BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 24.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022
Tanggal : 24 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
Jl. Pangeran Hidayat Km 6,5 No. 65 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Jambi 36127
Telp. (0741) 445388

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 24.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022
Tanggal : 24 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
Jl. Pangeran Hidayat Km 6,5 No. 65 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Jambi 36127
Telp. (0741) 445388

`

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TA 2021

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jambi. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi

yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24.B/LHP/XVIII.JMB/5/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jambi, 24 Mei 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jambi
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Nur Miftahul Lail S.E., Ak., CA, ERMAP
Register Negara Akuntan No. RNA-11938

GAMBARAN UMUM

PEMERIKSAAN

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);

c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jambi yang memiliki 34 Organisasi Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2021;
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
c. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Arus Kas (LAK);
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan LPSAL per 31 Desember 2021;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;

c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan;
f. Efektivitas desain dan implementasi SPI termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian laporan keuangan. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk SPI terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 45 hari mulai tanggal 14 Maret 2022 s.d. 13 Mei 2022 berdasarkan Surat Tugas Nomor 31/ST/XVIII.JMB/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Tugas Nomor 47/ST/XVIII.JMB/4/2022 tanggal 28 April 2022.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

`

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 *(AUDITED)*

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Jl. A. Yani No. 1 Telanai Pura Jambi 36122

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR LAMPIRAN x
DAFTAR GRAFIK xii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB xiii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN xiv
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH xvi
NERACA xvii
LAPORAN OPERASIONAL xix
LAPORAN ARUS KAS xx
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xxiii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan 4
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan 6
1.4. Entitas 8
1.5. Kebijakan Konversi 9
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA 11
2.1. Ekonomi Makro 11
2.1.1. Kondisi Perekonomian 11
2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 44
2.2. Kebijakan Keuangan 46
2.3. Pencapaian Target Kinerja 49

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 56
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 61
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 61
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 61
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 61
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 63
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 74
5.1. Laporan Realisasi Anggaran 74
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 102
5.3 Neraca 104
5.4 Laporan Operasional 163
5.5 Laporan Arus Kas 204
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 207
BAB VI INFORMASI NON-KEUANGAN 212
6.1. Letak Geografis dan Bentuk Hukum Entitas 212
6.2. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam tahun 2021 212
6.3. Pemilihan Kepala Daerah 212
6.4. Penanganan Pandemi Covid-19 213
BAB VII PENUTUP 214
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha	18
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha.	19
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha	19
Tabel 2.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran	20
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran	20
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran	21
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Sumatera	21
Tabel 2.8	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kota Jambi Bulan Desember 2021, Inflasi Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran COICOP	22
Tabel 2.9	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kota Muara Bungo Bulan Desember 2021, Inflasi Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran COICOP	24
Tabel 2.10	Perbandingan IHK dan Inflasi Antarkota se-Sumatera Bulan Desember 2021	28
Tabel 2.11	Indeks Harga Konsumen Kota Jambi	28
Tabel 2.12	Indeks Harga Konsumen Kota Muara Bungo	29
Tabel 2.13	Urutan Sumbangan Inflasi/Deflasi per Jenis Komoditas di Kota Jambi	30
Tabel 2.14	Urutan Sumbangan Inflasi/Deflasi per Jenis Komoditas di Kota Muara Bungo	31
Tabel 2.15	Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Kelompok Komoditi	32
Tabel 2.16	Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Kelompok Komoditi	34
Tabel 2.17	Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Komoditi dan Negara Tujuan Utama	35
Tabel 2.18	erkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Negara tujuan Utama	36

Tabel 2.19	Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Negara tujuan Utama	37
Tabel 2.20	Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Pelabuhan	38
Tabel 2.21	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi menurut Negara Asal Utama	39
Tabel 2.22	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi menurut Kelompok Komoditi	40
Tabel 2.23	Neraca Nilai Perdagangan Provinsi Jambi, Desember 2020 - Desember 2021	42
Tabel 3.1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	56
Tabel 3.2	Perkembangan PAD dari TA 2016 s.d 2021	57
Tabel 3.3	Perkembangan Dana Perimbangan TA 2016 - 2021	58
Tabel 3.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021	59
Tabel 3.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021	60
Tabel 3.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2021	60
Tabel 5.1	Ikhtisar LRA TA 2021 dan Realisasi TA 2020	74
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan 2020	75
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan 2020	75
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020	76
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020	77
Tabel 5.6	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 dan 2020	78
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 dan 2020	78
Tabel 5.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dan 2020	82
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020	84
Tabel 5.10	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2021 dan 2020	85
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020	85
Tabel 5.12	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 dan 2020	86
Tabel 5.13	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2021 dan 2020	87
Tabel 5.14	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 dan 2020	89

Tabel 5.15	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020	90
Tabel 5.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan TA 2020	90
Tabel 5.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Objek TA 2021 dan 2020	91
Tabel 5.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020	92
Tabel 5.19	Anggaran dan Realisasi Hibah TA 2021 dan 2020	94
Tabel 5.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020	96
Tabel 5.21	Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021	96
Tabel 5.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2021 dan 2020	97
Tabel 5.23	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020	98
Tabel 5.24	Anggaran dan Realisasi Transfer/Bantuan Keuangan TA 2021 dan 2020	99
Tabel 5.25	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota TA 2021 dan 2020	99
Tabel 5.26	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2021 dan 2020	100
Tabel 5.27	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dan 2020	101
Tabel 5.28	Realisasi Komponen SiLPA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2021	102
Tabel 5.29	Ikhtisar Neraca per 31 Desember TA 2021	104
Tabel 5.30	Aset per 31 Desember TA 2021 dan 2020	104
Tabel 5.31	Aset Lancar per 31 Desember TA 2021 dan 2020	105
Tabel 5.32	Kas dan Setara Kas per 31 Desember TA 2021 dan 2020	106
Tabel 5.33	Saldo Kas di Kas Daerah	107
Tabel 5.34	Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember TA 2021 dan 2020	108
Tabel 5.35	Kas Lainnya per 31 Desember TA 2021 dan 2020	109
Tabel 5.36	Rincian Kas Lainnya (PT Wirakarya) Tahun 2015 s.d. 2021	110
Tabel 5.37	Piutang per 31 Desember TA 2021 dan 2020	111
Tabel 5.38	Piutang Pendapatan per 31 Desember TA 2021 dan 2020	112
Tabel 5.39	Piutang Pajak per 31 Desember TA 2021 dan 2020	113
Tabel 5.40	Piutang Retribusi per 31 Desember TA 2021 dan 2020	114
Tabel 5.41	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember TA 2021 dan 2020	115
Tabel 5.42	Rincian Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember TA 2021 dan 2020	117

Tabel 5.43	Rincian Piutang Pendapatan Transfer Pajak per 31 Desember TA 2021 dan 2020	117
Tabel 5.44	Rincian Piutang Pendapatan Transfer Sumber Daya Alam	118
Tabel 5.45	Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember TA 2021 dan 2020	119
Tabel 5.46	Rincian Persediaan per Jenis per 31 Desember TA 2021 dan 2020	119
Tabel 5.47	Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember TA 2021 dan 2020	120
Tabel 5.48	Rincian Investasi Nonpermanen per 31 Desember TA 2021 dan 2020	121
Tabel 5.49	Rincian Saldo KUPEM per 31 Desember 2021 dan 2020	121
Tabel 5.50	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 dan 2020	123
Tabel 5.51	Rincian Ekuitas Bank Jambi per 31 Desember 2021 dan 2020	124
Tabel 5.52	Rincian Ekuitas PT JII	124
Tabel 5.53	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020	125
Tabel 5.54	Rincian Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD	132
Tabel 5.55	Rincian Peralatan dan Mesin di Lima OPD yang Hilang Belum Diproses Penghapusan dari KIB dan Belum Diproses TP-TGR	133
Tabel 5.56	Rincian Peralatan dan Mesin di Dua OPD yang Hilang Sudah Proses TPTGR Namun Belum Dihapus pada KIB	133
Tabel 5.57	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	141
Tabel 5.58	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020	142
Tabel 5.59	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020	145
Tabel 5.60	Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020	146
Tabel 5.61	Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS) per 31 Desember 2021 dan 2020	146
Tabel 5.62	Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020	152
Tabel 5.63	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya- Aset Lain Lain per 31 Desember 2021 dan 2020	154
Tabel 5.64	Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020	156
Tabel 5.65	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	157
Tabel 5.66	Rincian Utang Bagi Hasil PKB Tahun 2021	158
Tabel 5.67	Rincian Utang Bagi Hasil BBNKB Tahun 2021	159
Tabel 5.68	Rincian Utang Bagi Hasil PBBKB Tahun 2021	160

Tabel 5.69	Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2021	160
Tabel 5.70	Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2021	161
Tabel 5.71	Utang Bagi Hasil Per Kabupaten/Kota Tahun 2021	161
Tabel 5.72	Pendapatan Daerah-LO Tahun 2021	163
Tabel 5.73	Pendapatan-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021	164
Tabel 5.74	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 dan 2020	167
Tabel 5.75	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 dan LRA Tahun 2021	168
Tabel 5.76	Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 dan 2020	168
Tabel 5.77	Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021	169
Tabel 5.78	Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 dan 2020	169
Tabel 5.79	Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021	171
Tabel 5.80	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 dan 2020	172
Tabel 5.81	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021	172
Tabel 5.82	Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 dan 2020	173
Tabel 5.83	Penjelasan Selisih Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021	174
Tabel 5.84	Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021	175
Tabel 5.85	Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 dan 2020	176
Tabel 5.86	Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021	177
Tabel 5.87	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 dan 2020	177
Tabel 5.88	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021	178
Tabel 5.89	Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2021 dan 2020	178
Tabel 5.90	Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2021 dan LRA-TA 2021	179
Tabel 5.91	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 dan 20	179
Tabel 5.92	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021	180
Tabel 5.93	Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan 2020	181
Tabel 5.94	Pendapatan Hibah LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021	182
Tabel 5.95	Beban Tahun 2021 dan 2020	183
Tabel 5.96	Beban LO Tahun 2021 dan Belanja LRA TA 2021	184
Tabel 5.97	Beban Operasi Tahun 2021 dan 2020	184
Tabel 5.98	Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020	185

Tabel 5.99 Beban Pegawai-LO Tahun 2021 dan Belanja Pegawai LRA TA 2021 186
Tabel 5.100 Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020 186
Tabel 5.101 Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020 187
Tabel 5.102 Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 188
Tabel 5.103 Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan 189
Tabel 5.104 Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020 190
Tabel 5.105 Beban Hibah LO Tahun 2021 dan Belanja Hibah LRA TA 2021 191
Tabel 5.106 Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 192
Tabel 5.107 Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2021 dan Bantuan Sosial LRA TA 2021 193
Tabel 5.108 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan Belanja Penyisihan Piutang LRA 194
Tabel 5.109 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020 194
Tabel 5.110 Beban Penyusutan pada OPD Tahun 2021 195
Tabel 5.111 Beban Amortisasi per OPD Tahun 2021 dan 2020..... 196
Tabel 5.112 Beban Lain-lain per OPD Tahun 2021 dan 2020 198
Tabel 5.113 Beban Transfer Tahun 2021 dan 2020..... 200
Tabel 5.114 Beban Transfer LO Tahun 2021 dan Belanja Transfer LRA TA 2021 201
Tabel 5.115 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 204
Tabel 5.116 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan TA 2021 dan TA 2020 205
Tabel 5.117 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2021 dan TA 2020 205
Tabel 5.118 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2021 206
Tabel 5.119 Kenaikan/ Penurunan Kas Tahun 2021 dan 2020..... 206
Tabel 5.120 Saldo Akhir Kas Tahun 2021 dan 2020..... 207
Tabel 5.121 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap..... 208
Tabel 5.122 Rincian Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..... 209
Tabel 5.123 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya..... 211

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Masa Manfaat Aset

Lampiran 2 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lampiran 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021

Lampiran 4 Belanja Barang dan Jasa per OPD

Lampiran 5 Belanja Modal per OPD

Lampiran 6 Mutasi Piutang Pajak

Lampiran 7 Piutang Retribusi

Lampiran 8 Piutang Lain-lain yang PAD yang SAH

Lampiran 9 Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Hasil Pajak

Lampiran 10 Piutang Pendapatan Transfer Dana Hasil Bukan pajak

Lampiran 11 Beban Dibayar Dimuka

Lampiran 12 Persediaan per OPD dan per jenis persediaan

Lampiran 13 Rekapitulasi Penyisihan Piutang KUPEM

Lampiran 14 Rincian Saldo KUPEM

Lampiran 15 Aset Tanah Per OPD

Lampiran 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Lampiran 17 Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin per OPD

Lampiran 18 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Lampiran 19 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD

Lampiran 20 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Lampiran 21 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

Lampiran 22 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Lampiran 23 Daftar Aset Tetap Lainnya per OPD

Lampiran 24 Akumulasi Penyusutan per jenis aset tetap

Lampiran 25 Akumulasi Penyusutan Per OPD

Lampiran 26 Aset Tidak Berwujud Per OPD

Lampiran 27 Aset Lainnya Per OPD

Lampiran 28 Utang belanja jasa

Lampiran 29 Rincian Jaminan Reklamasi Pasca Tambang
Lampiran 29.1 Data Jaminan Reklamasi dan Pascatambang mineral Logam Batubara Provinsi Jambi
Lampiran 29.2 Data Jaminan reklamasi dan Pascatambang Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Jambi
Lampiran 30 Kalkulasi Saldo Buku Besar Beban Barjas VS Belanja Jasa
Lampiran 31 Kalkulasi Saldo Buku Besar Beban Barjas VS Belanja Persediaan

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun Tahun 2021 *(c to c)* 12

Grafik 2.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2021 (y to y) 13

Grafik 2.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2021 (q-to-q) 14

Grafik 2.4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c to c) 15

Grafik 2.5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) 16

Grafik 2.6 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) 17

Grafik 2.7 Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Jambi, Desember 2021 23

Grafik 2.8 Struktur Nilai Ekspor menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi, Januari - Desember 2020 dan Januari - Desember 2021 33

Grafik 2.9 Distribusi Persentase Ekspor Provinsi Jambi menurut Komoditi, Januari - Desember 2021 34

Grafik 2.10 Peranan Nilai Impor Menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi .. 41

Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi PAD TA 2016 s.d. 2021 57

Grafik 3.2 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2016 s.d 2021 59

Grafik 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan - LO TA 2021 163

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direviu oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional keuangan, perubahan ekuitas, arus kas dan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 24 Mei 2022
GUBERNUR JAMBI

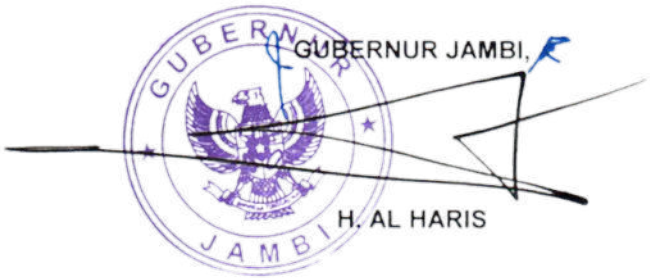

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
1	**PENDAPATAN**	**5.1.1**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.1.1.1**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1.383.781.959.390,00	1.558.105.416.539,27	112,60	1.292.729.048.514,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	11.384.921.000,00	12.616.308.643,00	110,82	18.593.509.421,41
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	28.028.487.059,00	28.028.487.058,56	99,99	27.923.864.761,82
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	177.946.632.430,00	244.680.974.312,20	137,50	195.937.064.541,11
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**		**1.601.141.999.879,00**	**1.843.431.186.553,03**	115,13	**1.535.183.487.238,34**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**				
10	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**5.1.1.2.1**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	193.610.000.035,00	255.597.160.730,00	132,02	152.642.024.299,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	133.739.884.827,00	230.872.791.329,00	172,63	291.967.549.326,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	1.284.884.150.000,00	1.284.884.150.000,00	100,00	1.288.418.327.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	1.126.649.615.000,00	1.090.191.841.971,00	96,76	1.116.093.491.331,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**		**2.738.883.649.862,00**	**2.861.545.944.030,00**	104,48	**2.849.121.391.956,00**
16						
17	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**5.1.1.2.2**				
18	Dana Penyesuaian		18.433.747.000,00	18.433.747.000,00	100,00	13.767.184.000,00
19	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17 s/d 18)**		**18.433.747.000,00**	**18.433.747.000,00**	100,00	**13.767.184.000,00**
20						
21	**Total Pendapatan Transfer (15+19)**		**2.757.317.396.862,00**	**2.879.979.691.030,00**	104,45	**2.862.888.575.956,00**
22						
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**5.1.1.3**				
24	Pendapatan Hibah		1.623.600.000,00	1.608.000.000,00	99,04	2.552.308.925,12
25	Pendapatan Dana Darurat		-	-		-
26	Pendapatan Lainnya		41.671.561.538,00	705.525.700,00	1,69	-
27	Pendapatan Luar Biasa		-	-		-
28	**Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 27)**		**43.295.161.538,00**	**2.313.525.700,00**	5,34	**2.552.308.925,12**
29	**JUMLAH PENDAPATAN (7+21+28)**		**4.401.754.558.279,00**	**4.725.724.403.283,03**	107,36	**4.400.624.372.119,46**
30						
31	**BELANJA**	**5.1.2**				
32	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**				
33	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.605.159.526.709,19	1.500.168.641.905,80	93,46	1.391.317.474.093,29
34	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	920.945.581.591,41	770.674.394.667,31	83,68	743.288.221.804,55
35	Subsidi	5.1.2.1.3	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00
36	Hibah	5.1.2.1.4	805.198.505.268,00	777.720.359.692,40	96,59	766.631.092.079,00
37	Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	52.159.535.180,00	26.328.366.390,00	50,48	328.500.000,00
38	**Jumlah Belanja Operasi (33 s/d 37)**		**3.384.013.148.748,60**	**3.075.441.762.655,51**	90,88	**2.902.115.287.976,84**
39						
40	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**				
41	Belanja Tanah		26.954.989.240,00	26.761.778.203,00	99,28	6.220.174.625,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin		163.240.417.763,40	142.649.146.950,00	87,39	118.488.626.018,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan		137.163.832.613,00	130.883.938.396,24	95,42	156.737.111.509,42
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		156.845.995.424,00	148.745.348.444,65	94,84	293.376.749.341,70
45	Belanja Aset Tetap Lainnya		1.107.701.566,00	650.471.612,00	58,72	67.827.096.294,25
46	Belanja Aset Lainnya		-	-		45.950.000,00
47	**Jumlah Belanja Modal (41 s/d 46)**		**485.312.936.606,40**	**449.690.683.605,89**	92,66	**642.695.707.788,37**
48						
49	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**				
50	Belanja Tidak Terduga		124.224.875.356,00	51.908.593.557,01	41,79	152.703.760.217,00
51	**Jumlah Belanja Tidak Terduga (49 s/d 50)**		**124.224.875.356,00**	**51.908.593.557,01**	41,79	**152.703.760.217,00**
52	**Jumlah Belanja (38+47+51)**		**3.993.550.960.711,00**	**3.577.041.039.818,41**	89,57	**3.697.514.755.982,21**
53						
54	**TRANSFER**	**5.1.3**				
55	**TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN**	**5.1.3.1**				
56	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		717.538.648.459,00	717.538.648.459,00	100,00	631.105.361.716,56
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-		-
58	**Jumlah Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota (56 s/d 57)**		**717.538.648.459,00**	**717.538.648.459,00**	100,00	**631.105.361.716,56**
59						
60	**TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN**	**5.1.3.2**				
61	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	5.1.3.2.1	93.720.000.000,00	93.720.000.000,00	100,00	99.800.420.000,00
62	Bantuan Keuangan Partai Politik	5.1.3.2.2	-	-		1.972.213.200,00

No.	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
63	**Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota (61 s/d 62)**		**93.720.000.000,00**	**93.720.000.000,00**	100,00	**101.772.633.200,00**
64	**Jumlah Transfer (58+63)**		**811.258.648.459,00**	**811.258.648.459,00**	100,00	**732.877.994.916,56**
65						
66	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (52 + 64)**		**4.804.809.609.170,00**	**4.388.299.688.277,41**	91,33	**4.430.392.750.898,77**
67						
68	**SURPLUS/DEFISIT (29 - 66)**		**(403.055.050.891,00)**	**337.424.715.005,62**	(83,72)	**(29.768.378.779,31)**
69						
70	**PEMBIAYAAN**	**5.1.4**				
71	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.1**				
72	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		403.055.050.891,00	390.555.050.891,14	96,90	420.323.429.670,45
73	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
74	Pengembalian angsuran pokok dana KUPEM		-	-		-
75	**Jumlah Penerimaan (72 s/d 74)**		**403.055.050.891,00**	**390.555.050.891,14**	96,90	**420.323.429.670,45**
76						
77	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.2**				
78	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-		-
79	Pembayaran Pokok Utang		-	-		-
80	**Jumlah Pengeluaran (78 s/d 79)**		-	-		-
81						
82	**PEMBIAYAAN NETO (75-80)**		**403.055.050.891,00**	**390.555.050.891,14**	96,90	**420.323.429.670,45**
83						
84	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	**5.1.5**	-	**727.979.765.896,76**		**390.555.050.891,14**

Jambi, 24 Mei 2022

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2021	2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	390.555.050.891,14	420.323.429.670,45
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	390.555.050.891,14	420.323.429.670,45
Sub Total (1-2)		**-**	**-**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	727.979.765.896,76	390.555.050.891,14
Sub Total (3+4)		**727.979.765.896,76**	**390.555.050.891,14**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	-	-
Lain-lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**5.2.5**	**727.979.765.896,76**	**390.555.050.891,14**

Jambi, 24 Mei 2022

GUBERNUR JAMBI,

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

3. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2021 AUDITED	TAHUN 2020 AUDITED
1	**ASET**	**5.3.1**		
2	**Aset Lancar**	**5.3.1.1**		
3	**Kas dan Setara Kas**	**5.3.1.1.1**		
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	678.166.989.766,49	341.702.788.841,67
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	600.000,00	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	671.194.050,00	254.019.125,00
7	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.1.4	48.718.629.584,87	45.746.833.714,07
8	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.5	422.352.495,40	2.851.409.210,40
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	42.782.662.697,00	41.896.331.591,45
10	**Jumlah Kas dan Setara Kas (4 s/d 9)**		**770.762.428.593,76**	**432.451.382.482,59**
11	**Investasi Jangka Pendek**	**5.3.1.1.2**	-	-
12	**Piutang**	**5.3.1.1.3**		
13	Piutang Pendapatan	5.3.1.1.3.1		
14	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.3.1.1	51.991.300,00	628.919.206,86
15	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(51.991.300,00)	(54.875.939,53)
16	Nilai bersih Piutang Pajak Daerah (14+15)		-	574.043.267,33
17	Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.1.2	2.279.480.925,00	12.804.227.584,00
18	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		(2.136.770.625,00)	(6.997.285.894,00)
19	Nilai bersih Piutang Retribusi Daerah (17+18)		142.710.300,00	5.806.941.690,00
20	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.3.1.3	-	-
21	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		-	-
22	yang Dipisahkan			
23	Nilai bersih Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			
24	yang Dipisahkan (20+22)		-	-
25	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3.1.4	57.135.524.770,65	3.267.406.519,00
26	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(7.495.357.419,91)	(936.776.851,60)
27	Nilai bersih Piutang Lain-lain PAD yang Sah (25+26)		49.640.167.350,74	2.330.629.667,40
28	Jumlah Piutang Pendapatan (14+17+20+25)		59.466.996.995,65	16.700.553.309,86
29	Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan (15+18+22+26)		(9.684.119.344,91)	(7.988.938.685,13)
30	Nilai bersih Piutang Pendapatan (28+29)		49.782.877.650,74	8.711.614.624,73
31	Piutang Pendapatan Transfer	5.3.1.1.3.2		
32	Piutang Transfer Pajak		-	42.009.955.658,00
33	Penyisihan Piutang Transfer Pajak		-	(210.049.778,29)
34	Nilai bersih Piutang Transfer Pajak (32+33)		-	41.799.905.879,71
35	Piutang Transfer Bukan Pajak		-	5.654.960.955,00
36	Penyisihan Piutang Transfer Bukan Pajak		-	(28.274.804,78)
37	Nilai bersih Piutang Transfer Pajak (35+36)		-	5.626.686.150,22
38	Jumlah Piutang Transfer		-	47.664.916.613,00
39	Jumlah Penyisihan Piutang Transfer		-	(238.324.583,07)
40	Nilai bersih Piutang Transfer (38+39)		-	47.426.592.029,93
41	**Jumlah Piutang (13+31)**		**59.466.996.995,65**	**64.365.469.922,86**
42	**Jumlah Penyisihan Piutang (29+39)**		**(9.684.119.344,91)**	**(8.227.263.268,20)**
43	**Nilai Bersih Piutang (41+42)**		**49.782.877.650,74**	**56.138.206.654,66**
44	**Beban Dibayar di Muka**	**5.3.1.1.4**	**718.057.442,08**	**661.979.657,16**
45	**Persediaan**	**5.3.1.1.5**	**324.634.883.310,00**	**276.504.426.742,35**
46	**Jumlah Aset Lancar (10+23+24+25+26)**		**1.145.898.246.996,58**	**765.755.995.536,76**
47				
48	**Investasi Jangka Panjang**	**5.3.1.2**		
49	**Investasi Nonpermanen**	**5.3.1.2.1**		
50	Investasi Nonpermanen Lainnya		17.963.033.038,49	17.427.062.911,59
51	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		(5.232.664.717,88)	(4.893.133.757,70)
52	Nilai Bersih Investasi Nonpermanen Lainnya (50+51)		12.730.368.320,61	12.533.929.153,89
53	**Investasi Permanen**	**5.3.1.2.2**		
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		437.877.249.681,95	400.826.452.283,08
55	Investasi Permanen Lainnya		-	-
56	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (54+55)**		**450.607.618.002,56**	**413.360.381.436,97**
57				
58	**Aset Tetap**	**5.3.1.3**		
59	Tanah	5.3.1.3.1	798.880.080.685,06	746.820.630.097,47
60	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.849.155.112.541,55	1.667.913.033.378,55
61	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.912.539.362.543,43	1.720.231.317.702,25
62	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	7.859.184.496.596,92	7.727.796.254.785,16
63	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	454.067.721.431,91	466.335.510.863,40
64	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	86.723.699.079,21	94.622.912.486,72

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2021 AUDITED	TAHUN 2020 AUDITED
65	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(6.175.741.278.091,54)	(5.712.247.455.174,22)
66	**Jumlah Aset Tetap (59 s/d 65)**		**6.784.809.194.786,54**	**6.711.472.204.139,33**
67				
68	**Dana Cadangan**	**5.3.1.4**		
69	Dana Cadangan		-	-
70	**Jumlah Dana Cadangan**			
71				
72	**Aset Lainnya**	**5.3.1.5**		
73	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.1	120.562.000,00	120.562.000,00
74	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	397.742.089.055,00	397.742.089.055,00
75	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	10.500.155.449,46	10.221.497.949,46
76	Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	905.346.198.451,18	915.157.760.271,41
77	Akumulasi Amortisasi	5.3.1.5.5	(7.785.942.478,66)	(7.515.137.483,18)
78	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain	5.3.1.5.6	(157.409.782.879,88)	(147.517.113.111,72)
79	**Jumlah Aset Lainnya (73 s/d 78)**		**1.148.513.279.597,10**	**1.168.209.658.680,97**
80	**JUMLAH ASET (46+56+66+70+79)**		**9.529.828.339.382,78**	**9.058.798.239.794,03**
81				
82	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**		
83	**Kewajiban Jangka Pendek**	**5.3.2.1**		
84	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	-
85	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.2.1.2	-	-
86	Utang Belanja	5.3.2.1.3	229.780.093.221,62	244.663.792.361,66
87	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	151.983.549.103,75	144.615.379.908,26
88	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (84 s/d 87)**		**381.763.642.325,37**	**389.279.172.269,92**
89				
90	**Kewajiban Jangka Panjang**	**5.3.2.2**		
91	Utang Dalam Negeri		-	-
92	Utang Luar Negeri		-	-
93	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		-	-
94	**JUMLAH KEWAJIBAN (88+93)**		**381.763.642.325,37**	**389.279.172.269,92**
95				
96	**EKUITAS**	**5.3.3**	**9.148.064.697.057,41**	**8.669.519.067.524,11**
97	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (94+96)**		**9.529.828.339.382,78**	**9.058.798.239.794,03**

Jambi, 24 Mei 2022

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

-

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REFF	TA 2021	TA 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4.**				
1	**PENDAPATAN**	**5.4.1**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.4.1.1**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	1.561.533.399.897,41	1.239.909.982.258,86	321.623.417.638,55	25,94
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	16.358.933.726,00	21.758.648.922,88	(5.399.715.196,88)	(24,82)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	28.028.487.058,56	27.923.864.761,82	104.622.296,74	0,37
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	303.618.459.344,07	175.198.186.424,86	128.420.272.919,21	73,30
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**		**1.909.539.280.026,04**	**1.464.790.682.368,42**	**444.748.597.657,62**	**30,36**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.4.2**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.4.2.1**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.2.1.1	213.587.205.072,00	151.574.110.044,00	62.013.095.028,00	40,91
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.2.1.2	225.217.830.374,00	170.463.829.748,00	54.754.000.626,00	32,12
13	Dana Alokasi Umum	5.4.2.1.3	1.284.884.150.000,00	1.288.418.327.000,00	(3.534.177.000,00)	(0,27)
14	Dana Alokasi Khusus	5.4.2.1.4	1.090.191.841.971,00	1.116.093.491.331,00	(25.901.649.360,00)	(2,32)
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d/ 14)**		**2.813.881.027.417,00**	**2.726.549.758.123,00**	**87.331.269.294,00**	**3,20**
16						
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	**5.4.2.2**				
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian		18.433.747.000,00	13.767.184.000,00	4.666.563.000,00	33,90
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18+19)**		**18.433.747.000,00**	**13.767.184.000,00**	**4.666.563.000,00**	**33,90**
21						
22	**Jumlah Pendapatan Transfer (15+20)**		**2.832.314.774.417,00**	**2.740.316.942.123,00**	**91.997.832.294,00**	**3,36**
23						
24	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.4.3**				
25	Pendapatan Hibah	5.4.3.1	30.194.332.669,00	195.303.001.291,08	(165.108.668.622,08)	(84,54)
26	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya	5.4.3.2	705.525.700,00	16.148.405.577,00	(15.442.879.877,00)	(95,63)
28	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (25 s/d 27)**		**30.899.858.369,00**	**211.451.406.868,08**	**(180.551.548.499,08)**	**(85,39)**
29	**JUMLAH PENDAPATAN (7+22+28)**		**4.772.753.912.812,04**	**4.416.559.031.359,50**	**356.194.881.452,54**	**8,06**
30						
31	**BEBAN**	**5.4.4**				
32	**BEBAN OPERASI**	**5.4.4.1**				
33	Beban Pegawai	5.4.4.1.1	1.475.893.160.829,06	1.408.345.369.989,79	67.547.790.839,27	4,80
34	Beban Persediaan	5.4.4.1.2	368.662.489.607,71	257.051.715.075,72	111.610.774.531,99	43,42
35	Beban Jasa	5.4.4.1.3	311.059.224.568,98	347.719.926.716,82	(36.660.702.147,84)	(10,54)
36	Beban Pemeliharaan	5.4.4.1.4	65.184.481.898,83	44.906.906.965,80	20.277.574.933,03	45,15
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.4.1.5	142.493.908.520,49	113.636.324.553,50	28.857.583.966,99	25,39
38	Beban Subsidi	5.4.4.1.6	550.000.000,00	550.000.000,00	-	-
39	Beban Hibah	5.4.4.1.7	600.238.715.839,36	816.637.372.713,05	(216.398.656.873,69)	(26,50)
40	Beban Bantuan Sosial	5.4.4.1.8	27.528.966.768,00	328.500.000,00	27.200.466.768,00	8.280,20
41	Beban Penyisihan Piutang	5.4.4.1.9	7.214.177.809,30	1.116.550.007,95	6.097.627.801,35	546,11
42	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.4.1.10	147.086.593.483,43	118.325.964.691,96	28.760.628.791,46	24,31
43	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.4.1.10	37.185.853.322,03	32.882.617.781,93	4.303.235.540,10	13,09
44	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.4.1.10	274.737.646.376,15	272.075.682.003,75	2.661.964.372,40	0,98
45	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.4.1.10	-	-	-	-
46	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.4.1.10	3.444.283.545,00	7.335.962,59	3.436.947.582,41	46.850,67
47	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.4.1.10	268.296.995,48	302.096.807,98	(33.799.812,50)	(11,19)
48	Beban Lain-lain	5.4.4.1.11	29.857.941.102,57	55.089.118.990,57	(25.231.177.888,00)	(45,80)
49	**Jumlah Beban Operasi (33 s/d 43)**		**3.491.405.740.666,38**	**3.468.975.482.261,41**	**22.430.258.404,97**	**0,65**
50						
51	**BEBAN TRANSFER**	**5.4.4.2**				
52	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.4.2.1	725.773.108.185,00	579.654.038.577,02	146.119.069.607,98	25,21
53	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.4.2.2	93.720.000.000,00	99.800.420.000,00	(6.080.420.000,00)	(6,09)
54	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.4.2.3	-	-	-	-
55	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	5.4.4.2.4	-	1.972.213.200,00	(1.972.213.200,00)	(100,00)
56	**Jumlah Beban Transfer (47 s/d 50)**		**819.493.108.185,00**	**681.426.671.777,02**	**138.066.436.407,98**	**20,26**
57	**JUMLAH BEBAN (44+51)**		**4.310.898.848.851,38**	**4.150.402.154.038,43**	**160.496.694.812,95**	**3,87**
58						
59	**SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (29-52)**	**5.4.5**	**461.855.063.960,66**	**266.156.877.321,07**	**195.698.186.639,59**	**73,53**
60						
61	**SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**5.4.6**				
62	**SURPLUS NON OPERASIONAL**					
63	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		37.602.222.215,77	-	37.602.222.215,77	-
64	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
65	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	33.976.765,99	(33.976.765,99)	**(100,00)**
66	**Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional (58 s/d 60)**		**37.602.222.215,77**	**33.976.765,99**	**37.568.245.449,78**	**110.570,40**
67						
68	**DEFISIT NON OPERASIONAL**					
69	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		-	-	-	-
70	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		-	-	-	-
71	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-	-	-	-
72	**Jumlah Defisit Kegiatan Non Operasional**		-	-	-	-

NO.	URAIAN	REFF	TA 2021	TA 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
73	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (61-67)**	**5.4.6**	**37.602.222.215,77**	**33.976.765,99**	**37.568.245.449,78**	**110.570,40**
74	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54+68)**	**5.4.7**	**499.457.286.176,43**	**266.190.854.087,06**	**233.266.432.089,37**	**87,63**
75						
76	**POS LUAR BIASA**					
77	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
78	Beban Luar Biasa		51.667.024.237,00	147.219.210.217,00	(95.552.185.980,00)	(64,90)
79	**JUMLAH POS LUAR BIASA (72-73)**		**(51.667.024.237,00)**	**(147.219.210.217,00)**	**95.552.185.980,00**	**(64,90)**
80	**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**	**5.4.8**	**(51.667.024.237,00)**	**(147.219.210.217,00)**	**95.552.185.980,00**	**(64,90)**
81						
82	**SURPLUS/DEFISIT-LO (69+74)**	**5.4.9**	**447.790.261.939,43**	**118.971.643.870,06**	**328.818.618.069,37**	**276,38**

Jambi, 24 Mei 2022

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	**5.5.1**		
2	**Arus Masuk Kas**			
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.558.105.416.539,27	1.292.729.048.514,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		12.616.308.643,00	18.593.509.421,41
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		28.028.487.058,56	27.923.864.761,82
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		244.680.974.312,20	193.667.723.941,11
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam		486.469.952.059,00	444.609.573.625,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.284.884.150.000,00	1.288.418.327.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		1.090.191.841.971,00	1.116.093.491.331,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		18.433.747.000,00	13.767.184.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Hibah		1.608.000.000,00	2.552.308.925,12
13	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	
14	Penerimaan Pendapatan Lainnya		705.525.700,00	
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	
16	**Jumlah I**		**4.725.724.403.283,03**	**4.398.355.031.519,46**
17	**Arus Keluar Kas**			
18	Pembayaran Pegawai		1.500.168.641.905,80	1.391.317.474.093,29
19	Pembayaran Barang		770.674.394.667,31	743.288.221.804,55
20	Pembayaran Bunga		-	
21	Pembayaran Subsidi		550.000.000,00	550.000.000,00
22	Pembayaran Hibah		777.720.359.692,40	766.631.092.079,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		26.328.366.390,00	328.500.000,00
24	Pembayaran Belanja Tak Terduga		51.908.593.557,01	152.703.760.217,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		717.538.648.459,00	631.105.361.716,56
26	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		93.720.000.000,00	99.800.420.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		-	1.972.213.200,00
29	**Jumlah II**		**3.938.609.004.671,52**	**3.787.697.043.110,40**
30	**Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi I-II)**		**787.115.398.611,51**	**610.657.988.409,06**
31				
32	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	**5.5.2**		
33	**Arus Masuk Kas**			
34	Pencairan Dana Cadangan		-	-
35	Penjualan atas Tanah		-	-
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	2.269.340.600,00
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
40	Penjualan Aset Lainnya		-	-
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
43	**Jumlah III**		**-**	**2.269.340.600,00**
44	**Arus Keluar Kas**			
45	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
46	Perolehan Tanah		26.761.778.203,00	6.220.174.625,00

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2021	TAHUN 2020
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		142.649.146.950,00	118.488.626.018,00
48	Perolehan Gedung dan Bangunan		130.883.938.396,24	156.737.111.509,42
49	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		148.745.348.444,65	293.376.749.341,70
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		650.471.612,00	67.827.096.294,25
51	Perolehan Aset Lainnya		-	45.950.000,00
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
54	**Jumlah IV**		**449.690.683.605,89**	**642.695.707.788,37**
55	**Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi (III-IV)**		**(449.690.683.605,89)**	**(640.426.367.188,37)**
56				
57	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	**5.5.3**		
58	**Arus Masuk Kas**			
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
68	**JumlahV**		**-**	**-**
69	**Arus Keluar Kas**			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan		-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan		-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
76	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
78	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
79	**Jumlah VI**		-	-
80	**Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (V-VI)**		**-**	**-**
81				
82	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	**5.5.4**		
83	**Arus Masuk Kas**			
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		229.460.920.601,18	198.819.738.440,61
85	Penerimaan Utang Pihak Ketiga		886.331.105,55	931.686.641,40
86	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan		254.019.125,00	400.000,00
87	Kiriman Uang Masuk		-	
88	Penerimaan Koreksi			-
89	**Jumlah VII**		**230.601.270.831,73**	**199.751.825.082,01**
90	**Arus Keluar Kas**			
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		229.460.920.601,18	198.736.783.440,61
92	Pengeluaran Utang Pihak Ketiga		-	7.022.291.433,41
93	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Berjalan		671.794.050,00	254.019.125,00
94	Kiriman Uang Keluar		-	-
95	Pengeluaran Koreksi		-	-
96	**Jumlah VIII**		**230.132.714.651,18**	**206.013.093.999,02**
97	**Total Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (VII-VIII)**		**468.556.180,55**	**(6.261.268.917,01)**
98				
99	**Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode**	**5.5.5**	**337.893.271.186,17**	**(36.029.647.696,32)**
100	**Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS**		**432.197.363.357,59**	**468.227.011.053,91**

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2021	TAHUN 2020
101	**Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS**		**770.090.634.543,76**	**432.197.363.357,59**
102	**Kas di Bendahara Penerimaan**		**600.000,00**	**-**
103	**Kas di Bendahara Pengeluaran**		**671.194.050,00**	**254.019.125,00**
104	**Saldo Akhir Kas**	**5.5.6**	**770.762.428.593,76**	**432.451.382.482,59**

Jambi, 24 Mei 2022

GUBERNUR JAMBI,

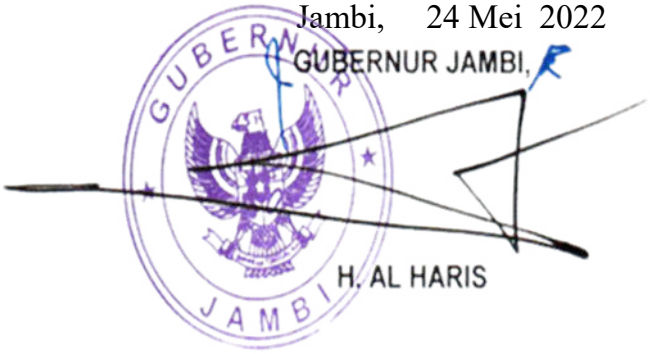

H. AL HARIS

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN		2021	2020
EKUITAS AWAL		8.669.519.067.524,11	8.530.688.465.049,08
SURPLUS/DEFISIT-LO		447.790.261.939,43	118.971.643.870,06
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		30.755.367.593,87	19.858.958.604,97
	Koreksi ekuitas lainnya :	30.755.367.593,87	19.858.958.604,97
1.	Koreksi Nilai Persediaan	379.479.000,00	(307.842.481,00)
2.	Selisih Revaluasi Aset Tetap		-
3.	Koreksi Ekuitas Lainnya		10.833.947.327,00
4.	Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	(1,00)	(1.776.298.714,20)
5.	Penyesuaian Aset Tetap	41.706.862.723,62	158.386.476.117,60
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.867.145.431,52)	5.958.828.086,62
7.	Penyesuaian Aset Lainnya	(4.700.685.023,85)	(138.968.722.609,97)
8.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.508.000,00)	(17.396.591,40)
9.	Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	78.754.536,40	-
10.	Penilaian/Pencatatan Aset Tetap	-	-
11.	Koreksi atas Beban Persediaan	-	-
12.	Koreksi Nilai Investasi Non Permanen	(354.985.650,18)	141.169.253,28
13.	Pengakuan atas Penyisihan Piutang	-	138.149.357,10
14.	Penyesuaian kewajiban	1.515.595.440,40	-
15.	Koreksi Silpa Tahun Sebelumnya	-	-
16.	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
17.	Koreksi Nilai Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	-	-
18.	Koreksi Nilai Investasi Permanen	-	(14.529.351.140,06)
19.	Lain-lain	-	
EKUITAS AKHIR		**9.148.064.697.057,41**	**8.669.519.067.524,11**

Jambi, 24 Mei 2022

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada pasal terkait, Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2021 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2021.

LKPD Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LKPD dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Lampiran III dan Lampiran IV. LKPD Provinsi Jambi TA 2021 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Disadari daerah akan berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik. Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka pemerintah daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan kedalam APBD.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Provinsi Jambi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK.

LKPD Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. LKPD Pemerintah Provinsi Jambi TA 2021 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pelaksanaan APBD TA 2021. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

LKPD Pemerintah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

   Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

   LPSAL merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

   Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional pemerintah daerah.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE, termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PStandar Akuntansi Pemerintahan) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

k. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021;

m. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2021;

n. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;

o. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;

p. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jambi Tahun 2021;

q. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Jambi Tahun 2021.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan, dan surplus/defisit dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian LRA terdiri dari realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi TA 2021.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.

c. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), kewajiban (utang), dan ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah daerah.

d. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

LO merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2) Beban dari kegiatan operasional;
3) Surplus/defisit dari operasional;
4) Kegiatan non operasional;
5) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
6) Pos luar biasa;
7) Surplus/defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang didefinisikan sebagai berikut.

1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. LPE merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

1) Ekuitas awal;
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
4) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang

tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6) Informasi yang diharuskan oleh PStandar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.4. Entitas

Untuk TA 2021, entitas dalam Pemerintah Provinsi Jambi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan rincian:

a. Sekretariat Daerah
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c. Sekretariat DPRD;
d. Inspektorat Daerah;
e. Badan Daerah:
    1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    2) Badan Kepegawaian Daerah;
    3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
    6) Badan Penghubung Daerah;
    7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Dinas Daerah:
   1) Dinas Pendidikan;
   2) Dinas Kesehatan;
   3) Dinas Kehutanan;
   4) Dinas Pemuda dan Olahraga;
   5) Dinas Komunikasi dan Informatika;
   6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
   7) Dinas Pemberdayaam Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
   8) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
   9) Dinas Perkebunan;
   10) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   11) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   12) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
   13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
   14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
   15) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
   16) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   17) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
   18) Dinas Kelautan dan Perikanan;
   19) Dinas Lingkungan Hidup;
   20) Dinas Ketahanan Pangan;
   21) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   22) Dinas Perhubungan;

g. Badan Layanan Umum Daerah.
   1) Balai Laboratorium Kesehatan;
   2) Rumah Sakit Umum Daerah;
   3) Rumah Sakit Jiwa Daerah.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2021 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi TA 2021 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos laporan keuangan, struktur APBD (pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan), serta CaLK. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian LKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, yang mana dilakukan reklasifikasi untuk belanja operasional dan belanja modal.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEUANGAN DAERAH, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2021 memberikan gambaran tentang ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan tahun 2021 dengan diformulasikan melalui prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang diambil guna mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021.

2.1.1 Kondisi Perekonomian

Perekonomian Provinsi Jambi 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp233,73 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp153,88 triliun. Ekonomi Jambi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen (c-*to*-c) dibandingkan tahun 2020. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,33 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 9,27 persen.

Ekonomi Jambi triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,62 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,76 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,15 persen. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -0,37 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,97 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 36,56 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada 2021 didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 31,56 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 65,84 persen.

1) PDRB Menurut Lapangan Usaha

a) Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2021 (c-*to*-c)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen (c-*to*-c). Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,33 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi covid-19. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah

Konstruksi sebesar 8,01 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,08 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,36 persen; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,13 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 5 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,56 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,09 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,58 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 10,25 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi hampir mencapai 70 persen.

Grafik 2.1
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-*to*-c)
Tahun 2021 Dalam Persentase
(data BPS)

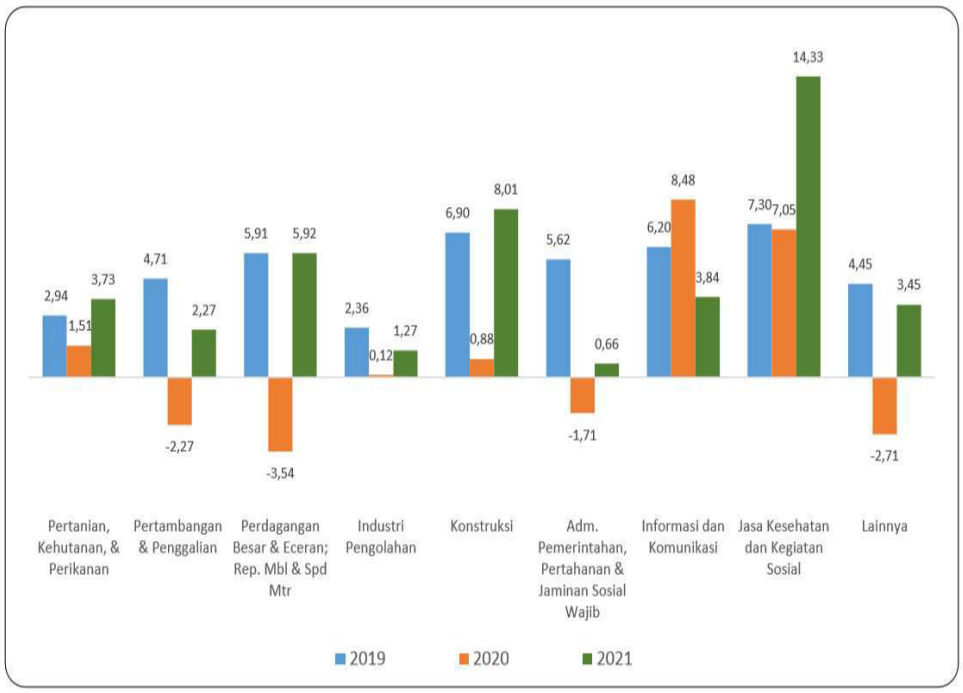

b) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2020 terhadap Triwulan IV-2019 (*y-on-y*).

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2020 (y-*on*-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,62 persen. Hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif kecuali Industri Pengolahan dan Jasa Keuangan dan Asuransi yang terkontraksi masing-masing sebesar 2,23 persen dan 2,31 persen. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 20,76 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar

13,55 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 11,30 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 10 persen.

Grafik 2.2
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-*to*-y)
Tahun 2021 Dalam Persentase
(data BPS)

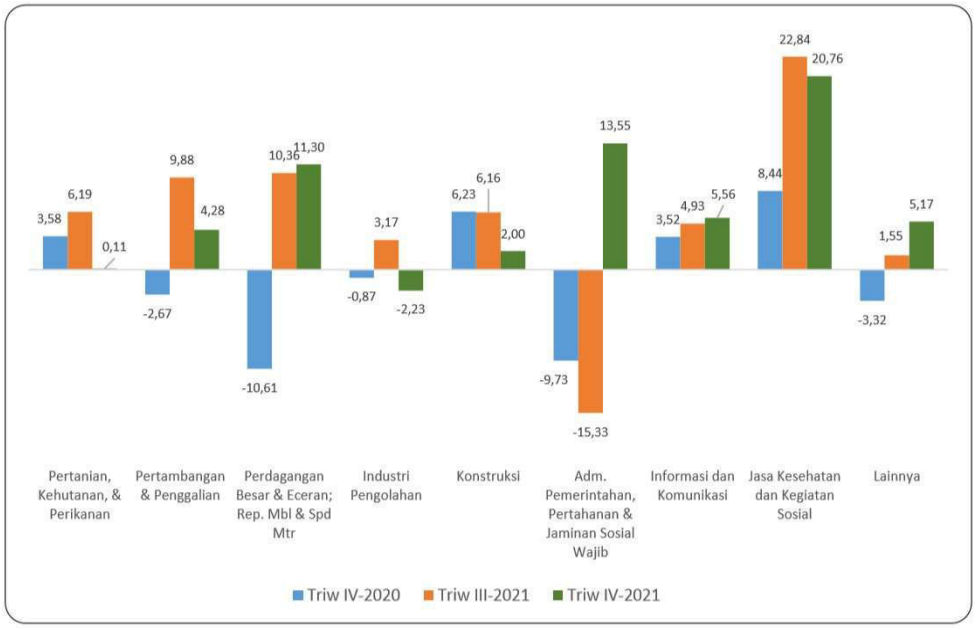

c) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2020 terhadap Triwulan III-2020 (q-*to*-q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 (q-*to*-q) mengalami kontraksi sebesar 0,37 persen. Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan adalah Pertambangan dan Penggalian terkontraksi sebesar 5,07 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,70 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4.00; Industri Pengolahan sebesar 2,93 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,41 persen. Di sisi lain, bebarapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan, diantaranya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 27,97 persen; Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 13,50 persen; serta Konstruksi tumbuh 11,66 persen. Peningkatan realisasi belanja pegawai dan belanja modal pada triwulan IV tahun 2021 menjadikan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara q-*to*-q.

Grafik 2.3
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
(q-*to*-q) Dalam Persentase
(data BPS)

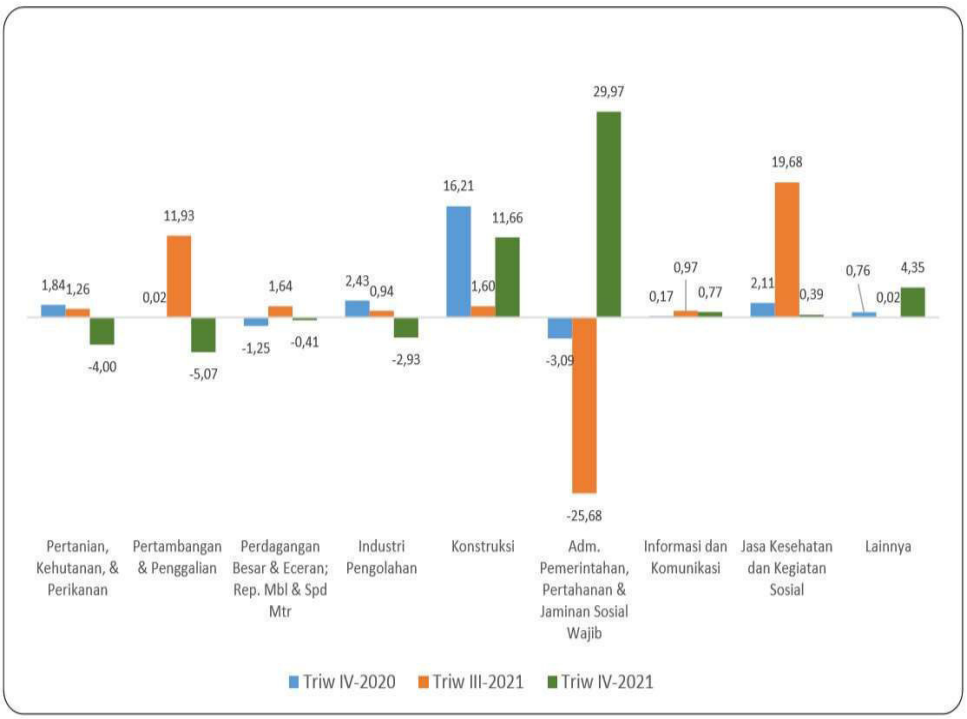

2) PDRB Menurut Pengeluaran

a) Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2021 (c-*to*-c)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen (c-*to*-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,27 persen; diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,62 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 3,40 persen; Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,94 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,27 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan sebesar 7,10 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (65,84 persen) namun terkoreksi Komponen Impor Barang dan Jasa (41,35 persen). Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Komponen PK-RT yang mencapai hampir separuh PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 44,02 persen dan diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 21,89 persen. Komponen PK-P memiliki andil sebesar 7,86 persen. Sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 1,17 persen dan 0,57 persen.

Grafik 2.4
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran
(c-*to*-c) Dalam Persentase
(data BPS)

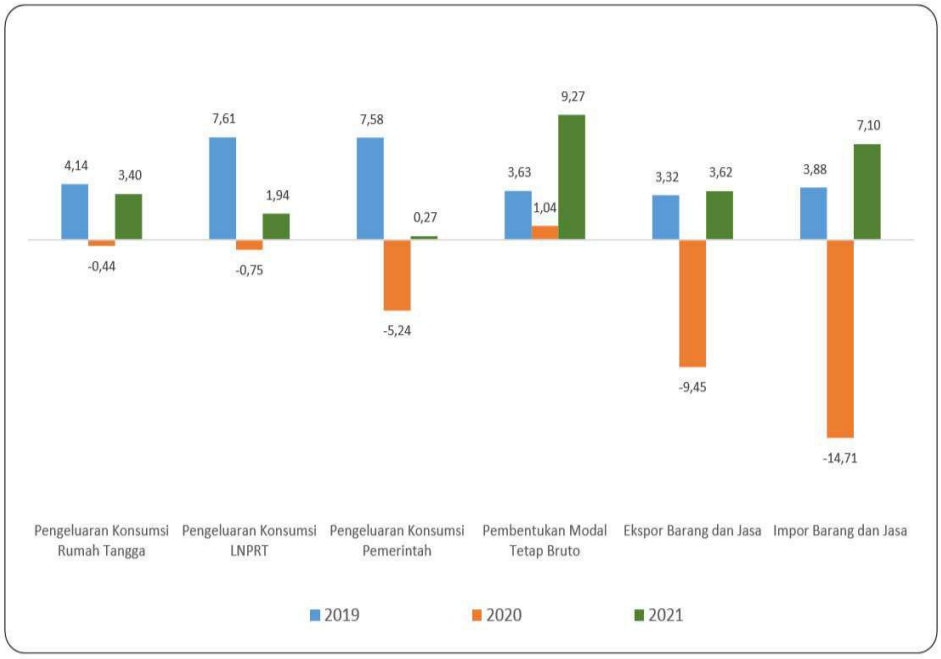

b) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 terhadap Triwulan IV-2020 (y-*on*-y)

Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 (y-*on*-y) tumbuh sebesar 3,62 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang terkontraksi sebesar 3,55 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-RT sebesar 5,15 persen; diikuti oleh Komponen PK-LNPRT serta Ekspor Barang dan Jasa keduanya tumbuh sebesar 4,72 persen. Komponen PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 4,19 persen, sementara itu Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 0,63 persen.

Grafik 2.5
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-*on*-y) Dalam Persentase (data BPS)

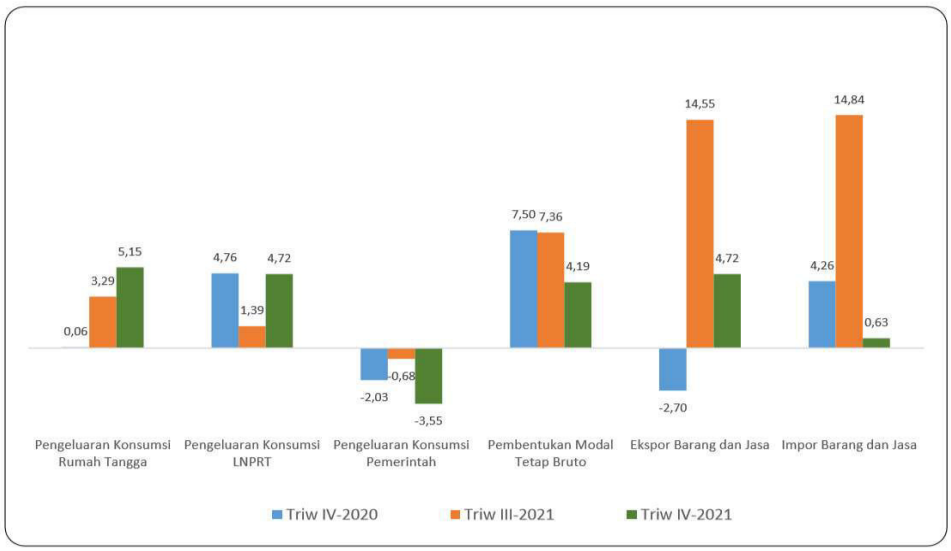

c) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 terhadap Triwulan III-2021 (q-*to*-q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,37 persen (q-*to*-q). Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen PK-P yang tumbuh sebesar 36,56 persen; berikutnya adalah Komponen PMTB sebesar 12,33 persen; Ekspor Barang dan Jasa sebesar 12,28 persen; Komponen PKRT sebesar 5,36 persen; dan Komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 4,65 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan 39,88 persen. Ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi (q-*to*-q) secara umum mengalami kontraksi.

Grafik 2.6
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-*to*-q)
Dalam Persentase
(data BPS)

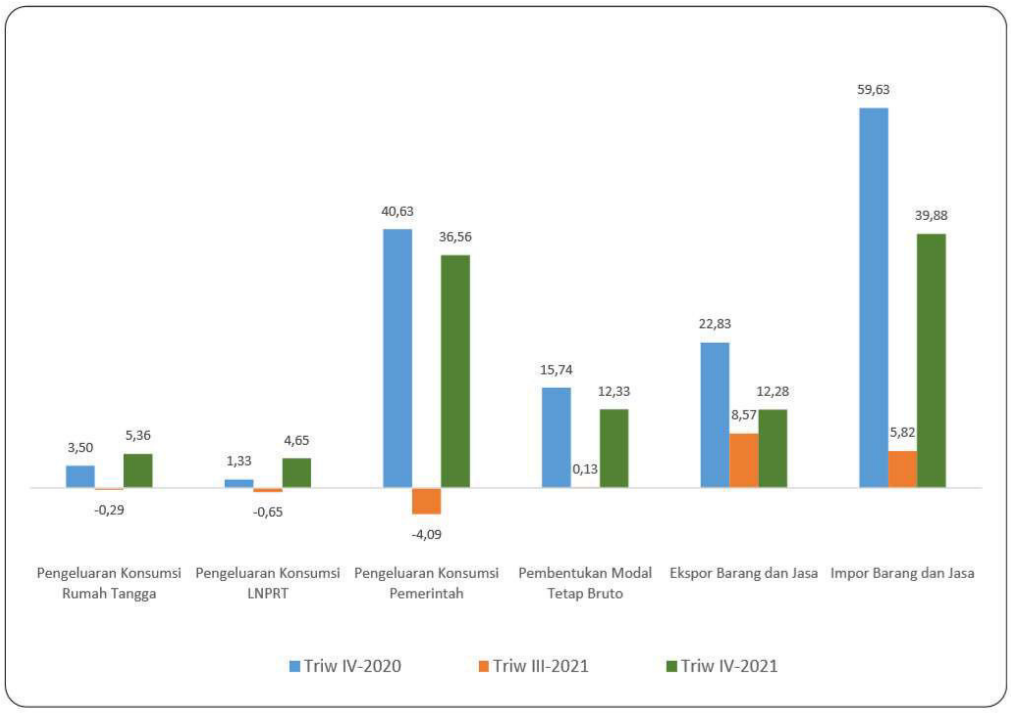

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Setelah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda termasuk di Sumatera. Pada tahun 2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan (c-to-c) tertinggi, yaitu sebesar 5,05 persen, diikuti Provinsi Jambi sebesar 3,66 persen serta Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 3,58 persen. Sementara itu, provinsi lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 3,5 persen.

Secara spasial, struktur perekonomian Sumatera pada tahun 2021 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga Provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 23,37 persen, Provinsi Riau sebesar 22,92 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,36 persen. Provinsi Jambi bila dilihat dari distribusinya terhadap PDRB Sumatera berada pada peringkat tujuh dengan share sebesar 6,35 persen.

Gambar 2.1
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera
Dalam Persentase
(data BPS)

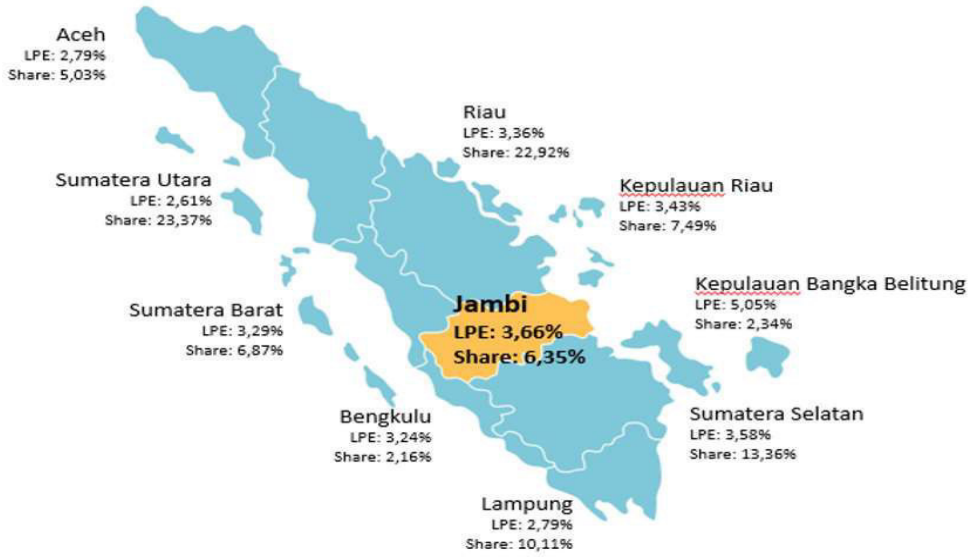

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
(data BPS)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	60.510,6	63.708,2	73.769,6	39.160,1	39.751,9	41.234,9
B.	Pertambangan dan Penggalian	40.095,9	25.223,2	32.934,5	35.709,3	34.900,0	35.692,2
C.	Industri Pengolahan	21.279,7	22.066,8	23.959,1	15.495,3	15.513,7	15.711,1
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	145,5	153,1	165,7	77,6	81,1	86,9
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	303,8	311,5	331,1	198,7	202,7	213,1
F.	Konstruksi	16.128,8	16.423,4	18.314,8	11.043,4	11.140,6	12.033,1
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26.332,2	26.078,0	29.399,0	14.724,6	14.203,5	15.044,6
H.	Transportasi dan Pergudangan	7.019,1	5.643,0	5.994,7	4.891,8	4.203,8	4.412,6
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.628,9	2.440,7	2.567,8	1.700,4	1.584,3	1.661,1
J.	Informasi dan Komunikasi	8.472,4	9.136,9	9.513,0	5.624,3	6.101,0	6.335,0
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.046,1	5.395,1	5.976,4	3.259,9	3.487,3	3.674,3
L.	Real Estat	3.533,9	3.573,3	3.771,9	2.212,4	2.212,0	2.281,9
M,N.	Jasa Perusahaan	2.668,9	2.596,6	2.825,5	1.564,9	1.480,6	1.540,3
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.474,1	10.698,5	10.693,5	5.148,5	5.060,5	5.093,8
P.	Jasa Pendidikan	7.615,4	7.927,1	8.148,9	4.971,0	5.127,7	5.183,5
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.572,6	2.810,8	3.280,9	1.781,2	1.906,8	2.180,1
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	2.099,8	2.056,2	2.079,2	1.547,6	1.491,4	1.503,3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		216.927,7	206.242,6	233.725,5	149.111,1	148.448,8	153.881,7

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Dalam Persen
(data BPS)

	Lapangan Usaha	Triw III-2021 Terhadap Triw II-2021 (*q-to-q*)	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (*q-to-q*)	Triw III-2021 Terhadap Triw III-2020 (*y-on-y*)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (*y-on-y*)	Laju Pertumbuhan 2021	Sumber Pertumbuhan 2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,26	-4,00	6,19	0,11	3,73	1,00
B.	Pertambangan dan Penggalian	11,93	-5,07	9,88	4,28	2,27	0,53
C.	Industri Pengolahan	0,94	-2,93	3,17	-2,23	1,27	0,13
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,20	3,26	5,88	9,05	7,08	0,00
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,75	2,07	6,99	8,19	5,13	0,01
F.	Konstruksi	1,60	11,66	6,16	2,00	8,01	0,60
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,64	-0,41	10,36	11,30	5,92	0,57
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,45	6,19	6,09	9,91	4,97	0,14
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,51	13,50	-1,59	7,65	4,85	0,05
J.	Informasi dan Komunikasi	0,97	0,77	4,93	5,56	3,84	0,16
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,81	-4,70	5,48	-2,31	5,36	0,13
L.	Real Estat	3,86	4,55	2,21	5,41	3,16	0,05
M,N.	Jasa Perusahaan	3,27	6,25	5,19	9,16	4,03	0,04
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-25,68	29,97	-15,33	13,55	0,66	0,02
P.	Jasa Pendidikan	-6,61	6,60	-5,22	4,64	1,09	0,04
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,68	0,39	22,84	20,76	14,33	0,18
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	-1,48	2,41	1,02	3,72	0,80	0,01
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**2,74**	**-0,37**	**5,94**	**3,62**	**3,66**	**3,66**

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c : PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulanan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Dalam Persen
(data BPS)

	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,94	1,51	3,73	27,89	30,89	31,56
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,71	-2,27	2,27	18,48	12,23	14,09
C.	Industri Pengolahan	2,36	0,12	1,27	9,81	10,70	10,25
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	4,59	7,08	0,07	0,07	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,00	1,98	5,13	0,14	0,15	0,14
F.	Konstruksi	6,90	0,88	8,01	7,44	7,96	7,84
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,91	-3,54	5,92	12,14	12,64	12,58
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,59	-14,06	4,97	3,24	2,74	2,56
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,62	-6,83	4,85	1,21	1,18	1,10
J.	Informasi dan Komunikasi	6,20	8,48	3,84	3,91	4,43	4,07
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	6,97	5,36	2,33	2,62	2,56
L.	Real Estat	6,91	-0,02	3,16	1,63	1,73	1,61
M,N.	Jasa Perusahaan	4,09	-5,39	4,03	1,23	1,26	1,21
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,62	-1,71	0,66	4,83	5,19	4,58
P.	Jasa Pendidikan	5,75	3,15	1,09	3,51	3,84	3,49
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,30	7,05	14,33	1,19	1,36	1,40
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	4,14	-3,63	0,80	0,97	1,00	0,89
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**4,35**	**-0,44**	**3,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)
(data BPS)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	96.343,5	96.941,7	102.874,8	65.279,8	64.991,0	67.202,2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.270,9	1.274,9	1.330,3	845,2	838,9	855,2
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.246,8	17.878,5	18.377,2	11.556,8	10.950,8	10.980,3
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	45.855,1	46.334,3	51.165,0	31.894,3	32.227,0	35.215,5
5. Perubahan Inventori	1.627,9	1.553,2	2.732,1	1.177,1	825,5	1.811,9
6. Ekspor Barang dan Jasa	158.700,8	136.547,4	153.895,5	112.297,1	101.681,3	105.359,5
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	105.117,4	94.287,4	96.649,4	73.939,2	63.065,8	67.542,9
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	216.927,7	206.242,6	233.725,5	149.111,1	148.448,8	153.881,7

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Dalam Persen
(data BPS)

Komponen	Triw III-2021 Terhadap Triw II-2021 (*q-to-q*)	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (*q-to-q*)	Triw III-2021 Terhadap Triw III-2020 (*y-on-y*)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (*y-on-y*)	Laju Pertumbuhan 2021	Sumber Pertumbuhan 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,29	5,36	3,29	5,15	3,40	1,49
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,65	4,65	1,39	4,72	1,94	0,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4,09	36,56	-0,68	-3,55	0,27	0,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,13	12,33	7,36	4,19	9,27	2,01
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	8,57	12,28	14,55	4,72	3,62	2,48
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5,82	39,88	14,84	0,63	7,10	3,02
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2,74	-0,37	5,94	3,62	3,66	3,66

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c : PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulanan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran
Dalam Persen
(data BPS)

Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,14	-0,44	3,40	44,41	47,00	44,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,61	-0,75	1,94	0,59	0,62	0,57
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,58	-5,24	0,27	8,41	8,67	7,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,63	1,04	9,27	21,14	22,47	21,89
5. Perubahan Inventori	-	-	-	0,75	0,75	1,17
6. Ekspor Barang dan Jasa	3,32	-9,45	3,62	73,16	66,21	65,84
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3,88	-14,71	7,10	48,46	45,72	41,35
Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB)	4,35	-0,44	3,66	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Sumatera
Dalam Persen
(data BPS)

Provinsi	Triw III-2021 Terhadap Triw II-2021 (*q-to-q*)	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (*q-to-q*)	Triw III-2021 Terhadap Triw III-2020 (*y-on-y*)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (*y-on-y*)	Laju Pertumbuhan 2021	Sumber Pertumbuhan 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	3,94	3,66	3,02	7,39	2,79	0,16
2. Sumatra Utara	1,98	0,18	3,67	3,81	2,61	0,60
3. Sumatra Barat	2,16	2,70	3,31	4,38	3,29	0,24
4. Riau	4,58	0,57	4,13	3,81	3,36	0,72
5. Jambi	2,74	-0,37	5,94	3,62	3,66	0,24
6. Sumatra Selatan	2,46	-1,66	3,92	5,12	3,58	0,49
7. Bengkulu	-1,90	2,06	2,78	5,57	3,24	0,07
8. Lampung	2,11	-6,37	3,00	5,15	2,79	0,29
9. Kep. Bangka Belitung	1,82	2,75	6,09	6,32	5,05	0,12
10. Kepulauan Riau	-0,39	6,87	2,97	5,27	3,43	0,26

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulanan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

4) Inflasi Daerah

Pada Bulan Desember 2021, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,48 persen dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar 0,45 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi sebesar 108,00 dan IHK Kota Muara Bungo tercatat sebesar 107,69. Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran. Sedangkan inflasi Kota Muara Bungo terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada tujuh kelompok pengeluaran barang dan jasa. Laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Jambi pada bulan ini sebesar 1,67 persen. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan *year on year* Kota Muara Bungo sebesar 1,65 persen.

Dari 24 kota IHK di Sumatera, sebanyak 22 kota mengalami inflasi dan dua kota deflasi. Inflasi tertinggi se-Sumatera terjadi di Kota Pangkal Pinang sebesar 1,27 persen dan terendah di Kota Pekanbaru sebesar 0,07 persen. Sedangkan deflasi tertinggi se-Sumatera terjadi di Kota Dumai sebesar 0,13 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi se-Indonesia. Dari 90 kota IHK se-Indonesia, sebanyak 88 kota mengalami inflasi, dan dua kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura sebesar 1,91 persen dan terendah di Kota Pekanbaru sebesar 0,07 persen.

a) Indeks Harga Konsumen Kota Jambi dan Kota Muara Bungo menurut Kelompok Pengeluaran

Pada Desember 2021, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,00. Sedangkan Kota Muara Bungo mengalami inflasi sebesar 0,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,69. Laju inflasi tahun kalender dan inflasi *year on year* Kota Jambi sebesar 1,67 persen. Kemudian laju inflasi tahun kalender dan inflasi year on year Kota Muara Bungo sebesar 1,65 persen.

Tabel 2.8
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kota Jambi Bulan Desember 2021, Inflasi Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)
(data BPS)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	Tingkat Inflasi Desember 2021 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi Desember 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum (*Headline)*	**108,00**	**0,48**	**1,67**	**1,67**	**0,4800**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	111,35	1,22	3,57	3,57	0,3737
Pakaian dan Alas Kaki	104,63	-0,02	0,61	0,61	-0,0013
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	106,56	0,38	2,06	2,06	0,0703
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	108,89	0,01	1,20	1,20	0,0006
Kesehatan	112,13	0,00	0,30	0,30	0,0000
Transportasi	104,03	0,02	-0,26	-0,26	0,0023
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,35	-0,01	-1,11	-1,11	-0,0005
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	122,50	0,00	2,30	2,30	0,0000
Pendidikan	104,83	0,00	0,32	0,32	0,0000
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	105,93	0,54	1,21	1,21	0,0381
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	111,80	0,03	0,40	0,40	0,0019

Sumber: Survei Harga Konsumen Kota Jambi, BPS

https://jambi.bps.go.id

Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,22 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,38 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,02 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,54 persen; serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,03 persen (Tabel 2.8).

Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 0,48 persen, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,1449 persen (Tabel 2.8).

Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Jambi bulan Desember 2021 antara lain: daging ayam ras (0,1449 persen), minyak goreng (0,1217 persen), cabai rawit (0,0997 persen), bawang merah (0,0351 persen), telur ayam ras (0,0325 persen), semen (0,0279 persen), bayam (0,0255 persen), kontrak rumah (0,0248 persen), kue kering berminyak (0,0221 persen) dan bahan bakar rumah tangga (0,0163 persen).

Grafik 2.7
Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Jambi, Desember 2021
(2018=100)
(data BPS)

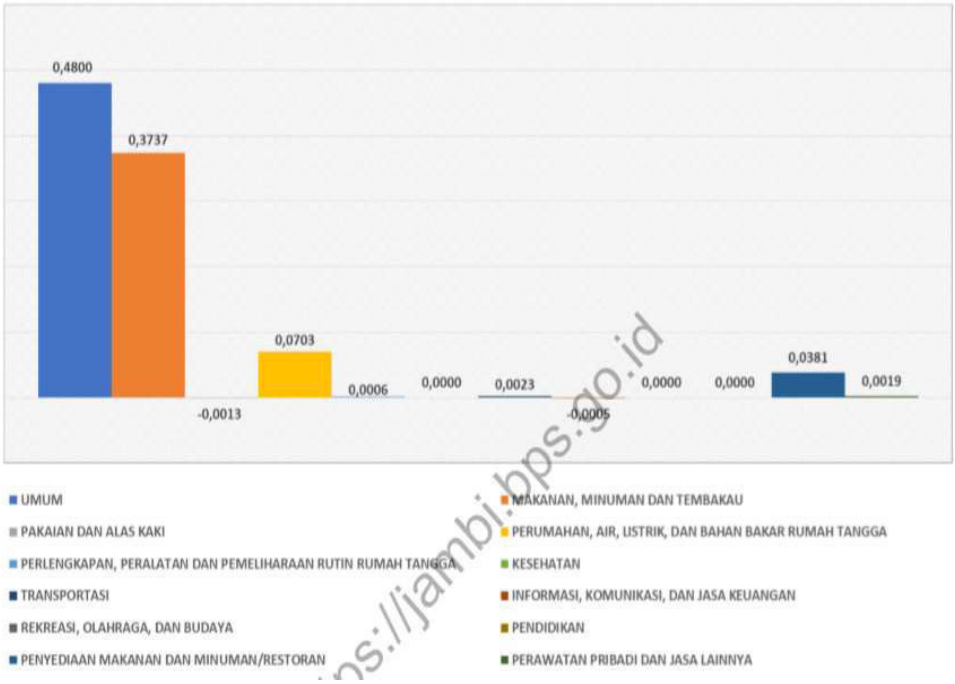

Sementara itu, inflasi Kota Muara Bungo terjadi pada tujuh kelompok pengeluaran karena adanya kenaikan indeks harga, yaitu pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,47 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,04 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,67 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,64 persen;

kelompok Transportasi sebesar 1,23 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 0,38 persen; serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,11 persen (Grafik 2.7).

Dalam pembentukan inflasi Kota Muara Bungo sebesar 0,45 persen, andil terbesar berasal dari kelompok transportasi sebesar 0,1505 persen. Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Muara Bungo adalah minyak goreng (0,2120 persen), telur ayam ras (0,1552 persen), angkutan udara (0,1509 persen), kontrak rumah (0,1163 persen), daging ayam ras (0,0947 persen), bawang merah (0,0694 persen), cabai rawit (0,0633 persen), jengkol (0,0200 persen), ayam hidup (0,0198 peren), dan ikan nila (0,0195 persen).

Tabel 2.9
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kota Muara Bungo Bulan Desember 2021, Inflasi Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)
(data BPS)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	Tingkat Inflasi Desember 2021 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi Desember 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum (*Headline*)	**107,69**	**0,45**	**1,65**	**1,65**	**0,4500**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,10	0,47	1,37	1,37	0,1472
Pakaian dan Alas Kaki	110,05	0,04	1,62	1,62	0,0029
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,31	0,67	2,12	2,12	0,1212
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	109,31	0,64	4,24	4,24	0,0378
Kesehatan	105,58	-0,02	1,63	1,63	-0,0004
Transportasi	105,77	1,23	2,42	2,42	0,1505
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	102,82	-0,38	0,48	0,48	-0,0212
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,31	0,38	0,77	0,77	0,0067
Pendidikan	103,16	0,00	0,41	0,41	0,0000
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	105,43	0,00	0,15	0,15	0,0000
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	119,39	0,11	1,43	1,43	0,0073

Sumber: Survei Harga Konsumen Kota Muaro Bungo, BPS

https://jambi.bps.go.id

b) Uraian Inflasi Kota Jambi menurut Kelompok Pengeluaran

1. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 1,12 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 110,01 pada November 2021 menjadi 111,35 pada November 2021.

Dari tiga subkelompok pada kelompok pengeluaran ini, dua diantaranya mengalami inflasi, yaitu: subkelompok makanan sebesar 1,44 persen; dan subkelompok rokok dan tembakau sebesar 0,40 persen. Sedangkan

subkelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

Kelompok ini pada Desember 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,3737 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: daging ayam ras sebesar 0,1449 persen; minyak goreng sebesar 0,1217 persen; cabai rawit sebesar 0,0997 persen; bawang merah sebesar 0,0351 persen; telur ayam ras sebesar 0,0325 persen; bayam sebesar 0,0255 persen; sawi hijau sebesar 0,0131 persen; susu bubuk untuk balita sebesar 0,0102 persen; dan rokok putih sebesar 0,0102 persen.

2. Pakaian dan Alas Kaki

   Kelompok pengeluaran Pakaian dan Alas Kaki pada Desember 2021 mengalami deflasi sebesar 0,02 persen atau terjadi penurunan indeks dari 104,65 pada November 2021 menjadi 104,63 pada Desember 2021.

   Dari dua subkelompok pada kelompok pengeluaran ini, subkelompok pakaian mengalami inflasi sebesar 0,02 persen. Sedangkan subkelompok alas kaki tidak mengalami perubahan. Kelompok ini memberikan andil/sumbangan deflasi sebesar 0,0013 persen pada Desember 2021. Adapun komoditas utama yang mengalami penurunan harga, yaitu celana panjang jeans anak sebesar 0,0009 persen.

3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

   Kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,38 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 106,16 pada November 2021 menjadi 106,56 pada Desember 2021.

   Dari empat subkelompok pada kelompok pengeluaran ini, tiga subkelompok mengalami inflasi, yaitu: subkelompok sewa dan kontrak rumah sebesar 0,43 persen; subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan sebesar 0,57 persen; dan subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,31 persen. Sementara itu, subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya tidak mengalami perubahan harga dibanding bulan sebelumnya.

   Kelompok ini pada Desember 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0703 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: semen sebesar 0,0279 persen; kontrak rumah sebesar 0,0248 persen; dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,0163 persen.

4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

   Pada Desember 2021, kelompok pengeluaran Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami inflasi sebesar 0,01 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,88 pada November 2021 menjadi 108,89 pada Desember 2021.

   Dari enam subkelompok pada kelompok pengeluaran ini, dua diantaranya mengalami inflasi, yaitu: subkelompok furnitur, perlengkapan dan karpet sebesar 0,17 persen; dan subkelompok peralatan rumah tangga sebesar 0,22 persen. Sedangkan subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin mengalami deflasi sebesar 0,11 persen. Sementara subkelompok tekstil rumah tangga; subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum; serta subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun tidak mengalami perubahan.

Kelompok ini pada Desember 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0006 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu kulkas/lemari es sebesar 0,0011 persen; dan sabun detergen bubuk/cair sebesar 0,0010 persen.

5. Kesehatan

   Kelompok pengeluaran Kesehatan pada Desember 2021 tidak mengalami perubahan indeks harga. Artinya, komoditas barang dan jasa pada kelompok pengeluaran ini tidak mengalami perubahan harga dibanding bulan sebelumnya.

6. Transportasi

   Pada Desember 2021, kelompok pengeluaran Transportasi mengalami inflasi sebesar 0,02 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,01 pada November 2021 menjadi 104,03 pada Desember 2021.

   Dari empat subkelompok pada kelompok pengeluaran ini, dua diantaranya mengalami inflasi, yaitu subkelompok pembelian kendaraan sebesar 0,10 persen; dan subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 0,02 persen. Sedangkan subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Sementara itu subkelompok jasa pengiriman barang tidak mengalami perubahan indeks harga dibanding bulan sebelumnya.

   Kelompok ini pada Desember 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0023 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu mobil sebesar 0,0038 persen.

7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

   Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan pada Desember 2021 mengalami deflasi sebesar 0,01 persen atau terjadi penurunan indeks dari 101,36 pada November 2021 menjadi 101,35 pada Desember 2021.

   Dari empat subkelompok pada kelompok pengeluaran ini, satu diantaranya mengalami inflasi, yakni subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 0,12 persen, kemudian subkelompok jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,84 persen. Sedangkan dua subkelompok lainnya, yaitu subkelompok layanan informasi dan komunikasi; serta subkelompok asuransi tidak mengalami perubahan.

   Kelompok ini pada Desember 2021 memberikan andil/sumbangan deflasi sebesar 0,0005 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu biaya administrasi transfer uang sebesar 0,0020 persen.

8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

   Pada Desember 2021, kelompok pengeluaran Rekreasi, Olahraga dan Budaya tidak mengalami perubahan indeks harga. Artinya, komoditas barang dan jasa pada kelompok pengeluaran ini tidak mengalami perubahan harga dibanding bulan sebelumnya.

9. Pendidikan

   Kelompok pengeluaran Pendidikan pada Desember 2021 juga tidak mengalami perubahan indeks harga. Artinya, komoditas barang dan jasa pada kelompok pengeluaran ini tidak mengalami perubahan harga dibanding bulan sebelumnya.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok pengeluaran Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,54 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 105,36 pada November 2021 menjadi 105,93 pada Desember 2021. Inflasi tersebut dipicu oleh subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi sebesar 0,54 persen.

Komoditas dominan yang memberikan andil/sumbangan inflasi pada kelompok pengeluaran ini, yaitu kue kering berminyak sebesar 0,0221 persen; teh siap saji sebesar 0,0058 persen.

11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Pada Desember 2021, kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 0,03 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 111,77 pada November 2021 menjadi 111,80 pada Desember 2021.

Dari empat subkelompok pengeluaran, satu diantaranya mengalami inflasi, yakni subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 0,12 persen. Kemudian satu subkelompok deflasi, yakni subkelompok perawatan pribadi sebesar 0,01 persen. Sedangkan dua subkelompok lainnya, yaitu subkelompok perlindungan sosial; dan subkelompok jasa lainnya tidak mengalami perubahan.

Kelompok ini pada Desember 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0019 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu emas perhiasan sebesar 0,0022 persen.

c) Perbandingan Inflasi Antarkota IHK di Sumatera

Perbandingan inflasi antarkota IHK se-Sumatera yang terlihat pada Tabel 2.10 menunjukkan bahwa dari 24 kota IHK se-Sumatera, 22 kota inflasi dan dua kota deflasi. Pada Desember 2021, inflasi tertinggi se-Sumatera terjadi di Kota Pangkal Pinang sebesar 1,27 persen dan terendah di Kota Pekanbaru sebesar 0,07 persen. Kota Jambi dan Kota Muara Bungo mengalami inflasi pada Desember 2021, masing-masing sebesar 0,48 persen dan 0,45 persen.

Tabel 2.10
Perbandingan IHK dan Inflasi Antarkota se-Sumatera Bulan Desember 2021
(2018=100)

Kota	Desember 2021		Kota	Desember 2021	
	IHK	Tingkat Inflasi (%)		IHK	Tingkat Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PANGKAL PINANG	107,16	1,27	**13. BUNGO**	**107,69**	**0,45**
2. TANJUNG PANDAN	110,92	1,14	14. MEDAN	105,92	0,44
3. BANDAR LAMPUNG	108,63	0,99	15. PALEMBANG	106,55	0,42
4. METRO	109,22	0,99	16. TANJUNG PINANG	105,70	0,42
5. PEMATANG SIANTAR	107,79	0,85	17. BENGKULU	106,85	0,39
6. MEULABOH	111,38	0,81	18. PADANGSIDIMPUAN	108,68	0,35
7. BANDA ACEH	108,48	0,74	19. LUBUKLINGGAU	106,79	0,35
8. GUNUNGSITOLI	108,43	**0,62**	20. TEMBILAHAN	107,42	0,29
9. LHOKSEUMAWE	108,71	0,59	21. SIBOLGA	108,15	0,17
10. BATAM	107,23	0,58	22. PEKANBARU	106,53	0,07
11. PADANG	106,82	0,48	23. BUKITTINGGI	106,59	-0,04
12. JAMBI	**108,00**	**0,48**	24. DUMAI	107,70	-0,13

Sumber: Survei Harga Konsumen 24 Kota se-Sumatera, BPS

Tabel 2.11
Indeks Harga Konsumen Kota Jambi dan Perubahannya, Desember 2021
(2018=100)

Kelompok/Sub Kelompok	IHK	Inflasi		
	Des 2021	Des 2021 [1]	Tahun Kalender [2]	Tahun ke Tahun [4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UMUM	**108,00**	**0,48**	**1,67**	**1,67**
I. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	**111,35**	**1,22**	**3,57**	**3,57**
Makanan	109,89	1,44	3,33	3,33
Minuman yang Tidak Beralkohol	103,82	-0,08	1,01	1,01
Rokok dan Tembakau	124,92	0,40	6,13	6,13
II. PAKAIAN DAN ALAS KAKI	**104,63**	**-0,02**	**0,61**	**0,61**
Pakaian	106,59	-0,02	0,97	0,97
Alas Kaki	96,98	0,00	-0,93	-0,93
III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	**106,56**	**0,38**	**2,06**	**2,06**
Sewa dan Kontrak Rumah	101,41	0,43	0,76	0,76
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/ Perumahan	111,14	0,57	6,61	6,61
Penyediaan Air dan Layanan Perumahan Lainnya	126,48	0,00	0,00	0,00
Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,63	0,31	0,37	0,37
IV. PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	**108,89**	**0,01**	**1,20**	**1,20**
Furnitur, Perlengkapan dan Karpet	107,18	0,17	4,46	4,46
Tekstil Rumah Tangga	109,96	0,00	0,70	0,70
Peralatan Rumah Tangga	111,20	0,38	0,81	0,81
Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum	108,30	0,00	1,75	1,75
Peralatan dan Perlengkapan Perumahan dan Kebun	111,92	0,00	1,17	1,17
Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin	108,48	-0,11	0,49	0,49
V. KESEHATAN	**112,13**	**0,00**	**0,30**	**0,30**
Obat-Obatan dan Produk Kesehatan	113,52	0,00	-0,64	-0,64
Jasa Rawat Jalan	108,10	0,00	2,75	2,75
Jasa Rawat Inap	112,93	0,00	0,00	0,00
VI. TRANSPORTASI	**104,03**	**0,02**	**-0,26**	**-0,26**
Pembelian Kendaraan	105,01	0,10	0,38	0,38
Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi	101,46	-0,02	0,37	0,37
Jasa Angkutan Penumpang	110,01	0,02	-3,08	-3,08
Jasa Pengiriman Barang	111,26	0,00	0,00	0,00

https://jambi.bps.go.id

VII. INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	101,35	-0,01	-1,11	-1,11
Peralatan Informasi dan Komunikasi	90,89	0,12	-3,60	-3,60
Layanan Informasi dan Komunikasi	105,56	0,00	-0,29	-0,29
Asuransi	104,31	0,00	0,00	0,00
Jasa Keuangan	98,65	-0,84	-0,84	-0,84
VIII. REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	122,50	0,00	2,30	2,30
Barang Rekreasi Lainnya dan Olahraga	105,05	0,00	0,00	0,00
Layanan Rekreasi dan Olahraga	121,53	0,00	0,65	0,65
Layanan Kebudayaan	100,00	0,00	0,00	0,00
Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah	131,44	0,00	3,97	3,97
IX. PENDIDIKAN	104,83	0,00	0,32	0,32
Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini	107,47	0,00	0,00	0,00
Pendidikan Menengah	104,06	0,00	0,02	0,02
Pendidikan Tinggi	103,64	0,00	0,00	0,00
Pendidikan Lainnya	105,12	0,00	2,30	2,30
X. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	105,93	0,54	1,21	1,21
Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman	105,93	0,54	1,21	1,21
XI. PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	111,80	0,03	0,40	0,40
Perawatan Pribadi	111,49	-0,01	0,90	0,90
Perawatan Pribadi Lainnya	113,38	0,12	-0,66	-0,66
Perlindungan Sosial	109,33	0,00	0,00	0,00
Jasa Lainnya	100,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Survei Harga Konsumen Kota Jambi, BPS
Keterangan : 1) Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK November 2021.
2) Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2020.
3) Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2020.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 2.12
Indeks Harga Konsumen Kota Muara Bungo dan Perubahannya,
Desember 2021 (2018=100)

Kelompok/Sub Kelompok	IHK	Inflasi		
	Des 2021	Des 2021 [1]	Tahun Kalender [2]	Tahun ke Tahun [3]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UMUM	107,69	0,45	1,65	1,65
I. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	110,10	0,47	1,37	1,37
Makanan	107,33	0,62	-0,60	-0,60
Minuman yang Tidak Beralkohol	111,33	0,07	7,74	7,74
Rokok dan Tembakau	120,86	0,00	7,35	7,35
II. PAKAIAN DAN ALAS KAKI	110,05	0,04	1,62	1,62
Pakaian	108,23	0,02	1,88	1,88
Alas Kaki	118,81	0,12	0,43	0,43
III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	103,31	0,67	2,12	2,12
Sewa dan Kontrak Rumah	102,31	1,72	1,72	1,72
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/ Perumahan	106,90	-0,26	5,58	5,58
Penyediaan Air dan Layanan Perumahan Lainnya	100,00	0,00	0,00	0,00
Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,01	0,21	1,03	1,03
IV. PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	109,31	0,64	4,24	4,24
Furnitur, Perlengkapan dan Karpet	107,30	0,00	2,20	2,20
Tekstil Rumah Tangga	119,70	0,00	1,45	1,45
Peralatan Rumah Tangga	113,18	0,08	6,99	6,99
Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum	102,72	0,17	0,78	0,78
Peralatan dan Perlengkapan Perumahan dan Kebun	108,53	0,00	5,13	5,13
Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin	108,52	1,41	5,17	5,17
V. KESEHATAN	105,58	-0,02	1,63	1,63
Obat-Obatan dan Produk Kesehatan	112,66	-0,06	1,68	1,68
Jasa Rawat Jalan	102,72	0,00	2,72	2,72
Jasa Rawat Inap	100,00	0,00	0,00	0,00
VI. TRANSPORTASI	105,77	1,23	2,42	2,42
Pembelian Kendaraan	105,43	0,00	0,60	0,60
Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi	104,20	0,00	1,81	1,81
Jasa Angkutan Penumpang	112,03	8,33	8,61	8,61
Jasa Pengiriman Barang	101,49	0,00	1,49	1,49

https://jambi.bps.go.id

VII. INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	**102,82**	**-0,38**	**0,48**	**0,48**
Peralatan Informasi dan Komunikasi	109,64	0,00	3,40	3,40
Layanan Informasi dan Komunikasi	101,35	0,00	0,01	0,01
Asuransi	100,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Keuangan	94,72	-5,28	-5,28	-5,28
VIII. REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	**107,31**	**0,38**	**0,77**	**0,77**
Barang Rekreasi Lainnya dan Olahraga	102,58	0,00	0,00	0,00
Layanan Rekreasi dan Olahraga	122,04	0,00	0,00	0,00
Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah	104,22	0,85	1,75	1,75
IX. PENDIDIKAN	**103,16**	**0,00**	**0,41**	**0,41**
Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini	100,96	0,00	0,00	0,00
Pendidikan Menengah	103,71	0,00	0,00	0,00
Pendidikan Tinggi	102,59	0,00	0,92	0,92
Pendidikan Lainnya	108,64	0,00	0,24	0,24
X. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	**105,43**	**0,00**	**0,15**	**0,15**
Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman	105,43	0,00	0,15	0,15
XI. PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	**119,39**	**0,11**	**1,43**	**1,43**
Perawatan Pribadi	113,35	0,35	3,79	3,79
Perawatan Pribadi Lainnya	128,59	-0,16	-1,15	-1,15
Jasa Lainnya	100,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Survei Harga Konsumen Kota Muara Bungo, BPS
Keterangan : 1) Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK November 2021.
2) Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2020.
3) Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2020.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 2.13
Urutan Sumbangan Inflasi/Deflasi per Jenis Komoditas di Kota Jambi, Desember 2021

	Jenis Komoditas	Andil Inflasi		Jenis Komoditas	Andil Inflasi		Jenis Komoditas	Andil Inflasi
	(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
1	DAGING AYAM RAS	0,1449	26	KACANG PANJANG	0,0033	51	TEH	-0,0014
2	MINYAK GORENG	0,1217	27	DAUN SINGKONG	0,0032	52	SAWI PUTIH/PECAY/ PITSAI	-0,0015
3	CABAI RAWIT	0,0997	28	SUSU CAIR KEMASAN	0,0030	53	MAKANAN RINGAN/ SNACK	-0,0017
4	BAWANG MERAH	0,0351	29	CAT TEMBOK	0,0029	54	BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER	-0,0020
5	TELUR AYAM RAS	0,0325	30	PENYEDAP MASAKAN/ VETSIN	0,0028	55	KERANG	-0,0029
6	SEMEN	0,0279	31	DAGING SAPI	0,0023	56	PEMBERSIH LANTAI	-0,0032
7	BAYAM	0,0255	32	EMAS PERHIASAN	0,0022	57	IKAN LAMBAK	-0,0033
8	KONTRAK RUMAH	0,0248	33	BAWANG PUTIH	0,0021	58	BUMBU MASAK JADI	-0,0034
9	KUE KERING BERMIN-YAK	0,0221	34	SOSIS	0,0020	59	AYAM HIDUP	-0,0038
10	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,0163	35	SELAI / JAM	0,0020	60	KEPITING/RAJUNGAN	-0,0038
11	SAWI HIJAU	0,0131	36	TEPUNG TERIGU	0,0018	61	KEMBANG KOL	-0,0040
12	KOPI SIAP SAJI	0,0103	37	BAKSO	0,0017	62	BESI BETON	-0,0043
13	SUSU BUBUK UNTUK BALITA	0,0102	38	IKAN ASIN TERI	0,0016	63	WORTEL	-0,0044
14	ROKOK PUTIH	0,0102	39	TERONG	0,0016	64	CABAI HIJAU	-0,0049
15	JENGKOL	0,0077	40	TELEPON SELULER	0,0015	65	KETIMUN	-0,0051
16	IKAN LELE	0,0072	41	SUSU BUBUK	0,0014	66	IKAN PATIN	-0,0055
17	ROKOK KRETEK FILTER	0,0066	42	JAGUNG MANIS	0,0014	67	KOL PUTIH/KUBIS	-0,0063
18	TEH SIAP SAJI	0,0058	43	KERUPUK IKAN	0,0013	68	LABU SIAM/JIPANG	-0,0064
19	KANGKUNG	0,0057	44	IKAN ASIN BULU AYAM	0,0012	69	CUMI-CUMI	-0,0082
20	RAMPELA HATI AYAM	0,0044	45	BUNCIS	0,0011	70	IKAN GABUS	-0,0137
21	NUGGET	0,0044	46	KULKAS/LEMARI ES	0,0011	71	TOMAT	-0,0181
22	DAUN SELEDRI	0,0039	47	PARFUM	0,0011	72	CABAI MERAH	-0,0221
23	MOBIL	0,0038	48	SABUN CAIR/CUCI PIRING	-0,0012	73	IKAN DENCIS	-0,0272
24	KUE BASAH	0,0035	49	BEDAK BAYI	-0,0012	74	IKAN NILA	-0,0278
25	MAKANAN BAYI	0,0033	50	DAUN BAWANG	-0,0013	75	UDANG BASAH	-0,0279

https://jambi.bps.go.id

Tabel 2.14
Urutan Sumbangan Inflasi/Deflasi per Jenis Komoditas di Kota Muara Bungo, Desember 2021

	Jenis Komoditas	Andil Inflasi		Jenis Komoditas	Andil Inflasi		Jenis Komoditas	Andil Inflasi
	(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
1	MINYAK GORENG	0,2120	26	IKAN LELE	0,0030	51	SALAK	-0,0016
2	TELUR AYAM RAS	0,1552	27	TAUGE/KECAMBAH	0,0030	52	DAUN SINGKONG	-0,0021
3	ANGKUTAN UDARA	0,1509	28	TERONG	0,0030	53	WORTEL	-0,0021
4	KONTRAK RUMAH	0,1163	29	IKAN CAKALANG/ IKAN SISIK	0,0029	54	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-0,0025
5	DAGING AYAM RAS	0,0947	30	KANGKUNG	0,0023	55	TELUR AYAM KAMPUNG	-0,0041
6	BAWANG MERAH	0,0694	31	SANDAL KULIT PRIA	0,0021	56	TOMAT	-0,0042
7	CABAI RAWIT	0,0633	32	GULA PASIR	0,0018	57	BESI BETON	-0,0047
8	JENGKOL	0,0200	33	APEL	0,0017	58	EMAS PERHIASAN	-0,0047
9	AYAM HIDUP	0,0198	34	LIPSTIK	0,0015	59	KERAMIK	-0,0048
10	IKAN NILA	0,0195	35	SHAMPO	0,0015	60	SABUN MANDI	-0,0056
11	BAYAM	0,0185	36	IKAN DALAM KALENG	0,0013	61	KENTANG	-0,0120
12	SEMANGKA	0,0149	37	TEH	0,0012	62	BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER UANG	-0,0210
13	SABUN DETERGEN BUBUK/CAIR	0,0146	38	HAND BODY LOTION	0,0012	63	CABAI MERAH	-0,5768
14	IKAN SERAI	0,0143	39	SABUN MANDI CAIR	0,0011			
15	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,0140	40	BAWANG PUTIH	0,0010			
16	KACANG PANJANG	0,0114	41	KIPAS ANGIN	0,0010			
17	KETIMUN	0,0094	42	TEPUNG TERIGU	0,0005			
18	UPAH ASISTEN RUMAH TANGGA	0,0093	43	KAOS KUTANG/SINGLET PRIA	0,0005			
19	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	0,0085	44	SIKAT GIGI	0,0005			
20	PASTA GIGI	0,0084	45	SEPATU WANITA	-0,0005			
21	BUKU TULIS BERGARIS	0,0066	46	OBAT BATUK	-0,0005			
22	PEMBERSIH LANTAI	0,0057	47	CUMI-CUMI	-0,0009			
23	PENGHARUM CUCIAN/ PELEMBUT	0,0042	48	SABUN CAIR/CUCI PIRING	-0,0009			
24	PEMBASMI NYAMUK BAKAR	0,0031	49	JERUK	-0,0013			
25	MINYAK RAMBUT	0,0031	50	KACANG HIJAU	-0,0016			

https://jambi.bps.go.id

5) Neraca Perdagangan

a) Ekspor Provinsi Jambi

Nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Desember 2021 naik 14,10 persen dibanding bulan November 2021, yaitu dari US$ 209,13 juta menjadi US$ 238,61 juta. Penyebab utama naiknya nilai ekspor Provinsi Jambi bulan Desember 2021 adalah naiknya ekspor pada komoditi pinang, komoditi kopi, teh, dan rempah, komoditi minyak nabati, komoditi karet dan olahannya, komoditi kayu lapis, komoditi pulp dan kertas, serta komoditi migas.

Nilai ekspor sampai bulan Desember 2021 yaitu sebesar US$ 2.389,66 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, yaitu naik sebesar 34,51 persen.

Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok Pertambangan yaitu sebesar 55,60 persen, diikuti Kelompok Industri sebesar 36,64 persen, dan Kelompok Pertanian sebesar 7,76 persen. Bila dirinci menurut komoditi, Kelompok Industri didominasi oleh karet dan olahannya yang memberikan kontribusi mencapai 20,29 persen. Penyumbang kontribusi

terbesar dari Kelompok Pertambangan yaitu minyak dan gas yang mencapai 50,60 persen. Sedangkan dari Kelompok Pertanian, komoditi pinang memiliki sumbangan 5,93 persen.

Tabel 2.15
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Kelompok Komoditi, Desember 2021
(data BPS)

Kelompok Komoditi	Nilai FOB (US$)						
	November 2021	Desember 2021	% Perubahan Desember21 thd November'21	Januari - Desember 2020	Januari - Desember 2021	% Perubahan	% Peran 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	12.613.868	14.098.699	11,77	136.556.845	185.364.543	35,74	7,76
1. Ikan dan Udang	0	0	-	29.444	0	(100,00)	0,0000
2. Pinang	7.843.412	8.769.837	11,81	101.231.959	141.792.938	40,07	5,93
3. Kopi, Teh, rempah-rempah	3.771.383	3.865.089	2,48	30.359.537	34.698.898	14,29	1,45
4. Lainnya	999.073	1.463.773	46,51	4.935.905	8.872.708	79,76	0,37
Industri	61.267.117	87.100.286	42,16	797.758.123	875.561.825	9,75	36,64
1. Minyak Nabati	22.313.198	28.629.568	28,31	206.609.112	286.004.531	38,43	11,97
2. Karet & Olahannya	34.586.221	38.930.356	12,56	385.728.838	484.903.009	25,71	20,29
3. Kayu Lapis & Olahan Lainnya	3.601.734	4.515.412	25,37	44.100.024	38.161.145	(13,47)	1,60
4. Arang	0	40.837	-	307.649	231.468	(24,76)	0,01
5. Pulp dan Kertas	567.037	14.846.618	> 500	157.003.318	63.660.417	(59,45)	2,66
6. Lainnya	198.928	137.494	(30,88)	4.009.181	2.601.255	(35,12)	0,11
Pertambangan	135.250.450	137.412.878	1,60	842.270.692	1.328.735.269	57,76	55,60
1. Migas	110.971.035	131.862.779	18,83	812.918.224	1.209.212.104	48,75	50,60
2. Pertambangan Lainnya	24.279.415	5.550.098	(77,14)	29.352.468	119.523.165	307,20	5,00
a. Batubara	24.279.415	5.550.098	(77,14)	29.352.468	119.523.165	307,20	5,00
b. Lainnya	0	0	-	0	0	-	0,00
Total Ekspor Asal Jambi	209.131.436	238.611.863	14,10	1.776.585.660	2.389.661.637	34,51	100,00

https://jambi.bps.go.id

Grafik 2.8
Struktur Nilai Ekspor menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi, Januari - Desember 2020 dan Januari - Desember 2021
(data BPS)

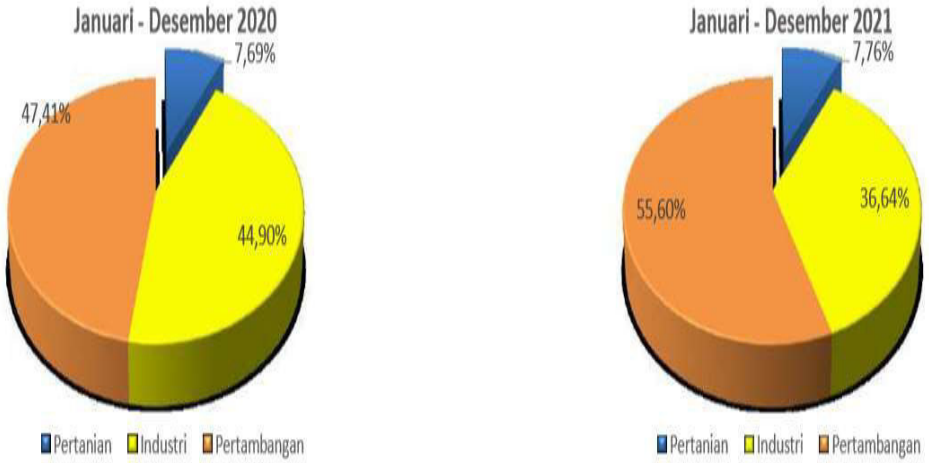

1. Ekspor menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi

   a. Pertanian

      Nilai ekspor Kelompok Pertanian bulan Desember 2021 sebesar US$ 14,10 juta, naik sebesar 11,77 persen dibanding bulan November 2021. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya nilai ekspor komoditi pinang serta komoditi kopi, teh, dan rempah.

      Ekspor Kelompok Pertanian sampai dengan Bulan Desember 2021 naik sebesar 35,74 persen dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2020. Kenaikan nilai ekspor ini karena naiknya ekspor terutama pada komoditi pinang, serta komoditi kopi, teh, dan rempah.

   b. Industri

      Kelompok Industri naik sebesar 42,16 persen dari US$ 61,27 juta pada November 2021 menjadi US$ 87,10 juta pada Desember 2021. Kenaikan terjadi pada komoditi minyak nabati, komoditi karet dan olahannya, komoditi kayu lapis dan olahan lainnya, serta komoditi pulp dan kertas.

      Ekspor Kelompok Industri sampai dengan Bulan Desember 2021, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya naik sebesar 9,75 persen.

   c. Pertambangan

      Nilai ekspor Kelompok Pertambangan Bulan Desember 2021 naik sebesar 1,60 persen dari bulan sebelumnya yaitu dari US$ 135,25 juta pada Bulan November 2021 menjadi US$ 137,41 juta pada Bulan Desember 2021. Kenaikan terjadi pada nilai ekspor komoditi migas.

      Nilai ekspor Kelompok Pertambangan sampai dengan Bulan Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya naik

sebesar 57,76 persen. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya nilai ekspor komoditi migas serta komoditi batubara.

Grafik 2.9
Distribusi Persentase Ekspor Provinsi Jambi menurut Komoditi, Januari - Desember 2021
(data BPS)

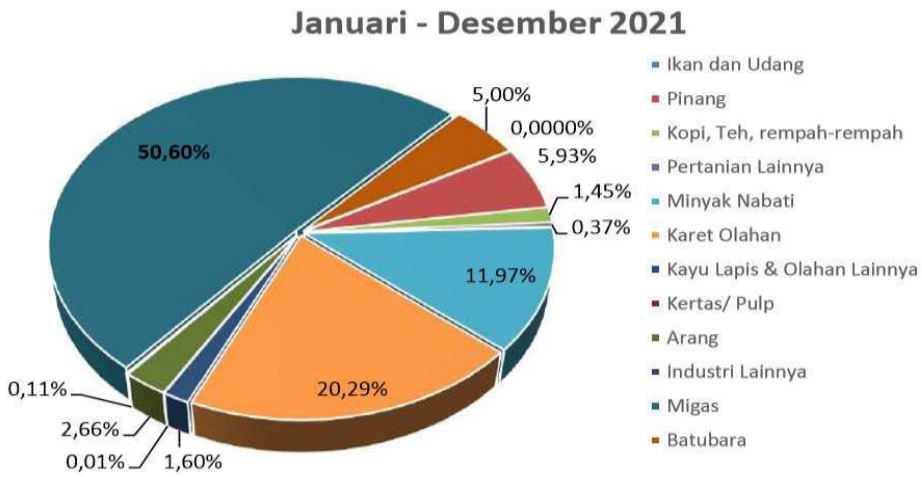

Tabel 2.16
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Kelompok Komoditi, Desember 2021
(data BPS)

Negara Tujuan Utama	Nilai FOB (US$)						
	November 2021	Desember 2021	% Perubahan Desember'21 thd November'21	Januari - Desember 2020	Januari - Desember 2021	% Perubahan	% Peran 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Asean							
1. Singapura	111.039.810	132.365.199	19,21	817.064.469	1.215.222.492	48,73	50,85
2. Malaysia	10.752.306	13.139.255	22,20	119.741.977	143.751.788	20,05	6,02
3. Thailand	10.294.042	8.911.777	(13,43)	71.995.859	142.039.881	97,29	5,94
Asean Lainnya	3.407.375	2.917.076	(14,39)	24.824.763	30.685.434	23,61	1,28
Uni Eropa	0	0					
4. Jerman	648.801	175.597	(72,94)	10.101.033	9.649.547	(4,47)	0,40
5. Perancis	0	0	-	3.596.714	183.144	(94,91)	0,01
6. Inggris	66.420	0	(100,00)	9.418.453	384.189	(95,92)	0,02
Uni Eropa Lainnya	2.243.298	1.452.453	(35,25)	34.160.287	31.776.209	(6,98)	1,33
Negara Utama Lain	0	0					
7. Cina	10.859.175	14.626.776	34,70	87.809.835	111.924.448	27,46	4,68
8. Jepang	20.716.494	28.080.462	35,55	169.459.682	251.747.726	48,56	10,53
9. Amerika Serikat	13.683.884	20.464.382	49,55	147.434.346	180.367.577	22,34	7,55
10. India	11.506.054	4.835.251	(57,98)	79.487.606	108.530.516	36,54	4,54
11. Australia	17.372	0	(100,00)	5.544.990	1.267.839	(77,14)	0,05
12. Korea Selatan	1.637.429	3.095.209	89,03	40.899.270	40.006.165	(2,18)	1,67
13. Taiwan	92.236	82.699	(10,34)	2.967.475	1.020.772	(65,60)	0,04
Total Ekspor Asal Jambi	209.131.436	238.611.863	14,10	1.776.585.660	2.389.661.637	34,51	100,00

https://jambi.bps.go.id

2. Ekspor menurut Negara Tujuan

Secara umum nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Bulan Desember 2021 ke beberapa negara utama mengalami kenaikan. Ekspor Jambi yang mengalami kenaikan adalah ke Singapura, Malaysia, Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Sedangkan pergerakan turunnya nilai ekspor dapat diamati ke negara Thailand, Jerman, Inggris, India, Australia, dan Taiwan.

Sampai dengan Bulan Desember 2021 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa secara umum transaksi ekspor mengalami kenaikan. Namun demikian, ada beberapa transaksi ekspor ke berbagai negara mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada ekspor ke Jerman, Perancis, Inggris, Australia, Korea Selatan, dan Taiwan.

Tabel 2.17
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Komoditi dan Negara Tujuan Utama, Desember 2021
(data BPS)

Negara Tujuan Utama	Nilai FOB (US$)						% Peran 2021
	November 2021	Desember 2021	% Perubahan Desember'21 thd November'21	Januari - Desember			
				2020	2021	% Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Migas	110.971.035	131.862.779	18,83	812.918.224	1.209.212.104	48,75	50,60
Singapura	110.971.035	131.862.779	18,83	812.918.224	1.209.212.104	48,75	50,60
Lainnya	0	0	-	0	0	-	0,00
Karet dan Olahannya	34.586.221	38.930.356	12,56	385.728.838	484.903.009	25,71	20,29
Amerika Serikat	11.039.425	17.961.848	62,71	112.982.426	158.210.542	40,03	6,62
Jepang	11.395.098	13.233.514	16,13	80.992.554	125.433.470	54,87	5,25
Cina	2.415.912	1.350.766	(44,09)	38.239.007	23.720.155	(37,97)	0,99
Lainnya	9.735.786	6.384.228	(34,43)	153.514.852	177.538.841	15,65	7,43
Minyak Nabati	22.313.198	28.629.568	28,31	206.609.112	286.004.531	38,43	11,97
Jepang	8.123.920	13.359.028	64,44	71.336.323	113.098.278	58,54	4,73
Malaysia	9.983.345	11.893.936	19,14	104.268.559	130.662.388	25,31	5,47
Thailand	3.745.801	3.085.023	(17,64)	19.364.699	23.871.272	23,27	1,00
Lainnya	460.131	291.581	(36,63)	11.639.532	18.372.593	57,85	0,77
Total 3 Komoditi	167.870.453	199.422.704	18,80	1.405.256.175	1.980.119.643	40,91	
Total Ekspor Asal Jambi	209.131.436	238.611.863	14,10	1.776.585.660	2.389.661.637	34,51	100,00

https://jambi.bps.go.id

Tabel 2.17 menunjukkan perkembangan ekspor tiga komoditi utama pada bulan Desember 2021, yaitu komoditi migas, komoditi karet dan olahannya, serta komoditi minyak nabati. Ekspor terbesar adalah komoditi migas yang pada bulan ini diekspor ke Singapura. Komoditi karet dan olahannya terbanyak diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. Komoditi minyak nabati terbanyak diekspor ke Jepang, Malaysia, dan Thailand.

Tabel 2.18
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Negara tujuan Utama, Desember 2021
(data BPS)

Komoditi Utama	Nilai FOB (US$)						
	November 2021	Desember 2021	% Perubahan Desember'21 thd November'21	Januari - Desember			% Peran 2021
				2020	2021	% Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Singapura	111.039.810	132.365.199	19,21	817.064.469	1.215.222.492	48,73	50,85
Migas	110.971.035	131.862.779	18,83	812.918.224	1.209.212.104	48,75	50,60
Pinang	68.640	374.790	446,02	3.372.775	5.115.377	51,67	0,21
Kopi, Teh, Rempah	0	97.270	-	441.363	305.723	(30,73)	0,01
Lainnya	135	30.359	> 500	332.106	589.288	77,44	0,02
Jepang	20.716.494	28.080.462	35,55	169.459.682	251.747.726	48,56	10,53
Minyak Nabati	8.123.920	13.359.028	64,44	71.336.323	113.098.278	58,54	4,73
Karet dan Olahannya	11.395.098	13.233.514	16,13	73.311.664	125.433.470	71,10	5,25
Kayu Lapis	1.197.462	1.396.193	16,60	24.790.293	13.091.623	(47,19)	0,55
Lainnya	14	91.726	> 500	21.402	124.354	481,05	0,01
Amerika Serikat	13.683.884	20.464.382	49,55	147.434.346	180.367.577	22,34	7,55
Karet dan Olahannya	11.039.425	17.961.848	62,71	119.679.195	158.210.542	32,20	6,62
Kopi, Teh, Rempah	2.622.704	2.218.874	(15,40)	18.757.080	20.049.126	6,89	0,84
Kayu Lapis	21.344	283.184	> 500	0	931.369	-	0,04
Lainnya	410	475	15,90	8.998.070	1.176.541	(86,92)	0,05
Total 3 Negara	145.440.187	180.910.042	24,39	1.133.958.496	1.647.337.796	45,27	
Total Ekspor Asal Jambi	209.131.436	238.611.863	14,10	1.776.585.660	2.389.661.637	34,51	100,00

https://jambi.bps.go.id

Tabel 2.18 menunjukkan ekspor Jambi ke tiga negara utama berdasarkan komoditi yang diekspor pada bulan Desember 2021. Jumlah ekspor ke tiga negara mencapai 75,82 persen dari total ekspor. Ekspor terbesar adalah ke negara Singapura sebesar 55,47 persen dengan komoditi utama yaitu komoditi migas, komoditi pinang, serta komoditi kopi, teh, dan rempah. Selanjutnya adalah ekspor ke Jepang sebesar 11,77 persen dengan komoditi utama adalah komoditi minyak nabati, komoditi karet dan olahannya, serta komoditi kayu lapis. Sedangkan komoditi terbesar yang diekspor ke

Amerika Serikat adalah komoditi karet dan olahannya, komoditi kopi, teh, rempah, serta komoditi kayu lapis.

Tabel 2.19
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Negara tujuan Utama, Desember 2021
(data BPS)

Komoditi Utama	Nilai FOB (US$)						
	November 2021	Desember 2021	% Perubahan Desember'21 thd November'21	Januari - Desember			% Peran 2021
				2020	2021	% Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Singapura	111.039.810	132.365.199	19,21	817.064.469	1.215.222.492	48,73	50,85
Migas	110.971.035	131.862.779	18,83	812.918.224	1.209.212.104	48,75	50,60
Pinang	68.640	374.790	446,02	3.372.775	5.115.377	51,67	0,21
Kopi, Teh, Rempah	0	97.270	-	441.363	305.723	(30,73)	0,01
Lainnya	135	30.359	> 500	332.106	589.288	77,44	0,02
Jepang	20.716.494	28.090.462	35,55	169.459.682	251.747.726	48,56	10,53
Minyak Nabati	8.123.920	13.359.028	64,44	71.336.323	113.098.278	58,54	4,73
Karet dan Olahannya	11.395.099	13.233.514	16,13	72.211.664	125.433.470	71,10	5,25
Kayu Lapis	1.197.462	1.396.193	16,60	24.790.293	13.091.623	(47,19)	0,55
Lainnya	14	91.726	> 500	21.402	124.354	481,05	0,01
Amerika Serikat	13.693.894	20.464.392	49,55	147.434.246	180.367.577	22,34	7,55
Karet dan Olahannya	11.039.425	17.961.849	62,71	119.679.195	159.210.542	22,20	6,62
Kopi, Teh, Rempah	2.622.704	2.218.874	(15,40)	19.757.080	20.049.126	6,89	0,84
Kayu Lapis	21.344	283.184	> 500	0	931.369	-	0,04
Lainnya	410	475	15,90	8.998.070	1.176.541	(86,92)	0,05
Total 3 Negara	145.440.187	190.910.042	24,39	1.132.958.496	1.647.337.796	45,27	
Total Ekspor Asal Jambi	209.131.436	239.611.863	14,10	1.776.595.660	2.389.661.637	34,51	100,00

https://jambi.bps.go.id

Tabel 2.19 menunjukkan ekspor Jambi ke tiga negara utama berdasarkan komoditi yang diekspor pada bulan Desember 2021. Jumlah ekspor ke tiga negara mencapai 75,82 persen dari total ekspor. Ekspor terbesar adalah ke negara Singapura sebesar 55,47 persen dengan komoditi utama yaitu komoditi migas, komoditi pinang, serta komoditi kopi, teh, dan rempah. Selanjutnya adalah ekspor ke Jepang sebesar 11,77 persen dengan komoditi utama adalah komoditi minyak nabati, komoditi karet dan olahannya, serta komoditi kayu lapis. Sedangkan komoditi terbesar yang diekspor ke Amerika Serikat adalah komoditi karet dan olahannya, komoditi kopi, teh, rempah, serta komoditi kayu lapis.

3. Ekspor Menurut Pelabuhan

Kegiatan ekspor Jambi dilakukan melalui Pelabuhan di Jambi dan Pelabuhan di luar Jambi. Kegiatan ekspor pada Bulan Desember 2021 melalui Pelabuhan di Jambi sebesar US$ 207,36 juta dengan rincian komoditi asal Jambi US$ 68,49 juta dan komoditi yang berasal dari luar Jambi sebesar US$ 138,86 juta. Sedangkan ekspor Provinsi Jambi yang melewati pelabuhan di luar Jambi mencapai US$ 170,12 juta.

Total ekspor asal Jambi sampai dengan Bulan Desember 2021 yang melalui pelabuhan di Jambi sebesar 38,34 persen dan yang melalui pelabuhan luar Jambi sebesar 61,66 persen.

Tabel 2.20
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi menurut Pelabuhan, Desember 2021
(data BPS)

Pelabuhan	Nilai FOB (US$)					
	November 2021	Desember 2021	% Perubahan Desember'21 thd November'21	Januari - Desember		
				2020	2021	% Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelabuhan Jambi	226.173.897	207.355.716	(8,32)	787.112.277	1.280.342.878	62,66
- Komoditi Asal Jambi	79.564.640	68.494.256	(13,91)	759.480.054	916.144.506	20,63
- Komoditi dari Luar Jambi	146.609.257	138.861.460	(5,28)	27.632.222	367.464.909	> 500
2. Pel.Luar Jambi	129.566.796	170.117.607	31,30	1.017.105.606	1.473.517.131	44,87
Total Ekspor Asal Jambi	209.131.436	238.611.863	14,10	1.776.585.660	2.389.661.637	34,51

jambi.bps.go.id

b) Impor Provinsi Jambi

Nilai impor Provinsi Jambi Desember 2021 naik sebesar 10,71 persen dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari US$ 2,81 juta pada bulan November 2021 menjadi US$ 3,11 juta pada bulan Desember 2021. Lima negara dengan transaksi Impor terbesar pada bulan Desember 2021 adalah dari negara Singapura, Cina, Malaysia, Australia, dan Turki. Sampai dengan Bulan Desember kelompok Mesin dan Alat Angkutan memiliki kontribusi terbesar terhadap total Impor di Jambi yaitu sebesar 40,44 persen, diikuti kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 32,96 persen, dan kelompok komoditi makanan dan sejenisnya sebesar 12,99 persen.

1. Impor menurut Negara Asal

Tabel 2.21 memperlihatkan perkembangan nilai impor Provinsi Jambi Bulan Desember 2021 dari negara-negara pengimpor utama. Sepuluh transaksi impor terbesar Provinsi Jambi pada Bulan Desember 2021 berasal dari negara Singapura, Cina, Malaysia, Australia, Turki, Austria, Brazil, India, Swedia, dan Thailand. Transaksi impor terbesar sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah dari negara Singapura yang mencapai 34,91 persen disusul dari Cina yaitu sebesar 22,78 persen.

Tabel 2.21
Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi menurut Negara Asal Utama, Desember 2021
(data BPS)

Kelompok Komoditi	Nilai CIF (US$)						% Peran 2021
	November 2021	Desember 2021	% Perubahan Des'21 thd Nov'21	Januari -Desember			
				2020	2021	% Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Singapura	1.637.548	813.949	(50,29)	6.995.386	11.141.625	59,27	34,91
2 Cina	811.847	619.064	(23,75)	17.159.856	7.269.118	(57,64)	22,78
3 Malaysia	13.248	555.630	> 500	1.550.485	1.555.254	0,31	4,87
4 Australia	0	323.791	-	2.062.314	1.223.160	(40,69)	3,83
5 Turki	0	311.836	-	36	311.836	> 500	0,98
6 Austria	0	270.060	-	652.286	658.324	0,93	2,06
7 Brazil	0	79.480	-	674.662	154.682	(77,07)	0,48
8 India	204.063	68.021	(66,67)	5.833.172	3.608.133	(38,14)	11,31
9 Swedia	53.000	37.075	(30,05)	923.290	1.072.925	16,21	3,36
10 Thailand	0	20.378	-	1.840.414	916.559	(50,20)	2,87
Total 10 Negara	2.719.706	3.090.284	13,63	37.691.901	27.911.616	(25,95)	87,46
Negara Lainnya	88.185	18.360	(79,18)	27.553.402	4.000.549	(85,48)	12,54
Total Impor	2.807.891	3.108.644	10,71	65.245.303	31.912.165	(51,09)	100,00

https://jambi.bps.go.id

2. Impor menurut Kelompok Komoditi

Impor Provinsi Jambi melalui tiga pelabuhan laut utama di Jambi yaitu: Pelabuhan Talang Duku Jambi, Muara Sabak dan Kuala Tungkal serta pelabuhan udara Bandara Sultan Thaha. Nilai impor Bulan Desember 2021 sebesar US$ 3,11 juta, naik sebesar 10,71 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan impor ini dipicu oleh naiknya nilai impor pada kelompok komoditi mesin dan alat angkutan serta kelompok komoditi hasil industri dan lainnya.

Bila dilihat perannya sampai dengan Bulan Desember 2021, impor Kelompok Mesin dan alat angkutan memberikan kontribusi sebesar 40,44 persen dari total impor, diikuti Kelompok Komoditi Bahan kimia dan sejenisnya sebesar 32,96 persen, dan Kelompok komoditi Makanan dan sejenisnya sebesar 12,99 persen. Untuk kelompok komoditi Hasil Industri dan lainnya berperan sebesar 12,62 persen dan kelompok komoditi Karet dan sejenisnya hanya berperan 0,98 persen.

Tabel 2.22
Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi menurut Kelompok Komoditi , Desember 2021
(data BPS)

Kelompok Komoditi	Nilai CIF (US$)						% Peran 2021
	November 2021	Desember 2021	% Perubahan Des'21 thd Nov'21	Januari - Desember			
				2020	2021	% Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Makanan dan sejenisnya	204.063	68.021	(66,67)	3.221.947	4.146.861	28,71	12,99
2. Bahan kimia dan sejenisnya	1.705.279	658.521	(61,38)	15.110.215	10.517.713	(30,39)	32,96
3. Karet dan sejenisnya	115.300	24.487	(78,76)	163.378	313.834	92,09	0,98
4. Mesin dan alat angkutan	437.760	1.737.406	296,89	26.196.666	12.905.192	(50,74)	40,44
5. Hasil industri dan lainnya	345.489	620.209	79,52	20.553.097	4.028.565	(80,40)	12,62
Total	2.807.891	3.108.644	10,71	65.245.303	31.912.165	(51,09)	100,00

https://jambi.bps.go.id

Grafik 2.10
Peranan Nilai Impor Menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi,
Januari - Desember 2020 dan Januari - Desember 2021
(data BPS)

Sampai dengan Bulan Desember 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa transaksi impor secara umum mengalami penurunan. Penurunan tertinggi dialami oleh impor kelompok komoditi hasil industri dan lainnya yaitu sebesar US$ 16,52 juta (80,40 persen), selanjutnya adalah kelompok komoditi mesin dan alat angkutan sebesar US$ 13,29 juta (50,74 persen) dan kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar US$ 4,59 juta (30,39 persen).

Namun demikian ada transaksi impor yang mengalami kenaikan selama periode JanuariDesember 2021 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi dialami oleh impor kelompok komoditi karet dan sejenisnya sebesar 92,09 persen serta kelompok komoditi makanan dan sejenisnya sebesar 28,71 persen.

c) Neraca Perdagangan

Tabel 2.23 menyajikan informasi tentang neraca pedagangan Provinsi Jambi dari Desember 2020 hingga Januari-Desember 2021. Secara rata-rata, neraca perdagangan Provinsi Jambi selalu mengalami surplus pada kurun waktu tersebut.

Neraca perdagangan Provinsi Jambi pada Bulan Desember 2021 mengalami surplus sebesar US$ 235,50 Juta. Surplus tersebut didorong oleh nilai ekspor bulan Desember 2021 yang lebih besar dibandingkan impor, dengan nilai ekspor mencapai US$ 238,61 juta dan nilai impor sebesar US$ 3,11 juta.

Dengan demikian pada Januari-Desember 2021, neraca perdagangan Provinsi Jambi mengalami surplus sebesar US$ 2.357,75 juta. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, surplus neraca perdagangan yang

dihasilkan pada Januari-Desember 2021 lebih besar. Surplus neraca perdagangan pada Januari-Desember 2020 hanya mencapai US$ 1.711,34 juta.

Tabel 2.23
Neraca Nilai Perdagangan Provinsi Jambi, Desember 2020 - Desember 2021
(US$)
(data BPS)

Bulan	Ekspor	Impor	Neraca
(1)	(2)	(3)	(4)
2020			
Desember	157.565.442	3.874.350	153.691.092
Jan-Des	1.776.585.660	65.245.303	1.711.340.357
2021			
Januari	169.630.526	1.386.929	168.243.597
Februari	158.074.361	1.401.450	156.672.911
Maret	183.210.885	3.986.926	179.223.959
April	162.608.524	2.572.430	160.036.094
Mei	178.802.371	2.574.802	176.227.569
Juni	169.533.634	3.646.859	165.886.775
Juli	219.653.387	2.428.547	217.224.840
Agustus	241.269.706	3.164.653	238.105.053
September	240.768.984	3.046.798	237.722.186
Oktober	218.365.959	1.786.236	216.579.723
November	209.131.436	2.807.891	206.323.545
Desember	238.611.863	3.108.644	235.503.219
Jan-Des	2.389.661.637	31.912.165	2.357.749.472

https://jambi.bps

6) Lingkungan Internal dan Eksternal

Perkembangan perekonomian Provinsi Jambi tahun 2021 masih dipengaruhi oleh lingkungan eksternal utamanya, yang masih sama dengan tahun 2020 lalu, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan adanya pembatasan kegiatan seperti kegiatan pembelajaran maupun kegiatan bisnis atau usaha yang akhirnya akan mempengaruhi banyak sektor, terutama sektor perekonomian dan kesehatan masyarakat.

Integrasi perekonomian dunia yang mulai bangkit dari keterpurukan tahun lalu mulai semakin meningkat. Hal ini di satu sisi menjadi peluang besar bagi peningkatan perekonomian daerah, namun di lain sisi juga akan menuntut daya saing yang cukup ketat dan lebih tinggi bagi perekonomian daerah untuk lebih mampu menaikkan tingkat kesiapan dalam memasuki zona tersebut.

Kondisi perekonomian daerah Jambi, utamanya dalam lingkup faktor eksternal, tidak terlepas dari perekonomian regional, nasional, bahkan negara tetangga yang masih menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian negara-negara industri di Asia lainnya.

Kendati demikian, terdapat beberapa faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat, baik di sektor moneter maupun sektor riil. Di lain sisi, perekonomian daerah juga dipengaruhi

oleh perekonomian global seperti naik turunnya niali mata uang asing, harga minyak dunia, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Beberapa lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a) Ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

b) Pemerintahan yang kuat dan didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi;

c) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi;

d) Keseriusan Pemerintah dalam menangani dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sektor Ekonomi dan Kesehatan memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

7) Tantangan Pokok

Di samping keberhasilan yang telah dicapai masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi

Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak krisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun, kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah gizi dan rendahnya kemampuan daya beli harus terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia, ditandai dengan masih awalnya peningkatan investasi dan ekspor non-migas dan masih banyaknya kendala di daerah yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan.

c) Menjaga Stabilitas Ekonomi

Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, yang mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi dari tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah.

d) Meningkatkan Jaringan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Berhubungan dengan penyediaan oleh pemerintah terhadap layanan kesehatan baik ketersediaan rumah sakit, tenaga kesehatan, obat-obatan dan penyaluran vaksin. Pada sisi lain, masyarakat dituntut turut berpartisipasi dalam pengendalian wabah dan dapat berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, khususnya ditempat-tempat keramaian seperti pasar tradisional, pasar modern, sekolah, tempat peribadatan, taman publik, dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

2.1.2 Arah kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2021

Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2021, meliputi:

1) Percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek melalui:

a) Mendorong perbaikan kinerja sektor perkebunan melalui penciptaan pasar domestik dan melakukan inisiatif penjajakan perluasan pasar ekspor. Pengembangan pasar domestik sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengembangkan pemanfaatan karet alam dalam pembangunan infrastruktur.

b) Mendorong investasi dan penciptaan sumber pertumbuhan baru non sumber daya alam (SDA) melalui:

(1) Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif.

(2) Meminimalisir hambatan investasi (peraturan/perizinan, pajak/retribusi, infrastruktur).

(3) Insentif bagi investor dan pelaku usaha/wirausaha baru seperti relaksasi pajak/retribusi, penyediaan tata ruang, bantuan permodalan, bantuan promosi, penyediaan sumber daya alam (SDM) yang unggul melaui kerjasama dengan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi.

(4) Insentif khusus bagi calon investor yang membangun industri hilir penunjang komoditas unggulan Jambi.

c) Mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama anggaran belanja modal pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur strategis (jalan, jembatan, saluran irigasi, dan pelabuhan) dalam rangka peningkatan konektivitas dan Peraturan Daerah Provinsi Jambigangan antar daerah.

(1) Mengantisipasi perlambatan konsumsi rumah tangga dengan memastikan bahwa realisasi program bantuan sosial dan/atau subsidi terkait penanggulangan kemiskinan seperti penyaluran Program Keluarga Harapan, program bantuan pangan dan Rastra, serta program

jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat *bottom of the pyramid* dapat berjalan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

(2) Mengoptimalkan program *cash for work* dana desa untuk pengembangan kawasan perdesaan dalam rangka perbaikan kinerja sektor pertanian yang menjadi penopang utama pertumbuhan daerah sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan petani, terutama melalui penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan, melalui:

   a) Pelaksanaan program peremajaan tanaman (*replanting*) tanaman kelapa sawit dan karet berbasis perkebunan rakyat.

   b) Mendorong pengembangan hilirisasi industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang, dan industri terkait lainnya dengan memberikan kemudahan izin, pembiayaan dan pengembangan serta didukung dengan:

      Pengembangan Balai Riset dan Standarisasi untuk mendorong penerapan teknologi tepat guna melalui penguatan laboratorium uji SNI dan sertifikasi produk;

      Membangun pendidikan vokasi yang menunjang kebutuhan pengembangan industri karet melalui kerjasama dengan institusi pendidikan di daerah.

   c) Perbaikan tata niaga dan distribusi pasca produksi yang diimplementasikan dengan:

      (1) Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai Peraturan Daerah Provinsi Jambigangan yang terlalu panjang serta mendorong terciptanya *corporate farming*;

      (2) Sosialisasi dan penguatan kelembagaan pasar komoditas (pasar lelang *spot* dan *forward* untuk tanaman perkebunan dan pasar agribisnis untuk tanaman hortikultura);

      (3) Membangun pusat informasi harga karet dan komoditas utama lainnya yang mudah diakses sampai ke level petani.

3. Untuk menyikapi pengendalian inflasi, pemerintah daerah perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi mendatang serta potensi resiko yang perlu diwaspadai dengan:

   a) Melakukan pemantauan terhadap penerapan harga acuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Peraturan Daerah Provinsi Jambigangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan penjualan di Konsumen, termasuk menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan;

b) Pengawasan terhadap ketersediaan cadangan bahan pokok melalui pemantauan rutin serta mendorong kerjasama dengan daerah sentra penghasil;

c) Pengembangan *database* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mencakup kondisi surplus defisit komoditas pangan daerah, pengawasan arus keluar masuk barang, perkembangan stok dan pemantauan harga;

d) Mendorong pengembangan sentra produksi lokal untuk komoditas bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Jambi;

e) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait program kerja TPID dan himbauan-himbauan menyangkut pengendalian inflasi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi selalu mengacu pada visi yaitu "Jambi Mantap 2021-2024", yakni Provinsi Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan Daerah Provinsi Jambi tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2021 ini penerimaan PAD (dibagi total pendapatan) jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, di samping akan melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain peninjauan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, peninjauan tarif, pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah, peninjauan atas kerja sama pengelolaan kekayaan daerah dengan pihak ketiga maupun penggalian sumber penerimaan daerah yang lainnya.

Dari sisi pengeluaran, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

a. Keuangan Daerah.

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jumlah Realisasi Pendapatan Provinsi Jambi TA 2021 adalah sebesar 107,36% atau Rp4,725 triliun dari target yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan tahun 2021 sebesar Rp4,401 triliun atau terdapat kenaikan sebesar 7,39% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp4,400 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain dengan mengoptimalkan sumber pendapatan melalui intensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah yang di antaranya dengan melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Realisasi pendapatan sebagaimana penjelasan di atas, masing masing bersumber dari realisasi PAD sebesar Rp1,843 triliun atau memiliki kontribusi sebesar 39,01% terhadap total realisasi pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2,879 triliun atau memiliki kontribusi sebesar 60,94% terhadap total pendapatan serta dari realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp2,313 miliar atau memiliki kontribusi sebesar 0,05% dari total Pendapatan.

Realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp1,843 triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1,535 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp308,181 miliar atau 20,07%, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp2,879 triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2,862 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp17,091 miliar atau 0,60%, demikian juga realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 sebesar Rp2,313 miliar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2,552 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp238,783 juta atau 9,36%.

Realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp1,843 triliun, masing-masing bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp1,558 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp12,616 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp28,028 miliar serta dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp244,680 miliar.

Realisasi Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp1,558 triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1,292 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp308,181 miliar atau 20,07%, sedangkan realisasi retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp12,616 miliar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp18,593 miliar mengalami penurunan sebesar Rp5,997 miliar atau 32,15%, demikian juga realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp28,028 miliar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp27,923 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp104,622 juta atau 0,37%, sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun

2021 sebesar Rp244,612 miliar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp195,937 miliar berarti mengalami kenaikan sebesar Rp48,675 miliar atau 24,84%.

Realisasi Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp1,558 triliun, masing-masing bersumber dari realisasi PKB sebesar Rp510,370 miliar, realisasi BBNKB sebesar Rp408,140 miliar, realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp400,206 miliar, realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1,505 miliar dan realisasi Pajak Rokok sebesar Rp237,884 miliar.

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp12,616 miliar, yang bersumber dari realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp452,470 juta, realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp12,127 miliar, dan dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp36,715 juta.

Sedangkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp28,028 miliar, yang bersumber dari realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp28,028 miliar.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2021 sebesar Rp244,680 miliar yang bersumber dari realisasi hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp3,465 miliar, realisasi penerimaan jasa giro sebesar Rp14,09 miliar, realisasi hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp9,255 juta, realisasi penerimaan bunga deposito sebesar Rp4,171 miliar, realisasi denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1,387 miliar, realisasi pendapatan denda pajak sebesar Rp2,395 miliar, realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1,674 juta, realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp173,881 miliar, dan realisasi penerimaan lain-lain sebesar Rp46,299 miliar.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan jumlah penerimaan sebesar Rp2,879 triliun dengan rincian Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2,879 triliun, masing-masing yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp2,861 triliun dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp18,433 miliar.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp2,879 triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2,862 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp17,091 miliar atau 0,60%.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2,879 triliun, masing-masing yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp2,861 triliun dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp18,433 miliar.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 sebesar Rp2,313 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2,552 miliar terdapat penurunan sebesar Rp238,783 juta atau 9,36%.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp2,313 miliar dengan rincian Pendapatan Hibah sebesar Rp1,608 miliar dan Lain-lain

Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp705,525 juta.

2) Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Jumlah realisasi belanja daerah yang dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 89,56% atau Rp3,576 triliun dari anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp3,993 triliun. Realisasi tersebut secara nominal lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp3,697 triliun.

Realisasi Belanja tahun 2021 sebesar Rp3,576 triliun, masing-masing merupakan realisasi dari Belanja Operasi sebesar Rp3,075 triliun atau memiliki proporsi sebesar 85,98%, Belanja Modal sebesar Rp449,690 miliar atau memiliki proporsi sebesar 12,57%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp51,667 miliar atau memiliki proporsi sebesar 1,44%.

3) Transfer ke Daerah

Transfer ke daerah meliputi transfer bagi hasil pendapatan (transfer bagi hasil pajak daerah) dan transfer bantuan keuangan (transfer bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota).

Jumlah realisasi transfer ke daerah yang dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 100,00% atau Rp811,258 miliar dari anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp811,258 miliar. Realisasi tersebut secara nominal lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp732,877 miliar.

Realisasi Transfer ke Daerah tahun 2021 sebesar Rp811,258 miliar, masing-masing merupakan realisasi dari transfer bagi hasil pendapatan (bagi hasil pajak daerah) sebesar Rp717,538 miliar atau memiliki proporsi sebesar 88,45% dan transfer bantuan keuangan (transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota) sebesar Rp93,720 miliar atau memiliki proporsi sebesar 11,55%.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi TA 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi TA 2021. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut kedalam

belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah;

b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif;

c. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur;

d. Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Jambi;

e. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif;

f. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian pembangunan;

g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah (pangan, lingkungan, investasi, hak asasi manusia/HAM);

h. Memperpendek birokrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI);

i. *Quick response*;

j. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, obat-obatan secara merata;

k. Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);

l. Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga yang bersumber daya masyarakat;

m. Peningkatan koordinasi upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular;

n. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

o. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah;

p. Meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat;

q. Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;

r. Peningkatan pelestarian budaya lokal;

s. Peningkatan apresiasi dan penggiat seni budaya dalam menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah;

t. Meningkatkan tenggang rasa masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan;

u. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan *gender* dan anak;

v. Penurunan potensi konflik melalui pencegahan dini dan pengendalian konflik masyarakat;

w. Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

x. Pemberian layanan hukum pemerintah daerah dan masyarakat;

y. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman;

z. Mengembangkan SDM berkemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) dan *entrepreneur*;

aa. Pengembangan fasilitas pelatihan yang mendukung IPTEKIN dan *enterpreneur*;

bb. Penguatan budaya IPTEKIN dan *enterpreneur* melalui proses pendidikan dan kebudayaan;

cc. Mendorong usaha-usaha bisnis baru berbasis IPTEKIN dan enterpreneurship;

dd. Meningkatkan iklim yang mampu mendorong berkembangnya bisnis berbasis IPTEKIN dan *enterpreneurship*;

ee. Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal;

ff. Mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN sehingga mampu mengubah struktur ekonomi primer ke sekunder dan tersier;

gg. Memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan;

hh. Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mempu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi;

ii. Menyiapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investasi agribisnis dan agroindustri;

jj. Peningkatan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD;

kk. Meningkatkan pengembangan usaha yang produktif dan menguntungkan BUMD;

ll. Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif padat karya;

mm. Mengembangkan komoditas unggulan agribisnis berbasis teknologi dan inovasi;

nn. Meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan;

oo. Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal;

pp. Meningkatkan akses terhadap bahan pangan;

qq. Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal;

rr. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan asal sayur dan buah;

ss. Meningkatkan produksi dan produktivitas, produk pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis IPTEKIN;

tt. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan sarana prasarana teknologi;

uu. Meningkatkan penyediaan sarana produksi dan bibit unggul pertanian di pedesaan;

vv. Percepatan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat;

ww. Perwujudan simpul-simpul maritim Provinsi Jambi;

xx. Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi;

yy. Peningkatan akses masyarakat terhadap energi listrik;

zz. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak;

aaa. Pembangunan jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa;

bbb. Pengendalian daya rusak air;

ccc. Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah;

ddd. Menerapkan *good mining practice*;

eee. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;

fff. Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan;

ggg. Meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik di bidang industri;

hhh. Meningkatkan peran pariwisata dalam pengelolaan SDA;

iii. Pemisahan peran administrator dengan pengelola kawasan hutan melalui pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan cabang dinas serta operasionalnya;

jjj. Memfasilitasi masyarakat dalam mengakses kawasan hutan dengan program perhutanan berbasis masyarakat;

kkk. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kehutanan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

lll. Mengoptimalkan patroli, operasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan;

mmm. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan tertib peredaran hasil hutan kayu dan non kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan;

nnn. Menginventarisasi status dan fungsi kawasan hutan serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan pola ruang;

ooo. Melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL);

ppp. Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;

qqq. Memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

rrr. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan komunitas adat terpencil (KAT);

sss. Meningkatkan kerja sama dengan swasta dalam penyaluran tenaga kerja;

ttt. Memperluas akses lapangan pekerjaan dan akses permodalan;

uuu. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2016-2021 adalah:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan;
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan;
e. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis;
f. Meningkatkan kualitas SDM perempuan;
g. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah;
h. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN;
i. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian;
j. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum;
k. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
l. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik;

c. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;

d. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah;

e. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya;

f. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama;

g. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan;

h. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum;

i. Meningkatnya *total factor productivity* (TFP);

j. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah;

k. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal;

l. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan;

m. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian;

n. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik;

o. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi;

p. Meningkatnya tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan;

q. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal;

r. Meningkatnya kualitas pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi;

s. Menurunnya angka kemiskinan;

t. Menurunnya angka pengangguran;

u. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui pembandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD Provinsi Jambi TA 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 5 November 2021, maka anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp4,725,657,808,639.44, anggaran belanja sebesar Rp3,576,799,450,498.41 Transfer Rp811,258,648,459.00, penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp 390,555,050,891.14 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00. Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah

Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pendapatan	4.401.754.558.279,00	4.725.657.808.639,44	107,36	4.400.624.372.119,46
2.	Belanja	3.993.550.960.711,00	3.576.799.450.498,41	89,56	3.697.514.755.982,21
3.	Transfer	811.258.648.459,00	811.258.648.459,00	100,00	732.877.994.916,56
4.	**Surplus/Defisit (1-2-3)**	**(403.055.050.891,00)**	**337.599.709.682,04**	**(83,76)**	**(29.768.378.779,31)**
5.	Penerimaan Pembiayaan	403.055.050.891,00	390.555.050.891,14	96.90	420.323.429.670,45
6.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
7.	**Pembiayaan (5-6)**	403.055.050.891,00	390.555.050.891,14	96,90	**420.323.429.670,45**
8.	**SiLPA (4+7)**	**0,00**	**728.154.760.573,18**	**0,00**	**390.555.050.891,14**

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD TA 2021 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp4.401.754.558.279.00 dapat direalisasikan sebesar Rp4.725.657.808.639,44 atau 107.36 % dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp3.993.550.960.711,00 direalisasikan sebesar Rp3,576,799,450,498.41 atau 89,56% dari anggaran sedangkan transfer yang dianggarkan sebesar Rp811,258,648,459.00 direalisasikan sebesar Rp811,258,648,459.00 atau 100%. Dengan demikian, dari anggaran defisit sebesar (Rp403,055,050,891.00) direalisasikan defisit sebesar Rp390.555.050.891,14 atau (96,90)%.
2. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2016 sampai dengan 2021 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Grafik 3.1 berikut.

Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2016 s.d. 2021

(dalam Rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2016	1.321.867.908.750,82	5,44	1.233.514.664.109,54	(0,62)
2.	2017	1.426.696.725.798,00	7,93	1.580.304.867.342,36	28,11
3.	2018	1.490.504.569.321,44	4,74	1.656.569.597.282,27	4,38
4.	2019	1.566.447.128.511,00	5,10	1.651.089.944.335,33	(0,33)
5.	2020	1.360.986.764.131,78	(5,10)	1.535.183.487.238,34	(7,02)
6.	2021	1,601,141,999,879.00	17.65	1,843,364,591,909.44	20.07

Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi PAD TA 2016 s.d. 2021

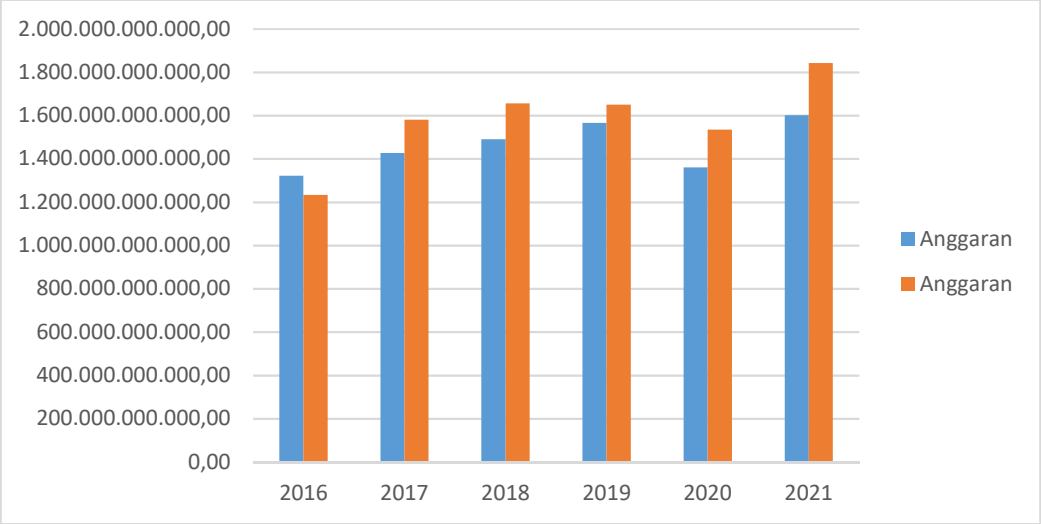

Secara keseluruhan dari TA 2016 sampai dengan TA 2021 target PAD Provinsi Jambi terus menerus mengalami kenaikan, namun walaupun target mengalami kenaikan akan tetapi realisasinya mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari TA 2016 sampai dengan TA 2017 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp104.828.817.047,18 atau sebesar 7,93%, TA 2017 sampai TA 2018 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp63.807.843.523,44 atau sebesar 4,47%, TA 2018 sampai TA 2019 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp75.942.559.189,56 atau 5,10%, TA 2019 sampai TA 2020 target PAD mengalami penurunan sebesar (Rp205.460.364.379,22) atau 13,12% karena *refocusing* anggaran dalam masa pandemi COVID-19, dan TA 2020 sampai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp240.155.235.747.22 atau 17,65%.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, TA 2016 sampai dengan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp346.790.203.232,82 atau 28,11%, TA 2017 sampai dengan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp76.264.729.939,91 atau 4,83%, TA 2018 sampai dengan TA 2019 mengalami penurunan sebesar

(Rp5.479.652.946,94) atau 0,33%, dan TA 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp115.906.457.096,99) atau 7,02% karena masa pandemi COVID-19, dan TA 2020 sampai dengan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp308.181.104.671,10 atau 20,07%.

Untuk Dana Perimbangan realisasi penerimaan sebesar Rp2.861.545.944.030,00 atau 104,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.738.883.649.862,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari TA 2015 sampai dengan TA 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Grafik 3.2 berikut.

Tabel 3.3 Perkembangan Dana Perimbangan TA 2016 s.d. 2021

(dalam Rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2016	2.110.651.958.000,00	5,3	1.547.888.628.454,00	(17,97)
2.	2017	2.028.612.287.504,00	(4.04)	2.723.260.588.950,00	75,93
3.	2018	2.721.885.858.300,00	34,17	2.754.346.967.999,00	1,14
4.	2019	2.972.795.799.284,00	9,22	2.896.753.806.401,00	5,17
5.	2020	2.799.553.812.051,00	(5,83)	2.849.121.391.956,00	(1,64)
6.	2021	2,738,883,649,862.00	(2.17)	2,861,545,944,030.00	0.44

Dilihat dari sisi target anggaran Pendapatan dari Pendapatan Transfer mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan target dimana pada TA 2016 ke TA 2017 turun sebesar (3,9%), TA 2017 ke TA 2018 naik sebesar 34,17%, TA 2018 ke TA 2019 naik sebesar 9,22%, TA 2019 ke TA 2020 turun sebesar (5,83%) karena *refocusing* anggaran dalam masa pandemi COVID-19, dan pada TA 2020 ke TA 2021 kembali mengalami penurunan sebesar (2.17).

Kemudian dari sisi Realisasi Perkembangan Pendapatan dari Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dan penurunan pada TA 2016 ke TA 2017 naik sebesar 75,93%, TA 2017 ke TA 2018 naik sebesar 1,14%, TA 2018 ke TA 2019 naik sebesar 5,17%, TA 2019 ke TA 2020 turun sebesar (1,64%), dan TA 2020 ke TA 2021 naik sebesar 0.44%.

Grafik 3.2 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2016 s.d. 2021

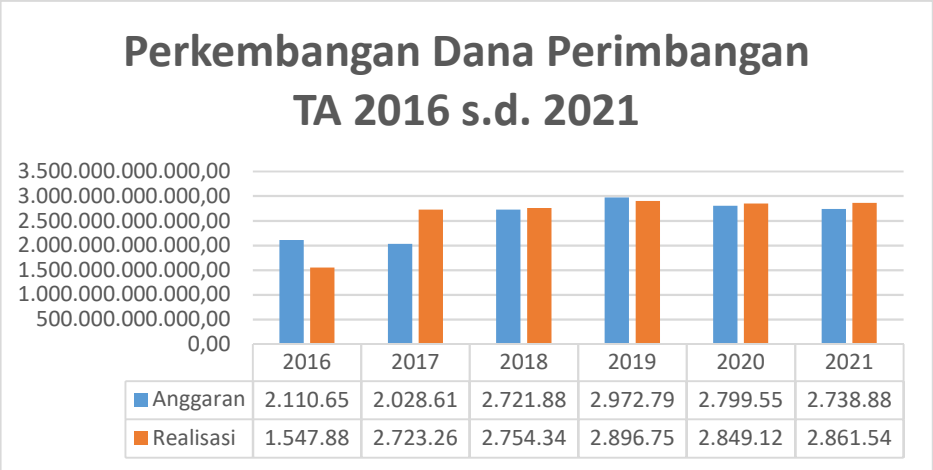

Penerimaan yang ada pada Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, DAU, DAK, Dana Keistimewaan, Dana Penyesuaian dan Pendapatan Hibah. Bila dilihat dari *trend* penerimaan, bahwa Dana Perimbangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi pendapatan.

3. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2021 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3.993.550.960.711,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.576.799.450.498,41 atau 89,56%, sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp416,751,510,212.59. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

   Belanja Operasi TA 2020 dengan target sebesar Rp3,384,013,148,748.60 terealisasi sebesar Rp3,075,441,742,655.52 atau 90,88% terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	(Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai	1.605.159.526.709,19	1.500.168.641.905,80
2.	Belanja Barang dan Jasa	920.945.581.591,41	770.674.374.667,32
3.	Belanja Subsidi	550.000.000,00	550.000.000,00
4.	Belanja Hibah	805.198.505.268,00	777.720.359.692,40
5.	Belanja Bantuan Sosial	52.159.535.180,00	26.328.366.390,00
Jumlah		3,384,013,148,748.60	3,075,441,742,655.52

Pada TA 2021, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp485,312,936,606.40 dan terealisasi sebesar Rp449,690,683,605.89 atau 92,66% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Realisasi)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=4:3
1.	Belanja Modal Tanah	26,954,989,240.00	26,761,778,203.00	99.28
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163,240,417,763.40	142,649,146,950.00	87.39
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137,163,832,613.00	130,883,938,396.24	95.42
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	156,845,995,424.00	148,745,348,444.65	94.84
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,107,701,566.00	650,471,612.00	58.72
6.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah		**485,312,936,606.40**	**449,690,683,605.89**	**92,66**

Untuk Belanja Tidak Terduga tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp124,224,875,356.00 dan terealisasi sebesar Rp51,667,024,237.00 atau 41,59%.

Terakhir adalah Belanja Transfer pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp811,258,648,459.00 terealisasi sebesar Rp811,258,648,459.00 atau 100%.

Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	2	3	4	5=4:3
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	717,538,648,459.00	717,538,648,459.00	100.00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	93,720,000,000.00	93,720,000,000.00	100.00
Jumlah		**811,258,648,459.00**	**811,258,648,459.00**	**100.00**

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp403,055,050,891.00 dapat direalisasikan sebesar Rp390,555,050,891.14 atau 96,90%, realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi Bank Jambi dengan realisasi Rp0,00.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan LRA berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2021 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional (LO) serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau di Kas Bendahara Penerimaan OPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau Bendahara Penerimaan OPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau rekening Bendahara Pengeluaran OPD/SKPKD serta untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima/dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada RKUD. (RKUD) Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto* yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto* dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

c. Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

d. Surplus/Defisit-LRA

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto.

f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

g. Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yang meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

h. Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

i. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

j. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

k. Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedomam Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun kebijakan sebagai berikut.

a. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas *bruto* yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto* dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

b. Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto* yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto* dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam LO. Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam CaLK.

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi:

1) Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;

2) Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;

3) Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 dan perubahanya.

c. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

1) Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2) Terjadinya konsumsi aset.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

d. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah.

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah.

3) Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

4) Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

e. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut:

1) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;

   a) Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK dan apabila pada periode berjalan terdapat perubahan, maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;

   b) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

   Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari RKUD.

   Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

   Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

f. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

g. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD;

2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

h. Akuntansi Pembiayaan Neto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan LRA.

i. Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;

2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola oleh BUD;

3) Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD;

4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan pemegang kas daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada bank;

5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke kas daerah (uang yang harus dipertanggungjawabkan);

6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;

7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan BLUD (Balai Laboratorium Kesehatan, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;

8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK.

j. Akuntansi Piutang

1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;

2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;

3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk piutang pajak/retribusi daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);

4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;

5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut.

   a) Kualitas piutang lancar;

   b) Kualitas piutang kurang lancar;

   c) Kualitas piutang diragukan;

   d) Kualitas piutang macet;

   Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

   Tarif penyisihan piutang sebagimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tersebut dan perubahannya.

k. Akuntansi Persediaan

1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan diakui:

   a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

   b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

3) Persediaan disajikan sebesar:

   a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

   b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

   c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

   Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan secara periodik untuk persediaan alat tulis kantor (ATK) dan bahan kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi).

Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara *First In First Out* (FIFO).

l. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi Peraturan Pemerintah membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi:

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;

Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah Provinsi Jambi untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;

Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya *(Cost Method)*;

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

2.2 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (dana bergulir) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah atau aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir, sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*.

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net reliazable value)* yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongankan kedalam 4 (empat) kategori:

(1) Kualitas Lancar

Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.

(2) Kualitas kurang lancar

Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan tiga tahun.

(3) Kualitas diragukan

Umur dana Bergulir lebih dari tiga tahun sampai dengan lima tahun setelah jatuh tempo.

(4) Kualitas Macet

Umur dana Bergulir lebih dari lima tahun setelah jatuh tempo.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Dana Bergulir:

(1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;

(2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;

(3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;

(4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

m. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan aset tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;

2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:

a) Tanah;

b) Peralatan dan Mesin;

c) Gedung dan Bangunan;

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

e) Aset Tetap Lainnya;

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;

4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;

5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah);

7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan untuk masa manfaat aset sebagaimana dimaksud pada kebijakan akuntansi dapat dilihat;

8) Penyusutan aset tetap menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);

9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;

11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (Rincian ada pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015).

n. Akuntansi Dana Cadangan

1) Dana cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok dana cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;

3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme langsung (LS);

4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika Peraturan Pemerintah telah menyetujui surat perintah pencairan dana (SP2D)-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

o. Akuntansi Aset Lainnya

1) Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap maupun investasi jangka panjang;

2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
   a) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD);
   b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer*/BOT) (Kewenangan PPKD);
   c) Aset lain-lain (Kewenangan PPKD);
   d) Aset Tak Berwujud (Kewenangan Perangkat Daerah);
   e) Aset Lainnya (Kewenangan Perangkat Daerah);
3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2021 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

p. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek
1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
   a) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
   b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo;
   c) Utang Jangka Pendek;
   d) Utang Belanja;
   e) Pendapatan diterima dimuka;
3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
   a) Transaksi dengan pertukaran;
   b) Transaksi tanpa pertukaran;
   c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah;
   d) Kejadian yang diakui pemerintah.

q. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang
1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;

2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

r. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam LRA, LPSAL, pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos dan Pendapatan dan Beban terdapat pada LO, penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam LAK.

LRA menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2021. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021. LO menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan. LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2021, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2021.

Tabel 5.1 Ikhtisar LRA TA 2021 dan Realisasi TA 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pendapatan	4.401.754.558.279,00	4.725.724.403.283,03	107,36	4.400.624.372.119,46
2.	Belanja	3.993.550.960.711,00	3.577.041.039.818,42	89,57	3.697.514.755.982,21
3.	Transfer	811.258.648.459,00	811.258.648.459,00	100,00	732.877.994.916,56
4.	**Surplus/Defisit (1-2-3)**	**(403.055.050.891,00)**	**337.424.715.005,62**	**(83,72)**	**(29.768.378.779,31)**
5.	Penerimaan Pembiayaan	403.055.050.891,00	390.555.050.891,14	96.90	420.323.429.670,45
6.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
7.	**Pembiayaan (5-6)**	403.055.050.891,00	390.555.050.891,14	96,90	**420.323.429.670,45**
8.	**SiLPA (4+7)**	**-**	**727.979.765.896,76**	**-**	**390.555.050.891,14**

5.1.1. Pendapatan – LRA

TA 2021	TA 2020
Rp4.725.724.403.283,03	**Rp4.400.624.372.119,46**

Pendapatan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp4.401.754.558.279,00 dengan realisasi sebesar Rp4.725.724.403.283,03 atau sebesar 107,36% dan naik sebesar Rp. 323.969.845.004,03 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp4.400.624.372.119,46 atau sebesar 7,39%. Pendapatan terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.601.141.999.879,00	1.843.431.186.553,03	115,13	1.535.183.487.238,34
2.	Pendapatan Transfer	2.757.317.396.862,00	2.879.979.691.030,00	104,45	2.862.888.575.956,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	43.295.161.538,00	2.313.525.700,00	5,34	2.552.308.925,12
Jumlah		**4.401.754.558.279,00**	**4.725.724.403.283,03**	**107,36**	**4.400.624.372.119,46**

Berdasarkan Pendapatan TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Pendapatan mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi PAD terhadap jumlah Pendapatan adalah sebesar 39,01%, kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 60,94%, dan kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap jumlah Pendapatan adalah sebesar 0,05%. Hal itu memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi yaitu sebesar 60,94% dari keseluruhan Pendapatan.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

TA 2021	TA 2020
Rp1.843.431.186.553,03	**Rp1.535.183.487.238,34**

PAD dianggarkan sebesar Rp1.601.141.999.879,00 dengan realisasi sebesar Rp1.843.431.186.553,03 atau sebesar 115,13% dan naik sebesar Rp 242.289.186.674,03 atau sebesar 15,78% jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2020 sebesar Rp1.535.183.487.238,34. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Rincian anggaran dan realisasi PAD TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.383.781.959.390,00	1.558.105.416.539,27	112,60	1.292.729.048.514,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	11.384.921.000,00	12.616.308.643,00	110,82	18.593.509.421,41
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.028.487.059,00	28.028.487.058,56	100,00	27.923.864.761,82
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	177.946.632.430,00	244.680.974.312,20	137,50	195.937.064.541,11
Jumlah		**1.601.141.999.879,00**	**1.843.431.186.553,03**	**115,13**	**1.535.183.487.238,34**

Berdasarkan PAD TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan PAD melebihi target yang ditetapkan. Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap jumlah PAD adalah sebesar 84,52%, Pendapatan Retribusi Daerah terhadap jumlah PAD sebesar

0,68%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap jumlah PAD sebesar 1,52%, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap jumlah PAD sebesar 13,27%. Hal itu memperlihatkan Pendapatan Pajak Daerah paling berkontribusi atas keseluruhan PAD.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp1.558.105.416.539,27	**Rp1.292.729.048.514,00**

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Pajak Daerah diatur berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penetapan besaran pendapatan pajak daerah dibuat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2021, kecuali PBBKB dan Pajak Rokok. Berdasarkan ketetapan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berwenang menganggarkan dan merealisasikan seluruh pendapatan pajak daerah. Dalam pelaksanaannya, BPKPD membawahi 10 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk menangani penerimaan PKB, BBNKB, dan PAP yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.383.781.959.390,00 dengan realisasi sebesar Rp1.558.105.416.539,27 atau sebesar 112,60% dan naik sebesar Rp174.323.457.149,27 atau sebesar 13,48% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp1.292.729.048.514,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	481.509.751.333,00	510.370.054.254,00	105,99	465.129.288.875,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	336.419.389.834,00	408.140.058.000,00	121,32	253.462.168.400,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	342.771.613.079,00	400.206.269.286,27	116,76	329.680.392.517,00
4.	Pajak Air Permukaan	1.287.793.064,00	1.504.139.332,00	116,80	1.399.932.053,00
5.	Pajak Rokok	221.793.412.080,00	237.884.895.667,00	107,26	243.057.266.669,00
Jumlah		**1.383.781.959.390,00**	**1.558.105.416.539,27**	**112,60**	**1.292.729.048.514,00**

Berdasarkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Pendapatan Pajak Daerah melebihi target yang ditetapkan. Kontribusi PKB terhadap jumlah Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar 32,76%, BBNKB sebesar 26,19%, PBBKB sebesar 25,69%, PAP sebesar 0,10%, dan Pajak Rokok sebesar 15,27%. Hal itu memperlihatkan PKB paling berkontribusi atas keseluruhan Pendapatan Pajak Daerah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp12.616.308.643,00	**Rp18.593.509.421,41**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp11.384.921.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.616.308.643,00 atau sebesar 110,82% dan turun sebesar Rp5.977.200.778,41 atau sebesar 32,15% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp18.593.509.421,41.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Retribusi Jasa Umum	463.000.000,00	452.470.000,00	97,73	-
2.	Retribusi Jasa Usaha	10.785.671.000,00	12.127.122.883,00	112,44	18.591.509.421,41
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	136.250.000,00	36.715.760,00	26,95	2.000.000,00
Jumlah		**11.384.921.000,00**	**12.616.308.643,00**	**110,82**	**18.593.509.421,41**

Berdasarkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap jumlah Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar 3,59%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 96,12%, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 0,29%. Hal itu memperlihatkan Retribusi Jasa Usaha paling berkontribusi atas keseluruhan Pendapatan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum-LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp452.470.000,00	**Rp0,00**

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum diatur berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribusi Jasa Umum TA 2021 dianggarkan sebesar Rp463.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp452.470.000,00 atau sebesar 97,73% dan naik sebesar Rp452.470.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2020 sebesar Rp0,00.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	442.500.000,00	442.500.000,00	100,00	-
2	Retribusi Pelayanan Pasar	20.500.00,00	9.970.000,00	48,63	-
Jumlah		**463.000.000,00**	**452.470.000,00**	**97,73**	**-**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis TA 2021 dianggarkan sebesar Rp442.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp442.500.000,00 atau sebesar 100,00% dan naik sebesar Rp442.500.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp0,00.

Selanjutnya, Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2021 dianggarkan sebesar Rp20.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.970.000,00 atau sebesar 48,00% dan naik sebesar Rp9.970.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp0,00.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha-LRA

TA 2021	TA 2020
Rp12.127.122.883,00	**Rp18.591.509.421,41**

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha diatur berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp10.785.671.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.127.122.883,00 atau sebesar 112,44% dan turun sebesar Rp6.464.386.538,41 atau sebesar 34,77% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2020 sebesar Rp18.591.509.421,41.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	**1.624.885.000,00**	**2.371.218.000,00**	**145,93**	**1.283.110.000,00**
a.	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	1.624.885.000,00	2.371.218.000,00	145,93	1.283.110.000,00
2.	**Dinas Perkebunan**	**1.476.800.000,00**	**1.566.874.380,00**	**106,10**	**860.684.365,00**

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
a.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa bibit atau benih tanaman	1.476.800.000,00	1.566.874.380,00	106,10	860.684.365,00
3.	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**262.500.000,00**	**262.527.225,00**	**100,01**	**266.914.000,00**
a.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	266.914.000,00
b.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	210.000.000,00	210.027.225,00	100,01	-
4.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.050.000.000,00**	**591.915.787,00**	**56,37**	**416.255.237,00**
a.	UPTD Workshop dan Peralatan : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Alat	577.500.000,00	185.428.640,00	32,11	349.361.336,00
b.	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium	472.500.000,00	406.487.147,00	86,03	66.893.901,00
5.	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**174.000.000,00**	**103.644.000,00**	**59,57**	**58.324.500,00**
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Ruangan	153.500.000,00	90.000.000,00	58,63	58.324.500,00
b.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.500.000,00	13.644.000,00	66,56	-
6.	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan**	**1.524.386.000,00**	**1.781.758.000,00**	**116,88**	**1.495.696.500,00**
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	25.000.000,00	31.963.500,00	127,85	23.207.000,00
b.	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	12.400.000,00	10.250.000,00	82,66	5.000.000,00
c.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	6.850.000,00
d.	Retribusi Tempat Rekreasi	1.321.400.000,00	1.534.583.000,00	116,13	1.248.579.000,00
e.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	156.886.000,00	196.261.500,00	125,10	212.060.500,00
7.	**Dinas Koperasi dan UMKM**	**15.000.000,00**	**10.700.000,00**	**71,33**	**2.500.000,00**
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	15.000.000	10.700.000	71,33	2.500.000,00
8.	**Badan Penghubung Provinsi Jambi**	**420.000.000,00**	**374.200.000,00**	**89,10**	**314.200.000,00**
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	15.000.000,00	15.500.000,00	103,33	11.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
b.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	400.000.000,00	356.800.000,00	89,20	303.200.000,00
c.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000,00	1.900.000,00	38,00	-
9.	**Sekretariat Daerah-Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**-**	**-**	**-**	**11.465.559.286,41**
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	1.221.966.668,00
b.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – BGS PT JSMP	-	-	-	500.000.000,00
c.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – BGS PT SPP	-	-	-	-
d.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – BGS PT EBN	-	-	-	240.000.000,00
e.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – BGS PT JBC	-	-	-	7.868.460.183,41
10.	**Dinas Kehutanan**	**55.000.000,00**	**53.420.000,00**	**97,13**	**39.124.500,00**
a.	Retribusi Tempat Rekreasi	55.000.000,00	53.420.000,00	97,13	39.124.500,00
11.	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur**	**215.000.000,00**	**109.900.000,00**	51,12	**29.335.000,00**
a.	Retribus Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	215.000.000,00	109.900.000,00	51,12	29.335.000,00
12.	**Dinas Kesehatan**	**-**	**-**	**-**	**88.250.000,00**
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	-	-	-	88.250.000,00
13.	**Dinas Pendidikan**	**465.000.000,00**	**9.700.000,00**	**2,09**	**8.800.000,00**
a.	Retribusi pemakaian kekayaan daerah ruangan	450.000.000,00	-	-	0,00
b.	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	15.000.000,00	9.700.000,00	64,67	8.800.000,00
14.	**Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**35.000.000,00**	**46.170.000,00**	**131,91**	**29.170.000,00**
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	25.000.000,00	34.650.000,00	138,60	19.250.000,00
b.	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	10.000.000,00	11.520.000,00	115,20	9.920.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
15.	**Dinas Lingkungan Hidup**	**2.049.600.000,00**	**3.326.308.866,00**	**162,29**	**2.049.648.033,00**
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium	2.049.600.000,00	3.326.308.866,00	162,29	2.049.648.033,00
16.	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**150.000.000,00**	**180.631.500,00**	**120,42**	**183.938.000,00**
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium	150.000.000,00	180.631.500,00	120,42	183.938.000,00
17.	**Badan Keuangan Daerah**	**1.251.500.000,00**	**1.331.937.125,00**	**106,43**	**-**
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Tanah dan Bangunan	1.251.500.000,00	1.331.937.125,00	106,43	-
18.	**Perhubungan**	**17.000.000,00**	**6.218.000,00**	**36,58**	-
a.	Retribusi Pelayanan Pasar Kios	-	-	-	-
b.	Retribusi Pelayanan penyediaan Fasilitas lainnya di lingkunganTerminal	17.000.000,00	6.218.000,00	36,58	-
c.	Retribusi Izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	-	-	-	-
Jumlah (1+2+..16)		**10.785.671.000,00**	**12.127.122.883,00**	**112,44**	**18.591.509.421,41**

Berdasarkan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha di atas diketahui sepuluh Perangkat Daerah mencapai/melebihi target dan delapan Perangkat Daerah tidak mencapai target. Tidak tercapainya target Retribusi Pemakaian Kekayaan yaitu Dinas PUPR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi UKM, Badan Penghubung Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, disebabkan pengaruh pandemi COVID-19.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu-LRA

TA 2021	TA 2020
Rp36.715.760,00	**Rp2.000.000,00**

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi pemberian izin trayek dari Dinas Perhubungan dan retribusi pemberian perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada pemberi tenaga kerja asing dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pelaksanaan Retribusi Perizinan Tertentu diatur berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp136.250.000,00 terealisasi sebesar Rp36.715.760,00 atau sebesar 26,95% dan naik sebesar Rp34.715.760,00 atau 1,735,79% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2020 sebesar Rp2.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Perizinan Tertentu karena penurunan jumlah perpanjangan izin trayek dan IMTA akibat pandemi COVID-19.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp28.028.487.058,56	**Rp27.923.864.761,82**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp28.028.487.059,00 dengan realisasi sebesar Rp28.028.487.058,56 atau sebesar 100,00% dan naik sebesar Rp104.622.296,74 atau sebesar 0,37% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp27.923.864.761,82.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan dan direalisasikan oleh Bakeuda selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pada TA 2021, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba Penyertaan pada :

a. PT Bank Jambi

   Bagian Laba Penyertaan pada PT Bank Jambi berdasarkan Akta Notaris Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 tentang Pemberian Deviden Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebesar Rp27.850.270.213,56.

b. PT Bangun Askrida

   Bagian Laba Penyertaan pada PT Bangun Askrida berdasarkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui surat nomor: 163/VI/2020 (revisi-2) tanggal 25 Juni 2020 dengan deviden yang diperoleh tahun 2020 sebesar Rp178.216.845,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	PT Bank Jambi	27.850.270.214,00	27.850.270.213,56	100,00	27.744.791.377,82
2.	PT Bangun Askrida	178.216.845,00	178.216.845,00	100,00	179.073.384,00
Jumlah		**28.028.487.059,00**	**28.028.487.058,56**	**100,00**	**27.923.864.761,82**

Berdasarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan mencapai target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp244.680.974.312,20	**Rp195.937.064.541,11**

Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp177.946.632.430,00 dengan realisasi sebesar Rp244.680.974.312,20 atau sebesar 137,50% dan naik sebesar Rp 66.734.341.882,20 atau sebesar 24,84% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 sebesar Rp195.937.064.541,11.

Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp244.680.974.312,20 direalisasikan atas Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Penerimaan Lain-lain. Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan pada Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak DIpisahkan antara lain sebagai berikut:

a. Kontribusi atas Bangun Guna Serah (BGS) yang berasal dari PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak Produksi antara Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama Nomor 14 tanggal 17 September 2018 dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel & Resort di Jalan Slamet Riyadi Jambi yang dilegalisasi dengan Akta Notaris Nomor: 28/L/1995/V tanggal 27 Januari 1995 serta Adendum I Perjanjian Kerjasama Kontrak Produksi antara Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama Nomor 14 tanggal 17 September 2018 dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu *Riverview* Hotel & Resort di Jalan Slamet Riyadi Jambi. Pendapatan BGS PT Jambi Sapta Manunggal Pratama tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00.

b. Kontribusi atas Bangun Guna Serah (BGS) yang berasal dari PT Simota Putra Parayudha (SPP) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 1A/KB/CHK/II/2004 dan Nomor: 08/SPP-KB/OHK/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Kerjasama Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi. Pendapatan BGS PT Simota Putra Parayudha tahun 2021 sebesar Rp0,00.

c. Kontribusi atas Bangun Guna Serah (BGS) yang berasal dari PT Putra Kurnia Properti (*Jambi Business Center*/JBC) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 07/PK.GUB/PU/2014 tanggal 27 Juni 1995 tentang Kerjasama Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi. Pendapatan BGS PT Putra Kurnia Properti tahun 2021 sebesar Rp846.168.750,00.

d. Kontribusi atas Bangun Guna Serah (BGS) yang berasal dari PT Era Guna Bumi Nusa (EBN) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 06/PK.GUB/PU/2014 dan Nomor: 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru dengan Pola Bangun Guna Serah dan Adendum Pertama Surat Perjanjian Nomor: 644/09/Setda.PKS/X/2018 dan Nomor: 09/X/EBN/PKS/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru dengan Pola Bangun Guna Serah. Pendapatan BGS PT Era Guna Bumi Nusa tahun 2021 sebesar Rp2.000.000.000.00.

e. Kontribusi atas Pemanfaatan Tanah yang berasal dari PT Angkasa Pura berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 03/PK.GUB/BPKAD/2015, PJJ.04.04/00.04/02/

2015/0012 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pemanfaatan Tanah untuk Pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi dan Adendum II Pemprov Jambi sebesar Rp119.800.500,00.

dengan rincian lebih lanjut pada **Lampiran 2.**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp2.879.979.691.030,00	**Rp2.862.888.575.956,00**

Pendapatan Transfer ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan oleh Bakeuda selaku SKPKD. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya.

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.757.317.396.862,00 dengan realisasi sebesar Rp2.879.979.691.030,00 atau sebesar 104,45% dan naik sebesar Rp17.091.115.074,00 atau sebesar 0,60% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp2.862.888.575.956,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.738.883.649.862,00	2.861.545.944.030,00	104,48	2.849.121.391.956,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID)	18.433.747.000,00	18.433.747.000,00	100,00	13.767.184.000,00
Jumlah		**2.757.317.396.862,00**	**2.879.979.691.030,00**	**104,45**	**2.862.888.575.956,00**

Berdasarkan Pendapatan Transfer TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan melebihi target yang ditetapkan. Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terhadap jumlah Pendapatan Transfer adalah sebesar 99,36%, Dana Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Insentif Daerah sebesar 0,64%.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp2.861.545.944.030,00	**Rp2.849.121.391.956,00**

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp2.738.883.649.862,00 dengan realisasi sebesar Rp2.861.545.944.030,00 atau sebesar 104,48% dan naik sebesar Rp12.424.552.074,00 atau sebesar 0,44% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2020 sebesar Rp2.849.121.391.956,00.

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	193.610.000.035,00	255.597.160.730,00	132,02	152.642.024.299,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	133.739.884.827,00	230.872.791.329,00	172,63	291.967.549.326,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.284.884.150.000,00	1.284.884.150.000,00	100,00	1.288.418.327.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	208.342.253.000,00	194.598.056.982,00	93,40	1.116.093.491.331,00
5.	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	918.307.362.000,00	895.593.784.989,00	97,53	-
Jumlah		**2.738.883.649.862,00**	**2.861.545.944.030,00**	**104,48**	**2.849.121.391.956,00**

Berdasarkan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2021 di atas diketahui kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebesar 8,93%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 8,07%, DAU sebesar 44,90%, DAK Fisik sebesar 6,80%, dan DAK Non Fisik sebesar 31,30%. Hal itu memperlihatkan DAU paling berkontribusi atas keseluruhan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

TA 2021	TA 2020
Rp255.597.160.730,00	**Rp152.642.024.299,00**

Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 dianggarkan sebesar Rp193.610.000.035,00 dengan realisasi sebesar Rp255.597.160.730,00 atau sebesar 132,02% dan naik sebesar Rp102.995.136.431,00 atau sebesar 67,45% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 sebesar Rp152.642.024.299,00.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	139.434.681.035,00	174.766.257.521,00	125,34	89.855.743.520,00
2.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 25/29	53.640.405.000,00	69.977.041.055,00	130,46	62.786.280.779,00
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	534.914.000,00	10.853.862.154,00	-	-
Jumlah		**193.610.000.035,00**	**255.597.160.730,00**	**132,02**	**152.642.024.299,00**

Berdasarkan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan melebihi target yang ditetapkan. Kontribusi PBB terhadap Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebesar 68,38%, PPh sebesar 27,38%, dan Bagi Hasil Cukai Tembakau

sebesar 4,25%. Hal itu memperlihatkan PBB paling berkontribusi atas keseluruhan Dana Bagi Hasil Pajak.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp230.872.791.329,00	**Rp291.967.549.326,00**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 dianggarkan sebesar Rp133.739.884.827,00 dengan realisasi sebesar Rp230.872.791.329,00 atau sebesar 172,63% dan turun sebesar Rp61.094.757.997,00 atau sebesar 20,93% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2020 sebesar Rp291.967.549.326,00.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Provisi Sumber Daya Hutan	7.782.124.147,00	17.741.309.765,00	227,98	4.924.612.145,00
2.	Iuran Tetap (*Land Rent*)	1.601.478.000,00	7.630.334.450,00	476,46	1.617.351.677,00
3.	Pertambangan Minyak Bumi	53.346.145.000,00	58.981.179.714,00	110,56	69.006.145.732,00
4.	Pertambangan Gas Bumi	38.654.640.000,00	102.325.229.694,00	264,72	169.254.868.721,00
5.	Dana Reboisasi	3.165.827.437,00	9.279.173.383,00	293,10	1.060.995.200,00
6.	Mineral dan Batubara-Royalty	29.181.648.000,00	34.892.564.350,00	119,57	41.061.964.731,00
7.	Bagi Hasil Cukai Tembakau	-	-	-	671.054.793,00
8.	Pengusahaan Panas Bumi	-	22.996.400,00	100,00	-
9.	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	8.022.243,00	3.573,00	0,04	-
10.	Bea Pungut - PBB	-	-	-	4.370.556.327,00
Jumlah		**133.739.884.827,00**	**230.872.791.329,00**	**172,63**	**291.967.549.326,00**

Berdasarkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi Provisi Sumber Daya Hutan terhadap Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah sebesar 7,68%, Iuran Tetap (*Land Rent*) sebesar 3,30%, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) sebesar 0,00%, Pertambangan Minyak Bumi sebesar 25,55%, Pertambangan Gas Bumi sebesar 44,32%, Dana Reboisasi sebesar 4,02%, Mineral dan Batubara-Royalty sebesar 15,11%, Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar 0,00%, Pengusahaan Panas Bumi sebesar 0,01%, Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar 0,0000015% dan Bea Pungut - PBB sebesar 0,00% dikarenakan pada LKPD tahun 2021 penerimaan biaya pungut tersebut dianggarkan include kedalam pendapatan bagi hasil pajak (PBB). Hal itu memperlihatkan Pertambangan Gas Bumi paling berkontribusi atas keseluruhan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp1.284.884.150.000,00	**Rp1.288.418.327.000,00**

DAU TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.284.884.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.284.884.150.000,00 atau sebesar 100,00% dan turun sebesar Rp3.534.177.000,00 atau sebesar 0,27% jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2020 sebesar Rp1.288.418.327.000,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp1.090.191.841.971,00	**Rp1.116.093.491.331,00**

DAK TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.126.649.615.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.090.191.841.971,00 atau sebesar 96,76% dan turun sebesar Rp25.901.649.360,00 atau sebesar 2,32% jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2020 sebesar Rp1.116.093.491.331,00.

Rincian anggaran dan realisasi DAK TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	**DAK Fisik Reguler**	**155.357.317.000,00**	**123.814.381.827,00**	**79,70**	**69.190.847.575,00**
a.	DAK Bidang Pendidikan	128.708.293.000,00	97.018.836.686,00	**75,38**	55.075.074.210,00
b.	DAK Bidang Kesehatan	16.214.884.000,00	16.797.286.141,00	**103,59**	14.115.773.365,00
c.	DAK Bidang Pertanian	-	-	-	-
d.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
e.	DAK Bidang Pariwisata	-	-	-	-
f.	DAK Bidang Jalan	10.434.140.000,00	9.998.259.000,00	**95,82**	-
g.	DAK Bidang Irigasi	-	-	-	-
2.	**DAK Fisik Penugasan**	**52.984.936.000,00**	**70.783.675.155,00**	**133,59**	**116.418.890.858,00**
a.	DAK Bidang Pendidikan SMK	-	24.575.500.612,00	-	111.680.409.858,00
b.	DAK Bidang Pertanian	6.183.849.000,00	7.027.004.795,00	113,63	-
c.	DAK Bidang Kesehatan-Penguatan Intervensi *Stunting*	10.982.470.000,00	7.708.335.820,00	70,19	4.738.481.000,00
d.	DAK Bidang Irigasi	-	-	-	-
d.	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	744.409.000,00	-	-	-
e.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	5.179.419.000,00	4.793.278.980,00	92,54	-
f.	DAK Bidang Pariwisata	-	-	-	-
g.	DAK Bidang Kesehatan-RS Rujukan	-	-	-	-
h.	DAK Bidang Irigasi	1.999.901.000,00	1.118.991.948,00	55,95	-

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
i.	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-
j.	DAK Bidang Pasar	-	-		-
k.	DAK Bidang Jalan	27.894.888.000,00	25.560.563.000,00	91,63	
3.	**DAK Fisik Afirmasi**	-	-	**-**	**1.147.513.000,00**
a.	DAK Bidang Pendidikan SMA	-	-	-	1.147.513.000,00
4.	**DAK Non Fisik**	**918.307.362.000,00**	**895.593.784.989,00**	**97,53**	**929.336.239.898,00**
a.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	710.312.680.000,00	698.345.323.000,00	98,32	738.270.510.000,00
b.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi	4.140.000.000,00	2.470.000.000,00	59,66	-
c.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja	8.760.000.000,00	4.930.000.000,00	56,28	-
d.	Tunjangan Profesi Guru	179.011.897.000,00	179.011.897.000,00	100,00	167.706.616.000,00
e.	Tunjangan Penghasilan Guru	1.194.000.000,00	358.200.000,00	30,00	3.750.250.000,00
f.	Tunjangan Khusus Guru	308.679.000,00	92.604.000,00	30,00	668.319.000,00
g.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	5.320.529.000,00	2.031.127.371,00	38,18	11.830.025.019,00
h.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	2.859.547.000,00	2.310.120.000,00	80,79	2.397.869.600,00
i.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.550.030.000,00	1.192.079.868,00	76,91	239.305.779,00
j.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	1.750.000.000,00	1.562.085.750,00	89,26	4.473.344.500,00
k.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya- Museum	3.100.000.000,00	2.425.000.000,00	78,23	-
l.	Fasilitas Penanaman Modal	-	507.467.000,00	-	-
m.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	357.881.000,00	98,32	-
Jumlah (1+2+3+4)		**1.126.649.615.000,00**	**1.090.191.841.971,00**	**96,76**	**1.116.093.491.331,00**

Berdasarkan DAK TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi DAK Fisik Reguler terhadap DAK adalah sebesar 11,36%, DAK Fisik Penugasan sebesar 6,49%, DAK Fisik Afirmasi sebesar 0,00%, dan DAK Non Fisik sebesar 82,15%. Hal itu memperlihatkan DAK Non Fisik paling berkontribusi atas keseluruhan DAK.

		TA 2021	TA 2020
5.1.1.2.2.	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Insentif Daerah (DID) - LRA**	**Rp18.433.747.000,00**	**Rp13.767.184.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yaitu Dana Insentif Daerah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp18.433.747.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.433.747.000,00 atau sebesar 100% dan naik sebesar Rp4.666.563.000,00 atau sebesar 33,90% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2020 sebesar Rp13.767.184.000,00.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LRA	TA 2021	TA 2020
	Rp2.313.525.700,00	**Rp2.552.308.925,12**

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp43.295.161.538,00 dengan realisasi sebesar Rp2.313.525.700,00 atau sebesar 5,34% dan turun sebesar Rp238.783.225,12 atau sebesar 9,36% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2020 sebesar Rp2.552.308.925,12.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	-	-	-
2.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.623.600.000,00	1.608.000.000,00	99,04	1.608.000.000,00
3.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	-	-	-	21.000.000,00
4.	Pendapatan Hibah dari Perseorangan	-	-	-	923.308.925,12
5.	Pendapatan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	41.671.561.538,00	705.525.700,00	1,69	-
Jumlah		**43.295.161.538,00**	**2.313.525.700,00**	**5,34%**	**2.552.308.925,12**

Realisasi Pendapatan Hibah tersebut bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan jumlah Rp1.608.000.000,00 dan Pendapatan hibah dari pendapatan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp705.525.700,00 merupakan hibah dana BOS.

Berdasarkan Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 di atas diketahui bahwa target yang ditetapkan belum terpenuhi. Kontribusi Pendapatan Hibah dari Pemerintah atas Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebesar 0%, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar 99,04%, Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat sebesar 0,00%, dan Pendapatan Hibah dari Perseorangan sebesar 0,00%, pendapatan hibah dari pendapatan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 1,69%. Hal itu memperlihatkan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri paling berkontribusi atas keseluruhan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

5.1.2. Belanja

TA 2021	TA 2020
Rp3.577.041.039.818,42	**Rp3.697.514.755.982,21**

Belanja TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 3.993.550.960.711,00 dengan realisasi sebesar Rp3.577.041.039.818,42 atau sebesar 89,57% dan turun sebesar Rp120.473.716.163,79 atau sebesar 3,25% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2020 sebesar Rp3.697.514.755.982,21. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Operasi	3.384.013.148.748,60	3.075.441.762.655,52	90,88	2.902.115.287.976,84
2.	Belanja Modal	485.312.936.606,40	449.690.683.605,89	92,66	642.695.707.788,37
3.	Belanja Tidak Terduga	124.224.875.356,00	51.908.593.557,01	41,79	152.703.760.217,00
Jumlah		**3.993.550.960.711,00**	**3.577.041.039.818,42**	**89,57**	**3.697.514.755.982,21**

Berdasarkan Belanja TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Belanja tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase Belanja Operasi terhadap jumlah Belanja adalah sebesar 85,98%, Belanja Modal sebesar 12,57%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 1,45%. Hal itu memperlihatkan biaya operasional Pemerintah Provinsi Jambi cukup tinggi yaitu sebesar 85,98% dari keseluruhan Belanja.

5.1.2.1 Belanja Operasi

TA 2021	TA 2020
Rp3.075.441.762.655,52	**Rp2.902.115.287.976,84**

Belanja Operasi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp3.384.013.148.748,60 dengan realisasi sebesar Rp3.075.441.762.655,52 atau sebesar 90,88%, naik sebesar Rp 308.571.386.093,08 atau sebesar 5,97% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2020 sebesar Rp2.902.115.287.976,84. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Pegawai	1.605.159.526.709,19	1.500.168.641.905,80	93,46	1.391.317.474.093,29
2.	Belanja Barang dan Jasa	920.945.581.591,41	770.674.394.667,32	83,68	743.288.221.804,55
3.	Subsidi	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00
4.	Hibah	805.198.505.268,00	777.720.359.692,40	96,59	766.631.092.079,00
5.	Bantuan Sosial	52.159.535.180,00	26.328.366.390,00	50,48	328.500.000,00
Jumlah		**3.384.013.148.748,60**	**3.075.441.762.655,52**	**90,88**	**2.902.115.287.976,84**

Berdasarkan Belanja Operasi TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase Belanja Pegawai atas Belanja Operasi adalah sebesar 48,78%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 25,06%, Subsidi sebesar 0,02%, Hibah sebesar 25,29%, dan Bantuan Sosial sebesar 0,86%. Hal itu memperlihatkan Belanja Pegawai paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Operasi dan Belanja Hibah hampir sama pengaruhnya dengan Belanja Barang dan Jasa.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	TA 2021	TA 2020
	Rp1.500.168.641.905,80	**Rp1.391.317.474.093,29**

Belanja Pegawai TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.605.159.526.709,19 dengan realisasi sebesar Rp1.500.168.641.905,80 atau sebesar 93,46% dan naik sebesar Rp114.138.463.361,51 atau sebesar 7,26% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp1.391.317.474.093,29.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Objek TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	823.321.483.518,15	758.965.640.075,00	92.18	773.736.403.189,29
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	350.769.847.648,04	330.156.671.471,00	94.12	371.643.046.034,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, KDH/WKDH	5.635.569.000,00	5.387.766.640,00	95.60	11.898.650.000,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.128.290.271,00	34.140.372.002,00	85.08	-
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	428.051.531,00	107.136.579,00	25.03	-
6.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	339.229.937.342,31	332.933.184.769,80	98.14	-
7.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-
8.	Belanja Pegawai BLUD	45.646.347.398,69	38.477.870.369,00	84.29	57.920.072.484,00
9.	Tunjangan Profesi Guru	-	-	-	169.952.745.386,00
10.	Tunjangan Penghasilan Guru	-	-	-	5.499.500.000,00
11.	Tunjangan Khusus Guru	-	-	-	667.057.000,00
Jumlah		**1.605.159.526.709,19**	**1.500.168.641.905,80**	**93.46**	**1.391.317.474.093,29**

Berdasarkan Belanja Pegawai TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase Belanja Gaji dan Tunjangan atas Belanja Pegawai adalah sebesar 50,59%, Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar 22%, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, KDH/WKDH sebesar 0,35%, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD adalah 2,28%, Belanja Gaji dan Tunjangan

KDH/WKDH adalah sebesar 0,01%, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah sebesar 22,19%, Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 0%, Belanja Pegawai BLUD sebesar 2,56%, Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru tidak terdapat realisasi dikarenakan ketiga belanja tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 kodefikasi anggarannya pada belanja DAK Non Fisik. Hal itu memperlihatkan Gaji dan Tunjangan paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Pegawai.

Rincian belanja pegawai per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

TA 2021	TA 2020
Rp770.674.394.667,32	**Rp743.288.221.804,55**

Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dianggarkan sebesar Rp920.945.581.591,41 dengan realisasi sebesar Rp770.674.394.667,32 atau sebesar 119,50% dan naik sebesar Rp 150.271.186.924,09 atau sebesar 19,50% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp743.288.221.804,55.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	236.206.747.192,09	198.612.428.496,94	84,08	32.921.372.514,80
2.	Belanja Bahan/Material	49.128.178,00	48.890.138,00	99,52	52.237.604.572,60
3.	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	91.244.841.357,16
4.	Belanja Premi Asuransi	244.753.264.807,06	214.013.795.867,00	87,44	29.397.191.769,20
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	20.376.725.198,00
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	12.379.723.280,00
7.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-	2.461.887.907,00
8.	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
9.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	3.388.096.000,00
10.	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	31.515.334.308,00
11.	Belanja Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	152.530.000,00
12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	3.668.103.300,00
13.	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	1.066.247.725,00
14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	-	-	-	486.846.850,00
15.	Belanja Perjalanan Dinas	191.920.390.075,25	142.493.908.520,49	74,25	113.634.674.553,50
16.	Belanja Pemeliharaan	95.333.614.449,01	88.790.802.506,98	93,14	24.530.181.767,80
17.	Belanja Jasa Konsultasi (Konstruksi dan Non	9.290.783.841,00	7.709.606.469,00	82,98	7.922.879.290,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
	Konstruksi)				
18.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	370.000.000,00
19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.253.059.773,00	5.130.420.608,00	82,05	3.619.946.077,00
20.	Belanja Honorarium PNS	-	-	-	16.801.231.494,00
21.	Belanja Honorarium Non PNS	-	-	-	120.271.362.885,00
22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	-	-	-	99.853.003.758,44
23.	Belanja Beasiswa Pendidikan	-	-	-	-
24.	Belanja Perlengkapan/ Peralatan Kantor	-	-	-	364.138.180,00
25.	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimtek	-	-	-	368.000.000,00
26.	Belanja Jasa Iuran	-	-	-	108.500.000,00
27.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.804.739.870,00	27.245.649.545,00	59,48	49.202.726.064,00
28.	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.754.707.530,00	12.350.114.288,00	89,79	1.694.694.000,00
29.	Belanja Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.100.016.000,00	771.364.000,00	70,12	23.127.319.153,05
30.	Belanja Perlengkapan/ Peralatan Olahraga	-	-	-	123.059.800,00
31.	Belanja Barang Bekas Dipakai	12.440.000,00	3.425.000,00	27,53	-
32.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	58.566.446.800,00	57.437.707.481,00	98,07	-
33.	Belanja Sewa Tanah	482.200.000,00	482.200.000,00	100,00	-
34.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.856.155.190,00	1.591.288.274,00	85,73	-
35.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.076.362.686,00	3.819.207.243,00	93,69	-
36.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.500.000,00	-	-	-
37.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	706.010.000,00	703.412.500,00	99,63	-
38.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	10.596.015.200,00	9.290.173.729,91	87,68	-
Jumlah		**920.945.581.591,41**	**770.674.394.667,32**	**83.68**	**743.288.221.804,55**

Berdasarkan Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dianggarkan sebesar Rp920.945.581.591,41 dengan realisasi sebesar Rp770.674.374.667,32 atau sebesar 83,68%. diketahui bahwa secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan.

Empat kegiatan yang paling besar pengaruhnya atas Belanja Barang dan Jasa adalah Belanja Bahan Pakai Habis sebesar 25,77%, persentase Premi Asuransi sebesar 27,77%, Belanja Perjalanan Dinas sebesar 18,49%, dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

sebesar 7,45%. Hal itu memperlihatkan Belanja Premi Asuransi paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Barang dan Jasa. Belanja yang tidak ada anggaran dan realisasinya TA 2021 dikarenakan adanya perubahan kodefikasi rekening belanja sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.

Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp770.674.374.667,32 termasuk direalisasikan atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp27.245.649.545,00 dengan rincian lebih lanjut pada **Lampiran 4.**

5.1.2.1.3 Subsidi

TA 2021	TA 2020
Rp550.000.000,00	**Rp550.000.000,00**

Subsidi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp550.000.000,00 atau 100% sama dengan realisasi Subsidi tahun 2020 sebesar Rp550.000.000,00.

5.1.2.1.4 Hibah

TA 2021	TA 2020
Rp777.720.359.692,40	**Rp766.631.092.079,00**

Belanja Hibah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp805.198.505.268,00 dengan realisasi sebesar Rp777.720.359.692,40 atau sebesar 96,59% dan naik sebesar Rp11.089.267.613,40 atau sebesar 1,42% jika dibandingkan dengan realisasi Hibah TA 2020 sebesar Rp766.631.092.079,00.

Rincian anggaran dan realisasi Hibah TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Hibah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	12.131.977.894,00	11.371.906.769,00	93.73	201.116.052.549,00
2.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	11.269.499.976,00	11.095.166.619,40	98.45	600.000.000,00
3.	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	53.628.168.188,00	44.268.610.889,00	82.55	1.724.579.530,00
4.	Belanja Hibah Dana BOS	726.064.089.210,00	708.879.905.415,00	97.63	563.190.460.000,00
5.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.104.770.000,00	2.104.770.000,00	100,00	-
Jumlah		**805.198.505.268,00**	**777.720.359.692,40**	**96,59**	**766.631.092.079,00**

Berdasarkan Hibah TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun realisasi terbesar pada Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terealisasi sebesar 100%.

Terhadap Belanja Hibah yang telah disalurkan diatas sampai dengan akhir Desember 2021 telah diterima Pengembalian pada Kas Daerah atas sisa Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp759.331.723,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pengembalian dana hibah Polda untuk kegiatan pengamanan Pilkada sebesar Rp515.700.000,00;
2. Pengembalian belanja Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebesar Rp18.571.049,00;
3. Pengembalian Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp8.133.979,00;
4. Pengembalian Hibah Uang Kepada Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Jambi sebesar Rp153.053.689,00;
5. Pengembalian Hibah Lembaga Adat Melayu Jambi sebesar Rp11.664.690,00;
6. Pengembalian Hibah Uang PW Nahdatul Ulama Provinsi Jambi sebesar Rp6.958.491;
7. Pengembalian Hibah Uang PW BKMT Provinsi Jambi sebesar Rp7.422.630;
8. Pengembalian Dana Hibah PMI Provinsi Jambi Rp37.827.195,00

5.1.2.1.5 Bantuan Sosial

TA 2021	TA 2020
Rp26.328.366.390,00	**Rp328.500.000,00**

Bantuan Sosial TA 2021 dianggarkan sebesar Rp52.159.535.180,00 dengan realisasi sebesar Rp26.328.366.390,00 atau 50,48% naik sebesar Rp25.999.866.390,00 atau 7.914,72% jika dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp328.500.000,00.

Bantuan Sosial uang yang diberikan kepada Individu sebesar Rp942.726.000,00, bantuan sosial uang kepada keluarga sebesar Rp16.306.500.000,00, bantuan sosial barang kepada keluarga sebesar Rp6.230.002.890,00, bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat sebesar Rp960.000.000,00, bantuan sosial barang kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1.889.137.500,00.

5.1.2.2. Belanja Modal

TA 2021	TA 2020
Rp449.690.683.605,89	**Rp642.695.707.788,37**

Belanja Modal TA 2021 dianggarkan sebesar Rp485.312.936.606,40 dengan realisasi sebesar Rp449.690.683.605,89 atau sebesar 92,66% dan turun sebesar Rp193.005.024.182,48 atau sebesar 42,92% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp642.695.707.788,37. Belanja Modal terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Belanja Tanah	26.954.989.240,00	26.761.778.203,00	99,28	6.220.174.625,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	163.240.417.763,40	142.649.146.950,00	87,39	118.488.626.018,00
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	137.163.832.613,00	130.883.938.396,24	95,42	156.737.111.509,42
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	156.845.995.424,00	148.745.348.444,65	94,84	293.376.749.341,70
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.107.701.566,00	650.471.612,00	58,72	67.827.096.294,25
6.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	45.950.000,00
Jumlah		**485.312.936.606,40**	**449.690.683.605,89**	**92,66**	**642.695.707.788,37**

Berdasarkan Belanja Modal TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan, akumulasi realisasi TA 2021 lebih sedikit dari anggaran sebesar Rp35.622.253.000,71, dengan total anggaran Belanja Modal TA 2021 adalah sebesar Rp485.312.936.606,40 dan realisasi sebesar Rp449.690.683.605,89 atau 92,66% dari anggaran.

Persentase Belanja Tanah atas Belanja Modal adalah sebesar 5,95%, Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 31,72%, Belanja Bangunan dan Gedung sebesar 29,11%, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 33,08%, Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 0,14%, Belanja Aset Lainnya sebesar 0,00%. Hal itu memperlihatkan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Modal. Belanja Modal sebesar Rp449.690.683.605,89.

Rincian belanja modal per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

TA 2021	TA 2020
Rp51.908.593.557,01	**Rp152.703.760.217,00**

Belanja Tidak Terduga TA 2021 dianggarkan sebesar Rp124.224.875.356,00 dengan realisasi sebesar Rp51.908.593.557,01 atau sebesar 41,79% dan turun sebesar Rp 72.316.281.798,99 atau 66,01% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 sebesar Rp152.703.760.217,00.

Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.21 Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021

No.	Uraian Belanja Tidak Terduga	Nilai (Rp)
1.	BTT Penanganan Pandemi COVID-19 ke Dinkes	19.830.701.427,00
2.	BTT Penanganan Pandemi COVID-19 ke Satpol PP	654.288.616,00
3.	BTT Penanganan Pandemi COVID-19 ke RSUD Raden Mattaher	27.813.360.483,00
4.	BTT Penanganan Pandemi COVID-19 ke Dinsosdukcapil	367.719.930,00
5.	BTT Penanganan Pandemi COVID-19 ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.987.023.100,00

No.	Uraian Belanja Tidak Terduga	Nilai (Rp)
6.	BTT – Kelebihan Penyetoran Pajak	13.930.681,00
7.	Jurnal Koreksi BPK – Terdapat dua kali pencatatan buku kas di Kas Daerah atas Belanja Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan (dicatat di BTT BPKPD)	211.569.320,01
8.	Jurnal Koreksi BPK – Terdapat dua kali pencatatan buku kas di Kas Daerah atas pengembalian Belanja pada Dinas Kesehatan	30.000.000,00
Jumlah		**51.908.593.557,01**

Belanja Tidak Terduga turun secara signifikan dalam rangka pasca percepatan penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp101.036.735.980,00 atau 66,01%.

5.1.3. Transfer

TA 2021	TA 2020
Rp811.258.648.459,00	**Rp732.877.994.916,56**

Transfer TA 2021 dianggarkan sebesar Rp811.258.648.459,00 dengan realisasi sebesar Rp811.258.648.459,00 atau sebesar 100% dan naik sebesar Rp78.380.653.542,44 atau sebesar 10,69% dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2020 sebesar Rp732.877.994.916,56.

Belanja Transfer tersebut dianggarkan untuk membiayai pengeluaran dana bagi hasil pajak Provinsi Jambi sebagai wujud pelaksanaan dari kebijakan pemerintah pusat, dan bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota serta bantuan keuangan untuk desa/kelurahan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	717.538.648.459,00	717.538.648.459,00	100,00	631.105.361.716,56
2.	Transfer Bantuan Keuangan	93.720.000.000,00	93.720.000.000,00	100,00	101.772.633.200,00
Jumlah		**811.258.648.459,00**	**811.258.648.459,00**	**100**	**732.877.994.916,56**

Berdasarkan Transfer TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan mencapai target yang ditetapkan. Persentase Transfer/Bagi Hasil Pendapatan atas Transfer adalah sebesar 88,45% dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 11,55%. Hal itu memperlihatkan Transfer/Bagi Hasil Pendapatan paling berpengaruh atas keseluruhan Transfer.

5.1.3.1 Transfer/Bagi Hasil Pendapatan

TA 2021	TA 2020
Rp717.538.648.459,00	**Rp631.105.361.716,56**

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota TA 2021 dianggarkan sebesar Rp717.538.648.459,00 dengan realisasi sebesar Rp717.538.648.459,00 atau 100% dan naik sebesar Rp86.433.286.742,44 atau sebesar 13,70% jika dibandingkan dengan Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota TA 2020 sebesar Rp631.105.361.716,56.

Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Kota Jambi	131.885.386.955,00	131.885.386.955,00	100,00	115.018.774.783,90
2.	Kabupaten Batang Hari	61.064.411.865,00	61.064.411.865,00	100,00	54.127.432.490,05
3.	Kabupaten Muaro Jambi	67.471.810.603,00	67.471.810.603,00	100,00	59.401.029.120,49
4.	Kabupaten Bungo	69.656.267.314,00	69.656.267.314,00	100,00	61.428.606.711,78
5.	Kabupaten Tebo	60.088.892.151,00	60.088.892.151,00	100,00	52.721.073.609,35
6.	Kabupaten Kerinci	49.566.581.238,00	49.566.581.238,00	100,00	43.562.442.236,77
7.	Kabupaten Merangin	64.449.995.239,00	64.449.995.239,00	100,00	56.365.188.601,04
8.	Kabupaten Sarolangun	58.622.526.037,00	58.622.526.037,00	100,00	51.525.666.535,34
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	61.074.310.323,00	61.074.310.323,00	100,00	53.850.760.594,11
10.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	49.380.859.898,00	49.380.859.898,00	100,00	44.911.406.078,16
11.	Kota Sungai Penuh	44.277.606.836,00	44.277.606.836,00	100,00	38.192.980.955,57
Jumlah		**717.538.648.459,00**	**717.538.648.459,00**	**100,00**	**631.105.361.716,56**

Berdasarkan Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan. Tiga pemerintah kabupaten/kota teratas yang memperoleh bagi hasil pajak yaitu Kota Jambi sebesar 18,38%, Kabupaten Bungo sebesar 9,71%, dan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 9,40%. Hal itu memperlihatkan Kota Jambi paling berpengaruh atas keseluruhan Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota.

5.1.3.2 Transfer/Bantuan Keuangan

TA 2021	TA 2020
Rp93.720.000.000,00	**Rp101.772.633.200,00**

Transfer/Bantuan Keuangan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp93.720.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp93.720.000.000,00 atau sebesar 100% dan turun sebesar Rp8.052.633.200,00 atau sebesar 7,91% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer/Bantuan Keuangan TA 2020 sebesar Rp101.772.633.200,00.

Rincian anggaran dan realisasi Transfer/Bantuan Keuangan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Transfer/Bantuan Keuangan TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1 .	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	93.720.000.000,00	93.720.000.000,00	100,00	99.800.420.000,00
2.	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	1.972.213.200,00
Jumlah		**93.720.000.000,00**	**93.720.000.000,00**	**100,00**	**101.772.633.200,00**

Berdasarkan Transfer/Bantuan Keuangan TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota atas Bantuan Keuangan adalah sebesar 100,00%. Untuk tahun 2021 Belanja Hibah dianggarkan pada Belanja Hibah kepada Partai Politik dianggarkan pada Belanja Hibah.

5.1.3.2.1 Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	TA 2021	TA 2020
	Rp93.720.000.000,00	**Rp99.800.420.000,00**

Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota TA 2021 dianggarkan sebesar Rp93.720.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp93.720.000.000,00 atau sebesar 100% dan turun sebesar Rp6.080.420.000,00 atau sebesar 6,09% jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota TA 2020 sebesar Rp99.800.420.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Kota Jambi	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	100,00	3.720.000.000,00
2.	Kabupaten Muaro Jambi	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	100,00	9.300.000.000,00
3.	Kabupaten Batang Hari	7.440.000.000,00	7.440.000.000,00	100,00	7.440.000.000,00
4.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5.580.000.000,00	5.580.000.000,00	100,00	5.580.000.000,00
5.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00	8.040.000.000,00
6.	Kabupaten Bungo	9.180.000.000,00	9.180.000.000,00	100,00	6.720.000.000,00
7.	Kabupaten Tebo	6.720.000.000,00	6.720.000.000,00	100,00	13.380.000.000,00
8.	Kabupaten Merangin	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00	100,00	12.900.000.000,00
9.	Kabupaten Sarolangun	9.480.000.000,00	9.480.000.000,00	100,00	9.480.000.000,00
10.	Kabupaten Kerinci	17.220.000.000,00	17.220.000.000,00	100,00	19.100.420.000,00
11.	Kabupaten Sungai Penuh	4.140.000.000,00	4.140.000.000,00	100,00	4.140.000.000,00
Jumlah		**93.720.000.000,00**	**93.720.000.000,00**	**100,00**	**99.800.420.000,00**

Berdasarkan Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan mencapai target yang ditetapkan. Tiga pemerintah kabupaten/kota teratas yang memperoleh bantuan keuangan bersifat khusus yaitu Kabupaten Kerinci sebesar 18,37%, Kabupaten Merangin sebesar 13,76%, dan Kabupaten Sarolangun sebesar 10,12%. Hal itu memperlihatkan Kabupaten Kerinci paling berpengaruh atas keseluruhan Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.

5.1.3.2.2 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	TA 2021	TA 2020
	Rp0,00	**Rp1.972.213.200,00**

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2021 dianggarkan pada anggaran belanja hibah tahun 2021.

5.1.4 Pembiayaan	TA 2021	TA 2020
	Rp390.555.050.891,14	**Rp420.323.429.670,45**

Pembiayaan (*netto*) TA 2021 dianggarkan sebesar Rp403.055.050.891,00 dengan realisasi sebesar Rp390.555.050.891,14 atau sebesar 96,90% dan turun sebesar Rp29.768.338.779,31 atau sebesar 7,08% dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp420.323.429.670,45. Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Rincian anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1	Penerimaan Pembiayaan	403.055.050.891,00	390.555.050.891,14	96.90	-
2	Penggunaan SiLPA TA 2020	-	-	-	420.323.429.670,45
3	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
4	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
5	**Pembiayaan (*netto*)**	**403.055.050.891,00**	**390.555.050.891,14**	**96.90**	**420.323.429.670,45**

Berdasarkan Pembiayaan TA 2021 di atas diketahui bahwa penggunaan SiLPA TA 2020 paling berpengaruh atas keseluruhan Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	TA 2021	TA 2020
	Rp390.555.050.891,14	**Rp420.323.429.670,45**

Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp403.055.050.891,00 dengan realisasi sebesar Rp390.555.050.891,14 atau sebesar 96,90% dan turun sebesar Rp29.768.378.779,31 atau sebesar 7,08 % jika dibandingkan dengan realisasi

Penerimaan Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp420.323.429.670,45. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Penggunaan SiLPA TA 2020.

Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	173.763.575.387,98	224.308.611.936,68	97,13	9.997.964.454,32
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	2.820.480.256,93
3.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	120.000.000,00
4.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	394.173.871.495,13
5.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-	13.211.113.464,07
6.	Sisa Belanja Dana Transfer	-	1.334.434.913,72	-	-
7.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	-	-	-	-
8.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	41.500.000.000,00	-	-	-
9.	Penghematan Belanja	187.791.475.503,02	121.661.362.175,92	82,25	
10.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	10.667.433.225,23	-	-
11.	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	-	32.583.208.639,59	-	-
Jumlah		**403.055.050.891,00**	**390.555.050.891,14**	**96,90**	**420.323.429.670,45**

Berdasarkan Penerimaan Pembiayaan TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase Pelampauan Penerimaan PAD atas keseluruhan Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar 129,09%, Sisa Penghematan Belanja sebesar 64,79%. Hal itu memperlihatkan Pelampauan Penerimaan PAD paling berpengaruh atas keseluruhan Penerimaan Pembiayaan.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

TA 2021	TA 2020
Rp0,00	**Rp0,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dan sama dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp0,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan

	TA 2021	TA 2020
Anggaran	**Rp727.979.765.896,76**	**Rp390.555.050.891,14**

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2021 adalah sebesar Rp727.979.765.896,76 naik sebesar Rp337.424.715.005,62 atau sebesar 86,40% jika dibandingkan dengan dengan SiLPA TA 2020 sebesar Rp390.555.050.891,14 Rincian dapat dilihat pada Tabel 5.29 berikut:

Tabel 5.28 Realisasi Komponen SiLPA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi	Realisasi TA 2020	Naik/(Turun)	
						Jumlah	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Pendapatan-LRA**	**4.401.754.558.279,00**	**4.725.724.403.283,03**	**107,36**	**4.400.624.372.119,46**	**325.100.031.163,57**	**7,38%**
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	1.601.141.999.879,00	1.843.431.186.553,03	115.13	1.535.183.487.238,34	308.247.699.314,69	20,08
1.2	Pendapatan Transfer-LRA	2.757.317.396.862,00	2.879.979.691.030,00	104.45	2.862.888.575.956,00	17.091.115.074,00	0,60
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	43.295.161.538,00	2.313.525.700,00	5.34	2.552.308.925,12	238.783.225,12	9,36
2	**Belanja dan Transfer-LRA**	**4.804.809.609.170,00**	**4.388.299.688.277,42**	**91,33**	**4.430.392.750.898,77**	**(42.093.062.621,35)**	**(0,95)**
2.1	Belanja Operasi	3.384.013.148.748,60	3.075.441.762.655,52	90.88	2.902.115.287.976,84	173.326.454.678,68	5,97
2.2	Belanja Modal	485.312.936.606,40	449.690.683.605,89	92.66	642.695.707.788,37	(193.005.024.182,48)	(30,03)
2.3	Belanja Tidak Terduga	124.224.875.356,00	51.908.593.557,01	41.79	152.703.760.217,00	(100.795.166.659,99)	66,01
2.4	Transfer	811.258.648.459,00	811.258.648.459,00	100	732.877.994.916,56	78.380.653.542,44	10,69
3	**Surplus/(Defisit)**	**(403.055.050.891,00)**	**337.424.715.005,62**	**(83.72)**	**(29.766.060.467,98)**	**367.365.770.150,02**	**1234,18**
4	**Pembiayaan Neto**	**403.055.050.891,00**	**390.555.050.891,14**	**96,90**	**420.323.429.670,45**	**29.768.378.779,31**	7,08
4.1	Penerimaan Pembiayaan	403.055.050.891,00	390.555.050.891,14	96.90	420.323.429.670,45	29.768.378.779,31	7,08
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
5	**SILPA**	**-**	**727.979.765.896,76**	**-**	**390.555.050.891,14**	**337.424.715.005,62**	**86,40**

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan yang merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	TA 2021	TA 2020
	Rp390.555.050.891,14	**Rp420.323.429.670,45**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, nilai per 1 Januari 2021 sebesar Rp390.555.050.891,14, turun sebesar Rp29.768.378.779,31 atau sebesar 7,08% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp420.323.429.670,45

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai	TA 2021	TA 2020
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**Rp390.555.050.891,14**	**Rp420.323.429.670,45**

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp390.555.050.891,14, turun sebesar Rp29.768.378.779,31 atau sebesar 7,08% bila dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp420.323.429.670,45.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	TA 2021	TA 2020
Anggaran (SILPA/SIKPA)	**Rp727.979.765.896,76**	**Rp390.555.050.891,14**

SILPA/SIKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2021 sebesar Rp727.979.765.896,76 turun sebesar Rp337.424.715.005,62 atau sebesar 86,40% bila dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp390.555.050.891,14.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan	TA 2021	TA 2020
Tahun Sebelumnya	**0,00**	**0,00**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya , tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	TA 2021	TA 2020
	Rp727.979.765.896,76	**Rp390.555.050.891,14**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 sebesar Rp727.979.765.896,76 naik sebesar Rp337.424.715.005,62 atau sebesar 86,40% bila dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp390.555.050.891,14.

SAL akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp727.979.765.896,76 terdiri dari:

1) SAL pada Rekening Kas di Kas Daerah sebesar Rp678.166.989.766,49
2) SAL pada Rekening Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp600.000,00

3) SAL pada Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp671.194.050,00

4) SAL pada Rekening Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp48.718.629.584,87, dan

5) SAL pada Rekening Bendahara Dana BOS sebesar Rp422.352.495,40.

SAL akhir per 31 Desember 2021 tidak termasuk Kas Lainnya sebesar Rp42.782.662.697,00

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021.

Tabel 5.29 Ikhtisar Neraca per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	31 Desember TA 2021 (Rp)	31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Aset	9.529.828.339.382,78	9.058.798.239.794,03	471.030.099.588,75	5,20
2.	Kewajiban	381.763.642.325,37	389.279.172.269,92	(7.515.529.944,55)	(1,93)
3.	Ekuitas	9.148.064.697.057,41	8.669.519.067.524,11	478.545.629.533,30	5,52

5.3.1. Aset

TA 2021	TA 2020
Rp9.529.828.339.382,78	**Rp9.058.798.239.794,03**

Aset per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp 9.529.828.339.382,78 naik sebesar Rp471.030.099.588,75 atau sebesar 5,20% dibandingkan dengan Aset per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp9.058.798.239.794,03. Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Rincian Aset per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.30 Aset per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Aset Lancar	1.145.898.246.996,59	765.755.995.536,76	380.142.251.459,83	49,64
2.	Investasi Jangka Panjang	450.607.618.002,56	413.360.381.436,97	37.247.236.565,59	9,01
3.	Aset Tetap	6.784.809.194.786,54	6.711.472.204.139,33	73.336.990.647,21	1,09
4.	Dana Cadangan	-	-	-	-
5.	Aset Lainnya	1.148.513.279.597,10	1.168.209.658.680,97	-19.696.379.083,87	1,69
Jumlah		**9.529.828.339.382,78**	**9.058.798.239.794,03**	**471.030.099.588,76**	5,20

Berdasarkan Aset per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Aset mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan kenaikan terbesar pada Aset Lancar sebesar Rp380.142.251.459,83 atau sebesar 49,64%.

Persentase Aset Lancar atas keseluruhan Aset per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar 12,02%, Investasi Jangka Panjang sebesar 4,73%, Aset Tetap sebesar 71,20%, Dana Cadangan sebesar 0%, dan Aset Lainnya sebesar 12,05%. Hal itu memperlihatkan Aset Tetap paling berpengaruh atas keseluruhan Aset.

5.3.1.1. Aset Lancar

TA 2021	TA 2020
Rp 1.145.898.246.996,59	**Rp765.755.995.536,76**

Aset Lancar per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp1.145.898.246.996,59 naik sebesar Rp380.142.251.459,83 atau sebesar 49,64% jika dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp765.755.995.536,76. Aset Lancar terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Beban Dibayar di Muka, dan Persediaan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.31 Aset Lancar per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Kas dan Setara Kas	770.762.428.593,76	432.451.382.482,59	338.311.046.111,17	78,23
2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-
3.	Piutang	59.466.996.995,65	64.365.469.922,86	(4.898.472.927,21)	(7,61)
4.	Penyisihan Piutang	(9.684.119.344,91)	(8.227.263.268,20)	(1.456.856.076,71)	(17,71)
5.	Beban Dibayar di Muka	718.057.442,09	661.979.657,16	56.077.784,93	8,47
6.	Persediaan	324.634.883.310,00	276.504.426.742,35	48.130.456.567,65	17,41
Jumlah		**1.145.898.246.996,59**	**765.755.995.536,76**	**380.142.251.459,83**	49,64

Berdasarkan Aset Lancar per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Aset Lancar mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan kenaikan terbesar pada Kas dan Setara Kas sebesar Rp338.311.046.111,17 atau sebesar 78,23%..

Persentase Kas dan Setara Kas atas keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar 67,26%, Investasi Jangka Pendek sebesar 0%, Piutang sebesar 5,19%, Beban Dibayar di Muka sebesar 0,06%, dan Persediaan sebesar 28,33%. Hal itu memperlihatkan Kas dan Setara Kas paling berpengaruh atas keseluruhan Aset Lancar.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

TA 2021	TA 2020
Rp 770.762.428.593,76	**Rp432.451.382.482,59**

Kas dan Setara Kas per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp 770.762.428.593,76 naik sebesar Rp 338.311.046.111,17 atau sebesar 78,23% dibandingkan dengan Kas dan Setara Kas per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp432.451.382.482,59.

Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.32 Kas dan Setara Kas per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Kas di Kas Daerah	678.166.989.766,49	341.702.788.841,67	336.464.200.924,82	98.47
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	600.000,00	-	600.000,00	-
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	671.194.050,00	254.019.125,00	417.174.925,00	164.23
4.	Kas di Bendahara BLUD	48.718.629.584,87	45.746.833.714,07	2.971.795.870,80	6.50
5.	Kas di Bendahara BOS	422.352.495,40	2.851.409.210,40	(2.429.056.715,00)	(85,19)
6.	Kas Lainnya	42.782.662.697,00	41.896.331.591,45	886.331.105,55	2,12
7.	Setara Kas	-	-	-	-
Jumlah		**770.762.428.593,76**	**432.451.382.482,59**	**338.311.046.111,17**	**78,23**

Berdasarkan Kas dan Setara Kas per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa hampir secara keseluruhan Kas dan Setara Kas mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan kenaikan sebesar Rp338.311.046.111,17 atau sebesar 78,23%.

Persentase Kas di Kas Daerah atas keseluruhan Kas dan Setara Kas per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar 87,99%, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar 0,0001%, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 0,09%, Kas di Bendahara BLUD sebesar 6,32%, Kas di Bendahara BOS sebesar 0,05%, Kas Lainnya sebesar 5,55%, dan Setara Kas sebesar 0%. Hal itu memperlihatkan Kas di Kas Daerah paling berpengaruh atas keseluruhan Kas dan Setara Kas.

Rekening kas ditetapkan dalam Kepgub Jambi Nomor 1000/KEP-GUB/BADAN KEUANGAN DAERAH-6.3/2018 tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dan Rekening Bendahara BLUD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Perangkat Daerah tidak membuka rekening giro Bendahara Penerimaan dan Pemerintah Provinsi Jambi belum menetapkan rekening giro BOS.

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
Rp678.166.989.766,49	**Rp341.702.788.841,67**

Kas di Kas Daerah per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp678.166.989.766,49 naik sebesar Rp336.464.200.924,82 atau sebesar 98,47% jika dibandingkan dengan Kas di Kas Daerah per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp341.702.788.841,67. Kenaikan Saldo Kas di Kas Daerah dikarenakan ada aktivitas operasi yang dijelaskan dalam Laporan Arus Kas.

Pengelolaan uang daerah menganut sistem *single treasury account* satu rekening jenis Giro Pemerintah di Bank Jambi nomor 101431703 atas nama REK KAS UMUM DAERAH PROV JAMBI yang mengelola penerimaan dan pengeluaran. Saldo akhir

rekening giro Kas Umum Daerah tersebut sebesar Rp720.708.083.144,49, termasuk di dalamnya terdapat Kas Lainnya (CaLK nomor 5.1.1.1.6) sebesar 42.782.662.697,00.

Saldo Kas di Kas Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.33 Saldo Kas di Kas Daerah

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Saldo RKUD Prov Jambi per 31 Desember 2021	720.708.083.144,49
2.	Kas Lainnya	42.782.662.697,00
3.	**Saldo Kasda di Rekening (1-2)**	**677.925.420.447,49**
4.	Kesalahan Koreksi Pihak Bank Jambi atas transaksi SP2D Nomor 2780/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2021 pada Dinkes sehingga terjadi kurang catat sebesar Rp92.250.000,00 (Telah dikembalikan ke Kasda pada tgl 10 Januari 2022)	92.250.000,00
5.	Terdapat dua kali penerbitan SP2D oleh Bidang Perbendaharaan atas satu transaksi sebesar Rp119.319.319,00 pada Disdik sehingga Kasda kurang catat atas transaksi yang double. (Telah dikembalikan ke Kasda pada tgl 19 Januari 2022)	119.319.319,00
6.	Dinkes melakukan kesalahan penginputan pada SIMDA yang menyebabkan kurang catat transaksi pengembalian belanja sebesar Rp30.000.000,00	30.000.000,00
Jumlah Kas di Kas Daerah (3+4+5+6)		**678.166.989.766,49**

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp600.000,00	Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp Rp600.000,00 dibandingkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan terdapat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp671.194.050,00	Rp254.019.125,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp671.194.050,00 naik sebesar Rp417.174.925,00 atau 164,23% jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp254.019.125,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp671.194.050,00 merupakan sisa UYHD Dinas Kehutanan sebesar Rp41.828.345,00 dan RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp629.365.705,00 yang berada di Bank Jambi atas nama Bendahara Pengeluaran masing-masing dan sudah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari Tahun 2022.

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp48.718.629.584,87	Rp45.746.833.714,07

Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp48.718.629.584,87 naik sebesar Rp2.971.795.870,80 atau sebesar 6,50% jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp45.746.833.714,07. Kas di Bendahara BLUD terdiri atas kas di BLUD Balai Laboratorium Kesehatan, BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dan BLUD RSJD Provinsi Jambi yang seluruhnya berada dalam rekening bank operasional BLUD.

Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.34 Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	BLUD Balai Laboratorium Kesehatan Bank BNI nomor rekening 0163725421 atas nama BLUD Balai Labkes Jambi	694.758.327,00	613.471.314,00	81.287.013,00	13.25
2.	BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Bank Jambi dengan nomor rekening 101006875 atas nama Bendahara Penerima RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Jambi	44.476.773.658,87	38.503.152.492,07	5.973.621.166,80	15.51
3.	BLUD RSJD Provinsi Jambi Bank Jambi dengan nomor rekening 0186729097 atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	3.547.097.599,00	6.630.209.908,00	(3.083.112.309,00)	(46,50)
Jumlah		**48.718.629.584,87**	**45.746.833.714,07**	**2.971.795.870,80**	**6.50**

Berdasarkan Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Kas di Bendahara BLUD mengalami kenaikan dengan kenaikan terbesar pada Kas di Bendahara BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp5.973.621.166,80 atau sebesar 15,51%.

Persentase Kas di Bendahara BLUD Balai Laboratorium Kesehatan atas keseluruhan Kas di Bendahara BLUD adalah sebesar 1,43%, Kas di Bendahara BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar 91,29%, dan Kas di Bendahara BLUD RSJD Provinsi Jambi sebesar 7,28%. Hal itu memperlihatkan Kas di Bendahara BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi paling berpengaruh atas keseluruhan Kas di Bendahara BLUD.

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp422.352.495,40	Rp2.851.409.210,40

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp422.352.495,40 turun sebesar Rp2.429.056.715,00 atau sebesar 85,18% dibandingkan dengan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp2.851.409.210,40.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp42.782.662.697,00	Rp41.896.331.591,45

Kas Lainnya per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp42.782.662.697,00 naik sebesar Rp886.331.105,55 atau sebesar 2,12% jika dibandingkan dengan Kas Lainnya per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp41.896.331.591,45. Kas Lainnya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya sebab Pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki dasar untuk mengakuinya sebagai bagian dari kas daerah.

Rincian Kas Lainnya per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.35 Kas Lainnya per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	PT Wirakarya Sakti (WKS)	42.687.907.697,00	41.801.576.591,45	886.331.105,55	2.12
2.	PT Putra Kurnia Properti (PKP)	-	-	-	-
3.	Bank Mandiri	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-
4.	Yeti Suhartini	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.	Potongan Tapetarum	82.955.000,00	82.955.000,00	-	-
Jumlah		**42.782.662.697,00**	**41.896.331.591,45**	**886.331.105,55**	**2.12**

Berdasarkan Kas Lainnya per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa dalam Kas Lainnya terdapat kenaikan pada Kas Lainnya PT Wirakarya Sakti (WKS) sebesar Rp886.331.105,55 atau sebesar 2.12%.

Penjelasan Kas Lainnya adalah sebagai berikut.

a. Kas Lainnya PT WKS sebesar Rp42.687.907.697,00 yang terdiri atas pokok Rp35.591.895.904,80 dan jasa gironya sebesar Rp7.096.011.792,20. Setoran tersebut masuk ke kas daerah pada TA 2015 merupakan ganti rugi tegakan yang seharusnya disetor ke kas negara dengan rincian TA 2015 s.d. 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.36 Rincian Kas Lainnya (PT Wirakarya) Tahun 2015 s.d. 2021

No.	Tahun Anggaran	Kas (Rp)	Jasa Bunga (Rp)	Saldo per 31 Desember (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
1.	2015	35.591.895.904,80	1.435.603.709,78	37.027.499.614,58
2.	2016	35.591.895.904,80	2.327.838.908,49	37.919.734.813,29
3.	2017	35.591.895.904,80	3.286.769.681,29	38.878.665.586,09
4.	2018	35.591.895.904,80	4.269.950.313,21	39.861.846.218,01
5.	2019	35.591.895.904,80	5.277.994.045,25	40.869.889.950,05
6.	2020	35.591.895.904,80	6.209.680.686,65	41.801.576.591,45
7.	2021	35.591.895.904,80	7.096.011.792,20	42.687.907.697,00

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah diketahui kas sebesar Rp42.687.907.697,00 belum disetorkan ke Rekening Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena Surat Direktur IPHH Dirjend. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK Nomor S.351/IPHH/PNBP/PHPL.4/2/2016 tanggal 17 Februari 2016 menyatakan:

1) Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.28/PHPL-UHP/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Penyelesaian Permasalahan Dugaan Bekerja Di Luar Izin oleh PT WKS, Provinsi Jambi yang pada intinya adalah penyelamatan uang Negara yang telah disetor PT WKS ke Rekening Kas Daerah Provinsi Jambi sejumlah Rp35.591.895.904,80 beserta bunganya agar disetor ke Kas Negara;
2) Uang Negara yang dimaksud pada butir 1 (satu) di atas adalah Dana yang diperoleh negara dari Ganti Rugi Tegakan yang dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
3) Apabila telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka setoran PT WKS tersebut segera disetor ke Kas Negara melalui SIMPONI sesuai dengan Pasal I butir 6 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provinsi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Dengan demikian, dana sebesar Rp42.687.907.697,00 tersebut hanya bersifat titipan dan tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

b. Kas Lainnya Bank Mandiri merupakan kelebihan transfer ke kas daerah sebesar Rp6.800.000,00 (Rp500.000,00 atas transaksi setoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta pada TA 2017 (seharusnya Rp500.000,00 terkirim Rp1.000.000,00) sesuai surat dari Bank Mandiri Nomor R04.Br.JCN/41/2021 tanggal 14 Februari 2020) dan tahun 2020 sebesar Rp6.300.000,00.

c. Kas Lainnya Yeti Suhartini merupakan angsuran pelepasan hak atas tanah a.n. Yeti Suhartini sebesar Rp5.000.000,00 yang disetor ke kas daerah. Proses pelepasan tanah

tersebut dihentikan sejak TA 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi telah memberitahukan kepada Yeti Suhartini atas uang tersebut.

d. Kas Lainnya Potongan Tabungan Perumahan sebesar Rp82.955.000,00 dihentikan penyetorannya sebab Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) dibubarkan sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi belum dapat memastikan perlakuan selanjutnya atas uang tersebut.

Kas Lainnya per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp42.782.662.697,00 seluruhnya juga disajikan sebagai Kewajiban

5.3.1.1.2	Investasi Jangka Pendek	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
		Rp0,00	Rp0,00

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan Investasi Jangka Pendek per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3	Piutang	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
		Rp59.466.996.995,65	Rp64.365.469.922,86

Piutang per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp59.466.996.995,65 turun sebesar Rp4.898.472.927,21 atau sebesar 8,23% dibandingkan dengan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp64.365.469.922,86. Piutang terdiri atas Piutang Pendapatan dan Piutang Pendapatan Transfer.

Rincian Piutang per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.37 Piutang per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Piutang Pendapatan	59.466.996.995,65	16.700.553.309,86	42.766.443.685,79	256,08
2.	Piutang Pendapatan Transfer	-	47.664.916.613,00	(47.664.916.613,00)	100,00
Jumlah		**59.466.996.995,65**	**64.365.469.922,86**	**(4.898.472.927,21)**	**7.61**

Berdasarkan Piutang per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Piutang mengalami penurunan dengan penurunan terbesar pada Piutang Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00 atau sebesar 100%.

Persentase Piutang Pendapatan atas keseluruhan Piutang adalah sebesar 256,08% dan Piutang Pendapatan Transfer sebesar 100%. Hal itu memperlihatkan Piutang Pendapatan paling berpengaruh atas keseluruhan Piutang.

5.3.1.1.3.1 Piutang Pendapatan	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp59.466.996.995,65	Rp16.700.553.309,86

Piutang Pendapatan per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp59.466.996.995,65 naik sebesar Rp42.766.443.685,79 atau sebesar 256,08% jika dibandingkan dengan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.700.553.309,86. Piutang Pendapatan terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.38 Piutang Pendapatan per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020	Kenaikan/Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Piutang Pajak Daerah	51.991.300,00	628.919.206,86	(576.927.906,86)	(91,73)
2.	Piutang Retribusi	2.279.480.925,00	12.804.227.584,00	(10.524.746.659,00)	(82.20)
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	57.135.524.770,65	3.267.406.519,00	53.868.118.251.65	1.648,65
Jumlah Piutang Pendapatan		**59.466.996.995,65**	**16.700.553.309,86**	**42.766.443.685,79**	**256,08**
Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan		(9.684.119.344,91)	(7.988.938.685,13)	(1.695.180.659,78)	21,22
Nilai bersih Piutang Pendapatan		**49.782.877.650,74**	**8.711.614.624,73**	**41.071.263.026,01**	**471,45**

Berdasarkan Piutang Pendapatan per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Piutang Pendapatan mengalami kenaikan dengan kenaikan terbesar pada Piutang Lain2 PAD yang sah sebesar Rp41.071.263.026,01 atau sebesar 471,45%.

Persentase Piutang Pajak Daerah atas keseluruhan Piutang Pendapatan adalah sebesar (91.73%), Piutang Retribusi sebesar (82,20%), dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar 1.648,65%. Hal itu memperlihatkan Piutang Lain2 PAD yang sah paling berkontribusi atas keseluruhan Piutang Pendapatan.

Jumlah Piutang Pendapatan sebesar Rp59.466.996.995,65 dan Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp9.684.119.344,91 sehingga nilai bersih Piutang Pendapatan per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp49.782.877.650,74.

5.3.1.1.3.1.1 Piutang Pajak	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp51.991.300,00	Rp628.919.206,86

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp.51.991.300,00 turun sebesar Rp576.927.906,86 atau sebesar (91,73%) jika dibandingkan dengan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp628.919.206,86.

Piutang Pajak Daerah seluruhnya di BPKPD terdiri atas Piutang PKB dan Piutang PBBKB dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39 Piutang Pajak per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	**Piutang PKB**	**51.991.300,00**	**51.991.300,00**	-	-
a.	PT Mega Anugerah Sarana	2.342.400,00	2.342.400,00	-	-
b.	PT Sumber Tehnik	49.648.900,00	49.648.900,00	-	-
2.	**Piutang PBBKB PT Syuriah Bahtera Harapan Mandiri**	**-**	**576.927.906,86**	**(576.927.906,86)**	**(100,00)**
Jumlah Piutang Pajak Daerah (1+2)		**51.991.300,00**	**628.919.206,86**	**(576.927.906,86)**	**(91.73)**
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(51.991.300,00)	(54.875.939,53)	2.884.639,53	(5.26)
Nilai bersih Piutang Pajak Daerah		**-**	**574.043.267,33**	**(574.043.267,33)**	**(100,00)**

Berdasarkan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Piutang Pajak Daerah mengalami penurunan dengan penurunan terbesar pada Piutang Pajak PBBKB sebesar Rp576.927.906,86 atau 91,73%.

Persentase Piutang PKB atas keseluruhan Piutang Pajak Daerah adalah sebesar 91,73% dan Piutang PBBKB sebesar 100%. Hal itu memperlihatkan Piutang PBBKB paling berkontribusi atas keseluruhan Piutang Pajak.

Jumlah Piutang Pajak Daerah sebesar Rp51.991.300,00 dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp51.991.300,00 sehingga didapatkan nilai bersih Piutang Pajak per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Rincian mutasi tambah kurang Piutang Pajak Daerah diuraikan pada **Lampiran 6.**

5.3.1.1.3.1.2 Piutang Retribusi	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp2.279.480.925,00	Rp12.804.227.584,00

Piutang Retribusi per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp2.279.480.925,00 turun sebesar Rp10.524.746.659,00 atau sebesar (82,20%) jika dibandingkan dengan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.804.227.584,00,00.

Piutang Retribusi terdiri atas Piutang Retribusi Jasa Usaha dan Piutang Kerja Sama BGS dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40 Piutang Retribusi per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	**Piutang Retribusi Jasa Usaha**	**2.279.480.925,00**	**1.578.631.500,00**	**700.849.425,00**	**44,40**
a.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Daerah	28.700.000,00	30.650.000,00	(1.950.000,00)	(6,36)
b.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.157.364.625,00	1.454.566.500,00	702.798.125,00	48,32
c.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah (Koreksi BPK Tahun 2019 tentang Sewa Tanah dan Bangunan) – BPKPD	93.415.000,00	93.415.000,00	-	-
d.	Piutang atas Dinas Perkebunan	800,00	-	800,00	100
e.	Piutang atas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemuda dan Olahraga	500,00	-	500,00	100
2.	**Piutang Retribusi Kerja Sama BGS**	**-**	**11.225.596.084,00**	**(11.225.596.084,00)**	**(100,00)**
a.	Piutang Kerja Sama PD Angso Putih	-	397.811.204,00	(397.811.204,00)	**(100,00)**
b.	Piutang Kerja Sama BOT Pasar Angso Duo Baru (PT Eraguna Bumi Nusa)	-	10.327.784.880,00	(10.327.784.880,00)	**(100,00)**
c.	Piutang Kerja Sama BOT Pembangunan WTC (PT Simota Putra Parayudha)	-	-	-	-
d.	Piutang Kerja Sama BOT Hotel dan *Resort* (PT Jambi Sapta Manunggal Pratama	-	500.000.000,00	500.000.000,00	**(100,00)**
Jumlah Piutang Retribusi (1+2)		**2.279.480.925,00**	**12.804.227.584,00**	**(10.524.746.659,00)**	**(82,20)**
Penyisihan Piutang Retribusi		(2.136.770.625,00)	(6.997.285.894,00)	4.860.515.269,00	(69,46)
Nilai bersih Piutang Retribusi Daerah		**142.710.300,00**	**5.806.941.690,00**	**(5.664.231.390,00)**	**(97,54)**

Berdasarkan Piutang Retribusi per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Piutang Retribusi Jasa Usaha mengalami kenaikan terbesar pada Piutang Retribusi sebesar 48,32%. Untuk Piutang Retribusi Kerjasama BGS pada Tahun 2021 direklasifikasi ke rekening Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang sah.

Mutasi Piutang Retribusi terdiri atas:

1) Saldo Akhir Badan Penghubung Daerah Provinsi Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp28.700.000,00 karena ada pengurangan piutang sebesar Rp1.950.000,00;
2) Saldo Akhir Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.157.364.625,00 karena penambahan piutang sebesar

Rp722.323.125,00 dan mutasi kurang sebesar Rp19.525.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp702.798.125,00;

3) Saldo Akhir Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp93.415.000,00 merupakan Saldo Koreksi BPK Tahun 2019 tentang Sewa Tanah dan Bangunan;

4) Saldo Akhir Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp800,00 merupakan koreksi tambah sebesar Rp800,00 akibat kesalahan bank, telah disetor ke Kasda pada TA 2022;

5) Saldo Akhir Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp500,00 merupakan koreksi tambah sebesar Rp500,00 akibat kesalahan bank, telah disetor ke Kasda pada TA 2022.

Rincian Piutang Retribusi per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 7.**

5.3.1.1.3.1.3	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan**	**per 31 Desember TA 2021**	**per 31 Desember TA 2020**
		Rp0,00	**Rp0,00**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan, masih tetap Rp0,00.

5.3.1.1.3.1.4	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**per 31 Desember TA 2021**	**per 31 Desember TA 2020**
		Rp57.135.524.770,65	**Rp3.267.406.519,00**

Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.135.524.770,65 naik sebesar Rp53.868.118.251,65 atau sebesar 1.648,65% jika dibandingkan dengan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.267.406.519,00.

Rincian Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.41 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD	16.482.214.305,25	601.439.423,00	15.880.774.882,25	2.640,46
2.	Piutang Pendapatan BLUD pada RSJD	917.291.000,00	1.369.951.576,00	(452.660.576,00)	33,04
3.	Piutang Pendapatan BLUD pada Balabkes Daerah Jambi	11.991.000,00	-	11.991.000,00	100,00
4.	Piutang Denda PKB dan BBNKB	15.597.390,00	15.597.390,00	-	-
5.	Piutang Taspen atas Uang Duka Wafat yang Belum Dibayarkan	-	-	-	-

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
6.	Piutang Samisake Kabupaten Sungai Penuh	-	1.280.418.130,00	(1.280.418.130,00)	(100,00)
7.	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	25.441.659.333,40	-	25.441.659.333,40	-
8.	**Piutang BGS**	**13.868.960.538,00**	-	**13.868.960.538,00**	**100,00**
	PT Simota Putra Parayuda (kerja sama BGS pembangunan WTC)	-	-	-	-
	PT Jambi Sapta Manunggal (kerja sama BGS pembangunan Hotel Tepian Ratu)	500.000.000,00	-	500.000.000,00	100,00
	PT Eraguna Bumi Nusa (kerja sama BGS pembangunan Pasar Angso Duo)	13.368.960.538,00	-	13.368.960.538,00	100,00
9.	**Piutang atas tagihan PD Angso Putih**	**397.811.204,00**	**-**	**397.811.204,00**	**100,00**
	Suhelmi, SE/KUD semangat 45 Bangko	58.760.255,00	-	58.760.255,00	100,00
	Junaidi Nainggolan	126.805.205,00	-	126.805.205,00	100,00
	AR Siregar	129.165.416,00	-	129.165.416,00	100,00
	Istiono/Bambang Sriyono	83.080.328,00	-	83.080.328,00	100,00
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**57.135.524.770,65**	**3.267.406.519,00**	**53.868.118.251,65**	**1.648,65**
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(7.495.357.419,91)	(936.776.851,60)	(6.558.760.568.31)	700,14
Nilai Bersih Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**49.640.167.350,74**	**2.330.629.667,40**	**47.309.537.683,34**	**2.029,90**

Mutasi Piutang Pendapatan Lain – Lain PAD yang sah terdiri atas:

1) Saldo Akhir RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp16.482.214.305,25 karena penambahan piutang sebesar Rp16.079.432.336,25 dan mutasi kurang sebesar Rp198.657.454,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp15.880.774.882,25
2) Saldo Akhir RS Jiwa Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp917.291.000,00 karena penambahan piutang sebesar Rp917.291.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp1.369.951.576,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp452.660.576,00
3) Saldo Akhir Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp11.991.000,00 karena penambahan piutang sebesar Rp11.991.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.991.000,00
4) Saldo Akhir Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp25.441.659.333,40 karena penambahan piutang sebesar Rp25.441.659.333,40 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp25.441.659.333,40
5) Saldo Akhir Piutang BGS Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp13.868.960.538,00 karena penambahan piutang sebesar Rp5.541.175.658,40 dan mutasi kurang sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar

Rp3.041.175.658,00. Piutang BGS Provinsi Jambi direklasifikasi dari Piutang Pendapatan Retribusi ke Piutang Lain-Lain PAD yang sah.

6) Saldo Akhir Piutang atas tagihan PD.Angso Putih/Biro APSDA Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp397.811.204 , tidak terdapat penambahan piutang. Piutang Tagihan PD.Angso Putih/Biro APSDA direklasifikasi dari Piutang Pendapatan Retribusi ke Piutang Lain-Lain PAD yang sah.

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 8.**

5.3.1.1.3.2	**Piutang Pendapatan Transfer**	**per 31 Desember TA 2021** **Rp0,00**	**per 31 Desember TA 2020** **Rp47.664.916.613,00**

Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021, sebesar 0,00 turun sebesar Rp47.664.916.613,00 atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp47.664.916.613,00. Piutang Pendapatan Transfer terdiri atas Piutang Transfer Pajak dan Piutang Transfer Sumber Daya Alam.

Rincian Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Piutang Transfer Pajak	-	42.009.955.658,00	-	100,00
2.	Piutang Transfer Sumber Daya Alam	-	5.654.960.955,00	-	100,00
Piutang Transfer		-	**47.664.916.613,00**	-	100,00
Penyisihan Piutang Transfer		-	(238.324.583,07)	-	100,00
Nilai Bersih Piutang Transfer		-	**47.426.592.029,93**	-	100,00

Rincian Piutang Pendapatan Transfer diuraikan sebagai berikut.

a. Piutang Transfer Pajak

Tabel 5.43 Rincian Piutang Transfer Pajak per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	
1.	**Pajak Bumi dan Bangunan**	-	**42.009.955.658,00**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
a.	Dana Bagi Hasil Bagian Daerah	-	39.667.090.326,00
b.	Bea Pungut PBB	-	2.342.865.332,00
2.	**Pajak Penghasilan (PPh)**	-	-
a.	PPh Pasal 21	-	-
b.	PPh Pasal 25/29	-	-
Piutang Transfer Pajak		**-**	**42.009.955.658,00**
Penyisihan Piutang Transfer Pajak		-	(210.049.778,29)
Nilai Bersih Jumlah Piutang Transfer Pajak		-	**41.799.905.879,71**

Rincian Piutang Transfer Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

b. Piutang Transfer Sumber Daya Alam

Tabel 5.44 Rincian Piutang Transfer Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	
1.	**Sumber Daya Alam**	-	**5.143.152.371,00**
a.	DR	-	-
b.	IIUPH	-	-
c.	PSDH	-	5.143.030.747,00
2.	**Migas**	-	-
a.	Gas Bumi	-	-
b.	Minyak Bumi	-	-
3.	**Minerba**	-	**511.930.208,00**
a.	*Landrent*	-	511.930.208,00
b.	Royalti	-	-
Piutang Transfer Sumber Daya Alam		-	**5.654.960.955,00**
Penyisihan Piutang Transfer Sumber Daya Alam		-	**(28.274.804,78)**
Nilai Bersih Piutang Transfer Sumber Daya Alam		-	**5.626.686.150,23**

Rincian Piutang Transfer Sumber Daya Alam dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

5.3.1.1.4	**Beban Dibayar di Muka**	**per 31 Desember TA 2021** **Rp718.057.442,09**	**per 31 Desember TA 2020** **Rp661.979.657,16**

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp718.057.442,09 naik sebesar Rp56.077.784,93 atau 8,47% jika dibandingkan Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp661.979.657,16.

Beban Dibayar di Muka terdiri atas biaya-biaya asuransi yang belum jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Asuransi di Sekretariat Daerah	251.669.255,60	253.507.082,58	(1.837.826,98)	0,72
2.	Asuransi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	291.802.315,36	321.089.258,05	(29.286.942,69)	9,12
3.	Asuransi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.966.177,32	16.584.950,13	7.381.227,19	44,51
4.	Asuransi di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	127.684.910,20	61.556.158,50	66.128.751,70	107,43
5.	Asuransi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.106.767,12	-	14.106.767,12	100,00
6.	Asuransi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.828.016,49	9.242.207,90	(414.192,41)	4,48
Jumlah		**718.057.442,09**	**661.979.657,16**	**56.077.784,93**	**8,47**

Berdasarkan Beban Dibayar di Muka per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Beban Dibayar di Muka mengalami Kenaikan terbesar pada Badan Penghubung sebesar Rp66.128.751,70 atau sebesar 107,43%.

Persentase Beban Dibayar di Muka - Asuransi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi atas keseluruhan Beban Dibayar di Muka adalah sebesar 40,64%. Hal itu memperlihatkan Asuransi di Dinas PUPR paling berpengaruh atas keseluruhan Beban Dibayar di Muka.

Rincian Beban Dibayar di Muka dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

5.3.1.1.5 Persediaan	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp324.634.883.310,00	**Rp276.504.426.742,35**

Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp324.634.883.310,00 naik sebesar Rp48.130.456.567,65 atau 17,41% jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp276.504.426.742,35.

Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.46 Rincian Persediaan per Jenis per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Bahan	6.050.993.407,45	4.363.921.976,63	1.687.071.430,82	38,66
2.	Suku Cadang	4.777.250,00	50.379.471,00	(45.602.221,00)	90,52

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
3.	Alat Bahan Kegiatan Kantor	2.049.195.865,99	2.727.369.218,84	(678.173.352,85)	24,87
4.	Obat Obatan	23.652.761.914,37	28.943.219.319,57	(5.290.457.405,20)	18,28
5.	Persediaan Untuk dijual/diserahkan	292.776.457.972,19	240.283.423.413,81	52.493.034.558,38	21,85
6.	Persediaan Strategis/berjaga-jaga	93.234.900,00	-	93.234.900,00	-
7.	Natura dan Pakan	7.198.500,00	136.113.342,50	(128.914.842,50)	94,71
8.	Persediaan Dalam Proses	263.500,00	-	263.500,00	-
Jumlah		**324.634.883.310,00**	**276.504.426.742,35**	**48.130.456.567,65**	**17,41**

Berdasarkan Persediaan per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Persediaan mengalami kenaikan, dengan kenaikan terbesar pada persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp52.493.034.558,38 dan penurunan terbesar pada obat-obatan sebesar Rp5.290.457.405,20.

Rincian saldo Persediaan per OPD dan per jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

5.3.1.2	**Investasi Jangka Panjang**	**per 31 Desember TA 2020** **Rp450.607.618.002,56**	**per 31 Desember TA 2020** **Rp413.360.381.436,97**

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp450.607.618.002,56 naik sebesar Rp37.247.236.565,59 atau 9,11% dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020sebesarRp413.360.381.436,97.

Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.47 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020	Kenaikan/Penurunan	PersentaseKenaikan/ Penurunan
1	2	3	3	5=3-4	6=5:4
1.	Investasi Non permanen	17.963.033.038,49	17.427.062.911,59	535.970.126,90	3,08%
	Penyisihan Dana KUPEM Tidak Tertagih	(5.232.664.717,88)	(4.893.133.757,70)	(339.530.960,18)	6,94%
	Nilai bersih Investasi Nonpermanen	12.730.368.320,61	12.533.929.153,89	196.439.166,72	1,57%
2.	Investasi Permanen	437.877.249.681,95	400.826.452.283,08	37.050.797.398,87	9,24%
Jumlah		**450.607.618.002,56**	**413.360.381.436,97**	**37.247.236.565,59**	9,01%

Berdasarkan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan, peningkatan terbesar pada Investasi Permanen sebesar Rp37.050.797.398,87 sebesar 9,24%.

Persentase Investasi Permanen atas keseluruhan Investasi Jangka Panjang adalah sebesar 97,17%. Hal itu memperlihatkan Investasi Permanen paling berpengaruh atas keseluruhan Investasi Jangka Panjang.

5.3.1.2.1	**Investasi Nonpermanen**	**per 31 Desember TA 2021** **Rp17.963.033.038,49**	**per 31 Desember TA 2020** **Rp17.427.062.911,59**

Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.963.033.038,49 naik sebesar Rp535.970.126,90 atau sebesar 3,08% dibandingkan dengan Investasi Non permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.427.062.911,59 dengan penyisihan sebesar (Rp5.232.664.717,88), sehingga nilai bersih Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.730.368.320,61.

Investasi Nonpermanen merupakan Dana Bergulir KUPEM dengan rincian per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.48 Rincian Investasi Nonpermanen per 31 Desember TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020	Kenaikan/Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Dana KUPEM	17.963.033.038,49	17.427.062.911,59	535.970.126,90	3,08%
2.	Penyisihan Dana KUPEM tidak tertagih	(5.232.664.717,88)	(4.893.133.757,70)	(339.530.960,18)	6,94%
Jumlah Bersih Dana KUPEM		**12.730.368.320,61**	**12.533.929.153,89**	**196.439.166,72**	**1,57%**

Dana Bergulir KUPEM per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.49 Rincian Saldo KUPEM per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	3	5=3-4
1.	KUPEM Pola *Executing* (tunggakan)	1.649.336.413,21	1.246.138.881,03	403.197.532,18
2.	Penyisihan KUPEM Pola *Executing* tak tertagih	(1.649.336.413,21)	(1.246.138.881,03)	(403.197.532,18)
3.	Nilai bersih *Executing* (1+2)	-	-	-
4.	KUPEM Pola *Channeling* (tunggakan)	3.509.291.743,67	3.572.958.315,67	(63.666.572,00)
5.	Penyisihan KUPEM Pola *channeling* tak tertagih	(3.509.291.743,67)	(3.572.958.315,67)	63.666.572,00

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	3	5=3-4
6.	Nilai bersih *Channeling* (4+5)	-	-	-
7.	KUPEM Pola *Channeling*- Pensertifikatan Tanah	74.036.561,00	74.036.561,00	-
8.	Penyisihan KUPEM Pola *Channeling*- Pensertifikatan Tanah tak tertagih	(74.036.561,00)	(74.036.561,00)	-
9.	Nilai bersih *Channeling* Pensertifikatan (7+8)	-	-	-
10.	Saldo Rekening KUPEM yang berada di Kab/Kota	10.577.465.981,38	10.464.059.545,17	113.406.436,21
11.	Saldo Giro Beku	2.152.902.339,23	2.069.869.608,72	83.032.730,51
Jumlah (3+6+9+10+11)		**12.730.368.320,61**	**12.533.929.153,89**	**196.439.169,72**

KUPEM adalah kredit usaha dan investasi pengembangan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disalurkan melalui Bank Jambi kepada petani hortikultura, petani ikan, pedagang/pengumpul pemasaran duku dan industri kecil, dalam rangka pembiayaan usaha tani dan usaha industri kecil.

Terdapat dua pola pelaksanaan program KUPEM yaitu pola *Executing* yang dilaksanakan sejak tahun 2001 s.d. tahun 2004 dan pola *Channeling* yang dilaksanakan sejak tahun 2005. Perbedaan kedua pola tersebut adalah pada tanggung jawab penyaluran, pengelolaan dan pengawasan kredit, dimana pada pola *Executing* tanggung jawab tersebut ada pada Bank Jambi, dan pada pola *Channeling* tanggung jawab tersebut ada pada Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk pelaksanaan KUPEM dengan pola *Channeling* dan *Executing* tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Terpadu yang dikoordinasikan oleh Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dana KUPEM per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.730.368.323,61diuraikan sebagai berikut.

a. Pola *Channeling*, nilai bersih setelah penyisihan KUPEM pola *channeling* adalah sebagai berikut.

   Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00. Saldo sebesar Rp0,00 sudah dilakukan perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 (rincian perhitungan penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran 13**). Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet, sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100%.

b. Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota sebesar Rp10.577.465.981,38 Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.577.465.981,38 naik sebesar Rp113.406.436,21 atau 1,08% dibandingkan dengan saldo tahun 2020 sebesar Rp10.464.059.545,17. Saldo sebesar Rp10.577.465.981,38 tersebut disimpan di Bank Jambi dengan rincian pada **Lampiran 14.**

c. Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.152.902.339,23,naik sebesar Rp83.032.730,51 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.069.869.608,72. Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku sebesar Rp2.152.902.339,23 merupakan saldo rekening KUPEM di Rekening Giro Beku pada Bank Jambi dengan nomor rekening 0101010546 dan 101035147.

d. Saldo bersih Dana KUPEM *Executing* per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.649.336.413,21 naik sebesar Rp403.197.532,18 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.246.138.881,03 (rincian perhitungan penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran 13**). Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet, sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100%.

e. Saldo bersih Dana KUPEM *Executing* pensertifikatan tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet, sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100%.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen | **per 31 Desember TA 2021** | **per 31 Desember TA 2020**
Rp437.877.249.681,95 | **Rp400.826.452.283,08**

Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp437.877.249.681,95 turun sebesar Rp37.050.797.398,87 atau sebesar 9,24% jika dibandingkan dengan Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp400.826.452.283,08. Investasi Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jambi pada Bank Jambi, PT Jambi Indoguna Internasional (JII), dan PT Asuransi Bangun ASKRIDA dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.50 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Bank Jambi	435.224.206.085,61	398.173.729.364,37	37.050.476.721,24	9,31%
2.	PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII)	1.463.043.596,34	1.462.722.918,71	320.677,63	0,02%
3.	PT Asuransi ASKRIDA	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	-	-
Jumlah		**437.877.249.681,95**	**400.826.452.283,08**	**37.050.797.398,87**	**9,24%**

Berdasarkan Investasi Permanen per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Investasi Permanen mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada Investasi Permanen Bank Jambi sebesar Rp37.050.476.721,24 atau sebesar 9,31%.

Persentase Investasi Permanen Bank Jambi atas keseluruhan Investasi Permanen adalah sebesar 99,34%. Hal itu memperlihatkan Investasi Permanen Bank Jambi paling berpengaruh atas keseluruhan Investasi Permanen.

Investasi Permanen diuraikan sebagai berikut.

a. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di Bank Jambi sebesar Rp173.364.000.000,00 yang terdiri atas modal dasar sebanyak 173.364 lembar saham

dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar saham. Jumlah seluruh saham yang dimiliki Bank Jambi adalah Rp768.316.500.000,00. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 22,56%. Berdasarkan kepemilikan saham yang lebih dari 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan, maka pencatatan atas investasi menggunakan metode ekuitas (*equity method*) sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp435.224.206.085,61.

Tabel 5.51 Rincian Ekuitas Bank Jambi per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Ekuitas Bank Jambi	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Modal saham	770.816.500.000,00	768.316.500.000,00
2.	Modal donasi	-	.
3.	Tambahan modal disetor	590.574.736,00	590.931.736,00
4.	Saldo laba di tahan yang telah ditentukan penggunaannya	841.920.121.799	735.785.976.650,00
5.	Saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya	314.153.668.557	275.813.481.558,00
6.	Keuntungan (kerugian) surat berharga tersedia untuk dijual	10.121.272.060	7.895.153.866,00
7.	Keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan pasca kerja	(2.494.506.674)	(23.771.289.229,00)
Jumlah		**1.935.107.630.478,00**	**1.764.630.754.581,00**

Nilai Investasi di Bank Jambi dengan Metode Ekuitas adalah Rp173.364.000.000,00/Rp770.816.500.000,00 x Rp1.935.107.630.478,00 = Rp435.224.206.085,61 *(Lihat Lampiran Laporan Keuangan BUMD).*

b. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT JII sebesar Rp13.787.500.000,00. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 99,55%. Berdasarkan presentasi kepemilikan saham yang lebih dari 20%, maka pencatatan atas investasi menggunakan metode ekuitas (*equity method*) sehingga nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Jambi di PT JII sebesar Rp1.463.043.596,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52 Rincian Ekuitas PT JII

No.	Ekuitas PT JII	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Modal Saham Pemprov. Jambi	13.787.500.000,00	13.787.500.000,00
2.	Modal saham Afrizal	-	62.500.000,00
	Jumlah Saham	**13.787.500.000,00**	**13.850.000.000,00**
3.	Laba (Rugi) Tahun Lalu	(12.715.562.293,66)	(12.414.555.964,75)
4.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	391.105.890,00	33.909.540,39
5.	Laba (rugi) tahun 2020 kurang saji dikarenakan sampai dengan Pemeriksaan beakhir belum didapat Laporan Keuangan PT JII *Audited*.	-	-
Jumlah		**1.463.043.596,34**	**1.469.353.575,64**

Nilai Investasi di PT JII dengan Metode Ekuitas adalah Rp13.787.500.000,00/Rp13.787.500.000,00 x Rp1.463.043.596,34 = Rp1.463.043.596,34 *(Lihat Lampiran Laporan Keuangan BUMD).*

c. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT Asuransi Bangun ASKRIDA per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.190.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan modal. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 0,40%. Berdasarkan persentase kepemilikan saham yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas investasi menggunakan metode biaya *(cost method)* yaitu berdasarkan nilai penyertaan modal sebesar Rp1.190.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
Rp6.784.809.194.786,54	**Rp6.711.472.204.139,33**

Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.784.788.964.156,54 naik sebesar Rp73.336.990.647,21 atau sebesar 1,09% jika dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.711.472.204.139,33.

Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Tanah	798.880.080.685,06	746.820.630.097,47	52.059.450.587,59	6,97
2.	Peralatan dan Mesin	1.849.155.112.541,55	1.667.913.033.378,55	181.242.079.163,00	10,87
3.	Gedung dan Bangunan	1.912.539.362.543,43	1.720.231.317.702,25	192.308.044.841,18	11,18
4.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	7.859.184.496.596,92	7.727.796.254.785,16	131.388.241.811,76	1,70
5.	Aset Tetap Lainnya	454.067.721.431,91	466.335.510.863,40	(12.267.789.431,49)	(2,63)
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	86.723.699.079,21	94.622.912.486,72	(7.899.213.407,51)	(8,35)
7.	**Jumlah Aset Tetap (1 s/d 6)**	**12.960.550.472.878,10**	**12.423.719.659.313,60**	**536.830.813.564,63**	**4,32**
8.	Akumulasi Penyusutan	(6.175.741.278.091,54)	(5.712.247.455.174,22)	(463.493.822.917,32)	8,11
Nilai Buku Aset Tetap (7+8)		**6.784.809.194.786,54**	**6.711.472.204.139,33**	**73.336.990.647,21**	**1,09**

Berdasarkan Aset Tetap per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Aset Tetap mengalami kenaikan kecuali pada Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan, dengan kenaikan terbesar pada Jalan, Gedung dan bangunan sebesar Rp192.308.044.841,18 sebesar 11,18%.

Persentase Jalan, Irigasi dan Jaringan atas keseluruhan Aset Tetap adalah sebesar 60,64%. Hal itu memperlihatkan Jalan, Irigasi dan Jaringan paling berpengaruh atas keseluruhan Aset Tetap.

5.3.1.3.1 Tanah	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp798.880.080.685,06	**Rp746.820.630.097,47**

Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp798.880.080.685,06 naik sebesar Rp52.059.450.587,59 atau sebesar 6,97% jika dibandingkan dengan Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp746.820.630.097,47. Rincian mutasi Tanah tahun 2021 sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	746.820.630.097,47
Mutasi Tambah	Rp	70.952.107.186,00
Mutasi Kurang	Rp	18.892.656.598,41
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**798.880.080.685,06**

Mutasi tambah sebesar **Rp70.952.107.186,00** terdiri atas:

a. Mutasi tambah karena realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp26.761.778.203,00

b. Mutasi tambah pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp282.968.000,00 yang merupakan Reklas dari Aset Lainnya.

c. Mutasi tambah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu Revaluasi Aset Tanah Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-155/BAKEUDA-3.2/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp43.907.360.981,00.

d. Mutasi tambah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu Hibah dari Fadli Sudria, SE, M.Hum ke BPKPD Berdasarkan BAST Nomor 1104/BAST/Bakeuda-3.2/2021 tangga 25 Oktober 2021 Rp1,00.

e. Mutasi tambah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu Hibah dari Desa Panca Bakti ke BPKPD Berdasarkan BAST Nomor 1109/BAST/Bakeuda-3.2/2021 tangga 25 Oktober 2021 Rp1,00.

Mutasi Kurang sebesar **Rp18.892.656.598,41** terdiri atas:

a. Hibah dari BPKPD ke Kementerian Keuangan Berdasarkan BAST Nomor 299/BAST/Setda.PBMD-3.2/2021 tangga 8 Februari 2021 Rp807.463.469,00.

b. Hibah dari BPKPD ke Kementerian Agama Berdasarkan BAST Nomor 301/BAST/Setda.PBMD-3.2/2021 tangga 8 Februari 2021 Rp1.043.687.254,00.

c. Hibah dari BPKPD ke Pemkot Jambi Berdasarkan BAST Nomor 198/BAST/Setda.PBMD-3.2/2021 tangga 29 Januari 2021 Rp7.098.190.905,00.

d. Hibah dari BPKPD ke Mahkamah Agung Berdasarkan BAST Nomor 303/BAST/Setda.PBMD-3.2/2021 tanggal 8 Februari 2021 Rp237.144.000,00.

e. Hibah dari BPKPD ke Pemkab Bungo Berdasarkan BAST Nomor 291/BAST/Setda.PBMD-3.2/2021 tangga 8 Februari 2021 Rp7.140.000.000,00.

f. Hibah dari BPKPD ke Polri Berdasarkan BAST Nomor 297/BAST/Setda.PBMD-3.2/2021 tangga 8 Februari 2021 Rp2.044.344.970,41.

g. Hibah dari BPKPD ke BMKG Berdasarkan BAST Nomor 305/BAST/Setda.PBMD-3.2/2021 tangga 8 Februari 2021 Rp34.000.000,00.

h. Hibah dari BPKPD ke Pemkab Tanjabbar Berdasarkan BAST Nomor 3060/BAST/Setda.PBMD-3.2/2020 tangga 28 Desember 2020 Rp57.060.000,00.

i. Hibah dari BPKPD ke Kementerian Kesehatan Berdasarkan BAST Nomor 3059/BAST/Setda.PBMD-3.2/2020 tangga 28 Desember 2020 Rp430.766.000,00.

Daftar Aset Tetap Tanah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

Penjelasan permasalahan Tanah yang masih perlu penyelesaian lebih lanjut antara lain sebagai berikut.

a. Terdapat bangunan-bangunan permanen dan kios-kios milik masyarakat yang berada di atas tanah seluas 9.626 m^2 terletak di Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura dengan sertifikat Hak Pakai (HP) Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, sertifikat HP Nomor 40 Tahun 1972 seluas 1.100.923 m^2 terletak di Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura juga sebagian dikuasai oleh masyarakat.

   Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Penertiban dan Penyelesaian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 413/KEP.GUB/SETDA. BPAKD.3.2/2013 tanggal 11 Juni 2013. Tim telah melakukan:

   1) Pendataan Tanah yang dikuasai oleh masyarakat, tumpang tindih, terutama Tanah HP Nomor 40 Tahun 1972 dan HP Nomor 8 Tahun 1972 yang sudah diganti dengan HP Nomor 8 Tahun 2010.
   2) Menyiapkan *action plan* untuk langkah-langkah konkrit.
   3) Menyurati pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapat penjelasan tentang riwayat dan risalah Tanah yang bermasalah/dikuasai masyarakat atau tumpang tindih mengenai kepemilikan.
   4) Membentuk Tim Kecil untuk melakukan Inventarisasi terhadap HP Nomor 40 Tahun 1972 dan HP Nomor 8 Tahun 2010 dengan melibatkan Pihak Pemerintah Provinsi Jambi, Camat, Lurah, RT dan masyarakat untuk melakukan inventarisasi, investigasi, pengukuran di lapangan dan melaksanakan negosiasi dengan masyarakat. Terhadap tanah dalam penguasaan masyarakat, penyelesaiannya diusahakan dengan musyawarah/mediasi untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila tidak ada kesepakatan akan diselesaikan secara hukum dan telah diserahkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk penyelesaian lebih lanjut.
   5) Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati BPN Kota Jambi agar dapat mengeluarkan hasil inventarisasi/pengukuran yang telah dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Nomor 31/03-15.71/I/2014 tanggal 21 Januari 2014, perihal permohonan mengeluarkan hasil inventarisasi di lapangan. Pihak BPN Kota Jambi telah mengeluarkan hasil inventarisasi dan menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Jambi melalui Surat Nomor 82/03-15.71/II/2014 perihal Permohonan Penjelasan Data dan Luas Tanah dan dilampiri dengan peta dan data lengkap yang nantinya akan dijadikan bahan oleh Biro Hukum untuk penyelesaian selanjutnya.
   6) Dalam pengamanan Tanah tersebut telah dilakukan pemasangan papan nama pada lokasi HP Nomor 40 Tahun 1972 dan Tanah HP Nomor 8 Tahun 2010.

7) Untuk tanah seluas 116.439 m^2 dengan sertifikat HP Nomor 40 Tahun 1972, sebagian dari luas tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah Drs. Zulkifli Nurdin seluas 20.878 m^2 dan pada tahun 2017 mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 13/G/2017/PTUN.JBI tanggal 4 Desember 2017 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/B/2018/PTTUN-MDN tanggal 7 Mei 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 13/G/2017/PTUN.JBI.

8) Upaya Penyelesaian untuk penghapusan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi seluas 20.878 m^2 sebagian dari sertifikat HP Nomor 40 Tahun 1972 dimaksud, saat ini masih dalam proses pada Pemerintah Provinsi Jambi (Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

9) Tanah HP Nomor 8 Tahun 2010 telah dilakukan pendataan nama pemakai/pemilik kios-kios/toko yang berdiri di atas tanah tersebut sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 593/31/SETDA.PBMD-2.2/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang mohon bantuan data pedagang, dan sesuai dengan surat Ketua RT 18 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi tanggal 25 Februari 2020 tentang Penyampaian data warga. Selanjutnya akan diberlakukan dengan sewa pakai, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Upaya penyelesaian dengan kesepakatan bersama antara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan Kejaksaan Tinggi Jambi tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara, Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor 250/SKU/SETDA.HKM-2.2/I/2021.

b. Tanah seluas 45.710 m^2 terletak di Kelurahan Pematang Sulur dengan Sertifikat HP Nomor 5 Tahun 1970 diantaranya seluas 19.668 m^2 digunakan untuk Cadika/Gedung Pramuka dan sisanya sebanyak 13 bidang tanah dikuasai oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengamanan melalui pemasangan papan nama sejak tahun 2013. Upaya penyelesaian dengan inventarisasi dan pengumpulan data untuk dilimpahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN).

c. Tanah seluas 72.660 m^2 terletak di Kelurahan Simpang IV Sipin dengan Sertifikat HP Nomor 6 Tahun 1987 digunakan untuk Kompleks Perumahan DPRD Tingkat I dan Perumahan Pegawai Golongan III sebanyak 13 rumah, sedangkan sisanya merupakan tanah kosong yang ditempati sebanyak lima kepala keluarga sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 180/SETDA.PBMD-2.2/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 hal penyampaian data nama yang menempati tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi HP Nomor 6 Tahun 1987 untuk penyelesaian lebih lanjut. Upaya penyelesaian dengan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Nomor SKK: 249/SETDA.HKM-2.2/I/2021.

d. Tanah seluas 264.320 m^2 terletak di Kelurahan Pematang Sulur dengan Sertifikat HP Nomor 58 Tahun 1989 digunakan untuk lapangan golf, tanah kosong, dan sebagian dikuasai oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan terhadap tanah dimaksud di atas yaitu telah dilakukan pengamanan dengan cara pemasangan papan nama pada tahun

2013 selanjutnya secara bertahap akan diselesaikan apabila penyelesaian tanah HP Nomor 8 Tahun 2010 dan HP Nomor 40 Tahun 1972 tuntas. Upaya penyelesaian dengan inventarisasi dan pengumpulan data dilimpahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) Nomor SKK: 250/SETDA.HKM-2.2/I/2021.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Rp1.849.155.112.541,55	**Rp1.667.913.033.378,55**

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.849.155.112.541,55 naik sebesar Rp181.242.079.163,00 atau sebesar 10,87% jika dibandingkan dengan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.667.913.033.378,55 Rincian mutasi Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	1.667.913.033.378,55
Mutasi Tambah	Rp	206.132.443.168,37
Mutasi Kurang	Rp	24.890.364.005,37
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**1.849.155.112.541,55**

Mutasi tambah sebesar **Rp206.132.443.168,37** yang terdiri atas:

a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp142.649.146.950,00 pada 36 OPD dengan rincian pada **Lampiran 16.**

b. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari aset selain peralatan dan mesin sebesar Rp17.666.784.116,24 yaitu:

1)	Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:	
	- *Dinas Perhubungan*	*284.020.000,00*
	Jumlah (1)	***284.020.000,00***
2)	Reklasifikasi dari Aset Jalan Jaringan Irigasi pada:	
	- *Dinas Perkebunan*	*125.785.000,00*
	Jumlah (2)	**125.785.000,00**
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada:	
	- *Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*7.050.000,00*
	- *Biro Umum*	*468.471.863,24*
	- *Dinas Pekerjaan Umum PR*	*133.333.200,00*
	- *Dinas Pendidikan*	*16.610.124.053,00*
	- *Dinas Kehutanan*	*38.000.000,00*
	Jumlah (3)	**17.256.979.116,24**
	Jumlah (1+2+3)	**17.666.784.116,24**

c. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.447.386.120,00 yaitu:

- *Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*5.028.000,00*
- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*17.700.000,00*
- *Dinas Pendidikan*	*7.424.658.120,00*
Jumlah	**Rp7.447.386.120,00**

d. Mutasi tambah karena menerima Hibah sebesar Rp28.586.332.667,00 yaitu:

1)	*Hibah dari kementerian kelautan dan perikanan BAST no. 3319/SJ.2/PL.730/IX/2021 tgl 10-9-2021*	*54.250.000,00*
2)	*Hibah dari Kemenkes RI 2021 ke Rumah Sakit Jiwa sesuai dgn BAST No: KN.02.07/I.3/4801/2021 tgl 7 April 2021*	*5.061.195.000,00*
3)	*Hibah dari Kementerian Perhubungan R.I ke Dinas Perhubungan tahun 2021(BAST No HK.201/9/8/DJPD/2021, HK.201/12/5/DJPD/2021)*	*4.650.705.167,00*
4)	*Hibah dari Satker Dana TP ke Dinas Kehutanan (BAST N0 89/DISHUT-TP/II/2021)*	*592.767.200,00*
5)	*Hibah dari BPHP ke Dinas Kehutanan (BAST NO 252/BPHP.IC/TU/UM/10/202)*	*697.440.000,00*
6)	*Hibah dari BPHP ke Dinas Kehutanan (BAST NO 252/BPHP.IC/TU/UM/10/2021)*	*141.200.000,00*
7)	*Hibah dari Kemenkes RI Tahun 2021 Kemenkes RI 2021 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : KN.02.07/I.3/4801/2021 Tanggal 7 April 2021*	*17.388.775.300,00*
	Jumlah	**28.586.332.667,00**

e. Mutasi tambah atas Peralatan dan mesin yang diperoleh dari utang BLUD pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp4.201.155.271,10

f. Mutasi tambah atas Peralatan dan mesin yang diperoleh dari BTT COVID-19 pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp1.565.168.500,00 .

g. Mutasi tambah atas Peralatan dan mesin yang diperoleh dari Belanja modal BLUD pada RSUD sebesar Rp3.185.071.232,00 dan belanja modal BLUD RSJ sebesar Rp831.398.312,00

h. Mutasi tambah atas Peralatan Mesin atas kurang saji pada Biro Umum sebesar Rp0,01

i. Mutasi tambah atas Peralatan Mesin atas kurang saji pada Inspektorat sebesar Rp0,02

Mutasi kurang sebesar **Rp24.890.364.005,37** terdiri atas:

a. Mutasi kurang atas reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.274.785.949,11 yaitu:

a.	Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada:	
	- *Dinas ESDM*	*474.372.000,00*
	- *Dinas Komunikasi dan Informatika*	*169.519.950,00*
	- *Biro Pengadaan Barang dan Jasa*	*65.500.000,00*
	Jumlah (1)	**709.391.950,00**
b.	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada:	
	- *Dinas Pendidikan*	*32.119.995,11*
	Jumlah (2)	**32.119.995,11**

c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada:

- *Balitbangda*	*966.456.509,00*
- *Biro Administrasi Pembangunan*	*532.867.495,00*
- *Dinas pendidikan*	*33.950.000,00*
Jumlah (3)	**1.533.274.004,00**
Jumlah (1+2+3)	**2.274.785.949,11**

b. Mutasi kurang atas reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Jasa sebesar Rp828.720.464,00 yaitu:

- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*15.733.500,00*
- *Satpol PP*	*7.293.904,00*
- *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*	*4.050.000,00*
- *RSUD Raden Mattaher*	*712.845.718,00*
- *RSJ*	*84.660.702,00*
- *Dinas Tanaman Pangan*	*4.136.640,00*
Jumlah	**Rp828.720.464,00**

c. Mutasi kurang atas reklasifikasi Aset Tetap Peralatan ke beban barang untuk diserahkan ke masyarakat sebesar **Rp2.847.981.513,00** yaitu:

- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*513.370.000,00*
- *Dinas Perkebunan*	*134.622.5745,00*
- *Dinas Ketahanan Pangan*	*401.921.300,00*
- *Dinas Kehutanan*	*586.464.468,00*
Jumlah	**Rp2.847.981.513,00**

d. Mutasi kurang atas Peralatan dan Mesin yang nilai satuannya dibawah kapitalisasi sebesar **Rp17.530.810.470,26** sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pertaruan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah sebagai berikut.

a.	*Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*134.296.388,00*
b.	*Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah*	*54.013.910,00*
c.	*Dinas Kelautan dan Perikanan*	*22.852.500,00*
d.	*Balitbangda*	*1.468.500,00*
e.	*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*	*12.758.000,00*
f.	*Dinas Pemuda dan Olahraga*	*21.728.125,00*
g.	*Dinas Perhubungan*	*1.868.463.370,00*
h.	*Dinas Pemberdayaan Perempuan*	*3.900.000,00*
i.	*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*50.649.680,00*
j.	*Dinas Lingkungan Hidup*	*1.195.000,00*
k.	*Dinas Kehutanan*	*160.121.480,00*
l.	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*	*54.220.000,00*
m.	*RSUD Rd Mattaher*	*898.270.831,00*
o.	*Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi*	*52.694.133,00*
p.	*Rumah Sakit Jiwa*	*67.546.930,00*
q.	*Sekretariat DPRD*	*173.272.000,00*

r.	*Biro Umum*	*643.395.200,000*
s.	*BPSDM*	*11.752.000,00*
t.	*Badan Penghubung Daerah*	*26.347.400,00*
u.	*PU*	*92.720.375,92*
v.	*BPKPD (Bakeuda)*	*170.104.000*
w.	*Dinas Koperasi UMKM*	*66.200.000,00*
x.	*Dinas Kesehatan*	*1.106.073.804,50*
y.	*Dinas Perindag*	*850.682.000,00*
z.	*Dinas Pendidikan*	*10.977.271.985,84*
aa.	*Dinas Tanaman Pangan*	*2.725.880,00*
ab.	*Dinas Perkebunan*	*6.086.977,00*
	Jumlah	**Rp17.530.810.470,26**

e. Mutasi kurang atas Peralatan dan Mesin yang tercatat tahun lalu tetapi belum dilakukan pembayaran (hutang) BLUD dan tahun ini dilakukan pembayaran (belanja) yang tercatat sebagai penambahan aset melalui belanja modal pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp1.408.065.609,00.

Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 17.**

Penjelasan permasalahan Peralatan dan Mesin yang masih perlu penyelesaian lebih lanjut antara lain sebagai berikut.

a. Terdapat kendaraan dinas roda dua sebanyak 43 unit sebesar Rp360.528.194,30 yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum.

b. Terdapat kendaraan dinas roda dua sebanyak 23 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 6 unit tidak dicatat dalam KIB dan LBMD sebagai berikut.

Tabel 5.54 Rincian Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD

No	Nama OPD/Biro	Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tidak Dicatat	Hasil Konfirmasi Perkiraan Harga Kendaraan ke Samsat Kota Jambi		
			Jumlah Kendaraan Diketahui Perkiraan Harganya		Jumlah Kendaraan Tidak Diketahui Perkiraan Harganya
			Roda empat	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3-4
A.	**Kendaraan Roda Dua**				
1.	Biro Umum	22	-	-	22
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat	1	-	-	1
	Sub Jumlah	23	-	-	23
B.	**Kendaraan Roda Empat**				
1.	Biro Umum	6	-	-	-
Jumlah		**29**	**6**	**-**	**23**

c. Terdapat Peralatan dan Mesin sebanyak 14 unit sebesar Rp95.155.500,00 di sembilan OPD yang hilang belum diproses penghapusan dari KIB dan belum diproses TP-TGR sebagai berikut.

Tabel 5.55 Rincian Peralatan dan Mesin di Lima OPD yang Hilang Belum Diproses Penghapusan dari KIB dan Belum Diproses TP-TGR

No.	OPD	Nama Barang	Jumlah (buah)	Nilai (Rp)	Tgl Laporan ke Kepolisian
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laptop Toshiba	1	10.000.000,00	19-Nop-14
2.	RSJD Provinsi Jambi	Laptop Sony Vaio Tahun 2014	1	10.400.000,00	10-Nop-14
		Notebook HP Tahun 2010	1	6.474.500,00	03-Nop-11
		Notebook HP Tahun 2010	1	6.474.500,00	20-Mei-11
		Printer Canon MP 287	1	955.000,00	21-Jun-12
3.	Bandiklatda	Televisi 24 Inci merk Sharp	7	24.255.000,00	17-Jun-14
4.	Dinas Kesehatan	Honda NF 125 TRF	1	15.050.000,00	30-Mrt-15
5.	Dinas Perkebunan	Yamaha Vixion BH 3647 HZ	1	21.546.500,00	15-Mei-15
Jumlah			**14**	**95.155.500,00**	

d. Terdapat Peralatan dan Mesin sebanyak dua unit sebesar Rp78.452.413,39 di dua OPD yang hilang dan sudah diproses TP-TGR tetapi belum dihapus pada KIB sebagai berikut.

Tabel 5.56 Rincian Peralatan dan Mesin di Dua OPD yang Hilang Sudah Proses TPTGR Namun Belum Dihapus pada KIB

No.	OPD	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Tanggal Laporan ke Kepolisian
1.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kamera vidio Sony	1	29.900.000,00	11-Des-14
2.	Biro Umum	*Infocus*	1	48.552.413,39	12-Nop-13
Jumlah			**2**	**78.452.413,39**	

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
Rp1.912.539.362.543.43	**Rp1.720.231.317.702,25**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.912.539.362.543,43 naik sebesar Rp192.308.044.841,18 atau sebesar 11,18% jika dibandingkan dengan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.720.231.317.702,25. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	1.720.231.317.702,25
Mutasi Tambah	Rp	259.726.656.385,18
Mutasi Kurang	Rp	67.418.611.544,00
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**1.912.539.362.543,43**

Mutasi tambah sebesar **Rp259.726.656.385,18** terdiri atas:

a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp130.883.938.396,24 dengan rincian pada **Lampiran 18**.

b. Mutasi tambah atas reklasifikasi sebesar Rp128.539.777.988,94 yaitu:

a. Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada:

- *Biro Umum*	*132.427.000,00*
- *Dinas Penanaman Modal dan PTSP*	*25.740.000,00*
Jumlah (1)	***158.167.000,00***

b Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada:

- *Sekretariat DPRD*	*5.929.220.109,72*
- *Dinas Perindag*	*2.628.928.292,00*
- *Dinas Pendidikan*	*40.000.000,00*
- *Dinas Pekerjan Umum*	*521.823.000,00*
- *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*	*43.130.280.213,17*
- *Badan Penghubung*	*5.156.279.560,00*
- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*	*845.692.857,34*
- *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*	*7.647.996.229,89*
- *Inspektorat*	*439.580.971,44*
Jumlah (2)	***66.339.801.233,56***

3) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada:

- *Sekretariat DPRD*	*329.715.000,00*
- *Rumah Sakit Umum Daerah*	*195.701.000,00*
- *Dinas Kelautan*	*93.890.000,00*
Jumlah (3)	***619.306.000,00***

4) Reklasifikasi dari Aset Lainnya pada:

- *Dinas Perindustrin dan perdagangan*	*6.784.983.969,00*
- *Dinas kebudayaan dan pariwisata*	*10.551.217.466,00*
- *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*	625.748.000,00
Jumlah (4)	**17.961.949.435,00**

5) Reklasifikasi dari Belanja dan Jasa

- *PekerjaanUmum*	1.*751.573.527,38*
- *Dinas Pendidikan*	*35.472.214.364,00*
- *Sekretariat DPRD*	*69.643.000,00*
- *Dinas Perhubungan*	*199.650.000,00*
- *Dinas Peanaman Modal dan PTSP*	*506.500.000,00*
- *Inspektorat*	*424.605.000,00*
- *RS Jiwa*	*2.672.515.429,00*
- *RSUD raden Mataher*	*2.363.853.000,00*
Jumlah (5)	***43.460.554.320,38***
	128.539.777.988,94

Jumlah (1+2+3+4+5)

c. Mutasi tambah atas Gedung dan Bangunan yang dibiayai dari utang BLUD pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp302.940.000,00

Mutasi kurang sebesar **Rp67.418.611.544,00** yang terdiri atas:

a. Mutasi kurang atas reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar **Rp65.177.852.244,00** yaitu:

1) Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin pada:	
- *Dinas Perhubungan*	*113.520.000*
Jumlah (1)	***113.520.000,00***
2) Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada:	
- *RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi*	*807.142.000,00*
- *Rumah Sakit Jiwa*	*57.751.000,00*
- *Dinas ESDM*	*100.322.396,00*
Jumlah (2)	**965.215.396,00**
3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada:	
- *RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi*	*76.769.000,00*
- *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat*	*43.188.642.320*
- *Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah*	*197.947.000,00*
Jumlah (3)	**43.463.358.320,00**
4) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada:	
- *Sekretariat DPRD*	*939.602.000,00*
- *RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi*	*394.967.000,00*
- *Dinas Pendidikan*	*968.773.600,00*
- *Dinas Perkebunana*	*29.700.000,00*
- *Dinas Kelautan dan perikanan*	*59.939.000,00*
Jumlah (4)	**2.392.981.600,00**
5) Reklasifkasi ke Beban Jasa	
- Sekretariat DPRD	46.910.000,00
Jumlah (5)	**46.910.000,00**

6)	Reklasifkasi ke Persediaan	18.195.866.928,00
	- Dinas Pekerjan Umum	
	Jumlah (6)	**18.195.866.928,00**
	Jumlah (1+2+3+4+5+6)	**65.177.852.244,00**

b. Mutasi kurang atas Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp46.906.200,00 yang terdapat pada:

1)	*Dinas Komunikasi dan Informasi*	*12.880.000,00*
2)	*RSUD Raden mataher*	*10.000.000,00*
3)	*RS Jiwa*	*9.075.000,00*
4)	*Dinas Tanman Pangan*	*14.951.200,00*
	Jumlah	**46.906.200,00**

c. Mutasi kurang dari RSUD Raden Matahir Rp600.735.000,00 mengeluarakan aset yang telah tercatat sebagai utang BLUD tahun lalu.

d. Mutasi kurang dari BPKPD Karena Hibah Ke Pemkab Bungo berdasarkan BAST Nomor: 291/BAST/Setda PBMD-3.2/2021 sebesar Rp384.160.000,00

e. Mutasi kurang dari BPKPD Karena Hibah Ke Pemkab Merangin yang belum dihitung sebagai faktor pengurang aset pada tahun lalu berdasarkan BAST Nomor: 3063/BAST/Setda PBMD-3.2/2020 sebesar Rp254.160.000,00

f. Mutasi kurang dari BPKPD Karena Hibah Ke Pemkab Tanjab barat yang belum dihitung sebagai faktor pengurang aset pada tahun lalu berdasarkan BAST Nomor: 3060/BAST/Setda PBMD-3.2/2020 sebesar Rp487.056.100,00

g. Mutasi Kurang karena reklas dari belanja modal ke beban persediaan yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perkebunan sebesar Rp467.742.000,00 (BASTB No: 15/CV-ICP/BASTB/XII/2021 TGL 28-12-2021, BASTB No: 0058/CV-ZR/BASTB/XII/2021 TGL 15-12-2021, BASTP No:021/CV-KD/BASTP/XII/2021 Tgl 15-12-2021, BASTP NO:0138/CV-SM/BASTP/XII/2021 TGL 15-12-2021, BASTB NO: 0159/CV-TBC/BASTb/XII/2021 TGL 15-12-2021,BASTP No:0047/CV-ABU/BASTP/XII/2021 TGL 15-12-2021)

Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 19.**

5.3.1.3.4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**per 31 Desember TA 2021** **Rp7.859.184.496.596,92**	**per 31 Desember TA 2020** **Rp7.727.796.254.785,16**

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.859.184.496.596,92 naik sebesar Rp 131.388.241.811,76 atau 1,7% dibandingkan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.727.796.254.785,16. Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	7.727.796.254.785,16
Mutasi Tambah	Rp	154.466.426.931,65
Mutasi Kurang	Rp	23.078.185.119,89
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**7.859.184.496.596,92**

Mutasi tambah sebesar **Rp154.466.426.931,65** terdiri dari:

a. Mutasi tambah atas realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp148.745.348.444,65 yang tersebar pada tiga OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan rincian pada **Lampiran 20**.

b. Mutasi tambah RSUD Raden Mataher sebesar Rp394.400.000,00 dari Dana tidak Terduga

c. Reklasifikasi dari selain aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.326.678.487,00 dengan rincian sebagai berikut.

1)	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pada:	
	- *DinasKelautan dan Perikanan*	*3.398.713.440,00*
	Jumlah (1)	**3.398.713.440,00**
2)	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada:	
	- *Dinas Komunikasi dan Informasi*	*169.519.950,00*
	- *Dinas ESDM*	*474.372.000,00*
	Jumlah (2)	**643.891.950,00**
3)	Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:	
	- *RSU Jiwa*	*57.751.000,00*
	- *Dinas ESDM*	*100.322.396,00*
	- *RSUD Raden Mataher*	*381.294.000,,00*
	Jumlah (3)	**539.367.396,00**
4)	Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya pada:	
	- *Dinas Pendidikan*	*68.028.700,00*
	Jumlah (4)	**68.028.700,00**
5)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	676.677.001,00
	Jumlah (4)	**676.677.001,00**
	Jumlah (1+2+3+4+5)	**5.326.678.487,00**

Mutasi kurang sebesar **Rp23.078.185.119,89** terdiri atas:

a. Mutasi kurang atas reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar **Rp343.931.220,00** pada

1)	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*	*194.000,00*
2)	*Dinas Pendidikan*	*45.028.700,00*
3)	*Dinas Sosial*	*2.423.520,00*
4)	*Dinas Perkebunan*	*125.785.000,00*
5)	*Dinas Perhubungan*	*170.500.000,00*
Jumlah		***343.931.220,00***

b. Mutasi kurang atas reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp132.427.000,00 pada Biro Umum.

c. Mutasi kurang atas reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp25.740.000,00 pada Penanaman Modal PTSP.

d. Mutasi kurang atas reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp425.944.000,00 pada Dinas Perhubungan.

e. Mutasi kurang atas reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp2.336.703.783,25 pada Dinas Pekerjaan Umum.

f. Mutasi Kurang atas reklas ke Beban barang Rp4.074.840,00 dan Beban jasa sebesar Rp80.642.572,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

g. Mutasi Kurang atas koreksi Tahun 2020 ke penyesuaian lebih saji sebesar Rp971.456.157,41 pada Dinas Pekerjaan Umum.

h. Mutasi kurang atas reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp3.623.638.489,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020.

i. Mutasi kurang atas reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp14.701.312.283,23 pada Dinas Pekerjan Umum Tahun 2020.

j. Mutasi kurang atas Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp302.793.837,00 pada RSUD Raden Mataher

k. Mutasi kurang atas Reklasifikasi Belanja Modal Ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp129.520.938,00 pada Sekretariar DPRD.

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 21.**

5.3.1.3.5	**Aset Tetap Lainnya**	**per 31 Desember TA 2021**	**per 31 Desember TA 2020**
		Rp454.067.721.431,91	**Rp466.335.510.863,40**

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp454.067.721.431,91 turun sebesar Rp12.267.789.431,49 atau sebesar 2,63% jika dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp466.335.510.863,40. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	466.335.510.863,40
Mutasi Tambah	Rp	83.491.342.937,91
Mutasi Kurang	Rp	95.759.132.369,40
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**454.067.721.431,91**

Mutasi tambah sebesar **Rp83.491.342.937,91** terdiri atas:

a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp650.471.612,00 pada delapan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan rincian pada **Lampiran 22**.

b. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari aset selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp46.609.622.092,91

1) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada:

- *Dinas Pendidikan*	*32.119.995,11*
Jumlah (1)	**32.119.995,11**

2) Reklasifikasi dari dari Aset Gedung dan Bangunan pada:

- *Balitbangda*	*197.947.000,00*
- *RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi*	*76.769.000,00*
- *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat*	*46.212.878.097,80*
Jumlah (2)	***46.487.594.097,80***

3) Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigassi dan Jaringan pada:

- *RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi*	*89.908.000,00*
Jumlah (3)	**89.908.000,00**
Jumlah (1+2+3)	**46.609.622.092,91**

c. Mutasi tambah yang di peroleh dari Dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp36.231.249.233,00

Mutasi kurang sebesar **Rp95.759.132.369,40** terdiri atas:

a. Mutasi kurang atas reklasifikasi sebesar Rp83.551.380.877,09 yaitu:

1) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada:

- Biro Umum	468.471.863,24
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat	133.333.200,00
- Dinas Pendidikan	16.610.124.053,00
- Dinas Sosial	700.000,00
Jumlah (1)	17.212.629.116,24

2) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan pada:

- Sekretariat DPR	4.650.384.508,72
- Sekretariat DPR	1.142.991.601,00
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat	521.823.000,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.628.928.292,00
- Dinas Pendidikan	40.000.000,00
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	43.130.280.213,17
- Dinas Nakertran	7.647.996.229,89
- Badan Penghubung	4.982.287.560,00
- Inspektorat	439.580.971,44
- Kesbangpol	845.692.857,34
Jumlah (2)	66.029.965.233,56

3) Reklasifikasi ke Aset Jalan Jaringan pada:

- Dinas Pendidikan	68.028.700,00
Jumlah (3)	68.028.700,00

4) Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	131.681.327,29
- Dinas Pendidikan	23.812.500,00
Jumlah (4)	155.493.827,29

5)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada:	
	- Dinas Kehutanan	38.000.000,00
	Jumlah (5)	38.000.000,00
6)	Reklasifikasi ke Beban Jasa pada:	
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	284.000,00
	Jumlah (6)	284.000,00
7)	Reklasifikasi ke Beban Persdian Untuk Masyarakat pada:	
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	46.980.000,00
	Jumlah (7)	46.980.000,00
	Jumlah (1+2+3+4+5+6+7)	83.551.380.877,09

b. Mutasi kurang karena nilai Aset Tetap Lainnya dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp12.207.751.492,31 yang terdapat pada:

1)	*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*	*5.070.912,00*
2)	*Dinas Sosial*	*7.050.000,00*
3)	*Dinas Pendidikan*	*12.195.630.580,31*
	Jumlah	12.207.751.492,31

Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 23.**

5.3.1.3.6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**per 31 Desember TA 2021** **Rp86.723.699.079,21**	**per 31 Desember TA 2020** **Rp94.622.912.486,72**

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.723.699.079,21 turun sebesar Rp7.899.213.407,51 atau 8,34% jika dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.622.912.486,72. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	94.622.912.486,72
Mutasi Tambah	Rp	16.641.833.600,00
Mutasi Kurang	Rp	24.541.047.007,51
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**86.723.699.079,21**

Mutasi tambah sebesar **Rp16.641.833.600,00** terdiri atas:

a. Mutasi tambah atas reklasifikasi sebesar Rp3.154.865.600,00 dari aset selain Konstruksi Dalam Pengerjaan yaitu:

1)	Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:	
	- *Dinas Perhubungan*	*425.944.000,00*
	- *RSUD Raden Mataher*	*730.907.000,00*
	- *Sekretariat DPRD*	*939.602.000,00*

- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*59.939.000,00*
- *Dinas Perkebunan*	*29.700.000,00*
- *Dinas Pendidikan*	968.773.600,00
Jumlah (1)	**3.154.865.600,00**

b. Mutasi tambah atas Dana Bantuan Tidak Terduga sebesar Rp13.486.968.000,00 pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

Mutasi kurang sebesar **Rp24.541.047.007,51** Terdiri dari :

a. Reklasifikasi ke aset selain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.643.541.777,80

1) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan pada:

- *Sekretariat DPRD*	*329.715.000,00*
- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*93.890.000,00*
- *RSUD Raden Mataher*	195.701.000,00
Jumlah (1)	**619.306.000,00**

2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada:

- *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat*	*3.024.235.777,80*
Jumlah (2)	**3.024.235.777,80**

Konstruksi Dalam Pengerjaan berada pada 13 OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	3.164.770.909,20
2.	Dinas Kesehatan	247.460.000,00
3.	RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	77.064.202.585,00
4.	RSJD Provinsi Jambi	45.683.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	798.909.000,01
6.	Dinas Perhubungan	2.924.660.000,00
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan	109.659.000,00
8.	Dinas Perkebunan	58.985.000,00
9.	Dinas Kehutanan	148.350.000,00
10.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	332.941.000,00
11.	Sekretariat DPRD	929.463.000,00
12.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	-
13.	Badan Keuangan Daerah	898.615.585,00
Jumlah		**86.723.699.079,21**

Penjelasan lebih lanjut atas Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut.

b. Reklasifikasi Ke Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didalamnya termasuk pekerjaan pembangunan Jembatan Rantau Limau Manis di atas tanah Pemerintah Kabupaten Merangin sebesar Rp20.500.649.426,97.

c. Reklasifikasi ke Aset lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena Temuan dari LHP BPK RI Tahun 2020 atas Laporan Keuangan Perangkat daerah Tahun 2020 Rp396.855.802,74.

5.3.1.3.7	**Akumulasi Penyusutan**	**per 31 Desember TA 2021 (Rp6.175.741.278.091,54)**	**per 31 Desember TA 2020 (Rp5.712.247.455.174,22)**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp6.175.741.278.091,54) naik sebesar (Rp 463.493.822.917,32) atau 8,11% jika dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp5.712.247.455.174,22).

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	(5.712.247.455.174,22)
Mutasi Tambah	Rp	*(515.377.079.833,51)*
Mutasi Kurang	Rp	*(51.883.256.916,19)*
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**(6.175.741.278.091,54)**

Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.58 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Peralatan dan Mesin	(1.359.390.205.377,01)	(1.171.715.843.665,53)	(187.674.361.711,49)	16,02
2.	Gedung dan Bangunan	(407.614.290.332,34)	(386.722.711.912,84)	(20.891.578.419,50)	5,40
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4.408.670.332.382,19)	(4.153.725.817.595,85)	(254.944.514.786,34)	6,14
4.	Aset Tetap Lainnya	(66.450.000,00)	(83.082.000,00)	(16.632.000,00)	(20,02)
	Jumlah	(6.175.741.278.091,54)	(5.712.247.455.174,22)	(463.493.822.917,32)	8,11

Berdasarkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Akumulasi Penyusutan mengalami kenaikan, dengan kenaikan terbesar pada Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar (Rp4.408.670.332.382,19) sebesar 6,14%.

Persentase Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan atas keseluruhan Akumulasi Penyusutan adalah sebesar 71,39%. Hal itu memperlihatkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan paling berpengaruh atas keseluruhan Akumulasi Penyusutan.

Rincian atas Akumulasi Penyusutan per jenis aset tetap per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 24** dan **Lampiran 25.**

Mutasi tambah sebesar **(Rp515.377.079.833,51)** terdiri atas:

a. Penambahan Beban Penyusutan tahun 2021 sebesar **(Rp456.452.086.464,65)**.

b. Penambahan Akumulasi Penyusutan atas aset yang diperoleh dari hibah sebesar **(Rp17.233.482.300,00)** yaitu:

- *RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi*	*(17.233.482.300,00)*
Jumlah	**(17.233.482.300,00)**

c. Mutasi tambah atas koreksi tambah sebesar **(Rp254.999.849,40)** yaitu:

- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*(37.916.716,28)*
- *Badan Kepegawaian Daerah*	*(169.474,19)*
- *Inspektorat*	*(78.779.021,00)*
- *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*	*(29.365.000,02)*
- *Badan Lingkungan Hidup*	*(41.829.972,30)*
- *Dinas Kehutanan*	*(16.933.579,98)*
- *RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi*	*(2.670.041,66)*
- *Rumah Sakit Jiwa*	*(11.888.000,00)*
- *Badan Perencanaan Daerah*	*(4.003.432,61)*
- *Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan*	*(12.349.001,35)*
- *Dinas Pendidikan*	*(18.749.110,00)*
- *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*(346.500,01)*
Jumlah	**(254.999.849,40)**

d. Mutasi Tambah yang berasal dari Reklas dan Mutasi sebesar **(Rp41.436.511.219,46)** yaitu :

- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*	*(103.657.873,54)*
- *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*	*(23.445.981.466,76)*
- *RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi*	*(1.536.471.450,00)*
- *Tenaga Kerja dan Transmigrasi*	*(1.055.823.036,78)*
- *Biro Umum*	*(468.471.863,24)*
- *Biro Pengadaan Barang dan Jasa*	*(192.781.235,50)*
- *BPKPD (Bakeuda)*	*(13.503.928.141,82)*
- *Dinas Perindustrian dan Perdagangan*	*(75.000.000)*
- *Dinas Pendidikan*	*(35.076.708,33)*
- *Sekretariat DPR*	*(762.344.806,43)*
- *Biro Pengadaan Barang dan Jasa*	*(56.395.463,60)*
- *Badan Penghubung*	*(200.579.173,46)*
Jumlah	**(41.436.511.219,46**

Mutasi kurang sebesar **(Rp51.883.256.916,19)** terdiri atas:

a. Mutasi kurang atas hibah keluar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar **(Rp249.175.637,96)**.

b. Mutasi kurang karena Aset yang di hapus pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar **(Rp12.424.999,99).**

c. Mutasi kurang atas koreksi sebesar **(Rp13.846.543.117,60)** yaitu:

- *Dinas Kelautan dan Perikanan*	*(2.918.333,33)*
- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*	*(20.852.295,00)*
- *Satuan Polisi Pamong Praja*	*(166.666,66)*
- *inspektorat*	*(792.796.690,40)*
- *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*(346.500,03)*
- *PUPR*	*(11.473.307.886,84)*
- *Dinas Kesehatan*	*(661.466,66)*
- *BPKPD (Bakeuda)*	*(5.210.143,49)*
- *Sekretariat DPR*	*(10.916.235,00)*
- *Badan Penghubung*	*(136.300.000,19)*
- *Dinas Pendidikan*	*(1.402.934.400,00)*
- *Biro Umum*	*(132.500,00)*
Jumlah	**(Rp13.846.543.117,60)**

d. Mutasi kurang karena di Reklas dan Mutasi sebesar **(Rp37.775.113.160,64)** yaitu :

- *Biro Umum*	*(751.428.571,43)*
- *Biro Administrasi Pembangunan*	*(725.648.730,50)*
- *Biro Organisasi*	*(497.037.014,00)*
- *PUPR*	*(22.297.070.702,89)*
- *Biro Pengadaan Barang dan Jasa*	*(13.323.186.199,74)*
- *Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan*	*(180.741.942,08)*
Jumlah	**(37.775.113.160,64)**

5.3.1.4	**Dana Cadangan**	**per 31 Desember TA 2021**	**Per 31 Desember TA 2020**
			Rp0,00

Dana Cadangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan Dana Cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

Dana cadangan merupakan alokasi dana yang dicadangkan Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu (seperti pembangunan/belanja modal yang memerlukan dana beberapa tahun anggaran/*multi years*) dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

5.3.1.5	**Aset Lainnya**	**per 31 Desember TA 2021**	**per 31 Desember TA 2020**
		Rp1.148.513.279.597,10	**Rp1.168.209.658.680,97**

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.148.513.279.597,10 turun sebesar Rp19.696.379.083,87 atau sebesar 1,69% jika dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.168.209.658.680,97.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.59 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	120.562.000,00	120.562.000,00	-	-
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS)	397.742.089.055,00	397.742.089.055,00	-	-
3.	Aset Tidak berwujud	10.500.155.449,46	10.221.497.949,46	278.657.500,00	2,73
4.	Aset Lain-lain	905.346.198.451,18	915.157.760.271,41	(9.811.561.820,23)	-1,07
5.	**Jumlah Aset Lainnya (1 s/d 4)**	**1.313.709.004.955,64**	**1.323.241.909.275,87**	**(9.532.904.320,23)**	-0,72
6.	Akumulasi Amortisasi	(7.785.942.478,66)	(7.515.137.483,18)	(270.804.995,48)	3,60
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain	(157.409.782.879.88)	(147.517.113.111,72)	(9.892.669.768,16)	6,71
Jumlah Nilai Buku Aset Lainnya (5+6+7)		**1.148.513.279.597,10**	**1.168.209.658.680,97**	**(19.696.379.083,87)**	(1,69)

Berdasarkan Aset Lainnya per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Aset Lainnya mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain sebesar Rp(9.892.669.768,16) atau 6,71%.

Persentase Aset Lain-lain atas keseluruhan Aset Lainnya adalah sebesar (68,92)%. Hal itu memperlihatkan Aset Lain-lain paling berpengaruh atas keseluruhan Aset Lainnya.

		per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
5.3.1.5.1	**Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**	**Rp120.562.000,00**	**Rp120.562.000,00**

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp120.562.000,00 sama dengan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp120.562.000,00.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah dikeluarkan surat pembebanannya dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.60 RincianTuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	29.900.000,00	29.900.000,00	-	-
2.	Badan Keuangan Daerah	78.345.500,00	78.345.500,00	-	-
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.316.500,00	12.316.500,00	-	-
4.	Dinas Kehutanan	-	-	-	-
Jumlah		**120.562.000,00**	**120.562.000,00**	**-**	**-**

Persentase Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Badan Keuangan Daerah atas keseluruhan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sebesar (64,98)%. Hal itu memperlihatkan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Badan Keuangan Daerah paling berpengaruh atas keseluruhan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

5.3.1.5.2		per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS)	**Rp397.742.089.055,00**	**Rp397.742.089.055,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS) per 31 Desember 2021 sebesar Rp397.742.089.055,00 sama dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS) per 31 Desember 2020 sebesar Rp397.742.089.055,00 yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga dalam bentuk BGS (Bangun Guna Serah).

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.61 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS) per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	BGS dengan PT Jambi Sapta Manunggal	8.333.440.000,00	8.333.440.000,00	-	-
2.	BGS dengan PT Simota Putra Parayudha (WTC)	13.986.560.000,00	13.986.560.000,00	-	-
3.	BGS dengan PT Eraguna Bumi Nusa	167.422.089.055,00	167.422.089.055,00	-	-
4.	BGS dengan PT Putra Kurnia Properti	208.000.000.000,00	208.000.000.000,00	-	-
Jumlah		**397.742.089.055,00**	**397.742.089.055,00**	**-**	**-**

Berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS) per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS) tidak ada kenaikan masih sama dengan tahun 2020.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS) diuraikan sebagai berikut.

a. BGS dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP) dalam pembangunan dan pengelolaan Jambi Tepian Ratu River View & Resort di Jalan Slamet Riyadi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Kontrak Produksi. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS pada tanggal 27 Januari 1995.

   Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan sebidang tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) seluas 52.084 m^2 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura dan PT JSMP akan memanfaatkan tanah dengan status Hak Guna Bangun (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) selama 30 tahun sejak ditandatanganinya kontrak produksi untuk mendirikan Hotel secara bertahap berkapasitas sebanyak 92 kamar dalam jangka waktu lima tahun.
   PT JSMP harus membayar kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 atas pemberian hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dan harus menyediakan dana investasi Rp20.521.096.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun ke-3 sesuai perjanjian. Setiap keterlambatan pembayaran royalti akan dikenakan denda sebesar 1 per mil setiap hari. Jangka waktu BGS tersebut selama 30 tahun.

   Pencatatan Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak ketiga (BGS) dengan PT JSMP diakui sebesar nilai investasi yaitu sebesar Rp8.333.440.000,00 yaitu seluas 52.084 m^2 dengan nilai Tanah Tahun 2002 sebesar Rp160.000,00/m^2.

b. BGS dengan PT Simota Putra Parayudha sesuai dengan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha dalam pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi yang telah diubah melalui Addendum I Kesepakatan Bersama Nomor 1/KB/OHK/II/2006 dan Nomor 028/SPP-KB/II/2006 tanggal 28 April 2006. Kerja sama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Nomor 101 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha yang telah diubah melalui Akta Notaris Nomor 24 tanggal 18 Desember 2020 tentang Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS.

   Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa kerja sama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kawasan pusat perdagangan dan jasa yang terdiri atas pusat perbelanjaan/Mall dan/atau Hotel. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 10.765 m^2 sebesar Rp13.986.560.000,00. PT Simota Putra Parayudha berkewajiban melakukan pembayaran biaya kompensasi bangunan milik PT Pelindo II, membayar biaya pembuatan sertifikat HPL untuk dan atas nama PT Pelindo II sebesar 50% dari biaya seluruhnya, mengganti tanah dan membangun gedung pusat kesehatan pelabuhan, mengganti pembangunan gedung administrator pelabuhan dan membiayai pembangunan pusat perdagangan/perbelanjaan dan jasa dengan perkiraan investasi Rp105.000.000.000,00 serta berkewajiban membayar

royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak pengoperasian/grand opening. Jangka waktu BGS tersebut selama 30 tahun.

c. BGS dengan PT Eraguna Bumi Nusa sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Eraguna Bumi Nusa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru Nomor 06/PK.GUB/PU/2014 - Nomor : 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang telah diubah melalui Addendum Pertama Nomor 644/09/Setda.PKS/X/2018 - Nomor 09/X/EBN/PKS 2018 tanggal 11 Oktober 2018. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS.

   Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa kerja sama dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 71.757 m^2 sebesar Rp167.422.089.055,00. PT Eraguna Bumi Nusa berkewajiban menyediakan biaya pembangunan sebesar Rp176.600.000.000,00 untuk membangun pasar dan fasilitas penunjang lainnya serta berkewajiban membayar kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp17.660.000.000,00 selama jangka waktu perjanjian tersebut selama 20 tahun terhitung sejak diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB).

d. BGS dengan PT Putra Kurnia Properti sesuai dengan perjanjian nomor PK.GUB/PU/2014 dan 001/JBC-PKP/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal kerja sama pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center (JBC). Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan tanah seluas 76.750 m^2 dan bangunan diatasnya dengan nilai appraisal sebesar Rp208.000.000.000,00 yang beralamat di Jalan Kapten A. Bakarudin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura sedangkan PT Putra Kurnia Properti membangun fasilitas dan mengelola Jambi Bisnis Center dengan perkiraan biaya pembangunan dan biaya pengelolaan sebesar Rp1.501.267.500.000,00 serta wajib membayar biaya kontribusi sebesar Rp56.411.250.000,00 yang diangsur selama 30 tahun.

		per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
5.3.1.5.3	**Aset Tidak Berwujud**	**Rp10.500.155.449,46**	**Rp10.221.497.949,46**

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.500.155.449,46 naik sebesar Rp278.657.500,00 atau 2,73% jika dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.221.497.949,46.

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	10.221.497.949,46
Mutasi Tambah	Rp	278.657.500,00
Mutasi Kurang	Rp	-
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**10.500.155.449,46**

Mutasi Tambah sebesar **Rp 278.657.500,00** terdiri atas:

a. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari Belanja Modal yang salah Penganggaran Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp33.950.000,00.

b. Mutasi tambah atas reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp23.812.500,00.

c. Mutasi tambah atas reklasifikasi Belanja Modal yang Salah penganggaran Aset Tetap Lainnya pada Dinas PUPR Provinsi Jambi sebesar Rp98.395.000,00.

d. Mutasi tambah dari Perolehan Utang Belanja Modal pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp57.000.000,00.

e. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari Belanja Modal yang salah Penganggaran Peralatan dan Mesin pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi sebesar Rp65.500.000,00.

Aset Tidak Berwujud per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

5.3.1.5.4	**Aset Lain-lain**	**per 31 Desember TA 2021**	**per 31 Desember TA 2020**
		Rp905.346.198.451,18	**Rp915.157.760.271,41**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp905.346.198.451,18 turun sebesar Rp(9.811.561.820,23) atau 1,07% jika dibandingkan dengan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp915.157.760.271,41.

Rincian mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	915.157.760.271,41
Mutasi Tambah	Rp	113.467.056.324,03
Mutasi Kurang	Rp	123.278.618.144,26
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**905.346.198.451,18**

Mutasi tambah sebesar Rp**113.467.056.324,03** yang terdiri dari atas:

a. Mutasi tambah atas reklasifikasi sebesar Rp4.266.169.917,28 yaitu:

1) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada:

- *Balitbanda Pertambahan nilai dari Aset rusak berat*	*966.456.509,00*
- *Biro Administrasi Pembangunan Pertambahan nilai dari Aset rusak berat*	*532.867.495,00*
Jumlah (1)	**1.499.324.004,00**

2) Reklasifikasi dari Aset Jalan Jaringan pada:

- *Dinas Pendidikan*	*2.336.703.783,25*
Jumlah (2)	**2.336.703.783,25**

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada:

- *Dinas PUPR*	*33.286.327,29*
Jumlah (3)	**33.286.327,29**

4) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	*396.855.802,74*
Jumlah (4)	**396.855.802,74**
Jumlah (1)+(2)+(3)+(4)	**4.266.169.917,28**

b. Mutasi tambah atas pencatatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang sampai dengan tanggal 31 desember 2021 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp109.200.886.405,75.

Mutasi kurang sebesar **Rp123.278.618.144,26** yang terdiri dari:

a. Mutasi kurang sebesar Rp12.425.000,00 karena penghapusan TP-TGR yang telah selesai ditindak lanjuti.

b. Mutasi kurang atas koreksi lebih saji tahun sebelumnya pada Biro Umum sebesar Rp0,09.

c. Mutasi kurang yang berasal dari Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp102.719.048.316,81.

d. Mutasi kurang atas reklasifikasi Aset dari Aset Lainnya ke Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar Rp282.968.000,00.

e. Mutasi kurang atas reklasifikasi Aset dari Aset Lainnya ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar Rp1.625.550.391,36.

f. Mutasi kurang atas reklasifikasi Aset dari Aset Lainnya ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi sebesar Rp6.784.983.969,00.

g. Mutasi kurang atas reklasifikasi Aset dari Aset Lainnya ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sebesar Rp625.748.000,00.

h. Mutasi kurang atas reklasifikasi Aset dari Aset Lainnya ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Jambi sebesar Rp676.677.001,00.

i. Mutasi kurang atas reklasifikasi Aset dari Aset Lainnya ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Jambi sebesar Rp10.551.217.466,00.

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp905.346.198.451,18 dengan uraian sebagai berikut.

a. Aset yang secara fungsi dan keberadaannya dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp581.954.105.887,02 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp124.001.048.453 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp457.498.079.934,02.`

b. Aset rusak berat sebesar Rp267.788.094.240,85 pada sebanyak 42 OPD.

c. Aset Lain-lain berupa Survei Investigasi Desain (SID) sebesar Rp1.175.043.137,61 yang terdiri atas Perluasan Sawah Kegiatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Tata Air Mikro sebesar Rp798.980.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan dan SID pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp376.063.137,61.

d. Piutang jangka panjang berupa komitemen kontribusi dari perjanjian BGS yang jatuh tempo lebih dari setahun, yaitu lebih dari 31 Desember 2021 sebesar Rp13.368.960.538,00.

e. Hewan ternak yang digulirkan oleh petani yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp29.772.400.000,00.

f. Aset yang hilang pada Biro Umum yang belum ditetapkan surat pembebanan atas ganti kerugiannya sebesar Rp144.573.349,91.

g. Nilai kerugian atas jaminan pelaksanaan dan kekurangan volume yang belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan belum ditetapkan SK Pembebanannya/SKTJM nya sebesar Rp11.597.962.797,79 yaitu:

1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp129.710.546,96;

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp11.468.252.250,83

Aset Lainnya per OPD dirinci pada **Lampiran 27.**

5.3.1.5.5	**Akumulasi Amortisasi**	**per 31 Desember TA 2021 (Rp7.785.942.478,66)**	**per 31 Desember TA 2020 (Rp7.515.137.483,18)**

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp7.785.942.478,66) naik sebesar (Rp270.804.995,48) atau sebesar 3,60% jika dibandingkan dengan Akumulasi Amortisasi tahun 2020 sebesar (Rp7.515.137.483,18).

Rincian mutasi Akumulasi Amortisasi sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	(7.515.137.483,18)
Mutasi Tambah	Rp	(270.804.995,48)
Mutasi Kurang	Rp	-
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**(7.785.942.478,66)**

Mutasi tambah sebesar (**Rp270.804.995,48**) yang terdiri atas:

a. Penambahan beban amortisasi Tahun 2021 sebesar Rp268.296.995,48 yaitu:

1)	*Dinas Kesehatan*	*4.598.000,00*
2)	*RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi*	*14.770.000,00*
3)	*Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*3.480.340,00*
4)	*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*6.220.000,00*
5)	*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*	*29.026.666,67*
6)	*Biro Umum*	*22.605.000,01*
7)	*Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*34.217.916,67*
8)	*Badan Keuangan Daerah*	*56.687.500,00*
9)	*Dinas Kelautan dan Perikanan*	*5.798.863,80*
10)	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*	*89.930.000,00*
11)	*Dinas Pendidikan*	*962.708,33*
	Jumlah	**Rp268.296.995,48**

b. Mutasi tambah atas kurang catat selisih perhitungan akumulasi Tahun 2020 sebesar Rp2.508.000,00.

Rincian Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.62 Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Dinas Pendidikan	(2.400.962.708,33)	(2.400.000.000,00)	(962.708,33)	0,04
2.	Dinas kesehatan	(25.080.000,00)	(17.974.000,00)	(7.106.000,00)	39,53
3.	Rumah Sakit Umum	(141.885.000,00)	(127.115.000,00)	(14.770.000,00)	11,62
4.	Pekerjaan Umum	(1.170.064.000,00)	(1.170.064.000,00)	-	
5.	Dinas Perhubungan	(1.704.608.000,00)	(1.704.608.000,00)	-	
6.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(205.435.000,00)	(176.408.333,33)	(29.026.666,67)	16,45
7.	Biro Hukum	(129.480.000,00)	(129.480.000,00)	-	
8.	Biro Pembangunan dan kerja sama	(57.120.800,00)	(57.120.800,00)	-	
9.	Biro umum	(145.100.380,48)	(122.495.380,47)	(22.605.000,01)	18,45
10.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	(111.149.270,84)	(76.931.354,17)	(34.217.916,67)	44,48
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.182.076.666,67)	(1.175.856.666,67)	(6.220.000,00)	0,53
12.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(7.250.708,33)	(3.770.368,33)	(3.480.340,00)	92,31
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(188.574.166,67)	(98.644.166,67)	(89.930.000,00)	91,17
14.	Badan Keuangan Daerah	(288.161.458,33)	(231.473.958,33)	(56.687.500,00)	24,29
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan	(28.994.319,01)	(23.195.455,21)	(5.798.863,80)	25,00
Jumlah		**(7.785.942.478,66)**	**(7.515.137.483,18)**	**(270.804.995,48)**	**3,60**

Berdasarkan Akumulasi Amortisasi per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Akumulasi Amortisasi mengalami kenaikan, dengan kenaikan terbesar pada Akumulasi Amortisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar (Rp89.930.000,00) atau 91,17%.

Persentase Akumulasi Amortisasi di Dinas Pendidikan atas keseluruhan Akumulasi Amortisasi adalah sebesar 30,84%. Hal itu memperlihatkan Akumulasi Amortisasi di Dinas Pendidikan paling berpengaruh atas keseluruhan Akumulasi Amortisasi.

5.3.1.5.6	**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain**	**per 31 Desember TA 2021 (Rp157.409.782.879,88)**	**per 31 Desember TA 2020 (Rp147.517.113.111,72)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar (Rp157.409.782.879,88) naik sebesar (Rp9.892.669.768,16) atau sebesar 6,71% jika dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar (Rp147.517.113.111,72).

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	(147.517.113.111,72)
Mutasi Tambah	Rp	(9.967.669.768,16)
Mutasi Kurang	Rp	75.000.000,00
Saldo Tahun 2021	**Rp**	**(157.409.782.879,88)**

Mutasi tambah sebesar **(Rp9.967.669.768,16)** yang terdiri atas:

a. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Inspektorat sebesar (Rp792.796.690,40).

b. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Rp294.715.645,00).

c. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama (Rp532.867.495,00).

d. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Biro Organisasi (Rp497.037.014,00).

e. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Biro Administrasi Pimpinan (Rp222.212.550,00).

f. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Biro Administrasi Pimpinan (Rp11.712.500,00).

g. Mutasi tambah atas reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Rp4.478.472.473,75).

h. Mutasi tambah atas koreksi kurang saji tahun sebelumnya pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar (Rp3.137.855.400,00).

i. Mutasi tambah atas koreksi kurang saji tahun sebelumnya pada Biro Umum sebesar (Rp0,01).

Mutasi kurang sebesar **Rp75.000.000,00** yang berasal dari reklasifikasi kurang Akumulasi Penyusutan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.63 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya- Aset Lain Lain per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(20.852.295,00)	(20.852.295,00)	-	-
2.	Biro Umum	(6.856.809.758,53)	(6.856.809.758,52)	-	-
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.379.570.490,00)	(1.379.570.490,00)	-	-
4.	RSJD Provinsi Jambi	(491.614.858,00)	(491.614.858,00)	-	-
5.	Sekretariat DPRD	(3.679.949.732,00)	(3.679.949.732,00)	-	-
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(217.584.101,50)	(217.584.101,50)	-	-
7.	Badan Penanaman Modal Daerah dan PTSP	(204.952.438,00)	(204.952.438,00)	-	-
8.	Badan Keuangan Daerah	(2.156.916.059,75)	(2.156.916.059,75)	-	-
9.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.814.121.758,20)	(1.814.121.758,20)	-	-
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(19.811.836.630,72)	(19.811.836.630,72)	-	-
11.	Dinas Perhubungan	(1.554.547.264,00)	(1.554.547.264,00)	-	-
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(683.891.746,00)	(683.891.746,00)	-	-
13.	Dinas Tanaman Pangan	(1.329.565.949,75)	(1.329.565.949,75)	-	-
14.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah-	(4.409.270.977,02)	(4.409.270.977,02)	-	-
15.	Biro Hukum	(185.989.000,00)	(185.989.000,00)	-	-
16.	Dinas Ketahanan Pangan	(112.000.000,00)	(112.000.000,00)	-	-

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
17.	Dinas Pendidikan	(93.280.270.772,54)	(93.280.270.772,54)	-	-
18.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(3.231.344.404,90)	(3.231.344.404,90)	-	-
19.	Dinas Perkebunan	(4.900.000,00)	(4.900.000,00)	-	-
20.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(29.700.000,00)	(29.700.000,00)	-	-
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(13.900.000,00)	(88.900.000,00)	(75.000.000,00)	(84,36)
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(21.700.000,00)	(21.700.000,00)	-	-
23.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(25.200.000,00)	(25.200.000,00)	-	-
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	(1.212.597.525,00)	(1.212.597.525,00)	-	-
25.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(7.327.938.674,57)	(2.849.466.200,82)	(4.478.472.473,75)	157,17
26.	Dinas Perpustakaan	(181.000.000,00)	(181.000.000,00)	-	-
27.	Badan Penghubung Daerah Provinsi	(1.682.561.150,00)	(1.682.561.150,00)		-
28.	Rumah Sakit Umum	(3.137.855.400,00)	-	(3.137.855.400,00)	100,00
29.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	(294.715.645,00)	-	(294.715.645,00)	100,00
30.	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	(11.712.500,00)	-	(11.712.500,00)	100,00
31.	Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama	(532.867.495,00)	-	(532.867.495,00)	100,00
32.	Biro Organisasi	(497.037.014,00)	-	(497.037.014,00)	100,00
33.	Biro Administrasi Pimpinan	(222.212.550,00)	-		100,00
34.	Inspektorat	(792.796.690,40)	-	(792.796.690,40)	100,00

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
Jumlah		(157.409.782.879,88)	(147.517.113.111,72)	(9.820.457.248,15)	6,66

Berdasarkan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain mengalami kenaikan, dengan kenaikan terbesar pada Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Pendidikan sebesar (Rp93.280.270.772,00) atau 100%.

Persentase Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Pendidikan atas keseluruhan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain adalah sebesar 93,72%. Hal itu memperlihatkan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Pendidikan paling berpengaruh atas keseluruhan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain.

5.3.2 Kewajiban

per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
Rp381.763.642.325,37	Rp389.279.172.269,92

Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp381.763.642.325,37 turun sebesar Rp7.515.529.944,55 atau 1,93% jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp389.279.172.269,92. Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Rincian Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.64 Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Kewajiban Jangka Pendek	381.763.642.325,37	389.279.172.269,92	(7.515.529.944,55)	(1,93)
2.	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah		381.763.642.325,37	389.279.172.269,92	(7.515.529.944,55)	(1,93)

Berdasarkan Kewajiban per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Kewajiban mengalami penurunan pada Kewajiban Jangka Pendek.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
Rp381.763.642.325,37	Rp389.279.172.269,92

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp381.763.642.325,37 turun sebesar Rp7.515.529.944,55 atau 1,93% jika dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp389.279.172.269,92.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.65 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	per 31 Desember TA 2021 (Rp)	per 31 Desember TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
1.	Utang PFK	-	-	-	-
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
3.	Utang Belanja	229.780.093.221,62	244.663.792.361,66	(14.883.699.140,04)	(6,00)
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	151.983.549.103,75	144.615.379.908,26	7.368.169.195,49	5,00
Jumlah		**381.763.642.325,37**	**389.279.172.269,92**	**(7.515.529.944,55)**	**(1,93)**

Berdasarkan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember TA 2021 di atas diketahui bahwa Utang Belanja mengalami penurunan sebesar 14.883.699.140,04 atau 6,00%, sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya mengalami kenaikan sebesar 7.368.169.195,49 atau 5,00%.

Persentase Utang Belanja atas keseluruhan Kewajiban Jangka Pendek adalah sebesar 60,18%. Hal itu memperlihatkan Utang Belanja paling berpengaruh atas keseluruhan Kewajiban Jangka Pendek.

5.3.2.1.1 Utang PFK

per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
Rp0,00	Rp0,00

Utang PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan Utang PFK per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyetorkan seluruh PFK yang dipungut ke Kas Daerah.

5.3.2.1.2 Utang kepada Pihak Ketiga

per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
Rp0,00	Rp0,00

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
Rp229.780.093.221,62	Rp244.663.792.361,66

Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp229.780.093.221,62 turun sebesar Rp14.883.699.140,04 atau 6,00% dari Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp244.663.792.361,66.

Rincian utang belanja sebesar **Rp229.780.093.221,62** diuraikan sebagai berikut.

a. Utang Belanja Pegawai sebesar **Rp8.335.550.894,52**

Utang belanja ini keseluruhan berasal dari Utang Belanja Pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp8.335.550.894,52.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp37.901.386.176,00**

Utang Belanja Barang dan Jasa ini berasal dari Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp.27.955.804.826,00 pada Rumah Sakit Jiwa sebesar 3.600.000,00, kemudian berasal dari Utang Belanja Barang pakai habis bahan-bahan kimia pada Dinas Kesehatan sebesar RP.8.024.019.481,00 dan berasal dari Utang Belanja Jasa sebesar Rp.1.917.961.869,00 yang keseluruhannya merupakan utang belanja jasa kantor dengan rinci pada **Lampiran 28**.

c. Utang Belanja Modal sebesar **Rp4.675.096.271,10**

Utang Belanja Modal tersebut berasal dari Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp4.309.546.271,10 dengan rincian:

- Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar *Rp3.860.138.501,50*
- Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar *Rp139.102.650,00*
- Utang Belanja Modal Komputer sebesar *Rp.219.575.000,00*
- Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar *Rp.90.730.119,60.*

Utang Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp365.550.000,00 yang berasal dari Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar *Rp302.940.000,00* dan pada Dinas Pendidikan sebesar *Rp62.610.000,00*.

d. Utang Belanja Bagi Hasil sebesar **Rp.178.868.059.880,00**

Utang Belanja Bagi Hasil berasal dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.178.868.059.880,00 yang merupakan utang Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1) Bagi Hasil PKB Tahun 2021 sebesar Rp31.878.259.424,00 dengan rincian :

Tabel 5.66 Rincian Utang Bagi Hasil PKB Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	KOTA JAMBI	9.631.197.863,00
2	BATANGHARI	2.799.860.391,00
3	BUNGO	2.565.411.897,00

NO	KAB/KOTA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	TEBO	2.422.615.367,00
5	MERANGIN	2.605.427.244,00
6	SAROLANGUN	2.229.081.298,00
7	MUARO JAMBI	2.441.939.615,00
8	TANJAB. BARAT	2.249.140.608,00
9	TANJAB. TIMUR	1.755.445.875,00
10	SUNGAI PENUH	1.398.928.393,00
11	KERINCI	1.779.210.873,00
JUMLAH		**31.878.259.424,00**

2) Bagi Hasil BBNKB Tahun 2021 sebesar Rp29.835.247.621,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Rincian Utang Bagi Hasil BBNKB Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	KOTA JAMBI	8.847.299.405,00
2	BATANGHARI	2.804.043.211,00
3	BUNGO	2.899.872.015,00
4	TEBO	2.084.684.966,00
5	MERANGIN	2.247.572.399,00
6	SAROLANGUN	1.918.146.946,00
7	MUARO JAMBI	2.478.160.658,00
8	TANJAB. BARAT	1.935.408.185,00
9	TANJAB. TIMUR	1.885.238.932,00
10	SUNGAI PENUH	1.203.791.997,00
11	KERINCI	1.531.028.907,00
JUMLAH		**29.835.247.621,00**

3) Bagi Hasil PBBKB Tahun 2021 sebesar Rp86.644.341.181,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Rincian Utang Bagi Hasil PBBKB Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	KOTA JAMBI	24.307.832.241,00
2	BATANGHARI	6.745.858.323,00
3	BUNGO	8.434.946.981,00
4	TEBO	5.246.764.237,00
5	MERANGIN	6.849.722.540,00
6	SAROLANGUN	5.954.586.601,00
7	MUARO JAMBI	8.056.440.236,00
8	TANJAB. BARAT	4.756.256.959,00
9	TANJAB. TIMUR	6.001.816.908,00
10	SUNGAI PENUH	5.495.246.568,00
11	KERINCI	4.794.869.587,00
JUMLAH		**86.644.341.181,00**

4) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2021 sebesar Rp232.335.552,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	KOTA JAMBI	110.272.307,00
2	BATANGHARI	10.710.505,00
3	BUNGO	16.533.277,00
4	TEBO	4.824.987,00
5	MERANGIN	7.631.929,00
6	SAROLANGUN	6.489.501,00
7	MUARO JAMBI	14.818.487,00
8	TANJAB. BARAT	35.893.485,00
9	TANJAB. TIMUR	2.842.616,00
10	SUNGAI PENUH	7.683.138,00
11	KERINCI	14.635.320,00
JUMLAH		**232.335.552,00**

5) Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2021 sebesar Rp30.277.876.102,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70 Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH
1	2	3
1	KOTA JAMBI	4.054.550.139,00
2	BATANGHARI	2.702.186.300,00
3	BUNGO	2.868.449.900,00
4	TEBO	2.804.666.829,00
5	MERANGIN	2.899.958.399,00
6	SAROLANGUN	2.588.400.799,00
7	MUARO JAMBI	2.983.611.734,00
8	TANJAB. BARAT	2.765.869.825,00
9	TANJAB. TIMUR	2.366.750.624,00
10	SUNGAI PENUH	1.815.014.294,00
11	KERINCI	2.428.417.259,00
JUMLAH		**30.277.876.102,00**

Dari rincian tersebut maka didapat Total Utang Belanja Bagi Hasil yang berasal dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.178.868.059.880,00 dapat dirinci per Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 5.71 Utang Bagi Hasil Per Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	KOTA JAMBI	46.951.151.955,00
2	BATANGHARI	15.062.658.730,00
3	BUNGO	16.785.214.070,00
4	TEBO	12.563.556.386,00
5	MERANGIN	14.610.312.511,00
6	SAROLANGUN	12.696.705.145,00
7	MUARO JAMBI	15.974.970.730,00
8	TANJAB. BARAT	11.742.569.062,00
9	TANJAB. TIMUR	12.012.094.955,00
10	KOTA SUNGAI PENUH	9.920.664.390,00
11	KERINCI	10.548.161.946,00
JUMLAH		**178.868.059.880,00**

5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
		Rp151.983.549.103,75	Rp144.615.379.908,26

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.983.549.103,75 naik sebesar Rp7.368.169.195,49 atau sebesar 5,09% jika dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp144.615.379.908,26.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar **Rp151.983.549.103,75** dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kewajiban Penerimaan Dana Reklamasi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp109.200.886.406,75**. Kewajiban Penerimaan Dana Reklamasi ini merupakan Jaminan Pasca tambang yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pasca tambang di bidang pertambangan umum. Jaminan pasca tambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah. Rincian dari Jaminan Pasca tambang yang disediakan oleh perusahaan pertambangan dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

b. Nilai setoran PT WKS sebesar **Rp42.687.907.697,00** yang terdiri atas pokok Rp35.591.895.904,80 dan jasa gironya sebesar Rp7.096.011.792,20 Setoran tersebut masuk ke kas daerah pada TA 2015 merupakan ganti rugi tegakan yang seharusnya disetor ke kas negara.

c. Nilai kelebihan transfer ke kas daerah sebesar **Rp6.800.000,00** (Rp500.000,00 atas transaksi setoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta pada TA 2017 (seharusnya Rp500.000,00 terkirim Rp1.000.000,00) sesuai surat dari Bank Mandiri Nomor R04.Br.JCN/41/2021 tanggal 14 Februari 2020) dan tahun 2020 sebesar Rp6.300.000,00.

d. Nilai angsuran pelepasan hak atas tanah a.n. Yeti Suhartini sebesar **Rp5.000.000,00** yang disetor ke kas daerah. Proses pelepasan tanah tersebut dihentikan sejak TA 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi telah memberitahukan kepada Yeti Suhartini atas uang tersebut.

e. Nilai Potongan Tabungan Perumahan sebesar **Rp82.955.000,00** dihentikan penyetorannya sebab Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) dibubarkan sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi belum dapat memastikan perlakuan selanjutnya atas uang tersebut.

5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
		0,00	Rp0,00

Sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki utang jangka panjang.

5.3.3	Ekuitas	per 31 Desember TA 2021	per 31 Desember TA 2020
		Rp9.148.064.697.057,41	Rp8.669.519.067.524,11

Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp9.148.064.697.057,41 naik sebesar Rp478.545.629.533,30 atau 5,52% jika dibanding tahun 2020 sebesar Rp8.669.519.067.524,11.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp4.772.753.912.812,04	**Rp4.416.559.031.359,50**

Pendapatan-LO Tahun 2021 Provinsi Jambi adalah pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.772.753.912.812,04, naik sebesar Rp356.194.881.452,54 atau sebesar 8,06% jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2020 sebesar Rp4.416.559.031.359,50. Pendapatan-LO terdiri atas Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Pendapatan Daerah-LO Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase Terhadap Pendapatan-LO (%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	1.909.539.280.026,04	1.464.790.682.368,42	444.748.597.657,62	30.36
2	Pendapatan Transfer-LO	2.832.314.774.417,00	2.740.316.942.123,00	91.997.832.294,00	3.36
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	30.899.858.369.00	211.451.406.868,08	(180.551.548.499.08)	(85.39)
Jumlah		**4.772.753.912.812,04**	**4.416.559.031.359,50**	**356,194,881,452.54**	**8.06**

Pada tahun 2021, komposisi Pendapatan Asli Daerah-LO terhadap Pendapatan-LO adalah sebesar 40,01% dan kontribusi Pendapatan Transfer-LO terhadap Pendapatan-LO adalah sebesar 59,34%, Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO terhadap Pendapatan-LO adalah sebesar 0,65% sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5.1 Komposisi Pendapatan-LO Tahun 2021

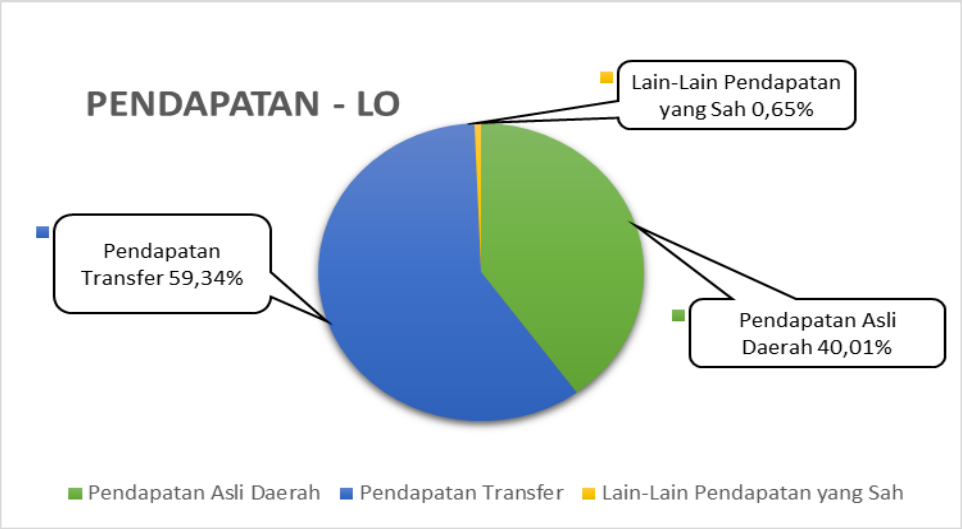

Grafik di atas memperlihatkan masih adanya ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan yaitu sebesar 59,34% dari keseluruhan pendapatan daerah.

Pendapatan-LO Tahun 2021 sebesar Rp4.772.753.912.812,04 dan Pendapatan-LRA TA 2021 sebesar Rp4.725.724.403.283,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp47.029.509.529,01.

Rincian Pendapatan -LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.73 Pendapatan-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	**Pendapatan**	**4.772.753.912.812,04**	**4.725.724.403.283,03**	**47.029.509.529,01**
I	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.909.539.280.026,04**	**1.843.431.186.553,03**	**66.108.093.473,01**
a.	Pendapatan Pajak Daerah	1.561.533.399.897,41	1.558.105.416.539,27	3.427.983.358,14
b.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.358.933.726,00	12.616.308.643,00	3.742.625.083,00
c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.028.487.058,56	28.028.487.058,56	-
d.	Lain-lain PAD yang Sah	303.618.459.344,07	244.680.974.312,20	58.937.485.031,87
II	**Pendapatan Transfer**	**2.832.314.774.417,00**	**2.879.979.691.030,00**	**(47.664.916.613,00)**
a.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.832.314.774.417,00**	**2.879.979.691.030,00**	**(47.664.916.613,00)**
1.	**DANA PERIMBANGAN**	**2.813.881.027.417,00**	**2.861.545.944.030,00**	**(47.664.916.613,00)**
1)	**Bagi Hasil Pajak**	**213.587.205.072,00**	**255.597.160.730,00**	**(42.009.955.658,00)**
a)	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	132.756.301.863,00	174.766.257.521,00	(42.009.955.658,00)
b)	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi dan PPh Pasal 21	69.977.041.055,00	69.977.041.055,00	-
c)	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	10.853.862.154,00	10.853.862.154,00	-
2)	**Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam**	**225.217.830.374,00**	**230.872.791.329,00**	**(5.654.960.955,00)**
a)	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	12.598.279.018,00	17.741.309.765,00	(5.143.030.747,00)
b)	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	9.279.173.383,00	9.279.173.383,00	-
c)	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (*Land-Rent)*	7.118.404.242,00	7.630.334.450,00	(511.930.208,00)
d)	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi)	-	-	-
e)	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	102.325.229.694,00	102.325.229.694,00	-
f)	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	58.981.179.714,00	58.981.179.714,00	-

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
g)	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.	-	-	-
h)	Bea Pungut PBB	-	-	-
i)	Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi	22.996.400,00	22.996.400,00	-
j)	Bagi Hasil Dari Mineral dan Batu Bara-Royalty	34.892.564.350,00	34.892.564.350,00	-
k)	Bagi Hasil Dari Kehutanan-IIUPH	3.573,00	3.573,00	-
3)	**Dana Alokasi Umum**	**1.284.884.150.000,00**	**1.284.884.150.000,00**	-
a)	Dana Alokasi Umum	1.284.884.150.000,00	1.284.884.150.000,00	-
4)	**Dana Alokasi Khusus (Fisik)**	**194.598.056.982,00**	**194.598.056.982,00**	**-**
a)	DAK Bidang Kesehatan	-	-	-
b)	DAK Bidang Pariwisata	-	-	-
c)	Tunjangan Profesi Guru	-	-	-
d)	DAK Bidang Kesehatan-KB Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	14.361.307.541,00	14.361.307.541,00	-
e)	DAK Bidang Kesehatan-KB - Penugasan - Penurunan Stunting (KB)	2.445.948.120,00	2.445.948.120,00	-
f)	DAK Bidang Kesehatan-KB Reguler – Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	5.262.387.700,00	5.262.387.700,00	-
g)	DAK Bidang Kesehatan-KB Reguler – Pelayanan Kefarmasian	540.845.000,00	540.845.000,00	-
h)	DAK Bidang Kesehatan-KB Reguler – Pelayanan Kesehatan Dasar	1.895.133.600,00	1.895.133.600,00	-
i)	DAK Bidang Pendidikan SMK	37.695.790.729,00	37.695.790.729,00	-
j)	DAK Bidang Pendidikan SMK-Penugasan	24.575.500.612,00	24.575.500.612,00	-
k)	DAK Bidang Pendidikan - Reguler - SLB	1.888.001.250,00	1.888.001.250,00	-
l)	DAK Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah	4.070.516.700,00	4.070.516.700,00	-
m)	DAK Bidang Pendidikan SMA	53.364.528.007,00	53.364.528.007,00	-
n)	DAK Bidang Pendidikan	-	-	-
o)	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	-	-	-
p)	DAK Fisik Bidang Pertanian	7.027.004.795,00	7.027.004.795,00	-

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
q)	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	4.793.278.980,00	4.793.278.980,00	-
r)	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Kerja	6.973.722.000,00	6.973.722.000,00	-
s)	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	18.586.841.000,00	18.586.841.000,00	-
t)	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-Reguler	9.998.259.000,00	9.998.259.000,00	-
u)	DAK Fisik Bidang Irigasi-Penugasan	1.118.991.948,00	1.118.991.948,00	-
5)	**Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)**	**895.593.784.989,00**	**895.593.784.989,00**	-
a)	Bantuan Operasional Sekolah-Reguler	698.345.323.000,00	698.345.323.000,00	-
b)	Bantuan Operasional Sekolah-Afirmasi	2.470.000.000,00	2.470.000.000,00	-
c)	Bantuan Operasional Sekolah-Kinerja	4.930.000.000,00	4.930.000.000,00	-
d)	Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	179.011.897.000,00	179.011.897.000,00	-
e)	Tamsil Guru PNSD	358.200.000,00	358.200.000,00	-
f)	Tunjangan Khusus Guru	92.604.000,00	92.604.000,00	-
g)	BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.425.000.000,00	2.425.000.000,00	-
h)	BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.562.085.750,00	1.562.085.750,00	-
i)	Bantuan Operasional Kesehatan – KB- BOK	2.031.127.371,00	2.031.127.371,00	-
j)	PK2UKM	2.310.120.000,00	2.310.120.000,00	-
k)	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.192.079.868,00	1.192.079.868,00	-
l)	Penanaman Modal	507.467.000,00	507.467.000,00	-
m)	Perempuan dan Anak	357.881.000,00	357.881.000,00	-
b.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-
2.	**DANA INSENTIF DAERAH**	**18.433.747.000,00**	**18.433.747.000,00**	-
	Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	18.433.747.000,00	18.433.747.000,00	-
III	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**30.899.858.369,00**	**2.313.525.700,00**	**28.586.332.669,00**

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1)	**Pendapatan Hibah**	**30.194.332.669,00**	**1.608.000.000,00**	**28.586.332.669,00**
a)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	27.154.925.467,00	-	27.154.925.467,00
b)	Pendapatan Hibah Dari Pemda Lainnya	1.431.407.201,00	-	1.431.407.201,00
c)	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi (Dalam Negeri)	1.608.000.000,00	1.608.000.000,00	-
d)	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat /Perorangan Dalam Negeri	1,00	-	1,00
2)	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**705.525.700,00**	**705.525.700,00**	-

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah- LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp1.909.539.280.026,04	**Rp1.464.790.682.368,42**

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.909.539.280.026,04 naik sebesar Rp444.748.597.657,62 atau sebesar 30,36% jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp1.464.790.682.368,42.

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.74 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	1.561.533.399.897,41	1.239.909.982.258,86	321.623.417.638,55
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	16.358.933.726,00	21.758.648.922,88	(5.399.715.196,88)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	28.028.487.058,56	27.923.864.761,82	104.622.296,74
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	303.618.459.344,07	175.198.186.424,86	128.420.272.919,21
Jumlah		**1.909.539.280.026,04**	**1.464.790.682.368,42**	**444.748.597.657,62**

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.909.539.280.026,04 dan Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2021 adalah sebesar Rp1.843.431.186.553,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp66.108.093.473,01

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.75 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021

No.	Uraian	LO Tahun 2021 (Rp)	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.561.533.399.897,41	1.558.105.416.539,27	3.427.983.358,14
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.358.933.726,00	12.616.308.643,00	3.742.625.083,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.028.487.058,56	28.028.487.058,56	-
4.	Lain-lain PAD yang Sah	303.618.459.344,07	244.680.974.312,20	58.937.485.031,87
Jumlah		**1.909.539.280.026,04**	**1.843.431.186.553,03**	**66.108.093.473,01**

Penjelasan selisih terdapat pada penjelasan masing-masing akun

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp1.561.533.399.897,41	**Rp1.239.909.982.258,86**

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.561.533.399.897,41 naik sebesar Rp321.623.417.638,55 atau sebesar 25,94% jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp1.239.909.982.258,86.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.76 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	510.370.054.254,00	465.129.288.875,00	45.240.765.379,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	408.140.058.000,00	253.462.168.400,00	154.677.889.600,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	399.629.341.379,41	330.257.320.423,86	69.372.020.955,55
4	Pajak Air Permukaan - LO	1.504.139.332,00	1.399.932.053,00	104.207.279,00
5	Pajak Rokok – LO	241.889.806.932,00	189.661.272.507,00	52.228.534.425,00
	Jumlah	**1.561.533.399.897,41**	**1.239.909.982.258,86**	**321.623.417.638,55**

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.561.533.399.897,41 dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2021 sebesar Rp1.558.105.416.539,27, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.427.983.358,14 terdiri dari :

1. Mutasi Kurang atas pembayaran piutang tunggakan PBBKB PT Syuria Bahtera Harapan Mandiri sebesar Rp576.927.906,86 berdasarkan surat perjanjian pelunasan tunggakan dan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor antara Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dengan Direktur PT Syuria Bahtera Harapan Mandiri Nomor: S-983/BAKEUDA2.2/IX/2018 dan Nomor: 01/SBHM/IX/2018 tanggal 24 September 2018
2. Jurnal Koreksi BPK – Pendapatan Pajak Rokok masih tercatat sebagai neto (seharusnya dicatat bruto dengan memperhitungkan potongan BPJS dimana potongan tersebut disajikan sebagai belanja) sebesar Rp4.004.911.265,00

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.77 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021

No.	Uraian	LO Tahun 2021 (Rp)	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	510.370.054.254,00	510.370.054.254,00	-
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	408.140.058.000,00	408.140.058.000,00	-
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	399.629.341.379,41	400.206.269.286,27	(576.927.906,86)
4.	Pajak Air Permukaan	1.504.139.332,00	1.504.139.332,00	-
5.	Pajak Rokok	241.889.806.932,00	237.884.895.667,00	4.004.911.265,00
Jumlah		**1.561.533.399.897,41**	**1.558.105.416.539,27**	**3.427.983.358,14**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
16.358.933.726,00	**Rp21.758.648.922,88**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp16.358.933.725,00 turun sebesar Rp5.399.715.196,88 atau sebesar (24,82)% jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp21.758.648.922,88.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.78 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	9.970.000,00	-	9.970.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	442.500.000,00	-	442.500.000,00
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	9.436.830.561,00	17.510.456.557,88	(8.073.625.996,88)
4.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	10.250.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
5.	Retribusi Terminal-LO	6.218.000,00	-	6.218.000,00
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	8.700.000,00	6.850.000,00	1.850.000,00
7.	Retribusi Tempat Penginapan / Persinggahan / Vila-LO	385.500.000,00	305.150.000,00	80.350.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Pelabuhan-LO	52.500.000,00	266.914.000,00	(214.414.000,00)
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO	3.996.585.500,00	2.589.533.500,00	1.407.052.000,00
10.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.973.163.905,00	1.072.744.865,00	900.419.040,00
11.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	2.000.000,00	2.000.000,00	-
12.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	34.715.760,00	-	34.715.760,00
Jumlah		**16.358.933.726,00**	**21.758.648.922,88**	**(5.399.715.196,88)**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp16.358.933.726,00 dan Pendaptan Retribusi Daerah-LRA TA 2021 sebesar Rp12.616.308.643,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.742.625.083,00 dengan uraian sebagai berikut.

a. Mutasi tambah Jurnal Penyesuaian untuk mencatat piutang retribusi Tahun 2021 sebesar Rp1.696.862.000,00.

b. Mutasi tambah Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Piutang Retribusi Kekayaan Daerah (BOT Pengelolaan Angso Duo) a.n PT. Jambi Sapta Manunggal sebesar Rp13.368.960.538,00.

c. Mutasi tambah Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Piutang Retribusi Kekayaan Daerah (BOT Pengelolaan Angso Duo) a.n PT. Jambi Sapta Manunggal sebesar Rp500.000.000,00.

d. Mutasi tambah Jurnal Koreksi atas Piutang Sewa Rumah Dinas Pemda-BPKPD yang belum tersaji di Neraca sebesar Rp148.440.000,00.

e. Mutasi tambah Jurnal Koreksi atas an Piutang Sewa Tanah dari BGS PT EBN BPKPD yang belum tersaji di Neraca sebesar Rp312.062.625,00.

f. Mutasi tambah Jurnal Koreksi Pendapatan Retribusi yang belum tercatat di Dinas Perkebunan dikarenakan kesalahan Bank sebesar Rp800,00.

g. Mutasi tambah Jurnal Penyesuaian atas kas di bendahara penerimaan untuk retribusi karcis kolam renang bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp600.000,00.

h. Mutasi tambah Jurnal Koreksi atas piutang Pendapatan Retribusi Daerah yang belum tercatat di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dikarenakan kesalahan Bank sebesar Rp500,00.

i. Mutasi tambah Jurnal Penyesuaian atas Piutang Retribusi Tahun 2021 sebesar Rp28.700.000,00.

j. Mutasi kurang Jurnal Balik atas Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kerjasama BOT dengan PT. Jambi Sapta Manunggal) Tahun 2020 sebesar Rp500.000.000,00.

k. Mutasi kurang Jurnal Balik atas Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kerjasama BOT dengan PT. Jambi Sapta Manunggal) Tahun 2020 sebesar Rp10.327.784.880,00.

l. Mutasi kurang Jurnal Balik Piutang Tahun 2021 sebesar Rp1.454.566.500,00.

m. Mutasi kurang Jurnal Balik atas saldo awal 2020 piutang retribusi kekayaan daerah sebesar Rp30.650.000,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.79 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021

No.	Uraian	LO Tahun 2021	LRA TA 2021	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	**Retribusi Jasa Umum**	**452.470.000,00**	**452.470.000,00**	**-**
	Retribusi Pelayanan Pasar	9.970.000,00	9.970.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Pendidikan	442.500.000,00	442.500.000,00	-
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**15.869.747.966,00**	**12.127.122.883,00**	**3.742.625.083,00**
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.578.051.158,00	325.230.000,00	3.252.821.158,00
	Retribusi Penyewaan Tanah	1.215.769.750,00	903.707.125,00	312.062.625,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan	255.440.000,00	107.000.000,00	148.440.000,00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	3.945.391.013,00	3.945.391.013,00	-
	Retribusi Pemakaian Ruangan	256.750.000,00	256.750.000,00	-
	Retribusi Pemakaian Alat	185.428.640,00	185.428.640,00	-
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	10.250.000,00	10.250.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	6.218.000,00	6.218.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	8.700.000,00	8.700.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	385.500.000,00	356.800.000,00	28.700.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	52.500.000,00	52.500.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.996.585.500,00	3.995.985.000,00	600.500,00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	1.680.672.680,00	1.680.671.880,00	800,00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	210.027.225,00	210.027.225,00	-
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	82.464.000,00	82.464.000,00	-
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**36.715.760,00**	**36.715.760,00**	**-**

No.	Uraian	LO Tahun 2021	LRA TA 2021	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=3-4
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	34.715.760,00	34.715.760,00	-
	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	**16.358.933.726,00**	**12.616.308.643,00**	**3.742.625.083,00**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp28.028.487.058,56	**Rp27.923.864.761,82**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 sebesar Rp28.028.487.058,56 naik sebesar Rp104.622.296,74 atau sebesar 0,37% jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2020 sebesar Rp27.923.864.761,82.

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.80 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Bagian Laba penyertaan pada PT Bank Jambi-LO	27.850.270.213,56	27.744.791.377,82	105.478.835,74
2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta (PT Askrida Cabang Jambi)-LO	178.216.845,00	179.073.384,00	(856.539,00)
Jumlah		**28.028.487.058,56**	**27.923.864.761,82**	**104.622.296,74**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 sebesar Rp28.028.487.058,56 sama dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2021 sebesar Rp28.028.487.058,56 sehingga tidak terdapat selisih.

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.81 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021

No.	Uraian	LO Tahun 2021	LRA TA 2021	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta (PT. Askrisda Cabang Jambi)	178.216.845,00	178.216.845,00	-

No.	Uraian	LO Tahun 2021 (Rp)	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
2.	Bagi Laba penyertaan pada PT.Bank Jambi	27.850.270.213,56	27.850.270.213,56	-
Jumlah		**28.028.487.058,56**	**28.028.487.058,56**	**-**

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp303.618.459.344,07	**Rp175.198.186.424,86**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021sebesar Rp303.618.459.344,07 naik sebesar Rp128.420.272.919,21 atau sebesar 73,30% jika dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2020 sebesar Rp175.198.186.424,86.

Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.82 Lain-lain PAD yang Sah-LOTahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan-LO	3.465.969.250,00	-	3.465.969.250,00
2.	Penerimaan Jasa Giro-LO	12.956.626.248,72	7.234.660.305,99	5.721.965.942,73
3.	Penerimaan Jasa Giro Rekening Dana Bos-LO	110.012.495,88	-	110.012.495,88
4.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	9.255.524,00	-	9.255.524,00
5.	Pendapatan Bunga-LO	4.171.917.808,25	28.932.671.232,81	(24.760.753.424,56)
6.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	-	-	-
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.387.373.930,48	5.906.771.388,33	(4.519.397.457,85)
8.	Pendapatan Denda Pajak-LO	2.396.964.549,00	1.682.160.105,75	714.804.443,25
9.	Pendapatan Denda Retribusi-LO	-	852.800,00	(852.800,00)
10.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.674.912,00	101.488.118,95	(99.813.206,95)
11.	Pendapatan Zakat-LO	-	-	-
12.	Pendapatan BLUD-LO	195.079.083.552,95	122.491.651.236,29	72.587.432.316,66
13.	Pendapatan Pengambilan Gaji/Tunjangan/Taspen-LO	-	750.000,00	(750.000,00)
14.	Pendapatan Pengembalian Setoran Pihak Ketiga-LO	-	8.340.542.261,00	(8.340.542.261,00)
15.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	84.039.581.072,79	2.600.000,00	84.036.981.072,79
16.	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	-	-	-
17.	Penerimaan Lain-lain-LO	-	-	-
18.	Pendapatan Uang Duka dari PT Taspen-LO	-	-	-
19.	Temuan Hasil Pemeriksaan-LO	-	496.088.975,74	(496.088.975,74)

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
20.	Taman Nasional-LO	-	7.950.000,00	(7.950.000,00)
Jumlah		**303.618.459.344,07**	**175.198.186.424,86**	**128.420.272.919,21**

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp303.618.459.344,07 dan Lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2021 sebesar Rp244.680.974.312,20, sehingga terdapat selisih sebesar Rp58.937.485.031,87 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.83 Penjelasan Selisih Lain-lain PAD yang Sah LO – LRA Tahun 2021

No	Uraian	D	K
1	Jurnal Koreksi BPK karena kesalahan perhitungan jasa giro pada kas lainnya PT Wirakarya Sakti (WKS) – Awalnya sebesarRp42.754.502.340,59 menjadi Rp42.687.907.697,00		66.594.643,59
2	Koreksi BPK pendapatan pajak air permukaan lebih saji (LO)		1.502.969,00
3	Jurnal Balik atas Piutang Pendapatan RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2020	601.439.423,00	
4	Jurnal balik atas piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2020	1.369.951.576,00	
5	Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Pendapatan RSUD Raden Mattaher Jambi Semester I Tahun 2021		223.861.976,34
6	Jurnal Penyesuaian atas Piutang Pendapatan RSUD Raden Mattaher Jambi Semester I Tahun 2021		3.585.792.627,30
7	Jurnal Penyesuaian atas piutang pendapatan retribusi kesehatan tahun 2021		16.482.214.305,25
8	Jurnal Koreksi atas Piutang Pendapatan BLUD pada Labkes belum tersaji sebesar Rp11.991.000,00 (Rp6.441.000,00 dan Rp5.550.000)		11.991.000,00
9	Jurnal Penyesuaian Atas Piutang Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2021		917.291.000,00
10	Jurnal Koreksi BPK Reklas Pendapatan Zakat ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	2.454.088.835,14	
11	Jurnal Koreksi BPK Reklas Pendapatan Infaq ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	41.615.864.728,26	
12	Jurnal Balik atas Piutang Samisake Tahun 2012 s.d 2015 Pemerintah Kota Sungai Penuh.	1.280.418.130,00	
13	Jurnal Penyesuaian Pencatatan Aset Peralatan dan Mesin (Alat Kantor) yang bersumber dari Dana BTT Tahun Anggaran 2021		994.763.500,00
14	Jurnal Penyesuaian Pencatatan Aset Peralatan dan Mesin (Alat Kedokteran) yang bersumber dari Dana BTT Tahun Anggaran 2021		558.905.000,00
15	Jurnal Penyesuaian Pencatatan Aset Peralatan dan Mesin (Komputer) yang bersumber dari Dana BTT Tahun Anggaran 2021		11.500.000,00
16	Jurnal Penyesuaian Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bersumber dari Dana BTT Tahun Anggaran 2021		13.486.968.000,00
17	Jurnal Penyesuaian Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari Dana BTT Tahun Anggaran 2021		394.400.000,00
18	Jurnal penyesuaian atas pencatatan piutang atas Silpa Bantuan Keuangan Kelurahan periode Tahun 2017 s.d		8.414.180.036,00

No	Uraian	D	K
	2021		
19	Jurnal penyesuaian atas pencatatan piutang silpa Bantuan Keuangan Desa/Dusun periode Tahun 2017 s.d 2021		1.140.000.000,00
20	Jurnal penyesuaian atas pencatatan piutang silpa Bantuan Keuangan Alat Berat/Alat Pendukung Lainnya periode Tahun 2017 s.d 2021		8.591.127.612,00
21	Jurnal penyesuaian atas pencatatan piutang silpa Bantuan Keuangan RSUD Raden Hanafie Bungo periode 2020		178.606.550,00
22	Jurnal Penyesuaian atas piutang pengembalian dana bantuan keuangan Bandara Depati Parbo Kerinci Tahun 2020		674.830.000,00
23	Jurnal Koreksi BPK Kurang saji uang pihak ketiga (dari Badan Penghubung Rp7.304.450,00+Rp 4.545.355,99 uang kelebihan setor)		11.849.805,99
24	Jurnal Koreksi atas Piutang Bankeu		6.442.915.135,40
25	Jurnal Koreksi BPK Reklas Pendapatan Zakat ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya		2.454.088.835,14
26	Jurnal Koreksi BPK Reklas Pendapatan Infaq ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya		41.615.864.728,26
	Jumlah	**47.321.762.692,40**	**106.259.247.724,27**

Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021adalah sebagai berikut.

Tabel 5.84 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021

No.	Uraian	LO	LRA	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan-LO	3.465.969.250,00	3.465.969.250,00	-
2	Penerimaan Jasa Giro-LO	12.956.626.248,72	12.956.626.248,72	-
3	Penerimaan Jasa Giro Rekening Dana Bos-LO	110.012.495,88	110.012.495,88	-
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	9.255.524,00	9.255.524,00	-
5	Pendapatan Bunga-LO	4.171.917.808,25	4.171.917.808,25	-
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	-	-	-
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.387.373.930,48	1.387.373.930,48	-
8	Pendapatan Denda Pajak-LO	2.396.964.549,00	2.396.964.549,00	-
9	Pendapatan Denda Retribusi-LO	-	-	-
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.674.912,00	1.674.912,00	-
11	Pendapatan Zakat-LO	-	-	-
12	Pendapatan BLUD-LO	195.079.083.552,95	173.881.656.514,11	21.197.427.038,84
13	Pendapatan Pengambilan Gaji/Tunjangan/Taspen-LO	-	-	-
14	Pendapatan Pengembalian Setoran Pihak Ketiga-LO	-	-	-

No.	Uraian	LO	LRA	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
15	Lain-lain PAD yang Sah-LO	84.039.581.072,79	-	84.039.581.072,79
16	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	-	-	-
17	Penerimaan Lain-lain-LO	-	-	-
18	Pendapatan Uang Duka dari PT Taspen-LO	-	-	-
19	Temuan Hasil Pemeriksaan-LO	-	46.299.523.079,76	(46.299.523.079,76)
20	Taman Nasional-LO	-	-	-
Jumlah		**303.618.459.344,07**	**244.680.974.312,20**	**58.937.485.031,87**

5.4.2 Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp2.832.314.774.417,00	**Rp2.740.316.942.123,00**

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp 2.832.314.774.417,00 naik sebesar Rp 91.997.832.294,00 atau sebesar 3,36% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2020 sebesar Rp 2.740.316.942.123,00.

Rincian Pendapatan Transfer -LO Tahun 2021dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.85 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	2.813.881.027.417,00	2.726.549.758.123,00	87.331.269.294,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO (Dana Insentif Daerah)	18.433.747.000,00	13.767.184.000,00	4.666.563.000,00
Jumlah		**2.832.314.774.417,00**	**2.740.316.942.123,00**	**91.997.832.294,00**

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp 2.832.314.774.417,00 dan Pendapatan Transfer-LRA TA 2021 sebesar Rp 2.879.979.691.030,00, sehingga terdapat turun sebesar Rp 47.664.916.613,00. Selisih atas nilai pendapatan Transfer-LO dan pendapatan Transfer-LRA adalah sebagai berikut :

1. Mutasi Kurang atas piutang pendapatan transfer pemerintah pusat dan dana bagi hasil bukan pajak DBH Kehutanan sebesar Rp 5.143.030.747,00.
2. Mutasi Kurang atas piutang pendapatan transfer pemerintah pusat dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp42.009.955.658,00, dan
3. Mutasi Kurang atas Piutang DBH Minerba sebesar Rp511.930.208,00

Rincian Pendapatan Transfer-LOTahun 2021dan LRA TA 2021adalah sebagai berikut.

Tabel 5.86 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021

No.	Uraian	LO Tahun 2021 (Rp)	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	2.813.881.027.417,00	2.861.545.944.030,00	(47.664.916.613,00)
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Dana Insentif Daerah	18.433.747.000,00	18.433.747.000,00	-
Jumlah		**2.832.314.774.417,00**	**2.879.979.691.030,00**	**(47.664.916.613,00)**

5.4.2.1 Transfer PemerintahPusat-	Tahun 2021	Tahun 2020
Dana Perimbangan-LO	**Rp2.813.881.027.417,00**	**Rp2.726.549.758.123,00**

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.813.881.027.417,00 naik sebesar Rp 87.331.269.294,00 atau sebesar 3,20% jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2020 sebesar Rp2.535.751.876.847,00.

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.87 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	213.587.205.072,00	151.574.110.044,00	62.013.095.028,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	225.217.830.374,00	170.463.829.748,00	54.754.000.626,00
3.	Dana Alokasi Umum-LO	1.284.884.150.000,00	1.288.418.327.000,00	(3.534.177.000,00)
4.	Dana Alokasi Khusus-LO	1.090.191,841.971,00	1.116.093.491.331,00	(25.901.649.360,00)
Jumlah		**2.813.881.027.417,00**	**2.726.549.758.123,00**	**87.331.269.294,00**

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.813.881.027.417,00 dan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA TA 2021 sebesar Rp2.861.545.944.030,00, sehingga terdapat selisih turun sebesar Rp47.664.916.613,00.

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.88 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021

No.	Uraian	LO Tahun 2021 (Rp)	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	213.587.205.072,00	255.597.160.730,00	(42.009.955.658,00)
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	225.217.830.374,00	230.872.791.329,00	(5.654.960.955,00)
3.	Dana Alokasi Umum	1.284.884.150.000,00	1.284.884.150.000,00	-
4.	Dana Alokasi Khusus	1.090.191.841.971,00	1.090.191.841.971,00	-
Jumlah		**2.813.881.027.417,00**	**2.861.545.944.030,00**	**(47.664.916.613,00)**

5.4.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Tahun 2021	**Tahun 2020**
Rp213.587.205.072,00	**Rp151.574.110.044,00**

Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2021 sebesar Rp213.587.205.072,00 turun sebesar Rp62.013.095.028,00 atau sebesar 40,91% jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2020 sebesar Rp151.574.110.044,00.

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.89 Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan –LO	132.756.301.863,00	99.919.331.890,00	32.836.969.973.00
2.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 25/29-LO	69.977.041.055,00	51.043.357.677,00	18.933.683.378.00
3.	Bagi Hasil Cukai Tembakau-LO	10.853.862.154,00	611.420.477,00	10.242.441.677.00
Jumlah		**213.587.205.072,00**	**151.574.110.044,00**	**62.013.095.028,00**

Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2021 sebesar Rp213.587.205.072,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2021 sebesar Rp255.597.160.730,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp42.009.955.658,00, disebabkan karena pembayaran piutang pajak atas dana bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2021.

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.90 Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2021 dan LRA-TA 2021

No.	Uraian	LO Tahun 2021 (Rp)	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	132.756.301.863,00	174.766.257.521.00	(42.009.955.658,00)
2.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 25/29	69.977.041.055,00	69.977.041.055,00	-
3.	Bagi Hasil Cukai Tembakau	10.853.862.154,00	10.853.862.154,00	-
Jumlah		**213.587.205.072,00**	**255.597.160,730,00**	**(42.009.955.658,00)**

5.4.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp225.217.830.374,00	**Rp170.463.829.748,00**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 sebesar Rp225.217.830.374,00 naik sebesar Rp54.754.000.626,00 atau sebesar 32,12% jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2020 sebesar Rp170.463.829.748,00.

Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.91 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan-LO	12.598.279.018,00	7.898.559.281,00	4.699.719.737,00
	Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas -LO	22.996.400,00	-	22.996.400,00
	Bagi Hasil dari Keutanan -LO	3.573,00	-	3.573,00
2.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*)-LO	7.118.404.242,00	1.421.081.738,00	5.697.322.504,00
3.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)-LO	34.892.564.350,00	23.519.948.748,00	11.372.615.602,00
4.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO	102.325.229.694,00	100.751.386.390,00	1.573.843.304,00
5.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO	58.981.179.714.00	31.441.302.064,00	27.539.877.650,00
6.	Bagi Hasil Cukai Tembakau-LO	-	-	-
7.	Dana Reboisasi-LO	9,279,173,383.00	1.060.995.200,00	8.218.178.183,00
8.	Bea Pungut - PBB-LO	-	4.370.556.327,00	(4.370.556.327,00)
Jumlah		**225,217,830,374.00**	**170.463.829.748,00**	**54,754,000,626.00**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 sebesar Rp225.217.830.374,00 dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA TA 2021 sebesar Rp230.872.791.329,00, sehingga terdapat selisih turun sebesar Rp5.654.960.955,00 dikarenakan pembayaran piutang dana bagi hasil sumber daya alam.

Tabel 5.92 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021

Uraian	LO Tahun 2021 (Rp)	LRA Tahun 2021 (Rp)	Selisih
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	12.598.279.018,00	17.741.309.765,00	(5,143,030,747.00)
Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	9,279,173,383.00	9,279,173,383.00	-
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (*Land-Rent)*	7,118,404,242.00	7,630,334,450.00	(511,930,208.00)
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi)	-	-	-
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	102,325,229,694.00	102,325,229,694.00	-
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	58,981,179,714.00	58,981,179,714.00	-
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.	-	-	-
Bea Pungut PBB	-	-	-
Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi	22,996,400.00	22,996,400.00	-
Bagi Hasil Dari Mineral dan Batu Bara-Royalty	34,892,564,350.00	34,892,564,350.00	-
Bagi Hasil Dari Kehutanan-IIUPH	3,573.00	3,573.00	-
JUMLAH	**225,217,830,374.00**	**230,872,791,329.00**	**(5,654,960,955.00)**

5.4.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp1.284.884.150.000,00	**Rp1.288.418.327.000,00**

Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.284.884.150.000,00 turun sebesar Rp3.534.177.000,00atau sebesar (0.27%) jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2020 sebesar Rp1.288.418.327.000,00.

Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.284.884.150.000,00 sama dengan Dana Alokasi Umum-LRA TA 2021 sebesar Rp1.288.884.150.000,00, sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp1.090.191.841.971,00	**Rp1.116.093.491.331,00**

Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.090.191.841.971,00 turun sebesar Rp25.901.649.360,00 atau sebesar 2,32% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2020 sebesar Rp1.116.093.491.331,00.

Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.090.191.841.971,00 sama denganDana Alokasi Khusus-LRA TA 2021 sebesar Rp1.090.191.841.971,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya (Dana Insentif Daerah)

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp18.433.747.000,00	**Rp13.767.184.000,00**

Transfer Pusat-Lainnya-LO Tahun 2021 berupa Dana Insentif Daerah sebesar Rp18.433.747.000,00 turun sebesar Rp4.666.563.000,00 atau sebesar 33,90% jika dibandingkan Transfer Pusat-Lainnya-LO Tahun 2020 sebesar Rp13.767.184.000,00.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO Tahun 2021 sebesar Rp18.433.747,00 sama dengan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA TA 2021 sebesar Rp18.433.747.000,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp30.899.858.369,00	**Rp211.451.406.868,08**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp30.899.858.369,00 turun sebesar Rp180.551.548.499,08 atau sebesar 85,39% jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LOTahun 2020 sebesar Rp211.451.406.868,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp30.899.858,.369,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA TA 2021 sebesar Rp2.313.525.700,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp28.586.332.669,00.

5.4.3.1 Pendapatan Hibah–LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp30.194.332.669,00	**Rp195.303.001.291,08**

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp30.194.332.669,00 turun sebesar Rp165.108.668.622,08 atau sebesar 84,54% jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2020 sebesar Rp195.303.001.291,08.

Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.93 Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	1.608.000.000,00	2.200.790.000,00	(592.790.000,00)
2.	Pendapatan hibah dari pemerintah	27.154.925.467,00	171.757.490.515,08	(144.602.565.048,08)
3.	Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya	1.431.407.201,00	3.292.278.040,00	(1.860.870.839,00)
4.	Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	1,00	17.966.994.716,00	(17.966.994.715,00)
5.	Pendapatan hibah dari perorangan	-	85.448.020,00	(85.448.020,00)
Jumlah		**30.194.332.669,00**	**195.303.001.291,08**	**(165.108.668.622,08)**

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp30.194.332.669,00 dan Pendapatan Hibah-LRA TA 2021 sebesar Rp1.608.000.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp28.586.332.669,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.94 Pendapatan Hibah LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021

No.	Uraian	LO Tahun 2021	LRA TA 2021	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	4	3	5=4-3
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	1.608.000.000,00	1.608.000.000,00	-
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	27.154.925.467,00	-	27.154.925.467,00
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Oraganisasi swasta Dalam Negeri	1.431.407.201,00	-	1.431.407.201,00-
4.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	1,00	-	1,00
5.	Pendapatan Hibah dari Perorangan	-	-	-
Jumlah		**30.194.332.669,00**	**1.608.000.000,00**	**28.586.332.669,00**

Tabel di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya –LO, merupakan hibah dari PT.Jasa Raharja (Persero) sebesar Rp1.608.000.000,00
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Lainnya –LO terdiri dari :
   a. Hibah Peralatan Mesin (Alat-alat kantor dan Rumah Tangga) Hibah dari Kemenkes RI 2021 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : KN.02.07/I.3/4801/2021 Tanggal 7 April 2021 sebesar Rp603.974.000,-
   b. Hibah Peralatan Mesin (Alat-alat Kedokteran) Hibah dari Kemenkes RI Tahun 2021 Kemenkes RI 2021 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : KN.02.07/I.3/4801/2021 Tanggal 7 April 2021 sebesar Rp16.784.801.300,00
   c. Hibah dari kementrian Kesehatan dengan nomor BAST : KN.02.07/I.3/5893/2021 sebesar Rp5.061.195.000,00
   d. Jurnal untuk mencatat Hibah Kendaraan Roda 4 sebanyak 5 (lima) buah dari Kementrian Perhubungan R.I Tahun 2021sebesar Rp3.290.000.000,00
   e. Jurnal untuk mencatat Hibah Bus Air sebanyak 1 (satu) buah dari Kementrian Perhubungan R.I Tahun 2021 sebesar Rp1.360.705.167,00
   f. Mencatat Hibah tambah Aset Peralatan dan Mesin dari KKP berdasarkan BAST no. 3319/SJ.2/PL.730/IX/2021 tgl 10-9-2021sebesar Rp54.250.000,00
   3. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO terdiri dari :
      a. Mencatat hibah Barang milik Negara belanja barang penunjang tugas pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah BAST - 89/DISHUT-TP/II/2021sebesar Rp592.767.200,00
      b. Mencatat hibah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yag berada pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi BA.338/BPHP.IV/TU/UM/12/2020 sebesar Rp697.440.000,00
      c. Hibah dari Desa Panca Bakti ke BPKPD Berdasarkan BAST Nomor 1109/BAST/Bakeuda-3.2/2021 tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp1,00

d. mencatat hibah dari BPHP dengan Nomor Berita Acara Serah Terima Nomor 252/BPHP.IC/TU/UM/10/2021 sebesar Rp141.200.000,00

4. Koreksi atas Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat sebesar Rp1,00

5.4.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp705.525.700,00	**Rp16.148.405.577.00**

Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2021 sebesar Rp705.525.700,00 turun sebesar Rp15.442.879.877,00 atau sebesar 95.63% jika dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2020 sebesar Rp16.148.405.577,00.

Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2021 sebesar Rp705.525.700,00 dan Pendapatan Lainnya-LRA TA 2021 sebesar Rp705.525.700,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.4 Beban	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp4.310.898.848.851,38	**Rp4.150.402.154.038,43**

Beban Tahun 2021 sebesar Rp4.310.898.848.851,38 turun sebesar Rp160.496.694.812,95 atau sebesar 3,87% jika dibandingkan dengan beban Tahun 2020 sebesar Rp4.150.402.154.038,43.

Rincian Beban Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.95 Beban Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Operasi	3.491.405.740.666,38	3.468.975.482.261,41	22.430.258.404,97
2	Beban Transfer	819.493.108.185,00	681.426.671.777,02	138.066.436.407,98
Jumlah		**4.310.898.848.851,38**	**4.150.402.154.038,43**	**160.496.694.812,95**

Beban-LO Tahun 2021 sebesar Rp4.310.898.848.851,38 dan Belanja-LRA TA 2021 sebesar Rp4.195.271.797.207,60 sehingga terdapat selisih sebesar Rp115.627.051.643,78 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.96 Beban LO Tahun 2021 dan Belanja LRA TA 2021

No.	Uraian akun LO	LO TA 2021 (Rp)	Uraian akun LRA	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=3-5
1	Beban Operasi	3.491.405.740.666,38	Belanja	3.384.013.148.748,60	107.392.591.917,78
2	Beban Transfer	819.493.108.185,00	Transfer	811.258.648.459,00	8.234.459.726,00
Jumlah		**4.310.898.848.851,38**	**Jumlah**	**4.195.271.797.207,60**	**115.627.051.643,78**

5.4.4.1 Beban Operasi

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp3.491.405.740.666,38	**Rp3.468.975.482.261,41**

Beban Operasi Tahun 2021 sebesar Rp3.491.405.740.666,38 naik sebesar Rp22.430.258.404,97 atau sebesar 0,65% jika dibandingkan dengan Beban Operasi Tahun 2020 sebesar Rp3.468.975.482.261,41.

Rincian Beban Operasi Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.97 Beban Operasi Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Pegawai	1.475.893.160.829,06	1.408.345.369.989,79	67.547.790.839,27
2	Beban Persediaan	368.662.489.607,71	257.051.715.075,72	111.610.774.531,99
3	Beban Jasa	311.059.224.568,98	347.719.926.716,82	(36.660.702.147,84)
4	Beban Pemeliharaan	65.184.481.898,83	44.906.906.965,80	20.277.574.933,03
5	Beban Perjalanan Dinas	142.493.908.520,49	113.636.324.553,50	28.857.583.966,99
6	Beban Subsidi	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
7	Beban Hibah	600.238.715.839,36	816.637.372.713,05	(216.398.656.873,69)
8	Beban Bantuan Sosial	27.528.966.768,00	328.500.000,00	27.200.466.768,00
9	Beban Penyisihan Piutang	7.214.177.809,30	1.116.550.007,95	6.097.627.801,35
10	Beban Lain-lain	29.857.941.102,57	55.089.118.990,57	(25.231.177.888,00)
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	462.722.673.722,08	423.593.697.248,21	39.128.976.473,87
Jumlah		**3.491.405.740.666,38**	**3.468.975.482.261,41**	**22.430.258.404,97**

Beban Operasi-LO Tahun 2021 sebesar Rp3.491.405.740.666,38 dan Belanja Operasi-LRA TA 2021 sebesar Rp3.384.013.148.748,60, sehingga terdapat selisih sebesar Rp107.392.591.917,78.

5.4.4.1.1 Beban Pegawai	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp1.475.893.160.829,06	**Rp1.408.345.369.989,79**

Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp1.475.893.160.829,06 naik sebesar Rp67.547.790.839,27 atau sebesar 4,80% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp1.408.345.369.989,79.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.98 Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	758.965.640.075,00	763.273.378.189,29	(4.307.738.114,29)
2	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	34.140.372.002,00	-	34.140.372.002,00
3	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	330.156.671.471,00	339.877.326.533,00	(9.720.655.062,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	107.136.579,00	-	107.136.579,00
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH WKDH-LO	5.387.766.640,00	22.361.675.000,00	(16.973.908.360,00)
6	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	38.188.491.621,26	(38.188.491.621,26)
7	Beban Belanja Pegawai BLUD	73.865.903.684,52	55.178.242.360,24	18.687.661.324,28
8	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	245.995.838.758,54	-	245.995.838.758,54
9	Beban Tunjangan Profesi Guru	-	183.296.288.686,00	(183.296.288.686,00)
10	Beban Tunjangan Penghasilan Guru	-	5,499.500.000,00	(5.499.500.000,00)
11	Beban Tunjangan Khusus Guru	-	670.467.600,00	(670.467.600,00)
12	Beban Pegawai BOS	27.273.831.619,00	-	27.273.831.619,00
Jumlah		**1.475.893.160.829,06**	**1.408.345.369.989,79**	**67.547.790.839,27**

Beban Pegawai-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.475.893.160.829,06 dan Belanja Pegawai-LRA TA 2021 sebesar Rp1.500.168.641.905,80, sehingga terdapat selisih turun sebesar (Rp24.275.481.076,74) dengan uraian sebagai berikut.

a. Terdapat mutasi kurang atas Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp86.937.346.011,26;

b. Terdapat mutasi tambah atas Beban Pegawai BOS sebesar Rp27.273.831.619,00

c. Terdapat mutasi tambah atas Beban Pegawai BLUD sebesar Rp35.236.930.685,52

d. Terdapat mutasi tambah atas Jurnal Koreksi BPK tentang utang belanja pegawai BLUD sebesar Rp151.102.630,00

Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2021 dan LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.99 Beban Pegawai-LO Tahun 2021 dan Belanja Pegawai LRA TA 2021

No.	Uraian akun LO	LO Tahun 2021 (Rp)	Uraian akun LRA	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=3-5
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO	758.965.640.075,00	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	758.965.640.075,00	-
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	330.156.671.471,00	Belanja Tambahan Penghasilan PNS-LO	330.156.671.471,00	-
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	245.995.838.758,54	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	332.933.184.769,80	(86.937.346.011.26)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	34.140.372.002,00	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.140.372.002,00	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	107.136.579,00	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	107,136,579,00	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.387.766.640,00	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.387.766.640,00	-
7	Beban Pegawai BOS	27.273.831.619,00	Belanja Pegawai BOS	-	27.273.831.619,00
8	Beban Pegawai BLUD	73.865.903.684,52	Belanja Pegawai BLUD	38.477.870.369,00	35.388.033.315,52
Jumlah		**1.475.893.160.829,06**	**Jumlah**	**1.500.168.641.903,80**	**(Rp24.275.481.076,74)**

5.4.4.1.2 Beban Persediaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp368.662.489.607,71	**Rp257.051.715.075,72**

Beban Persediaan Tahun 2021 sebesar Rp368,662,489,607.71 turun sebesar Rp111.610.774.531,99 atau sebesar 43,42% jika dibandingkan dengan Beban Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp257.051.715.075,72.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.100 Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Bahan Pakai Habis	93.781.751.082,02	138.026.324.740,19	(44.244.573.658,17)
2	Beban Persediaan Bahan/Material	34.297.334.572,00	60.606.890.015,81	(26.309.555.443,81)
3	Beban Cetak dan Penggandaan	13.370.225.598,86	12.382.340.525,00	987.885.073,86
4	Beban Makanan dan Minuman	43.923.636.124,83	31.387.697.965,50	12.535.938.159,33
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	454.498.000,00	3.668.103.300,00	(3.213.605.300,00)
6	Beban Pakaian Kerja	2.794.580.647,00	1.066.247.725,00	1.728.332.922,00

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.742.771.371,00	486.846.850,00	1.255.924.521,00
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	9.427.263.954,22	(9.427.263.954,22)
9	Kebeban pipa pipa plastik, komponen bekas dan omponen lainnya	97.420.138,00	-	97.420.138.00
10	Beban Barang dan Jasa BOS	107.297.596.663,00	-	107.297.596.663.00
11	Beban Barang dan Jasa BLUD	70.902.675.411,00	-	70.902.675.411,00
Jumlah		**368.662.489.607,71**	**257.051.715.075,72**	**111.610.774.531,99**

Beban Persediaan-LO Tahun 2021 sebesar Rp368.662.489.607,71 dan Belanja Barang dan Jasa Persediaan-LRA TA 2021 sebesar Rp225.910.393.179,94 sehingga terdapat selisih sebesar Rp142.752.096.427,77 perbedaan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.4.4.1.3 Beban Jasa

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp311.059.224.568,98	**Rp347.719.926.716,82**

Beban Jasa Tahun 2021 sebesar Rp311.059.224.568,98 turun sebesar (Rp36.660.702.147,84) atau sebesar (10,54%) jika dibandingkan dengan Beban Jasa Tahun 2020 sebesar Rp347.719.926.716,82.

Rincian Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.101 Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Jasa Kantor	166.401.311.753,00	142.968.374.993,16	23.432.936.759,84
2	Beban Premi Asuransi	1.904.528.440,79	29.580.937.369,09	(27.676.408.928,30)
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	853.570.000,00	2.461.137.907,00	(1.607.567.907,00)
4	Beban Sewa Tanah kering dan tanah lapangan parkir	482.200.000,00	-	482.200.000,00
5	Beban Sewa Sarana Mobilitas	959.863.940,00	152.530.000,00	807.333.940,00
6	Beban Sewa Alat Berat	-	-	-
7	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.763.155.637,00	3.388.096.000,00	(1.624.940.363,00)
8	Beban Jasa Konsultasi	16.999.780.198,91	7.922.879.290,00	9.076.900.908,91
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	370.000.000,00	(370.000.000,00)
10	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.779.670.905,00	3.619.946.077,00	(840.275.172,00)
11	Beban Honorarium Non Pegawai	8.234.772.220,00	151.102.630,00	8.083.669.590,00
12	Beban Honorarium PNS	6.531.234.000,00	16.660.971.894,00	(10.129.737.894,00)
13	Beban Honorarium Non PNS	103.320.000,00	88.485.885.750,00	(88.382.565.750,00)

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
14	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.121.478.288,00	1.694.694.000,00	11.426.784.288,00
15	Beban Barang Dana BOS	-	-	-
16	Beban Jasa Iuran	55.477.101.255,28	108.500.000,00	55.368.601.255,28
17	Beban Perlengkapan/Peralatan Kantor	-	337.579.430,00	(337.579.430,00)
18	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	49.326.231.576,57	(49.326.231.576,57)
19	Beban Bea siswa Pendidikan	180.000.000,00	-	180.000.000,00
20	Beban Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis	2.350.749.703,00	368.000.000,00	1.982.749.703,00
21	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 dan layanan kesehatan	32.916.488.228,00	-	32.916.488.228,00
22	Beban Perlengkapan/Peralatan Olahraga	-	123.059.800,00	(123.059.800,00)
Jumlah		**311.059.224.568,98**	**347.719.926.716,82**	**(36.660.702.147,84)**

Beban Jasa-LO Tahun 2021 sebesar Rp311.059.224.568,98 dan Belanja Jasa-LRA TA 2021 sebesar Rp313.479.290.459,91, sehingga terdapat selisih sebesar (Rp2.420.065.890,93) rincian perbedaan dapat di lihat pada **Lampiran 31.**

5.4.4.1.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp65.184.481.898,83	**Rp44.906.906.965,80**

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp65.184.481.898,83 naik sebesar Rp20.277.574.933,03 atau sebesar 45,15% jika dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan Tahun 2020 sebesar Rp44.906.906.965,80.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.102 Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Pemeliharaan Tanah	31.933.000,00	-	31.933.000,00
2	Beban Perawatan Peralatan dan Mesin	17.205.598.203,00	20.376.725.198,00	(3.171.126.995,00)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	26.751.590.135,60
4	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	19.021.215.892,23	-	19.021.215.892,23
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.174.144.668,00	-	2.174.144.668,00
6	Beban Pemeliharaan	-	24.530.181.767,80	(24.530.181.767,80)
Jumlah		**65.184.481.898,83**	**44.906.906.965,80**	**20.277.574.933,03**

Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2021 sebesar Rp65.184.481.898,83 sedangkan Belanja Pemeliharaan-LRA TA 2021 sebesar Rp88.790.802.506,98, sehingga terdapat selisih sebesar (Rp23.606.320.608,00), penjelasan selisih atas beban pemeliharaan LO dan belanja pemeliharaan LRA terdapat pada tabel 5.107 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.103 Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan

URAIAN	BELANJA	BEBAN	SELISIH	PENJELASAN
Dinas Pendidikan	354.78.379.766,00	6.165.402,00	35.472.214.364,00	penambahan reklasifikasi aset tetap GB dari belanja barjas akibat salah penganggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.485.876.305,38	19.435.615.061,23	(12.949.738.755,85)	kapitalisasi/reklas beban dari beban pemeliharaan gedung ke at GB 1.751.573.527,38 dan reklas aset dari jij ke beban pemeliharaan JIJ (tdk memenuhi kategori b.mod) 14.701.312.283,23
Dinas Perhubungan	2.637.696.799,00	2.438.046.799,00	199.650.000,00	jp utk mencatat GB yg bersumber dr kelompok belanja barjas (pemeliharaan gedung) smt II tahun 2021
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	884.362.000,00	377.862.000,00	506.500.000,00	JP utk memasukkan nilai b. mod GB dr kelompok belanja barjas SP2D: 0932/SP2D-LS/BJS/BUD/VIII/2021 146.835.000, SP2D: 1454/SP2D-LS/BJS/BUD/VIII/2021 342.615.000, SP2D: 0205/SP2D-LS/BJS/BUD/IV 2021 17.050.000
Inspektorat Daerah Provinsi	858.217.530,00	433.612.530,00	424.605.000,00	JP utk mengeluarkan belanja barjas (pemeliaraan GB) dan memasukkan ke b.mod GB
Sekretariat DPRD	4.432.728.075,00	4.479.638.075,00	(46.910.000,00)	JP utk mengeluarkan b. mod GB kepada kelompok barjas (pemeliharaan gedung)
TOTAL			**23.606.320.608,15**	

5.4.4.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp142.493.908.520,49	**Rp113.636.324.553,50**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 sebesar Rp142.493.908.520,49 naik sebesar Rp28.857.583.966,99 atau sebesar 25,39% jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp113.636.324.553,50.

Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2021 sebesar Rp142.493.908.520,49 sama dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA TA 2021 sebesar Rp142.493.908.520,49, sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.4.1.6 Beban Subsidi

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp550.000.000,00	**Rp550.000.000,00**

Beban Subsidi Tahun 2021 sebesar Rp550.000.000,00 merupakan subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya naik sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dari Beban Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp550.000.000,00.

Beban Subsidi-LO Tahun 2021 sebesar Rp550.000.000,00 sama dengan Belanja Subsidi-LRA TA 2021 sebesar Rp550.000.000,00, sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.4.1.7 Beban Hibah	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp600.238.715.839,36	**Rp816.637.372.713,05**

Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp600,238,715,839.36 turun sebesar (Rp216.398.656.873,69) atau sebesar (26,50%) jika dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2020 sebesar Rp816.637.372.713,05.

Rincian Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.104 Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.166.639.693,41	25.965.011.481,00	(21.798.371.787,59)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh	-	913.950.000,00	(913.950.000,00)
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	36.198.777.979,00	(36.198.777.979,00)
4	Beban Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia	-	600.000.000,00	(600.000.000,00)
5	Beban Hibah kepada KPU	-	130.475.012.050,00	(130.475.012.050,00)
6	Beban Hibah kepada Bawaslu	-	35.000.000.000,00	(35.000.000.000,00)
7	Beban Hibah kepada PMI	-	1.166.842.050,00	(1.166.842.050,00)
8	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota	-	529.476.100.000,00	(529.476.100.000,00)
9	Belanja Dana Hibah BOS Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota	-	33.71.360.000,00	(33.714.360.000,00)
10	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	23.127.319.153,05	(23.127.319.153,05)
11	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
12	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	14.530.152.505,00	-	14.530.152.505,00
13	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.031.061.287,00	-	7.031.061.287,00
14	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.136.015.100,00	-	1.136.015.100,00
15	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.273.954.189,00	-	3.273.954.189,00

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
16	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	70.,006.000,00	-	705.006.000,00
17	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.316.230.643,00	-	29.316.230.643,00
18	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15,057.927.421,95	-	15.057.927.421,95
19	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	442.922.879.000,00	-	442.922.879.000,00
20	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	47.715.411.000,00	-	47.715.411.000,00
21	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	32.278.669.000,00	-	32.278.669.000,00
22	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.104.770.000,00	-	2.104.770.000,00
	Jumlah	**600.238.715.839,36**	**816.637.372.713,05**	**(216.398.656.873,69)**

Beban Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp600.238.715.839,36 dan Belanja Hibah-LRA TA 2021 sebesar Rp777.720.359.692,40 sehingga terdapat selisih sebesar Rp177.481.643.853,04.

Beban Hibah-LO Tahun 2021 dengan Belanja Hibah-LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.105 Beban Hibah LO Tahun 2021 dan Belanja Hibah LRA TA 2021

No.	Uraian Akun LO	LO Tahun 2021 (Rp)	Uraian akun LRA	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih
1.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.166.639.693,41	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	8.720.952.769,00	(4.554.313.075,59)
2.	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	2.650.954.000,00	(2.650.954.000,00)
3.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	14.530.152.505,00	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	11.095.166.619,40	3.434.985.885,60
4.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.031.061.287,00	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.031.061.287,00	-
5.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.136.015.100,00	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.136.015.100,00	-
6.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.273.954.189,00	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.273.954.189,00	-

No.	Uraian Akun LO	LO Tahun 2021	Uraian akun LRA	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih
7.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	705.006.000,00	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	705.006.000,00	-
8.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.316.230.643,00	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.316.230.643,00	-
9.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.057.927.421,95	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.806.343.670,00-	12.251.538.752,00
10.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	442.922.879.000,00	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	442.922.879.000,00	-
11.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	47.715.411.000,00	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	47.715.411.000,00	-
12.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	32.278.669.000,00	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	218.241.615.415,00	(185.962.946.415,00)
13.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.104.770.000,00	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.104.770.000,00	-
JUMLAH		**600.238.715.839,36**	**JUMLAH**	**777.720.359.692,40**	**(177.481.643.853,04)**

5.4.4.1.8 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp27.528.966.768,00	**Rp328.500.000,00**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp27.528.966.768,00 merupakan bantuan sosial kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 naik sebesar Rp27.200.466.768,00 atau sebesar 8.280,20% jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar Rp328.500.000,00.

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.106 Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
2.	Beban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	1.889.137.500,00	328.500.000,00	1.560.637.500,00
3.	Beban Bantuan Sosial yang Tidak Di rencanakan	-	-	-
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	942.726.000,00	-	942.726.000,00

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	16.306.500.000,00	-	16.306.500.000,00
6	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	6.230.002.890,00	-	6.230.002.890,00
7	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	960.000.000,00	-	960.000.000,00
8	Beban Bantuan Soisal Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.200.600.378,00	-	1.200.600.378,00
	Jumlah	**27.528.966.768,00**	**328.500.000,00**	**27.200.466.768,00**

Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2021 sebesar Rp27.528.966.768,00 sama dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA TA 2021 sebesar Rp26.328.366.390,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.200.600.378,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107 Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2021 dan Bantuan Sosial LRA TA 2021

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Uraian akun LRA	LRA TA 2021	Selisih
1	2	3	4	5	6=3-5
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.889.137.500,00	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.889.137.500,00	-
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	942.726.000,00	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	942.726.000,00	-
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	16.306.500.000,00	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	16.306.500.000,00	-
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	6.230.002.890,00	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	6.230.002.890,00	-
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	960.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	960.000.000,00	-
6	Beban Bantuan Soisal Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.200.600.378,00	Belanja Bantuan Soisal Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	1.200.600.378,00
Jumlah		**27.528.966.768,00**	**Jumlah**	**26.328.366.390,00**	**1.200.600.378,00**

5.4.4.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp7.214.177.809,30	**Rp1.116.550.007,95**

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp7,214,177,809.30 merupakan penyisihan piutang Provinsi Jambi yang terdapat pada lima OPD naik sebesar Rp6.097.627.801,36 atau sebesar 546,11% jika dibandingkan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp1.116.550.007,95.

Rincian Beban Penyisihan Piutang dan Belanja Penyisihan Piutang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.108 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan Belanja Penyisihan Piutang LRA

No.	OPD	Beban LO (Rp)	Belanja LRA (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	(2.884.639.53)	-	(2.884.639,53)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.173.123.957,19	-	2.173.123.957,19
3	Beban Penyesihan Piutang Retribusi Tempat	(9.750,00)	-	(9.750,00)
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	15.597.390,00	-	15.597.390,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	5.744.111.596,22	-	5.744.111.596,22
5	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Perimbangan	(238.324.583,07)	-	(238.324.583,07)
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(477.436.161,51)	-	(477.436.161,51)
Jumlah		**7.214.177.809,30**	**-**	**7.214.177.809,30**

5.4.4.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp462.722.673.722,08	**Rp423.593.697.248,21**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 sebesar Rp462.722.673.722,08 naik sebesar Rp28.760.628.791,46 atau sebesar 9,24% jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 sebesar Rp 423.593.697.248,21.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.109 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	147.086.593.483,43	118.325.964.691,96	28.760.628.791,46

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=3-4
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.185.853.322,03	32.882.617.781,93	4.303.235.540,10
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	274.737.646.376,15	272.075.682.003,75	2.661.964.372,40
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5	Beban Penyusutan aset lainnya	3.444.283.545,00	7.335.962,59	3.436.947.582,41
6	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	268.296.995,48	302.096.808,00	(33.799.812,52)
Jumlah		**462,722.673.722,08**	**423.593.697.248,21**	**39.128.976.473,85**

Rincian Beban Penyusutan per OPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.110 Beban Penyusutan pada OPD Tahun 2021

Uraian	Peralatan Dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi
Dinas Pendidikan	44.629.794.070,59	15.860.111.858,86	282.314.687,62
Dinas Kesehatan	2.086.728.966,49	682.058.060,59	84.489.356,47
RSUD Rd. Mattaher	40.693.383.675,89	4.231.029.259,50	293.111.034,68
Rumah Sakit Jiwa	7.758.222.618,94	1.416.652.571,20	191.018.231,67
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.844.579.288,09	1.190.359.973,17	256.375.437.748,20
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	506.827.053,53	24.744.952,24	3.313.971,26
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.179.384.626,56	92.961.565,59	7.378.544,16
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	733.593.580,13	283.795.217,08	39.977.977,82
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	535.324.516,81	1.348.857.149,62	300.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	137.203.674,35	13.255.760,00	400.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	192.227.640,62	12.517.100,00	1.376.287,51
Dinas Lingkungan Hidup	518.997.936,14	190.714.500,52	13.144.283,34
Dinas Perhubungan	8.539.758.575,94	174.015.564,18	139.124.150,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.166.771.821,38	8.098.520,00	32.758.766,97
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	362.835.681,32	210.556.541,44	12.385.265,34
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	411.286.178,64	93.415.320,60	

Uraian	Peralatan Dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	482.018.253,21	991.086.333,84	3.727.440,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	439.356.596,86	1.383.951.399,00	2.902.882.725,20
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	573.917.590,18	51.040.350,00	14.868.888,90
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.425.343.930,00	847.223.750,65	493.078.324,82
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.364.664.128,43	1.453.692.106,46	160.934.238,70
Dinas Perkebunan	659.413.539,12	82.403.446,67	684.448.766,88
Dinas Kehutanan	1.623.809.749,13	280.675.428,32	157.068.906,76
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	537.162.586,52	53.676.765,92	12.638.833.305,79
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	890.512.231,48	642.651.583,84	3.230.300,00
Sekretariat Daerah	6.088.323.268,99	1.198.072.395,85	94.485.807,46
Inspektorat Daerah Provinsi	539.680.416,53	76.074.811,00	499.250,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	874.789.561,90	74.668.331,32	31.389.258,34
Badan Keuangan Daerah	5.400.436.824,88	2.552.235.820,72	27.555.033,76
Badan Kepegawaian Daerah	310.764.898,46	23.567.078,30	1.239.550,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	604.158.256,59	419.945.457,48	37.927.349,50
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	191.732.146,09	-	-
Sekretariat DPRD	3.741.049.009,24	228.996.044,69	437.500,00
Badan Penghubung Daerah	843.380.403,06	959.084.456,82	6.833.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	199.160.187,33	33.663.846,56	1.676.425,00
Jumlah	**147.086.593.483,42**	**37.185.853.322,03**	**274.737.646.376,15**

Rincian Beban Amortisasi per OPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.111 Beban Amortisasi per OPD Tahun 2021 dan 2020

No.	OPD	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Dinas Pendidikan	962.708,33	-	962.708,33
2.	Dinas Kesehatan	4.598.000,00	2.508.000,00	2.090.000,00
3.	RSUD Raden Mattaher	14.770.000,00	13.820.000,00	950.000,00
4.	RSJD Provinsi Jambi	-	-	-
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat	-	-	-
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-

No.	OPD	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-
8.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.480.340,00	3.480.340,00	-
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak danPengendalian Penduduk	-	-	-
12.	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-
13.	Dinas LingkunganHidup	-	-	-
14.	Dinas Perhubungan	-	-	-
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.220.000,00	37.538.666,67	(31.318.666,67)
16.	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-
17.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	29.026.666,67	44.860.000,00	(15.833.333,33)
18.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-
20.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.798.863,80	5.798.863,81	- (0,01)
22.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	-	-	-
23.	Dinas Perkebunan	-	-	-
24.	Dinas Kehutanan	-	-	-
25.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
26.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-
27.	Sekretariat Dewan	-	-	-
28.	Sekretariat Daerah	56.822.916,68	50.195.937,50	6.626.979,18
29.	Badan Penghubung Daerah Provinsi	-	-	-
30.	Inspektorat Daerah	-	-	-
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89.930.000,00	87.207.500,00	2.722.500,00
32.	Badan Keuangan Daerah	56.687.500,00	56.687.500,00	-

No.	OPD	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
33.	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-
34.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-
35.	Badan penelitian dan pengembangan Daerah	-	-	-
Jumlah		**268.296.995,48**	**302.096.807,98**	**(33.799.812,50)**

5.4.4.1.11 Beban Lain-lain

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp29.857.941.102,57	**Rp55.089.118.990,57**

Beban Lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp29.857.941.102,57 merupakan beban atas Belanja Modal yang tidak bisa masuk ke Neraca ataupun ke Daftar Barang Milik Daerah (Buku Inventaris) karena nilai satuan barangnya dibawah kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Beban Lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp29.857.941.102,57 turun sebesar Rp25.231.177.888,00 atau sebesar (45,80)% jika dibandingkan dengan Beban Lain-lain Tahun 2020 sebesar Rp55.089.118.990,57.

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.112 Beban Lain-lain per OPD Tahun 2021 dan 2020

No.	OPD	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Dinas Pendidikan	23.217.931.266,15	39.439.365.940,87	(16.221.434.674,72)
2.	Dinas Kesehatan	1.106.073.804,50	47.200.000,00	1.058.873.804,50
3.	RSUD Raden Mattaher	951.469.951,00	666.224.884,20	285.245.066,80
4.	RSJD Provinsi Jambi	76.621.930,00	45.716.300,00	30.905.630,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat	92.720.375,92	109.019.620,00	(16.299.244,08)
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	5.110.656,00	(5.110.656,00)
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	54.120.000,00	(54.120.000,00)
8.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	137.419.908,00	62.421.100,00	74.998.808,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.220.000,00	3.850.000,00	50.370.000,00
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	52.694.133,00	80.400.000,00	(27.705.867,00)

No.	OPD	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	3.900.000,00	-	3.900.000,00
12.	Dinas Ketahanan Pangan	-	2.486.364,00	(2.486.364,00)
13.	Dinas Lingkungan Hidup	1.195.000,00	12.685.200,00	(11.490.200,00)
14.	Dinas Perhubunga	1.868.463.370,00	3.371.886.037,00	(1.503.422.667,00)
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	63.529.680,00	35.872.664,00	27.657.016,00
16.	Dinas Koperasi	66.200.000,00	-	66.200.000,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	39.519.000,00	(39.519.000,00)
18.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	21.728.125,00	-	21.728.125,00
19.	Dinas Pariwisata	12.758.000,00	-	12.758.000,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	54.013.910,00	-	54.013.910,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.852.500,00	10.723.679.550,50	(10.700.827.050,50)
22.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	17.677.080,00	-	17.677.080,00
23.	Dinas Perkebunan	6.086.977,00	-	6.086.977,00
24.	Dinas Kehutanan	160.121.480,00	35.346.000,00	124.775.480,00
25.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
26.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	855.946.912,00	5.096.790,00	850.850.122,00
27.	Sekretariat DPRD	173.272.000,00	196.286.088,00	(23.014.088,00)
28.	Biro Pemerintahan dan Otda	-	1.784.800,00	(1.784.800,00)
29.	Biro Perekonomian dan SDA	-	1.784.800,00	(1.784.800,00)
30.	Biro Pembangunan dan kerjasama	-	1.784.800,00	(1.784.800,00)
31.	Biro Kesejahteraan Masyarakat	-	1.784.800,00	(1.784.800,00)
32.	Biro Umum	643.395.200,00	9.793.051,00	633.602.149,00
33.	Biro Humas dan Protokol	-	1.784.800,00	(1.784.800,00)
34.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	87.208.815,00	(87.208.815,00)
35.	Biro Hukum	-	6.043.680,00	(6.043.680,00)
36.	Biro Organisasi	-	1.784.800,00	(1.784.800,00)

No.	OPD	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
37.	Badan Penghubung Daerah Provinsi	1.900.000,00	24.316.500,00	(22.416.500,00)
38.	Inspektorat Daerah	-	-	-
39.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	-	-	-
40.	Badan Keuangan Daerah	170.104.000,00	1.590.000,00	168.514.000,00
41.	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	-	-	-
42.	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-
43.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.752.000,00	10.000.000,00	1.752.000,00
44.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.893.500,00	3.171.950,00	10.721.550,00
Jumlah		**29.857.941.102,57**	**55.089.118.990,57**	**(25.231.177.888,00)**

5.4.4.2 Beban Transfer

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp819.493.108.185,00	**Rp681.426.671.777,02**

Beban Transfer Tahun 2021 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp819.493.108.185,00 naik sebesar Rp138.066.436.407,98 atau sebesar 20,26% jika dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2020 sebesar Rp681.426.671.777,02.

Rincian Beban Transfer Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.113 Beban Transfer Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	2	3		
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab/Kota	725.773.108.185,00	579.654.038.577,02	146.119.069.607,98
2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	93.720.000.000,00	99.800.420.000,00	(6.080.420.000,00)
3.	Beban Transfer Bantuan kepada Partai Politik	-	1.972.213.200,00	(1.972.213.200,00)
Jumlah		**819.493.108.185,00**	**681.426.671.777,02**	**138.066.436.407,98**

Beban Transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp819.493.108.185,00 dan Belanja Transfer-LRA TA 2021 sebesar Rp811.268.648.459,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.234.459.726,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.114 Beban Transfer LO Tahun 2021 dan Belanja Transfer LRA TA 2021

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Uraian akun LRA	Realisasi Belanja LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=3-5
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab/Kota	725.773.108.185,00	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab/Kota	717.538.648.459,00	8.234.459.726,00
2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	93.720.000.000,00	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	93.720.000.000,00	-
Jumlah		**819.493.108.185,00**	**Jumlah**	**811.258.648.459,00**	**8.234.459.726,00**

Beban Transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp819.493.108.185,00 dan Belanja Transfer-LRA TA 2021 sebesar Rp811.258.648.459,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.234.459.726,00, dengan uraian sebagai berikut.

a. Mutasi Tambah Utang DBH Pajak Daerah kepada Pemkab sebesar Rp131.916.907.925,00.

b. Mutasi Tambah Jurnal Koreksi BPK Pendapatan Pajak Rokok masih tercatat sebagai neto (seharusnya dicatat bruto dengan memperhitungkan potongan BPJS dimana potongan tersebut disajikan sebagai belanja) sebesar Rp2.804.310.887,00.

c. Mutasi Tambah Utang DBH Pajak Daerah kepada Pemkot sebesar Rp46.951.151.955,00.

d. Mutasi Kurang Jurnal Balik Utang DBH Pajak Daerah Kepada Pemkab sebesar Rp127.033.972.013,00.

e. Mutasi Kurang Jurnal Balik Utang DBH Pajak Daerah kepada Pemkot Rp46.403.939.028,00.

5.4.4.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada PemerintahanKabupaten/Kota

	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp725.773.108.185,00	**Rp579.654.038.577,02**

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebesar Rp725.773.108.185,00 naik sebesar Rp146.119.069.607,98 atau sebesar 25,21% jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebesar Rp579.654.038.577,02.

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota-LO Tahun 2021 sebesar Rp725.773.108.185,00 dan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LRA TA 2021 sebesar Rp717.538.648.459,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.234.459.726,00, dengan uraian sebagai berikut.

a. Mutasi Tambah Utang DBH Pajak Daerah kepada Pemkab sebesar Rp131.916.907.925,00.

b. Mutasi Tambah Jurnal Koreksi BPK Pendapatan Pajak Rokok masih tercatat sebagai neto (seharusnya dicatat bruto dengan memperhitungkan potongan BPJS dimana potongan tersebut disajikan sebagai belanja) sebesar Rp2.804.310.887,00.

c. Mutasi Tambah Utang DBH Pajak Daerah kepada Pemkot sebesar Rp46.951.151.955,00.

d. Mutasi Kurang Jurnal Balik Utang DBH Pajak Daerah Kepada Pemkab sebesar Rp127.033.972.013,00.

e. Mutasi Kurang Jurnal Balik Utang DBH Pajak Daerah kepada Pemkot Rp46.403.939.028,00.

5.4.4.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/ Kota

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp93.720.000.000,00	**Rp99.800.420.000,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebesar Rp93.720.000.000,00 turun sebesar Rp6.080.420.000,00 atau sebesar 6,09% jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebesar Rp99.800.420.000,00.

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota-LO Tahun 2021 sebesar Rp93.720.000.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota-LRA TA 2021 sebesar Rp93.720.000.000,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.4.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp0,00	**Rp0,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2021 sebesar Rp0,00 tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO Tahun 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA TA 2021 sebesar Rp0,00, sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.4.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp0,00	**Rp1.972.213.200,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik Tahun 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp1.972.213.200,00 atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik Tahun 2020 sebesar Rp1.972.213.200,00 karena pada Tahun 2021 dilakukan reklasifikasi atas Bantuan Keuangan ke Partai Politik yang semula dicatat sebagai Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik direklasifikasi menjadi Beban Hibah

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik-LO Tahun 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik-LRA TA 2021 sebesar Rp1.972.213.200,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.5 Surplus/Defisit Dari Operasi	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp461.855.063.960,66	**Rp266.156.877.321,07**

Surplus/Defisit untuk Tahun 2021 dari Operasi sebesar Rp461.855.063.960,66 naik sebesar Rp195.698.186.639,59 atau sebesar 73,53% jika dibandingkan dengan Surplus Tahun 2020 sebesar Rp266.156.877.321,07.

5.4.6 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp37.602.222.215,77	**Rp33.976.765,99**

Surplus untuk Tahun 2021 dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp37.602.222.215,77 naik sebesar Rp37.568.245.449,78 atau 110.570,40% jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 Rp33.976.765,99. Nilai sebesar Rp37.602.222.215,77 berasal dari (Rp37.050.476.721,24 + Rp320.677,63 + Rp86.762.730,51+ Rp464.662.086,39) tersebut berasal dari perubahan Nilai Investasi Permanen pada Bank Jambi, BUMD JII, Investasi Non Permanen berdasarkan data dari Biro PSDA (Dana KUPEM).

5.4.7 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp499.457.286.176,43	**Rp266.190.854.087,06**

Surplus untuk Tahun 2021 sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp499.457.286.176,43 naik sebesar Rp233.266.432.089,37 atau sebesar 87,63% jika dibandingkan dengan Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2020 sebesar Rp266.190.854.087,06.

5.4.8 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp51.667.024.237,00)	**(Rp147.219.210.217,00)**

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar (Rp51.667.024.237,00) dan Tahun 2020 sebesar (Rp147.219.210.217,00). Pendapatan Luar Biasa pada Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Beban Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp51.667.024.237,00 turun sebesar Rp95.552.185.980,00 atau 64,90% jika dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2020 sebesar Rp147.219.210.217,00.

5.4.9 Surplus/Defisit LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp447.790.261.939,43	**Rp 118.971.643.870,06**

Surplus-LO Tahun 2021 sebesar Rp447.790.261.939,43 naik sebesar Rp328.818.618.069,37 atau sebesar 276,38% jika dibandingkan dengan Surplus-LO Tahun 2020 sebesar Rp118.971.643.870,06.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

LAK bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK menggambarkan arus kas bersih (arus kas masuk dikurangi arus kas keluar) selama periode tertentu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi/investasi aset non keuangan, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/non anggaran. Penjelasan atas LAK Tahun 2021 sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

TA 2021	TA 2020
Rp787.115.398.611,51	**Rp610.657.988.409,06**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp787.115.398.611,51 naik sebesar Rp176.457.410.202,45 atau sebesar 28,89% bila dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp610.657.988.409,06 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.115 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1.	Arus Masuk Kas	4.725.724.403.283,03	4.398.355.031.519,46	327.369.371.763,57	7,44
2.	Arus Keluar Kas	3.938.609.004.671,53	3.787.697.043.110,40	150.911.961.561,13	3,98
Arus Kas Bersih		**787.115.398.611,51**	**610.657.988.409,06**	**176.457.410.202,45**	**28,89**

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

TA 2021	TA 2020
Rp(449.690.683.605,89)	**Rp(640.426.367.188,37)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2021 sebesar

Rp(449.690.683.605,89) naik sebesar Rp190.735.683.582,48 atau sebesar 29,78% bila dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp(640.426.367.188,37), dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.116 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1.	Arus Masuk Kas	-	2.269.340.600,00	(2.269.340.600,00	(100,00)
2.	Arus Keluar Kas	449.690.683.605,89	642.695.707.788,37	(193.005.024.182,48)	(30,03)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan		**(449.690.683.605,89)**	**(640.426.367.188,37)**	**190.735.683.582,48**	**29,78**

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	TA 2021	TA 2020
	Rp0,00	**Rp0,00**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain pada masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	TA 2021	TA 2020
	Rp468.556.180,55	**Rp(6.261.268.917,01)**

Arus kas bersih aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2021 sebesar Rp468.556.180,55 naik sebesar Rp6.729.825.097,56 atau sebesar 107,48% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp(6.261.268.917,01) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.117 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Turun/Naik	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1.	Arus Masuk Kas	230.601.270.831,73	199.751.825.082,01	30.849.445.749,72	15,44
2.	Arus Keluar Kas	230.132.714.651,18	206.013.093.999,02	24.119.620.652,16	11,70
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris Non Anggaran		**468.556.180,55**	**(6.261.268.917,01)**	**6.729.825.097,56**	**107,48**

Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.118 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2021

No.	Jenis	Penerimaan	Setoran/Pengeluaran
1.	Potongan Askes	54.127.544.759,00	54.127.544.759,00
2.	Iuran Wajib Pegawai	53.855.591.486,00	53.855.591.486,00
3.	Pajak Penghasilan 21	46.711.099.822,00	46.711.099.822,00
4.	Pajak Penghasilan 22	3.866.030.789,00	3.866.030.789,00
5.	Pajak Penghasilan 23	3.931.762.181,00	3.931.762.181,00
6.	Pajak Penghasilan Final Ps 4	5.260.385.588,00	5.260.385.588,00
7.	Pajak Penghasilan 26	43.636,00	43.636,00
8.	Pajak Pertambahan Nilai	57.119.735.463,18	57.119.735.463,18
9.	Potongan JKK & JKM	4.588.726.877,00	4.588.726.877,00
10.	Penerimaan Utang Pihak Ketiga	886.331.105,55	-
11.	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan	254.019.125,00	671.794.050,00
12.	Penerimaan Koreksi	-	-
Jumlah		**230.601.270.831,73**	**230.132.714.651,18**

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

TA 2021	TA 2020
Rp337.893.271.186,17	**Rp(36.029.647.696,32)**

Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2021 sebesar Rp337.893.271.186,17 naik sebesar Rp373.922.918.882,49 atau sebesar 1.073,82% bila dibandingkan Tahun 2020 sebesar (Rp36.029.647.696,32) dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.119 Kenaikan/ Penurunan Kas Tahun 2021 dan 2020

No.	Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktivitas Operasi	787.115.398.611,51	610.657.988.409,06	176.457.410.202,45	28,89
2.	Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan	(449.690.683.605,89)	(640.426.367.188,37)	190.735.683.582,48	29,78
3.	Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	-	-	-	-

No.	Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
4.	Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	468.556.180,55	(6.261.268.917,01)	6.729.825.097,56	107,48
Jumlah Kenaikan/Penurunan Kas		**337.893.271.186,17**	**(36.029.647.696,32)**	**373.922.918.882,49**	**1.037,82**

5.5.6. Saldo Akhir Kas

TA 2021	TA 2020
Rp770.762.428.593,76	**Rp432.451.382.482,59**

Saldo Akhir Kas Tahun 2021 sebesar Rp770.762.428.593,76 naik sebesar Rp338.311.046.111,17 atau sebesar 78,23% bila dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp432.451.382.482,59, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Saldo Akhir Kas Tahun 2021 dan 2020

No.	Saldo Akhir Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1.	Saldo Akhir Kas di BUD + BLUD + BOS	770.090.634.543,76	432.197.363.357,59	337.893.271.186,17	78,18
2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	600.000,00	-	600.000,00	-
3.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	671.194.050,00	254.019.125,00	417.174.925,00	164,23
Jumlah		**770.762.428.593,76**	**432.451.382.482,59**	**338.311.046.111,17**	**78,23**

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal Tahun 2021 sebesar Rp8.669.519.067.524,11 merupakan saldo akhir Tahun 2020.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp447.790.261.939,43

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2021 adalah sebesar Rp30.755.367.593,87 yang terdiri dari:

1. Koreksi Nilai Persediaan Rp379.479.000,00

   Koreksi nilai persediaan merupakan koreksi kurang saji atas saldo persediaan untuk diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp379.479.000,00.

2. Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar Rp(1,00)

   Koreksi ekuitas penyesuaian aset lancar merupakan koreksi lebih saji atas Kas di BLUD pada Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp(1,00).

3. Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap Rp41.706.862.723,62

   Rincian koreksi ekuitas penyesuaian aset tetap dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.121 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(971.456.157,41)	Pengurangan ekuitas karena lebih saji aset tetap
2.	Biro Umum	0,01	Penambahan ekuitas dari kurang saji aset tetap
3.	Inspektorat Daerah Provinsi	0,02	Penambahan ekuitas dari kurang saji aset tetap
4.	Badan Keuangan Daerah	42.678.318.881,00	Penambahan ekuitas dari Penilaian Aset Tanah Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-155/BAKEUDA-3.2/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp43.907.360.981,00 Pengurangan ekuitas karena: - Hibah ke Pemkab Tanjabbar Berdasarkan BAST Nomor 3060/BAST/Setda.PBMD-3.2/2020 tangga 28 Desember 2020 sebesar Rp(544.116.100,00) - Hibah ke Kementerian Kesehatan Berdasarkan BAST Nomor 3059/BAST/Setda.PBMD-3.2/2020 tangga 28 Desember 2020 sebesar Rp(430.766.000,00) - Pemkab Merangin Berdasarkan BAST Nomor 3063/BAST/Setda.PBMD-

No.	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			3.2/2020 tangga 28 Desember 2020 sebesar Rp(254.160.000,00)
Jumlah		**41.706.862.723,62**	

4. Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(7.867.145.431,52)

Rincian koreksi ekuitas akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.122 Rincian Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	OPD	Jumlah	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	1.384.185.290,00	Penambahan ekuitas dari lebih saji Akumulasi Penyusutan
2.	Dinas Kesehatan	661.466,66	Penambahan ekuitas dari lebih saji Akumulasi Penyusutan
3.	RSUD Rd. Mattaher	(17.236.152.341,66)	Pengurangan Ekuitas karena: - Pencatatan akumulasi penyusutan Hibah dari Kemenkes RI sesuai dengan BASTB Nomor KN.02.07/I.3/4801/2021 Tanggal 7 April 2021 sebesar Rp(16784801300) - Pencatatan akumulasi penyusutan Hibah dari Kemenkes RI sesuai dengan BASTB Nomor KN.02.07/I.3/4801/2021 Tanggal 7 April 2021 sebesar Rp(448.681.000,00) - Kurang saji akumulasi penyusutan Rp(2.670.041,66)
4.	Rumah Sakit Jiwa	(11.888.000,00)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.473.307.886,84	Penambahan ekuitas dari lebih saji Akumulasi Penyusutan
6.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	20.852.295,00	Penambahan ekuitas dari lebih saji Akumulasi Penyusutan
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	(0,01)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
8.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(3.878.170,01)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(2.731.375.157,20)	Pengurangan ekuitas karena pencatatan akumulasi penyusutan hasil reklasifikasi aset mutasi dari Dinas PUPR
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan	(34.998.382,96)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
11.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan	(12.349.001,35)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan

No.	OPD	Jumlah	Keterangan
	Peternakan		
12.	Dinas Perkebunan	(35.169.758,59)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
13.	Biro Umum	(468.339.363,24)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
14.	Biro Administrasi Pimpinan	(3,33)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
15.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(1.500.000,00)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
16.	Inspektorat Daerah Provinsi	(78.779.021,00)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.003.432,61)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
18.	Badan Keuangan Daerah	162.187.381,45	Penambahan dari: - Pencatatan akumulasi penyusutan Hibah ke Pemkab Tanjabbar Berdasarkan BAST Nomor 3060/BAST/Setda.PBMD-3.2/2020 tangga 28 Desember 2020 sebesar Rp95.978.837,96 - Pencatatan akumulasi penyusutan Hibah ke Pemkab Merangin Berdasarkan BAST Nomor 3063/BAST/Setda.PBMD-3.2/2020 tangga 28 Desember 2020 sebesar Rp60.998.400,00 - Lebih saji Akumulasi Penyusutan
19.	Badan Kepegawaian Daerah	(169.474,19)	Pengurangan ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan
20.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,02	Penambahan ekuitas dari lebih saji Akumulasi Penyusutan
21.	Sekretariat DPRD	10.916.235,00	Penambahan ekuitas dari lebih saji Akumulasi Penyusutan
22.	Badan Penghubung Daerah	(197.162.673,46)	Pengurangan ekuitas karena pencatatan akumulasi penyusutan hasil reklasifikasi aset mutasi dari Dinas PUPR
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(103.491.206,88)	Penambahan ekuitas dari lebih saji Akumulasi Penyusutan sebesar Rp166.666,66 Pengurangan ekuitas karena pencatatan akumulasi penyusutan hasil reklasifikasi aset mutasi dari Dinas PUPR sebesar Rp103.657.873,54
Jumlah		**(7.867.145.431,52)**	

5. Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya Rp(4.700.685.023,85)

   Rincian koreksi ekuitas penyesuaian aset lainnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.123 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya

No.	OPD	Jumlah	Keterangan
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(4.478.472.473,75)	Pengurangan ekuitas karena pencatatan akumulasi penyusutan aset lainnya
2.	Biro Umum	(0,10)	Pengurangan ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan aset lainnya
3.	Biro Administrasi Pimpinan	(222.212.550,00)	Pengurangan ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan aset lainnya
Jumlah		**(4.700.685.023,85)**	

6. Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp(2.508.000,00)

   Koreksi ekuitas akumulasi amortisasi aset tidak berwujud merupakan kurang saji akumulasi amortisasi aset tidak berwujud pada Dinas Kesehatan sebesar Rp(2.508.000,00).

7. Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Rp78.754.536,40

   Koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap merupakan kurang saji mutasi akumulasi penyusutan dari Badan Penghubung Daerah sebesar Rp78.754.536,40.

8. Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen Rp(354.985.650,18)

   Koreksi ekuitas nilai investasi non permanen merupakan penyisihan dana bergulir (KUPEM) pada Biro Perekonomian sebesar Rp(354.985.650,18).

9. Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban Rp1.515.595.440,40

   Koreksi ekuitas penyesuaian kewajiban sebesar Rp1.515.595.440,40 terdiri dari:

   a. Koreksi utang pengadaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.464.761.560,00; dan

   b. Koreksi utang belanja modal pada RSUD Raden Mattaher sebesar Rp50.833.880,40.

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Jumlah ekuitas akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.148.064.697.057,41 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Ekuitas Awal	Rp	8.669.519.067.524,11
2.	Suplus/Defisit LO	Rp	447.790.261.939,43
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	30.755.367.593,87
4.	Ekuitas Akhir	Rp	9.148.064.697.057,41

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Letak Geografis dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering di bagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala di bagian timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat di barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Duabelas di bagian tengah serta lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia "IMS-GT" (Indonesia, Malaysia, Singapura – *Growth Triangle*). Dengan posisi itu wilayah Provinsi Jambi memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang minyak dan gas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Sumber daya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha. luas daratan Provinsi Jambi, seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian dan non pertanian seluas 2.920.560 ha (57,27%). Di samping itu, terdapat daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari satu Sekretariat Daerah dengan sembilan Biro, satu Sekretariat DPRD, satu Inspektorat, dua puluh dua dinas, delapan badan, dan dua unit pelaksana teknis daerah.

6.2. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam Tahun 2021

Dalam tahun 2021 terdapat penggantian manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yaitu pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih masa jabatan Tahun 2021-2024, serta pergantian jabatan karena pengisian jabatan Perangkat Daerah Definitif dan pergantian karena penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah. Demikian juga dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah juga terdapat pergantian baik yang berhubungan dengan pergantian Pejabat Definitif dan Pelaksana Tugas maupun karena kebutuhan organisasi.

6.3 Pemilihan Kepala Daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di 88 TPS dalam lima kabupaten dan kota di daerah pada tanggal 27 Mei 2021. Keputusan PSU itu tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-

Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PSU pascaputusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020. Dalam rangka mendukung pendanaan Pemilukada telah dianggarkan dan disalurkan Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu), Kepolisian Daerah (Polda) dan Komando Resor Militer (Korem) dengan berpedoman ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6.4 Penanganan Pandemi COVID-19

Pemerintah Provinsi Jambi tetap berkomitmen dalam penannggulangan dan penanganan Pandemi COVID-19 di tahun 2021. Beberapa regulasi dan ketentuan dalam rangka yang mempengaruhi kebijakan penganggaran APBD TA 2021 Pemerintah Provinsi Jambi adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Regulasi dan Ketentuan di atas ditindaklanjuti dengan pembentukan Gugus Tugas Penanganan pandemi COVID-19 Provinsi Jambi dan melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Jambi serta penerbitan peraturan turunan sebagai dasar pelaksanaan di daerah.

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

- **Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA):**
  Target pendapatan yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp4.401.754.558.279,00 telah direalisasi sebesar Rp4.725.724.403.283,03 atau sebesar 107,36%. Pada sisi belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp4.804.809.609.170,00 terealisasi sebesar Rp4.388.299.688.277,42 atau sebesar 91,33%. Dari angka defisit APBD yang ditargetkan sebesar (Rp403.055.050.891,00) terealisasi surplus sebesar 337.424.715.005,62 atau sebesar (83,72%). Dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp403.055.050.891,00, maka terdapat SILPA sebesar Rp727.979.765.896,76.

- **Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL):**
  SAL Tahun 2021 sebesar Rp727.979.765.896,76 naik sebesar Rp337.424.715.005,62 atau sebesar 86,40% jika dibandingkan dengan SAL Tahun 2020 sebesar Rp390.555.050.891,14. Penggunaan SAL Tahun 2020 sebesar Rp390.555.050.891,14 dan terdapat SAL Tahun 2021 yang tidak digunakan sebesar Rp727.979.765.896,76.

- **Pada Neraca:**
  Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.529.828.339.382,81 naik sebesar Rp471.030.099.588,79 atau sebesar 5,20% jika dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.941.719.097.774,88. Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp381.763.642.325,37 turun sebesar Rp7.515.529.944,55 atau sebesar 1,93% jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp389.279.172.269,92. Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.148.064.697.057,45 naik sebesar Rp478.545.629.533,34 atau sebesar 5,52% jika dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.669.519.067.524,11.

- **Pada Laporan Operasional (LO):**
  Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp4.772.753.912.812,04 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp1.909.539.280.026,04, Pendapatan Transfer LO sebesar Rp2.832.314.774.417,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp30.899.858.369,00. Beban Tahun 2021 sebesar Rp4.310.898.848.851,35 yang terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp3.491.405.740.666,35 dan Beban Transfer sebesar Rp819.493.108.185,00. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional surplus sebesar Rp461.855.063.960,69. Surplus Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp37.602.222.215,77. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp499.457.286.176,46. Pendapatan luar biasa sebesar Rp0,00, Beban Luar Biasa sebesar Rp51.667.024.237,00, Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa mengalami defisit Rp51.667.024.237,00, sehingga Surplus/Defisit LO surplus sebesar Rp447.790.261.939,46.

- **Pada Laporan Arus Kas (LAK):**
  Saldo arus kas pada akhir tahun 2021 sebesar Rp770.750.598.787,77 naik sebesar Rp338.299.216.305,18 atau sebesar 78,00% jika dibandingkan saldo arus kas pada akhir tahun 2020 sebesar Rp432.451.382.482,59.

- **Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):**
  Ekuitas awal sebesar Rp8.669.519.067.524,11, Surplus/Defisit LO sebesar Rp447.790.261.939,46 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar Rp30.755.367.593,88 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp9.148.064.697.057,45.

Jambi, 24 Mei 2022

GUBERNUR JAMBI,

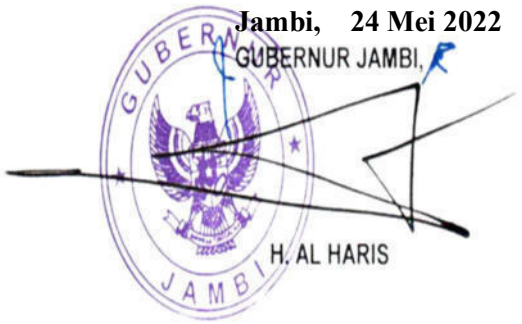

H. AL HARIS

LAMPIRAN

Lampiran 1

Masa Manfaat Barang Milik Daerah

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	5
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu (Khusus Rambu Tidak Bersuar)	5
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**1.462.197.691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**11.417.354.130,00**	**3.465.969.250,00**	**30,36**	**0,00**
3	**Penerimaan Jasa Giro**	**5.047.894.609,00**	**13.066.638.744,60**	258,85	**7.234.660.305,99**
	Jasa Giro Kas Daerah	5.047.894.609,00	12.956.626.248,72	256,67	5.009.647.932,89
	Jasa Giro Bendahara	0,00	110.012.495,88	**0,00**	2.225.012.373,10
4	**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**0,00**	**9.255.524,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Pendapatan Bunga Deposito**	**11.769.186.000,00**	**4.171.917.808,25**	35,45	**28.932.671.232,81**
6	**Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**1.387.373.930,48**	**0,00**	**5.906.771.388,33**
7	**Pendapatan Denda Pajak**	**0,00**	**2.396.964.549,00**	**0,00**	**1.682.160.105,75**
	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.373.432.143,00	0,00	1.649.001.329,00
	Pendapatan Denda Pajak BBNKB	0,00	16.931.200,00	0,00	22.922.200,00
	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	752.085,75
	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	6.601.206,00	0,00	9.484.491,00
8	**Pendapatan Denda Retribusi**	**0,00**	**-**	0,00	**80.000,00**
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9	**Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Aset Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772.800,00**
	Pendapatan Denda Sewa Aset daerah	0,00	0,00	0,00	504.000,00
	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset daerah	0,00	0,00	0,00	268.800,00
10	**Pendapatan dari Pengembalian**	**0,00**	**1.674.912,00**	**0,00**	**102.238.118,95**
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunjangan	0,00	1.674.912,00	0,00	750.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain	0,00	0,00	0,00	101.488.118,95
11	**Pendapatan BLUD**	**148.250.000.000,00**	**173.881.656.514,11**	117,29	**143.233.129.352,23**
12	**Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.814,00**
13	**Penerimaan Lain-lain**	**0,00**	**46.299.523.079,76**	**0,00**	**8.844.113.423,05**
	Temuan Hasil Pemeriksaan	0,00	4.429.639.226,50	0,00	496.088.975,74
	Taman Nasional	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
	Lelang Kayu/Lelang Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	426.393.994,00
	ORARI	0,00	0,00	0,00	7.913.680.453,31
	Pengembalian Gaji/Tunjangan/Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengembalian Setoran Pihak Ketiga	0,00	41.869.883.853,26	0,00	0,00
14	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kerugian Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**177.946.632.430,00**	**244.680.974.312,20**	**137,50**	**195.937.064.541,11**

Lampiran 3

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2021

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	675.437.638.716,00	652.919.815.571,00	96,67	636.636.961.709,95
2	Dinas Kesehatan	37.009.126.387,00	34.862.559.204,00	94,20	32.990.303.986,44
3	Rumah Sakit Umum	221.147.832.886,00	222.431.653.040,31	100,58	157.568.871.766,72
4	Rumah Sakit Jiwa	56.922.887.944,00	47.437.315.132,00	83,34	33.010.715.696,65
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	32.740.781.211,00	29.847.679.657,00	91,16	27.882.234.227,00
6	Bappeda	12.373.246.198,00	12.127.530.746,00	98,01	11.740.657.977,00
7	Dinas Perhubungan	9.480.523.937,00	7.877.498.354,00	83,09	7.667.972.463,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	12.594.713.659,00	12.271.143.723,00	97,43	11.284.137.753,09
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	9.834.836.194,00	8.401.468.990,00	85,43	8.686.373.736,89
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.115.350.560,00	3.863.938.530,00	75,54	4.145.225.848,43
11	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.347.427.003,00	15.141.890.132,00	92,63	14.821.106.993,00
12	Dinas Koperasi dan UKM	8.471.987.384,00	7.812.018.241,00	92,21	7.668.908.748,86
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.408.425.565,99	8.551.353.332,00	90,89	8.617.526.675,00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.306.833.896,00	13.813.910.537,00	90,25	13.678.355.398,36
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	11.838.840.957,00	9.509.331.062,00	80,32	10.019.678.405,58
16	Satuan Satuan Polisi Pamong Praja	20.459.702.617,00	18.444.470.153,00	90,15	17.704.470.892,79
17	Badan Kesbangpol	7.703.145.116,00	6.821.433.243,00	88,55	7.084.111.083,63
18	Sekretariat DPRD	52.234.588.064,00	45.303.022.024,00	86,73	36.905.989.925,40
19	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.543.730.604,00	6.939.009.637,00	81,22	7.208.293.407,65
20	Inspektorat	14.686.888.811,00	13.921.660.121,00	94,79	13.140.222.607,00

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
21	Badan Penghubung Daerah	6.094.524.322,00	5.330.676.711,00	87,47	5.324.662.939,19
22	Badan Keuangan Daerah	77.476.856.055,00	59.096.143.138,49	76,28	56.643.318.127,00
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	13.501.151.931,00	12.896.365.047,00	95,52	12.397.614.302,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	12.427.389.208,00	11.238.671.287,00	90,43	11.049.128.672,00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.608.625.882,00	7.978.858.587,00	92,68	6.669.612.988,00
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	11.973.153.670,00	11.054.726.341,00	92,33	11.142.519.657,80
27	Dinas Ketahanan Pangan	9.858.902.278,20	9.111.387.895,00	92,42	8.936.602.021,80
28	Biro Umum	58.831.407.523,00	57.499.967.405,00	97,74	55.929.914.045,00
29	Biro Pemetintahan dan Otonomi Daerah	246.680.000,00	227.820.000,00	92,35	0,00
30	Biro Kesramas	432.840.000,00	411.340.000,00	95,03	0,00
31	Biro Perekonomian	104.160.000,00	97.650.000,00	93,75	0,00
32	Biro Administrasi Pembangunan	164.040.000,00	162.330.000,00	98,96	0,00
33	Biro Administrasi Pimpinan	283.080.000,00	275.010.000,00	97,15	0,00
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.243.560.000,00	1.191.850.000,00	95,84	0,00
35	Biro Hukum	176.640.000,00	168.410.000,00	95,34	0,00
36	Biro Organisasi	175.480.000,00	174.360.000,00	99,36	0,00
37	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	37.170.872.180,00	32.673.875.295,00	87,90	33.572.109.971,68
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.960.214.556,00	17.585.360.494,00	92,75	17.520.164.825,00
39	Dinas Perkebunan	14.572.532.310,00	12.790.715.524,00	87,77	13.359.770.209,89
40	Dinas Kehutanan	52.404.763.379,00	43.840.438.854,00	83,66	45.798.323.593,27
41	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.414.401.578,00	9.365.882.456,00	89,93	9.116.431.321,00
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.697.100.356,00	16.858.492.061,00	95,26	16.158.469.899,00

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.682.643.771,00	11.839.609.381,00	80,64	12.542.538.576,22
44	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00		2.126.073.278,00
45	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00		4.568.100.364,00
Jumlah		**1.605.159.526.709,19**	**1.500.168.641.905,80**	**93,46**	**1.391.317.474.093,29**

Lampiran 4

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa 2021

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	125.997.233.379,60	115.636.343.029,00	91,78	207.028.749.914,44
2	Dinas Kesehatan	111.050.794.947,00	95.648.096.556,52	86,13	51.700.566.969,00
3	Rumah Sakit Umum	144.970.112.537,00	93.093.658.910,00	64,22	79.726.980.300,00
4	Rumah Sakit Jiwa	9.206.832.833,00	8.008.343.094,82	86,98	22.711.382.559,40
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	80.789.286.265,00	75.357.248.731,38	93,28	78.135.037.364,23
6	Bappeda	9.911.414.403,00	8.252.235.108,60	83,26	7.416.420.192,00
7	Dinas Perhubungan	7.664.687.602,00	6.849.536.507,00	89,36	9.138.932.607,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.745.680.143,00	3.594.542.895,00	95,97	3.932.817.152,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	4.430.168.955,00	4.010.477.076,00	90,53	3.128.882.252,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.990.490.865,00	12.139.837.820,00	93,45	4.928.385.661,00
11	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.369.176.752,00	11.504.619.180,00	86,05	8.161.338.347,00
12	Dinas Koperasi dan UKM	7.297.705.718,00	7.117.604.967,00	97,53	6.780.626.421,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.814.081.390,01	3.554.300.937,00	93,19	2.161.506.105,00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.017.930.537,00	14.014.481.011,00	93,32	10.149.982.054,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	38.617.477.336,00	30.263.416.213,00	78,37	13.754.919.192,00
16	Satuan Satuan Polisi Pamong Praja	6.310.158.133,00	5.866.006.044,00	92,96	6.755.719.572,00
17	Badan Kesbangpol	4.549.711.600,00	4.487.752.264,00	98,64	4.059.459.092,00
18	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.008.747.101,00	2.372.317.914,00	78,85	3.445.533.099,50
19	Sekretariat DPRD	79.981.139.516,00	53.235.968.050,00	66,56	49.137.374.153,33
20	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.143.326.754,00	2.974.012.383,00	94,61	2.502.699.546,00
21	Inspektorat	12.756.403.053,00	11.372.102.418,00	89,15	11.544.919.517,00
22	Badan Penghubung Daerah	8.726.587.847,00	7.315.575.438,00	83,83	6.169.088.058,35

NO	OPD	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
23	Badan Keuangan Daerah	27.863.792.330,00	24.352.634.157,00	87,40	21.856.371.141,50
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	8.556.289.861,00	7.861.462.178,00	91,88	6.359.340.414,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	4.044.397.511,00	3.403.323.341,00	84,15	3.684.824.761,00
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.680.515.155,00	13.068.311.594,00	95,52	5.556.982.881,00
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.119.713.231,00	6.891.118.176,00	96,79	2.575.024.500,00
28	Dinas Ketahanan Pangan	5.964.385.566,80	5.489.253.524,00	92,03	3.028.082.408,00
29	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.228.723.000,00	1.099.200.236,00	89,46	1.417.564.290,00
30	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	8.639.438.496,00	6.829.863.260,00	79,05	3.661.424.129,00
31	Biro Perekonomian	1.220.799.890,00	1.110.292.701,00	90,95	920.518.829,00
32	Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama	1.238.600.086,00	1.152.273.580,00	93,03	2.381.284.114,00
33	Biro Umum	33.228.326.507,00	30.630.877.915,00	92,18	26.109.102.253,00
34	Biro Administrasi Pimpinan	2.669.844.800,00	2.436.920.424,00	91,28	9.241.112.268,00
35	Biro Hukum	1.587.915.860,00	1.439.496.470,00	90,65	1.566.452.250,00
36	Biro Organisasi	1.537.282.000,00	1.485.774.266,00	96,65	1.292.442.449,00
37	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	36.781.414.082,00	34.953.105.489,00	95,03	16.976.026.192,00
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.536.401.216,00	8.055.829.617,00	94,37	4.376.567.163,00
39	Dinas Perkebunan	13.591.122.579,00	11.220.075.800,00	82,55	12.721.170.474,00
40	Dinas Kehutanan	10.676.884.507,00	9.035.003.184,00	84,62	8.248.756.282,80
41	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.657.894.045,00	3.226.110.155,00	88,20	4.183.709.615,00
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.144.292.396,00	12.160.096.536,00	92,51	9.364.011.578,00
43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.628.400.806,00	8.104.895.517,00	93,93	5.296.133.684,00
Jumlah		**920.945.581.591,41**	**770.674.394.667,32**	**83,68**	**743.288.221.804,55**

Lampiran 5

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Jumlah		%	Lebih/ (Kurang)
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan	109.173.652.927,40	99.945.645.369,03	91,55	(9.228.007.558,37)
2	Dinas Kesehatan	20.620.222.697,00	16.297.758.706,00	79,04	(4.322.463.991,00)
3	Rumah Sakit Umum	41.079.459.603,00	33.447.282.529,00	81,42	(7.632.177.074,00)
4	Rumah Sakit Jiwa	13.670.240.901,00	13.022.414.411,51	95,26	(647.826.489,49)
5	Dinas Pekerjaan Umum	246.934.260.451,00	237.745.220.003,65	96,28	(9.189.040.447,35)
6	Bappeda	1.268.949.850,00	1.207.805.588,00	95,18	(61.144.262,00)
7	Dinas Lingkungan Hidup	153.762.056,00	152.261.400,00	99,02	(1.500.656,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	739.186.298,00	686.895.050,00	92,93	(52.291.248,00)
9	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	850.879.498,00	780.580.408,00	91,74	(70.299.090,00)
10	Dinas Koperasi dan UKM	218.470.788,00	217.719.000,00	99,66	(751.788,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	130.577.474,00	127.175.000,00	97,39	(3.402.474,00)
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	751.539.236,00	714.567.500,00	95,08	(36.971.736,00)
13	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	515.569.541,00	507.580.500,00	98,45	(7.989.041,00)
14	Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	16.361.904,00	12.943.904,00	79,11	(3.418.000,00)
15	Badan Kesbangpol	123.468.625,00	123.456.000,00	99,99	(12.625,00)
16	Sekretariat DPRD	9.538.665.305,00	8.106.025.949,70	84,98	(1.432.639.355,30)
17	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.468.500,00	1.468.500,00	100,00	0,00
18	Inspektorat Daerah	1.730.991.890,00	1.460.630.903,00	84,38	(270.360.987,00)
19	Badan Penghubung Daerah	274.895.400,00	266.660.400,00	97,00	(8.235.000,00)
20	Badan Keuangan Daerah	1.703.577.621,00	1.617.316.664,00	94,94	(86.260.957,00)
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	313.942.678,00	309.352.702,00	98,54	(4.589.976,00)
22	Badan Kepegawaian Daerah	194.988.199,00	102.395.000,00	52,51	(92.593.199,00)
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	2.299.170.238,00	2.197.368.070,00	95,57	(101.802.168,00)
24	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	366.026.152,00	361.394.210,00	98,73	(4.631.942,00)
25	Dinas Ketahanan Pangan	484.446.920,00	481.022.483,00	99,29	(3.424.437,00)
26	Dinas Perhubungan	3.534.694.193,00	3.518.096.920,00	99,53	(16.597.273,00)
27	Biro Umum	14.982.291.256,00	13.597.472.840,00	90,76	(1.384.818.416,00)
28	Biro Adminstrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	65.633.000,00	65.500.000,00	99,80	(133.000,00)
30	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.667.605.319,00	2.886.666.475,00	78,71	(780.938.844,00)

NO	SKPD	Jumlah		%	Lebih/ (Kurang)
		Anggaran	Realisasi		
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	393.992.406,00	366.430.432,00	93,00	(27.561.974,00)
32	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	0,00
33	Dinas Perkebunan	2.864.015.068,00	2.818.987.232,00	98,43	(45.027.836,00)
34	Dinas Kehutanan	951.062.105,00	948.601.948,00	99,74	(2.460.157,00)
35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.073.119.650,00	3.058.431.096,00	99,52	(14.688.554,00)
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.264.689.044,00	1.219.227.500,00	96,41	(45.461.544,00)
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.357.159.813,00	1.314.428.912,00	96,85	(42.730.901,00)
Jumlah		**485.312.936.606,40**	**449.690.683.605,89**	**92,66**	**(35.622.253.000,51)**

Lampiran 6

MUTASI PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES)				MUTASI KURANG (JAN S.D DES)				SALDO AKHIR (PER 31 DES 2021)	KET
		JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (3+7)-11	14
I	**PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**	**51.991.300,00**				-		**I**	**PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**	**-**	**51.991.300,00**	
1	DIPENDA	-				-	1		DIPENDA	-	-	-
2	PT. MEGA ANUGERAH SARANA	2.342.400,00				-	2		PT. MEGA ANUGERAH SARANA	-	2.342.400,00	-
3	PT. SUMBER TEHNIK	49.648.900,00				-	3		PT. SUMBER TEHNIK	-	49.648.900,00	-
II	**PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK)**	**-**				**-**		**II**	**PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK)**	**-**	**-**	
4	PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK) KOREKSI BPK RI SESUAI SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH NO : S-49/PK.4/2020 TGL 23-4-2020	-				-				-	-	-
5	PIUTANG PAJAK DAERAH (ROKOK) KOREKSI BPK RI SESUAI SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH NO : S-49/PK.4/2020 TGL 23-4-2020	-				-				-	-	-
III	**PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR-KENDARAAN BERMOTOR**	**576.927.906,86**				**-**		**III**	**PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR-KENDARAAN BERMOTOR**	**576.927.906,86**	**-**	
6	PIUTANG PAJAK PBBKB PT. SYURIAH BAHTERA HARAPAN MANDIRI TUNGGAKAN TAHUN 2014 S.D 2015	362.830.756,86				-	-	31 DES 2020	PT. SYURIAH BAHTERA HARAPAN MANDIRI	362.830.756,86	-	-
7	PIUTANG PAJAK PBBKB PT. SYURIAH BAHTERA HARAPAN MANDIRI TUNGGAKAN TAHUN 2019	214.097.150,00				-	-	31 DES 2020	PT. SYURIAH BAHTERA HARAPAN MANDIRI	214.097.150,00	-	-
	PIUTANG PAJAK DAERAH BRUTO	**628.919.206,86**				**-**			PIUTANG PAJAK DAERAH BRUTO	**576.927.906,86**	**51.991.300,00**	-
	% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	**(54.875.939,53)**							% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG		**(51.991.300,00)**	-
	PIUTANG PAJAK DAERAH NETTO	**574.043.267,33**							PIUTANG PAJAK DAERAH NETTO		**-**	-

Lampiran 7

PIUTANG RETRIBUSI

Per 31 Desember 2021

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	SALDO AWAL 1 JANUARI 2021 JUMLAH (RP)	MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES)				MUTASI KURANG (JAN S.D DES)				SALDO AKHIR (PER 31 DES 2021)	KET
			NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (RP)	
	PIUTANG RETRIBUSI											
1	BADAN PENGHUBUNG DAERAH											
	JUMLAH	30.650.000		-	-	-	1	Tahun 2021	PIUTANG RETRIBUSI	1.950.000	28.700.000	-
	% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	(28.709.750)									(28.700.000)	-
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH NETTO	1.940.250		-	-	-	-				-	-
2	BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											
	JUMLAH	1.454.566.500		-	-	722.323.125	1	Tahun 2021	PIUTANG RETRIBUSI	19.525.000	2.157.364.625,00	-
	% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	(1.404.372.500)									(2.108.070.625,00)	-
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH NETTO	50.194.000		-	-	722.323.125					49.294.000	-
3	BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											
	KOREKSI BPK RI TAHUN 2019 ATAS PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN											
	JUMLAH	93.415.000		-	-	-	-	-	-	-	93.415.000	-
	% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	-									-	
4	PIUTANG ATAS DINAS PERKEBUNAN										-	
	JUMLAH	-	1		Kurang setor	800,00					800,00	
	% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	-									-	-
	PIUTANG RETRIBUSI NETTO	-									800,00	-
5	PIUTANG ATAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA										-	
	JUMLAH	-	1		Kurang setor	500,00					500,00	
	% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	-									-	-
	PIUTANG RETRIBUSI NETTO	-									500,00	-
	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	1.578.631.500,00		-	-	722.324.425,00				21.475.000,00	2.279.480.925,00	-
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	(1.433.082.250,00)		-	-				-		(2.136.770.625,00)	-
	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH NETTO	145.549.250,00		-	-				-		142.710.300,00	-

Lampiran 8

PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Per 31 Desember 2021

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	SALDO AWAL 1 JANUARI 2021 JUMLAH (RP)	MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES)				MUTASI KURANG (JAN S.D DES)				SALDO AKHIR (PER 31 DES 2021)
			NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (RP)
1	**RSUD RADEN MATTAHER JAMBI**	**601.439.423,00**	**1**	**Tahun 2021**	**Pelayanan Retribusi Kesehatan**	**16.079.432.336,25**			**Pelayanan Retribusi Kesehatan**	**198.657.454,00**	**16.482.214.305,25**
	PENYISIHAN PIUTANG	(212.472.817,60)									(263.113.850,24)
	PIUTANG NETTO	388.966.605,40									16.219.100.455,01
2	**RSJ DAERAH PROVINSI JAMBI**	**1.369.951.576,00**	**# #**	**Thn 2021**	**Pendapatan Retribusi Kesehatan**	**917.291.000,00**	**1**	**Thn 2021**	**Pendapatan Retribusi Kesehatan**	**1.369.951.576,00**	**917.291.000,00**
	PENYISIHAN PIUTANG	(68.497.579,00)									(4.586.455,00)
	PIUTANG NETTO	1.301.453.997,00									912.704.545,00
3	**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN**	**-**	**#**	**Thn 2021**	**Pendapatan Retribusi Kesehatan**	**11.991.000,00**				**-**	**11.991.000,00**
	PENYISIHAN PIUTANG	-									(59.955,00)
	PIUTANG NETTO	-									11.931.045,00
4	**BAKEUDA**	**15.597.390,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.597.390,00**
	PENYISIHAN PIUTANG	(15.597.390,00)									(15.597.390,00)
	PIUTANG NETTO	-									-
5	**PIUTANG TASPEN ATAS UANG DUKA WAFAT YANG BELUM DIBAYARKAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PENYISIHAN PIUTANG	-									-
	PIUTANG NETTO	-									-
6	**PIUTANG SAMISAKE SKPKD**	**1.280.418.130,00**							**PIUTANG SAMISAKE SKPKD**	**1.280.418.130,00**	**-**
	PENYISIHAN PIUTANG	(640.209.065,00)									-
	PIUTANG NETTO	640.209.065,00									-
7	**PIUTANG BANTUAN KEUANGAN DAN ALAT BERAT/ALAT PENDUKUNG LAINNYA**	**-**			**PIUTANG BANTUAN KEUANGAN DAN ALAT BERAT/ALAT PENDUKUNG LAINNYA**	**25.441.659.333,40**			**PIUTANG BANTUAN KEUANGAN DAN ALAT BERAT/ALAT PENDUKUNG LAINNYA**	**-**	**25.441.659.333,40**
	1. BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN	**-**				**8.228.321.536,00**			**1. BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN**	**-**	**8.228.321.536,00**
	a. Kab. Batanghari	-			a. Kab. Batanghari	324.218.647,00					
	b. Kab. Tebo	-			b. Kab. Tebo	480.434.192,00					
	c. Kab. Sarolangun	-			c. Kab. Sarolangun	-					
	d. Kab. Bungo	-			d. Kab. Bungo	1.400.000.000,00					
	e. Kab. Kerinci	-			e. Kab. Kerinci	-					
	f. Kota Sungai Penuh	-			f. Kota Sungai Penuh	64.141.500,00					
	g. Kab. Tanjab Timur	-			g. Kab. Tanjab Timur	113.290.000,00					
	h. Kota Jambi	-			h. Kota Jambi	454.651.897,00					
	i. Muaro Jambi	-			i. Muaro Jambi	-					
	j. Kab. Merangin	-			j. Kab. Merangin	702.155.100					
	k. Kab. Tanjab Barat	-			k. Kab. Tanjab Barat	4.689.430.200					
	2. BANTUAN KEUANGAN DUSUN/DESA	**-**			**2. BANTUAN KEUANGAN DUSUN/DESA**	**7.768.773.635,40**			**2. BANTUAN KEUANGAN DUSUN/DESA**	**-**	**7.768.773.635,40**
	a. Kab. Batanghari	-			a. Kab. Batanghari	-					
	b. Kab. Tebo	-			b. Kab. Tebo	-					
	c. Kab. Sarolangun	-			c. Kab. Sarolangun	60.000.000,00					
	d. Kab. Bungo	-			d. Kab. Bungo	-					
	e. Kab. Kerinci	-			e. Kab. Kerinci	1.080.000.000,00					
	f. Kota Sungai Penuh	-			f. Kota Sungai Penuh	120.000.000,00					
	g. Kab. Tanjab Timur	-			g. Kab. Tanjab Timur	130.000.000,00					
	h. Kota Jambi	-			h. Kota Jambi	-					
	i. Muaro Jambi	-			i. Muaro Jambi	2.826.665.203,40					
	j. Kab. Merangin	-			j. Kab. Merangin	560.245.198,00					
	k. Kab. Tanjab Barat	-			k. Kab. Tanjab Barat	2.991.863.234,00					
	3. BANTUAN KEUANGAN ALAT BERAT/ALAT PENDUKUNG LAINNYA	**-**			**3. BANTUAN KEUANGAN ALAT BERAT/ALAT PENDUKUNG LAINNYA**	**8.591.127.612,00**			**3. BANTUAN KEUANGAN ALAT BERAT/ALAT PENDUKUNG LAINNYA**	**-**	**8.591.127.612,00**
	a. Kab. Batanghari	-			a. Kab. Batanghari	131.357.753,00					
	b. Kab. Tebo	-			b. Kab. Tebo	899.661.006,00					
	c. Kab. Sarolangun	-			c. Kab. Sarolangun	892.956.000,00					
	d. Kab. Bungo	-			d. Kab. Bungo	-					

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	SALDO AWAL 1 JANUARI 2021 JUMLAH (RP)	MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES)				MUTASI KURANG (JAN S.D DES)				SALDO AKHIR (PER 31 DES 2021)
			NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (RP)
	e. Kab. Kerinci	-			e. Kab. Kerinci	3.168.614.576,00					
	f. Kota Sungai Penuh	-			f. Kota Sungai Penuh	522.928.020,00					
	g. Kab. Tanjab Timur	-			g. Kab. Tanjab Timur	338.382.714,00					
	h. Kota Jambi	-			h. Kota Jambi	115.593.240,00					
	i. Muaro Jambi	-			i. Muaro Jambi	1.663.000.000,00					
	j. Kab. Merangin	-			j. Kab. Merangin	854.900.884,00					
	k. Kab. Tanjab Barat	-			k. Kab. Tanjab Barat	3.733.419					
	4. BANTUAN KEUANGAN UNTUK RSUD RADEN HANAFIE BUNGO TAHUN 2020	**-**			**4. BANTUAN KEUANGAN UNTUK RSUD RADEN HANAFIE BUNGO TAHUN 2020**	**178.606.550,00**			**4. BANTUAN KEUANGAN UNTUK RSUD RADEN HANAFIE BUNGO TAHUN 2020**	**-**	**178.606.550,00**
	5. BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN BANDARA DEPATI PARBO KERINCI	**-**			**5. BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN BANDARA DEPATI PARBO KERINCI**	**674.830.000,00**			**5. BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN BANDARA DEPATI PARBO KERINCI**	**-**	**674.830.000,00**
	PENYISIHAN PIUTANG	**-**							**PENYISIHAN PIUTANG**		**(127.208.296,67)**
	PIUTANG NETTO	**-**							**PIUTANG NETTO**		**25.314.451.036,73**
8	SKPKD										
	JUMLAH	10.827.784.880				5.541.175.658,00		-		2.500.000.000,00	13.868.960.538,00
	PT. SIMOTA PUTRA PARAYUDHA (BOT PEMBANGUNAN WTC)	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	PT. JAMBI SAPTA MANUNGGAL (BOT PEMBANGUNAN HOTEL TEPIAN RATU	500.000.000,00	1	Thn 2021	BOT Tepian Ratu	500.000.000,00	1	Thn 2021	BOT Tepian Ratu	500.000.000,00	500.000.000,00
	PT. ERAGUNA BUMI NUSA (BOT PEMBANGUNAN PASAR ANGSO DUO)	10.327.784.880,00	1	Thn 2021	BOT Angso Duo	5.041.175.658,00	1	Thn 2021	BOT Angso Duo	2.000.000.000,00	13.368.960.538,00
	% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	(5.166.392.440,00)									(6.686.980.269,00)
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH NETTO	5.161.392.440,00		-	-	-	-	-	-	-	7.181.980.269
9	PIUTANG ATAS TAGIHAN PD. ANGSO PUTIH/BIRO APSDA										
	SUHEIMI, SE/KUD SEMANGAT 45 BANGKO	58.760.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.760.255,00
	JUNAIDI NAINGGOLAN	126.805.205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.805.205,00
	AR SIREGAR	129.165.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	129.165.416,00
	ISTIONO/BAMBANG SRIYONO	83.080.328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	83.080.328,00
	JUMLAH	397.811.204,00				-				-	397.811.204,00
	% TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG	(397.811.204,00)									(397.811.204,00)
	PIUTANG RETRIBUSI NETTO	-									-
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**14.493.002.603,00**				**47.991.549.327,65**			**JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.349.027.160,00**	**57.135.524.770,65**
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**(6.500.980.495,60)**							**JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		**(7.495.357.419,91)**
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH NETTO	**7.992.022.107,40**							**JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH NETTO**		**49.640.167.350,74**

Lampiran 9

PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DARI DANA BAGI HASIL PAJAK

PER 31 DESEMBER 2021

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	SALDO AWAL (PER 1 JANUARI 2020) SETELAH KOREKSI PMK 113 TAHUN 2020	MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES)				MUTASI KURANG (JAN S.D DES)				SALDO AKHIR (PER 31 DES 2021)	KET
		JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (RP)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (4+8)-12	14
I	**PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN KB.2018-PMK.20/2020**	-									-	
1	DANA BAGI HASIL PAJAK											
	1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	-									-	
	DBH - BAG. DAERAH	-									-	
	BP-PBB	-									-	
	2. PPH	-									-	
	PPH PS.21	-									-	
	PPH.PASAL 25/29	-									-	
	3. CUKAI TEMBAKAU	-									-	
II	**PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN KB.2018-PMK.36/2020**				**KOREKSI TAMBAH PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN KB.2018-PMK.36/2020**				**PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN KB.2018-PMK.36/2020**			
1	DANA BAGI HASIL PAJAK	42.009.955.658,00	1	Tahun 2021	DANA BAGI HASIL PAJAK	2.946.110.177,00	1	Tahun 2021	DANA BAGI HASIL PAJAK	44.956.065.835,00	-	
	1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	42.009.955.658,00			1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	2.848.938.161,00			1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	44.858.893.819,00	-	
	DBH - BAG. DAERAH	39.667.090.326,00			DBH - BAG. DAERAH	2.668.522.000,00			DBH - BAG. DAERAH	42.335.612.326,00	-	
	BP-PBB	2.342.865.332,00			BP-PBB	180.416.161,00			BP-PBB	2.523.281.493,00	-	
	2. PPH	-			2. PPH	-			2. PPH	-	-	
	PPH PS.21	-			PPH PS.21	-			PPH PS.21	-	-	
	PPH.PASAL 25/29	-			PPH.PASAL 25/29	-			PPH.PASAL 25/29	-	-	
	3. CUKAI TEMBAKAU	-			3. CUKAI TEMBAKAU	97.172.016,00			3. CUKAI TEMBAKAU	97.172.016,00	-	
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL PAJAK	**42.009.955.658,00**				**2.946.110.177,00**			**JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL PAJAK**	**44.956.065.835,00**	**-**	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	**(210.049.778,00)**							**JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG**		**-**	
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL PAJAK NETTO	**41.799.905.880,00**				**-**			**JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL PAJAK NETTO**	**44.956.065.835,00**	**-**	

Lampiran 10

PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DARI DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2021

NO	JENIS PIUTANG/SKPD	SALDO AWAL (PER 1 JANUARI 2021) SETELAH KOREKSI PMK 113 TAHUN 2020	MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES)				MUTASI KURANG (JAN S.D DES)				SALDO AKHIR (PER 31 DES 2021)	KET
		JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (RP)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (4+8)-12	14
I	**PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT**	-	-	-	-	-			**PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT**	-	-	
	SESUAI DENGAN KB.2018-PMK.20/2020											
1	**DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK**								**DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK**			
	1. SUMBER DAYA ALAM	-	-	-	-	-			**1. SUMBER DAYA ALAM**	-	-	
	DR	-	-	-	-	-			DR	-	-	
	IIUPH	-	-	-	-	-			IIUPH	-	-	
	PSDH	-	-	-	-	-			PSDH	-	-	
	2. MIGAS	-	-	-	-	-			**2. MIGAS**	-	-	
	GAS BUMI	-	-	-	-	-			GAS BUMI	-	-	
	MINYAK BUMI	-	-	-	-	-			MINYAK BUMI	-	-	
	3. MINERBA	-	-	-	-	-			**3. MINERBA**	-	-	
	LANDRENT	-	-	-	-	-			LANDRENT	-	-	
	ROYALTI	-	-	-	-	-			ROYALTI	-	-	
II	**PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN KB.2018-PMK.36/2020**	**5.654.960.955,00**				**2.939.252.386,00**			**PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT**	**8.594.213.341,00**	-	
1	**DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK**				**DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK (KOREKSI TAMBAH)**				**DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK**			
	1. SUMBER DAYA ALAM	**5.143.030.747,00**	1	Tahun 2021	**1. SUMBER DAYA ALAM**	**2.939.252.386,00**			**1. SUMBER DAYA ALAM**	**8.082.283.133,00**	-	
	DR	-			DR	2.675.300.890,00			DR	2.675.300.890,00	-	
	IIUPH	-			IIUPH	8.025.816,00			IIUPH	8.025.816,00	-	
	PSDH	5.143.030.747,00			PSDH	255.925.680,00			PSDH	5.398.956.427,00	-	
	2. MIGAS	-			**2. MIGAS**	-			**2. MIGAS**	-	-	
	GAS BUMI	-			GAS BUMI	-			GAS BUMI	-	-	
	MINYAK BUMI	-			MINYAK BUMI	-			MINYAK BUMI	-	-	
	3. MINERBA	**511.930.208,00**			**3. MINERBA**	-			**3. MINERBA (KOREKSI KURANG)**	**511.930.208,00**	-	
	LANDRENT	511.930.208,00			LANDRENT	-			LANDRENT	511.930.208,00	-	
	ROYALTI	-			ROYALTI	-			ROYALTI	-	-	
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL BUKAN PAJAK	**5.654.960.955,00**				**2.939.252.386,00**			**JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL BUKAN PAJAK**	**8.594.213.341,00**	-	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	**(28.274.804,78)**							**JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG**		-	
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL BUKAN PAJAK NETTO	**5.626.686.150,22**				**2.939.252.386,00**			**JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DARI BAGI HASIL BUKAN PAJAK NETTO**	**8.594.213.341,00**	-	

Lampiran 11

Rincian Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Penyedia	Polis			Masa berlaku			Sisa Nilai per 31-Dec-21
			Nomor	Tanggal	Nilai	Mulai	Selesai		
	Biro Umum Sekretariat Daerah								
1	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT . ASURANSI UMUM BUMI PUTRA	1025012121120001	01-Dec-21	29.918.000	01-Dec-21	01-Dec-22	30	27.458.986,30
2	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT . ASURANSI UMUM BUMI PUTRA	1025012121120002	01-Dec-21	29.565.000	01-Dec-21	01-Dec-22	30	27.135.000,00
3	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT . ASURANSI UMUM BUMI PUTRA	1025012121120003	01-Dec-21	29.656.000	01-Dec-21	01-Dec-22	30	27.218.520,55
4	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Februari 2021	PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk	34022221000584	24-Feb-21	154.312.770	24-Feb-21	24-Feb-22	310	23.252.609,18
5	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Maret 2021	PT. ASURANSI PURNA ARTHANUGRAHA	2402012100016	29-Mar-21	185.567.225	29-Mar-21	29-Mar-22	277	44.739.495,34
6	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode April 2021	PT. ASURANSI UMUM MEGA	IP.21.02.21.000006	12-Apr-21	197.665.010	12-Apr-21	12-Apr-22	263	55.237.893,21
7	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Juli 2021	PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk	3402222001142	12-Jul-21	88.180.125	12-Jul-21	12-Jul-22	172	46.626.751,03
	Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo pada Biro Umum Sekretariat Daerah				**714.864.130**				**251.669.255,60**
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
1.	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Juni 2021	PT. JASA RAHARJA PUTERA	121000221062100108	18-Jun-21	175.949.550	18-Jun-21	17-Jun-22	196	81.467.051,92
2.	Belanja Asuransi Alat Berat Periode Agustus 2021	PT. JASA RAHARJA PUTERA	121000203082100041	12-Aug-21	199.090.000	12-Aug-21	12-Aug-22	141	122.181.260,27
3.	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode April 2021	PT. JASA RAHARJA PUTERA	121000109042100018	01-Apr-21	99.530.383	01-Apr-21	01-Apr-22	274	24.814.424,25
4	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Juni 2021	PT. JASA RAHARJA PUTERA	121000221062100074	16-Jun-21	72.125.175	16-Jun-21	16-Jun-22	198	32.999.737,60
5	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode September 2021	PT. JASA RAHARJA PUTERA	121000221092000019	01-Sep-21	40.126.650	01-Sep-21	01-Sep-22	121	26.824.390,68
6	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode November 2021	PT. BUMIDA BUMIPUTERA	10250022120100003	25-Nov-21	3.900.120	25-Nov-21	25-Nov-22	36	3.515.450,63
	Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				**590.721.878**				**291.802.315,36**
	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja								
1.	Belanja Asuransu Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Juni 2021	PT. ASURANSI BINTANG Tbk	P61300100489	22-Jun-21	32.281.760	21-Jun-21	21-Jun-22	193	15.212.226,63
2.	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Periode Juni 2021	PT. JASA RAHARJA PUTERA	121001012062100038	03-Jun-21	20.748.000	03-Jun-21	03-Jun-22	211	8.753.950,68
	Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Dinas Satuan Polisi Pamong Praja				**53.029.760**				**23.966.177,32**
	Badan Penghubung								
1.	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT. BUMIDA BUMIPUTERA	1004011521110003	22-Dec-21	859.963	22-Dec-21	22-Dec-22	9	838.758,78
2.	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT. BUMIDA BUMIPUTERA	1004012121110008	22-Dec-21	35.493.975	22-Dec-21	22-Dec-22	9	34.618.781,10

No.	Uraian	Penyedia	Polis			Masa berlaku			Sisa Nilai per 31-Dec-21
			Nomor	Tanggal	Nilai	Mulai	Selesai		
3.	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT. BUMIDA BUMIPUTERA	1004011521110004	22-Dec-21	8.412.318	22-Dec-21	22-Dec-22	9	8.204.890,82
4	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT. BUMIDA BUMIPUTERA	1004011521110001	22-Dec-21	187.479	22-Dec-21	22-Dec-22	9	182.856,58
5	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT. BUMIDA BUMIPUTERA	1004012121110005	22-Dec-21	718.185	22-Dec-21	22-Dec-22	9	700.476,33
6	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT. BUMIDA BUMIPUTERA	1004012121110007	22-Dec-21	2.463.453	22-Dec-21	22-Dec-22	9	2.402.710,32
7	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT. BUMIDA BUMIPUTERA	1004012121110006	22-Dec-21	37.807.765	22-Dec-21	22-Dec-22	9	36.875.518,74
8	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Periode Desember 2021	PT. BUMIDA BUMIPUTERA	1004011521110002	23-Dec-21	19.751.777	23-Dec-21	23-Dec-22	9	19.264.747,26
9	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode April 2021	PT. BUMIDA BUMIPUTERA	1004012121110008	23-Dec-21	90.682.850	23-Dec-21	23-Dec-22	266	24.596.170,27
Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Badan Penghubung					**196.377.766**				**127.684.910,20**
	Dinas Koperasi dan UMKM								
1.	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode April 2021	PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM	10802010221000192	13-Apr-21	49.990.000	13-Apr-21	13-Apr-22	262	14.106.767,12
Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Dinas Koperasi dan UMKM					**49.990.000**				**14.106.767,12**
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								
1.	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Februari 2021	PT. JASA RAHARJA PUTERA	121000221022100024	26-Feb-21	18.402.150	26-Feb-21	26-Feb-22	308	2873760,41
2.	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Maret 2021	PT. JASA RAHARJA PUTERA	121000221032100014	19-Mar-21	27.862.865	19-Mar-21	19-Mar-22	287	5954256,08
Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					**46.265.015**				**8.828.016,49**
TOTAL BIAYA DIBAYAR DI MUKA TAHUN 2021									***718.057.442,09***

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DATA PERSEDIAAN TAHUN 2021
PER SKPD DAN JENIS PERSEDIAAN
-

NO	SKPD	Barang Pakai Habis								JUMLAH
		Bahan	Suku Cadang	Alat Bahan Kegiatan Kantor	Obat Obatan	Persediaan Untuk dijual/diserahkan	Persediaan Strategis/berjaga-jaga	Natura dan Pakan	Penelitian Dalam Proses	
1	Dinas Pendidikan	-	-	2.176.600,00	-	-	-	-	-	**2.176.600,00**
2	Dinas Kesehatan	1.370.808.506,00	-	2.164.200,00	5.451.384.124,14	-	-	-	-	**6.824.356.830,14**
3	Rumah Sakit Umum	1.471.991.962,67	4.777.250,00	438.441.310,00	16.302.073.216,00					**18.217.283.738,67**
4	Rumah Sakit Jiwa	377.605.800,01		367.017.707,50	1.888.929.407,23					**2.633.552.914,74**
5	Dinas Pekerjaan Umum			783.400,00		292.089.335.888,96				**292.090.119.288,96**
6	Badan Kesbangpol			2.185.034,00						**2.185.034,00**
7	Satpol. PP			2.930.200,00						**2.930.200,00**
8	Dinas Sosial Dukcapil	8.037.258,00		10.421.906,00	1.750.167,00	304.133.078,00	93.234.900,00			**417.577.309,00**
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	306.798.850,00	-	174.009.150,00	-	-				**480.808.000,00**
10	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi			2.696.000,00						**2.696.000,00**
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan									**-**
12	Dinas Ketahanan Pangan	880.600.543,77		5.141.000,00		382.989.005,23				**1.268.730.549,00**
13	Dinas Lingkungan Hidup			1.953.591,00	7.840.000,00					**9.793.591,00**
14	Dinas Perhubungan			12.762.090,00						**12.762.090,00**
15	Dinas Kominfo			1.323.500,00						**1.323.500,00**
16	Dinas Koperasi & UKM			4.425.800,00						**4.425.800,00**
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			2.652.300,00						**2.652.300,00**
18	Dispora			1.419.850,00						**1.419.850,00**
19	Disbudpar			16.962.008,00						**16.962.008,00**

NO	SKPD	Barang Pakai Habis								JUMLAH
		Bahan	Suku Cadang	Alat Bahan Kegiatan Kantor	Obat Obatan	Persediaan Untuk dijual/diserahkan	Persediaan Strategis/berjaga-jaga	Natura dan Pakan	Penelitian Dalam Proses	
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah									-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.102.708.620,00		1.522.693,00				7.198.500,00		**1.111.429.813,00**
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan									-
23	Dinas Perkebunan	386.763.850,00		19.800,00						**386.783.650,00**
24	Dinas Kehutanan	25.698.800,00		185.933.020,00						**211.631.820,00**
25	Dinas ESDM			1.479.500,00						**1.479.500,00**
26	Disperindag	119.736.000,00		7.686.700,00						**127.422.700,00**
27	Sekretariat DPRD			5.190.500,00						**5.190.500,00**
28	Biro Pemerintahan	151.300,00		582.600,00						**733.900,00**
29	Biro Kesramas			1.772.400,00						**1.772.400,00**
30	Biro Perekonomian									-
31	Biro Administrasi Pembangunan			3.068.900,00						**3.068.900,00**
32	Biro Umum			47.593.917,00						**47.593.917,00**
33	Biro Administrasi Pimpinan			43.968.000,00						**43.968.000,00**
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa			364.308,00						**364.308,00**
35	Biro Hukum									-
36	Biro Organisasi			502.900,00						**502.900,00**
37	Badan Penghubung Daerah			16.995.484,00						**16.995.484,00**
38	Inspektorat			1.144.000,00					263.500,00	**1.407.500,00**
39	Bappeda			2.480.900,00						**2.480.900,00**
40	Bakeuda			665.911.077,49	785.000,00					**666.696.077,49**

NO	SKPD	Barang Pakai Habis								JUMLAH
		Bahan	Suku Cadang	Alat Bahan Kegiatan Kantor	Obat Obatan	Persediaan Untuk dijual/diserahkan	Persediaan Strategis/berjaga-jaga	Natura dan Pakan	Penelitian Dalam Proses	
41	Badan Kepegawaian Daerah	91.917,00		4.626.564,00						**4.718.481,00**
42	BPSDM			6.445.000,00						**6.445.000,00**
43	Balitbangda			2.441.956,00						**2.441.956,00**
Jumlah		**6.050.993.407,45**	**4.777.250,00**	**2.049.195.865,99**	**23.652.761.914,37**	**292.776.457.972,19**	**93.234.900,00**	**7.198.500,00**	**263.500,00**	**324.634.883.310,00**

Lampiran 13

PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG DIRAGUKAN TERTAGIH DANA KUPEM PER 31 DESEMBER 2021

No	Dana KUPEM	Nilai Investasi Non Permanen yang ditempatkan			Kualitas Dana Bergulir				%Penyisihan	Jumlah Penyisihan	NRV
		Pokok	Bunga	Total	Lancar (Belum Jatuh Tempo - 0,5%)	Kurang Lancar (Jatuh Tempo s.d 3 Tahun 10%)	Kualitas Diragukan (3 s.d 5 Tahun setelah jatuh tempo -50 %)	Kualitas Macet (>5 Tahun setelah jatuh tempo - 100%)			
	Chanelling										
	Kota Jambi	101.782.998,00	27.588.676,00	129.371.674,00				129.371.674,00	100%	129.371.674,00	-
	Batanghari	211.342.660,00	28.900.000,00	240.242.660,00				240.242.660,00	100%	240.242.660,00	-
	Muaro Jambi	**381.601.130,67**	**50.525.000,00**	432.126.130,67				432.126.130,67	100%	432.126.130,67	-
	Kerinci	257.584.736,00	46.260.000,00	303.844.736,00				303.844.736,00	100%	303.844.736,00	-
	Merangin	349.095.666,00	43.685.000,00	392.780.666,00				392.780.666,00	100%	392.780.666,00	-
	Sarolangun	**447.792.942,00**	**25.343.483,00**	473.136.425,00				473.136.425,00	100%	473.136.425,00	-
	Bungo	**198.796.867,00**	**37.671.000,00**	236.467.867,00				236.467.867,00	100%	236.467.867,00	-
	Tebo	198.138.342,00	26.953.989,00	225.092.331,00				225.092.331,00	100%	225.092.331,00	-
	Tanjab. Barat	**194.691.637,00**	**27.410.000,00**	222.101.637,00				222.101.637,00	100%	222.101.637,00	-
	Tanjab. Timur	**803.022.557,00**	**51.105.060,00**	854.127.617,00				854.127.617,00	100%	854.127.617,00	-
	Total	**3.143.849.535,67**	**365.442.208,00**	**3.509.291.743,67**				**3.509.291.743,67**		**3.509.291.743,67**	**-**
	Executing										
	Kota Jambi			-				-	100%	-	-
	Batanghari			273.592.537,76				273.592.537,76	100%	273.592.537,76	-
	Muaro Jambi			268.974.560,58				268.974.560,58	100%	268.974.560,58	-
	Kerinci			302.039.856,70				302.039.856,70	100%	302.039.856,70	-
	Merangin			-				-	100%	-	-
	Sarolangun			273.592.537,76				273.592.537,76	100%	273.592.537,76	-
	Bungo			-				-	100%	-	-
	Tebo			273.444.450,00				273.444.450,00	100%	273.444.450,00	-
	Tanjab. Barat			257.692.470,41				257.692.470,41	100%	257.692.470,41	-
	Tanjab. Timur			-				-	100%	-	-
	Total	**-**	**-**	**1.649.336.413,21**				**1.649.336.413,21**		**1.649.336.413,21**	**-**
	Sertifikasi Tanah	74.036.561,00		74.036.561,00							
	Kota Jambi								100%	-	-
	Batanghari								100%	-	-
	Muaro Jambi								100%	-	-
	Kerinci								100%	-	-
	Merangin								100%	-	-
	Sarolangun								100%	-	-
	Bungo								100%	-	-
	Tebo								100%	-	-
	Tanjab. Barat								100%	-	-
	Tanjab. Timur	-		-				-	100%	-	-
	Total	**74.036.561,00**	**-**	**74.036.561,00**				**74.036.561,00**		**-**	**-**

Lampiran 14

REKENING PENAMPUNGAN KUPEM CHANNELING DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAMBI
PER 31 DESEMBER 2021

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	NOMOR REKENING KORAN	SALDO		TOTAL
			REK. MODAL KERJA	REK. SERTIFIKASI	
1	KOTA JAMBI	0701003454	1.041.132.274,00		1.041.132.274,00
2	BATANGHARI	0501007374	860.378.094,00		860.378.094,00
		0501007383	-	273.592.537,76	273.592.537,76
3	MUARO JAMBI	0101034399	935.517.589,00		935.517.589,00
		0101035131	-	-	-
		0101035147	86.762.730,51	-	86.762.730,51
		0711000027	-	83.466.773,46	83.466.773,46
4	KERINCI	0301003037	936.535.183,00		936.535.183,00
		0301003021		302.103.988,45	302.103.988,45
5	MERANGIN	0401011037	1.338.330.994,00		1.338.330.994,00
6	SAROLANGUN	0801010423	1.173.577.187,00		1.173.577.187,00
		0801010393		273.592.537,76	273.592.537,76
7	BUNGO	0201014883	1.216.674.590,00		1.216.674.590,00
8	TEBO	0901013489	861.441.534,00		861.441.534,00
		0901013446		273.446.450,00	273.446.450,00
9	TANJAB BARAT	0601002027	940.848.436,00		940.848.436,00
		0601002019		257.692.470,41	257.692.470,41
10	TANJAB TIMUR	0611000577	1.269.463.953,00		1.269.463.953,00
			10.660.662.564,51	1.463.894.757,84	12.124.557.322,35

Daftar Aset Tanah Per OPD Tahun 2021

NO	NAMA SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Dinas Pendidikan		-
2	Dinas Kesehatan		-
3	Rumah Sakit Umum		-
4	Rumah Sakit Jiwa		-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	111.354.640.446,00	84.309.894.243,00
6	Badan Kesbangpol		-
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		-
8	Dinas Sosial Dukcapil		-
9	Badan Penanggulangan Bencana		-
10	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi		-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan		-
12	Dinas Ketahanan Pangan		-
13	Dinas Lingkungan Hidup		-
14	Dinas Perhubungan	563.400.000,00	563.400.000,00
15	Dinas Kominfo		-
16	Dinas Koperasi & UKM		-
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		-
18	Dispora		-
19	Disbudpar		-
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Jambi		-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.845.000,00	5.845.000,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		-
23	Dinas Perkebunan	807.445.000,00	807.445.000,00
24	Dinas Kehutanan	1.022.663.192,00	1.022.663.192,00
25	Dinas ESDM		-
26	Disperindag		-
27	Sekretariat DPRD		-
28	Biro Pemerintahan dan Otonimi Daerah		-
29	Biro Kesramas		-
30	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam		-
31	Biro Pembangunan dan Kerjasama		-
32	Biro Umum		-
33	Biro Humas dan Protokol		-

NO	NAMA SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020
34	Biro Pengadaan Baran dan Jasa	-	660.111.382.662,47
35	Biro Hukum		-
36	Biro Organisasi		-
37	Badan Penghubung Daerah		-
38	Inspektorat		-
39	Bappeda		-
40	Bakeuda	685.126.087.047,06	-
41	Bakeuda (SKPKD)		-
42	Badan Kepegawaian Daerah		-
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur		-
44	Balitbangda		-
Jumlah		798.880.080.685,06	746.820.630.097,47

Lampiran 16

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Jumlah		Lebih/ (Kurang)
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	67.220.620.503,40	61.847.461.803,00	(5.373.158.700,40)
2	Dinas Kesehatan	15.521.504.497,00	11.403.114.706,00	(4.118.389.791,00)
3	Rumah Sakit Umum	32.306.327.603,00	25.649.831.692,00	(6.656.495.911,00)
4	Rumah Sakit Jiwa	3.897.659.675,00	3.515.222.325,00	(382.437.350,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum	4.993.791.679,00	4.926.496.945,00	(67.294.734,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	16.361.904,00	12.943.904,00	(3.418.000,00)
7	Bappeda	168.949.850,00	168.440.000,00	(509.850,00)
8	Dinas Perhubungan	2.778.942.193,00	2.798.232.920,00	19.290.727,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	153.762.056,00	152.261.400,00	(1.500.656,00)
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	579.991.634,00	530.998.500,00	(48.993.134,00)
11	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	840.415.658,00	770.406.888,00	(70.008.770,00)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.286.288.085,00	2.184.488.070,00	(101.800.015,00)
13	Dinas Koperasi dan UKM	218.470.788,00	217.719.000,00	(751.788,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	104.544.474,00	101.435.000,00	(3.109.474,00)
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	213.022.242,00	200.277.500,00	(12.744.742,00)
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	515.569.541,00	507.580.500,00	(7.989.041,00)
17	Dinas Perkebunan	1.802.736.187,00	1.776.631.102,00	(26.105.085,00)
18	Badan Kesbangpol	123.468.625,00	123.456.000,00	(12.625,00)
19	Biro Umum	13.048.347.456,00	11.667.916.540,00	(1.380.430.916,00)
20	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	65.633.000,00	65.500.000,00	(133.000,00)
21	Sekretariat DPRD	4.650.761.805,00	3.564.657.850,00	(1.086.103.955,00)
22	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.468.500,00	1.468.500,00	0,00
23	Inspektorat	1.730.991.890,00	1.460.630.903,00	(270.360.987,00)
24	Badan Keuangan Daerah	1.703.577.621,00	1.617.316.664,00	(86.260.957,00)
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	313.942.678,00	309.352.702,00	(4.589.976,00)
26	Badan Kepegawaian Daerah	194.988.199,00	102.395.000,00	(92.593.199,00)
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	257.126.152,00	253.392.910,00	(3.733.242,00)
28	Dinas Ketahanan Pangan	484.446.920,00	481.022.483,00	(3.424.437,00)
29	Badan Penghubung Daerah	274.895.400,00	266.660.400,00	(8.235.000,00)
30	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
31	Biro Pemerintahan dan Otda	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2.823.149.086,00	2.106.498.275,00	(716.650.811,00)
33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	302.137.566,00	281.713.020,00	(20.424.546,00)
34	Dinas Kehutanan	913.053.549,00	910.601.948,00	(2.451.601,00)
35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	486.304.000,00	484.861.000,00	(1.443.000,00)
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	891.371.886,00	875.096.500,00	(16.275.386,00)
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.351.894.861,00	1.309.164.000,00	(42.730.861,00)
38	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
39.	Biro Perekonomian	-	-	0,00
40.	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	0,00
41.	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	0,00
42.	Biro Hukum	-	-	0,00
43.	Biro Organisasi	-	-	0,00
Jumlah		**163.240.417.763,40**	**142.649.146.950,00**	**(20.591.270.813,40)**

Daftar Aset Peralatan dan Mesin Per OPD Tahun 2021

NO	NAMA SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Dinas Pendidikan	403.793.108.595,97	328.954.206.600,92
2	Dinas Kesehatan	43.265.011.596,50	32.967.970.695,00
3	Rumah Sakit Umum	513.635.702.246,33	463.191.091.909,23
4	Rumah Sakit Jiwa	56.324.856.643,21	47.069.248.638,21
5	Dinas Pekerjaan Umum	127.828.110.812,25	124.568.191.543,17
6	Badan Kesbangpol	4.917.971.867,50	4.794.515.867,50
7	Satpol. PP	8.158.297.501,00	8.152.647.501,00
8	Dinas Sosial Dukcapil	9.874.701.221,08	9.226.512.721,08
9	Badan Penanggulangan Bencana	35.295.010.813,00	34.584.832.313,00
10	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	10.962.440.435,60	10.733.421.548,60
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan	4.383.251.719,00	4.383.251.719,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.724.997.571,00	3.645.896.388,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	17.043.545.340,00	16.892.478.940,00
14	Dinas Perhubungan	75.528.187.507,03	69.663.692.790,03
15	Dinas Kominfo	22.604.013.203,00	20.639.694.763,00
16	Dinas Koperasi & UKM	6.288.875.053,00	6.137.356.053,00
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.239.978.015,00	5.138.543.015,00
18	Dispora	9.202.881.839,23	8.717.029.464,23
19	Disbudpar	14.490.881.107,43	14.307.411.607,43
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Jambi	9.818.163.199,34	9.618.784.199,34
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	29.089.502.547,00	28.694.412.047,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	70.841.782.877,15	68.760.589.122,15
23	Dinas Perkebunan	13.424.285.248,00	12.874.181.868,00
24	Dinas Kehutanan	28.710.456.754,87	27.077.033.554,87
25	Dinas ESDM	6.854.469.978,70	6.843.980.978,70
26	Disperindag	16.824.567.585,32	16.366.085.585,32
27	Sekretariat DPRD	48.261.396.426,90	43.292.010.576,90

NO	NAMA SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020
28	Biro Pemerintahan	1.510.405.495,25	1.452.464.495,25
29	Biro Kesramas	3.619.003.133,50	3.619.003.133,50
30	Biro Perekonomian	1.454.613.425,00	1.436.285.425,00
31	Biro Administrasi Pembangunan	893.718.023,74	1.897.357.354,74
32	Biro Umum	116.257.974.650,77	106.707.682.447,52
33	Biro Administrasi Pimpinan	6.292.511.263,00	6.145.200.263,00
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7.409.847.597,70	6.901.490.677,70
35	Biro Hukum	1.170.719.290,00	1.115.806.290,00
36	Biro Organisasi	924.368.615,00	872.754.615,00
37	Badan Penghubung Daerah	14.647.289.678,60	14.542.126.678,60
38	Inspektorat	8.919.621.127,92	7.458.990.224,90
39	Bappeda	16.660.774.198,00	16.492.334.198,00
40	Bakeuda	51.136.798.336,36	49.538.984.756,36
41	Bakeuda (SKPKD)		
42	Badan Kepegawaian Daerah	5.340.909.649,30	5.238.514.649,30
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	12.510.568.480,00	12.212.967.778,00
44	Balitbangda	4.019.541.873,00	4.985.998.382,00
Jumlah		**1.849.155.112.541,55**	**1.667.913.033.378,55**

Lampiran 18

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Jumlah		Lebih/ (Kurang)
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	41.906.600.324,00	38.051.779.666,03	(3.854.820.657,97)
2	Dinas Kesehatan	5.098.718.200,00	4.894.644.000,00	(204.074.200,00)
3	Rumah Sakit Umum	8.256.728.000,00	7.494.657.000,00	(762.071.000,00)
4	Rumah Sakit Jiwa	9.772.581.226,00	9.507.192.086,51	(265.389.139,49)
5	Dinas Pekerjaan Umum	62.546.429.235,00	61.809.029.248,00	(737.399.987,00)
6	Bappeda	1.100.000.000,00	1.039.365.588,00	(60.634.412,00)
7	Dinas Perhubungan	135.000.000,00	123.420.000,00	(11.580.000,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	159.194.664,00	155.896.550,00	(3.298.114,00)
9	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	0,00
10	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	0,00
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	0,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	538.516.994,00	514.290.000,00	(24.226.994,00)
13	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	0,00
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	0,00
15	Biro Umum	1.790.090.000,00	1.786.264.500,00	(3.825.500,00)
16	Sekretariat DPRD	4.746.927.500,00	4.411.847.161,70	(335.080.338,30)
17	Badan Keuangan Daerah	-	-	0,00
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	0,00
19	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	0,00
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	15.000.000,00	14.951.200,00	(48.800,00)
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	0,00
22	Dinas Kehutanan	-	-	0,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	101.797.520,00	100.322.396,00	(1.475.124,00)
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	195.093.321,00	195.017.000,00	(76.321,00)
25	Dinas Perkebunan	788.273.476,00	772.382.000,00	(15.891.476,00)
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.882.153,00	12.880.000,00	(2.153,00)
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	0,00
Jumlah		**137.163.832.613,00**	**130.883.938.396,24**	**(6.279.894.216,76)**

Lampiran 19

Daftar Aset Gedung Dan Bangunan per OPD

NO	NAMA SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Dinas Pendidikan	862.027.280.611,20	789.432.060.181,17
2	Dinas Kesehatan	38.420.991.116,99	33.526.347.116,99
3	Rumah Sakit Umum	220.766.952.180,48	212.299.414.180,48
4	Rumah Sakit Jiwa	76.389.895.114,60	64.277.013.599,09
5	Dinas Pekerjaan Umum	63.891.110.127,39	61.391.670.600,01
6	Badan Kesbangpol	1.765.416.857,34	919.724.000,00
7	Satpol. PP	1.237.247.612,00	1.237.247.612,00
8	Dinas Sosial Dukcapil	15.577.389.501,00	15.577.389.501,00
9	Badan Penanggulangan Bencana	4.579.541.550,00	4.423.645.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	14.993.005.947,89	6.719.261.718,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan	662.788.000,00	662.788.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	625.855.000,00	625.855.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	8.189.575.726,00	8.189.575.726,00
14	Dinas Perhubungan	8.802.055.698,00	8.592.505.698,00
15	Dinas Kominfo	404.926.000,00	404.926.000,00
16	Dinas Koperasi & UKM	11.383.433.100,00	11.383.433.100,00
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.076.501.652,00	3.544.261.652,00
18	Dispora	49.321.775.202,74	49.321.775.202,74
19	Disbudpar	72.208.161.068,17	18.012.373.389,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	2.599.607.500,00	2.599.607.500,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.625.745.070,00	44.396.777.070,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	73.918.949.744,90	74.555.500.744,90
23	Dinas Perkebunan	7.971.077.400,00	7.696.137.400,00
24	Dinas Kehutanan	14.128.171.415,65	14.128.171.415,65
25	Dinas ESDM	2.130.661.199,58	2.130.661.199,58

NO	NAMA SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020
26	Disperindag	14.063.952.714,00	4.650.040.453,00
27	Sekretariat DPRD	43.139.003.423,75	33.186.613.152,33
28	Biro Pemerintahan		
29	Biro Kesramas		
30	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
31	Biro Pembangunan dan Kerjasama		
32	Biro Umum	58.570.807.603,17	56.652.116.103,17
33	Biro Humas dan Protokol		
34	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah		74.115.660.160,66
35	Biro Hukum		
36	Biro Organisasi		
37	Badan Penghubung Daerah	50.604.641.587,00	45.448.362.027,00
38	Inspektorat	4.191.298.523,44	3.327.112.552,00
39	Bappeda	8.268.756.099,43	7.229.390.511,43
40	Bakeuda	112.368.209.483,71	38.741.374.423,05
41	Bakeuda (SKPKD)		
42	Badan Kepegawaian Daerah	1.119.681.517,00	1.119.681.517,00
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	19.514.897.196,00	19.514.897.196,00
44	Balitbangda		197.947.000,00
Jumlah		**1.912.539.362.543,43**	**1.720.231.317.702,25**

Lampiran 20

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Jumlah		Lebih/ (Kurang)
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	-
2	Rumah Sakit Umum	516.404.000,00	302.793.837,00	(213.610.163,00)
3	Rumah Sakit Jiwa	0,00	0,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum	151.635.166.527,00	143.896.298.907,65	(7.738.867.619,35)
5	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.643.840,00	2.423.520,00	(220.320,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	-
7	Dinas Perhubungan	620.752.000,00	596.444.000,00	
8	Dinas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	-
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	26.033.000,00	25.740.000,00	(293.000,00)
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	-
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	130.869.245,00	101.850.000,00	(29.019.245,00)
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	790.089.397,00	729.717.000,00	(60.372.397,00)
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	194.040,00	194.000,00	(40,00)
14	Biro umum	132.989.000,00	132.427.000,00	(562.000,00)
15	Badan Keuangan Daerah	-	-	-
16	Sekretariat DPRD	140.976.000,00	129.520.938,00	(11.455.062,00)
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-
18	Dinas Perkebunan	273.005.405,00	269.974.130,00	(3.031.275,00)
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.485.018.130,00	2.473.247.700,00	(11.770.430,00)
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91.854.840,00	84.717.412,00	(7.137.428,00)
Jumlah		**156.845.995.424,00**	**148.745.348.444,65**	**(8.076.338.979,35)**

Lampiran 21

Daftar Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD Tahun 2021

NO	NAMA SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Dinas Pendidikan	9.488.642.504,36	8.864.327.504,36
2	Dinas Kesehatan	1.922.138.617,85	1.922.138.617,85
3	Rumah Sakit Umum	7.716.286.201,02	6.940.592.201,02
4	Rumah Sakit Jiwa	7.882.796.404,00	7.825.045.404,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	7.142.089.555.155,96	7.120.272.898.296,20
6	Badan Kesbangpol	67.057.000,00	67.057.000,00
7	Satpol. PP	105.841.850,00	105.841.850,00
8	Dinas Sosial Dukcapil	1.958.006.913,00	1.958.006.913,00
9	Badan Penanggulangan Bencana	129.953.000,00	129.953.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	15.000.000,00	15.000.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan	16.000.000,00	16.000.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	55.051.500,00	55.051.500,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	524.938.000,00	524.938.000,00
14	Dinas Perhubungan	1.502.670.000,00	1.502.670.000,00
15	Dinas Kominfo	1.022.974.315,00	853.454.365,00
16	Dinas Koperasi dan UKM	469.528.500,00	469.528.500,00
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
18	Dispora	149.097.600,00	149.097.600,00
19	Disbudpar	101.059.506.904,00	537.613.568,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	297.377.778,00	297.377.778,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	26.472.642.446,06	22.972.079.006,06
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	7.296.619.263,80	6.566.902.263,80
23	Dinas Perkebunan	26.475.788.448,00	26.331.599.318,00
24	Dinas Kehutanan	6.979.329.270,00	6.979.329.270,00
25	Dinas ESDM	507.876.245.977,47	504.828.303.881,47
26	Disperindag	129.212.000,00	129.212.000,00

NO	NAMA SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020
27	Sekretariat DPRD	17.500.000,00	17.500.000,00
28	Biro Pemerintahan		
29	Biro Kesramas		
30	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
31	Biro Pembangunan dan Kerjasama		
32	Biro Umum	2.966.316.698,40	2.966.316.698,40
33	Biro Administasi Pimpinan	9.000.000,00	9.000.000,00
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	373.788.800,00	373.788.800,00
35	Biro Hukum		
36	Biro Organisasi		
37	Badan Penghubung Daerah	184.410.000,00	184.410.000,00
38	Inspektorat	19.970.000,00	19.970.000,00
39	Bappeda	1.178.287.000,00	1.178.287.000,00
40	Bakeuda	1.102.201.350,00	1.102.201.350,00
41	Bakeuda (SKPKD)		
42	Badan Kepegawaian Daerah	49.582.000,00	49.582.000,00
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1.581.181.100,00	1.581.181.100,00
44	Balitbangda		
Jumlah		**7.859.184.496.596,92**	**7.727.796.254.785,16**

Lampiran 22

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Jumlah		Lebih/ (Kurang)
		Anggaran	Realisasi	
1.	Dinas Pendidikan	46.432.100,00	46.403.900,00	(28.200,00)
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	803.883.770,00	351.616.700,00	(452.267.070,00)
3.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.820.000,00	7.750.000,00	(70.000,00)
4.	Dinas Perpusatakaan dan Arsip Daerah	108.900.000,00	108.001.300,00	(898.700,00)
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.354.592,00	47.264.000,00	(90.592,00)
6.	Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan peternakan	39.366.836,00	35.500.000,00	(3.866.836,00)
7.	Dinas Kehutanan	38.008.556,00	38.000.000,00	(8.556,00)
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.070.912,00	5.070.912,00	-
9.	Biro Umum	10.864.800,00	10.864.800,00	0,00
Jumlah		**1.107.701.566,00**	**650.471.612,00**	**(457.229.954,00)**

Daftar Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2021

NO	NAMA SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Dinas Pendidikan	160.296.985.983,52	152.924.808.688,72
2	Dinas Kesehatan	113.104.600,00	113.104.600,00
3	Rumah Sakit Umum	2.843.270.250,00	2.676.593.250,00
4	Rumah Sakit Jiwa	3.899.700,00	3.899.700,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	235.144.002.106,39	256.816.333.394,44
6	Badan Kesbangpol		-
7	Satpol. PP	221.585.000,00	221.585.000,00
8	Dinas Sosial Dukcapil	15.217.000,00	15.217.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana	306.350.000,00	306.350.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	260.507.000,00	260.507.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan		-
12	Dinas Ketahanan Pangan	1.750.000,00	1.750.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup		-
14	Dinas Perhubungan	118.800.000,00	118.800.000,00
15	Dinas Kominfo		-
16	Dinas Koperasi & UKM		-
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		-
18	Dispora	4.279.261.523,00	4.279.261.523,00
19	Disbudpar	4.241.084.528,00	4.241.084.528,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	3.455.529.158,00	3.347.527.858,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.500.000,00	49.500.000,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	8.894.538.925,00	6.877.192.600,00
23	Dinas Perkebunan	9.495.013.225,00	9.495.013.225,00
24	Dinas Kehutanan	222.142.963,00	222.142.963,00
25	Dinas ESDM	494.077.000,00	494.077.000,00

26	Disperindag	27.000.000,00	27.000.000,00
27	Sekretariat DPRD	238.861.540,00	238.861.540,00
28	Biro Pemerintahan		-
29	Biro Kesramas	787.993.000,00	787.993.000,00
30	Biro Administrasi Perekonomian		-
31	Biro Pembangunan dan Kerjasama		-
32	Biro Umum	613.319.800,00	1.070.926.863,24
33	Biro Administrasi Pimpinan	72.273.420,00	72.273.420,00
34	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	20.115.228.301,00
35	Biro Hukum	51.110.000,00	51.110.000,00
36	Biro Organisasi	174.245.714,00	174.245.714,00
37	Badan Penghubung Daerah	384.185.292,00	384.185.292,00
38	Inspektorat	23.815.909,00	23.815.909,00
39	Bappeda	246.815.579,00	246.815.579,00
40	Bakeuda	20.224.878.301,00	109.650.000,00
41	Bakeuda (SKPKD)		-
42	Badan Kepegawaian Daerah	19.750.000,00	19.750.000,00
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	254.806.915,00	254.806.915,00
44	Balitbangda	492.047.000,00	294.100.000,00
Jumlah		**454.067.721.431,91**	**466.335.510.863,40**

Lampiran 24

Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akumulasi Penyustan Aset Tetap lainnya
1	Dinas Pendidikan	(196.469.749.294,72)	(191.245.146.356,70)	(2.131.695.326,55)	
2	Dinas Kesehatan	(28.820.398.007,12)	(4.480.742.109,06)	(657.688.740,27)	
3	Rumah Sakit Umum	(415.380.725.765,77)	(35.671.109.421,55)	(1.518.612.084,33)	
4	Rumah Sakit Jiwa	(47.331.415.120,81)	(12.861.678.486,75)	(1.306.808.023,23)	
5	Dinas Pekerjaan Umum	(111.768.067.363,09)	(12.952.979.759,05)	(4.224.442.370.553,04)	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(14.115.899.258,81)	(1.482.878.193,07)	(345.169.490,01)	
7	Dinas Perhubungan	(51.985.369.059,09)	(2.398.298.791,60)	(815.014.349,99)	
8	Dinas Lingkungan Hidup	(15.192.539.123,90)	(767.405.162,24)	(78.130.977,80)	
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP	(3.928.710.547,14)	(169.312.880,00)	(4.400.000,00)	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(28.648.340.694,13)	(626.995.362,80)	(66.194.397,46)	
11	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(7.061.707.487,08)	(5.890.055.284,20)	(175.378.462,40)	
12	Dinas Koperasi dan UKM	(5.642.372.170,52)	(1.801.705.515,96)	(107.946.476,61)	
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(4.417.534.162,35)	(1.797.325.438,59)	-	
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(13.974.800.468,69)	(7.466.123.028,78)	(23.752.476.989,56)	
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(7.965.895.309,45)	(10.806.802.770,93)	(44.545.210,00)	
16	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	(6.874.830.006,04)	(353.851.320,33)	(42.716.795,01)	
17	Badan Kesbangpol	(4.162.911.799,87)	(362.556.472,79)	(16.764.250,00)	
18	Biro Pengadaaan Barang dan Jasa	(5.779.193.699,27)	-	(133.358.249,75)	
19	Sekretariat DPRD	(33.552.133.824,14)	(9.108.540.779,41)	(8.348.000,00)	
20	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.324.063.985,10)	-	-	
21	Inspektorat Daerah	(6.372.936.468,11)	(2.452.124.598,31)	(7.488.750,00)	(66.450.000,00)
22	Badan Penghubung Daerah	(11.916.887.620,79)	(15.633.590.080,52)	(114.103.000,00)	
23	Badan Keuangan Daerah	(39.347.362.621,32)	(25.716.875.755,93)	(287.542.221,30)	
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	(11.022.877.314,72)	(8.120.382.217,50)	(289.686.108,00)	
25	Badan Kepegawaian Daerah	(4.595.695.904,94)	(331.845.305,90)	(11.155.950,00)	
26	Dinas Komunikasi dan Informasi	(18.398.886.936,38)	(77.438.680,00)	(130.957.356,94)	
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(8.786.286.451,71)	(621.075.760,00)	(237.022.778,00)	
28	Dinas Ketahanan Pangan	(3.133.026.668,24)	(281.909.700,00)	(29.767.950,01)	
29	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(1.244.948.683,28)	0,00	-	
30	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	(3.409.378.730,30)	0,00	-	
31	Biro Perekonomian	(1.305.387.699,00)	0,00	-	
32	Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama	(626.147.763,23)	0,00	-	
33	Biro Umum	(91.158.779.718,38)	(21.608.472.978,44)	(1.376.402.262,30)	
34	Biro Administrasi Pimpinan	(5.882.028.667,77)	0,00	(5.227.250,00)	
35	Biro Hukum	(914.229.483,39)	0,00	-	
36	Biro Organisasi	(749.039.143,05)	0,00	-	
37	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(49.402.293.494,17)	(10.587.978.617,06)	(1.454.044.150,20)	
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(9.892.733.609,20)	(4.610.812.204,71)	(1.200.000,00)	
39	Dinas Perkebunan	(11.339.335.895,52)	(2.630.184.115,00)	(19.115.604.063,10)	
40	Dinas Kehutanan	(24.831.949.374,89)	(2.734.916.665,29)	(1.485.808.517,07)	
41	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(5.398.011.773,83)	(552.120.871,07)	(119.977.332.751,27)	
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	(29.130.900.956,47)	(7.258.119.887,93)	(8.466.939.897,98)	
43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(13.134.423.251,24)	(4.152.935.760,87)	(32.431.000,00)	
	JUMLAH	**(1.359.390.205.377,02)**	**(407.614.290.332,34)**	**(4.408.670.332.382,19)**	**(66.450.000,00)**

Lampiran 25

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per OPD Tahun 2021

No	Nama OPD	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Dinas Pendidikan	(389.846.590.977,97)	(330.423.478.942,57)
2	Dinas Kesehatan	(33.958.828.856,45)	(31.106.213.939,56)
3	Rumah Sakit Umum	(452.570.447.271,65)	(388.580.299.509,92)
4	Rumah Sakit Jiwa	(61.499.901.630,79)	(52.122.120.208,98)
5	Dinas Pekerjaan Umum	(4.349.163.417.675,18)	(4.119.523.419.255,46)
6	Badan Kesbangpol	(4.542.232.522,66)	(4.204.240.856,89)
7	Satpol. PP	(7.271.398.121,38)	(6.757.364.439,35)
8	Dinas Sosial Dukcapil	(13.127.141.233,68)	(12.069.774.458,65)
9	Badan Penanggulangan Bencana	(29.341.530.454,40)	(27.061.805.718,08)
10	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	(14.504.745.813,91)	(12.620.264.147,48)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan	(4.102.423.427,14)	(3.951.563.992,78)
12	Dinas Ketahanan Pangan	(3.444.704.318,25)	(3.238.583.290,12)
13	Dinas Lingkungan Hidup	(16.038.075.263,94)	(15.315.218.543,94)
14	Dinas Perhubungan	(55.198.682.200,68)	(46.345.783.910,56)
15	Dinas Kominfo	(18.607.282.973,32)	(17.399.653.864,97)
16	Dinas Koperasi & UKM	(7.552.024.163,09)	(6.966.246.674,99)
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(6.214.859.600,94)	(5.706.279.931,69)
18	Dispora	(18.817.243.290,38)	(17.340.411.263,33)
19	Disbudpar	(45.193.400.487,03)	(17.021.228.299,21)
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	(9.644.384.989,71)	(9.004.558.160,63)
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	(44.855.960.742,38)	(42.055.316.353,95)
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(61.444.316.261,43)	(54.633.418.728,57)
23	Dinas Perkebunan	(33.085.124.073,62)	(31.623.688.562,36)

No	Nama OPD	Saldo 2021	Saldo 2020
24	Dinas Kehutanan	(29.052.674.557,25)	(26.991.120.473,04)
25	Dinas ESDM	(125.927.465.396,16)	(112.697.792.737,93)
26	Disperindag	(17.319.790.012,11)	(15.708.395.896,79)
27	Sekretariat DPRD	(42.669.022.603,55)	(37.947.111.478,19)
28	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(1.244.948.683,28)	(1.150.573.486,75)
29	Biro Kesramas	(3.409.378.730,30)	(3.323.304.576,20)
30	Biro Perekonomian	(1.305.387.699,00)	(1.241.164.694,33)
31	Biro Pembangunan	(626.147.763,23)	(1.200.688.398,73)
32	Biro Umum	(114.143.654.959,12)	(108.436.869.762,00)
33	Biro Administrasi Pimpinan	(5.887.255.917,77)	(5.706.412.142,30)
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(5.912.551.949,02)	(18.332.244.955,91)
35	Biro Hukum	(914.229.483,39)	(820.378.361,39)
36	Biro Organisasi	(749.039.143,05)	(1.178.360.928,25)
37	Badan Penghubung Daerah	(27.664.580.701,31)	(25.793.270.167,97)
38	Inspektorat	(8.898.999.816,42)	(8.996.763.008,29)
39	Bappeda	(15.943.946.941,89)	(14.959.096.357,72)
40	Bakeuda	(65.351.780.598,55)	(45.586.772.118,82)
41	Bakeuda (SKPKD)		-
42	Badan Kepegawaian Daerah	(4.938.697.160,84)	(4.602.956.159,89)
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	(19.432.945.640,22)	(18.370.914.576,67)
44	Balitbangda	(4.324.063.985,10)	(4.132.331.839,01)
Jumlah		**(6.175.741.278.091,54)**	**(5.712.247.455.174,22)**

Lampiran 26

Daftar Aset Tidak Berwujud (ATB) Per OPD Tahun 2021

No	Nama OPD	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Dinas Pendidikan	2.457.762.500,00	2.400.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	25.080.000,00	25.080.000,00
3	Rumah Sakit Umum	216.300.000,00	159.300.000,00
4	Rumah Sakit Jiwa	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum	1.268.459.000,00	1.170.064.000,00
6	Badan Kesbangpol	-	-
7	Satpol. PP	-	-
8	Dinas Sosial Dukcapil	17.401.700,00	17.401.700,00
9	Badan Penanggulangan Bencana	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	-
14	Dinas Perhubungan	1.704.608.000,00	1.704.608.000,00
15	Dinas Kominfo	1.205.920.000,00	1.205.920.000,00
16	Dinas Koperasi & UKM	-	-
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	224.300.000,00	224.300.000,00
18	Dispora	-	-
19	Disbudpar	-	-
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Jambi	-	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.994.319,00	28.994.319,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	-	-
23	Dinas Perkebunan	-	-
24	Dinas Kehutanan	-	-
25	Dinas ESDM	-	-
26	Disperindag	-	-
27	Sekretariat DPRD	-	-
28	Biro Pemerintahan	-	-
29	Biro Kesramas	-	-
30	Biro Perekonomian	-	-
31	Biro Administrasi Pembangunan	28.125.000,00	57.120.800,00
32	Biro Umum	179.007.880,46	179.007.880,46
33	Biro Administrasi Pimpinan	-	-
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	297.567.050,00	203.071.250,00
35	Biro Hukum	129.480.000,00	129.480.000,00
36	Biro Organisasi	-	-
37	Badan Penghubung Daerah	-	-
38	Inspektorat	-	-
39	Bappeda	449.650.000,00	449.650.000,00
40	Bakeuda	2.267.500.000,00	2.267.500.000,00
41	Bakeuda (SKPKD)	-	-
42	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-

No	Nama OPD	Saldo 2021	Saldo 2020
44	Balitbangda	-	-
Jumlah		**10.500.155.449,46**	**10.221.497.949,46**

Lampiran 27

Daftar Aset Lain lain Per OPD Tahun 2021

No	Nama OPD	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Dinas Pendidikan	217.281.355.225,92	217.281.355.225,92
2	Dinas Kesehatan	1.356.604.443,00	1.356.604.443,00
3	Rumah Sakit Umum	3.284.983.080,00	3.284.983.080,00
4	Rumah Sakit Jiwa	491.614.858,00	491.614.858,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	489.154.231.953,18	506.859.530.867,26
6	Badan Kesbangpol	233.847.101,50	233.847.101,50
7	Satpol. PP	20.852.295,00	20.852.295,00
8	Dinas Sosial Dukcapil	1.814.121.758,20	1.814.121.758,20
9	Badan Penanggulangan Bencana	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	3.231.344.404,90	3.231.344.404,90
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan	294.715.645,00	294.715.645,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	112.000.000,00	112.000.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	166.000.000,00	166.000.000,00
14	Dinas Perhubungan	1.554.547.264,00	1.554.547.264,00
15	Dinas Kominfo	1.379.570.490,00	1.379.570.490,00
16	Dinas Koperasi & UKM	683.891.746,00	683.891.746,00
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	220.752.438,00	220.752.438,00
18	Dispora	1.212.597.525,00	1.212.597.525,00
19	Disbudpar	7.327.938.674,57	7.327.938.674,57
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	181.000.000,00	181.000.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	236.118.500,00	236.118.500,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	32.030.656.496,71	32.030.656.496,71
23	Dinas Perkebunan	4.900.000,00	4.900.000,00
24	Dinas Kehutanan	404.800.000,00	404.800.000,00
25	Dinas ESDM	109.230.586.406,75	102.748.748.316,81
26	Disperindag	13.900.000,00	88.900.000,00
27	Sekretariat DPRD	3.679.949.732,00	3.679.949.732,00
28	Biro Pemerintahan	280.571.515,75	280.571.515,75
29	Biro Kesramas	-	-
30	Biro Perekonomian	11.712.500,00	11.712.500,00

No	Nama OPD	Saldo 2021	Saldo 2020
31	Biro Pembangunan dan Kerjasama	532.867.495,00	-
32	Biro Umum	6.856.809.758,53	6.856.809.758,62
33	Biro Administrasi Pimpinan	222.212.550,00	222.212.550,00
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.448.257.377,02	4.445.837.377,02
35	Biro Hukum	185.989.000,00	185.989.000,00
36	Biro Organisasi	497.037.014,00	497.037.014,00
37	Badan Penghubung Daerah	1.680.141.150,00	1.682.561.150,00
38	Inspektorat	792.796.690,40	792.796.690,40
39	Bappeda	21.700.000,00	21.700.000,00
40	Bakeuda	2.156.916.059,75	2.156.916.059,75
41	Bakeuda (SKPKD)	10.627.784.880,00	10.627.784.880,00
42	Badan Kepegawaian Daerah	273.451.615,00	273.451.615,00
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	25.200.000,00	25.200.000,00
44	Balitbangda	1.129.870.808,00	175.839.299,00
Jumlah		**905.346.198.451,18**	**915.157.760.271,41**

Lampiran 28

Utang Belanja Jasa Kantor Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Telepon	Air	Listrik	Internet	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	1.782.680,00	1.716.200,00	39.186.432,00	0,00	42.685.312,00
2.	Dinas Kesehatan	477.800,00	2.544.000,00	35.014.077,00	34.500,00	38.070.377,00
3.	Rumah Sakit Umum	21.571.711,00	122.636.000,00	336.041.605,00	0,00	480.249.316,00
4.	Rumah Sakit Jiwa	669.572,00	23.783.000,00	413.000,00	0,00	24.865.572,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	1.124.620,00	3.193.500,00	72.312.484,00	0,00	76.630.604,00
6.	Bappeda	(48.860,00)	(2.039.750,00)	21.017.249,00	(1.949.860,00)	16.978.779,00
7.	Dinas Perhubungan	1.126.294,00	563.300,00	10.591.102,00	654.457,00	12.935.153,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	17.670.606,00	137.000,00	12.235.657,00	0,00	30.043.263,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan anak	80.020,00	517.500,00	6.779.311,00	0,00	7.376.831,00
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD)	71.000,00	836.300,00	10.050.312,00	960.860,00	11.918.472,00
11.	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.546,00	3.837.500,00	24.279.533,00	1.424.256,00	29.591.835,00
12.	Dinas Koperasi dan UKM	19.494,00	(476.500,00)	19.230.216,00	(1.603.740,00)	17.169.470,00
13.	Badan Penanaman Modal dan PTSP	41.660,00	1.759.000,00	9.404.004,00	3.257.750,00	14.462.414,00
14.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.555.359,00	6.261.500,00	39.059.429,00	0,00	50.876.288,00
15.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	636.477,00	19.609.000,00	39.232.684,00	2.734.160,00	62.212.321,00
16.	Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran	296.500,00	19.500,00	7.872.168,00	0,00	8.188.168,00
17.	Badan Kesbangpol	42.160,00	1.148.300,00	6.044.346,00	1.649.998,00	8.884.804,00
18.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Biro Kesra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Biro Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Biro Umum	(40.470.213,00)	(71.498.650,00)	351.775.770,00	0,00	239.806.907,00
23.	Biro Humas Dan Protokol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	SKPD	Telepon	Air	Listrik	Internet	Jumlah
24.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Sekretariat DPRD	10.535.000,00	15.727.000,00	94.250.867,00	0,00	120.512.867,00
28.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)	121.680,00	6.013.500,00	34.513.893,00	0,00	40.649.073,00
29.	Inspektorat	1.907.069,00	3.559.100,00	10.937.188,00	0,00	16.403.357,00
30.	Badan Penghubung Daerah	333.658,00	2.373.960,00	234.973.701,00	0,00	237.681.319,00
31.	Badan Keuangan Daerah	0,00	14.664.295,00	85.584.073,00	0,00	100.248.368,00
32.	Badan Keuangan Daerah(SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)	855.560,00	348.800,00	10.262.897,00	0,00	11.467.257,00
34.	Badan Kepegawaian Daerah	155.440,00	1.876.000,00	556.630,00	0,00	2.588.070,00
35.	Dinas Kelautan dan Perikanan	(45.860,00)	(1.668.150,00)	43.069.461,00	131.650,00	41.487.101,00
36.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(2.000,00)	29.300,00	12.483.026,00	2.650.000,00	15.160.326,00
38.	Dinas Ketahanan Pangan	83.320,00	1.070.000,00	6.592.466,00	364.400,00	8.110.186,00
39.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	3.260.855,00	4.675.000,00	58.473.606,00	0,00	66.409.461,00
40.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	2.353.550,00	27.926.009,00	4.290.000,00	34.569.559,00
41.	Dinas Perkebunan	(93.724,00)	(3.167.500,00)	30.586.027,00	278.020,00	27.602.823,00
42.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	365.580,00	(686.800,00)	21.031.571,00	(3.573.500,00)	17.136.851,00
43.	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	60.591,00	92.800,00	2.561.174,00	2.274.800,00	4.989.365,00
Jumlah		**28.234.595,00**	**161.807.555,00**	**1.714.341.968,00**	**13.577.751,00**	**1.917.961.869,00**

Lampiran 29

REKAPITULASI JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 SEMESTER II (JULI S/D 31 DESEMBER 2021)

NO.	KOMODITAS	JAMINAN		JUMLAH
		REKLAMASI	PASCATAMBANG	
1,	Mineral Logam dan Batubara	71.526.661.592,80	37.153.510.906,86	108.680.172.499,66
2,	Mineral Bukan Logam dan Batuan	169.864.538,50	350.849.368,59	520.713.907,09
TOTAL JUMLAH				**109.200.886.406,75**

Lampiran 29.1

DATA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG MINERAL LOGAM DAN BATUBARA PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 SEMESTER II (JULI S/D 31 DESEMBER 2021)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KABUPATEN	LUAS (Ha)	TAHAP KEGIATAN	KOMODITAS	JAMINAN REKLAMASI Rp.	JAMINAN PASCATAMBANG Rp.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Aneka Inti Utama, PT	Muaro Jambi	6.034	Eksplorasi	Batubara	-	-
2	Argo Makmur, PT	Muaro Jambi	954	Operasi Produksi	Batubara	120.000.000,00	-
3	Bara Raya Persada, PT	Muaro Jambi	1.085	Operasi Produksi	Batubara	150.000.000,00	78.527.684,00
4	Batubara Jambi Lestari, PT	Muaro Jambi	1.000	Operasi Produksi	Batubara	1.002.604.057,00	188.810.532,00
5	Bumi Borneo Inti, PT	Muaro Jambi	1.000	Operasi Produksi	Batubara	300.000.000,00	-
6	Crista Jaya Perkasa, CV	Muaro Jambi	973	Operasi Produksi	Batubara	489.394.173,00	77.837.125,00
7	Gea Lestari, PT	Muaro Jambi	1.000	Operasi Produksi	Batubara	93.350.000,00	146.398.204,00
8	Jambi Suka Batubara, PT	Muaro Jambi	260	Operasi Produksi	Batubara	111.917.363,00	97.136.343,00
9	Mutiara Fortuna Raya, PT (180)	Muaro Jambi	3.075	Operasi Produksi	Batubara	234.291.293,00	-
10	Mutiara Fortuna Raya, PT (76)	Muaro Jambi	3.000	Operasi Produksi	Batubara	-	-
11	Raja Perkasa Energi, PT	Muaro Jambi	7.069	Eksplorasi	Batubara	-	-
12	Sinar Mega Selaras, PT	Muaro Jambi	5.929	Eksplorasi	Batubara	-	-
13	Triadat Quantum, PT	Muaro Jambi	1.000	Operasi Produksi	Batubara	75.000.000,00	-
14	Sinar Gunung Moile, PT	Muaro Jambi	2.335	Operasi Produksi	Batubara	90.000.000,00	4.349.404,00
15	Arta Bevimdo Mandiri, PT	Batang Hari	4.800	Operasi Produksi	Batubara	771.582.780,00	286.334.463,00
16	Bubuhan Multi Sejahtera, PT	Batang Hari	195	Operasi Produksi	Batubara	111.292.375,00	-
17	Sentosa Prima Coal, PT	Batang Hari	2.000	Operasi Produksi	Batubara	296.556.865,00	123.622.555,00
18	Tambang Bukit Tambi, PT	Batang Hari	3.220	Operasi Produksi	Batubara	1.732.764.062,00	2.179.417.000,00
19	Bumi Bara Makmur Mandiri (210), PT	Batang Hari	198,7	Operasi Produksi	Batubara	1.281.088.092,00	79.700.000,00
20	Batu Hitam Jaya, PT	Batang Hari	2.000	Operasi Produksi	Batubara	-	-
21	Batu Hitam Sukses, PT	Batang Hari	1.945	Operasi Produksi	Batubara	-	-
22	Bumi Makmur Sejati, PT	Batang Hari	1.380	Operasi Produksi	Batubara	430.942.590,00	90.006.000,00
23	Inti Bara Nusalima, PT	Batang Hari	1.000	Operasi Produksi	Batubara	834.385.656,10	27.108.170,13
24	Kasongan Mining Mills, PT	Batang Hari	2.000	Operasi Produksi	Batubara	265.000.000,00	35.000.000,00
25	Kurnia Alam Investama (209), PT	Batang Hari	199	Operasi Produksi	Batubara	1.833.483.957,00	55.615.141,00
26	Alam Semesta Sukses batubara, PT	Batang Hari	1.945	Operasi Produksi	Batubara	-	-
27	Nan Riang, PT	Batang Hari	996	Operasi Produksi	Batubara	2.992.574.803,00	4.415.266.000,00
28	Bara Batin Pratama, PT	Batang Hari	634	Operasi Produksi	Batubara	739.323.794,00	657.918.932,00
29	Bumi Indo Power, PT	Tanjab Barat	5.027	Operasi Produksi	Batubara	246.903.329,00	13.000.000,00
30	Bumi Permata Hijau, PT	Tanjab Barat	4.053	Operasi Produksi	Batubara	-	-
31	Sembilan Setia Mitra, PT	Tanjab Barat	198	Operasi Produksi	Batubara	162.848.346,76	-
32	Terminalindo Idaman Permai, PT	Tanjab Barat	4.070	Operasi Produksi	Batubara	-	-
33	Terminalindo Idaman Permai, PT	Tanjab Barat	3.961	Operasi Produksi	Batubara	-	-
34	Andalas Maju Multimineral, PT	Merangin	835	Operasi Produksi	Bijih Besi	622.843.347,27	-
35	Mineral Merangin Sejahtera, PT	Merangin	460	Operasi Produksi	Bijih Besi	597.032.500,00	-
36	Putra Sarko Mining, PT	Merangin	206	Operasi Produksi	Bijih Besi	600.000.000,00	146.344.190,00
37	Rajawali Terbang Tinggi, PT	Merangin	3.330	Operasi Produksi	Batubara	-	-
38	Randu Hijau Lestari (153), PT	Merangin	70	Operasi Produksi	Bijih Besi	100.000.000,00	-
39	Randu Hijau Lestari (366), PT	Merangin	185	Operasi Produksi	Bijih Besi	111.000.000,00	-
40	Sahabat Baru Century, PT	Merangin	6.800	Operasi Produksi	Bijih Besi	167.000.000,00	-
41	Sahabat Baru Century, PT	Merangin	8.913	Operasi Produksi	Bijih Besi	152.000.000,00	-
42	Sitasa Energi, PT	Merangin	2.710	Operasi Produksi	Bijih Besi	953.661.755,00	-
43	Anugerah Alam Andalas Andalan (198), PT	Tebo	177	Operasi Produksi	Batubara	645.621.837,66	450.429.000,00
44	Anugerah Alam Andalas (299), PT	Tebo	199	Operasi Produksi	Batubara	60.220.224,00	-
45	Asia Multi Investama, PT	Tebo	4.469	Operasi Produksi	Batubara	337.590.985,00	181.082.008,00
46	Berlian Mahkota Coal, PT	Tebo	4.850	Operasi Produksi	Batubara	-	-
47	Bumi Unggul Permai, PT	Tebo	199	Operasi Produksi	Batubara	705.842.440,84	397.376.233,00
48	Cahaya Permata Nusantara, PT	Tebo	2.113	Operasi Produksi	Batubara	-	-
49	Daya Bambu Sejahtera, PT	Tebo	3.548	Operasi Produksi	Batubara	1.971.483.379,00	326.195.949,12
50	Dwi Ghita Karya Mandiri (46), PT	Tebo	195	Operasi Produksi	Batubara	759.309.704,00	327.733.500,00
51	Dwi Ghita Karya Mandiri, PT (Aff. Elyon Coal Tebo,	Tebo	1.489	Operasi Produksi	Batubara	-	-
52	Energi Primer Tebo, PT	Tebo	970	Operasi Produksi	Batubara	337.168.144,00	170.949.890,00
53	Globalindo Alam Lestari, PT	Tebo	3.197	Operasi Produksi	Batubara	604.449.359,00	17.462.951,00
54	Hasil Tambang Raya, PT (103)	Tebo	195	Operasi Produksi	Batubara	423.240.774,11	-
55	Hasil Tambang Raya, PT (153)	Tebo	199	Operasi Produksi	Batubara	-	-
56	Haswi Kencana Indah, PT	Tebo	1.289	Operasi Produksi	Batubara	436.255.000,00	250.000.000,00
57	Klola Tebo Energi, PT	Tebo	1.885	Operasi Produksi	Batubara	555.006.100,00	100.000.000,00
58	Mampun Cipta Bara, PT	Tebo	650	Eksplorasi	Batubara	-	-
59	Subaru Duta Makmur, PT	Tebo	715	Operasi Produksi	Batubara	-	-
60	Tebo Agung International, PT	Tebo	3.152	Operasi Produksi	Batubara	219.288.487,00	-
61	Tebo Batubara Investama, PT	Tebo	193	Operasi Produksi	Batubara	1.009.836.257,00	128.359.677,00
62	Tebo Dwi Lestari, PT	Tebo	4.420	Operasi Produksi	Batubara	318.413.053,00	20.722.585,00
63	Tebo Inti Batubara, PT	Tebo	2.000	Eksplorasi	Batubara	-	-
64	Tebo Prima, PT	Tebo	1.800	Operasi Produksi	Batubara	219.171.202,00	52.736.126,00
65	Tebo Tunggal Lestari, PT	Tebo	5.000	Operasi Produksi	Batubara	294.569.977,00	30.399.077,00
66	Winner Prima Sekata, PT	Tebo	1.200	Operasi Produksi	Batubara	1.755.979.920,06	76.086.707,00
67	Bangun Energi Perkasa, PT	Tebo	3.587	Operasi Produksi	Batubara	-	-
68	Batanghari Energi Prima, PT	Tebo	4.380	Operasi Produksi	Batubara	-	-
69	Nazmira Energi Prima, PT	Tebo	5.000	Eksplorasi	Batubara	-	-
70	Tepian Kenalu Putra Mandiri, PT	Tebo	1.500	Operasi Produksi	Batubara	-	-
71	Pandu Putra Alam Persada, PT	Tebo	2.900	Eksplorasi	Batubara	-	-
72	Akat Srida Amri, PT	Bungo	36	Operasi Produksi	Batubara	125.000.000,00	225.000.000,00
73	Andalas Nusa Indah, PT	Bungo	196	Operasi Produksi	Batubara	200.000.000,00	100.000.000,00
74	Anugrah Mining Persada, PT	Bungo	128	Operasi Produksi	Batubara	-	-
75	Bara Harmonis Batang Asam, PT	Bungo	172	Operasi Produksi	Batubara	3.458.114.711,00	3.120.496.418,00
76	Baratama Rezeki Anugerah Sentosa Utama, PT	Bungo	113	Operasi Produksi	Batubara	416.638.082,00	250.000.000,00
77	Batang Bungo Jaya, PT	Bungo	195	Operasi Produksi	Batubara	-	-
78	Berkat Nusantara Permai, PT	Bungo	199	Operasi Produksi	Batubara	782.068.602,00	1.433.696.098,00
79	Bukit Petai Indah, PT	Bungo	195	Operasi Produksi	Batubara	-	-
80	Bumi Anugrah Nusantara, PT	Bungo	175	Operasi Produksi	Batubara	-	-
81	Bumi Bara Perkasa, PT	Bungo	187	Operasi Produksi	Batubara	355.051.247,00	97.865.215,00

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KABUPATEN	LUAS (Ha)	TAHAP KEGIATAN	KOMODITAS	JAMINAN REKLAMASI Rp.	JAMINAN PASCATAMBANG Rp.
82	Bumi Mas Resources, PT	Bungo	200	Operasi Produksi	Batubara	50.000.000,00	200.000.000,00
83	Bungo Bara Utama, PT	Bungo	1.301	Operasi Produksi	Batubara	1.214.435.441,00	374.434.026,00
84	Bungo Bara Makmur, PT	Bungo	199	Operasi Produksi	Batubara	439.413.305,00	2.369.447.729,00
85	Bungo Berkah Jaya, PT	Bungo	133	Operasi Produksi	Batubara	100.000.000,00	-
86	Daya Bara Nusantara, PT	Bungo	106	Operasi Produksi	Batubara	477.006.500,00	100.000.000,00
87	Energi Bara Bersinar, PT	Bungo	195	Operasi Produksi	Batubara	-	-
88	Inti Baratama Anugerah Prima, PT	Bungo	145	Operasi Produksi	Batubara	727.449.317,00	225.000.000,00
89	Karya Cemerlang Persada, PT	Bungo	143	Operasi Produksi	Batubara	4.316.898.994,00	1.276.519.188,00
90	Khatulistiwa Makmur Persada, PT	Bungo	120	Operasi Produksi	Batubara	196.815.726,00	51.074.751,00
91	Kuansing Inti Makmur, PT	Bungo	199	Operasi Produksi	Batubara	3.119.003.616,00	4.314.467.954,00
92	Kuansing Inti Sejahtera, PT	Bungo	199	Operasi Produksi	Batubara	5.319.331.953,00	720.897.867,00
93	Marga Bara Tambang, PT	Bungo	199	Operasi Produksi	Batubara	-	-
94	Niska, CV	Bungo	199	Operasi Produksi	Batubara	-	-
95	Putra Jujuhan Mandiri, PT	Bungo	199	Operasi Produksi	Batubara	-	-
96	Sinar Bumi Baratama, PT	Bungo	110	Operasi Produksi	Batubara	95.649.271,00	43.609.347,00
97	Sungai Pangean Jaya, PT	Bungo	190	Operasi Produksi	Batubara	-	-
98	Surya Anugrah Sejahtera, PT	Bungo	170,8	Operasi Produksi	Batubara	513.457.861,00	250.000.000,00
99	Tambulun Pangian Indah, PT	Bungo	199	Operasi Produksi	Batubara	600.000.000,00	-
100	Tanjung Batang Asam, PT	Bungo	196	Operasi Produksi	Batubara	3.981.050.598,00	1.843.812.366,00
101	Tanjung Belit Bara Utama, PT	Bungo	198	Operasi Produksi	Batubara	697.392.264,00	2.031.431.787,00
102	Andhika Yoga Pratama, PT	Sarolangun	3.000	Operasi Produksi	Batubara	706.277.600,00	-
103	Bangun Persada Jambi Energi, PT	Sarolangun	2.580	Operasi Produksi	Batubara	66.122.593,00	10.181.665,00
104	Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT	Sarolangun	199	Operasi Produksi	Batubara	928.340.282,00	1.572.713.231,00
105	Dinar Kalimantan Coal, PT	Sarolangun	590	Operasi Produksi	Batubara	1.125.702.722,00	250.000.000,00
106	Duta Energiy Indonesia, PT	Sarolangun	5.843	Operasi Produksi	Batubara	-	-
107	Duta Energy Transporter, PT	Sarolangun	4.690	Operasi Produksi	Batubara	-	-
108	Ganesha Minerals Jaya, PT	Sarolangun	100	Operasi Produksi	Batubara	120.757.270,50	37.206.250,00
109	Indocom Jaya Mulia Perkasa, PT	Sarolangun	6.000	Operasi Produksi	Batubara	-	-
110	Jambi Prima Coal, PT	Sarolangun	1.000	Operasi Produksi	Batubara	5.292.854.967,00	3.064.754.407,00
111	Kamalindo Sompurna, PT	Sarolangun	1.093	Operasi Produksi	Batubara	190.976.720,00	234.960.405,00
112	Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT	Sarolangun	1.170	Operasi Produksi	Batubara	-	-
113	Kirana Graha Buana, PT	Sarolangun	599	Operasi Produksi	Batubara	250.954.651,00	-
114	Marga Perkasa, PT	Sarolangun	1.720	Operasi Produksi	Batubara	170.000.000,00	-
115	Hutamas Koado, PT	Sarolangun	198,3	Operasi Produksi	Batubara	250.000.000,00	200.000.000,00
116	Mahakarya Abadi Prima, PT	Sarolangun	2.855	Operasi Produksi	Batubara	-	-
117	Sarolangun Bara Prima, PT	Sarolangun	1.376	Operasi Produksi	Batubara	1.834.925.088,00	438.083.000,00
118	Sarolangun Ketalo Coal, PT	Sarolangun	1.788	Operasi Produksi	Batubara	1.069.575.284,50	30.181.807,10
119	Sarolangun Prima Coal, PT	Sarolangun	2.064	Operasi Produksi	Batubara	1.729.984.213,00	300.000.000,00
120	Sinar Wijaya Pratama, PT	Sarolangun	2.127	Operasi Produksi	Batubara	236.182.083,00	165.877.816,08
121	Surya Global Makmur, PT	Sarolangun	2.600	Operasi Produksi	Batubara	913.456.407,00	185.442.028,43
122	Tamarona Mas International, PT	Sarolangun	725	Operasi Produksi	Batubara	483.486.242,00	54.432.105,00
123	Tembesi Coalindo, PT	Sarolangun	1.896	Operasi Produksi	Batubara	-	-
124	Trans Power Indonesia, PT	Sarolangun	1.430	Operasi Produksi	Batubara	-	-
125	Wahana Surya Abadi, PT	Sarolangun	1.643	Operasi Produksi	Batubara	650.000.000,00	350.000.000,00
					TOTAL	**71.526.661.592,80**	**37.153.510.906,86**

Lampiran 29.2

DATA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 SEMESTER II (JULI S/D 31 DESEMBER 2021)

NO.	NAMA PERUSAHAAN IUP	LOKASI	LUAS IUP (Ha)	TAHAP KEGIATAN	KOMODITAS	JAMINAN REKLAMASI Rp.	JAMINAN PASCATAMBANG Rp.
1	Alam Permata Batanghari. PT 1 (225)	Muaro Jambi	41,25	Operasi Produksi	Pasir	10.000.000,00	5.000.000,00
2	Alam Permata Batanghari. PT.3	Muaro Jambi	16	Operasi Produksi	Pasir	-	-
3	Alam Permata Batanghari. PT 4	Muaro Jambi	108	Operasi Produksi	Pasir	-	-
4	Anugrah Mulia. CV	Muaro Jambi	15	Operasi Produksi	Pasir	-	-
5	Batanghari Alam Persada .PT	Muaro Jambi	37,36	Operasi Produksi	Pasir	-	-
6	Bumi Mas Resources.PT	Muaro Jambi	8,3	Operasi Produksi	Pasir	-	-
7	Danati Jusmi. Sdri	Muaro Jambi	5,1	Operasi Produksi	Pasir	-	-
8	Dewi Rosiana, Sdri	Muaro Jambi	6,5	Operasi Produksi	Pasir	-	-
9	Dwi Karya .CV	Muaro Jambi	14,3	Operasi Produksi	Pasir	7.582.000,00	7.821.000,00
10	Erwin Lim, Sdr	Muaro Jambi	20,3	Operasi Produksi	Pasir	5.000.000	10.000.000
11	Gitta Aneka Tambang. PT	Muaro Jambi	45,3	Operasi Produksi	Pasir	-	26.893.503,86
12	Hidayah Murni, PT	Muaro Jambi	88	Operasi Produksi	Pasir	-	-
13	Hidayah Murni, PT	Muaro Jambi	77,6	Operasi Produksi	Pasir	-	-
14	Inti Bintang Sejati. PT	Muaro Jambi	15,5	Operasi Produksi	Pasir	-	-
15	Jambi Sand Mining. PT	Muaro Jambi	90	Operasi Produksi	Pasir	-	-
16	Jambi Sand Mining. PT	Muaro Jambi	114,9	Operasi Produksi	Pasir	-	-
17	M. Saleh Shibly, Sdr	Muaro Jambi	18,88	Operasi Produksi	Pasir	-	-
18	M. Saleh Shibly, Sdr	Muaro Jambi	30,57	Operasi Produksi	Pasir	-	-
19	Mitra Pasirindo. CV	Muaro Jambi	32,3	Operasi Produksi	Pasir	-	37.668.000,00
20	Muara Ghibran Malik . CV	Muaro Jambi	9,9	Operasi Produksi	Pasir	-	-
21	Patron Koperasi	Muaro Jambi	54,2	Operasi Produksi	Pasir	-	-
22	ANUGERAH MULIA, CV	Muaro Jambi	27,5	Operasi Produksi	Pasir	-	-
23	Peki Prasetia. Sdr	Muaro Jambi	9,4	Operasi Produksi	Pasir	-	-
24	Putra Batanghari, CV	Muaro Jambi	5	Operasi Produksi	Pasir	-	-
25	Putra Batanghari, CV	Muaro Jambi	152,36	Operasi Produksi	Pasir	-	-
26	Raden Z Ansyory HT	Muaro Jambi	59,6	Operasi Produksi	Pasir	-	-
27	Robin	Muaro Jambi	8,8	Operasi Produksi	Pasir	-	-
28	Sand Batanghari, CV	Muaro Jambi	42	Operasi Produksi	Pasir	10.000.000,00	10.000.000,00
29	Sukarman	Muaro Jambi	6,5	Operasi Produksi	Pasir	-	-
30	Sumber Sedayu, PT	Muaro Jambi	10,5	Operasi Produksi	Pasir	-	-
31	Sunar	Muaro Jambi	19,6	Operasi Produksi	Pasir	-	-
32	H. Moh Yasin	Muaro Jambi	7,89	Operasi Produksi	Pasir	-	-
33	PT. Winner Prima Sinergy	Muaro Jambi	46,41	Operasi Produksi	Pasir	-	-
34	PT. Winner Prima Sinergy	Muaro Jambi	26,6	Operasi Produksi	Pasir	-	-
35	Rudy Robin Lie	Muaro Jambi	18,8	Operasi Produksi	Pasir	-	-
36	Tanjung Jaya Indonesia, PT	Muaro Jambi	104	Operasi Produksi	Pasir	-	-
37	Theo Anugrah Persada, PT	Muaro Jambi	36,35	Operasi Produksi	Pasir	-	-
38	Usman	Muaro Jambi	6,65	Operasi Produksi	Pasir	46.240.588,50	7.037.261,73
39	Utama Karya, CV	Muaro Jambi	75,4	Operasi Produksi	Pasir	-	-
40	Raden Z Ansyory HT	Muaro Jambi	7,1	Operasi Produksi	Pasir	-	-
41	Bangun Berkah Bersama, CV	Muaro Jambi	44	Operasi Produksi	Pasir	-	-
42	RIKI ANDRI	Muaro Jambi	7,3	Operasi Produksi	Pasir	-	-
43	Fauzi Abas	Muaro Jambi	16,7	Operasi Produksi	Pasir	-	-
44	RINI LISTYANINGTYAS	Muaro Jambi	49,6	Operasi Produksi	Pasir	-	-
45	ANGSO DUO. CV	Muaro Jambi	38,5	Operasi Produksi	Pasir	-	-
46	RUSMANSYAH	Muaro Jambi	82,19	Operasi Produksi	Pasir	-	-
47	SUPARTO	Muaro Jambi	5,33	Operasi Produksi	Pasir	-	-
48	Raden Z Ansyory HT	Muaro Jambi	8	Operasi Produksi	Pasir	-	-
49	Ade Irawan	Muaro Jambi	5,6	Operasi Produksi	Pasir	-	-
50	Ade Irawan	Muaro Jambi	14,75	Eksplorasi	Pasir	-	-
51	Raden Z. Ansyory. HT	Muaro Jambi	10,76	Operasi Produksi	Pasir	-	-
52	Hasan Basri	Muaro Jambi	6,9	Operasi Produksi	Pasir	-	-
53	Suharyanta	Muaro Jambi	50,2	Operasi Produksi	Pasir	-	-
54	PT. BATANGHARI MANDIRI	Muaro Jambi	154,24	Operasi Produksi	Pasir	-	-
55	PT. BATANGHARI MANDIRI	Muaro Jambi	5,8	Operasi Produksi	Pasir	-	-
56	YATIMAN	Muaro Jambi	5,6	Operasi Produksi	Pasir	-	-
57	FAUZI SYARIF	Muaro Jambi	6,75	Operasi Produksi	Pasir	-	-
58	BUMI BIYANKA BAROKAH, CV	Muaro Jambi	108,60	Eksplorasi	Pasir	-	-
59	Eddy Thamrin	Muaro Jambi	48,80	Operasi Produksi	Pasir	-	-
60	Syamsuddin Hasan	Muaro Jambi	14,16	Operasi Produksi	Pasir		
61	Anugerah Mulia, PT	Muaro Jambi	27,50	Operasi Produksi	Pasir		
62	Ridlo IIlahi, CV	Batang Hari	167,2	Operasi Produksi	Pasir	-	-
63	Jaya Mandiri, CV	Batang Hari	13,4	Operasi Produksi	Pasir	-	-
64	Musyarial	Batang Hari	7,65	Operasi Produksi	Pasir	-	-
65	Fauzi	Batang Hari	35,85	Operasi Produksi	Pasir	-	-
66	ALAM BARAJO, PT	Tanjab Barat	178	Operasi Produksi	Andesit	-	-
67	CHANDRA JAYA, CV	Tanjab Barat	48,76	Operasi Produksi	Andesit	-	-
68	REMON SURYADI	Tanjab Barat	44,76	Eksplorasi	Andesit	-	-
69	ATLAS CITRA GEMILANG, PT	Tanjab Barat	66,59	Operasi Produksi	Andesit	-	69.325.000,00

NO.	NAMA PERUSAHAAN IUP	LOKASI	LUAS IUP (Ha)	TAHAP KEGIATAN	KOMODITAS	JAMINAN REKLAMASI Rp.	JAMINAN PASCATAMBANG Rp.
70	JABUNG TUAH KILOAN, PT	Tanjab Barat	44,70	Operasi Produksi	Andesit	-	-
71	AJI WATU GUNUNG, PT	Tanjab Barat	123,56	Eksplorasi	Andesit	-	-
72	Hasan Basri	Tanjab Barat	5,2	Operasi Produksi	Tanah Urug	-	-
73	Johan Wahyudi	Tanjab Barat	5,27	Operasi Produksi	Tanah Urug		
74	Muhammad Asri	Tanjab Barat	12,33	Eksplorasi	Laterite		
75	BANGUN PERSADA ENERGI, PT	Merangin	656	Operasi Produksi	Marmer	-	-
76	GULAM RIZAL	Merangin	6,3	Eksplorasi	Sirtu	-	-
77	AFRIAL	Merangin	13,94	Operasi Produksi	Sirtu	-	-
78	PT. Merangin Karya Sejati	Merangin	5,00	Operasi Produksi	Sirtu	-	-
79	Syaihu	Merangin	5,00	Operasi Produksi	Sirtu	-	-
80	Novrida	Merangin	176,58	Eksplorasi	Marmer	-	-
81	PT. Bumi Mas Resources	Merangin	22.732	Eksplorasi	Batu Gamping	-	-
82	CV Putra Kembar	Merangin	5,00	Operasi Produksi	Sirtu	-	-
83	PT. Joeang Perkasa Jaya	Merangin	9,50	Operasi Produksi	Sirtu	-	-
84	Nofrida Yoli	Merangin	11,20	Eksplorasi	Sirtu	-	-
85	ADI SUTOMO	Bungo	8	Operasi Produksi	Andesit	-	-
86	ANAS INDAH JAYA, PT	Bungo	20	Operasi Produksi	Andesit	-	-
87	BETON LOVINDO, CV	Bungo	8	Operasi Produksi	Andesit	-	-
88	BUKIT TELAGO LESTARI, PT	Bungo	10	Operasi Produksi	Andesit	-	-
89	PETRADAYA PRIMA, PT (7)	Bungo	12,8	Operasi Produksi	Andesit	-	-
90	SINAR BAHRI CERIA, PT	Bungo	4	Operasi Produksi	Andesit	31.250.000,00	20.200.000,00
91	RUDY AGUNG LAKSANA, PT	Bungo	5	Operasi Produksi	Andesit	-	-
92	BATUMAMAK SERASI, PT	Bungo	24,44	Operasi Produksi	Andesit	18.018.450,00	6.992.609,00
93	MUSYATIANOP	Bungo	18	Eksplorasi	Andesit	-	-
94	SATRIA BUDIA PERKASA, PT	Bungo	7	Operasi Produksi	Andesit	11.773.500,00	129.911.994,00
95	MAMAN HERMANTO	Bungo	10	Eksplorasi	Andesit	-	-
96	MUNTAS BERKAH SILIKA, CV	Sarolangun	65,90	Operasi Produksi	Silika	-	-
97	SEMEN BATURAJA, PT	Sarolangun	1.554	Operasi Produksi	Gamping	-	-
98	SEMEN BATURAJA, PT	Sarolangun	647,67	Eksplorasi	Clay	-	-
99	BUMI KUARSA ABADI, PT	Sarolangun	3.200	Operasi Produksi	Kuarsa	-	-
100	PUTRA APRI REMON	Kerinci	5,25	Operasi Produksi	Sirtu	15.000.000,00	10.000.000,00
101	RAMLI UMAR	Kerinci	5,6	Operasi Produksi	Sirtu	15.000.000,00	10.000.000,00
102	SARDI	Kerinci	11,7	Eksplorasi	Sirtu	-	-
103	SAMSUL RIZAL	Tanjab Timur	26,95	Operasi Produksi	Pasir	-	-
104	M. DAUD	Tanjab Timur	22,7	Operasi Produksi	Pasir	-	-
105	APRILIA YOLANDA	Tanjab Timur	38,2	Eksplorasi	Pasir	-	-
106	MUSTAKIM	Tanjab Timur	69,6	Operasi Produksi	Pasir	-	-
107	RAHMAT PEMBANGUNAN	Tanjab Timur	58,4	Eksplorasi	Pasir	-	-
108	SAMSUL RIZAL	Tanjab Timur	17,87	Eksplorasi	Pasir	-	-
109	FIRMAN	Tanjab Timur	36,66	Eksplorasi	Pasir	-	-
110	FIRMAN	Tanjab Timur	20,32	Eksplorasi	Pasir	-	-
111	SAMSUL RIZAL	Tanjab Timur	20,15	Eksplorasi	Pasir	-	-
112	UBAIDILAH	Tanjab Timur	39	Operasi Produksi	Pasir	-	-
113	CV. USAHA BATANGHARI	Tanjab Timur	5,8	Eksplorasi	Andesit	-	-
114	RUDY AGUNG LAKSANA	Tanjab Timur	18,5	Eksplorasi	Andesit	-	-
115	ANIZAR	Tanjab Timur	5,0	Operasi Produksi	Andesit	-	-
116	KASDI	Tanjab Timur	5,5	Eksplorasi	Tanah Urug	-	-
117	JUNAIDI	Tanjab Timur	5,2	Eksplorasi	Tanah Urug	-	-
118	JUNAIDI	Tanjab Timur	6,3	Eksplorasi	Tanah Urug	-	-
					TOTAL	**169.864.538,50**	**350.849.368,59**

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Daftar Beban Persediaan VS Belanja Persediaan

per 31 December 2021

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	
L O			L R A			Selisih (LO - LRA)
Beban Pakai Habis						
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	34.297.334.572,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	34.298.483.224,00	(1.148.652,00)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	785.420.251,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.822.012.990,00	(1.036.592.739,00)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.984.240.973,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.984.240.973,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0005	Beban Bahan-Bahan Baku	1.112.282.670,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.109.344.940,00	2.937.730,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0007	Beban Bahan-Barang dalam Proses	6.468.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	6.468.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.277.415.774,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.060.200.544,00	(782.784.770,00)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	24.760.008,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	24.695.008,00	65.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	227.347.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	227.347.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.764.953.220,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	896.297.600,00	868.655.620,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	(7.865.266.938,66)	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	129.905.000,00	(7.995.171.938,66)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.208.986.476,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat	4.208.986.476,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	603.076.400,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	603.076.400,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat	450.553.700,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat	450.553.700,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.320.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat	6.320.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	(4.777.250,00)				(4.777.250,00)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0022	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja	181.754.037,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja	181.754.037,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	78.269.471,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	27.890.000,00	50.379.471,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	6.835.049.343,26	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat	7.500.380.891,00	(665.331.547,74)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas	568.939.619,19	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas	570.337.036,00	(1.397.416,81)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	13.370.225.598,86	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	13.925.846.996,00	(555.621.397,14)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda	120.651.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda	120.651.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	3.282.326.673,14	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	3.274.042.366,00	8.284.307,14
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	72.070.185,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	72.467.678,00	(397.493,00)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	2.740.783.518,59	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat	2.550.574.161,00	190.209.357,59
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	94.113.300,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	94.113.300,00	0,00
	Perlengkapan Dinas			Perlengkapan Dinas		0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.190.170.200,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.190.170.200,00	0,00
	Perlengkapan Pendukung Olah Raga			Perlengkapan Pendukung Olahraga		0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	427.518.100,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	427.518.100,00	0,00
	Suvenir/Cendera Mata			Suvenir/Cendera Mata		0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	5.926.933.702,44	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	13.062.269.587,12	(7.135.335.884,68)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0037	Beban Obat-Obatan-Obat	19.728.075.101,20	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	18.841.575.489,00	886.499.612,20
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.980.735.635,82	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.111.349.940,82	4.869.385.695,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	24.728.296.413,04	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	21.463.975.978,00	3.264.320.435,04
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	124.493.000,00				124.493.000,00
	Pihak Ketiga/Pihak Lain					0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0041	Beban Persediaan untuk Tujuan	(93.234.900,00)				(93.234.900,00)
	Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan					0,00
	Strategis/Berjaga-jaga					0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	5.920.689.119,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.920.116.619,00	572.500,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	179.726.200,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	179.726.200,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan	112.611.080,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan	102.514.080,00	10.097.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	12.355.611.510,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.355.611.510,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.777.712.864,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.777.712.864,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	
L O			L R A			Selisih (LO - LRA)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45.748.500,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45.748.500,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	6.695.418.800,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	6.695.418.800,00	0,00 0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.391.858.864,83	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.643.595.705,00	(251.736.840,17) 0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.987.871.586,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.987.871.586,00	0,00 0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas	3.669.414.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas	3.669.414.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	276.388.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	276.388.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	178.110.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	178.110.000,00	0,00 0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	77.927.800,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	77.927.800,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	489.749.500,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	489.749.500,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	386.327.560,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	386.327.560,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0068	Beban Pakaian Siaga	29.856.500,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0068	Belanja Pakaian Siaga	29.856.500,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	328.509.020,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	328.509.020,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	1.464.210.267,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.464.210.267,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0072	Beban Pakaian Kerja Bengkel	18.000.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	18.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0074	Beban Pakaian Adat Daerah	37.740.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	37.740.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	469.047.720,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	469.047.720,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0076	Beban Pakaian Olahraga	1.129.918.651,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.129.918.651,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0077	Beban Pakaian Paskibraka	106.065.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	106.065.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 02 . 0006	Beban Komponen-Komponen Lainnya	45.105.000,00				45.105.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 02 . 0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	39.925.388,00	5 . 1 . 2 . 01 . 02 . 0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	39.925.388,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 02 . 0013	Beban Pipa-Pipa Lainnya	8.964.750,00	5 . 1 . 2 . 01 . 02 . 0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	8.964.750,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 03 . 0001	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-	3.425.000,00	5 . 1 . 2 . 01 . 03 . 0001	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-	3.425.000,00	0,00
Jumlah		**190.462.217.533,71**			**198.664.743.634,94**	**(8.202.526.101,23)**
Masuk ke Beban Persediaan						0,00
8 . 1 . 2 . 88 . 88 . 8888	Beban Barang dan Jasa BOS	107.297.596.663,00				107.297.596.663,00
8 . 1 . 2 . 99 . 99 . 9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	70.902.675.411,00	5 . 1 . 2 . 99 . 99 . 9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.245.649.545,00	43.657.025.866,00
Jumlah		**178.200.272.074,00**			**27.245.649.545,00**	**150.954.622.529,00**
JUMAL BEBAN BARANG DAN JASA		**368.662.489.607,71**	**JUMAL BELANJA BARANG DAN JASA**		**225.910.393.179,94**	**142.752.096.427,77**

Lampiran 31

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Daftar Beban Jasa VS Belanja Jasa

per 31 December 2021

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	
	L O			L R A		Selisih (LO - LRA)
Beban Pakai Habis						
Beban Jasa						0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	318.600.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	318.600.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	534.970.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	534.970.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	8.234.772.220,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.234.772.220,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.224.734.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.224.734.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	86.000.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	86.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau	1.164.650.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.164.650.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0007	Beban Honorarium Rohaniwan	235.200.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Honorarium Rohaniwan	235.200.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi	103.320.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan	103.320.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.540.950.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.540.950.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah	279.700.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	279.700.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	46.647.393.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	46.647.393.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.061.140.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.061.140.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	434.700.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	434.700.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.661.669.368,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.661.669.368,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.154.600.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.154.600.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	7.076.675.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	7.076.675.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	21.600.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	21.600.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan	363.243.250,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan	363.243.250,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	85.655.250,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	85.655.250,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.109.250.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.109.250.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	33.745.715.500,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.745.715.500,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	264.000.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	264.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.544.448.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.544.448.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.735.816.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.735.816.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	6.657.837.824,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.657.837.824,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.444.007.666,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.444.007.666,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0033	Beban Jasa Tenaga Supir	1.209.600.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.209.600.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	201.750.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	201.750.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	683.350.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	683.350.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0038	Beban Jasa Tata Rias	24.300.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tata Rias	24.300.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.356.769.800,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.356.769.800,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air,	16.046.250,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon,	16.046.250,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	336.185.600,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	336.185.600,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	
	L O			L R A		Selisih (LO - LRA)
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.039.688.906,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.039.688.906,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	239.972.760,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	239.972.760,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	303.742.630,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	303.742.630,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0050	Beban Jasa Kalibrasi	222.883.080,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Kalibrasi	222.921.440,00	(38.360,00)
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama,	1.583.245.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, d	1.583.245.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0053	Beban Jasa Pengukuran Tanah	39.615.952,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	39.615.952,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan	7.451.381.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan	7.451.381.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0059	Beban Tagihan Telepon	3.019.076.032,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Tagihan Telepon	2.695.595.032,00	323.481.000,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0060	Beban Tagihan Air	4.193.031.617,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Tagihan Air	4.118.500.441,00	74.531.176,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0061	Beban Tagihan Listrik	16.649.755.747,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Tagihan Listrik	16.155.780.164,00	493.975.583,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.325.326.983,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.325.326.983,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.524.330.600,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	5.389.379.665,00	134.950.935,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0064	Beban Paket/Pengiriman	1.614.880.512,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Paket/Pengiriman	1.614.880.512,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0066	Beban Registrasi/Keanggotaan	183.692.857,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Registrasi/Keanggotaan	183.692.857,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.174.935.569,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.174.935.569,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 0075	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan	32.916.488.228,00	5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 00	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan	32.916.488.228,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 02 . 0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	22.652.024.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 02 . 00	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	22.652.024.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 02 . 0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.830.602.200,00	5 . 1 . 2 . 02 . 02 . 00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.830.602.200,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 02 . 0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.965.126.005,97	5 . 1 . 2 . 02 . 02 . 00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.956.635.332,00	8.490.673,97
8 . 1 . 2 . 02 . 02 . 0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi	29.349.049,31	5 . 1 . 2 . 02 . 02 . 00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi	38.103.000,00	(8.753.950,69)
8 . 1 . 2 . 02 . 02 . 0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	1.904.528.440,79	5 . 1 . 2 . 02 . 02 . 00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.960.342.949,00	(55.814.508,21)
8 . 1 . 2 . 02 . 03 . 0009	Beban Sewa Tanah Kering	2.000.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 03 . 00	Belanja Sewa Tanah Kering	2.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 03 . 0018	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	480.200.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 03 . 00	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	480.200.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	873.001.640,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	868.951.640,00	4.050.000,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	61.000.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 00	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk	61.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0052	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor	3.775.000,00				3.775.000,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0077	Beban Sewa Peralatan Tukang Kayu	21.136.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 00	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu	21.136.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0106	Beban Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan	951.300,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 01	Belanja Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan	951.300,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	75.865.454,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 01	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	75.865.454,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0118	Beban Sewa Mebel	63.320.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 01	Belanja Sewa Mebel	63.320.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0121	Beban Sewa Alat Pendingin	68.140.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 01	Belanja Sewa Alat Pendingin	68.140.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	221.628.040,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 01	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	221.628.040,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	16.000.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 01	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	16.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0133	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	23.398.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 01	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	23.398.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0308	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	18.767.840,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 03	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	18.767.840,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 0355	Beban Sewa Peralatan Umum	152.130.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 03	Belanja Sewa Peralatan Umum	152.130.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 05 . 0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	359.238.363,00	5 . 1 . 2 . 02 . 05 . 00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	359.238.363,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 05 . 0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat	3.398.168.880,00	5 . 1 . 2 . 02 . 05 . 00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat	3.398.168.880,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 05 . 0036	Beban Sewa Taman	61.800.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 05 . 00	Belanja Sewa Taman	61.800.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 06 . 0002	Beban Sewa Jalan Provinsi	(199.907.440,00)	5 . 1 . 2 . 02 . 07 . 00	Belanja Sewa Buku Filsafat	99.000.000,00	(298.907.440,00)
8 . 1 . 2 . 02 . 06 . 0031	Beban Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya	(1.933.306.000,00)				(1.933.306.000,00)
8 . 1 . 2 . 02 . 06 . 0048	Beban Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	(745.500.000,00)				(745.500.000,00)
8 . 1 . 2 . 02 . 06 . 0126	Beban Sewa Jaringan Listrik Lainnya	(520.000.000,00)				(520.000.000,00)
8 . 1 . 2 . 02 . 07 . 0002	Beban Sewa Buku Filsafat	99.000.000,00				99.000.000,00
8 . 1 . 2 . 02 . 07 . 0005	Beban Sewa Buku Ilmu Bahasa	200.000.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 07 . 00	Belanja Sewa Buku Ilmu Bahasa	200.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 07 . 0012	Beban Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak	2.650.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 07 . 00	Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak	2.650.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 07 . 0037	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang	196.200.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 07 . 00	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang	196.200.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 07 . 0057	Beban Sewa Tanaman	205.562.500,00	5 . 1 . 2 . 02 . 07 . 00	Belanja Sewa Tanaman	205.562.500,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	
	L O			L R A		Selisih (LO - LRA)
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	133.834.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain	133.834.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan	59.290.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan	59.290.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.157.309,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.157.309,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi	186.984.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk	186.984.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik	466.999.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk	466.999.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0014	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan	419.700.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan	419.700.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	878.036.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	878.036.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0016	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	591.785.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan	591.785.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan	158.953.200,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi	158.953.200,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0027	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa	84.125.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa	84.125.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0028	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Penguijan dan Analisa Komposisi dan Tingkat	21.255.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Penguijan dan Analisa Komposisi dan Tingkat	21.255.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0029	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Penguijan dan Analisa Parameter Fisikal	8.370.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Penguijan dan Analisa Parameter Fisikal	8.370.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa	86.400.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi	86.400.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0034	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	264.230.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 08 . 0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen	264.230.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 09 . 0001	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	554.252.600,00	5 . 1 . 2 . 02 . 09 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	554.252.600,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 09 . 0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-	572.608.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 09 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-	572.608.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 09 . 0004	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	315.689.180,00	5 . 1 . 2 . 02 . 09 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	315.689.180,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 09 . 0006	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-	249.056.700,00	5 . 1 . 2 . 02 . 09 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-	249.056.700,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 09 . 0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-	1.591.291.600,00	5 . 1 . 2 . 02 . 09 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-	1.591.291.600,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 09 . 0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	199.420.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 09 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	199.420.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 09 . 0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-	865.169.880,00	5 . 1 . 2 . 02 . 09 . 00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-	865.169.880,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 10 . 0017	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan	9.290.173.729,91	5 . 1 . 2 . 02 . 10 . 00	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan	9.290.173.729,91	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 11 . 0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	40.000.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 11 . 00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	40.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 11 . 0003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	140.000.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 11 . 00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	140.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 12 . 0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.350.749.703,00	5 . 1 . 2 . 02 . 12 . 00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.350.749.703,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 12 . 0002	Beban Sosialisasi	2.741.520.905,00	5 . 1 . 2 . 02 . 12 . 00	Belanja Sosialisasi	2.741.520.905,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 12 . 0003	Beban Bimbingan Teknis	38.150.000,00	5 . 1 . 2 . 02 . 12 . 00	Belanja Bimbingan Teknis	38.150.000,00	0,00
	Jumlah	**297.937.746.280,98**			**300.357.812.171,91**	**(2.420.065.890,93)**
Masuk ke Beban Jasa						0,00
8 . 1 . 2 . 05 . 01 . 0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.724.114.288,00	5 . 1 . 2 . 05 . 01 . 00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.724.114.288,00	0,00
8 . 1 . 2 . 05 . 01 . 0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	626.000.000,00	5 . 1 . 2 . 05 . 01 . 00	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	626.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 05 . 02 . 0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak	771.364.000,00	5 . 1 . 2 . 05 . 02 . 00	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak	771.364.000,00	0,00
	Jumlah	**13.121.478.288,00**			**13.121.478.288,00**	**0,00**
	JUMLAH BEBAN JASA	**311.059.224.568,98**		**JUMLAH BELANJA JASA**	**313.479.290.459,91**	**(2.420.065.890,93)**

IKHTISAR
LAPORAN KEUANGAN
BUMD

BANK JAMBI

LAPORAN TAHUNAN 2021
ANNUAL REPORT

Values of Change

Bahagia Melayani

Jambi Mantap
Bank Jambi Maju

Jambi is Great
Bank Jambi is Growing

TEMA DAN KESINAMBUNGAN TEMA

Theme and Theme Continuity

Tumbuh Berkembang Menjemput Peluang

Evolving While Seizing Opportunities

Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Bank Jambi. Bank Jambi berkomitmen untuk terus berkembang menjemput peluang. Wujud pembuktian ini terlihat melalui bertambahnya jaringan kantor Bank Jambi yang tidak hanya tersebar di wilayah Provinsi Jambi saja, namun Bank Jambi kini telah menunjukkan eksistensinya dengan membuka kantor fungsional di Jakarta.

2017 was a challenging year for Bank Jambi. Bank Jambi has committed to keep evolving in order to seize every opportunities. This commitment has been manifested in the increased number of Bank Jambi's office networks which not only diffused around Jambi Province but also established in Jakarta. The latter is a functional office which aimed to show its existence in Jakarta.

Meningkatkan Customer Based dengan Digital Banking

Strengthening Customer Based with Digital Banking

Bank Jambi menyadari bahwa di era modern seperti saat ini, upaya untuk memperkuat basis nasabah harus diiringi dengan penguatan kapabilitas perbankan digital. Untuk itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank Jambi telah memulai mengembangkan layanan perbankan berbasis digital dan melakukan edukasi pelanggan untuk lebih sering melakukan transaksi non tunai. Saat ini, Bank Jambi telah menyediakan layanan perbankan berbasis digital Bank Jambi *Mobile Banking,* agen LAKU PANDAI, COB *(Customer on Board),* SBS *(Smart Branch System),* CCM *(Cash Cloud Machine),* CRM *(Cash Recycle Machine),* Kios-K dan layanan lain ditujukan untuk pembangunan *electronic banking* di desa-desa yang bekerja sama dengan BUMDes. Hal ini merupakan bukti kuatnya komitmen Bank Jambi dalam mendukung pembangunan daerah.

Bank Jambi realizes that in the current era, the efforts taken to strengthen the customer base must be accompanied by the efforts to leverage digital banking capabilities. For this reason, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi or Bank Jambi has begun to develop digital-based banking services while educating customers, encouraging them use cashless transactions more frequently. Currently Bank Jambi has provided digital banking services based on Bank Jambi Mobile Banking, LAKU PANDAI agents, COB (Customer On Board), SBS (Smart Branch System), CCM (Cash Cloud Machine), CRM (Cash Recycle Machine), Kios -K and other services aimed at the development of electronic banking in the villages in cooperation with BUMDes. This is evidence of the strong commitment of Bank Jambi in supporting regional development.

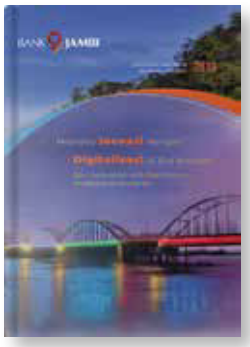

Memacu Inovasi dengan Digitalisasi di Era Disrupsi

Spur Innovation with Digitalization in the Era of Disruption

Teknologi digital telah banyak mengubah cara industri jasa keuangan beroperasi, termasuk perbankan, dari cara-cara yang biasa dilakukan selama beberapa dekade terakhir. Disrupsi ini tidak hanya berdampak pada layanannya saja, tetapi juga berdampak pada strategi bisnis yang dihasilkan dan diimplementasikan oleh korporasi dan lembaga keuangan. Menyadari perubahan tersebut, Bank Jambi telah membangun strategi yang jelas untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan di dalam era disrupsi. Untuk itu, agar Bank siap untuk memenuhi tuntutan masa depan, salah satu langkah yang diambil oleh Bank adalah dengan memacu inovasi dengan digitalisasi.

It is well known that digital technology has substantially changed the way financial services, including banking, are delivered over the past decades. This disruption not only has an impact on the services as such, but also has an impact on the resulting business strategy that corporates and financial institutions decide on and need to implement. Being fully aware of this, Bank Jambi has built a clear strategy to cope with the challenges and seize the opportunity this era of disruption has brought before us. For which, to set the company ready for the future demand, one of the undertakings is by spurring innovation with digitalization.

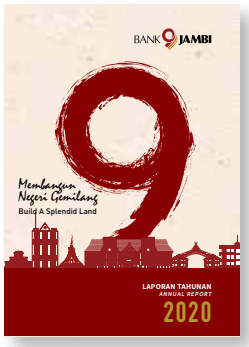

Membangun Negeri Gemilang

Build a Splendid Land

Sebagai salah satu penggerak laju pertumbuhan ekonomi di Jambi dan sekitarnya, Bank Jambi senantiasa menjaga komitmennya dalam mendukung pembangunan di Provinsi Jambi dengan jalan mengoptimalkan perannya dan mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Untuk itu, segala daya upaya akan dicurahkan Bank Jambi dan seluruh karyawannya ke dalam satu semangat untuk Membangun Negeri Gemilang.

As one of the driving force behind the economic growth in Jambi and its surroundings, Bank Jambi always maintains its commitment to supporting the development in Jambi Province by optimizing its role and improving its performance from time to time. To that end, all efforts will be devoted by Bank Jambi and all employees in a single spirit to Build a Splendid Land.

Jambi Mantap Bank Jambi Maju

Jambi is Great, Bank Jambi is Growing

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Jambi menyadari bahwa untuk memacu pertumbuhan usahanya, maka Bank tidak boleh hanya mengandalkan *captive market* seperti ASN. Itu sebabnya, Bank Jambi mulai melakukan ekspansi ke segmen pasar baru, dan harus mampu beradaptasi dengan tantangan perbankan di era digital agar dapat memberi layanan sesuai kebutuhan nasabah modern. Untuk itu, Bank Jambi pun bertransformasi dengan mengembangkan infrastruktur teknologi untuk mendigitalisasi operasional, produk dan distribusinya.

Ke depannya Bank Jambi akan terus menjaga pertumbuhannya dan meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Jambi mantap.

As a Regional Development Bank, Bank Jambi realizes that to spur its business growth, the should not rely solely on captive markets such as ASN. Therefore, Bank Jambi begun to expand its business into new market segments, and must be able to adapt to banking challenges in the digital era in order to cater the needs of modern customers. To that end, Bank Jambi is also transforming itself by developing technology infrastructure to digitize its operations, products and distribution.

Going forward, Bank Jambi will maintain its growth and enhance its contribution to realize a Great Jambi.

DAFTAR ISI
Contents

0	Tema dan Kesinambungan Tema | *Theme and Theme Continuity*
2	Daftar Isi | *Contents*
4	Ikhtisar Kinerja 2021 | *Performance Overview 2021*

01 LAPORAN MANAJEMEN *MANAGEMENT REPORT*

10	Laporan Komisaris | *Commissioner Report*
15	Profile Komisaris | *Commissioner Profile*
16	Laporan Direksi | *Board of Directors Report*
26	Profile Direksi | *Board of Directors Profile*

02 PROFIL PERUSAHAAN *COMPANY PROFILE*

32	Identitas Perusahaan | *Corporate Identity*
33	*Hat Trick!!!*
36	Riwayat Singkat | *Brief History*
38	Visi dan Misi | *Vision and Mission*
39	Budaya Perusahaan | *Corporate Culture*
40	Filosofi Logo Perusahaan | *Corporate Logo Philosophy*
41	Tonggak Sejarah | *Milestone*
42	Bidang Usaha | *Line of Business*
46	Unit Layanan Syariah | *Sharia Services Unit*
48	Struktur Organisasi | *Organization Structure*
50	Komposisi Pemegang Saham | *Shareholders Composition*
52	Penghargaan/Sertifikat | *Awards/Certificate*
54	Daftar Alamat Jaringan Kantor | *List of Channeling Address*
60	Pemimpin Divisi | *Division Head*
62	Profil Pemimpin Divisi | *Profile of Division Head*
74	Pemimpin Cabang Bank Jambi Tahun 2021 | *Bank Jambi Branches Managers Years of 2021*
76	Peristiwa Penting | *Significant Event*
80	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Komisaris dan Direksi | *Education and Training for Board of Commissioners and Board of Directors*
83	Informasi Anak Perusahan, Perusahaan Asosiasi dan *Joint Ventures* | *Information on Subsidarries and Joint Ventures*
83	Struktur Grup | *Group Structure*
83	Informasi Pada Situs Web Perusahaan | *Information on the Company Website*
83	Keanggotaan Asosiasi | *Member of Association*

03 PENDUKUNG BISNIS *BUSINESS SUPPORT*

86	Laporan Sumber Daya Manusia | *Human Resources Report*
95	Laporan Teknologi Informasi | *Information Technology Report*
96	Tata Kelola TI | *IT Governance*
96	Strategi Pengembangan TI | *IT Development Strategy*

04 ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN *MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS*

100	Tinjauan Perekonomian Global | Global *Economic Overview*
100	Tinjauan Ekonomi | *Economic Overview*
100	Tinjauan Perekonomian Nasional | *National Economic Overview*
102	Tinjauan Keuangan Perbankan | *Financial and Banking Overview*
103	Tinjauan Bisnis & Analisis Kinerja Keuangan | *Business Review & Financial Performance Analysisi*

05 TATA KELOLA PERUSAHAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

110	i	Pendahuluan | *Introduction*
113	ii	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi | *The Implementation of Duties and Responsibilities of The Board of Directors*
123	iii	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | *Implementation of Duties and Responsibilities of The Board of Commissioners*

132	iv	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite di bawah Dewan Komisaris | *Completeness and Implementation of Duties of Committees Under The Board of Commissioners*
144	v	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite di bawah Dewan Direksi | *Completenessa and Implementation of Duties of Committees Under The Board of Directors*
145	vi	Penanganan Benturan Kepentingan | *Handling of Conflict of Interest*
146	vii	Penerapan Fungsi Kepatuhan | *Application of Compliance Function*
148	viii	Penerapan Fungsi Audit Intern | *Implementation of The Internal Audit Function*
149	ix	Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) | *Total Devotions (Internal Fraud)*
150	x	Penerapan Fungsi Audit Ekstern | *Implementation of the External Audit Function*
150	xi	Penerapan Manajemen Risiko | *Implementation of Risk Management*
154	xii	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Skala Besar | *Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures*
155	xiii	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal | *Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, Governance Implementation Reports and Internal Reports*
156	xiv	Rencana Strategis Bank | *The Bank's Strategic Plan*
157	xv	*Share Option* | *Share Option*
157	xvi	*Buy Back Shares* dan *Buy Back* Obligasi | *Buy Back Shares and Buy Back Bonds*
158	xvii	Permasalahan Hukum | *Legal Issues*
158	xviii	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik | *Provision of Funds for Social and Political Activities*
158	xix	Hasil *Self Assesment* Tata Kelola | *Self Assesment Governance Results*
174	xx	Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi | *Implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) Program at PT Bank Pembangunan Daerah Jambi*
178		Laporan Pelaksanaan GCG Unit Usaha Syariah | *Report of GCG Implementation in Sharia Business Units*
178		Pendahuluan | *Introduction*
179		Pelaksanaan *Good Corporate Governance* | *Implementation Of Good Corporate Governance*
182		Daftar Konsultan | *List of Consultants*
182		Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya | *Remuneration Policy and Other Facilities*
182		Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah | *Frequency of Sharia Supervision Board Meeting*
184		Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian | *Number of Deviations (Internal Fraud) and The Efforts to Solve*
184		Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh UUS | *Total Legal Issues and Efforts of Settlement Performed By SBU*
184		Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana | *Provision of Funds For Social Activities, Amount and Recipients*
184		Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya | *Non-Halal Income and Its Use*
184		Kelemahan dan Kekuatan Secara Umum | *General Weakness and Strength*
185		Kesimpulan Umum | *General Conclusions*

06 TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENT*

172	Kebijakan CSR | *CSR POLICY*
172	Dasar Hukum | *Legal Basis*
173	Tujuan Pelaksanaan CSR | *The Objectives of CSR Implementation*
173	Pelaksanaan Program CSR | *Implementation of CSR Programs*

07 LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN *SUSTAINABLE FINANCIAL REPORT*

176	Laporan Keuangan Berkelanjutan | *The Sustainable Financial Report*

08 LAPORAN KEUANGAN *FINANCIAL REPORT*

i-iii	Laporan Posisi Keuangan | *Statement of Financial Position*
iv	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | *Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
v	Laporan Perubahan Ekuitas | *Statement of Changes in Equity*
vi-vii	Laporan Arus Kas | *Statement of Cash Flows*
1-152	Catatan Atas Laporan Keuangan | *Notes to Financial Statement*
153	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan | *Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report*

IKHTISAR KINERJA 2021
Performance Overview 2021

Kajian Regional
Regional Review

Dalam Jutaan Rupiah/*In Million Rupiah*

NERACA	2021	2020	2019	2018	2017	*BALANCE SHEETS*
Kredit *(gross)*	**8.976.066**	8.494.608	7.814.429	6.879.550	5.772.373	*Loan (Gross)*
Dana Pihak Ketiga	**10.599.623**	9.385.841	7.708.677	6.835.751	5.729.482	*Third Party Fund*
- Giro	**3.114.419**	1.986.055	2.300.751	1.630.372	1.398.731	*- Current Account*
- Tabungan	**2.087.578**	1.832.491	1.697.850	1.400.645	1.092.783	*- Saving Account*
- Deposito	**5.397.626**	5.567.296	3.710.076	3.804.734	3.237.968	*- Time Deposit*

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlight

Dalam Jutaan Rupiah/*In Million Rupiah*

NERACA	2021	2020	2019	2018	2017	*BALANCE SHEETS*
Total Aset	**13.116.343**	11.389.694	11.716.841	10.895.787	9.526.849	*Total Assets*
Total Aset Produktif	**11.868.646**	11.131.507	10.693.154	9.845.727	8.418.837	*Total Earning Assets*
Kredit (gross)	**8.976.066**	8.494.608	7.814.429	6.879.550	5.772.373	*Loans (gross)*
Total Liabilitas	**11.181.236**	9.625.064	10.092.500	9.435.035	8.242.714	*Total Liabilities*
Dana Pihak Ketiga	**10.599.623**	9.385.841	7.708.677	6.835.751	5.729.482	*Third Party Fund*
- Giro	**3.114.419**	1.986.055	2.300.751	1.630.372	1.398.731	*- Current Account*
- Tabungan	**2.087.578**	1.832.491	1.697.850	1.400.645	1.092.783	*- Saving Account*
- Deposito	**5.397.626**	5.567.296	3.710.076	3.804.734	3.237.968	*- Time Deposit*
Modal/ Ekuitas	**1.935.108**	1.764.631	1.624.341	1.460.751	1.284.134	*Equity*

Dalam Jutaan Rupiah/*In Million Rupiah*

LABA RUGI	2021	2020	2019	2018	2017	*INCOME STATEMENT*
Pendapatan bunga	**1.145.602**	1.078.540	1.099.312	1.216.049	856.127	*Interest Income*
Biaya Bunga	**392.724**	473.318	578.465	472.100	400.176	*Interest Expense*
Pendapatan Bunga Bersih	**752.878**	605.223	520.847	743.949	455.951	*Net Interest Income*
Pendapatan Operasional Lainnya	**100.573**	117.696	98.426	1.295.348	986.241	*Operating Income*
Biaya Operasional Lainnya	**450.306**	835.347	897.587	984.050	658.606	*Operating Expense*
Laba Operasional	**403.146**	360.889	300.151	311.298	327.635	*Income from Operation*
Pendapatan (Beban) Non Operasional	**3.645**	7.631	20.573	2.887	(2.470)	*Non Operating Income*
Laba Sebelum Pajak	**406.791**	368.521	320.724	314.185	325.165	*Income Before Tax*
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh)	**408.222**	364.243	348.664	371.421	376.230	*Net Income*

Dalam Jutaan Rupiah/*In Million Rupiah*

IKHTISAR KINERJA KONVENSIONAL	2021	2020	2019	2018	2017	*CONVENTIONAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS*
Dana Pihak Ketiga	**10.007.028**	8.506.369	7.324.456	6.193.793	5.474.234	*Third Party Fund*
- Giro	**3.027.514**	1.929.637	2.271.791	1.621.579	1.394.666	*- Current Account*
- Tabungan	**1.985.558**	1.749.798	1.614.553	1.328.208	1.015.999	*- Saving Account*
- Deposito	**4.993.956**	4.826.935	3.438.112	3.244.006	3.063.569	*- Time Deposit*
Penyaluran Kredit	**8.193.509**	7.674.680	7.069.345	6.295.606	5.398.608	*Loans*
- Kredit Konsumsi	**7.125.327**	6.688.539	6.053.911	5.433.887	4.736.657	*- Consumer Loan*
- Kredit Modal Kerja	**159.599**	824.630	285.512	170.774	121.986	*- Working Capital Loan*
- Kredit Investasi	**908.583**	161.511	729.922	690.945	539.965	*- Investment Loan*

Dalam Jutaan Rupiah/*In Million Rupiah*

IKHTISAR KINERJA UNIT USAHA SYARIAH	2021	2020	2019	2018	2017	*SHARIA BUSINESS UNIT PERFORMANCE HIGHLIGHTS*
Produk Pendanaan	**592.594**	879.472	384.221	641.958	255.247	*Funding Products*
Produk Pembiayaan	**782.557**	812.298	745.085	580.160	373.462	*Financing Products*

Dalam Persentase/*In Percentage*

RASIO KEUANGAN	2021	2020	2019	2018	2017	*FINANCIAL RATIO*
Permodalan						*Equity*
- CAR	**25,38%**	23,90%	22,78%	24,44%	21,00%	*- CAR*
- Modal Inti terhadap Modal Pelengkap	**2.387,56%**	2.228%	2.106%	2.196,94%	1.809,38%	*- Tier I to Tier II Capital*
Kualitas Aset						*Assets Quality*
- NPL Gross	**1,12%**	0,79%	0,78%	0,37%	0,47%	*- NPL Gross*
- NPL Netto	**0,31%**	0,29%	0,44%	0,12%	0,10%	*- NPL Net*
Rentabilitas						*Earnings*
- ROA	**3,20%**	3,17%	2,72%	3,06%	3,65%	*- Return on Assets*
- ROE	**19,37%**	19,04%	19,84%	21,70%	22,64%	*- Return on Equity*
- NIM	**6,01%**	5,49%	5,00%	8,04%	5,92%	*- Net Interest Margin*
- BOPO	**67,65%**	69,87%	74,74%	75,84%	66,48%	*- Operating Cost to Operating Income*
Likuiditas						*Liquidity*
- LDR	**84,68%**	90,50%	101,37%	100,64%	100,75%	*- Loan to Deposit Ratio*
- GWM	**3,58%**	4,17%	6,89%	6,01%	5,95%	*- Minimum Statutory Reserves*

TOTAL ASET
Total Assets

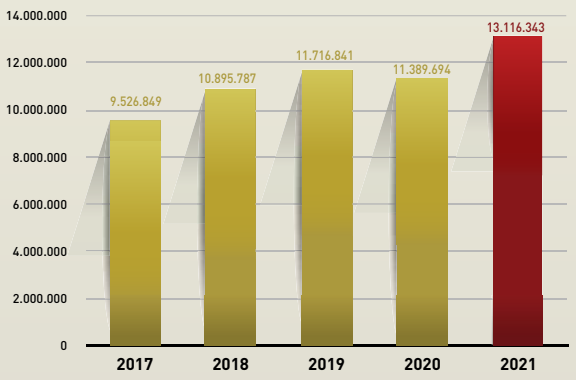

KREDIT (GROSS)
Loans (Gross)

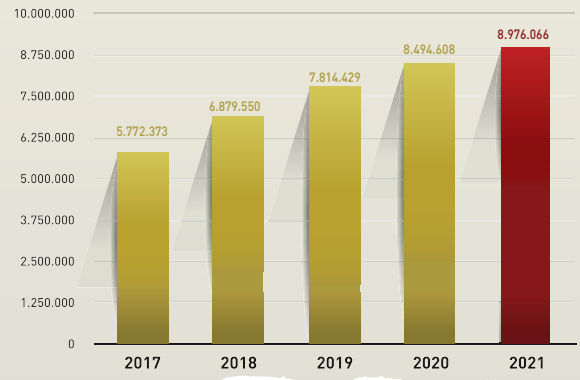

TOTAL LIABILITAS
Total Liabilities

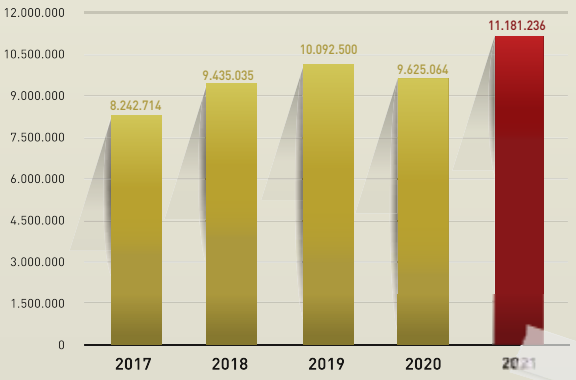

DANA PIHAK KETIGA
Third Party Fund

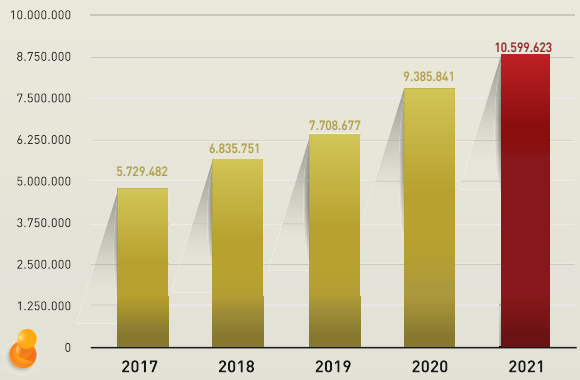

EKUITAS
Equity

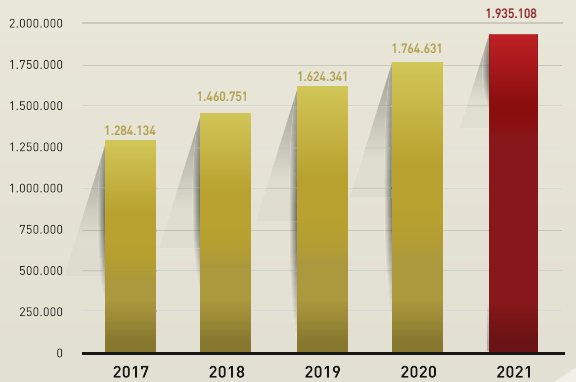

PENDAPATAN BUNGA
Interest Income

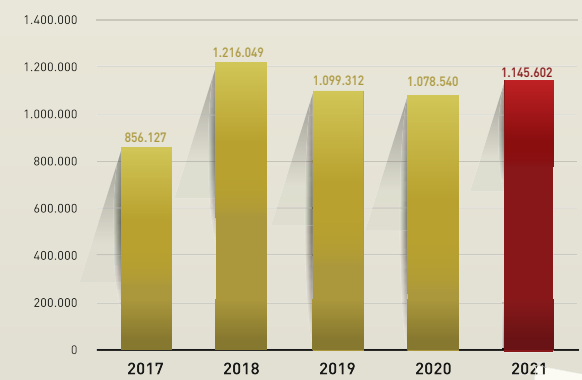

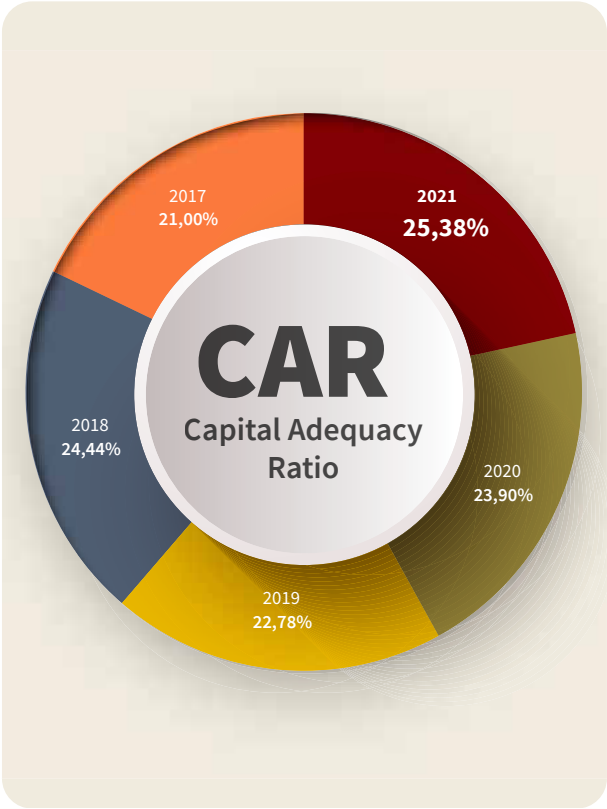
CAR
Capital Adequacy Ratio
2017
21,00%
2021
25,38%
2018
24,44%
2020
23,90%
2019
22,78%

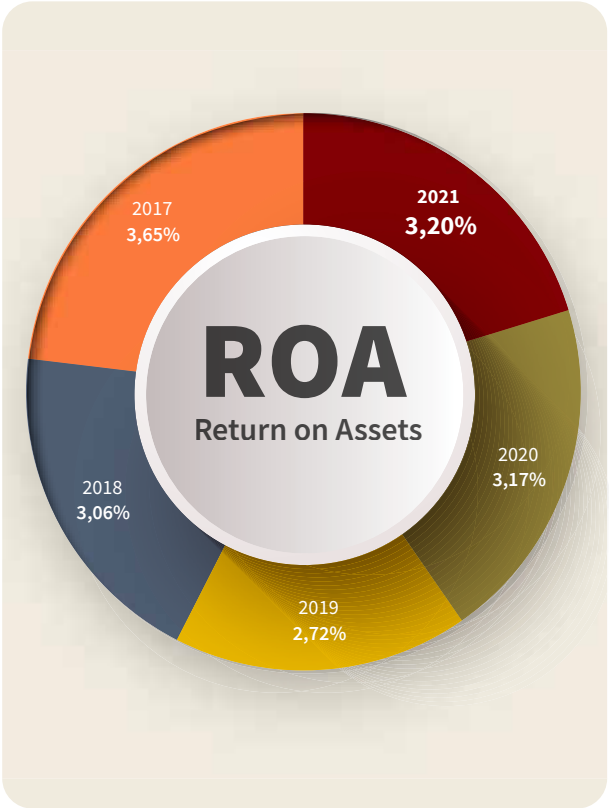
ROA
Return on Assets
2017
3,65%
2021
3,20%
2018
3,06%
2020
3,17%
2019
2,72%

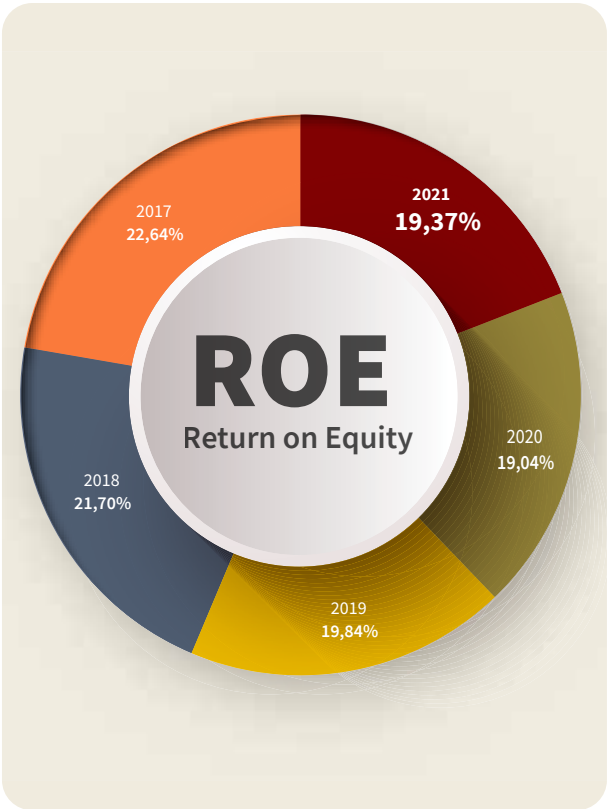
ROE
Return on Equity
2017
22,64%
2021
19,37%
2018
21,70%
2020
19,04%
2019
19,84%

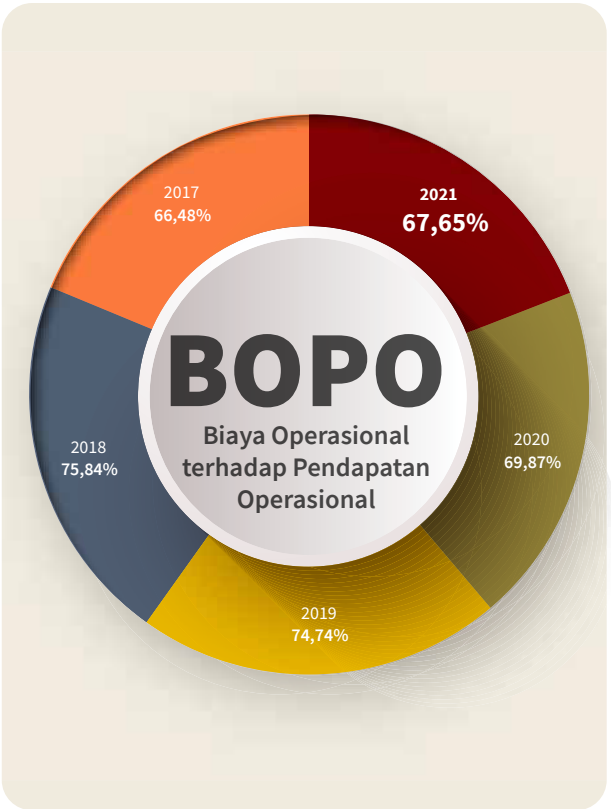
BOPO
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
2017
66,48%
2021
67,65%
2018
75,84%
2020
69,87%
2019
74,74%

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

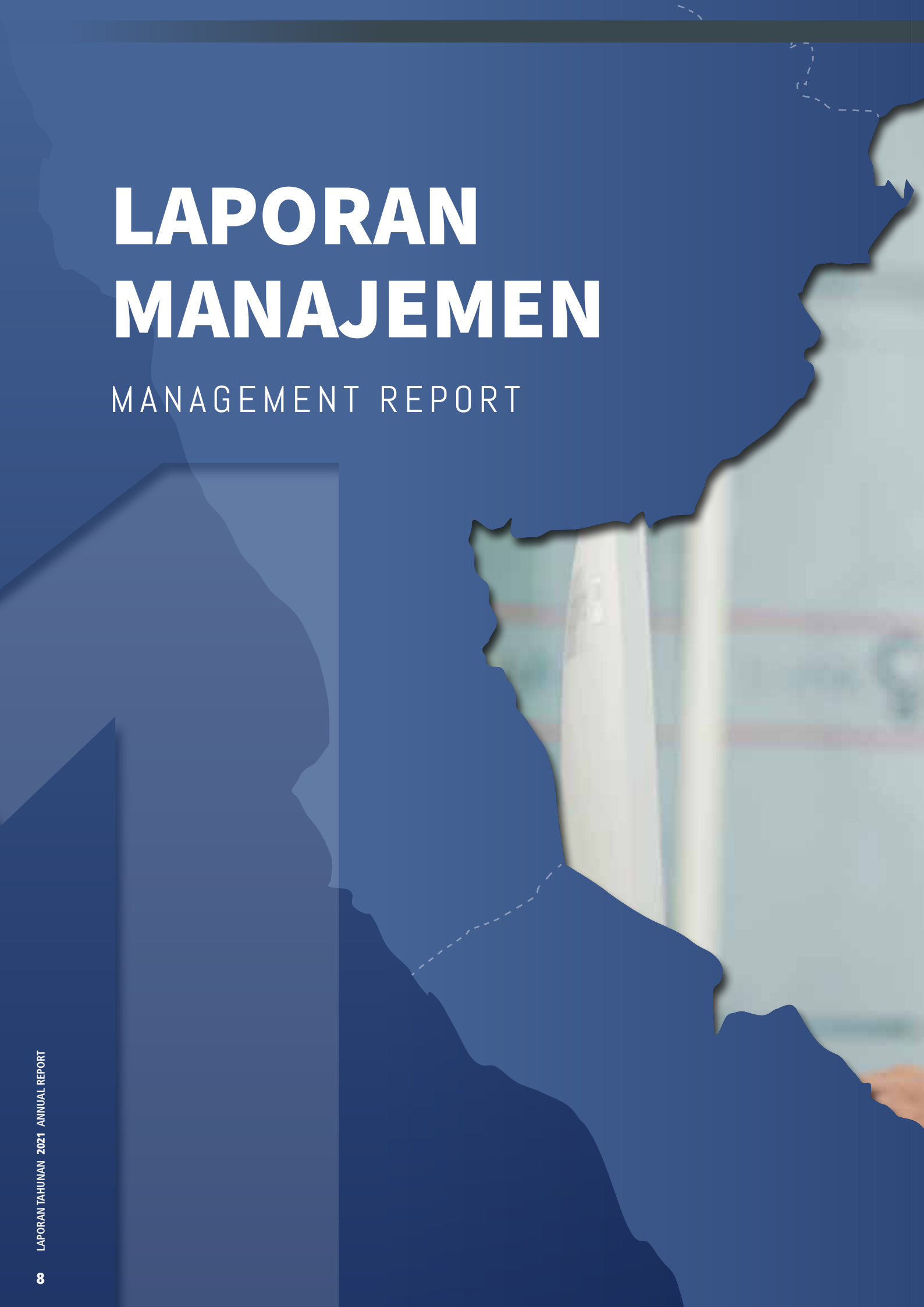

LAPORAN KOMISARIS
Commissioners Report

Dra. Emilia, M.E.
Komisaris Utama | *President Commissioner*

Dewan Komisaris senantiasa memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank Jambi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

The Board of Commissioners always ensures that the principles of Good Governance are implemented in every business activity of the Bank Jambi at all levels of the organization.

Pemegang Saham yang Terhormat,

Pertama-tama, mewakili Dewan Komisaris Bank Jambi izinkanlah kami untuk terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan PT Bank Jambi dalam menunjukkan kinerja yang baik di tengah masa pandemi COVID-19, sejalan dengan harapan seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dewan Komisaris Bank Jambi telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat yang difokuskan pada pengembangan Perseroan menjadi bank yang terkemuka dalam hal pelayanan dan kinerja.

Bank Jambi berkomitmen untuk terus memberikan layanan prima agar mampu mengubah tantangan menjadi peluang baru untuk mendukung kinerja bisnis di masa depan.

Bersama ini kami sampaikan hasil pengawasan Dewan Komisaris atas perkembangan dan pengelolaan Bank Jambi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pandangan Dewan Komisaris atas Kondisi Eksternal

Tahun 2021 masih dibayangi ketidakpastian setelah ekonomi Indonesia mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia berharap pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021 dengan prediksi pertumbuhan 3,5 hingga 4%.

Masih ada berbagai tantangan masih harus dihadapi Pemerintah, antara lain stabilitas sosial, pengangguran serta krisis di sektor riil yang berimbas pada sektor keuangan. Mengantisipasi peningkatan risiko kredit perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.

Akan tetapi, Bank Jambi menilai bahwa sejumlah peluang untuk tahun 2021 sudah mulai terlihat, antara lain penguatan nilai tukar rupiah dan pasar saham. IHSG terus bergerak naik dari level 5,400 menjadi 6.165,62 pada penutupan pasar

Dear Shareholders,

First of all, on behalf of the Board of Commissioners of Bank Jambi, please kindly allow us to express our gratitude for the presence of God Almighty so that PT Bank Jambi managed to post a good performance in the midst of the COVID-19 pandemic, in line with the expectations of all shareholders and other stakeholders.

The Board of Commissioners of Bank Jambi has performed their duties, obligations as well responsibilities within the context of supervising and advising that is focused on developing the Bank to become a leading financial institution in terms of service and performance.

Bank Jambi is committed to continuously provide excellent services and be able to turn challenges into new opportunities to support future business performance.

Hereby we would like to deliver the supervisory report of Board of Commissioners regarding the development and management of Bank Jambi for the fiscal year ended December 31, 2021.

Board of Commissioners View on External Conditions

The year 2021 is still overshadowed by uncertainty following the economic contraction Indonesia is experiencing in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Nevertheless, the Government of Indoensia expect that the economic recovery will occur in 2021 with a predicted growth of 3.5 to 4%.

There is still a number of challenges need to be addressed by the Government, including social stability, unemployment level and crises in the real sectors which have an impact on the financial sector. Anticipating the increase in bank credit risk, the Financial Services Authority issued a Regulation on National Economic Stimulus as a countercyclical policy due to the impact of the spread of COVID-19.

However, Bank Jambi views opportunities for 2021 have begun to be seen, including the strengthening of the rupiah exchange rate and the stock market. IHSG continued to move up from the level of 5,400 to 6,165.62 at the close of the market as of

per 21 Desember 2021 dan nilai tukar rupiah berada di level Rp14.130/US$.

Peluang lain timbul sehubungan dengan perubahan perilaku konsumen di masa pandemi yang memilih belanja secara *online* pada *marketplace* atau *e-commerce* karena adanya pembatasan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan di luar. Itu sebabnya, Bank Jambi harus meningkatkan infrastruktur digitalnya untuk dapat mengoptimalkan peluang usaha di era perbankan digital.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi industri perbankan secara umum saat memasuki tahun 2021 cukup banyak, meliputi: risiko kredit bermasalah terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta semakin beragamnya layanan berbasis teknologi informasi yang ditawarkan oleh bank-bank yang lebih besar.

Di sisi lain, beberapa Bank hasil merger dengan pemegang saham dari negara lain lebih cepat dalam pengembangan *digital banking.* Pertumbuhan *fintech companies* menjadi *direct disruption* bagi perbankan. Persaingan untuk pangsa kredit kecil dan mikro yang menjadi target bank skala besar dan bank asing, kini semakin ketat.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi Bank Jambi telah mengantisipasi dengan baik semua peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan strategi bisnis untuk tahun 2021.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Bisnis Direksi

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas pencapaian kinerja Bank Jambi pada tahun 2021. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum stabil seiring dengan naik turunnya kasus COVID-19 dan terjadinya gelombang varian Delta pada tahun 2021, Bank Jambi tetap dapat menjaga kinerjanya dengan baik.

Profit dari Bank Jambi didorong oleh segmen konsumer, terutama kredit ASN. Selain itu, sumber pendapatan BPD juga berasal dari UMKM dan juga tentunya Pemerintah Daerah. Namun UMKM jadi pertaruhan untuk memperkuat, karena daya tahannya di masa pandemi cukup luar biasa. Transformasi digital jadi upaya yang dilakukan untuk menjaga pasar dengan baik. Saat ini, Bank Jambi konsisten mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah untuk bangkit dari masa sulit, akibat pandemi COVID-19. BPD Jambi terus tumbuh kreatif dan mengadaptasi teknologi terkini demi kinerja dan pelayanan terbaik untuk nasabah.

Oleh sebab itu, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi Bank Jambi pada tahun 2021 secara umum telah menjalankan bisnis dengan sangat baik sesuai dengan rencana bisnis bank.

December 21, 2021 and the rupiah exchange rate was at the level of Rp14,130/US$.

Another opportunity arises in connection with changes in consumer behavior during the pandemic who opt to shop online, on a marketplace or e-commerce, as result of the social restriction imposed by the government. That is why, Bank Jambi must improve its digital infrastructure to be able to optimize business opportunities in the digital banking era.

Meanwhile, entering 2021, the banking industry in general faces a number of challenges, among others: Non-performing loan due to the sluggish economic growth, and the increasing variety of information technology-based services as offered by major banks.

On the other hand, a number of banks resulted from mergers, with foreign investor as shareholders, are able to develop digital banking faster. The growth of fintech companies has also become a direct disruption for banks. Competition for the market share of small and micro loans, which are the targets of large-scale banks and foreign banks, is now getting tougher.

The Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors of Bank Jambi has well anticipated all opportunities and challenges faced in the preparation of a business strategy for 2021.

Supervision on the Implementation of the Board of Directors' Business Strategy

The Board of Commissioners expresses appreciation to the Board of Directors for the achievement of Bank Jambi's performance in 2021. In the midst of unstable national economic conditions along with the ups and downs of COVID-19 cases and the occurrence of a wave of Delta variants in 2021, Bank Jambi can still maintain its performance well.

Profit from Bank Jambi is driven by the consumer segment, especially ASN loans. In addition, the source of BPD income also comes from MSMEs and of course the Regional Government. However, MSMEs are at stake to strengthen, because their resilience during the pandemic is quite extraordinary. Digital transformation is an effort made to maintain the market properly. Currently, Bank Jambi is consistently able to become the engine of regional economic growth to rise from difficult times, due to the COVID-19 pandemic. BPD Jambi continues to grow creatively and adapt the latest technology for the best performance and service for customers.

Therefore, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors of Bank Jambi in 2021 in general has run the business very well in accordance with the bank's business plan.

Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan

Pemerintah telah meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2022. Hal tersebut turut meningkatkan kuota penyaluran KUR yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Maka dari itu, BPD di Indonesia mengejar target KUR di tahun 2022. Berbagai strategi dipersiapkan Bank Jambi untuk mencapai target tahun ini. Salah satunya, melakukan penetrasi kepada pelaku UMKM. Berbekal pengalaman penyaluran KUR di tahun sebelumnya, Bank Jambi optimistis penyaluran KUR di tahun 2022 akan jauh lebih baik.

Sementara itu, prediksi ekonomi Indonesia 2022 menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Bank Dunia akan meningkat menjadi 5,0%-5,8%. Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah kembali positif di tahun 2021, akan terus berlanjut hingga 2022. Dengan adanya prediksi ekonomi Indonesia untuk tahun 2022 tersebut, Pemerintah Indonesia terus mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, hingga potensi pemulihan ekonomi di 2022 mendatang, dimana fungsi intermediari perbankan dapat kembali pulih, serta didukung oleh kebijakan moneter BI dan kebijakan sektor keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kondusif demi merealisasikan perekonomian Indonesia pada tahun 2022.

Momentum akselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 menjanjikan prospek bisnis yang positif bagi perbankan nasional.

View on the Company's Business Prospects

The government has increased the people's business credit (KUR) ceiling for 2022. This has also increased the KUR distribution quota carried out by Regional Development Banks (BPD). Therefore, BPD in Indonesia is pursuing the KUR target in 2022. Various strategies are prepared by Bank Jambi to achieve this year's target. One of them is to penetrate SMEs. Armed with the experience of KUR distribution in the previous year, Bank Jambi is optimistic that the distribution of KUR in 2022 will be much better.

Meanwhile, according to the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the World Bank, Indonesia's economic for 2022 is predicted to increase to 5.0%-5.8%. In addition, Bank Indonesia (BI) is also optimistic that Indonesia's economic growth, which has bounced back to positive in 2021, will continue to do so until 2022. With such prediction of the Indonesian economy for 2022, the Government of Indonesia keeps eyeing on various global and national economic dynamics, risks of uncertainty, and the potential for economic recovery in 2022. The Ministry of Finance also considers since the COVID-19 is expected to continue be under control, then the banking intermediary function will recover, supported by BI monetary policy and the Financial Services Authority (OJK) financial sector policies that are conducive to realizing the Indonesian economy in 2022.

Such momentum of accelerated recovery and economic growth in Indonesia in 2022 promises positive business prospects for national banking.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Anggota Direksi

Melalui rapat gabungan yang dilakukan secara rutin dengan Direksi, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan konsultasinya dengan memberikan masukan terkait kinerja Bank Jambi dan pelaksanaan strategi usaha di tahun 2021 agar dapat mencapai hasil terbaik di tengah situasi perekonomian yang kurang kondusif. Masukan dan nasihat tidak hanya diberikan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, namun bila perlu juga dilakukan pada momen-momen lain sesuai dengan kebutuhan.

Frequency and Method of Providing Advice to Members of the Board of Directors

Through regular joint coordination meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners has carried out its supervisory and consultative functions by providing input regarding Bank Jambi's performance and the implementation of business strategies in 2021 in order to achieve the best results amid an unfavorable economic situation. Input and advice is not only given during joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, but if necessary it is also carried out at other moments as needed.

Pandangan atas Penerapan Praktik GCG dan WBS di Perseroan

Dewan Komisaris menyadari perlunya pelaksanaan tata kelola yang baik dalam rangka meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kinerja bank dalam masa pandemi, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan

Views on the Implementation of GCG and WBS Practices in the Company

The Board of Commissioners realizes that it is necessary to implement good governance in order to improve or at least maintain bank performance during the pandemic, protect the interests of stakeholders, and improve compliance with

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Itu sebabnya, Dewan Komisaris senantiasa memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank Jambi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, baik secara langsung dalam rapat-rapat maupun secara tertulis.

laws and regulations and generally accepted ethical values in the banking industry. Therefore, the Board of Commissioners always ensures that the principles of Good Governance are implemented in every business activity of the Bank Jambi at all levels of the organization through reports submitted to the Board of Commissioners either directly in meetings or in writing.

Apresiasi

Atas nama Dewan Komisaris, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Bank Jambi.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan karyawan kami yang berdedikasi, yang mengelola pertumbuhan bisnis dan mengarahkan Bank Jambi menuju posisi yang kokoh.

Kami berharap ke depannya, Bank Jambi dapat terus mempertahankan kinerja terbaiknya dan meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, konsumen, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

Appreciation

On behalf of the Board of Commissioners, allow me to express my gratitude to the shareholders and stakeholders for the support and trust that has been given to the Bank Jambi.

We would also like to thank the Board of Directors and our dedicated employees, who managed to drive Bank Jambi's business growth and ushered it to a solid position.

We hope that going forward, Bank Jambi can continue to maintain its best performance and increase corporate value for shareholders, consumers, business partners, and all stakeholders in the future.

Jambi, 31 Maret 2022 | *March 31, 2022*
Atas Nama Komisaris | *On Behalf of the Commissioners*

Dra. Emilia, M.E.
Komisaris | *Commissioner*

PROFIL KOMISARIS
Commissioners Profile

Dra. Emilia, M.E.

Komisaris/ *Commissioner (February 2019 - Present)*

Warga Negara Indonesia, lahir di Jambi tanggal 29 Juni 1959. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi tahun 1981 dan pendidikan Pascasarjana dari Universitas Indonesia tahun 1993. Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi sejak tahun 1989 dan di Program Magister Ekonomika Pembangunan Pascasarjana Universitas Jambi sejak tahun 2005. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Pengajar di Sekolah Menengah Farmasi Jambi (1981-1986), Anggota Tim PKSP Provinsi Jambi di Bappeda Provinsi Jambi (1999-2000), Koordinator *Provincial Support* Unit Program Parul di Bappenas-UNDP (1999-2001) dan Sekretaris Jurusan IESP di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi (2000-2004).

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak periode 2011 sampai dengan 2015 dan ditunjuk kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada April 2015 hingga September 2018 dan ditunjuk sebagai Peltu Komisaris Utama pada Oktober 2018-Januari 2019. Pada Bulan Februari 2019 sampai sekarang ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Jambi.

An Indonesian citizen, born in Jambi on June 29, 1959. She finished her Bachelor Degree at Economics Faculty of Jambi University in 1981, and her Master Degree in 1993 at Indonesia University (UI). She has been a lecturer at Economics Faculty of Jambi University since 1989, and a lecturer at a Master Program in Development Economics of Jambi University since 2005. She was a teaching staff at a Pharmacy High School Jambi (1981-1986), a member of Acceleration of One Map Policy (PKSP) Team of Jambi Province at Regional Development Planning Board Jambi (1999-2000), a coordinator of Provincial Support Unit for Poverty Alleviation through Rural- Urban Linkages Program (Parul) at Regional Development Planning Board-UNDP (1999-2001), and a secretary at Economics and Development Studies (IESP) at Economics Faculty of Jambi University (2000-2004).

She was an Independent Commissioner within the period of 2011 - 2015, and was appointed again as an Independent Commissioner for PT Bank Pembangunan Daerah Jambi in April 2015 - September 2018 and appointed as Peltu President Commissioner on October 2018-January 2019. At February 2019 until present was appointed as President Commissioner of Bank Jambi.

LAPORAN DIREKSI
Board of Directors Report

Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si.
Direktur Utama | *President Director*

Bank Jambi telah membangun fondasi yang diperlukan dalam penerapan keuangan berkelanjutan di antaranya peningkatan kompetensi pejabat struktural dan *Account Officer*, melakukan kajian atas kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP), serta mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kegiatan yang mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Bank Jambi has built the necessary foundations in implementing sustainable finance, including increasing the competence of structural officers and Account Officers, conducting studies on the suitability of Standard Operating Procedures (SOP), and allocating Corporate Social Responsibility (CSR) funds for activities that support the implementation of Sustainable Finance.

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Sepanjang tahun 2021, di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, Bank Jambi terus berupaya untuk menjaga kinerja yang baik dan memberikan kontribusi positif pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama di provinsi Jambi dan sekitarnya.

Bank Jambi juga menyadari bahwa bisnis perbankan terutama sebagai BPD, tidak lagi dapat mengandalkan *captive market* seperti ASN. Ekspansi ke segmen pasar baru, dan digitalisasi menjadi kebutuhan demi memacu pertumbuhan. Bank Jambi pun harus meningkatkan infrastruktur digital untuk beradaptasi dengan tantangan perbankan di era digital. Itu sebabnya, Bank Jambi mengembangkan infrastruktur teknologi untuk mendigitalisasi operasional, produk, dan distribusi.

Tinjauan Perekonomian

Tahun lalu seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat. Bahkan banyak negara yang menerapkan *lock-down* yang memberikan konsekuensi pada perekonomian yang langsung merosot sangat tajam.

Semua negara dengan berbagai upaya stimulus maupun *countercyclical policy*-nya akan dihadapkan pada ketidakpastian. Selain munculnya varian baru, juga efektivitas dari *countercyclical policy*-nya juga sangat ditentukan oleh bagaimana perekonomian negara tersebut. Bank Jambi ikut membantu dalam meningkatkan perekonomian daerah terus mengupayakan pemulihan dan adanya *rebound* karena perekonomian harus terus kembali bergerak. Setidaknya, Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi *pre-crisis level.*

Dear Shareholders,

Throughout 2021, in the midst of the ongoing COVID-19 pandemic, Bank Jambi continued to strive to maintain good performance and make a positive contribution to the development of community welfare, especially in Jambi province and its surroundings.

Bank Jambi also realizes that the banking business, especially as BPD, can no longer rely on a captive market like ASN. Expansion into new market segments, and digitalization is a necessity to spur growth. Bank Jambi must also improve its digital infrastructure to adapt to banking challenges in the digital era. That is why, Bank Jambi has developed a technology infrastructure to digitize operations, products and distribution.

Economic Overview

Last year, the whole world has to face an economic downturn causing a very severe economic contraction as almost all countries imposed strict mobility restrictions. In fact, many countries have implemented lockdowns which have consequences on the economy which immediately declines very sharply.

All countries with various stimulus efforts and their countercyclical policies will be faced with uncertainty. In addition to the emergence of new variants, the effectiveness of the countercyclical policy is also very much determined by how the country's economy is. Bank Jambi is helping to improve the regional economy, continuing to seek recovery and a rebound because the economy must continue to move. At least, the Indonesian economy with various steps taken by the government has succeeded in reaching beyond the pre-crisis level.

Merebaknya pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa rentannya rantai pasok global saat menghadapi disrupsi. Disrupsi rantai pasok ini kemudian membawa dampak pada stagnasi ekonomi dan peningkatan inflasi di sejumlah negara.

Di Indonesia, salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat ini adalah dengan memberi dukungan interkoneksi rantai pasok secara digital. Saling terhubungnya rantai pasok dengan faktor-faktor pendukung tersebut diyakini dapat berperan meningkatkan utilitas industri manufaktur dalam negeri.

Sementara itu, akselerasi pemberian vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh banyak negara telah memberikan dampak positif bagi keberlanjutan proses pemulihan ekonomi dengan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global yang terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan dunia dan menurunnya angka pengangguran di mayoritas negara anggota G20.

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan perekonomian global tumbuh di level 5,9% pada tahun 2021. Selain itu, IMF juga memprediksi bahwa pemulihan ekonomi dunia tersebut juga berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada negara maju, dimana negara berkembang justru mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata negara maju.

Pulihnya aktivitas ekonomi tercermin pada perkembangan beberapa indikator dini yang menunjukkan perbaikan, antara lain *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur pada Oktober 2021 yang berada pada zona ekspansif di level 57,2, meningkatnya mobilitas penduduk, indeks belanja masyarakat, penjualan kendaraan bermotor, penjualan semen, serta konsumsi listrik sektor industri dan bisnis. Sementara itu, laju inflasi terkendali di level 1,60% (yoy).

Pemerintah Indonesia juga terus mempercepat penyaluran vaksinasi COVID-19 untuk melindungi masyarakat dari penularan virus. Dampak gencarnya vaksinasi COVID-19 serta penerapan aturan protokol kesehatan yang ketat, membuat momentum pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik di sepanjang tahun 2021.

Perkembangan indikator ekonomi pada Desember 2021 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 3,2-4,0%, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus COVID-19 perlu terus diwaspadai.

The outbreak of the COVID-19 pandemic has shown how vulnerable global supply chains are in the face of disruption. This supply chain disruption then led to economic stagnation and increased inflation in a number of countries.

In Indonesia, one of the government's strategic undertakings to encourage the current national economic recovery (PEN) is to provide digital support for supply chain interconnection. The interconnectedness of the supply chain with these supporting factors is believed to increase the utility of the domestic manufacturing industry.

Meanwhile, the acceleration of the COVID-19 vaccination carried out by many countries has had a positive impact on the ongoing process of economic recovery by encouraging an increase in global economic activity which is reflected in the increase in world trade activity and also from the decline in unemployment in the majority of the G20 member countries.

International Monetary Fund (IMF) projected the global economy to grow at the level of 5.9% in 2021. In addition, the IMF also predicted that the world economic recovery will also take place in a more balanced way, not only relying on developed countries, in the way that developing countries will experience higher growth than the average developed countries.

The recovery in economic activity is reflected in the growth of several early indicators, which have shown some improvement, including the manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) in October 2021 which was in the expansion zone at 57.2, increased population mobility, the public spending index, sales motor vehicles, cement sales, as well as electricity consumption in the industrial and business sectors. Meanwhile, the inflation rate was under control at 1.60% (yoy).

The Indonesian government also continues to accelerate the distribution of COVID-19 vaccinations to protect the public from transmission of the virus. The impact of the incessant COVID-19 vaccination, as well as the implementation of strict health protocols, has made the momentum for Indonesia's economic recovery to be well maintained throughout 2021.

Developments in economic indicators in December 2021 indicate an acceleration of the recovery process, including community mobility, retail sales, and consumer confidence. Overall, economic growth in 2021 is predicted to remain in the range of 3.2-4.0%, amid maintained government fiscal spending and exports, although the risk of an increase in COVID-19 cases requires continued vigilance.

Kinerja Industri Perbankan Indonesia pada Tahun 2021

Peluang Industri perbankan di Indonesia menunjukkan perbaikan kinerja hingga kuartal ketiga setelah tertekan akibat PPKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia mencatatkan kredit perbankan di Indonesia naik 2,21% *year on year* (yoy) per September 2021. Kualitas kredit perbankan di Indonesia terus membaik tercermin dari rasio kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) di level 3,22% di September 2021. Padahal di Agustus dan Juli 2021 stagnan di level tertinggi 3,35%.

Dengan demikian, salah satu tantangan industri perbankan di tahun yang akan datang adalah bagaimana cara menyesuaikan kemajuan teknologi di era globalisasi yang semakin berkembang pesat, khususnya Bank Pembangunan Daerah dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut karena masyarakat yang lebih tertarik dengan sesuatu yang memanfaatkan teknologi dan serba praktis.

Secara umum, kinerja perbankan nasional mengalami perbaikan di tahun 2021. Penghimpunan dana dan penyaluran kredit telah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan ketahanan permodalan yang memadai. Berdasarkan data publikasi dari regulator, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri perbankan pada September 2021 berada di level 25,24% (Juni 2021: 24,33%), jauh di atas *threshold*. Namun, kinerja industri perbankan Indonesia di tahun 2021 juga menghadapi tantangan, yaitu tantangan terhadap daya tahan perbankan dalam menyerap kerugian (CKPN) sebagai dampak dari restrukturisasi kredit dan tantangan terhadap perubahan perilaku masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Performance of the Indonesian Banking Industry in 2021

Opportunities in the banking industry in Indonesia showed an improvement in performance as of the third quarter after being under pressure due to PPKM. The Financial Services Authority (OJK) of the Republic of Indonesia recorded that banking credit in Indonesia rose 2.21% year on year (yoy) as of September 2021. The quality of banking credit in Indonesia continues to improve, as reflected in the ratio of bad loans or non-performing loans (NPL) at 3.22% in September 2021. Whereas in August and July 2021 it was stagnant at the highest level of 3.35%.

Thus, one of the challenges of the banking industry in the coming year is how to adapt technological advances in the era of globalization which is growing rapidly, especially Regional Development Banks can keep pace with these technological advances because people are more interested in something that uses technology and is all practical.

In general, the performance of the national banking system will improve in 2021. Fundraising and lending has shown a positive growth trend with adequate capital resilience. Based on published data from the regulator, the Capital Adequacy Ratio (CAR) of the banking industry in September 2021 was at the level of 25.24% (June 2021: 24.33%), well above the threshold. However, the performance of the Indonesian banking industry in 2021 also faces challenges related to its resilience in absorbing losses (CKPN) as a result of credit restructuring and challenges to changes in people's behavior due to the COVID-19 pandemic.

Tantangan dan Peluang yang Mempengaruhi Bisnis Bank Jambi pada Tahun 2021

Pandemi COVID-19 menyebabkan turbulensi keuangan pada seluruh aspek ekonomi di Indonesia, tidak terkecuali industri perbankan. Bank merupakan lembaga yang *core business*-nya sangat tergantung pada kinerja seluruh industri atau entitas ekonomi karena berperan sebagai salah satu penyedia sumber kapital terbesar untuk entitas ekonomi. Tantangan selanjutnya bagaimana kita dapat terlepas dari krisis pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Industri Perbankan, khususnya Bank Jambi, harus dapat terus berinovasi dalam berperan sebagai garda terdepan perbaikan perekonomian yang terdampak pandemi.

Di samping itu Bank juga harus melakukan *monitoring* secara intensif untuk debitur-debitur yang kreditnya direstrukturisasi karena usahanya terdampak pandemik COVID-19. Bank harus dapat menilai keberlangsungan usaha debitur dan membuat pencadangan yang memadai.

Prospek Industri Perbankan pada Tahun 2022

Memasuki tahun 2022, Bank Jambi menilai melihat bahwa pertumbuhan ekonomi masih akan menghadapi beberapa tantangan eksternal dan internal, antara lain inflasi yang diperkirakan akan naik karena meningkatnya harga komoditas dan bahan bakar.

Perbankan nasional diperkirakan akan tumbuh secara moderat, baik dari sisi pendanaan maupun kredit. Di samping itu, perhatian terhadap kualitas dari aset produktif menjadi hal yang sangat penting di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Dana pihak ketiga dan kredit industri diperkirakan masih tumbuh moderat sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi, dengan kondisi likuiditas perbankan yang diperkirakan masih cukup baik.

Diperkirakan target pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 5% akan tumbuh moderat sejalan dengan proses pemulihan ekonomi yang berlangsung secara bertahap. Perkembangan dari virus Corona juga diperkirakan akan memberi tekanan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, terutama pada semester pertama 2022.

Digitalisasi menjadi kunci pertumbuhan bisnis Bank di tahun-tahun yang akan datang. Sebagian besar nasabah yang kini telah terbiasa menggunakan beragam *platform* berbasis digital, akan terus bergantung kepada layanan tersebut, meskipun kelak pandemi COVID-19 telah berakhir. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi perbankan selain terus berinovasi dan mendigitalisasi proses bisnisnya, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan nasabah di era digital.

Sejatinya, tren digitalisasi bukanlah hal baru bagi sebagian perbankan yang telah melakukan transformasi digital

Challenges and Opportunities That Affect Bank Jambi's Business Growth in 2021

The COVID-19 pandemic has caused financial turbulence in all aspects of the economy in Indonesia, including the banking industry. Banks are institutions whose core business is highly dependent on the performance of all industries or economic entities because they act as one of the largest providers of capital sources for economic entities. The next challenge is how we can escape the current COVID-19 pandemic crisis. The banking industry, especially Bank Jambi, must be able to continue to innovate in its role as the front line in improving the economy affected by the pandemic.

In addition, the Bank must also carry out intensive monitoring for debtors whose loans were restructured because their businesses were affected by the COVID-19 pandemic. The Bank must be able to assess the sustainability of the debtor's business and make adequate reserves.

Prospects of the Banking Industry in 2022

Entering 2022, Bank Jambi noted that economic growth will still face several external and internal challenges, including inflation which is expected to rise due to rising commodity and fuel prices.

National banking is expected to grow moderately, both in terms of funding and credit. In addition, attention to the quality of productive assets becomes very important in the midst of an economic condition that has not yet fully recovered. Third party funds and industrial loans are predicted to maintain moderate growth in line with expectations of economic growth, with banking liquidity conditions expected to remain quite good.

It is estimated that Indonesia's economic growth target of 5% will grow moderately in line with the gradual process of economic recovery. The development of the Corona virus is also expected to put pressure on global and Indonesian economic growth, especially in the first half of 2022.

Digitalization is the key to the Bank's business growth in the years to come. Most customers who are now accustomed to using various digital-based platforms will continue to depend on these services, even though the COVID-19 pandemic will end. Therefore, banks have no other choice but to continue to innovate and digitize their business processes, so that they remain relevant to customer needs in the digital era.

Indeed, the trend of digitization is not new for some banks that have carried out digital transformation long before the

jauh sebelum pandemi. Digitalisasi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan bisnis yang bisa diandalkan.

Strategi Bank Jambi dalam Beradaptasi di Era Digital

Perbankan digital di Indonesia sudah sangat baik, hal ini menguat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 /POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, pengertian *digital banking* atau perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan *(customer experience),* serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan. Dengan kata lain, layanan perbankan digital memungkinkan calon nasabah atau nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan *(financial advisory),* investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik *(e-commerce),* dan kebutuhan lainnya dari nasabah Bank. Layanan tersebut dapat diakses melalui *smartphone* yang telah ditambahkan sistem aplikasi perbankan sepanjang terhubung dengan jaringan internet.

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital di era revolusi industri 4.0 ini, pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun lalu turut mendorong percepatan transformasi digital perbankan. Pandemi virus Corona yang disertai pembatasan mobilisasi orang atau aktivitas fisik memaksa masyarakat harus beradaptasi dan perlahan melakukan transaksi ekonomi melalui *platform* daring (dalam jaringan/ *online*) atau digital. Transaksi-transaksi yang awalnya banyak dilakukan di kantor cabang saat ini dilakukan secara digital atau *online* melalui *mobile banking, internet banking,* ataupun *call center* yang digerakkan oleh *artificial intelligence.*

Menilik strategi Bank Pembangunan Daerah di masa pandemi, pentingnya bagi BPD untuk mendorong transformasi termasuk sektor digital. Inilah yang menjadi tugas utama BPD Jambi agar terus dapat bersaing dalam digitalisasi. Dimana perkembangan teknologi menuntut BPD untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar terhadap digitalisasi layanan perbankan. Selain itu, BPD juga harus meningkatkan manajemen risiko yang diiringi oleh pengembangan kualitas SDM agar mampu menjaga eksistensi BPD. BPD harus bisa masuk ke bisnis yang dilakukan oleh bank umum lainnya sehingga BPD juga bisa ikut meningkatkan penyaluran pembiayaan di berbagai sektor.

pandemic. Digitalization is expected to be a reliable driver of business growth.

Bank Jambi's Strategy in Adapting to the Digital Age

Digital banking in Indonesia has shown a very good progress strengthened by the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks, digital banking is defined as electronic banking services developed by optimizing utilization of customer data in order to serve customers more quickly, easily, and according to needs (customer experience), and can be carried out completely independently by customers, taking into account security aspects. In other words, digital banking services allow prospective customers or Bank customers to obtain information, communicate, register, open accounts, banking transactions, and close accounts, including obtaining other information and transactions outside of banking products, including financial advisory, investment, electronic-based trading system transactions (e-commerce), and other needs of the Bank's customers. These services can be accessed via smartphones that have added a banking application system as long as they are connected to the internet network.

Along with the development of digital technology in the era of the industrial revolution 4.0, the COVID-19 pandemic which started last year has helped accelerate the acceleration of banking digital transformation. The Corona virus pandemic, accompanied by restrictions on the mobilization of people or physical activity, forces people to adapt and slowly carry out economic transactions through online (network/online) or digital platforms. Transactions that were initially carried out at branch offices are now carried out digitally or online through mobile banking, internet banking, or call centers driven by artificial intelligence.

Looking at the Regional Development Bank's strategy during the pandemic, it is important for BPD to encourage transformation, including the digital sector. This is the main task of BPD Jambi in order to continue to compete in digitalization. Where technological developments require BPD to adapt to market needs for digitizing banking services. In addition, the BPD must also improve risk management accompanied by the development of the quality of human resources in order to be able to maintain the existence of the BPD. BPD must be able to enter the business carried out by other commercial banks so that BPD can also participate in increasing the distribution of financing in various sectors.

Penerapan GCG pada Tahun 2021

Pelaksanaan GCG dilakukan sebagai dukungan bagi kelangsungan bisnis bank serta meminimalisasi risiko-risiko yang dihadapinya. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sepanjang tahun 2021, Bank Jambi senantiasa menerapkan penerapan prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance*-GCG) di seluruh jenjang organisasi di Bank Jambi, dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai dengan pekerjanya.

Bank Jambi menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Penyempurnaan kualitas penerapan tata kelola perusahaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan nasional dan praktik international seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, ASEAN *Corporate Governance Scorecard* serta memperhatikan praktik-praktik terbaik *(the best practices)* di industri perbankan.

Bank Jambi juga senantiasa membangun komunikasi aktif dengan para nasabah, regulator dan komunitas pasar modal yang mendukung transparansi dengan para pemangku kepentingan tersebut. Bank Jambi memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja di Bank Jambi serta menerapkan prinsip *check and balance* guna menjalankan sistem pengendalian internal yang baik.

Komitmen Bank Jambi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Komitmen Bank Jambi dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan merupakan tanggung jawab terhadap seluruh *stakeholders* secara berkesinambungan, terutama komunitas masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasional Bank. Bank Jambi telah membangun fondasi yang diperlukan dalam penerapan keuangan berkelanjutan di antaranya peningkatan kompetensi pejabat struktural dan *Account Officer,* melakukan kajian atas kesesuaian *Standar Operasional Prosedur* (SOP), serta mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kegiatan yang mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan. Fondasi tersebut diperlukan dalam pelaksanaan penerapan keuangan berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk tumbuh bersama menuju keberlanjutan.

Bank Jambi senantiasa memegang komitmen dalam penerapan prinsip keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola di dalam organisasi.

Implementation of GCG in 2021

The implementation of GCG is carried out as a support for the continuity of the bank's business as well as minimizing risks. In the midst of slowing economic growth as a result of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic throughout 2021, Bank Jambi continues to implement the principles and practices of Good Corporate Governance (GCG) at all levels of the organization at Bank Jambi, from the Board of Commissioners, the Board of Directors, the management to the employees.

Bank Jambi implements good corporate governance based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Improvements in the quality of the implementation of corporate governance are carried out by taking into account national regulations and international practices, such as regulations by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, the ASEAN Corporate Governance Scorecard and by taking into account the best practices in the banking industry.

Bank Jambi builds active communication with customers, regulators and the capital market community that supports transparency with these stakeholders. Bank Jambi ensures a clear division of tasks and responsibilities between work units at Bank Jambi and applies the principle of checks and balances to implement a good internal control system.

Bank Jambi's Commitment Regarding the Implementation of Sustainable Finance

The commitment of Bank Jambi in supporting the implementation of sustainable finance is the responsibility of all stakeholders on an ongoing basis, especially the community around the Bank's work and operational areas. Bank Jambi has built the necessary foundations in implementing sustainable finance, including increasing the competence of structural officers and Account Officers, conducting studies on the suitability of Standard Operating Procedures (SOP), and allocating Corporate Social Responsibility (CSR) funds for activities that support the implementation of Sustainable Finance. This foundation is needed in implementing the implementation of sustainable finance whose goal is to grow together towards sustainability.

Bank Jambi is always committed to implementing sustainable finance principles that integrate environmental, social and governance aspects within the organization.

Penutup

Pada kesempatan ini, mewakili seluruh anggota Direksi Bank Jambi, izinkan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan, dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas kerja sama dan masukan-masukannya yang sangat berharga bagi kami.

Kepada seluruh karyawan Bank Jambi, saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang mereka berikan.

Kepada seluruh mitra kerja, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan kepada Bank Jambi.

Ke depannya, Direksi berharap Bank Jambi dapat terus menjadi bagian penting dan berkontribusi lebih besar lagi dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Closing

On this occasion, on behalf of all members of the Board of Directors of Bank Jambi, please allow me to express my gratitude to all Shareholders for their trust, and to all members of the Board of Commissioners for their cooperation and invaluable inputs for us.

To all Bank Jambi employees, I would also like to express my highest appreciation for the dedication they have given.

To all business partners, customers, and other stakeholders, I thank you profusely for the support given to Bank Jambi.

In the future, the Board of Directors hopes that Bank Jambi will continue to be an important part and contribute even more in supporting Indonesia's economic recovery and the development of community welfare.

Jambi, 31 Maret 2022 | *March 31, 2022*
Atas Nama Direksi | *On Behalf of the Board of Director*

Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si.
Direktur Utama | *President Director*

Drs. H. Pauzi Usman
Direktur Operasional
Director of Operations

H. Khairul Suhairi, S.E.
Direktur Pemasaran & Syariah
Director of Marketing & Sharia

Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si.
Direktur Utama
President Director

Hj. Riza Roziani, S.E.
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

PROFIL DIREKSI
Board of Directors Profile

Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si.
Direktur Utama
President Director

Lahir pada tanggal 8 Desember 1964 di Malang. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Negeri Jambi pada tahun 1989 dan gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998. Mengikuti berbagai pelatihan, terakhir dengan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV pada tahun 2015. Posisi yang pernah dijabat di Bank Jambi, antara lain sebagai Pelaksana Seksi Keuangan dan Akuntansi (1993-1994), Pelaksana Seksi Supervisi Kredit (1994-1995), Kepala Seksi Kas Daerah (1998-1999), Pelaksana Tugas Kepala Bagian Personalia (1999-2002), Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan (2005-2007), Kepala Bagian Perencanaan (2007-2008), Kepala Bidang *Risk Management* (2008-2009), Kepala Bidang Pemasaran dan Produk Dana (2009-2012), Pemimpin Cabang Muara Sabak (2012-2014), Kepala Divisi *Branch Banking* (2014-2015), hingga ditunjuk sebagai Direktur Pemasaran dan Syariah pada Januari 2016 untuk periode 2016-2020. Beliau meraih gelar Doktor dari Universitas Negeri Jambi pada bulan Desember 2017. Sertifikasi *Treasury Dealer* dan Syariah Level *Advance* tahun 2018. Diangkat menjadi Direktur Utama sejak Maret 2020 sampai sekarang.

Born in December 8, 1964 in Malang. He attained his bachelor degree at Jambi University in 1989, and his master's degree at Gadjah Mada University in 1998. He attended various trainings, with the latest being the Certification of Risk Management IV (2015). Following are the positions he ever took and is taking at Bank Jambi: Executive in Financial and Accounting Section (1993-1994), Executive of Credit Supervision Section (1994-1995), Head of Regional Cash Section (1998-1999), Acting Head of Personalia Division (1999-2002), Head of Research and Development Section (2005-2007), Head of Planning Division (2007-2008), Head of Risk Management Division (2008-2009), Head of Marketing and Fund Products Division (2009-2012), Leader of Muara Sabak Branch (2012-2014), Head of Branch Banking Division (2014-2015), Director of Marketing and Sharia (January 2016-2020). He attained his doctorate degree in December 2017. Certificates of Treasury Dealers and Sharia Level Advance in 2018. Serving as President Director since March 2020 until now.

Drs. H. Pauzi Usman
Direktur Operasional
Director of Operations

Lahir di Jambi, tanggal 26 April 1961. Lulusan pendidikan S1 dari Universitas Jambi pada tahun 1989. Jabatan yang pernah diduduki antara lain pada tahun 1994 sebagai Kepala Seksi Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) di Cabang Kuala Tungkal, Kepala Seksi Kepala Unit Administrasi dan Keuangan Cabang Sei. Penuh pada tahun 1995, Wakil Kepala Cabang Ma. Bungo pada tahun 1997, Pemimpin Cabang Ma. Bungo pada tahun 2000, Pemimpin Cabang Bangko pada tahun 2001, Pemimpin Bidang Dana dan Jasa di Kantor Pusat pada tahun 2003, Pemimpin Cabang di Kantor Cabang Sutomo pada tahun 2008, Pjs. Kepala Divisi TI pada 2011, Pemimpin Kantor Cabang Utama pada tahun 2011-2017, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional Bank Jambi periode 2017-2021.

Born in Jambi, April 26, 1961. A bachelor from Jambi University, graduating in 1989. Following are the positions he ever took and is taking Head of Administration Unit and Finance at Branch Office Kuala Tungkal (1994), Head of Administration Unit and Finance at Branch Office Sei. Penuh (1995), Vice Head of Branch Office Ma. Bungo (1997), Leader of Branch Ma. Bungo (2000), Leader of Branch Office Bangko (2001), Leader of Fund and Service Division at Head Office (2003), Leader of Branch Office Sutomo (2008), Ad Int. Head of IT Division (2011), Leader of Main Branch Office (2011- 2017), and Director of Operations Bank Jambi 2017-2021.

Hj. Riza Roziani, S.E.
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Lahir di Jakarta, tanggal 26 Mei 1967. Lulusan pendidikan S1 dari Universitas Jambi dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1990. Jabatan yang pernah diduduki pada tahun 2005 sebagai Kepala Bidang Kepatuhan dan Peraturan, Pemimpin Cabang di Kantor Cabang Muara Bulian pada tahun 2010, Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada tahun 2012, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia pada tahun 2013, Menjadi Kepala Divisi Dana pada tahun 2016 yang kemudian berubah nama menjadi Divisi *Treasury* dan Dana, saat ini menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank Jambi periode 2017-2021.

Born in Jakarta, May 26, 1967. An Economy Bachelor of Jambi University, graduating in 1990. Following are the positions she ever took and is taking Head of Compliance and Regulation Division (2005), Leader of Branch Office Muara Bulian (2010), Head of Compliance and Risk Management Division (2012), Head of Human Resource Division (2013), Head of Treasury and Fund Division (2016), Funding Division and Director of Compliance of Bank Jambi (2017-2021).

H. Khairul Suhairi, S.E.
Direktur Pemasaran & Syariah
Director of Marketing & Sharia

Lahir di Pauh, tanggal 12 Agustus 1970. Lulusan pendidikan S1 dari Universitas Jambi dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1994. Jabatan yang pernah diduduki pada tahun 2011 sebagai Kepala Pemasaran Kantor Cabang Syariah, Pemimpin Cabang di Muaro Bungo pada tahun 2012, Kepala Divisi Kredit Produktif pada tahun 2017, Kepala Divisi Kredit Kredit Konsumtif pada tahun 2018, menjadi Pimpinan Divisi Kredit pada tahun 2020, saat ini menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Syariah Periode 2020-2024.

Born in Pauh, August 12, 1970. An Economy Bachelor of Jambi University, graduating in 1994. Following are the position he ever took and is taking Head Marketing of Sharia Branch Office (2011), Leader of Branch Office Muaro Bungo (2012), Head of the Productive Credit Division (2017), Head of the Consumptive Credit Division (2018), Head of Credit Division (2020), currently serves as Director of Marketing and Sharia (2020-2024).

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

NAMA PERUSAHAAN *Name of Company*	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi)
STATUS PERUSAHAAN *Company's Status*	Badan Usaha Pemerintah Daerah Non Devisa *Non-Foreign Exchange Regional Government Business Entity*
BIDANG USAHA *Line of Business*	Industri Perbankan *Banking Industry*
SEGMEN USAHA *Business Segments*	- Perbankan Konvensional/*Conventional Banking* - Perbankan Syariah/*Sharia Banking*
KEPEMILIKAN *Ownership*	- Provinsi Jambi 22,49%/*Jambi Province 22.49%* - Pemerintah Kota Provinsi Jambi 16,54%/*Municipal Government of Jambi Province 16.54%* - Pemerintah Kabupaten Provinsi Jambi 60,42% /*Regency Government in Jambi Province 60.42%* - Koperasi Bank Jambi 0,55%/ *Bank Jambi Cooperative 0.55%*
TANGGAL PENDIRIAN *Date of Establishment*	12 Februari 1959/*February 12, 1959*
DASAR HUKUM PENDIRIAN *Legal Basis for Establishment*	Akta No. 37 tanggal 4 Oktober 1991 yang disempurnakan dengan Akta No. 122 tanggal 20 November 1991 *Deed No. 37 dated October 4, 1991 enhanced with Deed No. 122 dated November 20, 1991*
MODAL DASAR *Authorized Capital*	Rp3.000.000.000.000
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH *Issued and Fully-Paid Capital*	Rp770.816.500.000
JUMLAH KARYAWAN *Number of Employees*	633 orang/*people*
ALAMAT KANTOR PUSAT *Head Office*	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Telanaipura Jambi 36122, Indonesia Telepon : (+62-741) 60416, 60665 Faksimile : (+62-741) 64882 E-mail : bankjambi@bankjambi.co.id Website : www.bankjambi.co.id
JARINGAN *Network*	1 Kantor Pusat/*Head Office* 1 Kantor Cabang Utama/*Main Branch Offices* 11 Kantor Cabang Konvensional/*Conventional Branch Offices* 1 Cabang Syariah/*Sharia Branch Office* 41 Layanan Syariah/*Sharia Services* 30 Cabang Pembantu Konvensional/*Conventional Sub Branch Offices* 2 Cabang Pembantu Syariah /*Sharia Sub Branch Offices* 9 Kantor Fungsional/*Functional Offices* 14 *Payment Point/Payment Points* 131 ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/*Automated Teller Machine*
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG *Supporting Profession and Institution*	Kantor Akuntan Publik/*Public Accounting Firm* Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali Menara Kuningan 11th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940 - Indonesia
NOTARIS *Notary*	Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn. Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 2 Jambi 36112 - Indonesia

BANK JAMBI "THE BEST" TAHUN 2021

Bank Jambi is "The Best" in 2021

Laba Naik, LDR Pecah Rekor & Gedung Baru

Ditengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir serta belum pulihnya beberapa sektor usaha; perdagangan, retail, industri, transportasi, serta sektor usaha mikro, Bank Jambi tetap menunjukkan performa maksimal. Dari total realisasi indikator kinerja dibandingkan target 2021 rata-rata tercapai 100%.

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2021 tanggal 3 Februari 2022 atas pengesahan Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Direktur Utama Bank Jambi Dr. H. Yunsak El Halcon. S.H., M.Si., di dampingi oleh Komisaris Utama, Dra. Hj. Emilia Hamzah, M.E., Direktur Operasional Drs. H. Fauzi Usman, Direktur Kepatuhan H. Riza Roziani, S.E., Direktur Pemasaran dan Syariah H. Khairul Suhairi, S.E. menjelaskan bahwa Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dalam laporannya tanggal 2 Februari 2022 disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Profits increase, LDR Breaks Records & New Building

In the midst of the COVID-19 pandemic which is still looming and several business sectors have not yet recovered; trade, retail, industry, transportation, and micro business sectors, Bank Jambi managed to show maximum performance. with the total realization of performance indicators compared to the 2021 target 100% on average.

Based on the General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021 dated February 3, 2022 on the ratification of the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dated December 31, 2021 and for the year ended on that date, the President Director of Bank Jambi Dr. H. Yunsak El Halcon. S.H., M.Si., accompanied by the President Commissioner, Dra. Hj. Emilia Hamzah, M.E., Director of Operations Drs. H. Fauzi Usman, Compliance Director H. Riza Roziani, S.E., Marketing and Sharia Director H. Khairul Suhairi, S.E. stated that the Financial Statements have been audited by Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali in their report dated February 2, 2022 presented fairly, in all material respects, financial position, financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Dalam jutaan Rupiah/*In million rupiah*

POS/*POST*	REALISASI/*REALIZATION*		PERTUMBUHAN/ *GROWTH*
	2020	2021	(YOY)
Aset/*Asset*	11.389.694	**13,116,343**	15,16%
DPK/*Third Party Fund*	9,385,842	**10,599,623**	12,93%
Kredit/*Loan*	8,494,626	**8,976,066**	5,67%
Modal Setor/*Paid-up Capital*	768,317	**770.817**	0,33%
Laba Bersih/ *Nett Income*	275,813	**314,154**	13,90%
BOPO/ *Operating Cost to Operating Income*	69,83	**67,65**	(3,12%)
LDR/ *Loan to Deposit Ratio*	90,51	**84,68**	(6,44%)

Dari sisi profitabilitas Bank Jambi, Direktur Utama Yunsak El Halcon menjelaskan bahwa pencapaian laba signifikan, di mana laba setelah pajak akhir 2021 meningkat 13,90% (yoy) menjadi sebesar Rp314,154 miliar, cukup jauh di atas rata-rata pertumbuhan laba perbankan nasional yang hanya mencapai 9,68%. Pertumbuhan ini sebagai wujud keberhasilan Bank Jambi dalam meningkatkan CASA (dana murah) yang komposisinya mencapai 49,07% dari total dana dan program efisiensi biaya yang tercermin dari penurunan BOPO (perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional) menjadi sebesar 67,65% (yoy).

In terms of profitability of Bank Jambi, President Director Yunsak El Halcon explained that the Bank posted a significant profit, where profit after tax at the end of 2021 increased by 13.90% (yoy) to Rp314.154 billion which only reached 9.68%. This growth is a manifestation of Bank Jambi's success in increasing CASA (low-cost funds) whose composition reached 49.07% of total funds and cost efficiency programs as reflected in the decrease in BOPO (comparison of operating costs to operating income) to 67.65% (yoy).

Selain profitabilitas, indikator kinerja yang bisa dilihat adalah *Loan to Funding Ratio (Loan to Deposit Ratio)* Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai risiko likuiditas yaitu *loan to deposits ratio* (LDR) yang merupakan rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.

In addition to profitability, another performance indicator to observe is the Loan to Funding Ratio (Loan to Deposit Ratio). One of the ratios used to assess liquidity risk is the loan to deposits ratio (LDR), which is the ratio between the total volume of loans disbursed by banks and the amount received from various sources.

Tahun 2021, *Loan to Funding Ratio* (LDR) Bank Jambi pecah rekor mencapai 84,68%, angka ini jauh di atas rata-rata LDR perbankan nasional yang hanya sebesar 78,04%. Capaian ini tentu saja mengambarkan kerja keras bank Jambi dalam menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat.

In 2021, Bank Jambi's Loan to Funding Ratio (LDR) recorded an unprecedented record high, reaching 84.68%, far above the national average LDR of only 78.04%. This achievement of course illustrates the hard work of the Jambi bank in raising funds and distributing them back to the community.

Selain itu, aset Bank Jambi secara YoY juga tumbuh signifikan, yakni sebesar 15,16% salah satunya ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 5,67%, di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 4,17%. Begitupula dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 12,93% (YoY) masih di atas rata-rata perbankan yang hanya berkisar 9,6%.

In addition, Bank Jambi's assets also grew significantly YoY, amounting to 15.16%, one of which was supported by credit growth of 5.67%, above the national average of only 4.17%. Likewise, the growth of Third Party Funds of 12.93% (YoY) was still above the banking average of only 9.6%.

Mahligai 9 (Sembilan) Berasal dari kata Mahligai (KBBI) yang mempunyai arti ruang atau tempat kediaman raja/putra-putri raja dalam lingkungan istana atau di tengah taman berdiri bangunan yang indah, sedangkan 9 (sembilan)

Mahligai 9 (Nine), comes from the word Mahligai (KBBI) which means the room or residence of the king/the king's sons and daughters in a palace environment or in the middle of a garden stands a beautiful building, while 9 (nine) is taken from

diambil dari semboyan Provinsi Jambi, yaitu Sepucuk Jambi 9 (Sembilan) Lurah. Angka 9 juga dijadikan sebagai logo Bank Jambi yang berwarna merah *maroon* memiliki arti Ekspresi semangat berkarya, semangat perjuangan & produktivitas, *Orange* adalah Ekspresi kehangatan, dekat atau bersahabat, Kuning keemasan adalah Refleksi dan harapan akan sukses, keagungan dan kegemilangan Kemudian, Hitam yang memiliki arti Formal, Mantap dan Tegas.

Pembangunan Mahligai 9 sesuai dengan Visi Jambi Mantap Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. yang telah memberi dukungan penuh kepada Direksi untuk menjalankan strategi perusahaan secara opensif dan profesional.

Gedung Mahligai 9 tinggi nan kokoh melambangkan sebuah kesejahteraan, kekuasaan serta keberhasilan, maka dibangunnya Gedung Mahligai dapat menunjukan kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat Jambi serta mampu menujukan eksistensinya dalam mendorong perekonomian daerah sebagai Bank Pembangunan Daerah di Provinsi Jambi.

Saat ini Gedung Mahligai 9 dilengkapi berbagai fasilitas, seperti, *ball room* untuk berbagai kegiatan seperti seminar, rapat dan pertemuan. Suatu penghormatan *Ball Room* Mahligai 9 ini diberi nama oleh Gubernur Jambi Al Haris, *Grand Ball Room* H. Joesoef Singedekane, nama mantan Gubernur Jambi periode 1959-1966.

Selain *ball room,* Gedung Mahligai 9 dilengkapi Masjid Tuan Guru Makki, seorang ulama yang mengajar di lembaga pondok maupun madrasah di Jambi. Ia datang dari Mekkah pada tahun 1925, dan mengajar di Madrasah Nurul Iman. Syekh Muhammad Ali Al-Makki, ulama yang sangat terkenal di Nusantara, dengan karyanya Innaratu Duja Syarah Tanwirul Hija Nadzam Safinatu Naja.

Gedung Mahligai 9 juga dilengkapi dengan *food court* yang lengkap bagi karyawan dan pengunjung. Lantai 12 terdapat *roof top* yang memberikan pandangan *land scape* Jambi di atas ketinggian 60 meter. Suatu sensasi yang berbeda melihat Jambi dari ketinggian sambil menikmati kopi di sana.

Di lantai dasar Mahligai 9, juga terdapat *banking hall* yang dilengkapi fasilitas *mall* UMKM, ATM dan layanan prioritas Bank Jambi pada nasabah.

the motto of Jambi Province, namely Sepucuk Jambi 9 (Nine) Lurah. Number 9 is also used as the logo of Bank Jambi which is maroon in color which means Expression of enthusiasm for work, spirit of struggle & productivity, Orange is an expression of warmth, closeness or friendship, Golden yellow is a reflection and hope for success, majesty and glory Then, Black which means Formal, Steady and Firm.

The construction of Mahligai 9 is in accordance with the Jambi Vision Mantap. The Governor of Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH who gave a full support to the Board of Directors to carry out the Bank's strategy in an open and professional manner.

The tall and sturdy Mahligai 9 building symbolizes prosperity, power and success, so the construction of the Mahligai Building can show the progress of civilization and the welfare of the Jambi community and be able to show its existence in encouraging the regional economy as a Regional Development Bank in Jambi Province.

Currently Mahligai 9 Building is equipped with various facilities, such as, ball room for various activities such as seminars, meetings and gatherings. A tribute to the Mahligai 9 Ball Room, it was named by the Governor of Jambi Al Haris, the Grand Ball Room H. Joesoef Singedekane, the name of the former Governor of Jambi from 1959 to 1966.

In addition to the ball room, Mahligai 9 Building is equipped with the Tuan Guru Makki Mosque, a cleric who teaches at Islamic boarding schools and madrasas in Jambi. He came from Mecca in 1925, and teaches at Madrasah Nurul Iman. Sheikh Muhammad Ali Al-Makki, a very well-known scholar in the archipelago, with his work Innaratu Duja Syarah Tanwirul Hija Nadzam Safinatu Naja.

Mahligai 9 building is also equipped with a complete food court for employees and visitors. On the 12th floor there is a roof top which gives a view of the Jambi land scape above a height of 60 meters. A different sensation to see Jambi from a height while enjoying coffee there.

On the ground floor of Mahligai 9, there is also a banking hall equipped with MSME mall facilities, ATMs and Bank Jambi priority services for customers.

RIWAYAT SINGKAT

Brief History

Bank Jambi adalah bank milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota di Provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Parlindungan No. 6 tanggal 12 Februari 1959, dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, dengan maksud untuk menunjang serta mendorong pembangunan daerah dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mempertinggi taraf hidup rakyat. Dalam rangka penyempurnaan, diadakan perubahan penting melalui akta Notaris Habro Poerwanto No. 70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. J.A/5/115/6 tanggal 6 November 1969 dan dimuat pada tambahan Berita Negara RI No. 110.104 tanggal 29 Desember 1959.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, seluruh Bank Pembangunan Daerah wajib menyesuaikan ketentuan pendiriannya. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No. 3 Tahun 1963 dan dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 9/32/127-164 tanggal 25 September 1964, maka PT Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan spesifikasi kegiatannya sebagai Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan aturan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1962.

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menuntut seluruh bank komersial untuk menyesuaikan kembali ketentuan pendiriannya. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No. 13 Tahun 1992 tanggal 30 November 1992 dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 548.25-25-434 tanggal 23 Maret 1993, maka Bank Pembangunan Daerah Jambi mengatur kembali dan menyesuaikan kegiatannya sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan sebagai Bank Umum.

Pada tanggal 22 November 2007, Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi Perseroan Terbatas dan selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut sebagai Bank Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2006 dan berdasarkan Akta Notaris Robert Faisal, S.H. No. 1 tanggal 1 Februari 2007 yang kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. W20-00061 HT.01.01- TH.2007 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/59/KEP. GBI/2007 tanggal 13 November 2007. Lini usaha Bank Jambi meliputi seluruh kegiatan bank umum, termasuk sebagai Pemegang Kas Daerah yang berfungsi melaksanakan dan mengelola penyimpanan, penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta mengutamakan pembiayaan bidang proyek Pembangunan Daerah.

Bank Jambi is owned by the Provincial Government, District Government and Municipal Government in the Province of Jambi, which was established based on the Notarial Deed No. 6 dated February 12, 1959 made by Notary Mr. Adiputra Parlindungan, under the name of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, with the intention of supporting and encouraging regional development and promoting regional economic growth in order to improve the livelihood of the people. Later on, as part of the Bank's improvement, some significant changes were made based on the Notarial Deed No. 70 dated October 12, 1959 made by Notary Mr. Habro Poerwanto, approved by the Minister of Justice Republic Indonesia No. J.A/5/115/6 dated November 6, 1969 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 110.104 dated December 29, 1959.

Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 13 Year 1962 about Regional Development Banks, all Regional Development Banks are required to adjust the establishment provisions. Thus, in line with the Provincial Regulation of Jambi No. 3 Year 1963, ratified by the Minister of Internal Affairs No. 9/32/127-164 dated September 25, 1964, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi changed its name Bank Pembangunan Daerah Jambi, engaging business activities as a Regional Development Bank in accordance with the provision stipulated in the Law No. 13 of 1962.

The enactment of the Law of the Republic of Indonesia No. 7/1992 on Banking requires all commercial banks to readjust the provisions of its establishment. Therefore, pursuant to the Jambi Provincial Regulation No. 13 of 1992 dated November 30, 1992 ratified by the Minister of Internal Affair No. 548.25-25-434 dated March 23, 1993, the Regional Development Bank of Jambi reorganized and adjusted its activities as a Commercial Bank, in accordance with the Law of Banking.

In November 22, 2007, the Regional Development Bank of Jambi changed its status to Limited Liability Company and later on the Regional Development Bank Jambi shall be referred to as Bank Jambi, based on the Jambi's Provincial Regulation No. 2 of 2006 and based on the Notarial Deed No. 1 dated February 1, 2007 of Notary Robert Faisal, S.H., which was subsequently ratified by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. W20-00061 HT.01.01-TH.2007, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 55 dated July 10, 2007 and the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 9/59/KEP.GBI/2007 dated November 13, 2007. Bank Jambi's line of business covers all activities of commercial bank, including as Regional Cash Treasurer which serves to implement and manage saving, receipts and expenditures of Regional Cash and also prioritize the financing of Regional Development project

MAHLIGAI 9

VISI DAN MISI
Vision and Mission

Visi

Menjadi Bank yang ideal dan sehat yang berkontribusi nyata untuk perekonomian Jambi, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan layanan berbasis digital dan berkelanjutan serta dikelola secara profesional, dengan prinsip kehati-hatian.

Vision

To become the ideal and healthy bank that deliver real contribution to the Jambi economy, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), with digital-based and sustainable services, which is managed professionally under the principle of prudence.

Misi

- Mengedepankan bisnis berbasis layanan digital yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian Daerah serta bersinergi bersama Jambi Mantap
- Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Pemerintah Daerah
- Mendorong Perekonomian Masyarakat Provinsi Jambi melalui digitalisasi UMKM
- Menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan berakhlak
- Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mission

- *Prioritizing digital service-based businesses that contribute significantly to the regional economy and synergize with Jambi Mantap*
- *As holder of regional treasury and/or cash deposit of regional government*
- *Encouraging the Jambi Province's Community Economy through the digitization of MSMEs*
- *Creating professional, Integrity and ethical Human Resources*
- *As a source of Regional Original Income (PAD)*

Motto Perusahaan
Move On, Semangat Membangun Negeri

Company Tagline
Move On, Spirit to Build the Country

BUDAYA PERUSAHAAN
Corporate Culture

INTAN

INOVATIF
Menciptakan peluang untuk menghasilkan kinerja yang melampaui harapan

NORMATIF
Berpegang teguh pada aturan yang berlaku

TERAMPIL
Cakap, handal, cekatan pada bidangnya

AKURAT
Berkualitas terbaik, terpercaya dan konsisten

NYAMAN
Selalu memberikan produk dan layanan yang mudah dan bersahabat

INNOVATIVE
Creates opportunity to produce performance that exceeds expectations

NORMATIVE
Adhere to the applicable rules

INGENIOUS
Proficient, reliable, skillful in the field

ACCURATE
Best in quality, reliable and consistent

PLEASANT
Always provide products and services that are easy and friendly

SOLID

SALING menghargai dan bekerja sama

ORIENTASI pada nilai tambah dan perbaikan terus-menerus

LOYALITAS pada perusahaan

INTEGRITAS proaktif dan cepat tanggap

DISIPLIN dan konsisten

MUTUAL *respect and work together*

ORIENTED *to the values and continuous improvement*

LOYALTY *to the company*

INTEGRITY, *proactive and responsive*

DISCIPLINED *and consistent*

BISA

BERINISIATIF sigap dan tanggap dalam merespon nasabah

INTENS dalam meningkatkan mutu pelayanan

SALAM senyum dan sapa terhadap nasabah

AKTUALISASI diri untuk selalu memberikan pelayanan prima

Take the ***INITIATIVE*** *to be responsive in responding to customers*

INTENSE *to improve the quality of services*

SALUTE*, smile and greet to the customers*

SELF-ACTUALIZATION *to provide excellent service*

FILOSOFI LOGO PERUSAHAAN

Corporate Logo Philosophy

BANK 9 JAMBI

Logo "9" merepresentasikan persatuan antar etnis yang ada di daerah Jambi, dengan adatnya:

"Sepucuk Jambi Sembilan Lurah,
Batangnyo Alam Rajo"

Artinya:

- Pucuk adalah ulu (dataran tinggi)
- Sembilan Lurah adalah representasi dari sembilan negeri/wilayah
- Batangnyo Alam Rajo adalah daerah teras kerajaan yang terdiri dari 12 (dua belas) daerah/suku

Nama **"Jambi"** berasal dari kata Jambe yang berarti Pinang, sesuai dengan legenda yang pernah hidup dalam masyarakat yaitu **"Putri Selaras Pinang Masak"**.

- **Merah Maroon:**
  Ekspresi semangat berkarya (aktif), semangat perjuangan dan produktivitas.
- **Hitam:**
  Formal, mantap, dan tegas.
- **Kuning Keemasan:**
  Refleksi dan harapan akan sukses, keagungan, dan kegemilangan.
- **Orange:**
  Ekspresi kehangatan, dekat/bersahabat.

The "9" *logo represents the inter-ethnic unity in Jambi area, with cultural adage states:*

"Sepucuk Jambi Sembilan Lurah,
Batangnyo Alam Rajo,"

which means:

- *Pucuk as ulu or plateau*
- *Sembilan Lurah means representation from nine homelands/regions*
- *Batangnyo Alam Rajo means kingdom peripheral area consists of 12 (twelve) regions/ethnics*

Name of ***"Jambi"*** *is derived from the word Jambe which means areca nut, based on urban legend of* ***"Putri Selaras Pinang Masak".***

- ***Maroon:***
  Expression of working spirit (active), fighting spirit and productivity.
- ***Black:***
  Formal, firm, and steady.
- ***Goldish Yellow:***
  Success, dignity and excellence reflection and expectation.
- ***Orange:***
  Warmth, intimate/friendly expression.

TONGGAK SEJARAH
Milestone

2021

Launching QRIS Bank Jambi sebagai wujud komitmen untuk terus berinovasi digital
Launching QRIS Bank Jambi as a form of commitment to continue to innovate digitally

2020

Peluncuran Program *Clear and Clean* Bank Jambi, Pembukaan KCP Tebing Tinggi
The launching of Bank Jambi's Clear and Clean Program, Opening of KCP Tebing Tinggi

2019

Peresmian *Save Deposit Box*
The Inauguration of Save Deposit Box

2018

Peresmian Mini Bank, Bank Jambi
The Inauguration of Mini Bank, Bank Jambi

2017

Penerbitan *Medium Term Notes* sebesar Rp500.000.000.000,- terdiri dari *Medium Term Notes* Konvensional sebesar Rp300.000.000,- dan *Medium Term Notes* Syariah sebesar Rp200.000.000;-
- Pendirian Kantor Fungsional Jakarta
- Peluncuran *Mobile Banking* Bank Jambi

Medium Term Notes Publishing Rp500.000.000.000,- consists of Conventional Medium Term Notes Rp300.000.000,- and Sharia Medium Term Notes Rp200.000.000,
- *The establishment of Jakarta Functional Office*
- *Launching Mobile Banking Bank Jambi*

2007

Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT Bank Pembangunan Daerah Jambi) dan disebut Bank Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2006.

Bank Pembangunan Daerah Jambi changed its status into Limited Liability Company (PT Bank Pembangunan Daerah Jambi) and acknowledged as Bank Jambi in pursuant to the Jambi Provincial Government Regulation No. 2 of 2006.

1993

Bank Pembangunan Daerah Jambi menyesuaikan kegiatannya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank Pembangunan Daerah Jambi aligned its business activity based on the Law of Republic of Indonesia No. 7 of 1992 regarding Banking.

1964

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, maka PT Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi.

As follow up of the issuance Law of Republic of Indonesia No. 13 of 1962 regarding Regional Development Bank, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi was transformed into Bank Pembangunan Daerah Jambi.

1959

Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Establishment of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

BIDANG USAHA
Line of Business

Komitmen kuat PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank Jambi dalam melayani masyarakat tercermin dari ragam produk dan layanan yang disediakannya. Kesemuanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya sebaik mungkin.

Produk Dana

Sebagai Bank Umum, Bank Jambi menjalankan fungsi penghimpunan dana melalui produk Giro, Tabungan, dan Deposito.

A. Giro

Rekening Giro Bank Jambi diperuntukkan bagi nasabah Perorangan, Perorangan Pribadi, Perorangan Perusahaan, dan Giro Perusahaan Berbadan Hukum. Giro Bank Jambi menawarkan kemudahan transaksi perbankan dengan pilihan lembar cek yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

B. Tabungan

Sebagai salah satu sumber dana murah, Bank Jambi menawaran berbagai produk tabungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

- **Tabungan Simpeda**
  Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) merupakan tabungan yang dimiliki oleh seluruh Bank Pembangunan Daerah, termasuk Bank Jambi.
- **Tabungan Siginjai**
  Tabungan Gerakan Investasi Jambi (Siginjai) merupakan produk tabungan unggulan Bank Jambi dengan berbagai penawaran dan program menarik sepanjang tahun.
- **TabunganKu**
  Merupakan produk tabungan yang diluncurkan Bank Indonesia yang diterbitkan dengan maksud menumbuhkan budaya menabung masyarakat.
- **Tabungan Simpel**
  Produk tabungan yang diluncurkan OJK sebagai bentuk inklusi keuangan. Simpanan Pelajar (Simpel) diperuntukkan khusus bagi nasabah yang berstatus sebagai pelajar.
- **Tabungan Siginjai Pensiun**
  Produk turunan dari Tabungan Siginjai ini khusus diperuntukkan bagi nasabah pensiunan yang pembayaran gajinya melalui Bank Jambi.
- **Tabungan Siginjai Pedagang**
  Produk turunan dari Tabungan Siginjai ini khusus diperuntukkan bagi nasabah yang berprofesi sebagai pedagang.
- **SILAH**
  Siginjai Langsung Hadiah menawarkan hadiah menarik yang dapat dipilih sendiri oleh nasabah, sesuai dengan jangka waktu dan nominal tabungan.

Strong commitment from PT Bank Pembangunan Daerah Jambi or Bank Jambi in serving the community is reflected in the variety of products and services it provides. All of them are aimed at fulfilling the needs of its customers as best as possible.

Third Party Fund Products

As a Commercial Bank, Bank Jambi carries out the function of raising funds through Current Accounts, Savings and Time Deposits products.

A. Current Account

The Bank Jambi's Current Account is povided for individual customers, private individuals, corporate individuals, and legal entity. Bank Jambi's Current Account offers the convenience of banking transactions with a choice of check book that can be tailored to customer needs.

B. Saving Account

As a source of low-cost funds, Bank Jambi offers a variety of savings products that can be tailored to customer needs.

- ***Simpeda savings***
  Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) is saving account product provided by all Regional Development Banks, including Bank Jambi.
- ***Siginjai Saving Accounts***
  Gerakan Investasi Jambi (Siginjai) is the flagship savings product of Bank Jambi which offers various attractive offering and programs throughout the year.
- ***TabunganKu***
  A savings product launched by Bank Indonesia which aiming at fostering a saving culture within the society.
- ***Simpel Saving Accounts***
  A savings product launched by the OJK as a form of financial inclusion. Student Deposit (Simpel) is specifically intended for students.
- ***Siginjai Pension Savings***
  This derivative product from Siginjai Saving Accounts is specifically intended for retired customers whose salary payments are made through Bank Jambi.
- ***Siginjai Pedagang Saving Accounts***
  This derivative product from siginjai Saving Accounts is specifically intended for customers who work as traders/ merchant.
- ***SILAH***
  Siginjai Langsung Hadiah offers attractive prizes for customers to choose by themselves, according to the time period and nominal savings.

- **Tabungan Siginjai Gaji**
  Produk turunan dari Tabungan Siginjai ini khusus diperuntukkan bagi nasabah ASN dan karyawan perusahaan yang melakukan pembayaran gaji melalui Bank Jambi.

C. Deposito

Merupakan salah satu jenis simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan hingga korporasi. Deposito Bank Jambi menawarkan suku bunga yang menarik dan jangka waktu yang bervariasi (1, 3, 6, dan 12 bulan) sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta berbagai kemudahan seperti perpanjangan otomatis.

Penyaluran Dana

Bank Jambi menempatkan dana dalam bentuk aktiva produktif yang terdiri dari kredit yang diberikan untuk individu maupun korporasi serta penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, penempatan surat berharga, dan pasar uang.

Bank Jambi menyalurkan dana dalam bentuk kredit, baik melalui konsumtif maupun produktif. Penyaluran kredit pada Bank Jambi masih didominasi oleh kredit konsumtif ASN sebagai *main core* kredit Bank Jambi. Selain itu, Bank Jambi juga menyalurkan kredit konsumtif kepada pensiun/ prapensiun dan perumahan. Meski demikian, Bank Jambi tetap berusaha memberikan kontribusi terhadap sektor produktif melalui pembiayaan kepada UMKM, termasuk kredit program seperti KUR, Tuntas 21, dan *Replanting*, di samping beberapa kredit sindikasi.

Layanan Perbankan

Sebagai bentuk nyata Bank Jambi dalam memberikan pelayanan maksimal bagi nasabahnya, Bank Jambi memberikan berbagai layanan perbankan, di antaranya:

- SKN dan RTGS
- Setoran penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN)
- Penerbitan Bank Garansi, Dukungan Bank, dan Referensi Bank
- Layanan ATM yang terintegrasi dengan ATM Bersama
- Setoran tunai melalui mesin CDM
- Agen Laku Pandai
- QRIS
- *Mobile banking*
- Penerima setoran haji
- Pembayaran uang kuliah
- Pembelian pulsa dan paket data
- *Payroll* gaji
- Berbagai *biller* dan *payment* lokal dan nasional lainnya

- ***Siginjai Gaji Saving Accounts***
  It is a derivative product of Siginjai saving accounts and is specifically intended for Civil Servant and company employees who wish to make salary payments through Bank Jambi.

C. Time Deposits

A type of savings intended for individual or corporate customers. Bank Jambi's Time Deposits offer attractive interest rates in varying terms (1, 3, 6, and 12 months) according to customer needs, as well as various conveniences such as automatic renewals.

Fund Distribution

Bank Jambi places funds in the form of productive assets consisting of loans to individuals and corporations as well as Placements with Bank Indonesia, placements with other banks, placements in securities, and money market.

Bank Jambi distributes funds in the form of credit, both consumer and productive credit. The Credit distribution at Bank Jambi is still dominated by Consumer Loans for Civil Servants, the main core of Bank Jambi credit. In addition, Bank Jambi also provides consumer loans to pensioners / pre-retirees, and loans for housing ownership (mortgage). However, Bank Jambi is still trying to contribute to the productive sector through financing to MSMEs, including credit programs such as KUR, Tuntas 21, and Replanting, in addition to several syndicated loans.

Banking Services

As a tangible form of Bank Jambi in providing maximum service to its customers, Bank Jambi provides a variety of banking services, including:

- *SKN and RTGS*
- *Deposits of state revenue through the State Revenue Module (MPN)*
- *Issuance of Bank Guarantee, Bank Support, and Bank Reference*
- *ATM services that are integrated with ATM Bersama*
- *Cash deposits via a CDM machine*
- *Smart Practice Agents*
- *QRIS*
- *Mobile banking*
- *Recipients of hajj deposits*
- *Payment of tuition fees*
- *Purchase of mobile phone credit and data packages*
- *Payroll*
- *Various billers and other local and national payments*

PRODUK KREDIT

1. Kredit Multiguna adalah Pinjaman terhadap calon debitur dari berbagai macam profil perkerjaan, yang memiliki pembayaran gaji perbulan secara teratur, baik telah melalui Bank Jambi (*payroll*) atau belum melalui Bank Jambi (*non payroll*). Pinjaman ini dapat dipergunakan oleh calon debitur untuk memenuhi bebutuhan konsumtif multiguna seperti: *take over/pay off* pada Bank lain, pembelian rumah/kendaraan, perjalanan wisata dan berbagai kebutuhan lainnya adapun contoh kredit multiguna:
   a. Kredit Multiguna pada CPNS/PNS
   b. Kredit Multiguna pada Pra-Pensiun
   c. Kredit Multiguna pada Pensiun
   d. Kredit Multiguna Kepala Daerah
   e. Kredit Multiguna pada Anggota DPRD
   f. Kredit Multiguna pada Karyawan Swasta
   g. Kredit Multiguna pada Karyawan Kontrak Bank Jambi
   h. Kredit Multiguna pada Kepala Desa
   i. Kredit Multiguna pada Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (Honor/Kontrak)
2. Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera adalah Pinjaman terhadap calon debitur yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna membeli rumah sejahtera tapak atau rumah sejahtera susun melalui jasa pengembang (*developer*) rekanan Bank Jambi, dengan suku bunga murah serta syarat mudah sesuai ketentuan pemerintah dan Bank Jambi (bank pelaksana program).
3. Kredit Kepemilikan Rumah Komersil adalah Pinjaman terhadap calon debitur yang memiliki penghasilan/ pendapatan mencukupi guna memenuhi kebutuhannya pada pemilikan properti/bangunan komersil (kredit beragunan properti), baik berwujud komersil hunian (rumah tapak/rumah susun) atau properti komersil non hunian (rukan/ruko/kios), baik dalam keadaan baru/ bekas. Pinjaman ini dapat dipergunakan oleh calon debitur untuk memenuhi kebutuhan konsumtif KPR komersil seperti: kebutuhan membeli properti, kebutuhan rehab properti, kebutuhan *take over/pay off* pada fasilitas KPR Bank lain atau kebutuhan *refinancing*/multiguna.
4. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor adalah Pinjaman terhadap calon debitur guna memenuhi kebutuhannya untuk membeli kendaraan baru (*new*) baik kendaraan roda dua, roda tiga atau roda empat dengan tujuan kendaraan yang dibeli tersebut adalah untuk kegiatan pribadi/non kegiatan produktif.
5. Kredit *Cash Collateral* adalah Pinjaman terhadap calon debitur guna memenuhi kebutuhannya baik untuk konsumtif, modal kerja atau investasi dengan agunan yang diserahkan calon debitur adalah jaminan uang tunai (*fully cash collateral*) yang disimpan dan diadministrasikan di Bank Jambi baik berbentuk Deposito/Tabungan/Giro.

CREDIT PRODUCTS

1. *Multipurpose Credit is loan provided to debtors from various job profiles, who have regular monthly salary payments, whether their wages have been paid through Bank Jambi (payroll) or not (non-payroll). This loan can be used by debtors to meet various consumptive needs, such as: take over/pay off at other banks, purchase of houses/vehicles, travel tours and various other needs. As for examples of multipurpose loans:*
   a. Multipurpose Loans for CPNS/PNS
   b. Multipurpose Loans for Pre-Retirement
   c. Multipurpose Loans for Pension
   d. Multipurpose Loans for Regional Heads
   e. Multipurpose Loans for DPRD Members
   f. Multipurpose Loans for Private Employees
   g. Multipurpose Loans for Contract Employees of Bank Jambi
   h. Multipurpose Loans to Village Heads
   i. Multipurpose Loans To Government Employees With Work Agreement (Honor/Contract)
2. *Rumah Sejahtera Ownership Loans are loans to debtors who meet the criteria for low-income communities (MBR) to be used to buy a "rumah sejahtera tapak" (landed house) or " rumah sejahtera susun" (flat), through t-he services of partner developer of Bank Jambi, with low interest rates and easy terms, according to the provision fro the Government and Bank Jambi (as the implementing bank for the program).*
3. *Commercial Home Ownership Loans are loans to debtors who have sufficient income to meet their needs of property / commercial buildings (mortgaged property loans), either in the form of residential commercial (landed houses / flats) or non-residential commercial properties (office / shop / kiosk), both new / used. This loan can be used by debtors to meet their needs of commercial mortgages, such as: purchasing property, property renovation, take over / pay off at other bank KPR facilities or for refinancing / multipurpose.*
4. *Vehicle Ownership Loans is a loan for debtors to be used for purchasing new vehicles, whether two-wheeled, three-wheeled or four-wheeled vehicles, and the vehicle being purchased is for personal / non-productive uses.*
5. *Cash Collateral Credit is a loan for a debtor in order to meet their needs, whether for consumptive, working capital or for investment purposes. Collateral submitted by the debtor is a cash guarantee (fully cash collateral) that is saved and administered at Bank Jambi in the form of deposits/ savings/demand deposits.*

6. Kredit Produktif pada Pegawai (KPP Produktif) adalah Pinjaman terhadap calon debitur berstatus aparatur sipil negara, karyawan BUMN/BUMD, karyawan swasta, karyawan kontrak Bank Jambi, karyawan Bank Jambi, Pra Pensiun PNS dan Pensiunan PNS yang memiliki usaha produktif dan akan dipergunakan untuk tujuan produktif.
7. Kredit UMKM adalah Pinjaman terhadap calon debitur pelaku usaha UMKM dan usaha sejenis untuk memenuhi kebutuhan usahanya adapun berbagai macam jenis kreditnya sebagai berikut:
   a. Kredit UMKM
   b. Kredit Usaha Rakyat
   c. Kredit Mikro Tuntas 21
8. Kredit Bumdes+ adalah Pinjaman terhadap badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kredit Kontruksi adalah Pinjaman terhadap calon debitur pelaku usaha kontraktor/sub kontraktor guna mendukung modal kerja usahanya untuk pelaksanaan pengadaan barang/konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya pada instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah/BUMN/BUMD atau badan usaha milik perusahaan swasta *bonafide*.
10. Kredit *Developer* adalah Pinjaman terhadap calon debitur pelaku usaha pengembang guna mendukung modal kerja usahanya untuk pembangunan perumahan baik jenis bangunan berbentuh horizontal (rumah tapak/dsb.) atau berbentuh vertikal (rumah susun/dsb.) guna dijual kembali, baik dalam bentuk tunai atau kredit pemilikan rumah pada Bank Jambi.
11. Kredit Pasar Angso Duo adalah Pinjaman terhadap calon debitur pelaku usaha UMKM & Besar untuh memenuhi kebutuhan investasinya berupa kepemilikan tempat usaha di lokasi pusat perdagangan/pasar.
12. Surat Dukungan Bank pada Kontraktor/*Developer* adalah surat keterangan yang diterbitkan Bank Jambi sesuai permintaan nasabah untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam mengikuti pengadaan barang & jasa pada lingkungan pemerintah/swasta atau guna mendapat bantuan PSU perumahan/jenis kebutuhan dukungan keuangan lainnya dari bank jambi sebagaimana dipersyaratkan oleh *bouwheer/owner* atau sesuai peraturan pemerintah yang mengatur.
13. Bank Garansi adalah Warkat yang berisi jaminan pembayaran kepada pihak tertentu baik perorangan/badan usaha (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) mengalami wanprestasi/tidak memenuhi kewajibannya kepada *bouwheer/owner*.

6. *Productive Employee Loans (Productive KPP) are loans for debtors with the status of state civil servants, BUMN / BUMD employees, private employees, contract employees of Bank Jambi, employees of Bank Jambi, pre-retirement civil servants and retired civil servants who have productive businesses and to be used for productive purposes.*
7. *MSME Loans are loans to debtors for MSME business actors and similar businesses to meet their business needs as for the various types of credit as follows:*
   a. MSME Credit
   b. People's Business Credit
   c. Tuntas 21 Micro Credit
8. *Bumdes + credit is a loan to a village-owned enterprise whose capital is wholly or partly owned by the village through direct participation originating from separated village assets in order to manage assets, services, and other businesses for the maximum welfare of the village community.*
9. *Construction Credit is a loan for contractor/sub-contracting entrepreneur to support them with working capital for the implementation of procurement of goods/construction/consulting services/other services at central government agencies/regional government/BUMN/BUMD or business entities owned by bonafide private companies.*
10. *Developer Credit is a loan for debtors for developers actors to support them with working capital for housing construction, either horizontal type of building (landed house/etc.) or vertical structure (flat/etc.) for resale, either in cash or in ownership credit. house at Bank Jambi.*
11. *Angso Duo Market Credit is a loan for MSME & Large businesses to meet their investment needs in the form of ownership of a business place in a trading center/market location.*
12. *Bank Support Letter to the Contractor/Developer is a certificate issued by Bank Jambi upon request by the customer to meet the administrative requirements in participating in the procurement of goods & services in a government/private environment or to obtain PSU assistance for housing/other types of financial support needs from Bank Jambi as required by bouwheer/owner of project or according to applicable government regulations.*
13. *Bank Guarantee is a document that contains guarantees of payment to certain parties, both individuals/business entities (beneficiary) if the guaranteed party (applicant) fails to fulfill its obligations to the bouwheer/owner.*

UNIT LAYANAN SYARIAH

Sharia Business Unit

PRODUK DANA SYARIAH

Bank Jambi Unit Usaha Syariah menjalankan fungsi penghimpunan dana melalui produk Giro, Tabungan, dan Deposito.

A. Giro

Rekening Giro Bank Jambi Unit Usaha Syariah diperuntukkan bagi nasabah Perorangan/Pribadi, Perorangan Perusahaan, dan Giro Perusahaan/Badan Hukum/Persero, Giro Yayasan/Organisasi/Koperasi. Giro Bank Jambi Unit Usaha Syariah menawarkan kemudahan transaksi perbankan dengan pilihan lembar cek yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

B. Tabungan

Sebagai salah satu sumber dana murah, Bank Jambi Unit Usaha Syariah menawaran berbagai produk tabungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

- **Tabungan Siginjai IB Wadiah**
  Tabungan Simpanan Gerakan Investasi Jambi (Siginjai) IB Wadiah merupakan salah satu produk tabungan unggulan Bank Jambi Syariah, dimana masyarakat dapat menyimpan uang dengan mudah, aman.
- **Tabungan Siginjai IB Mudharabah**
  Tabungan Siginjai IB Mudharabah merupakan salah satu produk tabungan unggulan Bank Jambi Syariah, dimana masyarakat dapat menyimpan uang dengan mudah, aman dengan nisbah bagi hasil yang menguntungkan.
- **TabunganKu IB**
  TabunganKu adalah Produk tabungan IB yang dimiliki oleh Bank Jambi Syariah dengan persyaratan yang mudah. Produk tabungan ini dimiliki oleh seluruh Bank yang ada di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Tabungan Simpel IB**
  Produk tabungan yang diluncurkan OJK sebagai bentuk inklusi keuangan. Simpanan Pelajar (Simpel) diperuntukkan khusus bagi nasabah yang berstatus sebagai pelajar
- **Tabungan Niat Haji**
  Tabungan Niat Haji adalah tabungan yang digunakan sebagai sarana penyimpanan dana untuk nasabah yang berniat untuk melaksanakan Rukun Islam yang kelima yaitu Ibadah Haji. Dengan membuka rekening ini nasabah sudah berniat untuk mempersiapkan diri untuk membiayai akomodasi ke Tanah Suci.

C. Deposito

Merupakan salah satu jenis simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan hingga korporasi. Deposito Bank Jambi Syariah menggunakan nisbah bagi hasil

SHARIA FUND PRODUCTS

The Sharia Business Unit of Bank Jambi carries out the function of collecting funds through Current Accounts, Savings Accounts and Time Deposits.

A. Current Account

The Current Account of Bank Jambi's Sharia Business Unit is provided for Individual/Personal Customers, Corporate Individual, and Corporate/ Legal Entity/Company Current Accounts, Foundation/Organization/Cooperative Current Accounts. Bank Jambi's Syariah Business Unit Current Accounts offers the convenience of banking transactions with a choice of check book that can be tailored to customer needs.

B. Saving Accounts

As one of the sources of low-cost funds, Bank Jambi's Syariah Business Unit offers a variety of savings products that can be tailored to customer needs.

- ***IB Wadiah Siginjai Savings***
  Simpanan Gerakan Investasi Jambi (Siginjai) IB Wadiah is one of the excellent savings account of Bank Jambi Syariah, where people can save money easily and safely.
- ***Siginjai IB Mudharabah Saving Account***
  Siginjai IB Mudharabah Saving Account is one of the superior savings products of Bank Jambi Syariah, where people can save money easily, safely with a profitable profit sharing ratio.
- ***TabunganKu IB***
  TabunganKu is an IB savings product with easy requirements provided by Bank Jambi Syariah. This savings product is offered by all banks in Indonesia in order to foster the saving culture and improve public welfare.
- ***IB Simple Saving Account***
  A savings product launched by the OJK as part of financial inclusion efforts. Student Deposit (Simpel) is specifically intended for students customers.
- ***Niat Haji Saving Accounts***
  Niat Haji Saving Accounts is a savings account that provides a means of saving funds for customers who intend to carry out the fifth pillar of Islam, namely Hajj pilgrimage. By opening this account, the customer has intended to prepare himself to finance the accommodation in the Holy Land.

C. Time Deposits

Type of savings intended for individual or corporate customers. Bank Jambi Syariah Deposits offers an attractive profit sharing ratio in various terms (1, 3, 6, and

yang menguntungkan yang menarik dan jangka waktu yang bervariasi (1, 3, 6, dan 12 Bulan) sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta berbagai kemudahan seperti perpanjangan otomatis.

12 months) to cater various customer needs, as well as various conveniences such as automatic renewal.

Penyaluran Dana Syariah

Bank Jambi Syariah menempatkan dana dalam bentuk aktiva produktif yang terdiri dari Pembiayaan yang diberikan untuk individu maupun korporasi serta Penempatan Pada Bank Indonesia, Penempatan Pada Bank Lain, Penempatan surat berharga, dan pasar uang.

Bank Jambi Syariah menyalurkan dana dalam bentuk Pembiayaan, baik melalui konsumtif maupun produktif. Penyaluran Pembiayaan pada Bank Jambi Syariah masih di dominasi oleh kredit konsumtif ASN sebagai *main core* pembiayaan Bank Jambi Syariah. Selain itu, Bank Jambi Syariah juga menyalurkan kredit konsumtif kepada pensiun/ prapensiun dan perumahan. Meski demikian, Bank Jambi Syariah tetap berusaha memberikan kontribusi terhadap sektor produktif melalui pembiayaan kepada UMKM, termasuk kredit program seperti KUR, Tuntas 21, dan Replanting, disamping beberapa Pembiayaan sindikasi.

Sharia Fund Distribution

Bank Jambi Syariah places funds in productive assets consisting of Financing for individuals and corporations, as well as Placements with Bank Indonesia, Placements with Other Banks, Placements in Securities and Money Market.

Bank Jambi Syariah distributes funds in the form of financing, both through consumptive and productive financing. The distribution of financing at Bank Jambi Syariah is still dominated by Consumer Loans for Civil Servants, the main core of Bank Jambi Syariah financing. In addition, Bank Jambi Syariah also provides consumer loans for pensioners/ pre-retirees and loans for housing ownership (mortgage). However, Bank Jambi Syariah is still seeking to contribute to a more productive sector through financing to MSMEs, including credit programs such as KUR, Tuntas 21, and Replanting, in addition to several syndicated financing.

Layanan Perbankan Syariah

Sebagai bentuk nyata Bank Jambi Syariah dalam memberikan pelayanan maksimal bagi nasabahnya, Bank Jambi Syariah memberikan berbagai layanan perbankan, di antaranya:

- SKN dan RTGS
- Penerbitan Bank Garansi, Dukungan Bank, dan Referensi Bank
- Layanan ATM yang terintegrasi dengan ATM Bersama
- *Mobile Banking*
- Penerima Setoran Haji
- Pembelian Pulsa dan Paket data

Sharia Banking Services

As a tangible form of Bank Jambi Syariah commitment in providing maximum service to its customers, Bank Jambi Syariah provides various banking services, including:

- *SKN and RTGS*
- *Issuance of Bank Guarantee, Bank Support, and Bank Reference*
- *ATM services that are integrated with ATM Bersama*
- *Mobile Banking*
- *Recipients of Hajj Deposits*
- *Purchase of credit and data packages*

STRUKTUR ORGANISASI
Organization Structure

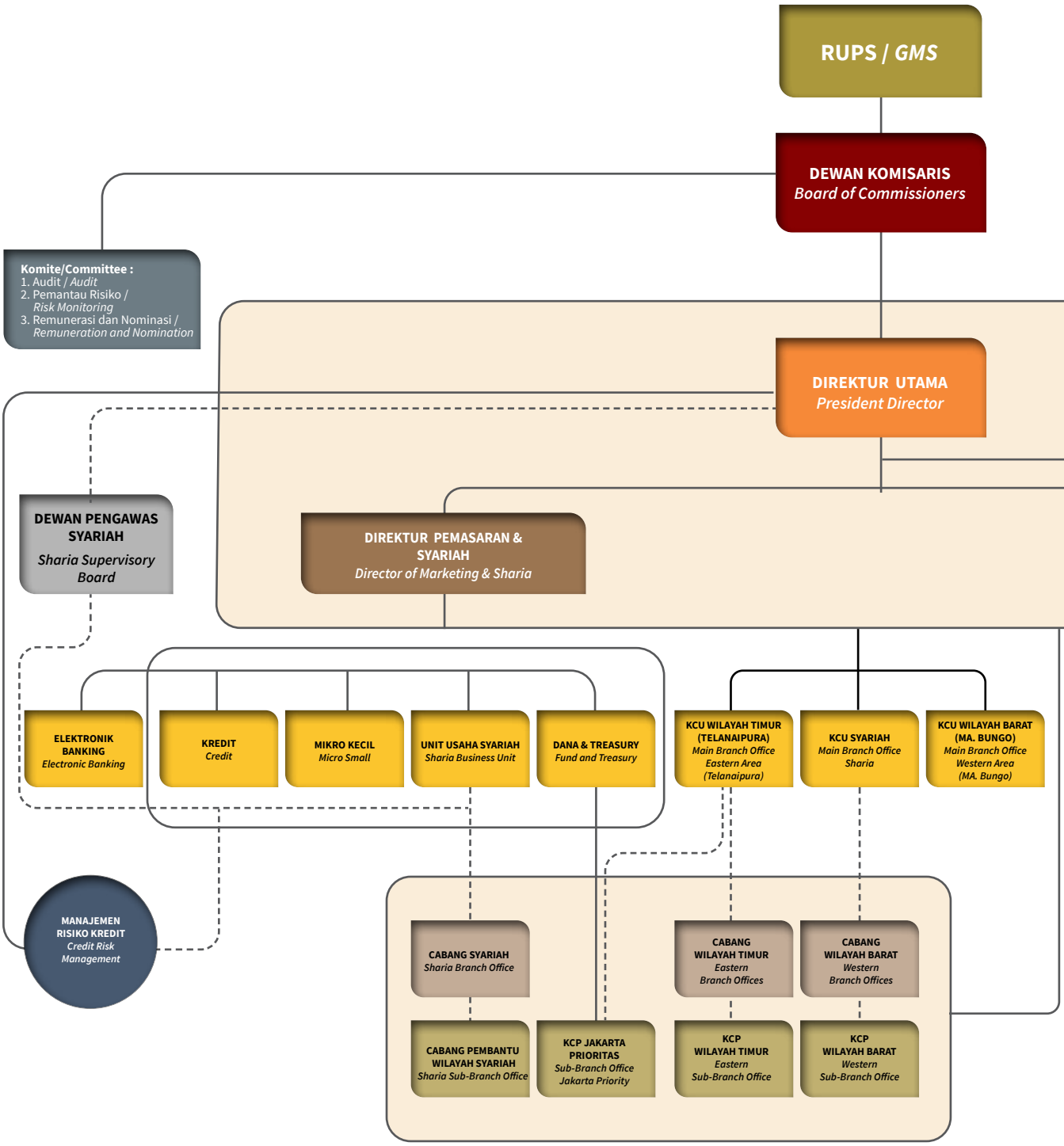

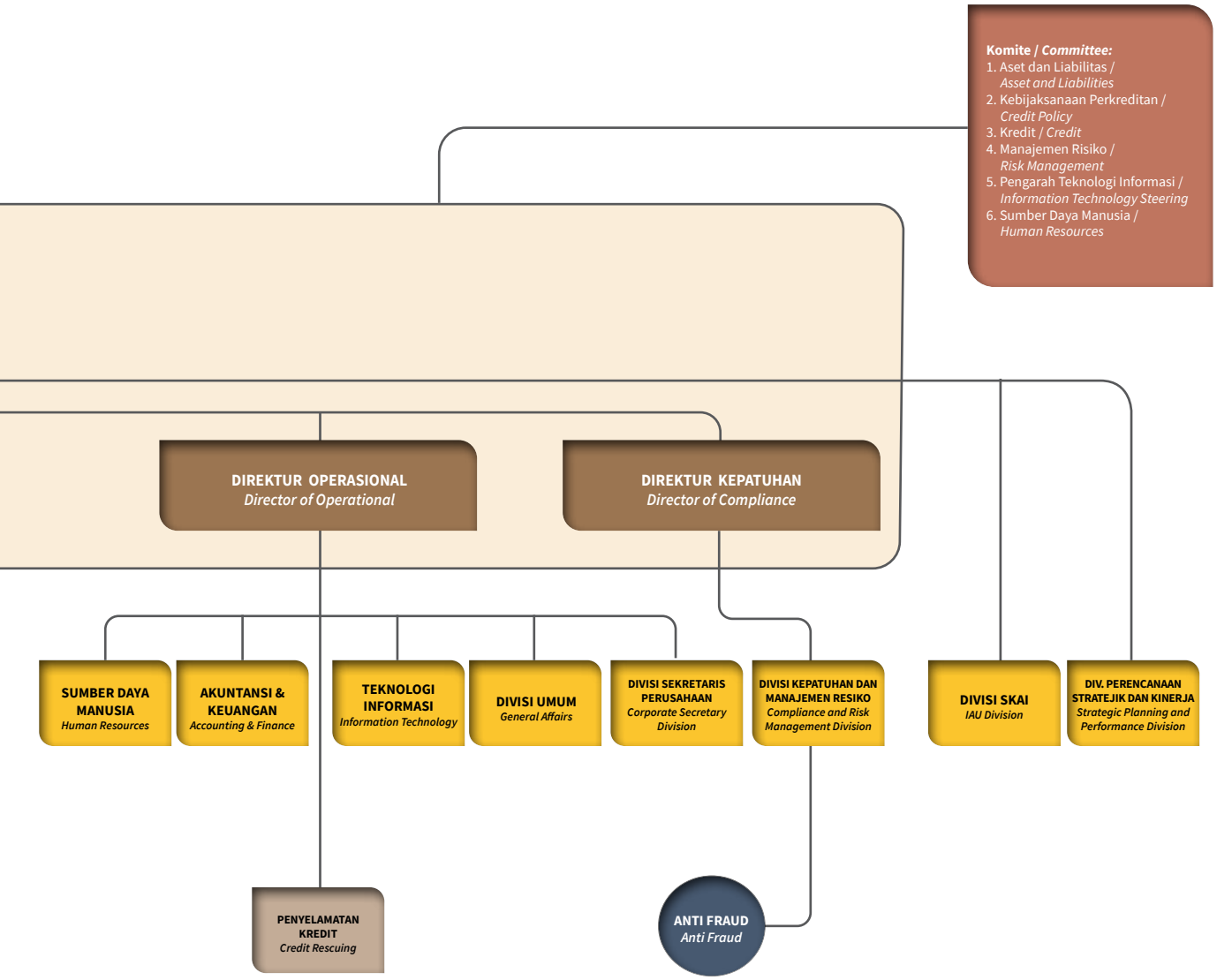
Komite / Committee:
1. Aset dan Liabilitas / Asset and Liabilities
2. Kebijaksanaan Perkreditan / Credit Policy
3. Kredit / Credit
4. Manajemen Risiko / Risk Management
5. Pengarah Teknologi Informasi / Information Technology Steering
6. Sumber Daya Manusia / Human Resources
DIREKTUR OPERASIONAL
Director of Operational
DIREKTUR KEPATUHAN
Director of Compliance
SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources
AKUNTANSI & KEUANGAN
Accounting & Finance
TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology
DIVISI UMUM
General Affairs
DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary Division
DIVISI KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RESIKO
Compliance and Risk Management Division
DIVISI SKAI
IAU Division
DIV. PERENCANAAN STRATEJIK DAN KINERJA
Strategic Planning and Performance Division
PENYELAMATAN KREDIT
Credit Rescuing
ANTI FRAUD
Anti Fraud

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Composition

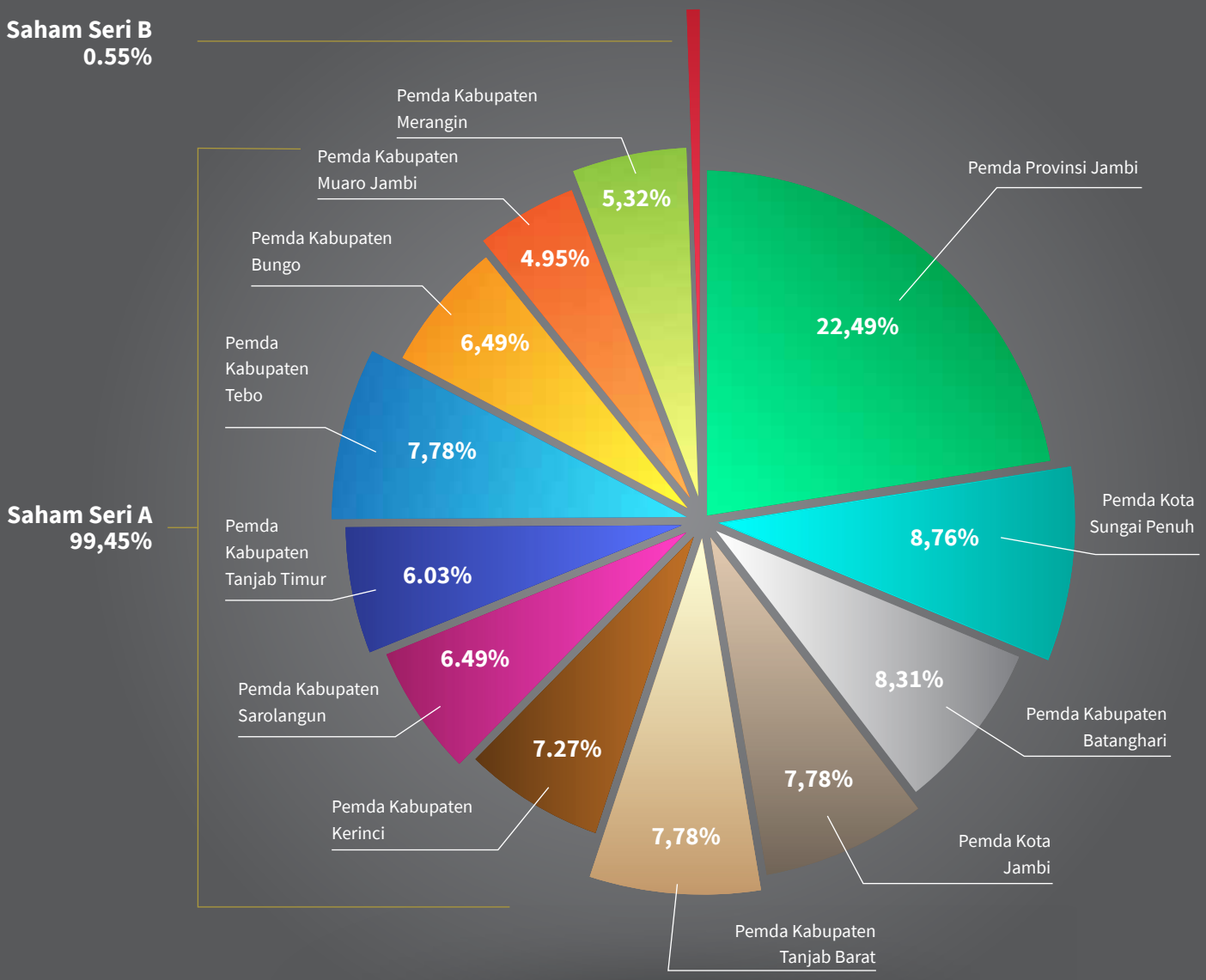

Proyeksi Posisi Modal Setor Bank Jambi

Projected Paid-Up Capital Position of Bank Jambi

PEMEGANG SAHAM/*SHAREHOLDERS*	31 Desember 2021/*December 31, 2021*	
	Modal Setor	%
Pemda Provinsi Jambi	**173,364,000,000**	**22,49%**
Pemda Kota Sungai Penuh	**67,500,000,000**	**8,76%**
Pemda Kabupaten Batanghari	**64,055,000,000**	**8,31%**
Pemda Kota Jambi	**60,000,000,000**	**7.78%**
Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	**60,000,000,000**	**7,78%**
Pemda Kabupaten Kerinci	**56,000,000,000**	**7,27%**
Pemda Kabupaten Sarolangun	**50,000,000,000**	**6,49%**
Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	**46,514,000,000**	**6,03%**
Pemda Kabupaten Tebo	**59,999,000,000**	**7,78%**
Pemda Kabupaten Bungo	**50,000,000,000**	**6,49%**
Pemda Kabupaten Muaro Jambi	**38,164,000,000**	**4,95%**
Pemda Kabupaten Merangin	**41,000,000,000**	**5,32%**
Jumlah Saham Seri A/ *Total of Series A Shares*	**766,596,000,000**	**99.45%**
Saham Seri B/ *Series B Shares*	**4,220,500,000**	**0,55%**
Jumlah/*Total*	**770,816,500,000**	**100.00%**

PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Award/Certificate

PT BPD Jambi - Indonesia Best BPD Award 2021 (Warta Ekonomi)

PT BPD Jambi - Indonesia Best BPD Award 2021 (Warta Ekonomi)

Indonesia Sharia Award 2021

Indonesia Sharia Award 2021

Bisnis Excellent Quality - Bank Jambi

Bisnis Excellent Quality - Bank Jambi

Top Corporate Finance Award 2021

Top Corporate Finance Award 2021

PT BPD Jambi - Indonesia Top Bank Awards by ICONOMICS

PT BPD Jambi - Indonesia Top Bank Awards by ICONOMICS

TOP DIGITAL Bintang 4 Jambi

TOP DIGITAL Bintang 4 Jambi

Most Stable Bank with Highly Innovation of The Year 2021

Most Stable Bank with Highly Innovation of The Year 2021

Trusted Business Brand Awards

Trusted Business Brand Awards

IDC FIIA 2021 - Asia's Leader in SME Banking

IDC FIIA 2021 - Asia's Leader in SME Banking

TOP BUSINESS - PT Pembangunan Daerah Jambi

TOP BUSINESS - PT Pembangunan Daerah Jambi

INFOBANK Award - Aset Rp10 triliun sampai dengan di bawah Rp25 triliun

INFOBANK Award - Assets of IDR 10 trillion to below IDR 25 trillion

INFOBANK Award - Sebagai Institusi Syariah Berpredikat "Excellent" untuk Kinerja Keuangan Tahun 2021

INFOBANK Award - As Sharia Institution with Predicate "Excellent" for Financial Performance in 2021

Majalah Investor - Bank Terbaik 2021 Kategori BPD dengan Modal Inti Rp1 Triliun-Rp5 Triliun

Investor Magazine - Best Bank 2021 for BPD Category with Core Capital Rp1 Trillion-Rp5 Trillion

DAFTAR ALAMAT JARINGAN KANTOR

List of Connecting Address

KANTOR PUSAT
HEAD OFFICE

1 **KANTOR PUSAT**
Jl. Jend. A. Yani No. 18
Telanaipura, Jambi - 36122
Telp. : 0741 - 60665

KANTOR CABANG UTAMA
MAIN BRANCH OFFICES

1 **KANTOR CABANG UTAMA**
Jl. Jend. A. Yani No. 18
Telanaipura, Jambi - 36122
Telp. : 0741-5910019

KANTOR CABANG
BRANCH OFFICES

1. **KANTOR CABANG BUNGO**
Jl. Saleh Somad No. 251 A
Muara Bungo - 37211
Telp. : 0747-21022

2. **KANTOR CABANG SUNGAI PENUH**
Jl. R.A. Kartini No. 2
Sungai Penuh - 37114
Telp. : 0748-21783

3. **KANTOR CABANG KERINCI**
Jl. Raya Pasar Siulak Gedang Dusun
Baru RT. 03 - 37162
Telp. : 0748-21783

4. **KANTOR CABANG KUALA TUNGKAL**
Jl. Jend. Merdeka No.42
Kuala Tungkal - 36000
Telp. : 0742-21422

5. **KANTOR CABANG BANGKO**
Jl. R. Kadipan No. 2, Bangko - 37311
Telp. : 0746-21139

6. **KANTOR CABANG MUARA BULIAN**
Jl. Jendral Sudirman No. 32
Muara Bulian - 36613
Telp. : 0743-21098

7. **KANTOR CABANG SUTOMO**
Jl. Dr. Soetomo No. 8
Kota Jambi - 36113
Telp. : 0741-22470

8. **KANTOR CABANG SAROLANGUN**
Jl. Lintas Sumatera No. 04
Pasar Sarolangun - 37481
Telp. : 0745-91460

9. **KANTOR CABANG TEBO**
Jl. M. Taher No. 12 A,
Muara Tebo - 37571
Telp. : 0744-21360

10. **KANTOR CABANG MUARA SABAK**
Jl. Talang Bakik No. 43
Perkantoran Pemda - 36761
Telp. : 0740-7370045

11. **KANTOR CABANG SENGETI**
Jl. Lintas Timur Sengeti
RT. 07 RW. 02 No. 30
Sangeti - 36551
Telp. : 0747-26727

12. **KANTOR CABANG SUTOMO**
Jl. A. Rahman Saleh
Kel. Paal Merah - 36139

13. **KANTOR CABANG SUTOMO**
Jl. Bastari
Kel. Tanjung Pinang - 36146

14. **KANTOR CABANG SUTOMO**
Jl. D. I. Panjaitan
Kel. Kebun Handil - 36137

KANTOR CABANG PEMBANTU
SUB BRANCH OFFICES

1. **KCP RIMBO BUJANG**
Jl Pahlawan Unit II Ps. Sarinah
Kel. Wirotho - 37533
Telp. : 0744-21360

2. **KCP SUNGAI BENGKAL**
Jl. Lintas Tebo Pasar Sungai Bengkal
No. 09 - 37572
Telp. : 0744-21360

3. **KCP SINGKUT**
Jl. Lintas Sumatera
Pasar Singkut - 37482
Telp. : 0745-92324

4. **KCP SUNGAI RENGAS**
Jl. Lintas Jambi
Muara Tebo Km. 124 - 36655
Telp. : 0743-21098

5. **KCP PAMENANG**
Jl. Lingkar Tebat Rajo
No. 77 RT. 29 RW. 12
Pamenang - 37357
Telp. : 0746-21139

6. **KCP SUNGAI BAHAR**
Desa Mekar Sari Makmur
RT. 01 Blok B
Sungai Bahar - 36365
Telp. : 0747-26727

7. **KCP KUAMANG KUNING**
Jl. Batanghari 1 Kel. Purwasari
Pelepat Ilir - 37252
Telp. : 0747-21022

8. **KCP MANDIANGIN**
Jl. Lintas Sarolangun-Tembesi
Pasar Mandiangin - 37492
Telp. : 0745-91460

9. **KCP MARENE**
Jl. Sentot Alibasya
Kel. Payo Selincah - 36139
Telp. : 0741-22470

10. **KCP MUARA DELANG**
Jl. Gulama Bulat RT. 01 RW. 05
Desa Muara Delang - 37354
Telp. : 0746-21139

11. **KCP PEMATANG LUMUT**
Jl. Lintas Jambi Tungkal
Kec. Betara - 36555
Telp. : 0742-21422

12. **KCP NIPAH PANJANG**
Jl. Agung RT. 01
Kel. Nipah Panjang 1 - 36771
Telp. : 0740-7370045

13. **KCP MERLUNG**
Jl. Lintas Timur Km. 110 RT. 01
Kel. Merlung - 36554
Telp. : 0742-21422

14. **KCP TEMBESI**
Jl. Raya Muara Tembesi
Kec. Pasar Tembesi - 36653
Telp. : 0743-21098

15. **KCP SABAK TIMUR**
Jl. Paduka Berhala RT. 02 No. 39
Sabak Timur - 36762
Telp. : 0740-7370045

16. **KCP RANTAU IKIL**
Dusun Rantau Ikil
Kec. Jujuhan- 37258
Telp. : 0747-21022

17. **KCP KAYU ARO**
Desa Batang Sangir Dusun 4 RT. 01
Kayu Aro - 37163
Telp. : 0748-21783

18. **KCP SUNGAI GELAM**
Desa Sungai Gelam RT. 10 RW. 05
Sungai Gelam - 36373
Telp. : 0747-26727

19. **KCP LEMBAH MASURAI**
Desa Pasar Masurai RT. 01
Kec. Lembah Masurai - 37372
Telp. : 0746-21139

20. **KCP UNJA MENDALO**
Jl. Raya Jambi Ma. Bulian Km. 15
Unja Mendalo - 36361
Telp. : 0741-5910019

21. **KCP GERAGAI**
Jl. Santa Fe RT. 18 Kel. Pandan Jaya
Geragai - 36764
Telp. : 0740-7370045

22. **KCP BAJUBANG**
Jl. Lintas Muara Bulian-Tembesi
RT. 03 RW. 01
Bajubang - 36611
Telp. : 0743-21098

23. **KCP WALIKOTA**
Jl. Basuki Rachmat
Kel. Paal Lima - 36128
Telp. : 0741-22470

24. **KCP THEHOK**
Jl. Tharmidzi Kadir RT. 25
Kel. Pakuan Baru - 36138
Telp. : 0741-5910019

25. **KCP PULAU TEMIANG**
Jl. Padang Lamo Kel. Pulau Temiang
Kec. Tebo Ulu - 37555
Telp. : 0744-21360

26. **KCP ANGSO DUO**
Jl. Sultan Thaha
Komplek Pasar Angso Duo - 36121
Telp. : 0741-22470

27. **KCP TEBING TINGGI**
Jl. Lintas Wks Km. 2,5 RT. 3
Kel. Tebing Tinggi - 36552
Telp. : 0742-21422

28. **KCP PEMAYUNG**
Jl. Tembesi - Jambi, Jembatan Mas
Pemayung - 36657

29. **KCP RSU KOTA ABDUL MANAF**
Jl. Skrd Syahbudin - 36126
Telp. : 0741-3018402

30. **KCP JAKARTA PRIORITAS**
Jl. Epicentrum Raya Kuningan,
Jakarta Selatan - 12940
021-22057556

31. **KCP SINGKUT**
Jl. Lintas Sumatera Pasar Singkut
Singkut - 37482

KANTOR KAS
CASH OFFICES

1. **KANTOR KAS RSU RADEN MATTAHER**
Jl. Letjend Suprapto No. 2
Telanaipura - 36122
Telp. : 0741-5910019

2. **KANTOR KAS UNBARI**
Jl. Slamet Riyadi Telanaipura - 36124
Telp. : 0741 - 7150053

3. **KANTOR KAS BANGUN SERANTEN**
Desa Bangun Seranten
Kec. Muara Tabir - 37572
Telp. : 0744 - 21360

4. **KANTOR KAS DURIAN LUNCUK**
Jl. Lintas MA Tembesi-Sarolangun
KM.30 RT. 08 - 36656
Telp. : 0743-21098

5. **KANTOR KAS JUJUN**
Desa Jujun, Kec. Keliling Danau - 37173
Telp. : 0748-21783

6. **KANTOR KAS PEMDA TEBO**
Jl. Lintas Tebo Bungo
KM. 12 Muara Tebo - 37571
Telp. : 0744-21360

7. **KANTOR KAS**
LIMBUR LUBUK MENGKUANG
Desa Tebo Jaya SP. 3 - 37255
Telp. : 0747-21022

8. **KANTOR KAS RSU MAYJEN H. A. THALIB**
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01
Sungai Penuh - 37152
Telp. : 0748-21783

9. **KANTOR KAS PEMDA**
TANJUNG JABUNG BARAT
Jalan Jend Sudirman
Kuala Tungkal - 36000
Telp. : 0742-21422

SAMSAT

1. **SAMSAT KOTA JAMBI**
Samsat Kota Jambi - 36000

2. **SAMSAT KAB. MERANGIN**
Jl. Jend Sudirman KM. 02
Kel. Pematang Kandis - 37314

3. **SAMSAT KAB. BATANGHARI**
Samsat Kab Batanghari - 36613

4. **SAMSAT KAB. TANJAB BARAT**
Samsat Kab Tanjab Barat - 36000

5. **SAMSAT KAB. BUNGO**
Samsat Kab Bungo - 37211

6. **SAMSAT KAB. SAROLANGUN**
Samsat Kab Sarolangun - 37481

7. **SAMSAT KAB. TANJAB TIMUR**
Samsat Kab. Tanjab Timur - 36761

8. **SAMSAT KAB. TEBO**
Jl. Lintas Tebo-Bungo KM. 4
Muara Tebo - 37571

9. **SAMSAT KAB. KERINCI**
Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi MS. SH
No. 7 - 37114

10. **SAMSAT MERLUNG**
Jl. Lintas Timur
Kel. Merlung Kec. Merlung - 36554

11. **SAMSAT KAB. MUARO JAMBI**
Samsat Kab. Muaro Jambi - 36000

12. **PBB DISPENDA KAB. BUNGO**
Jl. Raden Mat Thaher
Kel. Cadika - 37214

13. **PBB DISPENDA KAB. TANJABBAR**
Jl. Beringin Kel. Sriwijaya
Kec. Tungkal Ilir - 36512

14. **PBB DISPENDA KAB BATANGHARI**
Jl. Jend Sudirman
Muara Bulian - 36613

15. **PBB DISPENDA KAB TEBO**
Jl. Lintas Tebo - Bungo KM. 12
Muara Tebo - 37571

16. **PBB KANTOR CAMAT JELUTUNG**
Jl. Dr. Sumbiyono No. 02
Kec. Jelutung - 36136

17. **PBB KANTOR CAMAT JAMBI SELATAN**
Jl. Kol. M. Taher, Kel. Pakuan Baru
Jambi Selatan - 36132

18. **PBB KANTOR CAMAT JAMBI TIMUR**
Jl. Amangkurat No. 01
Kel. Tanjung Pinang - 36146

19. **PBB KANTOR CAMAT PELAYANGAN**
Jl. K.H. Abdul Somad Kel. Tengah
Kec. Pelayangan - 36254

20. **PBB DISPENDA MUARO JAMBI**
Komplek Perkantoran Pemda
Kab. Muaro Jambi - 36361

21. **PTSP KOTA JAMBI**
Jl. Zainir Havis
Kel. Paal V Kec. Kota Baru - 36128

22. **ANGSODUO**
Jl. Sultan Thaha 01 No. 119
Pasar Jambi - 36121

23. **PAYMENT POINT DPPKAD**
KAB. SAROLANGUN
Kompleks Perkantoran
Gunung Kembang - 37481

24. **PAYMENT POINT**
RSUD KOL. ABUNJANI
Jl. Kesehatan
Kel. Pematang Kandis
Kec. Bangko - 37314

25. **PAYMENT POINT**
KANTOR CAMAT RANTAU RASAU
Komplek Perkantoran
Rantau Rasau - 36772

26. **PAYMENT POINT**
BKD TANJABTIM
Komplek Perkantoran Rano
Kel. Rano - 36761

ATM

1. **ATM KC UTAMA**
Jl. Jendral A. Yani No. 18
Telanaipura - 36122

2. **ATM KC SUTOMO**
Jl. Dr. Sutomo No. 8, Jambi - 36113

3. **ATM KC SUNGAI PENUH**
Jl. R.A. Kartini No. 02
Sungai Penuh - 37114

4. **ATM KANTOR SAMSAT**
Jl. Gajah Mada Jelutung
36141

5. **ATM KC BUNGO**
Jl. Saleh Somad No. 251 A
Muara Bungo - 37211

6. **ATM KC BANGKO**
Jl. Rd. Kadipan No. 2, Bangko - 37311

7. **ATM KC KUALA TUNGKAL**
Jl. Merdeka No. 42
Kuala Tungkal - 36000

8. **ATM KC MUARA BULIAN**
Jl. Jend. Sudirman No. 32
Muara Bulian - 36613

9. **ATM KC TEBO**
Jl. M. Taher No 12 A
Muara Tebo - 37571

10. **ATM KC SAROLANGUN**
Jl. Lintas Sumatera No.4
Pasar Sarolangun - 37481

11. **ATM BANDARA SULTAN THAHA**
Jl. Soekarno Hatta
Palmerah Thehok - 36139

12. **ATM KC MUARA SABAK**
Jl. Talang Bakik No. 43
Perkantoran Pemda - 36761

13. **ATM KANTOR GUBERNUR**
Jl. Jendral A. Yani No. 01
Telanaipura - 36122

14. **ATM SIMPANG RIMBO**
Jl. Pattimura Simpang Rimbo,
Simpang Rimbo - 36129

15. **ATM KCP RIMBO BUJANG**
Jl. Pahlawan
RT.07 RW.05, Kel. Wirotho
Rimbo Bujang - 37573

16. **ATM KCP SUNGAI BENGKAL**
Jl. Pasar Sei Bengkal No. 09
Sungai Bengkal - 37572

17. **ATM ABDUL MANAP**
Jl. Skrd Syahbudin
36128

18. **ATM KANTOR WALIKOTA JAMBI**
Kantor Walikota Jambi
Kota Jambi - 36128

19. **ATM SMU TITIAN TERAS**
Jl. Jambi Pijoan Km. 21
36139

20. **ATM KANTOR BUPATI SAROLANGUN**
Kompleks Kantor Bupati Sarolangun
Kota Sarolangun - 37481

21. **ATM SUTOMO**
Jl. Datuk Bagindo No. 52
Talang Banjar - 36131

22. **ATM MALL JAMTOS**
Jl. Kapten A. Bakaruddin No. 88
Kota Jambi - 36126

23. **ATM ALFAMART SIPIN**
Jl. Kol. Abunjani No. 47
Jambi - 36128

24. **ATM CAB MUARA BUNGO III**
Jl. Soleh Somad No. 251 A
Pasar Muara Bungo - 37211

25. **ATM KANTOR BUPATI MERANGIN**
Jl. Jend. Sudirman Km. 2
Jambi - 37314

26. **ATM RSUD RADEN MATTAHER**
Jl. Letjend Suprapto
Telanaipura - 36122

27. **ATM KC UTAMA II**
Jl. Jendral Achmad Yani No. 18
Telanaipura - 36122

28. **ATM CABANG SENGETI**
Jl. Lintas Timur RT. 07
Kel. Sengeti Kec. Sekernan - 36381

29. **ATM KCP SUNGAI RENGAS**
Jl. Lintas Jambi Muara Tebo Km. 124
Jambi - 36655

30. **ATM PLAZA ARAFAH**
Jl. Muradi No. 06
Sungai Penuh - 37114

31. **ATM MESS JAMBI**
Jl. Cidurian No. 15-17
Cikini - 10330

32. **ATM PEMKAB TEBO**
Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 04
Muara Tebo - 37571

33. **ATM KCP MUARA TEMBESI**
Pasar Paal V RT. 04 Kampung Baru
Muara Tembesi - 36653

34. **ATM RS KAMBANG**
Jl. Kol Amir Hamzah No. 53
Sei Kambang - 36121

35. **ATM KCP SABAK TIMUR**
Jl. Paduka Berhala RT. 02 No. 39
36762

36. **ATM MINI MARKET MELATI**
Jl. Jend Sudirman
Kel. Pematang Kandis - 37314

37. **ATM KC UTAMA III**
Jl. Jend A. Yani No. 18
Telanaipura - 36122

38. **ATM TRIBUN JAMBI**
Jl. Prof. Dr. M. Yamin RT. 32 No. 06
Kel. Lebak Bdg - 36124

39. **ATM INDOMARET POLDA**
Jl. Basuki Rahmat
Kota Baru Paal Lima - 36128

40. **ATM**
Jl. Jend. Sudirman No. 5
Kel. Tambaksari - 36138

41. **ATM**
Jl. Dr. Sutomo No. 8
Kel. Pasar Jambi - 36113

42. **ATM KCU SYARIAH**
Jl. Kapten Pattimura No. 70-71
Kel. Simpiv Sipin - 36124

43. **ATM KC TUNGKAL III**
Jl. Merdeka No. 42
Kuala Tungkal - 36512

44. **ATM KCP KUAMANG KUNING**
Jl. Batang Hari, Purwasari
Pelepat Ilir - 37262

45. **ATM KCP MANDIANGIN**
Jl. Lintas Sarolangun-Tembesi
Mandiangin - 37492

46. **ATM KCP SUNGAI BAHAR**
Jl. Poros I, Desa Sari Makmur
Sungai Bahar - 36365

47. **ATM SPBU MUNTIALO**
Desa Muntialo, Pematang Lumut
Kuala Tungkal - 36555

48. **ATM SABAK II**
Jl. Talang Bakik No. 43
Komplek Perkantoran - 36761

49. **ATM SIULAK GEDANG**
Dusun Baru RT. 03
Pasar Siulak Gedang - 37162

50. **ATM KCP GERAGAI**
Jl. Santa Fe RT. 18
Kel. Pandan Jaya - 36764

51. **ATM ALFAMART BULIAN**
Jl. Jend. Sudirman No. 32
Muara Bulian - 36613

52. **ATM SPBU TANJUNG LUMUT**
Jl. Lingkar Timur
Kel. Talang Bakung - 36139

53. **ATM SPBU PALL VIII**
Jl. Pangeran Hidayat Paal 8
Kec. Kenali - 36128

54. **ATM KK DURIAN LUNCUK**
Jl. Lintas Jambi Sarolangun RT. 08
Jambi - 36656

55. **ATM KCP MARENE**
Jl. Sentot Alibasa
Kel. Payo Selincah - 36148

56. **ATM UNJA TELANAIPURA**
Jl. H. A Manap Kec. Telanaipura - 36122

57. **ATM ALFAMART RSJ**
Jl. Kapten Pattimura RT. 02
Simpang Rimbo - 36129

58. **ATM SPBU AURDURI**
Jl. Lintas Timur Mendalo Darat
Jaluko - 36361

59. **ATM PAAL LIMA KOTABARU (SPBU BERINGIN)**
Jl. H. Adam Malik Thehok
Kec. Jambi Selatan - 36125

60. **ATM RSUD PROF. CHATIB QIZWAIN**
Jl. Lintas Sumatera Km. 9
Desa Simpang Bukit - 37482

61. **ATM KC TEBO II**
Jl. M. Thaher No. 12 A
Kel. Muara Tebo - 37571

62. **ATM KANTOR BUPATI MA. BUNGO**
Jl. R.M. Taher Kec. Rimbo Tengah
37214

63. **ATM KCP MUARA DELANG**
Jl. Gilama Bulat RT. 05 RW. 01
Desa Ma Delang - 37354

64. **ATM KC SPN II**
Jl. R.A. Kartini No. 02
Sungai Penuh - 37114

65. **ATM WALIKOTA SUNGAI PENUH**
Jl. Gajah Mada No. 01
Sungai Penuh - 37114

66. **ATM RSD KOL ABUNDJANI BKO**
Jl. Kesehatan No. 01
Kel. Pematang Kandis - 37357

67. **ATM KCP MERLUNG**
Jl. Lintas Timur Sumatera Km. 120
Kel. Merlung - 36554

68. **ATM RSUD NURDIN HAMZAH**
Jl. Keramas Kel. Parit Culum I
Jambi - 36764

69. **ATM KCP PAMENANG**
Jl. Ling. Tebat Rajo No. 77 RT. 29 RW. 12
37357

70. **ATM ALFAMART MENDALO**
Jl. Lintas Muaro Bulian RT. 03
Kel. Mendalo Indah - 36361

71. **ATM MANDALA MART**
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1
Kel. Talang Bakung - 36139

72. **ATM KCP KAYU ARO**
Desa Batang Sangir Dusun 4 RT. 01
37163

73. **ATM KCP RANTAU IKIL**
Jl. Lintas Sumatra Simpang IV
Rantau Ikil - 37258

74. **ATM KCP NIPAH PANJANG**
Jl Agung RT. 01 Kel. Nipah Panjang II
36771

75. **ATM KC SPN III**
Jl. Ra Kartini No. 02
Sungai Penuh - 37114

76. **ATM KTR BUPATI BATANGHARI**
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Kel. Muara Bulian - 36618

77. **ATM ALFAMART RSUD HAMBA**
Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi
RT. 10 RW. 03
Jambi - 36612

78. **ATM HOTEL CANTIKA**
Jl. Lintas Sumatera Km. 3
Lingkungan Mensawang - 37311

79. **ATM KCP SYARIAH OLAK KEMANG**
Jl. K.H. Hasan Anang RT. 04
Kel. Olak Kemang - 36262

80. **ATM KCP SUNGAI GELAM**
Desa Sungai Gelam RT. 10 RW. 05
Kec. S. Gelam - 36373

81. **ATM KC SAROLANGUN II**
Jl. Lintas Sumatera No. 4
Kel. Psr Sarolangun - 37481

82. **ATM PASAR PAUH**
Kel. Pauh RT. 04 RW. 03
Kec. Pauh - 37491

83. **ATM KC BANGKO II**
Jl. Rd. Kadipan No. 02
Kel. Pasar Bangko - 37311

84. **ATM KCP PEMATANG LUMUT**
Desa Pematang Lumut
Kec. Betara - 36555

85. **ATM KC TUNGKAL II**
Jl. Merdeka No. 42
Kel. Tungkal IV Kota
36513

86. **ATM CAB MUARA BUNGO II**
Jl. Soleh Somad No. 251 A
Pasar Muara Bungo - 37211

87. **ATM PUSKESMAS R RASAU**
Jl. Jend. Sudirman Sk 16
Kel. Rantau Rasau 2 - 36772

88. **ATM KANTOR PEMDA TEBO**
Jl. Lintas Tebo Bungo Km. 12
Muara Tebo - 37571

89. **ATM ABDUL MANAP II**
Jl. Skrd Syabuddin
Kel. Mayang Mengurai - 36126

90. **ATM BAROKAH MART**
Desa Pasir Panjang
Kec. Danau Teluk Sengeti
Kota Jambi - 36373

91. **ATM KC SENGETI II**
Jl. Lintas Timur Sengeti No. 30
Muara Jambi - 36381

92. **ATM STKIP MB MUARO BUNGO**
Jalan Rangkayo Hitam Cadika
Rimbo Tengah - 37211

93. **ATM INDOMARET TEUKU UMAR**
Jl. Teuku Umar, Kel. Pasir Putih - 37214

94. **ATM STAI SMQ BANGKO**
Jl. Prof. M. Yamin, S.H.
Kel. Pasar Atas Bangko - 37312

95. **ATM MM ARIZONA S PENUH**
Jl. Yos Sudarso Desa Gedang
Kec. Sungai Penuh
Jambi - 37111

96. **ATM MM IKO S PENUH**
Jl. Sriwijaya Kel. Lawang Agung - 37114

97. **ATM RSU MHAT S. PENUH**
Jl. Basuki Rahmat Kel. Koto Renah
Kec. P. Bukit - 37152

98. **ATM MM GLORIA S PENUH**
Desa Pasar Semurup
Kec. Air Hangat - 37161

99. **ATM KAS JUJUN**
Desa Pasr Jujun
Kec. Keliling Danau - 37173

100. **ATM SPBU BATANG ASAM**
Jl. Lintas Timur Sumatra Km. 153
Desa Kampung Baru - 36552

101. **ATM KCP LEMBAH MASURAI**
Desa Pasar Masurai RT. 01
Kec. Lembah Masurai - 37372

102. **CDM CABANG UTAMA**
Jl. Jend. A. Yani No. 18
Telanaipura - 36122

103. **CCM BUKIT SARI**
Desa Bukit Sari
RT. 04 RW. 01 - 36655

104. **ATM INDOMARET SIMP KAWAT**
Jl. R. B. Siagian, Tambak Sari
Kec. Jamsel - 36138

105. **CDM CABANG MA. BULIAN**
Jl. Jend. Sudirman No. 32
Muara Bulian - 36613

106. **CDM CABANG BANGKO**
Jl. R. Kadipan No. 2
Bangko - 37311

107. **CRM CABANG SAROLANGUN**
Jl. Lintas Sumatera No. 04
Pasar Sarolangun - 37481

108. **CDM CABANG UTAMA II**
Jl. Jend. A. Yani No. 18
Telanaipura - 36122

109. **CDM KC SUTOMO**
Jl. Dr. Sutomo No. 08 - 36113

110. **CCM SUNGAI ABANG**
Jl. Padang Lamo
Desa Sungai Abang - 37561

111. **CDM KCP RIMBO BUJANG**
Jl. Pahlawan Unit II Pasar Sarinah
RT. 7 RW. 5 - 37553

112. **ATM KCP PULAU TEMIANG**
Jl. Padang Lamo Kel. Pulau Temiang
Kec. Tebo Ulu - 37555

113. **ATM KCP SYARIAH MERSAM**
RT. 15 Kel. Paseban
Kec. Mersam - 36654

114. **ATM BUPATI TUNGKAL II**
Jl. Jend. Sudirman No. 182
Kel. Sriwijaya - 36557

115. **ATM SPBU TANAH KAMPUNG**
Jl. Stadion Pancasila
Desa Tanjung Bunga - 37171

116. **ATM KCU IV**
Jl. Dr. Siwabessy, Telanaipura - 36122

117. **ATM KCP ANGSO DUO**
Jl. Sultan Thaha
Komplek Pasar Angso Duo - 36121

118. **ATM KK LIMBUR LUBUK MENGKUANG**
Desa Tebo Jaya Sp. 3 - 37255

119. **ATM KCP PEMAYUNG**
Jl. Tembesi - Jamb
Kel. Jembatan Mas Pemayung - 36657

120. **CDM KCP ANGSO DUO**
Jl. Sultan Thaha
Komplek Pasar Angso Duo - 36121

121. ATM KCP TEBING TINGGI
Jl. Lintas Wks Km. 2,5 RT. 3
Kel. Tebing Tinggi - 36552

121. ATM BPKAD MERANGIN
Pematang Kandis Bangko
Kabupaten Merangin - 37313

122. ATM KC SAROLANGUN III
Jl. Lintas Sumatera No. 04
Pasar Sarolangun - 37481

123. ATM SUNGAI BENGKAL II
Jl. Pasar Sei Bengkal No. 09
Sungai Bengkal - 37572

124. ATM SPBU BAGAN PETE
Kelurahan Bagan Pete
Kec Kotabaru - 36129

125. ATM ASSYFA MART
Jl. Raya Siulak Kayu Aro
Desa Koto Rendah - 37173

126. ATM FRESH ZONE
Jl. Kompol M. Thaher RT. 34
Kel. Tambak Sari - 36139

KANTOR CABANG SYARIAH
SHARIA BRANCH OFFICE

1 **KANTOR CABANG SYARIAH**
Jl. Kapten Pattimura No 70-71 - 36139
Telp. : 0741 - 61609

KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH
SHARIA SUB BRANCH OFFICES

1 **KCP SYARIAH SEBERANG**
Jl. K.H. Hasan Anang
RT. 04 Kel. Olak Kemang - 36262
Telp. : 0741 - 61609

2 **KCP SYARIAH MERSAM**
RT. 15 Kel. Paseban
Kec. Mersam - 36654
Telp. : 0741 - 61609

LAYANAN SYARIAH
SHARIA SERVICES

1. **LAYANAN SYARIAH KC UTAMA**
Jl. Jend. A Yani No. 18
Telanaipura - 36122

2. **LAYANAN SYARIAH KC SUTOMO**
Jl. Dr.sutomo No. 08
Pasar Jambi - 36113

3. **LAYANAN SYARIAH KC SUNGAI PENUH**
Jl. R.A. Kartini No. 2
Sungai Penuh - 37114

4. **LAYANAN SYARIAH KC SAROLANGUN**
Jl. Lintas Sumatera No. 04 Pasar
Sarolangun - 37481

5. **LAYANAN SYARIAH KC BANGKO**
Jl. R. Kadipan No. 2, Bangko - 37311

6. **LAYANAN SYARIAH KC BUNGO**
Jl. Saleh Somad No. 251 A
Muara Bungo - 37211

7. **LAYANAN SYARIAH KC TEBO**
Jl. M. Taher No. 12 A, Muara Tebo - 37571

8. **LAYANAN SYARIAH KC MUARA SABAK**
Jl. Talang Bakik No. 43
Perkantoran Pemda - 36761

9. **LAYANAN SYARIAH KC KUALA TUNGKAL**
Jl. Jend. Merdeka No. 42
Kuala Tungkal - 36512

10. **LAYANAN SYARIAH KC MUARA BULIAN**
Jl. Jendral Sudirman No. 32
Muara Bulian - 36613

11. **LAYANAN SYARIAH KC SENGETI**
Jl. Lintas Timur Sengeti
RT. 07 RW. 02 No. 30
Jambi - 36381

12. **LAYANAN SYARIAH KCP SUNGAI RENGAS**
Jl. Lintas Ma Tebo Km. 124 RR.03
Simp. S. Rengas - 36655

13. **LAYANAN SYARIAH KCP SUNGAI BENGKAL**
Jl. Lintas Ma Tebo
Pasar Sungai Bengkal No.09
Jambi - 37572

14. **LAYANAN SYARIAH KCP RIMBO BUJANG**
Jl. Pahlawan Unit II Pasar Sarinag
RT. 07, Jambi - 37573

15. **LAYANAN SYARIAH KCP SINGKUT**
Jl. Lintas Sumater
Pasar Singkut - 37482

16. **LAYANAN SYARIAH KCP MUARA DELANG**
Jl. Gulama Bulat RT. 01/05
Ma. Delang - 37354

17. **LAYANAN SYARIAH KCP MANDIANGIN**
Jl. Lintas Tembesi-Sarolangun
Jambi - 37492

18. **LAYANAN SYARIAH KCP MARENE**
Jl. Sentot Alibasa Kel. Payo Selincah
Jambi - 36148

19. **LAYANAN SYARIAH KCP PAMENANG**
Jl. Lingkungan Tebat Rajo No. 77
Pamenang - 37352

20. **LAYANAN SYARIAH KCP NIPAH PANJANG**
Jl. Agung RT. 01
Kel. Nipah Panjang - 36571

21. **LAYANAN SYARIAH KCP SABAK TIMUR**
Jl. Paduka Berhala
RT. 02 No. 39 - 36561

22. **LAYANAN SYARIAH KCP MERLUNG**
Lintas Timur Km. 110 RT. 01
Kel. Merlung - 36554

23. **LAYANAN SYARIAH KCP PEMATANG LUMUT**
Jl. Kuala Tungkal RT. 11
Desa Pematang Lumut - 36555

24. **LAYANAN SYARIAH KCP MUARA TEMBESI**
Jl. Raya Muara Tembesi
Kec. Pasar Tembesi - 36653

25. **LAYANAN SYARIAH KCP SUNGAI BAHAR**
Desa Mekar Sari Makmur
RT. 01 Blok B, Jambi - 36365

26. **LAYANAN SYARIAH KCP KUAMANG KUNING**
Jl. Batang Hari 1 Spa, Kel. Purwasari - 37252

27. **LAYANAN SYARIAH KCP RANTAU IKIL**
Dusun Rantau Ikil, Kec. Jujuhan - 37258

28. **LAYANAN SYARIAH CABANG KERINCI**
Jl. Raya Pasar Siulak Gedang
Dusun Baru RT. 03 - 37162

29. **LAYANAN SYARIAH KCP KAYU ARO**
Desa Batang Sangir Dusun 4 RT. 01
Jambi - 37163

30. **LAYANAN SYARIAH KCP SUNGAI GELAM**
Jl. Bumi Perkemahan RT. 10
Desa Sungai Gelam, Jambi - 36373

31. **LAYANAN SYARIAH KCP LEMBAH MASURAI**
Desa Pasar Masurai RT. 01
Kec. Lembah Masurai, Jambi - 37372

32. **LAYANAN SYARIAH KCP UNJA MENDALO**
Jl. Raya Jambi Ma. Bulian Km. 15 - 36361

33. **LAYANAN SYARIAH KCP GERAGAI**
Jl. A. Yani Pusat Pembelanjaan Baruga
Regency - 36764

34. **LAYANAN SYARIAH KCP BAJUBANG**
Jl. Lintas Muara Bulian-Tempino
RT. 03 RW. 01 - 36111

35. **LAYANAN SYARIAH KCP THEHOK**
Jl. Tharmidzi Kadir RT. 25
Kel. Pakuan Baru - 36138

36. **LAYANAN SYARIAH KCP WALIKOTA**
Jl. Basuki Rachmat Kel. Paal Lima
Jambi - 36128

37. **LAYANAN SYARIAH KCP PULAU TEMIANG**
Jl. Padang Lamo, Kel. Pulau Temiang
Kec. Tebo Ulu - 37555

38. **LAYANAN SYARIAH KCP ANGSO DUO**
Jl. Sultan Thaha
Komplek Pasar Angso Duo - 36121

39. **LAYANAN SYARIAH KCP RSU ABD MANAP**
Jl. Skrd. Syahbudin - 36126
Telp. 0741-3018402

40. **LAYANAN SYARIAH KCP TEBING TINGGI**
Jl. Lintas Wks Km 2,5 RT. 3
Kel. Tebing Tinggi - 36552

41. **LAYANAN SYARIAH KCP PEMAYUNG**
Jl. Tembesi - Jambi,
Kel. Jembatan Mas, Pemayung - 36657

PEMIMPIN DIVISI
Division Head

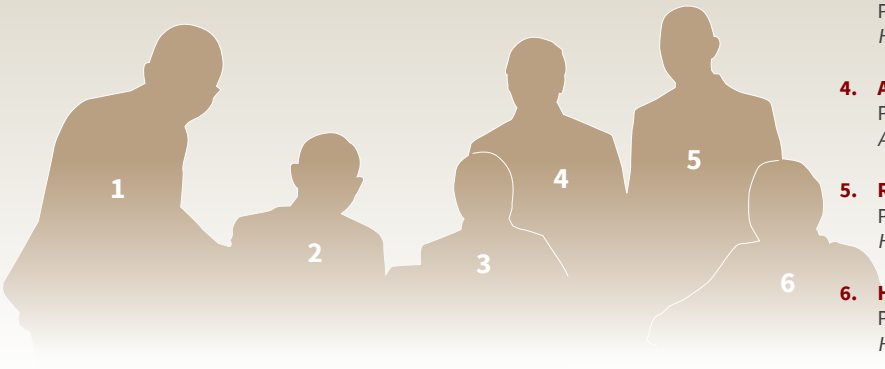

1. **ACHMAD JAIZ**
   Pj. Pemimpin Divisi Umum dan Sekretaris Perusahaan
   Act. Head of General Affair and Corporate Secretary Division

2. **HABIBULLAH**
   Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia
   Head of Human Resources Division

3. **Hj. RUSIAH**
   Pemimpin Divisi *Treasury* & Dana
   Head of Treasury and Fund Division

4. **AGUS SALIM**
   Pjs. Pemimpin Divisi Akuntansi & Keuangan
   Ad Int. Head of Accountant & Finance Division

5. **R. A. EDI WIDODO**
   Pemimpin Divisi Perencanaan Stratejik dan Kinerja
   Head of Strategic Planning and Performance Division

6. **Hj. FATIMAH**
   Pemimpin Divisi Elektronik Banking
   Head of Electronic Banking Division

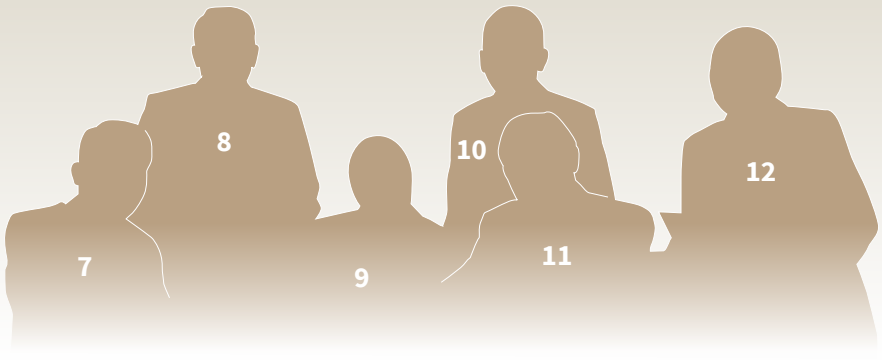

7. **HENDRI**
Pemimpin Divisi Satuan Kerja Audit Intern
Head of Internal Audit Work Unit Division

8. **YUFNIZARMAN**
Pjs. Pemimpin Kantor Cabang Utama
Ad Int. Head of Main Branch Office

9. **ENDANG PURWATI**
Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Head of Compliance and Risk Management Division

10. **NURHADI**
Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Head of Technology Information Division

11. **EDI LASTONO K.**
Pemimpin Divisi Kredit
Head of Credit Division

12. **Hj. ROSIQO**
Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah
Head of Sharia Business Unit Division

PROFIL PEMIMPIN DIVISI

Profile of Division Head

Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah

Head of Sharia Business Unit Division

Hj. ROSIQO

Lahir di Jambi, 28 Januari 1971
Born in Jambi, January 28, 1971
Lulusan Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen dari Universitas Bung Hatta Padang
Bachelor of Economics, specializing in Management from Bung Hatta University Padang

DASAR PENUNJUKAN | *BASE OF APPOINTMENT*	
Dasar penunjukan diangkat menjadi Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah melalui Surat Keputusan Direksi No. 99 tanggal 17 September 2020	*Appointed as the Head of Sharia Business Unit Division based on Board of Directors Decree No. 99 dated September 17, 2020*
RIWAYAT PEKERJAAN | *WORK HISTORY*	
• Pemimpin Bidang Humas, Rumah Tangga dan Sekretaris Kantor Pusat (26 Juni 2012-7 Maret 2014)	• *Head of Public Relations, Household and Secretary Division Head Office (June 26, 2012-March 7, 2014)*
• Pemimpin Kantor Cabang Syariah (7 Maret 2014-22 Februari 2017)	• *Head of Sharia Branch Office (March 7, 2014-February 22, 2017)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah (22 Februari 2017-16 Desember 2019)	• *(Ad. int). Head of Sharia Business Unit Division Head Office (February 22, 2017 - December 16, 2019)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah Kantor Pusat (22 Februari 2017-Sekarang)	• *(Ad. int). Head of Sharia Business Unit Division Head Office (February 22, 2017-Present)*
• Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah (16 Desember 2019 - Sekarang)	• *Head of Sharia Branch Office (December 16, 2019 - Present)*
SEMINAR DAN PELATIHAN | *SEMINARS AND TRAININGS*	
• Pelatihan Dasar *Treasury* (2007)	• *Training on Basic Treasury (2007)*
• Uji Kompetensi Manajemen Risiko 1 (2008)	• *Competency Test on Risk Management 1 (2008)*
• Pelatihan Protokoler (2013)	• *Protocol Training (2013)*
• *Training* Pemahaman Dasar Syariah (2014)	• *Training on Basic Understanding of Sharia (2014)*
• Seminar Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Nasabah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (2015)	• *Seminar on Settlement of Sharia Banking Disputes with Customers Post-Decision of the Constitutional Court (2015)*
• Pelatihan *Complaint Handling* (2015)	• *Training on Complaint Handling (2015)*
• *Benchmarking* Program Pelatihan *Branch Manager Course of Islamic* Bank (2015)	• *Benchmarking training program on Branch Manager Course of Islamic Bank (2015)*
• *Workshop* Pengembangan Pasar, Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (2018)	• *Workshop on the Development of Market, Product, and Education on Sharia Banking (2018)*
• Pembekalan Sertifikasi *Treasury Level Basic (2020)*	• *Briefing for Basic Level Treasury Certification (2020)*

Pj. Pemimpin Divisi Umum dan Sekretaris Perusahaan

Act. Head of General Division and Corporate Secretary

ACHMAD JAIS

Lahir di Jambi, 15 Juni 1969
Born in Jambi, June 15, 1969

Lulusan Magister Ekonomi Syariah Jurusan Perbankan Syariah dari IAIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi.
Master of Sharia Economics, Department of Sharia Banking from IAIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi

DASAR PENUNJUKAN | *LEGAL BASIS OF APPOINTMENT*	
Diangkat menjadi Plt. Pemimpin Divisi Umum dan Sekretaris Perusahaan Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan No. 002 tanggal 3 Januari 2022.	*Appointed as Acting (Ads Int.) Head of General Division and Company Secretary Head Office based on Decree No. 002 dated January 3, 2022.*

RIWAYAT PEKERJAAN | *WORK HISTORY*	
• Pjs. Pemimpin Divisi Umum dan Sekretaris Perusahaan (2021)	• *Acting Head of General Affairs and Corporate Secretary Division (2021)*
• Pemimpin Kantor Cabang Syariah (2018)	• *Head of Sharia Branch Office (2018)*
• Pjs. Pemimpin Kantor Cabang Syariah (2017)	• *Acting Head of Sharia Branch Office (2017)*
• Kepala BIdang Pemasaran dan Pengembangan (2016)	• *Head of Marketing and Development (2016)*

SEMINAR DAN PELATIHAN | *SEMINARS AND TRAININGS*	
• Sosialisasi SK Pengembangan Karir dan Manajemen Talenta	• *Socialization of Decree on Career Development and Talent Management*
• *Capacity Building Values of Change* Bank Jambi Tahun 2021	• *Capacity Building Values of Change Bank Jambi 2021*
• *Refreshment* Sertifikat Manajemen Risiko Level 4	• *Refreshment of Risk Management Certificate Level 4*
• Pelatihan dan Ujian Sertifikasi CCP (*Certified Procurement Professional*)	• *CCP (Certified Procurement Professional) Certification Training and Exams*
• Sosialisasi dan *Review Job Description*	• *Socialization and Review of Job Description*
• Sosialisasi Kegiatan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	• *Socialization of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Activities*
• T*raining Outdoor* dan Pemantapan Program Kerja RBB Tahun 2021	• *Outdoor Training and Consolidation of 2021 RBB*
• Pelatihan *Implementasi Channel* 9 Bank Jambi	• *Training for Implementation of Channel 9 Bank Jambi*
• *Sharing Session* Transformasi dibalik Turbulensi, *Turn Change Into Chance*	• *Sharing Session on Transformation behind Turbulence, Turn Change Into Chance*
• *Workshop Chanel* 9 Bank Jambi	• *Workshop Chanel 9 Bank Jambi*
• *Sharing Session* OJK Dan FKIJK Dampak Pandemi Terhadap *Financial Industry*	• *Sharing Session from OJK and FKIJK regarding the Impact of the Pandemic on the Financial Industry*
• Virtual Seminar "Etika, Integritas Dan Tatakelola di Industri Finansial"	• *Virtual Seminar on "Ethics, Integrity and Governance in the Financial Industry"*
• *Online Training* Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	• *Online Training on Sustainable Finance Action Plan (RAKB)*
• Rapat Koordinasi Tahun 2019	• *Coordination Meeting in 2019*
• Evaluasi Program Belajar Desember	• *Evaluation of Study Program in December*
• Program Belajar (Pembekalan Ketaspenan & *Flagging Web* Taspen)	• *Study Program (Debriefing on Taspenan & Flagging of Taspen Web)*
• Program Belajar (Evaluasi Program Belajar Periode November)	• *Study Program (Evaluation on Study Program for November Period)*
• Pembekalan Serfikasi Manajemen Risiko IV	• *Debriefing for Risk Management Certification IV*
• Program Belajar (SOP *Mobile Banking*)	• *Study Program (SOP for Mobile Banking)*
• Program Belajar (*Mobile Banking* Lanjutan)	• *Study Program (Advanced Mobile Banking)*
• Evaluasi Program Periode Oktober 2019 (Belajar APU/PTT)	• *Evaluation on Program for the Period of October 2019 (Learning APU/PTT)*
• Program Belajar APU/PTT (*Risk Based Approach* APU PTT)	• *Study Program of APU/PPT (Risk Based Approach APU PPT)*
• *Study* Banding ke Bank Riau	• *Comparative Study to Bank Riau*
• Program Belajar (Suku Bunga Kredit Produktif)	• *Study Program (Productive Loan Interest Rate)*
• Program Belajar (Penginputan penilaian Jaminan)	• *Study Program (Inputting Assurance assessment)*

PROFIL PEMIMPIN DIVISI

Profile of Division Head

Pjs. Pemimpin Divisi Akuntansi & Keuangan

Ad Int. Head of Accounting & Finance Division

AGUS SALIM

Lahir di Kuala Tungkal, 1 Agustus 1969
Born in Kuala Tungkal, August 1, 1969

Lulusan Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Bachelor of Economics, specializing in Management from Yogyakarta Muhammadiyah University

DASAR PENUNJUKAN | *BASE OF APPOINTMENT*	
Diangkat menjadi Pjs. Pemimpin Divisi Akuntansi dan Keuangan berdasarkan SK No. 14 tanggal 3 Februari 2021	*Appointed as acting (Ad Int.) Head of Accounting and Finance the Division based on the Decree No. 14 February 3, 2021*
RIWAYAT PEKERJAAN | *WORK HISTORY*	
• Koordinator Admin kredit, Pelaporan dan Penilaian Penjaminan Kantor Cabang Utama (28 April 2009 - 21 Juli 2013)	• *Coordinator Admin Credit Reporting and Valuation Assurance of the Branch Office of the Main (April 28, 2009-July 21, 2013)*
• Pemimpin Operasional Kantor Cabang Bulian (22 Juli 2013 - 15 Juli 2014)	• *Head of Operations Branch Office of Muara Bulian (July 22, 2013-July 15, 2014)*
• Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sungai Penuh (16 Juli 2014 - 29 Maret 2015)	• *Head of the Branch Office of Sungai Penuh (July 16, 2014-March 29, 2015)*
• Pemimpin Cabang Kantor Cabang Bangko (30 Maret 2015 - 23 Februari 2017)	• *Head of the Branch of Bangko (March 30, 2015-February 23, 2017)*
• Pemimpin Bidang Pemasaran PT BPD Jambi Kantor Cabang Utama (24 Februari 2017 - 30 Januari 2018)	• *Head of Marketing of PT BPD Jambi Main Branch Office (February 24, 2017 - January 30, 2018)*
• Pemimpin Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Plt/Kabid *Corsec* PT BPD Jambi Kantor Pusat disamping tugas rutin (31 Januari 2018 - 27 November 2018)	• *Head of Public Relations and Information the Acting/Head of Corsec PT BPD Jambi Central Office the routine tasks (January 31, 2018-November 27, 2018)*
• Pemimpin Bidang Umum dan Pengelolaan Aset PT BPD Jambi Kantor Pusat (31 Januari 2018 - 5 Februari 2019)	• *The Head of Public affairs and Asset Management PT BPD Jambi Central Office (January 31, 2018 -February 5, 2019)*
• Plt. Pemimpin Divisi Elektronik Banking (6 Februari 2019 - 5 Juli 2019)	• *Head of Electronic Banking Division (February 6, 2019-July 5, 2019)*
• Plt. Pemimpin Divisi Akuntansi dan Keuangan (5 Juli 2019 - 12 November 2019)	• *Head of the Accounting and Finance Division (July 5, 2019-November 12, 2019)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Akuntansi dan Keuangan (12 November 2019 - Sekarang)	• *(Ad. int) Head of Finance and Accounting Division (November 12, 2019 - Present)*
SEMINAR DAN PELATIHAN | *SEMINARS AND TRAININGS*	
• Pelatihan Sertifikasi Level 4 Manajemen Risiko (2019)	• *Certification Training Level 4 Risk Management (2019)*
• Sosialisasi Perlindungan Konsumen (2018)	• *The Socialization of Consumer Protection (2018)*
• Lokakarya Kiat dn Strategi Penetapan HPS dan Tata Cara Pelaksanaan Swakelola dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang Aman dan Konstitusional Terhadap Tuduhan Tindak Pidana Korupsi (2018)	• *Workshop Tips and Strategy the Determination of the HPS and procedures for the Implementation of self-management in the procurement of Goods Government Services that are Secure and of the Constitutional Against Accusations of Corruption (2018)*
• Sosialisasi *Whistleblowing System Fraud* (2018)	• *Socialization of the Whistleblowing System Fraud (2018)*
• Strategi Pembayaran di Era COVID-19 dan "*New Normal*" (2020)	• *Payment Strategy in the COVID-19 and "New Normal" Era (2020)*
• *Exposure Draft Primary Financial Statements* dan *Draft Exposure Amandement* PSAK 73 Sewa (2020)	• *Exposure Draft Primary Financial Statements and Exposure Amendment Draft PSAK 73 Leases (2020)*
• Sosialisasi Ketentuan Bank Umum (2020)	• *Socialization of Commercial Bank Regulations (2020)*
• Aspek Perpajakan PSAK 71, PSAK 72 & PSAK 73 (2020)	• *Taxation Aspects PSAK 71, PSAK 72 & PSAK 73 (20*

Pjs. Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia

Ad Int. Head of Human Resources Division

HABIBULLAH

Lahir di Jambi, 14 April 1967
Born in Jambi, April 14, 1967

Lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari STIE Jambi.
Bachelor of Economics, Department of Management from STIE Jambi

DASAR PENUNJUKAN | *BASE OF APPOINTMENT*	
Diangkat menjadi Plt. Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan No. 05 tanggal 28 Januari 2021.	*Appointed as Acting (Ads Int.) Head of Human Resources Division at Head Office based on Decree No. 05 dated January 28, 2021.*

RIWAYAT PEKERJAAN | *WORK HISTORY*	
• Pemimpin Kantor Cabang Sengeti (2020)	• *Head of Sengeti Branch Office (2020)*
• Pemimpin Kantor Cabang Muara Tebo (2017-2020)	• *Head of Muara Tebo Branch Office (2017-2020)*
• Pemimpin Operasional dan Pelayanan Kantor Cabang Sutomo (2016)	• *Head of Operations and Services Branch Sutomo (2016)*
• Pemimpin Pemasaran Kantor Cabang Sengeti (2016)	• *Head of Marketing at Sengeti Branch Office (2016)*

SEMINAR DAN PELATIHAN | *SEMINARS AND TRAININGS*	
• Sosialisasi Penyaluran Dana BSPS	• *Socialization of BSPS Fund Distribution*
• Pembekalan SMR Level 4	• *Providing SMR Level 4*
• Sosialisasi WBS Antri *Fraud* Bank Jambi	• *Socialization of WBS Antri Fraud Bank Jambi*
• Rapat Koordinasi Tahun 2019	• *2019 Coordination Meeting*
• Program Belajar (Evaluasi Program Belajar Periode November)	• *Learning Program (Study Program Evaluation Period November)*
• PKS 3 (Tiga) Pihak Terkait Dana Peremajaan Sawit	• *PKS 3 (Three) Parties Related to Oil Palm Rejuvenation Fund*
• Program Belajar (Penutupan Rekening Tabungan)	• *Learning Program (Savings Account Closing)*
• Program Belajar *Mobile Banking* (Standar Prosedur Pengoperasian *Mobile Banking*)	• *Mobile Banking Learning Program (Standard Mobile Banking Operating Procedures)*
• Program Belajar (SOP *KiosK*)	• *Learning Program (SOP KiosK)*
• Program Belajar (Suku Bunga Tabungan)	• *Learning Program (Savings Interest Rate)*
• Program Belajar (Evaluasi Materi Deposito)	• *Learning Program (Evaluation of Time Deposit Materials)*
• Program Belajar (*SOP Smart Branch System* (SBS))	• *Learning Program (SOP Smart Branch System (SBS))*
• Program Belajar (Pencairan Deposito Pada Saat Jatuh Tempo (Hari H))	• *Learning Program (Disbursement of Deposits on Maturity (D-Day))*
• Program Belajar (*Re Schedule* Deposito 1 bulan dan Re *Schedule* Deposito lebih dari 1 bulan)	• *Learning Program (Re Schedule Deposits 1 month and Re Schedule Deposits more than 1 month)*
• Program Belajar (Break Deposito 1 bulan dan *Break* Deposito lebih dari 1 bulan)	• *Learning Program (Break Deposits 1 month and Break Deposits more than 1 month)*
• Program Belajar (Standar Prosedur Pengoprasian *Mobile Banking*)	• *Learning Program (Standard Operating Procedures for Mobile Banking)*
• Program Belajar (*deposito spesial rate*)	• *Learning Program (special deposit rate)*
• Program Belajar (pembukaan deposito pada *core banking*)	• *Learning Program (opening deposits in core banking)*
• Program Belajar (Pembukaan deposito)	• *Learning Program (Opening deposits)*
• Program Belajar (Evaluasi *Role Play* materi, *Mobile Banking*, COB,SBS, KiosK, dan Laku Pandai)	• *Learning Program (Evaluation of material Role Play, Mobile Banking, COB, SBS, KiosK, and Laku Pandai)*
• Program Belajar (Evaluasi tertulis materi, *Mobile Banking*, COB, SBS, KiosK, dan Laku Pandai)	• *Learning Program (written evaluation of material, Mobile Banking, COB, SBS, KiosK, and Smart Practice)*
• Program Belajar (Lanjutan *Toolkit* Laku pandai)	• *Learning Program (Continued Smart Practice Toolkit)*
• Program Belajar (*Toolkit* Laku Pandai)	• *Learning Program (Smart Practice Toolkit)*
• Program Belajar (*Toolkit* KiosK) Program Belajar (*Toolkit Customer On Board*)	• *Learning Program (KiosK Toolkit) Learning Program (Customer On Board Toolkit)*
• Program Belajar (Pengoprasian SBS)	• *Learning Program (Operation SBS)*
• Program Belajar (*Mobile Banking*)	• *Learning Program (Mobile Banking)*
• Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1-3 LSPP	• *LSPP Level 1-3 Risk Management Certification Exam*
• Program Belajar (*Customer On Board* (COB))	• *Learning Program (Customer On Board (COB))*
• Program Belajar (*Mobile Banking*) Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level III	• *Learning Program (Mobile Banking), Level III Risk Management Certification Training and Examination*

PROFIL PEMIMPIN DIVISI

Profile of Division Head

Pemimpin Divisi *Treasury* & Dana

Head of Treasury and Fund Division

Hj. RUSIAH

Lahir di Jambi, 03 Januari 1969
Born in Jambi, January 03, 1969

Lulusan Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen dari Universitas Jambi
Bachelor of Economics, specializing in Management from Jambi University.

DASAR PENUNJUKAN | ***BASE OF APPOINTMENT***	
Diangkat menjadi Pemimpin Divisi *Treasury* melalui Surat Keputusan Direksi No. 99 tanggal 17 September 2020.	*Appointed as the Head of Treasury based on the Board of Director's Decree No. 99 dated September 17, 2020*
RIWAYAT PEKERJAAN | ***WORK HISTORY***	
• Pemimpin Seksi Supervisi Kredit Kantor Pusat (11 November 2004-28 April 2009)	• *Head of Credit Supervision Section at the Head Office (November 11, 2004-April 28, 2009)*
• Pjs. Pemimpin Bidang Auditor Area Kredit Kantor Pusat (28 April 2009-16 Oktober 2013)	• *(Ad. int). Head of Division of Credit Auditor Area at the Head Office (April 28, 2009– October 16, 2013)*
• Pemimpin Kantor Cabang Kuala Tungkal (16 Oktober 2013-18 September 2014)	• *Head of Branch Office Kuala Tungkal (October 16, 2013-September 18, 2014)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Akuntansi dan Teknologi Informasi Kantor Pusat (18 September 2014-18 Desember 2015)	• *(Ad.int) Head of Division of Accounting and Information and Technology at the Head Office (September 18, 2014-December 18, 2015)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Kantor Pusat (18 Desember 2015 - 5 Januari 2016)	• *(Ad.Int) Head of Division of Human Resource at the Head Office (December 18, 2015-January 5, 2016)*
• Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Kantor Pusat (5 Januari 2016-5 Juli 2019)	• *Head of Division of Human Resource at the Head Office (January 5, 2016-July 5, 2019)*
• Pemimpin Divisi *Treasury* & Dana Kantor Pusat (5 Juli 2019-Sekarang)	• *Head of Division Treasury and Fund at the Head Office (July 5, 2019-Present)*
SEMINAR DAN PELATIHAN | ***SEMINARS AND TRAININGS***	
• *Training ESQ Reguler* (2008)	• *Training ESQ Regular (2008)*
• Uji Kompetensi Manajemen Risiko 2 (2009)	• *Competence Test on Risk Management 2 (2009)*
• Uji Kompetensi Manajemen Risiko 3 (2012)	• *Competence Test on Risk Management 3 (2012)*
• *Training* untuk mempelajari *Service Level Agreement* (SLA), FDS (2015)	• *Training on Service Level Agreement (SLA), Fortress Data Service (2015)*
• Uji Sertifikasi Manajemen Risiko 4 (2015)	• *Test of Certification on Risk Management 4 (2015)*
• Seminar *Securing the Digital Bank for Growth* (2015)	• *Seminar on Securing the Digital Bank for Growth (2015)*
• *Workshop IT Management Essential* (2015)	• *Workshop on IT Management Essential (2015)*
• *Workshop* KPI Direksi dan Komisaris (2016)	• *Workshop on Key Performance Indicator for Director and Commissioner (2016)*
• *Workshop* Pengembangan SDM bagi BPD (2016)	• *Workshop on Human Resource Development for Regional Development Bank (2016)*
• *Workshop 1st Indonesia Human Resources Journey Expo* (2017)	• *Workshop on 1st Indonesian Human Resources Journey Expo (2017)*
• Sosialisasi Tentang SME & *Learning Champion* (2018)	• *Dissemination on SME and Learning Champion (2018)*
• Restruktrurisasi Kredit "Meneropong Perspektif Regulasi dan Industri (Telaah POJK No. 11/ POJK.03/2020) Strategi Restrukturisasi Kredit Menghadapi Berbagai Skenario COVID- 19 (2020)	• *Credit Restructuring "Looking at Regulatory and Industrial Perspectives (Review of POJK No. 11/ POJK.03/2020) Credit Restructuring Strategies in Facing Various COVID-19 Scenarios (2020)*
• Strategi Menjaga Ketahanan Likuiditas Perbankan dan Mencari Sumber Pendanaan di Bawah Bayang-Bayang Keringnya Likuiditas (2020)	• *Strategies for Maintaining Banking Liquidity Resilience and Finding Sources of Funding in the Shadow of Dry Liquidity (2020)*
• Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 (2020)	• *Provision of Level 5 (2020) Risk Management Certification*
• Ujian Sertifikasi *Treasury Dealer Level Advance* (2020)	• *Advanced Level Treasury Dealer Certification Exam (2020)*

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi

Head of Information Technology Division

NURHADI

Lahir di Magelang, 07 Maret 1970
Born in Magelang, March 07,1970

Lulusan Sarjana Komputer Jurusan Manajemen Informatika dari STMIK YPTK Padang
Bachelor of Computer, specializing in Information Management from STMIK YPTK Padang

DASAR PENUNJUKAN | *BASE OF APPOINTMENT*	
Diangkat menjadi Pemimpin Divisi Teknologi Informasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 14 tanggal 3 Februari 2021	*Appointed as the Head of Information Division Decree No. 14 dated February 3, 2021*

RIWAYAT PEKERJAAN | *WORK HISTORY*	
• *Officer Risk* Manajemen Kantor Pusat (2 Januari 2012-22 Juli 2013)	• *Management Risk Officer at Head Office (January 2, 2012-July 22, 2013)*
• Pemimpin Pemasaran dan Pelayanan PT BPD Jambi Kantor Cabang Muara Tebo (22 Juli 2013-30 Desember 2014)	• *Head of Marketing and Services of PT BPD Jambi Branch Office Muara Tebo (July 22, 2013-December 30, 2014)*
• Pjs. Pemimpin Cabang Muara Tebo (30 Desember 2014-5 Januari 2016)	• *(Ad. int). Branch Manager of Muara Tebo (December 30, 2014-January 5, 2016)*
• Pemimpin Cabang Sutomo (19 Januari 2017-11 Oktober 2017)	• *Head of Sutomo (January 19, 2017-October 11, 2017)*
• Peltu. Pemimpin Divisi *Treasury* dan Dana Kantor Pusat (11 Oktober 2017-30 Agustus 2018)	• *Acting Head of Treasury and Fund Division Head Office (October 11, 2017-August 30, 2018)*
• Pjs. Pemimpin Divisi *Treasury* dan Dana Kantor Pusat (30 Agustus 2018 - 5 Juli 2019)	• *Head of Treasury and Fund Division Head Office (August 30, 2018-July 5, 2019)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Elektronik Banking Kantor Pusat (5 Juli 2019 - 15 Agustus 2019)	• *Head of Electronic Banking Division Head Office (July 5, 2019-August 15, 2019)*
• Pj. Pemimpin Divisi Elektronik Banking Kantor Pusat (15 Agustus 2019 -Sekarang)	• *Head of Electronic Banking Division Head Office (August 15, 2019-Present)*

SEMINAR DAN PELATIHAN | *SEMINARS AND TRAININGS*	
• Operating Sistem Unix dan Inormix (2001)	• *Operating Unix and Inormix Systems (2001)*
• *Introduction to Treasury* (2007)	• *Introduction to Treasury (2007)*
• *Risk Based Internal Audit* (2007)	• *Risk Based Internal Audit (2007)*
• Pelatihan Manajemen Risiko 1 (2008)	• *Training on Risk Management 1 (2008)*
• *Management Implementation of Balance Scorecard* (2008)	• *Management Implementation of Balance Scorecard (2008)*
• *Liquidy Risk Management* (2010)	• *Liquidity Risk Management (2010)*
• *Islamic Banking Basic Training* (2011)	• *Basic Training on Islamic Banking (2011)*
• Sertifikasi Management Risiko 2 (2012)	• *Certification on Risk Management 2 (2012)*
• *Workshop* penyusunan *Action Plan* dan Kebijakan *Anti Fraud* (2012)	• *Workshop on Construction of Action Plan and Anti-Fraud Policy (2012)*
• *Basic Understanding of Islamic Banking* (2014)	• *Basic Understanding of Islamic Banking (2014)*
• Sertifikasi Kompetensi *General Banking* 2 (2015)	• *Competence Certification on General Banking 2 (2015)*
• Uji Kompetensi Manajemen Risiko 3 (2016)	• *Competency Test on Risk Management 3 (2016)*
• Lembang *Executive Forum* (2017)	• *Lembang Executive Forum (2017)*
• Sosialisasi Edukasi Keuangan Sektor Pasar Modal (2018)	• *Dissemination on Financial Education, Capital Market Sector (2018)*
• Strategi Pembayaran di Era COVID-19 dan "*New Normal*" (2020)	• *Payment Strategy in the COVID-19 and "New Normal" Era (2020)*
• Sosialisasi Penggunaan *Tapping Box* dan M-Pos Kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Sarolangun (2020)	• *Socialization of the Use of Tapping Boxes and M-Pos to Taxpayers of Hotels and Restaurants / Restaurants in Sarolangun Regency (2020*

PROFIL PEMIMPIN DIVISI

Profile of Division Head

Pemimpin Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

Head of Compliance and Risk Management Division

ENDANG PURWATI

Lahir di Jambi, 18 November 1971
Born in Jambi, November 18, 1971

Lulusan Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen dari Universitas Jambi
Bachelor of Economics, specializing in Management from Jambi University.

DASAR PENUNJUKAN | *BASE OF APPOINTMENT*	
Diangkat menjadi Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No. 99 tanggal 17 September 2020.	*Appointed as the Head of Compliance and Risk Management Division through Directors Decree No. 99 dated September 17, 2020.*
RIWAYAT PEKERJAAN | *WORK HISTORY*	
• *Officer* Akuntansi dan Teknologi Informasi PT BPD Jambi Kantor Cabang Kuala Tungkal (20 November 2000-4 Februari 2009)	• *Accounting officer and Information Technology at PT BPD Jambi Kuala Tungkal Branch Office (November 20, 2000-February 4, 2009)*
• Pemimpin Pemasaran dan Pelayanan PT BPD Jambi Kantor Cabang Kuala Tungkal (4 Februari 2009-22 Juli 2013)	• *Head of Marketing and Services of PT BPD Jambi Kuala Tungkal Branch Office (February 4, 2009 - July 22, 2013)*
• Pemimpin Cabang PT BPD Jambi Kantor Cabang Bangko (22 Juli 2013-16 Juli 2014)	• *Head of PT BPD Jambi Bangko Branch Office (July 22, 2013- July 16, 2014)*
• Pemimpin Cabang PT BPD Jambi Kantor Cabang Sutomo (16 Juli 2014-19 Januari 2017)	• *Head of PT BPD Jambi Branch Office Sutomo (July 16, 2014- January 19, 2017)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT BPD Jambi Kantor Pusat (22 Juni 2017 - 15 Januari 2019)	• *(Ad int). Head of Compliance and Risk Management Division of PT BPD Jambi's Head Office (June 22, 2017 - January 15, 2019)*
• Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT BPD Jambi Kantor Pusat (15 Januari 2019 - Sekarang)	• *Head of Compliance and Risk Management Division of PT BPD Jambi's Head Office (January 15, 2019 - Present)*
SEMINAR DAN PELATIHAN | *SEMINARS AND TRAININGS*	
• *Trainer Sigma* (*Core Banking*) (2004)	• *Trainer Sigma (Core Banking) (2004)*
• *Strategy Planning Management* (2007)	• *Strategy Planning Management (2007)*
• *Account Officer* (2008)	• *Account Officer (2008)*
• Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko 1 (2008)	• *Certification Training on Risk Management 1 (2008)*
• Pelatihan Pelaporan ke Bank Indonesia (LBU, LHBU) (2009)	• *Training on Report to Bank Indonesia (LBU, LHBU) (2009)*
• PBJJ Analis Kredit angkatan-15 (2009)	• *Long distance learning on Credit Analyst batch-15 (2009)*
• Pelatihan BPD *Net Online* (2009)	• *Training on BPD Net Online (2009)*
• Analisis Kelayakan Kredit Investasi (2010)	• *Investment Credit Feasibility Analysis (2010)*
• *Branch Manager* (2012)	• *Branch Manager (2012)*
• Program Pemeliharaan Sertifikat Manajemen Risiko (2013)	• *Risk Management on Certificate Maintenance Program (2013)*
• Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 3 (2016)	• *Competency Test on Risk Management 3 (2016)*
• Pelatihan *Basic Treasury* (2017)	• *Training on Basic Treasury (2017)*
• Seminar Persiapan Penerapan PSAK 71 (2017)	• *Seminar on the Preparation of Statement on financial accounting standard T71 (2017)*
• FGD GCG *Risk and Compliance* (GRC) (2017)	• *FGD GCG Risk and Compliance (GRC) (2017)*
• Program Pelatihan Reguler FKDKP Angkatan ke-1 (2018)	• *FDKP Regular Training Program Batch - 1 (2018)*
• Sosialisasi Ketentuan Bank Umum (2020)	• *Socialization of Commercial Bank Provisions (2020)*
• Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 (2020)	• *Briefing for Level 5 Risk Management Certification (2020)*
• *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (2020)	• *Refreshment of Risk Management Certification (2020)*

Pemimpin Divisi Satuan Kerja Audit Intern

Head of Internal Audit Work Unit Division

HENDRI

Lahir di Jambi, 2 Juli 1972
Born in Jambi, July 2, 1972

Lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari STIE YKPN Yogyakarta.
Bachelor of Economics, specializing on Accounting of Yogyakarta STIE YKPN.

DASAR PENUNJUKAN | *BASE OF APPOINTMENT*	
Diangkat menjadi Pemimpin Divisi Satuan Kerja Audit Intern melalui Surat Keputusan Direksi No. 99 tanggal 17 September 2020	*Appointed as Head of Internal Audit Division based on Board of Directors Decree No. 99 dated September 17, 2020*

RIWAYAT PEKERJAAN | *WORK HISTORY*	
• Pjs. Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Jambi Kantor Cabang Sutomo (26 Agustus 2002 - 7 Juli 2003)	• *(Ad. int) Head of Credit Section PT BPD Jambi Branch Office Sutomo (August 26, 2002- July 07, 2003)*
• Pemimpin Seksi Keuangan dan Akuntansi PT BPD Jambi Kantor Cabang Muara Tebo (7 Juli 2003-9 Desember 2008)	• *Head of Finance and Accounting Section PT BPD Jambi Branch Office Muara Tebo (July 07, 2003-December 09, 2008)*
• Pemimpin Operasional PT BPD Jambi Kantor Cabang Muara Tebo (9 Desember 2008-27 Juni 2012)	• *Head of Operations PT BPD Jambi Branch Office Muara Tebo (December 9, 2008-June 27, 2012)*
• Pj. Pemimpin Bidang Pengembangan Teknologi Informasi PT BPD Jambi Kantor Pusat (27 Juni 2012-31 Agustus 2012)	• *Acting Head of Information Technology Development Division of PT BPD Jambi Head Office (June 27, 2012-August 31, 2012)*
• Pj. Pemimpin Bidang Operasional Teknologi Informasi PT BPD Jambi Kantor Pusat (31 Agustus 2012-22 Juli 2013)	• *Acting Head of Information Technology Operation Division of PT BPD Jambi's Head Office (August 31, 2012-July 22, 2013)*
• Pemimpin Bidang MIS dan Pelaporan PT BPD Jambi Kantor Pusat (22 Juli 2013-18 September 2014)	• *Head of MIS and Reporting Division of PT BPD Jambi's Head Office (July 22, 2013 - September 18, 2014)*
• Pemimpin Kantor Cabang Kuala Tungkal (18 September 2014-19 Januari 2017)	• *Head of Kuala Tungkal Branch Office (September 18, 2014-January 19, 2017)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Elektronik Banking Kantor Pusat (19 Januari 2017-12 April 2017)	• *(Ad. int). Head of Electronic Banking Division Head Office (January 19, 2017- April 12, 2017)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Satuan Kerja Audit Intern Kantor Pusat (12 April 2017 - 15 Januari 2019)	• *(Ad. int). Head of Intern Audit Work Unit Division Head Office (April 12, 2017 - January 15,2019)*
• Pemimpin Divisi Satuan Kerja Audit Intern Kantor Pusat (2019)	• *Head of Intern Audit Work Unit Division Head Office (2019)*
• Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern Kantor Pusat (2020)	• *Head of Internal Audit Unit Head Office (2020)*

SEMINAR DAN PELATIHAN | *SEMINARS AND TRAININGS*	
• Audit Forensik (2020)	• *Forensic Audit (2020)*
• Sosialisasi Ketentuan Bank Umum (2020)	• *Socialization of Commercial Bank Provisions (2020)*
• Manajemen Risiko Perbankan (2020)	• *Banking Risk Management (2020)*
• Manajemen Risiko Tingkat V (2020)	• *Level V Risk Management (2020)*
• *Capacity Building* Kompetensi KMR (2019)	• *KMR Competency Capacity Building (2019)*
• Pelatihan *Basic Treasury* (2019)	• *Basic Treasury Training (2019)*
• Pelatihan Audit Internal (2019)	• *Internal Audit Training (2019)*
• Diklat Dasar - Dasar Audit (2019)	• *Basic Training - Basic Audit (2019)*
• Audit Intern Bank (2019)	• *Bank Internal Audit (2019)*
• Pembekalan Sertifikasi Audit Intern Bank Ujian Sertifikasi Audit Intern Bank (2019)	• *Briefing for Bank Internal Audit Certification Bank Internal Audit Certification Examination (2019)*
• *Focus Grup Discussion* (FGD) POJK penerapan fungsi audit intern pada bank umum (2019)	• *POJK's Focus Group Discussion (FGD) on the implementation of the internal audit function at commercial banks (2019)*
• Sarasehan Peluang dan Tantangan Menjadi Direksi Korporasi (2019)	• *Workshop on Opportunities and Challenges to Become Corporate Directors (2019)*
• Kegiatan Motivasi dan Tausiyah Agama *(Family Gathering)* (2019)	• *Religious Motivation and Tausiyah Activities (Family Gathering) (2019)*
• Manajemen Risiko Tingkat IV (2018)	• *Level IV Risk Management (2018)*
• *Training Quality Assurance for Internal Audit* (2018)	• *Quality Assurance Training for Internal Audit (2018)*
• *Refreshment* Manajemen Risiko (2018	• *Refreshment of Risk Management (2018)*

PROFIL PEMIMPIN DIVISI

Profile of Division Head

Pemimpin Divisi Kredit

Head of Credit Division

EDI LASTONO K.

Lahir di Sarko, 14 November 1969
Born in Sarko, November 14, 1969

Lulusan Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen dari Universitas Janabadra Yogyakarta
Bachelor of Economics, specializing in Management from Janabadra University Yogyakarta

DASAR PENUNJUKAN | ***BASE OF APPOINTMENT***	
Diangkat menjadi Pemimpin Divisi Kredit Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan No. 05 tanggal 28 Januari 2021.	*Appointed as Head of Head Office Credit Division based on Decree No. 05 dated January 28, 2021.*

RIWAYAT PEKERJAAN | ***WORK HISTORY***	
• Pemimpin Kantor Cabang Utama (2017-2019)	• *Head of Main Branch Office (2017-2019)*
• Pemimpin Kantor Cabang Muara Bulian (2014-2017)	• *Head of Muara Bulian Branch Office (2014-2017)*
• Pemimpin Kantor Cabang Tebo (2013-2014)	• *Head of the Tebo Branch Office (2013-2014)*
• Pemimpin Pemasaran dan Pelayanan Kantor Cabang Tebo (2011-2013)	• *Head of Marketing and Services at Tebo Branch (2011-2013)*
• Pemimpin Kantor Kas Sungai Bengkal (2004)	• *Head of the Sungai Bengkal Cash Office (2004)*

SEMINAR DAN PELATIHAN | ***SEMINARS AND TRAININGS***	
• Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	• *Preparation for Level 5 Risk Management Certification*
• *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko	• *Refreshment of Risk Management Certification*
• Rapat Koordinasi Tahun 2019	• *2019 Coordination Meeting*
• Training Internalisasi Penggunaan SBS, COB dan KiosK	• *Training on Internalization of the Use of SBS, COB and KiosK*
• Program Belajar (Toolkit KiosK)	• *Learning Program (KiosK Toolkit)*
• Pelatihan Reguler FKDKP Angkatan Ke 1 Tahun 2019	• *FKDKP 1st Batch Regular Training of 2019*
• Program Belajar *(Mobile Banking)*	• *Learning Program (Mobile Banking)*
• Program Belajar (SOP *Smart Branch System* (SBS))	• *Learning Program (SOP Smart Branch System (SBS))*
• Seminar Nasional BPDSI	• *BPDSI National Seminar*
• Sosialisasi *Whistleblowing System* dan *Fraud*	• *Socialization of the Whistleblowing System and Fraud*
• *Refreshment* Manajemen Risiko	• *Refreshment of Risk Management*
• *Training Leadership* dan *Character Building* bagi Pejabat Eksekutif	• *Leadership Training and Character Building for Executive Officers*
• Demo Laku Pandai BPDNet Bank Jambi	• *Bank Jambi BPDNet Smart Practice Demo*
• Sosialisasi Metodologi Kredit Usaha Mikro SBFIC Jerman	• *Dissemination of the German SBFIC Micro Business Credit Methodology*
• Bedah Buku *Execution Matter*	• *Execution Matter Book Review*
• Sosialisasi dan *Sharing Session* dengan PT BAP	• *Socialization and Sharing Session with PT. BAP*
• Pelatihan *Leadership & Selling Skill*	• *Leadership & Selling Skill Training*
• Lembang *Executive Forum*	• *Lembang Executive Forum*
• Seminar Motivasi dan *Team Building Games (Family Gathering)*	• *Motivation Seminar and Team Building Games (Family Gathering)*
• Pengarahan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 (2020)	• *Briefing for Level 5 Risk Management Certification (2020)*

Pemimpin Divisi Elektronik Banking

Head of Electronic Banking Division

Hj. FATIMAH

Lahir di Bangko, 02 Oktober 1967
Born in Bangko, October 02, 1967

Lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari AAMPK YPTK Padang
Bachelor of Economics, specializing on Accounting of Padang AAMPK YPTK.

DASAR PENUNJUKAN | *BASE OF APPOINTMENT*	
Diangkat menjadi Pemimpin Divisi Elektronik Banking melalui Surat Penunjukan No.: 5 Tanggal 28 Januari 2021	*Appointed as Head of Electronic Banking Division based on Decree No.: 5 dated Januari 28, 2021*

RIWAYAT PEKERJAAN | *WORK HISTORY*	
• Pemimpin Kantor Kas Sarolangun Kantor Cabang Bangko (21 September 1998-5 Oktober 2000)	• *Head of Sarolangun Cash Office Bangko Branch Office (September 21, 1998-October 5, 2000)*
• Wakil Pemimpin Cabang PT BPD Jambi Kantor Cabang Sarolangun (5 Oktober 2000-13 Februari 2001)	• *Deputy Head of PT BPD Jambi Sarolangun Branch Office (October 5, 2000-February 13, 2001)*
• Wakil Pemimpin Cabang PT BPD Jambi Kantor Cabang Bangko (13 Februari 2001-12 Januari 2009)	• *Deputy Head of PT BPD Jambi Branch Office Bangko (February 13, 2001-January 12, 2009)*
• Pemimpin Pemasaran dan Pelayanan PT BPD Jambi Kantor Cabang Bangko (12 Januari 2009-26 Juni 2012)	• *Head of Marketing and Services of PT BPD Jambi Branch Office Bangko (January 12, 2009 - June 26, 2012)*
• Pjs. Pemimpin Cabang PT BPD Jambi Kantor Cabang Bangko (26 Juni 2012-22 Juli 2013)	• *(Ad. int). Branch Manager of PT BPD Jambi Branch Office Bangko (June 26, 2012-July 22, 2013)*
• Pemimpin Bidang Hubungan Karyawan SDM PT BPD Jambi Kantor Pusat (22 Juli 2013 -18 Desember 2015)	• *Head of Human Resource Relation division of PT BPD Jambi Head Office (July 22, 2013 -December 18, 2015)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Akuntansi dan Keuangan PT BPD Jambi Kantor Pusat (18 Desember 2015-16 Februari 2016)	• *(Ad. int). Head of Accounting and Finance Division of PT BPD Jambi Head Office (December 18, 2015 - February 16, 2016)*
• Pemimpin Bidang Pengembangan Teknologi Informasi PT BPD Jambi Kantor Pusat (16 Februari 2016-25 Agustus 2016)	• *Head of Information Technology Development Division of PT BPD Jambi Head Office (February 16, 2016-August 25, 2016)*
• Pjs. Pemimpin Divisi Teknologi Informasi PT BPD Jambi Kantor Pusat (25 Agustus 2016- 17 Oktober 2018)	• *(Ad. int). Head of Information Technology Division of PT BPD Jambi Head Office (August 25, 2016-October 17, 2018)*
• Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (17 Oktober 2018 - 17 September 2020)	• *Head of Information Technology (October 17, 2018-September 17, 2020)*
• Pemimpin Divisi Elektronik Banking (28 Januari 2021 - Sekarang)	• *Head of Electronic Banking Division (January 28, 2021 - Present)*

SEMINAR DAN PELATIHAN | *SEMINARS AND TRAININGS*	
• Pelatihan *System Operating Unix and Informix* (2001)	• *Training on Operating System Unix and Informix (2001)*
• Analisis Kredit Komersial (2002)	• *Commercial Credit Analysis (2002)*
• Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 133 (2002)	• *Branch Manager Course 133 (2002)*
• *How to Handle Customers Complaint Productively for Banking Industry only* (2005)	• *How to Handle Customers Complaint Productively for Banking Industry only (2005)*
• *Basic Treasury* (2007)	• *Basic Treasury (2007)*
• *Treasury Application Training* (2007)	• *Training on Treasury Application (2007)*
• Sertifikasi Manajemen Risiko 1 (2007)	• *Certification on Risk Management 1 (2007)*
• *Banking Investigation and Banking Mediation (Banking Law Enforcement and Banking Conflict)* (2009)	• *Banking Investigation and Banking Mediation (Banking Law Enforcement and Banking Conflict) (2009)*
• *Training* ATM NCR (2009)	• *Training on NCR ATM (2009)*
• *Anti Money Laundering* (2010)	• *Anti Money Laundering (2010)*
• Sertifikasi Manajemen Risiko 2 (2012)	• *Certification on Risk Management 2 (2012)*
• *Workshop* Membangun Divisi SDM yang Prima (2013)	• *Workshop on Building Competence HR Division (2013)*
• *Workshop* Hubungan Industrial Solusi Peningkatan Harmonisasi Hubungan Pengusaha dan Pekerja (2014)	• *Workshop on Solutions of Industrial Relations for Enhancing Harmonization of Employers and Employees Relation(2014)*
• *Workshop* Perhitungan Aktuaria Sesuai PSAK 24 (2015)	• *Workshop on Actuary Calculation in accordance with Statement on financial accounting standard 24 (2015)*
• Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko 3 (2016)	• *Certification test on Risk Management 3 (2016)*
• *Training Web Admin & Client* LAKU PANDAI (2018)	• *Training Web Admin & Client LAKU PANDAI (2018)*
• Strategi Pembayaran di Era COVID-19 dan *"New Normal"* (2020)	• *Payment Strategy in the COVID-19 and "New Normal" Era (2020)*
• Sosialisasi Ketentuan Bank Umum (2020)	• *Socialization of Commercial Bank Regulations (2020)*
• Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 (2020)	• *Briefing for Level 5 Risk Management Certification (2020)*
• Pembekalan Sertifikasi *Treasury Level Basic* (2020)	• *Briefing for Basic Level Treasury Certification (2020)*

PROFIL PEMIMPIN DIVISI

Profile of Division Head

Pemimpin Divisi Perencanaan Stratejik dan Kinerja

Head of Strategic Planning and Performance Division

R. A. EDI WIDODO

Lahir di Jambi, 16 Februari 1966
Born in Jambi, February 16, 1966

Lulusan Magister Ekonomi, Jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Merdeka Malang
Master of Economics, specializing in Financial Management from Merdeka University Malang

DASAR PENUNJUKAN | ***BASE OF APPOINTMENT***	
Diangkat menjadi Pemimpin Divisi Perencanaan Stratejik dan Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 99 tanggal 17 September 2020	*Appointed as the Head of Strategic Planning an Performance Division based on the Board of Directors Decree No. 99 dated September 17, 2020*
RIWAYAT PEKERJAAN | ***WORK HISTORY***	
• Wakil Pemimpin Kantor Cabang Muara Bungo (16 September 2004-19 Januari 2007)	• *Deputy Head of Branch Office Muara Bungo (September 16, 2004-January 19, 2007).*
• Pjs. Pemimpin Cabang Muara Bungo (19 Januari 2007-27 Januari 2009)	• *(Ad. int). Head of Branch Muara Bungo (January 19, 2007-January 27, 2009)*
• Pemimpin Cabang Muara Bungo (27 Januari 2009-01 Februari 2010)	• *Head of Muara Bungo (January 27, 2009 - February 1, 2010)*
• Kapala Cab Bangko (1 Februari 2010–26 Juni 2012)	• *Head of Branch Office Bangko (Februay 1, 2010-June 26, 2012)*
• Pemimpin Bidang Pemasaran dan Produk Dana pada div. Branch banking Kantor Pusat (26 Juni 2012-16 Oktober 2013)	• *Head of Marketing and Fund Products Division Head Office (June 26, 2012-October 16, 2013)*
• Pemimpin Divisi Umum Kantor Pusat (16 Oktober 2013-3 Agustus 2016)	• *Head of General affairs Head Office (October 16, 2013-August 3, 2016)*
• Pemimpin Divisi Akuntansi dan Keuangan (3 Agustus 2016-5 Juli 2019)	• *Head of Accounting and Finance Division (August 3, 2016-July 5, 2019)*
• Pemimpin Divisi Perencanaan Stratejik dan Kinerja (5 Juli 2019 - Sekarang)	• *Head of Strategic Planning and Performance Division (July 5 2019 - Present)*
SEMINAR DAN PELATIHAN | ***SEMINARS AND TRAININGS***	
• *Workshop Risk Awareness and Implementation Management* Risiko (2008)	• *Workshop on Risk Awareness and Implementation of Risk Management (2008)*
• *Workshop* dan *Budgeting* Produk Baru Bank Jambi (2008)	• *Workshop and Budgeting of New Products of Bank Jambi (2008)*
• Uji Kompetensi Manajemen Risiko 1 (2008)	• *Competency Test on Risk Management 1 (2008)*
• Uji Kompetensi Manajemen Risiko 2 (2009)	• *Competency Test on Risk Management 2 (2009)*
• *Workshop* Nasional Pengadaan Barang dan Jasa (2014)	• *National Workshop on Procurement of Goods and Services (2014)*
• *Workshop* peningkatan Pemahaman Terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 (2014)	• *Workshop on enhancement of Understanding Related to Regulation of the Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 (2014)*
• Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (2014)	• *Training on Certification of Goods and Services (2014)*
• Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko 4 (2015)	• *Certification Test on Risk Management 4 (2015)*
• *Workshop* Penerapan PSAK 71 (IFRS) (2017)	• *Workshop on Implementation of Statement on Financial Accounting Standard 71 (IFRS) (2017)*
• Seminar Pajak (2018)	• *Seminar on Tax (2018)*

Pjs. Pemimpin Kantor Cabang Utama

Ad Int. Head of Main Branch Office

YUFNIZARMAN

Lahir di Koto Majidin, 4 April 1971
Born in Koto Majidin, April 4, 1971

Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari STIE Sakti Alam Kerinci
Bachelor of Economics majoring in Management from STIE Sakti Alam Kerinci

DASAR PENUNJUKAN | *BASE OF APPOINTMENT*	
Diangkat menjadi Pemimpin Kantor Cabang Utama berdasarkan Surat Keputusan No. 05 tanggal 28 Januari 2021.	*Appointed as Head of Main Branch Office based on Decree No. 05 dated January 28, 2021.*

RIWAYAT PEKERJAAN | *WORK HISTORY*	
• Pemimpin Seksi Kredit Kantor Cabang Pembantu Muara Sabak (2006 -2009)	• *Head of Credit Section of Muara Sabak Sub-Branch Office (2006 -2009)*
• Pemimpin Pemasaran dan Pelayanan Kantor Cabang Muara Sabak (2009 -2015)	• *Head of Marketing and Services at Muara Sabak Branch Office (2009-2015)*
• Pemimpin Pemasaran Kantor Cabang Muara Sabak (2015)	• *Head of Marketing for Muara Sabak Branch Office (2015)*
• Pemimpin Kantor Cabang Muara Sabak (2015-2016)	• *Head of Muara Sabak Branch Office (2015-2016)*
• Pemimpin Kantor Cabang Sungai Penuh (2015-2016)	• *Head of Sungai Penuh Branch (2015-2016)*
• Pemimpin Kantor Cabang Sutomo (2017)	• *Head of Sutomo Branch Office (2017)*
• Pjs. Pemimpin Kantor Cabang Utama (2021 - Sekarang)	• *Head of Main Branch Office (2021 - Present)*

SEMINAR DAN PELATIHAN | *SEMINARS AND TRAININGS*	
• Pembekalan SMR Level 4 (2020)	• *Preparation for SMR Level 4 (2020)*
• Pembekalan Sertifikasi *Treasury Level Basic* (2020)	• *Preparation for Treasury Level Basic Certification (2020)*
• *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (2020)	• *Refreshment of Risk Management Certification (2020)*
• Program Belajar (SOP *Mobile Banking*) (2019)	• *Learning Program (SOP Mobile Banking) (2019)*
• Pelatihan *Basic Treasury* (2019)	• *Basic Treasury Training (2019)*
• Program Belajar (pembukaan tabungan) Ujian Sertikasi Manajemen Risiko Level IV	• *Learning Program (opening a savings account) Level IV Risk Management Certification Exam*
• Program Belajar (*Customer On Board* (COB))	• *Learning Program (Customer on Board (COB))*
• Program Belajar (*Mobile Banking*)	• *Learning Program (Mobile Banking)*
• Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV	• *Level IV Risk Management Certification Training*
• Program Belajar (Laku Pandai)	• *Learning Program (Laku Pandai)*
• Program Belajar (*Mobile Banking*)	• *Learning Program (Mobile Banking)*
• Program Belajar (Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Siginjai & Ketentuan Rek Giro)	• *Learning Program (Conditions for Opening a Siginjai Savings Account & Current Account Conditions)*
• Program Belajar (SK Direksi No 72 tahun 2018 & Instruksi Direksi No. 003 tahun 2016)	• *Learning Program (Board of Directors Decree No 72 of 2018 & Directors Instruction No 003 of 2016)*
• Studi/Pembelajaran Aplikasi Perizinan yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi	• *Study / Learning of Licensing Applications Relating to Taxes and Charges*
• Sosialisasi Edukasi Keuangan Sektor Pasar Modal	• *Dissemination of Financial Education in the Capital Markets Sector*
• Sosialisasi *Whistleblowing System* dan *Fraud*	• *Socialization of the Whistleblowing System and Fraud*
• *Refreshment* Manajemen Risiko	• *Refreshment of Risk Management*
• *Training Leadership* dan *Character Building* bagi Pejabat Eksekutif	• *Leadership Training and Character Building for Executive Officers*
• Sosialisasi Laku Pandai	• *"Laku Pandai" Socialization*
• Sosialisasi *Bost Consumer*	• *Socialization of Bost Consumer*
• Bedah Buku *Execution Matter*	• *Book Review "Execution Matter"*
• Sosialisasi dan *Sharing Session* dengan PT. BAP	• *Socialization and Sharing Session with PT. BAP*
• Lembang *Executive* Forum	• *Lembang Executive Forum*
• Seminar Motivasi dan *Team Building Games* (*Family Gathering*)	• *Motivation Seminar and Team Building Games (Family Gathering)*
• Diklat Pemimpin Cabang Angkatan 184	• *Training for Branch Leaders, Batch 184*
• Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 3	• *Level 3 Risk Management Competency Test*
• Pendampingan Tes UKMR Level 3	• *Assistance for Level 3 UKMR Test*

PIMPINAN CABANG BANK JAMBI TAHUN 2021

Bank Jambi Branches Managers Year of 2021

1	**ACHMAD NUNUNG H. S.** Pemimpin Cabang Sutomo *Head of Branch Sutomo*	
2	**MUHAMMAD ACHSIEN ANTHONY** Pemimpin Cabang Muara Bungo *Head of Branch Muara Bungo*	
3	**ADE YUNIAWAN** Pjs. Pemimpin Cabang Kuala Tungkal *(Ad. Int) Head of Branch Kuala Tungkal*	
4	**DWI ANDAYANI** Pjs. Pemimpin Cabang Sengeti *(Ad. Int) Head of Branch Sengeti*
5	**FIRSAN SADLI** Pemimpin Cabang Syariah *Head of Branch Sharia*
6	**HAZWINDAR** Pjs. Pemimpin Cabang Muara Bulian *(Ad. Int) Head of Branch Muara Bulian*

7	**THARMIZI** Pemimpin Cabang Muara Tebo *Head of Branch Muara Tebo*	10	**MULYADI MUIN** Pemimpin Cabang Sungai Penuh *Head of Branch Sungai Penuh*
8	**JANUAR** Pemimpin Cabang Kerinci *Head of Branch Kerinci*	11	**MUHAMMAD ALAWI** Pemimpin Cabang Muara Sabak *Head of Branch Muara Sabak*
9	**MUHAMMAD RIDHO** Pemimpin Cabang Sarolangun *Head of Branch Muara Sarolangun*	12	**DENNY KARYADI** Pemimpin Cabang Banko *Head of Branch Bangko*

PERISTIWA PENTING
Significant Event

01 Upacara HUT Bank Jambi ke-58 di halaman Kantor Pusat Bank Jambi (8 Januari 2021)

The 58th Bank Jambi Anniversary Ceremony at Bank Jambi Head Office (January 8, 2021)

02 Peresmian Bank Jambi KCP Pemayung (17 Februari 2021)

Inauguration of Bank Jambi KCP Pemayung (February 17, 2021)

03 Kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi ke Gedung Menara 9 Bank Jambi (15 Maret 2021)

Visit of the Head of the High Attorney Office of Jambi to Menara 9 Bank Jambi (March 15, 2021)

04 Launching QRIS Bank Jambi dan Pengukuhan Tim TP2DD Provinsi Jambi (11 April 2021)

Launching of Bank Jambi QRIS and Inauguration of the Jambi Province TP2DD Team (April 11, 2021)

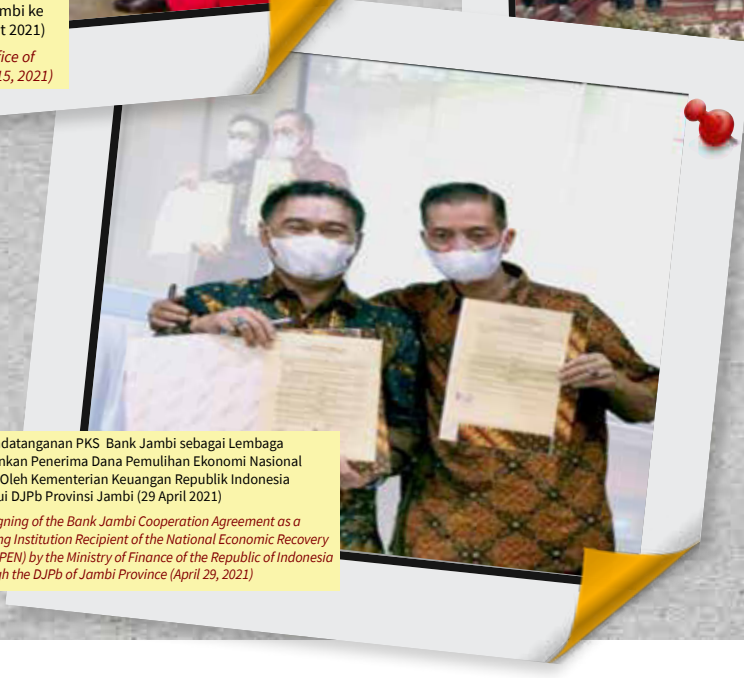

05 Penandatanganan PKS Bank Jambi sebagai Lembaga Perbankan Penerima Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui DJPb Provinsi Jambi (29 April 2021)

The signing of the Bank Jambi Cooperation Agreement as a Banking Institution Recipient of the National Economic Recovery Fund (PEN) by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia through the DJPb of Jambi Province (April 29, 2021)

06 Bank Jambi Sinergi bersama Kemenag Provinsi Jambi (9 Juni 2021)

Bank Jambi Synergy with the Ministry of Religion of Jambi Province (June 9, 2021)

07 Peresmian Bank Jambi Kantor Cabang Kerinci (28 Juni 2021)

Inauguration of Bank Jambi Kerinci Branch Office (June 28, 2021)

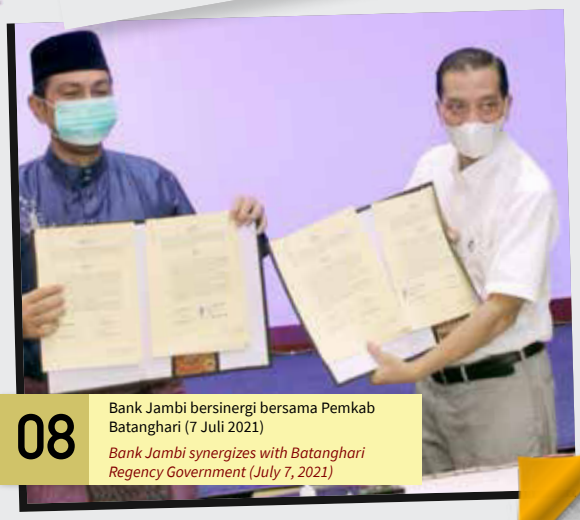

08 Bank Jambi bersinergi bersama Pemkab Batanghari (7 Juli 2021)

Bank Jambi synergizes with Batanghari Regency Government (July 7, 2021)

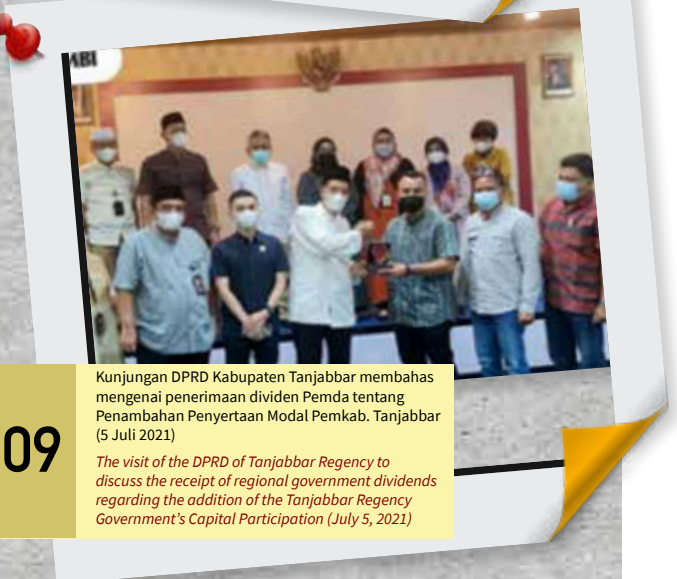

09 Kunjungan DPRD Kabupaten Tanjabbar membahas mengenai penerimaan dividen Pemda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkab. Tanjabbar (5 Juli 2021)

The visit of the DPRD of Tanjabbar Regency to discuss the receipt of regional government dividends regarding the addition of the Tanjabbar Regency Government's Capital Participation (July 5, 2021)

10 Jalin Kerjasama dengan BPKH, Bank Jambi jadi peserta BPIH (15 Juli 2021)

Establish Cooperation with BPKH, Bank Jambi becomes a BPIH participant (July 15, 2021)

PERISTIWA PENTING
Significant Event

11 Kolaborasi Bank Jambi Peduli COVID-19 Bersama Pemerintah Provinsi Jambi (28 Juli 2021)

Bank Jambi Cares for COVID-19 Collaboration with the Jambi Provincial Government (July 28, 2021)

12 Bank Jambi Bersama Pemprov Kibarkan 1000 Bendera Merah Putih di Gentala Arasy (16 Agustus 2021)

Bank Jambi Together with the Provincial Government Raise 1000 Red and White Flags at Gentala Arasy (August 16, 2021)

13 Bank Jambi memberikan 10.000 UMKM melalui Program Gerakan nasional peduli perlindungan tenaga kerja rentan BPJamsostek (21 Agustus 2021)

Bank Jambi provides 10,000 MSMEs through the National Movement Program to care for the protection of vulnerable workers from BPJamsostek (August 21, 2021)

14 Perubahan status Kantor Fungsional Jakarta (30 Agustus 2021)

Changes in the status of the Jakarta Functional Office (August 30, 2021)

15 Vaksinasi Massal Bank Jambi bersama OJK Jambi (7 September 2021)

Mass Vaccination at Bank Jambi with FSA Jambi (September 7, 2021)

16 Bank Jambi Launching Buku Pedoman Cegah Korupsi bersama KPK RI (27 September 2021)

Bank Jambi Launches Guidebook to Prevent Corruption with the Indonesian KPK (September 27, 2021)

17 Penandatanganan MoU Pemberian Pinjaman Daerah Melalui Skema Sindikasi oleh Direktur Utama Bank Jambi dan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Kantor Regional IV Sumbagsel (6 Oktober 2021)

Signing of the MoU on Regional Loans through a Syndicated Scheme by the President Director of Bank Jambi and the Director of Supervision of Financial Services Institutions of FSA of Regional Office IV of South Sumatra (October 6, 2021)

18 Rapat Koordinasi Values of Changes (Performance Overview Q3 2021 Business Plan 2022 and FGD Business Solution 2022. (20 November 2021)

Values of Changes Coordination Meeting (Performance Overview Q3 2021 Business Plan 2022 and FGD Business Solution 2022. (November 20, 2021)

19 Seminar Pemenuhan Modal Inti Minimum BPD bersama Kemendagri, Asbanda, OJK RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi (22 November 2021)

Seminar on Fulfillment of Minimum Core Capital of BPD with Ministry of Home Affairs, Asbanda, OJK RI, Governor and Deputy Governor of Jambi Province (November 22, 2021)

20 Direktur Utama Bank Jambi menerima Penghargaan TOP CEO 2021 (14 Desember 2021)

The President Director of Bank Jambi receives the TOP CEO 2021 Award (December 14, 2021)

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI

Education and Training for Board of Commissioners and Board of Directors

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan *workshop* dalam rangka meningkatkan kompetensi dan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, seminar tersebut antara lain:

Education and Training for the Board of Commissioner

During 2021, the Board of Commissioners has attended seminars and workshops in order to improve competence and in order to support the implementation of duties, these seminars include :

NO.	TANGGAL / *DATE*	TEMPAT PELAKSANAAN/ *VENUE*	NAMA PENDIDIKAN/ *NAME OF EDUCATION*	LEMBAGA PELAKSANA/ *ORGANIZER*	NAMA PESERTA/ *PARTICIPANT*
1	5 Maret 2021/ *March 5, 2021*	Jakarta	Seminar Nasional dan Rakernas FKDK Tahun 2021	FKDK BPDSI	1. Emilia 2. Ari Karyawan Semiawan 3. Khairul Pata
2	13 Maret 2021/ *March 13, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	*Training Outdoor* dan Pemantapan Program Kerja RBB Tahun 2021	BANK JAMBI	1. Emilia 2. Ari Karyawan Semiawan 3. Khairul Pata
3	29 Mei 2021/ *May 29, 2021*	Jakarta	Pembahasan Penjualan Surat Berharga Hapus Buku	BANK JAMBI (KFJ)	1. Ari Karyawan Semiawan 2. Khairul Pata
4	8 Juli 2021/ *July 8, 2021*	*Online*	*Refreshment* Sertifikat Manajemen Risiko Level 2	Talents	Ari Karyawan Semiawan
5	19 November 2021/ *November 19, 2021*	Bogor	*Capacity Building Values Of Change* Bank Jambi Tahun 2021	Internal Bank	Emilia

Pendidikan dan Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan kompetensi guna menunjang dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, selama tahun 2021, Direksi telah mengikuti berbagai seminar dan *workshop*. Berikut program pelatihan yang diikuti oleh Direksi, antara lain:

Board of Directors Education and Training

To improve and develop competencies, in order to support the duties of managing the company, during 2021, the Board of Directors has attended various seminars and workshops. The following are the training programs participated in by the Board of Directors, including:

NO.	TANGGAL / *DATE*	TEMPAT PELAKSANAAN/ *VENUE*	NAMA PENDIDIKAN/ *NAME OF EDUCATION*	LEMBAGA PELAKSANA/ *ORGANIZER*	NAMA PESERTA/ *PARTICIPANT*
1.	14 Januari 2021/ *January 14, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Koordinasi Tahunan Dan Arahan Presiden RI Mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU Dan TPPT Tahun 2021	PPATK	1. Riza Roziani 2. Yunsak El Halcon
2.	23 Januari 2021/ *January 23, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pelatihan Implementasi Channel 9 Bank Jambi	Bank Jambi	1. Khairul Suhairi 2. Pauzi Usman
3.	23 Januari 2021/ *January 23, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	*Refreshment* Sertifikat Manajemen Risiko	BSMR	Yunsak El Halcon
4.	27 Januari 2021/ *January 27, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI-Antasena)	Bank Indonesia	1. Khairul Suhairi 2. Riza Roziani
5.	27 Januari 2021/ *January 27, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Webinar Penguatan Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Dalam Pengembangan Pasar Repo Di Indonesia	Bank Indonesia	Khairul Suhairi

NO.	TANGGAL / *DATE*	TEMPAT PELAKSANAAN/ *VENUE*	NAMA PENDIDIKAN/ *NAME OF EDUCATION*	LEMBAGA PELAKSANA/ *ORGANIZER*	NAMA PESERTA/ *PARTICIPANT*
6.	1 Februari 2021/ *February 1, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Webminar *Launching* Implementasi Aplikasi Pelaporan GO AML	PPATK	Riza Roziani
7.	4 Februari 2021/ *February 4, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pertemuan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan	OJK	Riza Roziani
8.	22 Februari 2021/ *February 22, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pengendalian Gratifikasi Dan Anti Suap Perbankan	FKDKP	Riza Roziani
9.	26 Februari 2021/ *February 26, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI Antasena)	Bank Indonesia	1. Khairul Suhairi 2. Riza Roziani
10.	26 Februari 2021/ *February 26, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Sosialisasi Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul Perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus Bank Umum	OJK	Riza Roziani
11.	5 Maret 2021/ *March 5, 2021*	Jakarta	*Refreshment* Manajemen Risiko Pejabat Eksekutif	Talent Indonesia	Pauzi Usman
12.	6 Maret 2021/ *March 6, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pembekalan Sertifikasi *Treasury Level Advance*	ACI Indonesia	Khairul Suhairi
13.	13 Maret 2021/ *March 13, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	*Training Outdoor* dan Pemantapan Program Kerja RBB Tahun 2021	Bank Jambi	1. Yunsak El Halcon 2. Khairul Suhairi 3. Pauzi Usman 4. Riza Roziani
14.	25 Maret 2021/ *March 25, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank Dalam Menuju Era Pengaturan "*Principle Based*"	FKDKP	Riza Roziani
15.	8 April 2021/ *April 8, 2021*	Jakarta	*Refreshment* Manajemen Risiko Operasional Level 5	Talents Indonesia	Riza Roziani
16.	12 April 2021/ *April 12, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Ujian Sertifikasi *Treasury Dealer Level Advance*	LSPP	Khairul Suhairi
17.	12 April 2021/ *April 12, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pembinaan dan Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha	Bank Jambi	Riza Roziani
18.	24 Mei 2021/ *May 24, 2021*	KFJ	Pembekalan Sertifikasi *Treasury Dealer Level Advance*	Efektif Pro	Khairul Suhairi
19.	27 Mei 2021/ *May 27, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Webinar Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021	BPKP	1. Yunsak El Halcon 2. Riza Roziani
20.	28 Mei 2021 *May 28, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Ujian Sertifikasi *Treasury Dealer Level Advance*	LSPP	Khairul Suhairi
21.	18 Juni 2021/ *June 18, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Perpanjangan Sertifikat General Banking 3	Bank Jambi	Yunsak El Halcon

NO.	TANGGAL / *DATE*	TEMPAT PELAKSANAAN/ *VENUE*	NAMA PENDIDIKAN/ *NAME OF EDUCATION*	LEMBAGA PELAKSANA/ *ORGANIZER*	NAMA PESERTA/ *PARTICIPANT*
22.	19 Juni 2021/ *June 19, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pembahasan Kerjasama Kredit dengan PT Amartha Mikro Fintek	Bank Jambi	Khairul Suhairi
23.	24 Juni 2021/ *June 24, 2021*	Bali	*Workshop BI Fast*	ASBANDA	Pauzi Usman
24.	16 Juli 2021/ *July 16, 2021*	Bank Jambi	Rencana Implementasi Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Di Lingkungan Perbankan	FKDKP	Pauzi Usman
25.	27 Juli 2021/ *July 27, 2021*	Bank Jambi	*Sharing Session* Urgensi Penerapan Iso 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Sektor Jasa Keuangan	Asbanda	Riza Roziani
26.	10 Agustus 2021/ *August 10, 2021*	Bank Jambi	Webinar *IT Platform For Digital Transformation*	Asbanda	Pauzi Usman
27.	1 September 2021/ *September 1, 2021*	Bank Jambi	Pelatihan Ketentuan Bank Umum	Otoritas Jasa Keuangan	Riza Roziani
28.	1 September 2021/ *September 1, 2021*	Bank Jambi	Komitmen Serta Kesiapan Perbankan Dalam Implementasi CBS Bank Indonesia	Bank Indonesia	Pauzi Usman
29.	28 September 2021/ *September 28, 2021*	Bank Jambi	Konvensi Nasional Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan	Riza Roziani
30.	30 September 2021/ *September 30, 2021*	Bali	*Workshop Integrated GRC*	PT Asia Strategi Konsulting	Riza Roziani
31.	7 Oktober 2021/ *October 7, 2021*	Bank Jambi	Webinar *Online* Tantangan dan Strategi Mengatasi Kejahatan Siber	FKDKP	Riza Roziani
32.	21 Oktober 2021/ *October 21, 2021*	Bank Jambi	*Capital Market Online* Seminar Series 5 *"Ipo Legal Preparation And Compliance"*	ASBANDA	1. Riza Roziani 2. Khairul Suhairi
33.	22 Oktober 2021/ *October 22, 2021*	Bank Jambi	Webinar Transformasi Perbankan Di Era Digital	Otoritas Jasa Keuangan	1. Pauzi Usman
34.	28 Oktober 2021/ *October 28, 2021*	Bank Jambi	Undangan Diseminasi Hasil Pengukuran *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terorist Financing* Tahun 2021 Secara *Online*	PPATK	2. Riza Roziani
35.	19 November 2021/ *November 19, 2021*	Jakarta	*Capacity Building Values of Change* Bank Jambi Tahun 2021	Internal Bank	1. Yunsak El Halcon 2. Pauzi Usman 3. Riza Roziani 4. Khairul Suhairi
36.	22 November 2021/ *November 22, 2021*	Bank Jambi	Undangan Focus Group Discussion (FGD) Upaya Deteksi, Cegah dan Berantas Pinjaman *Online* Illegal	PPATK	Riza Roziani
37.	3 Desember 2021/ *December 3, 2021*	*Online*	*Refreshment* Sertifikasi *Treasury Level Advance*	ACI FMA	Yunsak El Halcon
38.	9 Desember 2021/ *December 9, 2021*	Bali	*Focus Group Discussion* Cetak Biru Transformasi Digital BPD SI	Asbanda	Pauzi Usman
39.	20 Desember 2021/ *December 20, 2021*	*Online*	Webinar Peluncuran Infrastruktur Literasi Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Khairul Suhairi

INFORMASI ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN *JOINT VENTURES*

Information on Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

Per 31 Desember 2021, Bank Jambi tidak memiliki entitas anak maupun perusahaan asosiasi dan/atau *Joint Ventures,* sehingga tidak ada informasi yang perlu dilaporkan.

As of December 31, 2021, Bank Jambi has no subsidiaries, associated companies, and/or Joint Ventures, and hence no information need to be disclosed.

STRUKTUR GRUP

Group Structure

Dengan tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi, dengan demikian Bank Jambi tidak memiliki informasi terkait Struktur Grup Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

With no subsidiary nor associate, Bank Jambi therefore does not have any information regarding the Company's Group Structure to be disclosed in this Annual Report.

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Information on the Company Website

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/ POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Bank Jambi telah menyediakan situs web yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan yang beralamat di bankjambi.co.id.

In accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 8/POJK.04/2015 regarding Websites of Issuers or Public Companies, the Bank has a website which can be easily accessed by all stakeholders at bankjambi.co.id.

Keberadaan situs web Bank Jambi juga merupakan salah satu bentuk keterbukaan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG agar seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh berbagai informasi terkait dengan Perusahaan. Selain itu, situs web Perseroan juga memuat informasi produk dan layanan yang diberikan Perseroan. Informasi-informasi yang disajikan dalam *website* senantiasa diperbarui secara berkala.

Bank Jambi website is also a form of transparency in the application of GCG principles so that all stakeholders can obtain various information related to the Company. In addition, the Company's website also contains information on products and services provided by the Company. The information presented on the website is constantly updated regularly.

KEANGGOTAAN ASOSIASI

Member of Association

Bank Jambi tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau ASBANDA, sebuah asosiasi yang beranggotakan 26 BPD seluruh Indonesia. Tujuan pembentukan ASBANDA adalah mendorong BPD yang ada di 26 provinsi tersebut untuk menjadi *be the host* di daerahnya sendiri.

Bank Jambi is a member of the Association of Regional Development Banks or ASBANDA, an association consisting of 26 BPDs throughout Indonesia. The purpose of establishing ASBANDA is to encourage BPDs in the 26 provinces to be the hosts in their own regions.

PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT

DEVELOPMENT
INTEGRATED
CONNECT
MARKET
TARGET
BUSINESS
GROWTH
TEAMWORK
SALE

LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources Report

Sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan upaya pemulihan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari penguatan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia, melalui Bank Indonesia, senantiasa berupaya untuk memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Langkah Bank Indonesia untuk memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang pada esensinya ditujukan untuk menjadikan BPD sebagai *regional champion*, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan yang diluncurkan tahun 2010 ini difokuskan pada tiga pilar berikut:
1. Menjaga dan meningkatkan ketahanan perbankan;
2. Berperan sebagai *agent of regional development*; dan
3. Meningkatkan kemampuan melayani masyarakat, khususnya di daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Bank Jambi menyadari perlunya membangun kualitas SDM-nya, sebagai salah satu faktor terpenting yang harus dikelola dan dikembangkan secara maksimal.

As part of efforts to strengthen the regional economy, the Regional Development Bank (BPD) has an important role in supporting the national economic recovery. This is true since national economic recovery effort is the accumulation of strengthened regional economies. Therefore, the Government of Indonesia, through Bank Indonesia, continues to strive to strengthen the role of the Regional Development Bank (BPD).

Bank Indonesia's initiative to strengthen the role of Regional Development Banks is realized through various policies which are essentially aimed at making BPDs regional champions, which will encourage regional economic growth.

Launched in 2010, the policy is focused on the following three pillars:
1. *Maintaining and enhancing banking resilience;*
2. *Acting as an agent of regional development; and*
3. *Increasing the ability to serve the community, especially in the regions.*

In this regard, Bank Jambi realizes the need to build the quality of its human resources, as one of the most important factors that must be managed and developed optimally.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Bank Jambi, antara lain meliputi:
1. Menyusun dan mengkoordinasi pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan perkembangan bisnis Bank Jambi, termasuk di antaranya penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan SDM, sistem dan rencana rekrutmen.
2. Melakukan pengembangan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang meliputi kebijakan dan strategi

Human Resources Management

The management of Human Resources at Bank Jambi, includes the following:
1. *Arranging and coordinating the fulfillment of Human Resources needs in accordance with the needs of Bank Jambi's business development, including among others the formulation of HR management policies and strategies, recruitment systems and plans.*
2. *Developing education and training activities covering policies and strategies for training and employee*

pelatihan dan pengembangan karyawan, analisis dan pengembangan kebutuhan materi pelatihan.
3. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja serta karir, termasuk di antaranya penyusunan kebijakan dan standar kinerja karyawan, pengelolaan dan penyempurnaan jalur karir, mutasi, rotasi, dan promosi karyawan sesuai dengan kondisi pengembangan bisnis Bank Jambi.
4. Menyusun dan memfasilitasi pengelolaan kesejahteraan karyawan yang disesuaikan dengan kebijakan maupun regulasi yang berkembang.
5. Melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian data karyawan.

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM

Strategi pengelolaan SDM di Bank Jambi diarahkan untuk menciptakan personel-personel yang memiliki kapabilitas tinggi, inovatif, serta berorientasi kepada pelayanan. Dengan demikian, Bank dapat dikelola dengan lebih efektif dan profesional. Kebijakan tersebut selaras dengan strategi jangka panjang Bank Jambi dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk menjadikan BPD sebagai *regional champion.*

Arsitektur pengelolaan SDM di Bank Jambi meliputi hal-hal berikut ini:
1. Melakukan pengembangan organisasi yang mendukung strategi bisnis;
2. Memperbarui *database* karyawan sebagai dasar pengembangan *Human Resources Information System* (HRIS) yang dikelola oleh profesional SDM;
3. Melakukan *mapping* yang jelas terhadap kebutuhan dan pengembangan karyawan yang berdasarkan HRIS;
4. Melakukan perekrutan dan penempatan karyawan pada jabatan dengan kompetensi atau keahliannya;
5. Pelaksanaan kegiatan *jump start* yang terdiri dari beberapa tahapan untuk pengembangan sistem baru dalam pendidikan dan pelatihan karyawan.

Visi Pengelolaan SDM Bank Jambi

Dalam pengelolaan SDM-nya, Bank Jambi telah menyusun visi berikut: memastikan kecukupan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi, Bank Jambi menyusun suatu perencanaan dan pengembangan karyawan yang terpadu dan berkesinambungan.

Komposisi Karyawan

Jumlah karyawan Bank Jambi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 633 karyawan, meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 607 karyawan.

development, analysis and development of training material needs.
3. *Conducting evaluation and performance and career appraisals, including the formulation of employee performance policies and standards, management and improvement of career paths, transfer, rotation and promotion of employees in accordance with the conditions of business development at Bank Jambi.*
4. *Formulating and facilitating the management of employee welfare in accordance with developing policies and regulations.*
5. *Performing administration and documentation of employee data.*

HR Management Policies and Strategies

HR management strategy at Bank Jambi is directed at creating highly capable, innovative and service-oriented personnel. Thus, the Bank can be managed more effectively and professionally. This policy is in line with Bank Jambi's long-term strategy and in accordance with the Government's policy to make BPD a regional champion.

The HR management architecture at Bank Jambi includes the following:
1. *Developing an organization that supports business strategy;*
2. *Updating the employee database as the basis for developing the Human Resources Information System (HRIS) which is managed by HR professionals;*
3. *Perform a clear mapping of the needs and development of employees based on HRIS;*
4. *Recruit and assign employees to positions with competence or expertise;*
5. *Implementation of a jump start activity consisting of several stages for the development of a new system in employee education and training.*

The Vision of HR Management at Bank Jambi

In managing its human resources, Bank Jambi has formulated the following vision: ensuring the adequacy of Human Resources with high competency and integrity, Bank Jambi formulates an integrated and sustainable employee planning and development.

Employee Composition

The number of Jambi Bank employees as of December 31, 2021 was 633 employees, an increase compared to 2020 which was 607 employees.

Perubahan jumlah karyawan merupakan dinamika yang biasa terjadi, namun Manajemen Bank Jambi memastikan bahwa perubahan jumlah karyawan tersebut tidak mengganggu operasional dan dengan demikian Bank Jambi tetap mampu memberikan layanan terbaik sesuai tuntutan nasabah.

The change in the number of employee is a usual dynamic, however, the Management of Bank Jambi ensures that the change in the number of employees does not disrupt the operation and thus Bank Jambi is still able to provide the best service according to customer demands.

Berikut ini komposisi karyawan Bank Jambi berdasarkan status karyawan, jenis kelamin, masa persiapan pensiun, usia, tingkat pendidikan dan level organisasi.

The following is the composition of Bank Jambi employees based on employee status, gender, retirement preparation period, age, educational level and organizational level.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Bank Jambi membagi status karyawannya menjadi karyawan tetap dan tidak tetap. Proses rekrutmen karyawan dimulai dengan status karyawan tidak tetap atau kontrak. Jumlah karyawan tetap Bank Jambi pada tahun 2021 adalah 472 orang, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, yakni 492 orang.

Bank Jambi divides the status of its employees into permanent and non-permanent employees. The employee recruitment process starts with a temporary or contract employee status. The number of permanent employees of Bank Jambi in 2021 was 472 persons, lower than the previous year, namely 492 persons.

Sementara jumlah karyawan tidak tetap adalah 161 orang, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 115 orang.

Meanwhile, the number of non-permanent employees was 161 persons, higher than the previous year, namely 115 persons.

Tabel Komposisi Berdasarkan Status Karyawan
Table of Composition by Employment Status Empowerment
Tahun/*Year* 2018-2021

KOMPOSISI BERDASARKAN STATUS KARYAWAN	2021	2020	2019	2018	*COMPOSITION BY EMPLOYMENT STATUS EMPOWERMENT*
Karyawan Tetap	**472**	492	516	477	*Permanent Employee*
Karyawan Tidak Tetap	**161**	115	107	81	*Non-Permanent Employee*
Jumlah	**633**	607	623	558	***Total***

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

Sesuai kebijakan kepegawaiannya, Bank Jambi tidak membedakan *gender*, sehingga seluruh karyawan mendapatkan perlakuan dan peluang yang sama. Penilaian karyawan hanya berdasarkan kompetensi dari masing-masing individu.

In accordance with its employment policy, Bank Jambi does not differentiate gender, so that all employees get the same treatment and opportunities. Employee assessment is only based on the competence of each individual.

Pada tahun 2021, jumlah karyawan pria adalah 341 orang, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 330 orang. Sementara jumlah karyawan wanita adalah 292 orang, juga lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 277 orang.

In 2021, the number of male employees was 341 persons, higher than the previous year, which was 330 persons. Meanwhile, the number of female employees was 292 persons, also higher than the previous year, namely 277 persons.

Tabel Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin
Table of Employee Composition by Gender
Tahun/*Year* 2018-2021

KOMPOSISI BERDASARKAN JENIS KELAMIN	2021	2020	2019	2018	*EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER*
Pria	**341**	330	341	300	*Male*
Wanita	**292**	277	282	258	*Female*
Jumlah	**633**	607	623	558	***Total***

Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Persiapan Pensiun

Pada tahun 2021, jumlah karyawan yang pensiun adalah 5 orang, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, yakni 9 orang. Sementara karyawan yang terdaftar dalam masa persiapan pensiun adalah 5 orang, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 3 orang.

Employee Composition by Retirement Preparation Period

In 2021, the number of employees who retired was 5 persons, lower than the previous year, which was 9 persons. Meanwhile, 5 employees were registered in the preparation period for retirement, higher than 3 in the previous year.

Tabel Komposisi Berdasarkan Masa Persiapan Pensiun
Table of Composition by Retirement Preparation Period
Tahun /*Year* 2018-2021

KOMPOSISI BERDASARKAN MASA PERSIAPAN PENSIUN	2021	2020	2019	2018	*COMPOSITION BY RETIREMENT PREPARATION PERIOD*
Karyawan Pensiun	**5**	9	3	5	*Retiree*
Masa Persiapan Pensiun	**5**	3	3	2	*Pre-retirement*
Jumlah	**10**	12	6	7	***Total***

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Bank Jambi pada tahun 2021 didominasi oleh karyawan yang berusia 20-30 tahun sebanyak 269 orang. Hal ini berarti operasional Bank Jambi masih didukung oleh karyawan dengan mayoritas usia produktif.

Employee Composition of Age

Bank Jambi in 2021 is dominated by employees aged 20-30 years as many as 269 persons. This means that Bank Jambi operations are still supported by employees with the majority of productive age.

Tabel Komposisi Berdasarkan Usia
Table of Composition by Age
Tahun/*Year* 2018-2021

KOMPOSISI BERDASARKAN USIA	2021	2020	2019	2018	*COMPOSITION BY AGE*
Di bawah 20 tahun	**1**	2	2	2	*Under 20 years old*
20-30 tahun	**269**	270	309	259	*20-30 years old*
31-40 tahun	**179**	165	139	136	*31-40 years old*
41-50 tahun	**138**	132	133	128	41-50 *years old*
51-70 tahun	**46**	38	40	33	*51-70 years old*
Di atas 70 tahun			0	0	*Above 70 years old*
Jumlah	**633**	607	623	558	***Total***

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2021 jumlah karyawan Bank Jambi yang memiliki tingkat pendidikan S1 adalah 474 orang, dan merupakan komponen mayoritas dalam komposisi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan.

Employee Composition by Education Level

In 2021, the number of Bank Jambi employees who have an undergraduate education level is 474 persons, and is the majority component in the composition of employees based on education level.

Tabel Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Table of Composition by Education Level
Tahun/*Year* 2018-2021

KOMPOSISI BERDASARKAN PENDIDIKAN	2021	2020	2019	2018	*COMPOSITION BY EDUCATION*
Doktoral (S3)					*Doctoral (S3)*
Pasca Sarjana (S2)	**22**	19	4	4	*Magister (S2)*
Sarjana (S1)	**474**	458	470	407	*Bachelor (S1)*
Sarjana Muda (D3)	**59**	60	64	63	Diploma (D3)
SMU	**76**	68	81	80	*Senior High School*
SD - SMP	**2**	2	4	4	*Elementary - Junior High School*
Jumlah	**633**	607	623	558	***Total***

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Struktur organisasi di Bank Jambi disusun sesuai kebutuhan bank dan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam operasional. Jenjang jabatan yang berlaku di Bank Jambi terbagi menjadi beberapa level, yaitu Kepala Divisi, Kepala Bidang, Pemimpin Cabang, Kepala Pemasaran/Kepala Operasional dan Pelayanan, Unit Kerja Khusus, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu, Pemimpin Kantor Kas, *Head/ Officer*/Koordinator, Pelaksana dan lain-lain. Perubahan level organisasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang dilaksanakan pada Bank Jambi.

Composition of Employees by Organization Level

The organization at Bank Jambi is structured according to the Bank's needs aimed to support efficiency and effectiveness in operations. The positions that apply at Bank Jambi are divided into several levels, namely Head of Division, Head of Field, Branch Manager, Head of Marketing / Head of Operations and Services, Special Work Units, Head of Sub-Branch Offices, Head of Cash Offices, Head / Officer / Coordinator, Executive and others. Changes in the organizational level are adjusted to the business needs implemented at Bank Jambi.

Tabel Komposisi Berdasarkan Level Organisasi
Table of Composition by Organization Level
Tahun/*Year* 2018-2021

KOMPOSISI BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI	2021	2020	2019	2018	*COMPOSITION BY ORGANIZATION LEVEL*
Kepala Divisi	**11**	9	12	11	*Head of Division*
Kepala Bidang	**22**	19	23	15	*Head of Department*
Pemimpin Cabang	**13**	12	12	12	*Head of Branch Office*
Kepala Pemasaran/Kepala Operasional dan Pelayanan	**13**	19	22	21	*Head of Marketing/Head of Operation and Service*
Unit Kerja Khusus	**1**	2	1	2	*Head of Special Unit*
Pemimpin Unit	**1**				*Head of Unit*
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu/ Pimpinan KFJ	**32**	31	30	28	*Head of Sub-Branch Office/Head of KFJ*
Pimpinan Senior	**14**	14	15	17	*Officer Senior*
Pemimpin Kantor Kas	**9**	9	9	9	*Head of Cash Office*
Pimpinan	**121**	104	56	58	*Officer*
Pelaksana	**234**	270	333	382	*Executive Staff*
Alih Daya					*Outsourced*
Sopir, Karyawan Dasar	**1**	3	3	3	*Driver, Staff*
Tenaga Honor Lainnya	**161**	115	107		*Other Honorary Staff*
Total	**633**	607	623	558	***Total***

Rekrutmen Karyawan

Kebutuhan usaha dan tantangan yang semakin besar telah memberikan kebutuhan akan ketersediaan sumber daya manusia yang cerdas, dinamis dan berintegritas juga semakin meningkat.

Pemenuhan kebutuhan sumber daya ini dilakukan Bank Jambi melalui penerapan strategi pemenuhan karyawan melalui pola rekrutmen yang tepat dengan tetap memperhatikan kualitas dan kompetensi dasar yang dimiliki dari setiap kandidat. Proses perekrutan, seleksi dan upaya mempertahankan karyawan merupakan siklus dalam pertumbuhan Bank Jambi dan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, Bank Jambi menilai bahwa proses rekrutmen dan seleksi menjadi salah satu proses terpenting dalam aktivitas operasional Bank dan telah menerapkan anggaran yang disiapkan secara khusus untuk melakukan proses rekrutmen.

Employee Recruitment

The business needs and growing challenges have increased the demand for human resources who are intelligent, dynamic and with integrity.

Fulfilment of such is carried out by Bank Jambi through the implementation of employee fulfilment strategy, by conducting appropriate recruitment while paying attention to the quality and basic competencies possessed by each candidate. The process of recruiting, selecting and retaining employees is a cycle in the growth of Bank Jambi and is one of the keys to the success of the company's survival. Therefore, Bank Jambi considers that the recruitment and selection process is one of the most important processes in the Bank's operational activities and has implemented a specially prepared budget to carry out the recruitment process.

Rekrutmen dan Seleksi merupakan proses memilih dan menentukan pelamar yang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk diangkat menjadi karyawan Bank Jambi melalui serangkaian ujian/tes, psikotes dan wawancara setiap proses rekrutmen dilakukan secara objektif, terbuka, adil dan setara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan kandidat terbaik yang potensial dan akan mengisi setiap fungsi dan jabatan.

Mekanisme perekrutan yang dilakukan Bank Jambi dilakukan melalui 2 (dua) sistem, yaitu rekrutmen karyawan tidak tetap/*outsourcing* dan rekrutmen karyawan tetap. Bank Jambi telah menerapkan syarat kelulusan minimal dalam proses seleksi dan penerimaan karyawan dengan *passing grade* tertentu.

Pengembangan Organisasi dan Kompetensi

Seiring dengan peningkatan target-target bisnis yang telah ditetapkan maka kebutuhan Bank Jambi terhadap SDM yang berkualitas juga senantiasa berlanjut dan meningkat. Atas kebutuhan tersebut Bank Jambi telah memiliki perencanaan dalam pemenuhan tenaga kerja secara tepat dan akurat sesuai dengan rencana pengembangan organisasi di masa yang akan datang yang dilengkapi dengan perencanaan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda sehingga dapat terintegrasi dengan baik.

Bank Jambi telah melakukan *training need analysis* dengan memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan, *job description* dan perkembangan bisnis atau organisasi sehingga pelatihan tersebut tepat guna dan meningkatkan kinerja organisasi.

Pemenuhan Kompetensi

Untuk mewujudkan transformasi Bank Pembangunan Daerah, Bank Jambi senantiasa berupaya untuk meningkatkan kompetensi karyawannya sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini diwujudkan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai media untuk menciptakan daya guna dari pelaksanaan tugas di setiap unit kerja organisasi.

Proses Diklat di Bank Jambi senantiasa diawali dengan analisis kebutuhan *training* agar materi yang diklat sesuai dengan kebutuhan sehingga Diklat tersebut dapat memberikan hasil yang optimal.

Bank Jambi memiliki 3 (tiga) jenis Analisis Kebutuhan *Training* yakni:

1. *Task Analysis*
   Analisis ini berfokus pada kebutuhan tugas yang dibebankan pada satu posisi tertentu. Bank Jambi akan menganalisis tugas dan tanggung jawab yang melekat pada posisi ini sehingga dapat diketahui jenis pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat mengisi posisi tertentu.

Recruitment and Selection is the process of selecting and determining applicants who meet the requirements and criteria to be appointed as employees of Bank Jambi through a series of tests / tests, psychological tests and interviews, each recruitment process is carried out objectively, openly, fairly and equally without discrimination to get the best potential candidates and will fill every function and position.

The recruitment mechanism carried out by Bank Jambi is carried out through 2 (two) systems, namely the recruitment of temporary employees / outsourcing and the recruitment of permanent employees. Bank Jambi has implemented a minimum passing requirement in the selection and acceptance process for employees with a certain passing grade.

Organizational Development and Competence

Along with the increase in business targets that have been set, Bank Jambi's need for quality human resources also continues and increases. To meet these needs, Bank Jambi has planned to fulfil the workforce composition appropriately and accurately in accordance with future organizational development plan, which are equipped with plans for the implementation of different functions or activities so that they can be properly integrated.

Bank Jambi has conducted training needs analysis by taking into account the required competencies, job descriptions and business or organizational developments so that the training is effective and improves organizational performance.

Fulfilment of Competence

To realize the transformation of the Regional Development Bank, Bank Jambi always strives to improve the competence of its employees in accordance with their respective duties. This is manifested through the Education and Training Program (Diklat) as a medium to create effectiveness from the implementation of tasks in each work unit of the organization.

The training process at Bank Jambi always begins with an analysis of training needs so that the training material is in accordance with the needs so that the training can provide optimal results.

Bank Jambi has 3 (three) types of Training Needs Analysis, namely:

1. *Task Analysis*
   This analysis focuses on the task requirements assigned to a particular position. Bank Jambi will analyze the duties and responsibilities attached to this position so that it can be seen the types of knowledge and skills needed to be able to fill certain positions.

2. *Person Analysis*
   Analisis yang berfokus pada level kompetensi calon karyawan yang akan memegang posisi tertentu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan area pengembangan yang dibutuhkan oleh calon karyawan tersebut, sehingga Bank Jambi mampu menyusun jenis pendidikan yang diperlukan.
3. *Organizational Analysis*
4. Analisis kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada kebutuhan strategis Bank Jambi dalam merespon dinamika situasi/bisnis masa depan. Kebutuhan strategis perusahaan/Bank dirumuskan dengan mengacu pada 2 (dua) elemen pokok :

   a. Strategi Perusahaan, Rencana Bisnis Bank
   b. Nilai Perusahaan, Visi dan Misi Bank Jambi.

Setiap karyawan Bank Jambi diarahkan untuk mampu menjadi SDM yang memiliki kemampuan bersaing dan berubah mengikuti perkembangan bisnis sekaligus memberikan daya dorong bagi kemajuan dan keberlanjutan bisnis Bank Jambi. Oleh karena itu, hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Bank Jambi selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan Bank Jambi baik dalam hal teknis, kemampuan manajerial, maupun sertifikasi.

Pendidikan dan pelatihan karyawan Bank Jambi terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

1. ***In House Training***
   Pelatihan yang dilakukan secara internal baik bagi karyawan yang terlibat secara langsung dengan pekerjaannya dengan menggunakan instruktur dari lembaga pendidikan ataupun instruktur internal yang bertujuan menambah pengetahuan yang bersifat teknis terkait keterampilan dasar dan menengah, misalnya pelatihan aplikasi dari Regulasi Bank Indonesia, aplikasi PSAK, LBU Basel, RTGS, Perpajakan dan lainnya.

2. **Lembaga Pendidikan Eksternal**
   Pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan/ keterampilan manajemen dalam bidang perbankan sifatnya lanjutan untuk mengkaji dan mendalami kasus-kasus serta menambah pengetahuan yang bersifat manajerial dan jenjang karir atau persyaratan jabatan dengan penyelenggara pelatihan yang dilaksanakan di luar lingkungan Bank Jambi, misalnya LPPI, ASBANDA, BSMR, Bank Indonesia dan lembaga pendidikan lainnya.

Komitmen Bank Jambi dalam peningkatan kompetensi karyawan secara berkesinambungan tercermin dari bertambahnya jumlah karyawan (termasuk Direksi, Komisaris DPS, beserta Komite) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Pada tahun 2021, jumlah karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tercatat sebanyak 4.381 naik dari sebelumnya 3.592 orang karena kondisi pandemi mulai

2. *Person Analysis*
   An analysis that focuses on the competency level of a prospective employee who will hold a certain position. This analysis aims to determine the shortcomings and areas of development needed by these prospective employees, so that Bank Jambi is able to arrange the type of education required.

3. *Organizational Analysis*
4. *Analysis of training needs based on the strategic needs of Bank Jambi in responding to the dynamics of the situation / business in the future. The strategic needs of the company / Bank are formulated by referring to 2 (two) main elements:*
   a. Corporate Strategy, Bank Business Plan
   b. Corporate Values, Vision and Mission of Bank Jambi.

Every employee of Bank Jambi is directed to be capable of becoming human resources who have the ability to compete and change following business developments as well as provide a driving force for the progress and sustainability of Bank Jambi's business. Therefore, the results of the education and training needs analysis conducted by Bank Jambi will then be used as the basis for implementing education and training to improve the capabilities of Bank Jambi employees in terms of both technical, managerial and certification capabilities.

Bank Jambi has 2 (two) types of employee education and training, namely:

1. ***In-house Training***
   The training is conducted internally for employees who directly involve with their work, and the training is provided by instructors from educational institutions or internal instructors, with the purpose of increasing technical knowledge related to basic and secondary skills. For example is training for the application of Bank Indonesia Regulations, PSAK, Basel LBU, RTGS, Taxation and many more.

2. ***External Educational Institutions***
   The training is aimed at increasing management knowledge/skills in the banking sector, which is advanced in nature, in order to study and explore cases as well as increase managerial knowledge and career paths or job requirements with training provided by external parties, such as LPPI, ASBANDA, BSMR, Bank Indonesia and other educational institutions.

Bank Jambi's commitment to continuously improving employee competence is reflected in the increasing number of employees (including the Board of Directors, Commissioners of DPS, and the Committees) participating in education and training.
In 2021, the number of employees participating in education and training was recorded at 4,381, an increase from the previous 3,592 because the pandemic conditions began to

berangsur membaik namun masih tetap terbatas pada pelatihan *online*.

Realisasi pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.290.659.720 mengalami kenaikan sebesar 34,86% dari sebelumnya, yakni Rp3.181.608.423.

Realisasi pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 ini mencapai 72,07% dari anggaran yang telah disiapkan, yakni sebesar Rp 5.953.093.100,-

Sistem Manajemen dan Penghargaan Kinerja

Bank Jambi telah memiliki sistem manajemen kinerja, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja Bank Jambi, sekaligus untuk membangun kualitas SDM. Kriteria penilaian kinerja karyawan mencakup pencapaian *Key Performance Index* (KPI) dan pencapaian kompetensi masing-masing individu.

Sistem manajemen kinerja di Bank Jambi dirancang secara bertahap dan sistematis yang meliputi sistem perencanaan, bimbingan, dan evaluasi. Hasil penilaian kinerja karyawan akan menjadi dasar bagi Bank Jambi dalam memberikan apresiasi atas kinerja karyawan, baik dalam bentuk program pengembangan diri, promosi maupun *reward* atau bonus.

Pemberian apresiasi tersebut dilakukan dalam rangka memacu semangat seluruh karyawan Bank Jambi untuk terus mengembangkan diri dengan berkompetisi secara sehat dan berinovasi. Program promosi karyawan di Bank Jambi selain merupakan peluang bagi karyawan untuk pengembangan karir pribadi, juga ditujukan untuk pengembangan organisasi di Bank agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam industri perbankan dan memperkuat posisi Bank di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan dinamis. Bank memberikan promosi bagi karyawan yang menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik, melebihi dari standar kinerja yang telah ditetapkan. Promosi dilakukan setelah melalui penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung untuk kemudian diusulkan kepada Kepala Bidang atau Kepala Divisi. Usulan Promosi tersebut selanjutnya dibahas oleh Dewan Pertimbangan karyawan dan diputuskan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi.

Selain *reward*, manajeman kinerja Bank Jambi juga menerapkan *punishment* sebagai bentuk ketegasan dalam menegakkan peraturan. Bank Jambi akan memberi sanksi disiplin kepada karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penentuan sanksi harus dilakukan berdasarkan ketentuan Direksi. Penentuan jenis sanksi yang ditetapkan harus didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan dan unsur perbuatan baik dampak secara finansial maupun non finansial.

gradually improve but were still limited to online training.

The realization of expenditure for education and training in 2021 is Rp4,290,659,720 an increase of 34.86% from the previous, which was Rp3,181,608,423.

The realization of spending on education and training in 2021 reached 72.07% of the budget that had been prepared, which was Rp. 5,953,093,100,-.

Management System and Performance Rewards

Bank Jambi already has a performance management system, which aims to support the improvement of the performance of Bank Jambi, as well as to build the quality of human resources. The criteria for employee performance appraisal include the achievement of the Key Performance Index (KPI) and the achievement of individual competencies.

The performance management system at Bank Jambi is designed in stages and systematically covering a system of planning, guidance and evaluation. The results of employee performance appraisals will be the basis for Bank Jambi in providing appreciation for employee performance, either in the form of self-development programs, promotions or rewards or bonuses.

The appreciation was given in order to stimulate the enthusiasm of all Bank Jambi employees to continue to develop themselves by competing in a healthy and innovative manner. The employee promotion program at Bank Jambi is not only an opportunity for employees to develop personal careers, but is also aimed at developing the organization in the Bank to be able to answer various challenges in the banking industry and strengthen the position of the Bank in the midst of increasingly fierce and dynamic business competition. The Bank provides promotions for employees who show good performance and performance, exceeding the predetermined performance standards. Promotion is carried out after going through an assessment conducted by the direct supervisor and then proposed to the Head of Division or Head of Division. The Promotion Proposal is then discussed by the employee Advisory Board and decided by the Board of Directors through a Decree of the Board of Directors.

In addition to rewards, Bank Jambi performance management also applies punishment as a form of firmness in enforcing regulations. Bank Jambi will impose disciplinary sanctions on employees who commit disciplinary violations. Determination of sanctions must be carried out based on the provisions of the Board of Directors. Determination of the types of sanctions to be determined must be based on the violations committed, as well as the impact and elements of the act, both financial and non-financial impacts.

Penghargaan Hak Asasi Karyawan dan Kesetaraan Karyawan

Dalam rangka menciptakan dan menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan karyawan, Bank Jambi senantiasa memperhatikan pemenuhan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan karyawan dan kepentingan Bank. Bank Jambi berusaha agar dapat memberikan perlindungan atas hak asasi karyawan untuk merasa nyaman dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Upaya perlindungan hak asasi karyawan tersebut dilakukan dengan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2021, tidak terdapat kecelakaan kerja yang menimpa karyawan Bank Jambi.

Selain itu, Bank Jambi juga senantiasa memberi setiap karyawan hak yang sama untuk bersaing secara sehat melalui pengembangan diri. Hal ini merupakan wujud komitmen Bank Jambi dalam menciptakan kesetaraan hak bagi seluruh karyawan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi, sejak proses rekrutmen, pengembangan kompetensi dan keahlian, hingga penetapan jenjang karir dan remunerasi. Adanya kesetaraan kesempatan kerja di antara karyawan tersebut akan memberikan kontribusi positif pada perkembangan Perseroan.

Employee Rights and Employee Equality Award

In order to create and maintain a harmonious working relationship with employees, Bank Jambi always pays attention to the fulfillment of balanced rights and obligations that aim to align the interests of employees and the interests of the Bank. Bank Jambi strives to be able to provide protection for the human rights of employees to feel comfortable in carrying out their work activities. Efforts to protect employees' human rights are carried out by meeting occupational health and safety standards in accordance with applicable regulations.

During 2021, there were no accidents that befell Bank Jambi employees.

In addition, Bank Jambi also always gives every employee the same rights to compete in a healthy manner through personal development. This is a manifestation of Bank Jambi's commitment to creating equal rights for all employees, regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and conditions, from the recruitment process, competency and expertise development, to the determination of career paths and remuneration. The existence of equal employment opportunities among these employees will make a positive contribution to the development of the Company.

LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Report

VISI

"Menjadikan Bank Jambi Sebagai Bank dengan TI yang andal melalui penyedian layanan perbankan yang kompetitif, dan inovatif"

MISI

1. Meningkatkan Tata Kelola TI dan Pengendalian Internal TI
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya TI
3. Menyediakan teknologi informasi yang andal dan tepat guna dalam memenuhi kebutuhan pengguna
4. Menyinergikan kapabilitas sumber daya TI dalam mendukung upaya Bank Jambi untuk menyediakan layanan yang responsif dan inovatif.

VISION

"Develop Bank Jambi to become a bank with reliable IT through the provision of competitive and innovative banking services"

MISSION

1. *Improve IT governance and IT Internal control;*
2. *Increase the capacity of IT resources;*
3. *Providing information technology that is reliable and efficient in meeting user needs;*
4. *Synergize the capabilities of IT resources to support Bank Jambi's efforts to provide responsive and innovative services.*

AKTIVITAS TI DI TAHUN 2021

IT ACTIVITIES IN 2021

NO.	SUBJEK / *SUBJECT*
APLIKASI INHOUSE /*IN-HOUSE APPLICATION*	
DIVISI AKUNTANSI DAN KEUANGAN / *ACCOUNTING AND FINANCE DIVISION*	
1	*Database* CKPN PSAK71 (Perhitungan CKPN yang akan di-*input* ke Aplikasi SIANIDA)/ *Database for CKPN PSAK71 (Calculation of CKPN to be input to the SIANIDA Application)*
2	Laporan Publikasi (*Upload File* PDF)/ *Publication Report (Upload PDF File)*
DIVISI KREDIT / *CREDIT DIVISION*	
3	Aplikasi KPR Sejahtera / *KPR Sejahtera Application*
4	Aplikasi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) / *FLPP (Housing Financing Liquidity Facility) Application*
5	SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) / *SIKP (Program Credit Information System)*
6	Aplikasi Hapus Buku/APP | *Write-Off/APP Apps*
DIVISI KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO / *COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT DIVISION*	
7	Aplikasi RBBR (*Risk Based Bank Rating*) / *RBBR (Risk Based Bank Rating) Application*
DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA / *HUMAN RESOURCES DIVISION*	
8	Pengembangan Modul SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) / *SIMPEG Module Development (Employee Management Information System):*
	- Pengelompokan Karyawan Aktif / *Active Employee Grouping*
	- Penambahan Notifikasi Terkait Lama Posisi Karyawan/ *Added Notifications Regarding the Terms of Employee Position"*
	- Penambahan Notifikasi Terkait Penyesuaian Grade / *Added Notification Regarding Grade Adjustment*
	- Penambahan Tingkat/Jenjang Jabatan Di kolom Management Riwayat Pekerjaan | *Added Levels/ Ranks In the Employment History Management column*

NO.	SUBJEK / *SUBJECT*
APLIKASI VENDOR (PIHAK KETIGA) / *APPLICATION FOR VENDORS (THIRD PARTY)*	
DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA / *HUMAN RESOURCES DIVISION*	
1	Aplikasi Absensi Tersentralisasi Berbasis Android dan iOS/ *Centralized Time Attendance Application Based on Android and iOS*
DIVISI KREDIT / *CREDIT DIVISION*	
2	Aplikasi Digital Loan / *Digital Loan Application*
3	Aplikasi LOS (*Loan Origination System*) / *LOS (Loan Origination System) application*
UNIT USAHA SYARIAH / *SHARIA BUSINESS UNITS*	
4	*Host to Host* BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) | *Host to Host BPKH (Hajj Financial Management Agency)*
5	Pengembangan / *Upgrade* Aplikasi SPAN Syariah, *Biller* Syariah dan CMS Konven serta Syariah | Development/*Upgrading of Sharia SPAN Applications, Sharia Billers and Conventional and Sharia CMS Applications*
6	Pelaksanaan *Testing* DRC *Delivery Channel* dan CBS T-24 Konvensional dan Syariah / *Implementation of Conventional and Sharia DRC Delivery Channel and CBS T-24 Testing*
7	Aplikasi Dana Bos Non Tunai/ *Non-Cash BOS Fund Application*
8	*WebTeller* Syariah / *Sharia WebTeller*
9	Aplikasi *Call Center* / *Call Center App*
10	Signal
11	Aplikasi SIANIDA/ *SIANIDA Apps*
12	Aplikasi SIAP (Pajak) / *SIAP (Tax) App*
13	*Upgrade* Aplikasi FLPP / *FLPP Apps Upgrade*
14	*Update* H2H Siskohat / *H2H Siskohat Update*
15	Aplikasi SKAKMAT / *SKAKMAT Apps*
16	Aplikasi Laporan DPK Harian (SIMONA) / *Daily Deposit Report Application (SIMONA)*

TATA KELOLA TI

Bank Jambi telah mengimplementasikan pengelolaan sistem teknologi informasi sesuai dengan regulasi perbankan menurut regulator mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dalam penggunaan TI pada Bank Jambi telah berpedoman pada ketentuan regulator dan ketentuan internal yang mengatur serta diwujudkan pada penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ITSP.

STRATEGI PENGEMBANGAN INFORMASI TEKNOLOGI

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan kecepatan layanan dan operasional perbankan, maka semakin kompleks pula kebutuhan adopsi teknologi yang harus dilakukan oleh suatu bank. Hal inilah yang mendasari rencana pengembangan di bidang teknologi informasi yang akan dilakukan Bank Jambi untuk menciptakan proses integrasi yang baik dalam rangka memudahkan operasional intern bank yang tertuang dalam IT *Strategic Plan* yang meliputi:

IT GOVERNANCE

Bank Jambi has implemented an information technology management system in accordance with banking regulations regarding the application of risk management in the use of information technology by commercial banks.

The implementation of risk management and corporate governance in the use of IT at Bank Jambi has been guided by regulatory provisions and internal regulations that govern and are embodied in the preparation of the Information Technology Strategy Plan as an integral part of ITSP.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT STRATEGY

Along with the increasing need for fast banking services and operations, the more complex is the Bank's need to adopt new technology. This is what underlies the information technology development plan to be carried out by Bank Jambi, aiming at creating an excellent integration process to facilitate the Bank's internal operations as stated in the IT Strategic Plan, which includes:

A. Divisi Akuntansi dan Keuangan
1. Aplikasi Laporan BI-Antasena Gabungan + UUS
2. Aplikasi Perbandingan Neraca dan Laba Rugi
3. Aplikasi Laporan ASBANDA
4. Aplikasi Laporan Jumlah Nasabah dan Rekening

B. Divisi Perencanaan Stratejik dan Kinerja
1. *Upgrade* Aplikasi KPI pada Aplikasi SIMPEG

C. Divisi Treasury dan Dana
1. Pengembangan *Channel* Pembayaran MPN
2. Pengembangan SIPD
3. Pengembangan/*Upgrade* CMS Konven dan Syariah
4. BIFast

D. Divisi Usaha Syariah
1. Integrasi Sistem Transaksi Keuangan BPS BPIH dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)

E. Divisi Elektronik Banking
1. APLUSE (Aplikasi USER)
2. *Update* Aplikasi PPAP
3. *Update* Aplikasi SIMOKA
4. *Update* Aplikasi Settlement
5. Pengembangan EDC Acquirer
6. Integrasi Microbiller
7. DIFa Channel (*Dashboard* Informasi Fasilitas *Channel*)
8. Aplikasi perhitungan pendapatan dari transaksibiller di seluruh channel
9. QRIS *Merchant Presented* Metode

F. Divisi Teknologi Informasi
1. Sistem Informasi *Knowledge Base* Bank Jambi
2. Aplikasi Surat-Menyurat
3. *Dashboard* Data *Warehouse*
4. Aplikasi Undian Siginjai SKAK MAT
5. *Dashboard Security*

G. Divisi Kredit
1. *Digital Loan* UMKM
2. Pengembangan/*Upgrade* Aplikasid PDAM, PBB, dan 9 Pajak Daerah Berbasis Web dan Mobile

H. Lainnya
1. Pelaksanaan *Testing* DRC *Delivery Channel* dan CBS T-24 Konvensional dan Syariah
2. Pelaksanaan *Security Awarness*
3. Pengadaan Sistem *Big Data*
4. Pengembangan *Digital Banking* (*Digital Lounge*)
5. Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi
6. Pengembangan Aplikasi Regulator (BI/OJK)
7. Pelaksanaan *Testing* DRC BI-RTGS, BI-ETP dan SKNBI Konvensional dan Syariah
8. Pembangunan *Data Center* Bank Jambi

A. Accounting and Finance Division
1. *Application for BI-Antasena Joint Report + UUS*
2. *Application for Comparison of Balance and Income*
3. *Application for ASBANDA Report*
4. *Application for Reports on the Number of Customers and Accounts*

B. Strategic Planning and Performance Division
1. *Upgrade the KPI Application on SIMPEG*

C. Treasury and Funds Division
1. *Development of MPN Payment Channels*
2. *Development of SIPD*
3. *Development/Upgrading of Conventional and Sharia CMS*
4. *BIFast*

D. Sharia Business Division
1. *Integration of the BPS BPIH Financial Transaction System with the Hajj Financial Management Agency (BPKH)*

E. Electronic Banking Division
1. *APLUSE (USER Application)*
2. *Update the PPAP Application*
3. *Update SIMOKA Application*
4. *Update the Settlement Application*
5. *Development of EDC Acquirer*
6. *Microbiller Integration*
7. *DIFa Channel (Channel Facility Information Dashboard)*
8. *Application for calculating revenue from transactionbillers across all channels*
9. *QRIS Merchant Presented Method*

F. Information Technology Division
1. *Bank Jambi Knowledge Base Information System*
2. *Correspondence Application*
3. *Data Warehouse Dashboard*
4. *Application for Siginjai SKAK MAT*
5. *Security Dashboard*

G. Credit Division
1. *MSME Digital Loans*
2. *Development/Upgrading of Applications for PDAM, PBB, and 9 Web and Mobile-Based Regional Taxes*

H. Others
1. *Implementation of Conventional and Sharia DRC Delivery Channel and CBS T-24 Testing*
2. *Implementation of Security Awareness*
3. *Procurement of Big Data System*
4. *Development of Digital Banking (Digital Lounge)*
5. *Maintenance and Development of Information Technology Infrastructure*
6. *Regulatory Application Development (BI/OJK)*
7. *Implementation of DRC BI-RTGS, BI-ETP and Conventional and Sharia SKNBI Testing*
8. *Development of Jambi Bank Data Center*

4

TINJAUAN EKONOMI
Economic Overview

TINJAUAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Pada tahun 2021, perekonomian global menunjukkan kinerja pemulihan yang cukup baik walau masih berada di bawah tekanan pandemi COVID-19.

Sementara itu, akselerasi vaksinasi COVID-19 telah memberikan dampak positif bagi keberlanjutan proses pemulihan ekonomi dengan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global dan pada menurunnya angka pengangguran di mayoritas negara anggota G20 dan meningkatnya aktivitas perdagangan dunia.

Melihat perkembangan ini telah membuat *Internasional Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan perekonomian global tumbuh di level 5,9% pada tahun 2021. Menurut perkiraan IMF, pemulihan ekonomi dunia tersebut juga berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada negara maju.

Bank-bank sentral negara maju, salah satunya seperti *The Fed*, telah memulai program normalisasi moneternya di akhir kuartal III-2021. Kebijakan pengurangan stimulus dan kenaikan suku bunga acuan mulai dilakukan dan dapat menimbulkan risiko keluarnya aliran modal asing dari negara-negara berkembang dan menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang negara-negara tersebut. Namun demikian, berbagai kalangan menyebutkan bahwa secara umum perekonomian global tetap tangguh dan mampu tumbuh positif di tahun 2021.

GLOBAL ECONOMIC OVERVIEW

In 2021, the global economy showed a fairly good recovery performance even amidst the pressure of the COVID-19.

On the other hand, the acceleration of COVID-19 vaccinations has had a positive impact on the sustainability of the economic recovery process by encouraging increased global economic activity, as reflected in the declining unemployment rate in the majority of the G20 member countries and increasing world trade activities.

Judging from this development, the International Monetary Fund (IMF) projected the global economy to grow at the level of 5.9% in 2021. According to the IMF prediction, the world's economic recovery is also taking place in a more balanced fashion, not only relying on developed countries.

A number of central banks of developed countries, such as the Fed, have started their monetary normalization program by the end of the third quarter of 2021. The policy of reducing stimulus and increasing the benchmark interest rate has begun and can pose a risk of outflows of foreign capital from developing countries and cause pressure on the exchange rates of these countries. However, various groups have stated that in general the global economy remains resilient and is able to grow positively in 2021.

TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Pemulihan ekonomi global mendorong pemulihan ekonomi di negara-negara yang memilki fundamental ekonomi cukup kuat, termasuk Indonesia. Kenaikan permintaan komoditas dan perdagangan antar negara telah mendukung pemulihan ekonomi Indonesia walau masih berupaya menangani pandemi gelombang kedua.

Pemerintah Indonesia terus mempercepat penyaluran vaksinasi COVID-19 untuk melindungi masyarakat dari penularan virus. Dampak gencarnya vaksinasi COVID-19 serta penerapan aturan protokol kesehatan yang ketat, membuat momentum pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik di sepanjang tahun 2021. Terbukti dari tren yang positif dari berbagai indikator ekonomi sektor riil, serta peningkatan mobilitas penduduk di triwulan terakhir tahun 2021 sebagaimana yang dilaporkan Biro Pusat Statistik. Indikator konsumsi juga menunjukkan tren positif yang tercermin dari indeks penjualan ritel Desember 2021 diperkirakan berada di level 206,91 atau mendekati level pra-pandemi yang sebesar 216,36 pada Februari 2020.

NATIONAL ECONOMIC OVERVIEW

The global economic recovery drove the economic recovery in countries, especially those with strong economic fundamentals, including Indonesia. The increase in demand for commodities and international trade has supported Indonesia's economic recovery, despite the fact that the country is still trying to deal with the second wave of the pandemic.

Indonesian government continues to accelerate the distribution of COVID-19 vaccinations to protect the public from virus transmission. The impact of the unabated COVID-19 vaccination as well as the implementation of strict health protocol rules which successfully maintains the momentum of Indonesia's economic recovery throughout 2021. This is evident from the positive trend of various real sector economic indicators, as well as the increase in population mobility in the last quarter of 2021 as shown in the figure reported by the Central Bureau of Statistics. The consumption indicator also shows a positive trend as reflected in the December 2021 retail sales index estimated to be at 206.91 or close to the pre-pandemic level of 216.36 in February 2020.

Perkembangan indikator ekonomi pada Desember 2021 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 3,2-4,0%, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus COVID-19 perlu terus diwaspadai.

Perkiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Kinerja lapangan usaha (LU) Utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian tumbuh meningkat. Secara spasial, perbaikan ekonomi diperkirakan terjadi di seluruh wilayah, terutama Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Bali Nusa Tenggara.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan tetap baik. Surplus NPI pada 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus sekitar 0,2% dari PDB dan surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2021 tetap tinggi, yakni 144,9 miliar dolar AS, setara pembiayaan 8,0 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan dilaporkan semakin menguat seiring dengan pemulihan ekonomi yang berjalan baik. Indeks Keyakinan Konsumen pada bulan Desember 2021 tercatat berada pada level 118,34. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi, yakni 117,65.

Indeks manufaktur juga menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melaporkan bahwa kinerja sektor industri pengolahan nonmigas di tanah air terus menunjukkan peningkatan seiring dengan penerapan kebijakan pemerintah yang probisnis. Hal ini tercemin dari capaian *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur Indonesia pada bulan Oktober yang bertengger di level 57,2 atau naik dibanding bulan September yang berada di peringkat 52,2. Melesatnya PMI manufaktur Indonesia pada bulan kesepuluh tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah manufaktur Indonesia dan menandai bahwa sektor manufaktur sedang mengalami fase ekspansi.

Developments in economic indicators in December 2021 indicate an accelerated recovery process, including community mobility, retail sales, and consumer confidence. Overall, economic growth in 2021 is predicted to remain in the range of 3.2-4.0%, amid maintained government fiscal spending and exports, although the risk of an increase in COVID-19 cases requires continued vigilance.

This forecast is supported by increased mobility in line with accelerated vaccinations, wider economic openings, and continued policy stimulus. The performance of the main business sectors, such as the manufacturing industry, trade, construction, and agriculture grew steadily. Spatially, economic recovery is predicted to take place in all regions, especially Java, Sumatra, Kalimantan and Bali Nusa Tenggara.

Indonesia's Balance of Payments (BOP) is predicted to remain favourable. The balance of payments surplus in 2021 is predicted to increase compared to the previous year, supported by the current account which recorded a surplus of around 0.2% of GDP and an increasing surplus in the capital and financial account.

The position of Indonesia's foreign exchange reserves as of the end of December 2021 remained high, at US$144.9 billion, equivalent to financing 8.0 months of imports or 7.8 months of imports and servicing the Government's foreign debt, and was above the international adequacy standard of around 3 months of imports.

Consumers' expectations for future economic conditions are reported to have strengthened in line with the ongoing economic recovery that went well so far. The Consumer Confidence Index in December 2021 was recorded at the level of 118.34. This figure is higher than the period before the pandemic, which was 117.65.

The manufacturing index also shows a strong growth trend. The Ministry of Industry of the Republic of Indonesia reports that the performance of the non-oil and gas processing industry sector in the country continues to show improvement in line with the implementation of pro-business government policies. This is reflected in the achievement of Indonesia's manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) in October at the level of 57.2 or increased compared to September which was ranked 52.2. Such fast increase in Indonesia's manufacturing PMI in that tenth month was the highest record in Indonesia's manufacturing history and signaled that the manufacturing sector was undergoing an expansion phase.

Sektor eksternal juga tercatat tumbuh sangat kuat tercermin dari tingginya angka pertumbuhan ekspor dan impor. Sektor eksternal yang terdiri dari rumah tangga, bisnis, dan pemerintah di luar negeri, dimana aktivitas bisnis mereka berada di luar kendali ekonomi domestik dan berinteraksi dengan ekonomi domestik melalui perdagangan internasional.

Laju pertumbuhan ekonomi kuartal-IV 2021 diperkirakan dapat berada di atas level 5,0% *year on year* (yoy), sehingga secara keseluruhan kinerja ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,6%.

Akselerasi pemulihan ekonomi Indonesa selain didukung oleh keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, juga dikarenakan penerapan kebijakan stimulus ekonomi Pemerintah Indonesia. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta program penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia.

Inflasi domestik dilaporkan terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tercermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menyentuh rekor tertinggi pada tahun 2021. Inflasi tumbuh 1,87% yoy pada tahun 2021 relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2020, mencerminkan perbaikan tingkat permintaan dan konsumsi domestik. Inflasi tahun 2021 masih stabil seiring dengan sinergi pelaksanaan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dengan otoritas moneter.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pangan masyarakat, menjaga keterjangkauan harga, serta meningkatkan kelancaran arus distribusi. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memberikan insentif fiskal sebagai stimulus bagi masyarakat, di antaranya insentif PPnBM untuk mobil, subsidi PPh bagi UMKM, serta PPh bagi karyawan. Demikian juga Bank Indonesia yang memberikan stimulus berupa relaksasi *Loan to Value* (LTV) maupun *Financing to Value* (FTV) untuk pembiayaan kepemilikan rumah guna mendorong bisnis properti.

TINJAUAN KEUANGAN DAN PERBANKAN

Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut, keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut mengambil langkah dengan menerbitkan dua ketentuan yang memperpanjang masa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan

The external sector also recorded very strong growth as reflected in the high growth rate of exports and imports. The external sector consists of households, businesses, and governments abroad, in which those business activities are outside the control of the domestic economy and can only interact with the domestic economy through international trade.

The rate of economic growth in the fourth quarter of 2021 is estimated to be above the level of 5.0% year on year (yoy), so that the overall economic performance in 2021 is estimated to grow by 3.6%.

The acceleration of Indonesia's economic recovery is not only supported by the successful control of the COVID-19 pandemic, but also due to the implementation of the Indonesian Government's economic stimulus policies. The acceleration of the vaccination program in 2021 as well as the COVID-19 handling program and the National Economic Recovery (PEN) have proven to be effective in maintaining the momentum of Indonesia's economic recovery.

Domestic inflation is reported to be maintained at a low and stable level, while financial market stability is also relatively well maintained, as reflected in the relatively stable exchange rate of the rupiah and the movement of the Jakarta Composite Stock Price Index (JCI) which touched a record high in 2021. Inflation grew by 1.87 % yoy in 2021 was relatively higher than inflation in 2020, reflecting improvements in domestic demand and consumption levels. Inflation in 2021 is still stable in line with the synergy in the implementation of the fiscal, monetary and real sector policy mix, as well as strong coordination between the central and regional governments, with the monetary authorities.

The government continues to strive to improve people's food access, maintain price affordability, and improve the smooth flow of distribution. To support the national economic recovery, the government provides fiscal incentives as a stimulus for the community, including Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) incentives for motor vehicles, income tax subsidies for MSMEs, and income tax for employees. Likewise, Bank Indonesia provided a stimulus in the form of Loan to Value (LTV) and Financing to Value (FTV) relaxation for home ownership financing to encourage the property business.

FINANCIAL AND BANKING OVERVIEW

Bank Indonesia continues to strive to optimize all of its policies in order to maintain macroeconomic and financial system stability, as well as to support efforts to further improve the economy. This decision is in line with the need to maintain stability in the exchange rate and financial system, amidst the low inflation forecast and efforts to support economic growth.

The Financial Services Authority (OJK) also took supportive steps by issuing two provisions extending the relaxation policy period for banking credit restructuring, from March 2022 to

dari Maret 2022 menjadi Maret 2023 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Perpanjangan kebijakan *countercyclical* sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang sudah mengalami perbaikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia memberlakukan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam penanganan Pandemi COVID-19. Ini merupakan stimulus fiskal berupa dana Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp744,77 triliun, untuk mendorong perbaikan ekonomi baik di bidang permintaan maupun penawaran, seperti masing-masing melalui dukungan sosial atau subsidi dan insentif pajak.

Dana Pemulihan Ekonomi yang disalurkan melalui sektor perbankan selain menguntungkan bagi perekonomian negara juga berdampak pada menurunnya tunggakan pinjaman di sektor perbankan karena meningkatnya pembayaran kembali pinjaman, penyaluran kredit pada 2021 tumbuh 4,4% *yoy* menjadi sebesar Rp5.694,9 triliun.

Melalui penerapan kebijakan dan inisiatif yang tepat, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia, mobilitas masyarakat mulai pulih seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial di berbagai daerah yang mendorong perbaikan kegiatan ekonomi menjelang akhir tahun.

TINJAUAN BISNIS & ANALISIS KINERJA KEUANGAN

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan Bank Jambi di tahun 2021 secara keseluruhan menunjukkan pencapaian yang cukup memuaskan di tengah situasi yang sangat tidak kondusif. Kinerja Bank dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai, dapat dilihat dari aset produktif mampu menghasilkan pendapatan bunga yang optimal. Hal ini juga tergambar dari rasio rentabilitas yang meningkat dibandingkan tahun lalu dan pencapaian kinerja laba yang melebihi proyeksi. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai analisis dan pembahasan kinerja keuangan Bank Jambi untuk tahun buku 2021.

ASET

Pada tahun 2021, total aset Bank Jambi naik 15,14% menjadi Rp13.116,34 miliar dari sebelumnya Rp11.389,69 miliar. Sementara adalah jumlah Kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp625,97 miliar atau 5,69%, dari Rp8.480,56 miliar di tahun 2020 menjadi Rp8.963,35 miliar di tahun 2021.

March 2023, in order to maintain the momentum of economic recovery. The extension of this countercyclical policy is an anticipatory and follow-up step to encourage optimization of banking performance, maintain financial system stability, and support economic growth, in order to maintain momentum for improving banking indicators.

In line with that, the Government of Indonesia implemented the National Economic Recovery Program to support state financial policies in handling the COVID-19 Pandemic, as a fiscal stimulus in the form of a National Economic Recovery fund of Rp744.77 trillion, which was aimed at encouraging economic improvement in both demand and supply through social support or subsidies and tax incentives.

Economic Recovery Funds channeled through the banking sector are not only beneficial for the country's economy but also have an impact on decreasing loan arrears in the banking sector due to increased loan repayments, lending in 2021 grew 4.4% yoy to Rp5,694.9 trillion.

Through the implementation of appropriate policies and initiatives, the Indonesian government shows a strong commitment to maintaining Indonesia's economic resilience, community mobility is starting to recover along with the easing of social restrictions policies in various regions that encourage improvement in economic activity towards the end of the year.

BUSINESS REVIEW & FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

FINANCIAL PERFORMANCE

Overall, Bank Jambi's financial performance in 2021 recorded a satisfactory achievement in the midst of a very unfavorable situation. The Bank's performance in generating profits or profitability is quite adequate, as can be seen from the productive assets that are able to generate optimal interest income. This is also reflected in the increased profitability ratio compared to last year and the achievement of profit performance that exceeds projections. The following is a more detailed explanation regarding the analysis and discussion of Bank Jambi's financial performance for the 2021 financial year.

ASSET

In 2021, Bank Jambi's total assets rose 15.14% to Rp13,116.34 billion from the previous Rp11,389.69 billion. Meanwhile, the number of loans disbursed increased by Rp625.97 billion or 5.69%, from Rp8,480.56 billion in 2020 to Rp8,963.35 billion in 2021.

(dalam jutaan rupiah/ *in million rupiah*)

KETERANGAN	2021	2020	*DESCRIPTION*
KAS	**321.828**	**244.279**	***CASH***
Giro pada Bank Indonesia	**536.174**	782.450	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	**1.889**	18.607	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	**789.008**	75.348	*Placements with Bank Indonesia and Other Banks*
Efek-Efek	**2.233.265**	1.598.746	*Marketable Securities*
Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	**142.551**	-	*Securities Purchased under Agreement to Resell*
Kredit yang Diberikan – Bersih	**8.843.622**	8.403.503	*Loans - Net*
Aset Tetap – Bersih	**109.284**	53.316	*Fixed Assets - Net*
Aset Hak Guna - Bersih	**8.220**	13.840	*Right-of-Use Assets - Net*
• Dikurangi: Akumulasi Penyusutan	**(15.441)**		*• Net of: Accumulated Depreciation*
• Jumlah			*• Total*
Aset Tidak Berwujud – Bersih	**490**	81	*Intangible Assets - Net*
Pajak Dibayar di Muka	**7.000**	15.000	*Prepaid Taxes*
Aset Lain-lain - Bersih	**103.638**	184.496	*Other Assets - Net*
Aset Pajak Tangguhan	**19.373**	13.869	*Deferred Tax Assets*
JUMLAH ASET	**13.116.343**	**11.389.695**	***TOTAL ASSETS***

LIABILITAS

Pada tahun 2021, jumlah liabilitas Bank Jambi naik sebesar 16,17% menjadi Rp11.181,23 miliar dari sebelumnya Rp9.625,06 juta pada 2020.

LIABILITY

In 2021, Bank Jambi's total liabilities increased by 16.17% to Rp11,181.23 billion from the previous Rp9,625.06 million in 2020.

(dalam jutaan rupiah/ *in million rupiah*)

KETERANGAN	2021	2020	*DESCRIPTION*
Liabilitas Segera	**184.107**	101.863	*Current Liabilities*
Simpanan Nasabah	**10.599.623**	9.385.841	*Deposits from Customers*
Simpanan dari Bank Lain	**314.503**	10.971	*Deposits from Other Banks*
Utang Pajak	**9.199**	10.638	*Tax Payables*
Liabilitas Pajak Tangguhan	**14.830**	-	*Deferred Tax LIabilities*
Pinjaman yang Diterima		30.000	*Borrowing*
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	**23.946**	44.451	*Employee Benefit*
Liabilitas Lain-lain	**35.026**	41.300	*Other Liabilities*
Jumlah Liabilitas	**11.181.236**	9.625.064	***Total Liabilities***

EKUITAS

Pada tahun 2021, jumlah ekuitas yang tercatat pada Bank Jambi meningkat sebesar 9,66% menjadi Rp1.935,10 miliar dari sebelumnya Rp1.764,63 miliar. Peningkatan ekuitas tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan saldo laba, baik yang sudah ditentukan penggunaannya maupun belum ditentukan penggunaannya, dimana masing-masing naik 16,08% dan 7,95%.

EQUITY

In 2021, the total equity recorded at Bank Jambi increased by 9.66% to Rp1,935.10 billion from the previous Rp1,764.63 billion. The increase in equity was mainly influenced by an increase in retained earnings, both designated and unassigned, which increased by 16.08% and 7.95%, respectively.

(dalam jutaan rupiah/ *in million rupiah*)

KETERANGAN	2021	2020	*DESCRIPTION*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**770.816**	768.317	*Issued and Fully Paid Capital*
Tambahan Modal Disetor	**590**	591	*Additional Paid-in Capital*
Keuntungan (Kerugian) Surat Berharga Tersedia untuk Dijual	**10.121**	7.895	*Available for sale securities*
Keuntungan (Kerugian) atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	**(2.494)**	(23.771)	*Gain (Loss) on Employee Benefits*
Saldo Laba			*Retained Earnings*
- Ditentukan Penggunaannya	**841.920**	735.786	*- Appropriated*
- Belum Ditentukan Penggunaannya	**314.154**	275.813	*- Unappropriated*
Jumlah Ekuitas	**1.935.108**	1.764.631	***Total Equity***

LAPORAN LABA RUGI / *INCOME STATEMENT*

KETERANGAN	2021	2020	*DESCRIPTION*
PENDAPATAN OPERASIONAL			***OPERATING INCOME***
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	**1.145.602**	1.078.540	*Interest Income and Sharia Income*
Pendapatan Operasional Lainnya	**100.573**	117.696	*Other Operating Income*
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**1.246.175**	1.196.236	*TOTAL OPERATING INCOME*
BEBAN OPERASIONAL			*OPERATING EXPENSES*
Beban Bunga dan Bagi Hasil	**392.724**	473.318	*Interest Expense and Profit Sharing*
Beban Operasional Lainnya			*Other Operating Expenses*
• Provisi dan Komisi	**49.394**	3.508	*Fee and Commission*
• Tenaga Kerja	**222.035**	211.671	*Employee*
• Umum dan Administrasi	**134.506**	135.587	*General and Administrative*
• Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	**44.370**	11.263	*Allowance for Impairment Losses*
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**843.030**	835.347	*TOTAL OPERATING EXPENSES*
LABA OPERASIONAL	**403.146**	360.889	*OPERATING INCOMES*
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL	**3.645**	7.631	*NON OPERATING INCOMES (EXPENSES)*
LABA SEBELUM PAJAK	**406.791**	368.520	*INCOME BEFORE TAXES*
BEBAN PAJAK	**92.634**	92.707	*TAX EXPENSES*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**314.154**	275.813	*INCOME FOR THE CURRENT YEAR*
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA	**23.503**	(2.155)	*OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**337.657**	273.658	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR***
LABA PER SAHAM	**408.222**	364.243	***EARNING PER SHARE***

Pendapatan Bunga & Syariah

Pada tahun 2021, jumlah Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah tercatat meningkat 6,22% dari Rp1.078,54 miliar menjadi Rp1.145,61 miliar.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pada tahun 2021, jumlah pendapatan Operasional Lainnya menurun 14,55% dari Rp117,70 miliar menjadi Rp100,57 miliar.

Total Pendapatan Operasional

Total Pendapatan Operasional pada tahun 2021 meningkat tipis sebesar 4,17% dari Rp1.196,24 miliar menjadi Rp1.246,17 miliar.

Total Beban Operasional

Total Beban Operasional pada tahun 2021 meningkat tipis 0,92% dari Rp835,35 miliar menjadi Rp843,03 miliar.

Interest & Sharia Incomes

In 2021, the total Interest Incomes and Sharia Incomes recorded an increase of 6.22% from Rp1,078.54 billion to Rp1,145.61 billion.

Other Operating Incomes

In 2021, total Other Operating incomes decreased by 14.55% from Rp117.70 billion to Rp100.57 billion.

Total Operating Incomes

Total Operating Incomes in 2021 increased slightly by 4.17% from Rp1,196.24 billion to Rp1,246.17 billion.

Total Operating Expenses

Total Operating Expenses in 2021 increased slightly by 0.92% from Rp835.35 billion to Rp843.03 billion.

Laba Operasional
Pada tahun 2021, Laba Operasional Bank Jambi meningkat 11,71% dari Rp360,89 miliar menjadi Rp403,15 miliar.

Pendapatan (Beban) Bukan Operasional
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional pada tahun 2021 menurun signifikan 52,23% dari Rp7,63 miliar menjadi Rp3,64 miliar.

Laba Sebelum Pajak
Laba Sebelum Pajak pada tahun 2021 meningkat 10,39% dari Rp368,52 miliar menjadi Rp406,79 miliar.

Laba Bersih Tahun Berjalan
Pada tahun 2021, Laba Bersih Tahun Berjalan Bank Jambi meningkat 13,90% dari Rp275,81 miliar menjadi Rp314,15 miliar.

Operational Profit
In 2021, Bank Jambi's Operating Profit increased by 11.71% from Rp360.89 billion to Rp403.15 billion.

Non-Operating Incomes (Expenses)
Non-Operating Incomes (Expenses) in 2021 decreased significantly by 52.23% from Rp7.63 billion to Rp3.64 billion.

Profit Before Taxes
Profit Before Taxes in 2021 increased by 10.39% from Rp368.52 billion to Rp406.79 billion.

Net Incomes for the Year
In 2021, Bank Jambi's Net Incomes for the Year increased by 13.90% from Rp275.81 billion to Rp314.15 billion.

ARUS KAS / *CASH FLOW*

(dalam jutaan rupiah/ *in million rupiah*)

KETERANGAN	2021	2020	*DESCRIPTION*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**1.683.512**	(389.383)	*Cash Flows from Operating Activities*
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**(972.946)**	1.087.556	*Cash Flows from Investment Activities*
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**(182.350)**	(602.539)	*Cash Flows from Financing Activities*
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**528.216**	95.634	*Net Increasing (Decreasing) in Cash and Cash Equivalents*
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**1.120.684**	1.025.050	*Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year*
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**1.648.890**	1.120.684	*Cash and Cash Equivalents at the End of the Year*
Jumlah Kas dan Setara Kas	**1.648.890**	1.120.684	***Total Cash and Cash Equivalents***

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih yang dikeluarkan dari aktivitas operasi selama tahun 2021 meningkat drastis 532,35% dari negatif Rp389,38 miliar menjadi positif Rp1.683,51 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi selama tahun 2021 juga menurun drastis, 189,46% dari positif Rp1.087,56 miliar menjadi negatif Rp972,95 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun 2021 meningkat 69,74% dari negatif Rp602,54 miliar menjadi Rp182,35 miliar.

Solvabilitas

Pada tahun 2021, Bank Jambi menunjukkan angka rasio yang masih baik atau *solvable*. Hal ini dapat dilihat dari rasio CAR berkisar antara 21,00% s/d. 25,38% selama 5 tahun terakhir.

Dengan kisaran CAR tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Jambi masih memiliki kemampuan yang baik dalam

Cash Flow from Operating Activities
Net Cash Flows issued from operating activities during 2021 increased dramatically by 532.35% from negative Rp389.38 billion to positive Rp1,683.51 billion.

Cash Flow from Investing Activities
Net Cash Flows obtained from investing activities during 2021 also decreased drastically, 189.46% from positive Rp1,087.56 billion to negative Rp972.95 billion.

Cash Flow from Funding Activities
Net Cash Flow used for financing activities during 2021 increase by 69.74% from negative Rp602.54 billion to Rp182.35 billion.

Solvency

In 2021, Bank Jambi shows a ratio that is still good or solvable. This can be seen from the CAR ratio ranging from 21,00% to 25,38% for the last 5 years.

Judging from the CAR posted by the Bank, it can be concluded that Bank Jambi still has a good ability to pay off its debts,

melunasi hutangnya, karena hanya sebagian kecil dari aktiva dan modalnya yang dibiayai menggunakan hutang.

because only a small part of its assets and capital are financed using debt.

	2021	2020	2019	2018	2017
CAR	**25,38%**	23,90	22,78	24,44	21,00

KOLEKTIBILITAS ***COLLECTABILITY***

	2021	2020	2019	2018	2017
NPL Nett	**1,12%**	0,29	0,44	0,17	0,10

Struktur dan Kebijakan Permodalan

Kebijakan manajemen Bank Jambi dalam mencapai keseimbangan permodalan adalah berusaha untuk menambah dan menguatkan struktur permodalan melalui penambahan modal oleh Pemegang Saham, dengan tujuan mendukung dan mempertahankan kelangsungan usahanya serta menjaga kualitas bisnisnya, sehingga dapat memberikan imbal hasil yang maksimal kepada Pemegang Saham.

Capital Structure and Policy

Bank Jambi's management policy regarding the capital balance is aimed at increasing and strengthening the capital structure through additional capital by Shareholders, in order to support and maintain business continuity and maintaining business quality, so as to provide maximum returns to Shareholders.

(dalam jutaan rupiah/ *in million rupiah*)

KETERANGAN	2021	2020	*DESCRIPTION*
Liabilitas	**11.181.236**	9.625.064	*Liabilities*
Ekuitas	**1.935.108**	1.764.631	*Equity*
Aktiva	**13.116.343**	11.389.695	*Assets*

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen yang dilakukan oleh Bank Jambi telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Dividend Policy

The dividend policy implemented by Bank Jambi is in accordance with the regulations stipulated in the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, which states that the Company is required to set aside a certain amount of net income for each financial year for reserves if the retained earnings are positive until such reserves reach at least 20% of the total issued and paid up capital.

Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi

Terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya tahun 2019 yang berdampak terhadap laporan keuangan Bank. Namun penerapan dari standar dan interpretasi baru tersebut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Impact of Changes in Accounting Policies

There is a Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") which must be applied for the first time in 2019 which have an impact on the Bank's financial statements. However, the adoption of these new standards and interpretations did not result in a substantial change in the Bank's accounting policies and did not have a significant impact on the amounts reported in the current year or the previous year.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I. PENDAHULUAN

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi selanjutnya disebut Bank atau Bank Jambi selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan seluruh *stakeholders,* menerapkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan dengan konsisten etika bisnis dan etika kerja *(code of conduct)* maka Bank wajib menerapkan praktik Tata Kelola yang baik.

Penerapan Tata Kelola yang merupakan keharusan dilaksanakan oleh Bank agar dapat memberikan hasil yang positif sesuai visi dan misi Bank serta akan menciptakan Bank menjadi sehat.

Dalam penerapan Tata Kelola itu Bank selalu mengacu pada beberapa peraturan dan ketentuan terutama ketentuan yang diatur, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi;
4. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

I. INTRODUCTION

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, hereinafter referred to as the Bank or Bank Jambi, always strives to improve its performance, protect the interests of all stakeholders, implement compliance with applicable laws and regulations and consistently implement business ethics and work ethics (code of conduct). Therefore, the Banks is required to implement good corporate governance practices.

Implementation of Good Corporate Governance is mandatory for the Bank in order to be able to provide positive results according to its vision and mission and to grow into a healthy Bank.

In implementing Good Corporate Governance, the Bank always refers to the applicable rules and regulations, especially:

1. *Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;*
2. *POJK No. 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks;*
3. *Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 40/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration;*
4. *SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.*

A. 5 (lima) prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:

1. Transparansi *(transparency),* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas *(accountability),* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif;
3. Pertanggungjawaban *(responsibility),* yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi *(independency),* yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran *(fairness),* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. 11 (sebelas) faktor penilaian dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait *(related party)* dan penyediaan dana besar *(large exposures);*
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal;
11. Rencana strategis Bank.

C. Transparansi pelaksanaan Tata Kelola, paling kurang meliputi:

1. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola paling kurang terdiri dari:
   a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:
      - Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi, Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
      - Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
      - Rekomendasi Dewan Komisaris

A. 5 (five) basic principles that form the basis for the implementation of Governance, namely:

1. *Transparency, namely openness in disclosing material and relevant information and openness in carrying out the decision-making process;;*
2. *Accountability, namely the clarity of functions and responsibilities of the Bank's organs, for the so that their management runs effectively;*
3. *Responsibility, namely the conformity of the Bank's management with the prevailing laws and regulations and the principles of sound Bank management;*
4. *Independence, namely the management of the Bank in a professional manner without any influence/ pressure from any party;*
5. *Fairness, namely fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on the agreement and the applicable laws and regulations.*

B. 11 (eleven) assessment factors to ensure the implementation of 5 (five) basic principles of Governance, namely:

1. *Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors;*
2. *Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners;*
3. *Completeness and implementation of the Committee's duties;*
4. *Handling conflicts of interest;*
5. *Implementation of compliance function;*
6. *Implementation of the internal audit function;*
7. *Implementation of the external audit function;*
8. *Implementation of risk management including internal control system;*
9. *Provision of funds to related parties and large exposures;*
10. *Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, reports on the implementation of Governance and internal reporting;*
11. *Bank strategic plan.*

C. Transparency in the implementation of Governance, which at least includes:

1. *Disclosure of the implementation of Governance shall at least consist of:*
   a. *Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, consisting of:*
      - *Number, Composition, Criteria and Independence, Share Ownership of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners;*
      - *Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
      - *Recommendation from the Board of Commissioners.*

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari:
   - Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite;
   - Tugas dan tanggung jawab Komite;
   - Frekuensi rapat komite;
   - Program kerja Komite dan realisasinya.

c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern Informasi yang perlu diungkap, antara lain:
   - Fungsi Kepatuhan;
   - Fungsi Audit Intern;
   - Fungsi Audit Ekstern.

d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, informasi yang perlu diungkap meliputi:
   - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
   - Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
   - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem infomasi manajemen risiko;
   - Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

e. Penyediaan dana kepada pihak terkait *(related party)* dan penyediaan dana besar *(large exposure)*.

f. Rencana strategis Bank, meliputi:
   - Rencana jangka panjang *(Corporate Plan)*.
   - Rencana jangka menengah dan pendek *(Business Plan)*.

g. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

h. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank.

2. Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.
3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
4. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. *Shares Option.*
6. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
7. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
8. Jumlah Penyimpangan internal *(internal fraud).*
9. Permasalahan Hukum.
10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
11. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi bank.
12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode laporan.
13. Kegiatan Sosial dan Politik.
14. Hasil Penilaian sendiri *(self assessment)* Tata Kelola.

b. Completeness and implementation of the duties of the Committees, consisting of:
   - *Structure, membership, expertise and independence of Committees member;*
   - *Duties and responsibilities of the Committees;*
   - *Frequency of the committees meetings;*
   - *The committees work program and its realization.*

c. Implementation of compliance function, internal audit and external audit Information that needs to be disclosed, among others:
   - *Compliance Function;*
   - *Internal Audit Function;*
   - *External Audit Function.*

d. Implementation of risk management including internal control system, information that needs to be disclosed includes:
   - *Active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
   - *Adequacy of policies, procedures and limit setting;*
   - *Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems;*
   - *Comprehensive internal control system.*

e. Provision of funds to related parties and large exposure.

f. The Bank's strategic plan, including:
   - *Long term plan (Corporate Plan).*
   - *Medium and short term plans (Business Plan)*

g. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions that have not been disclosed in other reports.

h. Other information related to Bank Governance.

2. Share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners which reaches 5% or more of the paid-up capital.
3. Financial and family relationships of members of the Board of Commissioners and Board of Directors with other members of the Board of Commissioners, other Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank.
4. Remuneration packages/policies and other facilities for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
5. Share Options.
6. Ratio of highest and lowest salary.
7. Frequency of the Board of Commissioners' meetings.
8. Number of internal fraud (internal fraud).
9. Legal Issues.
10. Transactions containing conflicts of interest.
11. Buy back shares and/or buy back bank bonds.
12. Provision of funds for social activities and/or political activities during the reporting period.
13. Social and Political Activities.
14. Results of Self-Assessment of Governance.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk kepentingan dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris, baik secara individual maupun kolektif berdasarkan kriteria yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Jambi berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KMR) dan Komite Manajemen Risiko. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor internal dan auditor eksternal lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Jambi.
b) Mengelola Bank Jambi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Mewakili Bank Jambi di dalam dan di luar pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Bank Jambi dengan pihak lain dan sebaliknya.
d) Menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank Jambi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
e) Membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Perkreditan, Komite Kebijaksanaan Perkreditan (KKP), Komite Kredit (KK), Komite Aset Liabilitas *(Asset Liability Committee)*, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Manajemen Risiko Kredit, dan satuan kerja lainnya.
f) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Bank Jambi sesuai dengan tujuan dan bidang usahanya.

II. IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a company organ that is fully in charge of the management of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi for the interests and objectives of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi in accordance with the provisions of the Articles of Association.

In carrying out their duties, the Board of Directors is responsible to the GMS. The accountability of the Board of Directors to the GMS is a manifestation of the accountability of the Bank's management in accordance with the principles of Good Corporate Governance. The performance of the Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners both individually and collectively based on the criteria developed by the Remuneration and Nomination Committee.

1. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors always adheres to and is guided by the Articles of Association as well as internal provisions and applicable laws and regulations. The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the management of Bank Jambi based on the precautionary principle.

The Board of Directors has established the Internal Audit Unit (SKAI), the Compliance and Risk Management Division (KMR) and the Risk Management Committee. The Board of Directors follows up on audit findings and recommendations from the results of OJK supervision, internal auditors and other external auditors.

The duties and responsibilities of the Board of Directors can be described as follows:

a) Fully responsible for the management of Bank Jambi.
b) Managing Bank Jambi in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
c) Represent Bank Jambi inside and outside the court and have the right to take all actions and actions both regarding management and ownership and binding Bank Jambi with other parties and vice versa.
d) Implementing Good Corporate Governance principles in every business activity of Bank Jambi at all levels of the organization.
e) Establish IAU, SKMR and Risk Management Committee, Credit Work Unit, Credit Policy Committee (KKP), Credit Committee (KK), Asset Liability Committee, Compliance Unit, Credit Risk Management Unit and other work units.
f) Strive for and ensure the implementation of Bank Jambi's business and activities in accordance with its objectives and line of business.

g) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bank Jambi, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Bank Jambi dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) bulan kalender sebelum tahun buku dimulai untuk dimintakan pengesahan atau persetujuan.
h) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan yang dituangkan dalam rencana kerja Bank Jambi dan penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Jambi (KPB) yang dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Jambi (PPKPB).
i) Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
j) Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan KKP.
k) Membuat dan memelihara berita acara rapat umum pemegang saham dan berita acara rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Bank Jambi sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Bank.
l) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
m) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank Jambi berupa laporan kegiatan Bank Jambi, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar setiap kali diminta oleh RUPS.
n) Menetapkan struktur organisasi Bank Jambi lengkap dengan perincian tugasnya.
o) Mengajukan kepada Komisaris usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Bank Jambi untuk tahun buku berikutnya.

p) Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan OJK.
q) Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-nya kepada pemegang saham melalui RUPS.
r) Mengungkapkan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
s) Tidak menggunakan jasa profesional yang mandiri sebagai konsultan/penasihat, kecuali memenuhi persyaratan berikut ini:
   - Adanya proyek yang bersifat khusus.
   - Didasari oleh kontrak yang jelas, sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
   - Konsultan/penasihat berasal dari pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
t) Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
u) Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan yang berlaku.

g) Prepare the work plan and budget of Bank Jambi, including other plans related to the business implementation of Bank Jambi and submit it to the Board of Commissioners no later than 2 (two) calendar months before the financial year begins for approval.

h) Prepare and be responsible for the preparation of the credit plan as outlined in the work plan of Bank Jambi and the preparation of the Bank Jambi Credit Policy (KPB) as outlined in the Guidelines for the Preparation of the Bank Jambi Credit Policy (PPKPB).

i) Ensure that the CDE has been implemented in consequent and consistent manner.
j) Implementation of corrective measures for the evaluation results and suggestions submitted by the KKP.
k) Prepare and maintain minutes of the general meeting of shareholders and minutes of the Board of Directors' meeting and maintain the bookkeeping and administration of Bank Jambi in accordance with the prevailing norms for a Bank.
l) Develop an accounting system based on the principles of internal control, especially the separation of functions of management, recording, storage and supervision.
m) Provide accountability and all information regarding the condition and operation of Bank Jambi in the form of reports on Bank Jambi activities, including financial reports, both in the form of annual reports and in the form of other periodic reports according to the method and time specified in the Articles of Association whenever requested by the GMS.
n) Determine the organizational structure of Bank Jambi complete with details of its duties
o) Submitting proposal to the Board of Commissioners for the appointment of Public Accountant to conduct an examination of the financial condition of Bank Jambi for the next financial year.
p) Following up on audit findings and recommendations from the Bank's internal Audit Work Unit, External Auditors and/or results of OJK supervision.
q) Be accountable for the implementation of their duties to shareholders through the GMS.
r) Disclosing to all employees regarding strategic policies in the field of personnel.
s) Not to use independent professional services as consultants/advisors unless they meet the following requirements:
   - *For special project needs.*
   - *Based on clear contract, at least covering the scope of work, responsibilities and duration of work as well as costs.*
   - *Consultants/advisors come from independent parties who are qualified to work on specific projects.*

t) Must provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners.
u) Organizing the Annual GMS and/or Extraordinary GMS in accordance with applicable regulations.

v) Memiliki aturan yang bersifat mengikat bagi seluruh Direksi yang paling kurang mencantumkan:
   - Pengaturan etika kerja dan waktu kerja sebagaimana diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
   - Pengaturan rapat.

w) Mengembangkan kemampuan utama dan kemampuan teknis sesuai dengan visi, misi, dan strategi Bank Jambi yang merupakan harapan dan keinginan dari pemegang saham.

x) Tahun buku Bank Jambi berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Bank Jambi ditutup. Dalam waktu paling lambat tangal akhir April tahun berikutnya setelah buku Bank Jambi ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.

v) Have provision that are binding all Directors which at least include:
   - *Arrangement of work ethics and working time as stipulated in the Organizational Structure and Work Procedure.*
   - *Meeting arrangements.*

w) Develop key capabilities and technical capabilities in accordance with the vision, mission, and strategy of Bank Jambi which are the hopes and desires of the shareholders.

x) The financial year of Bank Jambi starts from 1 (one) January to 31 (thirty one) December. The financial year of Bank Jambi starts from January 1 (one) to December 31 (thirty one) and the Bank's books close at the end of December each year. No later than end of April of the following year after the closing of the book, the Board of Directors must prepare an annual report in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations signed by all members of the Board of Directors and Commissioners to be submitted to the annual GMS.

2. TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi telah menyusun pedoman tata tertib kerja yang antara lain mengatur Etika Kerja Direksi, Penggantian Direksi dan ketentuan lain yang telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola.

2. RULES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has developed a code of conduct which, among other things, regulates the Work Ethics of the Board of Directors, Replacement of the Board of Directors and other provisions that have complied with the principles of Good Corporate Governance.

3. SUSUNAN KEANGGOTAAN DIREKSI

Direksi diangkat melalui RUPS dan telah melalui mekanisme *Fit and Profer Test* oleh OJK. Secara kolektif, Direksi telah memiliki keahlian untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dan terdiri dari anggota yang memiliki pemahaman yang memadai, memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha, membuat keputusan secara independen dan mendorong peningkatan kinerja Perusahaan.

Komposisi Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tahun 2021, yaitu berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari:

3. COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is appointed through the GMS and has passed the Fit and Proper Test by the OJK. Collectively, the Board of Directors has the expertise to carry out the mandated responsibilities and consists of members who have adequate understanding, have the competence to be able to deal with problems that arise in the business, make decisions independently and encourage the improvement of the Company's performance.

The composition of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi in 2021 is 4 (four) persons consisting of:

No.	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Dasar Pengangkatan/*Legal Basis of Appointment*	Periode Pengangkatan/ *Appointment Period*
1	**Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si.**	Direktur Utama *President Director*	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 06 tanggal 5 Maret 2020 *Notary Deed No. 06 of Firdaus Abu Bakar dated March 5, 2020*	2020–2024
2	**H. Khairul Suhairi, S.E.**	Direktur Pemasaran dan Syariah *Director of Marketing and Sharia*	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 24 tanggal 17 Desember 2020 *Notary Deed No. 24 of Firdaus Abu Bakar dated December 17, 2020*	2020–2024
3	**Drs. H. Pauzi Usman**	Direktur Operasional *Director of Operations*	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 24 tanggal 17 Desember 2020 *Notary Deed No. 24 of Firdaus Abu Bakar dated December 17, 2020*	2020–2024
4	**Hj. Riza Roziani, S.E.**	Direktur Kepatuhan *Director of Compliance*	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 19 tanggal 10 Februari 2021 *Notary Deed No. 19 of Firdaus Abu Bakar dated February 10, 2021*	2021–2025

4. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING DIREKSI

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Kepala Unit Kerja bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank, namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pembagian Tugas Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama:

a. Menjalankan visi Bank Jambi dengan menetapkan strategi dan kebijakan.
b. Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan kinerja yang harus dilakukan.
c. Terkoordinasinya kegiatan kerja seluruh anggota Direksi dan Kepala Divisi berikut aparat di bawahnya untuk mencapai hasil yang optimal.
d. Terselenggaranya aktivitas Divisi Audit Intern yang berada langsung di bawahnya agar mencapai rencana kerja yang ditetapkan.
e. Melakukan koordinasi dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Sumber Daya Manusia.
f. Memberikan persetujuan terhadap usulan pengembangan sistem dan manajemen SDM, termasuk rekrutmen, *training* & pengembangan, remunerasi, dan *reward punishment*.
g. Terciptanya hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Pegawai, Nasabah, dan Pemerintah/OJK dalam rangka menciptakan Tata Kelola yang baik.
h. Terselenggaranya pengelolaan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
i. Terkoordinasinya pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi/Unit/Tim Kerja dan Cabang.
j. Terbinanya hubungan dengan seluruh mitra kerja agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.
k. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai Direktur Utama.

4.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pemasaran dan Syariah

a. Memimpin dan mengkoordinasi secara langsung divisi-divisi yang dibawahi meliputi Divisi Unit Usaha Syariah, *Treasury* dan Dana, Elektronik Banking, Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif.
b. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran bidang *Treasury* dan Dana serta bidang Perkreditan Bank.
c. Menetapkan strategi dan kebijakan di bidang pembiayaan korporasi dan *treasury*, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

4. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors does not delegate general powers to other parties which will result in the transfer of duties and functions of the Board of Directors. The Power of Attorney from the Board of Directors to the Head of the Work Unit aims to facilitate the implementation of the Bank's operational duties but may not result in the transfer of duties and functions of the Board of Directors. The division of duties of members of the Board of Directors is as follows:

4.1. Duties and Responsibilities of the President Director:

a. Carry out Bank Jambi's vision by setting strategies and policies.
b. Carry out regular evaluations of the realization of target achievement and determine the steps to improve performance that must be carried out.
c. Coordinate the work activities of all members of the Board of Directors and Heads of Divisions and their subordinates to achieve optimal results.
d. Ensuring the implementation of the activities of the Internal Audit Division which is directly under the President Director in order to achieve the work plan that has been set.
e. Coordinate and evaluate directly the implementation of duties in the Human Resources Division.
f. Approved the proposed HR management and system development, including recruitment, training & development, remuneration and reward punishment.
g. Building a harmonious relationship between the Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders, Employees, Customers, and the Government/OJK in order to create Good Governance.
h. Implementation of Risk Management management in accordance with established policies.
i. Coordinate the development of all Heads of Divisions/ Units/Work Teams and Branches.
j. Established relationships with all work partners in order to realize mutually beneficial relationships for both parties.

k. Perform other duties related to the function as President Director.

4.2. Duties and Responsibilities of the Director of Marketing and Sharia

a. Directly directs and coordinates the divisions under him, including the Sharia Business Unit Division, Treasury and Funds, Electronic Banking, Consumer Credit and Productive Loans.
b. Formulate policy directions and targets in the Treasury and Funds sector as well as in the Bank Credit sector.
c. Establish strategies and policies in the field of corporate financing and treasury, as well as other supporting policies related to the implementation of their duties.

d. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai Direktur Pemasaran.

4.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

a. Memimpin dan mengkoordinasi secara langsung Divisi yang dibawahi, yaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KMR).
b. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko Bank.
c. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
d. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
f. Meminimalkan risiko kepatuhan.
g. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

4.4. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional

a. Memimpin dan mengkoordinasi secara langsung divisi-divisi yang dibawahi, meliputi Divisi Umum dan Sekretaris Perusahaan, Teknologi Informasi, Akuntansi dan Keuangan, serta Sumber Daya Manusia (SDM).
b. Melakukan koordinasi dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan tugas–tugas Divisi Umum, Divisi Akuntansi, Divisi SDM dan Teknologi Informasi, sedangkan untuk pengambilan keputusan yang prinsipil sebelumnya harus melakukan koordinasi dengan Direktur Utama.
c. Menyelia perencanaan strategis pada divisi–divisi yang berada di bawah penyeliaannya, yaitu Divisi Umum, Divisi SDM, dan Divisi Akuntansi dan TI.
d. Mengarahkan dan memonitor pencatatan dan pemeliharaan seluruh aset yang dimiliki Bank berikut pengurusan asuransinya.
e. Memberikan persetujuan terhadap usulan untuk membangun gedung kantor bank dan cabang-cabang baru pada lokasi/daerah yang strategis dan potensial.
f. Me-*review* secara aktif dan penyelia penyiapan laporan-laporan keuangan bank serta kewajiban publikasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Perform other tasks related to the function as Marketing Director.

4.3. Duties and Responsibilities of the Compliance Director

a. Directly directs and coordinates the Division under the Compliance and Risk Management (KMR) Division.

b. Formulate strategies to encourage the creation of a Compliance Culture and the implementation of Bank Risk Management.
c. Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors.
d. Establish compliance systems and procedures that will be used to formulate the Bank's internal provisions and guidelines.
e. Ensure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including sharia principles for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
f. Minimize compliance risk.
g. Take preventive measures so that policies and/or decisions taken by the Board of Directors of the Bank or the Head of the Branch Office of a Foreign Bank do not deviate from the provisions of the OJK and the prevailing laws and regulations.
h. Perform other tasks related to compliance function

4.4. Duties and Responsibilities of the Director of Operations

a. Directly leading and coordinating the Divisions under the General and Corporate Secretary Divisions, Information Technology, Accounting and Finance and Human Resources (HR).
b. Coordinate and evaluate directly the implementation of the tasks of the General Division, Accounting Division, HR and Information Technology Division, while for principal decision-making, prior coordination must be carried out with the President Director.
c. Supervise strategic planning in the Divisions under his supervision, namely the General Division, HR Division and Accounting and IT Division.
d. Directing and monitoring the recording and maintenance of all assets owned by the Bank including the management of insurance.
e. Approval of proposals to build bank office buildings and new branches in strategic and potential locations/regions.

f. Actively reviewing and supervising the preparation of bank financial reports and their publication obligations in accordance with applicable regulations.

g. Memberikan arahan dan mengevaluasi terhadap usulan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan Bank, baik *hardware*, sistem aplikasi, pengendalian mutu maupun pengendalian masalah teknologi.
h. Mengawasi pelaksanaan pengendalian masalah teknologi informasi, khususnya permasalahan teknologi untuk operasional perbankan.
i. Melakukan penilaian prestasi kerja bawahan secara berkala.
j. Menjaga disiplin kerja staf di bawahnya dan hubungan kerja yang harmonis dengan unit organisasi lainnya.
k. Memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris.
l. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan Bank.
m. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai Direktur Operasional.

g. Provide direction and evaluate the proposed development of information technology in accordance with the demands of the Bank's needs, both hardware, application systems, quality control and control of technology problems.

h. Supervise the implementation of controlling information technology issues, particularly technology issues for banking operations.
i. Conduct periodic performance appraisals of subordinates.

j. Maintain work discipline of staff and forge harmonious working relationship with other organizational units.
k. Provide all information relating to the company as required by members of the Board of Commissioners.

l. Implementing the principles of Good Corporate Governance in every activity of the Bank.
m. Perform other tasks related to the function as Director of Operations.

5. INDEPENDENSI DIREKSI

5. BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

5.1. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi (Y = Ya; T = Tidak)

5.1. Board of Directors' Financial and Family Relationships (Y = Yes; T = No)

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Hubungan Keuangan sampai dengan Derajat Kedua dengan/ *Financial Relationship with*						Hubungan Keluarga dengan/ *Family Relationship up to the Second Degree with*					
			Direksi		Dekom		PSP		Direksi		Dekom		PSP	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	**Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si.**	Direktur Utama *President Director*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√
2	**H. Khairul Suhairi, S.E.**	Direktur Pemasaran & Syariah *Director of Marketing and Sharia*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√
3	**Drs. H. Pauzi Usman**	Direktur Operasional *Director of Operations*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√
4	**Hj. Riza Roziani, S.E.**	Direktur Kepatuhan *Director of Compliance*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√

5.2. Kepemilikan Saham Direksi

Direksi tidak memiliki saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dan di perusahaan lain. Sejalan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Direksi telah menandatangani pakta integritas dan telah diserahkan kepada LPS sebagai komitmen menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Berikut daftar kepemilikan saham Direksi.

5.2. Board of Directors Share Ownership

The Board of Directors does not own shares in PT Bank Pembangunan Daerah Jambi and other companies. In line with good corporate governance practices, the Board of Directors has signed an integrity pact and has submitted it to IDIC as a commitment to avoid transactions that contain conflicts of interest. The following is a list of the share ownership of the Board of Directors.

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Saham di Bank Jambi/ *Shares at Bank Jambi*	Saham di Perusahaan Lain/ *Shares at Other*
1	**Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., MSi**	Direktur Utama/*President Director*	Nihil/*None*	Nihil/*None*
2	**H. Khairul Suhairi, S.E.**	Direktur Pemasaran & Syariah/*Director of Marketing & Sharia*	Nihil/*None*	Nihil/*None*
3	**Drs. H. Pauzi Usman**	Direktur Operasional/*Director of Operations*	Nihil/*None*	Nihil/*None*
4	**Hj. Riza Roziani, S.E.**	Direktur Kepatuhan/*Director of Compliance*	Nihil/*None*	Nihil/*None*

5.3. Rangkap Jabatan Direksi (Y = Ya; T = Tidak)

Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

5.3. Concurrent Positions of the Board of Directors (Y = Yes; T = No)

All Directors do not have concurrent positions as the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers at a Bank or other company, or as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officer in 1 (one) financial institution/company, or member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officer which carries out the supervisory function in 1 (one) non-Bank subsidiary company controlled by the Bank.

No.	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Rangkap Jabatan pada Lembaga/Perusahaan Keuangan/ *Concurrent Positions in Financial Institutions/ Companies*		Rangkap Jabatan pada Lembaga/ Perusahaan Anak Bukan Bank yang Dikendalikan Bank/ *Concurrent Positions in Non-Bank Subsidiary Institutions/Companies Controlled by the Bank*	
			Y	T	Y	T
1.	**Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si.**	Direktur Utama/ *President Director*	X	√	X	√
2.	**H. Khairul Suhairi, S.E.**	Direktur Pemasaran & Syariah/ *Director of Marketing & Sharia*	X	√	X	√
3.	**Drs. H. Pauzi Usman**	Direktur Operasional/*Director of Operations*	X	√	X	√
4.	**Hj. Riza Roziani, S.E.**	Direktur Kepatuhan/*Director of Compliance*	X	√	X	√

6. RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi yang telah dilaksanakan, baik secara berkala maupun tertentu, pada tahun 2021 sebanyak 59 kali. Adapun daftar kehadiran rapat Direksi di tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

6. BOARD OF DIRECTORS MEETING

The Board of Directors meetings that have been held in 2021, both periodically and incidentally, were 59 times. The list of attendance for the Board of Directors meeting in 2021 is as follows:

Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Rapat Direksi/*Board of Directors Meeting*	
		Jumlah Kehadiran/ *Total Attendance*	% Kehadiran/ *% Attendance*
Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si.	Direktur Utama/*President Director*	24	40,68%
H. Khairul Suhairi, S.E.	Direktur Pemasaran & Syariah/*Director of Marketing & Sharia*	33	55,93 %
Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional/*Director of Operations*	24	40,68 %
Hj. Riza Roziani, S.E.	Direktur Kepatuhan/*Director of Compliance*	35	59,32 %

7. KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi tahun 2021 meliputi gaji dan kompensasi lainnya, termasuk tantiem. Proses penetapan remunerasi didasarkan pada hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan *peer group*;
b. Mempertimbangkan kinerja Perusahaan;
c. Metode Remunerasi Variabel disusun berdasarkan kinerja dan risiko.

8. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji merupakan imbalan yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tertinggi, dan pegawai terendah yang diterima per bulan.

9. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan kompetensi guna menunjang dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, selama tahun 2021, Direksi telah mengikuti berbagai seminar dan *workshop*. Berikut program pelatihan yang diikuti oleh Direksi, antara lain:

7. REMUNERATION POLICY FOR BOARD OF DIRECTORS'

The total remuneration paid to the Board of Directors in 2021 including salaries and other compensation including bonuses. The remuneration determination process is based on the results of a review by the Remuneration and Nomination Committee by considering the following:

a. Based on peer groups;
b. By considering the Company's performance;
c. Variable Remuneration Method is based on performance and risk

8. RATIO OF HIGHEST AND LOWEST SALARY

The salary compared in the salary ratio is the compensation received by the Board of Directors, Board of Commissioners, the highest employee and the lowest employee received per month.

9. BOARD OF DIRECTORS EDUCATION AND TRAINING

In order to improve and develop competencies to support carrying out the duties of managing the company, during 2021, the Board of Directors has attended various seminars and workshops. The following are the training programs attended by the Board of Directors, including:

No	Tanggal/*Date*	Tempat Pelaksanaan/ *Place*	Nama Pendidikan/*Name of Education*	Lembaga Pelaksana/ *Organizer*	Nama Peserta/ *Participant*
1.	14 Januari 2021/ *January 14, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden RI mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2021/*Annual Coordination and Directives from the President of the Republic of Indonesia regarding the Prevention and Eradication of Money Laundering and Money Laundering Money in 2021*	PPATK	1. Riza Roziani 2. Yunsak El Halcon
2.	23 Januari 2021/ *January 23, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pelatihan Implementasi *Channel* 9 Bank Jambi/*Training for the Implementation of Channel 9 Bank Jambi*	Bank Jambi	1. Khairul Suhairi 2. Pauzi Usman
3.	23 Januari 2021/ *January 23, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	*Refreshment* Sertifikat Manajemen Risiko/ *Risk Management Certificate Refreshment*	BSMR	Yunsak El Halcon
4.	27 Januari 2021/ *January 27, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI-Antasena)/*Joint Communication for the Preparation of Integrated Commercial Bank Report Implementation (BI-Antasena)*	Bank Indonesia	1. Khairul Suhairi 2. Riza Roziani
5.	27 Januari 2021/ *January 27, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Webinar Penguatan Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Pengembangan Pasar Repo di Indonesia/*Webinar on Strengthening the Role of Regional Development Banks (BPD) in Repo Market Development in Indonesia*	Bank Indonesia	Khairul Suhairi
6.	1 Februari 2021/ *February 1, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Webinar *Launching* Implementasi Aplikasi Pelaporan GO AML/*Webinar Launching Implementation of GO AML Reporting Application*	PPATK	Riza Roziani
7.	4 Februari 2021/ *February 4, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pertemuan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan/ *Banking Research and Regulation Department Meeting*	OJK	Riza Roziani

No	Tanggal/*Date*	Tempat Pelaksanaan/ *Place*	Nama Pendidikan/*Name of Education*	Lembaga Pelaksana/ *Organizer*	Nama Peserta/ *Participant*
8.	22 Februari 2021/ *February 22, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap Perbankan/*Gratification Control and Anti-Bribery Banking*	FKDKP	Riza Roziani
9.	26 Februari 2021/ *February 26, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI Antasena)/*Integrated Commercial Bank Report (BI Antasena)*	Bank Indonesia	1. Khairul Suhairi 2. Riza Roziani
10.	26 Februari 2021/ *February 26, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Sosialisasi Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul Perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus Bank Umum/*Socialization of the Integrated Licensing and Registration System Application (SPRINT) Licensing Module Fit and Proper Test for Candidates for Commercial Bank Management*	OJK	Riza Roziani
11.	5 Maret 2021/ *March 5, 2021*	Jakarta	*Refreshment* Manajemen Risiko Pejabat Eksekutif/*Executive Officer Risk Management Refreshment*	Talent Indonesia	Pauzi Usman
12.	6 Maret 2021/ *March 6, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pembekalan Sertifikasi *Treasury* Level *Advance*/*Advanced Level Treasury Certification*	ACI Indonesia	Khairul Suhairi
13.	13 Maret 2021/ *March 13, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	*Training Outdoor* dan Pemantapan Program Kerja RBB Tahun 2021/ *Outdoor Training and Consolidation of RBB Work Programs in 2021*	Bank Jambi	1. Yunsak El Halcon 2. Khairul Suhairi 3. Pauzi Usman 4. Riza Roziani
14.	25 Maret 2021/ *March 25, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan *"Principle Based"*/ *The Effectiveness of Supervision of the Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance In Towards the "Principle Based" Regulatory Era "*	FKDKP	Riza Roziani
15.	8 April 2021/ *April 8, 2021*	Jakarta	*Refreshment* Manajemen Risiko Operasional Level 5/*Refreshment of Operational Risk Management Level 5*	Talents Indonesia	Riza Roziani
16.	12 April 2021/ *April 12, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Ujian Sertifikasi *Treasury Dealer* Level *Advance*/*Advanced Level Dealer Treasury Certification Exam*	LSPP	Khairul Suhairi
17.	12 April 2021/ *April 12, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha/ *Guidance and Counseling to the Community and Business Actors*	Bank Jambi	Riza Roziani
18.	24 Mei 2021/ *April 24, 2021*	KFJ	Pembekalan Sertifikasi *Treasury Dealer* Level *Advance*/Briefing for Advance Level Dealer Treasury Certification	Efektif Pro	Khairul Suhairi
19.	27 Mei 2021/ *May 27, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Webinar Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021/*Webinar of the National Coordination Meeting of Government Internal Oversight in 2021*	BPKP	1. Yunsak El Halcon 2. Riza Roziani
20.	28 Mei 2021/ *May 28, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Ujian Sertifikasi *Treasury Dealer* Level *Advance*/*Advanced Level Dealer Treasury Certification Exam*	LSPP	Khairul Suhairi
21.	18 Juni 2021/ *June 18, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Perpanjangan Sertifikat *General Banking* 3/*Extension of General Banking Certificate 3*	Bank Jambi	Yunsak El Halcon
22.	19 Juni 2021/ *June 19, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Pembahasan Kerja Sama Kredit dengan PT Amartha Mikro Fintech/ *Discussion of Credit Cooperation with PT Amartha Micro Fintech*	Bank Jambi	Khairul Suhairi
23.	24 Juni 2021/ *June 24, 2021*	Bali	*Workshop BI Fast*/*Workshop BI Fast*	ASBANDA	Pauzi Usman
24.	16 Juli 2021/ *July 16, 2021*	Bank Jambi	Rencana Implementasi Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) di Lingkungan Perbankan/*Plan for Implementation of Payment System Certification and Rupiah Money Management (SPPUR) in the Banking Environment*	FKDKP	Pauzi Usman

No	Tanggal/*Date*	Tempat Pelaksanaan/ *Place*	Nama Pendidikan/*Name of Education*	Lembaga Pelaksana/ *Organizer*	Nama Peserta/ *Participant*
25.	27 Juli 2021/ *July 27, 2021*	Bank Jambi	*Sharing Session* Urgensi Penerapan Iso 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Sektor Jasa Keuangan/*Sharing Session The Urgency of Implementing Iso 37001: Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Financial Services Sector*	Asbanda	Riza Roziani
26.	10 Agustus 2021/ *August 10, 2021*	Bank Jambi	Webinar IT *Platform for Digital Transformation*/*Webinar IT Platform for Digital Transformation*	Asbanda	Pauzi Usman
27.	1 September 2021/*September 1, 2021*	Bank Jambi	Pelatihan Ketentuan Bank Umum/*Commercial Bank Terms Training*	Otoritas Jasa Keuangan	Riza Roziani
28.	1 September 2021/ *September 1, 2021*	Bank Jambi	Komitmen serta Kesiapan Perbankan dalam Implementasi CBS Bank Indonesia/*Commitment and Readiness of Banking in the Implementation of CBS Bank Indonesia*	Bank Indonesia	Pauzi Usman
29.	28 September 2021/ *September 28, 2021*	Bank Jambi	Konvensi Nasional Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan/*National Convention on the Draft of the Indonesian National Qualifications Framework for Banking Risk Management*	Otoritas Jasa Keuangan	Riza Roziani
30.	30 September 2021/ *September 30, 2021*	Bali	*Workshop Integrated* GRC/*Workshop Integrated GRC*	PT Asia Strategi Konsulting	Riza Roziani
31.	7 Oktober 2021/ *October 7, 2021*	Bank Jambi	Webinar *Online* Tantangan dan Strategi Mengatasi Kejahatan Siber/ *Online Webinar on Cybercrime Challenges and Strategies*	FKDKP	Riza Roziani
32.	21 Oktober 2021/ *October 21, 2021*	Bank Jambi	*Capital Market Online Seminar Series 5 "Ipo Legal Preparation and Compliance"/Capital Market Online Seminar Series 5 "Ipo Legal Preparation And Compliance"*	ASBANDA	1. Riza Roziani 2. Khairul Suhairi
33.	22 Oktober 2021/ *October 22, 2021*	Bank Jambi	Webinar Transformasi Perbankan di Era Digital/*Webinar on Banking Transformation in the Digital Age*	Otoritas Jasa Keuangan	1. Pauzi Usman
34.	28 Oktober 2021/ *October 28, 2021*	Bank Jambi	Undangan Diseminasi Hasil Pengukuran *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terorist Financing* Tahun 2021 Secara Online/ *Invitation to Online Dissemination of Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing Measurement Results in 2021*	PPATK	2. Riza Roziani
35.	19 November 2021/ *November 19, 2021*	Jakarta	*Capacity Building Values of Change* Bank Jambi Tahun 2021/*Capacity Building Values of Change Bank Jambi 2021*	Internal Bank	1. Yunsak El Halcon 2. Pauzi Usman 3. Riza Roziani 4. Khairul Suhairi
36.	22 November 2021/ *November 22, 2021*	Bank Jambi	Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Upaya Deteksi, Cegah dan Berantas Pinjaman *Online* Illegal/*Invitation to Focus Group Discussion (FGD) on Efforts to Detect, Prevent and Erase Illegal Online Loans*	PPATK	Riza Roziani
37.	3 Desember 2021/ *December 3, 2021*	*Online*	*Refreshment* Sertifikasi *Treasury* Level *Advance*/*Refreshment of Advance Level Treasury Certification*	ACI FMA	Yunsak El Halcon
38.	9 Desember 2021/ *December 9, 2021*	Bali	*Focus Group Discussion* Cetak Biru Transformasi Digital BPD SI/*Focus Group Discussion on BPD SI's Digital Transformation Blueprint*	Asbanda	Pauzi Usman
39.	20 Desember 2021/*December 20, 2021*	*Online*	Webinar Peluncuran Infrastruktur Literasi Keuangan/*Webinar on the Launch of Financial Literacy Infrastructure*	Otoritas Jasa Keuangan	Khairul Suhairi

III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi melaksanakan Tata Kelola pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.

1. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap jenjang organisasi dibantu oleh unit-unit kerja terkait.
b) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank.
c) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Bank Jambi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah rencana kerja dan anggaran disampaikan oleh Direksi.
d) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
e) Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
   - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Jambi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak terkait dengan Bank Jambi dan kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja tahunan Bank Jambi.
g) Pengawasan pelaksanaan rencana pemberian kredit.
h) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Bank Jambi, rencana kerja dan anggaran tahunan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
i) Dalam melakukan pengawasan, maka Komisaris wajib mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Jambi.

III. IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a corporate organ that is collectively assigned and responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors and ensuring that PT Bank Pembangunan Daerah Jambi implements Good Corporate Governance at all levels and levels of the organization.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. The accountability of the Board of Commissioners to the GMS is the embodiment of supervisory accountability over the management of the company in the context of implementing the principles of Good Corporate Governance.

1. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

a) Ensuring the implementation of Good Corporate Governance principles at every level of the organization assisted by relevant work units.
b) Carry out duties in good faith and full responsibility for the interest of the Bank.
c) Approve the work plan and budget of Bank Jambi within no later than 1 (one) calendar month after the work plan and budget are submitted by the Board of Directors.
d) Ensuring the implementation of Good Corporate Governance in every business activity at all levels or levels of the organization.
e) The Board of Commissioners is prohibited from being involved in making decisions on the Bank's operational activities, except:
   - *Provision of funds to related parties as stipulated in the regulatory provisions concerning the Maximum Lending Limit (BMPK).*
   - *Other matters stipulated in the Articles of Association of Bank Jambi or the prevailing laws and regulations.*
f) Approved the annual credit plan including the plan to provide credit to parties related to Bank Jambi and credit to certain large debtors which will be stated in the annual work plan of Bank Jambi.
g) Supervision of the implementation of the credit granting plan.
h) Supervision of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors including the Bank Jambi development plan, work plan and annual budget, implementation of the provisions of the Articles of Association and resolutions of the GMS.
i) In conducting supervision, the Commissioners are required to direct and evaluate the implementation of Bank Jambi's strategic policies.

j) Mengikuti perkembangan kegiatan Bank Jambi, dan dalam hal Bank Jambi menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
k) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris membentuk:

   1. Komite Audit;
   2. Komite Pemantau Risiko;
   3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

l) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
   1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
   2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Jambi.

m) Mengadakan rapat Komisaris serta membuat dan memelihara Berita Acara Rapat Komisaris.
n) Memiliki Pedoman Perusahaan yang bersifat mengikat bagi seluruh Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan:
   - Pengaturan Etika kerja dan waktu kerja, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
   - Pengaturan rapat.

o) Mengembangkan kemampuan utama dan kemampuan teknis sesuai dengan visi, misi, dan strategi Bank Jambi yang merupakan harapan dan keinginan dari pemegang saham.
p) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
q) Menyampaikan laporan tepat waktu kepada penerima laporan antara lain:
   1. Laporan yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan lembaga pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Keuangan, dll.).
   2. Laporan yang secara langsung khusus disampaikan kepada pihak eksternal antara lain:
      2.1 Laporan Rencana Kerja Tahunan Bank Jambi yang disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK.
      2.2 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada OJK.
      2.3 Laporan wajib lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan pengembangan usaha Bank Jambi sebagaimana diatur ketentuan-ketentuan terkait.

j) Following the development of Bank Jambi activities, and in the event that Bank Jambi shows signs of setbacks, immediately report to the GMS accompanied by suggestions on corrective steps that must be taken.
k) In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners establishes:
   1. Audit Committee;
   2. Risk Monitoring Committee;
   3. Remuneration and Nomination Committee.;

l) Notify the Financial Services Authority no later than 7 (seven) working days upon the discovery of:
   1. Violation of laws and regulations in the field of finance and banking.
   2. Circumstances or estimates of conditions that could endanger the business continuity of Bank Jambi.

m) Hold Board of Commissioners meeting and prepare and maintain Minutes of Board of Commissioners Meeting.
n) Prepare Company Guidelines that are binding for all Board of Commissioners which at least includes:

   - *Arrangement of work ethics and working time, as regulated in the Organizational Structure and Work Procedures Manual.*
   - *Meeting arrangements.*

o) Develop key capabilities and technical capabilities in accordance with the vision, mission and strategy of Bank Jambi which are the hopes and desires of the shareholders.
p) Researching and reviewing the annual report prepared by the Board of Directors and signing the report.
q) Submit reports on time to the recipient of the report, among others:
   1. Reports related to compliance with government agency regulations (Financial Services Authority, Ministry of Finance, etc.).
   2. Reports that are specifically submitted to external parties include:
      2.1 Bank Jambi Annual Work Plan Report prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners and submitted to OJK.
      2.2 Report on the Implementation of the Work Plan submitted by the Board of Commissioners to OJK.
      2.3 Other mandatory reports related to operational activities and business development of Bank Jambi as regulated by related provisions.

2. SUSUNAN KEANGGOTAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan terlebih dahulu mengikuti *Fit and Proper Test* sesuai dengan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Komisaris Bank serta Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is appointed by the GMS and has passed the Fit and Proper test in accordance with POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Key Parties in Financial Services Institutions and SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Candidates for Members of the Board of Directors, and Candidates for Members of the Bank's Commissioners as well as Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Struktur Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan POJK tentang Tata Kelola. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

Masa jabatan Komisaris Independen periode tahun 2018-2021 berakhir pada 23 Oktober 2021, sehingga komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sampai dengan 23 Oktober 2021 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang berstatus sebagai Komisaris Utama dan 2 (dua) orang berstatus sebagai Komisaris Independen, dengan susunan sebagai berikut:

The structure of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi has complied with the provisions of the Limited Liability Company Law and the provisions of the POJK on Governance. All members of the Board of Commissioners have integrity, competence and adequate financial reputation.

The term of office of the Independent Commissioner for the period 2018-2021 ends on October 23, 2021, so that the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi until October 23, 2021 consists of 3 (three) persons, namely 1 (one) as President Commissioner and 2 (two) persons as Independent Commissioner, with the following composition:

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Dasar Pengangkatan/ *Basis of Appointment*	Periode Pengangkatan / *Period of Appointment*
1	**Dra. Emilia, M.E.**	Komisaris Utama/*President Commissioner*	Akta No. 04 tanggal 8 Februari 2019/*Deed No. 04 dated February 8, 2021*	2019 - 2022
2	**Ir. Ari Karyawan Semiawan**	Komisaris Indepnden/*Independent Commissioner*	Akta No. 29 tanggal 23 Oktober 2018/*Deed No. 29 dated October 23, 2021*	2018– 2021
3	**Khairul Pata, S.Sos.**	Komisaris Independen/*Independent Commissioner*	Akta No. 29 tanggal 23 Oktober 2018/*Deed No. 29 dated October 23, 2021*	2018– 2021

Susunan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi posisi 24 Oktober 2021 sampai dengan saat ini untuk jabatan Komisaris Independen dirangkap oleh Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Pemenuhan komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi saat ini sedang dalam proses *recruitment* Komisaris oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

The composition of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi position October 24, 2021 until now, regarding the position of Independent Commissioner concurrently by the President Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Fulfillment of the composition of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi is currently in the process of commissioner recruitment by the Remuneration and Nomination Committee.

3. INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebanyak paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Bank telah memiliki Komisaris Independen, yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

3. INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Members of the Board of Commissioners have met the composition, criteria and independence in accordance with POJK No. 55/POJK.03/2016 and SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks of at least 3 (three) people consisting of 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners. The Bank already has Independent Commissioners, namely members of the Board of Commissioners who have no financial, management, share ownership and/or share ownership relationship with the Bank.

3.1. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Komisaris (Y = Ya; T = Tidak)

3.1. Financial Relationship and Family Relationship of the Board of Commissioners (Y = Yes; T = No)

Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Hubungan Keuangan s.d. Derajat Kedua dengan/*Family Relationship up to Second Degree with*						Hubungan Keluarga dengan/*Financial Relationship with*					
		Dekom *BOC*		Direksi *BOD*		PSP *PSP*		Dekom *BOC*		Direksi *BOD*		PSP *PSP*	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Dra. Emilia, M.E.	Komisaris Utama/*President Commissioner*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√
Ir. Ari Karyawan Semiawan	Komisaris/*Commissioner*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√
Khairul Pata, S.Sos.	Komisaris Independen/*Independent Commissioner*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√

3.2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, tidak memiliki saham, baik pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi maupun pada bank dan perusahaan lainnya. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

3.2. Share Ownership of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners, either individually or jointly, do not own shares in either PT Bank Pembangunan Daerah Jambi or other banks and companies. Members of the Board of Commissioners do not take and/or receive personal benefits from the bank other than remuneration and other facilities determined by the GMS.

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Saham di Bank Jambi/*Shares in Bank Jambi*	Saham di Perusahaan Lain/*Shares in Other Companies*
1	Dra. Emilia, M.E.	Komisaris Utama/*President Commissioner*	Nihil	Nihil
2	Ir. Ari Karyawan Semiawan	Komisaris/*Commissioner*	Nihil	Nihil
3	Khairul Pata, S.Sos.	Komisaris Independen/*Independent Commissioner*	Nihil	Nihil

3.3. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris (Y = Ya; T = Tidak)

Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

3.3. Concurrent Positions on the Board of Commissioners (Y = Yes; T = No)

There are no members of the Board of Commissioners who hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers in 1 (one) financial institution/company, or members of the Board of Commissioners, Directors, or Executive Officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank.

Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Rangkap Jabatan pada Lembaga/Perusahaan Keuangan/*Concurrent Positions in Financial Institutions/Companies*		Rangkap Jabatan pada Lembaga/Perusahaan Anak Bukan Bank yang Dikendalikan Bank/*Concurrent Positions in Non-Bank Subsidiary Institutions/Companies Controlled by the Bank*	
		Y	T	Y	T
Dra. Emilia, M.E.	Komisaris Utama/*President Commissioner*	×	√	×	√
Ir. Ari Karyawan Semiawan	Komisaris/*Commissioner*	×	√	×	√
Khairul Pata, S.Sos.	Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*	×	√	×	√

4. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui forum rapat formal dan informal serta rekomendasi secara tertulis. Agenda rapat diadakan secara reguler dengan Direksi, Direktur Bidang, maupun unit kerja.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kinerja bank, profil risiko, tingkat kesehatan bank, kebijakan manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit intern/ekstern, teknologi informasi, penerapan Tata Kelola, implementasi sistem pengendalian intern, implementasi APU dan PPT dan lain sebagainya. Kinerja dimaksud antara lain kinerja bulanan, Tingkat Kesehatan Bank, Audit Intern, Penerapan Tata Kelola dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan program kerja Bank Jambi dan dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal yang perlu terus-menerus mendapat perhatian manajemen dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Bank Jambi sebagai berikut:

1) Persetujuan pemberian kredit pihak terkait A.n. Ari Karyawan Semiawan (Komisaris Independen) berdasarkan Surat No. 02.01/DK/BJ/2021 tanggal 8 Januari 2021.
2) Persetujuan perjanjian kerja sama Bank Jambi dengan UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, berdasarkan Surat No. 03.01/DK/BJ 2021 tanggal 11 Januari 2021.
3) Persetujuan Revisi Buku Pedoman penerapan program APU PPT, berdasarkan Surat No. 06.01/DK/BJ/2021 tanggal 18 Januari 2021.
4) Persetujuan *draft* perjanjian MOU Antara PT BPD Jambi dengan UNBARI, berdasarkan Surat No. 08.01/DK/BJ/2021, tanggal 22 Januari 2021.
5) Persetujuan Draft Buku Pedoman pelaksanaan kredit (PPK) PT BPD Jambi, berdasarkan Surat No. 09.01/DK/BJ/2021, tanggal 28 Januari 2021.
6) Persetujuan perpanjangan sewa ATM plaza Arafah sungai penuh, berdasarkan Surat No. 13.02/DK/BJ/2021 tanggal 2 februari 2021.
7) Persetujuan perpanjangan sewa gedung KCP Mandiangin, berdasarkan Surat No. 14.02/DK/BJ/2021 tanggal 2 Februari 2021.
8) Persetujuan draft MOU antara PT BPD Jambi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Produk *Transaction Banking,* berdasarkan Surat No. 19.02/DK/BJ/2021 tanggal 5 Februari 2021.
9) Persetujuan Revisi Struktur Organisasi PT BPD Jambi, berdasarkan surat No. 21.02/DK/BJ/2021 tanggal 8 Februari 2021.

4. SUPERVISION AND RECOMMENDATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its supervisory function and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners uses formal and informal meeting forums as well as written recommendations. Meeting agendas are held regularly with the Board of Directors, Divisional Directors, and work units.

To support the effectiveness of the implementation of its functions and duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee.

During 2021, the Board of Commissioners has supervised bank performance, risk profile, bank soundness level, risk management policies, follow-up on results of internal/external audits, information technology, implementation of governance, implementation of internal control systems, implementation of APU and PPT and so forth. The performance referred to includes monthly performance, Bank Soundness Level, Internal Audit, Implementation of Governance and others.

Based on the results of supervision on the implementation of the work program of Bank Jambi and in order to support sustainable growth, the Board of Commissioners recommends several issues to be addressed by the management in the efforts to improve the Bank's performance:

1) *Approval for granting credit to related parties Ari Employees Semiawan (Independent Commissioner) based on letter No. 02.01/DK/BJ/2021 dated January 8, 2021.*
2) *Approval of cooperation agreement between Jambi bank and UIN Sultan Thaha syaifuddin Jambi, based on Letter No. 03.01/DK/BJ 2021 on January 11, 2021.*
3) *Approval of the Revision of the Guidebook for the implementation of the APU PPT program, based on Letter No. 06.01/DK/BJ/2021 dated January 18, 2021.*
4) *Approval of the draft MOU agreement between PT BPD Jambi with UNBARI, based on Letter No. 08.01/DK/BJ/2021, January 22, 2021.*
5) *Approval of the Draft Guidelines for the Implementation of Credit (PPK) of PT BPD Jambi, based on Letter No. 09.01/DK/BJ/2021, January 28, 2021.*
6) *Approval for the extension of the ATM Plaza Arafah Sungai full lease, based on Letter No. 13.02/DK/BJ/2021 dated February 2, 2021.*
7) *Approval for extension of the KCP Mandiangin KCP building lease, based on Letter No. 14.02/DK/BJ/2021 dated February 2, 2021.*
8) *Approval of the draft MOU between PT BPD Jambi with PT Bank Mandiri (Persero) tbk Regarding Transaction Banking Products, based on Letter No. 19.02/DK/BJ/2021 dated February 5, 2021.*
9) *Approval of the Revision of the Organizational Structure of PT BPD Jambi, based on Letter no. 21.02/DK/BJ/2021 February 8, 2021.*

10) Persetujuan sewa ruang ATM Simpang Tiga Rawang, berdasarkan Surat No. 22.02/DK/BJ/2021 tanggal 22 Februari 2021.
11) Penyampaian Laporan Pengawasan RBB Semester II tahun 2020, berdasarkan Surat No. 24.02/DkBJ/2021 tanggal 25 Februari 2021.
12) Persetujuan standardisasi *draft* perjanjian kerja sama antara BPD dengan Pemda Provinsi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi tentang pengelolaan penempatan uang dana kas, berdasarkan Surat No. 25.03/DK/BJ/2021 tanggal 2 Maret 2021.
13) Persetujuan kerja sama antara BPKH Bak penerimaan setoran (BPS) ibadah haji, berdasarkan Surat No. 31.03/DK/BJ/2021 tanggal 5 Maret 2021.
14) Persetujuan usulan kredit hapus tagih berdasarkan Surat No. 36.03/DK/BJ/2021 tanggal 24 Maret 2021.
15) Tindak lanjut DPS PT Bank pembangunan Daerah Jambi, berdasarkan Surat No. 38.03/Dk/BJ/2021 tanggal 24 Maret 2021.
16) Persetujuan perjanjian sewa ruang ATM MM Gloria Semurup, berdasarkan Surat No. 40.04/DK/BJ/2021 tanggal 13 April 2021.
17) Persetujuan perjanjian kerja sama antara Kementrian Agama RI dgn BPS-BPIH, berdasarkan Surat No. 41.04/DK/BJ/2021 tanggal 15 April 2021.
18) Persetujuan perpanjangan perjanjian kerja sama addendum I sewa kendaraan operasional kantor dengan PT Kajang Lako berdasarkan Surat No. 42.04/DK/BJ/2021 tanggal 19 April 2021.
19) Persetujuan perjanjian sewa-menyewa kendaraan dinas Bank Jambi dengan PT Kajang Lako berdasarkan Surat No. 43.04/DK/BJ/2021 tanggal 21 April 2021.
20) Tindak lanjut Surat OJK Jambi No. S-304/KO/0701/2021 tanggal 23 April 2021 berdasarkan Surat No. 48.04/DK/BJ/2021 tanggal 30 April 2021.
21) Permintaan data terkait Surat OJK No. S-278/KO.0701/2021 berdasarkan Surat No. 49.04/DK/BJ/2021 tanggal 30 April 2021.
22) Persetujuan sewa ruang ATM di Asyfa Mart berdasarkan Surat No. 50.05/DK/BJ/2021 tanggal 10 Mei 2021.
23) Persetujuan izin sewa-menyewa kendaraan dinas Bank Jambi dengan PT Kajang Lako Tahap II berdasarkan Surat No. 51.05/DK/BJ/2021 tanggal 18 Mei 2021.
24) Persetujuan perjanjian kerja sama antara BPD UUS dengan PT Asuransi Askrida Syariah berdasarkan Surat No. 52.05/DK/BJ/2021 tanggal 27 Mei 2021.
25) Persetujuan atas *draft* kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan PT BPD Jambi No. 53.06/DK/BJ/2020 tanggal 7 Juni 2021.
26) Penyampaian laporan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit oleh KAP DBSDA atas laporan pelaksanaan pemberian jasa audit oleh KAP DBSDA berdasarkan Surat No. 54.06/DK/BJ/2021 tanggal 17 Juni 2021.

]

27) Persetujuan *draft* perjanjian kerja sama antara PT BPD Jambi dengan PT Jasa Raharja tentang pelayanan dan pemanfaatan berdasarkan Surat No. 55.06/DK/BJ/2021 tanggal 22 Juni 2021.

10) Approval for renting the ATM space at Simpang Tiga Rawang, based on Letter no. 22.02/DK/BJ/2021 dated February 22, 2021.
11) Submission of the RBB Supervision Report for the Second Semester of 2020, based on Letter No. 24.02/DkBJ/2021 dated February 25, 2021.
12) Approval of standardization of the draft cooperation agreement between the BPD and the Regional Government of the Regency and City in Jambi Province regarding the management of the placement of cash funds, based on Letter No. 25.03/DK/BJ/2021 dated March 2, 2021.
13) Approval of cooperation between BPKH Bak receipts of deposits (BPS) for the pilgrimage, based on Letter No. 31.03/DK/BJ/2021 dated March 5, 2021.
14) Approval of the credit write-off proposal based on Letter no. 36.03/DK/BJ/2021 dated March 24, 2021.
15) Follow-up of DPS PT Bank Jambi Regional Development, based on Letter No. 38.03/Dk/BJ/2021 dated March 24, 2021.
16) Approval of MM Gloria Semurup ATM space rental agreement, based on Letter No. 40.04/DK/BJ/2021 dated April 13, 2021.
17) Approval of the cooperation agreement between the Indonesian Ministry of Religion and BPS-BPIH, based on Letter No. 41.04/DK/BJ/2021 dated April 15, 2021.
18) Approval of the extension of the addendum I cooperation agreement for the rental of office operational vehicles with PT Kajang Lako based on Letter No. 42.04/DK/BJ/2021 dated April 19, 2021.
19) Approval of lease agreement for Bank Jambi's official vehicle with PT Kajang Lako based on Letter No. 43.04/DK/BJ/2021 dated April 21, 2021.
20) Follow-up Letter from OJK Jambi No. S-304/KO/0701/2021 dated April 23, 2021 based on Letter No. 48.04/DK/BJ/2021 dated April 30, 2021.
21) Request for data related to OJK Letter No. S-278/KO.0701/2021 based on Letter No. 49.04/DK/BJ/2021 dated April 30, 2021.
22) Approval for renting ATM space at Asyfa Mart based on Letter No. 50.05/DK/BJ/2021 dated May 10 , 2021.
23) Approval of lease permit for Bank Jambi's official vehicle with PT Kajang Lako Phase II based on Letter No. 51.05/DK/BJ/2021 dated May 18 , 2021.
24) Approval of cooperation agreement between BPD UUS and PT Asuransi Askrida Syariah based on Letter No. 52.05/DK/BJ/2021 dated May 27 , 2021.
25) Approval of the draft collective agreement between the Batanghari Regency Government and PT BPD Jambi No. 53.06/DK/BJ/2020 dated June 7, 2021.
26) Submission of an evaluation report on the implementation of the provision of audit services by KAP DBSDA on the report on the implementation of the provision of audit services by KAP DBSDA based on Letter No. 54.06/DK/BJ/2021 dated June 17, 2021.
27) Approval of the draft cooperation agreement between PT BPD Jambi and PT Jasa Raharja regarding services and utilization based on Letter No. 55.06/DK/BJ/2021 dated June 22, 2021.

28) Persetujuan BPP perusahaan kewenangan dan limit Risiko *Treasury* serta buku BPP produk dan aktivitas *treasury* PT BPD Jambi berdasarkan Surat No. 57.06/DK/BJ/2021 tanggal 24 Juni 2021.
29) Persetujuan *draft* PKS antara PT BPD Jambi dengan Sekdirjen Paud, berdasarkan Surat No. 58.06/DK/BJ/2021 tanggal 24 Juni 2021.
30) Persetujuan kerja sama dan *Refinancing* PT SMF (Persero) dengan PT BPD Jambi berdasarkan Surat No. 59.06/DK/BJ/2021 tanggal 29 Juni 2021.
31) Persetujuan perjanjian sewa ruko KCP Syariah Seberang berdasarkan Surat No. 60.06/DK/BJ/2021 tanggal 29 Juni 2021.
32) Persetujuan Revisi RBB PT BPD Jambi tahun 2021-2023 berdasarkan Surat No. 061.06 DK/BJ/2021 tanggal 29 Juni 2021.
33) Persetujuan perpanjangan sewa ruang ATM di komplek perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat No. 062.07/DK/BJ/2021 tanggal 12 Juli 2021.
34) Persetujuan *draft* perjanjian kerja sama antara PT BPD Jambi dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik tentang penyelenggaraan layanan bersama *payment* dan *settlement* tagihan Samsat Digital Nasional berdasarkan Surat No. 064.07/DK/BJ/2021 tanggal 14 Juli 2021.
35) Persetujuan *draft* Nota Kesepahaman (MOU) antara PT BPD Jambi dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional Pos III Palembang tentang kerja sama pengembangan layanan berdasarkan Surat No. 065.07/DK/BJ/2021 tanggal 16 Juli 2021.
36) Persetujuan perjanjian sewa KCP Pematang Lumut berdasarkan Surat No. 067.07/DK/BJ/2021 tanggal 26 Juli 2021.
37) Persetujuan perjanjian sewa-menyewa Kendaraan Dinas Bank Jambi dengan PT Estika Yasakelola berdasarkan Surat No. 066.07/DK/BJ/2021 tanggal 27 Juli 2021.
38) Persetujuan perpanjangan sewa KCP Unja Mendalo, berdasarkan Surat No. 076.08/DK/BJ/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
39) Pemberian Spesial *Rate* Pihak terkait A.n. Nancy Ernida Wuryanindyah terkait dengan Direktur Utama Bank Jambi berdasarkan Surat No. 075.08/DK/BJ/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
40) Pemberian Spesial Nisbah Pihak Terkait A.n. Yunsak El Halcon (Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Surat No. 078.08/DK/BJ/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
41) Pemberian Spesial Nisbah Pihak Terkait A.n. Zadiggah Isa Ansori (Terkait Kadiv UUS Bank Jambi Sdri. Rosiqo) berdasarkan Surat No. 079.08/DK/BJ/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
42) Pemberian Spesial Nisbah Pihak Terkait A.n. Yunsak El Halcon (Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Surat No. 080.08/DK/BJ/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
43) Pendaftaran Adm. Penggunaan *Officer* (ARO) berdasarkan Surat No. 082.08/DK/BJ/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
44) Pemberian Kredit Pihak Terkait A.n. Januar (terkait Pimpinan PT BPD Cabang Kerinci) berdasarkan Surat No. 084.09/DK/BJ/2021 tanggal 14 September 2021.

28) Approval of the BPP of the company's authority and Treasury Risk limit as well as the BPP book of PT BPD Jambi's treasury products and activities based on Letter No. 57.06/DK/BJ/2021 dated June 24, 2021.
29) Approval of the PKS draft between PT BPD Jambi and the Secretary General of Early Childhood Education, based on Letter No. 58.06/DK/BJ/2021 dated June 24, 2021.
30) Agreement on cooperation and refinancing of PT SMF (Persero) with PT BPD Jambi based on Letter No. 59.06/DK/BJ/2021 dated June 29, 2021.
31) Approval of the lease agreement for the KCP Seberang Syariah's office based on Letter No. 60.06/DK/BJ/2021 dated June 29, 2021.
32) Approval of the Revised RBB of PT BPD Jambi for 2021-2023 based on Letter No. 061.06 DK/BJ/2021 dated June 29, 2021.
33) Approval for the extension of the ATM space lease in the Bungo Regency Regional Secretariat office area, based on Letter No. 062.07/DK/BJ/2021 dated July 12, 2021.
34) Approval of the Draft Cooperation Agreement between PT BPD Jambi and PT Artajasa Pembayaran Elektronik regarding the implementation of joint services for Payment and settlement of National Digital Samsat bills based on Letter No. 064.07/DK/BJ/2021 dated July 14, 2021.
35) Approval of the Draft Memorandum of Understanding (MOU) between PT BPD Jambi and PT Pos Indonesia (Persero) Regional Office of Pos III Palembang regarding service development cooperation based on Letter No. 065.07/DK/BJ/2021 dated 16 July 2021.
36) Approval of the lease agreement for KCP Pematang Lumut based on Letter No. 067.07/DK/BJ/2021 dated July 26, 2021.
37) Approval of Bank Jambi service vehicle rental agreement with PT Estika Yasakelola based on Letter No. 066.07/DK/BJ/2021 dated July 27, 2021.
38) Approval for extension of KCP Unja Mendalo's lease, based on Letter No. 076.08/DK/BJ/2021 dated August 12, 2021.
39) Giving Special Rate to Related Parties Nancy Ernida Wuryanindyah related to the President Director of Bank Jambi based on Letter No. 075.08/DK/BJ/2021 dated August 10, 2021.
40) Provision of Special Ratio of Related Parties Yunsak El Halcon (President Director of Bank Jambi) based on Letter No. 078.08/DK/BJ/2021 dated August 12, 2021.
41) Provision of Special Ratio of Related Parties Zadiggah Isa Ansori (Regarding the Head of UUS Bank Jambi Ms. Rosiqo) based on Letter No. 079.08/DK/BJ/2021 dated August 12, 2021.
42) Provision of Special Ratio of Related Parties Yunsak El Halcon (President Director of Bank Jambi) based on Letter No. 080.08/DK/BJ/2021 dated August 9, 2021.
43) Registration of Usage Officer (ARO) Adm. based on Letter No. 082.08/DK/BJ/2021 dated August 25, 2021.
44) Granting of Credit to Related Parties in January (related to the Head of PT BPD Kerinci Branch) based on Letter No. 084.09/DK/BJ/2021 dated September 14, 2021.

45) Persetujuan Nota Kesepahaman (MOU) terkait dengan kerja sama pemberian kredit kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Surat No. 085.09/DK/BJ/2021 tanggal 17 September 2021.
46) Pengajuan nama KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT BPD Jambi untuk tahun yang berakhir 2021 berdasarkan Surat No. 086.09/DK/BJ/2021 tanggal 20 September 2021.
47) Pemberian Spesial *Rate* Pihak terkait A.n. Nancy Ernida Wuryanindyah (terkait dengan Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Surat No. 104.10/DK/BJ/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
48) Pemberian spesial nisbah pihak terkait A.n. Yunsak El Halcon, Nancy Ernida, dan Elsa Putri Nurul (terkait dengan Direktur Utama PT BPD Jambi) berdasarkan Surat No. 105.10/ DK/BJ/2021 tanggal 12 Oktober 2021.
49) Pemberian spesial nisbah pihak terkait A.n. Yunsak El Halcon (Direktur Utama PT BPD Jambi) berdasarkan Surat No. 106.10/DK/BJ/2021 tanggal 12 Oktober 2021.
50) Pemberian spesial nisbah pihak terkait A.n. Hindun dan Zaddigah Isa Ansori (terkait dengan Kadiv UUS Sdri. Hj. Rosiqo) berdasarkan Surat No. 107.10/DK/BJ/2021 tanggal 12 Oktober 2021.
51) Persetujuan Revisi Struktur Organisasi PT BPD Jambi berdasarkan Surat No. 117.10/DK/BJ/2021 tanggal 2 November 2021.
52) Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT BPD Jambi tahun 2022-2024, berdasarkan Surat No. 132.11/DK/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
53) Penunjukan KAP yang melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT BPD Jambi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 berdasarkan Surat No. 133.11/DK/BJ/2021 tanggal 22 November 2021.
54) Persetujuan *Corporate Plan* Tahun 2022-2026 PT BPD Jambi berdasarkan Surat No. 135.11/DK/BJ/2021 tanggal 24 November 2021.
55) Pemberian kredit kepada pihak terkait A.n. Rifan Rahmadani Henri (Anak Kandung dari Ibu Fatimah B. Henri, Kepala Divisi Elektronik Banking) berdasarkan Surat No. 136.11/DK/BJ/2021 tanggal 30 November 2021.
56) Persetujuan sewa ruang ATM di RSUD Raden Mattaher berdasarkan Surat No.140.11/DK/BJ/2021 tanggal 6 Desember 2021.
57) Pemberian kredit terkait A.n. Muhammad Ridho (terkait Pemimpin Cabang PT BPD Jambi Cabang Sarolangun) berdasarkan Surat No. 141.12/DK/BJ/2021 tanggal 10 Desember 2021.
58) Pemberian Kredit KUR Investasi Pihak terkait A.n. Nuria Hasma (terkait adik ipar Pemegang Saham Pengendali Bapak Al Haris) berdasarkan Surat No. 142.12/DK/BJ/2021 tanggal 10 Desember 2021.
59) Persetujuan *draft Memorandum of Understanding* (MOU) tentang Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Pemerintah Daerah di Kabupaten Tebo berdasarkan Surat No. 143.12/DK/BJ/2021 tanggal 13 Desember 2021.
60) Pemberian kredit pihak terkait A.n. Dwi Andayani (Pimpinan Cabang PT BPD Jambi Cabang Sengeti) berdasarkan Surat No. 158.12/DK/BJ/2021 tanggal 22 Desember 2021.

45) Approval of Memorandum of Understanding (MOU) related to cooperation in providing credit to Local Governments based on Letter No. 085.09/DK/BJ/2021 dated September 17, 2021.
46) Submission of the name of KAP for the Audit of the Financial Statements of PT BPD Jambi for the year ending 2021 based on Letter No. 086.09/DK/BJ/2021 dated September 20, 2021.
47) Granting Special Rates to Related Parties Nancy Ernida Wuryanindyah (related to the President Director of Bank Jambi) based on Letter No. 104.10/DK/BJ/2021 dated October 7, 2021.
48) Granting special rate for related parties Yunsak El Halcon, Nancy Ernida, and Elsa Putri Nurul (related to the President Director of PT BPD Jambi) based on Letter No. 105.10/DK/BJ/2021 dated October 12, 2021.
49) Granting special rate for related parties to Yunsak El Halcon (President Director of PT BPD Jambi) based on Letter No. 106.10/DK/BJ/2021 dated October 12, 2021.
50) Granting special rate for related parties Hindun and Zaddigah Isa Ansori (related to the Head of the UUS Division, Ms. Hj. Rosiqo) based on Letter No. 107.10/DK/BJ/2021 dated October 12, 2021.
51) Approval of the Revision of the Organizational Structure of PT BPD Jambi based on Letter No. 117.10/DK/BJ/2021 dated November 2, 2021.
52) Approval of Bank PT BPD Jambi's Business Plan for 2022-2024, based on Letter No. 132.11/DK/BJ/2021 dated November 18, 2021.
53) The appointment of KAP to conduct a General Audit of the financial statements of PT BPD Jambi for the year ended December 31, 2021 based on Letter No. 133.11/DK/BJ/2021 dated November 22, 2021.
54) Approval of the 2022-2026 PT BPD Jambi Corporate Plan based on Letter No. 135.11/DK/BJ/2021 dated November 24 , 2021.
55) Providing credit to related parties Rifan Rahmadani Henri (Biological Son of Mrs. Fatimah B. Henri, Head of Electronic Banking Division) based on Letter No. 136.11/DK/BJ/2021 dated November 30, 2021.
56) Approval for rental of ATM space at Raden Mattaher Hospital based on Letter No. 140.11/DK/BJ/2021 dated December 6, 2021.
57) Granting credit related Muhammad Ridho (related to the Branch Manager of PT BPD Jambi Sarolangun Branch) based on Letter No. 141.12/DK/BJ/2021 dated December 10, 2021.
58) Provision of Investment KUR Credit to related parties Nuria Hasma (related to the controlling shareholder's brother-in-law, Mr. Al Haris) based on Letter No. 142.12/DK/BJ/2021 dated December 10, 2021.
59) Approval of the draft Memorandum of Understanding (MOU) regarding Local Tax Revenue and Local Government Levies in Tebo Regency based on Letter No. 143.12/DK/BJ/2021 dated December 13, 2021.
60) Provision of credit to related parties Dwi Andayani (Branch Manager of PT BPD Jambi Sengeti Branch) based on Letter No. 158.12/DK/BJ/2021 dated December 22, 2021.

61) Persetujuan Revisi Struktur Organisasi dan *Job Description* PT BPD Jambi berdasarkan Surat No 159.12/DK/BJ/2021 tanggal 23 Desember 2021.
62) Persetujuan sewa ruang ATM di SPBU Batang Asam berdasarkan Surat No. 160.12/DK/BJ/2021 tanggal 23 Desember 2021.
63) Pemberian spesial nisbah pihak terkait A.n. Yunsak El Halcon (Direktur Bank Jambi) berdasarkan Surat No. 166.12/DKBJ/2021 tanggal 24 Desember 2021.
64) Pemberian spesial nisbah pihak terkait A.n. Nacy Ernida, Elsa Putri Nurul Ilman (pihak terkait Dirut Bank Jambi) berdasarkan Surat No. 167.12/DK/BJ/2021 tanggal 24 Desember 2021.
65) Pemberian spesial nisbah pihak terkait A.n. Zadiggah Isa Ansori (Pihak Terkait Adik Kandung Kadiv UUS Bank Jambi) berdasarkan Surat No. 169.12/DK/BJ/2021 tanggal 24 Desember 2021.
66) Penggantian Ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi Nominasi PT BPD Jambi berdasarkan Surat No. 170.12/DK/BJ/2021 tanggal 25 Desember 2021.

61) Approval of Revision of Organizational Structure and Job Description of PT BPD Jambi based on Letter No. 159.12/DK/BJ/2021 dated December 23, 2021.
62) Approval for rental of ATM space at Batang Asam Gas Station based on Letter No. 160.12/DK/BJ/2021 December 23, 2021.
63) Granting special rate for related parties to Yunsak El Halcon (Director of Bank Jambi) based on Letter No. 166.12/DKBJ/2021 dated December 24, 2021.
64) Granting special rate for Nancy Ernida, Elsa Putri Nurul Ilman (party related to the President Director of Bank Jambi) based on Letter No. 167.12/DK/BJ/2021 dated December 24, 2021.
65) Granting special rate for related party, namely Zadiggah Isa Ansori (Related Party, the Younger Brother of the UUS Division Head of Bank Jambi) based on Letter No. 169.12/DK/BJ/2021 December 24, 2021.
66) The replacement of the chairman of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Nomination Remuneration Committee of PT BPD Jambi based on Letter No. 170.12/DK/BJ/2021 December 25, 2021.

5. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 3 (tiga) bulan sekali atau 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berupa rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang. Selama Tahun 2021 rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali.

5. BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Meetings of the Board of Commissioners are held at least once every 3 (three) months or 4 (four) times a year. The meeting can be in the form of an internal meeting of the Board of Commissioners or a joint meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors or the Director of Division. During 2021 the Board of Commissioners' meeting was held 24 (twenty four) times.

Jabatan/*Position*	Nama/*Name*	Rapat Komisaris/*BOC Meeting*	
		Jumlah kehadiran/ *Total Attendance*	% kehadiran/ *% attendance*
Komisaris Utama/*President Commissioner*	**Dra. Emilia, M.E.**	24	100%
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*	**Ir. Ari Karyawan Semiawan**	8	33,33%
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*	**Khairul Pata, S.Sos.**	5	20,83%

6. KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Proses penetapan remunerasi didasarkan pada hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- Berdasarkan peer group;
- Mempertimbangkan kinerja perusahaan;
- Metode Remunerasi Variabel disusun berdasarkan kinerja dan risiko.

6. BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION POLICY

The provision of remuneration and other facilities refers to the decision of the shareholders as determined in the General Meeting of Shareholders by taking into account the advice given by the Remuneration and Nomination Committee. The remuneration determination process is based on the results of the Remuneration and Nomination Committee review by considering the following:
- *Based on peer groups;*
- *By considering the Company's performance;*
- *Variable Remuneration Method is based on performance and risk.*

7. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2021 Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan *workshop* dalam rangka meningkatkan kompetensi dan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, seminar tersebut antara lain:

7. BOARD OF COMMISSIONERS EDUCATION AND TRAINING

During 2021, the Board of Commissioners has attended various seminars and workshops to improve competence and support the implementation of tasks, among others:

No.	Tanggal / *Date*	Tempat Pelaksanaan/*Place*	Nama Pendidikan/*Training/Seminar*	Lembaga Pelaksana/ *Organizer*	Nama Peserta/ *Participant*
1	5 Maret 2021/ *March 5, 2021*	Jakarta	Seminar Nasional dan Rakernas FKDK Tahun 2021 / *National Seminar and National Working Meeting of FKDK in 2021*	FKDK BPDSI	1. Emilia 2. Ari Karyawan Semiawan 3. Khairul Pata
2	13 Maret 2021/ *March 13, 2021*	Kantor Pusat/ *Head Office*	*Training Outdoor* dan Pemantapan Program Kerja RBB Tahun 2021 / *Outdoor Training and Strengthening of Bank Business Plan Work Programs for 2021*	Bank Jambi	1. Emilia 2. Ari Karyawan Semiawan 3. Khairul Pata
3	29 Mei 2021/ *May 29, 2021*	Jakarta	Pembahasan Penjualan Surat Berharga Hapus Buku/ *Discussion on the Sale of Written Off Securities*	Bank Jambi (KFJ)	1. Ari Karyawan Semiawan 2. Khairul Pata
4	8 Juli 2021/ *July 8, 2021*	*Online*	Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko Level 2/ *Refreshment of Level 2 Risk Management Certificate*	Talents	Ari Karyawan Semiawan
5	19 November 2021/ *November 19, 2021*	Bogor	Capacity Building Values Of Change Bank Jambi Tahun 2021/ *Capacity Building Values Of Change Bank Jambi Tahun 2021*	Internal Bank	Emilia

IV. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

1. KOMITE AUDIT

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank Jambi telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

IV. COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. AUDIT COMMITTEE

To realize good corporate governance, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi established the Audit Committee assigned to assist the Board of Commissioners, with reference to the Financial Services Authority Regulations and the Financial Services Authority Circular Letter on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

1.1. Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The duties and responsibilities of the Bank Jambi Audit Committee are in accordance with POJK No. 55/POJK.03/2016 and SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, namely evaluating the implementation of internal audits to assess the adequacy of internal control and the adequacy of the financial reporting process. In addition, to coordinate with the Public Accounting Firm for the effectiveness of the external audit implementation.

In order to carry out these duties, the Audit Committee at least conducts the following evaluations:

1. *Evaluate the implementation of internal audit in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.*

2. *Review* dan diskusi atas perencanaan audit tahunan dengan SKAI.
3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor intern, auditor ekstern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan *review* atas kecukupan tindak lanjut atas temuan audit intern, ekstern dan regulator.

2. *Review and discussion of the annual audit plan with the IAU.*
3. *Implementation of follow-up by the Board of Directors on the audit findings and/or recommendations from the results of the supervision of the OJK, internal auditors, external auditors in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.*
4. *Provide recommendations regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms to the Board of Commissioners.*
5. *Reviewing the adequacy of follow-up on the findings of internal, external and regulatory audits.*

1.2. Susunan Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit Bank Jambi sampai dengan 23 Oktober 2021 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen diluar Bank Jambi, dengan susunan sebagai berikut:

1.2. Composition of the Audit Committee Members

The Audit Committee of Bank Jambi until October 23, 2021 has 3 (three) members, consisting of 1 (one) Chairman who is held by an Independent Commissioner and 2 (two) members from Independent Parties outside Bank Jambi. Its composition is as follows:

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*
1	**Khairul Pata, S.Sos**	Ketua/*Chairman*
2	**Dra. Susfayetti, M.Si., Ak.**	Anggota/*Member*
3	**Firmansyah Putra, S.H., M.H.**	Anggota/*Member*

Susunan anggota Komite Audit Bank Jambi dari tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan saat ini berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen diluar Bank Jambi, dengan susunan sebagai berikut:

The members of the Audit Committee of Bank Jambi from October 24, 2021 to the present are 3 (three) persons, consisting of 1 (one) Chairman held by the President Commissioner and 2 (two) members from Independent Parties outside Bank Jambi. The composition is as follows:

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*
1	**Dra. Hj. Emilia, M.E.**	Ketua/*Chairman*
2	**Dra. Susfayetti, M.Si., Ak.**	Anggota/*Member*
3	**Firmansyah Putra, S.H., M.H.**	Anggota/*Member*

1.3. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

1.3. Independence of the Members of the Audit Committee

All members of the Audit Committee have no financial, management, share ownership and/or family relationship with the controlling shareholder, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; or financial relationship and/or share ownership relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.

1.3.1. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga (Y = Ya; T = Tidak)

1.3.1. Financial Relationships and Family Relationships (Y = Yes; T = No)

No.	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Hubungan Keuangan sampai dengan Derajat Kedua dengan/*Financial Relationship Degree with*						Hubungan Keluarga dengan/*Family Relationship up to the Second with*					
			DIREKSI / *BOD*		DEKOM / *BOC*		PSP / *CS*		DIREKSI / *BOD*		DEKOM / *BOC*		PSP / *CS*	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1.	**Dra. Hj. Emilia, M.E.**	Ketua/*Chairman*	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√
2.	**Dra. Susfayetti, M.Si., Ak.**	Anggota/*Member*	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√
3.	**Firmansyah Putra, S.H., M.H.**	Anggota/*Member*	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√

1.3.2. Kepemilikan Saham

1.3.2. Share Ownership

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Saham di Bank Jambi/*Shares In Bank Jambi*	Saham di Perusahaan Lain/*Shares in Other Company*
1.	**Dra. Hj. Emilia, M.E.**	Ketua/*Chairman*	Nihil/*None*	Nihil/*None*
2.	**Dra. Susfayetti, M.Si., Ak.**	Anggota/*Member*	Nihil/*None*	Nihil/*None*
3.	**Firmansyah Putra, S.H., M.H.**	Anggota/*Member*	Nihil/*None*	Nihil/*None*

1.3.3. Rangkap Jabatan (Y = Ya; T = Tidak)

1.3.3. Concurrent Position (Y = Yes; T = No)

Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Rangkap Jabatan pada Lembaga/ Perusahaan keuangan *Concurrent Positions in Financial Institutions/Companies*		Rangkap Jabatan pada Lembaga/ Perusahaan Anak Bukan Bank yang Dikendalikan Bank *Concurrent Positions in Non-Bank Subsidiary Institutions/Companies Controlled by the Bank*	
		Y	T	Y	T
Dra. Hj. Emilia, M.E.	Ketua/*Chairman*	X	√	X	√
Dra. Susfayetti, M.Si., Ak.	Anggota/*Member*	X	√	X	√
Firmansyah Putra, S.H., M.H.	Anggota/*Member*	X	√	X	√

1.4. Rapat Komite Audit

Komite Audit telah mengadakan rapat secara berkala, selama tahun 2021 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit tercantum pada tabel di bawah ini:

1.4. Audit Committee Meetings

The Audit Committee holds regular meetings. During 2021 the Audit Committee held 4 (four) meetings with the attendance rate of each member of the Audit Committee listed in the table below:

Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Jumlah rapat (kali)/*Number of meetings (Times)*	Tingkat kehadiran (%)/*Attendance rate (%)*
Khairul Pata, S.Sos.	Ketua/*Chairman*	4	100%
Dra. Susfayetti, M.Si., Ak.	Anggota/*Member*	4	100%
Firmansyah Putra, S.H., M.H.	Anggota/*Member*	4	100%
Dra. Hj. Emilia, M.E.	Ketua/*Chairman* (24 Okt. 2021 - sekarang)/*(Oct 24, 2021 - present)*	-	-

1.5. Kegiatan dan Laporan Kerja Komite Audit

Selama tahun 2021, Komite Audit telah melakukan evaluasi atas laporan audit intern yang mencakup audit rutin dan audit khusus serta laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Evaluasi tersebut disertai saran/rekomendasi telah disampaikan seluruhnya kepada Dewan Komisaris. Di samping itu, Komite Audit juga telah menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Komite Audit memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Jambi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

Kegiatan Komite Audit dalam tahun 2021 dilakukan dalam bentuk pertemuan dalam rangka mengikuti Rapat Direksi dan Komisaris, Rapat Komisaris dan Direksi, Rapat Komisaris, pembahasan hasil evaluasi Komite Audit, hasil pertemuan Komite Audit dengan satuan-satuan kerja serta hasil kegiatan lainnya.

Beberapa hasil pengawasan yang dilakukan dari kegiatan Komite Audit dalam tahun 2021 berupa memo-memo hasil kajian dan rekomendasi yang dilakukan, antara lain:

1. Persetujuan sewa Ruang ATM Simpang Tiga Rawang berdasarkan Memo No. 02/KA/BJ/2021 tanggal 22 Februari 2021.
2. Standarisasi *Draft* perjanjian kerja sama antara PT BPD Jambi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi tentang pengelolaan penempatan uang dana kas umum dalam bentuk Giro dan Deposito berdasarkan Memo No. 05/KA/BJ/2021 tanggal 02 Maret 2021.
3. Analis atas permohonan persetujuan usulan kredit hapus buku menjadi hapus tagih berdasarkan Memo No. 07/KA/BJ/2021 tanggal 23 Maret 2021.
4. Persetujuan sewa Ruang ATM MM Semurup berdasarkan Memo No. 09/KA/BJ/2021 tanggal 13 April 2021.
5. Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit oleh KAP DBSDA atas laporan Keuangan PT BPD Jambi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020, berdasarkan Memo No. 09/KA/BJ/2020 tanggal 16 Juni 2021.
6. Persetujuan perpanjangan sewa Ruko KCP syariah seberang berdasarkan Memo No. 18/KA/BJ/2020 tanggal 28 Juni 2021.
7. Persetujuan Revisi RBB PT BPD Jambi 2021-2023 berdasarkan Memo No. 19/KA/BJ/2021 tanggal 29 Juni 2021.
8. Persetujuan kerja sama dan *Financing* PT SMF (persero) dengan PT BPD Jambi berdasarkan Memo No. 20/KA/BJ/2021 tanggal 29 Juni 2021.

1.5. Activities and Reports of the Audit Committee

During 2021, the Audit Committee has evaluated the internal audit reports, including routine audits and special audits as well as audit reports by the Public Accounting Firm. The evaluation is accompanied by suggestions/recommendations that have been submitted entirely to the Board of Commissioners. In addition, the Audit Committee has also submitted an annual report regarding the implementation of its duties and responsibilities to the Board of Commissioners and carried out other tasks in order to assist the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

The Audit Committee ensures that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit of Bank Jambi, external auditors, results of OJK supervision and/or results of supervision by other authorities.

The activities of the Audit Committee in 2021 are carried out in the form of meetings to attend the Board of Directors and Commissioners Meetings, Commissioners and Directors Meetings, Commissioners Meetings, discussion of the results of the Audit Committee evaluations, the results of the Audit Committee meetings with work units and the results of other activities.

Some of the results of supervision carried out from the activities of the Audit Committee in 2021 in the form of memos on the results of studies and recommendations made, among others:

1. *Approval for renting the Simpang Tiga Rawang ATM hall, based on Memo No. 02/KA/BJ/2021 February 22, 2021.*
2. *Standardization of the draft cooperation agreement between PT BPD Jambi and the Regency and City Provincial Governments in Jambi Province regarding the management of general cash fund placements in the form of Current Accounts and Time Deposits based on Memo No. 05/KA/BJ/2021 dated 02 March 2021.*
3. *Analyst on the application for approval of the proposal to change the write-off credit into a waiver based on Memo No. 07/KA/BJ/2021 dated March 23, 2021.*
4. *Approval for rental of ATM Hall at MM Semurup based on Memo No. 09/KA/BJ/2021 dated April 13, 2021.*
5. *Evaluation Report on the implementation of the provision of Audit Services by KAP DBSDA on the Financial statements of PT BPD Jambi for the period ended December 31, 2020, based on Memo No. 09/KA/BJ/2020 June 16, 2021.*
6. *Approval of lease extension of Sharia KCP Office House, based on Memo No. 18/KA/BJ/2020 dated 28 June 2021.*
7. *Approval of the Revised RBB of PT BPD Jambi 2021-2023 based on Memo No. 19/KA/BJ/2021 dated June 29, 2021.*
8. *Agreement on Cooperation and Financing of PT SMF (Persero) with PT BPD Jambi based on Memo No. 20/KA/BJ/2021 dated June 29, 2021.*

9. Persetujuan Perpanjangan sewa ruang ATM di komplek perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo berdasarkan Memo No. 021/KA/BJ/2021 tanggal 12 Juli 2021.
10. Persetujuan *Draft* Perjanjian kerjasama PT BPD Jambi dengan PT Artajasa pembayaran Elektronik tentang penyelenggaran layanan bersama *payment* dan *settlement* tagihan samsat digital berdasarkan Memo No. 023/KA/BJ/2021 tanggal 14 Juli 2021
11. Persetujuan *Draft* Nota Kesepahaman (MOU) PT BPD Jambi dengan PT Pos Indonesia (Persero) kantor regional Pos III Palembang tentang kerjasama pengembangan layanan berdasarkan Memo No. 024/KA/BJ/2021 tanggal 16 Juli 2021.
12. Persetujuan perpanjian sewa KCP Pematang Lumut berdasarkan Memo No. 025/KA/BJ/2021 tanggal 26 Juli 2021.
13. Persetujuan perpanjangan sewa KCP Unja Mendalo berdasarkan Memo No. 025/KA/BJ/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
14. Persetujuan sewa ruang ATM Pada SPBU Aurduri berdasarkan Memo No. 026/KA/BJ/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
15. Persetujuan Nota Kesepahaman (MOU) 4 (empat) Pihak terkait dengan kerja sama pemberian Kredit kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Memo No. 027/KA/BJ/2021 tanggal 17 September 2021.
16. Pengajuan Nama KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT BPD Jambi untuk tahun buku yang berakhir 2021 berdasarkan Memo No. 028/KA/BJ/2021 tanggal 20 September 2021.
17. Persetujuan Revisi struktur Organisasi PT BPD Jambi, berdasarkan Memo No.029/KA/BJ/2021 tanggal 02 November 2021.
18. Penunjukan KAP untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT BPD Jambi untuk tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 berdasarkan Memo No. 030/KA/BJ/2021 tanggal 22 September 2021.
19. Tindak Lanjut Surat OJK S-746/KO/0701/2021 berdasarkan Memo No.032/KA/BJ/2021 tanggal 06 Desember 2021.
20. Tindak Lanjut surat OJK S-747/KO/0701/2021 berdasarkan Memo No.033/KA/BJ/2021 tanggal 07 Desember 2021.
21. Persetujuan sewa ruang atm di RUSD Raden Mattaher berdasarkan Memo No. 034 /KA/BJ/2021 tanggal 07 Desember 2021.
22. Persetujuan *Draft Memorandum Of Understanding* (MOU) tentang Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Pemerintah Daerah di Kabupaten Tebo beradasarkan Memo No. 035/KA/BJ/2021 tanggal 13 Desember 2021.
23. Persetujuan Revisi Struktur Organisasi dan *Job Description* PT BPD Jambi berdasarkan Memo No. 036/KA/BJ/2021 tanggal 23 Desember 2021.
24. Persetujuan sewa ruang ATM di SPBU Batang Asam berdasarkan Memo No. 037/KA/BJ/2021 tanggal 23 Desember 2021.
25. Persetujuan perpanjangan sewa ruko KCP Sungai Gelam berdasarkan Memo No. 038/KA/BJ/2021 tanggal 29 Desember 2021.

9. *Approval for the extension of the ATM hall rental in the Bungo Regency Regional Secretariat office complex based on Memo No. 021/KA/BJ/2021 dated July 12, 2021.*
10. *Approval of the Draft Cooperation Agreement between PT BPD Jambi and PT Artajasa Electronic Payments regarding the provision of joint payment services and settlement of digital Samsat bills based on Memo No. 023/KA/BJ/2021 dated 14 July 2021*
11. *Approval of the Draft Memorandum of Understanding (MOU) of PT BPD Jambi with PT Pos Indonesia (Persero) Regional Office of Pos III Palembang regarding service development cooperation based on Memo No. 024/KA/BJ/2021 dated 16 July 2021.*
12. *Approval of the lease agreement for Pematang Lumut KCP based on Memo No. 025/KA/BJ/2021 dated 26 July 2021.*
13. *Approval for extension of KCP Unja Mendalo's lease based on Memo No. 025/KA/BJ/2021 dated August 12, 2021.*
14. *Approval on the rental of the ATM hall at the Aurduri gas station based on Memo No. 026/KA/BJ/2021 dated August 12, 2021.*
15. *Approval of the Memorandum of Understanding (MOU) of 4 (four) Parties related to the cooperation in providing Credit to Regional Governments based on Memo No. 027/KA/BJ/2021 dated 17 September 2021.*
16. *Submission of the name of KAP for the Audit of the Financial Statements of PT BPD Jambi for the financial year ending 2021 based on Memo No. 028/KA/BJ/2021 dated September 20, 2021.*
17. *Approval of Revision of Organizational structure of PT BPD Jambi, based on Memo No.029/KA/BJ/2021 dated November 2, 2021.*
18. *Appointment of KAP to conduct a General Audit of the Financial Statements of PT BPD Jambi for the year Ended December 31, 2021 based on Memo No. 030/KA/BJ/2021 dated 22 September 2021.*
19. *Follow-up to OJK Letter S-746/KO/0701/2021 based on Memo No.032/KA/BJ/2021 dated December 06, 2021.*
20. *Follow up on OJK letter S-747/KO/0701/2021 based on Memo No.033/KA/BJ/2021 dated December 07, 2021.*
21. *Approval for rental of ATM hall at RUSD Raden Mattaher based on Memo No. 034 /KA/BJ/2021 dated December 07 , 2021.*
22. *Approval of the Draft Memorandum of Understanding (MOU) regarding Local Tax Revenue and Local Government Levies in Tebo Regency based on Memo No. 035/KA/BJ/2021 dated December 13, 2021.*
23. *Approval of Revision of Organizational Structure and Job Description of PT BPD Jambi based on Memo No. 036/KA/BJ/2021 dated December 23, 2021.*
24. *Approval for renting the ATM hall at the Batang Asam gas station based on Memo No. 037/KA/BJ/2021 dated December 23, 2021.*
25. *Approval for extension of the shophouse rental of KCP Sungai Gelam based on Memo No. 038/KA/BJ/2021 December 29, 2021.*

2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam rangka mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana yang diamanahkan dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelolabagi Bank Umum, Direksi dan Komisaris Bank Jambi telah membentuk Komite Pemantau Risiko.

2.1. Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Sebagai salah satu bentuk pertanggungawaban Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2021 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko.
b. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
d. Memantau laporan Profil Risiko.
e. Memantau risiko yang terjadi serta rencana perbaikan *(Action Plan)*.

2.2. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 orang dari Pihak Independen sebagai anggota, dengan susunan sebagai berikut:

2. RISK MONITORING COMMITTEE

In order to implement good corporate governance as mandated in POJK No. 55/POJK.03/2016 and SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the Board of Directors and Commissioners of Bank Jambi have established a Risk Monitoring Committee.

2.1. Duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee

As a form of accountability of the Risk Monitoring Committee, during 2021 the Risk Monitoring Committee has carried out the following duties and responsibilities:

a. Evaluating risk management policies.
b. Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of these policies.
c. Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit, to provide recommendations to the Board of Commissioners.
d. Monitor the Risk Profile report.
e. Monitor the risks that occur and plan for improvement (Action Plan).

2.2. Membership of the Risk Monitoring Committee

The composition of the Risk Monitoring Committee as of October 23, 2021 consists of 3 (three) people consisting of 1 Independent Commissioner as Chairman and 2 Independent Parties as members, with the following composition:

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*
1	**Ir. Ari Karyawan Semiawan, M.Sc.**	Ketua/*Chairman*
2	**Rahayu, S.E., M.Sc., Ak.**	Anggota/*Member*
3	**Yor Patrik Nazda, S.E., M.Si.**	Anggota/*Member*

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jambi dari tanggal 24 Oktober 2021 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen diluar Bank Jambi, dengan susunan sebagai berikut:

The composition of the Bank Jambi Risk Monitoring Committee members from October 24, 2021 amounted to 3 (three) people consisting of 1 (one) Chairman held by the President Commissioner and 2 (two) members from Independent Parties outside Bank Jambi, with the composition as follows:

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*
1	**Dra. Hj. Emilia, M.E.**	Ketua/*Chairman*
2	**Rahayu, S.E., M.Sc., Ak.**	Anggota/*Member*
3	**Yor Patrik Nazda, S.E., M.Si.**	Anggota/*Member*

2.3. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

2.3. Independence of the Members of the Risk Monitoring Committee

All members of the Risk Monitoring Committee come from independent parties, have no financial, management, share ownership and/or family relationship with the controlling shareholder, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; or financial relationship and/or share ownership relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.

2.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T = Tidak)

2.3.1. Financial relationships and family relationships (Y = Yes; T = No)

No.	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Hubungan keuangan sampai dengan derajat kedua dengan/ *Family relationship up to the second degree with*						Hubungan keluarga dengan/ *Financial Relationship With*					
			DIREKSI / *BOD*		DEKOM / *BOC*		PSP / *CS*		DIREKSI / *BOD*		DEKOM / *BOC*		PSP / *CS*	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	**Dra. Hj. Emilia, M.E.**	Ketua/*Chairman*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√
2	**Rahayu, S.E., M.Sc., Ak.**	Anggota/*Member*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√
3	**Yor Patrik Nazda, S.E., M.Si.**	Anggota/*Member*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√

2.3.2. Kepemilikan saham

2.3.2. Share Ownership

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Saham Di Bank Jambi/ *Shares In Bank Jambi*	Saham Di Perusahaan Lain/ *Shares in Other Companies*
1	**Dra. Hj. Emilia, M.E.**	Ketua/*Chairman*	Nihil/*None*	Nihil/*None*
2	**Rahayu, S.E., M.Sc., Ak.**	Anggota/*Member*	Nihil/*None*	Nihil/*None*
3	**Yor Patrik Nazda, S.E., M.Si.**	Anggota/*Member*	Nihil/*None*	Nihil/*None*

2.3.3. Rangkap jabatan (Y = Ya; T = Tidak)

2.3.3. Concurrent Position (Y=Yes; TY=N0)

No.	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Rangkap jabatan pada lembaga/ perusahaan keuangan *Concurrent positions in financial institutions/companies*		Rangkap jabatan pada lembaga/ perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank *Concurrent positions in non-bank subsidiary institutions/companies controlled by the bank*	
			Y	T	Y	T
1	**Dra. Hj. Emilia, M.E.**	Ketua/*Chairman*	×	√	×	√
2	**Rahayu, S.E., M.Sc., Ak.**	Anggota/*Member*	×	√	×	√
3	**Yor Patrik Nazda, S.E., M.Si.**	Anggota/*Member*	×	√	×	√

2.4. Rapat Anggota Komite Pamantau Risiko

Rapat-rapat yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu rapat-rapat dengan:
1) Rapat Direksi - Komisaris
2) Rapat dengan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
3) Kegiatan rapat Lainnya

2.4. Risk Monitoring Committee Meetings

In 2021, the Risk Monitoring Committee held 4 (four) meetings, namely meetings with:

1) Board of Directors - Commissioner Meeting
2) Meeting with Compliance and Risk Management Division
3) Other meeting activities

Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Jumlah rapat (kali)/ *Number of meetings (Times)*	Tingkat kehadiran (%)/ *Attendance rate (%)*
Dra. Hj. Emilia, M.E.	Ketua/*Chairman*	4	100%
Rahayu, S.E., M.Sc., Ak.	Anggota/*Member*	4	100%
Yor Patrik Nazda, S.E., M.Si.	Anggota/*Member*	4	100%
Dra. Hj. Emilia, M.E.	Ketua/*Chairman* (24 Okt 2021 - skg/*24 Oct 2021 - Now*)	-	-

2.5. Kegiatan dan laporan kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Kegiatan-kegiatan Komite Pemantau Risiko tahun 2021, terdiri dari rapat-rapat internal maupun rapat dengan unit-unit kerja terkait. Memo-memo hasil kajian, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Analisis dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait An. Bapak Edi Lastono K berdasarkan Memo No. 03/KPR/BJ/2021 tanggal 13 Januari 2021.
2. Analisis dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait An. M. Ridho berdasarkan Memo No. 05/KPR/BJ/2021 tanggal 03 Maret 2021.
3. Analisis Pos Keuangan dan Rasio Likuiditas Posisi 4-5 Maret 2021 berdasarkan Memo No. 07/KPR/BJ/2021 tanggal 22 Maret 2021.
4. Laporan Kinerja Kantor Fungsional Jakarta berdasarkan Memo No. 08/KPR/BJ/2021 tanggal 22 Maret 2021.
5. Analisis dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait An.M. Firdaus (kakak kandung dari Kadiv Umum PT BPD Jambi Bpk Ahmad Jais) berdasarkan Memo No. 09/KPR/BJ/2021 tanggal 26 April 2021.
6. Analisis dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait An. Arif Munandar berdasarkan Memo No. 10/KPR/BJ/2021 tanggal 29 April 2021.
7. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special Rate* terkait An. Nancy Erninda (terkait dengan direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No. 12/KPR/BJ/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
8. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Yunsak El Halcon (terkait Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No.13/KPR/BJ/2021 tanggal 09 Agustus 2021.
9. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Zadiggah Isa Ansori (terkait Kadiv UUS Bank Jambi) berdasarkan Memo No.14/KPR/BJ/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
10. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Yunsak El Halcon, Nancy Erninda, dan Elsa Putri Nurul (terkait Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No.14/KPR/BJ/2021 tanggal 08 September 2021.

2.5. Activities and reports of the Risk Monitoring Committee

In carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee is responsible to the Board of Commissioners. The activities of the Risk Monitoring Committee in 2021, consisting of internal meetings and meetings with related work units. The memos on the results of studies, monitoring and supervision carried out include the following:

1. *Analysis and advice on granting credit to related parties, namely Mr. Edi Lastono K, based on Memo No. 03/KPR/BJ/2021 dated January 13, 2021.*
2. *Analysis and advice on granting credit to related parties, namely M. Ridho, based on Memo No. 05/KPR/BJ/2021 dated March 3, 2021.*
3. *Analysis of Financial Accounts and Liquidity Ratios Position 4-5 March 2021 based on Memo No. 07/KPR/BJ/2021 dated March 22, 2021.*
4. *Jakarta Functional Office Performance Report based on Memo No. 08/KPR/BJ/2021 dated March 22, 2021.*
5. *Analysis and suggestions for granting credit to related parties, namely M. Firdaus (brother of the General Head of PT BPD Jambi Bpk Ahmad Jais), based on Memo No. 09/KPR/BJ/2021 dated April 26, 2021.*
6. *Analysis and advice on granting credit to related parties, namely Arif Munandar, based on Memo No. 10/KPR/BJ/2021 dated April 29, 2021.*
7. *Analysis and suggestions for the application for approval of the special interest rate, namely Nancy Erninda (associated with the Managing Director of Bank Jambi), based on Memo No. 12/KPR/BJ/2021 dated August 10, 2021.*
8. *Analysis and suggestions for the application for approval of the special interest rate ratio, namely Yunsak El Halcon (related to the President Director of Bank Jambi) based on Memo No. 13/KPR/BJ/2021 dated August 9, 2021.*
9. *Analysis and suggestions for the application for approval of the special interest rate ratio, namely Zadiggah Isa Ansori (related to the UUS Head of Bank Jambi) based on Memo No. 14/KPR/BJ/2021 dated August 12, 2021.*
10. *Analysis and suggestions for Application for Approval of Special Interest Rate Ratios, namely Yunsak El Halcon, Nancy Erninda, and Elsa Putri Nurul (related to the President Director of Bank Jambi) based on Memo No. 14/KPR/BJ/2021 dated September 8, 2021.*

11. Analisis dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait An. Januar (terkait Pimpinan Cabang Kerinci PT BPD Jambi) berdasarkan Memo No. 15/KPR/BJ/2021 tanggal 13 September 2021.
12. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special Rate* terkait An. Nancy Erninda (terkait dengan direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No.16/KPR/BJ/2021 tanggal 07 Oktober 2021.
13. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Yunsak El Halcon, Nancy Erninda dan Elsa Putri Nurul (terkait Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No.17/KPR/BJ/2021 tanggal 12 Oktober 2021.
14. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Zadiggah Isa Ansori (terkait Kadiv UUS Bank Jambi) berdasarkan Memo No.18/KPR/BJ/2021 tanggal 12 Oktober 2021.
15. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special Rate* terkait An. Yunsak El Halcon (terkait Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No.19/KPR/BJ/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
16. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Yunsak El Halcon (terkait Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No.20/KPR/BJ/2021 tanggal 09 November 2021.
17. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Zadiggah Isa Ansori (terkait Kadiv UUS Bank Jambi) berdasarkan Memo No. 21/KPR/BJ/2021, tanggal 09 November 2021.
18. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Yunsak El Halcon, Nancy Erninda dan Elsa Putri Nurul (terkait Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No.22/KPR/BJ/2021 tanggal 09 November 2021.
19. Laporan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2022-2024 berdasarkan Memo No. 23/KPR/BJ/2021 tanggal 17 November 2021.
20. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special Rate* terkait An. Yunsak El Halcon (terkait direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No. 24/KPR/BJ/2021 tanggal 24 November 2021.
21. Analisis dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait An. Rifan Rahmadani Henri (terkait Kadiv E-Banking PT BPD Jambi) berdasarkan Memo No. 25/KPR/BJ/2021 tanggal 30 November 2021.
22. Analisis dan saran pemberian kredit KUR Investasi pihak terkait An. Nuria Hasma (terkait Adik ipar PSP Bapak Al Haris) berdasarkan Memo No. 27/KPR/BJ/2021 tanggal 09 Desember 2021.
23. Analisis dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait An. Dwi Andayani (terkait pimpinan cabang Sengeti PT BPD Jambi) berdasarkan Memo No. 25/KPR/BJ/2021 tanggal 21 Desember 2021.
24. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Yunsak El Halcon (terkait Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No. 26/KPR/BJ/2021 tanggal 24 Desember 2021.

11. *Analysis and advice on granting credit to related parties, namely Januar (related to the Kerinci Branch Manager of PT BPD Jambi) based on Memo No. 15/KPR/BJ/2021 dated September 13, 2021.*
12. *Analysis and advice on Application for Approval of the related special interest rate, namely Nancy Erninda (related to the President director of Bank Jambi) based on Memo No.16/KPR/BJ/2021 dated October 7, 2021.*
13. *Analysis and advice on Application for Approval of Special Interest Rate Ratios, namely Yunsak El Halcon, Nancy Erninda and Elsa Putri Nurul (related to the President Director of Bank Jambi) based on Memo No.17/KPR/BJ/2021 dated October 12, 2021.*
14. *Analysis and suggestions for the application for approval of the special interest rate ratio, namely Zadiggah Isa Ansori (related to the UUS Head of Bank Jambi) based on Memo No.18/KPR/BJ/2021 dated October 12, 2021.*
15. *Analysis and advice on the Application for Approval of the special interest rate, namely Yunsak El Halcon (related to the President Director of Bank Jambi) based on Memo No.19/KPR/BJ/2021 dated October 22, 2021.*
16. *Analysis and advice on Application for approval of special interest rate ratio, namely Yunsak El Halcon (related to the President Director of Bank Jambi) based on Memo No.20/KPR/BJ/2021 dated November 9, 2021.*
17. *Analysis and suggestions for the application for approval of the special interest rate ratio, namely Zadiggah Isa Ansori (related to the Head of the UUS Division of Bank Jambi) based on Memo No. 21/KPR/BJ/2021, dated November 9, 2021.*
18. *Analysis and advice on Application for Approval of Special Interest Rate Ratios, namely Yunsak El Halcon, Nancy Erninda and Elsa Putri Nurul (related to the President Director of Bank Jambi) based on Memo No.22/KPR/BJ/2021 dated November 9, 2021.*
19. *Report on the Business Plan of Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Year 2022-2024 based on Memo No. 23/KPR/BJ/2021 dated 17 November 2021.*
20. *Analysis and suggestions for the application for approval of the special interest rate, namely Yunsak El Halcon (related to the Managing Director of Bank Jambi) based on Memo No. 24/KPR/BJ/2021 dated November 24, 2021.*
21. *Analysis and advice on providing credit to related parties, namely Rifan Rahmadani Henri (related to the Head of the E-Banking Division of PT BPD Jambi) based on Memo No. 25/KPR/BJ/2021 dated November 30, 2021.*
22. *Analysis and advice on granting KUR loans to related parties, namely Nuria Hasma (related to PSP's brother-in-law Mr. Al Haris) based on Memo No. 27/KPR/BJ/2021 dated December 9, 2021.*
23. *Analysis and advice on granting credit to related parties, namely Dwi Andayani (related to the Sengeti branch head of PT BPD Jambi) based on Memo No. 25/KPR/BJ/2021 dated December 21, 2021.*
24. *Analysis and advice on Application for Approval of the related special interest rate ratio, namely Yunsak El Halcon (related to the President Director of Bank Jambi) based on Memo No. 26/KPR/BJ/2021 dated December 24, 2021.*

25. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Nancy Erninda, dan Elsa Putri Nurul (terkait dengan Direktur Utama Bank Jambi) berdasarkan Memo No. 27/KPR/BJ/2021 tanggal 24 Desember 2021.
26. Analisis dan saran Permohonan Persetujuan suku bunga *special* Nisbah terkait An. Zadiggah Isa Ansori (terkait Kadiv UUS Bank Jambi) berdasarkan Memo No. 28/KPR/BJ/2021 tanggal 24 Desember 2021.

25. Analysis and suggestions for the application for approval of the related special interest rate ratio, namely Nancy Erninda, and Elsa Putri Nurul (related to the President Director of Bank Jambi) based on Memo No. 27/KPR/BJ/2021 dated December 24, 2021.
26. Analysis and suggestions for the application for approval of the special interest rate ratio, namely Zadiggah Isa Ansori (related to the Head of the UUS Division of Bank Jambi) based on Memo No. 28/KPR/BJ/2021 dated December 24, 2021.

3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
   - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
   - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
c) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
d) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.2. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan 23 Oktober 2021 sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen salah satunya sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang dari unsur Pegawai yaitu Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut :

3. REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee was formed to assist the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties towards the Company, in particular to ensure that the remuneration and nomination system/policy of the Company has been prepared and implemented based on the principles of fairness and transparency and complies with the prevailing laws and regulations.

3.1. Remuneration and Nomination Committee Duties and Responsibilities

a) Evaluating the remuneration policy.
b) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding
   - *Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the GMS*
   - *Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors through the Board of Commissioners.*
c) Prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
d) Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

3.2. Composition of the Remuneration and Nomination Committee

The composition of the Remuneration and Nomination Committee in October 23, 2021 is 4 (four) persons consisting of 2 (two) Independent Commissioners, one of which is the Chairman, 1 (one) President Commissioner and 1 (one) person from the employee element, namely the Head of the Resources Division Human Power, with the following arrangement :

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*
1	**Ir. Ari Karyawan Semiawan, M.Sc.**	Ketua/*Chairman*
2	**Dra. Emilia, M.E.**	Anggota/*Member*
3	**Khairul Pata, S.Sos.**	Anggota/*Member*
4	**Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia**	Anggota/*Member*

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari tanggal 24 Oktober 2021 sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama sebagai Ketua dan 1 (satu) orang dari unsur Pegawai yaitu Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Composition of Remuneration and Nomination Committee Members from October 24, 2021 as many as 2 (two) people consisting of 1 (one) President Commissioner as Chair and 1 (one) person from the Employee element, namely the Head of the Human Resources Division, with the following composition:

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*
1	**Dra. Emilia, M.E.**	Ketua/*Chairman*
2	**Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia**	Anggota/*Member*

3.3. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada umumnya berasal dari pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota sesama Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen, disamping itu anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:

a. Tidak terdapat Direksi Bank maupun Direksi Bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
b. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi juga merangkap sebagai Ketua pada Komite lainyaitu Komite Pemantau Risiko, akan tetapi perangkapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3. Independence of Remuneration and Nomination Committee members

Members of the Remuneration and Nomination Committee generally come from independent parties, have no financial, management, share ownership and/or family relationship with the controlling shareholder, fellow members of the Board of Commissioners and/or with members of the Board of Directors; or financial relationship and/or share ownership relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently, in addition to members of the Remuneration and Nomination Committee:

a. There are no member of the Bank's BOD or member of other Bank's BOD who become member of the Remuneration and Nomination Committee.
b. The Chairman of the Remuneration and Nomination Committee also serves as the Chair of another Committee, namely the Risk Monitoring Committee, but this concurren position is in accordance with applicable regulations.

3.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T = Tidak)

3.3.1. Financial and family relationships (Y = Yes; N = No)

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Hubungan keuangan sampai dengan derajat kedua dengan/*Family relationship up to the second degree with*						Hubungan keluarga dengan/*Financial relationship with*					
			Direksi/ *BOD*		Dekom/ *BOC*		PSP/ *PSP*		Direksi/ *BOD*		Dekom/ *BOC*		PSP/ *PSP*	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	**Dra. Emilia, M.E.**	Ketua/*Chairman*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√
2	**Pemimpin Divisi SDM**	Anggota/*Member*	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√

3.3.2. Kepemilikan saham

3.3.2. Share Ownership

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Saham di Bank Jambi/ *Shares in Bank Jambi*	Saham di Perusahaan Lain/ *Shares in Other Companies*
1	**Dra. Emilia, M.E.**	Ketua	Nihil	Nihil
2	**Pemimpin Divisi SDM**	Anggota	Nihil	Nihil

3.3.3. Rangkap jabatan (Y = Ya; T = Tidak)

3.3.3. Concurrent Position (Y = Yes; T = No)

No	Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Rangkap jabatan pada lembaga/ perusahaan keuangan *Concurrent positions in financial institutions/companies*		Rangkap jabatan pada lembaga/ perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank *Concurrent positions in non-bank subsidiary institutions/companies controlled by the bank*	
			Y	T	Y	T
1	**Dra. Emilia, M.E.**	Ketua	×	√	×	√
2	**Pemimpin Divisi SDM**	Anggota	×	√	×	√

3.4. Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2021, Komite Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, dengan tingkat kehadiran ketua dan anggota sebagai berikut:

3.4. Remuneration and Nomination Committee member meeting

During 2021, the Remuneration Committee has held 6 (six) meetings, with the attendance of the chairman and members as follows:

Nama/*Name*	Jabatan/*Position*	Jumlah rapat (kali)/ *Number of meetings (Times)*	Tingkat kehadiran (%)/ *Attendance rate (%)*
Ir. Ari Karyawan Semiawan, M.Sc.	Ketua/*Chairman*	6	100%
Dra. Emilia, M.E.	Anggota/*Member*	6	100%
Khairul Pata, S.Sos.	Anggota/*Member*	5	100%
Pemimpin Divisi SDM	Anggota/*Member*	6	100%
Dra. Hj. Emilia, M.E.	Ketua/*Chairman* (24 Okt 2021 - skg/*24 Oct 2021 - Now*)	-	-

3.5. Kegiatan dan laporan kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tahun 2021. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam bentuk rapat, memberikan rekomendasi dan kegiatan-kegiatan lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah ke DSN MUI berdasarkan Memo No. 01/KRN/BJ/2021 tanggal 22 Januari 2021.
2. Usulan Remunerasi RUPS Sirkuler sebagai salah satu agenda Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Memo No. 02/KRN/BJ/2021 tanggal 10 Februari 2021.
3. Permohonan RUPS Sirkuler Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Memo No. 04/KRN/BJ/2021 tanggal 19 Maret 2021.
4. Tindak Lanjut Dewan Pengawas Syariah PT BPD Jambi berdasarkan Memo No. 05/KRN/BJ/2021 tanggal 22 Maret 2021.
5. Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah UUS PT BPD Jambi berdasarkan Memo No. 07/KRN/BJ/2021 tanggal 20 September 2021.
6. Penyampaian Kekurangan Dokumen Calon DPS berdasarkan Memo No. 08/KRN/BJ/2021 tanggal 06 Oktober 2021.

3.5. Remuneration and Nomination Committee activities and reports

In accordance with the work program of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi in 2021. The Remuneration and Nomination Committee has carried out several activities in the form of meetings, providing recommendations and other activities related to the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee, among others, as follows: following:

1. *Recommendation of the Sharia Supervisory Board to DSN MUI based on Memo No. 01/KRN/BJ/2021 dated January 22, 2021.*
2. *Proposed Remuneration for Circular GMS as one of the agendas for the General Meeting of Shareholders based on Memo No. 02/KRN/BJ/2021 dated February 10, 2021.*
3. *Application for the Sharia Supervisory Board Circular GMS based on Memo No. 04/KRN/BJ/2021 dated March 19, 2021.*
4. *Follow-up of the Sharia Supervisory Board of PT BPD Jambi based on Memo No. 05/KRN/BJ/2021 dated March 22, 2021.*
5. *Application for Extension of Recommendation from the Sharia Supervisory Board of UUS PT BPD Jambi based on Memo No. 07/KRN/BJ/2021 dated 20 September 2021.*
6. *Submission of Shortage of DPS Candidate Documents based on Memo No. 08/KRN/BJ/2021 dated October 6, 2021.*

7. Rekomendasi ke Sdr. H. Marwin Amirullah berdasarkan Memo No. 09/KRN/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
8. Rekomendasi ke Sdri. Robi'atul Adawiyah berdasarkan Memo No. 10/KRN/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
9. Rekomendasi ke Sdr. Endang. R berdasarkan Memo No. 11/KRN/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
10. Rekomendasi ke Sdr. Sucipto, berdasarkan Memo No. 12/KRN/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
11. Rekomendasi ke Sdr. Sudirman, berdasarkan Memo No. 13KRN/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
12. Rekomendasi ke Sdr. M Zaki, berdasarkan Memo No. 14/KRN/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
13. Rekomendasi ke Sdri. Eva Mayang Sari, berdasarkan Memo No. 15/KRN/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
14. Rekomendasi ke Sdri. Nurida Isnaeni, berdasarkan Memo No. 16/KRN/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
15. Rekomendasi ke Sdr. Ahmad Syahrizal, berdasarkan Memo No. 17/KRN/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
16. Rekomendasi ke Sdri. ILyanti, berdasarkan Memo No. 18/KRN/BJ/2021 tanggal 18 November 2021.
17. Rekomendasi Nama-nama Bakal Calon Komisaris Independen PT BPD Jambi, berdasarkan Memo No. 19/KRN/BJ/2021 tanggal 17 Desember 2021.
18. Penyampaian Hasil pelaksanaan rangkaian proses seleksi calon Komisaris Independen dan Non Independen berdasarkan Memo No. 20/KRN/BJ/2021 tanggal 24 Desember 2021.

V. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Aset dan Kebijakan/ Aset dan Liability, Komite KebijaksanaanPerkreditan, Komite Kredit, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pengarah Teknologi yang fungsinya memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama.

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi untuk mengetahui mengenai keragaman risiko dan menyakini bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan baik untuk risiko yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak dapat dikuantifikasikan serta mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada Bank.

2. KOMITE MANAJEMEN ASET DAN KEBIJAKAN/ ASET DAN *LIABILITY*

Komite Manajemen Aset dan Kebijakan/ Aset dan *Liability* dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan dan kewajiban keuangan Bank Jambi.

7. *Recommendation to Br. H. Marwin Amirullah based on Memo No. 09/KRN/BJ/2021 dated November 18 , 2021.*
8. *Recommendation to Ms. Robi'atul Adawiyah based on Memo No. 10/KRN/BJ/2021 dated November 18 , 2021.*
9. *Recommendation to Br. Endang. R based on Memo No. 11/KRN/BJ/2021 dated November 18, 2021.*
10. *Recommendation to Br. Sucipto, based on Memo No. 12/KRN/BJ/2021 dated November 18, 2021.*
11. *Recommendation to Br. Sudirman, based on Memo No. 13KRN/BJ/2021 November 18, 2021.*
12. *Recommendation to Br. M Zaki, based on Memo No. 14/KRN/BJ/2021 dated November 18, 2021.*
13. *Recommendation to Ms. Eva Mayang Sari, based on Memo No. 15/KRN/BJ/2021 dated 18 November 2021.*
14. *Recommendation to Ms. Nurida Isnaeni, based on Memo No. 16/KRN/BJ/2021 dated November 18, 2021.*
15. *Recommendation to Br. Ahmad Syahrizal, based on Memo No. 17/KRN/BJ/2021 dated November 18, 2021.*
16. *Recommendation to Ms. Ilyanti, based on Memo No. 18/KRN/BJ/2021 November 18, 2021.*
17. *Recommendations for the Names of Prospective Independent Commissioners of PT BPD Jambi, based on Memo No. 19/KRN/BJ/2021 December 17, 2021.*
18. *Submission of the results of the selection process for candidates for Independent and Non-Independent Commissioners based on Memo No. 20/KRN/BJ/2021 December 24, 2021.*

V. COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties, the Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee, Asset and Liability Management Committee and Policy, Credit Policy Committee, Credit Committee, Human Resources Committee and Technology Steering Committee whose function is to provide recommendations to the President Director.

1. RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee is tasked with assisting the Board of Directors in knowing about the diversity of risks and ensuring that all risks have been identified, measured, monitored and controlled for both quantifiable and non-quantifiable risks as well as reducing and eliminating risks that occur to the Bank.

2. ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE

The Asset and Policy/Asset and Liability Management Committee was formed to formulate policies and make decisions in managing and controlling the financial assets and financial liabilities of Bank Jambi.

3. KOMITE KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN

Komite Kebijaksanaan Perkreditan dibentuk untuk bertanggung jawab dalam merumuskan kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi **portfolio** perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

4. KOMITE KREDIT

Komite Kredit dibentuk untuk bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

5. KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program pengembangan karir dan penyelesaian pelanggaran ketentuan/ tata tertib karyawan Bank sepanjang diperlukan oleh Direksi agar program tersebut dapat berjalan secara efektif.

6. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana fungsinya yang memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam rangka penataan fungsi komputerisasi dan penyelenggaraan Teknologi Informasi.

VI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan/atau pihak terkait dengan Bank, seperti pemberian perlakuan istimewa kepada pihak–pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

Penanganan benturan kepentingan Bank Jambi dapat berupa:

3. CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee was formed to be responsible for formulating policies, overseeing the implementation of policies, monitoring the development and condition of the credit portfolio and providing suggestions for improvement.

4. CREDIT COMMITTEE

The Credit Committee is formed to be in charge in evaluating and/or deciding credit applications for the amount and type of credit determined by the Board of Directors.

5. HUMAN RESOURCES COMMITTEE

The Human Resources Committee was formed to provide input and recommendations on the implementation of career development programs and the resolution of violations of the Bank's employee regulations/rules to the extent required by the Board of Directors so that the program can run effectively.

6. TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Information Technology Steering Committee has the duties, authorities and responsibilities as its function which provides input to the President Director in the context of structuring the computerization function and the implementation of Information Technology.

VI. HANDLING OF CONFLICT OF INTEREST

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers of the Bank are prohibited from taking actions that may harm the Bank and/or reduce the Bank's profits and must disclose transactions containing the conflict of interest referred to in each of their decisions.

The conflict of interest referred to above is an event where there is a difference between the economic interests of the Bank and the personal economic interests of the owners, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Executive Officers of the bank and/or parties related to the Bank, such as giving preferential treatment to certain parties outside the procedures and provisions. applicable regulations and the provision of interest rates is not in accordance with the applicable provisions and procedures. If the decision still has to be taken, it must prioritize the economic interests of the Bank and avoid losses or reduce the Bank's profits.

The handling of conflicts of interest of Bank Jambi can be in the form of:

a) Pengungkapan *(disclosure)*
b) Melalui sarana pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS)
c) Penerapan pengendalian gratifikasi

a) Disclosure
b) Through the Whistle Blowing System (WBS) complaint facility
c) Application of gratification control

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan/ *Name and Position of Party Having Conflict of Interest*	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan/*Name and Position of Decision Maker*	Jenis Transaksi/ *Transaction Type*	Nilai Transaksi/ *Transaction Value*	Ket/*Note*
-	Nihil/*None*	Nihil/*None*	Nihil/*None*	Nihil/*None*	Nihil/*None*

VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. FUNGSI KEPATUHAN

Serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Untuk itu Bank selalu berusaha meningkatkan pemahaman Budaya kepatuhan kepada seluruh Unit Kerja dan jajaran Organisasi sampai kepada aktivitas bisnis paling terdepan.

Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Direktur Kepatuhan ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, diantaranya sebagai berikut:
- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. LAPORAN KEPATUHAN

Pelaporan kepada OJK mengenai Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan telah terlaksana secara rutin per semester. Laporan kepatuhan tersebut mencerminkan kepatuhan Bank Jambi terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

VII. IMPLEMENTATION OF THE COMPLIANCE FUNCTION

1. COMPLIANCE FUNCTION

A series of preventive actions or steps to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations, including Sharia Principles for sharia business units, and ensure the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities.

For this reason, the Bank always strives to improve the understanding of compliance culture to all Work Units and Organizational ranks to the most advanced business activities.

In accordance with POJK No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, the Compliance Director is assigned to determine the necessary steps to ensure Bank compliance.

Duties and responsibilities of the Compliance Director, including the following:
- *Formulating strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture;*
- *Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors;*
- *Establish compliance systems and procedures that will be used to formulate the Bank's internal provisions and guidelines;*
- *Ensuring that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with Bank Indonesia regulations and the prevailing laws and regulations;*

2. COMPLIANCE REPORT

Reports to the OJK regarding the Implementation Principles of the Compliance Director's Duties have been carried out regularly every semester. The compliance report reflects Bank Jambi's compliance with applicable laws and regulations.

Ketidakpatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundangan dapat berakibat sanksi dari pihak regulator sehingga dapat menurunkan reputasi Bank dimata *stakeholders*. Karena itu, Bank selalu tetap menjaga agar terhindar dari segala bentuk sanksi, baik teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu serta pemberhentian pengurus bank.

Atas dasar ini, fungsi kepatuhan Bank menjadi amat penting untuk mendukung pengelolaan Risiko Kepatuhan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan usaha baik sekarang maupun yang akan datang. Seluruh potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi dapat termitigasi dengan baik, sehingga dapat meminimalkan Risiko Kepatuhan bagi Bank.

Seluruh jajaran Bank wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku untuk setiap fungsi operasional sehari-hari. Dengan demikian, kepatuhan merupakan tanggung jawab setiap individu di Bank dan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Budaya Kepatuhan *(Compliance Culture)* merupakan unsur penting dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bank mulai dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah.

Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengkoordinasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan memastikan pemahaman jajaran Bank terhadap seluruh aturan telah terimplementasi dengan baik melalui praktik perbankan yang sehat sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

3. PENERAPAN KEPATUHAN

Penerapan Kepatuhan Bank sudah berjalan dengan cukup baik, dimana telah ditetapkan salah satu Direksi menjadi Direktur Kepatuhan melalui RUPS sesuai ketentuan OJK, dan dalam penerapan fungsi kepatuhan telah mempunyai unit kerja Bidang Kepatuhan yang terdapat pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Tingkat kepatuhan Bank Jambi pada Semester I dan Semester II tahun 2020 dengan penilaian secara umum Baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemastian kepatuhan terhadap seluruh operasional Bank Jambi yang dikoordinasi Direktur Kepatuhan berikut jajaran di bawahnya yaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) berjalan dengan Cukup Baik.

4. SISTEM KEPATUHAN

Sistem Kepatuhan Bank Jambi dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank Jambi terhadap regulasi yang berlaku.

The Bank's non-compliance with laws and regulations can result in sanctions from the regulator so that it can reduce the Bank's reputation in the eyes of stakeholders. Therefore, the Bank always maintains to avoid all forms of sanctions, both written warnings, lowering of bank soundness level, freezing of certain business activities and dismissal of bank management.

On this basis, the Bank's compliance function is very important to support the management of the Compliance Risk faced in accordance with current and future business developments. All potential Compliance Risks that are expected to be faced can be mitigated properly, so as to minimize Compliance Risk for the Bank.

All levels of the Bank are required to understand all applicable laws and regulations for every daily operational function. Thus, compliance is the responsibility of every individual in the Bank and is not solely the responsibility of the Compliance and Risk Management Division. Compliance Culture is an important element of all activities carried out by the Bank, starting from the highest ranks, namely the Board of Directors to the lowest employees.

The Compliance and Risk Management Division coordinates the implementation of the compliance function and ensures that the Bank's staff understands that all regulations are well implemented through sound banking practices in accordance with applicable regulations.

3. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE

The implementation of the Bank's Compliance has been going quite well, where one of the Directors has been appointed as the Compliance Director through the GMS in accordance with OJK regulations, and in the implementation of the compliance function, a Compliance Division has been established in the Compliance and Risk Management Division.

The level of compliance of Bank Jambi in Semester I and Semester II of 2020 with a general assessment of Good. This shows that the compliance assurance activities for all operations of Bank Jambi, which are coordinated by the Compliance Director and his subordinates, namely the Compliance and Risk Management Division and the Special Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorist Financing (PPT) Special Work Units are running quite well.

4. COMPLIANCE SYSTEM

The Bank Jambi Compliance System is implemented through a series of processes and stages to ensure Bank Jambi's compliance with applicable regulations.

5. PROSEDUR KEPATUHAN

Dimaksudkan untuk membangun *awareness* segenap jajaran Bank Jambi terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan *(compliance procedure)* di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

6. PENGUJIAN KEPATUHAN

Pengujian Kepatuhan *(Compliance Review)* adalah memastikan setiap ketentuan, Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* Bank Jambi sejalan dengan regulasi yang berlaku baik Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku lainnya.

7. *MONITORING & SUPPORTING*

Pelaksanaan *Monitoring* dan *Supporting* Kepatuhan Bank Jambi selama tahun 2021, meliputi:

- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan periode bulanan yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Divisi SKAI.
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan periode semesteran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Divisi SKAI.
- Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan pemantauan terhadap komitmen-komitmen yang dibuat oleh Unit Kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) atau Otoritas Pengawas lainnya telah disampaikan sesuai dengan ketentuan.

VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan secara konsisten telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin ke OJK setiap 6 (enam) bulan sekali. Temuan-temuan pemeriksaaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya wajib ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas temuan Audit Internal oleh Direksi merupakan salah satu aspek yang dievaluasi secara berkala oleh Komite Audit Bank. Aktivitas yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal antara lain:

5. COMPLIANCE PROCEDURE

It is intended to build awareness of all levels of Bank Jambi on work procedures and compliance procedures at the Head Office and at Branch Offices.

6. COMPLIANCE TESTING

Compliance Review is to ensure that every provision, Policy and Standard Operating Procedure of Bank Jambi is in line with applicable regulations, both laws and other applicable regulations.

7. MONITORING & SUPPORTING

Implementation of Bank Jambi Compliance Monitoring and Supporting during 2021, including:

- *Preparation of monthly report on the implementation of the duties and responsibilities of the Compliance Director to be submitted to the President Director with a copy to the Board of Commissioners and the Internal Audit Division.*
- *Preparation of report on the implementation of the duties and responsibilities of the Compliance Director for the semester to be submitted to the Financial Services Authority (OJK) with a copy to the Board of Commissioners, President Director and the Internal Audit Division.*
- *The Compliance and Risk Management Division monitors the commitments made by the Work Unit to the Financial Services Authority (OJK) or other Supervisory Authorities that have been submitted in accordance with the provisions.*

VIII. IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL AUDIT FUNCTION

The implementation of the internal audit function is guided by the Standard for Implementation of the Bank's Internal Audit Function (SPFAIB) as regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 01/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks and has been consistently implemented by the Bank's Internal Audit Unit (IAU).

The report on the implementation and main points of the audit results, including the results of audits that are confidential, have been reported regularly to the OJK every 6 (six) months. The findings of the Internal Audit examination have been submitted to the President Director and the Board of Commissioners and copied to the Compliance Director, which must then be followed up. The follow-up to the findings of the Internal Audit by the Board of Directors is one aspect that is regularly evaluated by the Bank's Audit Committee. Activities carried out by the Internal Audit Division include:

a) Merealisasikan audit (rutin dan non rutin/khusus) terhadap seluruh unit kerja Cabang dan Kantor Pusat sesuai dengan target dalam Rencana Kerja Audit Tahunan.
b) SKAI juga melakukan audit khusus/investigatif apabila terdapat permasalahan yang dapat mengganggu jalannya operasional Bank, pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dan prinsip Tata Kelola di seluruh lingkungan Bank.
c) Menerapkan mekanisme *monitoring* atas seluruh temuan audit yang masih harus ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja *(auditee)*.
d) Berperan aktif sebagai mitra kerja *(counterpart)* auditor eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP),yaitu memfasilitasi komunikasi antara manajemen dengan pihak auditor eksternal dan memantau tindak lanjut/penyelesaian temuan audit ekstern.

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan. Signifikan dalam arti apabila dampak penyimpangannya bernilai lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Jumlah penyimpangan internal pada tahun sebelumnya dan tahun 2021 sebagai berikut:

a) Realizing audits (routine and non-routine/special) on all Branch and Head Office work units in accordance with the targets in the Annual Audit Work Plan.

b) IAU also conducts special/investigative audits if there are problems that can interfere with the Bank's operations, violations of the Company's Code of Ethics and the principles of Good Corporate Governance throughout the Bank.
c) Implement a monitoring mechanism for all audit findings that still have to be followed up by each work unit (auditee).
d) Take an active role as a counterpart to external auditors, namely the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), the Indonesian Financial Audit Agency (BPK RI), the Financial Transaction and Analysis Reporting Center (PPATK) and the Public Accountant Office (KAP), namely facilitating communication between management and external auditors and monitoring the follow-up/ settlement of external audit findings.

IX. INTERNAL FRAUD

Internal fraud is irregularities/cheating committed by management, permanent and non-permanent employees (honorary and outsourcing) related to work processes and operational activities that significantly affect financial condition. Significant in the sense that the impact of the deviation is worth more than Rp100,000,000 (one hundred million rupiah). The number of internal deviations in the previous year and 2021 is as follows:

Kasus/*Case*	Jumlah kasus/*Number of Case*					
	Pengurus/ *Management*		Pegawai Tetap/ *Permanent Employee*		Pegawai Tidak Tetap/*Non Permanent Employee*	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud/*Total Fraud*	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan/*Settled*	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Intern Bank/*Under Process of Completion Settlement at the Bank's Internal*	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya/*Efforts have not been made to resolve it*	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum/*Have been followed up through the legal process*	0	0	0	0	0	0

Untuk meningkatkan pencegahan *internal fraud*, Bank Jambi berupaya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Penerapan *punishment*
b. Penyisipan arahan pencegahan *fraud* dalam pelatihan pegawai antara lain melalui *training*;
c. Pengelolaan database tentang Rekam Jejak pejabat/ pegawai Bank Jambi berkenaan dengan pelanggaran ketidakpatuhan maupun *fraud*;
d. Telah menerbitkan Pedoman dan Kebijakan tentang Gratifikasi.

To improve the prevention of internal fraud, Bank Jambi seeks to take the following steps:
a. Imposing punishment
b. Providing direction for fraud prevention in employee training, among others through training;
c. Database management regarding the track records of Bank Jambi officials/employees regarding violations of non-compliance and fraud;
d. Has published Guidelines and Policies on Gratification.

X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagai pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank Jambi tahun 2021. Peran dari auditor eksternal adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan Bank benar-benar merepresentasikan posisi dan kinerja keuangan Bank yang sebenarnya. Auditor eksternal bertindak mewakili kepentingan *shareholders* untuk mengevaluasi kinerja keuangan Bank. Laporan Audit Eksternal juga berperan dalam rangka menjaga transparansi kondisi keuangan Bank.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank menyadari bahwa pengaruh globalisasi industri, perkembangan ekonomi dan perkembangan industri yang pesat mengakibatkan persaingan usaha yang semakin ketat. Kondisi ini mendorong Bank lebih proaktif mengembangkan produk dan layanan sehingga Bank harus meningkatkan penerapan manajemen risiko yang efisien dan efektif. Karena itu, Bank senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan dalam penerapan manajemen risiko secara berkesinambungan.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan bank diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:
- Penyediaan informasi yang cepat dan tepat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis yang mengandung risiko signifikan bagi bank;
- Penyeimbangan tingkat risiko yang dihadapi dengan tingkat pengembalian hasil yang diterima dari berbagai kegiatan bisnis bank;
- Pengalokasian modal bank secara efisien pada berbagai risiko yang dihadapi bank;
- Peningkatan nilai perusahaan bagi seluruh *stakeholder*.

1. ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Bank telah memiliki organisasi manajemen risiko yang secara jelas menetapkan batas wewenang dan tanggung jawab seluruh jenjang organisasi di dalam perusahaan. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi antara satuan kerja pengambil risiko *(risk taking unit)*, satuan kerja pendukung *(supporting unit)* dan satuan kerja manajemen risiko *(risk management unit)*. *Risk owner* atas pengelolaan risiko berada pada masing-masing unit kerja terkait.

Penerapan manajemen risiko memerlukan komitmen dan keterlibatan dari seluruh pihak dalam organisasi. Untuk mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif bank memiliki Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai arah kebijakan dan strategi manajemen risiko perusahaan. Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas antara lain perumusan dan penyusunan kebijakan,

X. IMPLEMENTATION OF THE EXTERNAL AUDIT FUNCTION

The Bank has appointed the Public Accounting Firm (KAP) of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali to carry out the audit of the Financial Statements of Bank Jambi in 2021. The role of the external auditor is to ensure that the financial statements of the Bank truly represent the position and financial performance of the Bank actually. External auditors act on behalf of shareholders to evaluate the Bank's financial performance. The External Audit Report also plays a role in maintaining the transparency of the Bank's financial condition.

XI. IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

The Bank realizes that the influence of industrial globalization, economic development and rapid industrial development has resulted in increasingly fierce business competition. This condition encourages the Bank to be more proactive in developing products and services so that the Bank must improve the implementation of efficient and effective risk management. Therefore, the Bank continues to make improvements and developments in the implementation of risk management on an ongoing basis.

The implementation of risk management by banks is expected to provide benefits in the form of:
- *Provision of fast and accurate information for management in making business decisions that contain significant risks for the bank;*
- *Balancing the level of risk faced with the rate of return received from various bank business activities;*
- *Efficient allocation of bank capital to various risks faced by banks;*
- *Increasing the value of the company for all stakeholders.*

1. RISK MANAGEMENT ORGANIZATION

The Bank has a risk management organization that clearly defines the limits of authority and responsibility for all levels of the organization within the company. The Bank applies the principle of segregation of functions between the risk taking unit, the supporting unit and the risk management unit. The risk owner for risk management is in each related work unit.

Implementation of risk management requires commitment and involvement from all parties in the organization. To encourage the implementation of effective risk management, the bank has a Risk Management Committee. The Risk Management Committee, which consists of the Board of Directors and executive officers, functions to provide recommendations to the President Director regarding the direction of the company's risk management policies and strategies. The Risk Management Committee has duties, among others, to formulate and

pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko, sehingga kegiatan usaha bank sejalan dengan visi, misi, dan rencana bisnis yang ditetapkan.

2. KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Seiring dengan perkembangan kompleksitas usaha, produk, dan jaringan bank, eksposur risiko usaha bank semakin meningkat. Agar pengelolaan risiko usaha tetap terkendali secara baik, bank memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi pada seluruh unit kerja bank, di antaranya:

a. Kebijakan dan Prosedur
   Bank senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko agar sesuai dengan situasi dan kondisi usaha, termasuk iklim perbankan di Indonesia.

b. Penetapan Limit
   Bank telah menetapkan limit-limit dari berbagai produk atas kewenangan dari pejabat sebagai salah satu upaya dalam mengelola risiko agar sesuai dengan kondisi permodalan yang dimiliki.

3. SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam mengelola risiko, untuk itu bank senantiasa meningkatkan kompetensi seluruh pengurus dan pegawai terkait kapasitas penerapan Manajemen Risiko. Untuk memenuhi hal tersebut serta memenuhi ketentuan OJK bank telah mengikutsertakan pengurus dan pegawai untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko. Jumlah Pengurus dan pegawai bank yang telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko sampai dengan tahun 2021 adalah:

formulate policies, guidelines, and strategies for implementing risk management, so that the bank's business activities are in line with the established vision, mission and business plan.

2. RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Along with the development of the complexity of the Bank's business, products, and network, the risk exposure of the bank's business is increasing. In order for business risk management to be well controlled, the Bank has a comprehensive and integrated risk management framework in all bank work units, including:

a. Policies and Procedures
   The Bank continues to update policies and procedures related to the implementation of risk management to suit business situations and conditions, including the banking climate in Indonesia.

b. Limit Setting
   The Bank has set limits for various products under the authority of officials as an effort to manage risk so that it is in accordance with the condition of capital owned.

3. RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Human Resources (HR) plays an important role in managing risk, therefore the Bank continues to improve the competence of all management and employees regarding the capacity to implement Risk Management. To fulfill this and comply with OJK regulations, the bank has included management and employees to take the risk management certification exam. The number of bank administrators and employees who have obtained risk management certification until 2021 is as follow

Level	Komisaris/*Board of Commissioners*	Direksi/*Board of Directors*	Pegawai/*Employee*
I	-	-	126
II	2	-	88
III	1	-	56
IV	-	-	10
V	-	4	7

4. PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bank menerapkan manajemen risiko pada seluruh aktivitas operasional agar eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko kepatuhan agar dapat terkendali secara baik.

4.1. Risiko Kredit

Bank harus mengelola risiko kredit secara baik dan berkesinambungan guna menjaga portofolio aktiva produktif tetap berkualitas baik dan memberikan keuntungan. Karena itu bank selalu menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas pembiayaan sehingga *Non Performing Loan* tidak melampaui limit sesuai ketentuan Otoritas.

4. RISK MANAGEMENT PROCESS

The Bank implements risk management in all operational activities so that credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, strategic risk, reputation risk, legal risk and compliance risk are well controlled.

4.1. Credit Risk

Banks must manage credit risk properly and continuously in order to maintain a good quality and profitable portfolio of productive assets. Therefore, banks always take care that there is no decline in the quality of financing so that Non-Performing Loans do not exceed the limit according to the provisions of the Authority.

1. Kebijakan, Prosedur
   Bank telah menerbitkan, mengkaji ulang dan mengkinikan kebijakan, prosedur, sesuai dengan kondisi ekonomi makro, perkembangan dunia usaha, dan perubahan regulasi pemerintah atau Otoritas.
2. Limit Portofolio Pembiayaan
   Dalam rangka mengoptimalkan tingkat pengembalian sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi *(risk adjusted return)*, bank menetapkan limit untuk portofolio pembiayaan.
3. Monitoring Kualitas Pembiayaan
   Bank memantau dan menjaga kualitas pembiayaan dengan melakukan pemantauan atas perkembangan kualitas portofolio pembiayaan berdasarkan segmen bisnis, sektor industri, dan skema pembiayaan;

4.2. Risiko Pasar

Dalam mengelola risiko pasar, Bank senantiasa memantau eksposur risiko secara rutin sehingga dapat meminimalisasi kerugian akibat pergerakan imbal hasil pasar dan perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan. Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui pengukuran *repricing gap* untuk mengukur *gap* antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan imbal hasil pasar pada setiap jangka waktu. Bank melakukan pengukuran *repricing gap* secara bulanan. Hal tersebut untuk mengetahui risiko yang dihadapi bank apabila terjadi perubahan tingkat imbal hasil pasar.

4.3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Bank mengelola risiko likuiditas melalui penetapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pedoman Pengelolaan Dana, strategi dan *contingency plan* likuiditas. Dalam mengelola risiko likuiditas, Bank melakukan:

- Penetapan limit internal Giro Wajib Minimum.
- Penempatan pada instrumen keuangan Bank Indonesia dan instrumen keuangan jangka pendek lain sebagai cadangan likuiditas Bank.
- Pengukuran kecukupan likuiditas melalui penyusunan proyeksi *cashflow* dan *liquidity gap* secara rutin sehingga bank dapat memanfaatkan likuiditas secara tepat dan efisien sesuai kebutuhan.
- Pemantauan rasio likuiditas antara lain dengan melakukan *monitoring* rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, rasio kewajiban antar bank, dan rasio kas terhadap dana pihak ketiga.

4.4. Risiko Operasional

Bank membutuhkan pengelolaan risiko operasional secara terpadu dan terintegrasi agar kegiatan operasional bank terpantau dan terkendali dengan baik. Proses internal, sistem, manusia, dan kejadian

1. *Policies, Procedures*
   The Bank has issued, reviewed and updated policies, procedures, in accordance with macroeconomic conditions, developments in the business world, and changes in government regulations or authorities.
2. *Limit of Financing Portfolio*
   In order to optimize the rate of return in accordance with the level of risk faced (risk adjusted return), the Bank sets a limit for the financing portfolio.
3. *Financing Quality Monitoring*
   The Bank monitors and maintains the quality of financing by monitoring the development of the quality of the financing portfolio based on business segments, industrial sectors, and financing schemes;

4.2. Market Risk

In managing market risk, the Bank continues to monitor risk exposure on a regular basis so as to minimize losses due to movements in market returns and unfavorable changes in exchange rates. The Bank manages market risk through repricing gap measurement to measure the gap between assets and liabilities that are sensitive to changes in market returns at each time period. The bank measures the repricing gap on a monthly basis. This is to find out the risks faced by banks in the event of changes in the market rate of return.

4.3. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk associated with the Bank's inability to meet all short-term maturing obligations. The Bank manages liquidity risk through the establishment of Risk Management Policy and Fund Management Guidelines, strategy and liquidity contingency plan. In managing liquidity risk, the Bank performs:

- *Determination of the internal limit for Statutory Reserves.*
- *Placements in Bank Indonesia financial instruments and other short-term financial instruments as Bank liquidity reserves.*
- *Measurement of liquidity adequacy through the preparation of cashflow projections and liquidity gaps on a regular basis so that banks can utilize liquidity appropriately and efficiently as needed.*
- *Monitoring the liquidity ratio, among others by monitoring the ratio of financing to third party funds, the ratio of interbank liabilities, and the ratio of cash to third party funds.*

4.4. Operational Risk

The Bank requires integrated and integrated operational risk management so that its operational activities are properly monitored and controlled. Internal processes, systems, people, and external events are factors that can

eksternal adalah faktor-faktor yang dapat memicu kejadian risiko operasional yang dapat merugikan bank. Dalam mengelola risiko operasional, antara lain Bank melakukan:

- Perhitungan kecukupan modal risiko operasional.
- Bank telah menghitung kecukupan modal risiko operasional dengan menggunakan metode *basic indicator approach* yang memasukkan unsur ATMR.
- Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Bank menerapkan manajemen risiko terhadap teknologi informasi (TI) yang memegang peranan penting sebagai *core banking business bank*. Manajemen Risiko TI antara lain diterapkan pada proses desain suatu pengembangan sistem sampai dengan tahap akhir. Melalui *User Acceptance Test* (UAT), bank dapat mengidentifikasi dan melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan, sebelum sistem digunakan oleh user.

4.5. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal yang akan mempengaruhi operasional Bank.

4.6. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

4.7. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan operasional bank atau persepsi negatif terhadap bank.

4.8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan *(Compliance Risk)* yaitu risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. PROFIL RISIKO

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan Kecukupan Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

trigger operational risk events that can harm the Bank. In managing operational risk, among others, the Bank performs:

- *Calculation of operational risk capital adequacy*
  The Bank has calculated the operational risk capital adequacy by using the basic indicator approach method which incorporates the RWA element.
- *Application of Information Technology Risk Management*
  The Bank applies risk management to information technology (IT) which plays an important role as the bank's core banking business. IT Risk Management, among others, is applied to the design process of a system development up to the final stage. Through the User Acceptance Test (UAT), the bank can identify and make improvements to the weaknesses found, before the system is used by the user.

4.5. Strategic Risk

Strategic risk is a risk which is caused, among others, by the establishment and implementation of inappropriate Bank strategies, inappropriate business decision making or the Bank's lack of responsiveness to external changes that will affect the Bank's operations.

4.6. Legal Risk

Legal risk is the risk caused by the weakness of the juridical aspect, which among others is due to lawsuits, the absence of supporting laws and regulations, or the weakness of the engagement, such as not fulfilling the conditions for the validity of the contract and imperfect binding of collateral.

4.7. Reputation Risk

Reputational risk is a risk caused, among others, by negative publications related to bank operations or negative perceptions of the bank.

4.8. Compliance Risk

Compliance Risk is the risk that arises as a result of the Bank not complying with and/or not implementing the applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

5. RISK PROFILE

The risk profile assessment aims to provide information to all stakeholders regarding the business risk conditions faced by the bank. The risk profile includes an assessment of inherent risk and the adequacy of the application of risk management (KPMR).

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, melalui Analisis kuantitatif atas parameter tertentu.

Bank melakukan penilaian KPMR secara *self assesment* melalui Analisis kualitatif terhadap empat aspek penilaian KPMR yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Hasil penilaian masing-masing jenis risiko, periode tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Inherent risk assessment is an assessment of the risks inherent in the Bank's business activities, through quantitative analysis of certain parameters.

The Bank conducts self-assessment KPMR assessment through qualitative analysis of four aspects of KPMR assessment which include active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors, adequacy of policies, procedures and limit setting, adequacy of the measurement identification process, risk monitoring and control as well as risk management information system, and control system. comprehensive internal.

The results of the assessment of each type of risk, for the period 2021, are as follows:

No	Jenis Risiko/*Risk Type*	Posisi Desember 2021/*Position as of December 2021*		Peringkat Komposit/ *Composite Rating*
		Peringkat Inhern Risk/ *Inherent Risk Rating*	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko/ *Risk Management Implementation Quality Rating*	
1	Risiko Kredit/*Credit Risk*	3 *(Moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
2	Risiko Pasar/*Market Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
3	Risiko Likuiditas/*Liquidity Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
4	Risiko Operasional/*Operational Risk*	2 *(low to moderate)*	3 *(fair)*	2
5	Risiko Hukum/*Legal Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
6	Risiko Stratejik/*Strategic Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
7	Risiko Kepatuhan/*Compliance Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
8	Risiko Reputasi/*Reputational Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
Peringkat Komposit/*Composite Rating*		2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2

XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA SKALA BESAR

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, Bank wajib melaporkannya dan meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris tentang penyediaan dana kepada pihak terkait tersebut. Penyediaan dana besar dan atau penyediaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana POJK, PBI, ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Laporan Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar posisi Desember 2021 sebagai berikut:

XII. PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES AND LARGE EXPOSURE

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi has written policies, systems and procedures for the provision of funds to related parties and the provision of large funds. Provision of funds to related parties must obtain approval from the Board of Commissioners, Banks are required to report it and seek approval from the Board of Commissioners regarding the provision of funds to related parties. The provision of large funds and or provision to other parties who have an interest in the Bank is in accordance with the applicable rules and regulations such as POJK, PBI, other laws and regulations.

Report on the provision of funds to related parties and the provision of large funds for the position of December 2021 as follows:

Divisi Kredit / ***Credit Division***

(dalam juta/*in million*)

No	Laporan/*Report*	Debitur/*Debtor*	*Nominal*
1	Penyediaan Dana Secara Individu/*Individual Funding*	79	23.020,11
	Terkait/*Related*	79	23.020,11
	Tidak Terkait/*Unrelated*	-	-
2	Penyediaan Dana Besar/*Large Exposure*	3	390.933
	Individu/*Individual*	-	-
	Kelompok/Grup/*Group*	3	390.933
3	Pengecualian Penyediaan Dana Besar/*Exceptions to Large Exposure*	-	-
	Individu/*Individual*	-	-
	Kelompok/Grup/*Group*	-	-
4	Pelanggaran/ Pelampauan BMPK Individu/*Violation/Exceeding of Individual LLL*	-	-
	Terkait/*Related*	-	-
	Tidak Terkait/*Unrelated*	-	-

Divisi *Treasury* dan Dana / ***Treasury and Fund Division***

(dalam juta/*in million*)

No	Laporan/*Report*	Debitur/*Debtor*	*Nominal*
1	Penyediaan Dana Secara Individu/*Individual Funding*	23	5.760.440
	Terkait/*Related*	-	-
	Tidak Terkait/*Unrelated*	23	5.760.440
2	Penyediaan Dana Besar/*Large Exposure*	3	1.110.000
	Individu/*Individual*	3	1.110.000
	Kelompok/Grup/*Group*	-	-
3	Pengecualian Penyediaan Dana Besar/*Exceptions to Large Exposure*	23	5.760.440
	Individu/*Individual*	23	5.760.440
	Kelompok/Grup/*Group*	-	-
4	Pelanggaran/ Pelampauan BMPK Individu/*Violation/Exceeding of Individual LLL*	-	-
	Terkait/*Related*	-	-
	Tidak Terkait/*Unrelated*	-	-

XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Dalam penerapan transparansi kondisi keuangan Bank, manajemen Bank Jambi membuat laporan keuangan publikasi triwulan. Laporan keuangan publikasi bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain mengungkap hasil penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil operasionalnya. Disamping itu manajemen Bank Jambi juga melaporkan kondisi Non Keuangan kepada *Stakeholders*.

Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati–hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

Transparansi informasi produk Bank yang meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank disampaikan

XIII. TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS, INTERNAL REPORTING GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORTS

In implementing the transparency of the Bank's financial condition, the management of Bank Jambi makes quarterly published financial reports. Monthly and complete financial reports are published in the Annual Report which, among other things, discloses the results of the collection and use of funds as well as the results of their operations. In addition, the management of Bank Jambi also reports non-financial conditions to stakeholders.

Transparency of financial condition and use of customer personal data which is commonly provided by customers to the Bank in conducting transactions referring to and complying with applicable banking rules and regulations, taking into account and applying the precautionary principle through the principle of knowing customers as well as managing operational risk, legal risk and reputation risk. in accordance with the regulations and guidelines that have been owned by the Bank.

Transparency of the Bank's product information which includes the characteristics, benefits, risks and costs inherent in the products and services offered by the Bank is conveyed

secara memadai kepada nasabah baik secara lisan, tertulis, penyampaian melalui *website* dan lain sebagainya dengan cara-cara yang etis dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian *financial* yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, telah memiliki pedoman penyelesaian pengaduan nasabah atau konsumen dan unit kerja yang mengelola pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak–hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan. Pengaduan nasabah atau konsumen dan penyelesaiannya setiap triwulan dilaporkan ke OJK. Pelaksanaan Tata Kelola dilaporkan secara transparan dan disampaikan kepada *shareholder* dan pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat diakses melalui *website* Bank Jambi.

XIV. RENCANA STRATEGIS BANK

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menyusun rencana bisnis bank *(business plan)* secara realistis, komprehensif, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian *(prudent)* serta mengantisipasi perubahan internal dan eksternal serta disesuaikan dengan visi dan misi Bank.
Adapun rencana strategis bank meliputi:

1. Rencana Jangka Panjang

a) Perkreditan

Pertumbuhan kredit Bank Jambi diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 17,27% dari *outstanding* Rp7.814.429 juta pada tahun 2019, diproyeksikan menjadi Rp9.111.397 juta pada tahun 2022 atau naik 8.00%, diproyeksikan menjadi Rp11.369.457 juta pada tahun 2024 atau naik 16.75%, dan diproyeksikan meningkat 17.59% menjadi sebesar Rp15.609.366 juta pada tahun 2025 dan diproyeksikan menjadi Rp18.489.439 juta atau naik 18.45% diakhir 2026.

b) Penghimpunan Dana

Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga diproyeksikan bertumbuh rata-rata 16.57% sampai dengan tahun 2026, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 6.23% menjadi Rp9.971.044 juta di akhir 2021, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 7.27% menjadi Rp10.695.640 juta pada tahun 2022, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 15.54% menjadi Rp12.358.105 juta pada tahun 2023, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 16.75% menjadi Rp14.428.324 juta pada tahun 2024, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 17.59% menjadi Rp16.966.702 juta pada 2025 dan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 18.45% menjadi Rp20.097.216 juta pada 2026.

adequately to customers either orally, in writing, through the website and so on in an ethical and not misleading manner.

In order to support customer service and the development of banking operations, to facilitate the emergence of expressions of customer dissatisfaction caused by potential financial losses that are suspected to be due to errors or negligence of the Bank, we have guidelines for resolving customer or consumer complaints and a work unit that manages customer complaints which is one of the a form of increased customer protection in order to guarantee customer rights in dealing with the Bank, and if a dispute occurs, it can be resolved through a banking mediation institution. Customer or consumer complaints and their settlements are reported quarterly to the OJK. The implementation of Good Corporate Governance is reported transparently and submitted to share holders and other parties in accordance with applicable regulations and can be accessed through Bank Jambi website.

XIV. BANK STRATEGIC PLAN

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi prepares a realistic, comprehensive, measurable business plan for the bank and pays attention to the prudent principle and anticipates internal and external changes and is adjusted to the Bank's vision and mission.
The bank's strategic plan includes:

1. Long Term Plan

a) Credit

Bank Jambi's credit growth is projected to increase by an average of 17,27% from the outstanding Rp7.814.429 million in 2019, projected to be Rp9.111.397 million in 2022 or an increase of 8.00%, is projected to be Rp11.369.457 million in 2024 or an increase of 16.75%, and is projected increase of 17.59% to be Rp15.609.366 million in 2025 and is projected to be Rp18.489.439 juta or up 18.45% at the end of 2026.

b) Fund Collection

Total Third Party Funds growth is projected to grow by an average of 16.57% until 2026, is projected to increase by 6.23% to Rp9,971,044 million at the end of 2021, is projected to increase by 7.27% to Rp10,695,640 million in 2022, is projected to increase by 15.54% to Rp12,358,105 million in 2023, projected to increase by 16.75% to Rp14,428,324 million in 2024, projected to increase by 17.59% to Rp16,966,702 million in 2025 and projected to increase by 18.45% to Rp20. 097,216 million in 2026.

2. Rencana Jangka Menengah

Adapun arah dan kebijakan Bank Jambi jangka menengah sebagai berikut:

- UMKM
- Penyempurnaan nomenklatur
- Penguatan Ketahanan Kelembagaan
- Pemenuhan modal inti 3T
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- Peningkatan Portofolio Kredit UMKM
- Peningkatan Penghimpunan Dana Murah
- Digitalisasi Bank Jambi
- CMS, Kartu Debit, dan Kartu Kredit
- Ekstensifikasi bisnis melalui Bank Devisa
- *Branding* Produk Bank Jambi (selain aktifikasi perbankan)
- Peningkatan Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah
- Perluasan *Channel* Bisnis
- Pemenuhan Modal
- Penguatan kualitas kompetensi sumber daya manusia
- *Cloud App – Big Data*

3. Rencana Jangka Pendek

Arah dan kebijakan Bank Jambi jangka pendek lebih menitikberatkan pada:

- UMKM
- *Supply Chain*
- Perubahan nomenklatur
- Peningkatan DPK murah
- Optimalisasi pelayanan berbasis digital
- *Zero Fraud*
- Optimalisasi bisnis *treasury*
- CMS *Goverment*
- Penambahan Jaringan Bisnis

XV. *SHARES OPTION*

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan akhir Desember 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak melakukan *shares option.*

XVI. *BUY BACK SHARES* DAN *BUY BACK* OBLIGASI

Buy back shares dan *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak melakukan *buy back shares* maupun *buy back* obligasi.

2. Medium Term Plan

The direction and policies of Bank Jambi in the medium term are as follows:

- *MSME*
- *Nomenclature refinement*
- *Strengthening Institutional Resilience*
- *Fulfillment of core capital of IDR 3 Trillion*
- *Improvement of Human Resources Competence*
- *Increase of MSME Loan Portfolio*
- *Increase of Third Party Fund Collection*
- *Digitalization of Bank Jambi*
- *CMS, Debit Card and Credit Card*
- *Extensification of business through Foreign Exchange Bank*
- *Bank Jambi Product Branding (other than banking activation)*
- *Increasing Contribution to Regional Development*
- *Expansion of Business Channel*
- *Capital Fulfillment*
- *Strengthening the quality of human resource competencies*
- *Cloud App – Big Data*

3. Short Term Plan

Bank Jambi's short-term directions and policies are more focused on:

- *MSME*
- *Supply Chain*
- *Change of nomenclature*
- *Increase of TPF*
- *Optimization of digital-based services*
- *Zero Fraud*
- *Optimization of treasury business*
- *CMS Government*
- *Added Business Network*

XV. *SHARES OPTION*

Shares option is an option for members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers to buy shares which is carried out through the offering of share options in the context of providing compensation which has been decided in the General Meeting of Shareholders. Until the end of December 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi did not exercise a share option.

XVI. *BUY BACK SHARES AND BUY BACK BONDS*

Buy back shares and buy back bonds are efforts to reduce the number of shares or bonds that have been issued by buying back the shares or bonds, the payment procedure is carried out in accordance with applicable regulations. During 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Jambi did not buy back shares or buy back bonds.

XVII. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank Jambi selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Permasalahan hukum yang terjadi di Bank Jambi untuk periode Januari – Desember 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

XVII. LEGAL CASES

Legal cases include civil and criminal law issues faced by Bank Jambi during the reporting year and have been submitted through a legal process. Legal cases that occurred at Bank Jambi for the period January – December 2021 can be found in the following table:

Permasalahan Hukum/*Legal Case*	Jumlah kasus/*Number of Case*	
	Perdata/*Ciivil*	Pidana/*Criminal*
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/*Has received a decision that has permanent legal binding*	0	0
Dalam Proses Penyelesaian/*In Process of Settlement*	1	0
Total	1	0

XVIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank Jambi tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank Jambi terhadap masyarakat. Penjelasan secara lebih rinci diuraikan pada bagian Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2021 ini.

XVIII. PROVISION OF FUNDS FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

Bank Jambi is not involved in political activities and does not make donations for political purposes. On the other hand, concern for social and environmental issues is an important part of the duties and responsibilities of Bank Jambi to the community. A more detailed explanation is described in the Corporate Social Responsibility Report section of this 2021 Annual Report.

XIX. HASIL *SELF ASSESSMENT* TATA KELOLA

Berdasarkan analisis terhadap masing-masing kriteria/ indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:
  Jumlah, komposisi, persyaratan dan kriteria semua Anggota Direksi telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam:
  1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
  2. SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
  3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
  4. SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.

XIX. GOVERNANCE SELF ASSESSMENT RESULTS

Based on the analysis of each of the assessment criteria/ indicators mentioned above, it is concluded that:

1. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

A. Governance Structure

- *Positive factors in the Bank's governance structure aspects are:*
  The number, composition, requirements and criteria for all members of the Board of Directors have met the qualifications required in accordance with the prevailing rules and regulations as stated in:
  1. *POJK No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;*
  2. *SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks*
  3. *POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions;*
  4. *SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 concerning fit and proper test for prospective Controlling Shareholders, candidates for members of the Board of Directors and candidates for members of the Board of Commissioners of the Bank.*

5. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah:
  1. Direksi telah mengangkat Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
  3. Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sudah secara independen dan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola dan Anggaran Dasar Bank serta perundang–undangan yang berlaku.
  4. Setiap temuan dan rekomendasi Audit intern, ekstern, pengawasan OJK dan/atau otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
  5. Direksi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang strategis selalu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat melalui mekanisme rapat Direksi.
  6. Direksi tidak menerima remunerasi dan fasilitas lainnya selain yang ditetapkan dalam RUPS.
  7. Direksi tidak pernah memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lainnya.
  8. Direksi tidak pernah diintervensi oleh pemilik Bank.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah:
  1. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang strategis bidang kepegawaian kepada pegawai serta telah mengkomunikasikan arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi.
  2. Setiap rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.
  3. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank dan perusahaan lainnya dan tidak memiliki hubungan keluarga/keuangan sesama Direksi, Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Pengendali.

5. *POJK No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance structure **(None)**.*

B. *Governance Process*

- *Positive factors in the Bank's governance process aspects are:*
  1. *The Board of Directors has appointed the Committee in accordance with applicable regulations.*
  2. *The Board of Directors has never given general power of attorney to other parties.*
  3. *The Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities independently and in accordance with the provisions of the Bank's Governance and Articles of Association as well as the applicable laws and regulations.*
  4. *Every finding and recommendation of internal audit, external audit, OJK supervision and/or other authorities has been followed up by the Board of Directors.*
  5. *The Board of Directors in determining strategic policies and decisions is always carried out by deliberation and consensus through the mechanism of the Board of Directors meeting.*
  6. *The Board of Directors does not receive remuneration and other facilities other than those stipulated in the GMS.*
  7. *The Board of Directors has never used the bank for personal, family or other party interests.*
  8. *The Board of Directors has never been intervened by the owner of the Bank.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance process **(None)**.*

C. *Governance Outcome*

- *Positive factors in the Bank's governance outcome aspects are:*
  1. *The Board of Directors has disclosed the Bank's strategic policies in the field of personnel to employees and has communicated the Bank's business direction in order to achieve the mission and vision.*
  2. *Each meeting of the Board of Directors is stated in the minutes of the meeting and has been properly documented.*
  3. *All members of the Board of Directors do not own shares in the Bank and other companies and have no family/financial relationship with the Directors, Commissioners or Controlling Shareholders.*

4. Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima.
5. Direksi telah mengungkapkan opsi saham yang dimiliki.
6. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi atau pelaksanaan tugas Direksi.
7. Dengan komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang ada, kegiatan operasional Bank tidak pernah terganggu dan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank **(Tidak ada)**.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:
  Jumlah, komposisi, persyaratan dan kriteria semua Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam:
  1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
  2. SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
  3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
  4. SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Masa jabatan Komisaris Independen periode 2018 – 2021 berakhir pada 23 Oktober 2021 sehingga terdapat kekosongan jabatan pada posisi tersebut, namun saat ini sedang dalam proses *recruitment*).

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah:
  1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat dan rekomendasi baik lisan maupun secara tertulis kepada Direksi.

4. *The Board of Directors has disclosed the remuneration and other facilities received.*
5. *The Board of Directors has disclosed its share options.*
6. *There is no owner intervention on the composition or execution of the duties of the Board of Directors.*
7. *With the composition and/or implementation of the existing duties of the Board of Directors, the Bank's operational activities are never disrupted and can be carried out properly and smoothly.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance outcome **(None)**.*

2. *DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS*

A. *Governance Structure*

- *Positive factors in the Bank's governance structure aspects are:*
  The number, composition, requirements and criteria of all members of the Board of Commissioners have been meet the required qualifications in accordance with the applicable provisions and regulations listed in:
  1. *POJK No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;*
  2. *SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks*
  3. *POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions;*
  4. *SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 concerning fit and proper test for prospective Controlling Shareholders, candidates for members of the Board of Directors and candidates for members of the Board of Commissioners of the Bank.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance structure. (The term of office of the Independent Commissioner for the 2018-2021 period ends on October 23, 2021 so that there is a vacancy in this position, but is currently in the recruitment process.).*

B. *Governance Process*

- *Positive factors in the Bank's governance process aspects are:*
  1. *The Board of Commissioners has carried out supervision on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors on a regular basis or at any time, as well as providing advice and recommendations both verbally and in writing to the Board of Directors.*

2. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/ atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
4. Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
6. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal di Kantor.
8. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara berkala yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
9. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Dewan Komisaris tidak pernah mendapat intervensi apapun dari Pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :
  1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
  2. Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan sekurangnya : (a) Tidak adanya kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih

2. *In order to carry out its supervisory duties, the Board of Commissioners has directed, monitored, and evaluated the implementation of the Bank's strategic policies.*
3. *The Board of Commissioners is not involved in making decisions on the Bank's operational activities, except in terms of providing funds to related parties and other matters stipulated in the Bank's Articles of Association and/or applicable laws and regulations in order to carry out the supervisory function.*
4. *The Board of Commissioners assisted by the Audit Committee has ensured that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from SKAI, External Auditors, results of supervision by the Financial Services Authority and/or results of supervision by other authorities.*
5. *The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently.*
6. *The Board of Commissioners has established the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, as well as the Remuneration and Nomination Committee and the Board of Commissioners has ensured that the Committees formed have carried out their duties effectively.*
7. *The Board of Commissioners has provided sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally in the Office.*
8. *The Board of Commissioners has held regular meetings attended by all members of the Board of Commissioners.*
9. *Decision making in the Board of Commissioners meeting is based on deliberation and consensus.*
10. *The Board of Commissioners has never received any intervention from the Owner on the implementation of the duties of the Board of Commissioners.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance process **(None)**.*

C. *Governance Outcome*

- *Positive factors in the Bank's governance outcome aspects are:*
  1. *The results of the meeting of the Board of Commissioners have been stated in the minutes of the meeting and well documented, and have also been distributed to all members of the Board of Commissioners as a recommendation and/or direction to be implemented by the GMS and/or the Board of Directors.*
  2. *In the report on the implementation of Governance, members of the Board of Commissioners have disclosed at least: (a) There is no share ownership that reaches 5% (five percent) or more in the Bank*

pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; (b) Tidak adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; (c) Penerimaan remunerasi dan fasilitas lain; dan (d) opsi saham *(share option)* yang dimiliki Dewan Komisaris

3. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan *(stakeholders)* Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.

4. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank,

- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank **(Tidak ada)**.

3. KELENGKAPAN *COMMITTE*

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :
  - **Komite Audit**
  1. Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum.
  2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
  3. Anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
  4. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

  - **Komite Pemantau Risiko**
  1. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang ekonomi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko

concerned as well as in other banks and companies domiciled at home and abroad ; (b) There is no financial relationship and family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank; (c) Receipt of remuneration and other facilities; and (d) share options owned by the Board of Commissioners

3. Increasing the knowledge, skills and abilities of the members of the Board of Commissioners in supervising the Bank, which is shown, among others, by improving the performance of the Bank, solving problems faced by the Bank, and achieving results in accordance with the expectations of stakeholders. Increasing the culture of continuous learning in order to increase knowledge about banking and the latest developments related to finance/other fields that support the implementation of the duties and responsibilities of members of the Board of Commissioners.

4. There is no owner intervention on the composition and/or execution of the duties of the Board of Commissioners, which may cause the Bank's operational activities to be disrupted and/or provide unreasonable profits to the owners, which then results in reduced Bank profits and/or losses to the Bank.

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance outcome **(None)**.*

3. *COMPLETENESS OF THE COMMITTEE*

A. Governance Structure

- *Positive factors in the Bank's governance structure aspects are:*
  - ***Komite Audit***
  1. *Members of the Audit Committee consist of an Independent Commissioner, an Independent Party with expertise in finance or accounting and an Independent Party with expertise in the field of law.*
  2. *The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.*
  3. *Members of the Audit Committee are Independent Commissioners and Independent Parties.*
  4. *Members of the Audit Committee display good integrity, character and morals.*

  - ***Risk Monitoring Committee***
  1. *Members of the Risk Monitoring Committee consist of an Independent Commissioner, an Independent Party who is an expert in the field of economics and an Independent Party who is an expert in the field of risk management*

2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

➢ **Komite Remunerasi & Nominasi**

1. Anggota Komite Remunerasi & Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Utama, Komisaris Independen dan seorang Pejabat Sumber Daya Manusia.
2. Pejabat SDM memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan Bank*.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
4. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank.
6. Rapat Komite telah dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah Anggota.
7. Komposisi semua Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak ada intervensi pemilik.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :
  1. Komite Audit
     a. Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
     b. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
  2. Komite Pemantau Risiko
     a. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
     b. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

2. The Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner.
3. Members of the Risk Monitoring Committee are Independent Commissioners and Independent Parties
4. Members of the Risk Monitoring Committee display good integrity, character and morals.

➢ ***Remuneration & Nomination Committee***

1. Members of the Remuneration & Nomination Committee consist of a President Commissioner, an Independent Commissioner and a Human Resources Officer.
2. HR officers have knowledge and know the provisions of the remuneration and/or nomination system as well as the Bank's succession plan.
3. The Remuneration and Nomination Committee is chaired by an Independent Commissioner.
4. All Independent Parties who are members of the Committee do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which may affect their ability to act independently.
5. There is no Independent Party from the Board of Directors or Executive Officers of the Bank.
6. Committee meetings have been attended by more than 51% (fifty one percent) of the total members.
7. The composition of all Committees has complied with the provisions and there is no intervention from the owner.

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance structure **(None)**.*

B. Governance Process

- *Positive factors in the Bank's governance process aspects are:*
  1. Audit Committee
     a. The Audit Committee has monitored and evaluated the planning and implementation of the audit as well as monitoring the follow-up to the audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.
     b. The Audit Committee has provided recommendations for the appointment of Public Accounting Firm and Public Accountant in accordance with applicable regulations to the GMS through the Board of Commissioners.
  2. Risk Monitoring Committee
     a. The Risk Monitoring Committee has evaluated the policy and implementation of risk management.
     b. The Risk Monitoring Committee has monitored and evaluated the implementation of the tasks of the risk management committee and the Risk Management Work Unit (SKMR).

3. Komite Remunerasi dan Nominasi
   a. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi dan menyampaikan kebijakan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS serta remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai kepada Direksi.
   b. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, selama ini belum ada *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas.
6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
7. Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah:
  Setiap hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank **(Tidak ada)**.

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:
  Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai Penanganan Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

3. *Remuneration and Nomination Committee*
   a. *The Remuneration and Nomination Committee has evaluated and submitted the remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to the GMS and the remuneration of Executive Officers and Employees to the Board of Directors.*
   b. *The Remuneration and Nomination Committee has developed a system, as well as procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
4. *Committee meetings are held according to the needs of the Bank.*
5. *Meeting resolutions are made based on deliberation for consensus or a majority vote, so far there has been no clear dissenting opinion.*
6. *The results of the Committee meeting produce recommendations that can be utilized optimally by the Board of Commissioners.*
7. *The owner has never intervened in the implementation of the committee's duties related to recommendations for providing inappropriate remuneration to parties related to the owner, recommendations for candidates for members of the Board of Directors or candidates for members of the Board of Commissioners that are not in accordance with the established selection and/or replacement procedures.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance process **(None)**.*

C. *Governance Outcome*

- *Positive factors in the Bank's governance outcome aspects are :*
  The results of each Committee meeting have been stated in the minutes of the meeting and have been properly documented, each Committee has carried out its functions in accordance with the applicable provisions in providing recommendations to the Board of Commissioners.

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance outcome **(None)**.*

4. *HANDLING CONFLICTS OF INTEREST*

A. *Governance Structure*

- *Positive factors in the Bank's governance structure aspects are:*
  The Bank has policies, systems and procedures regarding the Handling of Conflicts of Interest that binds every management and employee.

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance structure **(None)**.*

B. *Governance Process*

- Faktor- faktor positif aspek *governance process,* Bank adalah:
  Pada periode laporan tidak pernah terjadi benturan kepentingan dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif proses *governance outcome,* Bank adalah:
  Pemilik atau Pihak Terkait atau Pihak Lain tidak pernah mengintervensi kegiatan operasional bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank **(Tidak ada)**.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
  1. Satuan kerja kepatuhan Independen terhadap satuan kerja operasional.
  2. Pengangkatan, pemberhentian/pengunduran diri Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan otoritas perbankan dan peraturan yang berlaku.
  3. Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Kepatuhan cukup berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah:
  1. Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
  2. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara bulanan kepada Direktur Utama; persemester kepada OJK, yang masing-masing laporannya ditembuskan ke Dewan Komisaris dan Divisi SKAI;
  3. Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;

B. Governance Process

- *Positive factors in the Bank's governance process aspects are:*
  During the reporting period there was no conflict of interest occurred among members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Executive Officers that could harm or reduce the Bank's profits.

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance process **(None)**.*

C. Governance Outcome

- *Faktor-faktor positif proses governance outcome, Bank adalah :*
  Pemilik atau Pihak Terkait atau Pihak Lain tidak pernah mengintervensi kegiatan operasional bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance outcome **(None)**.*

5. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE FUNCTION

A. Governance Structure

- *Positive factors in the Bank's governance struucture aspects are:*
  1. *The compliance work unit is independent from the operational work unit.*
  2. *The appointment, dismissal/resignation of the Director in charge of the compliance function is in accordance with the provisions of the banking authorities and applicable regulations.*
  3. *Human Resources in the Compliance Unit have sufficient quality to complete tasks effectively.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance structure **(None)**.*

B. Governance Process

- *Positive factors in the Bank's governance process aspects are:*
  1. *The Compliance Director has ensured the Bank's compliance with the provisions of the Financial Services Authority and the laws and regulations;*
  2. *The Director of Compliance has submitted a report on the implementation of duties and responsibilities on a monthly basis to the President Director; semester to OJK, each of which reports are forwarded to the Board of Commissioners and the SKAI Division;*
  3. *The Compliance Director has formulated a strategy to encourage the creation of a Bank compliance culture;*

4. Direktur Kepatuhan telah mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
5. Direktur Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
6. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.

7. Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif dan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur keseluruh jenjang organisasi terkait;

8. Direksi bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan;
9. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan;

10. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan-undangan.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome*, Bank adalah :
  1. Laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Utama dan Tembusan Dewan Komisaris.

  2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Outcome*, Bank adalah:
  Masih terdapat ketidakpatuhan dalam pelaksanaan penerapan Standar Operasional Prosedur dan peraturan lainnya pada Kantor Cabang tertentu sehingga terdapat sanksi terhadap kesalahan pengiriman data laporan,

4. The Director of Compliance has proposed a compliance policy or compliance principle to be determined by the Board of Directors;
5. The Compliance Director has ensured that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and the laws and regulations;
6. The appointment of the Director in charge of the compliance function is in accordance with the provisions.
7. The Board of Directors has approved the Bank's compliance policy in the form of a formal document regarding an effective compliance function and is responsible for communicating all policies, guidelines, systems, and procedures to all relevant organizational levels;

8. The Board of Directors is responsible for creating an effective and permanent compliance function as part of the Bank's overall compliance policy;

9. The Compliance Unit has reviewed and/or recommended updating and improving the policies, provisions, and systems and procedures of the Bank to comply with the provisions of the OJK and the laws and regulations;

10. The Compliance Unit has made efforts to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the Bank's business activities are in accordance with the provisions of the OJK and the laws and regulations.

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance process **(None)**.*

C. *Governance Outcome*

- *Positive factors in the Bank's governance outcome aspects are:*
  1. *The report on the main duties of the Director in charge of the compliance function has been submitted to the Financial Services Authority, the President Director and a copy of the Board of Commissioners.*
  2. *The scope of the report on the implementation of the duties of the Director in charge of the compliance function is in accordance with the provisions of the Financial Services Authority.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance outcome (None):*
  There are still non-compliance in the implementation of the application of Standard Operating Procedures and other regulations at certain Branch Offices so that there are sanctions for errors in sending data reports,

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah:
  1. Struktur organisasi SKAI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern bank.
  3. Kelembagaan SKAI Independen terhadap satuan kerja operasional.
  4. SDM yang ada pada Divisi SKAI cukup berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *Governance process*, Bank adalah:
  1. Hasil temuan audit intern telah ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.
  2. Rencana pemeriksaan SKAI, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai dan dilakukan pemeriksaan dengan System RBA *(Risk Based Audit)*.
  3. SKAI telah melaksanakan fungsi audit secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantuan hasil audit.
  4. SKAI telah melaksanakan tugas yang meliputi kecukupan sistem, efektivitas sistem dan efektivitas kinerja.
  5. SKAI telah melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah:
  1. Temuan hasil pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh *auditee* sesuai komitmen yang ada.
  2. SKAI telah bertindak objektif dalam melakukan audit.
  3. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome*, Bank adalah :
  Masih terdapat beberapa temuan yang berulang pada Kantor Cabang tertentu

6. *IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL AUDIT FUNCTION*

A. *Governance Structure*

- *Positive factors in the Bank's governance process structure are:*
  1. *The organizational structure of the IAU is in accordance with applicable regulations.*
  2. *The Bank already have standards for implementing the bank's internal audit function.*
  3. *Institutionally, IAU is Independent from operational work units.*
  4. *Human resources in the IAU Division have sufficient quality to complete their duties effectively.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance structure* ***(None)***.

B. *Governance Process*

- *Positive factors in the Bank's governance process aspects are:*
  1. *The findings of the internal audit have been followed up by the Board of Directors in accordance with the direction of the Board of Commissioners.*
  2. *The IAU examination plan, the adequacy of the scope of the examination and the depth of the examination have been adequate and the examination is carried out with the RBA System (Risk Based Audit).*
  3. *The IAU has carried out an independent audit function with an adequate scope of duties and in accordance with the plan, implementation and monitoring of audit results.*
  4. *The IAU has carried out its duties which include system adequacy, system effectiveness and performance effectiveness.*
  5. *The IAU has reported the results of the examination in accordance with applicable regulations.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance process* ***(None)***.

C. *Governance Outcome*

- *Positive factors in the Bank's governance outcomes aspects are:*
  1. *The findings of the IAU examination have been followed up by the auditee according to the commitment.*
  2. *The IAU has acted objectively in conducting the audit.*
  3. *The audit program has covered all work units whose implementation takes into account the level of risk in each work unit.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance outcome:*
  There are still some recurring findings in several Branch Offices.

7. PENERAPAN AUDIT EKSTERN

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah:
  Penugasan audit pada akuntan publik dan KAP telah memenuhi aspek–aspek yang ada antara lain dengan melihat kapasitas KAP yang ditunjuk dan kerjasama yang diadakan telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diantaranya mencakup ruang lingkup audit.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. *Governance Process*

- Faktor–faktor positif aspek *governance process*, Bank adalah:
  1. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdaftar di OJK.
  2. Penunjukkan akuntan atas rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
  3. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan otoritas perbankan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit telah dapat melaksanakan audit secara independen dan profesional.
  4. Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah:
  1. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Auditor telah bertindak objektif dalam melakukan audit.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank **(Tidak ada)**.

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah:

7. IMPLEMENTATION OF EXTERNAL AUDIT

A. Governance Structure

- *Positive factors in the Bank's governance structure aspects are:*
  The audit assignment to public accountants and KAP has fulfilled the existing aspects, among others, considering the capacity of the appointed KAP and the cooperation that has been established has been stated in the cooperation agreement which includes the scope of the audit.

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance structure **(None)**.*

B. Governance Process

- *Positive factors in the Bank's governance process aspects are:*
  1. *The appointment of a Public Accountant and KAP is in accordance with the applicable laws and regulations and is registered with the OJK.*
  2. *The appointment of an accountant is based on the recommendation of the Audit Committee through the Board of Commissioners.*
  3. *The Public Accountant has communicated with the banking authorities regarding the condition of the Bank being audited in the context of preparation and implementation of the audit and has been able to carry out the audit independently and professionally.*
  4. *Public accountants have carried out independent and professional audits.*

- *Negative factors in the Bank's governance process aspects **(None)**.*

C. Governance Outcome

- *Positive factors aspects of the Bank's governance outcome are:*
  1. *The scope of audit results is in accordance with applicable regulations.*
  2. *The auditor has acted objectively in conducting the audit.*

- *Negative factors in the Bank's governance outcome aspect **(None)**.*

8. IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT INCLUDING INTERNAL CONTROL SYSTEM

A. Governance Structure

- *Positive factors in the aspect of the Bank's governance structure are:*

1. Bank telah memiliki struktur organisasi SKAI, SKMR, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung penerapan risiko dan pengendalian intern.
2. Bank telah memiki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, misalnya adanya batasan wewenang dalam hal pemutusan pemberian kredit.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif *governance process*, Bank adalah:
  Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas yang diatur dalam kebijakan umum perusahaan, anggaran dasar bank dan peraturan yang terkait lainnya tentang Kebijakan, Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko.

- Faktor-faktor negatif *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah :
  1. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
  2. Komisaris dan Direksi cukup mampu melakukan pengawasan secara aktif.
  3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan.

- Faktor-faktor negatif *Governance Outcome* Bank **(Tidak ada)**.

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT *(RELATED PARTY)* DAN PENYEDIAAN DANA BESAR *(LARGE EXPOSURE)*

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:
  Telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang tertuang secara umum dalam buku pedoman perusahaan bidang perkreditan dan kebijakan direksi sedangkan dalam hal *monitoring* dan penyelesaian masalah mengikuti kebijakan, sistem dan prosedur perkreditan yang berlaku umum pada Bank Jambi.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

1. *The Bank has an organizational structure of IAU, SKMR, Risk Management Committee and Compliance Unit to support the implementation of risk and internal control.*
2. *The Bank has adequate policies, procedures and risk limits, for example, there are limits of authority in terms of terminating credit.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance structure **(None)**.*

B. *Governance Process*

- *Positive factors of the Bank's governance process are:*
  The Board of Commissioners and the Board of Directors have clear duties and responsibilities which are regulated in general company policies, bank articles of association and other related regulations regarding Risk Management Policy, Strategy and Framework.

- *Negative factors of the Bank's governance process **(None)**.*

C. *Governance Outcome*

- *The positive factors in the aspect of the Bank's governance outcome are:*
  1. *The Bank has implemented effective risk management in accordance with the objectives, policies, size and complexity of the business as well as the Bank's capabilities.*
  2. *Commissioners and Directors are quite capable of carrying out active supervision.*
  3. *The Bank does not carry out business activities that exceed the capital capacity.*

- *Negative factors of Bank Governance Outcome **(None)**.*

9. PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES AND PROVISION OF LARGE FUNDS (LARGE EXPOSURE)

A. *Governance Structure*

- *Positive factors in the aspect of the Bank's governance structure are:*
  The Bank has adequate written policies, systems and procedures for the provision of funds to related parties and the provision of large funds which are generally stated in the credit company manual and directors' policies, while in terms of monitoring and problem solving follow credit policies, systems and procedures. generally applicable at Bank Jambi.

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance structure **(None)**.*

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif *governance process,* Bank adalah:
  1. Bank telah mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur penyediaan dana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  3. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome*, Bank adalah:
  1. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan tentang BMPK dan telah memperhatikan kemampuan permodalan.
  2. Laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Outcome* Bank **(Tidak ada)**.

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah:
  1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
  2. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Pelaporan internal telah tersedia secara lengkap, akurat dan tepat waktu.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *governance process*, Bank adalah:
  1. Laporan keuangan dan non keuangan telah dilaporkan ke OJK atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.

B. *Governance Process*

- *Positive factors of governance process of the Bank is:*
  1. *The Bank has evaluated the policies, systems and procedures for the provision of funds in accordance with the prevailing laws and regulations.*
  2. *The process of providing funds to related parties and providing large amounts of funds is in accordance with the precautionary principle.*
  3. *Decision making in the implementation of the provision of funds is decided by the management independently without intervention from related parties or other parties.*

- *Negative factors in the Bank's Governance Process aspect **(None)**.*

C. *Governance Outcome*

- *The positive factors in the Bank's Governance Outcome aspects are:*
  1. *The provision of funds by the Bank to related parties and or the provision of large funds has complied with the provisions concerning the LLL and has taken into account capital capacity.*
  2. *The LLL and Provision of Large Funds reports have been submitted periodically and in a timely manner to OJK.*

- *Negative factors in the Bank's Governance Outcome aspect **(None)**.*

10. TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS, GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORTS AND INTERNAL REPORTS

A. Governance Structure

- *Positive factors in the aspect of the Bank's governance structure are:*
  1. *The Bank has policies and procedures regarding the transparency of financial and non-financial conditions.*
  2. *The Bank has prepared a report on the implementation of Good Corporate Governance at the end of each financial year with coverage in accordance with applicable regulations.*
  3. *Internal reporting is available in a complete, accurate and timely manner.*

- *Negative factors in the aspect of the Bank's governance structure **(None)**.*

B. Governance Process

- *Positive factors in the Bank's governance process aspects are:*
  1. *Financial and non-financial reports have been submitted to OJK or stakeholders in accordance with applicable regulations.*

2. Bank telah mentransparansi informasi produk bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dalam hal penggunaan data pribadi nasabah belum pernah dilakukan.
3. Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa pada nasabah melalui pemasangan papan pengumuman dimasing–masing Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor kas mengenai keberadaan unit penyelesaian pengaduan nasabah.
4. Isi dan cakupan laporan Tata Kelola telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Laporan Tata Kelola yang disampaikan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor–faktor positif *governance outcome*, Bank adalah :
  1. Transparansi laporan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi laporan publikasi, triwulanan dan laporan tahunan.
  2. Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan telah mencakup hal-hal yang telah diatur dalam SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
  3. Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan dalam hal penggunaan data nasabah bank belum pernah melakukannya.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank **(Tidak ada)**.

11. RENCANA STRATEGIS BANK

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif *governance structure,* Bank adalah :
  1. Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis
  2. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Faktor negatif *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif *governance process*, Bank adalah:
  1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
  2. Rencana Bisnis Bank telah disetujui Dewan Komisaris.

2. The Bank has transparently disclosed bank product information in accordance with applicable regulations, but in terms of the use of customer personal data, this has never been done.
3. The Bank has made transparent the procedures for customer complaints and dispute resolution with customers through the installation of bulletin boards in each Branch Office, Sub-Branch Office and cash office regarding the existence of a customer complaint settlement unit.
4. The content and scope of the Governance report has been prepared in accordance with applicable regulations.
5. The Governance Report submitted is in accordance with the actual situation.

- *Negative factors in the Bank's governance process aspects **(None)**.*

C. *Governance Outcome*

- *The positive factors of the Bank's governance outcome are:*
  1. *Report transparency complies with applicable regulations which include publication reports, quarterly and annual reports.*
  2. *The report on the implementation of Good Corporate Governance has reflected the actual condition of the Bank and has included matters that have been regulated in SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
  3. *The bank has implemented information transparency regarding products and in terms of using customer data, the bank has never done so.*
- *Negative factors in the Bank's governance outcome aspect **(None)**.*

11. *BANK STRATEGIC PLAN*

A. *Governance Structure*

- *Positive factors of governance structure of the Bank is:*
  1. *The Bank's strategic plan has been prepared in the form of a corporate plan and a business plan*
  2. *In the preparation and submission of the RBB, it has been guided by the applicable provisions.*
- *Negative factors of the Bank's governance structure **(None)**.*

B. *Governance Process*

- *Positive factors of governance process at the Bank is:*
  1. *The Bank has prepared a Bank Business Plan with due observance of the precautionary principle.*
  2. *The Bank's Business Plan has been approved by the Board of Commissioners.*

3. Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang Unit Organisasi.
4. Dalam penyusunan dan pelaporan RBB telah berpedoman pada ketentuan OJK.
5. Pemilik telah menunjukkan keseriusan dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis bank, antara lain dengan memberikan dukungan modal terhadap program *Bank Regional Champion* (BRC).

- Faktor-faktor negatif *governance process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif *governance outcome*, Bank adalah :
  1. Rencana korporasi dan rencana bisnis telah disusun oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
  2. Rencana korporasi dan RBB berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi.
  3. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan bank yang berkesinambungan.
  4. Pertumbuhan bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi *stakeholder*.
  5. Rencana Bisnis Bank telah disusun atas dasar kajian komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT) analisis.

- Faktor-faktor negatif *governance outcome* Bank **(Tidak ada)**.

3. *The Board of Directors has communicated the RBB to the Shareholders and all levels of the Organizational Unit.*
4. *In the preparation and reporting of the RBB, it has been guided by the provisions of the OJK.*
5. *The owner has shown seriousness and has taken the necessary steps to support the bank's strategic plan, among others by providing capital support to the Bank Regional Champion (BRC) program.*

- *Negative factors of the Bank's governance process* ***(None)***.

C. *Governance Outcome*

- *The positive factors of the Bank's governance outcome are:*
  1. *The corporate plan and business plan have been prepared by the Board of Directors and have been approved by the Board of Commissioners.*
  2. *The corporate plan and RBB along with their realization have been communicated by the Board of Directors to the controlling shareholders and all levels of the organization.*
  3. *The Bank's Business Plan has described the bank's sustainable growth.*
  4. *The Bank's growth has provided economic and non-economic benefits for stakeholders.*
  5. *The Bank's Business Plan has been prepared on the basis of a comprehensive study by taking into account the business opportunities and strengths of the bank and identifying weaknesses and threats (SWOT) analysis.*

- *Negative factors of Bank's governance outcome* ***(None)***.

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA/
SCORES OF SELF ASSESSMENT OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION

	PERINGKAT/ ***RANK***	**DEFINISI PERINGKAT/***RANK DEFINITION*
Individual/*Individual*	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank./*The Bank's management has implemented generally good Corporate Governance, which is reflected in the adequate compliance with the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Governance, in general these weaknesses are not significant and can be resolved by normal actions by the Bank's management.*
Konsolidasi/ *Consolidated*	-	

ANALISIS/ *ANALYSIS*

Hasil penilaian *self assesment* penerapan Tata Kelola berada pada peringkat 2 (Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank).

Berdasarkan Analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian hasil *self assessment* dapat disampaikan sebagai berikut:

1. *Governance Structure*

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai pada Pejabat dan karyawan/karyawati. Komposisi Direksi saat ini berjumlah 4 (Empat) orang, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Syariah, Direktur Operasional dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Komposisi Dewan Komisaris berjumlah 3 (Tiga) orang yang terdiri dari 1 (Satu) orang Komisaris Utama dan 2 (Dua) orang Komisaris Independen. Masa jabatan Komisaris Independen periode 2018–2021 berakhir pada tanggal 23 Oktober 2021, sehingga terdapat kekosongan jabatan untuk posisi tersebut namun tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dapat dirangkap oleh Komisaris Utama. Saat ini untuk pemenuhan posisi Komisaris Independen sedang dalam proses *recruitment* oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Untuk beberapa jabatan dibawah Pemimpin Divisi masih terdapat beberapa kekosongan, akan tetapi untuk tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masih dapat dilaksanakan oleh pejabat-pejabat lain yang ditunjuk pada masing-masing Unit Kerja terkait.

Terhadap infrastruktur kebijakan, sistem dan prosedur yang telah dimiliki Bank sudah cukup memadai, namun Bank terus melakukan penyempurnaan beberapa standar operasional dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Hal ini dalam rangka menunjang struktur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari setiap Unit Kerja yang ada.

2. *Governance Process*

Dengan struktur dan infrastruktur yang dimiliki proses pelaksanaan Tata Kelola Bank dapat terlaksana dengan efektif, walaupun terdapat beberapa kendala risiko operasional namun tidak signifikan dan masih dapat melaksanakan proses Tata Kelola Bank yang baik.

3. *Governance Outcome*

Secara keseluruhan Tata Kelola pada sebagian besar penilaian sangat baik, efektif dan berkualitas. Hal ini didukung oleh struktur dan infrastruktur yang cukup memadai sehingga kinerja Bank sangat baik dan perkembangan/pertumbuhan Bank selalu meningkat dari tahun ke tahun.

*The results of the self-assessment of the implementation of Governance are ranked 2 (Reflecting that the Bank's Management has implemented **Good** Governance in general. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the implementation of the principles of Governance, then generally speaking, In general, these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Bank Management).*

Based on the analysis of all the evaluation criteria/indicators, the results of the self-assessment can be submitted as follows:

1. *Governance Structure*

The Bank has an adequate organizational structure, including the Board of Commissioners, the Board of Directors to officials and employees. The current composition of the Board of Directors consists of 4 (four) people, consisting of the President Director, Marketing and Sharia Director, Operations Director and Director in Charge of the Compliance Function. The Board of Commissioners consists of 3 (three) people consisting of 1 (One) President Commissioner and 2 (Two) Independent Commissioners. The term of office of the Independent Commissioner for the 2018-2021 period ends on October 23, 2021, so there is a vacancy for this position but the main duties, functions and authorities can be concurrently held by the President Commissioner. Currently, the Independent Commissioner is in the process of being recruited by the Remuneration and Nomination Committee.

For several positions under the Head of Division, there are still some vacancies, but the main tasks, functions and authorities can still be carried out by other officials appointed in each relevant Work Unit.

The Bank's policy infrastructure, systems and procedures are adequate, however, the Bank continues to improve several operational standards and procedures that are adapted to current conditions. This is in order to support the structure of the implementation of the main tasks and functions of each existing Work Unit.

2. *Governance Process*

With the existing structure and infrastructure, the Bank's Governance implementation process can be carried out effectively, although there are some operational risk constraints but they are not significant and can still implement the Good Bank Governance process.

3. *Governance Outcome*

Overall, the Governance was rated as very good, effective and of high quality. This is supported by an adequate structure and infrastructure so that the Bank's performance is very good and the development/growth of the Bank always increases from year to year.

XX. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU dan Undang-Undang No.9 Tahun 2013 tentang PP TPPT serta berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku pada tanggal 30 September 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, maka dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme maka dapat disampaikan peranan aktif Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, yaitu :

Peranan Aktif Direksi

1. Memastikan Bank Jambi memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT.

2. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.
3. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
4. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.
5. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT.
6. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/ atau Pendanaan Terorisme, dan
7. Memastikan bahwa seluruh karyawan, khususnya karyawan dari satuan kerja terkait dan karyawan baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

Peranan Aktif Dewan Komisaris

1. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi,

XX. IMPLEMENTATION OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) PROGRAM AND COUNTER-TERRORISM FINANCING (CTF)AT PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

Pursuant to Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering and Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of the Crime of Terrorism Funding, as well as the enactment of Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 on the implementation of the Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program in the Financial Services Sector which took effect on September 30, 2019 and the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 32/SEOJK.03/2017 dated June 22, 2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Funding Programs Terrorism in the Banking Sector, in the context of optimizing and effectively implementing the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Program obligations, then it can be explained here the active roles of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, namely:

Active Role of the Board of Directors

1. *Ensuring that Bank Jambi has put in place the policies and procedures for the implementation of the AML and CTF programs.*
2. *Proposing written policies and procedures of a strategic nature regarding the implementation of the AML and CTF programs to the Board of Commissioners.*
3. *Ensuring the implementation of the AML and CTF programs is carried out in accordance with the written policies and procedures that have been established.*
4. *Establishing a special work unit and/or appoint officials in charge of the implementation of the AML and CTF programs.*
5. *Supervise the compliance of the work unit in implementing the AML and CTF programs.*
6. *Ensuring that written policies and procedures regarding the implementation of the AML and CTF programs are in line with changes and developments in products, services, and technology in the financial services sector as well as in accordance with developments in the modes of Money Laundering and/or Terrorism Financing, and*
7. *Ensuring that all employees, especially employees from related work units and new employees, have attended training related to the implementation of AML and CTF programs on a regular basis.*

Active Role of the Board of Commissioners

1. *Approving the policies and procedures for the implementation of the AML and CFT programs as proposed by the Board of Directors,*

2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT, dan
3. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Program Kerja Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT pada Tahun 2021

1. Memastikan penerapan Program APU dan PPT telah dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT pada Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Prioritas, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang merupakan perpanjangan tangan dari Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT Kantor Pusat sesuai Surat Keputusan Direksi No.023 Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

2. Melaporkan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yakni Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report*) melalui Aplikasi goAML.

3. Melaporkan kewajiban pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) secara triwulan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Web. GRIPS PPATK.

4. Melakukan Penilaian Pemahaman secara *self assessment* mengenai Penerapan Program APU dan PPT dalam bentuk kuesioner kepada seluruh unit kerja Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Prioritas, dan Kantor Kas yang berguna untuk meningkatkan *awareness* terhadap Program APU dan PPT.

5. Melakukan Pengelompokkan seluruh data Nasabah Bank melalui pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*/ RBA), yang terbagi menjadi :
   a. Nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*) termasuk Penyelenggara Negara (*Politically Exposed Person*/ PEP);
   b. Nasabah berisiko menengah (medium risk customer); dan
   c. Nasabah berisiko rendah (*low risk customer*).
   dan dilakukan pengkinian/ pemantauan sesuai dengan risiko yang melekat pada Nasabah tersebut.

6. Tersedianya Aplikasi APUPPT yang dapat mengakomodir:
   a. Pemantauan transaksi nasabah yang menyimpang dari profil nasabah dan transaksi Nasabah Penyelenggara Negara (*Politically Exposed Person*),

2. *Supervising the implementation of the Board of Directors' responsibilities for the implementation of the AML and CTF programs, and*
3. *Ensuring that there are discussions related to Money Laundering and/or Terrorism Financing in meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

AML and CTF Special Work Unit (UKK) Work Program in 2021

1. *Ensuring that the implementation of the AML and CTF Program has been carried out by the AML and CTF Special Work Units (UKK) at the Main Branch Offices, Branch Offices, Priority Jakarta Sub-Branch Offices, Sub-Branch Offices, and Cash Offices which are extensions of the Special Work Unit (UKK) AML and CTF Head Office in accordance with the Decree of the Board of Directors No.023 of 2021 dated February 15, 2021 regarding the Appointment of the Special Anti-Money Laundering (AML) and Prevention of Terrorism Financing (CTF) Unit of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.*

2. *Complying to the reporting obligation to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), namely the Suspicious Transaction Report and the Cash Transaction Report through the goAML Application.*

3. *Complying to the reporting obligation to the Integrated Service User Information System (SIPESAT) on a quarterly basis to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) via the Web. GRIPS PPATK.*

4. *Conducting self-assessment of Understanding of the Implementation of the AML and CFT Program in the form of a questionnaire to all work units of the Main Branch Offices/Sub-Branch Offices, Jakarta Priority Sub-Branch Offices, and Cash Offices which are useful for increasing awareness of the APU and PPT Programs.*

5. *Grouping all Bank Customer data through Risk Based Approach (RBA), which is divided into:*
   a. *High risk customers, including State Administrators (Politically Exposed Person/PEP);*
   b. *Medium risk customer; and*
   c. *Low risk customers.*
   and updating/monitoring the risks inherent in the aforementioned Customers.

6. *Availability of APUPPT Application that can accommodate:*
   a. *The monitoring of customer transactions that deviate from customer profiles and transactions of State Administrators (Politically Exposed Persons),*

b. Pemantauan dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dilakukan secara *online* oleh Unit Kerja Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Prioritas, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas kepada UKK APU dan PPT Kantor Pusat,
c. Modul Profil nasabah yang terdiri dari *database* nasabah berdasarkan pendekatan risiko (*Risk Based Approach*), laporan *suspect* CIF ganda, dan *screening* data SIPESAT.
d. *Database* Penyelenggara Negara *(Politically Exposed Person),* Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Proliferasi WMD).

7. Melakukan *monitoring* terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang diterbitkan dan disampaikan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dengan menyampaikan laporan pemblokiran secara serta merta/laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ditembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi SIGAP.

8. Penyempurnaan atas implementasi pengembangan Aplikasi goAML PPATK untuk penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).

9. Melakukan *monitoring* dan pemenuhan laporan terhadap Daftar Terduga Teroris pada Aplikasi SIPENDAR PPATK.

10. Terlaksananya *review* Pedoman PT BPD Jambi mengenai :
    a. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
    b. Pemantauan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
    c. Pedoman *Risk Assessment* Nasabah dengan Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Approach*) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
    d. Penunjukan Unit Kerja Khusus (UKK) Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
    e. Pemantauan Transaksi Nasabah, *Walk In Customer* (WIC), dan *Conductor*.
    f. Penginputan Kode Transaksi pada Menu Transaksi Teller di Aplikasi *Corebanking System* T24.
    g. Pemantauan terhadap Pemberian CIF guna Mengantisipasi Terjadinya CIF Ganda/ Lebih dari 1 (Satu).

b. The monitoring and submission of Cash Financial Transaction Reports (LTKT) carried out online by the Main Branch Office Work Units, Branch Offices, Priority Jakarta Sub-Branch Offices, Sub-Branch Offices, Cash Offices to UKK AML and CTF Head Office,
c. The customer profile module which consists of a customer database based on Risk Based Approach, double CIF suspect reports, and SIPESAT data screening.
d. Database of State Administrators (Politically Exposed Persons), List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD Proliferation).

7. Monitoring the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) submitted by the Financial Services Authority and the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) issued and submitted by the Financial Transactions and Analysis Reporting Center (PPATK) by submitting a blocking report as well as immediately/zero reports to the Indonesian National Police and copied to the Financial Services Authority through the SIGAP Application.

8. Completion of the implementation of the PPATK goAML Application development for the submission of Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) and Cash Financial Transaction Reports (LTKT).

9. Monitoring and complying reports on the List of Suspected Terrorists in the PPATK SIPENDAR Application.

10. Reviewing PT BPD Jambi Guidelines regarding:
    a. Implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Prevention of Terrorism Financing (CTF) Programs at PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
    b. Monitoring List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
    c. Guidelines for Customer Risk Assessment Using the Risk Based Approach of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
    d. Appointment of the Special Task Force (UKK) for Anti-Money Laundering (AML) and Prevention of Terrorism Financing (CTF) at PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
    e. Monitoring of Customer Transactions, Walk In Customer (WIC), and Conductors.
    f. Inputting the Transaction Code on the Teller Transaction Menu in the Corebanking System T24 Application.
    g. Monitoring the Provision of CIF to Anticipate the Occurrence of Double/More than 1 (One) CIF.

11. Tersedianya aplikasi *E-Learning* Program APU dan PPT yang dapat diakses oleh seluruh karyawan/karyawati Bank Jambi.

12. Terlaksananya Penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terorrist Financing* (FIR on ML/TF) yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada Tahun 2021.

13. Melakukan pelatihan/sosialisasi program APU-PPT secara berkala dan berkesinambungan melalui *inhouse training* baik secara tatap muka dan/atau non tatap muka (*video conference*) dengan seluruh karyawan/ti yang berhadapan langsung dengan Nasabah dan karyawan baru.

14. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak ekstern antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

15. Melakukan pemenuhan permintaan data keuangan Nasabah dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang terkait tata cara pembukaan data rahasia perbankan antara lain dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dll.

16. Bank Jambi terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program APU-PPT khususnya dengan menyampaikan kewajiban Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama Tahun 2021, sebagai berikut:

11. *Availability of AML and CTF Program E-Learning applications that can be accessed by all employees of Bank Jambi.*

12. *Implementation of the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) conducted by the Financial Transaction and Analysis Reporting Center (PPATK) in 2021.*

13. *Conduct training/socialization of the AML and CTF program on a regular and continuous basis through in-house training both face-to-face and/or non-face-to-face (video conference) with all employees/ti who deal directly with customers and new employees.*

14. *Participate in training held by external parties including the Financial Services Authority (OJK), Center for Financial Transaction Reports and Analysis (PPATK), and Communication Forum for Banking Compliance Director (FKDKP).*

15. *Fulfilling requests for customer financial data from the competent authorities in accordance with provisions related to procedures for opening confidential banking data, including from the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), the Corruption Eradication Commission (KPK), etc.*

16. *Bank Jambi continues to be committed to supporting the implementation of the AML-CTF program in particular by submitting the mandatory Cash Financial Transaction Reports (LTKT) and Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) during 2021, as follows:*

JENIS LAPORAN / *TYPE OF REPORT*	JUMLAH LAPORAN / *NUMBER OF REPORT*
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)/ *Cash Transaction Report (CTR)*	750 Laporan / *Reports*
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/ *Suspicious Transaction Report (STR)*	40 Laporan / *Reports*

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI UNIT USAHA SYARIAH - TAHUN 2021

Report of GCG Implementation PT BPD Jambi in Sharia Business Units 2021

A. PENDAHULUAN

Prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah, yang selanjutnya disebut *GCG* berlandaskan tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif,
3. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat,
4. Profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah, dan
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*, berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *Good Corporate Governance* UUS Bank Jambi yang kuat memerlukan teknik dan strategi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya harus ada Kode Etik Bankir, kejelasan tanggung jawab dan wewenang secara berjenjang dari Karyawan hingga Direksi dan Komisaris, sistem pengendalian dan pengawasan yang kuat, dengan demikian diharapkan seluruh Keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pedoman Pelaksanaan GCG di UUS Bank Jambi mengacu kepada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010. Untuk itu dalam pelaksanaan penerapan GCG pada UUS Bank Jambi sejalan dengan terbitnya Ketentuan tentang Penyusunan GCG pada Industri Keuangan Syariah, maka Penerapan GCG pada UUS Bank Jambi dilakukan antara lain dengan Penetapan Visi dan Misi serta langkah-langkah strategis antara lain dengan:

A. INTRODUCTION

The basic principles for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Islamic banking industry are based on Bank governance that applies the following principles:

1. *Transparency, namely openness in presenting material and relevant information and transparency in the decision-making process,*
2. *Accountability, namely the clarity of the function and implementation of the Bank's organizational accountability so that its management can run effectively,*
3. *Responsibility, namely the conformity of the management of the Bank with applicable laws and regulations and the principles of sound banking management,*
4. *Professional, namely having competence, able to act objectively, and free from influence/pressure from any party (independent) and has a high commitment to developing Islamic banks, and*
5. *Fairness, namely equality in fulfilling the rights of stakeholders, based on agreements and applicable regulations.*

The implementation of good corporate governance at the Sharia Business Unit (UUS) of Bank Jambi requires the right techniques and strategies, and hence the Bank needs to have Code of Ethics, clarity of accountability and authorities in stages from Employees to Directors and Commissioners, a robust control and supervision system, and so all decisions taken are based on high moral values and in compliance with Sharia Principles, based on the Fatwa of the National Sharia Council.

Guidelines for the Implementation of GCG at UUS of Bank Jambi refers to Bank Indonesia regulation Number 11/33/PBI/2009 concerning the implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010. For this reason, in the implementation of GCG implementation at the UUS of Bank Jambi in line with the issuance of the Provisions concerning the Preparation of GCG in the Islamic Finance Industry, the GCG Implementation at the Bank Jambi UUS is carried out, among others by establishing the Vision and Mission as well as the following steps: strategic steps include:

VISI

Menjadi Bank Umum Syariah terkemuka di wilayah Provinsi Jambi yang tumbuh secara sehat dan handal melayani Mitra Usaha.

MISI

- Mengembangkan pasar perbankan syariah di wilayah Provinsi Jambi.
- Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Memperkerjakan tenaga profesional yang disiplin, jujur, ramah dan penuh tanggung jawab.
- Mewujudkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan syariah didukung dengan teknologi yang memadai.
- Menerapkan prinsip kehati-hatian *(prundential banking)* dan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance).*
- Mencapai pertumbuhan usaha dan keuntungan yang memadai, berkesinambungan, dan memberikan nilai tambah kepada *stakeholder.*
- Melaksanakan pelayanan perjalanan haji kepada masyarakat di wilayah Provinsi Jambi.
- Melaksanakan manajemen zakat, infaq, shodaqoh yang tepat sasaran sebagai perwujudan kepedulian sosial.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

- Mengembangkan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) dan memperkuat permodalan secara berkesinambungan untuk menuju peningkatan UUS menjadi Bank Umum Syariah.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi setiap bulan terhadap target yang telah/belum tercapai pada Kantor Cabang Syariah.
- Mengoptimalkan Layanan Syariah melalui pemasaran DPK dan memberikan target sebagai ukuran kinerja masing-masing Layanan Syariah.
- Unifikasi UUS dengan Bank Syariah lain.
- Mengembangkan bisnis Bank Umum Syariah secara Profesional, sehat dan berkesinambungan.

B. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS Bank Jambi meliputi :

- Penetapan Direktur UUS telah dicatat dalam administrasi pengawasan Kantor OJK Provinsi Jambi berdasarkan surat OJK Provinsi Jambi tanggal 11 Januari 2021 S-22/KO.0701/2021 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 2020 telah dilaporkan ke Kantor OJK Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.KN tanggal 17 Desember 2020.

- Penunjukan Direktur UUS Bank Jambi telah melalui Penilaian dan Kepatutan dan wawancara Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan :

VISION

To become a leading Sharia Commercial Bank in Jambi Province that grows healthily and reliably serving Business Partners.

MISSION

- *Developing the Islamic banking market in Jambi Province.*
- *Contribute to regional economic growth, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*
- *Employ professional staff who are disciplined, honest, friendly and full of responsibility.*
- *Realizing a commitment to Islamic banking operational performance standards supported by adequate technology.*
- *Implementing prundential banking and good corporate governance principles.*
- *Achieve adequate, sustainable business growth and profit and provide added value to stakeholders.*
- *Carry out hajj travel services to communities in Jambi Province.*
- *Implementing zakat, infaq, shodaqoh management that is right on target as a manifestation of social care.*

STRATEGIC MEASURES

- *Developing the Sharia Business Unit (UUS) business and strengthen capital on an ongoing basis to move UUS into a Sharia Commercial Bank.*
- *Conduct monthly monitoring and evaluation of the targets that have been/not achieved at the Sharia Branch Offices.*
- *Optimizing Sharia Services through marketing of TPF and setting the targets to measure the performance of each Sharia Services.*
- *Unification of UUS with other Sharia Banks.*
- *Developing Sharia Commercial Bank business in a professional, healthy and sustainable manner.*

B. *IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

1. Implementation of duties and responsibilities of the Director of UUS Bank Jambi includes:

- *The appointment of the UUS Director has been recorded in the supervisory administration of the OJK Office of Jambi Province, based on the Jambi Province OJK letter dated January 11, 2021 S-22/KO.0701/2021 which is effective since December 17, 2020 and has been reported to the Jambi Province OJK Office as contained in the notarial deed of Firdaus Abu Bakar, SH, M.KN, dated December 17, 2020.*
- *The appointment of the Director of UUS Bank Jambi has passed a Fit and Proper Test and an interview with the Financial Services Authority in accordance with:*

- Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR- 342/ PB.12/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal: Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT BPD Jambi).
- Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-151/D.03/2020 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Khairul Suhairi selaku calon Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
  i. Latar Belakang Direktur UUS:
  Nama : H. Khairul Suhairi.
  Tempat Tanggal Lahir : Pauh, 12 Agustus 1970
  Pendidikan Umum : Sarjana Ekonomi.

  Pelatihan /*Inhouse Training:*
  - Telah mendapatkan sertifikat Pendidikan Dasar Pengetahuan Syariah (PDPS).
  - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
  - *Leadership* dan *Character Building* bagi Pejabat Eksekutif.
  - Sosialisasi Edukasi Keuangan Sektor Pasar Modal.
  - *Focus Group Discusion* (FGD) Pencapaian Rasio Kredit UMKM.
  - Bedah Buku *Execution Matter*.
  - Pelatihan Analisis Pembiayaan Syariah.
  - Sosialisasi OJK dan IJK bersama Anggota Komisi XI DPR RI Program Pilar 1 Strategi Nasional Keuangan Inklusi.
  - Strategi Pencegahan Produk Keuangan Bermasalah dan Kejahatan Perbankan UU No.21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - Peran Bank dalam Mencegah dan Menangani Kejahatan yang menggunakan Produk Bank.
  - Diklat Pemimpin Cabang Angkatan ke-175.
  - Dugaaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan Investasi.
  - Sosialisasi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
  - *Two Days Workshop* PSAK 71.
  - Manajemen Umum Dana Pensiun.

  ii. Dalam menjalankan tugasnya untuk mensupervisi kegiatan bisnis UUS Bank Jambi, Direktur UUS dibantu oleh Pejabat UUS yang berada pada unit kerja langsung di bawah Direktur UUS yaitu Kepala Divisi UUS beserta jajarannya.

- Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS
  - ✓ Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
  - ✓ Direktur UUS wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
  - ✓ Direktur UUS melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada

- *Financial Services Authority Letter No. SR- 342/ PB.12/2020 dated October 22, 2020 regarding: Submission of a Copy of Decision on Nomination of Marketing and Sharia Director of PT Jambi Regional Development Bank (PT BPD Jambi).*

- *A copy of the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number Kep-151 / D.03 / 2020 concerning the Results of the Fit and Proper Test for Mr. Khairul Suhairi as a candidate for Marketing and Sharia Director of PT Jambi Regional Development Bank.*
  i. Background of the Director of UUS:
  Name : H. Khairul Suhairi.
  Date and Place of Birth : Pauh, August 12, 1970
  Background Education : Bachelor of Economics.
  Training / Inhouse Training:
  - *Certificate of Sharia Knowledge Basic Education (PDPS).*
  - *Level 5 Risk Management Certification.*
  - *Leadership and Character Building for Executive Officers.*
  - *Socialization of Capital Market Sector Financial Education.*
  - *Focus Group Discussion (FGD) on Achievement of MSME Credit Ratio.*
  - *Execution Matter Book Review.*
  - *Sharia Financing Analysis Training.*
  - *Socialization of OJK and IJK with members of Commission XI DPR RI Pillar 1 Program of the National Strategy for Financial Inclusion.*
  - *Strategy for the Prevention of Problem Financial Products and Banking Crimes Law No. 21 concerning the Financial Services Authority.*
  - *Role of Banks in Preventing and Handling Crimes using Bank Products.*
  - *175th Bacth of Training for Branch Office Head.*
  - *Alleged Crime in the Financial Services and Investment Sector.*
  - *Socialization of the Deposit Insurance Corporation (LPS).*
  - *Two Days Workshop PSAK 71.*
  - *General Management of Pension Funds.*

  ii. In carrying out his duties to supervise the business activities of UUS Bank Jambi, the UUS Director is assisted by UUS Officials who are in the work unit directly under the UUS Director, namely the Head of the UUS Division and his staff.

- *Duties and responsibilities of the Director of UUS*
  - ✓ *Director of UUS is fully responsible for the implementation of UUS management based on prudential principles and sharia principles.*
  - ✓ *The Director of UUS must follow up on the results of the supervision of the Sharia Supervisory Board.*
  - ✓ *The Director of UUS implements transparency of financial and non-financial conditions to*

Stakeholders yang menyangkut tentang kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Unit Usaha Syariah yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan secara triwulan lewat media massa.

2. Pelaksanaan tugas dan tangggung jawab Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jambi Meliputi:

a) Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jambi, telah mendapat persetujuan RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Jambi berdasarkan Akta Notaris Firdaus Abu Bakar S.H., M.Kn. Nomor 45 Tanggal 19 November 2020, atas persetujuan dan penetapan:
   - Nyonya LUCKY ENGGRANI FITRI, lahir di Jambi seribu Sembilan ratus delapan puluh dua (27-07-1982), Warga Negara Indonesia, KTP Nomor 1571086707820121 sebagai Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.
     Komposisi Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jambi berjumlah 1 (satu) orang :
     Anggota : Dr. Lucky Enggrani Fitri, S.E., M.Si.
     Yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b) Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jambi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

c) Latar belakang Dewan Pengawas Syariah:
   Anggota : DR. Lucky Enggrani Fitri, S.E., M.Si. adalah Dosen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Telah mempunyai memiliki Pelatihan bidang Perbankan Syariah dan memiliki kompetensi dan integritas yang layak untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Jambi Unit Usaha Syariah.

d) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
   i. Memberikan saran dan nasihat kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah.
   ii. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
   iii. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.
   iv. Meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
   v. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
   vi. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Divisi UUS dan Cabang dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
   vii. DPS telah melaksanakan dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.

stakeholders concerning the management, ownership, business development of the Sharia Business Unit which is reported to the Financial Services Authority and published on a quarterly basis through the mass media.

2. Implementation of Duties And Responsibilities of the Sharia Supervisory Board Of UUS Bank Jambi Includes:

a) Sharia Supervisory Board of UUS Bank Jambi has received approval from the GMS of PT Jambi Regional Development Bank based on the Notary Deed of Firdaus Abu Bakar S.H., M.Kn. Number 45 dated November 19, 2020, with the approval and stipulation of:
   - *Mrs. LUCKY ENGGRANI FITRI, born in Jambi July 27, 1982, Indonesian citizen, ID No. 1571086707820121 as the Sharia Supervisory Board of the Sharia Business Unit of PT Jambi Regional Development Bank for the period 2020 to 2023.*

   The composition of the Sharia Supervisory Board of UUS Bank Jambi is 1 (one) person:
   Member : Dr. Lucky Enggrani Fitri, S.E., M.Si.
   In charge of providing advice and suggestions to the UUS Director and supervising UUS activities in accordance with sharia principles.

b) The chairman and members of the Sharia Supervisory Board of UUS Bank Jambi do not hold concurrent positions as members of other Sharia Supervisory Boards at other Sharia Financial Institutions.

c) Sharia Supervisory Board Background:
Member : DR. Lucky Enggarani Fitri, S.E., M.Si. is a Lecturer in Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, Jambi University. Has had training in the field of Sharia Banking and has proper competence and integrity to carry out his duties as the Sharia Supervisory Board of Bank Jambi Sharia Business Unit.

d) Sharia Supervisory Board Duties and Responsibilities
   i. Provide suggestion and advice to the Director of UUS and supervise UUS activities to ensure they are in accordance with sharia principles.
   ii. Assess and ensure compliance with sharia principles on operational guidelines and products issued by UUS.
   iii. Supervise the process of developing new UUS products to comply with the fatwa of the MUI National Sharia Council.
   iv. Request fatwa from the DSN of MUI for new UUS for products which has no fatwa yet.
   v. Conduct periodic reviews of the fulfillment of sharia principles on the mechanism for collecting and distributing funds and services.
   vi. Request data and information related to sharia aspects from the UUS Division and Branches in the context of carrying out their duties.
   vii. DPS has implemented and submitted a semi-annual report on the results of its supervision to the Financial Services Authority no later than 2 (two) months after the semester period ends.

viii. DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

viii. DPS provides sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.

C. DAFTAR KONSULTAN

Bank Jambi Unit Usaha Syariah selama tahun 2021 belum menggunakan konsultan, baik secara individu maupun secara perusahaan.

C. LIST OF CONSULTANTS

Bank Jambi Sharia Business Unit during 2021 has not used consultants either individually or as a company.

D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham mencakup jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

D. REMUNERATION POLICY AND OTHER FACILITIES

The disclosure of remuneration policies and other facilities as determined by the General Meeting of Shareholders includes the total amount of remuneration and other facilities as shown in the following table:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA/ *TYPE OF REMUNERATION AND OTHER FACILITIES*	JUMLAH DITERIMA DALAM SATU TAHUN 1 (SATU) ORANG/ *AMOUNT RECEIVED IN 1 YEAR FOR 1 (ONE) PERSONS*	JUMLAH RUPIAH/ AMOUNT OF RUPIAH
• Remunerasi / *Remuneration*		Rp 63.720.000
• Fasilitas Lainnya / *Other Facilities* a. Yang dapat dimiliki / *Can be owned* b. Yang tidak dapat dimiliki / *Cannot be owned Total*		Rp 18.585.000
Total		Rp 82.305.000

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel berikut di bawah ini:

The number of members of the Sharia Supervisory Board who receive remuneration in one year is grouped in the range of income levels, as shown in the following table:

JUMLAH REMUNERASI*) PER ORANG DALAM 1 TAHUN/ *AMOUNT OF REMUNERATION PER PERSON IN 1 YEAR**	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH/ *NUMBER OF SHARIA SUPERVISORY BOARD MEMBERS*
Di atas Rp2 miliar / *More than Rp2 billion*	Nihil / *None*
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar / *More than Rp1 billion – Rp2 billion*	Nihil / *None*
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar / *More than Rp500 million – Rp1 billion*	Nihil / *None*
Rp500 juta ke bawah / *Less than Rp500 million*	1 (satu) Orang / *(one) person*

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah/*valued in Rupiah equivalent*

E. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

E. FREQUENCY OF SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETINGS

NO	TANGGAL / *DATE*	MATERI / *AGENDA*	PESERTA / *PARTICIPANT*
1.	4 Januari 2021 / *January 4, 2021*	Silaturrahiim DPS baru dengan Pimpinan cabang Syariah / *Meeting between the New DPS with Sharia Branch Leaders*	1. A. A. Miftah 2. Lucky E. F. 3. Pimpinan cabang Syariah
2.	15 Januari 2021 / *January 15, 2021*	Pembahasan laporan DPS semester 2 tahun 2020 / *Discussion of the DPS report for semester 2 of 2020*	1. A. A. Miftah 2. Lucky E. F.
	1 Februari 2021 / *February 1, 2021*	Pembahasan program hadiah silah Syariah dan hadiah *top up* porsi haji / *Discussion of the SILAH-Syariah prize program and the top-up prize for the Hajj portion*	1. A. A. Miftah 2. Lucky E. F. 3. Divisi UUS 4. Bagian Pemasaran
3.	3 Februari 2021 / *February 3, 2021*	Pembahasan laporan internal UUS / *Discussion of UUS internal reports*	1. A. A. Miftah 2. Lucky E. F.
4.	16 April 2021 / *April 16, 2021*	Pembahasan temuan DPS tentang pemasaran / *Discussion of DPS findings on marketing*	1. A. A. Miftah 2. Lucky E. F.

NO	TANGGAL / *DATE*	MATERI / *AGENDA*	PESERTA / *PARTICIPANT*
5.	28 Mei 2021 / *May 28, 2021*	Pembahasan tentang berakhirnya masa DPS lama / *Discussion about the end of the previous DPS terms of office*	1. A. A. Miftah 2. Lucky E. F 3. Pimpinan Cabang Syariah 4. Wakil Pinca
6.	15 Juni 2021 / *June 15, 2021*	Pembahasan restrukturisasi pembiayaan kedua sindikasi Syariah A.n. PT BIJB / *Discussion of restructuring of the financing for the two Sharia syndications under PT BIJB*	1. Pimpinan Divisi UUS 2. Pinca Syariah 3. Bagian Pembiayaan (Lihat di notulensi UUS)
7.	25 Juni 2021 / *June 25, 2021*	Pembahasan laporan DPS semester 1 tahun 2021 / *Discussion of the DPS report for semester 1 of 2021*	1. A. A. Miftah 2. Lucky E. F.
8.	9 Juli 2021 / *July 9, 2021*	Pembahasan temuan DPS tentang form akad / *Discussion of DPS findings regarding contract forms*	1. Lucky E. F. 2. Pimpinan Cabang 3. Bagian Pembiayaan
9.	27 Agustus 2021 / *August 27, 2021*	Pembahasan tentang produk pembiayaan usaha mikro / *Discussion on micro business financing products*	1. Lucky E. F. 2. Pinca Syariah 3. Bagian pembiayaan
10.	15 Oktober 2021 / *October 15, 2021*	Pembahasan temuan DPS pada form akad / *Discussion of DPS findings on the contract form*	1. Lucky E. F. 2. Pinca Syariah 3. Bagian pembiayaan
11.	10 Desember 2021 / *December 10, 2021*	Pembahasan tentang persiapan laporan DPS semester 2 tahun 2021 / *Discussion on preparation of DPS report for semester 2 of 2021*	1. Lucky E. F. 2. Pimpinan Cabang

Keterangan:
- Seluruh keputusan dalam rapat DPS dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- Notulen rapat diparaf dan ditanda tangani oleh seluruh anggota DPS serta didokumentasikan dengan baik.
- Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi UUS Bank Jambi dan Direktur UUS.

Note :
- *All decisions in the DPS meeting are made by deliberation for consensus.*
- *Minutes of the meeting were signed by all DPS members and well documented.*
- *The results of the DPS meeting are used as information for business decisions for UUS Bank Jambi and the UUS Director.*

F. JUMLAH PENYIMPANGAN *(INTERNAL FRAUD)* YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH UUS

Dalam periode tahun 2021 tidak ada penyimpangan *(internal fraud)* yang timbul di UUS Bank Jambi.

F. THE NUMBER OF DEVIATION (INTERNAL FRAUD) THAT HAPPENED AND ATTEMPTS TO RESOLVE BY UUS

Throughout 2021 there were no deviation (internal fraud) that arose in the UUS of Bank Jambi.

INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN / *INTERNAL FRAUD IN 1 YEAR*	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH / *NUMBER OF CASES PERFORMED BY*					
	DEWAN KOMISARIS / DIREKSI *BOARD OF COMMISSIONERS/ DIRECTORS*		PEGAWAI TETAP / *PERMANENT EMPLOYEES*		PEGAWAI TIDAK TETAP/ *NON-PERMANENT EMPLOYEES*	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total *Fraud*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*
Telah diselesaikan / *Settled*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*
Dalam proses penyelesaian di Internal UUS / *Under internal settlement process*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*
Belum diupayakan penyelesaiannya / *Settlement has not been initiated*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum / *Has been followed up through a legal process*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*	Nihil / *None*

Keterangan :
- *Fraud* di Bank Jambi Unit Usaha Syariah tidak ada (nihil)
- DPS UUS Bank Jambi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi.

Note :
- *There is no (zero) fraud at Bank Jambi Sharia Business Unit*
- *DPS UUS Bank Jambi does not take and/or receive personal benefits from UUS other than remuneration.*

- DPS UUS Bank Jambi juga tidak pernah memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain. Selama tahun 2021 DPS belum ada pengajuan pembiayaan di UUS Bank Jambi. Jika DPS mengajukan pembiayaan kepada UUS Bank Jambi tetap diproses dan diAnalisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Bank Jambi.

- *Bank Jambi's UUS DPS has never used UUS for personal, family and/or other parties' interests. During 2021 there has been no application for financing from DPS to UUS Bank Jambi. If DPS applies for financing to UUS Bank Jambi, it will still be processed and analyzed by applying the precautionary principle and in accordance with applicable regulations, including obtaining approval from the Board of Commissioners of Bank Jambi.*

G. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH UUS

Sampai saat ini belum ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi UUS selama periode tahun 2021.

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum sebagaimana tabel di bawah ini :

G. LEGAL PROBLEMS AND SETTLEMENT EFFORT

Until now, there have been no legal issues, both civil and criminal, that UUS has faced during 2021.

Disclosure of legal issues as shown in the table below:

PERMASALAHAN HUKUM / *LEGAL CASE*	JUMLAH / *NUMBER*	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) / *Has been settled and has had permanent legal force*	Perdata / *Civil*	Pidana / *Crime*
Dalam proses penyelesaian / *Under settlement process*	Nihil / None	Nihil / *None*
Total	**Nihil / *None***	**Nihil / *None***

H. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA

· Penyaluran dana dan penerimaan dana untuk kegiatan sosial UUS
Penyaluran dana yang dananya berasal dari UUS untuk kegiatan sosial selama tahun 2021 tidak ada.

H. DISTRIBUTION OF FUNDS FOR SOCIAL ACTIVITIES

- *Distribution of funds for UUS social activities*

  During 2021, there was no disbursement of funds from UUS Bank Jambi for social activities.

I. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Saldo pendapatan non halal per 31 Desember 2021 berjumlah Rp86.288.304,11 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah sebelas sen), yangterdiri dari :
- Dana Kebajikan – Kas Rp89.147,55
- Dana Kebajikan – Denda Rp75.028.647,66
- Dana Kebajikan – Lainnya Rp11.170.508,90

I. NON HALAL INCOME AND THEIR USE

The balance of non-halal income as of December 31, 2021 amounted to Rp86,288,304.11 (Eighty-six million two hundred eighty-eight thousand three hundred and four rupiahs and eleven cents), which consists of:
- *Virtue Fund – Cash Rp89,147.55*
- *Virtue Funds – Fine Rp75,028,647.66*
- *Virtue Funds – Others Rp11,170,508,90*

J. KELEMAHAN DAN KEKUATAN SECARA UMUM

1. Kelemahan UUS Bank Jambi dalam Pelaksanaan GCG, yaitu :
   - Tenaga atau SDM yang perlu ditingkatkan kompetensinya.
   - Aset dan Modal yang perlu ditingkatkan untuk maksimalisasi bisnis.

J. WEAKNESSES AND STRENGTHS IN GENERAL

1. *Weaknesses of UUS Bank Jambi in GCG Implementation, namely:*
   - *The competence of personnel or human resources needs to be improved.*
   - *Assets and Capital need to be increased to maximize business.*

- Diversifikasi produk, *fitur pricing* dan layanan yang perlu diperbaiki (termasuk pembenahan dari aspek teknologi, jaringan dan kualitas layanan).

2. Kekuatan UUS Bank Jambi dalam Pelaksanaan GCG, yaitu :
   - Bank Jambi sebagai bank yang dimiliki oleh masyarakat setempat, memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dibandingkan dengan Bank lainnya yang ada di wilayah Jambi.
   - Bank Jambi UUS telah memiliki jaringan kantor Layanan Syariah yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di provinsi Jambi.
   - Tekad dan komitmen yang kuat dari Manajemen untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha perbankan syariah dengan sungguh-sungguh.
   - Bank Jambi memiliki *Captive Market* yang jelas.

KESIMPULAN UMUM

Dari hasil uraian pelaksanaan *Good Corporate Governance* UUS Bank Jambi periode pelaksanaan tahun 2021 maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Jambi UUS berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.11/33/ PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010.

- Implementasi pelaksanaan penerapan GCG pada UUS Bank Jambi telah menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan sasaran, strategi, kebijakan manajemen dan kinerja UUS secara keseluruhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melalui penyusunan Rencana Bisnis Bank, Laporan Semester, Triwulan, Bulanan, Mingguan, dan Laporan Harian.

- Bank Jambi UUS memiliki pelaporan internal yang cukup lengkap, didukung dengan *Core Banking* Syariah (T24) yang memadai, dan *core banking* yang digunakan oleh UUS Bank Jambi sama dengan *core Banking* yang digunakan oleh Bank Jambi Konvensional sebagai induknya.

- Kualitas dan kemampuan SDM masih harus ditingkatkan dengan pelatihan yang Berkesinambungan.

- Ringkasan perhitungan nilai komposit Bank Jambi UUS secara keseluruhan peringkat adalah 2. predikat BAIK, dengan kriteria faktor sebagai berikut :
  a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS peringkat 1.
  b. Pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah peringkat 2.
  c. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa peringkat 2.
  d. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti peringkat 2.

- *Product diversification, pricing features and services need to be improved (including improvements in technology, network and service quality aspects).*

2. *The strength of the UUS of Bank Jambi in the implementation of GCG, namely:*
   - *As a bank owned by the local community, Bank Jambi has a stronger emotional bond than other banks in Jambi province.*
   - *Bank Jambi UUS already has a network of Sharia Service offices spread across all regencies/cities in Jambi province.*
   - *Strong determination and commitment from the Management to seriously run and develop the Islamic banking business.*
   - *Bank Jambi has a clear Captive Market.*

GENERAL CONCLUSION

The conclusions from the description of the implementation of Good Corporate Governance of the UUS of Bank Jambi in 2021, are as follow:

- *In carrying out its operations, Bank Jambi UUS is based on Bank Indonesia regulation No.11/33/PBI/2009 concerning the implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010.*

- *The UUS of Bank Jambi has submitted information related to the objectives, strategies, management policies and performance of the UUS as a whole to the Financial Services Authority and Bank Indonesia through the preparation of the Bank's Business Plan, Semester, Quarterly, Monthly, Weekly, and Daily Reports.*

- *Bank Jambi UUS has a fairly complete internal reporting, supported by an adequate Sharia Core Banking (T24). The core banking used by UUS Bank Jambi is the same as that used by Conventional Jambi Bank as its parent.*

- *The quality and capability of human resources still need to be improved through continuous training.*

- *Overall, the composite score of Bank Jambi UUS is 2, obtaining GOOD predicate, with the following criteria:*
  a. Implementation of the duties and responsibilities of the UUS Director rank 1.
  b. The implementation and responsibilities of the Sharia Supervisory Board rank 2.
  c. Implementation of sharia principles in fund-raising and disbursing funds as well as rank 2 services.
  d. Distribution of funds to core financing customers and depository funds by 2nd rank core depositors.

e. Transparansi kondisi Unit usaha Syariah, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal adalah 2.

- Pada tahun 2021 UUS Bank Jambi telah memanfaatkan 12 (dua belas) Kantor Cabang Konvensional dan 32 (tiga puluh dua) kantor Cabang Pembantu Konvensional untuk jaringan *office channeling*.

Dari kesimpulan di atas, pelaksanaan *Good Corporate Governance* di UUS Bank Jambi secara konsisten akan terus diperbaiki, dan dikembangkan untuk mempertahankan kepercayaan *stakeholders*, sehingga dalam jangka panjang UUS Bank Jambi dapat terus beroperasi dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah dan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu: keterbukaan *(transparancy),* akuntabilitas *(accountability),* pertanggungjawaban *(responsibility),* profesional *(professional),* dan kewajaran *(fairness)* sehingga menciptakan sebuah struktur yang dapat membantu UUS Bank Jambi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, menetapkan sasaran, memperhatikan kebutuhan *stakeholders*, memastikan UUS Bank Jambi beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lainnya yang terkait, serta melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana.

e. Transparency of Sharia business unit condition, GCG implementation report and internal reporting is 2.

- *In 2021 Bank Jambi UUS has utilized 12 (twelve) Conventional Branch Offices and 32 (thirty-two) Conventional Sub-Branch Offices for office channeling networks.*

From the conclusion above, the implementation of Good Corporate Governance at UUS Bank Jambi will continue to be consistently improved, and developed so as to maintain stakeholder trust. Therefore, in the long term, UUS Bank Jambi can continue to operate and grow sustainably by adhering to sharia principles and applying the basic principles of GCG, namely: openness, accountability, responsibility, professionalism, and fairness so as to create a structure that can help UUS Bank Jambi in carrying out daily activities, setting targets, paying attention to the needs of stakeholders, ensuring the UUS Bank Jambi operates safely and healthily, complies with laws and other relevant regulations, and protects the interests of depositors.

Jambi, Maret 2022 | *March 2022*
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi

EMILIA HAMZAH
Komisaris Utama
President Commissioner

H. YUNSAK EL HALCON
Direktur Utama
President Director

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS TAHUN 2021
IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SBU DIRECTOR IN YEAR 2021

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS / *IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SBU DIRECTOR*

TUJUAN/*OBJECTIVE*:

Untuk menilai:
a. Kecukupan kriteria dan independensi Direktur UUS;
b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

To assess:
a. The adequacy of the criteria and independence of SBU Director;
b. The effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the SBU Director

SUB FAKTOR/ *SUB FACTOR*
A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS/*CRITERIA AND INDEPENDENCE OF THE SBU DIRECTOR*

KRITERIA/INDIKATOR/ *CRITERIA/INDICATOR*	ANALISIS *SELF ASSESMENT/SELF ASSESSMENT ANALYSIS*
1. Direktur UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS / *The SBU Director has the competence and is committed to developing the SBU.*	· Direktur UUS Bank Jambi memiliki integritas Kompetensi dan reputasi keuangan yang baik; · Bertanggung-jawab penuh terhadap pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah; · Memiliki pengetahuan Dasar Perbankan Syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya; · Memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan keuangan; · Berkomitmen untuk mengembangkan UUS; · Kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam pengembangan Unit Usaha Syariah. · *Bank Jambi's SBU Director has a good integrity of competence and financial reputation* · *Taking full responsibility for the management of SBU based on the principle of prudence and sharia principles,* · *Having adequate Basic Islamic Banking knowledge and are relevant to his position,* · *Having experience and expertise in banking and finance,* · *Commit to developing SBU* · *The ability to carry out strategic management in developing SBU.* **Peringkat / *Rank* : 1**
	1 | 2 | 3 | 4 | 5
2. Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam menjalankan tugasnya. / *The Director of SBU does not have a conflict of interest in carrying out his/her duties.*	Direktur UUS Bank Jambi memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya karena merangkap jabatan sebagai Direktur Pemasaran pada Bank Jambi Konvensional, namun rangkap jabatan tersebut tidak menyebabkan kerugian bank. / *Bank Jambi's SBU Director has a conflict of interest in carrying out his duties due to concurrently serving as Marketing Director at the Conventional Jambi Bank, but the concurrent position does not cause bank losses.* **Peringkat/ *Rank : 2***
	1 | **2** | 3 | 4 | 5
3. Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh OJK / *The Director of SBU has been interviewed by Financial Services Authority*	Direktur UUS Bank Jambi lulus *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otorita Jasa Keuangan / *Bank Jambi's SBU Director has passed the fit and proper test conducted by Financial Services Authority.* **Peringkat / *Rank* : 1**
	1 | 2 | 3 | 4 | 5
4. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur UUS telah dilaporkan oleh BUK secara tepat waktu. / *Appointment and/or replacement of the Director of SBU has been reported by BUK in a timely manner.*	Penunjukan Direktur Unit Usaha Syariah Bank Jambi telah dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional tepat waktu. / *The appointment of the Bank Jambi's SBU Director has been reported by the Conventional Commercial Bank on time.* **Peringkat / *Rank* : 1**
	1 | 2 | 3 | 4 | 5
SUB FAKTOR/*SUB FACTOR*	**PERINGKAT / *RANK***
KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS/*CRITERIA AND INDEPENDENCE OF THE SBU DIRECTOR*	**1** | 2 | 3 | 4 | 5

SUB FAKTOR/ *SUB-FACTOR RATINGS* B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS/ *DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SBU DIRECTOR*					
KRITERIA/INDIKATOR/ *CRITERIA/INDICATOR*	**ANALISIS *SELF ASSESMENT/SELF ASSESSMENT ANALYSIS***				
1. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. / *The SBU Director is fully responsible for the implementation of SBU management based on prudential principles and Sharia Principles.*	1. Direktur UUS Bank Jambi telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya 2. Direktur UUS Bank Jambi dalam melaksanakan tugas berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah 3. Direktur UUS Bank Jambi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas 1. *Bank Jambi's SBU Director has carried out his duties according to his responsibilities* 2. *Bank Jambi's SBU Director in carrying out its duties based on the principles of prudence and sharia principles* 3. *Bank Jambi's SBU Director is fully responsible for carrying out his duties* **Peringkat / *Rank* : 1**				
	1	2	3	4	5
2. Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS. / *SBU Director has followed up on recommendations from the results of SSB supervision.*	1. Dalam melaksanakan tugas Direktur UUS Bank Jambi berpedoman pada POJK, Peraturan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional 2. Direktur UUS Bank Jambi telah menindaklanjuti hasil pengawasan dan melaksanakan rekomendasi DPS dan menjadi perhatian. 1. *In carrying out the duties as Bank Jambi's SBU Director, he refers to FSA Regulation, Bank Indonesia regulations and the National Sharia Board.* 2. *Bank Jambi's SBU Director has followed up on the results of the supervision and implemented the SSB recommendations and received attention.* **Peringkat / *Rank* : 1**				
	1	2	3	4	5
3. Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS. / *Bank Jambi's SBU Director has provided data and information related to the fulfillment of Sharia Principles that are accurate, relevant and timely to SSB.*	· Direktur UUS Bank Jambi menyediakan data dan informasi yang diminta oleh DPS terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. · DPS tidak mendapat hambatan dalam mendapatkan informasi/data yang butuhkan · *Bank Jambi's SBU Director provides data and information requested by DPS related to compliance with sharia principles* · *DPS found no obstacles in getting the information/data needed* **Peringkat / *Rank* : 1**				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR/ *SUB FACTOR RANK*	**PERINGKAT / *RANK***				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS / *DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SBU DIRECTOR*	**1**	2	3	4	5

PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS / *ASSESSMENT OF RANKING FOR TASK IMPLEMENTATION FACTORS AND RESPONSIBILITIES OF THE SBU DIRECTOR*					
PERINGKAT SUB FAKTOR/ *SUB FACTOR RANK*	**PERINGKAT / *RANK***				
A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS / *CRITERIA AND INDEPENDENCE OF THE SBU DIRECTOR*	**1**	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS / *DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SBU DIRECTOR*	**1**	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR/ *FACTOR RANK*	**1**	2	3	4	5

KESIMPULAN / *CONCLUSION*:

1. Direktur UUS Bank Jambi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS, berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
2. Direktur UUS Bank Jambi memiliki komitmen dalam pengembangan UUS.
3. Direktur UUS Bank Jambi sebelum menjalankan tugasnya telah mendapatkan Pendidikan Dasar Pengetahuan Syariah.
4. Direktur UUS Bank Jambi sebelum menjalankan tugasnya telah lulus *Fit and profer tes* di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direktur UUS Bank Jambi memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan pengelolaan strategis dalam pengembangan bank yang sehat.
6. Direktur UUS Bank Jambi memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya karena merangkap jabatan sebagai Direktur Pemasaran pada Bank Jambi Konvensional, namun rangkap jabatan tersebut tidak menyebabkan kerugian bank.
7. Direktur UUS Bank Jambi tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
8. Direktur UUS Bank Jambi menyediakan data dan informasi yang diminta oleh DPS terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
9. Hasil pengawasan dan rekomendasi DPS telah ditindaklanjuti dan menjadi perhatian.

1. *Bank Jambi's SBU Director is fully responsible for the implementation of SBU management, based on the principle of prudence and sharia principles*
2. *Bank Jambi's SBU Director is committed to developing SBU*
3. *Bank Jambi's SBU Director, prior to carrying out his duties, received a Sharia Knowledge Basic Education*
4. *Bank Jambi's SBU Director, before carrying out his duties, passed the Fit and profer test at Financial Services Authority.*
5. *Bank Jambi's SBU Director has experience and expertise in banking and strategic management in developing a sound bank*
6. *Bank Jambi's SBU Director has a conflict of interest in carrying out his duties because of his concurrent position as Director of Marketing at the Conventional Jambi Bank, but the concurrent position does not cause bank losses*
7. *Bank Jambi's SBU Director complies with Financial Services Authority, Bank Indonesia regulations and the National Sharia Board*
8. *Bank Jambi's SBU Director provides data and information requested by SSB related to compliance with sharia principles*
9. *Results of supervision and SSB recommendations have been followed up and taken into account*

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) / *IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD (SSB)*

TUJUAN/*OBJECTIVE*:

Untuk menilai:
a. Kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS;
b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
c. Efektivitas penyelenggaraan rapat DPS;
d. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS.

To assess:
a. Adequacy of composition, criteria and level of independence of SSB members;
b. Effectiveness of the implementation of SSB duties and responsibilities;
c. Effectiveness of SSB meetings;
d. Adequacy of disclosure aspects regarding SSB.

SUB FAKTOR / *SUB FACTOR*
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENSI DPS/*COMPOSITION, CRITERIA AND INDEPENDENCE OF SSB*

KRITERIA/INDIKATOR/ *CRITERIA/INDICATOR*	ANALISIS *SELF ASSESMENT/SELF ASSESSMENT ANALYSIS*
1. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. / *SSB consists at least 2 (two) persons and at most 3 (three) persons.*	Jumlah DPS UUS Bank Jambi berjumlah 1 (Satu) orang, untuk pemenuhan sedang dilaksanakan proses seleksi penerimaan Anggota DPS. / *The SSB of Bank Jambi's SBU consists of 1 (one) person, for compliance, the selection process for the acceptance of DPS Members is being carried out.* **Peringkat/ *Rank : 2***

1	**2**	3	4	5

2. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai./ *All members of SSB have adequate integrity, competence and financial reputation*.	√ Ketua DPS UUS Bank Jambi memiliki akhlak dan moral yang baik dengan latar belakang pendidikan Islam, sebagai Ketua merangkap Anggota. √ Anggota DPS berlatar belakang pendidikan Islam dan sebagai Dosen Universitas Jambi. √ Anggota DPS patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti PBI dan Fatwa DSN. √ Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan dan memajukan UUS Bank Jambi sesuai dengan syariat Islam. √ Cukup memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah yang memadai sesuai jabatannya. √ DPS tidak memiliki kredit macet. √ DPS tidak pernah dinyatakan pailit. √ *Chairperson of the SSB of Bank Jambi's SBU demonstrates a good character and morals and has an Islamic educational background, as a Lecturer at UIN STS Jambi* √ *SSB members have Islamic education background and are lecturers at Jambi University* √ *SSB members comply with applicable laws and regulations such as PBI and DSN Fatwa* √ *Having high commitment to developing and advancing Bank Jambi SBU in accordance with Islamic law* √ *Having adequate knowledge in the field of Islamic banking in accordance with his/her position* √ *SSB members do not have non-performing loan* √ *SSB members have never been declared bankrupt* **Peringkat/ *Rank : 2***
	1 **2** 3 4 5
3. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi. / *Appointment and/or replacement of SSB members is done by taking into account the recommendations of the Nomination Committee or the Remuneration and Nomination Committee.*	Pengangkatan anggota DPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Komite Remunerasi. / *Appointment of SSB members by taking into account the recommendations of the Nomination Committee and Remuneration Committee.* **Peringkat / *Rank* : 1**
	1 2 3 4 5
4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS./ *Appointment and/or replacement of SSB members has received a recommendation from the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council and has obtained approval from the GMS*.	Pengangkatan anggota DPS mendapat rekomendasi dari DPS-MUI, dan mendapat persetujuan RUPS Bank Jambi serta lulus *fit and Proper Test* Otoritas Jasa Keuangan./ *The appointment of SSB members have received recommendation from DPS-MUI, and received the approval of the Bank Jambi RUPS and passed fit and Proper Test from Financial Services Authority.* **Peringkat / *Rank* : 1**
	1 2 3 4 5
5. Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris. / *The term of office of SSB member does not exceed the term of office of member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.*	Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. / *The term of office of a SSB member does not exceed the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.* **Peringkat / *Rank* : 1**
	1 2 3 4 5
6. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. / *SSB members hold concurrent positions as SSB members at most at 4 (four) other Islamic financial institutions.*	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya. / *SSB does not hold concurrent position as a member of SSB at other Islamic financial institutions.* **Peringkat / *Rank* : 1**
	1 2 3 4 5

PERINGKAT SUB FAKTOR / *SUB FACTOR RANK*	**PERINGKAT / *RANK***
KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS / *COMPOSITION, CRITERIA AND INDEPENDENCE OF SSB*	**1** 2 3 4 5

SUB FAKTOR / *SUB FACTOR* **B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS / *DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SSB***	
KRITERIA/INDIKATOR / *CRITERIA/INDICATOR*	**ANALISIS *SELF ASSESMENT* / *SELF ASSESMENT ANALYSIS***
1. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. / *SSB has carried out its duties and responsibilities in accordance with GCG principles.*	√ DPS melaksanakan tugas dan tangung jawab sesuai dengan prinsip GCG √ DPS memberikan masukan, nasehat kepada Direktur UUS Bank Jambi dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya dikantor Cabang. √ DPS melakukan pemeriksaan terhadap produk dan akad berdasarkan fatwa DSN √ *SSB carries out its duties and responsibilities in accordance with GCG principles.* √ *SSB provides input, advice to the Director of SBU Bank Jambi from the results of the examinatio conducted at the branch office.* √ *SSB checks products and contracts based on the DSN fatwa.* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 **2** 3 4 5
2. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. / *SSB has the duty and responsibility to provide advice and advice to the SBU Director and to supervise SBU activities to be in accordance with Sharia Principles.*	DPS secara insidentil telah memberikan nasehat dan saran kepada Direktur UUS Bank Jambi atas kelemahan yang terdapat dalam operasional Cabang Syariah. / *SSB incidentally provided advice and suggestions to the Director of SBU Bank Jambi on the weaknesses contained in Sharia Branch operations.* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 **2** 3 4 5
3. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS. / *SSB has assessed and ensured compliance with Sharia Principles on operational guidelines and products issued by SBU.*	Produk UUS Bank Jambi telah dinilai dan telah sesuai dengan prinsip syariah. / *Bank Jambi SBU products have been assessed and are in accordance with sharia principles.* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 **2** 3 4 5
4. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. / *SSB has overseen the process of developing SBU new products in compliance with the fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulama Council.*	Dalam pelaksanaan saat ini UUS Bank Jambi sudah ada pengembangan produk baru. / *At present, SBU Bank Jambi has developed a new product.* **Peringkat / *Rank* : 1** **1** 2 3 4 5
5. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya. / *SSB has requested a fatwa from National Sharia Council - Indonesian Ulama Council for new SBU products that has fatwa yet.*	Seluruh produk UUS Bank Jambi sampai saat ini sudah berdasarkan fatwa DSN-MUI. / *All of Bank Jambi's SBU products to date have been based on the DSN-MUI fatwa.* **Peringkat / *Rank* : 1** **1** 2 3 4 5
6. DPS telah melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS. / *SSB periodically reviews the compliance with Sharia Principles regarding the mechanism of raising funds and channeling funds and SBU services.*	DPS sewaktu waktu secara berkala melakukan *review* atas pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS. / *At any time/ not periodically, SSB reviews the compliance with sharia principles regarding the funds raising, channeling and SBU services.* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 **2** 3 4 5
7. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan. / *SSB to submit SSB Supervisory Report on a semester basis no later than 2 (two) months after the reporting period.*	DPS menyampaikan hasil laporan tidak lebih dari 2 bulan setelah periode laporan, dan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). / *SSB submits report results no later than 2 months after the reporting period, in accordance with OJK regulations.* **Peringkat / *Rank* : 1** **1** 2 3 4 5

8. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. / *Members of SSB have provided sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.*	Anggota DPS cukup mempunyai waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan kehadiran 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu. / *Members of SSB have enough time to carry out their duties and responsibilities, with the presence of 2 (two) times in 1 (one) week.* **Peringkat/ *Rank : 2***
	1 **2** 3 4 5

PERINGKAT SUB FAKTOR/ *SUB FACTOR RANK*	**PERINGKAT / *RANK***
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS / *DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SSB*	1 **2** 3 4 5

SUB FAKTOR / *SUB FACTOR* **C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS / *EFFECTIVENESS OF SSB MEETING***	
KRITERIA/INDIKATOR / *CRITERIA/INDICATOR*	**ANALISIS *SELF ASSESMENT* / *SELF ASSESMENT ANALYSIS***
1. Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. / *SSB meetings are held at least 1 (one) time in 1 (one) month.*	DPS menyelenggarakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan. / *SSB holds meetings at least 1 (one) time in a month.* **Peringkat/ *Rank : 2***
	1 **2** 3 4 5
2. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. / *Decision making of SSB meetings is based on consensus agreement.*	Keputusan rapat DPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. / *SSB meeting decisions are made based on deliberation and consensus.* **Peringkat/ *Rank : 2***
	1 **2** 3 4 5
3. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik. / *Minutes of the meeting, which is a joint decision of all SSB members, has been well documented.*	Risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik dan di simpan dalam file aman. / *Minutes of meetings have been well documented and stored in a secure file.* **Peringkat/ *Rank : 2***
	1 **2** 3 4 5
4. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS. / *The results of the SSB meeting have been submitted as reports or recommendations to the SBU Director.*	Hasil rapat yang dilakukan oleh DPS tidak semua dilaporkan kepada Direktur UUS Bank Jambi sebagai informasi dan untuk ditindaklanjuti. / *Not all SSB meeting results are reported to the Director of Bank Jambi SBU as information and to be followed up.* **Peringkat/ *Rank : 2***
	1 **2** 3 4 5

PERINGKAT SUB FAKTOR/ *SUB FACTOR RANK*	**PERINGKAT / *RANK***
EFEKTIVITAS RAPAT DPS / *EFFECTIVENESS OF DPS MEETINGS*	1 **2** 3 4 5

SUB FAKTOR/ *SUB FACTOR* **D. TRANSPARANSI DPS / *SSB TRANSPARENCY***					
KRITERIA/INDIKATOR/ *CRITERIA/INDICATOR*	**ANALISIS *SELF ASSESMENT/SELF ASSESSMENT ANALYSIS***				
1. Anggota DPS telah mengungkapkan: a. Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan b. Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. *SSB members have revealed:* *a. Concurrent position as a member of SSB in other Islamic financial institutions; and* *b. Remuneration and other facilities in the GCG Implementation Report.*	· Anggota DPS hanya sebagai anggota DPS pada UUS Bank Jambi dan tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan /perusahaan lainnya. · Anggota DPS telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang di didapat. · *SSB members only serves as members of Bank Jambi SSB and do not hold concurrent positions at other financial institutions / companies.* · *SSB members have revealed the remuneration and facilities obtained.* **Peringkat / *Rank* : 1**				
	1	2	3	4	5
2. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS. / *SSB members do not use UUS for personal, family and / or other parties' interests that reduce assets or reduce UUS profits.*	Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Bank Jambi untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS Bank Jambi. Dan tidak ada rekomendasi/usulan dari DPS untuk yang berhubungan dengan jabatannya. / *SSB members do not use Bank Jambi SBU for personal, family or other parties' interests that reduce assets or reduce the profits of Bank Jambi SBU. And there are no recommendations / proposals from SSB for those related to their positions.* **Peringkat / *Rank* : 1**				
	1	2	3	4	5
3. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. / *SSB members do not take and / or receive personal benefits from SBU other than remuneration and other facilities determined by the GMS.*	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Sampai saat ini anggota DPS hanya menerima gaji berdasarkan ketentuan. / *SBU members do not take and/or receive personal benefits from SBU other than remuneration and other facilities determined by the GMS. Until now SSB members only receive salary based on the provisions.* **Peringkat / *Rank* : 1**				
	1	2	3	4	5
4. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. / *SSB members do not hold concurrent positions as consultants in all SBU.*	Sampai saat ini anggota DPS selain jabatan dosen tidak ada jabatan lainnya dilembaga keuangan syariah lainnya. / *Until now there are no other DPS members besides lecturer positions in other Islamic financial institutions.* **Peringkat / *Rank* : 1**				
	1	2	3	4	5

PERINGKAT SUB FAKTOR/ *SUB FACTOR RANK*	**PERINGKAT / *RANK***				
TRANSPARANSI DPS / *SSB TRANSPARENCY*	**1**	2	3	4	5

PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH / *ASSESSMENT OF RATING FACTORS IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD*					
PERINGKAT SUB FAKTOR / *SUB-FACTOR RATINGS*	**PERINGKAT / *RANK***				
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS / *SSB COMPOSITION, CRITERIA AND INDEPENDENCE*	**1**	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS / *DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SSB*	1	**2**	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS / *EFFECTIVENESS OF SSB MEETING*	1	**2**	3	4	5
D. TRANSPARANSI DPS / *SSB TRANSPARENCY*	**1**	2	3	4	5

PERINGKAT FAKTOR / *FACTOR RATING*	1	**2**	3	4	5

KESIMPULAN / *CONCLUSION*:

1. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga Keuangan Syariah lain.
2. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Bank Jambi untuk kepentingan pribadi/keluarga.
3. Anggota DPS menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh RUPS.
4. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan memberikan nasehat dan saran kepada Direktur UUS.
5. DPS mengawasi kegiatan UUS didalam penyaluran produk pembiayaan dan produk penghimpunan dana serta produk jasa agar sesuai dengan prinsip syariah.

1. SSB members do not hold concurrent positions as SSB members in other Sharia Financial institutions
2. SSB members do not use Bank Jambi SBU for personal/family interests
3. SSB members receive remuneration and other facilities determined by the GMS
4. SSB has carried out its duties and responsibilities in accordance with GCG principles by providing advice and suggestions to the SBU Director
5. SSB oversees SBU activities in the distribution of financing products and fund raising products and service products to comply with sharia principles.

III. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH / *IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLES IN COLLECTING FUNDS AND DISTRIBUTION OF FUNDS AND SERVICE OF SHARIA BUSINESS UNITS*

TUJUAN/*OBJECTIVE*:

Untuk menilai :
a. kesesuaian Prinsip Syariah dalam produk UUS;
b. pemenuhan Prinsip Syariah oleh UUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa;
c. mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah.

To assess :
a. Compliace of Sharia Principles in SBU products;
b. Compliance with Sharia Principles by SBU in the implementation of fundraising, fund distribution and service activities;
c. The mechanism used by the SBU to settle disputes that occur between the SBU and the customer.

KRITERIA/INDIKATOR/ *CRITERIA/INDICATOR*	ANALISIS *SELF ASSESMENT/SELF ASSESSMENT ANALYSIS*
1. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS. / *The products owned by SBU are in accordance with the Fatwa issued by the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council and have been supplemented with sharia opinions from DPS.*	Produk Dana telah diberikan opini oleh DPS UUS Bank Jambi yang telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang fatwa DSN : √ No.1/DSN-MUI/IV/2000, tentang giro √ No.2/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan √ No.3/DSN-MUI/IV/2000, tentang Deposito √ No.4/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah √ No.7/DSN-MUI/IV/2000, tentang Mudharabah √ No.8/DSN-MUI/IV/2000, tentang Musyarakah √ No.13/DSN-MUI/IV/2000, tentang Uang Muka Murabahah √ No.27/DSN-MUI/III/2002, tentang AL-Ijarah AL-Muntahiyah BI AL-Tamlik √ No.102/DSN-MUI/X/2016, tentang Akad AL-Ijarah AL Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah(PPR)-Indent √ No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Ijarah √ No.19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh √ No.4/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah √ No.10/DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000, tentang wakalah √ No.DSN No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujroh √ No. DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008, tentang Musyarakah Mutanaqishah. √ No. DSN.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro √ No.115/DSN-MUI/IX/2007 tentang Mudharabah.

	Funding Product that has received opinion from Bank Jambi's SSB and is in accordance with the DSN-MUI fatwa regarding the DSN fatwa: √ *No.1/DSN-MUI/IV/2000, concerning current accounts* √ *No.2/DSN-MUI/IV/2000, concerning Savings* √ *No.3/DSN-MUI/IV/2000, concerning Deposits* √ *No.4/DSN-MUI/IV/2000, concerning Murabahah* √ *No.7/DSN-MUI/IV/2000, concerning Mudharabah* √ *No.8/DSN-MUI/IV/2000, about Musyarakah* √ *No.13/DSN-MUI/IV/2000, concerning Murabahah Advances* √ *No.27/DSN-MUI/III/2002, concerning AL-Ijarah AL-Muntahiyah BI AL-Tamlik* √ *No.102/DSN-MUI/X/2016, concerning the AL-Ijarah AL Maushufah fi Al- Dzimmah Agreement for Home Ownership Financing Products (PPR) -Indent* √ *No.112/DSN-MUI/IX/2017, concerning the Ijarah Agreement* √ *No.19/DSN-MUI/IV/2001, concerning Al-Qardh* √ *No.4/DSN-MUI/IV/2000, concerning Murabahah* √ *No.10/DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000, concerning time* √ *No.DSN No.113/DSN-MUI/IX/2017 concerning Wakalah Bil Ujroh Agreement* √ *No. DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008, concerning Musyarakah Mutanaqishah* √ *No. DSN.01/DSN-MUI/IV/2000 concerning giro* √ *No.115/DSN-MUI/IX/2007 concerning Mudharabah.* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 | **2** | 3 | 4 | 5
2. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia. / *The implementation of UUS fund raising products is in accordance with the Fatwa issued by the National Sharia Council - Indonesian Ulama Council and Bank Indonesia regulations.*	Pelaksanaan Produk penghimpunan dana telah memperhatikan fatwa DSN-MUI dan ketentuan Bank Indonesia nomor : √ PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta penyaluran jasa bank syariah sebagaimana telah diubah oleh PBI no.10/16/PBI/2008. √ SE BI nomor 10/14/DPbS/2008 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah √ PBI no,7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah *The fund raising has taken into account the DSN-MUI fatwa and Bank Indonesia regulation number:* √ *PBI No.9/19/PBI/2007 concerning the implementation of sharia principles in the activities of raising funds and channeling funds and channeling of Islamic bank services as amended by PBI no.10/16/PBI/2008* √ *SE BI number 10/14/DPbS/2008 concerning the implementation of sharia principles in the collection and distribution of funds and Islamic bank services* √ *PBI no, 7/46/PBI/2005, concerning the contract for the collection and distribution of funds for banks conducting business activities based on sharia principles.* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 | **2** | 3 | 4 | 5
3. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia. / *The distribution of funds by SBU is in accordance with the Fatwa issued by the National Sharia Board - Indonesian Ulema Council and Bank Indonesia regulations.*	Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan terhadap produk UUS mengacu dan memperhatikan fatwa DSN/PBI nomor : √ No.4/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah. √ No.7/DSN-MUI/IV/2000, tentang Mudharabah (Qiradh). √ No.23/DSN-MUI/III/2000, tentang potongan pelunasan dalam murabahah √ No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi. √ PBI Nomor 7 /46/PBI/2005 tanggl Nopember 4, 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. √ PBI Nomor 9/19PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas peraturan BI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. √ No.08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Musyarakah. √ No.13/DSN-MUI/IV/2000, tentang Uang Muka Murabahah. √ No. 112/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Ijarah. √ No.10/DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000, tentang wakalah. √ No.DSN No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujroh.

	In the implementation of financing for UUS products, refer to and consider DSN / PBI fatwa no. √ *No.4/DSN-MUI/IV/2000, concerning Murabahah* √ *No.7/DSN-MUI/IV/2000, concerning Mudharabah (Qiradh)* √ *No.23/DSN-MUI/III / 2000, concerning redemption deductions in Murabahah* √ *No.21 / DSN-MUI / X / 2001 concerning general insurance guidelines* √ *PBI Number 7/46 / PBI / 2005 dated November 4, 2005 concerning the contract for the collection and distribution of funds for banks conducting business activities based on sharia principles* √ *PBI Number 9 / 19PBI / 2007 dated December 17, 2007 concerning distribution of funds and Islamic bank services, as amended by PBI number 10/16 / PBI / 2008 dated September 25, 2008 concerning Amendments to BI regulation No. 9/19 / PBI / 2007 concerning the Implementation of Sharia Principles in the activities of raising funds and channeling funds as well as Sharia bank services.* √ *No.08/DSN-MUI/IV/2000, concerning Musyarakah* √ *No.13/DSN-MUI/IV/2000, concerning Murabahah Advances* √ *No. 112/DSN-MUI/IX/2017, concerning the Ijarah Agreement* √ *No.10/DSN No.10/DSN-MUI/IV /2000, concerning time* √ *No.DSN No.113/DSN-MUI/IX/2017 concerning Wakalah Bil Ujroh Agreement* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 **2** 3 4 5
4. Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia. / *The implementation of SBU services is in accordance with the Fatwa issued by the National Sharia Council - Indonesian Ulama Council and Bank Indonesia regulations.*	Jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan DSN-MUI yang berlaku: √ Fatwa DSN No.10/DSN/MUI/IV Tahun 2000 tentang Wakalah. √ Fatwa DSN No.11/DSN/MUI/IV tahun 2000 tentang Kafalah. √ PBI No.10/14/DPbS/2008 perihal pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank syariah. *Services in accordance with applicable DSN-MUI provisions:* √ *DSN Fatwa No.10/DSN/MUI/IV of 2000 concerning Wakalah* √ *DSN Fatwa No.11/DSN/MUI/IV of 2000 concerning Kafalah* √ *PBI No.10/14/DPbS/2008 concerning the implementation of Sharia Principles in Funds Collection and Distribution Activities and Islamic Bank Services* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 **2** 3 4 5
5. Penyelesaian sengketa antara UUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / *Settlement of disputes between SBUs and customers is carried out through deliberations, or through banking mediation of sharia arbitration mechanisms, or through judicial institutions based on applicable laws and regulations.*	Dalam tahun 2021 UUS Bank Jambi tidak ada sengketa antara UUS Bank Jambi dengan nasabah, apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah, atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / *In 2021, Bank Jambi SBU had no dispute between Bank Jambi SBU and customers. If this happens, then the dispute will be resolved through deliberation or through banking mediation, an Islamic arbitration mechanism, or through a judicial institution based on the applicable laws and regulations.* **Peringkat / *Rank* : 1** **1** 2 3 4 5

PERINGKAT FAKTOR/ *FACTOR RANK*	**PERINGKAT / *RANK***				
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK UMUM SYARIAH/ *IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLES IN FUNDING AND DISTRIBUTION OF FUNDS, AND SHARIA COMMERCIAL BANK SERVICES*	1	**2**	3	4	5

KESIMPULAN / *CONCLUSION*:

IV. PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI / *DISTRIBUTION OF FUNDS TO PRIMARY FINANCING CUSTOMERS AND FUND DEPOSIT BY PRIMARY DEPOSIT*

TUJUAN/*OBJECTIVE*:

Untuk menilai:
a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti;
b. independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti.

To assess:
a. Application of the prident principle in channeling funds to primary financing customers and depositing funds by primary depositors;
b. Independence of decision making relating to the distribution of funds to primary financing customers.

KRITERIA/INDIKATOR/ *CRITERIA/INDICATOR*	ANALISIS *SELF =ASSESMENT/SELF ASSESSMENT ANALYSIS*
1. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada Nasabah Inti. / *SBU has implemented the prudent principle in providing the provision of funds, especially the distribution of funds to Primary Customers.*	· Penyaluran dana kepada nasabah inti telah menerapkan prinsip kehati-hatian, memperhatikan prinsip dengan 5 C, dan mitigasi risiko. · Terhadap deposan inti tidak terdapat penyaluran dana pembiayaan. · *Fund distribution to primary customers has applied the principle of prudence, paying attention to the principle with 5 C, and risk mitigation* · *There is no distribution of funding for primary depositors* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 **2** 3 4 5
2. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti. / *SBU already has written policy guidelines and procedures on channeling funds to Core Customers.*	UUS Bank Jambi mempunyai pedoman kebijakan dan prosedur untuk penyaluran pembiayaan secara umum, namun masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki. / *Bank Jambi SBU has policy guidelines and procedures for lending in general, but there are still issues that need to be adressed.* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 **2** 3 4 5
3. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. / *Written policy guidelines and procedures on providing funds have been reviewed periodically at least 1 (one) time in 1 (one) year.*	Pedoman, kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana di kaji ulang secara periodik. / *Written guidelines, policies and procedures regarding the provision of funds have not been reviewed periodically.* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 **2** 3 4 5
4. UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada Nasabah Inti yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku. / *SBU does not provide distribution of funds to Core Customers that are contrary to the general procedures for the provision of funds in force.*	· Prosedur umum penyediaan dana tetap mengacu kepada SOP dan Peraturan Bank Indonesia serta fatwa DSN yang berlaku · *General procedures for providing funds remain in accordance with SOPs and Bank Indonesia Regulations and the applicable DSN fatwa.* **Peringkat/ *Rank : 1*** **1** 2 3 4 5
5. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk Deposan Inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku. / *The SBU does not provide facilities related to the collection of funds for Core Depositors unless such facilities have been determined in the general procedure for collecting funds in force.*	Pemberian fasilitas kepada deposan inti tetapkan mengacu kepada prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku. / *The provision of facilities to core depositors is determined by referring to the general procedure for collecting funds in force* **Peringkat/ *Rank : 2*** 1 **2** 3 4 5

6. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia. / *SBU has and administers a detailed list of Core Financing Customers and Core Depositors and submits it to Bank Indonesia.*	· Daftar rincian nasabah inti dan nasabah deposan inti telah ditatausahakan dengan baik. · Nasabah inti dan nasabah deposan inti dilaporkan dalam laporan LBBUS minggu ke IV · *A detailed list of core customers and core depositors hasbeen arranged.* · *Core customers and core depositors are reported in LBBUS report week IV.* **Peringkat/ *Rank : 1***

	1	2	3	4	5

PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI / *ASSESSMENT OF RANKING FOR DISTRIBUTION OF FUNDS TO PRIMARY FINANCING CUSTOMERS AND FUND DEPOSIT BY PRIMARY DEPOSIT*					
	PERINGKAT / *RANK*				
PERINGKAT FAKTOR/ *FACTOR RANK*	1	**2**	3	4	5

KESIMPULAN / *CONCLUSION*:

1. UUS Bank Jambi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti, namun dalam prakteknya masih terdapat kendala kendala yang sulit dilakukan secara syariah murni.
2. Bank Jambi UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana.
3. Bank Jambi UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada nasabah inti yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.
4. Bank Jambi UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.
5. Bank Jambi UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah deposan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

1. *Bank Jambi's SBU applies the prudent principle in providing the provision of funds, especially the distribution of funds to primary customers, but in practice there are still obstacles that are difficult to do Sharia practices purely.*
2. *Bank Jambi's SBU has written policy guidelines and procedures on channeling funds.*
3. *Bank Jambi's SBU does not provide distribution of funds to primary customers which contrary to the general procedures for the provision of funds*
4 *Bank Jambi's SBU does not provide facilities related to the collection of funds for primary depositors unless such facility has been determined in the general procedures for collecting funds.*
5. *Bank Jambi's SBU has and administers a detailed list of primary financing customers and primary depositors and submits them to Bank Indonesia.*

V. TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL / *TRANSPARENCY OF SHARIA BUSINESS UNIT CONDITIONS, GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORTS AND INTERNAL REPORTING*

TUJUAN/*OBJECTIVE*:

Untuk menilai:
a. ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholders (public)*;
b. efektivitas pengelolaan informasi produk dan jasa UUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;
c. cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu;
d. cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG;
e. keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) UUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).

To assess:
a. timeliness, accuracy and scope of transparency of financial and non-financial information submitted to stakeholders (public);
b. effectiveness of managing SBU product and service information, managing customer complaints and managing customer personal data;
c. the scope of the GCG implementation report submitted in a complete, accurate, current, complete and timely manner;
d. the scope of parties receiving reports on the implementation of GCG;
e. reliability of UUS Management Information Systems (MIS), particularly the Internal Reporting System, is able to present data and information in a timely, complete, accurate, and usefulness in decision making (business).

SUB FAKTOR/ *SUB FACTOR*
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI UUS / *APPLICATION OF TRANSPARENCY OF SBU CONDITIONS*

KRITERIA/INDIKATOR/ *CRITERIA/INDICATOR*	ANALISIS *SELF ASSESMENT/SELF ASSESSMENT ANALYSIS*
1. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. / *UUS has transcribed financial conditions by preparing and presenting Quarterly Published Financial Reports.*	UUS Bank Jambi telah membuat laporan keuangan publikasi triwulanan secara konsolidasi dengan induk (Konvensional). / *Bank Jambi SBU has made quarterly published financial statements on a consolidated basis with the parent (conventional).* **Peringkat / *Rank* : 1** **1** | 2 | 3 | 4 | 5
2. UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan informasi kegiatan UUS yang mencakup paling sedikit: a. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS; b. Perkembangan usaha syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, *Return on Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan; c. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan;; d. Tanggung jawab sosial perusahaan; dan e. Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil. *SBU through its head office has presented information on SBU activities which includes at least:* *a. Management objectives, strategies and policies used in the development of SBU;* *b. The development of sharia business, namely the distribution of funds and their composition, net income, Return on Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), sources of funds and their composition, total assets and other relevant information;* *c. Types of products and services offered;* *d. Corporate social responsibility; and* *e. Realization of profit sharing/rewards and profit sharing distribution calculation methods.*	UUS Bank Jambi telah menyajikan Informasi laporan- laporan dan kegiatan kepada Direksi dan Bank Indonesia. / *Bank Jambi SBU has presented information reports and activities to the Board of Directors and Bank Indonesia.* **Peringkat / *Rank* : 2** 1 | **2** | 3 | 4 | 5

3. UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan. / *UUS has announced Quarterly Published Financial Reports in Indonesian language newspapers which have broad circulation in accordance with the time stipulated in the provisions.*	Laporan keuangan publikasi UUS Bank Jambi dilaporkan menyatu dengan laporan triwulanan publikasi Bank Jambi Konvensional dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan mempunyai peredaran yang luas (Koran Jambi Independen, Jambi Ekpres, Tribun Jambi) . / *Bank Jambi UUS publication financial reports are reportedly integrated with the quarterly report of the Conventional Bank Jambi publication and published in an Indonesian language newspaper and have wide circulation (Independent Jambi Newspaper, Jambi Ekspres, Jambi Tribune).* **Peringkat / *Rank* : 1** **1** 2 3 4 5
PERINGKAT SUB FAKTOR / *SUB FACTOR RANK*	**PERINGKAT / *RANK***
PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI UUS / *APPLICATION OF TRANSPARENCY ON SBU CONDITION*	**1** 2 3 4 5

SUB FAKTOR / *SUB FACTOR* B. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE / REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE*	
KRITERIA/INDIKATOR/ *CRITERIA/INDICATOR*	**ANALISIS *SELF ASSESMENT/SELF ASSESSMENT ANALYSIS***
1. UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. / *SBU has prepared report on the implementation of GCG with the contents and scope of at least in accordance with applicable regulations.*	Bank Jambi UUS membuat laporan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. / *Bank Jambi SBU prepared GCG reports in accordance with applicable regulations.* **Peringkat / *Rank* : 2** 1 **2** 3 4 5
2. UUS telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG. / *SBU conducted a self assessment of GCG implementation.*	Telah melakukan *self assement* sesuai SE BI nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010. / *SBU has conducted a self assessment according to BI CL number 12/13 / DPbS on April 30, 2010* PERINGKAT /Rank : 2 1 **2** 3 4 5
3. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan, UUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut. / *In the event that there is an evaluation of the results of the GCG implementation self-assessment by Bank Indonesia, SBU has made improvements to the implementation of the GCG.*	Telah dilakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG. / *SBU has made improvements to the implementation of GCG.* **Peringkat / *Rank* : 2** 1 **2** 3 4 5
PERINGKAT SUB FAKTOR / *SUB FACTOR RANK*	**PERINGKAT / *RANK***
LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE / GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORT*	1 **2** 3 4 5

SUB FAKTOR / *SUB FACTOR* C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL / *ADEQUACY OF INTERNAL REPORTING*	
KRITERIA/INDIKATOR/ *CRITERIA/INDICATOR*	**ANALISIS *SELF ASSESMENT/SELF ASSESSMENT ANALYSIS***
1. UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal. / *SBU has complete internal reporting and is supported by a reliable SIM*	UUS Bank Jambi memiliki pelaporan yang lengkap sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. / *Bank Jambi's SBU has complete reporting in accordance with Bank Indonesia regulations and Financial Services Authority.* **Peringkat / *Rank* : 2** 1 **2** 3 4 5
2. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal. / *The availability of accurate and timely information that is supported by a reliable information system.*	Sistem informasi UUS Bank Jambi (T24) cukup memadai / *Bank Jambi SBU information system (T24) is adequate* **Peringkat / *Rank* : 2** 1 **2** 3 4 5

3. UUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. / *SBU has an information system that is supported by competent human resources.*	Sistem informasi UUS Bank Jambi Bank didukung sumber daya yang cukup kompeten. / *Bank Jambi SBU information system is supported by competent enough resources.* **Peringkat / *Rank* : 2**				
	1	**2**	3	4	5
4. UUS memiliki IT *security system* yang memadai. / *SBU has an adequate IT security system.*	*Core Banking* T24 Bank Jambi memiliki *security system* yang memadai. / *Bank Jambi's T24 Core Banking has an adequate security system.* **Peringkat / *Rank* : 2**				
	1	**2**	3	4	5

PERINGKAT SUB FAKTOR / *SUB FACTOR RANK*	**PERINGKAT / *RANK***				
KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL / *ADEQUACY OF INTERNAL REPORTING*	1	**2**	3	4	5

PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL / *EVALUATION OF RATING FACTORS TRANSPARENCY OF SHARIAH BUSINESS UNIT CONDITIONS, GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORT AND INTERNAL REPORTING*

PERINGKAT SUB FAKTOR / *SUB-FACTOR RATINGS*	**PERINGKAT / *RANK***				
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI / *UUS APPLICATION OF SBU TRANSPARENCY CONDITIONS*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
B. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE/ REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE*	1	**2**	3	4	5
C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL / *ADEQUACY OF INTERNAL REPORTING*	1	**2**	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR / *FACTORS RATING*	1	**2**	3	4	5

KESIMPULAN / *CONCLUSION*:

1. Bank Jambi UUS telah menyampaikan informasi yang berhubungan dengan sasaran, strategi, kebijakan manajemen dan kinerja UUS secara keseluruhan :
   a. Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melalui penyusunan rencana bisnis bank secara tahunan, *road map* untuk jangka panjang, LBUS secara bulanan, LBBUS secara mingguan, LHBUS secara harian.
   b. Laporan Publikasi triwulanan dimedia masa,
2. Bank Jambi UUS memiliki pelaporan internal yang cukup lengkap didukung sepenuhnya oleh *Core Banking* Syariah yang memadai, *core banking* (T24) yang digunakan syariah juga digunakan oleh konvensional sebagai induknya.
3. Sistem Informasi yang dimiliki UUS Bank Jambi didukung oleh ketersediaan SDM, namun kempuan SDM yang ada perlu ditingkatkan lagi dengan pelatihan yang berkesinambungan.

1. *Bank Jambi SBU has submitted information relating to the objectives, strategies, management policies and overall performance of SBU:*
   a. *To Financial Services Authority dan Bank Indonesia through the preparation of an annual bank business plan, road map for the long term, LBUS on a monthly basis, LBBUS on a weekly basis, LHBUS on a daily basis.*
   b. *Quarterly Publication Reports at mass media.*
2. *Bank Jambi SBU has a fairly complete internal reporting fully supported by adequate Syariah Core Banking, core banking (T24) used by sharia is also used by conventional as its parent.*
3. *The Information System owned by Bank Jambi SBU is supported by the availability of HR, but the capabilities of existing HR are enhanced by on going training.*

Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan
Report on Publication of Risk Exposure and Capital

Umum/General - Ukuran Utama *(Key Metrics)* (KM1)

No.	Deskripsi/*Description*	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20
	Modal yang Tersedia (nilai)/*Available capital (amounts)*					
1	Modal Inti Utama (CET1)/*Common Equity Tier 1 (CET1)*	1.748.007	1.711.479	1.579.685	1.513.277	1.581.918
2	Modal Inti/*Tier 1*	1.748.007	1.711.479	1.579.685	1.513.277	1.581.918
3	Total Modal/*Total Capital*	1.821.220	1.785.508	1.655.311	1.587.079	1.653.628
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)/*Risk-Weighted Assets (Amounts)*					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)/*Total Risk-Weighted Assets (RW A)*	7.177.024	7.246.730	7.372.882	7.225.679	6.977.334
	Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR/*Risk-Based Capital Ratios as A Percentage of RWA*					
5	Rasio CET1 (%)/*CET1 ratio (%)*	24,36%	23,62%	21,43%	20,94%	22,67%
6	Rasio Tier 1 (%)/*Tier 1 ratio (%)*	24,36%	23,62%	21,43%	20,94%	22,67%
7	Rasio Total Modal (%)/*Total capital ratio (%)*	25,38%	24,64%	22,45%	21,96%	23,70%
	Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR/*Additional CET1 buffer requirements as a percentage of RWA*					
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)/*Capital conservation buffer (2.5% from RWA) (%)*	0	0	0	0	0
9	Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%)/*Countercyclical Buffer (0-2.5% from RW A) (%)*	0	0	0	0	0
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)/*Capital Surcharge for Systemic Bank (1%-2.5%) (%)*	0	0	0	0	0
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)/*Total of bank CET1 specific buffer requirements (%) (row 8 + row 9 + row 10)*	0	0	0	0	0
12	Komponen CET1 untuk buffer/*CET1 Component for buffer*	16,38%	15,64%	13,45%	12,96%	14,70%
	Rasio pengungkit sesuai Basel III/*Basel III leverage ratio*					
13	Total Eksposur/*Total Exposure*	13.133.256	13.084.255	13.321.109	12.316.921	11.442.668
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)/*Leverage Ratio, including the impact from the adjustment of the temporary exemption from account with Bank Indonesia in regards with the fulfill of stipulated Minimum Reserve Requirement (if any)*	13,31%	13,08%	11,86%	12,29%	13,82%
14a	Nilai Rasio pengungkit sesuai dengan Basel III dengan adanya Model Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 secara Penuh. (%) (baris 2a/baris13)/ *Leverage Ratio in accordance with Basel III with the Full Expected Credit Loss Model in accordance with PSAK 71. (%) (line 2a/line13)*					
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)/*Leverage Ratio, excluding the impact from the adjustment of the temporary exemption from account with Bank Indonesia in regards with the fulfill of stipulated Minimum Reserve Requirement (if any)*	13,31%	13,08%	11,86%	12,29%	13,82%

No.	Deskripsi/*Description*	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset Securities Financing Transaction (SFT) secara gross/*Leverage Ratio, including the impact of adjustment of the temporary exemption from account with Bank Indonesia in regards with the fulfill of stipulated Minimum Reserve Requirement (if any), which already included the average from gross asset carrying value Securities Financing Transaction (SFT)*	13,31%	13,08%	11,86%	12,29%	13,82%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross/*Leverage Ratio, excluding the impact of adjustment of the temporary exemption from account with Bank Indonesia in regards with the fulfill of stipulated Minimum Reserve Requirement (if any), which already included the average from gross asset carrying value Securities Financing Transaction (SFT)*	13,31%	13,08%	11,86%	12,29%	13,82%
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)/*Liquidity Coverage Ratio (LCR)*					
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)/*Total high-quality liquid assets (HQLA)*					
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow)/*Total net cash outflow*					
17	LCR (%)/*LCR ratio (%)*					
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)/*Net Stable Funding Ratio (NSFR)*					
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)/*Total available stable funding*					
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)/*Total required stable funding*					
20	NSFR (%)/*NSFR ratio (%)*					

Analisis Kualitatif/*Qualitative Analysis*

Modal Inti Utama (CET 1) menunjukkan tren meningkat sampai dengan triwulan IV tahun 2021, peningkatan Modal Inti Utama seiring dengan peningkatan laba berjalan yang merupakan komponen utama CET 1. Dengan adanya peningkatan CET 1 maka Modal Bank juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.

The Bank's Common Equity Tier 1 (CET 1) shows an increasing trend until the fourth quarter of 2021, the increase in CET 1 is in line with the increase in current profit which is the main component of CET 1. With the increase in CET 1, the Bank's Capital also increases compared to the previous quarter, while Risk-Weighted Assets (RWA) tended to decline compared to the previous quarter.

Umum - Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan Mapping pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (LI1) / *General - Differences between Consolidated Scope and Mapping on Financial Statements according to Financial Accounting Standards with Risk Category according to Financial Services Authority Regulations for Risk Category (LI1)*

Dalam jutaan rupiah / *In Million Rupiah*

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan / *Carrying values as reported in published financial statements*	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian / *Carrying value based on prudent principle*	Nilai tercatat masing-masing risiko/*Carrying values of items*				
			Sesuai kerangka risiko kredit/ *Subject to credit risk framework*	Sesuai kerangka counterparty credit risk/ *Subject to counterparty credit risk framework*	Sesuai kerangka sekuritisasi/ *Subject to the securitisation framework*	Sesuai kerangka risiko pasar/ *Subject to the market risk framework*	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal/*Not subject to capital requirements or subject to deduction from capital*
Indonesia							
Aset/*Assets*							
Kas/*Cash*	321.828		321.828	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia/ *Placements with Bank Indonesia*	816.086		816.086	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain/ *Placements with other banks*	510.985		510.985	-	-	-	-
Tagihan spot dan derivative/ *Spot and derivative*	-			-	-	-	-
Surat berharga yang dimiliki/*Securities*	2.233.265		2.233.265	-	-	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)/*Securities sold under repurchase agreements (repo)*	-		-	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)/*Claims from securities purchased under resale agreements (reverse repo)*	142.550,8		142.550,8	-	-	-	-
Tagihan Akseptasi/*Acceptance Receivables*	-		-	-	-	-	-
Kredit dan pembiayaan yang diberikan/*Loans*	8.193.508,6		8.193.508,6	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah/*Sharia financing*	782.557,1		782.557,1	-	-	-	-
Penyertaan modal/*Equity Investments*	-		-	-	-	-	-
Aset keuangan lainnya/ *Other financial asset*	-		-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / *Impairment on financial assets*	(132.452)		-	-	-	-	-
Aset tidak berwujud/*Intangible assets*	5.331,5		-	-	-	-	5.332
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / *Accumulated amortization of intangible assets*	(4.841,28)		-	-	-	-	4.841
Aset tetap dan inventaris / *Fixed assets and equipment*	110.318,6		-	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / *Accumulated depreciation on fixed assets and equipment*	(58.419,11)		-	-	-	-	-

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan / *Carrying values as reported in published financial statements*	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian / *Carrying value based on prudent principle*	Nilai tercatat masing-masing risiko/*Carrying values of items*				
			Sesuai kerangka risiko kredit/ *Subject to credit risk framework*	Sesuai kerangka counterparty credit risk/ *Subject to counterparty credit risk framework*	Sesuai kerangka sekuritisasi/ *Subject to the securitisation framework*	Sesuai kerangka risiko pasar/ *Subject to the market risk framework*	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal/*Not subject to capital requirements or subject to deduction from capital*
Aset non produktif/*Non-productive assets*	9		-	-	-	-	9
Aset Lainnya/*Other assets*	195.616		-	-	-	-	-
Total Aset/*Total Asset*	13.116.343		13.000.781	-	-	-	10.182
Kewajiban/*Liabilities*							
Giro/*Demand Deposits*	3.114.419		-	-	-	-	3.114.419
Tabungan/*Saving Deposits*	2.087.578		-	-	-	-	2.087.578
Deposito/*Time Deposits*	5.397.626		-	-	-	-	5.397.626
Liabilitas kepada Bank Indonesia/ *Liabilities to Bank Indonesia*	-		-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain/*Liabilities to other banks*	314.503,50		-	-	-	-	314.503
Liabilitas spot dan derivatif/*forward Spot and derivative/forward liabilities*	-		-	-	-	-	-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) /*Securities sold under repurchase agreements (repo) liabilities*	-		-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi/ *Acceptance liabilities*	-		-	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan/ *Securities issued*	-		-	-	-	-	-
Pinjaman/pembiayaan *yang diterima/ Borrowings*	14.830,00		-	-	-	-	14.830
Setoran jaminan/*Margin deposits*	1.728,75		-	-	-	-	1.729
Liabilitas antar kantor/ *Interbranch liabilities*	-		-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya/*Other liabilities*	-		-	-	-	-	-
Total liabilitas/*Total Liabilities*	10.930.685		-	-	-	-	10.930.685

Analisis Kualitatif/*Qualitative Analysis*

Tidak terdapat perbedaan antara nilai tercatat dalam Publikasi Laporan Keuangan dan nilai tercatat dalam prinsip kehati-hatian disebabkan karena Bank tidak memiliki anak perusahaan berupa asuransi. Aset bank yang terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, pinjaman yang diberikan dan pembiayaan syariah serta aset tetap/inventaris dan aktiva non produktif terekspose risiko kredit sedangkan aset lainnya tidak termasuk dalam persyaratan modal. Bank tidak terekspos risiko pasar karena bank tidak memiliki surat berharga dalam *trading book*

There is no difference between the carrying amount in the Published Financial Statements and the carrying amount under the prudent principle because the Bank does not have a subsidiary in the form of insurance. Bank assets consisting of cash, placements with Bank Indonesia, placements with other banks, securities, loans and sharia financing as well as fixed assets/inventory and non-earning assets are exposed to credit risk while other assets are not included in the capital requirements. The bank is not exposed to market risk because the bank does not have securities in the trading book

Umum - Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Nilai Eksposur sesuai dengan ketentuan OJK (LI2). / ***General - The main difference between the Carrying Value according to Financial Accounting Standards and the Exposure according to OJK provisions (LI2).***

Dalam jutaan rupiah / *In Million Rupiah*

	Total	Item sesuai:			
		Kerangka risiko kredit/ *Credit Risk Framework*	Kerangka sekuritisasi / *Securitisation Framework*	Kerangka Counterparty credit risk / *Counterparty Credit Risk Framework*	Kerangka risiko pasar / *Market Risk Framework*
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)/*Asset carrying value amount under scope of regulatory consolidation (as per template LI1)*	13.000.781	13.000.781	-	-	-
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)/ *Liabilities carrying value amount under regulatory scope of consolidation (as per template LI1)*	10.930.685	-	-	-	-
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian/*Total net amount under regulatory scope of consolidation*	2.070.096	13.000.781	-	-	-
Nilai rekening administrative/*Off-balance sheet amounts*	122.018	5.779			
Perbedaan valuasi/*Differences in valuations*	-	-	-	-	-
Perbedaan antara netting rules, selain dari yang termasuk pada baris 2./*Differences due to different netting rules, other than those already included in row 2*	-	-	-	-	-
Perbedaan provisi/*Differences due to consideration of provisions*	-	-	-	-	-
Perbedaan prudential filters/*Differences due to prudential filters*	-	-	-	-	-
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian/ *Exposure amounts considered in accordance with the consolidated scope of prudential provisions*	2.185.658	13.000.781	-	-	-
Analisis Kualitatif / *Qualitative Analysis*					
Bank tidak memiliki anak perusahaan berupa asuransi sehingga tidak terdapat perbedaan antara antara eksposur sesuai ketentuan kehati-hatian dengan *carrying values* sesuai standar akuntansi keuangan *The Bank does not have a subsidiary in the form of insurance so that there is no difference between exposure according to prudential provisions and carrying values according to financial accounting standards.*					

Umum - Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK (LIA)

Tidak terdapat perbedaan antara nilai tercatat sesuai standar akuntansi yang dilaporkan pada laporan keuangan dan nilai tercatat dalam prinsip kehati-hatian disebabkan karena Bank tidak memiliki anak perusahaan berupa asuransi. Dalam menentukan nilai tercatat yang digunakan untuk masing-masing risiko, bank mengacu pada pengaturan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.

General - Explanation of the Difference between Exposure Value according to Financial Accounting Standards and OJK Regulations (LIA)

There is no difference between the carrying amount according to the accounting standards reported in the financial statements and the carrying amount under prudential principles since the Bank does not have a subsidiary engaging insurance business. In determining the carrying amount used for each risk, the bank refers to the provisions of the Financial Services Authority regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk.

Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1) – per 31 Desember 2021 /
Capital - Capital Composition (CC1) – as of 31 December 2021

Dalam jutaan rupiah / *In Million Rupiah*

No	Komponen/*Component*	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)/*No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*
	CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor/*Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves*		
1	Saham biasa (termasuk stock surplus)/*Common Stocks (incl. Stock Surplus)*	770.820	
2	Laba ditahan/*Retained Earnings*	314.154	
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)/*Accumulated other comprehensive income (and other reserves)*	738.118	
4	Modal yang termasuk *phase out* dari CET1/*Capital that include phase out of CET1*	-	
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan/*Non-Controlling Interests that can be taken into account*	-	
6	CET1 sebelum *regulatory adjustment*/*Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments*	1.823.091	
	CET 1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)/*Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments*		
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book* / *The difference in the amount of the fair value adjustment of the financial instrument in the trading book*	-	
8	Goodwill	-	
9	Aset tidak berwujud lainnya *(selain Mortgage-Servicing Rights) / Other intangibles asset (other than mortgage-servicing rights)*	490,26	
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari *future profitability*/*Deferred tax assets that rely on future profitability*	-	
11	*Cash-flow hedge reserve*	-	
12	*Shortfall on provisions to expected losses*	-	
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi/*Securitisation gain on sale*	-	
14	Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)/*Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities*	-	
15	Aset pensiun manfaat pasti/*Defined-benefit pension fund net assets*		
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di Laporan Posisi Keuangan)/ *Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)*	-	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain/ *Reciprocal cross-holdings in common equity tier 1 in other entities*	-	
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)/*Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)*	-	

No	Komponen/*Component*	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)/*No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)/*Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)*	-	
20	*Mortgage servicing rights*	-	
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak)/*Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)*	-	
22	**Jumlah melebihi batasan 15% dari:** ***Amount exceeding the 15% threshold of which:***	**-**	
23	investasi signifikan pada saham biasa *financials* *significant investments in the common stock of financials*	-	
24	*mortgage servicing rights*	-	
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer/ *deferred tax assets arising from temporary differences*	-	
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional/ *National specific regulatory adjustments*	-	
26a.	Selisih PPKA dan CKPN/ *Difference between PPA and CKPN*	55.221	
26b.	PPKA non produktif/ *PPA from non-productive assets*	0	
26c.	Aset Pajak Tangguhan/ *Deferred tax assets*	19.373	
26d.	Penyertaan/ *Investments*	-	
26e.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi/ *Capital shortfall in insurance subsidiary*	-	
26f.	Eksposur sekuritisasi/ *Securitisation exposure*	-	
26g.	Lainnya/ *Others*	-	
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya/ *Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions*	-	
28	**Jumlah pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap CET 1/ *Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1***	**75.084**	
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang/ *Common Equity Tier 1 capital (CET1)*	1.748.007	
	Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen/ *Additional Tier 1 capital: instruments*		
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*)/ *Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus*	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi/*of which: classified as equity under applicable accounting standards*	-	
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi/*classified as liabilities under applicable accounting standards*	-	
33	Modal yang termasuk *phase out* dari AT 1/*Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1*	-	
34	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi/*Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)*	-	
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*/*instruments issued by subsidiaries subject to phase out*	-	
36	**Jumlah AT 1 sebelum *regulatory adjustment*/ *Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments***	**-**	
	Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang *(Regulatory Adjustment)*/ *Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments*		
37	Investasi pada instrumen AT 1 sendiri/ *Investments in own Additional Tier 1 instruments*	-	
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain/*Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments*	-	
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)/*Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)*	-	

No	Komponen/*Component*	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)/*No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*
40	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi *short* yang diperkenankan)/*Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)*	-	
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional/ *National specific regulatory adjustments*	-	
	a. Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain/*Investments in AT1 instruments in other banks*	-	
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya /*Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions*	-	
43	**Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap AT 1/ *Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital***	**-**	
44	**Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang/*Additional Tier 1 capital after deduction factor***	**-**	
45	**Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1)/ *Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1)***	**1.748.007**	
	Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan/ *Tier 2 capital: instruments and provisions*		
46	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock surplus)/*Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus*	-	
47	Modal yang yang termasuk phase out dari Tier 2/*Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2*	-	
48	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi/ *Tier 2 instruments issued by subsidiaries and is recognized in the calculation of the CAR on a consolidated basis*	-	
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out/ *Capital Instruments issued by subsidiaries subject to phase out*	-	
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit/ *PPKA general reserves for productive assets that must be calculated with a maximum amount of 1.25% of RWA for Credit Risk*	73.213	
51	**Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang/*Tier 2 capital before regulatory adjustments***	**73.213**	
	Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang *(Regulatory Adjustment)*		
52	Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri/ *Investments in own Tier 2 instruments*	-	
53	Kepemilikan silang pada instrumen Tier 2 pada entitas lain/ *Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments*	-	
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik) Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik) *Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (the previous value was set with a threshold of 5% but no longer meets the criteria (for Systemic banks)* *Investments in other TLAC liabilities of banking, financial and insurance entities that fall outside the scope of regulatory consolidation and, for which the bank does not own more than 10% of the issued entity's common stock: amounts previously designated to the 5% limit but which are no longer qualify (only for G-SIBs Systemic Banks)*	-	
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi short yang diperkenankan)/ *Significant investments in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)*	-	
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional/*National specific regulatory adjustments*	-	
	a. *Sinking fund*	-	
	b. Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain/ *Investments in Tier 2 instruments in other banks*	-	
57	**Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) Modal Pelengkap/ *Total regulatory adjustments to Tier 2 capital***	**-**	
58	**Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah *regulatory adjustment*/ *Tier 2 capital after regulatory adjustment***	**73.213**	

No	Komponen/*Component*	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)/*No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)/*Total Capital (Tier 1 + Tier 2)*	1.821.220	
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)/ *Total risk weighted assets*	7.177.024	
	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal *(Capital Buffer)* Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM) and Additional Capital (Capital Buffer)		
61	Rasio Modal Inti Utama CET 1 (persentase terhadap ATMR)/*Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)*	24,36%	
62	Rasio Modal Inti Tier 1 (persentase terhadap ATMR)/ *Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)*	24,36%	
63	Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR)/ *Total capital (as a percentage of risk weighted assets)*	25,38%	
64	*Buffer* (persentase terhadap ATMR)	16,38%	
65	*Capital Conservation Buffer*	0,00%	
66	*Countercyclical Buffer*	0,00%	
67	*higher loss absorbency requirement*	0,00%	
68	Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi Buffer (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi Buffer. *For conventional commercial banks: CET 1 available to meet Buffer (percentage to RWA)* *For branch offices of Banks domiciled overseas: The portion of Business Funds placed in CEMA (expressed as a percentage of RWA) available to meet the Buffer*		
	National minima (jika berbeda dari Basel 3)/ *National minima (if different from Basel 3)*		
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)/ *National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)*	-	
70	Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)/*National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)*	-	
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)/*National total capital minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)*	-	
	Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)/*Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)*		
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain/ *Non-significant investments in the capital of other financials*	-	
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan /*Significant investments in the common stock of financials*	-	
74	Mortgage servicing rights (net dari kewajiban pajak)/*Mortgage servicing rights (net of related tax liability)*	-	
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)/ *Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)*	-	
	Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2/ *Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2*		
76	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)/*Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)*	-	
77	*Cap* atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar /*Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach*	-	
78	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)/Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	-	
79	*Cap* atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB /*Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach*	-	
	Instrumen Modal yang termasuk *phase out* (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)/ *Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between 1 Jan 2018 and 1 Jan 2022)*		
80	Cap pada CET 1 yang temasuk *phase out/Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements*	-	
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di atas *cap setelah redemptions* dan *maturities*)/*Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	-	

No	Komponen/*Component*	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)/*No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*
82	Cap pada AT 1 yang temasuk *phase out/ Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements*	-	
83	**Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)/*Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)***	**-**	
84	Cap pada Tier 2 yang temasuk *phase out/Current cap on Tier 2 instruments subject to phase out arrangements*	-	
85	**Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)/*Amount excluded from Tier 2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)***	**-**	
Analisis Kualitatif/ *Qualitative Analysis*			
Komposisi permodalan Bank terdiri dari Modal inti (Tier 1) dan Modal pelengkap (Tier 2), Modal inti disumbangkan dari komponen modal disetor, cadangan umum, laba berjalan dan dana setoran modal, sedangkan modal pelengkap bersumber dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk. Modal dibandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) menghasilkan rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sebesar 25,38% jauh diatas KPMM sesuai profil risiko yaitu 9%-10%. Kondisi ini mencerminkan bank memiliki modal yang kuat dalam mengcover kerugian akibat risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang. *The composition of the Bank's capital consists of Core Capital (Tier 1) and Supplementary Capital (Tier 2). Core capital is contributed from components of paid-up capital, general reserves, current profit and paid-in capital, while supplementary capital comes from PPA general reserves on mandatory productive assets. formed. Capital is compared to Risk Weighted Assets (RWA) resulting in a Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM) of 25.38%, far above the CAR according to the risk profile, which is 9%-10%. This condition reflects that the bank has strong capital in covering losses due to risks that will occur in the future.*			

Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1) – per 31 Desember 2021 / *Capital - Capital Composition (CC1) – as of 31 December 2021*

Dalam jutaan rupiah / *In Million Rupiah*

No	Komponen / *Component*	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) / *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1) *No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*
	CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor / *Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves*		
1	Saham biasa (termasuk stock surplus) / *Common Stocks (incl. Stock Surplus)*	770.820	
2	Laba ditahan / *Retained Earnings*	314.154	
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain) / *Accumulated other comprehensive income (and other reserves)*	738.118	
4	Modal yang termasuk phase out dari CET1 / *Capital that include phase out of CET1*	-	
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan / *Non-Controlling Interests that can be taken into account*	-	
6	CET1 sebelum regulatory adjustment / *Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments*	1.823.091	
	CET 1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment) / *Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments*		
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book / *The difference in the amount of the fair value adjustment of the financial instrument in the trading book*	-	
8	*Goodwill*	-	
9	Aset tidak berwujud lainnya (selain Mortgage-Servicing Rights) / *Other intangibles asset (other than mortgage-servicing rights)*	*490*	
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari future profitability / *Deferred tax assets that rely on future profitability*	-	
11	*Cash-flow hedge reserve*	-	
12	*Shortfall on provisions to expected losses*	-	
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi / *Securitisation gain on sale*	-	
14	Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA) *Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities*	-	
15	Aset pensiun manfaat pasti / *Defined-benefit pension fund net assets*	-	
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di Laporan Posisi Keuangan) / *Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)*	-	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain / *Reciprocal cross-holdings in common equity tier 1 in other entities*	-	

No	Komponen / *Component*	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) / *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1) *No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%) *Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)*	-	
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%) *Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)*	-	
20	*Mortgage servicing rights*	-	
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak) / *Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)*	-	
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari: / *Amount exceeding the 15% threshold of which:*	-	
23	investasi signifikan pada saham biasa financials / *significant investments in the common stock of financials*	-	
24	*mortgage servicing rights*	-	
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer / *deferred tax assets arising from temporary differences*	-	
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional / *National specific regulatory adjustments*	-	
	a. Selisih PPKA dan CKPN / *Difference between PPA and CKPN*	55.221	
	b. PPKA non produktif / *PPA from non-productive assets*	0	
	c. Aset Pajak Tangguhan / *Deferred tax assets*	19.373	
	d. Penyertaan / *Investments*	-	
	e. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi / *Capital shortfall in insurance subsidiary*	-	
	f. Eksposur sekuritisasi / *Securitisation exposure*	-	
	g. Lainnya / *Others*	-	
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya / *Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions*	-	
28	Jumlah pengurang (regulatory adjustment) terhadap CET 1/ *Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1*	75.084	
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang / *Common Equity Tier 1 capital (CET1)*	1.748.007	
	Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen / *Additional Tier 1 capital: instruments*	-	
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock surplus) / *Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus*	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi / *of which: classified as equity under applicable accounting standards*	-	
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi / *classified as liabilities under applicable accounting standards*	-	
33	Modal yang termasuk phase out dari AT 1 / *Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1*	-	
34	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi / *Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)*	-	
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out / *instruments issued by subsidiaries subject to phase out*	-	
36	Jumlah AT 1 sebelum regulatory adjustment / *Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments*	-	
	Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment) / *Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments*	-	
37	Investasi pada instrumen AT 1 sendiri / *Investments in own Additional Tier 1 instruments*	-	
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain / *Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments*	-	
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%) *Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)*	-	

No	Komponen / *Component*	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) / *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1) *No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*
40	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi short yang diperkenankan) *Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)*	-	
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional / *National specific regulatory adjustments*	-	
	a. Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain / *Investments in AT1 instruments in other banks*	-	
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya /*Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions*	-	
43	Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) terhadap AT 1 / *Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital*	-	
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang / *Additional Tier 1 capital after deduction factor*	1.748.007	
45	Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1) / *Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1)*	-	
	Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan / *Tier 2 capital: instruments and provisions*	-	
46	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*) / *Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus*	-	
47	Modal yang yang termasuk phase out dari Tier 2 / *Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2*	-	
48	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi / *Tier 2 instruments issued by subsidiaries and is recognized in the calculation of the CAR on a consolidated basis*	-	
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out / *Capital Instruments issued by subsidiaries subject to phase out*	-	
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit / *PPKA general reserves for productive assets that must be calculated with a maximum amount of 1.25% of RWA for Credit Risk*	73.213	
51	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang / *Tier 2 capital before regulatory adjustments*	73.213	
	Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang *(Regulatory Adjustment)*	-	
52	Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri / *Investments in own Tier 2 instruments*	-	
53	Kepemilikan silang pada instrumen Tier 2 pada entitas lain / *Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments*	-	
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik). Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik) *Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (the previous value was set with a threshold of 5% but no longer meets the criteria (for Systemic banks)* *Investments in other TLAC liabilities of banking, financial and insurance entities that fall outside the scope of regulatory consolidation and, for which the bank does not own more than 10% of the issued entity's common stock: amounts previously designated to the 5% limit but which are no longer qualify (only for G-SIBs Systemic Banks)*	-	
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (*net* posisi *short* yang diperkenankan) / *Significant investments in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)*	-	
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional / *National specific regulatory adjustments*	-	
	a. Sinking fund	-	
	b. Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain / Investments in Tier 2 instruments in other banks	-	
57	Jumlah faktor pengurang *(regulatory adjustment)* Modal Pelengkap / *Total regulatory adjustments to Tier 2 capital*	-	
58	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah *regulatory adjustment* / *Tier 2 capital after regulatory adjustment*	73.213	
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap) / *Total Capital (Tier 1 + Tier 2)*	1.821.220	
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) / *Total risk weighted assets*	7.177.024	

No	Komponen / *Component*	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) / *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1) *No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*
	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal *(Capital Buffer) /Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM) and Additional Capital (Capital Buffer)*		
61	Rasio Modal Inti Utama CET 1 (persentase terhadap ATMR) / *Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)*	24,36%	
62	Rasio Modal Inti Tier 1 (persentase terhadap ATMR) / *Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)*	24,36%	
63	Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR) / *Total capital (as a percentage of risk weighted assets)*	25,38%	
64	*Buffer* (persentase terhadap ATMR)	16,38%	
65	*Capital Conservation Buffer*	0,00%	
66	*Countercyclical Buffer*	0,00%	
67	*higher loss absorbency requirement*	0,00%	
68	Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi Buffer (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi *Buffer*. *For conventional commercial banks: CET 1 available to meet Buffer (percentage to RWA)* *For branch offices of Banks domiciled overseas: The portion of Business Funds placed in CEMA (expressed as a percentage of RWA) available to meet the Buffer*		
	National minima (jika berbeda dari Basel 3) / *National minima (if different from Basel 3)*	-	
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3) / *National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)*	-	
70	Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3) / *National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)*	-	
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3) / *National total capital minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)*		
	Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko) / *Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)*		
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain / *Non-significant investments in the capital of other financials*	-	
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan /*Significant investments in the common stock of financials*	-	
74	Mortgage servicing rights (*net* dari kewajiban pajak) / *Mortgage servicing rights (net of related tax liability)*	-	
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (*net* dari kewajiban pajak) / *Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)*	-	
	Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2 / *Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2*		
76	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan *cap*) / *Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)*	-	
77	*Cap* atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar /*Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach*	-	
78	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap) / *Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)*	-	
79	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB /*Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach*	-	
	Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022) / *Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between 1 Jan 2018 and 1 Jan 2022)*		
80	Cap pada CET 1 yang temasuk *phase out* / *Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements*	-	
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities) / *Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	-	
82	Cap pada AT 1 yang temasuk *phase out* / *Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements*	-	
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya cap (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*) / *Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	-	
84	Cap pada Tier 2 yang temasuk *phase out* / *Current cap on Tier 2 instruments subject to phase out arrangements*	-	
85	Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*) / *Amount excluded from Tier 2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	-	

Rekonsiliasi Permodalan (CC2) – per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 / *Capital Reconciliation (CC2) – as of 31 December 2021 and 31 December 2020*

Dalam jutaan rupiah / *In Million Rupiah*

No	Pos-pos / *Post*	Laporan Publikasi Posisi Keuangan / *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi keuangan konsilidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian / *Statement of consolidated financial position with a consolidated scope based on prudential provisions*	Laporan Publikasi Posisi Keuangan / *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi keuangan konsilidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian / *Statement of consolidated financial position with a consolidated scope based on prudential provisions*
		31 Des. 2021	31 Des. 2021	31 Des. 2020	31 Des.2020
	ASET / *Assets*				
1	Kas / *Cash*	321.828	321.828	244.279	244.279
2	Penempatan pada Bank Indonesia / *Placements with Bank Indonesia*	816.086	816.086	810.450	810.450
3	Penempatan Pada Bank lain / *Placements with other banks*	510.985	510.985	65.955	65.955
4	Tagihan Spot dan Derivatif / *Spot and derivative receivables*	-	-	-	-
5	Surat Berharga / *Securities*	-	-	-	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/ rugi | *Measured at fair value through profit/loss statement*	-	-	-	-
	i. Diperdagangkan / *Traded*	-	-	-	-
	ii. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar / *Set to be measured at fair value*	-	-	1.585.077	1.585.077
	b. Tersedia untuk dijual / *Available for sale*	2.066.190	2.066.190	1.063.436	1.063.436
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo / *Held to maturity*	167.075	167.075	521.641	521.641
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang / *Loans and receivables*	-	-	-	-
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) / *Securities sold with agreements to repurchase (Repo)*	-	-	-	-
7	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) / *Claims from securities purchased under resale agreements (reverse repo)*	142.551	142.551	-	-
8	Tagihan Akseptasi / *Acceptance receivables*	-	-	-	-
9	Kredit yang diberikan / *Loans*	-	-	-	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	-	-
	i. Diperdagangkan / *Traded*	-	-	-	-
	ii. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar / *Set to be measured at fair value*	-	-	-	-
	b. Tersedia untuk dijual / *Available for sale*	-	-	-	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo / *Held to maturity*	-	-	8.494.724	8.494.724
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang / *Loans and receivables*	8.193.509	8.193.509	7.674.680	7.674.680
10	Pembiayaan Syariah / *Sharia financing/receivables*	782.557	782.557	820.044	820.044
11	Penyertaan / *Equity Investments*	-	-	-	-
12	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan *-/-Impairment on financial assets -/-*	-	-	-	-

No	Pos-pos / *Post*	Laporan Publikasi Posisi Keuangan / *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi keuangan konsilidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian / *Statement of consolidated financial position with a consolidated scope based on prudential provisions*	Laporan Publikasi Posisi Keuangan / *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi keuangan konsilidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian / *Statement of consolidated financial position with a consolidated scope based on prudential provisions*
		31 Des. 2021	31 Des. 2021	31 Des. 2020	31 Des.2020
	a. Surat Berharga Yang Dimiliki / *Securities*	(0)	-0	4	4
	b. Kredit Yang Diberikan / *Loans*	(132.443)	-132.443	91.141	91.141
	c. Lainnya / *Others*	(0)	-0	0	0
13	Aset Tidak Berwujud / *Intangible Assets*	5.332	5.332	4.844	4.844
	Akumulasi Amortisasi -/- *Accumulated amortization -/- Non-productive assets a. b. c. d. Other assets*	(4.841)	-4.841	4.763	4.763
14	Aset Tetap dan Inventaris / *Fixed assets and equipment*	110.319	110.319	106.602	106.602
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/- *Accumulated depreciation on fixed assets and equipment -/-*	(58.419)	-58.419	60.064	60.064
15	Properti Terbengkalai / *Abandoned properties*	9	9	9	9
16	Aset yang diambil alih / *Foreclosed assets*	-	-	1.581	1.581
17	Rekening Tunda / *Suspense accounts*	-	-	-	-
18	Aset Antarkantor / *Interbranch assets*	-	-	-	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia/ *Conducting operational activities in Indonesia 03)*	-	-	0	0
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia/*Conducting operational activities outside Indonesia 04)*	-	-	-	-
19	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/- *Allowance for Impairment Losses on Other Assets -/-*	(9)	-9	9	9
20	Aset Pajak Tangguhan / *Deferred tax assets*	19.373	19.373	8.979	8.979
21	Rupa-Rupa Aset 05) / *Miscellaneous Assets 05)*	176.243	176.243	217.833	217.833
	TOTAL ASET / *TOTAL ASSET*	**13.116.343**	**13.116.343**	**11.384.351**	**11.384.351**
	LIABILITAS DAN EKUITAS / *LIABILITY AND EQUITY*				
1	Giro / *Current Account*	3.027.514	3.027.514	1.929.638	1.929.638
2	Tabungan / *Savings*	1.985.558	1.985.558	1.749.798	1.749.798
3	Simpanan Berjangka / *Time Deposit*	4.993.956	4.993.956	4.826.935	4.826.935
4	Dana Investasi Revenue Sharing / *Revenue Sharing Investment Fund*	-	-	-	-
	a. Giro / *Current Account*	86.905	86.905	56.418	56.418
	b. Tabungan / *Savings*	102.020	102.020	82.693	82.693
	c. Simpanan Berjangka / *Time Deposit*	403.670	403.670	740.360	740.360
	d. Lainnya / *Other*	-	-	9.385.842	9.385.842
5	Kewajiban Kepada Bank Indonesia / *Liability to Bank Indonesia*	-	-	-	-
6	Kewajiban Kepada Bank lain / *Liabilities To Other Banks*	314.503	314.503	10.971	10.971
7	Kewajiban Spot dan Derivatif / *Spot and Derivatives Liabilities*	-	-	-	-

No	Pos-pos / *Post*	Laporan Publikasi Posisi Keuangan / *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi keuangan konsilidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian / *Statement of consolidated financial position with a consolidated scope based on prudential provisions*	Laporan Publikasi Posisi Keuangan / *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi keuangan konsilidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian / *Statement of consolidated financial position with a consolidated scope based on prudential provisions*
		31 Des. 2021	31 Des. 2021	31 Des. 2020	31 Des.2020
8	Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) / *Liability for Securities sold under agreements to repurchase (repo)*	-	-	-	-
9	Kewajiban Akseptasi / *Acceptance Liability*	-	-	-	-
10	Surat Berharga yang diterbitkan / *Securities issued*	-	-	-	-
11	Pinjaman yang diterima / *Loans accepted*	14.830	14.830	30.000	30.000
12	Setoran Jaminan / *Collateral Deposit*	1.729	1.729	2.295	2.295
13	Kewajiban Antarkantor / *Inter-branch Liability*	-	-	-	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia/ *Conducting operational activities in Indonesia 06)*	-	-	-	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia / *Conducting operational activities outside Indonesia 07)*	-	-	-	-
14	Kewajiban Pajak Tangguhan / *Deferred Tax Liability*	-	-	-	-
15	Rupa-rupa Kewajiban / *Miscellaneous Liability 08)*	250.551	250.551	196.051	196.051
16	Dana Investasi Profit Sharing / *Profit Sharing Investment Fund*	-	-	-	-
17	Modal Pinjaman / *Loan Capital*	-	-	-	-
18	Modal Disetor / *Paid-up capital*	-	-	-	-
	a. Modal dasar / *Authorized capital* - *Agio* - *Disagio* - *Donation Capital* - *Adjustments due to the translation of financial statements* i. *Adding Factor* ii. *Reducing Factor*	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	b. Modal yang belum disetor -/- *Unpaid capital -/-*	2.229.184	2.229.184	2.231.684	2.231.684
	c. Saham yang dibeli kembali *(treasury stock) -/- Shares repurchased (treasury stock) -/-*	-	-	-	-
19	Tambahan modal disetor / *Additional paid-in capital*	-	-	-	-
	a. *Agio*	-	-	-	-
	b. *Disagio -/-*	-	-	-	-
	c. Modal Sumbangan / *Donation Capital*	-	-	-	-
	d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan / *Adjustments due to the translation of financial statements*	-	-	-	-
	i. Faktor Penambah / *Adding Factor*	-	-	-	-
	ii. Faktor Pengurang -/- / *Deducting Factor -/-*	-	-	-	-
	e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya / *Other comprehensive income (loss)*	-	-	-	-
	i. Keuntungan / *Profit*	19.921	19.921	-	-
	ii. Kerugian / *Loss -/-*	2.495	2.495	17.052	17.052
	f. Lainnya / *Others*	-	-	-	-

No	Pos-pos / *Post*	Laporan Publikasi Posisi Keuangan / *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi keuangan konsilidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian / *Statement of consolidated financial position with a consolidated scope based on prudential provisions*	Laporan Publikasi Posisi Keuangan / *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi keuangan konsilidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian / *Statement of consolidated financial position with a consolidated scope based on prudential provisions*
		31 Des. 2021	31 Des. 2021	31 Des. 2020	31 Des.2020
	i. Faktor Penambah / *Adding Factor*	-	-	-	-
	a. Waran yang diterbitkan / *Issued warrants*	-	-	-	-
	i. Berbasis saham biasa / *Common stock based*	-	-	-	-
	ii. Lainnya / *Others*	-	-	-	-
	b. Opsi saham / *Stock Option*	-	-	-	-
	i. Berbasis saham biasa / Berbasis saham biasa / *Common stock based*	-	-	-	-
	ii. Berbasis saham biasa yang khusus diterbitkan dalam rangka program kompensasi pegawai/manajemen | *Based on common stock which is specially issued in the framework of employee/management compensation program*	-	-	-	-
	iii. Lainnya / *Others*	-	-	-	-
	c. Lainnya / *Others*	588	588	588	588
	ii. Faktor Pengurang / *Deduuction Factors*	-	-	-	-
	Lainnya / *Others (-/-)*	-	-	-	-
	g. Dana setoran modal / *Capital deposit funds*	3	3	3	3
20	Selisih penilaian kembali aset tetap / *Difference of revaluation of fixed assets*	-	-	-	-
21	Cadangan / *Reserve*	-	-	-	-
	a. Cadangan Umum / *General Reserve*	720.692	720.692	614.558	614.558
	b. Cadangan Tujuan / *Appropriated Reserve*	111.429	111.429	111.429	111.429
22	Laba/rugi | *Profit / Loss*	-	-	-	-
	a. Tahun-tahun lalu / *Previous Years*	-	-	-	-
	i. Laba / *Profit*	-	-	-	-
	ii. Rugi / *Loss -/-*	-	-	-	-
	b. Tahun berjalan / *Current Year 02)*	-	-	-	-
	i. Laba / *Profit*	314.154	314.154	281.350	281.350
	ii. Rugi / *Loss -/-*	-	-	-	-
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS / *TOTAL OF LIABILITIES AND EQUITIES*	**13.096.423**	**13.096.423**	**20.770.193**	**20.770.193**

Permodalan – Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC – Eligible (CCA) / *Capital – Key Features of Capital Instruments and TLAC Instruments – Eligible (CCA)*

Dalam jutaan rupiah / *In Million Rupiah*

No	Indonesia	Informasi Kuantitatif/Kualitatif Desember 2021 *Information Quantitative/Qualitative December 2021*	Informasi Kuantitatif/Kualitatif Desember 2020 *Information Quantitative/Qualitative December 2020*
1	Penerbit / *Issuer*	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
2	Nomor identifikasi / *Identification Number*	A TT	B TT
3	Hukum yang digunakan / *Law*	Hukum Indonesia / *Indonesian Law*	Hukum Indonesia / *Indonesian Law*
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM / *Instruments treatment based on KPMM*		
4	Pada saat masa transisi / *During Transition*	-	-
5	setelah masa transisi / *Post Transition*	CET 1	CET 1
6	Apakah instrumen eligible untuk Individu / Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu *Is it eligible to Individual/Consolidation or Consolidation and Individual*	-	-
7	Jenis Instrumen / *Type of Instrument*	Saham biasa / *Common Stock*	Saham biasa / *Common Stock*
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM / *Amount recognized in KPMM calculation*	766.596	4.220,5
9	Nilai par dari instrument / *Par value from the instrument*	-	-
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan / *Classification based on Financial Accounting Standard*	Ekuitas / *Equity*	Ekuitas / *Equity*
11	Tanggal penerbitan / *Issuance Date*	07/09/2006	05/03/2020
12	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo / *without maturity date (perpertual) or with maturity date Maturity date*	Perpetual	Perpetual
13	Tanggal jatuh tempo / *Maturity date*	Tidak ada tanggal jatuh tempo / *Without maturity date*	Tidak ada tanggal jatuh tempo / *Without maturity date*
14	Eksekusi *call option* atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan / *Exercising call options with the approval of the Financial Services Authority*	Tidak / *No*	Tidak / *No*
15	Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan *call option* lainnya (bila ada) / *Call option date, withdrawal amount and other call option terms (if any)*	-	-
16	*Subsequent call option*	-	-
	Kupon / dividen *Coupons / dividends*		
17	Dividen/ kupon dengan bunga tetap atau floating *Dividend/coupon with fixed or floating interest*	*Floating*	*Floating*
18	Tingkat dari *coupon rate* atau index lain yang menjadi acuan *The level of other coupon rate or index that serve as reference*	-	-
19	Ada atau tidaknya *dividend stopper / Whether or not there is a dividend stopper*	Tidak / *No*	Tidak / *No*
20	Fully discretionary; partial atau mandatory / Fully discretionary; partial or mandatory	Partial	Partial

No	Indonesia	Informasi Kuantitatif/Kualitatif Desember 2021 *Information Quantitative/Qualitative December 2021*	Informasi Kuantitatif/Kualitatif Desember 2020 *Information Quantitative/Qualitative December 2020*
21	Apakah terdapat fitur *step up* atau insentif lain / *Is there a step up feature or other incentives?*	Tidak / *No*	Tidak / *No*
22	Non-kumulatif atau kumulatif / *Non-cumulative or cumulative*	Non-kumulatif / *Non - cumulative*	Non-kumulatif / *Non - cumulative*
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi / *Convertible or non-convertible*	Tidak dapat dikonversi / *non-convertible*	Tidak dapat dikonversi / *non-convertible*
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan *trigger point*-nya / *If convertible, please state the trigger point*	-	-
25	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian / *If convertible, is it whole or part*	-	-
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana *rate* konversinya / *If it is convertible, what is the conversion rate*	-	-
27	Jika dapat dikonversi; apakah *mandatory* atau *optional* / *If convertible; is it mandatory or optional?*	-	-
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya / *If convertible, state the type of conversion instrument*	-	-
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan *issuer of instrument it converts into / If non-convertible converted, mention the issuer of the instrument it converts into*	-	-
30	Fitur *write-down / Write-down feature*	Tidak / *No*	Tidak / *No*
31	Jika terjadi *write-down*, sebutkan *trigger-nya / If a write-down occurs, state the trigger*	-	-
32	Jika terjadi *write-down*, apakah penuh atau sebagian / *If there is a write-down, is it full or partial*	-	-
33	Jika terjadi *write down*; permanen atau temporer / *If there is a write down; is it permanent or temporary*	-	-
34	Jika terjadi *write down* temporer, jelaskan mekanisme *write-up / If a temporary write down occurs, explain the write-up mechanism*	-	-
34a	Tipe subordinasi / *Subordination type*	-	-
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi /*Instrument hierarchy at the time of liquidation*	Didahulukan dari Pemegang Saham seri B / *Priority to Series B Shareholders*	Setelah Terpenuhinya Pemegang Saham seri A / *After Fulfillment of Series A Shareholders*
36	Apakah terdapat fitur yang *non-compliant / Are there non-compliant features*	Tidak / *No*	Tidak / *No*
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang *non-compliant /If Yes, please describe non-compliant features*	-	-

Pengungkapan Kualitatif Mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan

Struktur permodalan Bank Jambi terdiri dari:
- Modal inti (Tier 1), modal Bank Jambi didominasi oleh modal inti dengan kontribusi terbesar yaitu sebesar Rp1,74triliun atau 95,96% terhadap total modal Bank (Rp1,81Triliun).
- Modal pelengkap (Tier 2) sebagian besar merupakan cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dibentuk (maksimum 1,25% dari ATMR untuk risiko kredit). Modal pelengkap tercatat sebesar Rp73,21miliar atau 4,04% dari total modal Bank.

Qualitative Disclosure on Capital Structure and Capital Adequacy

The capital structure of Bank Jambi consists of:
- *Core capital (Tier 1), Bank Jambi's capital is dominated by core capital with contribution of Rp1.74trillion or 95.96% of the Bank's total capital (Rp1.81Trillion).*
- *Supplementary capital (Tier 2) is mostly general reserve of Asset Quality Assessment for productive assets that must be formed (maximum 1.25% of RWA for credit risk). Supplementary capital was recorded at Rp73.21 billion or 4.04% of the Bank's total capital.*

Komponen modal / *Capital Component*	2021	2020
Total Modal / *Total Capital*	1.821.220	1.658.898
Modal Inti / *Tier 1*	1.748.007	1.587.656
Modal Pelengkap / *Tier 2*	73.213	71.242
ATMR (Risiko Kredit, Pasar dan Operasional) / *RWA (Credit, Market and Operational Risk)*	7.177.024	6.939.729
KPMM / *CAR*	25,38%	23,90%

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang diperhitungkan dalam perhitungan modal adalah ATMR risiko kredit dan risiko operasional, sedangkan untuk ATMR risiko pasar belum dipertimbangkan karena sesuai kriterianya Bank Jambi belum wajib untuk menghitung ATMR risiko pasar.

Risk-Weighted Assets (RWA) which are taken into account in the calculation of capital are RWA for credit risk and operational risk, while RWA for market risk has not been taken into consideration because according to the criteria, Bank Jambi is not required to calculate RWA for market risk.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas, Penyediaan modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan paling rendah, sebagai berikut:

Referring to the Financial Services Authority Regulation above, the minimum capital provision according to the risk profile is set at the lowest, as follows:

KPMM / *Minimum Capital Adequacy Requirement*	Peringkat Profil Risiko / *Risk Profile Rating*
a. 8%	1
b. 9% s.d <10%	2
c. 10% s.d <11%	3
d. 11% s.d <14%	4 & 5

Peringkat profil risiko Bank posisi Desember 2021 adalah Peringkat 2, maka Bank menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9%.

The Bank's risk profile rating for the position in December 2021 is Rank 2, therefore the Bank provides a minimum capital according to the risk profile, which is 9%.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Bank Jambi memastikan posisi permodalan pada tingkat yang memadai guna mendukung pengembangan usaha Bank. Kecukupan modal Bank Jambi dihitung dengan menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Bank Jambi memiliki tingkat permodalan yang memadai dengan rasio CAR sebesar 25,28%, berada di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko.

The Management Policy on the Capital Structure of Bank Jambi ensures that the capital position is at an adequate level to support the Bank's business development. Bank Jambi's capital adequacy is calculated using the Capital Adequacy Ratio (CAR) indicator. Bank Jambi has an adequate level of capital with a CAR ratio of 25.28%, which is above the minimum requirement according to the risk profile.

Manajemen Risiko – Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

Risk Management – Bank Risk Management Approach (OVA)

a. Model Bisnis dan Profil Risiko

Mengacu pada Rencana Bisnis Bank tahun 2021, Bank menjalankan model bisnis yang telah menjadi *core business* Bank yaitu dengan memfokuskan pada penyaluran kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pensiunan ASN serta kredit produktif pada berbagai

a. Business Model and Risk Profile

Referring to the Bank's 2021 Business Plan, the Bank runs a business model that has become the Bank's core business, namely by focusing on channeling consumptive loans for State Civil Apparatus (ASN) and ASN Pensioners as well as productive loans in various economic sectors, either

sektor ekonomi baik secara langsung maupun melalui program *channeling* dan penyediaan dana pada surat berharga berisiko rendah (surat berharga dan obligasi yang diterbitkan pemerintah). Dengan model bisnis yang dipilih, bank terekspos risiko kredit yang merupakan risiko utama bank dan risiko lainnya yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bank maupun kualitas penerapan manajemen risiko telah melalui proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko agar seluruh risiko yang dikelola sejalan dengan toleransi risiko yang disetujui oleh Direksi. Proses manajemen yang telah dilakukan selanjutnya diungkapkan dalam suatu informasi manajemen dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.

directly or through channeling programs and provision of funds in low-risk securities (securities and bonds issued by the government). With the chosen business model, the Bank is exposed to credit risk which is the main risk and other risks, namely market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, compliance risk and reputation risk. All risks inherent in the Bank's activities as well as the quality of risk management implementation have gone through a process of identification, measurement, monitoring and risk control so that all risks are managed in line with the risk tolerance approved by the Board of Directors. The management process that has been carried out is then disclosed in a management information and is used as a material for consideration by the Board of Directors in making decisions.

b. Struktur Tata Kelola Risiko

b. Risk Governance Structure

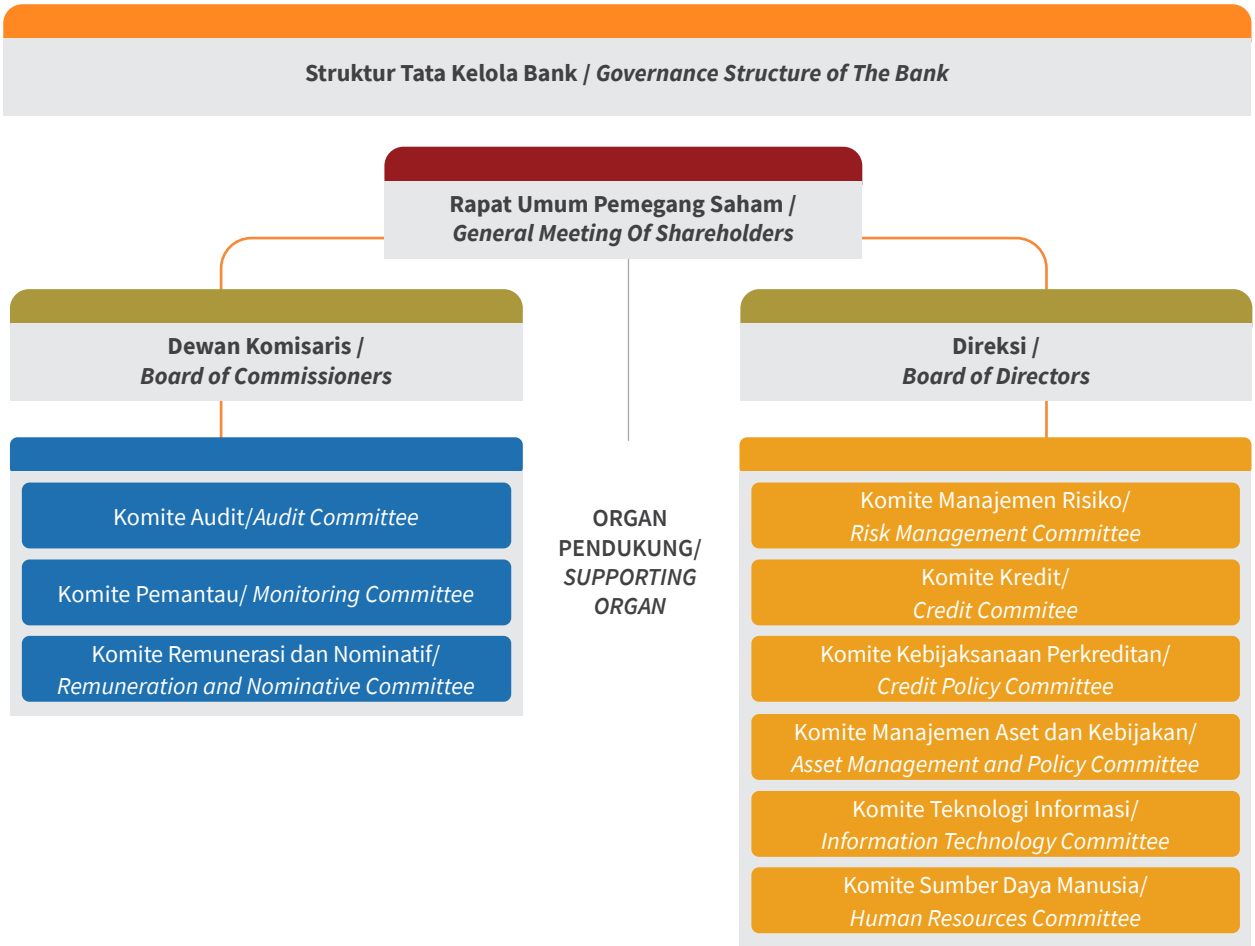

Struktur tata kelola Bank disusun dalam rangka penetapan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam Bank. Struktur tata kelola bank terdiri dari organ utama Bank yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil Direksi dalam menjalankan operasional

The Bank's governance structure is established in order to determine the division of tasks and responsibilities, mechanisms, and flow of decision-making implementation, as well as reporting within the Bank's organs. The governance structure of the bank consists of the main organs of the Bank, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, with the highest position being the GMS.

The Board of Commissioners supervises the policies taken by the Board of Directors in carrying out bank operations

bank serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam rangka memaksimalkan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi pada struktur tata kelola Bank, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite dibawah Dewan Komisaris dan Komite di bawah Direksi.

Berdasarkan hal tersebut, Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.

Direksi menjalankan peran operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan tanggung jawabnya Direksi membentuk komite yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Kebijaksanaan Perkreditan, Komite Manajemen Aset dan Kebijakan, Komite Informasi Teknologi dan Komite Sumber Daya Manusia

Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi lain dibawahnya seperti fungsi Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)* dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Hukum, Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta Unit Kerja Anti Fraud.

Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta komite di bawahnya dituangkan secara formal yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut.

Bank mengelola 8 (delapan) risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis bank, digunakan pendekatan Three lines of defence melalui prinsip membedakan antara fungsi bisnis, fungsi pemilik risiko *(risk owner/risk taking unit)* terhadap fungsi-fungsi yang menangani risiko *(managing risks)*, dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko *(overseeing risks)*.

c. Budaya Manajemen Risiko

Bank senantiasa memperkuat budaya manajemen risiko dengan membangun budaya risiko melalui suatu keterpaduan langkah antara pihak manajemen dengan unit *internal auditor*. Dalam rangka menciptakan budaya risiko diperlukan komitmen manajemen secara bersama-sama, selanjutnya pada level pemimpin divisi dan pimpinan cabang berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko.

Pedoman *code of conduct* yang dimiliki Bank dapat menjadi acuan seluruh karyawan terkait batas operasional

and provides advice to the Board of Directors. In order to maximize the function of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the governance structure of the Bank, in its implementation it will be assisted by supporting organs consisting of Committees under the Board of Commissioners and Committees under the Board of Directors.

Based on this, the Committees under the Board of Commissioners were formed to assist and improve the supervisory function carried out by the Board of Commissioners, which consists of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee.

The Board of Directors carries out the operational role of the Bank and is in charge of implementing the Bank's strategies and initiatives, both short term and long term. In assisting the implementation of its responsibilities, the Board of Directors has formed committees, namely the Risk Management Committee, Credit Committee, Credit Policy Committee, Asset and Policy Management Committee, Information Technology Committee and Human Resources Committee.

Furthermore, the implementation of the duties of the Board of Directors is also supported by other functions under it, such as the function of the Corporate Secretary and various work units, namely the Internal Audit Unit (SKAI), Compliance and Risk Management, Governance and Law, the Special Anti-Money Laundering and Prevention Unit. Terrorism Financing, Gratification Control Unit (UPG) and Anti Fraud Work Unit.

Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta komite di bawahnya dituangkan secara formal yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut.

Bank mengelola 8 (delapan) risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis bank, digunakan pendekatan Three lines of defence melalui prinsip membedakan antara fungsi bisnis, fungsi pemilik risiko (risk owner/risk taking unit) terhadap fungsi-fungsi yang menangani risiko (managing risks), dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (overseeing risks).

c. Risk Management Culture

The Bank continues to strengthen the risk management culture by building risk culture through integrated step between the management and the internal auditor unit. In order to create a risk culture, a joint management commitment is required, then at the level of division heads and branch office heads, they play an important role in communicating and influencing employee behavior in an effort to implement risk management.

The Bank's code of conduct becomes a reference for all employees regarding operational limits or procedures

atau prosedur untuk mencegah pelanggaran atau pelampauan batas risiko Bank. Berpedoman pada *code of conduct*, seluruh karyawan akan menjalankan nilai-nilai perusahaan, etika bisnis, etika kerja dan komitmen atas penegakan *code of conduct* yang pada akhirnya akan membudayakan karyawan untuk taat pada ketentuan. Untuk menanamkan nilai-nilai yang tertuang dalam *code of conduct* dan membudayakan risiko dilingkungan internal bank telah dilakukan kegiatan-kegiatan bersifat *knowledge sharing* mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi *culture*.

d. Ruang lingkup dan fitur utama sistem pengukuran risiko.

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank mengelola 8 (delapan) risiko, yaitu:

1) Risiko Kredit

Bank menerapkan PSAK 71 dengan menggunakan *expected loss* dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan. Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung berdasarkan segmen kredit yang ditetapkan bank dengan pendekatan *forward looking* yang tidak dilakukan pada penerapan PSAK 55 sebelumnya

Dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2021, mengharuskan Bank Jambi menerapkan manajemen risiko yang pruden dan disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,12% pada akhir tahun 2021 dan masih berada di bawah ketentuan regulator.

Dalam proses pengambilan keputusan kredit bank mengacu pada *four eyes principle* (pertimbangan dari dua sisi), yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit. Prosedur perkreditan senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan Bank Jambi dan ketentuan regulator. Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin.

Bank Jambi melakukan analisis *stress testing* secara berkala untuk memperkirakan besarnya dampak risiko sehingga dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan *"contingency plan"*.

2) Risiko Pasar

ALCO Bank Jambi secara berkala memantau perkembangan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit. Bank Jambi juga menganalisis dan mengkaji ulang kebijakan limit konsentrasi aset dan kewajiban serta limit penempatan pada surat berharga untuk mengatur komposisi portofolio serta melakukan

to prevent violations or exceeding the Bank's risk limits. By adhering to the code of conduct, all employees will implement the company's values, business ethics, work ethics and commitment to the enforcement of the code of conduct which will eventually civilize employees to comply with regulations. To instill values in the code of conduct and cultivate risk in the Bank's internal environment, knowledge sharing activities regarding risk management have been carried out, where employees can share knowledge and experience with each other on risk management which is carried out continuously and consistently. in the long term so that it becomes a culture.

d. The scope and main features of the risk measurement system.

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and the Financial Services Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, the Bank manages 8 (eight) risks, namely:

1) Credit Risk

The Bank applies PSAK 71 by using expected loss in calculating the impairment of financial assets. Allowance for impairment losses is calculated based on the credit segment determined by the bank using a forward looking approach which was not done in the previous implementation of PSAK 55.

The continued impact of the COVID-19 pandemic throughout 2021 has required Bank Jambi to implement prudent and disciplined risk management in lending, so that credit quality is maintained with an NPL ratio of 1.12% at the end of 2021 and is still under regulatory requirements.

In the credit decision-making process, the Bank refers to the four eyes principle (consideration from two sides), namely the business development side and the credit risk analysis side. Credit procedures are constantly being refined in line with the development of Bank Jambi and regulatory provisions. To maintain credit quality properly, monitoring of credit quality continues to be carried out on a regular basis.

Bank Jambi conducts stress testing analysis on a regular basis to estimate the magnitude of the impact of the risk so that it can create an appropriate strategy to mitigate these risks as part of the implementation of the "contingency plan".

2) Market Risk

ALCO Bank Jambi regularly monitors the development of the benchmark interest rate and interest rates offered by competing banks and adjusts deposit and loan interest rates. Bank Jambi also analyzes and reviews the policy on asset and liability concentration limits as well as placement limits on securities to regulate portfolio composition and conducts studies on the performance of securities issuers in order to

kajian terhadap kinerja penerbit surat berharga dalam rangka memastikan surat berharga yang dimiliki dinilai berkualitas baik dan bernilai tinggi.

ensure that the securities held are of good quality and high value.

3) Risiko Likuiditas

Bank Jambi senantiasa melakukan pengelolaan likuiditas dengan memastikan kewajiban jatuh tempo pada berbagai jangka waktu dapat dipenuhi dengan ketersediaan dana yang dimiliki Bank. Sebagian besar likuiditas Bank Jambi berasal dari penghimpunan deposito, memberikan kontribusi sebesar 50,93% dari total dana pihak ketiga. Rasio dana mahal yang tinggi merupakan salah satu fokus manajemen untuk terus menggantikannya dengan CASA (dana murah) karena tantangan ke depan tren suku bunga yang rendah diproyeksikan akan terjadi. Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Jambi di akhir tahun berada pada kondisi sehat 84,69%,. Untuk menjaga posisi dana pihak ketiga secara keseluruhan, Bank Jambi secara proaktif terus mengembangkan layanan digital guna meningkatkan dana retail Bank Jambi.

Bank juga melakukan stress test secara berkala untuk melihat kekuatan likuditas dalam menghadapi kondisi ekstrim. Bank Jambi juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut. Pengukuran risiko likuiditas dilakukan secara berkala dan komprehensif dengan memantau proyeksi arus kas, laporan *profil maturity,* rasio likuiditas dan skenario *stress test*.

3) Liquidity Risk

Bank Jambi always manages liquidity by ensuring that obligations due at various time periods can be met with the availability of funds owned by the Bank. Most of Bank Jambi's liquidity comes from deposit collection, contributing 50.93% of total third party funds. One of the management's focuses is reducing the ratio of high-priced funds to CASA (low-cost funds), because of the challenges ahead, the trend of low interest rates is projected to occur. Bank Jambi's Loan to Deposit Ratio (LDR) at the end of the year was in a healthy condition of 84.69%. To maintain the overall position of third party funds, Bank Jambi proactively continues to develop digital services to increase Bank Jambi's retail funds.

The Bank also conducts stress tests on a regular basis to see the strength of liquidity in the face of extreme conditions. Bank Jambi also has a contingency funding plan to deal with these extreme conditions. Liquidity risk measurement is carried out regularly and comprehensively by monitoring cash flow projections, maturity profile reports, liquidity ratios and stress test scenarios.

4) Risiko Operasional

Bank Jambi menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem dan kejadian eksternal. Secara berkala Bank melakukan evaluasi terhadap risiko operasional beserta penyebabnya untuk mengetahui tren dan dampak yang ditimbulkan.

Bank Jambi berusaha secara optimal untuk mitigasi risiko operasional berdasarkan sumber penyebab risiko sehingga dapat meminimalisir kejadian berulang dikemudian hari.

4) Operational Risk

Bank Jambi faces operational risks caused by human error, inadequate internal processes, system failures and external events. The Bank periodically evaluates operational risks and their causes to find out trends and impacts.

Bank Jambi strives to optimally mitigate operational risk based on the source of the risk causes so as to minimize recurring events in the future.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang timbul antara lain karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kemudian hari, dan adanya tuntutan hukum dalam proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Bank Jambi telah melakukan mitigasi risiko hukum, dengan cara antara lain:

- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Bank Jambi telah membentuk Bidang Hukum di Kantor Pusat.
- Melakukan kajian hukum terhadap perjanjian kerjasama kepada pihak ketiga,

5) Legal Risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses in the juridical aspects that arise, among others, due to weaknesses in the contracts made by the Bank, the absence and/or changes in laws and regulations that cause a transaction that has been carried out by the Bank to be inconsistent with the applicable provisions. at a later date, and there are lawsuits in the litigation process, whether arising from third party claims against the Bank or the Bank against third parties.

Bank Jambi has mitigated legal risk, among others:

- *To identify, measure, monitor and control legal risk, Bank Jambi has established a Legal Division at the Head Office.*
- *Conducting legal studies on cooperation agreements with third parties.*

6) Risiko Stratejik

Dalam rangka mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal, Bank Jambi melakukan:

- Pengkajian Rencana Bisnis Bank secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis dan kondisi ekonomi makro. Dalam hal terdapat penyesuaian rencana bisnis, Bank dapat melakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Penetapan target bisnis sesuai dengan tujuan Bank yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi tahun berjalan dan perkiraan tahun yang akan datang dengan menekankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kapasitas/kemampuan Bank Jambi ditengah persaingan indsutri perbankan.

Pengukuran Risiko Strategis Bank antara lain menilai pencapaian kinerja keuangan (realisasi vs *budget*) setiap secara berkala.

7) Risiko Kepatuhan

Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan merupakan prioritas Bank Jambi sebagai upaya untuk mengelola risiko kepatuhan. Untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan Bank menetapkan kebijakan dan prosedur yang harus dipatuhi dan secara proaktif melakukan pencegahan *(ex-ante)* dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif *(ex-post)* dalam rangka perbaikan.

8) Risiko Reputasi

Jumlah keluhan nasabah dan penyelesaiannya serta publikasi negatif merupakan parameter penilaian atas risiko reputasi. Bank Jambi terus mengembangkan infrastruktur layanan pengaduan nasabah melalui telepon, Instagram, *website* serta adanya whistle blowing system yang diharapkan mampu menjadikan pelayanan Bank Jambi semakin berkualitas.

Dalam mengelola risiko reputasi pada saat krisis, bank telah memiliki kebijakan pengelolaan krisis dan memiliki *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* serta memiliki *Call Center* yang merupakan tempat kerja cadangan bagi unit-unit kerja yang kritikal untuk tetap menjaga kelangsungan usaha dan memiliki *system back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.

e. Pelaporan

Sistem informasi manajemen bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam bentuk pelaporan. Pelaporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala terkait eksposur risiko yang dikelola Bank. Pelaporan disampaikan oleh unit pengelola risiko yaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara konferehensif dan berkala secara 3 bulan sekali berupa laporan profil risiko yang berisi identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko dengan substansi laporan yang sama disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, pemantauan risiko untuk risiko signifikan

6) **Strategic Risk**

In order to identify and respond to changes in the business environment, both external and internal, Bank Jambi performs:

- *Reviewing the Bank's Business Plan on a regular basis in accordance with business developments and macroeconomic conditions. In the event that there is an adjustment to the business plan, the Bank may revise it in accordance with the applicable regulations.*
- *Determination of business targets in accordance with the Bank's objectives by considering the current year's economic conditions and forecasts for the coming year by emphasizing the principle of prudence and taking into account the capacity/ ability of Bank Jambi in the midst of competition in the banking industry.*

Measurement of the Bank's Strategic Risk, among others, assesses the achievement of financial performance (realization vs. budget) on a regular basis.

7) Compliance Risk

Compliance with laws and regulations is a priority for Bank Jambi as an effort to manage compliance risk. To minimize the occurrence of compliance risk, the Bank establishes policies and procedures that must be complied with and proactively takes preventive measures (ex-ante) in order to minimize the occurrence of violations and take curative actions (ex-post) for improvement.

8) Reputational Risk

The number of customer complaints and their resolution as well as negative publications are parameters for assessing reputation risk. Bank Jambi continues to develop customer complaint service infrastructure via telephone, Instagram, website as well as a whistle blowing system which is expected to be able to make Bank Jambi's services more quality.

In managing reputation risk during a crisis, the bank has a crisis management policy and has a business continuity plan and disaster recovery plan and has a Call Center which is a backup workplace for critical work units to maintain business continuity and has a back up system for prevent high-risk business failures.

e. Reporting

The management information system aims to provide information to management in the form of reporting. Reports submitted to the Board of Commissioners and Directors on a regular basis regarding risk exposures managed by the Bank. Reports are submitted by the risk management unit, namely the Compliance and Risk Management Division in a comprehensive manner and periodically every 3 months in the form of a risk profile report containing identification, measurement, monitoring and risk control with the same substance of the report submitted to the Financial Services Authority. In addition, risk monitoring for significant risks is managed

yang dikelola bank secara bulanan dan dilaporkan kepada Direksi termasuk laporan mengenai hasil stress test yang dilakukan secara triwulanan dan tahunan.

Selain Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, terdapat unit kerja lain yang bersifat independen yang melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh aktivitas operasional bank dan secara berkala menyampaikan laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan audit baik internal maupun eksternal.

f. Informasi *stress test*

Dalam rangka mengukur dampak perubahan factor makroekonomi terhadap kondisi permodalan, likuiditas, kualitas aset dan laba perusahaan Bank Jambi secara berkala melakukan *stress test* berdasarkan skenario yang ditetapkan. Secara umum hasil *stress test* menunjukkan bahwa Bank Jambi memiliki posisi permodalan dan likuiditas yang solid dalam mengantisipasi estimasi kerugian dari potensi risiko-risiko yang dihadapi dalam berbagai skenario yang memburuk.

Bank menggunakan model statistik berdasarkan data historis dalam melakukan *stress test*, juga menggunakan metode *judgment* dengan memperhatikan faktor risiko kualitatif. Semua itu dilakukan untuk melihat dampak perubahan faktor makroekonomi di atas terhadap berbagai indikator utama, termasuk tingkat NPL, profitabilitas, likuiditas dan permodalan.

Stress testing risiko likuiditas merupakan pengujian dengan menggunakan skenario tertentu terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. Skenario yang digunakan bank adalah penarikan dana pihak ketiga (deposan inti), kegagalan *system* dan penurunan peringkat bank. *Stress test* dilakukan berdasarkan skenario *stress* secara spesifik pada bank *(bank spesific stress scenario)* dan skenario *stress* pada pasar *(general market stress scenario)*. Untuk skenario *stress* secara spesifik pada Bank paling sedikit dilakukan sekali dalam 3 bulan, sedangkan *stress testing* dengan skenario *stress* pada pasar paling sedikit dilakukan sekali dalam 1 tahun.

g. Strategi dan proses untuk mengatur, melindung nilai dan memitigasi risiko

Bank menjalankan bisnis sesuai dengan risk appetite yang ditetapkan dan sejalan dengan rencana bisnis. Bank selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjalankan manajemen risiko yang disiplin dalam memitigasi potensi risiko yang lebih besar, di tengah berbagai tekanan yang terjadi.

Bank Jambi meyakini bahwa di tengah tantangan yang ada saat ini, masih terdapat peluang-peluang baru yang dapat dioptimalkan. Bank terus melakukan berbagai pengembangan khususnya inisiatif berbasis digital pada layanan perbankan transaksi dimana hal ini semakin dibutuhkan oleh nasabah selama pandemi, yang cenderung menghindari kontak secara fisik dalam melakukan transaksi.

Dalam hal memitigasi risiko yang dikelola, Bank Jambi menetapkan Langkah-langkah yang efektif untuk

by the bank on a monthly basis and reported to the Board of Directors, including reports on the results of stress tests conducted on a quarterly and annual basis.

In addition to the Compliance and Risk Management Division, there are other independent work units that perform the supervisory function of all bank operational activities and periodically submit reports to the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the follow-up to the results of internal and external audits.

f. Stress test information

In order to measure the impact of changes in macroeconomic factors on the condition of capital, liquidity, asset quality and corporate profits, Bank Jambi periodically conducts stress tests based on the specified scenario. In general, the stress test results show that Bank Jambi has a solid capital and liquidity position in anticipating estimated losses from the potential risks faced in various deteriorating scenarios.

The bank uses a statistical model based on historical data in conducting stress tests, as well as using the judgment method by paying attention to qualitative risk factors. All of this is done to see the impact of changes in macroeconomic factors above on various key indicators, including the level of NPL, profitability, liquidity and capital.

Liquidity risk stress testing is a test using certain scenarios on the Bank's ability to meet liquidity needs in crisis conditions. The scenarios used by the bank are withdrawal of third party funds (core depositors), system failure and a downgrade of the bank's rating. Stress tests are carried out based on bank-specific stress scenarios and market stress scenarios (general market stress scenario). For stress scenarios specifically for Banks, it is carried out at least once in 3 months, while stress testing with stress scenarios on the market is carried out at least once in 1 year.

g. Strategy and process in managing, hedging and mitigating risk

The Bank conducts business in accordance with the established risk appetite and in line with the business plan. The Bank always adheres to the principle of prudence and carries out disciplined risk management in mitigating the potential for greater risks, in the midst of various pressures that occur.

Bank Jambi believes that in the midst of the current challenges, there are still new opportunities that can be optimized. The Bank continues to carry out various developments, especially digital-based initiatives in transaction banking services where this is increasingly needed by customers during the pandemic, who tend to avoid physical contact in conducting transactions.

In terms of mitigating managed risks, Bank Jambi establishes effective steps to minimize potential risks in

meminimalisasi potensi risiko ke depan, mitigasi terhadap risiko yang signifikan pada Bank Jambi dilakukan sebagai berikut:

Mitigasi Risiko Kredit
Salah satu mitigasi risiko kredit adalah agunan yang diserahkan debitur kepada Bank. Jenis agunan utama yang diterima untuk mitigasi risiko kredit adalah berupa agunan dalam bentuk uang tunai atau tanah dan bangunan. Jenis agunan tersebut memiliki nilai likuiditas relatif tinggi dan/atau keberadaannya tetap (tidak berpindah-pindah tempat) sehingga dapat secara efektif dicairkan pada saat pinjaman debitur/grup debitur masuk dalam kategori bermasalah. Penilaian agunan dilakukan oleh penilai *independent* untuk plafon diatas Rp5Miliar dan untuk plafon dibawah Rp5Miliar maka akan dilakukan oleh staf penilai internal yang tidak terlibat dalam proses pemberian kredit.

Bank melakukan kontrol terhadap fisik agunan yang dijaminkan oleh debitur ke Bank Jambi, maka harus dilakukan peninjauan agunan secara berkala.

Mitigasi risiko operasional
Untuk memitigasi risiko operasional, Bank:
- Secara berkala melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Telah memiliki *Business Continuity Management (BCM) Plan*, yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Bank Jambi dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah.
- Telah memiliki sistem pengendalian internal, dimana dalam pelaksanaannya antara lain telah memperhatikan prinsip *four eyes principle*, *segregation of duty* dan penerapan sistem rotasi guna mengurangi potensi *self-dealing* dan penyembunyian dokumen ataupun kemungkinan transaksi *fraud*

Mitigasi Risiko Likuiditas
Dalam upaya mitigasi risiko likuiditas, Bank menetapkan panduan untuk mengukur dan memitigasi risiko likuiditas, termasuk batasan konsentrasi aset dan kewajiban, penempatan dalam bentuk surat berharga. Bank juga mengidentifikasi dan mengembangkan Indikator Peringatan Dini *(Early Warning Indicators)* serta menerapkan Rencana Pendanaan Darurat *(Contigency Funding Plan)* dalam beberapa tingkatan untuk memitigasi risiko.

the future. Mitigation of significant risks at Bank Jambi is carried out as follows:

Credit Risk Mitigation
One of the credit risk mitigation is the collateral submitted by the debtor to the Bank. The main types of collateral accepted for credit risk mitigation are cash or land and buildings. This type of collateral has a relatively high liquidity value and/or its existence is fixed (not moving from place to place) so that it can be effectively disbursed when the debtor's loan/debtor group is categorized as non-performing. Collateral appraisal is carried out by an independent appraiser for ceilings above Rp 5 billion and for ceilings below Rp 5 billion, it will be carried out by internal appraisers who are not involved in the credit granting process.

The bank exercises control over the physical collateral pledged by the debtor to Bank Jambi, so a periodic review of the collateral must be carried out.

Operational risk mitigation
To mitigate operational risk, the Bank:
- *Periodically updating policies and procedures in accordance with organizational developments as well as changes to the prevailing laws and regulations.*
- *Established a Business Continuity Management (BCM) Plan, which is an integrated and comprehensive management process to ensure the continuity of Bank Jambi's operations in running the business and serving customers.*
- *Developed internal control system, taking into account the four eyes principle, segregation of duty and the implementation of a rotation system to reduce the potential for self-dealing and concealment of documents or the possibility of fraudulent transactions*

Liquidity Risk Mitigation
In an effort to mitigate liquidity risk, the Bank establishes guidelines for measuring and mitigating liquidity risk, including limits on the concentration of assets and liabilities, placements in the form of securities. The Bank also identifies and develops Early Warning Indicators and implements a Contingency Funding Plan at several levels to mitigate risks.

Rasio Pengungkit - Laporan kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit dan Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit / *Leverage Ratio - Report on obligations for Leverage Ratio Fulfillment and Leverage Ratio Calculation Report*

LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT
TOTAL EXPOSURE IN LEVERAGE RATIO REPORT

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (individu)

Posisi Laporan : 12/2021

Dalam jutaan rupiah / *In Million Rupiah*

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN). *Total consolidated assets as per published financial statements*	13.231.825
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *Adjusments for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation.*	0
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol). *Adjustment for securitised exposures that meet the operational requirements for the recognition of risk transference.* *In the event that the underlying financial assets have been deducted from the total assets on the statement of financial position, the number in this row is zero (0)*	-
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). *Adjustment for temporary exemption of central bank reserve (if applicable)*	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit. *Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operatice accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure.*	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. *Adjusments for regular-way purchases and sales of financial assets subject to trade date accounting*	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. *Adjustments for eligible cash pooling transactions*	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif. / *Adjustments for derivative financial instruments.*	-
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo. *Adjustments for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending).*	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK. *Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures).*	17.403
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa factor pengurang modal dan CKPN. *Adjusments for prudent valuation adjustments and specific and general provisions which have reduced tier 1 capital*	(123.571)
12	Penyesuaian lainnya. *Other adjusment*	-
13	Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit. *Leverage Ratio Exposure*	13.125.657

Analisis Kualitatif / *Qualitative Analysis*

Terdapat perbedaan antara Total Eksposur Rasio Pengungkit dan Total Aset dalam laporan posisi keuangan namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena eksposur *Securities Financing Transaction (SFT)* dan eksposur TRA dalam laporan komitmen dan kontinjensi tidak signifikan .

There is a difference between Total Leverage Ratio Exposure and Total Assets in the statement of financial position but it is not significant. This is because the Securities Financing Transaction (SFT) exposure and TRA exposure in the commitments and contingencies report are not significant.

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT
LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (individu)

Posisi Laporan : 12/2021

Dalam jutaan rupiah / *In Million Rupiah*

NO	KETERANGAN	PERIODE	
		Des 2021	Des 2020
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan / *On Balance Sheet Exposures*			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN) *On Balance Sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)*	13.106.236	11.475.497
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan *Gross up for derivatives collateral provided where deducted from the B/S assets pursuant to the operative accounting framework*	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif) *(Deduction of receivalvels assets for cash variation margin provided in derivatives transaction)*	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset) *(Adjustment for securities received under securities financing transactions that are recognised as an asset)*	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan) *Provision Impairment Loss (CKPN) on the asset in accordance with financial accounting standards)*	(132.443)	(91.146)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai factor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum) *Assets that have been calculated as a core capital deduction factor as referred to in the Financial Services Authority Regulation regarding the minimum capital requirement for commercial banks*	(490)	(81)
7	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6 *Total Asset Exposure in the statement of financial position Addition from Row 1 to Row 6*	12.973.302	11.384.270
Eksposur Transaksi Derivatif / *Derivative Exposure Transaction*			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu. *Replacement cost associated with all derivatives transaction (where applicable net of eligible cash variation margin and/or with bilateral netting)*	0	0
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivative *Add on amounts for PFE associated with all derivatives transactions*	0	0
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi *derivative* yang diselesaikan melalui *central counterparty (CCP)*) *(Exempted central counterparty (CCP) leg of client-cleared trade exposures)*	0	0
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit *Adjusted effective notional amount of written credit derivatives*	0	0
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan *add-on* untuk transaksi penjualan derivatif kredit) *(Adjusted effective notional offsets and add on deductions for written credit derivatives)*	0	0
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif (Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12) *Total derivatives Exposures (sum of rows 8 to 12)*	0	0
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT) / *Securities Financing Transaction Exposures*			
14	Nilai tercatat aset SFT secara *gross* *Gross SFT assets*	142.551	(0)

NO	KETERANGAN	PERIODE	
		Des 2021	Des 2020
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas) *(Net amounts of cash payables and cash receivables)*	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan *current exposure* sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini *CCR exposure for SFT assets*	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT / *Agent transaction exposures*	-	-
18	Total Eksposur SFT (Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17) *Total Securities Financing Transaction Exposures (sum of rows 14 to 17)*	142.551	-
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) / *Other Off Balance Sheet Exposures*			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai gross sebelum dikurangi CKPN *Off B/S exposures at gross notional amount*	122.018	161.744
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN) *(Adjustment for conversion to credit equivalent amount)*	(104.616)	(103.347)
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan) *(Specific and general provisions associated with off-balance sheet exposures deducted in determining Tier 1 Capital)*	(0)	-
22	Total Eksposur TRA (Penjumlahan dari baris 19 sampai denganbaris 21) *Total Off-balance sheet exposures (sum of rows 19 to 21)*	17.403	58.397
Modal dan Total Eksposur / *Capital and Total Exposures*			
23	Modal Inti *Tier 1 Capital*	1.748.007	1.581.918
24	Total Eksposur (Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22)	13.133.256	11.442.668
Rasio Pengungkit / *Leverage Ratio*			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada) *The value of the lever ratio,including the impact of adjustments of temporary exceptions on placement of current account with an indonesian bank in the context of meeting the minimum statutory reserve requirements*	13,31%	13,82%
25A	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada) *The value of the lever ratio,does not include the impact of adjustments to the temporary exemption on the placement of current account with an indonesian bank in the context of meeting the minimum statutory reserve requirements*	13,31%	13,82%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit / *National minimum leverage ratio requirement*	3%	3%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit / *Applicable leverage buffers*	0	0
Pengungkapan Nilai Rata-Rata / *Disclosure of average scores*			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross*, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan *(sale accounting transaction)* yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT *The average value of the carrying value of the gross SFT asset, after adjustments from net sales accounting transaction calculated with cash liabilities in SFT and internal cash bill SFT*	-	-
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan *(sale accounting transaction)* yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT *Final quarterly report value of gross carrying value of SFT asset, after adjustments for sales accounting transactions that are calculated on a net basis with a cash liability in SFT and Cash bill*	-	-

NO	KETERANGAN	PERIODE	
		Des 2021	Des 2020
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28 *Total exposure , including the impact of adjustments to temporary exceptions on the placement of current account at Bank Indonesia in the context of meeting the minimum statutory reserve requirements, which has included the gross average value of the gross asset value as referred to in line 28*	13.133.256	11.442.668
30A	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28 *Total exposure, not including the impact of adjustments to temporary exceptions on the placement of current account at bank indonesia in the context of meeting the minimum statutory reserve requirements , which has included the gross average value of the gross asset value as referred to in line 28*	13.133.256	11.442.668
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28. *Value of the leverage ratio, including the impact of adjustments to temporary exceptions on the placement of current account at bank indonesia in the context of meeting the minimum statutory reserve requirements , included the average value of the carrying value of the SFT assets in gross , as reffered to in line 28*	13,31%	13,82%
31A	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28. *Value of the leverage ratio, not including the impact of adjustments to temporary exceptions on the placement of current account at bank indonesia in the context of meeting the minimum statutory reserve requirements ,included the average value of the carrying value of the SFT assets in gross , as reffered to in line 28.*	13,31%	13,82%
Analisis Kualitatif			
Peningkatan rasio pengungkit pada periode penilaian dibandingkan tahun lalu disebabkan adanya peningkatan modal inti yang diikuti dengan peningkatan total eksposur terutama pada transaksi *Securities Financing Transaction* (SFT), sedangkan untuk nilai transaksi rekening administratif (TRA) tidak signifikan. *The increase in the leverage ratio in the assessment period compared to last year was due to an increase in core capital followed by an increase in total exposure, especially in Securities Financing Transactions (SFT), while the value of off-balance sheet transactions (TRA) was not significant.*			

Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah / *Credit Risk - Disclosure of Net Receivables by Region*

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	31 Desember 2021					31 Desember 2020				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah | Net Receivables by Region					Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah | Net Receivables by Region				
		Wilayah / Area 1	Wilayah / Area 2	Wilayah / Area 3	Wilayah / Area 4	Total	Wilayah / Area 1	Wilayah / Area 2	Wilayah / Area 3	Wilayah / Area 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Sovereign*	-	-	-	2.836.985	2.836.985	-	-	-	1.776.362	1.776.362
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*	-	-	-	53.250	53.250	-	-	-	96.272	96.272
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/ *Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank/*Claims on Bank*	-	-	-	665.636	665.636	-	-	-	243.962	243.962
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal/ *Secured by Residential Property*	59.144	43.173	40.022	410.271	552.610	45.183	29.707	29.604	314.866	419.360
6	Kredit Beragun Properti Komersial/ *Secured by Commercial Real Estate*	-	-	1.620	255.878	257.498	-	1.711	1.418	12.565	15.694
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan/ *Pensioners/ employees loans*	1.364.449	1.267.705	607.897	1.533.787	4.773.838	1.330.931	1.348.129	610.900	1.559.698	4.849.658
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*	879.948	751.301	364.125	925.800	2.921.175	794.019	575.126	327.893	850.465	2.547.503
9	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*	69	-	-	523.986	524.055	154	-	-	1.047.837	1.047.991
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo/*Past Due Claims*	3.884	2.984	2.876	16.375	26.120	2.507	1.887	3.541	15.653	23.588
11	Aset Lainnya/*Other Asset*	138.581	83.410	31.015	1.363.766	1.616.771	164.934	73.819	33.661	527.681	800.095
	TOTAL	**2.446.076**	**2.148.574**	**1.047.554**	**8.585.734**	**14.227.938**	**2.337.729**	**2.030.379**	**1.007.018**	**6.445.359**	**11.820.484**

Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
Credit Risk - Disclosure of Net Receivables by Remaining Contract Term

No.	Kategori Portofolio / *Portfolio Category*		
		< 1 tahun / *year*	> 1 - 3 tahun / *year*
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah / *Claims on Sovereign*	963.059	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / *Claims on Public Sector Entity*	31.350	21.899
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / *Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / *Claims on Bank*	563.493	86.081
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / *Secured by Residential Property*	33	1.916
6	Kredit Beragun Properti Komersial / *Secured by Commercial Real Estate*	-	1.005
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / *Pensioners/employees loans*	29.775	302.742
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / *Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*	40.366	140.530
9	Tagihan Kepada Korporasi / *Claims on Corporate*	17.568	26.302
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo / *Past due claims*	2.426	16.107
11	Aset Lainnya / *Other Asset*	0	0
	TOTAL	1.648.071	596.581

31 Desember 2021					31 Desember 2020					
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak *Net invoice based on remaining contract term*					Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak / *Net invoice based on remaining contract term*					
	> 3 - 5 tahun / *year*	> 5 tahun / *year*	*Non Contractual*	Total	< 1 tahun / *year*	> 1 - 3 tahun / *year*	> 3 - 5 tahun / *year*	> 5 tahun / *year*	*Non Contractual*	Total
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	60.043	1.813.883	0	2.836.985	831.131	22.791	-	922.441	-	1.776.362
	-	-	0	53.250	45.686	30.438	20.149	-	-	96.272
	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	-	16.063	0	665.636	132.293	81.189	30.479	-	-	243.962
	2.784	547.879	0	552.610	77	2.693	1.263,84	415.326	-	419.360
	-	256.493	0	257.498	-	1.589	134,76	13.970	-	15.694
	556.159	6.273.150	0	7.161.826	15.743	186.012	379.175,40	4.268.727	-	4.849.658
	171.449	225.404	0	577.748	91.424,65	278.440	199.130,77	1.978.508	-	2.547.503
	80.163	400.022	0	524.055	129.707,30	131.946	102.688,30	683.650	-	1.047.991
	3.591	3.995	0	26.120	18.479	2.325	1.765,93	1.017	-	23.588
	0	0	374.241	374.241	-	-	-	-	292.398	292.398
	874.189	9.536.889	374.241	13.029.969	1.264.542	737.421	734.787	8.283.639	292.398	11.312.787

Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi /
Credit Risk - Disclosure of Net Receivables by Economic Sector

No.	Sektor Ekonomi / *Economic Sector*	Tagihan Kepada Pemerintah/ *Claims on Sovereign*	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / *Claims on Public Sector Entity*
(1)	(2)	(3)	(4)
	30 Desember 2021		
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan | *Agricutlure, Forestry and Fisheries*		
2	Pertambangan dan Penggalian | *Mining and Quarrying*		
3	Industri Pengolahan | *Manufacturing*		
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/air panas dan Udara Dingin | *Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air*		
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah | *Water Management, Wastewater Management, Waste Management And Recycling*		
6	Konstruksi | *Construction*		
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | *Wholesale and Retail; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*		
8	Pengangkutan dan Pergudangan | *Transportation and Warehousing*		
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | *Accomodation, Food and Beverage*		
10	Informasi dan Komunikasi | *Information and Communication*		
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi | *Financial And Insurance Activity*	2.836.985	53.250
12	Real Estate | *Real Estate*		
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, Dan Teknis | *Professional, Scientific, And Technical Activities*		
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya | *Leasing and Leasing Activity without Option Rights, Employment, Travel Agencies, And Other Business Supports*		
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | *Public Administration, Defense and Mandatory Social Insurance*		
16	Pendidikan | *Education*		
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial | *Human Healthcare and Social Activity*		
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi | *Arts, Entertainment and Recreation*		
19	Aktivitas Jasa Lainnya | *Other Service Activity*		
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja | *Household As An Employer Activity*		
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | *International Agency And Other Suprastate Institution Activity*		
22	Bukan Lapangan Usaha | *Non-Business Sector*		
23	Lainnya | *Others*		
	TOTAL	**2.836.985**	**53.250**

	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/ *Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*	Tagihan Kepada Bank/ *Claims on Bank*	Kredit Beragun Rumah Tinggal / *Secured by Residential Property*	Kredit Beragun Properti Komersial / *Secured by Commercial Real Estate*	Kredit Pegawai/ Pensiunan / *Pensioners/ employees loans*	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / *Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*	Tagihan Kepada Korporasi/ *Claims on Corporate*	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *Past due claims*	Aset Lainnya / *Other Asset*
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			-		865	297.522	29	3.870	
						296			
					-	12.591	106.465	425	
						16	40		
				193.886		14.861	200.698	2.168	
			-	-	-	161.256		2.732	
						1.550			
			-	1.354	-	28.814		12.313	
						95	32.772	60	
		665.636				1.656	167.123		
						3.617		110	
						1.388		92	
						4.192		-	
						466		27	
			-		-	9.278			
						508			
			-		-	38.838	16.929	1.092	
						226			
			552.578	62.258	7.160.961	580		3.231	
									374.241
	-	**665.636**	**552.578**	**257.498**	**7.161.826**	**577.748**	**524.055**	**26.120**	**374.241**

No.	Sektor Ekonomi / *Economic Sector*	Tagihan Kepada Pemerintah/ *Claims on Sovereign*	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / *Claims on Public Sector Entity*
(1)	(2)	(3)	(4)
	31 Desember 2020		
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan | *Agricutlure, Forestry and Fisheries*		
2	Pertambangan dan Penggalian | *Mining and Quarrying*		
3	Industri Pengolahan | *Manufacturing*		
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/air panas dan Udara Dingin | *Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air*		
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah | *Water Management, Wastewater Management, Waste Management And Recycling*		
6	Konstruksi | *Construction*		
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | *Wholesale and Retail; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*		
8	Pengangkutan dan Pergudangan | *Transportation and Warehousing*		
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | *Accomodation, Food and Beverage*		
10	Informasi dan Komunikasi | *Information and Communication*		
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi | *Financial And Insurance Activity*	1.776.362	96.272
12	*Real Estate* | *Real Estate*		
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, Dan Teknis | *Professional, Scientific, And Technical Activities*		
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya | *Leasing and Leasing Activity without Option Rights, Employment, Travel Agencies, And Other Business Supports*		
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | *Public Administration, Defense and Mandatory Social Insurance*		
16	Pendidikan | *Education*		
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial | *Human Healthcare and Social Activity*		
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi | *Arts, Entertainment and Recreation*		
19	Aktivitas Jasa Lainnya | *Other Service Activity*		
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja | *Household As An Employer Activity*		
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | *International Agency And Other Suprastate Institution Activity*		
22	Bukan Lapangan Usaha | *Non-Business Sector*		
23	Lainnya | *Others*		
	TOTAL	**1.776.362**	**96.272**

	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/ *Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*	Tagihan Kepada Bank/ *Claims on Bank*	Kredit Beragun Rumah Tinggal / *Secured by Residential Property*	Kredit Beragun Properti Komersial / *Secured by Commercial Real Estate*	Kredit Pegawai/ Pensiunan / *Pensioners/ employees loans*	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / *Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*	Tagihan Kepada Korporasi/ *Claims on Corporate*	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *Past due claims*	Aset Lainnya / *Other Asset*
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					7.192	310.530		2.763	
						350			
					81	13.461	141.537	563	
						777	154		
					130	28.247	477.589	2.522	
			3		3.661	144.381	682	2.846	
						1.587	38.986	68	
				1.418	486	29.328		12.519	
		243.962				195	369.397		
						5.028		110	
						1.129		52	
						889	5.239		
						510		30	
					252	8.699			
						261			
					782	41.354	14.407	1.124	
						339			
			419.357	14.275	6.790.842	6.672		990	292.398
	-	**243.962**	**419.360**	**15.694**	**6.803.426**	**593.735**	**1.047.991**	**23.588**	**292.398**

Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah /
Credit Risk - Disclosure of Claims and Allowances by Region

No.	Keterangan / *Description*	31 Desember 2021					31 Desember 2020				
		Wilayah / *Area*					Wilayah / *Area*				
		Wilayah/ *Area 1*	Wilayah/ *Area 2*	Wilayah/ *Area 3*	Wilayah/ *Area 4*	Total	Wilayah/ *Area 1*	Wilayah/ *Area 2*	Wilayah/ *Area 3*	Wilayah/ *Area 4*	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tagihan / *Receivables*	2.515.808	2.148.267	1.047.554	8.437.711	14.149.341	2.347.247	2.043.307	1.007.018	6.422.886	11.820.458
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan *Stage* 3) *Receivables with increased and worsening credit risk (Stage 2 dan Stage 3)*						-	-	-	-	
	a. Belum jatuh tempo / *Non Past Due*	8.528	6.796	3.600	23.644	42.569	4.244	9.737	3.777	12.124	29.882
	b. Telah jatuh tempo/ *Past due*	24.840	19.985	9.355	46.547	100.727	10.242	11.724	7.869	36.935	66.770
3	CKPN - *Stage 1 / Allowance for Impairment Losses - Stage 1*	6.112	5.591	2.903	17.518	32.124	6.165	9.397	4.870	18.250	38.682
4	CKPN - *Stage 2 / Allowance for Impairment Losses - Stage 2*	4.215	3.523	1.652	6.960	16.349	1.347	3.092	1.244	3.159	8.841
5	CKPN - *Stage 3 / Allowance for Impairment Losses - Stage 3*	20.956	17.001	6.480	30.171	74.608	8.172	9.837	4.328	21.282	43.618
6	Tagihan yang dihapus buku/ *Receivables Written-off*						-	-	-	-	-

Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi / *Credit Risk - Disclosure of Claims and Provisions by Economic Sector*

No.	Sektor Ekonomi / *Economic Sector*	Tagihan / *Receivables*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Receivables with increased and worsening credit risk*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo / Non Past Due	Telah jatuh tempo / Past Due	*Allowance for Impairment Losses - Stage 1*	*Allowance for Impairment Losses - Stage 2*	*Allowance for Impairment Losses - Stage 3*	*Receivables Written-off*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
	30 Desember 2021							
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan | *Agricutlure, Forestry and Fisheries*	301.089	4.748	7.410	1.487	1.041	3.540	
2	Pertambangan dan Penggalian | *Mining and Quarrying*	296	-	-	1	-	-	
3	Industri Pengolahan | *Manufacturing*	119.904	189	835	63	13	409	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/air panas dan Udara Dingin | *Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air*	-	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah| *Water Management, Wastewater Management, Waste Management And Recycling*	56	-	-	0	-	-	
6	Konstruksi | *Construction*	413.195	4.539	3.615	2.152	136	1.447	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | *Wholesale and Retail; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*	166.228	2.402	4.476	943	496	1.744	
8	Pengangkutan dan Pergudangan | *Transportation and Warehousing*	1.552	28	-	10	2	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | *Accomodation, Food and Beverage*	50.965	865	20.620	999	176	8.308	
10	Informasi dan Komunikasi | *Information and Communication*	32.967	-	100	1	-	40	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi | *Financial And Insurance Activity*	1.656	-	-	12	-	-	
12	Real Estate | *Real Estate*	3.801	-	184	20	-	74	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, Dan Teknis | *Professional, Scientific, And Technical Activities*	1.511	-	123	67	-	31	
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya | *Leasing and Leasing Activity without Option Rights, Employment, Travel Agencies, And Other Business Supports*	4.241	-	49	33	-	49	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | *Public Administration, Defense and Mandatory Social Insurance*	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan | *Education*	511	-	46	1	-	18	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial | *Human Healthcare and Social Activity*	9.278	-	-	29	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi | *Arts, Entertainment and Recreation*	508	-	-	4	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya | *Other Service Activity*	58.241	1.728	2.090	2.073	384	998	
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja | *Household As An Employer Activity*	226	-	-	1	-	-	

No.	Sektor Ekonomi / *Economic Sector*	Tagihan / *Receivables*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Receivables with increased and worsening credit risk*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo / Non Past Due	Telah jatuh tempo / Past Due	*Allowance for Impairment Losses - Stage 1*	*Allowance for Impairment Losses - Stage 2*	*Allowance for Impairment Losses - Stage 3*	*Receivables Written-off*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | *International Agency And Other Suprastate Institution Activity*	-	-	-	-	-	-	
22	Bukan Lapangan Usaha | *Non-Business Sector*	7.851.690	28.068	61.181	24.228	14.100	57.950	
23	Lainnya | Others	374.241						
	Total	**9.392.153**	**42.569**	**100.727**	**32.124**	**16.349**	**74.608**	**-**
	31 Desember 2020							
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan | *Agricutlure, Forestry and Fisheries*	278.942	8.763	5.150	11.489	2.984	2.387	-
2	Pertambangan dan Penggalian | *Mining and Quarrying*	350	-	-	9	-	-	-
3	Industri Pengolahan | Manufacturing	156.144	276	980	508	85	416	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/air panas dan Udara Dingin | *Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air*	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah | *Water Management, Wastewater Management, Waste Management And Recycling*	930	-	-	50	-	-	-
6	Konstruksi | *Construction*	510.169	-	4.204	4.857	-	1.682	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | *Wholesale and Retail; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*	154.074	2.763	4.034	6.964	877	1.624	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan | *Transportation and Warehousing*	40.693	18	114	73	6	46	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | *Accomodation, Food and Beverage*	52.515	1.127	20.893	2.065	390	8.375	-
10	Informasi dan Komunikasi | *Information and Communication*	-	-	-	0	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi | *Financial And Insurance Activity*	195	-	-	11	-	-	-
12	*Real Estate* | *Real Estate*	5.228	66	184	371	16	74	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, Dan Teknis | *Professional, Scientific, And Technical Activities*	1.216	-	87	83	-	35	-
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya | *Leasing and Leasing Activity without Option Rights, Employment, Travel Agencies, And Other Business Supports*	6.128	-	-	65	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | *Public Administration, Defense and Mandatory Social Insurance*	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan | *Education*	560	-	50	0	-	20	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial | *Human Healthcare and Social Activity*	8.951	-	-	165	0	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi | *Arts, Entertainment and Recreation*	261	-	-	6	-	-	-

No.	Sektor Ekonomi / *Economic Sector*	Tagihan / *Receivables*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Receivables with increased and worsening credit risk*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo / Non Past Due	Telah jatuh tempo / Past Due	*Allowance for Impairment Losses - Stage 1*	*Allowance for Impairment Losses - Stage 2*	*Allowance for Impairment Losses - Stage 3*	*Receivables Written-off*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
19	Aktivitas Jasa Lainnya | *Other Service Activity*	59.019	1.712	1.898	3.628	578	774	-
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja | *Household As An Employer Activity*	339	-	-	68	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | *International Agency And Other Suprastate Institution Activity*	-	-	-	-	-	-	
22	Bukan Lapangan Usaha | *Non-Business Sector*	7.264.229	15.157	29.073	8.269	3.906	28.185	
23	Lainnya | *Others*	292.398						
	TOTAL	**8.832.340**	**29.882**	**66.667**	**38.682**	**8.841**	**43.618**	**-**

Risiko Kredit - Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai /
Credit Risk - Disclosure of Detailed Movements of Allowance for Impairment Losses

No.	Keterangan / Description	30 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 1	Stage 2	Stage 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Saldo awal CKPN / *Beginning Balance of Impairment Provision*	38.686	8.841	43.618	-		-
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) / *Charge/ Release of Impairment Provision for the Current Year (Net)*	(6.562)	7.508	30.989	38.686	8.841	43.618
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan / *Charge of Impairment Provision for the Current Year (Net)*						
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan / *Release of Impairment Provision for the Current Year (Net)*						
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan / *Impairment Provision for Writen-Off Current Year*				-		
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan / *Other Charge/ Release for the Current Year*				-		
Saldo akhir CKPN		**32.124**	**16.349**	**74.608**	**38.686**	**8.841**	**43.618**

Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio Dan Skala Peringkat /
Credit Risk - Disclosure of Net Receivables by Portfolio Category and Rating Scale

30 Desember 2021 / December 31, 2021

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat / *Rating Agency*	Peringkat Jangka panjang / *Long-term Rating*			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah *Claims on Sovereign*					1247208,173
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claims on Public Sector Entity*		21.899		31.350	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*					
4	Tagihan Kepada Bank *Claims on Bank*		55174,73652	58772,1723	451666,419	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal *Secured by Residential Property*					
6	Kredit Beragun Properti Komersial *Secured by Commercial Real Estate*					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan *Pensioners/employees loans*					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*					
9	Tagihan Kepada Korporasi *Claims on Corporate*					
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo *Past due claims*					
11	Aset Lainnya *Other Asset*					
	TOTAL		**77.074**	**58.772**	**483.017**	**1.247.208**

Tagihan Bersih / *Net Receivables*									
	Peringkat Jangka Pendek / *Short Term Rating*							Tanpa Peringkat / *No Rating*	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari / *Less than* B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari / *Less than* A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari / *Less than* B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari / *Less than* F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari / *Less than* B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari / *Less than* P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari/ *Less than* B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari/ *Less than* F3(idn)		
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari / *Less than* idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari/ *Less than* idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								1.589.777	2.836.985
									53.250
									-
								100.023	665.636
								552.610	552.610
								257.498	257.498
								7.161.826	7.161.826
								577.748	577.748
								524.055	524.055
								26.120	26.120
								374.241	374.241
	-	-	-	-	-	-	-	**11.163.898**	**13.029.969**

31 Desember 2020 / *December 31, 2020*

	Kategori Portofolio					
		Lembaga Pemeringkat / *Rating Agency*	Peringkat Jangka panjang / *Long-term Rating*			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah *Claims on Sovereign*					618.474
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claims on Public Sector Entity*		65.834		30.438	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*					
4	Tagihan Kepada Bank *Claims on Bank*		98.792	30.044	115.124	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal *Secured by Residential Property*					
6	Kredit Beragun Properti Komersial *Secured by Commercial Real Estate*					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan *Pensioners/employees loans*					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*					
9	Tagihan Kepada Korporasi *Claims on Corporate*					
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo *Past due claims*					
11	Aset Lainnya *Other Asset*					
	TOTAL		**164.626**	**30.044**	**145.561**	**618.474**

Tagihan Bersih / Net Receivables									
	Peringkat Jangka Pendek / *Short Term Rating*							Tanpa Peringkat / *No Rating*	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari / *Less than* B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari / *Less than* A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari / *Less than* B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari / *Less than* F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari / *Less than* B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari / *Less than* P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari/ *Less than* B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari/ *Less than* F3(idn)		
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari / *Less than* idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari / *Less than* idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								1.157.888	1.776.362
								-	96.272
								-	-
								3	243.962
								419.360	419.360
								15.694	15.694
								6.803.426	6.803.426
								593.735	593.735
								1.047.991	1.047.991
								23.588	23.588
								292.398	292.398
	-	-	-	-	-	-	-	**10.354.082**	**11.312.787**

Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / ***Credit Risk - Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weight After Taking into account the Impact of Credit Risk Mitigation***

No.	Kategori Portofolio / *Portfolio Category*				
		0%	20%	25%	
(1)	(2)	(3)	(4)		
A	Eksposur Neraca/*Balance Sheet Exposure*				
1	Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Sovereign*	2.694.434			
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*		21.899		
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*				
4	Tagihan Kepada Bank/*Claims on Bank*		594.012		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Secured by Residential Property*		196	2.176	
6	Kredit Beragun Properti Komersial/*Secured by Commercial Real Estate*				
7	Kredit Pegawai/Pensiunan/*Pensioners/employees loans*				
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*				
9	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*				
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo/*Past due claims*				
11	Aset Lainnya/*Other Asset*	322.187			
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan/*Total Statement of Financial Position Exposure*	3.016.621	616.108		
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif/ *Exposure of Committed/Contingent Liability on Administrative Account Transactions*				
1	Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Sovereign*				
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*				
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*				
4	Tagihan Kepada Bank/*Claims on Bank*				
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Secured by Residential Property*				
6	Kredit Beragun Properti Komersial/*Secured by Commercial Real Estate*				
7	Kredit Pegawai/Pensiunan/*Pensioners/employees loans*				
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*				
9	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*				
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo/*Past due claims*				
	Total Eksposur Transaksi Rekening *Administratif*	-	-		
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)/Credit Risk Exposure due to Counterparty Credit Risk*				
1	Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Sovereign*	142.551			
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*				
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*				
4	Tagihan Kepada Bank/*Claims on Bank*				
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*				
6	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*				
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**142.551**	**-**		

	30 Desember 2021/*December 30, 2021*								ATMR / *RWA*	Beban Modal/ *Capital Charge*
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / *Net Receivable After Taking into account the Impact of Credit Risk Mitigation*									
	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				31.350					20.055	1.806
										-
				71.624					154.615	13.915
	550.238								193.167	17.385
						257.498			257.498	23.175
				4.745.621					2.372.810	213.553
					2.987.951				2.240.964	201.687
						524.055			524.055	47.17
						3.098	23.022		37.630	3.387
						52.054			52.054	4.685
	550.238	-	-	4.848.595	2.987.951	836.705	23.022	-	5.852.847	526.756
					5.779	0			4.334	390
	-	-	-	-	5.779	-	-	-	4.334	390
									0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / *Credit Risk - Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weight After Taking into account the Impact of Credit Risk Mitigation*

No.	Kategori Portofolio / *Portfolio Category*				
		0%	20%	25%	
(1)	(2)	(15)	(16)		
A	Eksposur Neraca/*Balance Sheet Exposure*				
1	Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Sovereign*	1.776.362			
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*		65.834		
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*				
4	Tagihan Kepada Bank/*Claims on Bank*		128.844		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Secured by Residential Property*			2.429	
6	Kredit Beragun Properti Komersial/*Secured by Commercial Real Estate*				
7	Kredit Pegawai/Pensiunan/*Pensioners/employees loans*				
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*	182			
9	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*				
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo/*Past due claims*				
11	Aset Lainnya/*Other Asset*	292.398			
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan/*Total Statement of Financial Position Exposure*		194.678		
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif/ *Exposure of Committed/Contingent Liability on Administrative Account Transactions*				
1	Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Sovereign*				
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*				
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*				
4	Tagihan Kepada Bank/*Claims on Bank*				
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Secured by Residential Property*				
6	Kredit Beragun Properti Komersial/*Secured by Commercial Real Estate*				
7	Kredit Pegawai/Pensiunan/*Pensioners/employees loans*				
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*				
9	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*				
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo/*Past due claims*				
	Total Eksposur Transaksi Rekening *Administratif*	-	-		
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)/Credit Risk Exposure due to Counterparty Credit Risk*				
1	Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Sovereign*	-			
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*				
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*				
4	Tagihan Kepada Bank/*Claims on Bank*				
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*				
6	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*				
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**-**	**-**		

31 Desember 2020/*December 31, 2020*								ATMR / *RWA*	Beban Modal/ *Capital Charge*
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / *Net Receivable After Taking into account the Impact of Credit Risk Mitigation*									
35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
									-
			30.438					28.386	2.555
									-
			115.118					83.328	7.499
416.930								146.533	13.188
								15.694	1.412
			4.849.658	1.953.768	15.694			2.424.829	218.235
				546.639				1.875.305	168.777
								1.047.991	94.319
					1.047.991	22.509		34.842	3.136
					1.079			48.909	4.402
416.930	-	-	4.995.214	2.500.407		22.509	-	5.705.816	513.523
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
				46.915				35.186	3.167
-	-	-	-	46.915	-	-	-	35.186	3.167
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit / *Credit Risk - Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Techniques*

No.	Kategori Portofolio	30 Desember 2021/ *December 31, 2021*					
		Tagihan Bersih / *Net Claims*	Bagian Yang Dijamin Dengan / *Portion Secured With*				Bagian Yang Tidak Dijamin / *Unsecured Portion*
			Agunan / *Collateral*	Garansi / *Warranty*	Asuransi Kredit / *Credit Insurance*	Lainnya / *Other*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+ (6)+(7)]
A	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.694.434					2.694.434
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	53.250					53.250
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-					-
4	Tagihan Kepada Bank	665.636					665.636
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	552.610					552.610
6	Kredit Beragun Properti Komersial	257.498					257.498
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	7.161.826					7.161.826
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	571.969	223				571.746
9	Tagihan Kepada Korporasi	524.055					524.055
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	26.120					26.120
11	Aset Lainnya	374.241					374.241
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**12.881.639**	**223**	**-**	**-**	**-**	**12.881.416**
B	**Eksposur Transaksi Rekening Administratif**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	5.779					-
9	Tagihan Kepada Korporasi						
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo						
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**5.779**					**-**
C	**Eksposur Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan**						
1	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	142.551					
2	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
3	Tagihan Kepada Bank						
4	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
5	Tagihan Kepada Korporasi						
6	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
	Total Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan	**142.551**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (A+B+C)		**13.029.969**	**223**	**-**	**-**	**-**	**12.881.416**

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*					Portfolio Category
	Tagihan Bersih / *Net Claims*	Bagian Yang Dijamin Dengan / *Portion Secured With*			Bagian Yang Tidak Dijamin / *Unsecured Portion*	
		Agunan / *Collateral*	Garansi / *Warranty*	Asuransi Kredit / *Credit Insurance*	Lainnya / *Other*	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]	
							Balance Sheet Exposure
	1.776.362	-	-	-	-	1.776.362	*Claims on Sovereign*
	96.272	-	-	-	-	96.272	*Claims on Public Sector Entity*
	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*
	243.962		-	-	-	243.962	*Claims on Bank*
	419.360		-	-	-	419.360	*Secured by Residential Property*
	15.694	-	-	-	-	15.694	*Secured by Commercial Real Estate*
	6.803.426	-	-	-	-	6.803.426	*Pensioners/employees loans*
	546.821	182	-	-	-	546.639	*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*
	1.047.991	-	-	-	-	1.047.991	*Claims on Corporate*
	23.588	-	-	-	-	23.588	*Past due claims*
	292.398	-	-	-	-	292.398	*Other Asset*
	11.265.873	**182**	**-**	**-**	**-**	**11.265.691**	***Total Balance Sheet Exposure***
							Administrative Account Transaction Exposure
	-						*Claims on Sovereign*
	-						*Claims on Public Sector Entity*
	-						*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*
	-						*Claims on Bank*
	-						*Secured by Residential Property*
	-						*Secured by Commercial Real Estate*
	-						*Pensioners/employees loans*
	5.779	46.915				46.915	*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*
	-						*Claims on Corporate*
	-						*Past due claims*
	5.779	**46.915**	**-**	**-**	**-**	**46.915**	***Total Administrative Account Transaction Exposure***
							Counterparty Credit Risk
	142.551						*Claims on Public Sector Entity*
							Claims on Multilateral Development Banks and International Institute
							Claims on Bank
							Claims on Micro, Small and Retail Portfolio
							Claims on Corporate
							Claims on Public Sector Entity
	142.551						**Total Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**
	11.414.203	**47.096**			**-**	**11.312.605**	

Risiko Kredit - Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar /
Credit Risk - Disclosure of RWA Calculation for Credit Risk Using Standard Approach

1. Eksposur Aset di laporan posisi keuangan, kecuali eksposur sekuritisasi /
Asset Exposure in the statement of financial position, except securitization exposure

No	Kategori Portofolio / Portfolio Category	30 Desember 2021/*December 30, 2021*			31 Desember 2020/*December 31, 2021*		
		Tagihan Bersih/ Net Claims	ATMR Sebelum MRK/RWA pre CRM	ATMR Setelah MRK/RWA post CRM	Tagihan Bersih/ Net Claims	ATMR Sebelum MRK/RWA pre CRM	ATMR Setelah MRK/RWA post CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Sovereign*	2.694.434	0	0	1.776.362	0	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah/Claims on Government of Indonesia	2.694.434	0	0	0	0	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain/*Claims on Other Government*	0	0	0	0	0	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*	53.250	20.055	20.055	96.272	28.386	28.386
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*	0	0	0	0	0	-
4.	Tagihan Kepada Bank/*Claims on Bank*	665.636	154.615	154.615	243.962	83.328	83.328
	a. Tagihan Jangka Pendek/*Short Terms Claim*	481.947	96.389	96.389	18.607	3.721	3.721
	b. Tagihan Jangka Panjang/*Long Terms Claim*	183.690	58.225	58.225	225.355	79.606	79.606
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Secured by Residential Property*	552.610	193.167	193.167	419.360	146.533	146.533
6.	Kredit Beragun Properti Komersial/*Secured by Commercial Real Estate*	257.498	257.498	257.498	15.694	15.694	15.694
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan/*Pensioners/employees loans*	7.161.826	2.372.810	2.372.810	6.803.426	2.424.829	2.424.829
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*	571.969	2.241.131	2.240.964	546.821	1.875.442	1.875.305
9.	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*	524.055	524.055	524.055	1.047.991	1.047.991	1.047.991
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo/*Past due claims*	26.120	37.630	37.630	23.588	34.842	34.842
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Secured by Residential Property*	3.098	3.098	3.098	1.079	1.079	1.079
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Other than Secured by Residential Property*	23.022	34.532	34.532	22.509	33.763	33.763
11.	Aset Lainnya/*Other Asset*	374.241	0	52.054	292.398	0	48.909
	a. Uang Tunai, Emas dan Commemorative Coin/*Cash, Gold and Commemorative Coin*	322.187	0	0	244.279	0	-
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)/ *Investment (other than the capital reduction factor)*	0	0	0	0	0	-
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit/*Temporary capital investment in the framework of credit restructuring*	0	0	0	0	0	-
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa/*Participation in financial companies not listed on the exchange*	0	0	0	0	0	-
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa/*Participation in financial companies listed on the exchange*	0	0	0	0	0	-
	c. Aset tetap dan inventaris Neto/*Fixed assets and net inventory*	52.054	0	52.054	46.538	0	46.538
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)/*Foreclosed Collateral (AYDA)*	0	0	0	1.581	0	2.371
	e. Antar Kantor Neto/*Inter Office Assets*	1	0	1	0	0	-
	f. Lainnya/*Others*	0			0	0	-
TOTAL		**12.881.639**	**5.800.960**	**5.852.847**	**11.265.873**	**5.657.044**	**5.705.816**

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif kecuali eksposur sekuritisasi / *Exposure of Committed/Contingent Liabilities on Administrative Account Transactions except securitization exposure*

No	Kategori Portofolio	30 Desember 2021/*December 30, 2021*			31 Desember 2020/*December 31, 2021*		
		Tagihan Bersih/ Net Claims	ATMR Sebelum MRK/RWA pre CRM	ATMR Setelah MRK/RWA post CRM	Tagihan Bersih/ Net Claims	ATMR Sebelum MRK/RWA pre CRM	ATMR Setelah MRK/ RWA post CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah/ *Claims on Sovereign*				0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Government of Indonesia*				0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain/*Claims on Other Government*				0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*				0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*				0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank/*Claims on Bank*				0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek/*Short Terms Claim*				0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang/*Long Terms Claim*				0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Secured by Residential Property*				0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial/*Secured by Commercial Real Estate*				0	0	0
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan/*Pensioners/employees loans*				0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*	5.779	4.334	4.334	46.915	35.186	35.186
9.	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*				0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo/*Past due claims*				0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Secured by Residential Property*				0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Other than Secured by Residential Property*				0	0	0
TOTAL		**5.779**	**4.334**	**4.334**	**46.915**	**35.186**	**35.186**

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) / *Exposures That Give rise to Credit Risk due to Counterparty Credit Risk*

No	Kategori Portofolio/*Portfolio Category*	Tagihan Bersih/ *Net Claims*	ATMR Sebelum MRK/*RWA pre CRM*	ATMR Setelah MRK/*RWA post CRM*	Tagihan Bersih/ *Net Claims*	ATMR Sebelum MRK/*RWA pre CRM*	ATMR Setelah MRK/*RWA post CRM*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Sovereign*	142.551	0	0	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Government of Indonesia*				0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain/*Claims on Other Government*				0	0	0

2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*				0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*				0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank/Claims on Bank				0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek/*Short Terms Claim*				0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang/*Long Terms Claim*				0	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*				0	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*				0	0	0
TOTAL		**142.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen *(Settlement risk)*,
Bank tidak memiliki eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement risk*)

5. Eksposur Sekuritisasi
Bank tidak memiliki eksposur yang menimbulkan Eksposur Sekuritisasi

6. Eksposur Derivatif
Bank tidak memiliki Eksposur Derivatif

7. Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)

4. Exposures That Give rise to Credit Risk due to Settlement Failure (Settlement risk),
The Bank does not have any exposure that creates Credit Risk due to Settlement Failure (Settlement risk)

5. Securitization Exposure
The Bank does not have any exposure that gives rise to Securitization Exposure

6. Derivative Exposure
Bank has no Derivative Exposure

7. Total Credit Risk Measurement (1+2+3+4+5+6)

		30 Desember 2021/ *December 30, 2021*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT/*TOTAL CREDIT RISK RWA*	(A)	5.857.027	5.699.363
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit/ *RWA CREDIT RISK DEDUCTION FACTOR: The difference between PPKA's general reserves on productive assets that must be calculated and 1.25% RWA for Credit Risk*	(B)	23.468	19.633
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)/*TOTAL CREDIT RISK RWA (A) - (B)*	(C)	5.833.559	5.679.730
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL/*TOTAL CAPITAL DEDUCTION FACTOR*	(D)		0

Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitatif Counterparty Credit Risk (CCRA)

Credit Risk - Counterparty Credit Risk (CCRA) Qualitative Disclosures

No	Kategori Portofolio/Portfolio Category	30 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih/ *Net Claims*	ATMR Sebelum MRK/*RWA pre CRM*	ATMR Setelah MRK/*RWA post CRM*	Tagihan Bersih/ *Net Claims*	ATMR Sebelum MRK/*RWA pre CRM*	ATMR Setelah MRK/*RWA post CRM*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah/ *Claims on Sovereign*	142.551	0	0	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah/*Claims on Government of Indonesia*				0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain/*Claims on Other Government*				0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Claims on Public Sector Entity*				0	0	0

3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/*Claims on Multilateral Development Banks and International Institute*				0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank/*Claims on Bank*				0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek/*Short Terms Claim*				0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang/*Long Terms Claim*				0	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Claims on Micro, Small and Retail Portfolio*				0	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi/*Claims on Corporate*				0	0	0
TOTAL		**142.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Risiko Kredit – Analisis Eksposur *Counterparty Cret Risk* (CCR1)
Bank tidak memiliki eksposur *counterparty credit risk* – transaksi *derivative.*

Risiko Kredit – Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment (CCR2)
Bank tidak memiliki *eksposur counterparty credit risk* – transaksi *derivative Over the Counter* (OTC).

Risiko Kredit - Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)
Bank tidak memiliki eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk)- Transaksi derivative Over the Counter (OTC), Transaksi Repo atau Reverse Repo.

Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitatif Umum

a. Pengungkapan Kualitatif secara Umum

Penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, seperti pemberian kredit, pembelian surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontijensi, dimana pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar.

Bank Jambi terekspos risiko kredit terbesar dari kegiatan penyaluran kredit, diikuti oleh aktivitas pembelian surat berharga, penempatan pada bank lain. Perumusan strategi manajemen risiko disesuaikan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan *risk appetite, risk tolerance* dan *risk limit* dan didukung oleh kebijakan kredit, prosedur internal yang memadai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta ketentuan lain yang berlaku.

Bank Jambi telah memiliki Unit Manajemen Risiko Kredit yang betugas mengelola risiko kredit. Dalam hal ini unit risiko kredit bertugas melakukan analisis risiko terhadap kelayakan kredit dan surat berharga untuk dapat diberikan/beli atau tidak dalam jumlah tertentu.

Credit Risk – Counterparty Cret Risk (CCR1) Exposure Analysis
The Bank has no exposure to counterparty credit risk – derivative transactions.

Credit Risk – Capital Charge for Credit Valuation Adjustment (CCR2)
The Bank does not have counterparty credit risk exposure – Over the Counter (OTC) derivative transactions.

Credit Risk - CCR Exposure by Portfolio Category and Risk Weight (CCR3)
The Bank does not have exposure that creates Credit Risk due to counterparty credit risk - Over the Counter (OTC) derivative transactions, Repo Transactions or Reverse Repo.

Credit Risk - General Qualitative Disclosures

a. General Qualitative Disclosure

Implementation of risk management for Credit Risk
Credit risk is the risk due to the failure of other parties to fulfill obligations to the Bank, including credit risk due to debtor failure, credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk can be sourced from various bank business activities, such as lending, purchasing securities, acceptances, interbank transactions, trade finance transactions, exchange rate transactions and derivatives, as well as commitments and contingencies, where lending is the largest source of credit risk.

Bank Jambi is greatly exposed to credit risk from lending activities, followed by securities purchasing activities, placements with other banks. The formulation of risk management strategy is adjusted to the Bank's overall business strategy by taking into account risk appetite, risk tolerance and risk limits and is supported by credit policies, adequate internal procedures in accordance with laws and regulations, as well as other applicable provisions.

Bank Jambi already has a Credit Risk Management Unit in charge of managing credit risk. In this case, the credit risk unit is tasked with conducting a risk analysis on creditworthiness and securities to be given/purchased or not in a certain amount.

Bank melakukan identifikasi risiko kredit pada segmen kredit yang teridentifikasi mengalami tren penurunan nilai secara signifikan, baik berdasarkan jenis portofolio kredit, sektor ekonomi maupun jenis penggunaan, sedangkan untuk surat berharga Bank melakukan identifikasi risiko kredit melalui ketepatan pembayaran bunga/kupon oleh penerbit surat berharga. Disamping itu Bank juga menilai potensi yang dapat menimbulkan risiko kredit dimasa yang akan datang, seperti kegagalan bayar debitur yang mengakibatkan tagihan jatuh tempo dan *counterparty* dan konsentrasi penyediaan dana pada segmen atau *cunterparty* serta adanya indikasi penurunan nilai terhadap aktiva produktif tertentu. Berdasarkan indikator tersebut dilakukan pengukuran terhadap seberapa besar risiko kredit yang dihadapi Bank untuk diambil langkah pemantauan dan pengendalian yang tepat guna meminimalisasi potensi risiko kredit.

The Bank identifies credit risk in the credit segment that has been identified as experiencing a significant decline in value, both based on the type of credit portfolio, economic sector and type of use, while for securities the Bank identifies credit risk through the prompt payment of interest/coupons by the issuer of securities. In addition, the Bank also assesses the potential for credit risk in the future, such as default on debtor payments resulting in overdue and counterparty claims and concentration of provision of funds to segments or counterparties as well as indications of impairment in certain earning assets. Based on these indicators, measurements are made of how much credit risk is faced by the Bank to take appropriate monitoring and control steps to minimize potential credit risk.

Secara berkala Bank Jambi telah melakukan pemantauan terhadap risiko kredit dan dilaporkan kepada manajemen dalam bentuk hasil pemantauan terhadap konsentrasi penyediaan dana, kualitas kredit dan surat berharga, pemantauan *counterparty credit line*, kaji ulang penerbit surat berharga dan lain-lain guna memastikan aktivitas yang dijalankan Bank sesuai dengan tingkat risiko yang diambil.

Bank Jambi has periodically monitored credit risk and reported it to management in the form of monitoring results on the concentration of provision of funds, quality of credit and securities, monitoring of counterparty credit lines, review of securities issuers and others to ensure that the activities carried out by the Bank are in accordance with with the level of risk taken.

Dalam rangka melengkapi sistem pengukuran, dilakukan stress testing risiko kredit yaitu dengan mengestimasi potensi kerugian bank dengan menggunakan skenario penurunan nilai debitur guna melihat sensitivitas kinerja Bank Jambi terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi faktor yang berdampak signifikan terhadap portofolio dan kecukupan permodalan Bank Jambi.

In order to complete the measurement system, credit risk stress testing is carried out by estimating the potential loss of the bank using a debtor decline scenario in order to see the sensitivity of Bank Jambi's performance to changes in risk factors and identify factors that have a significant impact on Bank Jambi's portfolio and capital adequacy.

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih dalam akibat Risiko Kredit yang didukung dengan beberapa perangkat manajemen risiko kredit baik pada tataran eksposur individu maupun portofolio. Salah satu pengendalian risiko kredit yang dilakukan adalah pengalihan risiko melalui asuransi kredit dan jaminan.

Credit Risk Control is carried out in order to prevent deeper losses due to Credit Risk, which is supported by several credit risk management tools, both at the individual and portfolio exposure levels. One of the credit risk controls carried out is risk transfer through credit insurance and guarantees.

Risiko kredit yang timbul dari aktivitas perkreditan dan treasury menimbulkan konsekuensi Bank untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif terhadap seluruh tagihan baik yang belum jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai *(impairment)*.

Credit risk arising from credit and treasury activities causes the Bank to establish individual and collective Allowances for Impairment Losses (CKPN) for all receivables, both unpaid and past due and claims that are impaired (impairment).

Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai *(impairment)*
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo adalah Tagihan Kepada Pemerintah, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik, Tagihan Kepada Bank, Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, Kredit Pegawai atau Pensiunan, Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel, Tagihan Kepada Korporasi, yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga.

Definition of receivables that are past due and receivables that are impaired
Claims that are past due are Claims on Government, Claims on Public Sector Entities, Claims on Banks, Residential Backed Loans, Commercial Property Backed Loans, Employee or Retirement Loans, Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios, Claims on Corporations , which has matured more than 90 (ninety) days, both for principal payments and/or interest payments.

Dari segi klasifikasi penurunan nilai *(Stage)*, kredit dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
Kredit *Stage 1* (kredit dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan) yaitu bagian dari kerugian kredit

In terms of the classification of impairment (Stage), credit is divided into 3 (three) parts, namely:
Stage 1 credits (credits with 12 months expected credit losses) are part of their lifetime expected credit losses

ekspektasian sepanjang umurnya merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kredit *Stage* 1 adalah Kredit dengan risiko rendah, yaitu kredit dengan tunggakan pokok atau bunga 0 sampai dengan 30 hari.

Kredit *Stage 2* (kredit dengan kerugian kredit sepanjang umur pinjaman) yaitu kerugian kredit yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan seluruhnya. Kredit *Stage* 2 adalah Kredit yang risiko kredit meningkat seara signifikan, yaitu tunggakan poko dan atau bunga lebih dari 30 hari sampai dengan 90 hari.

Kredit *Stage 3* (kredit *impaired financial asset*), yaitu asset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari asset keuangan telah terjadi. Kredit stage 3 adalah kredit dengan tunggakan pokok lebih dari 90 hari dan atau kredit yang direstrukturisasi di mana nilai kini arus kas *(Net Present Value)* lebih kecil dari nilai wajar.

Pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
Bank Jambi menerapkan PSAK 71 yang mensyaratkan entitas untuk mengelompokkan Aset Keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (*stage 1*, *stage 2* dan *stage 3*). Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan *(stage 1)* dan kerugian kredit sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan *(stage 2)* serta aset keuangan yang mengalami penurunan tajam disertai riwayat keterlambatan pembayaran *(stage 3)*.

Metode Kerugian Kredit Ekspektasian:
a. Kredit Ekspektasian 12 bulan
   Jika tidak terjadi peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
b. Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya
   Jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal-baik dinilai secara individu atau kolektif-dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (forward-looking). (PSAK 71: Paragraf 5.5.4; hal 71.15).

Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian atau *Expected Credit Loss* (ECL)
Dalam menentukan besarnya Kerugian Kredit Ekspektasian, maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menggunakan perhitungan:

representing expected credit losses arising from financial instrument default events that may occur 12 months after the reporting date. Stage 1 Loans are low-risk loans, namely loans with 0 to 30 days arrears of principal or interest.

Stage 2 credits (credits with credit losses over the life of the loan) are credit losses resulting from all possible default events over the estimated life of the entire financial instrument. Stage 2 Loans are loans with a significant increase in credit risk, namely arrears of principal and or interest for more than 30 days to 90 days.

Stage 3 credit (credit impaired financial asset), which is a financial asset that is credit impaired when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Stage 3 loans are loans with principal arrears of more than 90 days and/or restructured loans where the present value of cash flows (Net Present Value) is less than fair value.

Approach used to establish Allowance for Impairment Losses (CKPN)
Bank Jambi applies PSAK 71 which requires the Bank to classify Financial Assets into three stages of impairment (stage 1, stage 2 and stage 3). The Bank measures allowance for losses in the amount of 12 months expected credit losses for financial assets that have low credit risk at the reporting date (stage 1) and lifetime credit losses for financial assets that experience a significant increase in credit risk (stage 2) and financial assets that experience a decline. sharp with a history of late payments (stage 3).

Expected Credit Loss Method:
a. 12 months Expected Credit
   If there is no significant increase since initial recognition. Such losses represent the expected credit losses arising from the event of default on financial instruments that may occur within 12 months after the reporting date.

b. Life Time Expected Credit
   If the credit risk of the financial instrument has increased significantly since initial recognition-whether assessed individually or collectively-taking into account all reasonable and supported information, including forward-looking information. (PSAK 71: Paragraph 5.5.4; page 71.15).

Calculation of Expected Credit Loss (ECL)

In determining the amount of the Expected Credit Loss, the formation of the Allowance for Impairment Losses uses the following calculation:

ECL = PD X EAD X LGD X DF X FLA

ECL	:	*Expected Credit Loss*/adalah kerugian Kredit Ekspektasian | *Expected Credit Loss is a credit loss that has been expected*
PD	:	*Probability of default* adalah kemungkinan gagal bayar debitur | *Probability of default is the possibility of default by the debtor*
EAD	:	*Exposure at default* adalah saldo aset keuangan pada saat gagal bayar | *Exposure at default is the balance of financial assets at the time of default*
LGD	:	*Loss Given Default* adalah kerugian yang diderita Bank saat asset keuangan gagal bayar | *Loss Given Default is the loss suffered by the Bank when financial assets fail to pay*
DF	:	*Discount Factor* adalah angka desimal untuk memperhitungkan arus kas untuk mendiskontokan kembali ke nilai sekarang *(Present value)* | *Discount Factor is a decimal number to take into account cash flows to discount back to present value (Present value)*
FLA	:	*Forward Looking Adjustment* adalah penyesuaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat perkiraan masa depan *(Forward Looking)* | *Forward Looking Adjustment is an adjustment made by considering information that is predictive of the future (Forward Looking)*

b. Pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar secara kualitatif*

Penggunaan Peringkat

Dalam teknik pengukuran risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar untuk aset di Neraca, Bank menggunakan skala peringkat guna menetapkan bobot risiko suatu tagihan, yaitu peringkat surat berharga dan peringkat perusahaan.

Kategori portofolio yang menggunakan peringkat

Bank menetapkan bobot risiko untuk kategori portofolio surat berharga didasarkan pada peringkat dari surat berharga dimaksud *(issue rating)*, penetapan bobot risiko atas tagihan penempatan pada bank lain didasarkan pada peringkat dari bank dan penetapan bobot risiko dari tagihan selain surat berharga dan penempatan pada bank lain didasarkan pada peringkat debitur *(issuer rating)*. Dalam hal tagihan berbentuk selain surat berharga dan penempatan yang tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat.

Lembaga pemeringkat yang digunakan

Peringkat surat berharga, peringkat bank *counterparty* dan peringkat perusahaan dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

a. Fitch Ratings
b. Moody's Investor Service
c. Standard and Poor's
d. PT Fitch Ratings Indonesia
e. PT Pemeringkat Efek Indonesia

c. Pengungkapan mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar

Penerapan mitigasi risiko kredit

Bank Jambi menerapkan Teknik Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar, yang mencakup:

1) Teknik MRK - Agunan;
2) Teknik MRK - Garansi; dan/atau
3) Teknik MRK - Penjaminan atau Asuransi Kredit

Jenis agunan utama yang diterima

Jenis agunan utama yang diterima dalam rangka mitigasi risiko kredit adalah objek yang dibiayai oleh Bank. Sedangkan sebagai pelengkap, Bank dapat menerima agunan tambahan.

b. Disclosure of credit risk with a qualitative standard approach

Rating Usage

In the technique of measuring credit risk using the standard approach for assets in the Balance Sheet, the Bank uses a rating scale to determine the risk weight of a claim, namely the rating of securities and the rating of the company.

Portfolio categories using ratings

The Bank determines the risk weight for the securities portfolio category based on the rating of the securities in question (issue rating), the determination of the risk weight for claims for placements with other banks is based on ratings from banks and the determination of the risk weights for claims other than securities and placements with other banks is based on on the debtor rating (issuer rating). In the event that claims are in the form of other than marketable securities and placements that are not rated, the determination of risk weight is based on the risk weight of unrated claims.

Rating agency used

Securities ratings, counterparty bank ratings and company ratings are issued by rating agencies recognized by the Financial Services Authority, namely:

a. Fitch Ratings
b. Moody's Investor Service
c. Standard and Poor's
d. PT Fitch Ratings Indonesia
e. PT Indonesian Securities Rating

c. Disclosure of credit risk mitigation using a standard approach

Implementation of credit risk mitigation

Bank Jambi applies Credit Risk Mitigation Techniques with a Standard Approach, which includes:

1) MRK Technique - Collateral;
2) MRK Technique - Guarantee; and/or
3) MRK Technique - Credit Guarantee or Insurance

Main types of collateral accepted

The main type of collateral accepted in the context of mitigating credit risk is the object financed by the Bank. Meanwhile, as a complement, the Bank may receive additional collateral.

Jenis agunan utama dan tambahan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Agunan, yang dapat berupa aset fisik (tanah, bangunan, mesin, peralatan, dsb.) maupun aset keuangan (*cash collateral*, *marginal deposit*, emas, piutang, surat hutang maupun surat berharga lainnya). Dalam teknik mitigasi risiko kredit, aset fisik tidak diperhitungkan sebagai teknik mitigasi risiko kredit.
2. Garansi, yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, Bank koresponden, maupun perusahaan Asuransi. Dalam teknik mitigasi risiko kredit, garansi yang diperhitungkan hanya garansi yang diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan kategori Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia, Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain, Tagihan Kepada Bank serta lembaga penjaminan/asuransi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan garansi dan penerbit garansi.
3. Asuransi Kredit, yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan polis asuransi, penerbit asuransi dan kategori portofolio penerima asuransi.

Kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur memadai dalam mendukung penilaian agunan, diantaranya dalam penilaian agunan Bank menggunakan penilai internal *(Internal appraisers)* dan untuk pinjaman diatas nilai tertentu, penilaian agunan dilakukan oleh pihak ekternal yang bersifat independent (eksternal *appraisers*). Dalam melakukan penilaian agunan, Bank Jambi mengutamakan menerima agunan yang memiliki nilai likuiditas tinggi dan bersifat *marketable* sehingga dapat segera dicairkan pada saat pinjaman debitur masuk dalam kategori bermasalah.

Pihak-pihak utama pemberi jaminan

Penggunaan teknik mitigasi kredit diutamakan pada jenis agunan utama non fisik. Bank Jambi menerapkan teknik mitigasi risiko kredit agunan pada penyediaan dana surat berharga korporasi dengan agunan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah (dijamin oleh pemerintah) dan kredit yang diberikan dengan *cash collateral* (agunan tunai berupa giro, tabungan dan deposito).

Tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi Risiko Kredit

Eksposur aset pada Neraca yang menggunakan teknik mitigasi risiko kredit tidak signifikan, baik pada penyediaan dana berupa surat berharga yang dimiliki maupun kredit yang diberikan. Penyaluran kredit Bank Jambi dominan diberikan kepada kredit pegawai/ pensiun yang tidak menerapkan teknik mitigasi risiko kredit dalam pengukurannya.

Risiko Pasar – Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Bank belum memenuhi kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar

***Interest Rate Risk in Banking Book* – Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB**

Bank belum memenuhi kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar

The main and additional types of collateral can be grouped into:

1. *Collateral, which can be in the form of physical assets (land, buildings, machinery, equipment, etc.) or financial assets (cash collateral, marginal deposits, gold, receivables, bonds and other securities). In the credit risk mitigation technique, physical assets are not taken into account as a credit risk mitigation technique.*
2. *Guarantees received from the Government of the Republic of Indonesia, correspondent banks, and insurance companies. In the credit risk mitigation technique, guarantees that are taken into account are only guarantees issued by parties that are included in the categories of Claims to the Government of Indonesia, Claims to Governments of Other Countries, Claims to Banks and guarantee/insurance institutions by taking into account the fulfillment of the requirements of the guarantee and the issuer of the guarantee.*
3. *Credit Insurance, which is issued by an insurance company by taking into account the fulfillment of the requirements of the insurance policy, the insurance issuer and the category of the insurance recipient's portfolio.*

Policies, procedures and processes for valuing and managing collateral

The Bank has adequate policies and procedures to support the valuation of collateral, including in the assessment of the Bank's collateral using internal appraisers (Internal appraisers) and for loans above a certain value, collateral appraisal is carried out by independent external parties (external appraisers). In evaluating collateral, Bank Jambi prioritizes receiving collateral that has a high liquidity value and is marketable so that it can be immediately disbursed when the debtor's loan is categorized as non-performing.

The main guarantors

The use of credit mitigation techniques is prioritized on the main type of non-physical collateral. Bank Jambi applies collateral credit risk mitigation techniques in the provision of corporate securities funds with securities issued by the government as collateral (guaranteed by the government) and loans provided with cash collateral (cash collateral in the form of demand deposits, savings and time deposits).

The level of concentration resulting from the use of Credit Risk mitigation techniques

The exposure of assets on the Balance Sheet using credit risk mitigation techniques is not significant, either in the provision of funds in the form of securities owned or on loans. Bank Jambi's credit distribution is dominantly given to employee/pension loans that do not apply credit risk mitigation techniques in its measurement.

Market Risk – Disclosure of Market Risk Using Standard Methods

The Bank has not fulfilled the obligation to take into account Market Risk

Interest Rate Risk in Banking Book – Report of Risk Management Implementation for IRRBB

The Bank has not fulfilled the obligation to take into account Market Risk

Risiko Likuiditas – Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)
Organisasi manajemen Risiko Likuiditas
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas Bank, termasuk memastikan integrasi penerapan manajemen risiko likuiditas dengan risiko-risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi likuiditas Bank.

Dalam menerapkan manajemen risiko likuiditas, Bank Jambi didukung oleh organisasi manajemen risiko likuiditas yaitu unit bisnis *treasury, dealing room* dan *Aset Liabilities Management Commitee* (ALCO).

Strategi Pendanaan
Strategi pendanaan yang dilakukan Bank Jambi dalam mengelola risiko likuiditas melalui alokasi penempatan pada cadangan primer *(Primary Reserve)* dan aset likuid dalam bentuk Kas, Surat Berharga Negara (SBN), Surat berharga korporasi, penempatan pada Bank Indonesia dan antar bank aktiva berdasarkan kriteria dan limit tertentu. Sedangkan untuk sumber pendanaan, Bank memanfaatkan dana pihak ketiga giro, tabungan dan deposito pemda/korporasi dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

Diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan dapat memperkuat kapasitas bank untuk bertahan pada kondisi krisis.

Kondisi Likuiditas Bank Jambi dinilai memadai pada saat pemenuhan kewajiban jatuh tempo ditandai dengan kemudahan dalam akses pendanaan baik dari korporasi maupun antar bank.

Teknik Mitigasi
Dalam mitigasi risiko likuiditas Bank telah memiliki kebijakan Rencana Pendanaan Darurat berupa Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Likuiditas dan *Contingency Funding Plan* (CFP) yang memuat rencana pendanaan darurat dan indikator peringatan dini serta mekanisme pengukuran dan *stress testing*.

Dalam pemantauan risiko likuiditas, bank menggunakan indikator peringatan dini internal dan ekternal antara lain kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu, peningkatan *mismatches*, pengulangan terjadinya pelampauan limit, penurunan fasilitas *credit line* yang diberikan oleh bank koresponden, peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo dan lain-lain.

Sedangkan rencana pendanaan darurat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:
a. Tahap Pengawasan
b. Tahap Pemusatan Perhatian
c. Tahap Krisis

Tindakan penanggulangan pendanaan darurat berbeda untuk tiap tahapannya. Dalam menentukan tindakan penanggulangan keadaan likuiditas darurat, faktor-faktor yang berikut dipertimbangkan secara sintetis:
a. Kemampuan mendapat dana pada tiap tahap
b. Tindakan yang berdasarkan komposisi aset dan kewajiban

Liquidity Risk – Liquidity Risk Management (LIQA)
Liquidity Risk management organization
The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for ensuring that the implementation of liquidity risk management is in accordance with the strategic objectives, scale, business characteristics and liquidity risk profile of the Bank, including ensuring the integration of the implementation of liquidity risk management with other risks that may impact the Bank's liquidity position.

In implementing liquidity risk management, Bank Jambi is supported by a liquidity risk management organization, namely the treasury business unit, dealing room and Asset Liabilities Management Committee (ALCO).

Funding Strategy
In managing liquidity risk, the funding strategy adopted by Bank Jambi is through the allocation of placements in primary reserves and liquid assets in the form of cash, government securities (SBN), corporate securities, placements with Bank Indonesia and interbank assets based on criteria and limits. certain. As for funding sources, the Bank utilizes third party funds, current accounts, savings and local government/corporate deposits and the Interbank Money Market (PUAB).

Diversification of sources and terms of funding can strengthen the capacity of banks to withstand crisis conditions.

Bank Jambi's liquidity condition is considered adequate when fulfilling its maturing obligations, which is indicated by the ease of access to funding from both corporations and interbanks.

Mitigation Techniques
In mitigating liquidity risk, the Bank has an Emergency Funding Plan policy in the form of a Liquidity Risk Management Company Manual and a Contingency Funding Plan (CFP) which contains an emergency funding plan and early warning indicators as well as measurement and stress testing mechanisms.

In monitoring liquidity risk, banks use internal and external early warning indicators, including deteriorating asset quality, increased concentration on certain assets and sources of funding, increased mismatches, repeated occurrences of limit exceedances, decreased credit line facilities provided by correspondent banks, increased withdrawals. deposits before maturity and others.

Meanwhile, the emergency funding plan is carried out in several stages, namely:
a. Supervision Stage
b. Attention Stage
c. Crisis Stage

Actions for dealing with emergency funding are different for each stage. In determining the action to deal with an emergency liquidity situation, the following factors are considered synthetically:
a. Ability to get funds at each stage
b. Actions based on the composition of assets and liabilities

c. Analisis aktual cash flow dan proyeksi cash flow
d. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan penanggulangan

Pengukuran dan *stress testing*

Untuk mengetahui ketahanan likuiditas di periode krisis, telah dilakukan *stress testing* likuiditas secara periodik. Skenario *stress testing* dilakukan dengan menggunakan skenario spesifik pada bank. Skenario spesifik pada bank menggunakan asumsi bank berada dalam kesulitan likuiditas akibat hilangnya kepercayaan investor/deposan pada bank terutama deposan korporasi yang merupakan deposan inti Bank Jambi. Hasil *stress testing* dari skenario tersebut akan digunakan untuk *liquidity funding plan* agar risiko yang terjadi tetap dapat dibatasi dan dikelola dengan baik. Untuk skenario *stress* secara spesifik pada Bank paling sedikit dilakukan sekali dalam 3 bulan.

Pengendalian dan pengawasan juga dilakukan dengan cara memantau posisi *cash flow* secara harian, mingguan dan bulanan:

1. menyusun laporan *maturity profile* secara berkala, memperhatikan kesenjangan *(mismatch)* antara struktur dan dan struktur pinjaman berdasarkan periode jatuh tempo,
2. melakukan monitoring saldo arus kas yang diperkenankan pada akhir hari dalam rangka mencegah kerugian *opportunity lost* dan juga tetap memperhatikan dana cadangan yang dapat digunakan pada saat Bank mengalami kesulitan likuiditas *(secondary reserve)*.

Pemantauan harian posisi likuiditas berupa Giro Wajib Minimum (GWM), *secondary reserves* dan rasio likuiditas dilakukan secara harian.

Risiko Operasional – Perhitungan Risiko Operasional

c. *Analysis of actual cash flow and projected cash flow*
d. *Time needed to take countermeasures*

Measurement and stress testing

To determine liquidity resilience during crisis, liquidity stress testing is carried out periodically. Stress testing scenarios are carried out using specific scenarios. The specific scenario is based on the assumption that the Bank is in liquidity difficulty due to the loss of investor/depositor confidence in the bank, especially corporate depositors who are the core depositors of Bank Jambi. The results of the stress testing of the scenario will be used for the liquidity funding plan so that the risks that occur can still be limited and managed properly. For specific stress scenarios at the Bank, at least once every 3 months.

Control and supervision are also carried out by monitoring the cash flow position on a daily, weekly and monthly basis:

1. *prepare a maturity profile report on a regular basis, taking into account the gap (mismatch) between the structure and structure of the loan based on the maturity period,*
2. *Monitor the balance of cash flows that are allowed at the end of the day in order to prevent opportunity lost losses and also pay attention to reserve funds that can be used when the Bank is experiencing liquidity difficulties (secondary reserve).*

Daily monitoring of liquidity position in the form of Statutory Reserves (GWM), secondary reserves and liquidity ratios is carried out on a daily basis.

Operational Risk – Calculation of Operational Risk

(dalam jutaan rupiah / in million rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan/ *Indicator Approach*	30 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)/*Average Gross Income in the Past 3 years*	Beban Modal/ *Capital Charge*	ATMR/ *RWA*	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)/*Average Gross Income in the Past 3 years*	Beban Modal/ *Capital Charge*	ATMR/*RWA*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar/*Basic Indicator Approach*	716.515	107.477	1.343.465	671.999	100.800	1.259.999
	Total	**716.515**	**107.477**	**1.343.465**	**671.999**	**100.800**	**1.259.999**

Risiko Operasional – Pengungkapan Kualitatif Umum
Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank

Manajemen unit bisnis atau unit pendukung merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari. Disamping itu, Bank Jambi telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko

Operational Risk – General Qualitative Disclosures
Operational Risk Management Organization

Operational Risk is risk arising from inadequate and/or malfunctioning internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the Bank's operations.

The management of the business unit or support unit is the risk owner who is responsible for the Risk Management process for day-to-day Operational Risk. In addition, Bank Jambi has established an independent Risk Management Unit which

yang independen bertanggung jawab melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional secara menyeluruh.

Risk Taking Unit seperti Divisi Kredit, Divisi Treasury dan Dana, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi, Kantor Cabang Operasional dan *Supporting Unit* seperti Divisi Umum & Sekertaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari. *Risk Owner* dapat melaporkan permasalahan dan Risiko Operasional secara spesifik dalam unitnya sesuai jenjang pelaporan. Dalam hal pelaporan risiko operasional, Bank telah membangun aplikasi database kerugian operasional yang terjadi diseluruh unit bisnis dan unit pendukung dengan tujuan untuk membangun *awareness* terhadap risiko operasional. Unit bisnis dan unit pendukung yang mengalami kerugian operasional wajib melaporkan jenis kejadian dan kerugian pada aplikasi *Loss Event Database* yang dikelola oleh Bidang Manajemen Risiko pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Dalam mengelola risiko operasional, Bank Jambi telah melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko Operasional antara lain frekuensi dan dampak dari :

a. Kegagalan dan kesalahan sistem;
b. Kelemahan sistem administrasi;
c. Kegagalan hubungan dengan nasabah;
d. Kesalahan perhitungan akuntansi;
e. Penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran;
f. *Fraud*; dan
g. Rekayasa akuntansi.

Bank membentuk komite manajemen risiko yang beranggotakan paling sedikit terdiri dari mayoritas Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait. Pejabat eksekutif terkait merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja bisnis, pejabat yang memimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan pejabat yang memimpin Satuan Kerja Audit Intern. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam komite Manajemen Risiko seperti treasury dan dana, kredit dan operasional, sesuai kebutuhan Bank. Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada direktur utama terkait manajemen risiko operasional seperti penyusunan dan penyempurnaan kebijakan risiko operasional untuk kemudian disahkan oleh Direksi sebelum diimplementasikan oleh seluruh unit kerja.

Identifikasi dan Pengukuran

Pada saat melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional, sumber informasi Risiko Operasional yang utama digunakan oleh Bank adalah temuan audit internal yang terkait dengan Risiko Operasional.

Berdasarkan parameter tersebut diatas, Bank Jambi melakukan Analisis terhadap kelemahan yang mengakibatkan risiko operasional terjadi dan melakukan mitigasi untuk mengurangi risiko operasional dikemudian hari, seperti:

a. Pengamanan proses teknologi informasi dan asuransi
b. Peningkatan layanan nasabah *(service excelent)*

is responsible for carrying out the overall Risk Management function for Operational Risk.

Risk Taking Units such as the Credit Division, Treasury and Funds Division, Information Technology Division, Accounting Division, Operational Branch Offices and Supporting Units such as the General & Corporate Secretary Division and Human Resources Division are risk owners who are responsible for the Risk Management process for day-to-day Operational Risk -day. The Risk Owner can report problems and Operational Risk specifically within his unit according to the reporting level. In terms of operational risk reporting, the Bank has built a database application for operational losses that occurred in all business units and support units with the aim of building awareness of operational risks. Business units and support units that experience operational losses are required to report the types of events and losses on the Loss Event Database application which is managed by the Risk Management Division in the Compliance and Risk Management Division.

In managing operational risk, Bank Jambi has identified and measured the parameters that affect Operational Risk exposure, including the frequency and impact of:

a. System failures and errors;
b. Administrative system weakness;
c. Failure of relationship with customers;
d. Accounting calculation errors;
e. Delays and errors in payment settlements;
f. Fraud; and
g. Accounting engineering.

The Bank establishes a risk management committee consisting of at least the majority of the Directors and related Executive Officers. Relevant executive officers are officials one level below the Board of Directors who lead the business work unit, officials who lead the Risk Management Work Unit (SKMR), and officials who lead the Internal Audit Work Unit. Membership of executive officers in the Risk Management committee is adjusted to the issues discussed in the Risk Management committee such as treasury and funds, credit and operations, according to the needs of the Bank. The authority and responsibility of the Risk Management Committee is to evaluate and provide recommendations to the President Director regarding operational risk management, such as the preparation and improvement of operational risk policies to be later approved by the Board of Directors before being implemented by all work units.

Identification and measurement

When identifying and measuring Operational Risk, the main source of Operational Risk information used by the Bank is internal audit findings related to Operational Risk.

Based on the parameters mentioned above, Bank Jambi analyzes the weaknesses that cause operational risks to occur and takes mitigation to reduce operational risks in the future, such as:

a. Securing information technology and insurance processes
b. Customer service improvement (excellent service)

c. Perbaikan perhitungan akuntansi sesuai standar akuntansi yang berlaku
d. Penerapan ketentuan rotasi karyawan dan kewajiban cuti, dan lain-lain

Mitigasi Risiko

1. Dalam penerapan manajemen risiko operasional, bank telah memiliki *Business Continuity Management* (BCM) yaitu proses manajemen atau protokol terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah yang mencakup: *Business Impact Analysis (BIA), Risk Assessment, Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan (DRP)*. Telah dilakukan pengujian secara berkala untuk meyakini bahwa pendekatan BCM yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan, melaksanakan pengujian *Disaster Recovery Center (DRC)* atau simulasi penggunaan sistem backup data.
2. Untuk memitigasi Risiko Operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait produk dan aktivitas bank seperti produk simpanan (tabungan, giro dan deposito) dan pinjaman (kredit konsumtif dan kredit produktif), Penyelesaian Transaksi, pedoman Standar Akuntansi yang telah disesuaikan dengan Penerapan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku, pedoman Alih Daya, pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
3. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari SDM, Bank telah memiliki kebijakan Rekrutmen, Seleksi, Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan, kebijakan Remunerasi Pengurus dan Karyawan, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, Pelaksanaan Rotasi Karyawan, Standar Persyaratan Jabatan Peringkat Jabatan dan Jenjang Karir, Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan dan lain-lain.
4. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko Bank telah didukung oleh prosedur akses antara lain kebijakan Limitasi *User Core Banking* dan *User BI-SSSS* dan BI ETP, Pengamanan di *Dealing Room* dan kebijakan Pengelolaan dan Syarat Ruang *Data Center*.
5. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, Bank telah memiliki pedoman Manajemen Aset yang didalamnya mencakup sistem perlindungan asuransi terhadap aset fisik Bank, dan pedoman *back up system.*

Dalam memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional, Bank menggunakan pendekatan indikator dasar *(Basic Indicator Approach)* yang memperhitungkan rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto *(gross income)* tahunan yang mempunyai nilai positif pada 3 (tiga) tahun terakhir, dikalikan faktor alpha 15% (lima belas persen).

Risiko Reputasi – Pengungkapan Kualitatif Umum
Organisasi manajemen Risiko Reputasi

Dalam mengelola risiko reputasi, Bank Jambi melakukan pengelolaan keluhan nasabah melalui unit pengelola risiko reputasi yaitu unit *corporate secretary* dan unit khusus pengaduan nasabah di Kantor Cabang, disamping itu Bank telah menetapkan budaya perusahaan untuk diimplementasikan keseluruh unit kerja.

c. Improvement of accounting calculations in accordance with applicable accounting standards
d. Implementation of employee rotation provisions and leave obligations, and others

Risk Mitigation

1. *In implementing operational risk management, the bank has a Business Continuity Management (BCM) which is an integrated and comprehensive management process or protocol to ensure the continuity of the Bank's operations in running the business and serving customers which includes: Business Impact Analysis (BIA), Risk Assessment, Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan (DRP). Periodic testing has been carried out to ensure that the BCM approach used can be operated effectively in the event of a disturbance, carrying out a Disaster Recovery Center (DRC) test or simulating the use of a data backup system.*
2. *To mitigate Operational Risk stemming from the complexity of internal processes, the Bank has policies and procedures related to bank products and activities such as savings products (savings, current accounts and time deposits) and loans (consumptive credit and productive credit), Transaction Settlement, Accounting Standard guidelines which has been adapted to the applicable Accounting Standards (PSAK), Outsourcing guidelines, and Anti-Fraud Strategy Implementation guidelines.*
3. *To reduce the possibility of Operational Risk arising from HR, the Bank has a policy of Recruitment, Selection, Acceptance and Appointment of Employees, Remuneration policy for Management and Employees, Implementation of Education and Training within PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, Implementation of Employee Rotation, Standard Requirements Position Position Rank and Career Path, Termination of Employee Relations and others.*

4. *To reduce the possibility of Operational Risk arising from systems and infrastructure, the Bank's Risk Management policies have been supported by access procedures including the Limitation of User Core Banking and BI-SSSS and BI ETP policies, Dealing Room Security and Room Requirements and Management policies. Data Center.*

5. *To reduce the possibility of Operational Risk arising from external events, the Bank already has an Asset Management guideline which includes an insurance protection system for the Bank's physical assets, and a back up system guideline.*

In estimating the capital expense for Operational Risk, the Bank uses the Basic Indicator Approach which takes into account the average of the annual gross income which has a positive value in the last 3 (three) years, multiplied by an alpha factor of 15% (fifteen percent).

Reputational Risk – General Qualitative Disclosure
Reputational Risk management organization

In managing reputation risk, Bank Jambi manages customer complaints through the reputation risk management unit, namely the corporate secretary unit and a special unit for customer complaints at the Branch Office, in addition the Bank has established a corporate culture to be implemented in all work units.

Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi telah diinternalisasikan pada seluruh level organisasi, antara lain :
a. Memaparkan budaya perusahaan guna menanamkan nilai-nilai perusahaan pada setiap karyawan
b. Menyediakan sarana untuk nasabah menyampaikan keluhan kepada Bank, baik melalui web Bank Jambi, Instagram maupun *Whistle Blowing System*
c. Menindaklanjuti keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kebijakan dan mekanisme untuk mengendalikan Risiko Reputasi
Bank Jambi telah memiliki kebijakan memadai terkait aktivitas bisnis Bank yang berpotensi merugikan reputasi Bank, seperti :
a. Pedoman penerimaan pengaduan dan penyelesaian nasabah yang disertai dengan limit penyelesaian pengaduan nasabah,
b. Pedoman tata kelola
c. Budaya perusahaan, dan
d. Anti gratifikasi

Proses Manajemen Risiko Reputasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi, antara lain :
a. Bank telah melakukan pencatatan terhadap keluhan nasabah terutama keluhan yang masuk melalui unit layanan nasabah di Kantor Cabang dan pemberitaan dari media massa.
b. Guna memitigasi risiko reputasi bank telah melakukan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan limit penyelesaian dan secara rutin melakukan edukasi perbankan guna membentuk reputasi positif pemangku kepentingan
c. Secara berkala membangun image Bank Jambi melalui media sosial terkait produk dan aktivitas Bank Jambi

Pengelolaan Risiko Reputasi pada saat krisis
Pemantauan terhadap pemberitaan *(news management)* dan pengelolaan krisis komunikasi serta *monitoring* opini/ komentar *news media* atau sosial media dilakukan oleh unit kerja Sekretaris Perusahaan.

Sedangkan pengelolaan komplain/keluhan nasabah dilakukan bekerjasama dengan Unit Kerja yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

Risiko Stratejik – Pengungkapan Kualitatif Umum
Organisasi manajemen Risiko Stratejik
Dalam rangka penerapan manajemen risiko stratejik, Direksi memberikan arahan dalam penyusunan rencana stratejik dan inisiatif-inisiatif bisnis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mengendalikan arah kegiatan usaha dan menjaga potensi timbulnya risiko stratejik yang selanjutnya Dewan Komisaris me-*review* dan memberikan persetujuan atas rencana bisnis bank dan revisinya.

Selain itu penerapan manajemen risiko stratejik Bank Jambi didukung oleh satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi, termasuk rencana stratejik dan rencana bisnis yaitu Divisi Perencanaan & Stratejik yang didukung oleh kebijakan yang memuat panduan dalam penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring rencana dan strategi bank, termasuk penetapan limit terkait deviasi pencapaian target dan penggunaan anggaran.

The Risk Management Culture for Reputational Risk has been internalized at all levels of the organization, including:
a. Explain the company culture to instill company values in every employee
b. Provide a means for customers to submit complaints to the Bank, either through the Bank Jambi website, Instagram and the Whistle Blowing System
c. Following up on customer complaints in accordance with applicable regulations

Policies and mechanisms to control Reputational Risk

Bank Jambi already has adequate policies related to the Bank's business activities that have the potential to harm the Bank's reputation, such as:
a. Guidelines for receiving customer complaints and settlements accompanied by limits for customer complaints settlement,
b. Governance guidelines
c. Corporate culture, and
d. Anti-gratification

Reputation Risk Management process in identifying, measuring, monitoring, and controlling Reputation Risk, among others:
a. The Bank has recorded customer complaints, especially complaints that come through the customer service unit at the Branch Office and reports from the mass media.

b. In order to mitigate reputation risk, the bank has resolved customer complaints in accordance with the settlement limit and regularly conducts banking education to build a positive reputation for stakeholders.

c. Periodically build the image of Bank Jambi through social media related to Bank Jambi products and activities

Reputational Risk Management in times of crisis
Monitoring news (news management) and management of communication crises as well as monitoring of opinions/ comments on news media or social media are carried out by the Corporate Secretary work unit.

Meanwhile, the management of customer complaints/complaints is carried out in collaboration with the Work Unit which performs the function of service and settlement of customer complaints.

Strategic Risk – General Qualitative Disclosure
Strategic Risk management organization
In the context of implementing strategic risk management, the Board of Directors provides direction in the preparation of strategic plans and business initiatives as outlined in the Bank's Business Plan (RBB) to control the direction of business activities and maintain the potential for strategic risks to arise, which the Board of Commissioners then reviews and approves of. the bank's business plan and its revision.

In addition, the implementation of strategic risk management at Bank Jambi is supported by a work unit or function that has the authority and responsibility to support the formulation and monitoring of strategy implementation, including strategic plans and business plans, namely the Planning & Strategic Division which is supported by policies that contain guidelines for the preparation, implementation and implementation as well as monitoring bank plans and strategies, including setting limits related to deviations from achieving targets and using budgets.

Identifikasi dan Pengukuran
Dalam hal mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis eksternal maupun internal, Bank Jambi melakukan:
- Pengkajian dan penyesuaian Rencana Bisnis Bank secara berkala terhadap perkembangan bisnis dan kondisi makro guna mencapai target yang ditetapkan.
- Penetapan target yang mempertimbangkan keadaan ekonomi terkini serta yang akan datang dengan tren persaingan dari perbankan maupun non-perbankan.

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur Profil Risiko Stratejik. Pengukuran risiko stratejik melalui kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah serta pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).

Mekanisme Pengukuran pencapaian rencana Bisnis
Mekanisme untuk mengukur pencapaian rencana bisnis yang telah ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan target terhadap realisasi bisnis melalui Pemantauan pencapaian kinerja perusahaan, Cabang dan seluruh Divisi yang dilakukan secara triwulanan.

Risiko Kepatuhan – Pengungkapan Kualitatif Umum
Organisasi manajemen Risiko

Untuk meminimalkan potensi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi, seluruh lini organisasi perlu bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas bank.

Bank Jambi telah memiliki fungsi pengawasan seperti Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan satuan kerja kepatuhan dibawah Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko kepatuhan secara keseluruhan. Sejalan dengan strategi manajemen risiko kepatuhan, Bank Jambi telah memiliki kebijakan untuk memitigasi dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran serta melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kesalahan.

Strategi manajemen risiko
Bank Jambi mempunyai komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara proaktif melakukan pencegahan *(ex-ante)* dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif *(ex-post)* dalam rangka perbaikan.

Dalam menjalankan fungsinya satuan kerja kepatuhan telah melakukan pengkajian kesesuaian kebijakan yang akan dijalankan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki program kerja tahunan terkait pengendalian risiko kepatuhan, menciptakan sarana bagi karyawan untuk mengakses ketentuan internal berbasis *web*.

Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan serta Kebijakan dan Prosedur terkait lainnya antara lain Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Anti Fraud, dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan, ditandai dengan:

Identification and Measurement
In terms of identifying and responding to changes in the external and internal business environment, Bank Jambi performs:
- *Review and adjust the Bank's Business Plan on a regular basis to business developments and macro conditions in order to achieve the set targets.*
- *Setting targets that take into account the current and future economic conditions with competitive trends from banking and non-banking.*

The risk measurement approach is used to measure the Strategic Risk Profile. Measurement of strategic risk through strategic alignment with business environment conditions, high-risk strategies and low-risk strategies as well as achieving the realization of the Bank's Business Plan (RBB).

Mechanism for measuring achievement of business plans
Mechanism to measure the achievement of the business plan that has been set, is carried out by comparing targets to business realization through Monitoring the performance achievement of the company, Branches and all Divisions which is carried out on a quarterly basis.

Compliance Risk – General Qualitative Disclosure
Risk management organization

To minimize potential compliance risk, all level of the organization need to be responsible for managing compliance risk in all bank activities.

Bank Jambi already has a supervisory function such as the Internal Audit Division (SKAI) and a compliance work unit under the Compliance and Risk Management Division in managing overall compliance risk. In line with the compliance risk management strategy, Bank Jambi has a policy to mitigate and minimize the occurrence of violations and take corrective actions for any errors.

Risk management strategy
Bank Jambi is committed to complying with applicable laws and regulations and proactively take prevention (ex-ante) in order to minimize the occurrence of violations and take curative actions (ex-post) for improvement.

In carrying out its functions, the compliance work unit has reviewed the conformity of policies to be carried out with the applicable laws and regulations, has an annual work program related to compliance risk control, created a means for employees to access web-based internal regulations.

Implementation of Compliance Risk Management refers to the Guidelines for Implementation of Compliance Risk Management as well as other related policies and procedures, including the Compliance Policy, Anti-Fraud Policy, and Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Procedures.

The Risk Management Process for Compliance Risk is adequate in identifying, measuring, monitoring, and controlling Compliance Risk, characterized by:

a. Telah dilakukan inventarisir atas pelanggaran ketentuan dan dilakukan pemantauan secara bulanan terhadap pelanggaran ketentuan serta mengevaluasi langkah mitigasinya

b. Hasil pemantauan kepatuhan secara bulanan disampaikan secara berkala kepada Direktur Utama dan ditembuskan ke Dewan Komisaris

c. Mengkomunikasikan dengan unit kerja terkait permasalahan yang mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran.

Mekanisme pemantauan dan pengendalian Risiko
Dalam rangka mengendalikan dan meminimalkan risiko kepatuhan, Bank Jambi telah melakukan langkah-langkah antara lain:

a. Pemantauan terhadap penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak eksternal lainnya melalui aplikasi *warning report*.

b. Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan dari audit internal, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas lainnya agar tidak terjadi temuan berulang.

c. Pemantauan terhadap prinsip prudential banking (*Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Giro Wajib Minimum (GWM), Penyediaan Dana Besar dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), *Non Performing Loan (NPL)*).

d. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta pelaksanaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Melakukan sertifikasi manajemen risiko karyawan.

f. Melakukan Identifikasi sumber-sumber risiko Kepatuhan.

g. Memantau dan Menjaga Kepatuhan Bank terhadap Komitmen Kepada Regulator/ Otoritas Pengawas

h. Efisiensi dan efektivitas informasi terbaru terkait ketentuanan internal maupun eksternal, Bank Jambi melakukan pemanfaatan teknologi informasi berbasis web melalui pustaka Bank Jambi

i. Memberikan sosialisasi ketentuan dan konsultasi atas berbagai pelaksanaan peraturan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dilakukan koordinasi antara Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Divisi Satuan Kerja Audit Iintern melalui rapat secara berkala dan komunikasi yang intensif. Permasalahan yang terkait dengan pengendalian internal khususnya potensi risiko kepatuhan dikaji dan dirumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Dari pengungkapan 8 (delapan) risiko tersebut di atas, secara komprehensif dapat digambarkan sebagai berikut:

a. An inventory of violations of provisions has been carried out and monthly monitoring of violations of provisions has been carried out as well as evaluating mitigation measures

b. Monthly compliance monitoring results are submitted periodically to the President Director and copied to the Board of Commissioners

c. Communicating with work units regarding problems that result in non-compliance so that there is no repetition of violations.

Risk monitoring and control mechanism
In order to control and minimize compliance risk, Bank Jambi has taken the following steps:

a. Monitoring the submission of reports to the Financial Services Authority and other external parties through the application of warning reports.

b. Monitoring of follow-up findings from internal audit, the Financial Services Authority and other supervisory authorities to prevent repeated findings.

c. Monitoring of prudential banking principles (Capital Adequacy Ratio (CAR), Minimum Statutory Reserves (GWM), Provision of Large Funds and Maximum Lending Limit (BMPK), Non Performing Loans (NPL)).

d. Ensuring that all policies, provisions, systems and procedures as well as the implementation of bank business activities are in accordance with the provisions of the Regulator and the applicable laws and regulations.

e. Conduct employee risk management certification.

f. Identify the sources of Compliance risk.

g. Monitor and Maintain Bank Compliance with Commitments to Regulators/Supervisory Authorities

h. Efficiency and effectiveness of the latest information related to internal and external regulations, Bank Jambi utilizes web-based information technology through the Bank Jambi library

i. Provide socialization of provisions and consultation on various implementation of regulations.

In order to improve the effectiveness of internal control, coordination is carried out between the Compliance and Risk Management Divisions and the Internal Audit Division through regular meetings and intensive communication. Issues related to internal control, especially potential compliance risks, are reviewed and steps are formulated that need to be taken.

From the disclosure of the 8 (eight) risks mentioned above, it can be comprehensively described as follows:

Profil Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Posisi Desember 2021
Risk Profile of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Position of December 2021

	Risiko/*Risk*	Peringkat Inheren Risk/ *Inherent Risk Rating*	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko/ *Risk Management Quality Rating*	Peringkat Tingkat Risiko/ *Risk Level Rating*
1.	Risiko Kredit/*Credit Risk*	3 *(moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
2.	Risiko Pasar/*Market Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
3.	Risiko Likuiditas/*Liquidity Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
4.	Risiko Operasional/*Operational Risk*	2 *(low to moderate)*	3 *(fair)*	2
5.	Risiko Hukum/*Legal Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
6.	Risiko Stratejik/*Strategic Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
7.	Risiko Kepatuhan/*Compliance Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
8.	Risiko Reputasi/*Reputation Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2
	Peringkat Komposit/*Composite Risk*	2 *(low to moderate)*	2 *(satisfactory)*	2

Penilaian profil risiko posisi Desember 2021 secara komposit berperingkat 2 yang merupakan kombinasi antara risiko yang melekat pada seluruh aktivitas Bank dan kualitas penerapan manajemen risiko. Peringkat komposit menggambarkan kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dan terdapat kelemahan minor yang perlu mendapat perhatian manajemen.

The composite risk profile of Bank Jambi for the position of December 2021 is ranked 2 which is a combination of the risks inherent in all Bank activities and the quality of risk management implementation. The composite rating describes the possible losses faced by the bank from the inherently low composite risk over a certain period of time in the future and there are minor weaknesses that need management attention.

Tingkat Kesehatan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Posisi Desember 2021
Soundness Level of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Position December 2021

Faktor-Faktor Penilaian/*Assessment Factors*	Peringkat 31 Des 2021/*Rating as of Dec 31, 2021*
Profil Risiko/*Risk Profile*	2
Tata Kelola/*Governance*	2
Rentabilitas/*Profitability*	2
Permodalan/*Capital*	2
Peringkat Komposit/*Composite Rating*	**2**

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Jambi posisi Desember 2021 peringkat komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Bank Jambi's Health Level position in December 2021 is at composite rating of 2 which reflects the condition of the Bank which is generally healthy so that it is considered capable of facing significant negative effects from changes in business conditions and other external factors as reflected in the rating of assessment factors, including risk profile, implementation of Good Corporate Governance. profitability, and generally good capital. In the event that there are weaknesses, in general these weaknesses are less significant.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENT

6

KEBIJAKAN CSR

Tanggung jawab Sosial Perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari *stakeholder* Bank, yang meliputi pemilik, karyawan, vendor/distributor, konsumen, pemerintah, media, dan masyarakat luas. Melalui program-program tanggung jawab Sosial, Bank mewujudkan kepedulian, tanggung jawab serta peran nyata berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di Provinsi Jambi. Hal ini sesuai dengan peran Bank Jambi sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), yakni menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga dapat mendorong peningkatan kinerja Bank Jambi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Karena program CSR yang dilakukan secara konsisten oleh Bank Jambi diyakini akan mampu meningkatkan kualitas hubungan antara Bank Jambi dengan *stakeholder*-nya. Pelaksanaan CSR secara konsisten merupakan salah satu bukti bahwa Bank Jambi menghargai masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* utama yang mendukung pertumbuhan kinerjanya. Bank Jambi berharap kegiatan CSR yang dilakukannya dapat membuat para *stakeholder* semakin nyaman dalam menjalin hubungan dengan Bank Jambi.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan Bank Jambi didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
- Keputusan RUPS Tahunan atas penggunaan laba bersih.

Perwujudan kepedulian dan komitmen Bank Jambi terhadap masyarakat tidak sebatas sebagai pemenuhan ketentuan

CSR POLICY

Corporate Social Responsibility is an effort to improve the quality of life of the Bank's stakeholders, which include owners, employees, vendors/distributors, consumers, government, media and the wider community. Through social responsibility programs, the Bank manifests concern, responsibility and a real role in contributing to improving the welfare of the community, especially in the Province of Jambi. This is in accordance with the role of Bank Jambi as a Regional Development Bank (BPD), which is to become the motor of regional economic growth.

The implementation of Corporate Social Responsibility can also encourage the improvement of Bank Jambi's performance, both in the short term and in the long term. Because the CSR program carried out consistently by Bank Jambi is believed to be able to improve the quality of the relationship between Bank Jambi and its stakeholders. The consistent implementation of CSR is one of the evidences that Bank Jambi reagards the community as one of the main stakeholders who support the growth of its performance. Bank Jambi hopes that its CSR activities can make stakeholders more comfortable in establishing relationships with Bank Jambi.

LEGAL BASIS

The implementation of social responsibility carried out by Bank Jambi is based on the following provisions:

- *Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies*
- *Republic of Indonesia Government Regulation Number 47 of 2012, concerning social and environmental responsibility of limited liability companies.*
- *Annual GMS decision on the use of net profit.*

The manifestation of Bank Jambi's concern and commitment to the community is not limited to fulfilling the above provisions.

tersebut di atas. Bank Jambi meyakini bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban yang juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah, khususnya dengan mendorong pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pengelolaan program CSR secara profesional, penuh kehatian-hatian.

TUJUAN PELAKSANAAN CSR

Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan Bank Jambi memiliki tujuan, antara lain:

a. Membantu Pemda dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial pada masyarakat sekitar di mana pun unit kerja Bank Jambi beroperasi.
b. Mewujudukan hubungan timbal balik yang harmonis antara Bank Jambi dengan masyarakat sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bisnis Bank Jambi.
c. Meningkatkan kualitas hidup *(Quality of Life)* bangsa Indonesia.

PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Pelaksanaan tanggung jawab sosial Bank Jambi pada hakikatnya merupakan kegiatan yang melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan dengan setiap aspek bisnis dan operasional yang dijalankan oleh Bank Jambi.

Pengelolaan kegiatan CSR di Bank Jambi dikelola oleh Divisi Umum dan dilakukan oleh Kantor Pusat dan kantor-kantor cabang sehingga dapat membawa dampak yang luas bagi masyarakat.

Dana yang dikeluarkan Bank Jambi untuk pengelolaan kegiatan CSR di tahun 2021 adalah sejumlah Rp4.451.332.943,50 (empat miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh sen).

Dana tersebut disalurkan untuk beragam kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan keagamaan. Dana CSR tersebut antara lain digunakan untuk perbaikan fasilitas di sekolah dan rumah ibadah.

Selain di bidang pendidikan dan keagamaan, Bank Jambi juga menunjukkan kepedulian pada bidang Sosial Kemasyarakatan, yakni dengan aktif membantu korban terdampak COVID-19 melalui penyaluran sembako atau melakukan renovasi rumah tinggal bagi warga tak mampu.

Konsep penerapan program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Bank Jambi juga berfokus kepada program yang dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank Jambi yang tergolong sebagai masyarakat kurang mampu.

Bank Jambi believes that corporate social responsibility is an obligation that also provides added value to the regional economy, particularly by encouraging the growth of Small and Medium Enterprises (SMEs) through professional, prudent management of CSR programs.

THE OBJECTIVES OF CSR IMPLEMENTATION

The implementation of social responsibility carried out by Bank Jambi has the following objectives:

a. Assisting the Government in handling social welfare problems in the surrounding community wherever the Jambi Bank work unit operates.
b. Creating a harmonious and mutually beneficial relationship between Bank Jambi and the community as a long-term investment for the sustainability of Bank Jambi's business.
c. Improve the quality of life of the Indonesian people.

IMPLEMENTATION OF CSR PROGRAMS

The implementation of Bank Jambi's social responsibility is essentially the activity that involves interaction between stakeholders and every aspect of business and operations run by Bank Jambi.

The CSR activities at Bank Jambi is managed by the General Division and are carried out by the Head Office and branch offices so that it can have a broad impact on the community.

The funds issued by Bank Jambi for the management of CSR activities in 2021 are in the amount of Rp4,451,332,943.50 (four billion four hundred fifty-one million three hundred thirty-two thousand nine hundred forty-three rupiah and fifty cents).

The funds are channeled for various needs of the community, especially in the fields of education and religion. The CSR funds are used, among others, to improve facilities in schools and houses of worship.

In addition to education and religion, Bank Jambi also shows concern in the social sector, by actively helping victims affected by COVID-19 by distributing basic necessities, or renovating houses for the needy.

The concept of implementing social responsibility programs carried out by Bank Jambi also focuses on programs that can provide benefits and added value for the welfare of the community, especially for communities around the operational area of Bank Jambi who are classified as underprivileged communities.

LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE FINANCIAL REPORT

Standard
Membership
Retail Membership
Corporate Membership
Gym Membership
Adult
Sales Monthly
Year 3

LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sustainable Financial Report

Bank Jambi meyakini bahwa kegiatan usaha harus dilaksanakan secara bertanggung jawab agar mampu memberikan kontribusi ekonomi yang optimal untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan manfaat bersama *(shared value)* bagi masyarakat. Bank Jambi telah mencatat kinerja ekonomi yang meyakinkan, terutama peningkatan penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga yang masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,67% dan 12,92% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bank Jambi believes that business activities must be carried out responsibly in order to be able to contribute optimally to the economy in improving the quality of life and shared value for the community. Bank Jambi has recorded a convincing economic performance, especially the increase in lending and the collection of third party funds which grew by an average of 5.67% and 12.92% respectively compared to the previous year.

Kami memaknai berbagai manfaat bersama sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada pemangku kepentingan dan atas kesadaran bahwa keberadaan operasi kami tersebar dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat yang harus tumbuh bersama secara berkelanjutan. Kesadaran berbagi manfaat bersama diwujudkan dalam bentuk keberpihakan program penyaluran kredit pada usaha mikro yang memiliki keterbatasan menjangkau layanan perbankan.

For us, the meaning of sharing mutual benefits is a form of moral responsibility to stakeholders and the awareness that the existence of our operations is spread out in a community environment that must grow together in a sustainable manner. Awareness of sharing mutual benefits is manifested in the form of taking part in lending programs to micro-enterprises that have limited access to banking services.

Melalui program tersebut, Bank Jambi berkomitmen untuk membantu menumbuhkan lapangan usaha pada sektor mikro kecil yang diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Langkah tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah ditunjang program unggulan dengan mengusung konsep digitalisasi selama tahun 2021, seperti Program Channel 9 yang berfokus pada penyaluran UMKM, koperasi, warung, sekolah & pesantren, Rumah Pangan Kita (RPK) melalui Laku Pandai, QRIS dan CCM sebagai *delivery channel*.

Through this program, Bank Jambi is committed to helping grow business fields in the micro and small sector which is expected to reduce unemployment and alleviate poverty. This policy cannot be separated from government support supported by superior programs by carrying out the concept of digitization during 2021 such as the Channel 9 Program which focuses on distributing MSMEs, cooperatives, stalls, schools & Islamic boarding schools, Rumah Pangan Kita (RPK) through Laku Pandai, QRIS and CCM as delivery channels.

Selain segmen UMKM dan komitmen membantu mengatasi kemiskinan, Bank Jambi juga mendukung keberlanjutan roda pembangunan nasional, antara lain melalui kredit kepada perguruan tinggi dan sekolah, berpartisipasi dalam kredit sindikasi untuk proyek infrastruktur, seperti jalan tol, pembangkit listrik, perusahaan jaringan telekomunikasi, maupun penyaluran kredit segmen industri besar (pabrik), properti, perhotelan, dan pariwisata.

In addition to the MSME segment and its commitment to help overcome poverty, Bank Jambi also supports the sustainability of national development, among others through credit to universities and schools, participating in syndicated loans for infrastructure projects, such as toll roads, power plants, telecommunications network companies, as well as lending. large industrial segment (factory), property, hotel and tourism.

Pertumbuhan bisnis, penambahan dana kelolaan pihak ketiga, peningkatan penyaluran kredit serta berbagai prestasi Bank Jambi pada tahun ini mencerminkan bagaimana upaya kami dalam menjaga kelangsungan usaha. Kami menyadari bahwa keberlanjutan pertumbuhan ini tidak dapat tercapai tanpa keterlibatan secara aktif dari para Pemangku Kepentingan Perusahaan.

The growth of our business as well as third party managed funds, increased lending and various achievements of Bank Jambi this year reflect how we strive to maintain business continuity. We realize that this sustainable growth cannot be achieved without the active involvement of the Company's Stakeholders.

Oleh karenanya, kami berkomitmen untuk senantiasa bersinergi dengan para Pemangku Kepentingan dalam membangun hubungan yang kolaboratif dan saling menguntungkan. Sinergitas tersebut kami wujudkan melalui pilar kontribusi ekonomi, pemberdayaan sosial, pelestarian lingkungan, serta upaya kami untuk senantiasa membangun Tata Kelola Perusahaan yang baik dan budaya peduli risiko dalam pengelolaan usaha. Pilar-pilar tersebut

Therefore, we are committed to always synergize with the Stakeholders in building collaborative and mutually beneficial relationships. This synergy is realized through the pillars of economic contribution, social empowerment, environmental preservation, as well as our efforts to always build good corporate governance and a risk-aware culture in business management. We embody these pillars in priority and strategic programs which include encouraging the development of

kami wujudkan dalam program-program prioritas dan strategis yang meliputi mendorong pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), mendorong penguatan inklusi keuangan, memfasilitasi pembangunan infrastruktur, menciptakan praktik ketenagakerjaan yang layak dan adil, serta terlibat dalam pelestarian lingkungan.

Bank Jambi meyakini bahwa dibalik kinerja yang telah dicapai, masih banyak aspek kinerja keberlanjutan yang perlu kami tingkatkan, terlebih tantangan dan persaingan dalam bisnis keuangan yang semakin ketat akibat resesi ekonomi global, perubahan regulasi Pemerintah, integrasi ekonomi regional, meningkatnya biaya modal, perubahan model bisnis akibat *disruptive technologies*, serta anomali lingkungan hidup terkait pemanasan global yang tidak dapat diprediksikan. Namun dengan dukungan dan semangat yang luar biasa dari seluruh Pemangku Kepentingan, Bank Jambi berhasil melewati tantangan tersebut dengan pencapaian kinerja yang membanggakan.

Atas nama seluruh jajaran Direksi Bank Jambi, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemangku Kepentingan yang telah mendukung keberlanjutan usaha kami sehingga mampu memberikan manfaat bersama *(shared value)* yang optimal kepada bangsa dan masyarakat. Semoga pada tahun-tahun yang akan datang, Bank Jambi dapat terus menjaga keberlanjutan usaha dan menjadi Bank Pembangunan Daerah terbaik.

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), encouraging strengthening financial inclusion, facilitating infrastructure development, creating decent and fair employment practices, and being involved in environmental conservation.

Bank Jambi believes that behind the performance that has been achieved, there are still many aspects of sustainability performance that we need to improve, especially the challenges and competition in the financial business which is getting tougher due to the global economic recession, changes in Government regulations, regional economic integration, rising capital costs, changing models. business due to disruptive technologies, as well as environmental anomalies related to unpredictable global warming. However, with the extraordinary support and enthusiasm from all Stakeholders, Bank Jambi managed to overcome these challenges with a proud performance achievement.

On behalf of the entire Board of Directors of Bank Jambi, we express our deepest gratitude and appreciation to all Stakeholders who have supported the sustainability of our business so as to be able to provide optimal shared value to the nation and society. Hopefully in the years to come, Bank Jambi can continue to maintain business sustainability and become the best Regional Development Bank.

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT

8

BANK JAMBI

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2021
Dan Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
Beserta
Laporan Auditor Independen

Financial Statements
as of December 31, 2021
and for The Year
Then Ended
with
Indepemdent Auditor' Report

BANK JAMBI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
BOARD OF DIRECTORS STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / *We, the undersigned below* :

1.	Nama / *Name*	:	Yunsak El Halcon
	Alamat kantor / *Office Address*	:	Jln. Jend. A. Yani No. 18, Jambi 36122
	Alamat Domisili sesuai KTP / *Domicile as states ID Card*	:	Jln. Letjen Suprapto RT/RW 011/- Kel Telanai Pura Kecamatan Ciputat
	Nomor Telepon Kantor / *Phone Number Office*	:	0741-60416, 60665
	Jabatan / *Position*	:	Direktur Utama/ *President Director*
2.	Nama / *Name*	:	Pauzi Hoesman Matsari
	Alamat kantor / *Office Addres*	:	Jln. Jend. A. Yani No. 18, Jambi 36122
	Alamat Domisili sesuai KTP / *Domicile as states ID Card*	:	Jln. Bukit Bulan RT/RW 021 Kel/Desa Rajawali Kecamatan Jambi Timur
	Nomor Telepon Kantor / *Phone Number Office*	:	0741-60416, 60665
	Jabatan / *Position*	:	Direktur Operasional/ *Operational Director*

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank);
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

State that :

1. *We are responsible on the preparation and representation of the PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank);*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *a. All information contained in Bank's financial statements has been fully and correctly disclosed*
   b. The Bank's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not eliminate material information and facts.
4. *We are responsible on the Bank's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter has been made truthfully.

Jambi,
02 Februari 2022 / *February 02, 2022*
Atas nama dan mewakili Direksi / *For and behalf of the Board of Directors.*

Yunsak El Halcon	**Pauzi Hoesman Matsari**
Direktur Utama / *President Director*	Direktur Operasional / *Operational Director*

Kantor Pusat
Jln. Jend. A. Yani No. 18 Jambi 36122
Telp. : (0741) 60416, 60665 Fax. : (0741) 64882, 62623
e-mail : bankjambi@bankjambi.co.id

DAFTAR ISI / *TABLE OF CONTENTS*

		Halaman/ *Pages*	
1.	SURAT PERNYATAAN DIREKSI		*1. DIRECTOR'S STATEMENTS LETTER*
2.	DAFTAR ISI		*2. TABLE OF CONTENTS*
3.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		*3. INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*
4.	LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, yang terdiri dari:		*4. FINANCIAL STATEMENT - For the year ended on December 31, 2021, are as follow:*
	- Laporan Posisi Keuangan	i - iii	- *Statement of Financial Position*
	- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	iv	- *Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
	- Laporan Perubahan Ekuitas	v	- *Statement of Changes in Equity*
	- Laporan Arus Kas	vi - vii	- *Statement of Cash Flows*
	- Catatan atas Laporan Keuangan	1 - 152	- *Notes to Financial Statement*

dbsd&a
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants

License number :
Minister of Finance : Kep-127/KM.1/2013
Cabang Jakarta Selatan
Jl. Mampang Prapatan VIII No. R 25B
Jakarta 12790 Indonesia
Phone : (62-21) 7975542, 7989085, 70641138
Fax : (62-21) 7996851
E-mail : dadangmulyanakapdbsda@gmail.com
dadang_mulyana@kapdbsda.co.id

Nomor / *Number* : 00003/3.0268/AU.1/07/0394-2/1/II/2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahaan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

dbsd&a
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants

License number :
Minister of Finance : Kep-127/KM.1/2013
Cabang Jakarta Selatan
Jl. Mampang Prapatan VIII No. R 25B
Jakarta 12790 Indonesia
Phone : (62-21) 7975542, 7989085, 70641138
Fax : (62-21) 7996851
E-mail : dadangmulyanakapdbsda@gmail.com
dadang_mulyana@kapdbsda.co.id

Tanggung jawab Auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebakan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' Responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi as of December 31, 2021, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI
Izin Usaha / *License Firm* No. 127/KM.1/2013

00003

Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI
Nomor Registrasi Akuntan Publik /
Public Accountant Registration Number
AP.0394

Jakarta, 02 Februari 2022/ *February 02, 2022*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	**2021**	**2020**	
ASET				***ASSETS***
Kas	2.d, 2.e, 4	321.828.427.300	244.279.258.050	*Cash*
Giro Pada Bank Indonesia	2.d, 2.f, 5	536.174.204.653	782.449.612.638	*Current Account With Bank Indonesia*
Giro Pada Bank Lain	2.d, 2.f, 6	1.888.661.773	18.606.640.214	*Current Account With Other Banks*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2.d, 2.g, 7	789.008.437.735	75.348.266.873	*Placements With Bank Indonesia and Other Banks*
Efek-efek	2.d, 2.h, 8	2.233.265.043.716	1.598.745.863.616	*Marketable Securities*
Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	2.d, 2.h, 9	142.550.758.665	--	*Securities Purchased Under Agreement To Resell*
Kredit Yang Diberikan	2.d, 2.k, 10			*Loans*
Pihak Ketiga		8.963.351.562.682	8.480.549.000.297	*Third Parties*
Pihak Berelasi	2.c, 37	12.714.112.638	14.059.136.282	*Related Parties*
Jumlah Kredit yang Diberikan		8.976.065.675.320	8.494.608.136.579	*Total Loans*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(132.443.490.930)	(91.104.705.529)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Kredit yang Diberikan - bersih		8.843.622.184.390	8.403.503.431.050	*Total Loans - nett*
Pajak Dibayar Dimuka	2.z, 11.a	7.000.000.000	15.000.000.000	*Prepaid Taxes*
Aset Tetap	2.l, 12	167.703.626.261	114.865.412.720	*Fixed Assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(58.419.114.628)	(61.549.625.269)	*Less: Accumulated depreciation*
Jumlah		109.284.511.633	53.315.787.451	*Total*
Aset Hak Guna	2.p, 13	23.661.201.901	24.155.426.720	*Right-of-Use Assets*
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(15.441.154.750)	(10.315.194.514)	*Less: Accumulated depreciation*
Jumlah		8.220.047.151	13.840.232.206	*Total*
Aset Takberwujud	2.m, 14	5.331.538.116	4.844.238.116	*Intangible Assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(4.841.280.565)	(4.763.462.878)	*Less: Accumulated amortization*
Jumlah		490.257.551	80.775.238	*Total*
Aset Pajak Tangguhan	2.z, 11.d	19.372.596.044	13.869.165.696	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-lain	2.n, 2.o, 15	106.691.521.920	172.235.983.899	*Others Assets*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(3.053.166.763)	(1.580.562.591)	*Less: Allowance for impairment losses*
Jumlah		103.638.355.157	170.655.421.308	*Total*
TOTAL ASET		**13.116.343.485.768**	**11.389.694.454.340**	***TOTAL ASSETS***

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABLITIES***
Liabilitas Segera	2.q, 18	184.107.147.399	101.862.410.592	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan Nasabah	2.d, 2.r, 2.s, 16			*Deposits From Customers*
Pihak ketiga		6.756.228.880.139	6.609.490.775.691	*Third parties*
Pihak berelasi	2.c, 36	3.843.394.061.631	2.776.350.264.377	*Related parties*
Jumlah simpanan nasabah		10.599.622.941.770	9.385.841.040.068	*Total deposits from customers*
Simpanan Dari Bank Lain	2.d, 2.t, 17	314.503.497.350	10.970.997.218	*Deposits From Other Banks*
Utang Pajak	2.z, 10.b	9.199.539.027	10.637.941.093	*Taxes Payable*
Pinjaman Yang Diterima	2.d, 2.x, 19	14.830.000.000	30.000.000.000	*Borrowings*
Imbalan Kerja Karyawan	2.y, 20			*Employee Benefits*
Jasa produksi	2.c	3.538.417.140	40.087.565	*Bonus*
Imbalan kerja	2.c	20.407.803.987	44.411.065.829	*Employee benefits*
Jumlah		23.946.221.127	44.451.153.394	*Total*
Liabilitas Lain-lain	22	35.026.508.617	41.300.157.394	*Others Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**11.181.235.855.290**	**9.625.063.699.759**	***TOTAL LIABILITIES***

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham				*Share Capital*
Modal dasar saham terdiri dari saham Seri A sebesar 2.165.000 saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham dan Saham Seri B sebesar 270.000 lembar, dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 per 31 Desember 2021 dan 2020				*Authorized share capital consists of Series A shares amounting to 2,165,000 shares, with a nominal of Rp1,000,000 per share and Series B Shares of 270,000 shares, with a nominal value of Rp500,000 in December 31, 2021 and 2020*
Modal ditempatkan dan disetor penuh saham Seri A masing-masing sebesar 766.596 dan 764.096 lembar saham dan Seri B masing-masing sebesar 8.441 per 31 Desember 2021 dan 2020	2.ab, 23	770.816.500.000	768.316.500.000	*The issued and paid-up capital of the Series A shares amounting to 770,816 and 768,316 shares, respectively, and the Series B shares amounting to 8,441 shares, respectively, in December 31, 2021 and 2020*
Tambahan modal disetor	2.ab, 24	590.574.736	590.931.736	*Additonal Paid in Capital*
Saldo Laba				*Retained Earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	2.ad, 26.a	841.920.121.799	735.785.976.650	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	2.ad, 26.c	314.153.668.558	275.813.481.558	*Unappropriated*
Keuntungan (Kerugian) surat berharga tersedia untuk dijual	2.d, 2.h, 27	10.121.272.060	7.895.153.866	*Unrealized gains or losses on available for sale Marketable Securities*
Keuntungan (Kerugian) atas liabilitas Imbalan pasca kerja	2.d, 2.y, 27	(2.494.506.674)	(23.771.289.229)	*Gain (Loss) on Employee benefit*
JUMLAH EKUITAS		**1.935.107.630.478**	**1.764.630.754.581**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**13.116.343.485.768**	**11.389.694.454.340**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
PENDAPATAN OPERASIONAL				***REVENUE OPERATING***
Pendapatan Bunga dan Syariah	2.w, 28	1.145.602.463.534	1.078.540.089.565	*Interest Income And Sharia Margin Income*
Pendapatan Operasional Lainnya	2.x, 29	100.572.926.283	117.695.826.287	*Other Operating Income*
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.246.175.389.817	1.196.235.915.852	*TOTAL OPERATING INCOME*
BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING EXPENSES***
Beban Bunga dan Bagi hasil	2.w, 30	392.723.556.604	473.317.527.688	*Interest Expense And Sharia Share Expenses*
Beban Operasional Lainnya				*Other Operating Expenses*
Provisi dan komisi		49.394.121.571	3.507.893.943	*Other fee and commision*
Tenaga kerja	31	222.035.530.316	211.671.152.955	*Employee's*
Umum dan administrasi	32	134.505.987.516	135.587.233.497	*General and administrative*
Pembentukkan cadangan kerugian penurunan nilai	33	44.370.414.559	11.262.893.009	*Allowance for impairment losses*
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		843.029.610.566	835.346.701.092	*TOTAL OPERATING EXPENSES*
LABA OPERASIONAL		**403.145.779.251**	**360.889.214.760**	***OPERATING REVENUE***
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL	34			***NON OPERATING INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan Bukan Operasional		8.481.562.689	11.318.268.203	*Non Operating Income*
Beban Bukan Operasional		(4.836.460.399)	(3.686.827.774)	*Non Operating Expenses*
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL		3.645.102.290	7.631.440.429	*TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES)*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**406.790.881.541**	**368.520.655.189**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK				***TAX EXPENSES***
Kini	2.z, 11.c	103.513.907.640	82.898.788.940	*Current Income Tax*
Beban (Manfaat) Tangguhan	2.z, 11.d	(10.876.694.657)	9.808.384.691	*Deferred Tax*
JUMLAH BEBAN PAJAK		92.637.212.983	92.707.173.631	*TOTAL TAX EXPENSES*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**314.153.668.558**	**275.813.481.558**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)***
Perubahan nilai wajar efek-efek				*Net changes in fair value of available for sale*
tersedia untuk dijual - bersih	2.d, 2.h, 27	2.226.118.194	7.379.114.350	*marketable securities - net*
Keuntungan (kerugian) Aktuaria - bersih	2.d, 2.y, 27	21.276.782.555	(9.534.310.197)	*Actuarial gain (loss) - net*
JUMLAH		23.502.900.749	(2.155.195.847)	*TOTAL*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**337.656.569.307**	**273.658.285.711**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM	2.aa, 36	**408.222**	**364.243**	***EARNING PER SHARES***

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
AND FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued And Fully Paid-Up Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Saldo Laba / *Retained Earnings*		Pendapatan Komprehensif Lainnya/ *Other Comprehensive Income*		Jumlah Ekuitas/ *Total Shareholders' Equity*	
				Telah Ditentukan Penggunaanya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaanya/ *Unappropriated*	Keuntungan (Kerugian) surat berharga Tersedia Untuk Dijual/ *Unrealized Gains or Losses on Available for Sale Marketable Securities*	Keuntungan (Kerugian) Atas Imbalan Pasca Kerja/ *Gain (loss) on Employee Benefit*		
SALDO PER 31 DESEMBER 2019		**746.133.000.000**	**2.590.969.736**	**633.836.424.637**	**255.501.301.826**	**516.039.516**	**(14.236.979.032)**	**1.624.340.756.683**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019***
Dampak penyesuaian transisi atas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 71) - Bersih		--	--	(34.743.644.464)	--	--	--	(34.743.644.464)	*Impact of transitional adjustment on the implementation of Statement of Financial Accounting Standards (SFAS 71) - Net*
SALDO PER 1 JANUARI 2020 SETELAH PENERAPAN PSAK 71		**746.133.000.000**	**2.590.969.736**	**599.092.780.173**	**255.501.301.826**	**516.039.516**	**(14.236.979.032)**	**1.589.597.112.219**	***BALANCE AS OF JANUARY 1, 2020 AFTER IMPLEMENTATION OF SFAS 71***
Setoran Modal	23	22.183.500.000	(22.183.500.000)	--	--	--	--	--	*Paid in capital*
Tambahan modal disetor	24	--	20.183.462.000	--	--	--	--	20.183.462.000	*Additional Paid in capital*
Pengampunan Pajak	25	--	--	--	--	--	--	--	*Tax Amnesty*
Komprehensif Lainnya	27								*Other Comprehensive*
Efek-efek Tersedia Untuk Dijual		--	--	--	--	7.379.114.350	--	7.379.114.350	*Available for sale securities*
Laba (rugi) Aktuaria		--	--	--	--	--	(9.534.310.197)	(9.534.310.197)	*Actuarial gain (loss)*
Dividen tunai	2.ae, 26.b	--	--	--	(118.808.105.349)	--	--	(118.808.105.349)	*Cash dividends*
Pembentukan cadangan	26.a	--	--	136.693.196.477	(136.693.196.477)	--	--	--	*Appropriation for reserves*
Laba bersih tahun berjalan	26.c	--	--	--	275.813.481.558	--	--	275.813.481.558	*Profit for the year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2020		**768.316.500.000**	**590.931.736**	**735.785.976.650**	**275.813.481.558**	**7.895.153.866**	**(23.771.289.229)**	**1.764.630.754.581**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020***
Setoran Modal	23	2.500.000.000	(2.500.000.000)	--	--	--	--	--	*Paid in capital*
Tambahan modal disetor	24	--	2.499.643.000	--	--	--	--	2.499.643.000	*Additional Paid in capital*
Pengampunan Pajak	25	--	--	--	--	--	--	--	*Tax Amnesty*
Komprehensif Lainnya	27								*Other Comprehensive*
Efek-efek Tersedia Untuk Dijual		--	--	--	--	2.226.118.194	--	2.226.118.194	*Available for sale securities*
Laba (rugi) Aktuaria		--	--	--	--	--	21.276.782.555	21.276.782.555	*Actuarial gain (loss)*
Dividen tunai	2.ae, 26.b	--	--	--	(121.357.931.886)	--	--	(121.357.931.886)	*Cash dividends*
Pembentukan cadangan	26.a	--	--	154.455.549.673	(154.455.549.673)	--	--	--	*Appropriation for reserves*
Penggunaan Dana Cadangan	26.a	--	--	(48.321.404.524)	--	--	--	(48.321.404.524)	*Application of reserves*
Laba bersih tahun berjalan	26.c	--	--	--	314.153.668.558	--	--	314.153.668.558	*Profit for the year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2021		**770.816.500.000**	**590.574.736**	**841.920.121.799**	**314.153.668.558**	**10.121.272.060**	**(2.494.506.674)**	**1.935.107.630.478**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021***

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
ARUS KAS DARI				***CASH FLOWS FROM***
AKTIVITAS OPERASI				***OPERATING ACTIVITIES***
Pendapatan bunga, provisi dan komisi		1.153.800.851.001	1.077.284.754.370	*Interest income, provision and commission*
Beban bunga dan margin syariah		(367.368.210.490)	(452.526.134.777)	*Interest expense and other expenses*
Pendapatan operasional lainnya		129.197.661.423	126.775.394.973	*Other operating revenues*
Beban administrasi dan umum		(93.938.197.300)	(206.064.932.526)	*General and administrative expenses*
Beban kepegawaian		(222.035.530.316)	(211.671.152.955)	*Employee's expenses*
Pajak Penghasilan		(91.579.045.396)	(78.355.902.578)	*Income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		508.077.528.922	255.442.026.507	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Penurunan/(kenaikan) aset operasi				*Decrease/(increase) in operating assets:*
Kredit yang diberikan		(484.430.831.352)	(681.759.752.598)	*Loans*
Kenaikan (penurunan) pada:				*Increase (Decrease) in operating liabilities:*
Simpanan		1.517.314.401.834	36.935.046.494	*Deposits*
Efek Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali		142.550.758.665	--	*Securites Sold Under Repurchase Agreement*
Kas bersih diperoleh dari Kegiatan operasi		**1.683.511.858.069**	**(389.382.679.596)**	***Net cash from provided operating activities***
ARUS KAS DARI				***CASH FLOWS FROM***
AKTIVITAS INVESTASI				***INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap		(52.838.213.541)	(8.684.188.551)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset takberwujud		(487.300.000)	(14.890.000)	*Acquisition of Intangible Assets*
Kenaikan (Penurunan) efek-efek		(919.620.697.430)	1.096.254.560.830	*Increase (Decrease) Marketable Securities*
Kas bersih digunakan untuk dari Kegiatan investasi		**(972.946.210.972)**	**1.087.555.482.279**	***Net cash used in provided from investing activities***
ARUS KAS DARI				***CASH FLOWS FROM***
AKTIVITAS PENDANAAN				***FINANCING ACTIVITIES***
Kenaikan setoran modal		2.499.643.000	20.183.462.000	*Increase in share capital*
Pembayaran dividen		(169.679.336.411)	(153.551.749.812)	*Payment for dividend*
Kenaikan efek-efek yang diterbitkan		--	(499.171.116.838)	*Increase Marketable securities issue*
Kenaikan (Penurunan) pinjaman yang diterima		(15.170.000.000)	30.000.000.000	*Inrease (Decrease) in borrowings*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(182.349.693.411)**	**(602.539.404.650)**	***Net cash used in financing activities***

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**528.215.953.686**	**95.633.398.033**	***NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		1.120.683.777.775	1.025.050.379.742	*CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR*
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**1.648.899.731.461**	**1.120.683.777.775**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				*Components of cash and cash equivalent:*
Kas	4	321.828.427.300	244.279.258.050	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	536.174.204.653	782.449.612.638	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	6	1.888.661.773	18.606.640.214	*Current account with Other Banks*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7	789.008.437.735	75.348.266.873	*Placements with Bank Indonesia and Other Banks*
Jum Jasa produksi		**1.648.899.731.461**	**1.120.683.777.775**	***Total***
Imbalan kerja				
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				***ACTIVITIES NOT INFLUENCING THE CASH FLOW***
Hapus Buku Surat Berharga		--	--	*Marketable Securities Write Off*
JUMLAH AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS		**--**	**--**	***TOTAL ACTIVITIES NOT INFLUENCING THE CASH FLOW***

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi ("Bank Jambi") berkedudukan di Jambi, didirikan pada tanggal 12 Pebruari 1959 berdasarkan Akta Notaris Adi Putra Parlindungan, S.H., No. 6 yang kemudian disempurnakan melalui Akta Notaris Habro Poerwanto No. 70 tanggal 12 Oktober 1959 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi No. 3 tanggal 8 Januari 1963 tentang Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Akta Notaris tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A/5/115/6 tanggal 6 November 1959 dan telah diumumkan dalam tambahan No.110 pada Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 29 Desember 1959, dan Perda tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Des/32/127-164.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank Jambi, ruang lingkup kegiatan Bank Jambi adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Bank Jambi juga melaksanakan fungsi sebagai lembaga yang menunjang pembangunan di daerah yaitu penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah dan sebagai pemegang kas daerah dan/atau melaksanakan penyimpanan uang daerah. Bank Jambi mulai beroperasi pada tanggal 6 Oktober 1959.

Perda tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dengan Perda Provinsi Jambi No.2 tanggal 27 April 2006 Bank Jambi mengubah bentuk Badan Hukumnya dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Anggaran Dasar Bank Jambi telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian No.1 tanggal 1 Pebruari 2007 dibuat dihadapan Robert Faisal, S.H., Notaris di Jambi tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT Bank Pembangunan Daerah Jambi" disebut "Bank Jambi", dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.W20-00061.HT.01.01-TH.2007 serta telah dimuat pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal 10 Juli 2007.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi ("Bank Jambi"), located in Jambi, was established on February 12, 1959 under Notarial Deed of Adi Putra Parlindungan, S.H., No.6 which was amended with Notarial Deed of Habro Poerwanto No.70 dated October 12, 1959 and the Regional Regulation (Perda) of Jambi Province No. 3 dated January 8, 1963 regarding the Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi. The Notarial Deed was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under his Decree No.J.A/5/115/6 dated November 6, 1959 and was promulgated in the supplement No.110 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 104 dated December 29, 1959, and the Perda was approved by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia under his Decree No.Des/32/127-164.

In accordance with article 3 of Bank Jambi's Articles of Association, Bank Jambi's scope of activities is to engage in general banking services in compliance with prevailing laws and regulations. Bank Jambi also conducts the function of an entity that supports the regional development by motivating and encouraging the development of the region, and also serves as regional cash account holder, and/or maintains regional savings. Bank Jambi started its operation on October 6, 1959.

The above Regional Regulation has been amended several times, and in the latest amendment under Regional Regulation of Jambi Province No.2 dated April 27, 2006 Bank Jambi changed its legal entity from Perusahaan Daerah (Regional Company of) Bank Pembangunan Daerah Jambi to Limited Liability Company.

Bank Jambi's Articles of Association have been amended several times, as stipulated in the Deed of Establishment No. 1 dated February 1, 2007 of Robert Faisal, S.H., notary in Jambi concerning the Establishment of Limited Liability Company "PT Bank Pembangunan Daerah Jambi" or "Bank Jambi", which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.W20-00061.HT.01.01-TH.2007 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.55 dated July 10, 2007.

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Terakhir sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar Perseroan, termaktub dalam Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) No. 34 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Disebut "Bank Jambi" No.AHU-AH.01.03-0494746 tanggal 31 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0235418.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, Bank Jambi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup Bank Jambi antara lain:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, cek atau sarana lainnya;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya; dan
- Melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

Selain itu Bank Jambi juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten Jambi dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten Jambi.

Bank Jambi memulai aktivitas unit usaha Syariah berdasarkan ijin dari Bank Indonesia melalui suratnya Nomor 13/2482/DpbS, tanggal 7 Desember 2011. Kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah efektif dilaksanakan tanggal 3 Januari 2012.

Kantor Pusat Bank Jambi terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18, Telanai Pura, Jambi. Unit Usaha Syariah berlokasi di Jl. Kapt. Pattimura No.70-71, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi 36139.

1. GENERAL (Continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The latest amendment to the Articles of Association of the Company is set forth in the Deed of Confirmation of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) No. 34 dated December 21, 2021, of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notary in Jambi, which deed has been notified to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with evidence of Receipt of Notification of Amendment to Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Referred to as Bank Jambi No.AHU-AH.01.03-0494746 dated December 31, 2021 and has been registered in the Company Register under No.AHU-0235418.AH.01.11 Tahun 2021 dated December 31, 2021.

In accordance with article 3 of Bank Jambi's Articles of Association, Bank Jambi's objective is to engage in the Banking business. To achieve this objective, the scope of Bank Jambi's activities mainly covers the following:

- *Collecting third-party funds in the form of current accounts, time deposits, certificates of deposits, savings, and/or other similar forms;*
- *Granting loans;*
- *Placing funds in, obtaining borrowings from, or providing financing to other Banks, either by letter, telecommunication facilities, checks or other facilities;*
- *Conducting investment activities through share participation in Bank or other financial institution companies; and*
- *Conducting Sharia Banking activities.*

In addition, Bank Jambi also assists the Provincial Government, Jambi Municipal/Regency in developing Rural Banks (BPR) and other financial service institutions owned by the Provincial Government of Jambi Municipal/Regency.

Bank established Sharia Business Unit based on the Letter of Bank Indonesia Number 13/2482/DpbS, dated December 7, 2011. The sharia branch office operation was effectively held on January 3, 2012.

The Head Office of Bank Jambi is located at Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18, Telanai Pura, Jambi. Sharia Business Unit is located at Jl. Kapt. Pattimura No.70-71, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi 36139.

1. UMUM (Lanjutan) / 1. GENERAL (Continued)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan) / a. Establishment and General Information (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank mempunyai jaringan distribusi sebagai berikut:

As of December 31, 2021 and 2020, Bank has distribution network as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Kantor Cabang Konvensional	12	11	*Conventional Branch Offices*
Kantor Cabang Pembantu Konvensional	69	65	*Conventional Sub Branches*
Kantor Cabang Pembantu Syariah	2	2	*Sharia Sub Branches*
Kantor Fungsional	--	1	*Functional Office*
Kantor Cabang Syariah	1	1	*Sharia Branch Office*
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	131	118	*Automatic Teller Machines (ATM)*

b. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit / b. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board and Audit Committee

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jambi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jambi as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Dra. Hj. Emilia, M.E.	Dra. Hj. Emilia, M.E.	*President Commissioner*
Komisaris Independen	--	Khairul Pata, S.Sos *	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	--	Ir. Ari Karyawan Semiawan, M.Sc. *	*Independent Commissioner*
	*) berakhir di Oktober 2021	*) *ended in October 2021*	
Dewan Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si	Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si	*President Director*
Direktur Kepatuhan	Hj. Riza Roziani, S.E.	Hj. Riza Roziani, S.E.	*Compliance Director*
Direktur Operasional	Drs. H. Pauzi Hoesman Matsari	Drs. H. Pauzi Hoesman Matsari	*Operational Director*
Direktur Pemasaran dan Syariah	H. Khairul Suhairi, S.E.	H. Khairul Suhairi, S.E.	*Marketing and Sharia Director*

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 8 Pebruari 2019 yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Akta Berita Acara No. 04 dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., di Jambi.

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 10 Februari 2021 dan tanggal 17 Desember 2020, yang risalah rapatnya di dokumentasikan dalam Akta Berita Acara No. 19 dan No. 24 dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notaris di Jambi.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

b. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board and Audit Committee (continued)

The Board of Commissioners as of December 31, 2021 and 2020 was appointed based on the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on February 8, 2019, which was documented under Notarial Deed No.4, of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, Notary in Jambi.

The Board of Directors as of December 31, 2021 and 2020 was appointed based on the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on February 10, 2021, and on December 17, 2020, which was documented under Notarial Deeds No. 19 and No. 24, of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notary in Jambi.

The composition of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2021, and 2020 is as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Dra. Hj. Emilia, M.E.	Khairul Pata, S.Sos *	*Chairman*
Anggota	Dra. Hj. Suspayetti, M.Si.	Dra. Hj. Suspayetti, M.Si.	*Member*
Anggota	Firmansyah Putra, S.H., M.H.	Firmansyah Putra, S.H., M.H.	*Member*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Komite Pemantau Risiko			***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Dra. Hj. Emilia, M.E.	Ir. Ari Karyawan Semiawan, M.Sc. *	*Chairman*
Anggota	Rahayu, S.E., M.Sc, Ak.	Rahayu, S.E., M.Sc, Ak.	*Member*
Anggota	Yor Patrick Nazda, S.E., M.Si.	Yor Patrick Nazda, S.E., M.Si.	*Member*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Komite Remunerasi dan Nominasi			***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	Dra. Hj. Emilia, M.E.	Ir. Ari Karyawan Semiawan, M.Sc. *	*Chairman*
Anggota	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Dra. Hj. Emilia, M.E.	*Member*
Anggota	--	Khairul Pata, S.Sos *	*Member*
Anggota	--	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	*Member*

*) berakhir di Oktober 2021

**) ended in October 2021*

Susunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 129A tanggal 25 Oktober 2021 dan No. 68 tanggal 26 April 2019.

The composition of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee as of December 31, 2021 and 2020 is in accordance with the Director Decision Letter No. 129A dated October 25, 2021 and No.68 dated April 26, 2019.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit (lanjutan)

Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko adalah sampai dengan terpilihnya Komisaris Independen yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan komite audit Bank Jambi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) No.IX.I.5 tanggal 24 Desember 2004 dan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum pada Pasal 12 ayat (1).

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah sesuai dengan SK Direksi No.128A tanggal 25 Oktober 2021 dan No.144 tanggal 31 Oktober 2018.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Jambi adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

b. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board and Audit Committee (continued)

The term of office of the Chairman and Members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee is until the election of a new Independent Commissioner in accordance with applicable regulations.

The establishment of Bank Jambis's Audit Committee is in compliance with the Regulation of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No.IX.I.5 dated December 24, 2004, and in compliance with Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks in Article 12 paragraph (1).

The composition of the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2021 and 2020 is in accordance with Director Decision Letters No.128A dated October 25, 2021 and No.144, dated October 31, 2018.

The composition of Bank Jambi's Sharia Supervisory Board is as follows:

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	
Dewan Pengawas Syariah			***Sharia Supervisory Board***
Ketua	--	Dr. Abdullah Ali Miftah, M.Ag.	*Chairman*
Anggota	Dr. Lucky Enggraini Fitri, S.E., M.Si.	Dr. Lucky Enggraini Fitri, S.E., M.Si.	*Member*

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 27 Juli 2020, dan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 19 November 2020, yang risalah rapatnya di dokumentasikan dalam Akta Berita Acara No.45 dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, di Jakarta.

Pemimpin Divisi Satuan Kerja Audit Internal Bank Jambi adalah Hendri, S.E., sesuai dengan Keputusan Direksi Bank Jambi Nomor 57 tahun 2017 tanggal 12 April 2017.

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah H. Achmad Jais, S.E., ME.Sy., sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 39 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, dan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Raden Azwan, S.E. sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 231 tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016.

The Sharia Supervisory Board as of December 31, 2021 and 2020 was appointed based on Extraordinary General Meeting of Shareholders held on July 27, 2020, and Circular Decree of the Shareholders held on November 19, 2020, which was documented under Notarial Deed No.45 of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta.

Bank Jambi's Head of Internal Control Division is Hendri, S.E., based on Bank Jambi's Director Decision letter number 57 of 2017 dated April 12, 2017.

The Bank's Corporate Secretary as of December 31, 2021 is H. Achmad Jais, S.E., ME.Sy., based on the Bank's Director Decision letter number 39 of 2021 dated March 29, 2021, and as of December 31, 2020 is Raden Azwan, S.E., based on the Bank's Director Decision letter number 231 of 2016 dated August 25, 2016.

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit (lanjutan)

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Komite Audit dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

b. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board and Audit Committee (continued)

The total salaries and allowances paid to the Board of Commissioners and Audit Committee and Board of Directors are as follows:

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*				
	Jumlah anggota/ *Members*	**Gaji/ *Salaries***	**Bonus/ *Bonus***	**Jumlah/ *Total***	
Dewan Komisaris	3	816.750.000	3.220.878.030	4.037.628.030	*Board of Commissioners*
Dewan Direksi	4	2.417.580.000	15.473.359.470	17.890.939.470	*Board of Directors*
Komite Audit	2	145.848.000	42.539.000	188.387.000	*Audit Committee*
Komite Pemantau Risiko	2	145.848.000	42.539.000	188.387.000	*Risk Monitoring Committee*
Dewan Pengawas Syariah	2	69.620.000	19.647.000	89.267.000	*Sharia Supervisory Board*
Sekretaris Perusahaan	6	381.430.326	543.859.256	925.289.582	*Corporate Secretary*
Jumlah	**19**	**3.977.076.326**	**19.342.821.756**	**23.319.898.082**	***Total***

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*				
	Jumlah anggota/ *Members*	**Gaji/ *Salaries***	**Bonus/ *Bonus***	**Jumlah/ *Total***	
Dewan Komisaris	3	914.760.000	3.675.375.085	4.590.135.085	*Board of Commissioners*
Dewan Direksi	4	1.859.402.678	12.863.812.793	14.723.215.471	*Board of Directors*
Komite Audit	2	144.786.000	24.308.000	169.094.000	*Audit Committee*
Komite Pemantau Risiko	2	144.786.000	24.308.000	169.094.000	*Risk Monitoring Committee*
Dewan Pengawas Syariah	2	134.520.000	22.321.667	156.841.667	*Sharia Supervisory Board*
Sekretaris Perusahaan	4	214.886.078	274.418.677	489.304.755	*Corporate Secretary*
Jumlah	**17**	**3.413.140.756**	**16.884.544.222**	**20.297.684.978**	***Total***

c. Susunan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah karyawan Bank Jambi adalah sebagai berikut:

c. The Composition of Employees

As of December 31, 2021 and 2020, the number of employees of Bank Jambi is as follows:

Tahun/ *Year*	**Tetap/ *Permanent***	**Honorer/ *Temporary***	**Outsourcing/ *Outsourcing***	**Jumlah *Total***
31 Desember /*December 31,* 2021	472	161	357	990
31 Desember /*December 31,* 2020	492	115	351	958

d. Persetujuan dan pengesahan untuk penerbitan laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 2 Februari 2022.

d. Approval and authorization for the issuance of financial statements

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements that were approved for issuance on February 2, 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Bank Jambi disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang telah diterapkan secara konsisten kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh Bank dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis dan disusun dengan dasar akrual (kecuali laporan arus kas, pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*), terkecuali untuk yang berikut ini:

1. Instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar;
2. Instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur pada nilai wajar;
3. Aset keuangan tersedia untuk dijual yang diukur pada nilai wajar;
4. Aset keuangan dan liabilitas yang diakui ditunjuk sebagai lindung nilai dalam kualifikasi hubungan lindung nilai wajar disesuaikan untuk perubahan nilai wajar diatribusikan pada risiko lindung nilai;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Summary of significant accounting policies applied in the preparation and presentation of the financial statements is as follows:

a. Basis of preparation of the financial statements

Statement of compliance

Bank Jambi's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).

Financial statements were prepared in accordance with SFAS 1, "Presentation of Financial Statements".

The significant accounting policies have been consistently applied by the Bank, except as explained below, in the presentation of the financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020.

The financial statements have been prepared on historical cost basis and accrual basis of accounting (except for statement of cash flows, revenue from istishna and profit sharing for mudharabah and musyarakah financing), except for the following:

1. *Derivative financial instruments are measured at fair value;*
2. *Financial instruments at fair value through profit or loss are measured at fair value;*
3. *Available-for-sale financial assets are measured at fair value;*
4. *Recognized financial assets and financial liabilities designated as hedged items in qualifying fair value hedge relationship are adjusted for changes in fair value attributable to the risk being hedged;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis dan disusun dengan dasar akrual (kecuali laporan arus kas, pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*), terkecuali untuk yang berikut ini: (lanjutan)

5. Liabilitas untuk imbalan pasti diakui sebesar nilai kini imbalan pasti dikurang total dari perencanaan, ditambah keuntungan aktuarial yang diakui, dikurangi biaya jasa di masa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuarial yang belum diakui.

Unit Usaha Syariah, yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*", PSAK 105 "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK 106 "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK 107 "Akuntansi *Ijarah*" dan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

1. Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan;

2. Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Statement of compliance (continued)

The financial statements have been prepared on historical cost basis and accrual basis of accounting (except for statement of cash flows, revenue from istishna and profit sharing for mudharabah and musyarakah financing), except for the following: (continued)

5. The liability for defined benefit obligations is recognized at the present value of the defined benefit obligation less the net total of the plan assets, plus recognized actuarial gains, less unrecognized past service cost and unrecognized actuarial losses.

The Sharia Business Unit, which is engaged in sharia banking presents financial statements in conformity with sharia accounting principles in accordance with SFAS 101, "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS 102 "Accounting for Murabahah", SFAS 105 "Accounting for Mudharabah", SFAS 106 "Accounting for Musyarakah", SFAS 107 "Accounting for Ijarah", and SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

The statements of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities. For the purpose of statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and Deposit Facility in Bank Indonesia, that mature within three months from the date of acquisition, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted in use.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Statements of Financial Accounting Standards requires the use of judgments, estimates and assumptions that affect:

1. The reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements;

2. The reported amounts of income and expenses during the reporting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas taksiran akuntansi diakui pada periode dimana taksiran tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi taksiran tersebut.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang akan dimulai 1 Januari 2021 yang berdampak terhadap laporan keuangan Bank.

- Amandemen PSAK No.22 "Kombinasi Bisnis";
- PSAK 110 "Akuntansi Sukuk";
- PSAK 111 "Akuntansi Wa'd";

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Statement of compliance (continued)

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed an on going basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future period affected.

The reporting currency used for the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are in full amount of Rupiah.

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of the Statements of Financial Accounting Standards

Below is the Indonesian Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of the Statement of Financial Accounting Standards ("IFAS") that are mandatory to apply starting January 1, 2021 which affect the Bank's financial statements.

- *Amendment to SFAS No.22 "Business Combinations";*
- *SFAS No.110 "Accounting for Sukuk";*
- *SFAS No.111 "Accounting for Wa'd";*

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substantial changes to Bank's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial period:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak - Pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Bank.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Transactions with Related Parties

In the normal course of its business, Bank enters into transactions with related parties as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosure". This revised SFAS requires the disclosures of relationships, transactions, and balances with related parties, including commitments, in the financial statements.

Implementation of the revised SFAS has an impact to the disclosure of financial statements of the Bank.

The Bank considers the following as their related parties:

1. A person or a close member of such person's family is related to the reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control over the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity; or
   c. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;
   d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika: (lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1.a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 37.

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan, kredit, dan investasi surat berharga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Transactions with Related Parties (continued)

The Bank considers the following as their related parties: (continued)

2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)

   e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers entity are also related to the reporting entity;

   f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

   g. The person identified in (1.a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the parent of the entity).

This transaction is made under the terms agreed by both parties, where such terms may not be the same as other transactions made with non-related parties.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to financial statements and the details are presented in Note 37.

d. Financial Assets and Financial Liabilities

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, financial assets held for trading, loans, and investment securities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari simpanan dari bank-bank, simpanan dari nasabah, pinjaman yang diberikan dan surat berharga yang diterbitkan.

1. Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from banks, deposits from customers, borrowing and debt securities issued.

1. Classification

The Bank classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at amortized cost.*

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model that aims at having financial assets in order to obtain contractual cash flow; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model that aims at obtaining contractual cash flow and sell financial assets; and*
- *The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan

- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

1. Classification (continued)

Valuation of business models

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Bank's key management personnel;*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*

- *How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).*

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- *Fitur leverage;*
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.
  Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

1. Classification (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Bank considers:

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities.*
  Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)*

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

1. Classification (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ *Category as defined by SFAS 71*		**Golongan (ditentukan oleh Bank)/ *Class (as determined by the Bank)***	**Subgolongan/ *Subclasses***
Aset Keuangan / *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income*	Efek-efek/*Marketable securities*	
		Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*	
		Penyertaan saham/ *Equity investments*	
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	Kas/*Cash*	*Kas pada vendor /Cash in vendor*
		Giro pada Bank Indonesia/*Current accounts with Bank Indonesia*	
		Giro pada bank lain / *Current accounts with other banks*	
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia /*Placements with other banks and Bank Indonesia*	
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/*Securities purchased under agreements to resell*	
		Wesel ekspor dan tagihan lainnya/*Bills and other receivables*	
		Tagihan akseptasi/*Acceptance receivables*	
		Pinjaman yang diberikan/*Loans*	
		Aset lain-lain/*Other assets*	Piutang lain-lain / *Other receivables*
			Piutang bunga / *Interest receivables*
			Lain-lain / *Others*
			Piutang terkait transaksi ATM / *Receivables related to ATM transactions*
			Piutang Premi Asuransi / *Insurance premium receivables*
		Efek-efek / *Marketable securities*	
		Obligasi Pemerintah/*Government Bonds*	

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)*

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

1. Classification (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

<table>
<tr><th colspan="2">Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71</th><th>Golongan (ditentukan oleh Bank)/ Class (as determined by the Bank)</th><th>Subgolongan/ Subclasses</th></tr>
<tr><td rowspan="20">Liabilitas Keuangan / Financial liabilities</td><td>Derivatif lindung nilai / Hedging derivatives</td><td colspan="2">Tagihan derivatif - terkait lindung nilai atas arus kas / Derivative receivables - hedging instruments in cash flow hedges related</td></tr>
<tr><td>Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi / Financial liabilities at fair value through profit or loss</td><td colspan="2">Liabilitas derivatif - tidak terkait lindung nilai / Derivative payables - non hedging related</td></tr>
<tr><td rowspan="18">Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi / Financial liabilities at amortized cost</td><td colspan="2">Liabilitas segera / Obligation due immediately</td></tr>
<tr><td colspan="2">Simpanan nasabah / Deposits from customers</td></tr>
<tr><td colspan="2">Simpanan dari bank lain / Deposits from other banks</td></tr>
<tr><td colspan="2">Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali / Securities sold under agreements to repurchase</td></tr>
<tr><td colspan="2">Liabilitas akseptasi / Acceptance payables</td></tr>
<tr><td colspan="2">Beban yang masih harus dibayar / Accrued expenses</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Liabilitas lain-lain / Other liabilities</td><td>Setoran jaminan / Security deposit</td></tr>
<tr><td>Utang bunga / Interest payable</td></tr>
<tr><td>Utang nasabah / Payable to customers</td></tr>
<tr><td>Utang ke pemegang polls / Obligation to policy holders</td></tr>
<tr><td>Utang reasuransi dan komisi / Reinsurance payable and commission</td></tr>
<tr><td>Lain-lain / Others</td></tr>
<tr><td colspan="2">Efek-efek yang diterbitkan / Marketable securities issued</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pinjaman yang diterima / Borrowings</td></tr>
<tr><td>Derivatif lindung nilai / Hedging derivatives</td><td colspan="2">Liabilitas derivatif - Terkait lindung nilai atas arus aks / Derivative payables - Hedging instruments in cash flow hedges related</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan/ Loan commitment and financial guarantee contract</td><td colspan="3">Fasilitas kredit yang belum digunakan / Unused loan facilities (committed)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan / Irrevocable letters of credit</td></tr>
<tr><td colspan="3">Garansi bank yang diberikan / Bank Guarantees issued</td></tr>
<tr><td colspan="3">Standby letters of credit</td></tr>
</table>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. Pengakuan Awal

Bank pada pengakuan awal mengakui kredit yang diberikan, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, deposito dan surat utang yang diterbitkan pada tanggal awal mula. Pada pembelian dan penjualan yang lazim, aset keuangan diakui pada tanggal perdagangan di mana Bank berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya (termasuk aset dan liabilitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan di mana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

3. Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

2. Initial Recognition

The Bank initially recognizes loans receivable, placements with Bank Indonesia and other banks, deposits and debt securities issued on the date of origination. At regular purchases and sales, financial assets are recognized on transaction date at which the Bank commits to purchase or sell the asset.

All other financial assets and liabilities (including assets and liabilities designated at fair value through profit and loss) are initially recognized on the transaction date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets or financial liabilities are measured at fair value plus (for items not subsequently measured at fair value through profit and loss) transaction costs directly attributable to its acquisition or issue. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification. Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of a financial liability and they are incremental cost that would not have been incurred if the instruments have not been acquired or issued.

3. Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4. Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

- Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan *(pass-through arrangement)*; dan

- Apakah (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

- Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan *(pass-through arrangement)*, dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

- Bank menghapusbukukan kredit atau aset produktif lainnya ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet penyisihan kerugian penurunan nilai.

- Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

4. Derecognitions

Financial assets are derecognized when:

- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired;*

- *The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass-through arrangement; and*

- *Either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

- *When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.*

- *The Bank writes-off loans or other earning assets when there is no realistic prospect of collection in the near future or the Bank's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses.*

- *Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4. Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

- Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi demikian diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

5. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

4. Derecognitions (continued)

Financial assets are derecognized when: (continued)

- *Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

5. Income and expense recognition

Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost amount of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

5. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurun nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

6. Reklasifikasi aset keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

5. Income and expense recognition (continued)

Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.

Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

6. Reclassification of financial asset

The Company reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

7. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

6. Reclassification of financial assets (continued)

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

7. Offsetting

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

8. Pengukuran biaya di amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

9. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Bank menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

8. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

9. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank establishes fair value using a valuation technique.

The Bank uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Bank menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter, unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Bank. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direview dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

9. Fair value measurement (continued)

For more complex instruments, the Bank uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Bank holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas;
- Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

9. Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- *Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).*
- *Level 3: input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.*

10. Allowance for impairment losses on financial assets

- *The Bank recognizes the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss;.*
- *There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments;*
- *The Bank measures the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:*
- *Debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
- *Other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The Bank considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut: (lanjutan)

- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- *Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Bank);*

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows: (continued)

- *Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitment is withdrawn and the cash flow is expected to be received by the Bank;*
- *For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- *If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.*
- *If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.*

Credit-Impaired Financial Assets

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan Yang Memburuk (lanjutan)

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini: (lanjutan)

- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk *(Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets* - POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

***Credit-Impaired Financial Assets** (continued)*

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events:

- *Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- *Breach of contract, such as a default or arrears;*

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events: (continued)

- *The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;*
- *It is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- *Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.*
- *Purchase or issuance of financial asset at significant discount which reflects the credit loss that occurs.*

Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets (POCI)

Financial assets are catergorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang di restrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- *Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- *Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;*
- *Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.*

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:
- *Loans which individually have significant value; or*
- *Restructured loans which individually have significant value.*

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

- *Loans which individually have insignificant value; or*
- *Restructured loans which individually have insignificant value.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan di kreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No.40/POJK.03/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Financial Service Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 regarding "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

At each statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk
  - Memburuknya status pembayaran pihak debitur dalam kelompok tersebut; dan

  - Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Recoveries of written-off financial assets *(continued)*

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

- *Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- *A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*
- *The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;*

- *It becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganization;*
- *The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- *Observed data indicates that there is a measured impairment on the estimated future cash flow of financial assets since the initial measurement of the assets, although the impairment cannot be identified to individual financial assets in that group, including:*

  - *Deterioration of the payment status of the debtor in that group; and*

  - *The estimated period between the occurrence of events and identification of a loss are determined by management for every identified portfolio. Generally, the period varies between 3 (three) to 12 (twelve) months, and for certain cases it may involve a longer period.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah

Unit Usaha Syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank *(BI checking)* dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Recoveries of written-off financial assets *(continued)*

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the Bank shall include the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assess them for impairment.

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking products

The Sharia Business Unit has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance, and repayment ability. Moreover, the provision of allowance also takes into account other things such as classification based on Bank Indonesia audit results, classification determined by other commercial banks on earning assets provided by more than one bank (BI checking) and availability of debtor's audited financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013, PSAK 102 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK 102 dan PAPSI 2013, Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sesuai dengan PSAK 102 dan Surat OJK tersebut, ketentuan transisi penurunan nilai atas aset keuangan secara kolektif berlaku mulai 1 Januari 2015.

Dalam evaluasi penurunan nilai terhadap piutang *murabahah* dilakukan secara periodik pada setiap tanggal laporan keuangan, untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang *murabahah*) dan peringkat kualitas aset, Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No. 9/9/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking products (continued)

For the purpose of evaluating the collective impairment on receivables and financing, as required by Bank Indonesia based on Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/26/DPbS dated July 10, 2013, SFAS 102 and Financial Services Authority letter No. S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning the response to Indonesian Islamic Banking Association's proposal, in adopting SFAS 102 and Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines 2013, the Bank applies the transition rule for collective impairment with the calculation based on the applicable Bank Indonesia's regulation on the Quality Rating of Assets of Commercial Bank which conducts Business Based on Sharia Principles.

In accordance with SFAS 102 and the aforementioned Financial Services Authority's Letter, the transition regulation for collective impairment calculation is effective as of January 1, 2015.

The evaluation of impairment of murabahah receivables is carried out periodically on every financial statement date to ensure methodology and assumptions are reliable, and to reduce difference between the amount of losses estimates and the actual losses.

In determining the allowance for losses (except for murabahah receivables) and asset quality rating, the Sharia Business Unit applies Regulation of Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended under Regulations of Bank Indonesia No.9/9/2007 dated June 18, 2007 and No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles in determining impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan OJK baru No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dan Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No.19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking products (continued)

Financial Services Authority (OJK) published a new OJK Regulation No. 16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 and OJK Circular Letter No.8/SEOJK.03/2015 dated March 10, 2015 concerning Asset Quality Rating for Sharia Banks and Sharia Business Unit and OJK Regulation No. 19/POJK.03/2018 dated Seotember 20, 2018 concerning Asset Quality Rating for Sharia Banks and Sharia Business Unit .

	Persentase minimum penyisihan kerugian/ *Percentage of minimum allowance for impairment*	
Lancar *)	Minimum 1%	*Current *)*
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%	*Special mention*
Kurang lancar	Minimum 15%	*Sub-standard*
Diragukan	Minimum 50%	*Doubtful*
Macet	100%	*Loss*

*) Diluar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif dengan agunan tunai.

*) *Excluding Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities, Bank Indonesia Sharia Certificate and sharia marketable securities and earning assets secured with cash collateral.*

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar hutang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

Special allowance for non-performing loans is calculated based on the debtor's debt servicing capacity. Special allowance is made as soon as the debtor's debt servicing capacity becomes questionable and management considers that the estimated recovery from the debtor is likely to fall short from the outstanding amount of principal and interest.

Penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No.13/658/DPNP/DPnP (SE-BI) tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan penghapusan atas aset non produktif dan transaksi rekening administrasi (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Impairment of commitments and contingencies

In accordance with Bank Indonesia Letter No.13/658/DPNP/DPnP (SE-BI) dated December 23, 2011, Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), however, the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable accounting standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

PSAK 48 (revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", mensyaratkan manajemen Bank untuk menelaah nilai aset untuk setiap penurunan dan penghapusan ke nilai wajar jika keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat tidak bisa diperoleh kembali. Di lain pihak, pemulihan kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Nilai tercatat aset ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Setiap rugi penurunan atau pemulihan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Taksiran kerugian atas transaksi rekening administratif disajikan sebagai estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi pada laporan posisi keuangan.

Penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai dari taksiran kerugian atas transaksi rekening administratif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Penyesuaian ini termasuk penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif dan penambahan taksiran kerugian atas transaksi rekening administratif, maupun pemulihan aset yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Transaksi komitmen dan kontinjensi dihapusbukukan dari penyisihan kerugian pada saat manajemen berpendapat bahwa transaksi komitmen dan kontinjensi tersebut tidak dapat tertagih lagi.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

Impairment of commitments and contingencies (continued)

In compliance with SFAS 48 (revised 2014), "Impairment in Asset Value", asset values are reviewed for any impairment and possible write-off to their fair values whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be fully recovered. On the other hand, a reversal of an impairment loss is recognized whenever there is indication that the asset is no longer impaired. The amount of impairment loss (reversal of impairment loss) is recognized in the current period's statements of profit or loss and other comprehensive income as expenses (revenues).

The carrying values of assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable. Any impairment loss or reversal of impairment loss is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the current period.

Estimated losses from administrative accounts transactions are presented as estimated losses on commitments and contingencies on the statements of financial position.

Adjustments to the allowance for impairment losses from the estimated losses from administrative accounts transaction are reported in the period such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for impairment losses from earning assets and additional estimated losses from administrative accounts transactions, as well as recoveries of previously written-off assets.

The commitment and contingent transactions written-off are charged to the allowance for impairment losses when management believes that they are definitely uncollectible.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents presented in the statement of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates maturing within 3 (three) months since the acquisition date, provided that they are not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dalam kegiatan usaha dengan prinsip syariah dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility* dan *deposit facility* syariah, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka, tabungan, dan *call money*.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

h. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia, unit penyertaan reksa dana, obligasi, obligasi subordinasi dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya, yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Current accounts with Bank Indonesia and other banks in sharia banking activities are stated at outstanding balance less allowance for impairment losses.

g. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility and sharia deposit facility, whereas placement with other banks is in the form of time deposit, savings, and call money.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

h. Marketable Securities

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificates Deposits of Bank Indonesia, mutual fund units, bonds, subordinated bonds and other debt instruments traded in the money market and stock exchanges.

At initial recognition, the marketable securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., amortized cost, fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Efek-efek (lanjutan)

Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.
- Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

i. Surat Berharga yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar dimuka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Marketable Securities (continued)

The Bank defined the classification of investment in marketable securities, specifically sukuk, based on business model in accordance with SFAS No. 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

- *At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*
- *At fair value securities are stated at fair values through profit or loss. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period profit or loss.*
- *At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

i. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the statement of financial position at the resale price net of unamortized interest and allowance for impairment losses.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price net of unamortized prepaid interest and allowance for impairment losses. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are repurchased using effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Surat Berharga yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali (lanjutan)

Surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

j. Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya terdiri dari tagihan transfer dan ATM antar bank. Akun ini diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

k. Kredit yang Diberikan dan Piutang Syariah

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari fasilitas *trade finance* yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Kredit yang diberikan termasuk piutang syariah, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta piutang *qardh*.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian *murabahah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase (continued)

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Interest income is amortized using the effective interest method.

j. Other Receivables

Other receivables consist of transfer receivables and inter-banks ATM. This account is classified as loans and receivables.

k. Loans and Sharia Receivables

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents there of, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 days.

Loans are classified as amortized cost.

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition loans are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

Loans may include sharia receivables, mudharabah and musyarakah financing and qardh receivable.

Sharia receivables are resulted from sale and purchase transactions under murabahah agreements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Kredit yang Diberikan dan Piutang Syariah (lanjutan)

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "marjin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana *(shahibul maal)* dan manajer pendanaan *(mudharib)* berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya.

Efektif 1 Januari 2015, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok kredit secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Loans and Sharia Receivables (continued)

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin mutually-agreed by the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. Murabahah receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

Mudharabah is a business cooperation contract between the owner of the funds (shahibul maal) and fund managers (mudharib) based on the predetermined ratio of income or gains and losses.

Effective January 1, 2015 , transaction costs that are directly attributable and an income, and additional costs to acquire the financial asset is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Musyarakah is an agreement between the investors (musyarakah partners) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Thereafter, all cash receipt under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest income, in accordance with the restructuring scheme.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Kredit yang Diberikan dan Piutang Syariah (Lanjutan)

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

l. Aset Tetap

Bank menerapkan PSAK No. 16, "Aset Tetap" dan ISAK No.25, "Hak atas Tanah".

ISAK No. 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai beban ditangguhkan pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya tersebut sudah termasuk harga pembelian dan biaya apapun yang langsung dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar mampu beroperasi dalam cara yang dimaksudkan oleh manajemen.

Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya, yaitu dilakukan dengan mengurangkan biaya dengan akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai. Biaya penggantian bagian aset tetap diakui pada jumlah yang tercatat, jika kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkandung di dalam bagian yang akan mengalir ke Bank dan biaya dapat diukur secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Loans and Sharia Receivables (Continued)

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses.

Subsequent recoveries of loans written-off are credited to the allowance for impairment losses in the statements of financial position if recovered in the current year, and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income if recovered after the statement of financial position date.

l. Fixed Assets

The Bank applies SFAS No. 16 "Fixed Assets" and IFAS No.25, "Land Rights".

IFAS No.25 prescribes that the legal cost of land rights in the form of Right on Land for Commercial Use (Hak Guna Usaha/HGU), Right on Land for Building (Hak Guna Bangunan/HGB) and Right to Use (Hak Pakai/HP) when the land was acquired initially is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and is not amortized. Meanwhile the cost of extension or renewal of such rights is recognized as deferred costs in the statements of financial position and is amortized over the shorter period of right's legal life and land's economic life.

Fixed assets are initially recognized at cost. Cost includes its purchase price and any cost directly attributable to bringing asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

After initial measurement, fixed assets are measured using cost model, carried at its cost less any accumulated depreciation and any impairment losses. The cost of replacing a part of an item of fixed assets is recognized in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Bank and its cost can be measured reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

l. Aset Tetap (Lanjutan)

Nilai tercatat atas bagian yang diganti adalah dihentikan pengakuannya. Biaya pemeliharaan sehari-hari aset tetap diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan berdasarkan Surat Edaran Direksi No. SE.10.05/KP.DIR/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang penyusutan aktiva tetap dan inventaris yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaanya dan diukur dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, kecuali penyusutan atas bangunan yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

l. Fixed Assets (Continued)

The carrying amount of the replaced part is derecognized. The cost of the day-to-day maintenance of fixed assets are recognized in profit or loss as incurred.

Fixed assets are depreciated based on the Circular Letter of the Bank's Board of Directors No.SE.10.05/KP.DIR/2016 dated May 13, 2016 regarding accumulated depreciation of fixed assets and inventory which complies with Law No. 36 of 2008 dated December 23, 2008, and the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 96/PMK.03/2009 dated May 15, 2009 regarding the types of tangible assets included as tangible assets other than building for depreciation purpose.

Depreciation of an asset starts when it is available for its intended use and measured using the double declining balance method, except for depreciation of building which is calculated using the straight line method.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly included in the profit or loss when the item is derecognized.

The asset residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at the end of each year and adjusted prospectively if necessary.

The estimated useful lives of the assets are as follows:

	Masa manfaat/ tahun ***Useful life / year***	**Persentase/** ***Percentage***	
Bangunan	10 - 20	5,00% - 10,00%	*Building*
Inventaris kantor	4 - 8	12,50% - 25,00%	*Office inventory*
Kendaraan bermotor	4 - 8	12,50%- 25,00%	*Vehicles*
Perlengkapan/peralatan kantor	4	25,00%	*Office equipment*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

l. Aset Tetap (Lanjutan)

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Hak atas tanah tidak disusutkan. Aset yang tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang terkait, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terkait.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, sementara itu pemugaran dan penambahan dalam jumlah material dikapitalisasi. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai buku dan akumulasi penyusutan atau amortisasi dari aset tetap tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Bila nilai tercatat aset tetap lebih besar daripada perkiraan jumlah terpulihkan, maka dicatat pada jumlah terpulihkan dan kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya.

Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Aset dalam penyelesaian

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

l. Fixed Assets (Continued)

When assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are written-off from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in the statement of comprehensive income.

The rights of the land is not depreciated. Assets that are retired or disposed of shall be removed from relevant fixed assets group, and any resulting gain or loss is recognized in the statement of profit or loss of the relevant year.

The cost of repairs and maintenance is charged to operations as incurred, while significant expenditures, which extend the useful life of the asset or result in increased future economic benefits are capitalized. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts, and any resulting gain or loss is reflected in the current earnings.

When the carrying amount of property and equipment is greater then its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount and the impairment losses are recognized in profit or loss.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal, and restoration, and the benefits from the site dismantlement, removal, and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs.

In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Construction in progress

Construction in progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Aset Takberwujud

Bank menerapkan PSAK No. 19, "Aset Takberwujud".

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset takberwujud merupakan perangkat lunak yang terdiri atas program komputer dan lisensi yang dibeli untuk penunjang kegiatan bisnis Perusahaan.

Aset Takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset Takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus. Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Intangible Assets

The Bank applies SFAS No. 19 "Intangible Assets".

Intangible asset is measured initially at cost. Subsequently, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss.

Intangible assets represent software which consist of computer program and licenses purchased to support the Company's business operation.

Intangible assets with finite useful life

Intangible assets with finite useful life are amortized over the economic useful life by using a straight-line method. Amortization is calculated so as to write off the cost of the assets, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:

	Masa Manfaat/ *Estimated Useful Lives*	
Jenis Aset Takberwujud:		*Types of Intangible Asset:*
Lisensi	15-20	*License*
Perangkat Lunak	5	*Software Application*

n. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai *outstanding* kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

n. Foreclosed Collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account.

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

n. Agunan yang Diambil Alih (AYDA) (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian dari penjualan agunan yang diambil alih dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut.

o. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari biaya dibayar dimuka, kliring dalam penyelesaian, uang muka dan lain-lain.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

p. Sewa

Bank telah menerapkan PSAK No. 73 "Sewa" sejak tanggal 1 Januari 2020.

PSAK No. 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK No. 73 pada laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Foreclosed Collaterals (continued)

Gains or losses from sales of foreclosed collaterals are credited or charged to profit and loss for the year.

In case of permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value. Such write-down is recognized in profit or loss.

Net realizable value is the fair value of foreclosed collaterals less estimated costs to sell foreclosed collaterals.

o. Other assets

Other assets include prepaid expenses, clearing in progress, advances and others.

Other assets are stated at the carrying amount less allowance for impairment losses.

p. Lease

The Bank has applied SFAS No. 73 "Lease" since January 1, 2020.

SFAS No. 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- *Leases of low value assets.*

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of SFAS No. 73 on the financial statements is described below.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Tanggal penerapan awal PSAK No. 73 untuk Bank adalah 1 Januari 2020. Bank telah menerapkan PSAK No. 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK No. 73.

a. Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No. 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasian dan *lessee* memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

b. Dampak pada akuntansi *lessee*

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No.48 Penurunan Nilai Aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Lease (continued)

The date of initial application of SFAS No. 73 for the Bank is January 1, 2020. The Bank has applied SFAS No. 73 using the modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of SFAS No. 73.

a. Impact of the new definition of a lease

The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No. 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS No.30

b. Impact on lessee accounting

The Bank applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and low-value asset leases. The Bank recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Bank recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS No. 48.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Lease (continued)

On the initial of lease date, the Bank recognized lease liabilities which are measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not depending on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated in SFAS No. 73 will be treated the same as operating leases in SFAS No. 30. The Bank will recognized these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Penerapan pencatatan PSAK No. 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

a. Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;

b. Mencatat penyusutan aset hak - guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan

c. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

q. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah pemindahbukuan, baik dari nasabah maupun dari bank lain. Liabilitas segera disajikan sebesar jumlah kewajiban Bank.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

r. Simpanan Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Lease (continued)

The recording implementation of SFAS No. 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

a. Presenting right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities are presented as part of other liabilities in the statement of financial position which are measured at the present value of the future lease payments;

b. Recording depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and

c. Separating the total amount of cash paid into a principal portion (presented in financing activities) and interest (presented in operating activities) in the statement of cash flows.

q. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately are Bank liabilities to other parties that are required to be paid immediately in accordance with the order mandated under predetermined agreement.

Liabilities due immediately are recorded when the liabilities incur or upon receipt of transfer orders from customer or other banks. Liabilities due immediately are stated at the Bank's liabilities amount.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at amortized cost.

r. Deposits from costumers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on a fund deposit agreements. Included in this account are demand deposits, savings deposits, time deposits and other similar items.

Demand deposits are deposits from customers that can be used as an instrument of payment and can be withdraw at any time using checks, or other orders of payment or transfers.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Simpanan Nasabah (lanjutan)

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan dengan cara pemindah-bukuan. Penarikan tabungan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban kepada pemilik tabungan.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal. Bank memberikan fasilitas bagi deposan yang dapat menarik dananya setiap saat walaupun belum jatuh tempo yang akan dikenakan pinalti, dan bunganya tidak dihitung dari hari bunga deposito. Simpanan nasabah dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah.

Sertifikat deposito merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi. Diskon atau perbedaan nilai yang diterima sekarang dan nilai nominal dicatat sebagai bunga dibayar dimuka dan diamortisasi selama periode sertifikat deposito.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

s. Simpanan Nasabah Syariah dan Dana Syirkah

Simpanan nasabah syariah merupakan simpanan nasabah pada unit usaha syariah. Pengakuan simpanan diakui pada saat dana/uang diterima dari nasabah dan diukur sebesar nilai nominal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

r. Deposits from costumers (continued)

Savings are customers deposits which may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine (ATM) and also by means of transfer. The withdrawal of savings cannot be carried out by using checks or other equivalent instruments. Savings are stated at the amount due to the saving account holders.

Time deposits represent deposits of customers which can only be withdrawn at a given time in accordance with the agreements between the customer and the Bank.

Time deposits are stated at nominal value. The Bank provides facility for the depositors to enable them to withdraw their funds at any time prior to the due date, which will be charged with a penalty; in addition to that, the interest shall not be calculated referring to the days of deposit interest. Deposits from customers are stated at the payable amount to customers.

Certificates of deposits are time deposits with evidence of savings which can be traded. Certificates of deposit are stated at nominal value net of unamortized interest. Discount or the difference in present value received and the nominal value are recorded as prepaid interest and amortized over the period of certificates of deposit.

Deposits from customers are classified as financial liabilities which are measured at amortized cost using the effective interest method. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers are deducted from the amount of deposits.

s. Sharia Deposits from Costumers and Temporary Syirkah Fund

Sharia deposits from customers represent customer deposits in sharia business unit. The deposits are recognized when the fund/money is received from customers and are measured at their nominal value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Simpanan Nasabah Syariah dan Dana Syirkah (lanjutan)

Simpanan nasabah syariah terdiri dari giro dan tabungan *wadiah*. Giro *wadiah* dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro. Giro wadiah serta tabungan wadiah mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Simpanan nasabah dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

Giro dan tabungan *wadiah* merupakan giro dan tabungan *wadiah yad-adhamanah* yakni titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan pendapatan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro Bank Jambi Syariah (BJS).

Simpanan dari nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh BJS.

BJS mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan BJS atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dana *syirkah* temporer dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang dana syirkah temporer bank.

Hubungan antara BJS dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah*.

Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah,* dan akun lain yang sejenis.

Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana juga menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Sharia Deposits from Costumers and Temporary Syirkah Fund (continued)

Sharia customer deposits consist of wadiah demand deposits and savings deposits. Demand deposits can be used as an instrument of payment and may be withdrawn at any time through checks and transfer forms. Demand deposits and saving deposits receive bonuses at the discretion of the Bank. Deposits from customers in the form of wadiah demand deposits and saving deposits are stated at the Bank's liabilities.

Wadiah demand deposits and savings deposits represent wadiah yad-adhamanah fund deposits in the form of demand deposits and savings deposits on which the customer may receive bonus income at the discretion of the Bank. Wadiah demand deposits are stated at the amount due to the account holders of Bank Jambi Syariah (BJS) deposits.

Deposits from customers are classified as financial liabilities which are measured at amortized cost. Temporary syirkah funds represent investment received by BJS.

The BJS has the right to manage and invest funds in accordance with either the BJS's policy or restriction policy by the depositors with the agreed profit sharing. Temporary syirkah funds are stated at the nominal amount as agreed by the temporary syirkah funds holder.

Relationship between the BJS and the owner of temporary syirkah funds are partnership based on mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah or musyarakah agreement.

Examples of temporary syirkah funds are investment funds received from mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarakah and other similar accounts.

Mudharabah musytarakah represents mudharabah where the fund manager also invests its capital or fund in the investment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Simpanan Nasabah Syariah dan Dana Syirkah (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi BJS.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

t. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan *interbank call money*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar jumlah liabilitas kepada bank lain tersebut, kecuali sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah.*

Simpanan dari bank lain dinyatakan sesuai jumlah liabilitas terhadap nasabah.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari total simpanan yang diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Sharia Deposits from Costumers and Temporary Syirkah Fund (continued)

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability because the Bank has no obligation to return the fund to the owner when loss is incurred, unless there is negligence or default by the BJS.

Temporary syirkah funds cannot be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds does not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right over the profit derived from current assets and non-investment assets.

The owner of temporary syirkah funds shall receive profit sharing in accordance with the agreement and receive loss sharing based on proportion to the total funds. The profit sharing of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

t. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in demand deposits, savings deposits, time deposits, certificates of deposit and interbank call money. Deposits from other banks are stated at the amount of liabilities to other banks, except for certificates of deposit which are stated at nominal value net of unamortized interest.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah demand deposits, mudharabah savings and time deposits.

Deposits from other banks are stated at Bank's liability to the customer.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability to the customer. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

u. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan adalah *Medium-Term Notes* (MTN)

Efek-efek yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

v. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, Pemerintah dan Lembaga Pembiayaan lain dimana liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

w. Pendapatan Bunga, Beban Bunga dan Bagi Hasil

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

u. Marketable securities issued

Marketable securities issued are Medium-Term Notes (MTN)

The marketable securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated with the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

v. Borrowings

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia, the Government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated with the initial recognition of borrowings, and transaction costs are an integral part of the effective interest rate.

w. Interest Income, Interest Expenses and Profit Sharing

Conventional

Interest income and expenses are recognized in the statements of comprehensive income using the effective interest method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial assets or financial liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to get the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but not considering future credit losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

w. Pendapatan Bunga, Beban Bunga dan Bagi Hasil (lanjutan)

Konvensional (lanjutan)

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai *(impairment)* dan pendapatan bunga yang sudah diakui, tetapi belum ditagih akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan lainnya.

Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Pendapatan dari transaksi ijarah diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif).

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Interest Income, Interest Expenses and Profit Sharing (continued)

Conventional (continued)

This calculation includes all commissions, provision fees, and other forms received by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

If financial asset or group of similar financial assets has been diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to its timely collection are generally classified as impaired loans. Interest accrued but not yet collected is reversed when a loan is classified as impaired loan.

Sharia

The main operating income consists of income from murabahah transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing and others.

Sharia expenses consist of mudharabah profit sharing expenses and wadiah bonus expenses.

Income from ijarah transactions is recognized using the accrual method. Income from istishna transactions and profit sharing from mudharabah and musyarakah financing are recognized when the cash installments are received. Expenses based on Sharia principles consist of mudharabah profit sharing expense and wadiah bonus expense.

Income from murabahah receivables uses the effective rate of return method (effective margin).

This calculation includes all commissions, provision fees, and other forms received by the parties to the contract which are an integral part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Pendapatan Bunga, Beban Bunga dan Bagi Hasil (lanjutan)

Syariah (lanjutan)

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil *(nisbah)* yang disepakati.

Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai *(cash basis)*. Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Beban syariah merupakan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan porsi bagi hasil *(nisbah)* yang telah disepakati sebelumnya yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah*.

Margin dan bagi hasil diakui secara akrual, kecuali pendapatan margin dan bagi hasil atas kredit yang diberikan dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing*, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.

Pendapatan margin dan bagi hasil yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

w. Interest Income, Interest Expenses and Profit Sharing (continued)

Sharia (continued)

Mudharabah and musyarakah profit sharing income are recognized when cash is received or in a period where the right of profit sharing is due based on agreed portion (nisbah).

Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Wadiah Certificates, placements with other Sharia banks, and revenue sharing from Sharia securities. Other main operating income is recognized upon collection.

Sharia expense represents revenue sharing for third party fund using the revenue sharing principle based on pre-determined nisbah in accordance with mudharabah mutlaqah principles.

Margin and profit sharing are recognized on an accrual basis, except for margin and profit sharing income on loans and other earning assets classified as non performing, which is recognized only when such interest is received in cash.

Margin and profit sharing income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as non performing, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash basis.

Provision fees and commissions directly related to lending activities, or provision fee and commission which relates to a specific period, are amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

x. Pendapatan Provisi dan Komisi

Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat kredit dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya.

x. Provision Fee and Commission Income

Unamortized provision fee and commission income relating to loans settled prior to maturity is recognized at the settlement date. Other provision fee and commission income is recognized at the transaction date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

x. Pendapatan Provisi dan Komisi (lanjutan)

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

y. Imbalan Kerja

Bank menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja", efektif sejak 1 Januari 2015, menggantikan PSAK 24 (revisi 2010): "Imbalan Kerja". Dengan diterapkan PSAK 24 (revisi 2013), maka Bank menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

Program imbalan pasti

Bank mengakui penyisihan imbalan masa kerja berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan untuk imbalan masa kerja diukur berdasarkan laporan aktuaria. Bank menggunakan metode penilaian aktuarial *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini dari imbalan, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (sebelum dikurangi aset program) pada tanggal tersebut atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut.

Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

x. Provision Fee and Commission Income (continued)

Provision fee and commission income related to lending activities is recognized as part of interest income. For sharia financing, provision fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.

Provision fee and commission income not related to lending activities or a period of time and/or associated with the service provided is recognized as revenue or expenses at the time of the transaction and recorded under other operating income.

y. Employee Benefits

The Bank implements SFAS 24 (revised 2013), "Employee Benefits", effective on January 1, 2015, replacing SFAS 24 (revised 2010): "Employee Benefits". By implementing SFAS 24 (revised 2013), the Bank eliminates corridor approach in calculating actuarial gain and loss in reporting period in other comprehensive income.

Defined benefits plan

The Bank recognizes provision for employee service entitlements in accordance with Labor Law No.13/2003 dated March 25, 2003. The provision for employee service entitlements is estimated on the basis of actuarial reports. The Bank uses the projected unit credit method to determine the present value of benefits, current service cost and past service cost.

Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceed the greater of 10% of the present value of the defined benefits obligation (before deducting plan assets) or 10% of the fair value of plan assets at that date.

Such actuarial gains or losses are recognized as income or expense on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

y. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti (lanjutan)

Biaya jasa lalu yang terjadi ketika pengenalan program imbalan pasti atau perubahan imbalan terutang pada program yang ada diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja atau *vested.*

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun manfaat pasti

Sehubungan dengan manfaat pensiun, Bank memiliki program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun manfaat pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank Jambi yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala.

Pendirian Dana Pensiun Bank Jambi telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.348/KM.17/1994 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Jambi tanggal 16 Desember 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-161/KM.10/2007 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 10 Agustus 2007.

Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

Kontribusi pegawai sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank sebesar 18%.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

y. Employee Benefits (continued)

Defined benefits plan (continued)

Past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined benefit pension plan

In relation to pension benefits, the Bank has a defined benefit pension plan covering all of its permanent employees. The defined benefit pension plan is funded through a payment to the Dana Pensiun Bank Jambi determined by a periodic actuary calculation.

The establishment of Dana Pensiun Bank Jambi has been approved by the Minister of Finance under the Decree of the Minister of Finance No. KEP.348/KM.17/1994 on Ratification of Pension Fund Regulation of Dana Pensiun Bank Jambi dated December 16, 1994 as lastly amended with Decree of the Minister of Finance No.: KEP-161/KM.10/2007 on Ratification of Pension Fund Regulation of Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi dated August 10, 2007.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement which usually depends on one or more factors, such as age, years of service and total compensation.

Employee contribution is 5% of the employee's basic income, and the remaining amount to be paid to the Pension Fund represents the Bank's contribution amounting to 18%.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

y. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Beban liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode *vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode *vesting*.

Program imbalan pasca kerja lainnya dan jangka panjang lainnya.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya, meliputi uang duka bagi pegawai yang meninggal dunia dan penghargaan masa kerja.

Liabilitas dan pendanaan penghargaan masa kerja dan uang duka dihitung aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*.

Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jasa produksi yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

Beban penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

y. Employee Benefits (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

Past service costs are recognized immediately in the statement of comprehensive income, unless the payments of the benefits are conditional on whether the employees remain working for a specified period of time (vesting period). In this case, the past service costs are amortized on a straight-line method over the vesting period.

Other post employment benefits program and long-term employee benefits program.

The Bank also provides post benefits program and long term benefit plan that includes Bereavement Payment to employees who pass away, and gratuity.

Employees gratuity liabilities and funding and Bereavement Payment are calculated by an independent actuary using the projected unit credit method.

Annual Bonuses

The Bank also provides annual bonuses to the Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is determined based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to statement of profit or loss and other comprehensive income as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

Reward expense for the Board of Commissioners and Board of Directors

The Bank provides end of service reward program for Commissioners and Directors, which amount is calculated proportionally during the period of service.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

z. Perpajakan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/ (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal neraca dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

z. Taxation

Effective on January 1, 2015, the Bank adopted SFAS No. 46 "Income Taxes". The adoption of the SFAS has no significant effect on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized, using the statement of financial position method, for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Deferred Income Tax Benefit (Expense)" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Adjustments to tax liabilities are recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

z. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

aa. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

ab. Modal Saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

Bank mengklasifikasikan instrumen modal sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi ketentuan kontrak dari instrumen. Saham Bank diklasifikasikan sebagai ekuitas ketika tidak ada liabilitas kontrak untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya.

ac. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Bank diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan Bank pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Bank.

ad. Saldo Laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

ae. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

z. Taxation (continued)

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

aa. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

ab. Share Capital

Share capital is measured at par value for all shares issued.

The Bank classifies capital instruments as financial liabilities or equity instruments in accordance with the substance of the contractual terms of the instruments. The Bank's shares are classified as equity when there is no contractual obligation to transfer cash or other financial assets.

ac. Dividends

Dividend distribution to the Bank's Shareholders is recognized as a liability in the Bank financial statements in the year in which the dividends are approved by the Bank's shareholders.

ad. Retained Earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

ae. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

ae. Provisi (lanjutan)

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

af. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadinya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

ag. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011 dan POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Atas aset non produktif, manajemen Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

Atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit, manajemen Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan selisih antara nilai tercatat dan nilai kini atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi *probable).*

ah. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank *(adjusting event)* akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events,* jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ae. Provisions (continued)

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

af. Contingent liabilities and assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statement but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

ag. Allowance for impairment losses on non-earning assets and commitments and contingencies

In accordance with Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP dated December 23, 2011 and Regulation of the Financial Services Authority No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, the Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable accounting standards.

For non-earning assets, the Bank's management determines the allowance for impairment losses at the lower of the carrying value and fair value after deducting cost of disposal.

For commitments and contingencies with credit risk, the Bank's management determines the allowance for impairment losses based on the difference between the carrying amount and the present value of the payment obligations that are expected to occur (when payment under the guarantee has become probable).

ah. Subsequent Events

Any post-year-end event that provides additional information regarding the Bank's financial position (adjusting event) is reflected in the financial statements. Post-year-end events that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

ai. Informasi segmen

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

2. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ai. Business segment information

The Bank determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the operating decision maker.

The Bank defines an operating segment as a component of an entity:

1. That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

2. Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

3. For which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of conventional and sharia banking.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES

The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Usaha yang berkelanjutan

Manajamen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memilki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan judgment yang signifikan. Dalam membuat judgment ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika Bank gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang insignifikan saat mendekati jatuh tempo, Bank harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length.*

Kontinjensi

Ketika Bank sedang terlibat dalam proses hukum, perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's abilities to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's abilities to continue as a going concern. Therefore, the financial statement continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No.71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies.

Held-to-maturity securities

The classification under held-to-maturity securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates their intention and ability to hold such investments to maturity. If the Bank fails to keep these investments to maturity other than in certain specific circumstances for example, selling an insignificant amount close to maturity, it will be required to reclassify the entire portfolio as available-for-sale securities. The available-for-sale securities will be measured at fair value and not at amortized cost.

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

When the Bank is involved in legal proceedings, the estimates of the probable costs for the resolution of claims have been developed in consultation with the aid of the legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Penilaian Mata Uang Fungsional

PSAK No. 10 mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Bank dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);

b. Mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
c. Mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi dan estimasi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan / piutang syariah

Bank menelaah portofolio kredit dan piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui provisi yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif, Bank membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio kredit sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

Assessment of Functional Currency

SFAS No. 10 requires management to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Bank considers the following:

a. The currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
b. The currency in which funds from financing activities are generated; and
c. The currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Estimates and Assumptions

The key estimates and assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

The Bank reviews its loan portfolio and receivables to assess impairment on an annual basis with updating provisions made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by credit officers.

In determining whether an impairment loss should be recorded in the statements of comprehensive income, the Bank makes judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan / piutang syariah (lanjutan)

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok debitur, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. Bank menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat penyisihan yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah penyisihan di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a group, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group. The Bank uses estimates in the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance required. Such estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting to future changes in the allowance.

Impairment of debt securities

The Bank determines that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Penurunan nilai aset non keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b. Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c. Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that which could trigger an impairment review include the following:

a. Significant under-performance relative to expected historical or projected future operating results;
b. Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c. Significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Present value of retirement obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Nilai kini atas kewajiban pensiun (lanjutan)

Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material estimasi liabilitas pensiun dan manfaat karyawan dan beban bersih imbalan kerja karyawan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

Present value of retirement obligation (continued)

While the Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Bank's actual results or significant changes in the Bank's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefit expense.

4. KAS / *4. CASH*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Kas besar	227.229.677.300	137.251.658.050	*Teller*
Kas ATM	94.598.750.000	107.027.600.000	*Cash in ATM*
Jumlah	**321.828.427.300**	**244.279.258.050**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, di dalam kas terdapat kas yang didasarkan pada Prinsip Perbankan Syariah, masing-masing sebesar Rp4.748.329.700 dan Rp3.626.919.000.

As of December 31, 2021 and 2020, cash includes cash based on the principles of Sharia, amounting to Rp4,748,329,700 and Rp3,626,919,000, respectively.

Pada tahun 2021 dan 2020 tidak terdapat kas yang dibatasi penggunaannya.

In 2021 and 2020 there is no restricted cash.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Giro Bank Indonesia	536.174.204.653	782.449.612.638	*Current accounts with Bank Indonesia*
Jumlah	**536.174.204.653**	**782.449.612.638**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, di dalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada Prinsip Perbankan Syariah, masing-masing sebesar Rp45.185.987.850 dan Rp20.622.802.085.

As of December 31, 2021 and 2020, current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on the principles of Sharia, amounting to Rp45,185,987,850, and Rp20,622,802,085, respectively.

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

The Bank is required to maintain minimum statutory reserves in Rupiah in its activities as a commercial and sharia bank, and minimum statutory reserves in foreign currencies in its activities in foreign currency transactions. These statutory reserves are deposited in the form of current accounts with Bank Indonesia.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga (DPK) adalah sebesar 84,69% dan 90,50% dan KPMM Bank adalah sebesar 25,27% dan 28,92%.

As of December 31, 2021 and 2020, the ratio of loans to total third-party deposits (DPK) amounted to 84.69% and 90.50% and the Capital Adequacy Ratio (CAR) amounted to 25.27% and 28.92%.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum Konvensional dan Syariah yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The minimum statutory reserve ratios of the Conventional and Sharia Bank required by Bank Indonesia's regulation as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
GWM Rupiah			*Statutory Reserves in Rupiah*
Konvensional			*Conventional*
Utama	3,50%	3,00%	*Primary*
RIM	0,70%	0,20%	*RIM*
PLM	6,00%	4,00%	*PLM*
Syariah			*Sharia*
Utama	3,50%	0,50%	*Primary*

Realisasi Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Konvensional dan Syariah (tidak diaudit) masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The realization of Minimum Statutory Reserves (GWM) of Conventional and Sharia Bank (unaudited) as of December 31, 2021 and 2020, respectively, is as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
GWM Rupiah			*Statutory Reserves in Rupiah*
Konvensional			*Conventional*
Utama	6,61%	8,56%	*Primary*
PLM	0,70%	10,23%	*PLM*
Syariah			*Sharia*
Utama	7,38%	2,81%	*Primary*

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Giro Wajib Minimum (GWM) telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No.17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, No.17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, No.18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 dan No.18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016, No.19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017, No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, No.22/20/PBI/2020 tanggal 22 Desember 2020, dan No.23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank umum konvensional, Bank umum Syariah dan unit usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.21/13/PBI/2019 tanggal 25 November 2019, PBI No.22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, dan No.23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan unit usaha Syariah.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah giro wajib minimum pada Bank Indonesia tersebut telah memadai dan memenuhi syarat.

Bank Jambi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (Continued)

As of December 31, 2021 and 2020, Minimum Statutory Reserves complies with Bank Indonesia (BI) Regulation No.15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 regarding Minimum Statutory Reserves in Rupiah for Commercial Banks and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks which have been further amended with Regulations of Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 dated June 25, 2015, No.17/21/PBI/2015 dated November 26, 2015, No.18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016, No.18/14/PBI/2016 dated August 18, 2016, No.19/6/PBI/2017 dated April 17, 2017, No.20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018, No.22/20/PBI/2020 dated December 22, 2020, and No.23/16/PBI/2021 dated December 17, 2021 regarding Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Regulations of Bank Indonesia No.21/13/PBI/2019 dated November 25, 2019, No.22/3/PBI/2020 dated March 24, 2020, and No.23/17/PBI/2021 dated December 17, 2021 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units.

Management believes that the amount of minimum statutory reserves in Bank Indonesia is adequate and in compliance with the requirements.

Bank Jambi has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum statutory reserves as of December 31, 2021 and 2020.

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Bank Pemerintah			*Government Bank*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	576.320.659	303.657.912	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	15.126.775	15.378.775	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	6.543.546	28.984.835	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia-Syariah	1.290.069	2.006.462	*PT Bank Rakyat Indonesia-Sharia*
PT Bank DKI	526.666	786.666	*PT Bank DKI*
PT Bank Syariah Mandiri	--	186.824	*PT Bank Sharia Mandiri*
Sub Jumlah	599.807.715	351.001.474	*Sub Total*
Bank Korporasi			*Corporate Bank*
Bank Maybank Indocorp	1.282.985.814	18.249.530.498	*Bank Maybank Indocorp*
PT Bank Mualamat Indonesia Tbk	5.868.244	6.108.242	*PT Bank Mualamat Indonesia, Tbk*
Sub Jumlah	1.288.854.058	18.255.638.740	*Sub Total*
Jumlah	1.888.661.773	18.606.640.214	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	*Allowances for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**1.888.661.773**	**18.606.640.214**	***Total - Net***

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, digolongkan sebagai lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

Current accounts with other banks as of December 31, 2021 and 2020 are classified as current. No current account was blocked or pledged as collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 termasuk dalam giro pada bank lain adalah giro yang didasarkan pada prinsip perbankan Syariah masing-masing sebesar Rp1.485.090 dan Rp2.628.306.

As of December 31, 2021 and 2020 current accounts with other banks include amount under Sharia Banking Principles amounting to Rp1,485,090 and Rp2,628,306, respectively.

Tingkat suku bunga giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,25% dan 1,50%.

The interest rates of current accounts with other banks for the years ended December 31, 2021 and 2020 are 0.25% and 1.50% per annum.

Cadangan Penurunan Nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah dihitung sesuai dengan PSAK 71, namun untuk Tahun 2021 dan 2020 Manajemen berpendapat bahwa cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan dikarenakan giro pada bank lain tidak mengalami penurunan nilai.

Allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 has been calculated in accordance with SFAS 71, however, for Fiscal Year 2021 and 2020 the Management believes that the allowance for impairment losses is unnecessary considering that there is no impairment on current accounts with other banks.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / *7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

a. Berdasarkan Jenis: / *a. By type:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Fasilitas Bank Indonesia (FASBI)	279.911.672.317	28.000.000.000	*Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)*
Interbank call money			*Interbank Call Money*
BPD Sulteng	100.000.000.000	--	*BPD Sulteng*
BPD Sulselbar	180.000.000.000	--	*BPD Sulselbar*
Bank Pan Indonesia	200.000.000.000	--	*Bank Pan Indonesia*
	759.911.672.317	28.000.000.000	
Sertifikat Deposito			*Certificates of Deposit*
BPD NTT	--	47.348.266.990	*BPD NTT*
BPD DKI	9.922.036.965	--	*BPD DKI*
BPD Bali	19.174.728.522	--	*BPD Bali*
	29.096.765.487	47.348.266.990	
Jumlah	789.008.437.804	75.348.266.990	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(69)	(117)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**789.008.437.735**	**75.348.266.873**	***Total - Net***

b. Berdasarkan Jatuh Tempo: / *b. By Maturity:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Kurang dari 1 bulan	759.911.672.317	28.000.000.000	*Less than 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	9.922.036.965	--	*More than 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 12 bulan	19.174.728.522	47.348.266.990	*More than 3 - 12 months*
	789.008.437.804	75.348.266.990	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(69)	(117)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**789.008.437.735**	**75.348.266.873**	***Total - Net***

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan Syariah masing-masing sebesar Nihil dan Rp28.000.000.000.

As of December 31, 2021 and 2020 placements with Bank Indonesia and other banks include placements under Sharia Banking Principles, amounting to Nil and Rp28.000.000.000, respectively.

Tingkat suku bunga penempatan pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 2,78% - 4,75% dan 2,13% - 5,38%.

The interest rates of placements with other banks for the years ended December 31, 2021 and 2020 are 2.78% - 4.75% and 2.13% - 5.38% per annum, respectively.

Semua penempatan pada bank lain digolongkan lancar. Tidak terdapat saldo penempatan pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

All placements with other banks are classified as current. No placement was blocked or pledged as collateral.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (Lanjutan)

b. Berdasarkan Jatuh Tempo: (lanjutan)

Cadangan Penurunan Nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah dihitung sesuai dengan PSAK 71, Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (Continued)

b. By Maturity: (continued)

Allowance for Impairment Losses as of December 31, 2021 and 2020 has been calculated in compliance with SFAS 71, however, Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise.

8. EFEK-EFEK

a. Transaksi dengan Pihak Tertentu:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Pihak Ketiga	2.233.265.047.403	1.598.750.173.238	*Third parties*
Pihak Berelasi	--	--	*Related parties*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.687)	(4.309.622)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**2.233.265.043.716**	**1.598.745.863.616**	***Total***

b. Berdasarkan Jenis:

b. By Type:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Biaya perolehan yang diamortisasi	167.074.562.785	535.929.479.583	*Acquisition at amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	2.066.190.484.618	1.062.820.693.655	*Fair value through other comprehensive income*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.687)	(4.309.622)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**2.233.265.043.716**	**1.598.745.863.616**	***Total***

8. EFEK-EFEK (Lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

c. Berdasarkan Penerbit: / *c. By Issuer:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Korporasi			***Corporate***
Reksadana			***Mutual Fund***
Insight Terproteksi 10	167.074.562.785	167.074.562.785	*Insight Terproteksi 10*
RDPT PNM	--	50.000.000.000	*RDPT PNM*
RDPT PNPM Pemb.Mikro BUMN	--	15.000.000.000	*RDPT PNPM Pemb. Mikro BUMN*
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III	--	100.000.000.000	*RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III*
Sub Jumlah	167.074.562.785	332.074.562.785	*Sub total*
Obligasi			***Bonds***
Sarana Multi Infrastruktur Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2018 Seri B	--	46.287.000.000	*Sarana Multi Infrastruktur Berkelanjutan 1 Tahap III Tahun 2018 Seri B*
Sarana Multigriya Finansial Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019 Seri B	21.710.600.000	21.206.600.000	*Sarana Multigriya Finansial Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019 Seri B*
Sub Jumlah	21.710.600.000	67.493.600.000	*Sub total*
Pemerintah Republik Indonesia			***Indonesia Government's***
Obligasi			***Bonds***
Obligasi Negara RR SUN	1.250.941.374.884	604.346.477.277	*Obligasi Negara RR SUN*
PBS005	175.609.500.000	191.842.129.113	*PBS005*
PBS004	171.450.000.000	192.629.770.172	*PBS004*
PBS029	222.911.206.366	--	*PBS029*
PBS017	10.438.500.000	--	*PBS017*
PBS028	32.039.803.368	--	*PBS028*
Jumlah	1.863.390.384.618	988.818.376.562	*Total*
Sub jumlah dipindahkan	2.052.175.547.403	1.388.386.539.347	*Sub total forward*

8. EFEK-EFEK (Lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

c. Berdasarkan Penerbit: (lanjutan) / *c. By Issuer: (continued)*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Sub jumlah pindahan	2.052.175.547.403	1.388.386.539.347	*Sub total transferred*
Bank			***Bank***
Obligasi			***Bonds***
Bank BTN berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	20.953.400.000	20.594.400.000	*Bank BTN berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013*
Bank Lampung IV Tahun 2017	50.677.000.000	51.260.500.000	*Bank Lampung IV Tahun 2017*
Bank BRI berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C	32.384.700.000	31.715.100.000	*Bank BRI berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C*
Bank BRI berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016 Seri C	--	35.350.350.000	*Bank BRI berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016 Seri C*
Bank Sulselbar berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021 Seri A	20.000.000.000	--	*Bank Sulselbar berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021 Seri A*
Bank Nagari seri VII Tahun 2015	--	16.008.960.000	*Bank Nagari seri VII Tahun 2015*
Bank Mandiri berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri A	--	14.034.423.891	*Bank Mandiri Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri A*
Bank Mandiri Taspen berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri A	15.781.800.000	--	*Bank Mandiri Taspen berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri A*
Sub Jumlah	139.796.900.000	168.963.733.891	*Sub total*
Medium Term Notes			***Medium Term Notes***
Bank Mandiri	10.566.000.000	10.482.500.000	*Bank Mandiri*
PPA	30.726.600.000	30.917.400.000	*PPA*
Sub Jumlah	41.292.600.000	41.399.900.000	*Sub total*
Jumlah	2.233.265.047.403	1.598.750.173.238	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.687)	(4.309.622)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**2.233.265.043.716**	**1.598.745.863.616**	***Total***

d. Berdasarkan jatuh tempo: / *d. By maturity:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
1 - 3 bulan	--	66.340.483.196	*1 to 3 months*
Lebih dari 3 - 12 bulan	85.668.112.800	179.227.372.294	*More than 3 to 12 months*
Lebih dari 12 - 60 bulan	170.178.300.000	269.798.747.607	*More than 12 to 60 months*
Lebih dari 60 bulan	1.977.418.634.603	1.083.383.570.141	*More than 60 months*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.687)	(4.309.622)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**2.233.265.043.716**	**1.598.745.863.616**	***Total***

8. EFEK-EFEK (Lanjutan) / 8. *MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

e. Berdasarkan segmen: / *e. By segment:*

	31 Desember/ *December 31,* 2021	**31 Desember/ *December 31,* 2020**	
Konvensional	1.598.640.712.074	1.098.758.557.891	*Conventional*
Syariah	634.624.335.329	499.991.615.347	*Sharia*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.687)	(4.309.622)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**2.233.265.043.716**	**1.598.745.863.616**	***Total***

f. Berdasarkan Peringkat dan Pengukuran: / *f. By Rating and Measurement:*

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*					
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Tarif/ *Rate* %**	**Jatuh Tempo/ *Maturity date***	**Nilai nominal/ *Nominal value***	**Nilai Tercatat/ *Carrying amount***
Biaya perolehan yang diamortisasi/ *Acquisition at amortized cost*						
Reksadana/ *Mutual fund*						
Insight Terproteksi 10	--	--	7,81%	15 - 05 - 2027	167.074.562.785	167.074.562.785
Jumlah/ *Total*					167.074.562.785	167.074.562.785
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain / *Fair value through other comprehensive income*						
Obligasi/ *Bonds*						
Obligasi Negara RI	Fitch Rating International	BBB	7,14%	15 - 05 - 2048	1.070.129.000.000	1.250.906.186.081
PBS 005	Fitch Rating International	BBB	6,40%	15 - 04 - 2043	174.000.000.000	175.609.500.000
PBS 004	Fitch Rating International	BBB	6,10%	15 - 04 - 2043	180.000.000.000	171.450.000.000
PBS 017	Fitch Rating International	BBB	6,13%	15 - 10 - 2023	10.000.000.000	10.438.500.000
PBS 028	Fitch Rating International	BBB	7,75%	15 - 04 - 2043	28.822.000.000	32.039.803.268
PBS 029	Fitch Rating International	BBB	6,38%	15 - 03 - 2034	221.981.000.000	222.946.395.269
BTN Berkelanjutan I Seri I	Fitch Rating International	AA(idn)	7,90%	27 - 04 - 2023	20.000.000.000	20.953.400.000
Bank Sulselbar Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021 Seri A			6,45%	29 - 12 - 2024	20.000.000.000	20.000.000.000
Bank BRI Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C	Perfindo	idAAA	8,25%	24 - 08 - 2024	30.000.000.000	32.384.700.000
Bank Mandiri Taspen Berkelanjutan I Tahun 2021			7,25%	28 - 04 - 2026	15.000.000.000	15.781.800.000
Bank Lampung Tahun 2017	Fitch Rating International	A(idn)	9,60%	07 - 07 - 2022	50.000.000.000	50.677.000.000
Sarana Multigriya Finansial Berkelanjutan Tahap II Tahun 2019	Perfindo	idAAA	8,10%	28 - 08 - 2019	20.000.000.000	21.710.600.000
Sub jumlah/ *Sub total*					1.839.932.000.000	2.024.897.884.618
Medium Term Notes						
Bank Mandiri	Perfindo	idAAA	9,00%	31 - 07 - 2023	10.000.000.000	10.566.000.000
PT. PPA Tahun 2019 Seri B	Perfindo	idAAA	9,00%	11 - 08 - 2022	30.000.000.000	30.726.600.000
Sub Jumlah */Sub total*					40.000.000.000	41.292.600.000
Jumlah/ *Total*					1.919.932.000.000	2.066.190.484.618
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai					--	(3.687)
Jumlah */Total*					**2.087.006.562.785**	**2.233.265.043.716**

8. EFEK-EFEK (Lanjutan) / 8. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

f. Berdasarkan Peringkat dan Pengukuran: (lanjutan) / *f. By Rating and Measurement: (continued)*

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*					
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Tarif/ *Rate* %	Jatuh Tempo/ *Maturity date*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai Tercatat/ *Carrying amount*
Biaya perolehan yang diamortisasi/ *Acquisition at amortized cost*						
Obligasi/ *Bonds*						
Obligasi Negara RI	Fitch Rating International	BBB	6,38%	04 - 15 - 2042	303.000.000.000	302.408.093.621
PBS005	Fitch Rating International	BBB	6,75%	04 - 15 - 2043	17.040.000.000	17.020.270.172
PBS004	Fitch Rating International	BBB	6,10%	02 - 15 - 2037	21.000.000.000	20.392.129.113
Bank Mandiri Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri A	Pefindo	idAAA	7,95%	09 - 30 - 2021	14.000.000.000	14.034.423.891
Sub jumlah/ *Sub Total*					355.040.000.000	353.854.916.797
Reksadana/ *Mutual fund*						
Insight Terproteksi 10	--	--	7,81%	05 - 15 - 2027	167.074.562.785	167.074.562.785
RDSPT PNM Pemb. Mikro BUMN	--	--	8,25%	01 - 31 - 2021	15.000.000.000	15.000.000.000
Sub jumlah/ *Sub Total*					182.074.562.785	182.074.562.785
Jumlah/ *Total*					537.114.562.785	535.929.479.582
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain / *Fair value through other comprehensive income*						
Obligasi/ *Bonds*						
Obligasi Negara RI	Fitch Rating International	BBB	7,38%	05 - 15 - 2048	231.297.000.000	240.722.753.656
PBS 005	Fitch Rating International	BBB	6,75%	04 - 15 - 2043	174.000.000.000	175.609.500.000
PBS 004	Fitch Rating International	BBB	6,10%	04 - 15 - 2043	180.000.000.000	171.450.000.000
ORI-018	Fitch Rating International	BBB	5,70%	10 - 15 - 2023	22.695.000.000	23.205.637.500
SR-013	Fitch Rating International	BBB	6,75%	04 - 15 - 2043	36.885.000.000	38.009.992.500
BTN Berkelanjutan I Seri I	Fitch Rating International	AA(idn)	7,90%	04 - 27 - 2023	20.000.000.000	20.594.400.000
Bank Nagari Tahap VII Tahun 2015	Perfindo	idA	10,95%	01 - 08 - 2021	16.000.000.000	16.008.960.000
Bank BRI Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C	Perfindo	idAAA	8,25%	08 - 24 - 2024	30.000.000.000	31.715.100.000
Bank BRI Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri C	Perfido	idAAA	9,60%	02 - 04 - 2021	35.000.000.000	35.350.350.000
Bank Lampung Tahun 2017	Fitch Rating International	A(idn)	9,60%	07 - 07 - 2022	50.000.000.000	51.260.500.000
Sarana Multigriya Finansial Berkelanjutan Tahap II Tahun 2019	Perfindo	idAAA	8,10%	08 - 28 - 2019	20.000.000.000	21.206.600.000
Sarana Multigriya Infrastruktur Berkelanjutan Tahap I Tahun 2016	Perfindo	idAAA	8,10%	08 - 28 - 2019	45.000.000.000	46.287.000.000
Sub jumlah/ *Sub total*					860.877.000.000	871.420.793.656
Reksadana/ *Mutual fund*						
RDPT PNM Pemb. Mikro BUMN 18 Seri II	--	--	9,25%	15 - 02 - 2022	50.000.000.000	50.000.000.000
RDSPT PNM Pemb. Mikro BUMN Seri III	--	--	9,00%	23 - 09 - 2021	100.000.000.000	100.000.000.000
Sub Jumlah/ *Sub Total*					150.000.000.000	150.000.000.000
Medium Term Notes						
Bank Mandiri	Perfindo	idAAA	9,00%	31 - 07 - 2023	10.000.000.000	10.482.500.000
PT. PPA Tahun 2019 Seri B	Perfindo	idAAA	9,00%	11 - 08 - 2022	30.000.000.000	30.917.400.000
Sub Jumlah */Sub total*					40.000.000.000	41.399.900.000
Jumlah/ *Total*					1.050.877.000.000	1.062.820.693.656
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai					--	(4.309.622)
Jumlah */Total*					**1.587.991.562.785**	**1.598.745.863.616**

g. Cadangan kerugian penurunan nilai: / *g. Allowance for impairment losses:*

	31 Desember/ *December 31,* 2021	31 Desember/ *December 31,* 2020	
Saldo Awal	(4.309.622)	--	*Beginning balance*
Penyesuaian PSAK 71	4.305.935	(4.309.622)	*Adjustment under SFAS 71*
Jumlah	**(3.687)**	**(4.309.622)**	***Total***

h. Nilai pasar untuk efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 95,25% sampai dengan 116,59%, dan 93,32% sampai dengan 110,77% dari nilai nominal obligasi yang dimiliki oleh Bank.

h. Market value for securities held to maturity as of December 31, 2021 and 2020 is 95.25% up to 116.59% and 93.32% up to 110.77%, respectively, of obligation nominal value owned by the Bank.

8. EFEK-EFEK (Lanjutan)

i. Bank mengakui keuntungan atau kerugian bersih yang belum direalisasi akibat peningkatan/ penurunan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Bank mengakui keuntungan peningkatan nilai wajar atas efek-efek yang tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp10.121.272.060 dan Rp7.895.153.866 yang disajikan dalam ekuitas (lihat catatan 27).

j. Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp18.913.688.204 dan Rp35.396.064.735 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) dari penjualan efek-efek - neto" (lihat catatan 29).

k. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, semua efek-efek pada 31 Desember 2021 dan 2020 diklasifikasikan lancar.

l. Tingkat suku bunga kontraktual rata-rata per tahun 6,25%- 10,25% dan 5,50%-8,25% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

m. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 penyisihan kerugian penurunan nilai dihitung sesuai dengan PSAK 71, Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian yang timbul atas surat berharga.

8. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

i. Bank recognizes unrealized net gains or losses due to an increase/decrease in the fair value of available-for-sale securities. As of December 31, 2021 and 2020 Bank recognizes the gain on impairment on fair value of available-for-sale securities amounting to Rp10,121,272,060 and Rp7,895,153,866, which is presented in equity (see note 27).

j. Bank recognizes the net profit from the sales of marketable securities amounting to Rp18,913,688,204 and Rp35,396,064,735 as of December 31, 2021 and 2020, which is presented in "Profit (loss) from marketable securities selling - net" (see note 29).

k. Based on the prevailing provisions, all marketable securities as of December 31, 2021 and 2020 are classified as current.

l. The average annual contractual interest rate is 6.25% - 10.25% and 5.50% - 8.25% for the years ended December 31, 2021 and 2020, respectively.

m. Allowance for Impairment Losses as of December 31, 2021 and 2020 has been calculated in compliance with SFAS 71, however, Management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover losses on marketable securities is unnecessary.

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Berikut ini adalah informasi atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Pada 31 Desember 2020 bernilai nihil, sedangkan pada 31 Desember 2021 yaitu:

9. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL

The following is information on securities purchased under agreements to resell. On December 31, 2020 it is nil, while on December 31, 2021 it is:

31 Desember 2021 / *December 31, 2021*

Nama Pihak Penjual / *Counterparty*	Jenis Efek / *Type of Security*	Nilai Nominal / *Nominal Amount*	Tarif / *Rate* (%)	Tanggal Mulai / *Value Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Nilai Jual / *Selling Price*
Bank Indonesia	SBN VR0062	150.062.000.000	3,50%	31 - 12 - 2021	07 - 01 - 2022	142.550.758.665

Efek-efek tersebut telah dibeli kembali.

The marketable securities have been repurchased.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN / *10. LOANS*

a. Berdasarkan Segmen: / *a. By Segment:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Konvensional	8.193.508.611.142	7.674.680.364.089	*Conventional*
Syariah	782.557.064.178	819.927.772.490	*Sharia*
Jumlah	8.976.065.675.320	8.494.608.136.579	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(132.443.490.930)	(91.104.705.529)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**8.843.622.184.390**	**8.403.503.431.050**	***Total - Net***

b. Transaksi dengan pihak tertentu: / *b. Transaction with certain parties:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Konsumsi	7.691.412.783.796	7.119.870.414.380	*Consumption*
Investasi	767.910.027.083	614.026.090.670	*Investment*
Sindikasi	338.826.618.335	381.829.305.677	*Syndicated*
Modal Kerja	159.830.766.832	307.777.539.383	*Working Capital*
Karyawan	5.371.366.636	57.045.650.187	*Employees*
Sub Jumlah	8.963.351.562.682	8.480.549.000.297	*Sub Total*
Pihak Berelasi (Catatan 37)			*Related Parties (Note 37)*
Konsumsi	6.705.178.315	8.662.160.716	*Consumption*
Investasi	2.612.222.527	2.022.629.014	*Investment*
Karyawan	1.292.652.380	225.000.000	*Employees*
Modal Kerja	2.104.059.416	3.149.346.552	*Working Capital*
Sub Jumlah	12.714.112.638	14.059.136.282	*Sub Total*
Jumlah	8.976.065.675.320	8.494.608.136.579	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Niai	(132.443.490.930)	(91.104.705.529)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**8.843.622.184.390**	**8.403.503.431.050**	***Total***

Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak berelasi yang terdiri dari karyawan kunci dan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp8.582.492.586 dan Rp4.043.698.984 dan pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp9.490.432.902 dan Rp4.471.481.158.

Total loans to related parties consisting of key employees and stockholders as of December 31, 2021 is amounting to Rp8,582,492,586 and Rp4,043,698,984, respectively, and as of December 31, 2020 is amounting to Rp9,490,432,902 and Rp4,471,481,158, respectively.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) / *10. LOANS (Continued)*

c. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas (dalam ribuan Rupiah): / *c. By type and collectibility (in thousands of Rupiah):*

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang Lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Konsumsi	7.571.351.466	57.341.237	8.358.220	9.693.398	42.484.091	7.689.228.412	*Consumption*
Investasi	422.379.711	21.790.106	596.444	1.355.072	20.821.163	466.942.496	*Investments*
Sindikasi	609.611.717	--	--	--	--	609.611.717	*Syndicated*
Modal kerja	114.131.348	8.813.252	284.900	566.790	16.056.491	139.852.781	*Working capital*
Karyawan	69.410.868	646.796	--	--	372.604	70.430.268	*Employee*
Jumlah	8.786.885.110	88.591.391	9.239.564	11.615.260	79.734.349	8.976.065.675	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.311.381)	(22.501.017)	(8.323.690)	(9.670.768)	(56.636.634)	(132.443.491)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**8.751.573.729**	**66.090.374**	**915.874**	**1.944.492**	**23.097.715**	**8.843.622.184**	***Total - Net***

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang Lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Konsumsi	7.063.171.948	36.806.736	1.106.622	2.599.017	24.848.251	7.128.532.574	*Consumption*
Investasi	578.100.003	17.192.665	462.129	1.371.842	18.922.081	616.048.720	*Investments*
Sindikasi	381.829.306	--	--	--	--	381.829.306	*Syndicated*
Modal kerja	285.208.913	8.397.241	658.964	503.789	16.157.979	310.926.886	*Working capital*
Karyawan	56.468.616	283.032	--	--	519.002	57.270.650	*Employee*
Jumlah	8.364.778.786	62.679.674	2.227.715	4.474.648	60.447.313	8.494.608.137	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.252.301)	(13.228.777)	(1.271.623)	(3.196.630)	(39.155.374)	(91.104.706)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**8.330.526.485**	**49.450.897**	**956.092**	**1.278.018**	**21.291.939**	**8.403.503.431**	***Total - Net***

d. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (dalam ribuan Rupiah): / *d. By economic sector and collectibility (in thousands of Rupiah):*

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang Lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Rumah Tangga	7.747.869.477	58.387.412	8.473.846	10.178.773	42.923.584	7.867.833.092	*Household*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	224.904	--	--	--	--	224.904	*Individual and household services*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	270.217.131	6.032.443	537.705	925.652	5.480.537	283.193.468	*Agriculture, hunting and forestry*
Perdagangan besar dan eceran	301.616.692	4.448.533	43.515	480.419	3.832.769	310.421.928	*Wholesale and groceries*
Konstruksi	210.562.196	4.444.995	--	--	3.660.565	218.667.756	*Construction*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	53.585.028	2.187.197	37.355	--	1.951.832	57.761.412	*Social, culture, entertainment, and other personal services*
Penyedian akomodasi dan makan minum	17.653.194	11.927.351	--	--	20.528.233	50.108.778	*Hotel, food and beverages*
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	34.227.983	14.338	--	--	99.856	34.342.177	*Transportation, warehousing and communication*
Industri Pengolahan	118.389.528	281.843	--	18.794	693.720	119.383.885	*Utilities industry*
Jasa kesehatan dan sosial	9.235.513	--	--	--	--	9.235.513	*Health and social service*
Perikanan dan Perindustrian	14.081.930	867.279	98.357	11.622	256.367	15.315.555	*Fishery and Manufacturing*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	6.760.480	--	48.786	--	261.383	7.070.649	*Real estate, rent, and service company*
Jasa pendidikan	456.408	--	--	--	45.503	501.911	*Education Service*
Pertambangan dan penggalian	293.915	--	--	--	--	293.915	*Mining and excavation*
Listrik, Gas, dan Air	55.661	--	--	--	--	55.661	*Water, Gas and electricity*
Lainnya	1.655.070	--	--	--	--	1.655.070	*Others*
Jumlah	8.786.885.110	88.591.391	9.239.564	11.615.260	79.734.349	8.976.065.675	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.311.381)	(22.501.017)	(8.323.690)	(9.670.768)	(56.636.634)	(132.443.491)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**8.751.573.729**	**66.090.374**	**915.874**	**1.944.492**	**23.097.715**	**8.843.622.184**	***Total - Net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) / *10. LOANS (Continued)*

d. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (dalam ribuan Rupiah): (lanjutan) / *d. By economic sector and collectibility (in thousands of Rupiah): (continued)*

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang Lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Rumah Tangga	7.108.908.975	36.653.232	1.106.622	2.599.017	25.367.254	7.174.635.100	*Household*
Konstruksi	499.716.592	895.252	--	--	4.203.876	504.815.720	*Construction*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	244.485.790	12.329.167	250.008	886.456	3.574.927	261.526.348	*Agriculture, hunting and forestry*
Industri Pengolahan	154.536.480	656.653	--	289.375	820.131	156.302.639	*Utilities industry*
Perdagangan besar dan eceran	143.059.256	5.563.214	391.760	412.244	3.737.257	153.163.731	*Wholesale and groceries*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	55.213.623	2.989.182	124.013	51.633	1.621.801	60.000.252	*Social, culture, entertainment, and other personal services*
Penyedian akomodasi dan makan minum	29.462.442	1.244.603	184.575	211.480	20.397.824	51.500.924	*Hotel, food and beverages*
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	40.301.237	17.991	--	--	113.702	40.432.930	*Transportation, warehousing and communication*
Perikanan dan Perindustrian	14.740.225	925.503	170.737	24.443	243.349	16.104.257	*Fishery and Manufacturing*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	11.748.215	461.382	--	--	317.058	12.526.655	*Real estate, rent, and service company*
Jasa kesehatan dan sosial	8.628.706	280.466	--	--	--	8.909.172	*Health and social service*
Listrik, Gas, dan Air	926.951	--	--	--	--	926.951	*Water, Gas and electricity*
Jasa pendidikan	489.928	--	--	--	50.134	540.062	*Education Service*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	194.049	226.490	--	--	--	420.539	*Individual and household services*
Pertambangan dan penggalian	348.201	--	--	--	--	348.201	*Mining and excavation*
Lainnya	52.018.116	436.539	--	--	--	52.454.655	*Others*
Jumlah	8.364.778.786	62.679.674	2.227.715	4.474.648	60.447.313	8.494.608.137	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.252.301)	(13.228.777)	(1.271.623)	(3.196.630)	(39.155.374)	(91.104.706)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**8.330.526.485**	**49.450.897**	**956.092**	**1.278.018**	**21.291.939**	**8.403.503.431**	***Total - Net***

e. Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian kredit) / *e. Terms (based on loan agreements)*

Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan jatuh temponya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

Maturity period is classified based on credit period and the remaining period to maturity as stated in the loan agreements as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Jangka Waktu			***Maturity Period***
Kurang dari 1 tahun	18.902.545.752	5.336.966.952	*Less than 1 year*
Lebih dari 1 - 2 tahun	54.552.505.340	61.528.752.300	*More than 1 to 2 years*
Lebih dari 2 - 5 tahun	752.349.810.989	817.183.001.926	*More than 2 to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	8.150.260.813.239	7.610.559.415.401	*More than 5 years*
Jumlah	8.976.065.675.320	8.494.608.136.579	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(132.443.490.930)	(91.104.705.529)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**8.843.622.184.390**	**8.403.503.431.050**	***Total - Net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) / *10. LOANS (Continued)*

f. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *f. By remaining Period to Maturity:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Jangka Waktu			***Maturity Period***
Kurang dari 1 tahun	116.904.610.723	106.741.337.028	*Less than 1 year*
Lebih dari 1 - 2 tahun	243.306.458.246	433.967.637.239	*More than 1 to 2 years*
Lebih dari 2 - 5 tahun	1.052.311.033.640	1.908.032.424.546	*More than 2 to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	7.563.543.572.711	6.045.866.737.766	*More than 5 years*
Jumlah	8.976.065.675.320	8.494.608.136.579	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(132.443.490.930)	(91.104.705.529)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**8.843.622.184.390**	**8.403.503.431.050**	***Total - Net***

g. Berdasarkan kolektibilitas: / *g. By collectibility:*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*			
	Pokok/ *Principal*	**Penyisihan/ *Allowance***	**Bersih/ *Net***	
Lancar	8.786.885.110.219	(35.311.380.704)	8.751.573.729.515	*Current*
Dalam perhatian khusus	88.591.391.177	(22.501.017.454)	66.090.373.723	*Special mention*
Kurang lancar	9.239.564.269	(8.323.690.443)	915.873.826	*Substandard*
Diragukan	11.615.260.285	(9.670.768.197)	1.944.492.088	*Doubtful*
Macet	79.734.349.370	(56.636.634.132)	23.097.715.238	*Loss*
Jumlah	**8.976.065.675.320**	**(132.443.490.930)**	**8.843.622.184.390**	***Total***

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*			
	Pokok/ *Principal*	**Penyisihan/ *Allowance***	**Bersih/ *Net***	
Lancar	8.364.778.787.067	(34.252.302.176)	8.330.526.484.891	*Current*
Dalam perhatian khusus	62.679.673.894	(13.228.776.761)	49.450.897.133	*Special mention*
Kurang lancar	2.227.714.696	(1.271.622.513)	956.092.183	*Substandard*
Diragukan	4.474.647.867	(3.196.630.314)	1.278.017.553	*Doubtful*
Macet	60.447.313.055	(39.155.373.765)	21.291.939.290	*Loss*
Jumlah	**8.494.608.136.579**	**(91.104.705.529)**	**8.403.503.431.050**	***Total***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) / *10. LOANS (Continued)*

h. Cadangan kerugian penurunan nilai: / *h. Allowance for impairment losses:*

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Saldo awal tahun	(91.104.705.529)	(36.899.226.989)	*Balance at beginning of the year*
Pembalikan (penyisihan) selama tahun berjalan (catatan 33)	(41.317.247.846)	(9.682.330.314)	*Reversal (allowance) during the year (note 33)*
Pembalikan (pembentukan) penyesuaian PSAK 71	(21.537.555)	(44.538.824.293)	*Reversal (allowance) adjustment in compliance with SFAS 71*
Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan	--	15.676.067	*Recovery of written-off receivables*
Saldo akhir tahun	**(132.443.490.930)**	**(91.104.705.529)**	***Ending balance***

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*			
	Individual	**Kolektif/ *Collective***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	(8.355.996.426)	(82.748.709.103)	(91.104.705.529)	*Beginning balance*
Pembalikan (penyisihan) selama tahun berjalan (catatan 33)	--	(41.317.247.846)	(41.317.247.846)	*Reversal (allowance) during the year (note 32)*
Pembalikan (pembentukan) penyesuaian PSAK 71	--	(21.537.555)	(21.537.555)	*Reversal (allowance) adjustment in compliance with SFAS 71*
Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan	--	--	--	*Recovery of written-off receivables*
Saldo akhir	**(8.355.996.426)**	**(124.087.494.504)**	**(132.443.490.930)**	***Ending Balance***

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*			
	Individual	**Kolektif/ *Collective***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	(130.590.085)	(36.768.636.904)	(36.899.226.989)	*Beginning balance*
Pembalikan (penyisihan) selama tahun berjalan (catatan 33)	(8.241.082.408)	(1.441.247.906)	(9.682.330.314)	*Reversal (allowance) during the year (note 33)*
Pembalikan (pembentukan) penyesuaian PSAK 71	--	(44.538.824.293)	(44.538.824.293)	*Reversal (allowance) adjustment in compliance with SFAS 71*
Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan	15.676.067	--	15.676.067	*Recovery of written-off receivables*
Saldo akhir	**(8.355.996.426)**	**(82.748.709.103)**	**(91.104.705.529)**	***Ending Balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya kredit.

Management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible loans.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) / *10. LOANS (Continued)*

h. Cadangan kerugian penurunan nilai: (lanjutan) / *h. Allowance for impairment losses: (continued)*

Kredit yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka dan jaminan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 jumlah kredit yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai berupa deposito berjangka yang diblokir adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp375.000.000 dan giro yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp614.427.921 dan Rp620.492.257 (catatan 16).

Loans are secured with collaterals bound by mortgage, deferred rights or power of attorney to sell, time deposits and other guarantees. As of December 31, 2021 and 2020 the amount of loans secured with cash collateral in the form of withheld time deposits are nil and Rp375,000,000, respectively, and blocked current accounts as of December 31, 2021 and 2020 are amounting to Rp614,427,921 and Rp620,492,257, respectively (note 16).

Kredit yang dihapusbukukan: / *Loans written-off:*

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 saldo Kredit yang dihapus buku oleh Bank sebesar Rp9.556.077.570. Mutasi untuk kredit yang dihapus buku pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021 and 2020 amount of loans written off by the Bank is amounting to Rp9,556,077,570, respectively. Changes in written-off loans as of December 31, 2021 and 2020 are as follows :

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Saldo awal	9.556.077.570	9.540.401.503	*Beginning balance*
Penerimaan kembali	--	15.676.067	*Recovery*
Hapus buku	--	--	*Write off*
Saldo akhir	**9.556.077.570**	**9.556.077.570**	***Ending Balance***

i. Kredit yang bermasalah: / *i. Non-performing loans:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Kurang lancar	9.239.564.269	2.227.714.796	*Substandard*
Diragukan	11.615.260.285	4.474.647.867	*Doubtful*
Macet	79.734.349.370	60.447.313.055	*Loss*
Jumlah	100.589.173.924	67.149.675.718	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(74.631.092.772)	(43.623.626.592)	*Allowances for impairment losses*
Saldo akhir tahun	**25.958.081.152**	**23.526.049.126**	***Ending balance***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) / *10. LOANS (Continued)*

i. Kredit yang bermasalah: (lanjutan) / *i. Non-performing loans : (continued)*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Rasio kredit bermasalah - kotor	0,70%	0,79%	*The ratio of non-performing loans - gross*
Rasio kredit bermasalah - bersih	0,20%	0,29%	*The ratio of non-performing loans - net*

j. Tingkat suku bunga: / *j. Interest rates:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Kredit modal kerja	5,50% - 17,00%	5,50% - 19,87%	*Working capital loan*
Kredit investasi	6,00% - 21,80%	6,00% - 13,71%	*Investment loan*
Kredit konsumtif	5,00% - 12,50%	1,50% - 22,08%	*Consumption loan*
Kredit pegawai	11,00% - 12,25%	6,00%	*Employee loan*
Kredit kepada DPRD	11,00% - 18,00%	12,00% - 18,00%	*State representative loan*

k. Kredit yang Direstrukturisasi: / *k. Restructured Loans:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Perpanjangan waktu kredit			*Extension of loan period*
Lancar	193.885.829.938	12.418.379.057	*Current*
Dalam perhatian khusus	--	664.127.642	*Special mention*
Jumlah	193.885.829.938	13.082.506.699	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.938.858.299)	(1.439.602.654)	*Allowances for impairment losses*
Saldo akhir tahun	**191.946.971.639**	**11.642.904.045**	***Ending balance***

Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan dalam kategori kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp214.793.220.818.

Restructured loans and those categorized as non-performing loan amounted to nil and Rp214,793,220,818 as of 31 December 2021 and 2020, respectively.

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020, "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019" tertanggal 13 Maret 2020.

Bank has restructured loans for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020, "National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Spread of Coronavirus Disease 2019" dated March 13, 2020.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) / *10. LOANS (Continued)*

k. Kredit yang Direstrukturisasi (lanjutan) / *k. Restructured Loans (continued)*

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang kemudian diubah dengan Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 tentang "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019" tanggal 3 Desember 2020.

In compliance with Financial Services Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 regarding "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" which was amended subsequently with OJK Regulation No.48/POJK.03/2020 regarding "Amendment to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2020 regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Spread of Coronavirus Disease 2019" dated December 3, 2020.

l. Kredit Usaha Kecil / *l. Micro Financing*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Kredit usaha mikro dan kecil	562.268.372.941	496.796.919.367	*Micro financing*
Jumlah	**562.268.372.941**	**496.796.919.367**	***Total***

Rasio Kredit Usaha Kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 6,26% dan 6,47%.

Micro financing ratio to total loans as of December 31, 2021 and 2020 is 6.26% and 6.47%, respectively.

m. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) / *m. Bank's Legal Lending Limit*

Sesuai dengan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik pihak ketiga maupun pihak yang berelasi.

In accordance with the Bank's Legal Lending Limit (BMPK) report to Bank Indonesia as of December 31, 2021 and 2020 the Bank is in compliance with legal lending limit for third parties and related parties.

n. Informasi Syariah: / *n. Sharia Information:*

Berdasarkan jenis akad: / *By type of agreements:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Murabahah	498.228.965.734	568.366.172.048	*Murabahah*
Musyarakah	283.468.774.853	199.379.309.753	*Musyarakah*
Ijarah	859.323.591	52.182.290.689	*Ijarah*
Jumlah	782.557.064.178	819.927.772.490	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.834.880.690)	(8.355.996.426)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**773.722.183.488**	**811.571.776.064**	***Total - Net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) / *10. LOANS (Continued)*

n. Informasi Syariah: (lanjutan) / *n. Sharia Information: (continued)*

Berdasarkan Kolektibilitas: / *By collectibility :*

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*			
	Pokok/ *Principal*	**Penyisihan/ *Allowance***	**Bersih/ *Net***	
Lancar	773.929.338.568	(7.737.416.422)	766.191.922.146	*Current*
Dalam perhatian khusus	7.321.391.388	(366.069.569)	6.955.321.819	*Special mention*
Kurang lancar	676.399.439	(101.459.916)	574.939.523	*Substandard*
Diragukan	--	--	--	*Doubtful*
Macet	629.934.783	(629.934.783)	--	*Loss*
Jumlah	**782.557.064.178**	**(8.834.880.690)**	**773.722.183.488**	***Total***

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*			
	Pokok/ *Principal*	**Penyisihan/ *Allowance***	**Bersih/ *Net***	
Lancar	817.773.725.246	(7.617.599.509)	810.156.125.737	*Current*
Dalam perhatian khusus	1.055.412.741	(52.770.637)	1.002.642.104	*Special mention*
Kurang lancar	115.625.000	(17.343.750)	98.281.250	*Substandard*
Diragukan	629.453.947	(314.726.974)	314.726.973	*Doubtful*
Macet	353.555.556	(353.555.556)	--	*Loss*
Jumlah	**819.927.772.490**	**(8.355.996.426)**	**811.571.776.064**	***Total***

Kisaran tingkat margin rata-rata per tahun: / *Range of average profit margin rates per annum:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Murabahah Modal Kerja	3,0% - 9,5% Flat	9,0% - 10% Flat	*Working Capital Murabahah*
Murabahah Investasi	6,48% Flat	8% Flat	*Investment Murabahah*
Murabahah Konsumsi	5,5% - 11% Flat	6,5% - 8,2% Flat	*Consumption Murabahah*
Murabahah KPR iB	7,6% Flat	7,8% Flat	*KPR iB Murabahah*
Musyarakah Modal Kerja	9,75% Time	15% Time	*Working Capital Musyarakah*
Musyarakah Investasi	9,75% Efektif	11% Efektif	*Investment Musyarakah*

o. Aset Yang Diperoleh Untuk *Ijarah* / *o. Assets Acquired For Ijarah*

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan hibah.

This account represents lease objects of an ijarah muntahiyah bittamlik transaction which includes an option to transfer the title of ownership over the assets through a grant.

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Harga Perolehan	1.137.361.111	55.511.544.018	*Acquisition Cost*
Akumulasi Penyusutan	(278.037.520)	(3.156.903.422)	*Accumulated Depreciation*
Jumlah - Bersih	**859.323.591**	**52.354.640.596**	***Total - Net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) / *10. LOANS (Continued)*

o. Aset Yang Diperoleh Untuk *Ijarah* (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, kewajiban membentuk cadangan umum penyisihan aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif dalam bentuk pembiayaan *ijarah* atau pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pembentukan cadangan khusus *ijarah*.

o. Assets Acquired For Ijarah (continued)

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, the obligation to provide allowance for impairment losses on earning assets do not apply to earning assets under ijarah or ijarah muntahiyah bittamlik financing.

p. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit pembiayaan bersama yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

p. Syndicated Loan

Syndicated loan represents loan provided to borrowers under syndication agreements with other Banks.

Persentase penyertaan Bank sebagai anggota dalam kredit sindikasi, dimana Bank lain bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut:

Bank's percentage of share in syndicated loans, where another financial institution is the lead arranger, is as follows:

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
% Partisipasi	0,69 - 12,85%	0,69 - 12,85%	*% Participation*

Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp801.000.000.000 dan Rp701.000.000.000.

Bank's participation in syndicated loans with other banks for the years ended December 31, 2021 and 2020 is amounting to Rp801,000,000,000 and Rp701,000,000,000, respectively.

11. PERPAJAKAN / *11. TAXES*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember/ *December 31, 2021*	**31 Desember/ *December 31, 2020***	
PPh pasal 21	--	2.094.343.273	*Income tax article 21*
Pajak lainnya	7.000.000.000	12.905.656.727	*Other income tax*
Jumlah	**7.000.000.000**	**15.000.000.000**	***Total***

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXES (Continued)*

b. Utang pajak / *b. Tax payables*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
PPh pasal 4 ayat 2	2.236.602.072	3.191.728.973	*Income tax article 4 par. (2)*
PPh pasal 21	964.963.809	1.873.964.180	*Income tax article 21*
PPh pasal 23	170.405.749	4.466.735.000	*Income tax article 23*
PPh pasal 29	5.827.567.397	1.105.512.940	*Income tax article 29*
Jumlah	**9.199.539.027**	**10.637.941.093**	***Total***

c. Pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax, as shown in the statements of income, and taxable income is as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan	406.790.881.541	368.520.655.189	*Profit before estimated tax*
Beda waktu			***Temporary differences***
Imbalan kerja	(5.335.155.371)	4.256.176.169	*Employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai	51.276.346.963	5.258.811.011	*Allowance for impairment losses*
Imbalan Jasa Produksi	3.498.329.575	(27.212.282.619)	*Bonus*
	49.439.521.167	(17.697.295.439)	
Beda Tetap			***Permanent differences***
Iklan dan Promosi	5.949.309.145	1.839.964.569	*Advertisement and Promotion*
Pajak	9.283.864.247	25.994.823.753	*Tax*
Penjamuan tamu	91.111.810	61.505.108	*Entertainment*
Sumbangan	1.598.239.701	927.389.677	*Bank donations*
Ultah dan Perayaan	1.348.047.052	1.246.717.051	*Anniversaries and celebrations*
Olahraga dan rekreasi	391.619.688	238.783.804	*Sports and recreation*
Aset sewa	2.752.659.044	4.027.315.651	*Leased asset*
Corporate Social Responsibilty	775.440.428	--	*Corporate Social Responsibilty*
Koran dan majalah	109.093.000	112.093.250	*Magazines and newspaper*
Lainnya	1.558.421.368	1.393.489.575	*Others*
Pendapatan bunga reksadana Kontrak Investasi Kolektif	(9.570.445.402)	(9.852.764.283)	*Mutual interest income of Collective Investment Contract*
	14.287.360.081	25.989.318.155	
Taksiran penghasilan kena pajak	470.517.762.000	376.812.677.000	*Estimated taxable income*
Taksiran pajak penghasilan badan	103.513.907.640	82.898.788.940	*Estimated corporate income tax*
Pajak dibayar dimuka:			*Prepaid Tax:*
PPh pasal 25	97.686.340.243	81.793.276.000	*Estimated tax art. 25*
Kurang (Lebih) Pajak - bersih	**5.827.567.397**	**1.105.512.940**	***Prepaid tax expenses - net***

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pada tahun 2020, Bank melakukan perbaikan SPT tahunan untuk tahun pajak 2019 yang sebelumnya lebih bayar sebesar Rp4.725.690.000 menjadi kurang bayar sebesar Rp853.359.500 dan atas kekuarangan pajak tersebut telah dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2020 dan telah dilaporkan pada tanggal 9 Juli 2020. Perbaikan SPT tersebut dikarenakan adanya koreksi atas perhitungan kembali terhadap pendapatan bunga reksadana Kontrak Investasi Kolektif yang semula sebesar Rp31.620.883.709 menjadi sebesar Rp9.304.686.406.

Pada tahun 2020 Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi atas pemeriksaan pajak 2018 sebesar Rp48.321.404.523. Atas SKPKB tersebut Bank telah membayar sebagai uang muka sebesar Rp15.000.000.000 yang terdiri dari PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 masing-masing sebesar Rp12.905.656.727 dan Rp2.094.343.273. Bank tidak mencatat atas SKPKB tersebut pada laporan laba rugi dikarenakan menunggu RUPS tahunan untuk meminta persetujuan dari pemegang saham menggunakan cadangan umum. Atas hal tersebut RUPS tahun 2020 telah menyetujui penggunaan cadangan umum.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No.30 Tahun 2020 tentang Peraturan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah dihitung menggunakan tarif pajak 22%, serta akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

11. TAXES (Continued)

c. Corporate Income Tax (continued)

In 2020, the Bank made improvements to the annual tax return (SPT) for the 2019 tax year, which previously had an overpayment of Rp4,725,690,000 to an underpayment of Rp853,359,500 reported on July 8, 2020 and was reported on July 9, 2020. The revision of the SPT was due to a correction to the recalculation of interest income for Collective Investment Contract mutual funds, which was originally Rp31,620,883,709 to Rp9,304,686,406.

In 2020 the Bank received an Underpayment Tax Assessment (SKP-KB) from the Jambi Primary Tax Service Office for the 2018 tax audit of Rp48,321,404,523. For this SKPKB, the Bank has paid as a down payment of Rp15,000,000,000, consisting of Income Tax Article 25 and Income Tax Article 21 amounting to Rp12,905,656,727 and Rp2,094,343,273, respectively. The bank did not record the SKPKB in the income statement because it was waiting for the annual GMS to seek approval from shareholders to use the general reserve. For this reason, the 2020 annual GMS approved the use of the general reserve.

On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No.1 of 2020 which has become Law (UU) No.2 of 2020, as well as stipulating Government Regulation (PP) No.30 of 2020 concerning Income Tax Rate Regulations for Domestic Corporate Taxpayers in the form of Public Companies since June 19, 2020. The regulation stipulates tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments from 25% to 22% for the 2020 and 2021 tax years, and 20% from fiscal year 2022 onwards, and a further 3% tax rate will be applied for domestic taxpayers who meet certain requirements.

The calculation of income tax for the years ended December 31, 2021 and 2020 has been calculated using a tax rate of 22%, and will be the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return (SPT).

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *11. TAXES (Continued)*

d. Aset (Liabilitas) Pajak tangguhan / *d. Deferred tax Assets (Liabilities)*

	1 Jan 2021/ *Jan 1, 2021*	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ *Charged to Profit or Loss*	Dibebankan ke Pendapatan Komprehensif/ *Charged to Statement of Comprehensive Income*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Liabilitas Imbalan Kerja	9.770.434.484	(1.173.734.182)	(6.001.143.797)	2.595.556.505	*Employee Benefits Liability*
Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai	(7.936.415.785)	11.280.796.332	--	3.344.380.547	*Allowance for Impairment Losses on Receivable*
Jasa Produksi	8.819.264	769.632.505	--	778.451.769	*Bonus*
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasikan atas efek tersedia dijual	2.226.838.269	--	627.879.490	2.854.717.759	*Unrealized gains (losses) on available-for-sale marketable securities*
Penyesuaian atas PSAK 71	9.799.489.464	--	--	9.799.489.464	*Adjustment in compliance with SFAS 71*
Jumlah	**13.869.165.696**	**10.876.694.655**	**(5.373.264.307)**	**19.372.596.044**	***Total***

	1 Jan 2020/ *Jan 1, 2020*	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ *Charged to Profit or Loss*	Dibebankan ke Pendapatan Komprehensif/ *Charged to Statement of Comprehensive Income*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	
Liabilitas Imbalan Kerja	6.975.918.712	105.351.356	2.689.164.415	9.770.434.484	*Employee Benefits Liability*
Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai	(9.374.591.967)	1.156.938.422	281.237.760	(7.936.415.785)	*Allowance for Impairment Losses on Receivable*
Jasa Produksi	11.079.493.733	(11.070.674.469)	--	8.819.264	*Bonus*
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasikan atas efek tersedia dijual	172.013.171	--	2.054.825.098	2.226.838.269	*Unrealized gains (losses) on available-for-sale marketable securities*
Penyesuaian atas PSAK 71	--	--	9.799.489.464	9.799.489.464	*Adjustment in compliance with SFAS 71*
Jumlah	**8.852.833.649**	**(9.808.384.691)**	**14.824.716.737**	**13.869.165.696**	***Total***

e. Surat Ketetapan Pajak / *e. Tax Assessment Letters*

Bank akan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2021.

The Bank will submit tax notification letter (SPT) for the year ended 2021.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah sesuai dengan SPT yang dilaporkan ke kantor pajak.

The calculation of corporate income tax for the year ended December 31, 2020 is in accordance with the Annual Corporate Tax Return reported to the tax office.

12. ASET TETAP / *12. FIXED ASSET*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Pemilikan langsung	167.703.626.261	114.865.412.720	*Direct ownership*
Akumulasi penyusutan	(58.419.114.628)	(61.549.625.269)	*Accumulated depreciation*
Jumlah	**109.284.511.633**	**53.315.787.451**	***Total***

31 Desember 2021/ *December 31, 2021*

	Saldo awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Cost***
Tanah	23.373.596.800	--	--	--	23.373.596.800	*Lands*
Bangunan	24.555.438.113	1.020.445.106	(242.671.700)	--	25.333.211.519	*Buildings*
Peralatan dan perabot kantor	55.000.667.436	3.601.564.504	(8.391.107.369)	--	50.211.124.571	*Office equipments and furniture*
Kendaraan bermotor	2.472.672.000	--	(535.017.000)	--	1.937.655.000	*Vehicles*
Sewa guna usaha	9.463.038.371	--	--	--	9.463.038.371	*Finance lease*
	114.865.412.720	4.622.009.610	(9.168.796.069)	--	110.318.626.261	
Bangunan dalam proses	--	57.385.000.000	--	--	57.385.000.000	*Construction in progress*
	114.865.412.720	62.007.009.610	(9.168.796.069)	--	167.703.626.261	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	10.994.422.393	1.360.771.238	(135.570.981)	--	12.219.622.650	*Buildings*
Peralatan dan perabot kantor	46.542.345.123	4.111.071.057	(8.407.813.088)	--	42.245.603.092	*Office equipment and Furniture*
Kendaraan bermotor	2.304.108.732	93.291.214	(625.412.000)	--	1.771.987.946	*Vehicles*
Sewa guna usaha	1.708.749.021	473.151.919	--	--	2.181.900.940	*Finance Lease*
	61.549.625.269	6.038.285.428	(9.168.796.069)	--	58.419.114.628	
Nilai Buku	**53.315.787.451**				**109.284.511.633**	***Book Value***

31 Desember 2020/ *December 31, 2020*

	Saldo awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Cost***
Tanah	19.153.660.800	4.219.936.000	--	--	23.373.596.800	*Lands*
Bangunan	22.192.538.022	1.517.853.091	--	845.047.000	24.555.438.113	*Buildings*
Peralatan dan perabot kantor	52.054.267.976	2.946.399.460	--	--	55.000.667.436	*Office Equipments and Furniture*
Kendaraan bermotor	2.472.672.000	--	--	--	2.472.672.000	*Vehicles*
Sewa guna usaha	9.463.038.371	--	--	--	9.463.038.371	
	105.336.177.169	8.684.188.551	--	845.047.000	114.865.412.720	
Bangunan dalam proses	845.047.000	--	--	(845.047.000)	--	*Construction in progress*
	106.181.224.169	8.684.188.551		--	114.865.412.720	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	10.402.891.077	591.531.316	--	--	10.994.422.393	*Buildings*
Peralatan dan Perabot kantor	42.032.968.800	4.509.376.323	--	--	46.542.345.123	*Office Equipment and Furniture*
Kendaraan bermotor	2.230.199.399	73.909.333	--	--	2.304.108.732	*Vehicles*
Sewa guna usaha	1.245.597.103	463.151.918	--	--	1.708.749.021	
	55.911.656.379	5.637.968.890	--	--	61.549.625.269	
Nilai Buku	**50.269.567.790**				**53.315.787.451**	***Book Value***

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Biaya penyusutan aset tetap yang telah dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp6.038.285.428 dan Rp5.637.968.890 (lihat Catatan 32).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 termasuk aset tetap yang didasarkan pada prinsip perbankan Syariah masing-masing sebesar Rp1.290.792.080 dan Rp1.603.480.835.

Selama tahun 2021 belum dilakukan penghapusbukuan dan lelang atas aset tetap Bank.

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam kepada PT Asuransi Bangun Askrida dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp91.491.815.920, dan Rp67.536.257.626 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak ada komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap dan aset yang mengalami penurunan nilai. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak terdapat aset yang tidak dipakai untuk sementara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Aset dalam proses merupakan Gedung Mahligai 9 yang telah mencapai 55% berdasarkan Berita Acara pembayaran termin I - V.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud dalam PSAK 48 (revisi 2014) selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

12. FIXED ASSET (Continued)

Depreciation expenses of fixed assets charged to statement of comprehensive income for the years ended December 31, 2021 and 2020 are Rp3,305,819,549 and Rp5,637,968,890, respectively (see Note 32).

Figures as of December 31, 2021 and 2020 include fixed assets under Sharia Banking Principles, amounting to Rp1,290,792,080 and Rp1,603,480,835, respectively.

During 2021 no write-off was made and no auction was carried out to the Bank's fixed assets.

Bank has insured their property (not including land rights) to cover possible losses against fire, theft, and natural disasters to PT Asuransi Bangun Askrida with full insurance coverage as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp91,491,815,920 and Rp67,536,257,626, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the insured property. As of December 31, 2021 and 2020, there are no fixed assets pledged as collateral.

As of December 31, 2021 and 2020 there is no contractual commitment in the acquisition of fixed assets and assets that have been impaired. Furthermore, on December 31, 2021 and 2020, there are no assets under construction and no assets are temporarily unused or idle on December 31, 2021 and 2020.

Asset in progress consists of Gedung Mahligai 9, which has reached 55% completion, based on payment term I - V Minutes of Handover.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year as described in SFAS 48 (revised 2014), because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

13. ASET HAK GUNA / *13. RIGHT-OF-USE ASSET*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*				
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan / *Additions***	**Pelepasan/ *Disposals***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya Perolehan					***Cost***
Tanah	--	--	--	--	*Lands*
Bangunan	2.372.146.782	323.668.474	--	2.695.815.256	*Buildings*
Mesin ATM	11.040.211.978		(1.344.116.574)	9.696.095.404	*Automatic Teller Machines*
Kendaraan bermotor	10.743.067.960	526.223.281	--	11.269.291.241	*Vehicles*
	24.155.426.720	849.891.755	(1.344.116.574)	23.661.201.901	
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Tanah					*Lands*
Bangunan	685.469.596	639.112.764	--	1.324.582.360	*Buildings*
Mesin ATM	3.759.436.903	3.514.535.230	(1.344.116.574)	5.929.855.559	*Automatic Teller Machines*
Kendaraan bermotor	5.870.288.015	2.316.428.816	--	8.186.716.831	*Vehicles*
	10.315.194.514	6.470.076.810	(1.344.116.574)	15.441.154.750	
Nilai Buku	**13.840.232.206**			**8.220.047.151**	***Book Value***

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*				
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pelepasan/ *Disposals***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya Perolehan					***Cost***
Tanah	--	--	--	--	*Lands*
Bangunan	--	2.372.146.782	--	2.372.146.782	*Buildings*
Mesin ATM	--	11.040.211.978	--	11.040.211.978	*Automatic Teller Machines*
Kendaraan bermotor	--	10.743.067.960	--	10.743.067.960	*Vehicles*
	--	24.155.426.720	--	24.155.426.720	
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Tanah	--	--	--	--	*Lands*
Bangunan	--	685.469.596	--	685.469.596	*Buildings*
Mesin ATM	--	3.759.436.903	--	3.759.436.903	*Automatic Teller Machines*
Kendaraan bermotor	--	5.870.288.015	--	5.870.288.015	*Vehicles*
	--	10.315.194.514	--	10.315.194.514	
Nilai Buku	**--**			**13.840.232.206**	***Book Value***

Biaya penyusutan aset hak guna yang telah dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp6.470.076.810 dan Rp10.315.194.514 (lihat Catatan 32).

Depreciation expenses of right-of-use assets charged to statement of comprehensive income for the years ended December 31, 2021 and 2020 are Rp6,470,076,810 and Rp10,315,194,514, respectively (see Note 32).

14. ASET TAKBERWUJUD / *14. INTANGIBLE ASSETS*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*				
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pelepasan/ *Disposals***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya Perolehan					***Cost***
Piranti Lunak	3.336.479.109	487.300.000	--	3.823.779.109	*Software*
Pengembangan piranti lunak	1.337.259.007	--	--	1.337.259.007	*Software development*
Hak Paten	170.500.000	--	--	170.500.000	*License*
	4.844.238.116	487.300.000	--	5.331.538.116	
Akumulasi Amortisasi					***Accumulated Amortization***
Piranti Lunak	3.273.135.666	60.384.928	--	3.333.520.594	*Software*
Pengembangan piranti lunak	1.319.827.212	17.432.759	--	1.337.259.971	*Software development*
Hak Paten	170.500.000	--	--	170.500.000	*License*
	4.763.462.878	77.817.687	--	4.841.280.565	
Nilai Buku	**80.775.238**			**490.257.551**	***Book Value***

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*				
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pelepasan/ *Disposals***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya Perolehan					***Cost***
Piranti Lunak	3.321.589.109	14.890.000	--	3.336.479.109	*Software*
Pengembangan piranti lunak	1.337.259.007	--	--	1.337.259.007	*Software development*
Hak Paten	170.500.000	--	--	170.500.000	*License*
	4.829.348.116	14.890.000	--	4.844.238.116	
Akumulasi Amortisasi					***Accumulated Amortization***
Piranti Lunak	3.222.222.952	50.912.714	--	3.273.135.666	*Software*
Pengembangan piranti lunak	1.123.710.673	196.116.539	--	1.319.827.212	*Software development*
Hak Paten	170.500.000	--	--	170.500.000	*License*
	4.516.433.625	247.029.253	--	4.763.462.878	
Nilai Buku	**312.914.491**			**80.775.238**	***Book Value***

Biaya amortisasi aset takberwujud yang telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp77.817.687 dan Rp247.029.253 (catatan 32).

Amortization expenses of intangible assets charged to statements of profit and loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2021 and 2020 are Rp77,817,687 and Rp247,029,253, respectively (note 32).

15. ASET LAIN-LAIN / *15. OTHER ASSETS*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Pendapatan yang masih akan diterima			*Accrued income*
Kredit	41.926.759.746	45.324.153.090	*Credit*
Efek-efek	18.491.740.038	24.385.464.230	*Marketable Securities*
Bagi hasil syariah	13.248.499.042	12.013.452.901	*Sharia Profit sharing*
Penempatan	80.026.364	--	*Placement*
Provisi	14.483.322	236.825.759	*Provisions*
	73.761.508.512	81.959.895.980	
Aset yang diambil alih	3.053.166.763	3.161.125.181	*Foreclosed Collaterals*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.053.166.763)	(1.580.562.591)	*Allowance for impairment losses*
	--	1.580.562.590	
Beban ditangguhkan	8.253.589.000	8.997.499.010	*Deferred expenses*
Beban dibayar dimuka	13.477.504.706	70.904.246.893	*Prepaid expense*
Materai, perangko dan barang cetakan	4.688.526.402	2.035.485.445	*Stamp duties, stamps and printings*
Tagihan *Settlement*	3.304.045.670	5.002.723.323	*Settlement bill*
Aset pengampunan pajak	153.180.867	175.008.067	*Tax amnesty*
Jumlah	**103.638.355.157**	**170.655.421.308**	***Total***

Beban dibayar dimuka merupakan sewa gedung kantor kas yang terdapat di masing-masing Kantor Cabang Bank Jambi, sewa mesin ATM dan penempatan lokasi ATM, dan sewa mobil untuk keperluan kantor, persekot operasional, asuransi, dan *fee* kredit.

Prepaid expenses represent rent for cash office buildings located at each Jambi Bank Branch office, rent for ATM machines and placement of ATM locations, and car rental for office needs, operational details, insurance, and credit fees.

Beban yang ditangguhkan merupakan beban atas biaya jaringan telekomunikasi terkait *Core Banking System*. Beban ditangguhkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Deferred expenses represent telecommunication networks expenses related to Core Banking System. Deferred expenses are amortized using the straight-line method.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset lain-lain karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset lain-lain tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of other assets since management believes that the carrying amounts of other assets do not exceed the estimated recoverable amount.

16. SIMPANAN DARI NASABAH / *16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

a. Berdasarkan segmen: / *a. By Segment:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Konvensional			*Conventional*
Giro	3.027.514.243.966	1.929.636.596.911	*Current accounts*
Tabungan	1.985.558.040.583	1.749.797.652.154	*Savings*
Deposito	4.993.956.149.844	4.826.935.199.815	*Time deposits*
Sub jumlah	10.007.028.434.393	8.506.369.448.880	*Sub total*
Syariah			*Sharia*
Giro	86.904.865.990	56.418.097.312	*Current accounts*
Tabungan	102.020.102.970	82.693.087.074	*Savings*
Deposito	403.669.538.417	740.360.406.802	*Time deposits*
Sub jumlah	592.594.507.377	879.471.591.188	*Sub total*
Jumlah	**10.599.622.941.770**	**9.385.841.040.068**	***Total***

b. Transaksi dengan pihak tertentu: / *b. Transactions with certain parties:*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*			
	Pihak Ketiga/ *Third parties*	**Pihak berelasi/ *Related parties***	**Jumlah/ *Total***	
Giro				*Current accounts*
Perusahaan	406.340.812.928	814.112.292	407.154.925.220	*Company*
Pemerintah	715.269.399.357	1.931.465.465.219	2.646.734.864.576	*Government*
Koperasi/Yayasan	42.017.541.518	2.968.935.900	44.986.477.418	*Cooperative /Foundation*
Perseorangan	8.142.223.898	74.068.529	8.216.292.427	*Individual*
	1.171.769.977.701	1.935.322.581.940	3.107.092.559.641	
Tabungan				*Savings accounts*
Siginjai	1.630.399.411.803	21.070.008.844	1.651.469.420.647	*Siginjai*
Simpeda	363.359.905.637	2.741.371.748	366.101.277.385	*Simpeda*
TabunganKu	30.705.970.404	137.734.435	30.843.704.839	*TabunganKu*
Silah	16.487.000.000	--	16.487.000.000	*Silah*
Simpel	29.973.926.333	29.364.664	30.003.290.997	*Simpel*
	2.070.926.214.177	23.978.479.691	2.094.904.693.868	
Deposito				*Time deposits*
Perusahaan	2.724.405.518.501	1.785.300.000.000	4.509.705.518.501	*Company*
Perseorangan	382.669.443.775	8.703.000.000	391.372.443.775	*Individual*
Koperasi/Yayasan	403.450.795.402	90.090.000.000	493.540.795.402	*Cooperative /Foundation*
Pemerintah	3.006.930.583	--	3.006.930.583	*Government*
	3.513.532.688.261	1.884.093.000.000	5.397.625.688.261	
Jumlah	**6.756.228.880.139**	**3.843.394.061.631**	**10.599.622.941.770**	***Total***

16. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan) / *16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)*

b. Transaksi dengan pihak tertentu: (lanjutan) / *b. Transactions with certain parties: (continued)*

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*			
	Pihak Ketiga/ *Third parties*	**Pihak berelasi/ *Related parties***	**Jumlah/ *Total***	
Giro				*Current accounts*
Perusahaan	322.867.609.302	1.138.975.270	324.006.584.572	*Company*
Pemerintah	477.175.286.852	1.134.942.521.825	1.612.117.808.677	*Government*
Koperasi/Yayasan	39.813.220.597	4.571.314.642	44.384.535.239	*Cooperative /Foundation*
Perseorangan	4.278.135.347	1.267.630.388	5.545.765.735	*Individual*
	844.134.252.098	1.141.920.442.125	1.986.054.694.223	
Tabungan				*Savings accounts*
Siginjai	1.389.837.487.273	24.384.333.849	1.414.221.821.122	*Siginjai*
Simpeda	346.709.969.154	4.389.170.755	351.099.139.909	*Simpeda*
TabunganKu	15.938.877.990	52.961.349	15.991.839.339	*TabunganKu*
Silah	20.752.000.000	--	20.752.000.000	*Silah*
Simpel	30.394.457.559	31.481.299	30.425.938.858	*Simpel*
	1.803.632.791.976	28.857.947.252	1.832.490.739.228	
Deposito				*Time deposits*
Perusahaan	2.595.388.463.307	1.499.280.000.000	4.094.668.463.307	*Company*
Perseorangan	322.327.730.925	27.296.000.000	349.623.730.925	*Individual*
Koperasi/Yayasan	741.000.606.802	36.099.000.000	777.099.606.802	*Cooperative /Foundation*
Pemerintah	303.006.930.583	42.896.875.000	345.903.805.583	*Government*
	3.961.723.731.617	1.605.571.875.000	5.567.295.606.617	
Jumlah	**6.609.490.775.691**	**2.776.350.264.377**	**9.385.841.040.068**	***Total***

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut: / *Time deposits classification by term of period is as follows:*

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
1 bulan	2.359.943.528.136	4.017.415.785.604	*1 month*
3 bulan	1.125.171.515.420	602.061.839.875	*3 months*
6 bulan	41.586.229.190	363.221.229.190	*6 months*
12 bulan	1.870.924.415.515	584.596.751.948	*12 months*
Jumlah	**5.397.625.688.261**	**5.567.295.606.617**	***Total***

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut: / *Time deposits classification by maturity is as follows:*

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Kurang dari 1 bulan	2.634.413.707.092	3.308.223.378.801	*Less than 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	2.455.035.803.726	1.311.254.246.677	*More than 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	32.289.968.342	363.221.229.190	*More than 3 - 6 months*
Lebih dari 6 - 12 bulan	275.886.209.101	584.596.751.949	*More than 6 - 12 months*
Jumlah	**5.397.625.688.261**	**5.567.295.606.617**	***Total***

16. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan) / *16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)*

b. Transaksi dengan pihak tertentu: (lanjutan)

Tingkat bunga:

Jumlah deposito yang diblokir yang dijadikan sebagai agunan kredit yang diberikan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp375.000.000.

Giro yang diblokir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp614.427.921 dan Rp620.492.257.

b. Transactions with certain parties: (continued)

The interest rates:

The amount of blocked time deposits pledged as collateral to credit granted as of December 31, 2021 and 2020 is nil and Rp375,000,000, respectively.

Blocked current accounts as of December 2021 and 2020 are amounting to Rp614,427,921 and Rp620,492,257 respectively.

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Giro			***Current accounts***
Kasda dan Pemerintah	0,25% - 2,10%	0,50% - 2,25%	*Kasda dan Government*
Swasta	0,00% - 2,00%	0,00% - 2,00%	*Private*
Tabungan			***Savings***
Simpeda	0,00% - 1,85%	0,00% - 1,90%	*Simpeda*
Siginjai	0,00% - 1,85%	0,00% - 1,90%	*Siginjai*
TabunganKu	0,00% - 1,00%	0,00% - 1,00%	*TabunganKu*
Simpel	--	--	*Simpel*
Deposito			***Time Deposits***
1 bulan	3,50% - 3,50%	5,00% - 5,75%	*1 month*
3 bulan	3,50% - 3,50%	5,25% - 5,75%	*3 months*
6 bulan	3,50% - 3,50%	5,25% - 5,75%	*6 months*
12 bulan	3,50% - 3,50%	5,25% - 5,75%	*12 months*

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 Desember 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Desember 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Under Law No. 24 dated Desember 22, 2004, effective as of December 22, 2005, as amended with Government Regulation in lieu of Law No. 3 dated October 13, 2008, the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the specified criteria.

As of December 31, 2021 and 2020, Bank is a participant of such guarantee program.

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan segmen: / *a. By segment:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Konvensional			*Conventional*
Giro	8.814.264.586	6.561.769.009	*Current accounts*
Tabungan	3.189.232.764	4.409.228.209	*Saving accounts*
Call money	300.000.000.000	--	*Call money*
Deposito	2.500.000.000	--	*Time deposits*
Jumlah	**314.503.497.350**	**10.970.997.218**	***Total***

b. Berdasarkan jenis / *b. By type:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Giro			*Current accounts*
Bank Swasta	8.814.264.586	6.560.060.730	*Private bank*
Bank Pemerintah	--	1.708.279	*Government bank*
Sub Jumlah	8.814.264.586	6.561.769.009	*Sub Total*
Tabungan			*Saving accounts*
Bank swasta	3.189.232.764	4.409.228.209	*Private bank*
Sub jumlah	3.189.232.764	4.409.228.209	*Sub Total*
Interbank call money			*Interbank call money*
Bank pemerintah	300.000.000.000	--	*Government bank*
Bank swasta	--	--	*Private bank*
Sub jumlah	300.000.000.000	--	*Sub Total*
Deposito Berjangka			*Time Deposits*
Bank swasta	2.500.000.000	--	*Private bank*
Sub jumlah	2.500.000.000	--	*Sub Total*
Jumlah - Bersih	**314.503.497.350**	**10.970.997.218**	***Total - Net***

Tingkat bunga: / *The interest rates:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Giro	0,00% - 2,00%	0,00% - 2,00%	*Current accounts*
Tabungan	0,00% - 1,85%	0,00% - 1,90%	*Saving accounts*
Interbank call money	2,87% - 3,52%	--	*Interbank call money*
Deposito berjangka	3,50% - 3,50%	--	*Time deposits*

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan per 31 Desember 2021 dan 2020.

There is no balance of deposits from other banks that are blocked or pledged as collateral as of December 31, 2021 and 2020.

18. LIABILITAS SEGERA / *18. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Rekening Titipan	133.410.533.018	54.419.078.392	*Accounts not yet settled*
Bunga	24.527.574.539	18.730.296.575	*Interest*
Setoran jaminan	11.300.613.004	7.434.590.657	*Matured security deposits*
ATM Bersama	13.120.927.104	20.860.610.892	*ATM Bersama*
Kiriman uang		--	*Money transfers*
Liabilitas kepada Kas Negara	1.747.499.734	417.834.076	*Liabilities to the State Treasury*
Jumlah	**184.107.147.399**	**101.862.410.592**	***Total***

Rincian bunga yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

Details of accrued interest income as of December 31, 2021 and 2020 are as follows :

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Deposito	24.396.460.917	18.650.631.343	*Time deposits*
Efek-efek yang diterbitkan	--	--	*Securities Issued*
Tabungan	131.113.622	79.665.232	*Saving accounts*
Pinjaman yang diterima	--	--	*Borrowings*
Jumlah	**24.527.574.539**	**18.730.296.575**	***Total***

Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Bank atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan.

Accounts not yet settled are payment transactions received from customers by the Bank and subsidiaries as collecting bank before deposited to destination accounts.

Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Bank sebagai bank persepsi.

Liabilities to Treasury and State Treasury Office is the result of receipt from both individuals and corporate taxpayers received by the Bank as a perception bank.

Kiriman uang digunakan untuk membukukan setoran transfer sebelum mengkredit atau mendebet rekening nasabah.

Money transfers are used to record deposit transfers before credited to or debited from destination accounts.

19. PINJAMAN YANG DITERIMA / *19. BORROWINGS*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
PT Sarana Multigriya Finansial	14.830.000.000	--	*PT Sarana Multigriya Finansial*
Badan Pengelola Keuangan Haji	--	30.000.000.000	*Badan Pengelola Keuangan Haji*
Jumlah	**14.830.000.000**	**30.000.000.000**	***Total***

19. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

a. PT Sarana Multigriya Finansial

Merupakan dana yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial, dimana liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No.139/PP/SMF-BPD.JAMBI/VII/2021 dan salinan akta No.74 tanggal 29 September 2021 tentang Pemberian Kredit *Non Revolving*.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar fasilitas pembiayaan sejumlah Rp20.000.000.000 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung dari tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan. Bunga yang disepakati sebesar 5,56% untuk pinjaman dan 5,45% untuk *uncommitted facility line*. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Bank telah mencairkan fasilitas sebesar Rp5.170.000.000.

Fasilitas Pembiayaan digunakan sebagai sumber pendanaan atas KPR yang telah disalurkan oleh Bank Jambi.

b. Badan Pengelola Keuangan Haji

Merupakan dana yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan Haji, dimana liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan akad pembiayaan *Mudharabah Muqayaddah* No.22/PKS-BPKH/2020 dan No.126.10/PKS.BPD-UUS/2020 Tanggal 13 Oktober 2020.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar fasilitas pembiayaan sejumlah Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung dari tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan. Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil untuk *Shahibul Maal* sebesar 56,54% dan *Mudharib* sebesar 43,46%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Bank telah memperoleh pencairan fasilitas tahap pertama sebesar Rp30.000.000.000.

Fasilitas Pembiayaan digunakan sebagai sumber dana dalam pemberian fasilitas pembiayaan syariah sesuai dengan persyaratan *Shahibul Maal.*

Pinjaman yang diterima tersebut telah dilunasi oleh Bank pada tanggal 23 Maret 2021.

19. BORROWINGS (Continued)

a. PT Sarana Multigriya Finansial

Represents funds received from PT Sarana Multigriya Finansial, where the repayment obligation is in accordance with the Loan Facility Provision Agreement No.139/PP/SMF-BPD.JAMBI/VII/2021 and a copy of deed No.74 dated September 29, 2021 concerning Non Revolving Loans .

The loan received is recognized at the amount of the financing facility amounting to Rp20,000,000,000 with a term of 12 (twelve) months, starting from the date of disbursement of the financing facility. The agreed interest is 5.56% for the loan and 5.45% for the uncommitted facility line. As of December 31, 2021, the Bank has made drawdown of the facility amounting to Rp5,170,000,000.

The Financing Facility is used as a source of funding for mortgages that have been distributed by Bank Jambi.

b. The Hajj Financial Management Agency

It is a fund received from the Hajj Financial Management Agency, where the repayment liability is in accordance with the Mudharabah Muqayaddah financing agreement No.22/PKS-BPKH/2020 and No.126.10/PKS.BPD-UUS/2020 dated October 31, 2020.

The loan received is recognized at the amount of the financing facility amounting to Rp200,000,000,000 with a term of 12 months, starting from the date of the disbursement of the financing facility. The agreement for the profit sharing ratio for Shahibul Maal is 56.54% and Mudharib is 43.46%. As of December 31, 2020, the Bank has obtained the first phase facility drawdown amounting to Rp30,000,000,000.

The Financing Facility is used as a source of funds in providing sharia financing facilities in accordance with the requirements of Shahibul Maal.

The Borrowing was paid off by the Bank on March 23, 2021.

20. IMBALAN KERJA KARYAWAN / *20. EMPLOYEE BENEFIT*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Jasa produksi	3.538.417.140	40.087.565	*Bonus*
Imbalan kerja	20.407.803.987	44.411.065.829	*Employee benefit*
Jumlah	**23.946.221.127**	**44.451.153.394**	***Total***

a. Jasa Produksi / *a. Bonus*

Perubahan jasa produksi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Changes in bonus as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Saldo awal	40.087.565	22.142.344.147	*Beginning balance*
Pembentukan dari laba bersih tahun berjalan (catatan 31)	78.538.417.140	68.953.370.390	*Addition during the year (note 31)*
Realisasi tahun berjalan	(75.040.087.565)	(91.055.626.972)	*Realization for the year*
Saldo akhir	**3.538.417.140**	**40.087.565**	***Ending balance***

Jasa Produksi untuk tahun buku 2021 telah dicadangkan dan dibayarkan keseluruhan pada bulan Desember 2021. Kekurangan dan kelebihan atas pembayaran jasa produksi akan disesuaikan dengan laba bersih setelah diaudit.

Bonuses for the 2021 financial year have been reserved and paid out in full in December 2021. Any excess of bonus payments will be adjusted to net income after being audited.

b. Imbalan kerja / *b. Employee benefit*

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada karyawannya yang memenuhi syarat yaitu program pensiun manfaat pasti.

The Bank provides long-term benefits and post-employment benefits to all eligible employees under defined benefit plan.

Penilaian aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh aktuaria independen (PT Dian Artha Tama) dengan menggunakan metode *projected unit credit.* Perhitungan aktuaria untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing diperoleh dari laporan aktuaria masing-masing pada tanggal 21 Januari 2022 dan 29 Januari 2021.

The actuarial calculation of the long-term benefits and post-employment benefits was performed by an independent actuary (PT Dian Artha Tama) using the projected unit credit method. The actuarial computation for the years ended December 31, 2021 and 2020 is presented in the actuarial reports dated January 21, 2022 and January 29, 2021, respectively.

Program Pensiun / ***Defined Benefit Pension Plan***

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi. Iuran pensiun ditetapkan 23% dari gaji karyawan. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank sebesar 18%.

The Bank's defined benefit pension plan is managed by Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi. The contribution is 23% of the employee's salary. The employee contribution is 5% of the employee's pension basic salary and the remaining amount required to fund the plan is contributed by the Bank at 18%.

20. IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFIT (Continued)

b. Imbalan kerja (lanjutan)

b. Employee benefit (continued)

Program Pensiun (lanjutan)

Defined Benefit Pension Plan (continued)

Program dana pensiun iuran pasti yang terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16 tanggal 27 Pebruari 2007 tentang peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jambi yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-161/KM.10/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jambi.

The latest defined benefit pension plan regulation as stipulated in Director Decision Letter No. 16 dated February 27, 2007 has been approved by the Minister of Finance under Decree No.Kep-161/KM.10/2007 dated August 10, 2007, regarding the ratification of the regulation of the Pension Fund from Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Program pengabdian dan pesangon

Service and Severance Payment Program

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pindah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003 dan kompensasi lainnya.

The liability for other long-term employee benefits consist of service payments, severance and termination benefits based on Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Keuntungan dan kerugian aktuaria yang timbul dari penyesuaian, perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dan perubahan dalam program diakui seluruhnya dalam laba komprehensif lain.

Actuarial gains and losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja:

Remeasurement of net employee benefit liabilities:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Nilai Kini Kewajiban awal tahun	23.771.289.229	14.236.979.032	*Value of Funded Obligations at beginning of year*
(Keuntungan) Kerugian aktuaria	(21.276.782.555)	9.534.310.197	*Actuarial (gain) loss*
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	**2.494.506.674**	**23.771.289.229**	***Recognized Actuarial Loss (Gain)***

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Expenses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Biaya Jasa Kini	10.666.986.029	9.805.880.018	*Current service cost*
Biaya Bunga	1.428.046.444	1.468.894.965	*Interest cost*
Jumlah	**12.095.032.473**	**11.274.774.983**	***Total***

20. IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan) / *20. EMPLOYEE BENEFIT (Continued)*

b. Imbalan kerja (lanjutan) / ***b. Employee benefit (continued)***

Program pengabdian dan pesangon (lanjutan) / ***Service and Severance Payment Program (continued)***

Mutasi atas nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Changes in present value of estimated liabilities for employee benefits are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Nilai Kini Kewajiban awal tahun	44.411.065.829	27.903.674.839	*Value of Funded Obligations at beginning of year*
Biaya Jasa Kini	10.666.986.029	9.805.880.018	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	1.428.046.444	1.468.894.965	*Interest Expenses*
Iuran Pemberi Kerja	(5.215.277.608)	(4.877.984.524)	*Employer Contributions*
Pembayaran Manfaat	(3.605.090.355)	(1.382.772.592)	*Benefits Payments*
Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui	--	--	*Curtailment*
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	(27.277.926.352)	11.493.373.123	*Recognized Actuarial Loss (Gain)*
Jumlah Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	**20.407.803.987**	**44.411.065.829**	***Total Recognized Actuarial Loss (Gain)***

Liabilitas imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi sebagai berikut:

The employee benefit liabilities are determined using the Projected Unit Credit method with the following assumptions:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Tingkat suku bunga			*Annual interest rate*
Aset	7,60% per tahun/ *per year*	7,70% per tahun/ *per year*	*Assets*
Liabilitas	7,60% per tahun/ *per year*	7,70% per tahun/ *per year*	*Liability*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	6,00% per tahun/ *per year*	6,00% per tahun/ *per year*	*Annual salary growth rate*
Tingkat mortalitas	GAM - 1971	GAM - 1971	*Mortality rate*
Tingkat cacat	0,025% per tahun/ *per year*	0,025% per tahun/ *per year*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri per tahun	0,10% per tahun/ *per year*	0,10% per tahun/ *per year*	*Resignation rate*
Usia 18 - 44 tahun	0,10% per tahun/ *per year*	0,10% per tahun/ *per year*	*18 - 44 years old*
Usia 45 - 55 tahun	1,00% per tahun/ *per year*	1,00% per tahun/ *per year*	*45 - 55 years old*
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun	*Normal retirement age*

Rincian nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja sebagai berikut:

Details of present value of post-employment benefit liabilities are as follows:

	2021	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	
Nilai kini kewajiban imbalan	20.407.803.987	44.411.065.829	27.903.647.839	11.797.984.106	37.472.088.349	*Present value of benefit liabilities*

22. LIABILITAS LAIN-LAIN / *22. OTHER LIABILITIES*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Sewa Guna Usaha	14.836.922.326	19.901.439.581	*Finance lease*
Cadangan Dana CSR	12.036.465.602	11.145.203.875	*CSR fund reserves*
Pendapatan ditangguhkan	3.195.869.059	4.406.752.269	*Deferred income*
Setoran jaminan	1.728.748.392	2.295.077.369	*Guarantee deposit*
Beban yang masih harus dibayar	1.195.039.573	2.618.203.126	*Accrued expenses*
Biaya kantor lainnya	86.296.030	41.645.970	*Other office expenses*
Lain-lain	1.947.167.635	891.835.204	*Others*
Jumlah	**35.026.508.617**	**41.300.157.394**	***Total***

Sewa guna usaha merupakan sewa yang dilakukan oleh Bank yang terdiri dari sewa mesin ATM, kendaraan dan sewa gedung kantor.

Leasing is a lease made by the Bank, which consists of renting ATM machines, vehicles and leasing office buildings.

Pendapatan ditangguhkan merupakan provisi kredit yang belum bisa diidentifikasi.

Deferred income is a credit provision that cannot be identified.

Beban yang masih harus dibayar merupakan antisipasi, premi penjaminan LPS, dan biaya kantor lainnya.

Accrued expenses represent anticipated expenses, LPS insurance premiums, and other office expenses.

23. MODAL SAHAM / *23. SHARE CAPITAL*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

As of December31, 2021 and 2020, the composition of the Bank's shareholders is as follows:

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*			
Pemegang Saham	**Jumlah lembar saham/ *Number of shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* (%)**	**Jumlah dalam Rupiah/ *Amount in Rupiah***	***Shareholders***
Saham Seri A				*Series A Shares*
Pemerintah Provinsi Jambi	173.364	22,49%	173.364.000.000	*Provincial Government Jambi*
	173.364	22,49%	173.364.000.000	
Pemerintah Kota				*Municipal Government*
Sungai Penuh	67.500	8,76%	67.500.000.000	*Sungai Penuh*
Jambi	60.000	7,78%	60.000.000.000	*Jambi*
	127.500	16,54%	127.500.000.000	
Pemerintah Kabupaten				*Regency Government*
Batanghari	64.055	8,31%	64.055.000.000	*Batanghari*
Tanjung Jabung Barat	60.000	7,78%	60.000.000.000	*Tanjung Jabung Barat*
Kerinci	56.000	7,27%	56.000.000.000	*Kerinci*
Sarolangun	50.000	6,49%	50.000.000.000	*Sarolangun*
Muara Tebo	59.999	7,78%	59.999.000.000	*Muara Tebo*
Tanjung Jabung Timur	46.514	6,03%	46.514.000.000	*Tanjung Jabung Timur*
Muaro Jambi	38.164	4,95%	38.164.000.000	*Muaro Jambi*
Merangin	41.000	5,32%	41.000.000.000	*Merangin*
Muara Bungo	50.000	6,49%	50.000.000.000	*Muara Bungo*
	465.732	60,00%	465.732.000.000	
Saham Seri B				*Series B Shares*
Koperasi Karyawan Bank Jambi	8.441	0,55%	4.220.500.000	*Cooperatives of Employees of Bank Jambi*
	8.441	0,55%	4.220.500.000	
Jumlah	**775.037**	**100,00%**	**770.816.500.000**	***Total***

23. MODAL SAHAM (Lanjutan) / *23. SHARE CAPITAL (Continued)*

Pemegang Saham / *Shareholders*	31 Desember 2020/*December 31, 2020*		
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* (%)**	**Jumlah dalam Rupiah/ *Amount in Rupiah***
Saham Seri A / *Series A Shares*			
Pemerintah Provinsi Jambi / *Provincial Government Jambi*	173.364	22,56%	173.364.000.000
	173.364	22,56%	173.364.000.000
Pemerintah Kota / *Municipal Government*			
Sungai Penuh / *Sungai Penuh*	67.500	8,79%	67.500.000.000
Jambi / *Jambi*	60.000	7,81%	60.000.000.000
	127.500	16,59%	127.500.000.000
Pemerintah Kabupaten / *Regency Government*			
Batanghari / *Batanghari*	64.055	8,34%	64.055.000.000
Tanjung Jabung Barat / *Tanjung Jabung Barat*	60.000	7,81%	60.000.000.000
Kerinci / *Kerinci*	56.000	7,29%	56.000.000.000
Sarolangun / *Sarolangun*	50.000	6,51%	50.000.000.000
Muara Tebo / *Muara Tebo*	59.999	7,81%	59.999.000.000
Tanjung Jabung Timur / *Tanjung Jabung Timur*	46.014	5,99%	46.014.000.000
Muaro Jambi / *Muaro Jambi*	38.164	4,97%	38.164.000.000
Merangin / *Merangin*	39.000	5,08%	39.000.000.000
Muara Bungo / *Muara Bungo*	50.000	6,51%	50.000.000.000
	463.232	60,00%	463.232.000.000
Saham Seri B / *Series B Shares*			
Koperasi Karyawan Bank Jambi / *Cooperatives of Employees of Bank Jambi*	8.441	0,55%	4.220.500.000
	8.441	0,55%	4.220.500.000
Jumlah / *Total*	**772.537**	**100,00%**	**768.316.500.000**

Penambahan modal saham Seri A dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp2.000.000.000 dari 1 (satu) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 42 tanggal 15 Oktober 2021.

- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp500.000.000 dari 1 (satu) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 34 tanggal 21 Desember 2021.

The increase of Series A share capital in 2021 is as follows:

- *Approval of Share capital injection amounting to Rp2,000,000,000 from 1 (one) shareholder as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 42 dated October 15, 2021.*

- *Approval of Share capital injection amounting to Rp500,000,000 from 1 (one) shareholder as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 34 dated December 21, 2021.*

23. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Penambahan modal saham tersebut telah dicatat perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Surat No.AHU-AH.01.03-0466954 dengan daftar perseroan No.AHU-0189034.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 dan No.AHU-AH.01.03-0494746 dengan daftar perseoran No.AHU-0235418.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 sehingga pada tanggal 31 Desember 2021 modal disetor Bank Jambi menjadi Rp770.816.500.000.

Penambahan modal saham Seri A dan Seri B dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp5.024.500.000 dari 2 (dua) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 06 tanggal 5 Maret 2020.
- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp6.113.000.000 dari 2 (dua) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 36 tanggal 27 Juli 2020.
- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp11.046.000.000 dari 3 (tiga) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 24 tanggal 17 Desember 2020.

Penambahan modal saham tersebut telah dicatat perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Surat No.AHU-AH.01.03-0138410 dengan daftar perseroan No. AHU-0049974.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020, No.AHU-AH.01.03-0352206 dengan daftar perseroan No. AHU-0135201.AH.01.11 Tahun 2020 Tanggal 18 Agustus 2020, dan No. AHU-AH.01.03-0424168 dengan daftar perseroan No. AHU-0219359.AH.01.11 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember 2020 sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 modal disetor Bank Jambi menjadi Rp768.316.500.000.

23. SHARE CAPITAL (Continued)

The increase of share capital has been recorded as amendment by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia under letters No. AHU-AH.01.03-0466954 with company register No. AHU-0189034.AH.01.11 Tahun 2021 dated October 29, 2021, and No.AHU-AH.01.03-0494746 with company register No.AHU-0235418.AH.01.11 Tahun 2021 dated December 31, 2021; therefore, as of December 31, 2021 Bank Jambi's paid-up capital is amounting to Rp770,816,500,000.

The increase of Series A and Series B share capital in 2020 is as follows:

- *Approval of Share capital injection amounting to Rp5,024,500,000 from 2 (two) shareholders as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 06 dated March 5, 2020.*
- *Approval of Share capital injection amounting to Rp6,113,000,000 from 2 (two) shareholders as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 36 dated July 27, 2020.*
- *Approval of Share capital injection amounting to Rp11,046,000,000 from 3 (three) shareholders as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 24 dated December 17, 2020.*

The increase of share capital has been recorded as amendment by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia under letters No. AHU-AH.01.03-0138410 with company register No. AHU-0049974.AH.01.11 Tahun 2020 dated March 12, 2020, No. AHU-AH.01.03-0352206 with company register No. AHU-0135201.AH.01.11 Tahun 2020 dated August 18, 2020 , and No. AHU-AH.01.03-0424168 with company register No. AHU-0219359.AH.01.11 Tahun 2020 dated December 29, 2020; therefore, as of December 31, 2020 Bank Jambi's paid-up capital is amounting to Rp768,316,500,000.

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2021 tambahan modal disetor sebesar Rp590.574.736 yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tebo, dan pada tanggal 31 Desember 2020 tambahan modal disetor sebesar Rp590.931.736 yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tebo.

24. OTHER PAID-IN CAPITAL

On December 31, 2021, additional paid-in capital was made in the amount of Rp590,574,736 consisting of the District Government of Batanghari, Muaro Jambi, and Tebo, and on December 31, 2020, additional paid-in capital was made in the amount of Rp590,931,736 consisting of the District Government of Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, and Tebo.

25. PENGAMPUNAN PAJAK

Bank Jambi telah memanfaatkan program Pengampunan Pajak *(Tax Amnesty)* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Bank Jambi telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak / Surat Pernyataan Harta (SPHPP) pada tanggal 21 Desember 2016 dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak / Surat Keterangan (SKPP) dengan No.KET-199/PP/WPJ.27/2017 tertanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp587.500.000.

Berdasarkan SPHPP dan SKPP, Bank Jambi mendeklasrasikan aset pengampunan pajak sebesar Rp718.772.000 dengan uang tebusan (jumlah yang dibayar sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak) sebesar Rp21.563.160.

25. TAX AMNESTY

Bank Jambi has been utilizing the Tax Amnesty program as stipulated in Law No. 11 of 2016 regarding Tax Amnesty.

Bank Jambi filed an Assets Declaration Letter for Tax Amnesty/Assets Declaration Letter (SPHPP) on December 21, 2016 and has obtained a Certificate of Tax Amnesty/(SKPP) Certificate No.KET-199/PP/WPJ.27/2017 dated January 4, 2017 amounting to Rp587,500,000.

Based on the SPHPP and SKPP, Bank Jambi declared tax amnesty assets amounting to Rp718,772,000 with redemption value (the amount paid in accordance with the Law of Tax Amnesty) amounting to Rp21,563,160.

26. PENGGUNAAN LABA BERSIH

26. APPROPRIATION OF NET INCOME

a. Cadangan / ***a. Reserves***

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Cadangan umum	730.491.232.881	624.357.087.732	*General reserves*
Cadangan bertujuan	111.428.888.918	111.428.888.918	*Purposed reserves*
Jumlah	**841.920.121.799**	**735.785.976.650**	***Total***

Perubahan cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Changes in general reserves as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Saldo awal	624.357.087.732	522.407.535.719	*Beginning balance*
Koreksi saldo awal (penerapan PSAK 71) - bersih	--	(34.743.644.464)	*Correction of beginning balance (Application of SFAS 71) - Net*
Pembentukan cadangan	154.455.549.673	136.693.196.477	*Provision of reserves*
Penggunaan Dana Cadangan	(48.321.404.524)	--	*Application of reserves*
Saldo akhir	**730.491.232.881**	**624.357.087.732**	***Ending balance***

Cadangan ini dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This reserve is arising from net profit after income tax which has been approved in the General Meeting of Shareholders in accordance with the prevailing regulations.

26. PENGGUNAAN LABA BERSIH (lanjutan)

a. Cadangan (lanjutan)

Cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp730.491.232.881 dan Rp624.357.087.732. Cadangan terakhir dibentuk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Akta Notaris No. 18 tanggal 10 Februari 2021 dihadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, di Jambi.

b. Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 18 tanggal 10 Februari 2021 dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, di Jambi, para pemegang saham menyetujui pembagian laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp275.813.481.558 dengan alokasi untuk dividen sebesar 44,00%, sehingga dividen yang dibagi sebesar Rp121.357.931.886.

c. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya merupakan akumulasi dari laba yang belum dibagikan (didistribusikan) dan menunggu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp314.153.668.557 dan Rp275.813.481.558.

26. APPROPRIATION OF NET INCOME (continued)

a. Reserves (continued)

The balance as of December 31, 2021 and 2020 is amounting to Rp730,491,232,881 and Rp624,357,087,732, respectively. The latest reserve is formed under Notarial Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 18, dated February 10, 2021 of Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, notary in Jambi.

b. Dividend

Based on the General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 10 dated February 10, 2021 of Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, in Jambi, the shareholders approved the distribution of 2020 net profit of Rp275,813,481,558 with the allocation of dividend at 44.00%, so as the dividend distributed is Rp121,357,931,886.

c. Retained earnings that have not been specified for use

Retained earnings that have not been specified for use represent the accumulation of profits that have not been distributed and waiting for the decision of the General Meeting of Shareholders (RUPS). Retained earnings that have not been specified for use as of December 31, 2021 and 2020 are Rp314,153,668,557 and Rp275,813,481,558, respectively.

27. PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA

27. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Aset keuangan tersedia untuk dijual			*Financial assets available for sale*
Saldo awal	7.895.153.866	516.039.516	*Beginning balance*
Keuntungan (kerugian) periode berjalan	2.743.155.492	10.194.397.043	*Gain (Loss) for the current period*
Pajak-pajak terkait	(517.037.298)	(2.815.282.693)	*Taxes*
Jumlah	**10.121.272.060**	**7.895.153.866**	***Total***
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja			*Actuarial Gain (Loss) for Employee Benefits Plan*
Saldo awal	(23.771.289.229)	(14.236.979.032)	*Beginning balance*
Keuntungan (kerugian) periode berjalan	27.277.926.352	(12.223.474.612)	*Gain (Loss) for the current period*
Pajak-pajak terkait	(6.001.143.797)	2.689.164.415	*Taxes*
Jumlah	**(2.494.506.674)**	**(23.771.289.229)**	***Total***

28. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH / *28. INTEREST INCOME AND SHARIA*

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Konvensional			*Conventional*
Kredit yang diberikan	911.954.755.566	863.420.081.006	*Loans*
Efek-efek	101.418.212.729	114.858.561.652	*Marketable Securities*
Penempatan pada Bank	18.465.349.301	6.851.108.706	*Placement in Bank*
	1.031.838.317.596	985.129.751.364	
Syariah			*Sharia*
Margin dan Bagi hasil	55.510.266.626	66.581.777.545	*Margin and profit sharing*
Efek-efek	57.068.432.671	26.534.437.323	*Marketable Securities*
Penempatan pada Bank	1.185.446.641	294.123.333	*Placement in Bank*
	113.764.145.938	93.410.338.201	
Jumlah	**1.145.602.463.534**	**1.078.540.089.565**	***Total***

a. Pendapatan bunga kredit / *a. Loan interest incomes*

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Kredit Konsumsi	821.726.266.155	776.157.724.165	*Consumption loans*
Kredit Investasi	74.562.997.271	70.754.462.581	*Investment loans*
Kredit Modal kerja	15.665.492.140	16.507.894.260	*Working capital loans*
Jumlah	**911.954.755.566**	**863.420.081.006**	***Total***

b. Efek-efek Konvensional dan Syariah / *b. Conventional and Sharia Marketable Securities*

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Surat Berharga	82.081.178.934	105.602.162.604	*Marketable securities*
Sertifikat Bank Indonesia	67.653.133.064	--	*Bank Indonesia Certificate*
Reksadana	8.689.963.958	29.175.578.354	*Mutual Fund*
Medium Term Notes	62.369.444	6.615.258.017	*Medium Term Notes*
Jumlah	**158.486.645.400**	**141.392.998.975**	***Total***

c. Penempatan pada Bank Konvensional dan Syariah / *c. Placement in Conventional and Sharia Banks*

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Bank Lain	7.976.118.268	2.699.387.344	*Other Banks*
Bank Indonesia	11.674.677.674	4.445.844.695	*Bank Indonesia*
Jumlah	**19.650.795.942**	**7.145.232.039**	***Total***

28. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (Lanjutan) / *28. INTEREST INCOME AND SHARIA (Continued)*

d. Margin dan Bagi hasil / *d. Margin and profit sharing*

		31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Murabahah	Konsumsi	41.646.529.209	44.784.051.657	*Consumption Murabahah*
Musyarakah	Modal Kerja	2.465.976.221	5.586.622.353	*Working Capital Musyarakah*
Murabahah	Investasi	2.574.452.360	9.470.219.996	*Investment Murabahah*
Murabahah	Modal Kerja	279.730.708	198.970.354	*Working Capital Murabahah*
Musyarakah	Investasi	--	--	*Investment Musyarakah*
Musyarakah	MMQ	3.005.001.682	32.038.345	*MMQ Musyarakah*
Murabahah	Karyawan	246.111.563	218.490.000	*Official Murabahah*
Murabahah	BSB	3.686.760.928	1.939.372.471	*BSB Murabahah*
Murabahah	KPR IB	129.750.000	136.065.625	*KPR IB Murabahah*
Ijarah		1.475.953.955	4.215.946.744	*Ijarah*
Jumlah		**55.510.266.626**	**66.581.777.545**	***Total***

29. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *29. OTHER OPERATING INCOME*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Fee transaksi	28.202.571.606	17.531.388.433	*Transaction fee*
Administrasi pinjaman	24.025.008.212	38.298.972.470	*Administration for loans*
Keuntungan penjualan surat berharga	18.913.688.204	35.396.064.735	*Gain from sales of investment securities*
Administrasi simpanan	14.418.773.785	15.314.456.148	*Administration for savings*
Administrasi lainnya	6.385.764.329	5.820.322.869	*Other administration*
Administrasi syariah	3.414.284.839	1.859.568.543	*Sharia administration*
Administrasi bank garansi	585.832.988	404.764.053	*Bank guarantees administration*
Referensi bank	406.370.800	341.448.000	*Bank references*
Kiriman uang RTGS dan kliring	229.143.747	277.572.900	*RTGS Transfer and clearing*
Lainnya	3.991.487.773	2.451.268.136	*Others*
Jumlah	**100.572.926.283**	**117.695.826.287**	***Total***

30. BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH / *30. INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Konvensional			*Conventional*
Simpanan nasabah	320.588.189.034	372.541.548.976	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.159.127.181	13.839.772.966	*Deposits from other banks*
Medium Term Notes	34.333.333	12.624.261.423	*Medium Terms Notes*
Jaminan Pihak ketiga	19.872.398.813	16.086.829.036	*Underwriting of third-party funds*
Pinjaman yang diterima	908.983.855	--	*Borrowings*
Lainnya	4.116.825.301	3.200.760.648	*Others*
	346.679.857.517	418.293.173.049	
Marjin dan Bagi hasil Syariah			*Margin and Sharia profit sharing*
Deposito Berjangka	43.594.744.142	38.585.386.004	*Time Deposits*
Medium Term Notes	--	10.575.288.405	*Medium Terms Notes*
Tabungan	1.018.668.923	1.190.217.151	*Saving accounts*
Giro	287.287.525	161.193.312	*Current Account*
SIMA	42.777.778	1.880.654.444	*SIMA*
Asuransi KPR	475.002.365	335.190.633	*Housing Loans Insurance*
Aset Ijarah	625.218.354	2.296.424.690	*Ijarah assets*
	46.043.699.087	55.024.354.639	
Jumlah	**392.723.556.604**	**473.317.527.688**	***Total***

a. Simpanan Nasabah / *a. Deposit from costumers*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Deposito Berjangka	266.235.365.151	324.839.006.563	*Time Deposits*
Giro	40.320.667.349	35.883.804.551	*Current accounts*
Tabungan	14.032.156.534	11.818.737.862	*Savings account*
Jumlah	**320.588.189.034**	**372.541.548.976**	***Total***

b. Simpanan dari Bank lain / *b. Deposit from others Banks*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Interbank Call Money	725.602.778	13.659.837.777	*Interbank Call Money*
Tabungan	74.040.401	97.967.485	*Saving account*
Giro	359.484.002	81.967.704	*Current accounts*
Jumlah	**1.159.127.181**	**13.839.772.966**	***Total***

31. BEBAN TENAGA KERJA / *31. EMPLOYEES EXPENSES*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Gaji dan tunjangan	80.850.986.756	80.780.153.411	*Employees salaries and allowance*
Jasa produksi (lihat catatan 20)	78.538.417.140	68.953.370.390	*Bonus (see note 20)*
Upah kerja lainnya	18.701.860.398	18.489.450.047	*Other employee benefits*
Asuransi pegawai	14.642.333.894	14.051.545.338	*Employee insurance*
Pengobatan	14.318.475.170	11.570.374.113	*Medical*
Pengabdian	9.776.740.195	14.157.124.935	*Service Payment*
Pendidikan dan pelatihan	4.294.759.720	3.181.608.423	*Education and training*
Beban pegawai lainnya	911.957.043	487.526.298	*Other employee expenses*
Jumlah	**222.035.530.316**	**211.671.152.955**	***Total***

Gaji dan tunjangan terdiri dari: / *Salaries and allowance consist of:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Gaji pegawai	26.887.531.235	27.433.476.145	*Employees salaries*
Gaji dan tunjangan Direksi	3.402.630.492	2.565.008.109	*Salaries and allowance of Directors*
Honorarium Dewan Komisaris dan Komite	1.178.066.000	1.338.852.000	*Honorarium of Commissioners and Committee*
Tunjangan:			*Allowance:*
Pegawai	26.566.499.153	31.428.643.727	*Employee*
Pajak penghasilan	10.495.899.221	7.049.469.513	*Employees Income tax*
Lainnya	12.320.360.655	10.964.703.917	*Others*
Jumlah	**80.850.986.756**	**80.780.153.411**	***Total***

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *32. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Listrik, air dan gas	29.841.695.476	21.836.173.863	*Electricity, water and gas*
Pajak dan retribusi	10.095.751.181	26.296.389.251	*Taxes and public facility*
Penelitian dan pengembangan	8.503.377.646	12.220.461.035	*Research and development*
Perjalanan dinas dan penginapan	7.714.945.083	5.828.889.757	*Official travels and accommodation*
Penyusutan Aset Hak Guna (catatan 13)	6.470.076.810	10.315.194.514	*Depreciation of Right-of-Use Assets (note 13)*
Corporate Socia Responsibility	6.283.073.371	5.516.269.631	*Corporate Social Responsibility*
Iklan dan promosi	5.949.309.145	1.839.964.569	*Promotion and advertising*
Sewa	5.825.734.980	5.775.087.469	*Rent*
Alat tulis dan cetakan	5.731.174.452	6.687.803.284	*Stationery and printings*
Pemeliharaan dan perbaikan	5.557.589.997	3.617.985.258	*Maintenance and repairs*
Perlengkapan kantor	3.716.816.597	2.990.163.055	*Office Equipment*
Penyusutan Aset Tetap (catatan 12)	6.038.285.428	5.637.968.890	*Depreciation of Fixed Assets (note 12)*
Pertemuan dan rapat	2.968.888.184	2.211.140.779	*Meeting*
Asuransi	2.538.783.315	2.072.555.206	*Insurance*
Konsultan	2.257.211.602	2.920.478.248	*Consultant*
Pungutan otoritas jasa keuangan	691.764.362	656.167.841	*Collected by Financial Services Authority*
Amortisasi (catatan 14)	77.817.687	247.029.253	*Amortization (note 14)*
Lainnya	24.243.692.200	18.917.511.594	*Others*
Jumlah	**134.505.987.516**	**135.587.233.497**	***Total***

33. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN / *33. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES OF FINANCIAL ASSETS*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Pembentukan (pemulihan)			*Allowance (Reversal)*
Kredit yang diberikan	40.859.901.139	8.766.473.429	*Loans*
Surat Berharga	4.305.935	(4.309.622)	*Marketable Securities*
Pembiayaan syariah	457.346.707	915.856.885	*Sharia financing*
Lainnya	3.048.860.778	1.584.872.317	*Others*
Jumlah	**44.370.414.559**	**11.262.893.009**	***Total***

34. PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL / *34. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)*

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Pendapatan bukan operasional			*Non-operating Income*
kredit hapus buku	99.540.139	46.286.370	*write-off*
Lainnya	8.382.022.550	11.271.981.833	*Others*
Jumlah	8.481.562.689	11.318.268.203	*Total*
Beban bukan operasional			*Non-operating expenses*
Lainnya	(4.836.460.399)	(3.686.827.774)	*Others*
	(4.836.460.399)	(3.686.827.774)	
Jumlah	**3.645.102.290**	**7.631.440.429**	***Total***

Pendapatan lainnya merupakan penerimaan kembali kredit hapus buku, penggantian buku cek dan bilyet giro, dan keuntungan penjualan aset keuangan surat berharga.

Other income is the recovery of write-off credits, replacement of check books and transfer form, and profit from sale of securities financial assets.

35. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *35. RECEIVABLES AND LIABILITIES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank Jambi yang dicatat pada *extra-comptable (off balance sheet)* adalah sebagai berikut:

Commitments and contingent transaction in the normal course of Bank Jambi's activities recorded on extra-comptable (off balance sheet) are as follow:

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Komitmen			***Commitment:***
Komitmen kredit yang belum ditarik	116.238.381.657	115.910.038.397	*Unused loan facility granted*
Lainnya	--	--	*Others*
Sub jumlah	116.238.381.657	115.910.038.397	*Sub total*
Kontinjensi			***Contingencies***
Bunga dalam penyelesaian	(16.360.273.612)	(11.850.918.012)	*Interest on non performing loan*
Garansi yang diterbitkan	5.779.230.624	46.914.516.440	*Guarantee granted*
Kredit yang dihapus bukukan	961.729.407	4.818.528.946	*Write-off loans*
Efek - efek	230.000.000.000	230.000.000.000	*Marketable Securities*
Sub jumlah	220.380.686.419	269.882.127.374	*Sub total*
Tagihan (liabilitas) kontinjensi bersih	**336.619.068.076**	**385.792.165.771**	***Net contingencies receivable (liability)***

36. LABA PER SAHAM / *36. EARNING PER SHARE*

	31 Desember / *December 31, 2021*	**31 Desember / *December 31, 2020***	
Laba bersih	314.153.668.558	275.813.481.558	*Net income*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	769.567	757.225	*Total weighted average of common share*
Laba bersih per saham dasar	**408.222**	**364.243**	***Net income per share***

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *37. RELATED PARTY TRANSACTIONS*

Dalam kegiatan normal usaha, Bank Jambi melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In the normal course of business, Bank Jambi enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties are in compliance with the agreed terms and conditions.

Saldo instrumen keuangan dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi antara lain:

Balances of financial instrument arising from transactions with related parties are, among others, as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Aset			***Assets***
Kredit yang diberikan dan Pembiayaan Syariah			*Loans and Sharia Financing*
Pemegang Saham			*Shareholders*
Pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten	4.043.698.984	4.471.481.158	*Provincial, Municipal and Regency Government*
Manajemen, Karyawan Kunci dan Pejabat Ekslusif	8.582.492.586	9.490.432.902	*Management, Key Employees and Exclusive Official*
Lainnya	87.921.068	97.222.222	*Others*
Jumlah	**12.714.112.638**	**14.059.136.282**	***Total***
Persentase dari jumlah aset	0,10%	0,12%	*Percentage to total assets*
Liabilitas			***Liabilities***
Giro			*Current accounts*
Pemerintah Kota dan Kabupaten	1.196.752.171.736	703.219.887.825	*Municipal and Regency Government*
Pemerintah Provinsi	734.713.293.483	431.722.634.000	*Provincial Government*
Entitas terkait lainnya	3.857.116.721	6.977.920.300	*Other Related Parties*
	1.935.322.581.940	1.141.920.442.125	
Tabungan			*Saving accounts*
Pemerintah Kota dan Kabupaten	2.022.004.723	2.433.469.778	*Provincial, Municipal and Regency Government*
Manajemen, Karyawan Kunci dan Pejabat Ekslusif	21.639.487.214	26.042.984.736	*Management, Key Employees and Exclusive Official*
Entitas terkait Lainnya	316.987.754	381.492.738	*Other Related Entity*
	23.978.479.691	28.857.947.252	
Deposito			*Time Deposits*
Pemerintah Kota dan Kabupaten	67.954.000.000	42.896.875.000	*Municipal and Regency Government*
Manajemen, Karyawan Kunci dan Pejabat Ekslusif	30.839.000.000	27.296.000.000	*Management, Key Employees and Exclusive Official*
Entitas terkait lainnya	1.785.300.000.000	1.535.379.000.000	*Other Related Entities*
	1.884.093.000.000	1.605.571.875.000	
Jumlah	**3.843.394.061.631**	**2.776.350.264.377**	***Total***
Persentase dari jumlah liabilitas	34,37%	28,85%	*Percentage to total liabilities*

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

37. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued)

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of Relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction*
Pemerintah propinsi, kota dan kabupaten/ *Provincial, Municipal and Regency Government*.	Pemegang saham/ *Shareholders*.	Giro, Deposito / *Demand deposit, Time deposit*.
Perseorangan/*Individual*	Komisaris, Direksi, Karyawan, Pejabat Eksekutif/ *Commissioners, Directors, Employees, Executive Officers.*	Kredit yang diberikan / *Loans*
Entitas yang terkait dengan entitas pelapor / *related entity*	Yayasan Dana Pensiun Bank Jambi, Koperasi dan Kesejahteraan Karyawan Bank Jambi / *Yayasan Dana Pensiun Bank Jambi, Koperasi and Kesejahteraan Karyawan Bank Jambi.*	Giro, tabungan, Deposito/*Demand deposit, savings, time deposit.*

38. INFORMASI SEGMEN

38. SEGMENT INFORMATION

Untuk tujuan manajemen, unit usaha Bank Jambi dikelompokkan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu Unit Usaha Konvensional dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

For managerial purposes, Bank Jambi's businesses are classified into 2 (two) units, namely the conventional business unit and the Sharia business unit:

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*			
	Jumlah/ *Total*	Konvensional/ *Conventional*	Syariah/ *Sharia*	
Aset				***Assets***
Kas	321.828.427.300	317.080.097.600	4.748.329.700	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	536.174.204.653	490.988.216.803	45.185.987.850	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	1.888.661.773	1.887.176.683	1.485.090	*Current Accounts with other Banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	789.008.437.735	789.008.437.735	--	*Placement with Bank Indonesia and other Banks*
Efek-efek	2.233.265.043.716	1.602.124.797.132	631.140.246.584	*Marketable securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	142.550.758.665	142.550.758.665	--	*Securities Purchased under Agreements to Resell*
Kredit yang diberikan	8.843.622.184.389	8.070.123.982.221	773.498.202.168	*Loans*
Pajak dibayar dimuka	7.000.000.000	7.000.000.000	--	*Prepaid Tax*
Aset tetap	51.899.511.633	50.608.719.553	1.290.792.080	*Fixed assets*
Aset dalam penyelesaian	57.385.000.000	57.385.000.000	--	*Construction in Progress*
Aset hak guna	8.220.047.151	7.821.943.932	398.103.219	*Right-of-Use Assets*
Aset takberwujud	490.257.551	490.257.551	--	*Intangible assets*
Aset Pajak tangguhan	19.372.596.044	19.372.596.044	--	*Deferred Tax Assets*
Aset lain-lain	103.638.355.157	89.616.412.290	14.021.942.867	*Other assets*
Jumlah Aset	**13.116.343.485.768**	**11.646.058.396.209**	**1.470.285.089.558**	***Total assets***
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas segera	184.107.147.399	166.507.410.081	17.599.737.318	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	10.599.622.941.770	10.007.028.434.393	592.594.507.377	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	314.503.497.350	314.503.497.350		*Deposits from other Banks*
Utang pajak	9.199.539.027	8.857.335.198	342.203.829	*Taxes payable*
Efek-efek yang diterbitkan	--	--	--	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	14.830.000.000	14.830.000.000	--	*Borrowings*
Imbalan kerja karyawan	23.946.221.127	23.946.221.127	--	*Employee benefits*
Liabilitas lain-lain	35.026.508.617	31.473.519.831	3.552.988.786	*Other liabilities*
Jumlah Liabilitas	**11.181.235.855.290**	**10.567.146.417.980**	**614.089.437.310**	***Total liabilities***

38. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan) / *38. SEGMENT INFORMATION (Continued)*

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*			
	Jumlah/ *Total*	**Konvensional/ *Conventional***	**Syariah/ *Sharia***	
Pendapatan Segmen				***Segment income***
Pendapatan operasi	1.145.602.463.534	1.031.823.435.068	113.779.028.466	*Operating income*
Pendapatan operasi lainnya	100.572.926.283	96.780.589.539	3.792.336.744	*Other operating income*
Pendapatan non operasi	8.481.562.689	8.387.634.187	93.928.502	*Non operating income*
Jumlah pendapatan segmen	**1.254.656.952.506**	**1.136.991.658.794**	**117.665.293.712**	***Total segment income***
Beban Segmen				***Segment expenses***
Beban operasi	(392.723.556.604)	(345.904.867.423)	(46.818.689.181)	*Operating expenses*
Beban operasi lainnya	(450.306.053.962)	(437.740.616.503)	(12.565.437.459)	*Other operating expenses*
Beban non operasi	(4.836.460.399)	(4.743.633.165)	(92.827.234)	*Non operating expenses*
Jumlah beban segmen	(847.866.070.965)	(788.389.117.091)	(59.476.953.874)	*Total segment expenses*
Beban pajak - bersih	(92.637.212.983)	(85.030.852.168)	(7.606.360.815)	*Tax expenses-net*
Laba bersih	**314.153.668.558**	**263.571.689.535**	**50.581.979.023**	***Net income***

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*			
	Jumlah/ *Total*	**Konvensional/ *Conventional***	**Syariah/ *Sharia***	
Aset				***Assets***
Kas	244.279.258.050	240.652.339.050	3.626.919.000	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	782.449.612.638	761.826.810.553	20.622.802.085	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	18.606.640.214	18.604.011.908	2.628.306	*Current Accounts with other Banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	75.348.266.873	47.348.266.873	28.000.000.000	*Placement with Bank Indonesia and other Banks*
Efek-efek	1.598.745.863.616	1.098.754.248.269	499.991.615.347	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan	8.403.503.431.050	7.591.931.654.986	811.571.776.064	*Loans*
Pajak dibayar dimuka	15.000.000.000	15.000.000.000	--	*Prepaid Tax*
Aset tetap	53.315.787.451	51.712.306.616	1.603.480.835	*Fixed assets*
Aset hak guna	13.840.232.206	13.349.406.433	490.825.773	*Right-of-Use Assets*
Aset takberwujud	80.775.238	78.197.113	2.578.125	*Intangible assets*
Aset Pajak tangguhan	13.869.165.696	13.869.165.696	--	*Deferred Tax Assets*
Aset lain-lain	170.655.421.308	157.640.766.785	13.014.654.523	*Other assets*
Jumlah Aset	**11.389.694.454.340**	**10.010.767.174.282**	**1.378.927.280.058**	***Total assets***
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas segera	101.862.410.592	95.360.207.959	6.502.202.633	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	9.385.841.040.068	8.506.369.448.880	879.471.591.188	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	10.970.997.218	10.970.997.218	--	*Deposits from other Banks*
Utang pajak	10.637.941.093	10.139.349.248	498.591.845	*Taxes payable*
Efek-efek yang diterbitkan	--	--	--	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	30.000.000.000	--	30.000.000.000	*Borrowings*
Imbalan kerja karyawan	44.451.153.394	44.451.153.394	--	*Employee benefits*
Liabilitas lain-lain	41.300.157.394	36.231.052.360	5.069.105.034	*Other liabilities*
Jumlah Liabilitas	**9.625.063.699.759**	**8.703.522.209.059**	**921.541.490.700**	***Total liabilities***
Pendapatan Segmen				***Segment income***
Pendapatan operasi	1.078.540.089.565	985.129.751.364	93.410.338.201	*Operating income*
Pendapatan operasi lainnya	117.695.826.287	115.331.868.364	2.363.957.923	*Other operating income*
Pendapatan non operasi	11.318.268.203	11.125.263.127	193.005.076	*Non operating income*
Jumlah pendapatan segmen	**1.207.554.184.055**	**1.111.586.882.855**	**95.967.301.200**	***Total segment income***
Beban Segmen				***Segment expenses***
Beban operasi	(473.317.527.688)	(418.293.173.049)	(55.024.354.639)	*Operating expenses*
Beban operasi lainnya	(362.029.173.404)	(349.542.496.018)	(12.486.677.386)	*Other operating expenses*
Beban non operasi	(3.686.827.774)	(3.583.069.888)	(103.757.886)	*Non operating expenses*
Jumlah beban segmen	(839.033.528.866)	(771.418.738.955)	(67.614.789.911)	*Total segment expenses*
Beban pajak - bersih	92.707.173.631	89.064.764.631	3.642.409.000	*Tax expenses-net*
Laba bersih	**275.813.481.558**	**251.103.379.269**	**24.710.102.289**	***Net income***

39. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 Desember 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Desember 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per Bank.

Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 3,50% dan 4,50% dalam mata uang Rupiah, masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan telah ditetapkan menjadi Undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank Jambi adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

39. THE GOVERNMENT'S GUARANTEE FOR PAYMENT OF COMMERCIAL BANK LIABILITIES

Under Law No.24 dated December 22, 2004, which came into effect on December 22, 2005, and as subsequently amended with the Government Regulation in Lieu of Law No.3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if in compliance with specified criteria.

Under the Indonesian Government Regulation No.66 of 2008 dated October 13, 2008 concerning the Amount of Deposit Guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation , the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 deposits per customer per Bank.

Customer deposits are covered only if the rate of interest is equal to or below 3.50% and 4.50% in Rupiah currency as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

Under the Law of the Republic of Indonesia No.7 of 2009, Government Regulation in Lieu of Law regarding Indonesian Deposit Insurance Corporation has been enacted as Law since January 13, 2009.

As of December 31, 2021 and 2020 Bank Jambi is a participant of the guarantee program.

40. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko telah dilakukan dan diterapkan diseluruh kegiatan aktivitas bisnis bank baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Saat ini Bank Jambi dalam melakukan Penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi yang dapat mengganggu aktivitas bisnis Bank Jambi.

40. RISK MANAGEMENT

Risk Management has been applied to all of the Bank's business activities, both conventional and sharia activities.

The implementation of risk management in Bank Jambi complies with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 concerning the implementation of risk management for commercial banks and Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No.34/ SEOJK.03/2016 dated December 1, 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Risk management is not only limited to monitoring, reporting and evaluation of risks, but also detecting and anticipating possible risks that may disrupt Bank Jambi's business activities.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Bank Jambi telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan yang paling sedikit mencakup:

Penerapan Manajemen Risiko

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam rangka implementasi manajemen risiko, Bank Jambi memulai dengan menanamkan budaya sadar risiko kepada seluruh karyawan pada setiap tingkatan dan pada setiap unit bisnis. Upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan budaya risiko kepada seluruh pegawai antara lain melalui sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan baik intern maupun *ekstern* dan menerapkan *reward* dan *punishment*. Disamping itu Bank Jambi telah meluncurkan gerakan *Clear and Clean* (C&C) dalam rangka menolak gratifikasi dan menanamkan budaya perusahaan yang bersih pada stakeholder. Untuk menilai risiko secara menyeluruh Bank memiliki aplikasi laporan profil risiko cabang dimana dengan aplikasi tersebut selain dapat melakukan penilaian sendiri terhadap pencapaian terget kinerja, kantor cabang juga dapat mengukur, memitigasi serta mengendalikan risiko yang dihadapi.

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris sangat penting dilakukan dalam penerapan manajemen risiko bank. Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas manajemen risiko Bank Jambi melalui pembentukan komite-komite ditingkat Dewan Komisaris yang antara lain bertujuan untuk memastikan kebijakan dan strategi manajemen risiko diseluruh unit organisasi telah berjalan efektif.

Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Manajemen Risiko serta beberapa komite seperti, Komite Manajemen Risiko dan Komite Aset dan Liabilitas.

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

Bank Jambi is managing 8 (eight) types of risk, namely credit risks, liquidity risks, market risks, operational risks, legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks, that shall include at least:

Application of Risk Management

1. *Active monitoring by the Boards of Commissioners and Directors.*
2. *Adequate policies and procedures of risk management and risk limits.*
3. *Adequate process of identification, measurement, monitoring, and control of risks and risk management information system.*
4. *Thorough internal control system.*

In implementing the risk management, Bank Jambi commences by raising risk awareness to all employees at every level and in every business unit. Efforts undertaken in order to create a risk-awareness culture for all employees are carried out, among others, through dissemination of both internal and external provisions and application of reward and punishment. In addition, Bank Jambi has launched the Clear and Clean (C&C) Movement in order to reject gratification and instill a clean corporate culture at stakeholder level. Furthermore, in order to make overall risk assessment the Bank installed risk profile report application at every branch office, by which the branch offices are able to not only conduct self assessment, but also measure, mitigate and control the risks encountered.

Active monitoring by the Board of Directors and Board of Commissioners

Active monitoring by the Board of Directors and Board of Commissioners is very important in the application of risk management of the Bank. Monitoring is carried out directly and indirectly to Bank Jambi's risk management activities through the formation of committees at the Board of Commissioners level, which is aimed at among others ensuring that the policies and strategies of risk management throughout the organization unit are running effectively.

This is implemented by establishing a Risk Management Division and several other committees such as Risk Management Committee and Assets and Liabilities Committee.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (lanjutan)

Wewenang dan tanggung jawab Direksi antara lain:

a. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank Jambi secara keseluruhan.
c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusi terkait dengan Manajemen Risiko.
f. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independent.
g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
    1. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
    2. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko.
    3. Ketetapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:
a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam penerapan manajemen risiko bank tidak terlepas dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dimana Bank Jambi telah membentuk satuan manajemen risiko yang didukung oleh metodologi manajemen risiko serta kebijakan dan prosedur, serta bersama satuan kerja kepatuhan dan unit bisnis terkait melakukan kaji ulang secara berkala atas kebijakan dan prosedur disetiap produk dan aktivitas yang dikelola sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

Active monitoring by the Board of Directors and Board of Commissioners (continued)

The authority and responsibilities of the Board of Directors include:
a. Making written and comprehensive policies and strategies for risk management.
b. Taking responsibility for the implementation of risk management policy and risk exposures undertaken by Bank Jambi as a whole.
c. Evaluating and determining which transactions requiring the approval of the Board of Directors.
d. Developing a culture of risk management at all levels of the organization.
e. Ensuring capacity development of human resources associated with Risk Management.
f. Ensuring that the Risk Management function is operating independently.
g. Carrying out the review on a regular basis to ensure:
    1. The accuracy of risk assessment methodologies.
    2. The adequacy of Risk Management information system implementation.
    3. The determination of Risk Management policies and procedures as well as risk limits.

The authority and responsibilities of the Board of Commissioners include:
a. Approving and evaluating the Risk Management policy.
b. Evaluating the accountability of the Board of Directors on the implementation of Risk Management policy.
c. Evaluating and making decisions with regard to the requests of Directors in respect of transactions which require the approval of the Board of Commissioners.

The application of bank risk management is inseparable from the active monitoring by the Board of Commissioners and Board of Directors, for which the Bank Jambi has formed a risk management unit which is supported by risk management methodology, policies, and procedures, and together with compliance work unit and relevant business units conduct reviews on a regular basis on the policies and procedures of each product and activity managed in accordance with the applicable rules and regulations.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (lanjutan)

Adapun kebijakan, prosedur dan pedoman yang telah direvisi selama tahun 2021, antara lain:
- Pedoman *Whistleblowing System* pada Bank Jambi
- SOP Laku Pandai
- Kebijakan Kredit Dampak Penyebaran *Carona Virus Disease 2019*
- Pedoman Kebijakan Strategi *Anti Fraud* dan Surat Keputusan Direksi Bank Jambi
- Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jambi

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Bank Jambi melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank Jambi.

Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank Jambi.

Kebijakan manajemen risiko Bank Jambi ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank Jambi, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Bank Jambi, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank Jambi memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko risiko yang dihadapi oleh Bank Jambi. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank Jambi.

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

Active monitoring by the Board of Directors and Board of Commissaries (continued)

The polices, procedures and guidelines which have been revised in 2021, include among others:
- *Guidelines of Whistleblowing System in Bank Jambi*
- *SOP for Laku Pandai*
- *Guidelines of Credit regarding the Impact of Spread of Corona Virus Disease 2019*
- *Guidelines of Anti Fraud Strategy and Decision Letter of Directors of Bank Jambi*
- *Guidelines and Procedures of Micro Financing Bank Jambi*

Risk management framework

Bank Jambi's risk management organization involves oversight from the Board of Commissioner, the Board of Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority at the Board of Commissioner level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of Bank Jambi.

Board of Commissioner delegates authority to the President Director and Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Commissioner and is responsible for managing risk of Bank Jambi.

Bank Jambi's risk management policies are established to identify and analyze the risks encountered by Bank Jambi, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. Bank Jambi, through its training and management standards and procedures, aims at developing a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

Bank Jambi's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with Bank Jambi's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by Bank Jambi. Bank Jambi's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to Bank Jambi's Audit Committee.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko.

Risk management framework (continued)

In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee.

Penilaian Profil Risiko Bank

Penilaian profil risiko pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Bank's Risk Profile Ratings

Bank's risk profile ratings as of December 31, 2021 and 2020 are presented in the following table:

	Penilaian 2021/ *Rating for 2021*			
	Peringkat risiko yang melekat/ *Inherent risk ratings*	**Peringkat kualitas penerapan/ *Quality of application ratings***	**Peringkat tingkat risiko/ *Risk level ratings***	
Kredit	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Credit*
Pasar	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Market*
Likuiditas	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Liquidity*
Operasional	*Low to moderate*	*Fair*	*Low to moderate*	*Operational*
Hukum	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Legal*
Strategik	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Strategic*
Kepatuhan	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Compliance*
Reputasi	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Reputation*
Peringkat komposit	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Composite ranking*

	Penilaian 2020/ *Rating for 2020*			
	Peringkat risiko yang melekat/ *Inherent risk ratings*	**Peringkat kualitas penerapan/ *Quality of application ratings***	**Peringkat tingkat risiko/ *Risk level ratings***	
Kredit	*Low to moderate*	*Fair*	*Low to moderate*	*Credit*
Pasar	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Market*
Likuiditas	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Liquidity*
Operasional	*Moderate*	*Fair*	*Moderate*	*Operational*
Hukum	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Legal*
Strategik	*Low to moderate*	*Fair*	*Low to moderate*	*Strategic*
Kepatuhan	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Compliance*
Reputasi	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Reputation*
Peringkat komposit	*Low to moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*	*Composite ranking*

Berdasarkan hasil penilaian profil risiko tersebut diatas, tingkat risiko bank secara keseluruhan dinilai rendah, dimana risiko yang melekat pada seluruh aktivitas bank (*inherent risk*) dinilai rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko dinilai memadai.

Based on the results of the risk profile ratings as stated above, the level of the bank's overall risk is rated as low, the inherent risks is rated as low, and the quality of risk management is rated as appropriate.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan)

Manajemen risiko yang dilakukan Bank Jambi adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban kepada Bank Jambi, termasuk Risiko kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Konsentrasi Kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

Sistem manajemen risiko kredit Bank Jambi dilaksanakan sebagai berikut:

Selain melakukan penyaluran kredit, pengelolaan risiko kredit juga mencakup aktivitas eksposur kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi.

Dalam pengelolaan risiko kredit, Bank Jambi telah memiliki kebijakan prosedur dan pedoman perkreditan yang terus direvisi secara berkala dengan tetap berdasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya yang berlaku.

Selain berdasarkan konsep *four eyes principles*, Bank Jambi juga menerapkan prinsip *the five C's principles* (5C) dalam pemberian kredit. Berdasarkan prinsip tersebut diatas setiap pemutusan kredit melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen untuk memperoleh keputusan yang objektif sesuai limit kewenangan dimana proses pemutusan kredit dilaksanakan melalui rapat komite kredit.

Dalam masa pandemi *Covid-19* Bank mengelola risiko kredit pada debitur yang terdampak *Covid-19* dengan melakukan kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi sesuai dengan ketentuan regulator yaitu melalui penambahan fasilitas pinjaman kepada debitur terdampak untuk menjaga stabilitas usahanya.

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

Bank's Risk Profile Ratings (continued)

Risk management conducted by Bank Jambi is as follows:

1. Credit Risk

Credit risk is the risk that occurs when counterparties fail to comply with their obligation to Bank Jambi, including credit risk due to failure of the debtor, credit concentration risk, counterparty credit risk and settlement risk.

Bank Jambi's credit risk management system is implemented as follows:

In addition to the loan portfolio, credit risk management activities also include other credit exposures such as placement, purchase of marketable securities and investments managed comprehensively at both the portfolio and transactions levels.

In credit risk management, Bank Jambi has established policies and procedures for lending guidelines, which have been revised regularly to ensure compliance with the regulations of the Financial Services Authority and other prevailing external provisions.

In addition to implementing the concept of four eyes principle, Bank Jambi also applies the five C's principles (5C) in lending. Based on the said principles, every loan approval will involve Business Unit and the Credit Risk Management Unit independently to obtain objective decisions in accordance with the authority limit and the loan approval process is conducted through a credit committee meeting.

During the Covid-19 pandemic the Bank manages credit risk for debtors affected by Covid-19 by implementing a relaxation policy in the form of restructuring in accordance with regulatory provisions, namely through the addition of loan facilities to affected debtors to maintain business stability.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan)

Bank's Risk Profile Assessment (continued)

1. Risiko Kredit (lanjutan)

1. Credit Risk (continued)

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Kebijakan pengelolaan kredit bermasalah telah dilaksanakan, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit.

Specific credit risk management is performed on the non performing loans portfolio. Efforts undertaken include, among others, restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.

Kebijakan dan prosedur aktivitas Bank Jambi yang terkait risiko kredit disediakan untuk menjamin para pejabat Bank Jambi dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan. Ruang lingkup kebijakan dan prosedur mencakup seluruh aspek dan tahapan dalam proses perkreditan, mulai dari tahapan analisa persetujuan kredit, pengawasan kredit sampai dengan tahapan penyelesaian kredit. Selain itu aspek-aspek yang diatur dalam kebijakan dan prosedur kredit adalah dokumentasi dan administrasi kredit, legal, wewenang memutus kredit, agunan dan sebagainya.

Policies and procedures of Bank Jambi's activities related to credit risk is provided to enable Bank Jambi's officials to carry out their duties according to established standards. The scope of the policies and procedures covers all aspects and stages of the lending process, from the stage of analysis of loans approval, loans monitoring up to the stage of completion of loans. In addition, the aspects set out in the policy and procedure include documentation and administration of loans, legal, authority to approve loans, collateral and so forth.

Bank Jambi telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

Bank Jambi carries out integrated identification, measurement, monitoring, and control of risks which include credit risk profiles in a comprehensive risk management process.

Berikut ini adalah rasio atas *non-performing loans* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 and 2020:

Below is the ratio of non-performing loans as of December 31, 2021 and 2020:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Rasio kredit bermasalah-kotor	0,70%	0,79%	*The ratio of non-performing loans - gross*
Rasio kredit bermasalah - bersih	0,20%	0,29%	*The ratio of non-performing loans – net*

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri.

Concentration of credit risk is classified by industry sector.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *40. RISK MANAGEMENT (Continued)*

Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan) / ***Bank's Risk Profile Assessment (continued)***

1. Risiko Kredit (lanjutan) / ***1. Credit Risk (continued)***

Saldo berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank Jambi pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

The following amount represents the details of Bank Jambi's credit risk exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other loans enhancements), categorized by industry sector as of December 31, 2021 and 2020:

Keterangan	Eksposur Maksimum/ *Maximum Exposure* 31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	*Descriptions*
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas	321.828.427.300	244.279.258.050	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	536.174.204.653	782.449.612.638	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.888.661.773	18.606.640.214	*Current account with others banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	789.008.437.735	75.348.266.873	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	2.233.265.043.716	1.598.745.863.616	*Marketable Securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	142.550.758.665	--	*Securities purchased under agreement to resell*
Kredit yang diberikan	8.976.065.675.320	8.494.608.136.579	*Loans*
Jumlah	**13.000.781.209.162**	**11.214.037.777.970**	***Total***

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rekening administratif tidak mengalami penurunan nilai.

Estimated losses on commitments and contingencies

As of December 31, 2021 and 2020, administrative account is not impaired.

Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Bank Jambi telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Bank Jambi juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

Collateral and protection to other loans

Bank Jambi has a manual on how to assess the type of collateral which can be accepted as credit risk mitigation. Several major collaterals obtained include land, buildings and vehicles. Bank Jambi also has certain credit facilities guaranteed by third parties.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan)

Bank's Risk Profile Assessment (continued)

1. Risiko Kredit (lanjutan)

1. Credit Risk (continued)

Agunan dan perlindungan kredit lainnya (lanjutan)

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit *("secondary source of loan repayment")* dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

Collateral and protection to other loans (continued)

Generally, collateral is required for all loans extended as a secondary source of loan repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of loan repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

Kualitas aset keuangan

Bank Jambi menetapkan pemeringkatan kualitas setiap aset yang dimiliki melalui kombinasi antara analisis keuangan dan analisa pasar sesuai dengan kebijakan intern mengenai kualitas aktiva dan mengacu pada panduan peringkat kualitas aset yang ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva.

Quality of financial assets

Bank Jambi has a policy which has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with the Assets Quality Assessment provisions of the Financial Services Authority.

Evaluasi penurunan nilai

Bank Jambi menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Impairment assessment

Bank Jambi determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas. Dengan diimplementasikan PSAK 71, salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah makro ekonomi dan Bank Jambi telah memperhitungkan makro ekonomi pada perhitungan penyisihan penurunan nilai sejak PSAK 71 diimplementasikan.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtor's business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows. With the implementation of SFAS 71, one of the factors to be taken into account in determining the allowance for impairment losses is the macro economy and Bank Jambi has calculated the macro economy in the calculation of allowance for impairment losses since SFAS 71 was implemented.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *40. RISK MANAGEMENT (Continued)*

Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan) / ***Bank's Risk Profile Assessment (continued)***

1. Risiko Kredit (lanjutan) / ***1. Credit Risk (continued)***

Evaluasi Penurunan Nilai (lanjutan) / *Quality of financial assets (continued)*

Impairment pada penerapan PSAK 55 mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi, sedangkan pada PSAK 71 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan. Bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Impairment in the application of SFAS 55 recognizes credit losses when the credit loss occurs, whereas SFAS 71 requires the immediate recognition of the effect of changes in expected credit losses after the initial recognition of the financial asset. The portion of lifetime expected credit losses represents expected credit losses arising from a financial instrument default that may occur within 12 months after the reporting date.

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit: / *Concentration of risk of financial assets with credit risk exposure:*

i. Berdasarkan sektor ekonomi: / *i. By economic sector:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Rumah Tangga	7.867.833.091.823	7.174.635.100.134	*Household*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	224.904.124	420.539.383	*Individual and household services*
Pertanian, perburuan,dan kehutanan	283.193.468.320	261.526.348.339	*Agriculture, hunting and forestry*
Perdagangan besar dan eceran	310.421.928.195	153.163.730.671	*Wholesale and groceries*
Konstruksi	218.667.756.132	504.815.720.261	*Construction*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya	57.761.412.195	60.000.251.525	*Social, culture, other entertainment services*
Penyedian akomodasi dan makan minum	50.108.777.912	51.500.924.240	*Hotel, food and beverages*
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	34.342.177.111	40.432.929.786	*Transportation, warehousing and communication*
Industri Pengolahan	119.383.885.123	156.302.639.149	*Utilities industry*
Jasa kesehatan dan sosial	9.235.512.821	8.909.171.670	*Health and social services*
Perikanan dan Perindustrian	15.315.555.332	16.104.256.655	*Fishery and Manufacturing*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	7.070.648.674	12.526.654.891	*Real estate, rent, and service company*
Jasa pendidikan	501.910.793	540.062.837	*Education Service*
Pertambangan dan penggalian	293.915.402	348.200.765	*Mining and excavation*
Listrik, Gas, dan Air	55.661.237	926.951.329	*Water, Gas and electricity*
Lainnya	1.655.070.126	52.454.654.944	*Others*
Jumlah	**8.976.065.675.320**	**8.494.608.136.579**	***Total***

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *40. RISK MANAGEMENT (Continued)*

1. Risiko Kredit (lanjutan) / *1. Credit Risk (continued)*

Evaluasi penurunan nilai (lanjutan) / *Impairment assessment (continued)*

ii. Berdasarkan jenis: / *ii. By type:*

	31 Desember / *December 31,* 2021	31 Desember / *December 31,* 2020	
Konsumsi	7.689.228.412.223	7.128.532.575.096	*Consumption*
Investasi	466.942.496.215	616.048.719.684	*Investment*
Sindikasi	609.611.717.334	381.829.305.677	*Syndicated*
Modal kerja	139.852.781.225	310.926.885.935	*Working Capital*
Karyawan	70.430.268.323	57.270.650.187	*Employee*
Jumlah	**8.976.065.675.320**	**8.494.608.136.579**	***Total***

Mutasi penyisihan (CKPN) berdasarkan jenis kredit yang diberikan: / *Changes in allowance (CKPN) by type of loans:*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*			
	Individual	**Kolektif/ *Collective***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	(8.355.996.426)	(82.748.709.103)	(91.104.705.529)	*Beginning balance*
Pembalikan (penyisihan) selama tahun berjalan	--	(41.317.247.846)	(41.317.247.846)	*Reversal (allowance) during the year*
Pembalikan (pembentukan) Penyesuaian PSAK 71	--	(21.537.555)	(21.537.555)	*Reversal (establishment) of the adjustment to SFAS 71*
Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan	--	--	--	*Recovery of written-off receivables*
Saldo akhir	**(8.355.996.426)**	**(124.087.494.504)**	**(132.443.490.930)**	***Ending Balance***

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*			
	Individual	**Kolektif/ *Collective***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	(130.590.085)	(36.768.636.904)	(36.899.226.989)	*Beginning balance*
Pembalikan (penyisihan) selama tahun berjalan	(8.241.082.408)	(1.441.247.906)	(9.682.330.314)	*Reversal (allowance) during the year*
Pembalikan (pembentukan) Penyesuaian PSAK 71	--	(44.538.824.293)	(44.538.824.293)	*Reversal (establishment) of the adjustment to SFAS 71*
Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan	15.676.067	--	15.676.067	*Recovery of written-off receivables*
Saldo akhir	**(8.355.996.426)**	**(82.748.709.103)**	**(91.104.705.529)**	***Ending Balance***

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

2. Risiko Pasar

Manajemen risiko pasar berhubungan dengan risiko kerugian yang dihadapi Bank Jambi akibat dari pergerakan variabel pasar (perubahan suku bunga dan nilai tukar) yang mempengaruhi portofolio Bank Jambi.

Risiko Pasar secara komposit dinilai rendah baik inheren risk maupun kualitas manajemen risiko. Dalam melakukan penempatan dana pada bank *counterparty*, Bank Jambi telah memperhatikan batasan maksimum yang diperbolehkan sesuai ketentuan intern maupun ekstern (*regulator*).

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank Jambi yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas treasury dan risiko yang melekat pada bisnis.

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi banking book, karena perubahan suku bunga.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur banking book, dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Bank Jambi yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank Jambi.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

2. Market Risk

Market risk management is associated with the risk of loss of Bank Jambi resulting from changes in interest rates and exchange rates that affect Bank Jambi's portfolio.

Market risk is compositely undervalued for both inherent risk and quality of risk management. In making fund placement with counterparty bank, Bank Jambi takes into account the maximum limit allowed by regulator.

Management of market risk is performed in accordance with Bank Jambi's policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

Interest rate risk represents risk resulting from changes in the financial instrument prices from the trading book position or from changes of the economic value position of the banking book due to changes in the interest rate.

The interest rate risk management is carried out on the banking book exposure by taking into considerations the gap position of Bank Jambi's assets and liabilities, which is sensitive to changes in interest rate, which influences the stability of Bank Jambi's profitability level.

The table below summarizes the average contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as of December 31, 2021 and 2020:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Aset			*Assets*
Giro pada Bank Indonesia	1,50%	0,00%	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	0,67%	0,60%	*Current account with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	3.17%	5.38%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	7,37%	7,60%	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan	11,30%	11,81%	*Loans*
Liabilitas			*Liabilities*
Simpanan nasabah	0,04%	5,24%	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	0,52%	2,00%	*Deposits from other banks*

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank Jambi untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank Jambi.

Dalam melakukan penilaian terhadap kebutuhan pendanaan, Bank Jambi telah melakukan analisa terhadap laporan *maturity profile*, proyeksi arus kas dan melakukan stress test yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Bank Jambi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pada saat terjadi krisis, sehingga dapat segera dilakukan antisipasi.

Untuk meminimalisasi risiko likuiditas, Bank Jambi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan dana sesuai dengan kebutuhan operasional kas pemerintah daerah, pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dan kebutuhan penarikan nasabah masyarakat;
2. Mengoptimalkan fungsi ALCO dan treasuri;
3. Mengelola penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang seimbang dengan pertumbuhan penyaluran kredit;
4. Menjaga hubungan baik dengan sumber pendanaan dan pemegang dana dominan;
5. Meningkatkan dana ritel dengan mengembangkan layanan berbasis digital yang memberikan kemudahan nasabah bertransaksi.

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

3. Liquidity Risk

Liquidity risk represents the risk due to the inability of Bank Jambi to meet its maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the activities and financial condition of Bank Jambi.

In assessing the funding needs, Bank Jambi has analyzed the maturity profile report, cash flow projection and stress test aimed at knowing to what extent Bank Jambi is able to meet the funding needs in the event of crisis, so that it can be immediately anticipated.

To minimize liquidity risk, Bank Jambi has taken the following measures:

1. *Maintaining the availability of funds in accordance with the operational needs of local government, Minimum Statutory Reserves (GWM) and withdrawal of community customers' needs;*
2. *Optimizing ALCO dan treasury function;*
3. *Managing the balance of Third Party fund raising to lending growth;*
4. *Maintaining good relationships with funding sources party and the dominant fund holders;*
5. *Increasing retail funds by developing digital-based services that make transactions easier for customers.*

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *40. RISK MANAGEMENT (Continued)*

3. Risiko Likuiditas (lanjutan) / *3. Liquidity Risk (continued)*

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan Rupiah):

The following maturity table provides information regarding the expected maturities of financial assets and liabilities as of December 31, 2021 and 2020 (in million of Rupiah):

31 Desember 2021 / *December 31, 2021*

	Saldo/ *Amount*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 Month*	1 - 3 bulan/ *1 - 3 months*	3 - 6 bulan/ *3 - 6 months*	6 - 12 bulan/ *6 - 12 months*	> 12 bulan/ *> 12 months*	
Aset							***Assets***
Kas	321.828	321.828	--	--	--	--	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	536.174	536.174	--	--	--	--	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	1.889	1.889	--	--	--	--	*Current account with others Banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	789.009	759.912	9.922	--	19.175	--	*Placement with Bank Indonesia and other Banks*
Efek -efek	2.233.265	--	--	--	85.668	2.147.597	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan	8.843.622	63.613	4.709	2.345	65.963	8.706.992	*Loans*
Beban dibayar dimuka, Aset lain-lain	110.538	110.538	--	--	--	--	*Prepaid Expenses, and Others asset*
Jumlah Aset	**12.836.325**	**1.793.954**	**14.631**	**2.345**	**170.806**	**10.854.589**	***Total Assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	184.107	184.107	--	--	--	--	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	10.599.623	9.158.137	789.483	28.146	623.857	--	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	314.503	314.503	--	--	--	--	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang diterbitkan	--	--	--	--	--	--	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	14.830	--	--	--	14.830	--	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain	16.566	1.729	--	--	--	14.837	*Other liabilities*
Jumlah Liabilitas	**11.129.629**	**9.658.476**	**789.483**	**28.146**	**638.687**	**14.837**	***Total Liabilities***
Selisih Aset dan Liabilitas	**1.706.696**	**(7.864.522)**	**(774.852)**	**(25.801)**	**(467.881)**	**10.839.752**	***Difference in Assets and Liabilities***

31 Desember 2020 / *December 31, 2020*

	Saldo/ *Amount*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 Month*	1 - 3 bulan/ *1 - 3 months*	3 - 6 bulan/ *3 - 6 months*	6 - 12 bulan/ *6 - 12 months*	> 12 bulan/ *> 12 months*	
Aset							***Assets***
Kas	244.279	244.279	--	--	--	--	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	782.449	782.449	--	--	--	--	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	18.607	18.607	--	--	--	--	*Current account with others Banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	75.348	28.000	--	--	47.348	--	*Placement with Bank Indonesia and other Banks*
Efek -efek	1.598.745	66.340	179.227	--	269.795	1.083.383	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan	8.403.503	60.447	4.475	2.228	62.680	8.273.673	*Loans*
Beban dibayar dimuka, Aset lain-lain	185.655	185.655	--	--	--	--	*Prepaid Expenses, and Others asset*
Jumlah Aset	**11.308.586**	**1.385.777**	**183.702**	**2.228**	**379.823**	**9.357.056**	***Total Assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	101.862	101.862	--	--	--	--	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	9.385.841	8.109.422	699.078	24.923	552.418	--	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	10.971	10.971	--	--	--	--	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang diterbitkan	--	--	--	--	--	--	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	30.000	--	--	--	30.000	--	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain	22.196	2.295	--	--	--	19.901	***Other liabilities***
Jumlah Liabilitas	**9.550.870**	**8.224.550**	**699.078**	**24.923**	**582.418**	**19.901**	***Total Liabilities***
Selisih Aset dan Liabilitas	**1.757.716**	**(6.838.773)**	**(515.376)**	**(22.695)**	**(202.595)**	**9.337.155**	***Difference in Assets and Liabilities***

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

3. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Untuk memastikan kemampuan Bank Jambi dalam memenuhi segera kewajibannya kepada nasabah atau counterparty, Bank Jambi menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas melalui alokasi penempatan pada cadangan primer (*Primary Reserve*) yang mana prioritas utama penempatan dana tersebut untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Primary Reserve* juga bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penarikan oleh nasabah, baik penarikan dana simpanan masyarakat maupun penarikan kredit, cadangan sekunder (*Secondary Reserve*) dimana cadangan tersebut dapat digunakan antara lain:

- Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek;
- Memenuhi kebutuhan likuiditas yang harus segera dipenuhi yang sebelumnya tidak diperkirakan;
- Sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi.

Dalam hal pengendalian risiko likuiditas Bank Jambi telah memiliki kebijakan *Contingency Funding Plan* yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank Jambi dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan likuiditas dimana dalam pengelolaan likuiditas harian dilakukan oleh Divisi Treasury dan Dana dan terhadap terjadi perubahan eksternal Bank Jambi telah memiliki komite ALCO (*Asset and Liabilities Committee*).

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya suatu proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Jambi.

Didalam pengelolaan risiko operasional Bank Jambi telah membuat kebijakan secara menyeluruh disetiap unit kerja dan aktivitas operasional Bank Jambi. Adapun beberapa kebijakan dalam pengendalian risiko operasional antara lain:

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

3. Liquidity Risk (continued)

To ensure Bank Jambi's ability to immediately fulfill its liabilities to the customers or counterparties, Bank Jambi implements a policy of managing liquidity through placements in the allocation of Primary Reserve, which is mainly to comply with the provisions stipulated by Bank Indonesia. Primary Reserve also aims at anticipating the possibility of a withdrawal by customers, either withdrawal of public deposits or drawdown of loans, secondary reserve, in which such reserves can be used to, among others:

- *Meet short-term liquidity needs;*
- *Meet the immediate liquidity needs which had not been expected;*
- *Serve as addition, in the event of inadequate primary reserve.*

In effort to manage liquidity risk, Bank Jambi has a Contingency Funding Plan policy in place which contains the measures to be taken by Bank Jambi in anticipating and addressing liquidity difficulties in which the daily liquidity management is carried out by the Treasury and Fund Division, and with regard to external changes Bank Jambi has formed ALCO (Asset and Liabilities Committee).

4. Operational Risk

Operational risk represents the risk due to the inadequacy and/or malfunction of some internal processes, human error, system failure, and/or the presence of external events affecting the operations of Bank Jambi.

In operational risk management Bank Jambi has made an extensive policy for all of its work units and the operational activities. The policy for operational risks management includes, among others:

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

4. Risiko Operasional (lanjutan)

- Melakukan pengkajian terhadap kebijakan, pedoman dan prosedur pengendalian intern sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah dan limitasi operasional yang ditetapkan.

- Melakukan tindakan pemantauan, koreksi dan penyelesaian terhadap hasil temuan baik dari pihak intern dan pihak ekstern.

- Menetapkan kebijakan intern terkait sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran, rotasi karyawan, kebijakan anti fraud, dan lain-lain.

- Menyediakan sarana yang mudah diakses oleh karyawan yang berisi ketentuan-ketentuan intern sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi di unit kerja masing-masing.

Risiko operasional secara komposit dinilai cukup tinggi. Penilaian risiko operasional yang dinilai cukup tinggi dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

- Manajemen sumber daya manusia belum efektif, pemenuhan sumber daya manusia dalam struktur organisasi yang berlaku saat ini belum memadai, pada beberapa bagian masih perlu dilakukan penambahan personil untuk mengoptimalkan fungsi pengendalian

- Lemahnya pengendalian mengakibatkan sering terjadi kegagalan karena faktor human error yang ditandai masih ditemukan kesalahan sebagaimana temuan resident audit cabang dan audit eksternal.

- Belum maksimalnya peningkatan kompetensi, kualitas dan pengetahuan sumber daya manusia secara berkesinambungan di bagian yang memerlukan keahlian/kompetensi khusus untuk menghindari terjadi kegagalan karena faktor manusia, ditandai dengan belum optimalnya penggunaan anggaran pendidikan sampai akhir tahun.

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

4. Operational Risk (continued)

- *Conducting a review of the policies, guidelines and procedures for internal control in accordance with the conditions of the development of the banking sector, government policy and specified operational limitations.*

- *Monitoring, correcting and completing the findings from both internal and external parties.*

- *Establishing internal policies related to sanctions for employees who commit violations, employee rotation, anti-fraud policies, and others.*

- *Providing an easily accessible facility for employees that contains internal provisions as a guide in carrying out functions in each work unit.*

Operational risks are compositely rated as fairly high. Operational risk assessment is rated as fairly high viewed from several aspects, among others:

- *Human resource management is ineffective. The placement of human resources in the current organizational structure is inadequate, some division require additional personnel to optimize the control function.*

- *The weak control results in frequent failures due to human error, which is indicated by errors as indicated by the findings of the resident audit branch and external audits.*

- *The improvement of competence, quality and knowledge of human resources in areas that require special expertise/competence is not maximized, while it is actually important in order to avoid failure due to human factors, which is indicated by the inadequate use of the education budget by the end of the year.*

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Aspek yuridis secara komposit dinilai rendah, baik dari risiko inheren maupun dari kualitas penerapan manajemen risiko, antara lain:

- Tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank Jambi;
- Standar perjanjian yang biasa digunakan oleh Bank Jambi menggunakan *best practice* yang didasarkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek yuridis secara komposit dinilai rendah, baik dari risiko *inheren* maupun dari kualitas penerapan manajemen risiko, antara lain: (lanjutan)

- Seluruh aktivitas transaksi dan aktivitas bisnis yang dijalankan terkait produk/jasa yang dimiliki Bank Jambi telah mengacu kepada perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- Kompleksitas kegiatan usaha Bank Jambi masih relatif sederhana, sehingga potensi risiko hukum yang mungkin terjadi masih relatif kecil;
- Setiap terdapat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap *draft* perjanjian tersebut untuk meminimalisir risiko hukum yang timbul dikemudian hari;

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury*, operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

5. Legal Risk

Legal risk represents the risk due to legal claims and/or weaknesses in juridical aspects, which among others are caused by the absence of supporting regulations, or weaknesses in agreements such as that the criteria for valid contracts is not fulfilled, and inappropriate collateral arrangements.

Juridical aspects are compositely rated as low, both for inherent risk as well as for the quality of risk management, as follows:

- *There are no litigation processes that occur in Bank Jambi;*
- *Standard agreements commonly used by Bank Jambi are using best practices based on prevailing laws and regulations;*

Juridical aspects are compositely rated as low, both for inherent risk as well as for the quality of risk management, as follows: (continued)

- *All transaction activities and business activities carried out related to products/services owned by Bank Jambi are subjected to the applicable laws and regulations;*
- *The complexity of the business of Bank Jambi is relatively modest, so the potential legal risks that may occur is relatively small;*
- *Prior to entering into each cooperation agreement with a third party, the Bank performs an assessment of the draft agreement to minimize the legal risks which may arise in the future;*

Legal risks are identified for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank Jambi.

6. Reputation Risk

Reputation risk represents the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of Bank Jambi.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

6. Risiko Reputasi (lanjutan)

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dar pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

Secara komposit dinilai rendah, baik dari risiko inheren maupun dari kualitas penerapan manajemen risiko dan dalam pengelolaan risiko reputasi Bank Jambi telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- Direksi telah menetapkan unit *Corporate Secretary* dibawah Divisi Umum dan Sekretaris Perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada nasabah dan pemangku kepentingan Bank terkait dengan aktivitas bisnis Bank dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi;
- Unit pengelola risiko reputasi telah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang tertuang dalam job description corporate secretary, salah satunya menjalankan fungsi kehumasan dan menindaklanjuti pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian Bank;
- Bank telah memiliki kebijakan terkait aktivitas bisnis Bank yang berpotensi merugikan reputasi Bank, seperti pedoman penerimaan pengaduan dan penyelesaian nasabah yang disertai dengan limit penyelesaian pengaduan nasabah, pedoman tata kelola dan budaya Perusahaan;
- Bank Jambi telah memiliki *website* yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat umum sebagai salah satu sarana penyampaian aspirasi saran dan keluhan terhadap Bank Jambi yang dikelola oleh bidang *corporate secretary* pada Divisi Umum dan Sekretaris Perusahaan dengan mengacu pada Buku Pedoman Perlindungan Konsumen sebagai upaya penyelesaian terhadap pengaduan/keluhan nasabah tersebut;

7. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

6. Reputation Risk (continued)

Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from the public/customers and customer's complaints.

Reputation risk is compositely rated as low, both for inherent risk and the quality of risk management, and in the management of reputation risk Bank Jambi has taken the following measures:

- *The Board of Directors has established a Corporate Secretary unit under the General Division and Corporate Secretary which has the authority and responsibility to provide information to customers and stakeholders of the Bank related to the Bank's business activities in order to control Reputation Risk;*
- *The reputation risk management unit has clear authority and responsibility as stated in the job description of the corporate secretary, one of which is to carry out the public relations function and follow up on negative news or other events that affect the reputation of the Bank and may cause losses to the Bank;*
- *The Bank has policies related to the Bank's business activities that have the potential to harm the Bank's reputation, such as guidelines for receiving complaints and customer settlements accompanied by limits for resolving customer complaints, guidelines for governance and corporate culture;*
- *Bank Jambi has a website that can be accessed by the public as one means of delivering aspirations, suggestions and complaints against Bank Jambi managed by the corporate secretary division under the General Division and Corporate Secretary with reference to Consumer Protection Manual as an effort to settle customer complaints/grievance;*

7. Strategic Risk

Strategic risk represents the risk due to inaccuracies in the decision and/or implementation of a strategic decision as well as the failure to anticipate changes in the business environment.

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

7. Risiko Stratejik (lanjutan)

Evaluasi pencapaian target dilakukan secara berkala sebagai salah satu bentuk pengendalian serta untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pencapaian rencana target Bank Jambi serta mencari solusi jika terjadi kendala dalam pelaksanaannya, hal tersebut sebagai bentuk proses pengukuran dan pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank Jambi.

7. Strategic Risk (continued)

Evaluation of target achievement is conducted periodically as a form of control and aimed at finding out the extent of success in achieving the target plan of Bank Jambi and finding a solution in case of obstacles in its implementation. It is as process of risk measurement and control performed by Bank Jambi.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank Jambi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan.

Risiko kepatuhan timbul akibat Bank Jambi tidak mematuhi dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank Jambi.

Secara komposit dinilai rendah, berdasarkan hasil penilaian risiko kepatuhan yang melekat pada seluruh aktifitas bahwa potensi risiko rendah dan terhadap penilaian kualitas penerapan manajemen risiko cukup memadai.

Selain itu dalam pengelolaan risiko kepatuhan Bank Jambi telah membentuk Satuan Kepatuhan dibawah naungan Direktur Kepatuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membuat langkah-langkah dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan di seluruh unit kerja;
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan yang mengacu kepada ketentuan regulator dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menilai, mereviu, merekomendasikan dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan aktivitas Bank Jambi telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

8. Compliance Risk

Compliance risk represents risk incurred due to the fact that Bank Jambi has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations.

Compliance risk arises from the non-compliance by Bank Jambi and/or internal processes failure, human error, system failure, and/or the presence of external events that affect Bank Jambi's performance.

Compositely rated as low, based on the results of the assessment of compliance risk inherent in all the activities the potential risk is low and the quality of risk management assessment is fair.

In addition, in managing compliance risk Bank Jambi has formed a Compliance Unit under the auspices of the Compliance Director, who has duties and responsibilities as follows:

- *Formulating measures to support the creation of a compliance culture throughout the work units;*
- *Identifying, measuring, monitoring and controlling compliance risks, in compliance with the prevailing laws and regulations;*
- *Assessing, reviewing, recommending and evaluating the effectiveness, adequacy and suitability of policies, regulations, systems and procedures that are owned in compliance with the prevailing laws and regulations;*
- *Undertaking measures to ensure that policies, regulations, systems and procedures as well as the activities of Bank Jambi are implemented in compliance with the prevailing laws and regulations;*

40. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Desember 2021 yang berada pada Peringkat 2 (PK 2) dengan predikat "sehat" atau stabil dibandingkan dengan posisi Desember 2020, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Profil Risiko
   Hasil penilaian Profil Risiko Bank periode 31 Desember 2021 masih stabil di Peringkat 2 *(Low to Moderate)* dengan tren meningkat. Terjadi penurunan risiko dibandingkan tahun 2020, dimana risiko operasional secara komposit pada tahun 2020 dinilai cukup tinggi, sehingga tahun 2021 menjadi risiko rendah.

2. Rentabilitas
   Terjadi penurunan tren risiko pada parameter Rentabilitas yang didukung oleh pencapaian kinerja laba yang diatas target.

3. Permodalan
   Penurunan tren risiko pada parameter permodalan ditandai dengan peningkatan komponen modal Bank salah satunya laba tumbuh dibandingkan tahun lalu.

4. Tata Kelola
   Tata kelola Bank posisi Desember 2021 dibandingkan dengan posisi Desember 2020 relatif stabil.

40. RISK MANAGEMENT (Continued)

The assessment of the Bank's Soundness Level (TKB) as of December 31, 2021 which is in Rank 2 (PK 2) with the predicate "healthy" or stable compared to the Bank's position as of December 2020, with the following assessment:

1. *Risk Profile*
   The results of the Bank Risk Profile assessment for the period December 31, 2021 are still stable at Rank 2 (Low to Moderate) with increasing trend. There is a decrease in risk compared to 2020, where composite operational risk in 2020 is considered quite high, so that in 2021 it will be a low risk.

2. *Rentability*
   There is some decrease of risk trend which occurred in Rentability parameter which was supported by the achievement of profitability performance that was above the target.

3. *Capital*
   The decline in the risk trend in the capital parameter is indicated by an increase in the Bank's capital components, one of which is profit growth compared to last year.

4. *Governance*
   Bank's governance in December 2021 is relatively stable compared to the position in December 2020.

41. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank Jambi atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank Jambi memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank Jambi saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank Jambi telah efisien.

Bank Jambi menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank Jambi senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank Jambi.

Kebutuhan permodalan Bank Jambi juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

41. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of Bank Jambi's capital management policy are to ensure that Bank Jambi has a strong capital to support Bank Jambi's current business expansion strategy to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements, and to ensure the efficiency of Bank Jambi's capital structure.

Bank Jambi undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. Bank Jambi will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Bank Jambi's capital and liquidity requirements.

The capital requirements of Bank Jambi are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

41. MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Perhitungan kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum",serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;

b. Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;

c. Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;

d. Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

41. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by the Bank's strategic and organizational requirements, by taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Calculation of capital requirement under the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2016, dated January 29, 2016, which was amended with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.34/POJK.03/2016 dated December 22, 2016 on "Minimum Capital Requirement for Commercial Banks", and Circular Letter of the Financial Services Authority No.26/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 regarding Minimum Capital Adequacy Ratio According to Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) Risk and Compliance Profile.

Minimum capital requirements are as follows:

a. For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;

b. For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;

c. For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset;

d. For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.

41. MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut: (lanjutan)

Posisi modal yang diwajibkan *regulator* Bank sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

41. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

Minimum capital requirements are as follows: (continued)

The Bank's regulatory capital position under prevailing Bank Indonesia regulation as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2021	**31 Desember / *December 31,* 2020**	
Aset Tertimbang Menurut Risiko			***Weighted risk assets***
Dengan memperhitungkan risiko kredit	5.833.715	5.679.730	*Against Loan risk*
Dengan memperhitungkan risiko operasional	1.343.465	1.259.999	*Against operational risk*
Dengan memperhitungkan risiko pasar	--	--	*Against market risk*
Modal			***Capital***
Modal Inti	1.748.007	1.587.656	*Primary Capital*
Modal Pelengkap	73.213	71.242	*Secondary capital*
Jumlah modal inti dan pelengkap	1.821.220	1.658.898	*Total Primary and Secondary Capital*
Rasio kewajiban penyediaan			***Adequacy ratio***
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	25,38%	23,70%	*Against loans and operational risk*
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar	31,22%	28,92%	*Against loans and market risk*
Dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	25,38%	23,70%	*Against loans, operational and market risk*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan Bank Indonesia sesuai profil risiko	9% - <10%	9% - <10%	*Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank men ghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Financial Services Authority (OJK) is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Berdasarkan *self-assessment* Bank Jambi, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 profil risiko Bank Jambi dinilai berada pada peringkat 2. Oleh karena itu, Bank Jambi berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Based on its self-assessment, as of December 31, 2021 and 2020 Bank Jambi's risk profile is assessed at rating 2. Therefore, Bank Jambi is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%.

42. PERIKATAN-PERIKATAN SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Kajang Lako

1. Perjanjian tentang Penyediaan Karyawan Alih Daya *(Outsourcing)* Untuk Tenaga Sopir dengan nomor perjanjian 044.11/KP.Umum. Sebagaimana telah perbarui dengan perjanjian 046/ADD.PKS.Sopir/BPDJ-KL/04/2020 tanggal 06 April 2020. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 28 November 2014 dan akan diperpanjang secara otomatis.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan

   Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan PT Kajang Lako pada tanggal 09 April 2018 dengan nomor perjanjian 066/SPK/KL/04/2018 dan 26 November 2018 dengan nomor perjanjian 089/SPK/KL/11/2018. PT Kajang Lako menyediakan kendaraan roda empat baru milik PT Kajang Lako yang akan digunakan oleh Bank Jambi dengan status sewa pakai. Perjanjian ini akan berakhir masing-masing pada tanggal 09 April 2022 dan 26 November 2021.

3. Penyediaan Tenaga Kerja *Outsourcing* untuk Petugas *Cleaning Service*

   Pada tanggal 28 November 2014 Bank Jambi telah sepakat melakukan kerja sama dengan PT Kajang Lako untuk penyediaan tenaga kerja *cleaning service* dengan nomor perjanjian 043.11/KP.Umum. Sebagaimana telah diperbarui dengan perjanjian 030/ADD.PKS.CS/BPDJ-KL/04/2020 tanggal 06 April 2020. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 27 November 2015 dan diperpanjang secara otomatis.

4. Penyediaan Tenaga Kerja *Outsourcing* Untuk Sekretaris Dewan Komisaris

   Pada tanggal 28 November 2014 Bank Jambi telah sepakat melakukan kerja sama dengan PT Kajang Lako untuk penyediaan tenaga kerja sekretaris dewan komisaris dengan nomor perjanjian 045.11/KP.Umum. Sebagaimana telah diperbarui dengan perjanjian 051/ADD.PKS.SEK.DEKOM/PT.BPD-KL/04/2020 tanggal 06 April 2020.

42. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Cooperation Agreement with PT Kajang Lako

1. Agreement on Provision of Outsourcing for Drivers with agreement number 044.11/KP.Umum, which was renewed with the agreement No.046/ADD.PKS.Sopir/ BPDJ-KL/04/2020 dated April 06, 2020. This agreement is valid from November 28, 2014 and will be extended automatically.

2. Vehicles Rental Agreement

Bank Jambi agreed to enter into a vehicle rental agreement with PT Kajang Lako on April 9, 2018 under agreement number 066/SPK/KL/04/2018 and on November 26, 2018 under agreement number 089/SPK/KL/11/2018. PT Kajang Lako provides a new four-wheel vehicle owned by PT Kajang Lako which will be used by Bank Jambi with rental status. These agreements will expire on April 9, 2022 and November 26, 2021, respectively.

3. Provision of Manpower Outsourcing for Cleaning Service Workers

On November 28, 2014 Bank Jambi agreed to enter into an agreement with PT Kajang Lako to provide cleaning service workers under agreement number 043.11/KP.Umum. Which was renewed with agreement No.030/ADD.PKS.CS/ BPDJ-KL/01/2019 dated April 06, 2020. This agreement expired on November 27, 2015 and was extended automatically.

4. Provision of Outsourcing Workers for the Secretary of the Board of Commissioner

On November 28, 2014 Bank Jambi agreed to enter into an agreement with PT Kajang Lako for the supply of manpower for the secretary of the board of commissioners under agreement number 045.11/KP.Umum, which was renewed with agreement No.051/ADD.PKS.SEK.DEKOM /PT.BPD-KL/ 04/2020 dated April 06, 2020.

42. PERIKATAN-PERIKATAN SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perjanjian Kerja Sama Tentang Perpanjangan Pengadaan Aplikasi *Core Banking System* (Konvensional & Syariah)

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama perpanjangan pengadaan aplikasi *core banking system* (konvensional & syariah) dengan PT Fortress Data Service pada tanggal 25 Maret 2019 dengan nomor perjanjian 021.03/PKS/PT.BPDJ/2019 dan 009/JAMBI/03/2019. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2024.

c. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian, kerja sama sewa menyewa kendaraan dengan PT Estetika Yasakelola pada tanggal 16 April 2020 dengan nomor perjanjian 041/SPK/EYK/04/2020. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 16 April 2023.

42. *SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)*

b. Cooperation Agreement Regarding Extension of Core Banking System Application (Conventional & Sharia)

Bank Jambi agreed to enter into a cooperation agreement to extend the core banking application system (conventional & sharia) with PT Fortress Data Service on March 25, 2019 under agreement numbers 021.03/PKS/PT.BPDJ/2019 and 009/JAMBI/ 03/2019. This agreement will expire on March 24, 2024.

c. Vehicle Rental Agreement

Bank Jambi agreed to enter into a vehicle rental cooperation agreement with PT Estetika Yasakelola on April 16, 2020 under the agreement number 041/SPK / EYK / 04/2020. This agreement will expire on April 16, 2023.

43. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keungan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

- Amandemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis" tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amandemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontijensi, dan aset kontijensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan' menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;

43. *NEW ACCOUNTING STANDARD*

The accounting standards and interpretations which have been issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (FASB), but not yet effective for current financial statements are disclosed below.

- *Amendment to SFAS 22: "Business Combinations" for reference to conceptual framework*
- *Amendment to SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";*
- *Annual improvement of SFAS 71: "Financial instruments"; and*
- *Annual improvement of SFAS 73: "Leases".*

The above standards will be effective on January 1, 2022 and early adoption is permitted.

- *Amendment to SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that changes the term "significant" to "material" and provides explanations of material accounting policies;*

43. STANDAR AKUNTANSI BARU (Lanjutan)

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amandemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan, Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amandemen *IAS 12 Income Taxes* tentang *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*; dan
- Amandemen PSAK 107: "Akuntansi *Ijarah*"

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amandemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

43. NEW ACCOUNTING STANDARD (Continued)

- *Amendment to SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;*
- *Amendment to SFAS 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;*
- *Amendment to SFAS 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;*
- *Amendment to SFAS 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which is adopted from Amended IAS 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and*
- *Amendment to SFAS 107: "Accounting for Ijarah".*

The above standards will be effective on January 1, 2023 and early adoption is permitted

- *SFAS 74: "Insurance Contract"; and*
- *Amendment to SFAS 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.*

The above standards will be effective on January 1, 2025.

As at the authorisation date of these financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Bank's financial statements

44. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No.25.01/KP.UUS tanggal 26 Januari 2022 dan No.60.08/KP.DIR-UUS tanggal 14 Agustus 2020, masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Jambi menyatakan bahwa pelaksanaan operasional serta produk dan jasa Unit Usaha Syariah Bank telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini syariah dari DPS, namun beberapa hal yang bukan prinsipil masih memerlukan penyempurnaan.

44. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letters No.25.01/KP.UUS dated January 26, 2022 and No.60.08/KP.DIR-UUS dated August 14, 2020, respectively for the periods ended December 31, 2021 and 2020, the Sharia Supervisory Board of Bank Jambi expresses an opinion that the operation and product and services of the Bank's Sharia Unit are in compliance with fatwa and sharia regulations issued by the National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and sharia opinion of DPS, however, several non-principal matters still require improvement.

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking)*.

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of default (PD)* atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Bank menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

- Pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default* (PD)
- Indikator kualitatif
- Tertunggak lebih dari 30 hari.

Credit Risk Grades

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan rating risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS

Significant Increase in Credit Risk

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Bank considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- *Probability of default (PD) for the remaining age at the reporting date; with*
- *Probability of default (PD) for the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).*

Bank uses these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit risk:

- *Quantitative test based on movement in probability of default*
- *Qualitative indicators*
- *A backstop of 30 days past due*

Credit Risk Grades

The Bank allocated each exposure to credit risk grades based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and applied credit experience judgement. Credit risk grades are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.

Credit risk grades are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as credit risk rating decreases, for example, the difference between credit risk rating grades 1 and 2 is smaller than the difference between credit risk rating grades 2 and 3.

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

Credit Risk Grades (lanjutan)

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur *probability of default term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *Probability of Default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Bank mempergunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Credit Risk Grades (continued)

Each exposure is allocated to credit risk grades at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different credit risk grades. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities, estimates of economic conditions.

Determination of the Probability of Default Structure

Credit risk grades are the main input in determining the PD term structure of the exposure. The Bank collects performance and default information about credit risk exposures, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as credit risk assessment. For some portfolios, information purchased from external credit assessors is also used.

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the probability of default (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic indicators include: GDP growth, benchmark interest rates, and the unemployment rate. For exposures in certain industries and/or regions, the analysis can include commodity prices and/or relevant property prices.

Determination of Significant Increase in Credit Risk

Bank uses several criteria for determining whether credit risk has increased significantly.

The criteria are determined using qualitative and quantitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Bank dimungkinkan menggunakan penilaian dari analis kredit dan pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dimana pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif.

Bank menentukan bahwa peningkatan resiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektifitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

Definisi Gagal Bayar (*Default*)

Bank menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* /gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Bank; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada Bank.

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Determination of Significant Increase in Credit Risk (continued)

The Bank can also use the judgment of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in a comprehensive manner on a timely manner.

The Bank determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.

The Bank monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.

Modification of Financial Assets

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and the modified loan can be recognized as a new loan at fair value.

When the contractual terms of the loan are modified and do not result in de-recognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is carried out by comparing:

- *PD remainder life at reporting date based on modified provision; with*
- *PD remainder estimated life based on data at initial recognition and initial contractual provisions.*

Definition of Default

The Bank considers financial assets as default when:

- *The debtor is unlikely to pay its loans obligation in full, without assistance (recourse) from the Bank; or*
- *The debtor has past due more than 90 days for any material loans obligation to the Bank.*

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Definisi Gagal Bayar (*Default*) (lanjutan)

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default* / gagal bayar, Bank mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan penjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai.

Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti, badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

Definition of Default (continued)

In assessing whether a debtor is in default, the Bank considers the following indicators:

- *Qualitative such as violations of the terms of the agreement (covenants);*
- *Quantitative such as arrears status; and*
- *Based on data developed internally and obtained from external sources*

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment.

Use of forward-looking information

The Bank uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Bank formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimates published by, such as, government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Other scenarios reflect more optimistic outputs and more pessimistic outputs.

The economic scenario is formulated using the following range of key indicators:

	2021	2022
Tingkat pengangguran / *Unemployment rate*	dasar 8% / *base 8%* kisaran antara 8% hingga 9% / *ranging between 8% and 9%*	dasar 8% / *base 8%* kisaran antara 8% hingga 8% / *ranging between 8% and 8%*
Suku bunga / *Interest rate*	dasar 1% / *base 1%* kisaran antara 0,5% hingga 2% / *ranging between 0.5% and 2%*	dasar 2% / *base 2%* kisaran antara 1% hingga 3% / *ranging between 1% and 3%*
Pertumbuhan PDB / *GDP growth*	dasar 0,8% / *base 0.8%* kisaran antara 0,05% hingga 2% / *ranging between 0.05% and 2%*	dasar 0,8% / *base 0.8%* kisaran antara 0,05% hingga 2% / *ranging between 0.05% and 2%*

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut :

- *Probability of default* (PD)
- *Loss of given default* (LGD)
- *Exposure at default* (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking.*

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo;
- industry; dan
- lokasi geografis debitur.

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Measurement of Expected Credit Loss

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:

- *Probability of default (PD)*
- *Loss of given default (LGD)*
- *Exposure at default (EAD)*

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

PD estimates is an estimate on a certain date, which is calculated based on a statistical ranking model, and is assessed using a rating that is adjusted to various categories of debtors and exposures. This statistical model is based on data compiled internally consisting of quantitative and qualitative factors.

LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.

EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

When parameter modeling is done collectively, financial instruments are grouped according to the similarity of risk characteristics which include:

- *type of instrument;*
- *credit risk rating;*
- *type of collateral;*
- *date of initial recognition;*
- *remaining due date;*
- *industry; and*
- *debtor's geographical location.*

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Measurement of Expected Credit Loss

a. Analisis risiko kredit berdasarkan *internal rating grades*

a. Credit risk analysis based on internal rating grades

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*			
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / *Not Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / *Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / *Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets***
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi / *Loans at amortized cost*				
Rating intemal / *Internal Grade* 1-2	18.667.788.696	18.667.788.696	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 3-4	7.631.844.721	7.631.844.721	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 5-6	11.577.090.088	--	11.577.090.088	--
Rating intemal / *Internal Grade* 7-8	12.729.138.277	--	12.729.138.277	--
Rating intemal / *Internal Grade* 9-10	73.002.753.549	--	73.002.753.549	--
Rating intemal / *Internal Grade* 11-12	--	--	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 13-14	--	--	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 15-16	--	--	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 17-18	--	--	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 19-20	--	--	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 21-22	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / *Loss Allowance*	123.608.615.331	26.299.633.417	97.308.981.914	--
Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**--**	**--**	**--**	**--**

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*			
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / *Not Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / *Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / *Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets***
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi / *Loans at amortized cost*				
Rating intemal / *Internal Grade* 1-2	26.639.948.307	26.639.948.307	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 3-4	4.352.346.455	4.352.346.455	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 5-6	3.659.667.105	--	3.659.667.105	--
Rating intemal / *Internal Grade* 7-8	4.260.818.268	--	4.260.818.268	--
Rating intemal / *Internal Grade* 9-10	42.979.269.307	--	42.979.269.307	--
Rating intemal / *Internal Grade* 11-12	--	--	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 13-14	--	--	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 15-16	--	--	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 17-18	--	--	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 19-20	--	--	--	--
Rating intemal / *Internal Grade* 21-22	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / *Loss Allowance*	81.892.049.442	30.992.294.762	50.899.754.680	--
Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**7.721.594.894.371**	**7.627.283.697.482**	**94.311.196.889**	**--**

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

b. Analisis risiko kredit berdasarkan *Days Past Due*

a. Credit risk analysis based on Days Past Due

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*			
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / *Not Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / *Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / *Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets***
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi / *Loans at amortized cost*				
< 30 Hari / *Days*	26.299.633.417	26.299.633.417	--	--
> 31-60 Hari / *Days*	11.577.090.088	--	11.577.090.088	--
> 61 - 90 Hari / *Days*	12.729.138.277	–	12.729.138.277	--
> 91 Hari / *Days*	73.002.753.549	–	73.002.753.549	--
Cadangan Kerugian Kredit / *Loss Allowance*	123.608.615.331	26.299.633.417	97.308.981.914	--
Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**--**	**--**	**--**	**--**

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*			
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / *Not Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / *Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / *Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets***
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi / *Loans at amortized cost*				
< 30 Hari / *Days*	30.992.294.762	30.992.294.762	--	--
> 31-60 Hari / *Days*	3.659.667.105	--	3.659.667.105	--
> 61 - 90 Hari / *Days*	4.260.818.268	–	4.260.818.268	--
> 91 Hari / *Days*	42.979.269.307	–	42.979.269.307	--
Cadangan Kerugian Kredit / *Loss Allowance*	81.892.049.442	30.992.294.762	50.899.754.680	--
Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**7.721.594.894.371**	**7.627.283.697.482**	**94.311.196.889**	**--**

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

c. Analisis risiko kredit berdasarkan *External Rating Grades*

c. Credit risk analysis based on External Rating Grades

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / *Not Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / *Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / *Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets***	**Jumlah / Total**
Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamotisasi / *Placements with other banks and Bank Indonesia at amortized cost*					
AAA	1	--	--	--	1
AA+	--	--	--	--	--
AA	--	--	--	--	--
AA-	8	--	--	--	8
A+	--	--	--	--	--
A	56	--	--	--	56
A-	--	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--	--
BB	--	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--	--
B+	--	--	--	--	--
B	--	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / *Loss Allowance*	65	--	--	--	65
Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / *Not Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / *Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / *Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets***	**Jumlah / *Total***
Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / *Government Bond at amortized cost*					
AAA	--	--	--	--	--
AA+	--	--	--	--	--
AA	--	--	--	--	--
AA-	--	--	--	--	--
A+	--	--	--	--	--
A	--	--	--	--	--
A-	--	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--	--
BB	--	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--	--
B+	--	--	--	--	--
B	--	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / *Loss Allowance*	--	--	--	--	--
Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

c. Analisis risiko kredit berdasarkan *External Rating Grades* (lanjutan)

c. Credit risk analysis based on External Rating Grades (continued)

	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / *Not Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / *Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / *Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets***	**Jumlah / *Total***
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Securities at amortized cost					
AAA	472	--	--	--	472
AA+	--	--	--	--	--
AA	--	--	--	--	--
AA-	--	--	--	--	--
A+	--	--	--	--	--
A	--	--	--	--	--
A-	--	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--	--
BB	--	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--	--
B+	--	--	--	--	--
B	--	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / *Loss Allowance*	472	--	--	--	472
Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / *Not Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / *Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / *Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets***	**Jumlah / Total**
Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamotisasi / *Placements with other banks and Bank Indonesia at amortized cost*					
AAA	5	--	--	--	5
AA+	--	--	--	--	--
AA	--	--	--	--	--
AA-	--	--	--	--	--
A+	--	--	--	--	--
A	--	--	--	--	--
A-	112	--	--	--	112
BBB+	--	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--	--
BB	--	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--	--
B+	--	--	--	--	--
B	--	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / *Loss Allowance*	117	--	--	--	117
Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**65.952.278.898**	**--**	**--**	**--**	**65.952.278.898**

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

c. Analisis risiko kredit berdasarkan *External Rating Grades* (lanjutan)

c. Credit risk analysis based on External Rating Grades (continued)

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / *Not Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / *Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / *Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets***	**Jumlah / *Total***
Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / *Government Bond at amortized cost*					
AAA	--	--	--	--	--
AA+	--	--	--	--	--
AA	--	--	--	--	--
AA-	--	--	--	--	--
A+	--	--	--	--	--
A	--	--	--	--	--
A-	--	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--	--
BBB	2.207.864	--	--	--	2.207.864
BBB-	--	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--	--
BB	--	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--	--
B+	--	--	--	--	--
B	--	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / *Loss Allowance*	2.207.864	--	--	--	2.207.864
Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**340.507.854.576**	**--**	**--**	**--**	**340.507.854.576**

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*				
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 month ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / *Not Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / *Credit - Impaired Lifetime ECL***	**Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / *Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets***	**Jumlah / *Total***
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Securities at amortized cost					
AAA	31	--	--	--	31
AA+	--	--	--	--	--
AA	--	--	--	--	--
AA-	--	--	--	--	--
A+	--	--	--	--	--
A	--	--	--	--	--
A-	--	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--	--
BB	--	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--	--
B+	--	--	--	--	--
B	462	--	--	--	462
Cadangan Kerugian Kredit / *Loss Allowance*	493	--	--	--	493
Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**181.133.577.028**	**--**	**--**	**--**	**181.133.577.028**

45. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

45. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)

Analisa Sensitivitas Kerugian Kredit Ekspektasian terhadap Kondisi Ekonomi Masa Depan

Asumsi ekonomi yang disajikan berikut ini disusun secara internal untuk keperluan perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

Sensitivity Analysis of Expected Credit Loss for Future Economic Conditions

The economic assumptions presented below are prepared internally for the purpose of calculating expected credit losses.

Skenario Moderat / *Moderate Scenario*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tingkat pengangguran / *Unemployment rate*	4,97%	4,82%	4,67%	4,61%
Suku bunga / *Interest rate*	4,85%	4,78%	4,78%	4,78%
Pertumbuhan PDB / *GDP growth*	4,48%	4,53%	4,58%	4,63%
Skenario Optimis / *Optimistic Scenario*				
Tingkat pengangguran / *Unemployment rate*	5,29%	5,27%	5,26%	5,24%
Suku bunga / *Interest rate*	5,52%	5,60%	5,68%	5,76%
Pertumbuhan PDB / *GDP growth*	5,58%	5,62%	5,66%	5,70%
Skenario Pesimis / *Pessimistic Scenario*				
Tingkat pengangguran / *Unemployment rate*	4,65%	4,51%	4,36%	4,29%
Suku bunga / *Interest rate*	4,18%	3,15%	2,49%	1,98%
Pertumbuhan PDB / *GDP growth*	3,80%	3,86%	3,92%	3,98%

Rasio kerugian kredit ekspektasian terhadap aset keuangan pada 31 Desember 2021 / *ECL Ratio to Financial Assets as of December 31, 2021*	**Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi / *Financial Assets measured at amortized cost***	**Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain / *Financial Assets measured at fair value through other comprehensive income***	**Jumlah / *Total***
Kerugian Kredit Ekspektasian yang dilaporkan / *Reported ECL*	123.608.610.241	--	123.608.610.241
Nilai Tercatat Bruto / *Gross Carrying Amount*	8.976.065.675.320	--	8.976.065.675.320
Rasio kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan terhadap nilai tercatat bruto/*ECL ratio to gross carrying amount*	**1,38%**	**--**	**1,38%**

46. INFORMASI TAMBAHAN

46. ADDITIONAL INFORMATION

a. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank Jambi memiliki rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* bruto terhadap total aset produktif masing-masing sebesar 0,60% dan 0,61%.

a. As of December 31, 2021 and 2020, Bank Jambi's non-performing earning assets (gross) to total earning assets ratios are 0.60% and 0.61%, respectively.

b. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank Jambi memiliki kredit yang diberikan yang *non-performing* bruto terhadap total kredit yang diberikan masing-masing sebesar 0,70% dan 0,79%.

b. As of December 31, 2021 and 2020, Bank Jambi's non-performing loans (gross) to total loans ratios are 0.70% and 0.79%.

46. INFORMASI TAMBAHAN (Lanjutan)

c. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah menerima penyerahan aset berupa tanah dari Pemegang Saham Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai wajar sebesar Rp4.121.000.000 (empat miliar seratus dua puluh satu juta rupiah) telah dilakukan penilaian kembali oleh lembaga independen masing-masing terdiri dari:

1. Tanah seluas 932 meter persegi di Jalan Merdeka Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir sebesar Rp3.457.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Bank Jambi sebagai Kantor Cabang Kuala Tungkal;

2. Tanah seluas 996 meter persegi di Jalan Lintas WKS Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp664.000.000 (enam ratus enam puluh empat juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Bank Jambi sebagai Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi.

Bank Jambi akan mencatat sebagai tambahan modal disetor setelah proses pengalihan hak selesai.

46. ADDITIONAL INFORMATION (Continued)

c. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi has received the transfer of assets in the form of land from the Shareholders of West Tanjung Jabung Regency with a fair value of Rp4,121,000,000 (four billion one hundred twenty one million rupiah) and has been re-evaluated by independent institutions, each consisting of:

1. A land area of 932 square meters on Jalan Merdeka, Tungkal IV, Tungkal Ilir District, amounting to Rp3,457,000,000 which has been used by Bank Jambi as the Kuala Tungkal Branch Office;

2. A land area of 996 square meters on Jalan Lintas WKS, Tebing Tinggi Subdistrict, Tebing Tinggi District, amounting to Rp.664,000,000 which has been used by Bank Jambi as a Tebing Tinggi Sub-Branch Office.

Bank Jambi will record additional paid-in capital after the transfer of rights is complete.

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) JAMBI TAHUN 2021

RESPONSIBILITY FOR 2021 ANNUAL REPORTING
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) JAMBI

Kebenaran atas isi Laporan Tahunan 2021 beserta dengan Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait di dalamnya merupakan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi, dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di bawah ini.

Dewan Komisaris | ***Board of Commissioners***

Dra. Emilia, M.E.
Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Direksi | ***Board of Directors***

Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si.
Direktur Utama
President Director

H. Khairul Suhairi, S.E.
Direktur Pemasaran & Syariah
Director of Marketing & Sharia

Drs. H. Pauzi Usman
Direktur Operasional
Director of Operations

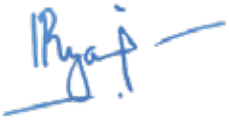

Hj. Riza Roziani, S.E.
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

Jl. Jend. A. Yani No. 18, Telanaipura
Kota Jambi 36122 - Indonesia
Telp. : (0741) 60665, 60416
Fax. : (0741) 64882
Email : bankjambi@bankjambi.co.id
Website : www.bankjambi.co.id

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 DESEMBER 2021

Dengan Angka Koresponding Untuk Tahun 2020

dan

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Pengurus	.....	i
Laporan Auditor Independen 2020	.....	ii
Neraca	.....	1
Laporan Laba Rugi	.....	2
Laporan Perubahan Ekuitas	.....	3
Laporan Arus Kas	.....	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	.....	5

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB LAPORAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mudasir. S.T
Jabatan	: Direktur Utama
Alamat	: Jl. Cisokan Raya No.122 RT 04/RW 014 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota. Depok
Nama	: Sauna Eka Tiondang M.Pd
Jabatan	: Bendahara
Alamat	: Lr. Mandala RT 01 Pematang Sulur TelanaiPura Jambi

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional.
2. Laporan keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional telah disusun dan disajikan sesuai standar Akuntansi Keuangnan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan Keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian Internal dalam PT. Jambi Indoguna Internasional

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jambi 22 Febuari 2021

METERAI TEMPEL
[redacted]3BDAJX551735249

Mudasir S.T
Direktur Utama

Sauna Eka Tiondang M.Pd
Bendahara

Office :
Jl.Prof.Dr.Sri Soedewi MS.SH. No.8
Telanaipura, Jambi 36122
Indonesia
T : +62 741 669 777
F : +62 741 669 789

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi
Registered Public Accountant

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
00024/2.1034/AU.2/05/1162-2/1/IV/2021

Kepada Yth
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT. Jambi Indoguna Internasional

Laporan atas Laporan Keuangan
Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan pelaksanaan audit yang sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit.

Basis untuk opini tidak menyatakan pendapat
Laporan keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional tersebut menyajikan saldo investasi sebesar Rp650.000.000, hutang usaha sebesar Rp601.236.473, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp705.000.000 yang merupakan lebih dari 100% dari aset bersih Perusahaan. Kami tidak memperoleh bukti audit yang memadai baik berupa dokumen maupun informasi eksternal yang dapat meyakinkan kami terhadap penyajian jumlah-jumlah tersebut dalam laporan keuangan. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap neraca dan laporan laba-rugi PT. Jambi Indoguna Internasional.

Opini tidak menyatakan pendapat
Karena signifikansi dari hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir.

Hormat kami,
Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi

Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
NRAP: AP.1162
24 Maret 2021

Dipindai dengan CamScanner

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

ASET	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020 *Audited*
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	985,359,406	1,144,453,429.11
Piutang Usaha	743,939,965	746,942,422.53
Persediaan	59,871,468.00	59,871,468.00
Investasi	650,000,000	650,000,000.00
JUMLAH ASET LANCAR	**2,439,170,838.68**	**2,601,267,319.64**
ASET TIDAK LANCAR		
Kendaraan	90,825,000.00	90,825,000.00
Investaris	39,103,100.00	39,103,100.00
Alat Bengkel	292,588,500.00	292,588,500.00
Akumulasi Penyusutan	(121.185.344,00)	(121.185.344,00)
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**301,331,256.00**	**301,331,256.00**
JUMLAH ASET	**2,740,502,094.68**	**2,902,598,575.64**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Hutang Usaha	601,236,473	601,236,473.00
Hutang Gaji	247,205,752	75,884,168.00
Hutang Pajak	135,170,003	51,124,359.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**983,612,228.00**	**728,245,000.00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Dana Jaminan Komisaris	500,000,000.00	500,000,000.00
Hutang PT. Wahana Catur Mas	205,000,000.00	205,000,000.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**705,000,000.00**	**705,000,000.00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**1,688,612,228.00**	**1,433,245,000.00**
EKUITAS		
Modal Saham Pemvrov Jambi	13,787,500,000	13,787,500,000.00
Modal Saham Afrizal	0	62,500,000.00
Laba (Rugi) Tahun Lalu	(12.715.562.293,66)	(12.715.562.293,66)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	351,224,229	334,915,869.30
JUMLAH EKUITAS	**1,469,353,575.64**	**1,469,353,575.64**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3,157,965,803.64**	**2,902,598,575.64**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

LAPORAN LABA RUGI

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

	Per 31 Des 2021	**Per 31 Des 2020**
	Non Audit	*Audited*
PENJUALAN		
Penjualan Semen		
Kompensasi KSO City Gas	1,328,363,595.00	657,577,104.00
Kompensasi KSO Solar	32,468,080.00	0.00
Kompensasi Modifikasi Kompor	3,343,000.00	5,160,000.00
JUMLAH PENJUALAN	**1,364,174,675.00**	**662,737,104.00**
HARGA POKOK		
Biaya Kompensasi KSO City Gas	741,876,722.00	330,932,930.00
JUMLAH HARGA POKOK	**741,876,722.00**	**330,932,930.00**
LABA (RUGI) KOTOR USAHA	**622,297,953.00**	**331,804,174.00**
BIAYA-BIAYA		
Beban Administrasi dan Umum	296,573,458.00	318,450,695.00
Laba(Rugi) Sebelum Penyusutan		13,353,478.00
Biaya Penyusutan		
Laba (Rugi) Setelah Penyusutan		13,353,478.00
JUMLAH BIAYA-BIAYA	**296,573,458.00**	**318,450,695.00**
PENDAPATAN DILUAR USAHA		
Pendapatan Diluar Usaha	302,550,790.53	321,562,390.00
JUMLAH PENDAPATAN DILUAR USAHA	**302,550,790.53**	321,562,390.00
LABA SEBELUM PAJAK	351,224,229.00	334,915,869.00
Pajak Penghasilan		
LABA BERSIH	351,224,229.00	334,915,869.00

catatn atas laporan keuangan merupakan bagiab yang tidak terpisahkan dari laporankeuangan secara keseluruhan

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Modal Pemvrov	Modal Saham	Laba Ditahan	Jumalah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2020	**13,787,500,000.00**	**62,500,000.00**	**(12,380,646,424)**	**1,469,353,575.64**
Tambahan Modal	-			
Laba (Rugi) Tahun Berjalan				
Laba Ditaha				
Saldo 31 Desember 2021			**(12,715,562,293)**	**1,463,043,596.34**
Tambahan Modal				
Laba (Rugi) Tahun Berjalan				
Laba Ditaha				

catatn atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

LAPORAN ARUS KAS

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

	Per 31 Des 2021	**Per 31 Des 2020**
		(Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	351,224,229	334,915,869
Penyesuaian Aset Tetap	0	
Piutang Usaha	-700,514,452	-423,802,979
Persediaan	333,960	333,960
Investasi	62,500,000	62,500,000
Hutang Gaji		
Hutang Pajak	135,170,003	13,419,936
Hutang Usaha		
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**-151,286,260**	**-137,633,213**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kenaikan(Penurunan) dari Kegiatan Investasi		
Aset Tetap		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan(Penurunan) dari Kegiatan Pendanaan		
Hutang Jangka Panjang		
Tambahan Modal Pemerintah		
Laba Ditahan		
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	**-111,404,599**	**-137,633,213**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**984,292,066**	**1,282,086,642**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**984,292,066**	**1,144,453,429**

catatn atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT.JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

Laba Rugi

JANUARI 2021- DESEMBER 2021

		Saldo
Pendapatan		IDR
KSO Jargas Jambi		
4106-0-001	Kompensasi KSO Pertagas	1,410,281,310
Total KSO Jargas Jambi		**1,410,281,310**
41060-002	Kompensasi KSO Solar	32,468,080
Modifikasi Kompor Gas		**32,468,080**
4107-0-001	Kompensasi modifikasi gas	
Total Modifikasi Kompor		
Total Pendapatan		**1,442,749,390**
Biaya atas Pendapatan		
Biaya Kompensasi KSO Jargas Jambi		
5106-0-001	Biaya Gaji	617,419,613
5106-0-002	Biaya Lembur	33,800,000
5106-1-001	Biaya Alat Tulis Kantor	23,011,573
5106-1-004	Biaya Telekomunikasi	8,709,706
5106-1-006	Biaya Listrik	15,250,753
5106-1-005	Biaya Air PDAM	1,273,300
5106-1-009	Biaya BBM KSO	12,809,358
5106-1-006	Biaya Pemeliharaan Jargas Jambi	233,000
5106-1-007	Biaya Pantry	7,527,319
5106-1-008	Biaya Perlengkapan	17,164,700
5106-1-010	Biaya Lain-Lain	4,677,400
Total Biaya Atas Pendapatan		**741,876,722**
Laba Rugi Kotor		**700,872,668**
Pengeluaran Operasional		
Biaya Gaji Adm & Umum		
6101-0-002	Gaji Karyawan	
6101-0-003	THR Komisaris Direksi Karyawan	37,948,833
6101-0-004	Biaya ATK	
6101-0-005	Biaya Cetak	1,210,000
6101-0-006	Biaya Ekspedisi	650,500
6101-0-007	Biaya Iklan dan reklame	2,500,000
6101-0-008	Biaya Materai	2,501,250
6101-0-009	Biaya Telpon dan Internet Kantor	
6101-0-010	Biaya Listrik	
6101-0-011	Biaya Air PDAM	
6101-0-012	Biaya BBM/Transportasi	149,790
6101-0-013	Biaya Service Kendaraan Kantor	
	STNK/KIR/Pajak Bermotor	
6102-0-014	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	6,214,400
6102-0-015	Biaya Pantry	
6102-0-019	Biaya Eintertainment	3,748,220
	Biaya Perjalanan Dinas Direksi/ Karyawan	26,884,978

6102-0-20	Dalam Provinsi	
6102-0-21	Luar Provinsi	
	Biaya Perizinan dan Retribusi	
6102-0-023	Biaya Administrasi Bank	2,317,294
	Biaya Tenaga Ahli	4,000,000
	Notaris	12,480,000
	Audit	44,000,000
	Biaya Retribusi kebersihan dan pemadam kebakaran	2,510,000
	Pajak Bumi dan Bangunan	892,408
6102-0-099	Biaya Lain-Lain	
6101-0-005	Jamsostek	25,056,789
6101-0-006	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	28,157,580
6101-0-007	Pesangon	20,000,000
6101-0-010	Biaya Telpon Kantor & Internet	
6101-0-015	Biaya Parkir	
6101-0-017	Biaya Pemeliharaan Kantor	61,600,000
	Biaya Safety	53,777,493
Total Biaya Gaji Adm & Umum		**336,599,535**
Jumlah TOTAL PENGELUARAN		**1,078,476,257**
Laba/Rugi Operasional		**364,273,133**
Pendapatan Lain		
Pendapatan Luar Usaha		
8102-0-000	Bunga Jasa Giro	
8102-0-001	Bunga Deposito	19,419,176
8102-0-009	Pendapatan Lain-Lain	
8105-0-001	Pendapatan Pekerjaan Instalasi City Gas	3,935,000
Total Pendapatan Luar Usaha		**19,419,176**
Total Pendapatan Lain		
Pengeluaran Lain		
Total Pengeluaran Lain		
Laba/ Rugi Bersih		**351,224,229**

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

01. UMUM

a. Pendirian

PT. Jambi Indoguna Internasional merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001 yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jambi dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Jambi Indoguna Internasional. PT Jambi Indoguna Internasional saat ini berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH. Nomor 8 Telanaipura Kota Jambi. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 20 Agustus 2001, oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jambi. PT. Jambi Indoguna Internasional telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Maret 2019, dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Mei 2019, berkenaan dengan pemberhentian dengan hormat direktur serta komisaris kemudian menunjuk dan menetapkan direktur dan komisaris.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PT. Jambi Indoguna Internasional telah memiliki izin usaha dari instansi terkait sebagai berikut:

1. Surat izin gangguan bagi kegiatan usaha, di bidang perusahaan dan industri No. 530.08-2234-DPMPTSP-1571101001/2017 dikeluarkan di jambi, oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tanggal 28 Desember 2017.
2. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) menengah No. 530-14453-DPMPTSP-15.710/1001-2017 tanggal 28 Desember 2017 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 05.05.1.46.14452 tanggal 28 Desember 2017 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
4. Surat izin tempat usaha (SITU) No. 517/12298/K/DPMPTSP/15.71.10.1001/2017 tanggal 28 Desember 2017.
5. NPWP No. 02.061.817.9-331.000

b. Tempat dan Kedudukan

PT. Jambi Indoguna Internasional saat ini berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH. Nomor 8 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

c. Tujuan dan Bidang Usaha Perusahaan

I. Tujuan

Tujuan pendirian dan pengembangan PT. Jambi Indoguna Internasional, sesuai dangan Anggaran Dasar Perusahaan, Tujuan Perusahaan adalah: turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah Jambi selaku Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jambi pada umumnya, khususnya di bidang pertambangan, pertanian, industri, perdagangan umum, pembangunan, transportasi, jasa umum dan usaha lainnya. Selanjutnya disamping maksud dan tujuan tersebut di atas, secara komersial perusahaan bertujuan untuk menjadi perusahaan yang menguntungkan (profitable), makmur (prosper) dan berkelanjutan (sustainable) dalam berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

II. Bidang Usaha Perusahaan

PT. Jambi Indoguna Internasional saat ini menjalankan usaha sebagai berikut:

1. Usaha yang sedang berjalan, berupa distribusi Semen Padang dan Kerjasama Operasional Pengelolaan CityGas Kota Jambi

2. Usaha yang masih dalam proses, berupa Usaha LPG Plant dan Power Plant atas alokasi gas dari PetroChina Internasional Jabung Ltd bekerjasama dengan PT. Bumi Jambi Energi dan Usaha pengelolaan Participant Interest (PI) 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi di Provinsi Jambi.

d. Susunan Dewan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan instruksi Gubernur Jambi, bahwa PT. Jambi Indoguna Internasional harus melakukan rasionalisasi serta efisiensi biaya. Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menetapkan susuna Dewan Direksi dan Komisaris PT. Jambi Indoguna Internasional sebagai berikut:

		2021	2020
Dewan Pengawas			
Ketua	:	Mudasir S.T	Akhmad Bastari M.Pd
Anggota	:		
Anggota	:		

		Sep s.d 2021	Jan s.d Agustus 2021
Dewan Direksi			
Direktur Utama (Pjs)	:	Mudasir S.T	Akhmad Bastari M.H
Direktur Administrasi dan Keuangan (Pjs)	:		
Direktur Teknik (Pjs)	:		

		Nov s.d Des 2021	2020
Dewan Direksi			
Direktur Utama (Pjs)	:	Mudasir S.T	Akhmad Bastari M.H
Direktur Umum Dan Keuangan (Pjs)	:		
Direktur Teknik (Pjs)	:		

02. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan disusun mengikuti standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional disusun memperhatikan tujuan dan motivasi pemakai laporan. Perusahaan telah menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011. Oleh karena itu laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 disajikan berdasarkan SAK ETAP. Laporan keuangan disajikan dengan prinsip akrual, prinsip kesinambungan (going concern), dinyatakan dalam mata uang rupiah dan diukur dengan konsep biaya historis. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode (tidak) langsung dan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi dan pendanaan. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (jika ada) dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 25 tentang "Mata Uang Pelaporan" dan SAK ETAP Bab 26 tentang "Transaksi Mata Uang Asing", jika terdapat transaksi dan saldo dalam mata uang asing, maka akan dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing, diakui segabai laba (rugi) selisih kurs pada laporan laba rugi tahun berjalan.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di tangan, Bank dan surat berharga yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan. Kas disimpan dalam rekening koran yang ditandatangani oleh 2 orang dari 3 orang yang ditetapkan. Kas ditangan untuk operasional maksimum sebesar Rp. 10.000.000,-

d. Piutang dan Penyisihan Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu diakui dan dihitung menggunakan umur piutang dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Umur Tunggakan	Persentase
1	> 1 bulan	5%
2	> 3 bulan	10%
3	> 6 bulan	20%
4	> 1 tahun	50%

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai perolehan atau nilai realisasi bersih, persediaan semen dinilai berdasarkan harga rata-rata bergerak, sedangkan persediaan kavling tanah perumahan dinilai berdasarkan harga perolehan tanah. Persediaan dicatat dengan metode rata-rata bergerak (weighted average)

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan sesuai dengan masa manfaatnya.

g. Investasi/surat berharga

Investasi kepemilikan pada surat berharga berbentuk saham pada perusahaan lain atau anak perusahaan dicatat sesuai dengan nilai nominal yang telah disetor dalam bukti setoran tercantum pada surat keterangan kepemilikan saham atau sertifikat saham. Penghasilan baru diakui oleh investor apabila investasi mendistribusikan laba bersih (kecuali deviden saham) yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan.

h. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode Saldo Menurun dengan masa manfaat berikut:

No	Jenis Aktiva	Masa Manfaat	Tarif
1	Bangunan	16 tahun	12,50% / tahun
2	Kendaraan	8 tahun	25% / tahun
3	Inventaris	8 tahun	25% / tahun
4	Inventaris	4 tahun	50% / tahun

Metode penyusutan digunakan secara konsisten. Beban pemeliharaan yang menambah umur aktiva dikapitalisasi dan menambah nilai aktiva yang bersangkutan. Aktiva tidak digunakan dicatat pada aktiva lain-lain. Penjualan aktiva yang mengakibatkan manfaat atau kerugian dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

i. Aktiva Lain-Lain

Aktiva lain-lain mencakup goodwill, Merk, Paten dan aktiva tidak berwujud lainnya serta aktiva tidak termasuk dalam klasifikasi aktiva lancar maupun aktiva tetap. Aktiva lain-lain selain aktiva yang tidak berwujud atau dan dalam sengketa diamortisasi selama masa manfaat.

j. Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo atau berumur kurang dari satu tahun diklasifikasi pada hutang jangka pendek atau hutang lancar

k. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban dicatat dengan metode akrual, apabila kriteria pengakuan pendapatan penjualan dengan metode akrual tidak terpenuhi, maka penjualan ditangguhkan dan transaksi tersebut diakui dengan metode deposit atau uang muka. Pendapatan atas penjualan semen diakui pada saat uang diterima atau barang diserahkan dan pendapatan atas penjualan kavling tanah diakui setelah ditandatangani akad jual beli dihadapan notaris.

l. Pajak

Kewajiban pajak diakui dan dicatat mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

j. Investasi Jangka panjang

Merupakan investasi saham kepada pihak ketiga yang perolehannya melalui pembayaran tunai ataupun melalui (Golden Share). Investasi yang diperoleh tunai dicatat sebesar harga perolehanny sedangkan golden share dicatat apabila terdapat bukti kepemilikan saham/surat keterangan kepemilikan saham dari pihak ketiga, jika golden share tidak didukung dengan bukti kepemilikan saham.surat keterangan kepemilikan saham tidak dicatat/tidak dilaporkan dalam laporan keuangan.

k. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 3 Desember 2018 Perusahaan menandatangani perjanjian terkait Pengelolaan Jaringan Gs Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Kota Jambi dengan PT. Pertagas Niaga dengan Nomor : 234/PN0000/2018-S0 dengan jangka waktu 36 bulan dengan biaya pekerjaan *Fixed Cost* sebesar Rp. 2.012.911.118 dan Biaya *Variabel Cost* Rp. 157.479.668 dan Service Fee Rp. 70,-

03. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas terdiri dari:

	31 Des 2021	31 Des 2020
KAS		
Kas	8,393,591.00	14,978,518.00
Kas KSO Citygas	23,987,900.00	23,987,900.00
JUMLAH KAS	32,381,491.00	38,966,418.00
BANK		
Bank Mandiri Rek. 110-00-0412643-6	14,183,141.39	47,161,035.55
Bank Bri Rek. 0020-0100-2284-301	-	-
Bank Perwakilan Daerah Rek. 0101-2312-23	937,430,268.91	17,289,192.52
Bank Tabungan Negara Rek. 0000-1030-0008-12	1,364,504.38	2,036,504.38
JUMLAH BANK	952,977,914.68	66,486,732.45
DEPOSITO		
Deposito Mandiri	-	1,000,000,000.00
JUMLAH DEPOSITO		1,000,000,000.00
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	**985,359,405.68**	**1,105,453,150.45**

04. PIUTANG USAHA

Piutang terdiri dari :

	31 Des 2021	31 Des 2020
Piutang Semen	8,119,000.00	8,719,000.00
Piutang Retensi	5,000,000.00	5,000,000.00
Piutang Lain-Lain	700,514,452.00	695,811,576.53
Piutang Direksi	28,000,000.00	19,400,000.00
Piutang Karyawan	19,580,923.00	18,011,846.00
JUMLAH PIUTANG USAHA	**761,214,375.00**	**746,942,422.53**

05. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	31 Des 2021	31 Des 2020
Persediaan Material Citygas	25,221,468.00	25,555,428.00
Persediaan Kavling Perum Indoguna Asri	34,650,000.00	34,650,000.00
JUMLAH PERSEDIAAN	**59,871,468.00**	**60,205,428.00**

06. INVESTASI

Investasi terdiri dari:

	31 Des 2021	31 Des 2020
Saham PT. Gas Energy Jambi	250,000,000.00	250,000,000.00
Saham PT. Sumatra Promotion Centre	100,000,000.00	100,000,000.00
Saham PT. Petrogas Jambi Power	237,500,000.00	237,500,000.00
Saham PT. Jambi Sinar Gas	62,500,000.00	62,500,000.00
JUMLAH INVESTASI	**650,000,000.00**	**650,000,000.00**

07. ASET TETAP

Aset Tetap terdiri dari :	31 Des 2021	31 Des 2020
Kendaraan	90,825,000.00	90,825,000.00
Inventaris	39,103,100.00	39,103,100.00
Akumulasi Penyusutan	(121,185,344.00)	(121,185,344.00)
Alat Bengkel	292,588,500.00	292,588,500.00
JUMLAH ASET TETAP	**301,331,256.00**	**301,331,256.00**

08. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Des 2021	31 Des 2020
Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:		
Hutang Usaha		
Lintasarta	18,798,900.00	18,798,900.00
CV. Prestasi Jaya	1,082,636.00	1,082,636.00
CV. Amanda	3,755,632.00	3,755,632.00
CV. Mulia Citra	5,814,000.00	5,814,000.00
PT. Bumi Jambi Energy	150,000,000.00	150,000,000.00
PT. Pertagas Niaga	421,785,305.00	421,785,305.00
Jumlah Hutang Usaha	601,236,473.00	601,236,473.00
Hutang Gaji	75,884,168.00	75,884,168.00

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang gaji sebagai berikut:

Petra Prima	25% gaji maret 2011 s/d Desember 2012	Rp. 30.470.834
M. Ridwansyah	25% gaji maret 2011 s/d Desember 2012	Rp. 5.326.667
Nasri Umar	25% gaji maret 2011 s/d Desember 2012	Rp. 8.726.667
Hasan Kasyim	Gaji bulan Maret 2011 Proporsional	Rp. 1.867.000
Roni Karim	Gaji bulan Maret 2011 Proporsional	Rp. 1.493.000
Chalik Saleh	Gaji bulan April s/d Desember 2007	Rp. 28.000.000

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Hutang Pajak		
PPh 23	-	32,112,781.00
PPN	47,639,793.00	5,591,642.00
Jumlah Hutang Pajak	135,170,003.00	37,704,423.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**812,290,644.00**	**714,825,064.00**

09. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :	31 Des 2021	31 Des 2020
Dana Jaminan Komisaris	500,000,000.00	500,000,000.00
Hutang PT. Wahana Catur Mas	205,000,000.00	205,000,000.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**705,000,000.00**	**705,000,000.00**

10. EKUITAS

Rincian Ekuitas terdiri dari :	31 Des 2021	31 Des 2020
Modal Saham Pemprov Jambi	13,787,500,000.00	13,787,500,000.00
Modal Saham Afrizal	-	62,500,000.00
Laba Tahun berjalan	391,105,890.00	(429,501,888.66)
Laba Tahun Lalu	(12,715,562,293.66)	(12,286,060,405.00)
JUMLAH EKUITAS	**1,463,043,596.34**	**1,134,437,706.34**

11. PENJUALAN

Rincian Penjualan Usaha terdiri dari :	31 Des 2021	31 Des 2020
Penjualan Semen	-	387,024,771.00
KSO Citygas	657,577,104.00	657,721,104.00
Modifikasi Kompor Gas	5,160,000.00	1,140,000.00
JUMLAH PENJUALAN	**662,737,104.00**	**1,045,885,875.00**

12. HARGA POKOK

Rincian Harga Pokok terdiri dari :	31 Des 2021	31 Des 2020
Harga Pokok	-	376,315,655.00
PPh pasal 22 Semen Padang	-	936,506.00
Biaya Operasional	-	3,100,000.00
JUMLAH HARGA POKOK	**-**	**380,352,161.00**

13. BIAYA-BIAYA

Rincian Biaya-Biaya terdiri dari :	31 Des 2021	31 Des 2020
Biaya Kompensasi KSO Citygas	741,876,722.00	314,848,106.00
Biaya Gaji, Adm & Umum	296,573,458.00	933,553,356.00
JUMLAH BIAYA-BIAYA	**1,038,450,180.00**	**1,248,401,462.00**

14. PENDAPATAN DILUAR USAHA

Rincian Pendapatan Diluar Usaha terdiri dari :

	31 Des 2021	31 Des 2020
Bunga Jasa Giro/Deposito	19,419,176.00	42,998,560.95
Penerimaan Pekerjaan Instalasi Citygas	3,343,000.00	2,334,000.00
Penerimaan Denda Pelanggan	-	72,642,000.00
Penerimaan Lain-lain	279,196,614.53	28,329,448.39
Penerimaan biaya ADM	**-**	7,061,850.00
JUMLAH PENDAPATAN DILUAR USAHA	**301,958,790.53**	**153,365,859.34**

15. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang diselesaikan tanggal 22 Febuari 2022.